Danantara Indonesia

PLN Nusantara Power

ACCELERATING SUSTAINABLE GROWTH for a GREENER ENERGY

Mempercepat Pertumbuhan Berkelanjutan
untuk Energi yang Lebih Hijau

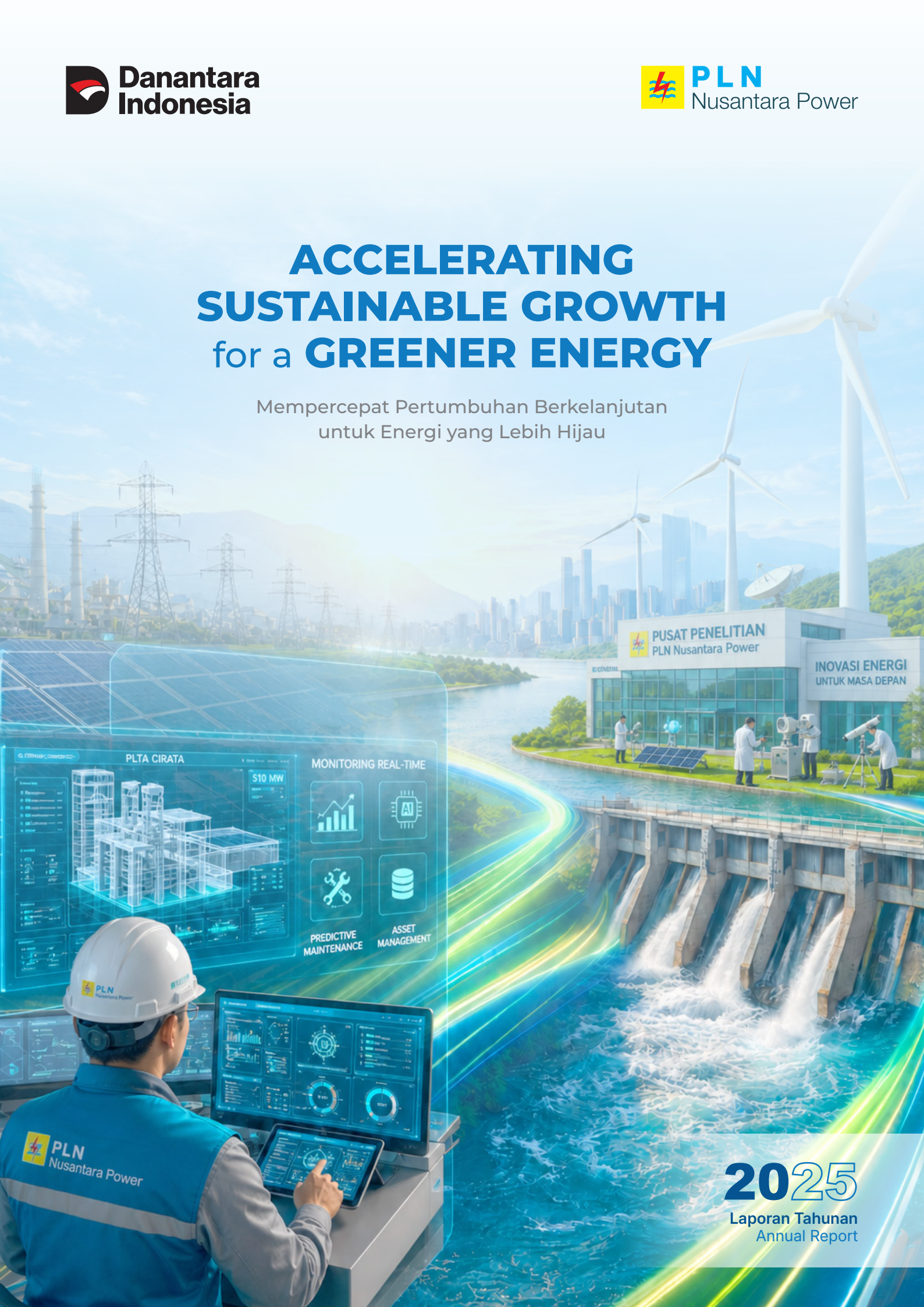

2025

Laporan Tahunan
Annual Report

Danantara Indonesia
PLN Nusantara Power
ACCELERATING SUSTAINABLE GROWTH
for a GREENER ENERGY
Mempercepat Pertumbuhan Berkelanjutan untuk Energi yang Lebih Hijau
2025
Laporan Tahunan
Annual Report

Accelerating Sustainable Growth for a Greener Energy

Mempercepat Pertumbuhan Berkelanjutan untuk Energi yang Lebih Hijau

PT PLN Nusantara Power terus mempercepat pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui penguatan portofolio energi bersih, transformasi operasional, serta penerapan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Di tengah dinamika transisi energi global dan tuntutan dekarbonisasi, Perseroan senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan bisnis yang adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan, peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko, serta penerapan prinsip keterbukaan informasi yang mendukung terciptanya hubungan yang sehat dan berkelanjutan dengan seluruh *stakeholder*.

Akselerasi pertumbuhan dilakukan melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), implementasi *co-firing* biomassa, digitalisasi pembangkit, serta peningkatan efisiensi operasional yang rendah emisi. Seluruh inisiatif tersebut dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparansi, penguatan manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap praktik tata kelola berkelanjutan guna menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Di saat yang sama, Perseroan terus memperkuat kapasitas bisnis dan operasional melalui pemanfaatan teknologi, pengembangan inovasi, serta optimalisasi sumber daya secara terintegrasi untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Melalui penguatan tata kelola, inovasi teknologi, budaya perbaikan berkelanjutan, serta kolaborasi strategis, PLN Nusantara Power terus mempercepat transformasi menuju perusahaan pembangkit yang lebih hijau, tangguh, berdaya saing global, dan terpercaya dalam mendukung masa depan energi Indonesia yang berkelanjutan. Dengan menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan standar kinerja dan keberlanjutan perusahaan guna menciptakan pertumbuhan yang adaptif dan mampu memberikan manfaat jangka panjang.

PT PLN Nusantara Power continues to accelerate sustainable business growth by strengthening clean energy portfolio, operational transformation, as well as implementing transparent and accountable corporate governance. Global energy transition and demands for decarbonization are fluctuating continuously, encouraging the Company consistently enhances the quality of business management, emphasizing its adaptive, innovative, and responsible approach as a foundation for building trust among shareholders and all stakeholders. The Company actualizes this commitment through the strengthening of sustainability-oriented corporate management system, enhancing the quality of risk-based decision-making, and implementing the principle of information transparency that supports healthy and sustainable relationships with all stakeholders.

PLN NP accelerates growth through the development of new and renewable energy (NRE), the implementation of biomass co-firing, power plant digitalization, and increasing operational efficiency with low emissions. The Company applies these all initiatives while prioritizing the principles of transparency, strengthening risk management, and adherence to sustainable governance practices to create long-term value for the Company, society, and the environment. At the same time, the Company keeps strengthening its business and operational capacity through the use of technology, developing innovations, and optimizing resources in an integrated manner to support national energy security.

Through the strengthened governance, technological innovation, a culture of continuous improvement, and strategic collaboration, PLN Nusantara Power continues to accelerate transformation toward a greener, more resilient, globally competitive, and trusted power generation company, supporting Indonesia's sustainable energy future. By emphasizing transparency and accountability as the foundations of its business operations, the Company is committed to continuously improving performance and sustainability standards to create adaptive growth and deliver long-term benefits.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2020

Trusted and Leading in Sustainable Energy

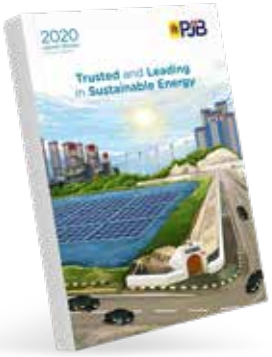

2021

Strengthening Synergy, Creating Green Energy

2022

Driving Energy Transition to Delivering Value Creation Excellences

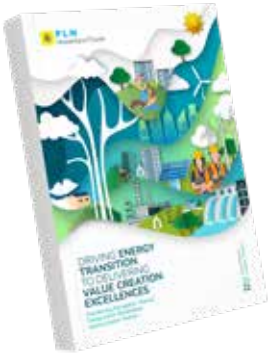

2023

Leading The Energy Transition Towards Sustainable Future

2024

Elevating Success to Build a Sustainable Future Through High Quality Growth

2025

Accelerating Sustainable Growth for a Greener Energy

Daftar Isi
Table of Contents

01 Pendahuluan
Introduction

3 Tema dan Kesinambungan Tema
Themes and Its Continuity

5 Daftar Isi
Table of Contents

8 Akselerasi *Co-Firing* untuk Masa Depan Rendah Karbon
Accelerating Co-Firing for a Low-Carbon Future

12 Membangun Masa Depan Energi Hijau melalui Kemitraan Global
Building a Green Energy Future Through Global Partnerships

16 PROPER, Dampak Keberlanjutan, dan Penguatan Tata Kelola
PROPER, Sustainability Impact, and Strengthening Governance

20 Mewujudkan Strategi Jangka Panjang melalui Governansi yang Berintegritas dan Berkelanjutan
Actualizing a Long-Term Strategy through Integrated and Sustainable Governance

23 Internalisasi Nilai Integritas dan Keberlanjutan dalam Budaya dan Operasional Perusahaan
Internalization of Integrity and Sustainability Values in Company Culture and Operations

27 Kesiapan PLN Nusantara Power dalam Implementasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK 1 dan SPK 2)
The Readiness of PLN Nusantara Power in Implementing Sustainability Disclosure Standards (SD 1 and SPK 2)

31 Memastikan Keandalan dan Kredibilitas Pelaporan Perusahaan
Ensuring the Reliability and Credibility of Corporate Reporting

34 Capaian Strategis 2025
2025 Strategic Achievements

38 Prestasi dan Penghargaan 2025
2025 Achievements and Awards

42 Sertifikasi
Certifications

46 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Data Highlights

53 Ikhtisar Kinerja Operasional
Operational Performance Highlights

57 Ikhtisar Saham
Share Highlights

57 Ikhtisar Obligasi
Bond Highlights

57 Aksi Korporasi
Corporate Actions

58 Peristiwa Penting 2025
Significant Event of 2025

62 Testimoni
Testimonial

02 Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
Report to Shareholders and Stakeholders

66 Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners

82 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors

108 Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2025 PT PLN Nusantara Power
Statement from the Board of Commissioners on Accountability Over the 2025 Annual Report of PT PLN Nusantara Power

109 Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2025 PT PLN Nusantara Power
Statement from the Board of Directors on Accountability Over the 2025 Annual Report of PT PLN Nusantara Power

110 Surat Pernyataan Direksi Tentang Kecukupan Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko PT PLN Nusantara Power
Statement from the Board of Directors on the Adequacy of the Internal Control System and Risk Management System of PT PLN Nusantara Power

03 Profil Perusahaan
Company Profile

114 Identitas Perusahaan
Company Identity

116 Riwayat Singkat
Brief Company History

118 Jejak Langkah
Milestone

123 Bidang Usaha
Line of Business

126 Produk dan Jasa
Products and Services

137 Skema Penyaluran Listrik
Scheme of Electricity Transmission

139 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture

142 Struktur Organisasi
Organizational Structure

145 Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

149 Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners

155 Profil Direksi
Profile of the Board of Directors

161 Jumlah dan Komposisi SDM
HR Number and Composition

165 Pengembangan Kompetensi SDM
HR Competency Development

173 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Structure and Composition

176 Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Share Listing

177 Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listing

181 Struktur Group dan Entitas Anak Perusahaan
Group Structure and Subsidiaries

186 Profil dan Kinerja Entitas
Profile and Performance of Entities

200 Wilayah Operasional
Operational Area

206 Alamat Kantor Pusat, Kantor Strategis dan Unit Usaha
Address of Head Office, Strategic Offiice, Bussiness Unit

212 Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

213 Lembaga Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professions

215 Informasi Pada Situs *Web* Perusahaan
Information on the Company Website

04

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

220 Sumber Daya Manusia
Human Capital

235 Teknologi Informasi
Information Technology

244 PLN *Nusantara Power Integrated Management System* (PLN NP-IMS)
PLN Nusantara Power Integrated Management System (PLN NP-IMS)

251 Manajemen Aset
Assets Management

05

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

262 Tinjauan Industri
Industry Overview

271 Analisis Operasi Per Segmen Usaha
Operational Analysis per Business Segment

317 Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing and Market Share Aspects

321 Profitabilitas Per Segmen
Profitability by Segment

323 Analisis Kinerja Keuangan
Analysis of Financial Performance

323 Analisis Posisi Keuangan
Analysis of Financial Position

345 Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Analysis of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

353 Analisis Arus Kas
Analysis of Cash Flows

358 Rasio Keuangan Utama
Main Financial Ratios

366 Struktur Modal
Capital Structure

368 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

372 Aspek Perpajakan
Taxation Aspect

376 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Goods Investment

385 Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Goods Investment

388 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2025
Comparison between Target and Realization of Company Performance in 2025

399 *Key Performance Indicator*
Key Performance Indicator

402 Prospek Usaha
Business Prospect

410 Target Kinerja Perusahaan Tahun 2026
Company Performance Target for 2026

418 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

427 Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal Material
Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

432 Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts after the Accountant's Report Date

433 Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

433 Realisasi Dana Penawaran Umum
Realization of Public Offering Proceeds

434 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policy

436 Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Regulatory Changes and the Impacts on the Company

442 Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Laba Perusahaan
Impact of Changes in Prices to Company's Revenue and Profit

06

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

446 Penerapan Governansi Berkelanjutan
Implementation of Sustainable Governance

471 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

484 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

518 Direksi
Board of Directors

553 Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Work Relations between the Board of Commissioners and Board of Directors

554 Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

569 Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja
Policy on Performance-Based Long-Term Compensation

569 Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

572 Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of the Board of Commissioners

575 Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Secretary

578 Komite Audit
Audit Committee

592 Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

608 Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee

621 Komite di Bawah Direksi
Committee under the Board of Directors

629 Komite Lain
Other Committees

630 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

642 Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

660 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

670 Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

695 Kebijakan Pengungkapan Informasi Perusahaan
Company Information Disclosure Policy

696 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Corporate Information and Data

702 Perlindungan Hak-Hak Kreditur
Protection of Creditors' Rights

703 Kebijakan Pengungkapan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris
Policy on Disclosure of Share Ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners

704 Kebijakan Terkait *Insider Trading*
Policy on Insider Trading

705 Kode Etik Perusahaan
Code of Conduct

716 Penanganan Perkara Hukum dan Sanksi Administrasi
Legal Cases and Administrative Sanctions Handling

719 Whistleblowing System
Whistleblowing System

728 Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

736 Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

743 Penerapan Atas Pedoman Governansi Perusahaan
Implementation of Corporate Governance Guidelines

07

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

796 Strategi Keberlanjutan
Sustainability Strategy

804 Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance

812 Ikhtisar Kinerja dan Inisiatif Program Keberlanjutan
Highlights of Sustainability Program Performance and Initiatives

812 Kinerja Keberlanjutan Aspek Ekonomi
Economic Sustainability Performance

815 Kinerja Keberlanjutan Aspek Lingkungan
Environmental Sustainability Performance

837 Kinerja Sosial
Social Performance

838 Aspek Masyarakat
Community Aspect

853 Aspek Pelanggan
Customer Aspect

859 Aspek Ketenagakerjaan
Employment Aspect

08

Laporan Keuangan *Audited*
Audited Financial Statements

874 Laporan Keuangan *Audited*
Audited Financial Statements

Akselerasi *Co-Firing* untuk Masa Depan Rendah Karbon

Co-Firing Acceleration for a Low-Carbon Future

KINERJA 2025 2025 PERFORMANCE

6.861,28 GWh

Produksi Energi Hijau
Green Energy Production

995,57 GWh

Kontribusi Energi Biomassa (*Co-Firing*)
Biomass Energy Contribution (Co-Firing)

20,63
Juta Ton CO_2eq
Million Tons CO_2eq

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Greenhouse Gas Emission Reduction

DAMPAK BERKELANJUTAN SUSTAINABLE IMPACT

Mengurangi Emisi Karbon
Reducing Carbon Emissions

Mendorong Ekonomi Sirkular
Promoting a Circular Economy

Membuka Peluang Usaha Baru
Creating New Business Opportunities

Memperkuat Rantai Pasok Lokal
Strengthening Local Supply Chains

Memberi Nilai Tambah Ekonomi Masyarakat
Providing Economic Value Add to the Community

TRANSFORMASI PEMBANGKIT MENUJU ENERGI HIJAU
POWER PLANT TRANSFORMATION TOWARDS GREEN ENERGY
Bersih Clean • Efisien Efficient • Berkelanjutan Sustainable

Langkah nyata hari ini, untuk masa depan energi Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

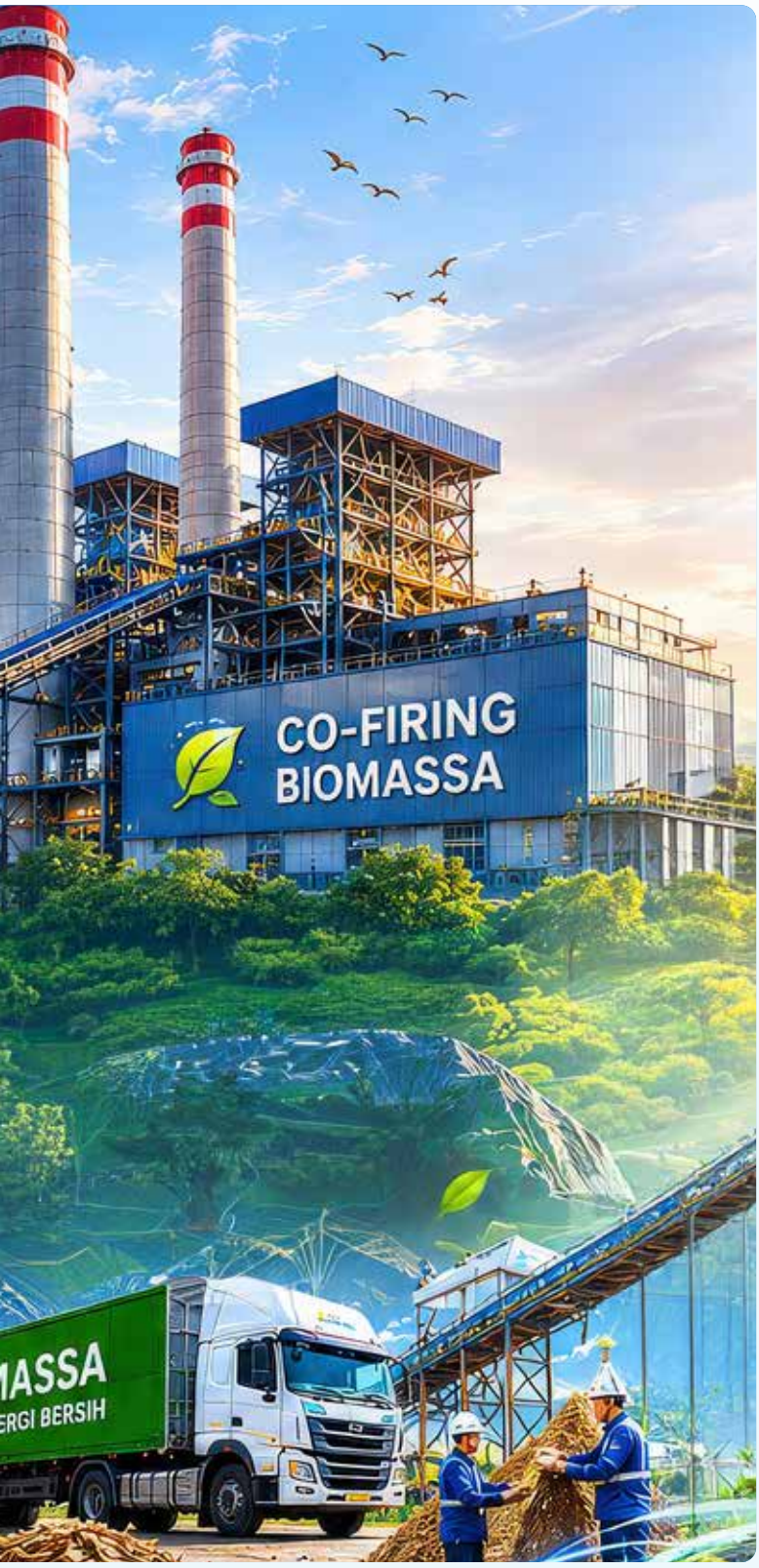

INOVATOR MUDA PLN NP MERAIH PENGHARGAAN

PLN NP Young Innovator Wins Award

SATYALANCANA WIRA KARYA 2025

atas inovasi di bidang energi bersih
for innovation in the clean energy sector

MATERIAL BIOMASSA

Biomass Materials

Sawdust	*Woodchip*	Sekam Padi Rice Husks	Cangkang Sawit Palm Kernel Shells

Real steps today, for a greener and more sustainable Indonesian energy future.

NET ZERO EMISSION 2060

Akselerasi *Co-Firing* untuk Masa Depan Rendah Karbon

Co-Firing Acceleration for a Low-Carbon Future

PLN NP meyakini bahwa transisi energi bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan perjalanan besar menuju masa depan yang lebih hijau, berkelanjutan, dan rendah karbon. Karena itu, transformasi energi dilakukan secara bertahap, adaptif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keandalan pasokan listrik nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu langkah strategis yang terus dipercepat PLN NP adalah implementasi *co-firing* biomassa pada unit-unit PLTU di berbagai wilayah Indonesia. Melalui inovasi ini, biomassa dimanfaatkan sebagai substitusi sebagian bahan bakar batubara untuk menghasilkan energi yang lebih bersih dan rendah emisi, sekaligus menjadi solusi transisi energi yang efektif dan dapat diterapkan secara cepat. Sebagai *subholding* pembangkit terbesar di Asia Tenggara, PLN NP terus memperkuat perannya dalam mendukung agenda dekarbonisasi nasional dan pencapaian target *Net Zero Emission* 2060. Implementasi *co-firing* biomassa menjadi bukti nyata bahwa transformasi menuju energi hijau dapat dimulai dari optimalisasi pembangkit yang telah ada saat ini.

Sepanjang tahun 2025, PLN NP berhasil memproduksi energi hijau sebesar 6.861,28 GWh, termasuk kontribusi energi biomassa sebesar 995,57 GWh melalui implementasi *co-firing* pada berbagai unit pembangkit. Inisiatif ini turut berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 20,63 juta ton CO_2eq sebagai bagian dari komitmen PLN NP dalam mendukung transisi menuju masa depan rendah karbon. Hingga saat ini, PLN NP telah mengimplementasikan *co-firing* biomassa secara komersial di 25 PLTU. Bahkan sejumlah PLTU

PLN NP believes that the energy transition is not simply a technological change, but rather a major journey towards a greener, more sustainable, and lower-carbon future. Therefore, the Company undertakes energy transformation in a gradual, adaptive, and sustainable manner, while maintaining the reliability of the national electricity supply for all Indonesians.

PLN NP continues to accelerate strategic steps, including the implementation of biomass co-firing in coal-fired power plants (CFPP) units across Indonesia. Through this innovation, biomass is utilized as a partial substitute for coal to produce cleaner, lower-emission energy, providing an effective and rapidly implemented energy transition solution. As the largest power plant subholding in Southeast Asia, PLN NP continues to strengthen the role in supporting the national decarbonization agenda and achieving the 2060 Net Zero Emission target. The implementation of biomass co-firing is a clear evidence that the transformation to green energy can begin with optimizing existing power plants.

Throughout 2025, PLN NP successfully produced 6,861.28 GWh of green energy, including a contribution of 995.57 GWh of biomass energy through co-firing at various generating units. This initiative contributed to a reduction in greenhouse gas emissions of 20.63 million tons of CO_2eq as part of PLN NP commitment to supporting the transition to a low-carbon future. To date, PLN NP has commercially implemented biomass co-firing at 25 coal-fired power plants (CFPPs). Several CFPPs have successfully operated on 100 percent biomass,

telah berhasil melakukan operasi dengan 100 persen biomassa, di antaranya PLTU Bolok di Nusa Tenggara Timur, PLTU Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, hingga PLTU Tidore di Maluku Utara.

Lebih dari sekadar inovasi operasional, implementasi *co-firing* biomassa oleh PLN NP menghadirkan dampak berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui pemanfaatan biomassa berbasis sumber daya lokal yang mendukung pengurangan emisi karbon, mendorong terciptanya ekonomi sirkular, membuka peluang usaha baru, memperkuat rantai pasok lokal, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional pembangkit. Melalui semangat inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan, PLN NP terus mempercepat transformasi pembangkit menuju energi yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan. Komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi nasional turut memperoleh pengakuan di tingkat nasional melalui penganugerahan Satyalancana Wira Karya Tahun 2025 kepada Ardi Nugroho, Vice President Technology Development PLN NP. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi dan inovasi insan PLN NP dalam pengembangan teknologi *co-firing* biomassa pada PLTU, sebagai solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara melalui pemanfaatan biomassa seperti *sawdust*, *woodchip*, sekam padi, dan cangkang sawit. Implementasi teknologi tersebut tidak hanya memperkuat upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan, tetapi juga menjadi wujud nyata kontribusi PLN Nusantara Power dalam mendukung agenda transisi energi dan pencapaian target *Net Zero Emissions* Indonesia menuju masa depan energi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

including the Bolok CFPP in East Nusa Tenggara, the Pulang Pisau CFPP in Central Kalimantan, and the Tidore CFPP in North Maluku.

More than just an operational innovation, biomass co-firing by PLN NP results in sustainable impacts to the environment and society through the utilization of locally sourced biomass that supports carbon emission reduction, encourages the creation of a circular economy, opens new business opportunities, strengthens local supply chains, and provides added economic value to communities within operational areas of the the power plant. Through the spirit of innovation, collaboration, and sustainability, PLN NP keeps accelerating the transformation of power plants towards cleaner, more efficient, and environmentally friendly energy. The Company has commitment to supporting the national energy transition which received national recognition through the awarding of the 2025 Satyalancana Wira Karya Award to Ardi Nugroho, Vice President of Technology Development at PLN NP. The award was given for the contribution and innovation by PLN NP employees in the development of biomass co-firing technology at CFPPs, as a strategic solution to reduce dependence on coal through the utilization of biomass such as sawdust, woodchips, rice husks, and palm kernel shells. This technology not only strengthens the decarbonization efforts of the electricity sector, but also serves as a concrete manifestation of contribution by PLN Nusantara Power in supporting the energy transition agenda and achieving Indonesia's Net Zero Emissions target towards a greener and more sustainable energy future.

Membangun Masa Depan Energi Hijau melalui Kemitraan Global

Building A Green Energy Future through Global Partnerships

Bersama mengembangkan teknologi energi bersih untuk masa depan yang berkelanjutan

Mengolah biomassa dan limbah menjadi bahan bakar alternatif yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi.
Processing biomass and waste into sustainable alternative fuels with economic value.

Teknologi substitusi pembakaran di PLTU dengan ammonia untuk menurunkan emisi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Combustion substitution technology in coal-fired power plants using ammonia to reduce emissions and decrease dependence on fossil fuels.

Menurunkan Emisi
Reducing Emissions

Mendorong Ekonomi Sirkular
Promoting a Circular Economy

Kolaborasi hari ini, energi bersih untuk generasi mendatang
Today's collaboration, clean energy for future generations

GLOBAL COMPETITIVENESS

GREEN INVESTMENT

FUTURE ENERGY BUSINESS

PLN Nusantara Power menggandeng perusahaan terkemuka asal Jepang:
PLN Nusantara Power collaborates with leading companies from Japan:

TOSHIBA | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | SUMITOMO | IHI IHI Corporation

Menciptakan Nilai bagi Masyarakat
Creating Value for Society

Memperkuat Posisi Indonesia dalam Transisi Energi Global
Strengthening Indonesia's Position in the Global Energy Transition

Sistem pengendali kualitas udara untuk menekan emisi polutan ke udara dan menjaga lingkungan yang lebih bersih.
Air quality control system to reduce pollutant emissions into the air and maintain a cleaner environment.

Menangkap, memanfaatkan, dan menyimpan karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.
Capturing, utilizing, and storing carbon to significantly reduce greenhouse gas emissions.

Membangun Masa Depan Energi Hijau melalui Kemitraan Global

PLN NP berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi menuju masa depan energi hijau melalui kolaborasi strategis dengan mitra global dalam pengembangan teknologi energi bersih. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendorong daya saing global, mendorong green investment, serta mempercepat pengembangan bisnis energi masa depan yang rendah karbon dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transisi energi, PLN NP menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah perusahaan terkemuka asal Jepang, yaitu Toshiba, Mitsubishi Heavy Industries, Sumitomo, dan IHI Corporation. Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan berbagai teknologi energi bersih di unit pembangkit, seperti *biomass processing plant*, *ammonia co-firing*, *Air Quality Control System* (AQCS), serta *Carbon Capture, Utilization and Storage* (CCUS).

Salah satu implementasi transisi energi yang terus dikembangkan Perseroan adalah teknologi *co-firing* biomassa, yaitu metode substitusi sebagian bahan bakar batubara pada PLTU dengan biomassa. Inovasi ini berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Selain

PLN NP is committed to continuously strengthening transformation towards a green energy future through strategic collaboration with global partners in the development of clean energy technologies. This step is a crucial part of boosting global competitiveness, encouraging green investment, and accelerating the development of a low-carbon and sustainable future energy business.

PLN NP actualizes commitment to the energy transition by establishing strategic partnerships with several leading Japanese companies, including Toshiba, Mitsubishi Heavy Industries, Sumitomo, and IHI Corporation. This collaboration focuses on the development of various clean energy technologies in generating units, such as biomass processing plants, ammonia co-firing, Air Quality Control Systems (AQCS), and Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

The Company keeps developing the energy transition, including biomass co-firing technology, a method of partially substituting coal fuel in coal-fired power plants with biomass. This innovation contributes to reducing carbon emissions while reducing dependence on fossil fuels. Furthermore, the implementation of co-firing

Building A Green Energy Future through Global Partnerships

itu, implementasi *co-firing* juga membuka peluang pengembangan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah dan sampah menjadi sumber energi alternatif. Salah satu sumber biomassa yang dimanfaatkan berasal dari Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP), yang mendukung pengelolaan sampah sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.

Melalui penguatan kemitraan internasional dan penerapan teknologi rendah karbon, PLN Nusantara Power optimistis dapat mempercepat terciptanya ekosistem energi yang lebih bersih, modern, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta transisi energi global.

also opens up opportunities for the development of a circular economy by utilizing waste and garbage as alternative energy sources. One of the biomass sources utilized is Solid Waste Fuel (BBJP), which supports waste management while creating added value for the community and the environment.

By strengthening international partnerships and implementing low-carbon technologies, PLN Nusantara Power is optimistic to accelerate the creation of a cleaner, more modern, and more sustainable energy ecosystem, while strengthening Indonesia's position on the global energy transition map.

PROPER, Dampak Keberlanjutan, dan Penguatan Tata Kelola

PROPER, Sustainability Impact, and Strengthening Governance

PLN Nusantara Power berkomitmen menghadirkan energi yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui sinergi ESG, penguatan tata kelola perusahaan, serta inovasi yang terintegrasi di seluruh proses bisnis.

PLN Nusantara Power is committed to providing reliable, environmentally friendly, and sustainable energy through ESG synergy, strengthening corporate governance, and integrated innovation across all business processes.

ESG *Implementation*
Menjalankan praktik bisnis berkelanjutan secara terintegrasi
Executing integrated sustainable business practices

Community Impact
Memberdayakan masyarakat dan menciptakan nilai bersama
Empowering communities and creating shared value

Environmental Governance
Tata kelola lingkungan yang kuat, terukur, dan berkelanjutan
Strong, measurable, and sustainable environmental governance

Good Corporate Governance
Tata kelola adaptif, agile, dan berbasis digital di seluruh lini organisasi
Adaptive, agile, and digital-based governance across all organizational lines

JEJAK PRESTASI, KOMITMEN TANPA BATAS
TRACK RECORD OF ACHIEVEMENTS, LIMITLESS COMMITMENT

2017
PROPER Emas pertama di PLN Group
First Gold PROPER in the PLN Group

2017-2024
8 tahun berturut-turut meraih PROPER Emas di PLN Group
8 consecutive years achieving Gold PROPER in the PLN Group

23
PROPER Emas diraih sejak 2017
Gold PROPERs achieved since 2017

PIONIR PROPER di PLN Group
PROPER PIONEER in the PLN Group

23 PROPER EMAS Capaian Tanpa Batas Sejak 2017
23 GOLD PROPERs, Limitless Achievements Since 2017

PLN Nusantara Power meraih PROPER Emas secara konsisten dan menjadi peraih PROPER Emas terpanjang di PLN Group
PLN Nusantara Power has consistently achieved the Gold PROPER, becoming the longest consecutive Gold PROPER recipient in the PLN Group

PENGUATAN TATA KELOLA YANG ADAPTIF, *AGILE*, DAN BERBASIS DIGITAL
STRENGTHENING ADAPTIVE, AGILE, AND DIGITAL-BASED GOVERNANCE

***GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)**
PLN NP mendorong implementasi GCG di seluruh tingkatan organisasi, termasuk entitas anak dan unit operasi, untuk memastikan konsistensi tata kelola dalam seluruh rantai proses bisnis.
PLN NP encourages the implementation of GCG at all organizational levels, including subsidiaries and operating units, to ensure governance consistency throughout the entire business process chain.

INTEGRITAS
INTEGRITY
Menjunjung tinggi etika dan integritas dalam setiap pengambilan keputusan
Upholding high ethics and integrity in every decision-making process

AKUNTABILITAS
ACCOUNTABILITY
Setiap proses dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab
Every process is executed in a measurable and responsible manner

TRANSPARANSI
TRANSPARENCY
Mengedepankan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan
Prioritizing information disclosure to all stakeholders

INOVASI
INNOVATION
Terus berinovasi untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan
Continuously innovating to create sustainable added value

Tata kelola yang kuat memastikan setiap inisiatif keberlanjutan dijalankan secara terukur, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan maupun masyarakat.
Strong governance ensures that every sustainability initiative is carried out in a measurable and accountable way, delivering real impact to both the environment and society

PROPER, Dampak Keberlanjutan, dan Penguatan Tata Kelola
PROPER, Sustainability Impact, and Strengthening Governance

IMPLEMENTASI SUSTAINABILITY
SUSTAINABILITY IMPLEMENTATION

Program pemberdayaan masyarakat berbasis *sustainability compass* yang selaras dengan prinsip ESG dan SDGs.
Community empowerment programs based on a sustainability compass aligned with ESG and SDG principles.

PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT

- Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
- Pengembangan UMKM
- Peningkatan pendapatan dan pemasaran
- Encouraging local economic growth
- MSME development
- Increasing income and marketing

PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL EMPOWERMENT

- Rehabilitasi ekosistem
- Pengelolaan sampah dan air
- Efisiensi sumber daya dan pelestarian keanekaragaman hayati
- Ecosystem rehabilitation
- Waste and water management
- Resource efficiency and biodiversity preservation

SUSTAINABILITY ECOSYSTEM
SUSTAINABILITY ECOSYSTEM

- Kolaborasi multipihak (pemerintah, komunitas, akademisi, industri)
- Inovasi dan teknologi untuk operasi lebih hijau
- Multi-stakeholder collaboration (government, community, academia, industry)
- Innovation and technology for greener operations

Di tengah percepatan transisi energi dan meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis berkelanjutan, PLN NP memandang bahwa keberhasilan perusahaan tidak lagi hanya diukur dari kinerja operasional dan finansial semata, tetapi juga dari kemampuan menciptakan nilai jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, transformasi menuju perusahaan energi masa depan dijalankan melalui sinergi implementasi ESG, penguatan tata kelola perusahaan, serta inovasi keberlanjutan yang terintegrasi dalam seluruh proses bisnis.

Komitmen tersebut tercermin melalui pencapaian PROPER Emas yang diraih secara konsisten sejak tahun 2017. Selama delapan tahun berturut-turut, PLN NP berhasil mempertahankan predikat tertinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup sekaligus menjadi peraih PROPER Emas terpanjang di lingkungan PLN Group. Pencapaian ini bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti nyata konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, operational excellence, dan tata kelola perusahaan yang baik secara menyeluruh.

Keberhasilan tersebut lahir dari budaya perusahaan yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, transparansi, serta inovasi berkelanjutan. PLN NP senantiasa mendorong penguatan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh tingkatan organisasi, termasuk pada unit

Amid the accelerating energy transition and increasing demands for sustainable business practices, PLN NP believes that a company success is no longer measured solely by operational and financial performance, but also by its ability to create long-term value for the environment, society, and all stakeholders. Therefore, the Company undertakes transformation into a future energy company through synergy in ESG implementation, strengthened corporate governance, and integrated sustainability innovation across all business processes.

PLN NP reflects this commitment in the consistent achievement of the Gold PROPER rating since 2017. For eight consecutive years, PLN NP has maintained the highest rating in environmental management and is the longest-standing Gold PROPER award recipient within the PLN Group. This achievement is not merely an award, but a tangible demonstration that the Company has been consistent in implementing the principles of sustainability, operational excellence, and good corporate governance across the board.

This success originates from a corporate culture that upholds integrity, accountability, transparency, and continuous innovation. PLN NP consistently promotes the strengthening of Good Corporate Governance (GCG) implementation at all levels of the organization, including

MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs
SUPPORTING THE ACHIEVEMENT OF SDGs

SINERGI MENCIPTAKAN DAMPAK NYATA
SYNERGY IN CREATING REAL IMPACT

Bersama masyarakat, kami menciptakan energi yang tidak hanya andal, tetapi juga ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan
Together with the community, we create energy that is not only reliable but also environmentally friendly, inclusive, and sustainable.

- Lingkungan lebih terjaga
  Better protected environment
- Masyarakat berdaya
  Empowered communities
- Bisnis berkelanjutan dan berdaya saing
  Sustainable and competitive business
- Tata kelola kuat, kepercayaan meningkat
  Strong governance, increased trust

dan entitas anak perusahaan, guna memastikan konsistensi penerapan tata kelola dalam seluruh rantai proses bisnis perusahaan. Penguatan tata kelola yang adaptif, agile, dan berbasis digital menjadi fondasi strategis bagi PLN NP dalam menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan, percepatan transisi energi, serta ekspektasi pemangku kepentingan yang semakin kompleks. Melalui tata kelola yang kuat, setiap inisiatif keberlanjutan dapat dijalankan secara terukur, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan maupun masyarakat.

Implementasi sustainability di PLN NP diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis *sustainability compass* yang selaras dengan prinsip ESG dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program-program tersebut mencakup penguatan ekonomi masyarakat, rehabilitasi dan pelestarian lingkungan, pengembangan ekonomi sirkular, hingga pembentukan *sustainability ecosystem* melalui kolaborasi berbagai pihak. Sinergi antara perusahaan dan masyarakat inilah yang menjadi kekuatan utama dalam menciptakan transformasi berkelanjutan. PLN NP tidak hanya menghadirkan energi yang andal, tetapi juga mendorong terciptanya masa depan energi yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang kuat dan inovasi yang terus berkembang, PLN NP berkomitmen untuk terus menciptakan nilai bersama bagi lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang.

its units and subsidiaries, to ensure consistent governance across the entire business process chain of the Company. Strengthening adaptive, agile, and digital-based governance is a strategic foundation for PLN NP in facing the dynamics of the electricity industry, the acceleration of the energy transition, and increasingly complex stakeholder expectations. Through strong governance, every sustainability initiative can be implemented in a measurable, accountable manner, and have a real impact on the environment and society.

PLN NP realized sustainability implementation through various community empowerment programs based on the sustainability compass, aligned with ESG principles and the Sustainable Development Goals (SDGs). These programs include strengthening the community economy, rehabilitating and preserving the environment, developing a circular economy, and establishing a sustainable ecosystem through multi-stakeholder collaboration. This synergy between the Company and the community is a primary potential in creating sustainable transformation. PLN NP not only provides reliable energy, but also encourages a greener, more inclusive, and more sustainable energy future. With strong governance and continuous innovation, PLN NP is committed to continuously creating shared value for the environment, society, and future generations.

Mewujudkan Strategi Jangka Panjang melalui Governansi yang Berintegritas dan Berkelanjutan

Actualizing a Long-Term Strategy through Integrated and Sustainable Governance

PLN Nusantara Power (PLN NP) memastikan prinsip integritas dan keberlanjutan terintegrasi dalam perumusan strategi jangka panjang melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis risiko. Melalui mekanisme governansi yang kuat, setiap keputusan strategis tidak hanya berorientasi pada pencapaian target bisnis, tetapi juga pada penguatan ketahanan usaha dan penciptaan nilai berkelanjutan.

PLN Nusantara Power (PLN NP) ensures the principles of integrity and sustainability are integrated into the formulation of long-term strategies through transparent, accountable, and risk-based governance. Through robust governance mechanisms, every strategic decision is not only oriented toward achieving business targets but also toward strengthening business resilience and creating sustainable value.

Proses Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Process

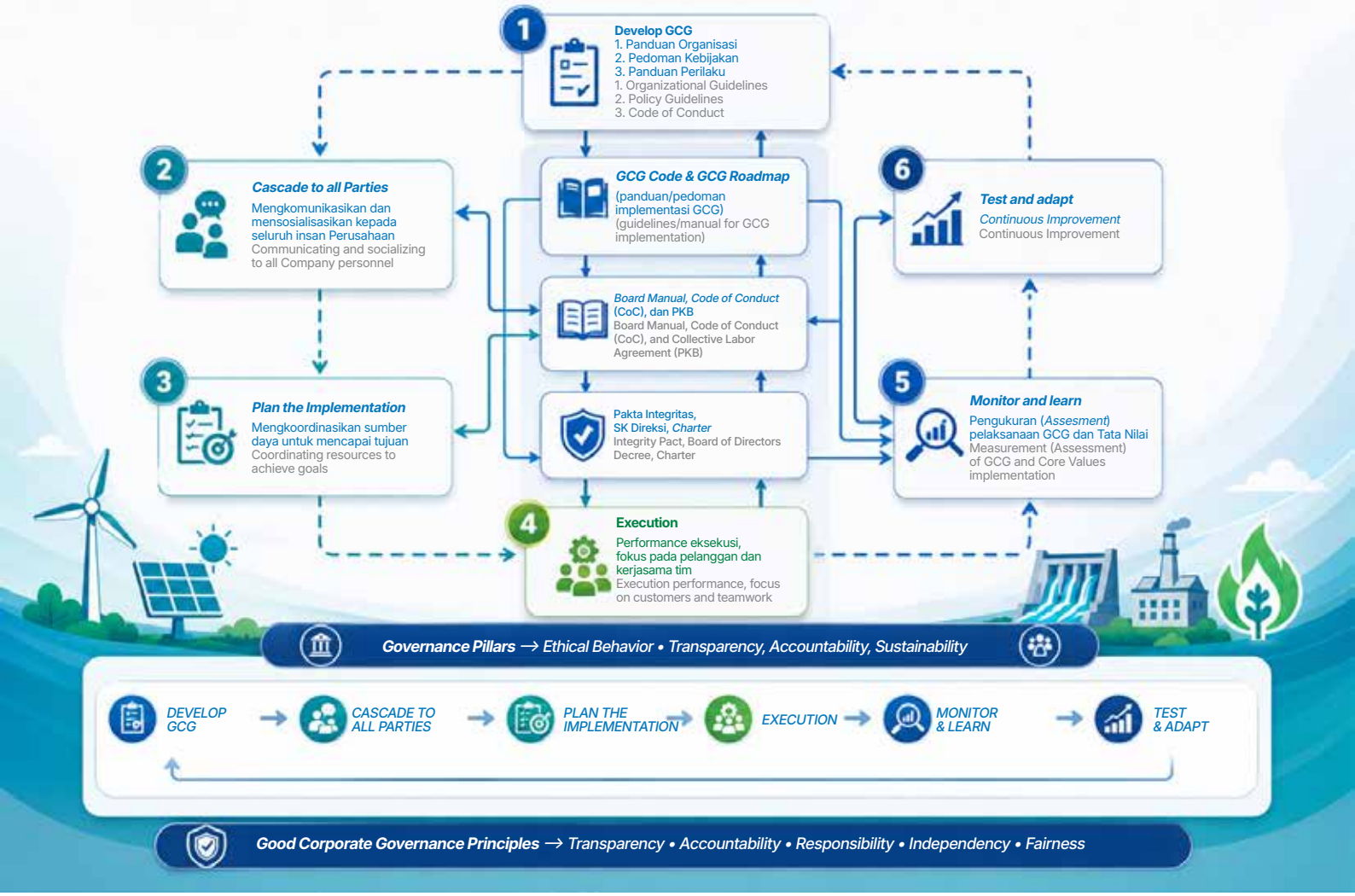

Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2024–2028 dilakukan melalui analisis internal dan eksternal yang komprehensif. Analisis internal digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, sedangkan analisis eksternal dilakukan melalui benchmarking lokal dan global guna mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Target strategis yang mencakup *Strategic Goal, Objective, Initiative*, dan Program dirumuskan secara kolaboratif dengan melibatkan Direksi, BOD-1, dan fungsi terkait baik bidang kantor pusat, unit maupun anak Perusahaan melalui berbagai *workshop* dan forum pembahasan, kemudian diselaraskan dengan strategi korporat dan dibahas bersama pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan arah perusahaan.

The preparation of the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2024–2028 is carried out through comprehensive internal and external analysis. Internal analysis is used to evaluate the company's strengths and weaknesses, while external analysis is conducted through local and global benchmarking to identify business opportunities and challenges. Strategic targets that encompass Strategic Goals, Objectives, Initiatives, and Programs are formulated collaboratively by involving the Board of Directors, BOD-1, and related functions from both the head office, units, and subsidiaries through various workshops and discussion forums, then aligned with corporate strategy and discussed with stakeholders to ensure the alignment of the Company's direction.

Sebagai bagian dari proses perumusan strategi yang transparan dan berbasis Risiko, Perusahaan menerapkan perencanaan skenario dengan mempertimbangkan asumsi makroekonomi dan operasional sebagai dasar penyusunan proyeksi bisnis dan keuangan. Seluruh asumsi divalidasi bersama *business process owner* yang relevan, disertai identifikasi dan asesmen risiko pada setiap tujuan strategis untuk memastikan tersedianya mitigasi yang memadai. Keseluruhan proses tersebut melalui validasi internal sebelum difinalisasi dan disetujui oleh Direksi.

As part of the transparent and risk-based strategy formulation process, the Company implements scenario planning by considering macroeconomic and operational assumptions as the basis for preparing business and financial projections. All assumptions are validated together with the relevant business process owners, accompanied by the identification and assessment of risks for each strategic objective to ensure adequate mitigation is available. The entire process undergoes internal validation before being finalized and approved by the Board of Directors.

Penerapan prinsip integritas diperkuat melalui berbagai kebijakan dan mekanisme tata kelola, antara lain Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Perilaku dan Etika, Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi, Pedoman Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan, Pedoman GRC (*Governance Risk and Compliance*), Pedoman Kebijakan Anti-*Fraud* dan Pengendalian Gratifikasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan, Pedoman *Subsidiary Governance*, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Panduan Penguatan Budaya Perusahaan serta kebijakan/perangkat pendukung lainnya yang memperkuat penerapan tata kelola dan budaya integritas Perusahaan. Kerangka tata kelola tersebut memastikan setiap keputusan strategis dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

The application of integrity principles is reinforced thru various governance policies and mechanisms, including the Guidelines for Corporate Governance, Code of Conduct, Guidelines for Integrated Risk Management, Guidelines for Decision-Making Authority Limitation, Guidelines for GRC (Governance Risk and Compliance), Guidelines for Anti-Fraud and Gratuity Control Policy, Anti-Bribery Management System, Guidelines for Conflict of Interest Control, Guidelines for Subsidiary Governance, Internal Control System, Whistleblowing System, Guidelines for Corporate Culture Strengthening, and other supporting policies/tools that reinforce the implementation of governance and the Company's integrity culture. The governance framework ensures that every strategic decision is made transparently, accountably, and responsibly.

Roadmap Keberlanjutan
Sustainability Roadmap

Dari aspek keberlanjutan, PLN NP mengintegrasikan komitmen ESG ke dalam strategi bisnis melalui implementasi *sustainability roadmap* 2024-2030, *ESG policy*, pengembangan pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT), program dekarbonisasi, peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan dampak lingkungan, peningkatan kinerja sumber daya manusia serta penciptaan nilai sosial (*Creating Shared Value*) bagi masyarakat. Integrasi ESG juga didukung oleh penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) untuk mengelola risiko strategis, termasuk risiko transisi energi, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan regulasi.

Sebagai bagian dari implementasi strategi keberlanjutan, PLN NP menetapkan target dan indikator kinerja *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Kontrak Manajemen. Pada tahun 2025, indikator tersebut antara lain mencakup *Maturity Level Sustainability* dengan capaian sebesar 105% serta perolehan CDP *Rating* kategori *Management* (B) untuk aspek *Climate Change* dan *Water Security*.

From a sustainability perspective, PLN NP integrates ESG commitments into its business strategy through the implementation of the 2024-2030 sustainability roadmap, ESG policy, development of New and Renewable Energy (NRE) power plants, decarbonization programs, operational efficiency improvements, environmental impact management, enhancement of human resource performance, and the creation of social value (Creating Shared Value) for the community. The integration of ESG is also supported by the application of Enterprise Risk Management (ERM) to manage strategic risks, including energy transition risks, climate change, technological advancement, and regulations.

As part of the sustainability strategy, PLN NP sets targets and performance indicators for the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Management Contract. In 2025, these indicators include the Sustainability Maturity Level with an achievement of 105% and obtaining a CDP Rating in the Management category (B) for the Climate Change and Water Security aspects.

Efektivitas implementasi strategi dipantau melalui *Performance & Budget Review Meeting*, *Strategic Delivery Meeting*, dan *Strategy Adaptive Meeting* yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian strategi sekaligus memastikan relevansi strategi terhadap dinamika lingkungan bisnis. Dewan Komisaris beserta komite di bawahnya turut menjalankan fungsi pengawasan terhadap pencapaian sasaran strategis, efektivitas tata kelola, serta implementasi aspek keberlanjutan.

The effectiveness of strategy implementation is monitored through the Performance & Budget Review Meeting, Strategic Delivery Meeting, and Strategy Adaptive Meeting, which are used to evaluate the achievement of the strategy while ensuring the strategy's relevance to the dynamics of the business environment. The Board of Commissioners, along with its committees, also performs oversight functions regarding the achievement of strategic objectives, the effectiveness of governance, and the implementation of sustainability aspects.

Melalui integrasi tata kelola yang baik, prinsip integritas, manajemen risiko, dan keberlanjutan dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi, PLN NP mampu memperkuat ketahanan usaha, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai bagi *stakeholders*.

Through the integration of good governance, integrity principles, risk management, and sustainability in the formulation, implementation, and evaluation of strategies, PLN NP is able to strengthen business resilience, enhance competitiveness, and create value for stakeholders.

Internalisasi Nilai Integritas dan Keberlanjutan dalam Budaya dan Operasional Perusahaan

Internalization of Integrity and Sustainability Values in Company Culture and Operations

Governansi PLN Nusantara Power (PLN NP) tidak hanya memastikan integritas dan keberlanjutan terintegrasi dalam strategi perusahaan, tetapi juga membentuk budaya perusahaan yang mendukung penciptaan nilai berkelanjutan. Melalui kerangka tata kelola yang kuat, nilai-nilai tersebut diinternalisasikan menjadi pola pikir, sikap dan perilaku kerja seluruh insan perusahaan.

Governance of PLN Nusantara Power (PLN NP) not only ensures that integrity and sustainability are integrated into the Company's strategy but also shapes a corporate culture that supports the creation of sustainable value. Through a strong governance framework, these values are internalized into the mindset, attitudes, and work behaviors of all company employees.

Pembentukan budaya perusahaan dilakukan melalui internalisasi tata nilai (*core values*) yang didukung oleh berbagai instrumen tata kelola, kepatuhan, dan pengendalian internal. Melalui penguatan budaya kepatuhan, anti-*fraud*, anti-suap, pengelolaan benturan kepentingan, serta program komunikasi, pelatihan, dan awareness secara berkelanjutan, perusahaan menumbuhkan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

The formation of corporate culture is conducted through the internalization of core values supported by various governance, compliance, and internal control instruments. By strengthening a culture of compliance, anti-fraud, anti-bribery, conflict of interest management, as well as continuous communication, training, and awareness programs, the Company fosters a work culture that upholds integrity, transparency, accountability, and responsibility toward economic, social, and environmental aspects.

Aspek Penguatan Budaya
Cultural Strengthening Aspects

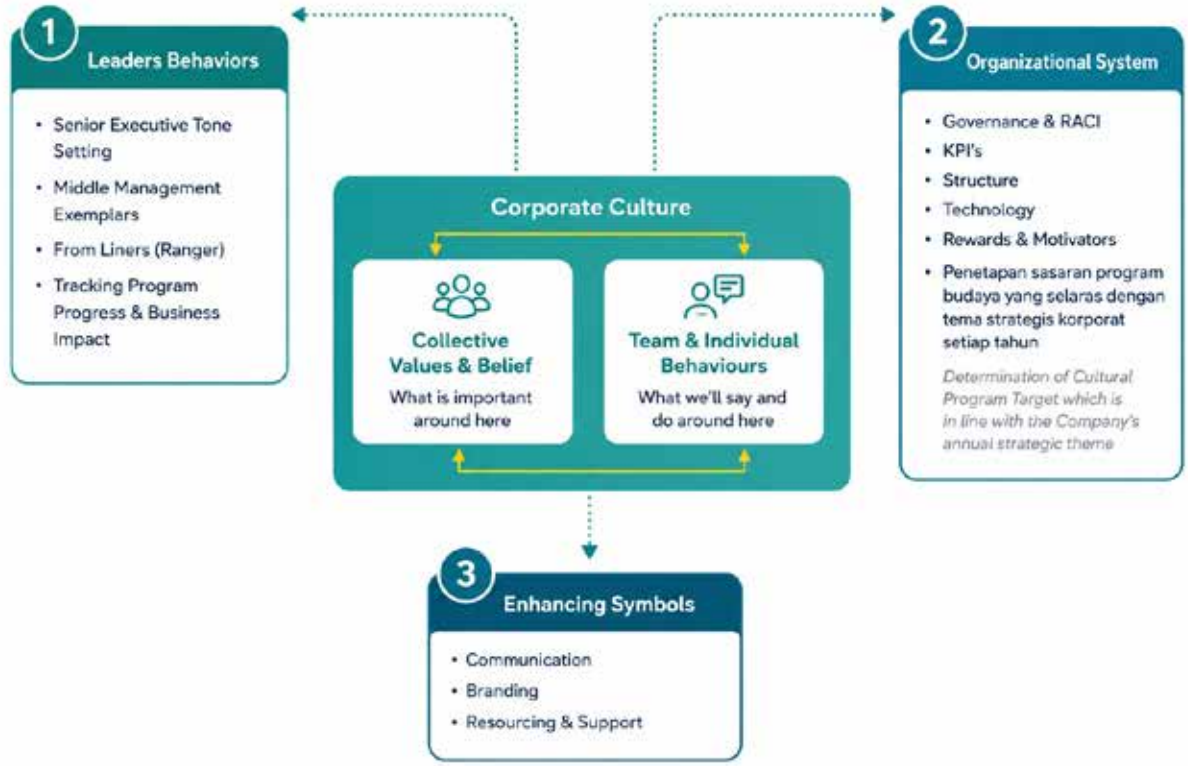

Budaya tersebut diperkuat melalui komitmen dan keteladanan pimpinan (*tone at the top*), di mana Direksi dan jajaran manajemen memastikan nilai integritas dan keberlanjutan menjadi bagian dari pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, pengembangan SDM, dan evaluasi kinerja organisasi.

Untuk memastikan implementasi yang konsisten, nilai perusahaan diintegrasikan ke dalam proses bisnis utama. Dalam operasional pembangkit, perusahaan menerapkan prinsip kepatuhan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*safety culture*), keandalan operasi, efisiensi sumber daya, dan pengelolaan lingkungan.

Dalam pengadaan dan rantai pasok, perusahaan menerapkan *sustainable procurement* pada proses seleksi pemasok guna memastikan pemasok memiliki komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, memenuhi standar kualitas, serta meminimalkan dampak lingkungan dan sosial.

Sementara itu, dalam investasi dan pengembangan usaha, aspek risiko, keberlanjutan, dan nilai jangka panjang menjadi bagian dari pertimbangan utama. PLN NP didukung oleh struktur tata kelola dan tim khusus

The culture is reinforced through the commitment and exemplary behavior of the leadership (tone at the top), where the Board of Directors and management ensure that the values of integrity and sustainability are part of decision-making, risk management, human resource development, and organizational performance evaluation.

To ensure consistent implementation, the Company's values are integrated into core business processes. In power plant operations, the Company applies principles of compliance, Safety and Health Culture (safety culture), operational reliability, resource efficiency, and environmental management.

The Company implements sustainable procurement in the supplier selection process of procurement and supply chain. It aims to ensure that suppliers are committed to sustainability principles, meet quality standards, and minimize environmental and social impacts.

Meanwhile, in investment and business development, aspects of risk, sustainability, and long-term value become part of the main considerations. PLN NP is supported by a governance structure and a special team consisting of

yang terdiri atas Pemrakarsa, *Evaluator* Kajian Kelayakan Proyek, Tim Verifikasi dan Validasi Investasi, serta Komite Perencanaan Investasi untuk memastikan setiap keputusan investasi melalui mekanisme *check and balance*, kajian yang komprehensif, dan proses validasi yang objektif.

Initiators, Project Feasibility Study Evaluators, Investment Verification and Validation Teams, and an Investment Planning Committee. It ensures that every investment decision goes through a check and balance mechanism, comprehensive studies, and an objective validation process.

Implementasi budaya juga diperkuat melalui *Program Culture* 2025 yang berfokus pada 4 *stream Corporate Culture Purpose* yaitu *Safety Culture*, *Beyond* kWh *Revenue*, Penghapusan Kemubadziran dan *Wellbeing*. PLN NP juga membentuk *Ranger* sebagai agen perubahan yang mendorong implementasi budaya perusahaan, peningkatan *engagement*, serta penguatan transformasi dan komunikasi internal di setiap unit kerja.

The implementation of culture is also reinforced through the Culture 2025 Program, which focuses on four streams of Corporate Culture Purpose: Safety Culture, Beyond kWh Revenue, Elimination of Waste, and Welfare. PLN NP also formed Rangers as change agents to drive the implementation of corporate culture, enhance engagement, and strengthen transformation and internal communication in every work unit.

Selain itu, Perusahaan secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi *code of conduct*, kampanye *safety reinforcement*, sosialisasi dan pembinaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, sosialisasi dan *workshop* manajemen Risiko, sosialisasi *Fraud Risk Assessment*, sosialisasi anti gratifikasi, sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS), edukasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan di seluruh unit kerja dan anak perusahaan.

In addition, the Company continuously conducts socialization of the code of conduct, safety reinforcement campaigns, socialization and training of the Anti-Bribery Management System, risk management socialization and workshops, Fraud Risk Assessment socialization, anti-gratification socialization, Whistleblowing System (WBS) socialization, education on the State Official's Wealth Report (LHKPN), and communicates the Company's values across all work units and subsidiaries.

Efektivitas penerapan budaya yang mengedapankan nilai integritas dan keberlanjutan dipantau melalui monitoring implementasi budaya, *employee experience survey*, penilaian implementasi GCG, penilaian *Risk Maturity Index* (RMI), *monitoring* dan survei *awareness* kepatuhan, audit internal, *maturity level sustainability* serta evaluasi kinerja yang mempertimbangkan aspek perilaku, tata kelola, dan keberlanjutan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan berkelanjutan untuk memastikan nilai perusahaan tercermin dalam perilaku organisasi dan praktik bisnis sehari-hari.

The effectiveness of implementing a culture that prioritizes integrity and sustainability is monitored through cultural implementation monitoring, employee experience surveys, GCG implementation assessments, Risk Maturity Index (RMI) assessments, compliance awareness monitoring and surveys, internal audits, sustainability maturity level evaluations, and performance evaluations that consider behavioral, governance, and sustainability aspects. The results of the evaluation serve as the basis for continuous improvement, ensuring that the Company's values are reflected in organizational behavior and daily business practices.

Melalui peran governansi yang konsisten dalam membentuk, menginternalisasi, dan mengawasi penerapan nilai perusahaan, PLN NP membangun budaya yang selaras dengan strategi korporasi serta mendukung pelaksanaan bisnis dan operasional yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Through a consistent governance role in shaping, internalizing, and overseeing the implementation of corporate values, PLN NP builds a culture that aligns with corporate strategy and supports the execution of responsible and sustainable business and operational practices.

Capaian KPI
KPI Achievement

105,66

Peraih PROPER Emas terpanjang di PLN Group selama delapan tahun berturut-turut.
The longest-running recipient of the Gold PROPER award in the PLN Group for eight consecutive years.

Jumlah raihan proper tahun 2025
Number of PROPER awards received in 2025

4	12	56
PROPER Emas Gold PROPER	**PROPER Hijau** Green PROPER	**PROPER Biru** Blue PROPER

Risk Maturity Index (RMI)
Risk Maturity Index (RMI)

2,85

penerapan manajemen risiko telah berkembang dan mendekati praktik yang baik.
The implementation of risk management has evolved and is approaching best practice.

Pencapaian *Maturity Level Sustainability*
Sustainability Maturity Level Achievement

3,89
dari 3,70 from 3,70

105,14%
tercapai achieved

Penilaian Implementasi GCG
Penilaian Implementasi GCG

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE	KNKG	OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
96,19 poin points	*Apply*: **57** *Explain*: **24**	*Comply*: **20** *Explain*: **5**

Pelatihan Anti-Korupsi kepada
Anti-Corruption Training to

4.584
Karyawan Employees

Maturity Level GCG
GCG Maturity Level

3,10
Skor Tertinggi di PLN Group
The Highest Score in PLN Group

Sertifikasi K3
OHS Certification

144
Personel
Personnel

Pelatihan K3
OHS Training

65
Personel
Personnel

ZERO ACCIDENT

Nilai Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Value

87,27%

0,01%

Employee Experience Survey (EES)

83,63%

Pengaduan yang lolos verifikasi melalui *Whistle Blowing* System mendapatkan tindak lanjut Perusahaan
Complaints that pass verification through the Whistle Blowing System receive follow-up by the Company

100%

Nusantara Volunteering Program

4.895
Karyawan Employees

103%
tercapai achieved

Kesiapan PLN Nusantara Power dalam Implementasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK 1 dan SPK 2)

The Readiness of PLN Nusantara Power in Implementing Sustainability Disclosure Standards (SPK 1 and SPK 2)

PLN NP terus memperkuat kesiapan implementasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK 1 dan SPK 2) melalui penguatan tata kelola, proses bisnis, manajemen risiko, serta sistem pengelolaan data keberlanjutan yang terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang diungkapkan Perusahaan relevan, andal, dan memiliki keterhubungan yang kuat dengan kinerja keuangan serta strategi jangka panjang Perusahaan.

Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif dalam mengarahkan dan mengawasi implementasi keberlanjutan melalui integrasi aspek ESG dan perubahan iklim ke dalam perencanaan strategis, pengelolaan risiko, pengambilan keputusan investasi, serta evaluasi kinerja perusahaan. Komitmen tersebut didukung oleh Komite *Sustainability* yang berfungsi mengoordinasikan implementasi keberlanjutan secara lintas fungsi dan memastikan konsistensi penerapan di seluruh organisasi.

Dalam rangka mempersiapkan implementasi SPK 1 dan SPK 2, PLN NP telah melaksanakan proses *alignment* terhadap IFRS S1 dan IFRS S2, termasuk asesmen kesenjangan (*gap analysis*), penguatan kapasitas organisasi serta pengembangan *framework* pengungkapan keberlanjutan. Sebagai bagian dari peningkatan pemahaman dan budaya keberlanjutan, pada tahun 2025 PLN NP juga menyelenggarakan *Workshop ESG Sustainability Culture & Deployment* Unit yang dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN NP. *Workshop* tersebut menjadi media *knowledge sharing* mengenai *Sustainability Mindset*, *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), serta Sustainability Procurement, guna memperkuat kompetensi dan kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan secara konsisten di seluruh unit kerja. Selain itu, Perusahaan juga telah menyusun *Roadmap* Persiapan Implementasi IFRS S1 dan IFRS S2 yang ditargetkan selesai pada tahun 2026, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

PLN NP continues to strengthen its readiness for the implementation of Sustainability Disclosure Standards (SDS 1 and SDS 2) through the improvement of governance, business processes, risk management, and an integrated sustainability data management system. This step is taken to ensure that the sustainability information disclosed by the Company is relevant, reliable, and has a strong connection with the Company's financial performance and long-term strategy.

The Board of Commissioners and Board of Directors play an active role in directing and supervising the implementation of sustainability through the integration of ESG aspects and climate change into strategic planning, risk management, investment decision-making, and company performance evaluation. This commitment is supported by the Sustainability Committee, which coordinates the implementation of sustainability across functions and ensures consistent application throughout the organization.

To prepare for the implementation of SDS 1 and SDS 2, PLN NP has conducted an alignment process with IFRS S1 and IFRS S2, including gap analysis, organizational capacity strengthening, and the development of a sustainability disclosure framework. As part of enhancing understanding and sustainability culture, in 2025, PLN NP also held the ESG Sustainability Culture & Deployment Unit Workshop attended by the Director of Finance and Risk Management of PLN NP. The workshop served as a knowledge-sharing platform on Sustainability Mindset, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), as well as Sustainability Procurement, to strengthen the organization's competence and readiness in consistently implementing sustainability principles across all work units. In addition, the Company prepared a Roadmap for the Implementation of IFRS S1 and IFRS S2, which is targeted to be completed by 2026, as shown in the following image.

Kesiapan tersebut didukung oleh pengembangan ESG *Dashboard* yang memungkinkan proses pengumpulan, validasi, pemantauan, dan pelaporan data keberlanjutan secara terintegrasi. Penguatan tata kelola data ini meningkatkan kualitas, konsistensi, dan keterlacakan informasi yang menjadi dasar pengungkapan keberlanjutan Perusahaan.

Prinsip-prinsip SPK 1 dan SPK 2 juga telah terinternalisasi dalam empat pilar utama pengungkapan keberlanjutan. Pada aspek *Governance*, Perusahaan memperkuat peran Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite *Sustainability* dalam pengawasan keberlanjutan. Pada aspek *Strategy*, risiko dan peluang keberlanjutan diintegrasikan ke dalam strategi dekarbonisasi, pengembangan energi baru terbarukan, digitalisasi operasional, dan implementasi R*oadmap Net Zero Emission*. Pada aspek *Risk Management*, risiko ESG dan perubahan iklim telah menjadi bagian dari *Enterprise Risk Management*. Sementara pada aspek *Metrics & Targets*, Perusahaan menetapkan indikator kinerja yang terukur, termasuk *Maturity Level Sustainability*, *Carbon Emission Reduction*, dan PROPER *Beyond Compliance*.

This readiness is supported by the development of the ESG Dashboard, which enables the integrated process of collecting, validating, monitoring, and reporting sustainability data. Strengthening data governance enhances the quality, consistency, and traceability of the information that forms the basis for the Company's sustainability disclosures.

The principles of SDS 1 and SDS 2 have also been internalized in the four main pillars of sustainability disclosure. In the aspect of Governance, the Company strengthens the roles of the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Sustainability Committee in overseeing sustainability. In the aspect of Strategy, sustainability risks and opportunities are integrated into decarbonization strategies, the development of new renewable energy, operational digitalization, and the implementation of the Net Zero Emission Roadmap. In the Risk Management aspect, ESG and climate change risks have become part of Enterprise Risk Management. Meanwhile, in the aspect of Metrics & Targets, the Company sets measurable performance indicators, including Sustainability Maturity Level, Carbon Emission Reduction, and PROPER Beyond Compliance.

INTERNALISASI DALAM 4 PILAR PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN
INTERNALIZATION IN 4 PILLARS OF SUSTAINABILITY DISCLOSURE

1 GOVERNANCE

Tata Kelola Keberlanjutan yang Efektif
Effective Sustainability Governance

FOKUS UTAMA
MAIN FOCUS

- **Struktur dan mekanisme tata kelola keberlanjutan**
  Sustainability governance structure and mechanism
- **Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi**
  Active role of the Board of Commissioners and Board of Directors
- **Integrasi aspek ESG dalam pengambilan keputusan dan pengawasan** Integration of ESG aspects in decision-making and supervision
- **Komite *Sustainability* sebagai penggerak lintas fungsi**
  Sustainability Committee as a cross-functional driver

IMPLEMENTASI DI PLN NUSANTARA POWER
IMPLEMENTATION AT PLN NUSANTARA POWER

- **Pembentukan Komite *Sustainability* (SK Direksi No. 0028.K/DIR/2024)**
  Establishment of Sustainability Committee - Board of Directors Decree No. 0028.K/DIR/2024)
- **Direksi** Board of Directors
- **Integrasi aspek keberlanjutan dalam RJPP, RKAP, kebijakan, dan keputusan investasi**
  Integration of sustainability aspects into Long-Term Corporate Plan [RJPP], Company Budget Work Plan [RKAP], policies, and investment decisions
- **Pengawasan implementasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite terkait**
  Supervision of implementation by the Board of Commissioners through related Committees

BUKTI & CAPAIAN EVIDENCE & ACHIEVEMENTS

- **Komite Sustainability Lintas Fungsi**
  Cross-Functional Sustainability Committee
- **Pengawasan Berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi**
  Periodic Supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors
- **ESG terintegrasi dalam strategi & keputusan bisnis**
  ESG integrated into business strategy & decisions

2 STRATEGY

Strategi untuk Menciptakan Nilai Jangka Panjang
Strategy to Create Long-Term Value

FOKUS UTAMA
MAIN FOCUS

- **Merespons transisi energi dan target *Net Zero Emission* Indonesia 2060**
  Responding to the energy transition and Indonesia's 2060 Net Zero Emission target
- **Integrasi risiko dan peluang keberlanjutan ke dalam strategi bisnis**
  Integration of sustainability risks and opportunities into business strategy
- **Transformasi portofolio & pengembangan energi bersih**
  Portfolio transformation & clean energy development

IMPLEMENTASI DI PLN NUSANTARA POWER
IMPLEMENTATION AT PLN NUSANTARA POWER

- **Dekarbonisasi Portofolio Energi: Percepatan pengembangan EBT, *co-firing* biomassa, dan eksplorasi teknologi rendah karbon.**
  Decarbonization of Energy Portfolio: Accelerating NRE development, biomass co-firing, and exploring low-carbon technologies.
- **Efisiensi & Digitalisasi Operasional: Optimalisasi kinerja pembangkit melalui digitalisasi dan peningkatan efisiensi energi.**
  Operational Efficiency & Digitalization: Optimizing plant performance through digitalization and energy efficiency improvements.
- **Pengembangan Bisnis Energi Bersih: Proyek EBT berskala besar, kemitraan strategis, serta inovasi model bisnis dan layanan energi bersih.**
  Clean Energy Business Development: Large-scale NRE projects, strategic partnerships, and innovation in clean energy business models and services.
- **Penguatan Ketahanan Iklim & Tata Kelola Keberlanjutan: Integrasi risiko ESG & iklim, penguatan tata kelola dan manajemen risiko keberlanjutan, serta peningkatan resiliensi terhadap perubahan iklim.**
  Strengthening Climate Resilience & Sustainability Governance: Integration of ESG & climate risks, strengthening sustainability governance and risk management, and increasing resilience to climate change.

BUKTI & CAPAIAN EVIDENCE & ACHIEVEMENTS

- ***Net Zero Emission Roadmap* selaras dengan *roadmap* PLN Group**
  Net Zero Emission Roadmap aligned with the PLN Group roadmap
- **Portofolio EBT terus bertumbuh & diversifikasi bisnis energi bersih**
  NRE portfolio continues to grow & diversification of clean energy business
- **Efisiensi & inovasi untuk kinerja berkelanjutan**
  Efficiency & innovation for sustainable performance

3 RISK MANAGEMENT

Manajemen Risiko untuk Ketahanan Jangka Panjang
Risk Management for Long-Term Resilience

FOKUS UTAMA
MAIN FOCUS

- Integrasi risiko keberlanjutan & risiko iklim ke dalam *Enterprise Risk Management* (ERM)
  Integration of sustainability risks & climate risks into Enterprise Risk Management (ERM)
- Identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pemantauan risiko ESG & iklim
  Identification, assessment, mitigation, and monitoring of ESG & climate risks
- Peningkatan kualitas pengungkapan risiko dan keselarasan standar internasional
  Improving the quality of risk disclosure and alignment with international standards

IMPLEMENTASI DI PLN NUSANTARA POWER
IMPLEMENTATION AT PLN NUSANTARA POWER

- Integrasi risiko ESG & iklim dalam ERM termasuk risiko fisik, transisi, regulasi, reputasi, dan rantai pasok.
  Integration of ESG & climate risks in ERM including physical, transition, regulatory, reputational, and supply chain risks.
- Pemantauan risiko secara berkala dan pelaporan mitigasi kepada manajemen.
  Periodic risk monitoring and mitigation reporting to management.

BUKTI & CAPAIAN EVIDENCE & ACHIEVEMENTS

Proses manajemen risiko terintegrasi
Integrated risk management process

Peningkatan kesadaran pengungkapan risiko iklim
Increased awareness of climate risk disclosure

4 METRICS & TARGETS

Kinerja Terukur untuk Perbaikan Berkelanjutan
Measurable Performance for Continuous Improvement

FOKUS UTAMA
MAIN FOCUS

- Penetapan indikator & target keberlanjutan yang terukur dan relevan
  Setting measurable and relevant sustainability indicators & targets
- Monitoring kinerja berkala melalui sistem terintegrasi
  Periodic performance monitoring through an integrated system
- Keterkaitan indikator keberlanjutan dengan kinerja perusahaan
  Linkage of sustainability indicators with company performance

IMPLEMENTASI DI PLN NUSANTARA POWER
IMPLEMENTATION AT PLN NUSANTARA POWER

- *Maturity Level Sustainability* sebagai KPI dari PLN Holding
  Sustainability Maturity Level as a KPI from PLN Holding
- Target *Carbon Emission Reduction*
  Target Carbon Emission Reduction
- Target jumlah unit dengan PROPER *Beyond Compliance*
  Target number of units with PROPER Beyond Compliance
- Pemantauan pencapaian melalui ESG *Dashboard* yang terintegrasi
  Monitoring achievement through an integrated ESG Dashboard

KINERJA 2025 (REALISASI TERHADAP TARGET)
2025 PERFORMANCE (REALIZATION AGAINST TARGET)

Maturity Level Sustainability	105,14%
Carbon Emission Reduction	115,87%
Unit with PROPER Beyond Compliance	114,29%

PROSEDUR & SISTEM INFORMASI PENDUKUNG
SUPPORTING PROCEDURES & INFORMATION SYSTEMS

- Keberlibatan BPO & seluruh fungsi dalam unit pembangkit
  Involvement of Business Process Owners & all functions in generating units
- Mekanisme reviu dan verifikasi berbasis sistem
  System-based review and verification mechanism
- Audit *trail* untuk memastikan keandalan dan keterlacakan data
  Audit trail to ensure data reliability and traceability

ESG Dashboard
https://esg.plnnusantarapower.co.id/

Sistem digital terintegrasi untuk pengumpulan, konsolidasi, *monitoring,* dan evaluasi kinerja ESG secara *real-time* dan akurat.
Integrated digital system for real-time and accurate data collection, consolidation, monitoring, and evaluation of ESG performance.

Sebagai bukti implementasi, pada tahun 2025 PLN Nusantara Power berhasil menyelesaikan Gap Analysis dan *Alignment* IFRS S1 dan IFRS S2, meraih ESG *Rating* "B" pada CDP untuk aspek *Climate Change* dan *Water Security*, serta melampaui seluruh target keberlanjutan yang telah ditetapkan, yaitu *Maturity Level Sustainability* sebesar 105,14%, *Carbon Emission Reduction* sebesar 115,87%, dan PROPER *Beyond Compliance* sebesar 114,29%.

As evidence of implementation, in 2025, PLN Nusantara Power successfully completed the Gap Analysis and Alignment of IFRS S1 and IFRS S2, achieved an ESG Rating of "B" on the CDP for Climate Change and Water Security aspects, and exceeded all established sustainability targets, namely a Sustainability Maturity Level of 105.14%, Carbon Emission Reduction of 115.87%, and PROPER Beyond Compliance of 114.29%.

Memastikan Keandalan dan Kredibilitas Pelaporan Perusahaan

Ensuring the Reliability and Credibility of Corporate Reporting

PLN NP secara konsisten memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan, laporan tahunan, dan pengungkapan keberlanjutan dilaksanakan secara andal, konsisten, kredibel, transparan, dan akuntabel melalui penguatan budaya tata kelola, sistem pengendalian internal, mekanisme assurance, serta pengawasan berlapis yang terintegrasi.

PLN NP consistently ensures that the process of preparing financial statements, annual reports, and sustainability disclosures is carried out reliably, consistently, credibly, transparently, and accountably through the strengthening of governance culture, internal control systems, assurance mechanisms, and integrated layered supervision.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan governance culture yang menekankan etika, kepatuhan, integritas, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pelaporan perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) terhadap kualitas pelaporan, termasuk memastikan konsistensi penerapan prinsip governansi dan pelaksanaan asesmen implementasi GCG secara berkala.

This commitment is realized through the implementation of a governance culture that emphasizes ethics, compliance, integrity, and accountability in all company reporting processes. The Board of Commissioners and Board of Directors actively perform oversight functions on the quality of reporting, including ensuring the consistency of governance principle application and the periodic assessment of GCG implementation.

Untuk menjaga keandalan data dan efektivitas pengendalian, PLN NP menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPIN) dan Internal *Control over Financial Reporting* (ICoFR) dengan kerangka model 3 lini (Three Lines of Model) guna memastikan akurasi, kelengkapan, dan validitas informasi yang disajikan. Lini pertama bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses bisnis, lini kedua melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta membangun budaya risiko, sedangkan lini ketiga melalui fungsi Audit Internal memberikan *assurance* independen atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal melalui pendekatan Risk Based Internal Audit (RBIA). Pengendalian tersebut diperkuat melalui mekanisme *early warning system*, konsinyering, serta rekonsiliasi data lintas fungsi untuk meminimalkan risiko salah saji serta meningkatkan konsistensi dan keandalan informasi.

To maintain data reliability and control effectiveness, PLN NP implements the Internal Control System (SPIN) and Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) with a three-line model framework to ensure the accuracy, completeness, and validity of the presented information. The first line is responsible for identifying and managing risks in business processes, the second line measures, monitors, and controls risks as well as builds a risk culture, while the third line, through the Internal Audit function, provides independent assurance on the effectiveness of governance, risk management, and internal control through a Risk-Based Internal Audit (RBIA) approach. These controls are strengthened through early warning system mechanisms, consignment, and cross-functional data reconciliation to minimize the risk of misstatements and enhance the consistency and reliability of information.

Kualitas pelaporan semakin diperkuat melalui proses validasi dan *review* berjenjang oleh Tim Penyusun *Annual Report* dan *Sustainability Report* hingga level Manager dan Vice President, sehingga setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi yang memadai. Proses ini didukung oleh berbagai kebijakan dan pedoman internal, antara lain Piagam Audit Internal, Kebijakan Strategis Audit Internal, Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Strategis Sistem Pengendalian Intern (SPIN), Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (ICoFR), Peraturan Pelaksana PLN terkait Standar penyusunan *Annual Report* dan *Sustainability Report*, serta keberadaan Komite Sustainability yang mengawal kualitas pengungkapan keberlanjutan Perseroan.

The quality of reporting is further strengthened through a tiered validation and review process by the Annual Report and Sustainability Report Preparation Team up to the Manager and Vice President levels, ensuring that every published piece of information has undergone adequate verification. This process is supported by various internal policies and guidelines, including the Internal Audit Charter, Strategic Internal Audit Policy, Integrated Risk Management Strategic Policy, Strategic Internal Control System (SPIN) Policy, Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) Implementation Guidelines, PLN Implementing Regulations related to the Standards for preparing the Annual Report and Sustainability Report, as well as the presence of the Sustainability Committee that oversees the quality of the Company's sustainability disclosures.

Sebagai bagian dari mekanisme independent *assurance*, laporan keuangan Perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen, sementara pada Sustainability Report juga dilakukan proses assurance oleh pihak independen untuk meningkatkan kredibilitas pengungkapan keberlanjutan. Sebagai wujud akuntabilitas manajemen, terdapat Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan, yang menegaskan tanggung jawab atas kewajaran dan keandalan informasi yang disajikan.

As part of the independent assurance mechanism, the Company's financial statements are audited by an independent Public Accounting Firm (KAP), while the Sustainability Report also undergoes an assurance process by an independent party to enhance the credibility of sustainability disclosures. As a manifestation of management accountability, there is a Statement of Responsibility for the Financial Statements signed by the President Director and the Finance Director, which affirms responsibility for the fairness and reliability of the presented information.

PLN NP juga secara aktif mengikuti evaluasi eksternal melalui berbagai ajang penilaian, seperti *Annual Report Award* (ARA), *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT), serta CDP Rating. Pada tahun 2025, PLN NP memperoleh peringkat Management (B) untuk aspek *Climate Change* dan *Water Security* dari CDP, serta kembali mengikuti proses penilaian pada tahun 2026 sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pengungkapan keberlanjutan secara berkelanjutan. Perusahaan juga membuka ruang umpan balik dari para pemangku kepentingan sebagai bagian dari budaya *continuous improvement*.

PLN NP also actively participates in external evaluations through various assessment platforms, such as the Annual Report Award (ARA), Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT), and CDP Rating. In 2025, PLN NP received a Management (B) rating for the Climate Change and Water Security aspects from CDP, and continued to participate in the assessment process in 2026 as a commitment to the continuous improvement of sustainability disclosure quality. The Company also opens up feedback channels from stakeholders as part of a culture of continuous improvement.

Melalui sinergi budaya tata kelola, penguatan pengendalian internal, *assurance* independen, dan evaluasi berkelanjutan, PLN NP memastikan bahwa setiap laporan yang diterbitkan memiliki integritas, transparansi, dan kredibilitas yang tinggi. Komitmen tersebut memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, mendukung pengambilan keputusan yang berkualitas, serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

Through the synergy of governance culture, strengthening internal controls, independent assurance, and continuous evaluation, PLN NP ensures that every report published has high integrity, transparency, and credibility. This commitment strengthens stakeholder trust, supports quality decision-making, and creates sustainable long-term value.

Capaian Strategis 2025
2025 Strategic Achievements

Kinerja Keuangan
Financial Performance

Pendapatan Usaha
Revenue
Rp98,89
Triliun Trillion
7,83%

Laba Usaha
Operating Income
Rp14,70
Triliun Trillion
6,99%

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year
Rp13,06
Triliun Trillion
1,15%

Total Aset
Total Assets
Rp357,67
Triliun Trillion
0,65%

Ekuitas
Equity
Rp315,15
Triliun Trillion
0,16%

Pendapatan *Beyond* KWh
Beyond KWh Revenue
Rp1.101,48
Juta Million
11,76%

Kinerja Operasional dan Bisnis
Operational and Business Performance

Total Kapasitas Pembangkit
Total Capacity of Power Plants
24.942,36
MW

Unit Milik Sendiri Owned Unit	18.304 MW
Jasa O&M O&M Service	788,46 MW
Kepemilikan IPP IPP Ownership	5.850 MW

Penjualan Tenaga Listrik
Sales of Electricity
63.285,67
GWh

Batubara Coal	33.427,61 GWh
Gas & Non Batubara Gas & Non-Coal	29.858,06 GWh

Capaian KPI
KPI Achievement
105,66

Produksi Energi Listrik
Electricity Production

66.919,39
GWh

Batubara Coal	36.336,07 GWh
Gas & Non Batubara* Gas & Non-Coal*	30.583,33 GWh
EBT NRE	6.861,28 GWh 12,43%
Hidro Hydro	5.865,71 GWh 10,95%
Biomassa Biomass	995,57 GWh 22%

* termasuk EBT including NRE

Unit Pembangkitan
Generation Unit

Total Kapasitas Terpasang
Total Installed Capacity

18.304
MW

Unit Pembangkitan (UP) Generation Unit (GU)	31
PLTS Riset Cirata (1 MW) Cirata Research SPP (1 MW)	1
Unit PLTU CFPP Units	6

Penjualan Bersih Tenaga Listrik
Net Electricity Sales

Rp94,97
Triliun Trillion

7,53%

Unit Bisnis Lainnya
Other Business Units

O&M Services
O&M Services

Pendapatan Revenue
Rp2,15
Triliun Trillion

26,54%

EPC Services
EPC Services

Pendapatan Revenue
Rp1,17
Triliun Trillion

9,43%

Lain-Lain
Others

Pendapatan Revenue
Rp598,33
Miliar Billion

Capaian Strategis, Proyek Prioritas, ESG dan SDM
Strategic Achievements, Priority Projects, ESG, and HR

Progress Kolaborasi Strategis
Progress of Strategic Collaboration

PLTU CFPP MT Sumbagsel 1 300 MW
COD Efektif per tanggal 24 Maret 2025
COD Effective as of March 24, 2025

PLTS Terapung Floating SPP Karangkates 100 MWac/130 MWp
Masih pada tahap pra-konstruksi dengan *progress* positif. Target COD proyek dijadwalkan pada akhir 2026
It is still in the pre-construction phase, with positive progress. The project's COD is scheduled for late 2026

PLTS Terapung Floating SPP Tembesi 35 MWac/46 MWp
On *progress* tahap konstruksi EPC. Proses AMDAL, perizinan, dan amandemen PPA terus berjalan guna mendukung penyelesaian proyek sesuai target operasi.
The EPC construction phase is on progress. The EIA process, permitting, and PPA amendments are ongoing to ensure the project is completed in line with the operational target.

Program Dekarbonisasi
Decarbonization Program

Implementasi mencapai 4,97 juta ton CO_2, melampaui target sebesar 115,3%, yang menunjukkan keberhasilan strategi transisi energi dan penurunan emisi perusahaan.Capaian terutama didorong operasi:
Implementation reached 4.97 million tons of CO_2, exceeding the target by 115.3%, indicating the success of the energy transition strategy and the Company's emission reduction efforts. Achievements were primarily driven by the following operations:

PLTGU Gas Gas CCPP	3.777.027,70 ton CO_2
Co-firing Biomassa Biomass Co-firing	1.092.526,16 ton CO_2
Pembangkit EBT NRE Power Plant	103.329,36 ton CO_2

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Solar Power Plant (SPP)

PLTS Terapung Cirata Cirata Floating SPP	145 MWac	192 MWp
PLTS IKN Nusantara IKN Nusantara SPP	50 MWac	71,2 MWp
PLTS Terapung Karangkates Karangkates Floating SPP	100 MWac	130 MWp
PLTS Terapung Tembesi Tembesi Floating SPP	35 MWac	46 MWp

Perdagangan Karbon
Carbon Trading

Hingga akhir tahun 2025
Until the end of 2025

SPE-GRK yang dibursakan Listed SPE-GRK	1,23 juta million ton CO_2
Transaksi Transaction	633 ribu thousand ton CO_2

Peraih PROPER Emas terpanjang di PLN Group selama delapan tahun berturut-turut.
The longest-running recipient of the Gold PROPER award in the PLN Group for eight consecutive years.

Jumlah raihan proper tahun 2025
Number of PROPER awards received in 2025

4	12	56
PROPER Emas Gold PROPER	**PROPER Hijau** Green PROPER	**PROPER Biru** Blue PROPER

Maturity Level Sustainability
Sustainability Maturity Level

3,89

Skor Tertinggi di PLN Group
The Highest Score in PLN Group

Maturity Level GCG
GCG Maturity Level

3,10

Skor Tertinggi di PLN Group
The Highest Score in PLN Group

Employee Experience Survey (EES)

83,63%

Pemanfaatan FABA
FABA Utilization

414.000
ton

Jumlah Karyawan
Number of Employees

4.954
karyawan employees

Pengembangan SDM
HR Development

Pendapatan Revenue

Rp11,5
Miliar Billion

Laki-laki Male	88%
Perempuan Female	12%

Biaya Pengembangan Development Cost	Rp18,56 miliar billion
Jumlah Pelatihan Total Training	547 judul titles
Jumlah Peserta Number of Participants	23.808 karyawan employees
Jumlah jam pelatihan Total training hours	279.965 jam hours
Rata-rata jam pelatihan Average training hours	56,51 jam/orang hour/person

Assessment GCG
GCG Assessment

Asean CG *Scorecard*

Capaian *assessment* ACGS 2025 sebesar 96,19 poin. Hasil ini menunjukkan komitmen kuat PLN NP dalam memperkuat praktik GCG, transparansi, serta daya saing korporasi di tingkat internasional.
The ACGS 2025 assessment achievement is 96.19 points. This result demonstrates PLN NP's strong commitment to strengthening GCG practices, transparency, and corporate competitiveness at the international level.

Assessment GCG PUG-KI
GCG PUG-KI Assessment

Capaian penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) menunjukkan komitmen PLN NP dalam memperkuat praktik tata kelola yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. PLN NP terus menyelaraskan kebijakan serta proses bisnis dengan prinsip governansi modern guna mendukung kinerja unggul dan penciptaan nilai jangka panjang.
The achievement of the implementation of the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) demonstrates PLN NP's commitment to strengthening governance practices that are integral, transparent, accountable, and sustainable. PLN NP continues to align policies and business processes with modern governance principles to support excellent performance and long-term value creation.

Assessment GCG POJK 21
POJK 21 GCG Assessment

Implementasi POJK 21/POJK.04/2015 mencerminkan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi pasar modal dan standar tata kelola yang berlaku. Pemenuhan aspek hak pemegang saham, fungsi organ perusahaan, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab sosial menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan daya saing perusahaan.
The implementation of POJK 21/ POJK.04/2015 reflects the Company's compliance with capital market regulations and applicable governance standards. Fulfillment of shareholder rights, the functions of corporate organs, information transparency, and social responsibility are crucial foundations in enhancing stakeholder trust and the Company's competitiveness.

Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025
2025 Achievements and Awards

24 Januari
January

Peraihan lima penghargaan berupa:
- *Brilliant Overall Human Capital Transformation for Sustainabillity of Year 2024 – Platinum*
- *The Most Brilliant HC Team of Year 2024 – Diamond*
- *The Most Brilliant Employee Engagement of Year 2024 – Diamond*
- Direktur Utama PLN NP Ruly Firmansyah - *Brilliant CEO in Sustainable Human Capital Transformation of Year 2024*
- Plt Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN NP Komang Parmita - *The Most Brilliant Director in HC Transformation of Year 2024*

Pada Ajang Indonesia *Human Capital Brilliance Award* (IHCBA) 2024 oleh Business Asia.

Acheived five awards:
- 2024 Brilliant Overall Human Capital Transformation for Sustainability – Platinum
- 2024 The Most Brilliant HC Team – Diamond
- 2024 The Most Brilliant Employee Engagement – Diamond
- PLN NP's President Director Ruly Firmansyah – 2024 Brilliant CEO in Sustainable Human Capital Transformation
- PLN NP's Acting Director of Human Capital Management and Administration Komang Parmita – 2024 The Most Brilliant Director in HC Transformation

At the 2024 Indonesia Human Capital Brilliance Award (IHCBA) by Business Asia.

7 Februari
February

Peraihan 19 Penghargaan pada Ajang *Power Awards* 2024 oleh Direktorat Manajemen Pembangkit PT PLN (Persero).

The Directorate of Power Generation Management of PT PLN (Persero) received 19 awards at the 2024 Power Awards.

21 Februari
February

Peraihan dua penghargaan berupa:
- *Silver - Best Performance Communication* SH/AP
- *Gold - Best Communication Campaign Program*

Pada Ajang PLN *Corporate Communication Awards* oleh PLN (Persero).

Achieved two awards:
- Silver - Best Performance Communication SH/AP
- Gold - Best Communication Campaign Program

At the PLN Corporate Communication Awards organized by PLN (Persero).

24 Februari
February

Peraihan 72 penghargaan PROPER berupa:
- Proper Emas = 4 Unit
- Proper Hijau = 12 Unit
- Proper Biru = 56 Unit

Oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Achieved 72 PROPER awards:
- Gold Proper = 4 Units
- Green Proper = 12 Units
- Blue Proper = 56 Units

By the Ministry of Environment (KLH).

26 Juni
June

Peraihan penghargaan 7th *Indonesia Top Digital PR Award* 2025 pada kategori *Special Achievement for Subsidiary* BUMN oleh InfoBrand/TRAS N CO Indonesia.

Winning the 7th Indonesia Top Digital PR Award 2025 in the Special Achievement for Subsidiary BUMN category by InfoBrand/TRAS N CO Indonesia.

11 Juli
July

Peraihan enam penghargaan berupa:
- 1 predikat *Platinum* kategori *Gender Equality & Social Inclusion*.
- 2 predikat *Gold* pada kategori *Education* dan kategori *Health Quality Improvement*.
- 3 predikat *Bronze* pada kategori *Economic Empowerment*.

Pada Ajang *Indonesia Social Responsibility Award* (ISRA) 2025 oleh Prospectus Media.

Achieved six awards were:
- 1 Platinum award in the Gender Equality & Social Inclusion category
- 2 Gold awards in the Education and Health Quality Improvement categories
- 3 Bronze awards in the Economic Empowerment categories

At the 2025 Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) by Prospectus Media.

18 Juli
July

Peraihan dua penghargaan berupa:
- UP Tenayan – *Gold Winner* pada kategori Sumber Daya Input
- UP Rembang - *Gold Winner* pada kategori Perpanjangan Sumberdaya *Output* dan Daur Ulang

Pada Ajang *Circular Economy Sustainability Award* (CESA) 2025 oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD).

Achieved two awards:
- Tenayan GU – Gold Winner in the Input Resources category
- Rembang GU – Gold Winner in the Output Resources Extension and Recycling category

At the 2025 Circular Economy Sustainability Award (CESA) by the Corporate Forum for CSR Development (CFCD).

15 Juli
July

Peraihan apresiasi sebagai Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Terpatuh untuk kategori Kegiatan Berusaha Terminal Khusus oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Awarded as the Holder of the Compliant Marine Spatial Utilization Activity Conformity Approval (KKPRL) for the Special Terminal Business Activity category by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) of the Republic of Indonesia.

31 Juli
July

Peraihan Penghargaan "*Excellence in Efficient Power Generation*" pada BUMN *Awards* 2025 oleh Investortrust.id.

Winning the "Excellence in Efficient Power Generation" Award at the 2025 BUMN Awards by Investortrust.id.

16 September
September

Peraihan 46 penghargaan pada 10 Unit Pembangkitannya pada Ajang *Environmental & Social Innovation Awards* (ENSIA) 2025 oleh PT SUCOFINDO (Persero).

Achieved 46 awards for 10 Generation Units at the 2025 Environmental & Social Innovation Awards (ENSIA) event by PT SUCOFINDO (Persero).

26 Agustus
August

Peraihan penghargaan internasional *Gold Stevie® Award for Technology Excellence* 2025 dalam kategori *Technology Breakthrough of the Year – Energy Technology* oleh The Stevie Awards.
Winning the international Gold Stevie® Award for Technology Excellence 2025 in the category of Technology Breakthrough of the Year – Energy Technology by The Stevie Awards.

16 Oktober
October

Peraihan empat penghargaan berupa:
- Juara Utama – kategori *Energy Management in Small and Medium Industries*
- Juara Utama – kategori *Enabler Technology*
- Juara Utama – kategori *Biofuels*
- 1st *Runner Up Combined Heat and Power* (CHP) *Generation*.

Pada Ajang ASEAN *Energy Awards* 2025 oleh ASEAN Centre for Energy (ACE).
Achieved four awards:
- Grand Champion – Energy Management in Small and Medium Industries category
- Grand Champion – Enabler Technology category
- Grand Champion – Biofuels category
- First Runner-Up in the Combined Heat and Power (CHP) Generation

At the ASEAN Energy Awards 2025 by the ASEAN Centre for Energy (ACE).

31 Oktober
October

Peraihan Juara 3 Nasional pada Ajang kompetisi ide kreatif BRIN AIDeaNation 2025 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas inovasi unggulan SOLARIS (*Solar AI Inspection System*).
Winning the 3rd National Place in the BRIN AIDeaNation 2025 creative idea competition by the National Research and Innovation Agency (BRIN) for its superior innovation SOLARIS (Solar AI Inspection System).

2 Oktober
October

Peraihan Lestari *Awards* 2025 untuk kategori *Renewable Energy* oleh KG Media.
Winning Lestari Awards 2025 for the Renewable Energy category by KG Media.

24 Oktober
October

Peraihan enam penghargaan pada Ajang Subroto *Awards* 2025 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Achieved six awards at the 2025 Subroto Awards by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).

27 Oktober
October

Peraihan 46 penghargaan pada Ajang HLN *Awards* 2025 oleh PLN (Persero).
Achieved 46 awards at the 2025 HLN Awards by PLN (Persero).

6 November
November

Peraihan penghargaan *Initiative Award* 2025 pada kategori *Education and Future Talent* oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program SIPANDU DESI (Sistem Pengembangan Agrikultur Terpadu Desa Sinergi Energi) pada UP Tanjung Awar-awar.
Winning the 2025 Initiative Award in the Education and Future Talent category was won by the East Java Provincial Government through the SIPANDU DESI (Integrated Village Agricultural Development System for Energy Synergy) program at Tanjung Awar-awar GU.

7 November
November

PLN NP berhasil meraih penghargaan *Asia ESG Positive Impact Award* 2025 untuk kategori *Renewable Energy* melalui program BEST (Besai *Environmental Sustainability and Transformation*) pada PLTA Besai, Lampung.
PLN NP won awards for the Asia ESG Positive Impact Award 2025 for the Renewable Energy category through the BEST (Besai Environmental Sustainability and Transformation) program at the Besai Hydroelectric Power Plant, Lampung.

28 November
November

Peraihan "*Platinum Rank*" pada Ajang *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2025 oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR).
Winning "Platinum Rank" at the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025 event by the National Center for Corporate Reporting (NCCR).

8 Desember
December

Peraihan Juara 1 kategori BUMN Non Go Publik Non Keuangan Klaster Pendapatan di atas Rp5 triliun pada Ajang *Annual Report Award* (ARA) 2024.
Winning 1st Place in the Non-Go Public Non-Financial SOE category with Revenue Cluster above Rp5 trillion at the 2024 Annual Report Award (ARA) Event.

10 Desember
December

Peraihan dua penghargaan berupa:
- UP Bukit Asam – Predikat *Gold* GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*).
- PLN Nusantara Renewables – Predikat *Gold* GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*).

Pada Ajang GENTING *Collaboration Summit* (GCS) 2025 yang diselenggarakan oleh BKKBN.
Achieved two awards:
- Bukit Asam University – Gold GENTING Award (Foster Parent Movement to Prevent Stunting).
- PLN Nusantara Renewables – Gold GENTING Award (Foster Parent Movement to Prevent Stunting).

At the 2025 GENTING Collaboration Summit (GCS) organized by the National Population and Family Planning Board (BKKBN).

Sertifikasi
Certifications

1

2

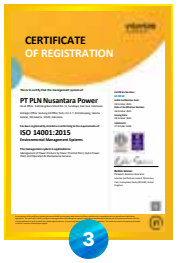

3

4

5

6

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Lingkup Scope	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid Until	Badan Sertifikasi Certifier
1	**ISO 9001:2015** *Quality Management Systems*	Kantor Pusat Head Office 14 Unit Pembangkitan (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar dan Tenayan) 14 Generation Units (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar and Tenayan) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* Maintenance, Repair & Overhaul Unit	28 Oktober 2025 October 28, 2025	27 Oktober 2028 October 27, 2028	PT Intertek
2	**ISO 9001:2015** Sistem Manajemen Mutu Quality Management Systems	Kantor Pusat Head Office 16 Unit Pembangkitan (Bakaru, Kalselteng, Bandar Lampung, Belawan, Gorontalo, Kapuas, Kendari, Minahasa, Kaltimra, Pandan, Pekanbaru, Bukit Asam, Nagan Raya, Punagaya, Sebalang dan Tarahan) 16 Generation Units Kalselteng, Bandar Lampung, Belawan, Gorontalo, Kapuas, Kendari, Minahasa, Kaltimra, Pandan, Pekanbaru, Bukit Asam, Nagan Raya, Punagaya, Sebalang and Tarahan)	27 Desember 2023 December 27, 2023	26 Desember 2026 December 26, 2026	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center
3	**ISO 14001:2015** *Environmental Management System*	Kantor Pusat Head Office 14 Unit Pembangkitan (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar dan Tenayan) 14 Generation Units (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar and Tenayan) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* Maintenance, Repair & Overhaul Unit	28 Oktober 2025 October 28, 2025	27 Oktober 2028 October 27, 2028	PT Intertek

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Lingkup Scope	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid Until	Badan Sertifikasi Certifier
4	**SNI ISO 14001:2015** Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System	Kantor Pusat Head Office 16 Unit Pembangkitan (Bakaru, Kalselteng, Bandar Lampung, Belawan, Gorontalo, Kapuas, Kendari, Minahasa, Kaltimra, Pandan, Pekanbaru, Bukit Asam, Nagan Raya, Punagaya, Sebalang dan Tarahan) 16 Generation Units Kalselteng, Bandar Lampung, Belawan, Gorontalo, Kapuas, Kendari, Minahasa, Kaltimra, Pandan, Pekanbaru, Bukit Asam, Nagan Raya, Punagaya, Sebalang and Tarahan)	27 Desember 2023 December 27, 2023	26 Desember 2026 December 26, 2026	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center
5	**ISO 45001:2018** *Occupational Health and Safety Management Systems*	Kantor Pusat Head Office 14 Unit Pembangkitan (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar dan Tenayan) 14 Generation Units (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar and Tenayan) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* Maintenance, Repair & Overhaul Unit	28 Oktober 2025 October 28, 2025	27 Oktober 2028 October 27, 2028	PT Intertek
6	**SNI ISO 45001:2018** Sistem Manajemen K3 Occupational Health and Safety Management Systems	Kantor Pusat Head Office 16 Unit Pembangkitan (Bakaru, Kalselteng, Bandar Lampung, Belawan, Gorontalo, Kapuas, Kendari, Minahasa, Kaltimra, Pandan, Pekanbaru, Bukit Asam, Nagan Raya, Punagaya, Sebalang dan Tarahan) 16 Generation Units Kalselteng, Bandar Lampung, Belawan, Gorontalo, Kapuas, Kendari, Minahasa, Kaltimra, Pandan, Pekanbaru, Bukit Asam, Nagan Raya, Punagaya, Sebalang and Tarahan)	27 Desember 2023 December 27, 2023	26 Desember 2026 December 26, 2026	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center
7	**ISO 55001:2014** *Asset Management Systems*	Kantor Pusat Head Office 14 Unit Pembangkitan (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar dan Tenayan) 14 Generation Units (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar and Tenayan) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* Maintenance, Repair & Overhaul Unit	16 Oktober 2025 October 16, 2025	15 Oktober 2028 October 15, 2028	PT Intertek
8	**SNI ISO 55001:2014** Sistem Manajemen Aset Asset Management System	Kantor Pusat Head Office 2 Unit Pembangkitan (Pekanbaru dan Punagaya) 2 Generation Units (Pekanbaru and Punagaya)	10 September 2024 September 10, 2024	9 September 2027 September 9, 2027	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center

7

8

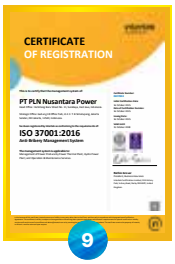

9

10

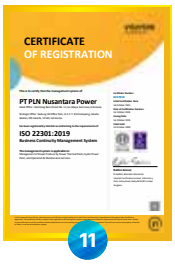

11

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Lingkup Scope	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid Until	Badan Sertifikasi Certifier
9	**ISO 37001:2016** *Anti-Bribery Management System*	Kantor Pusat Head Office 14 Unit Pembangkitan (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar dan Tenayan) 14 Generation Units (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar and Tenayan) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* Maintenance, Repair & Overhaul Unit	16 Oktober 2025 October 16, 2025	15 Oktober 2028 October 15, 2028	PT Intertek
10	**SNI ISO 55001:2014** Sistem Manajemen Aset Asset Management System	Kantor Pusat Head Office UP Pekanbaru Pekanbaru GU	10 September 2024 September 10, 2024	9 September 2027 September 9, 2027	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center
11	**ISO 22301:2019** *Business Continuity Management System*	Kantor Pusat Head Office 14 Unit Pembangkitan (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar dan Tenayan) 14 Generation Units (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar and Tenayan) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* Maintenance, Repair & Overhaul Unit	16 Oktober 2025 October 16, 2025	15 Oktober 2028 October 15, 2028	PT Intertek
12	**ISO 50001:2018** *Energy Management System*	Kantor Pusat Head Office 14 Unit Pembangkitan (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar dan Tenayan) 14 Generation Units (Arun, Brantas, Cirata, Gresik, Indramayu, Kaltim Teluk, Muara Karang, Muara Tawar, Pacitan, Paiton, Pulang Pisau, Rembang, Tanjung Awar-Awar and Tenayan) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* Maintenance, Repair & Overhaul Unit	24 Oktober 2025 October 24, 2025	23 Oktober 2028 October 23, 2028	PT Intertek

12

13

14

15

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Lingkup Scope	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid Until	Badan Sertifikasi Certifier
13	**ISO/IEC 27001:2022** *Information Security Management Systems*	Kantor Pusat Head Office	28 Oktober 2025 October 28, 2025	27 Oktober 2028 October 27, 2028	PT Intertek
14	**ISO/IEC 20000-1:2018** *IT Service Management*	Kantor Pusat Head Office	17 November 2025 November 17, 2025	16 November 2028 November 16, 2028	PT Intertek
15	**SNI ISO/IEC 17025:2017** Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi General Requirements for Competency of Testing and Calibration Laboratories	UP Punagaya Punagaya GU	21 Juli 2021 July 21, 2021	20 Juli 2026 July 20, 2026	Komite Akreditasi Nasional (KAN) National Accreditation Committee (KAN)
		UP Indramayu Indramayu GU	8 November 2021 November 8, 2021	24 Oktober 2026 October 24, 2026	
		UP Gresik Gresik GU	25 Oktober 2021 October 25, 2021	24 Oktober 2026 October 24, 2026	
		UP Pacitan Pacitan GU	22 Desember 2021 December 22, 2021	21 Desember 2026 December 21, 2026	
		UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU	19 Januari 2022 January 19, 2022	4 Desember 2026 December 4, 2026	
		UP Tenayan Tenayan GU	19 Januari 2022 January 19, 2022	18 Januari 2027 January 18, 2027	
		UP Nagan Raya Nagan Raya GU	16 Maret 2022 March 16, 2022	15 Maret 2027 March 15, 2027	
		UP Muara Karang Muara Karang GU	30 April 2022 April 30, 2022	29 April 2027 April 29, 2027	
		UP Muara Tawar Muara Tawar GU	4 Juli 2022 July 4, 2022	27 Juni 2027 June 27, 2027	
		UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU	5 Februari 2025 February 5, 2025	2 Februari 2030 February 2, 2030	
		Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* Maintenance, Repair & Overhaul Unit	25 September 2024 September 25, 2024	1 September 2029 September 1, 2029	

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Data Highlights

Posisi Keuangan
Financial Position

(Rp juta) (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025
Aset Lancar Current Assets	32.727.109	34.548.253	48.883.318	56.744.655	**63.930.282**
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	297.727.450	298.045.438	294.577.850	298.622.579	**293.740.975**
Jumlah Aset Total Assets	**330.454.559**	**332.593.691**	**343.461.168**	**355.367.234**	**357.671.257**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	12.841.591	9.914.987	11.101.047	13.372.162	**13.071.204**
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	15.193.664	20.848.901	23.499.297	27.351.078	**29.445.572**
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**28.035.255**	**30.763.888**	**34.600.344**	**40.723.240**	**42.516.776**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**302.419.304**	**301.829.803**	**308.860.824**	**314.643.994**	**315.154.481**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas **Total Liabilities and Equity**	**330.454.559**	**332.593.691**	**343.461.168**	**355.367.234**	**357.671.257**
Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama Investment in Associates/Joint Ventures	12.390.846	16.114.319	17.494.224	19.841.653	**21.910.592**

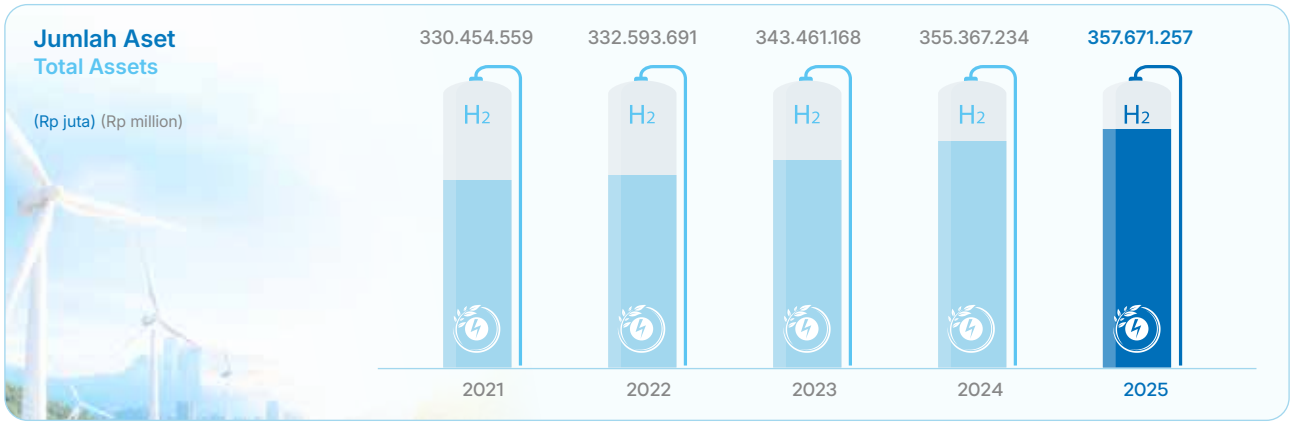

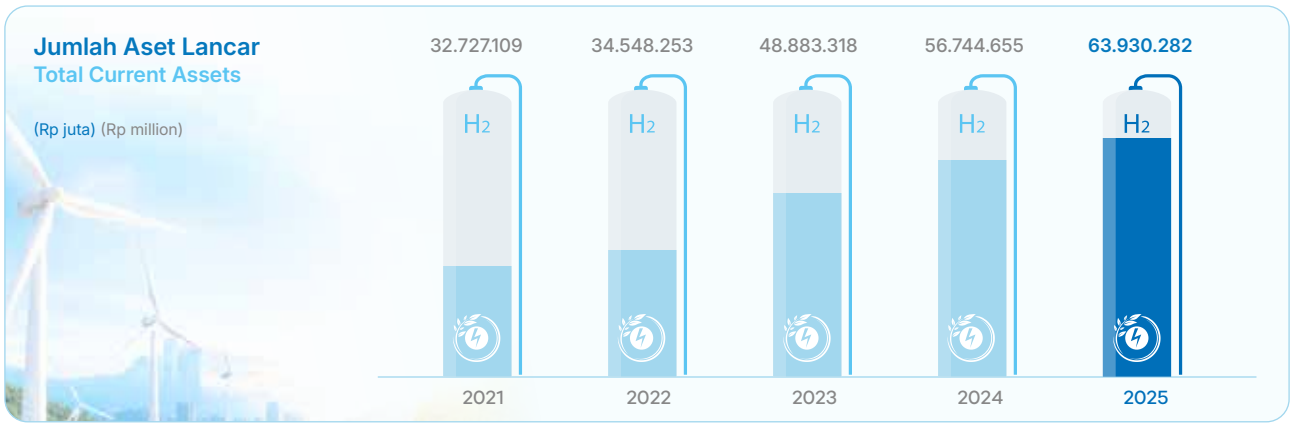

Jumlah Aset Tidak Lancar
Total Non-Current Assets

(Rp juta) (Rp million)

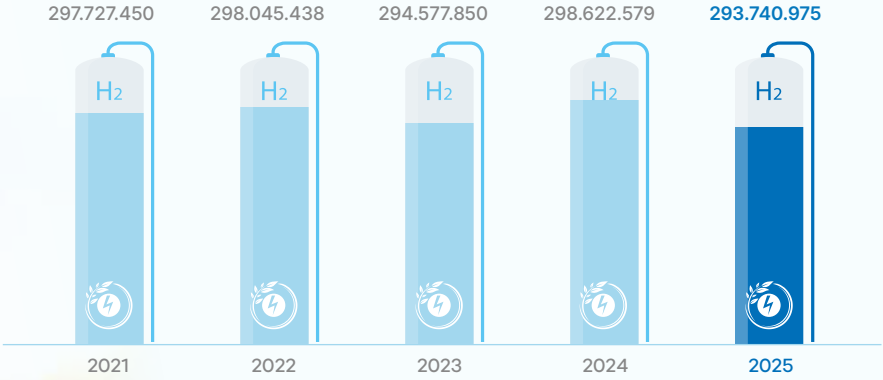

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

(Rp juta) (Rp million)

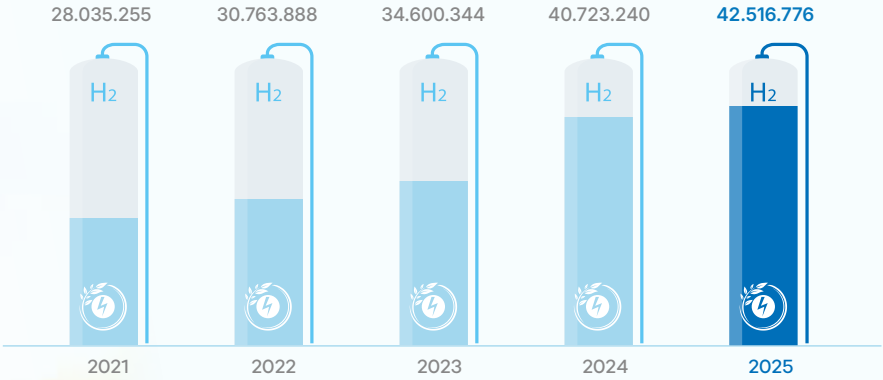

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Total Current Liabilities

(Rp juta) (Rp million)

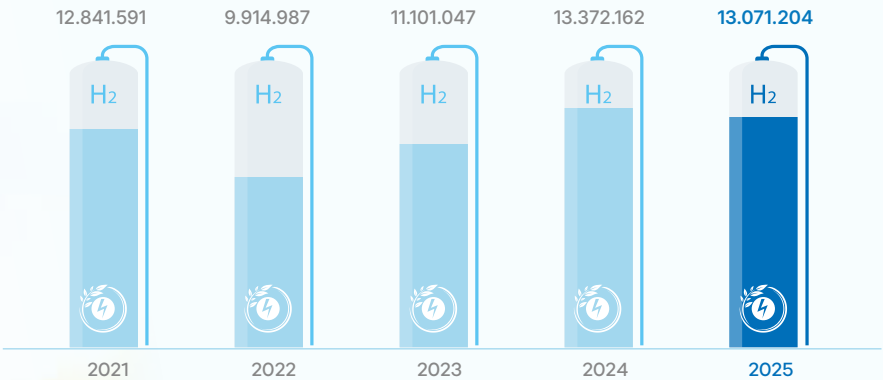

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
Total Non-Current Liabilities

(Rp juta) (Rp million)

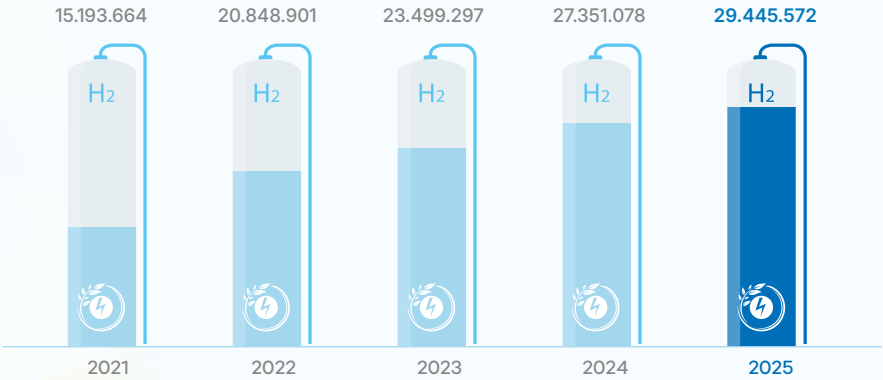

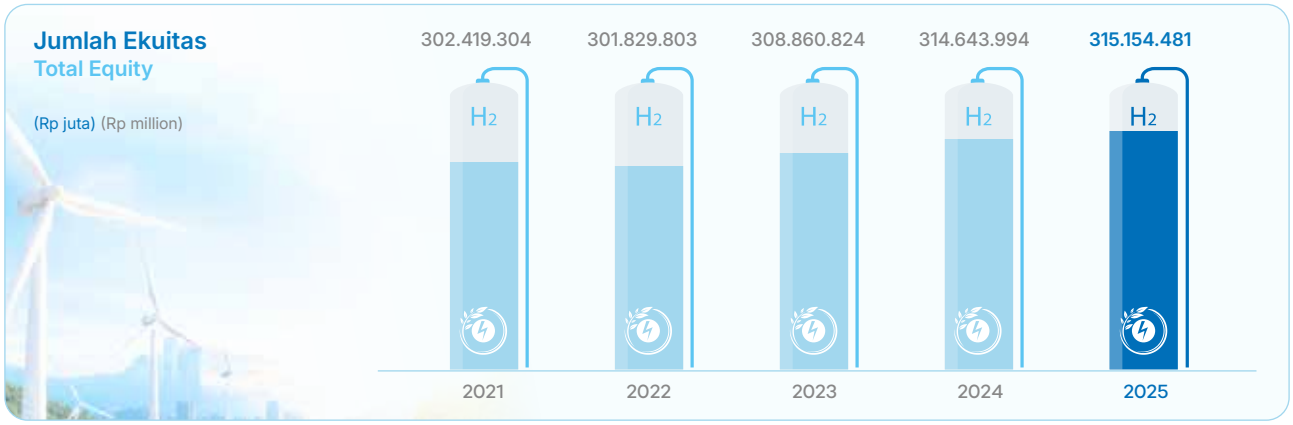

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(Rp juta) (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan Usaha Revenue	29.508.134	76.006.693	90.375.607	91.713.159	**98.893.003**
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	24.541.378	73.690.178	87.851.149	88.321.254	**94.971.854**
Pendapatan Usaha Lainnya Other Operating Revenues	4.966.756	2.316.515	2.524.458	3.391.905	**3.921.149**
Beban Usaha Operating Expense	(25.101.143)	(69.373.751)	(76.008.286)	(77.972.760)	**(84.192.736)**
Laba Usaha Operating Income	4.406.991	6.632.942	14.367.321	13.740.399	**14.700.267**
Pos Keuangan dan Lain-lain (Bersih) Financial Items and Others (Net)	2.785.049	1.877.655	2.026.198	2.091.552	**1.508.100**
Beban Pajak Tax Expense	(1.371.852)	(3.039.879)	(2.725.866)	(2.922.370)	**(3.150.723)**
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**5.820.188**	**5.470.718**	**13.667.653**	**12.909.581**	**13.057.644**
Penghasilan (kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income (Loss) for the Year after Tax	(2.301.389)	446.746	(86.198)	6.525.719	**322.868**
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan **Comprehensive Income for the Year**	**3.518.799**	**5.917.464**	**13.581.455**	**19.435.300**	**13.380.512**
Laba Tahun Berjalan Diatrubusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	5.810.033	5.435.649	13.643.598	12.865.251	**12.984.152**
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	10.155	35.069	24.055	44.330	**73.492**
Penghasilan Komprehensif Diatribusikan kepada: Comprehensive Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	5.810.033	5.435.649	13.643.598	12.865.251	**13.301.055**
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	10.155	35.069	24.055	44.330	**79.457**
Laba Per Saham Dasar (Rp) Basic Earnings per Share (Rp)	970	906	44	42	**42**

Jumlah Pendapatan Usaha
Total Revenue

(Rp juta) (Rp million)

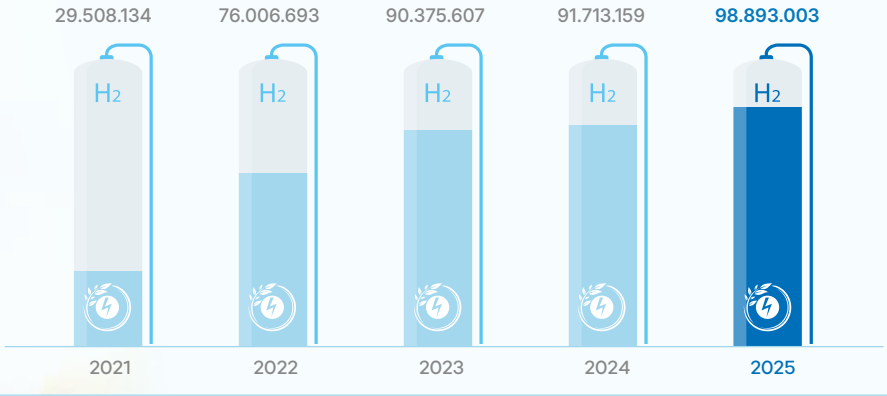

Jumlah Beban Usaha
Total Operating Expense

(Rp juta) (Rp million)

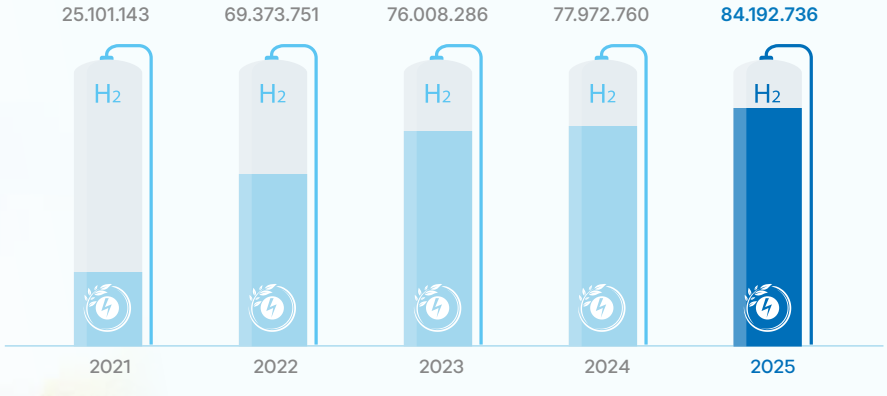

Jumlah Laba Usaha
Total Operating Income

(Rp juta) (Rp million)

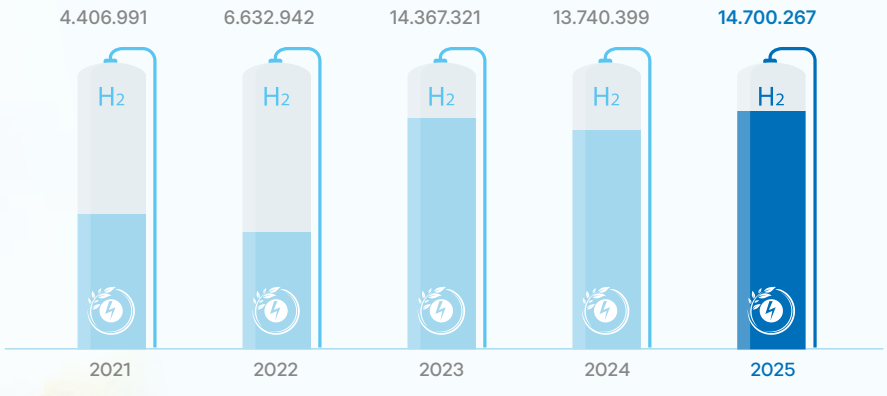

Jumlah Laba Tahun Berjalan
Total Profit for the Year

(Rp juta) (Rp million)

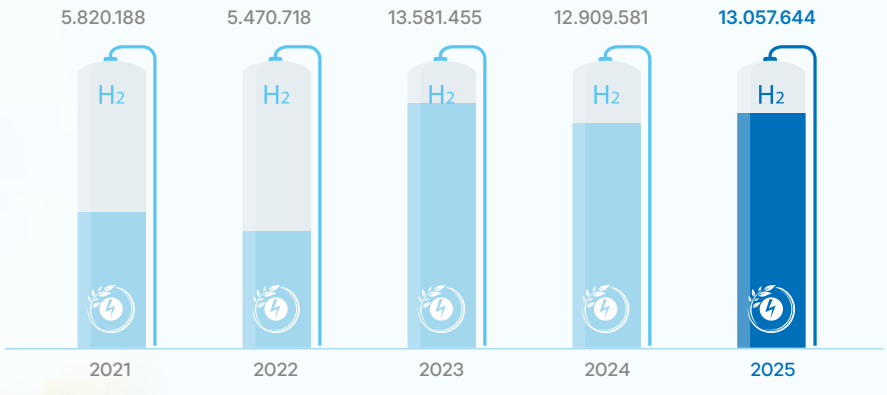

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Comprehensive Income for the Year

(Rp juta) (Rp million)

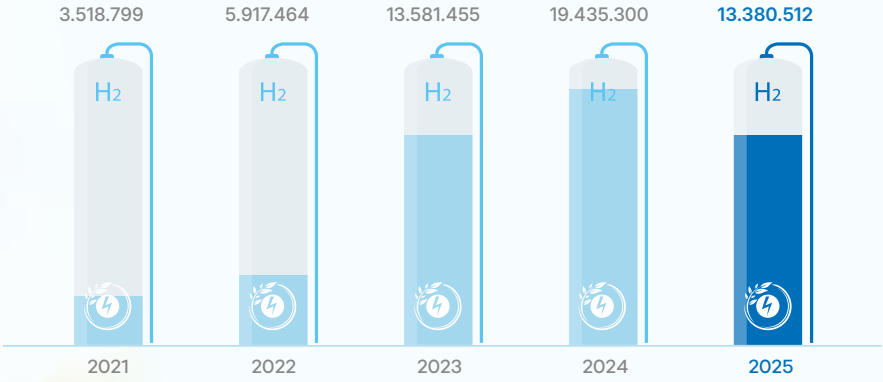

Arus Kas
Cash Flows

(Rp juta) (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	4.323.208	5.799.978	2.059.188	3.561.925	**2.859.978**
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(334.356)	(3.986.039)	(3.416.403)	(2.460.697)	**(3.577.173)**
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by (Used In) Financing Activities	(167.500)	(296.994)	(748.644)	(403.577)	**(700.503)**
Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	3.821.352	1.516.945	(2.105.859)	697.651	**(1.417.698)**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	3.511.113	7.343.968	8.958.158	6.846.288	**7.544.144**
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of Changes in Foreign Currency	11.503	97.245	(6.011)	205	**(187)**
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	7.343.968	8.958.158	6.846.288	7.544.144	**6.126.259**

Rasio Keuangan
Financial Ratios

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Rasio Laba terhadap Aset (%) Retun on Assets (%)	1,76	1,64	3,98	3,63	**3,65**
Rasio Laba terhadap Ekuitas (%) Return on Equity (%)	1,92	1,81	4,43	4,10	**4,14**
Rasio Laba terhadap Investasi (%) Retun on Investment (%)	6,19	6,48	7,59	33,88	**7,31**
Rasio Laba terhadap Pendapatan (%) Profit to Revenue Ratio (%)	19,72	7,20	15,12	14,08	**13,20**
Rasio Pertumbuhan Penjualan (%) Sales Growth Ratio (%)	(3,04)	157,58	18,90	1,48	**7,83**
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	254,85	348,44	440,35	424,35	**489,09**
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	49,85	84,49	57,99	56,42	**46,87**
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	229,17	301,12	401,18	388,96	**458,06**
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio					
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	9,27	10,19	11,20	12,94	**13,49**
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%) Debt to Asset Ratio (%)	8,48	9,25	10,07	11,46	**11,89**
Rasio Aktivitas Activity Ratio					
Collection Period (hari) Collection Period (day)	292	284	114	156	**175**
Perputaran Total Aset (kali) Total Assets Turnover (times)	0,17	0,16	0,27	0,26	**0,28**

Rasio Laba terhadap Aset
Retun on Assets

(%)

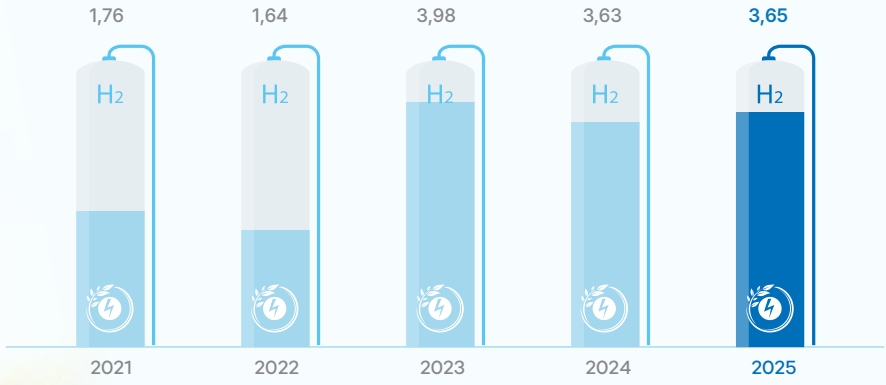

Rasio Laba terhadap Ekuitas
Return on Equity

(%)

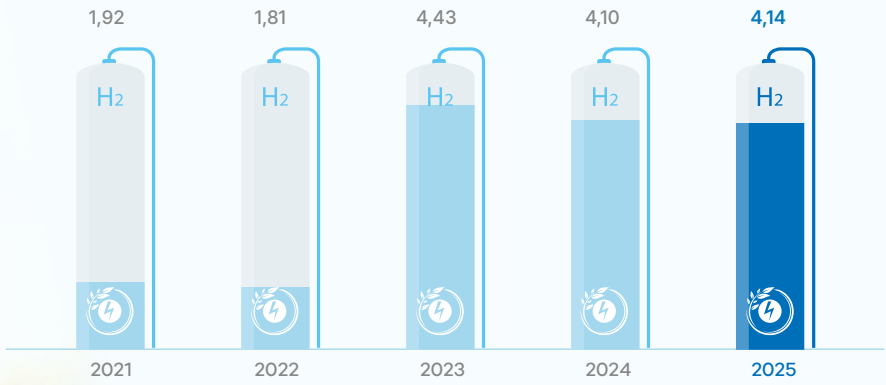

Rasio Laba terhadap Pendapatan
Profit to Revenue Ratio

(%)

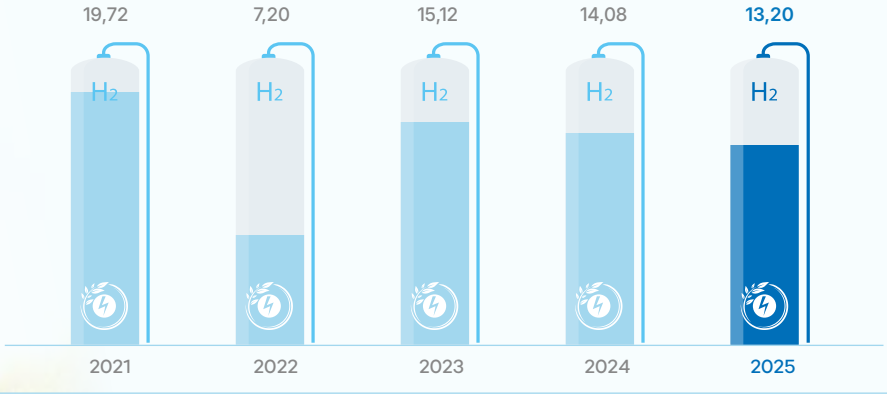

Rasio Lancar
Current Ratio

(%)

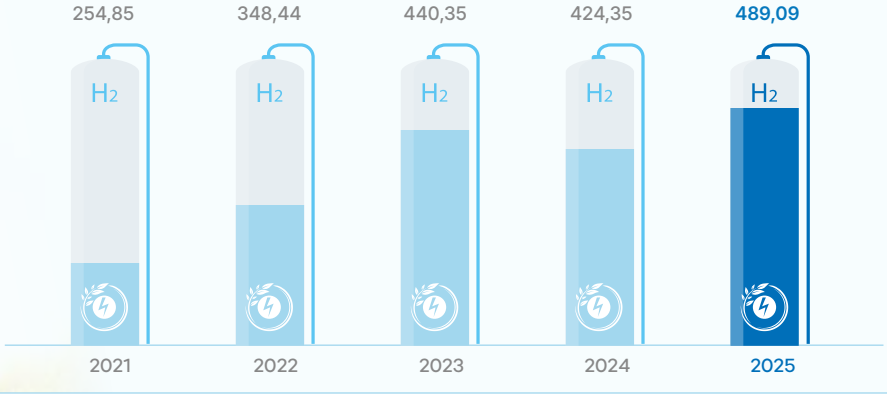

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas
Debt to Equity Ratio

(%)

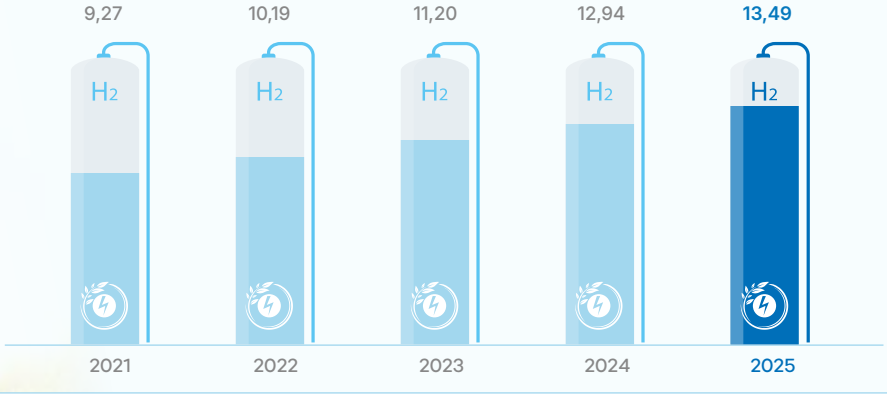

Rasio Liabilitas terhadap Aset
Debt to Assets Ratio

(%)

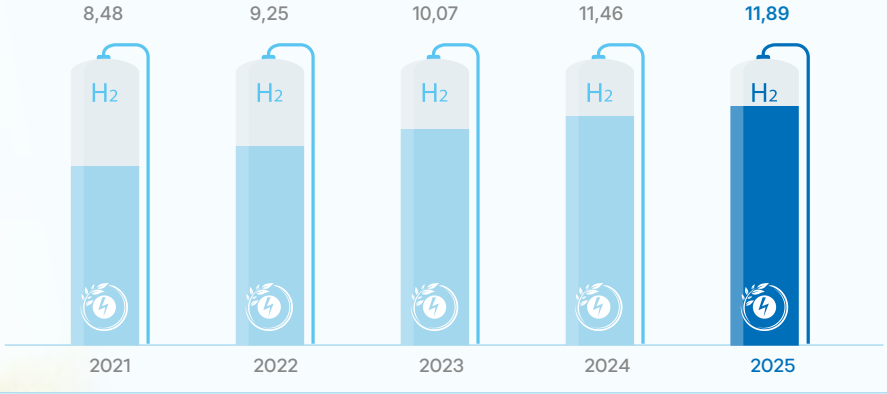

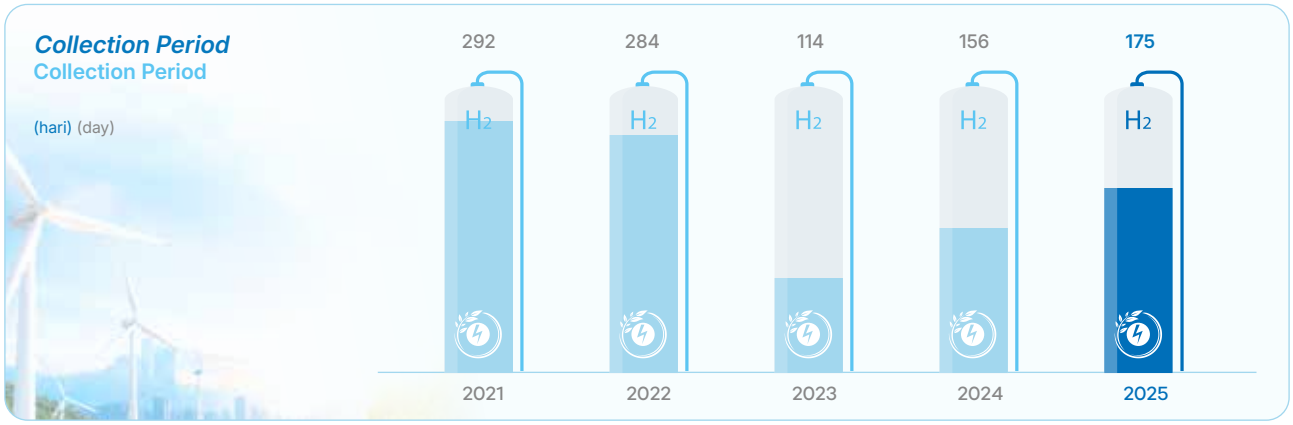

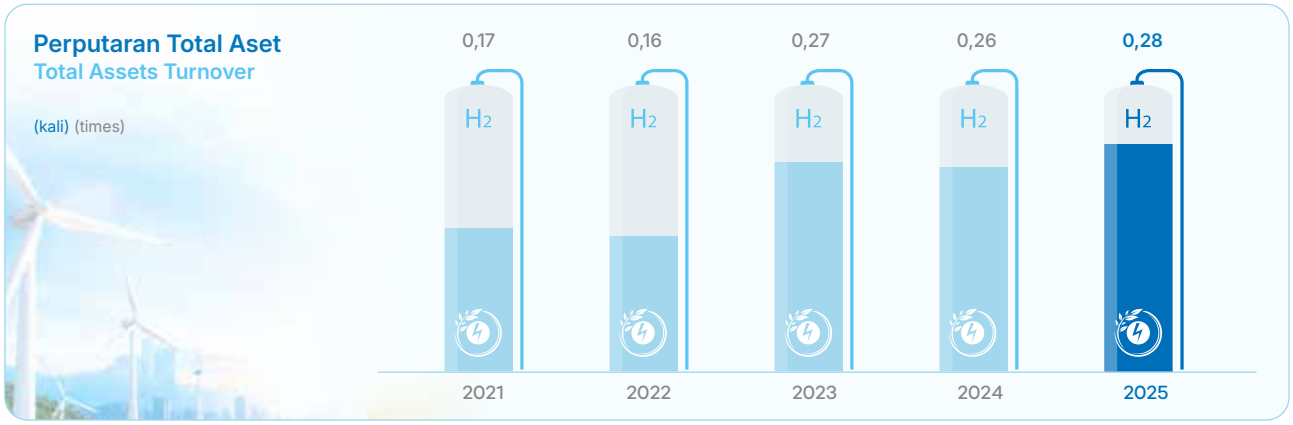

Ikhtisar Kinerja Operasional
Operational Performance Highlights

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025
Produksi Tenaga Listrik (GWh) Electricity Production (GWh)	20.641	17.064	66.846	67.095	**66.919**
Penjualan Tenaga Listrik (GWh) Sales of Electricity (GWh)	19.848	16.379	63.179	63.415	**63.286**
***Equivalent Availability Factor*/EAF (%)**					
EAF Pembangkit Batubara Coal Power Plant EAF	95,12	91,08	84,85	83,48	**86,86**
EAF Pembangkit Non Batubara Non-Coal Power Plant EAF	95,21	95,18	94,73	94,34	**94,34**
***Equivalent Forced Outage Rate*/EFOR (%)**					
EFOR Pembangkit Batubara Coal Power Plant EFOR	0,92	0,47	3,15	2,88	**1,92**
EFOR Pembangkit Non Batubara Non-Coal Power Plant EFOR	3,51	0,41	2,93	2,77	**2,44**
***Net Plant Heat Rate*/NPHR (kCal/kWh)**					
NPHR Pembangkit Batubara Coal Power Plant NPHR	2.749,89	2.797,22	3.064,73	3.092,48	**3.196,43**
NPHR Pembangkit Non Batubara Non-Coal Power Plant NPHR	2.361,72	2.284,33	2.243,64	2.294,82	**2.266,30**

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025
***Sudden Outage Frequency*/SdOF (kali/unit)** (kali/unit)					
SdOF Pembangkit Batubara Coal Power Plant SdOF	2,50	1,00	2,81	2,93	**3,02**
SdOF Pembangkit Non Batubara Non-Coal Power Plant SdOF	0,88	0,61	1,30	1,60	**0,03**
***Scheduled Outage Factor*/SOF (%)**					
SOF Pembangkit Batubara Coal Power Plant SOF	3,88	8,47	11,71	13,47	**10,90**
SOF Pembangkit Non Batubara Non-Coal Power Plant SOF	2,57	4,35	3,53	4,01	**4,22**
***Net Capacity Factor*/NCF (%)**					
NCF Pembangkit Batubara Coal Power Plant NCF	80,80	68,15	70,18	68,75	**69,82**
NCF Pembangkit Non Batubara Non-Coal Power Plant NCF	28,12	28,02	32,71	27,97	**32,02**
***Specific Fuel Consumption*/SFC**					
SFC Batubara (kg/kWh) Coal SFC (kg/kWh)	0,5825	0,6210	0,6617	0,6730	**0,7047**
SFC Gas (MMBTU/kWh) Gas SFC (MMBTU/kWh)	0,0086	0,0082	0,0086	0,0087	**0,0087**
SFC Bahan Bakar Minyak (liter/kWh) Fuel SFC (liter/kWh)	0,2615	0,2336	0,2855	0,2917	**0,2714**
Jumlah Kapasitas Terpasang (MW) Total Installed Capacity (MW)	7.060	7.210	18.573	18.333	**18.304**
Jumlah Daya Mampu Neto (MW) Total Net Dependable Capacity (MW)	6.455	6.605	15.856	15.920	**16.157**
Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees (person)	3.071	3.034	4.985	5.077	**4.954**
Pencapaian *Key Performance Indicator*/KPI (skor) Achievement of Key Performance Indicator/KPI (score)	96,13	102,88	103,51	106,27	**105,66**

Produksi Tenaga Listrik
Electricity Production

(GWh)

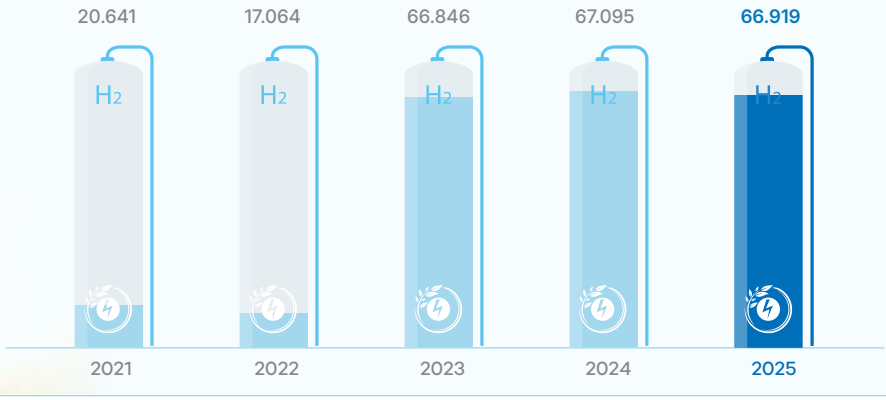

Penjualan Tenaga Listrik
Sales of Electricity

(GWh)

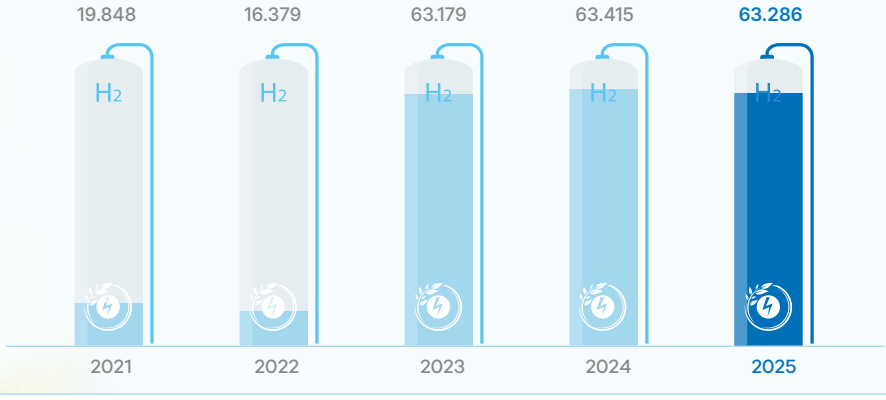

EAF Pembangkit Batubara
Coal Power Plant EAF

(%)

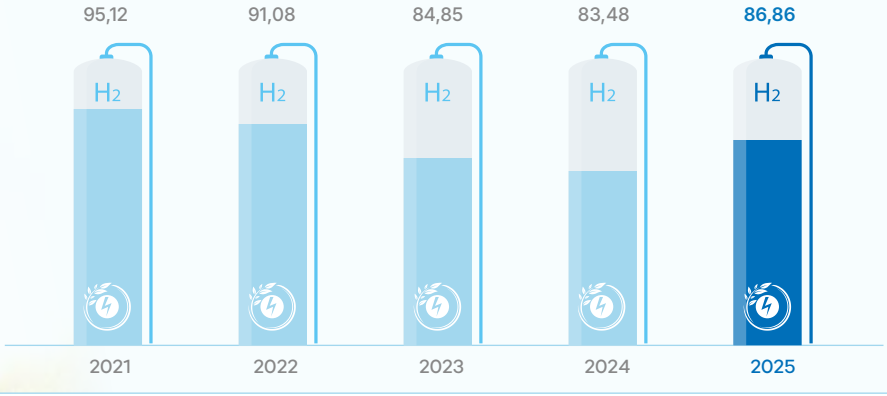

EAF Pembangkit Non Batubara
Non-Coal Power Plant EAF

(%)

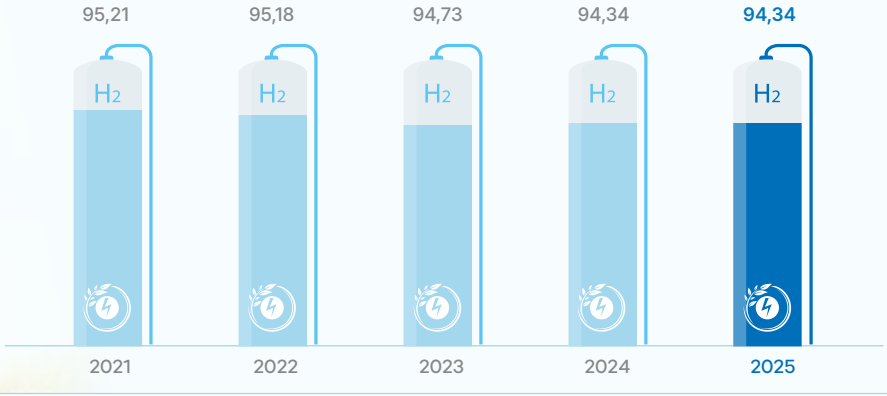

EFOR Pembangkit Batubara
Coal Power Plant EFOR

(%)

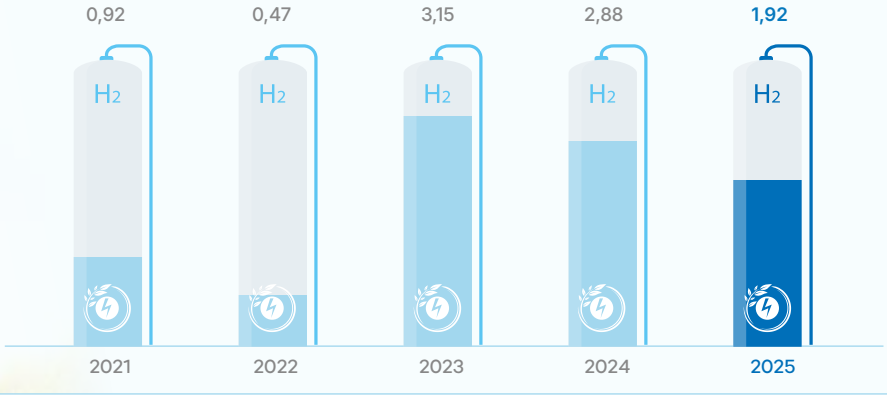

EFOR Pembangkit Non Batubara
Non-Coal Power Plant EFOR

(%)

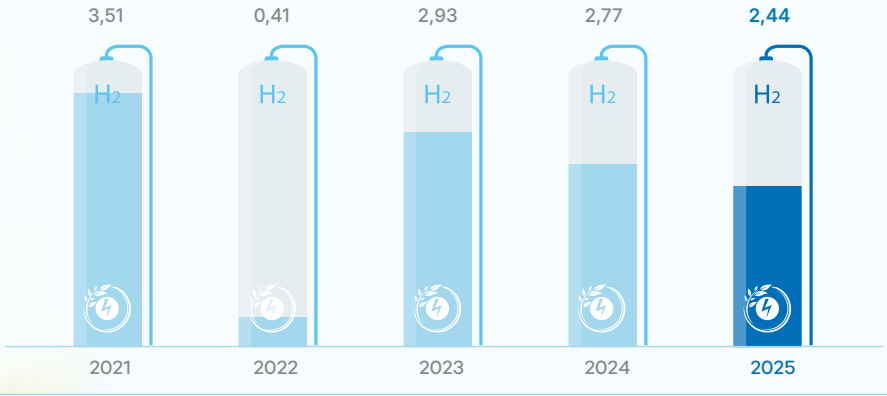

SdOF Pembangkit Batubara
Coal Power Plant SdOF

(%)

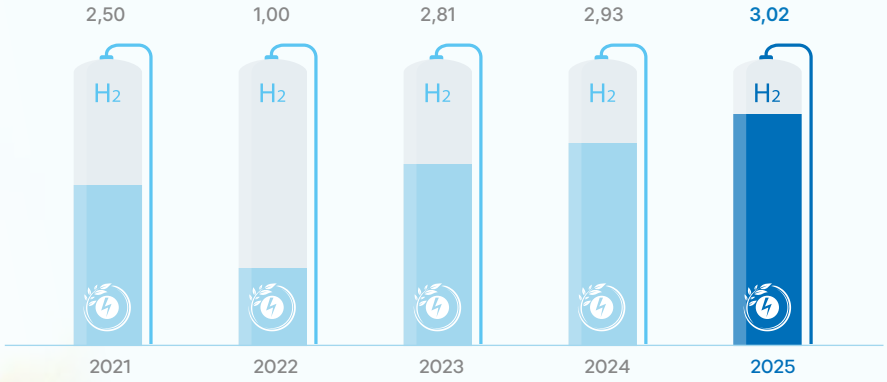

SdOF Pembangkit Non Batubara
Non-Coal Power Plant SdOF

(%)

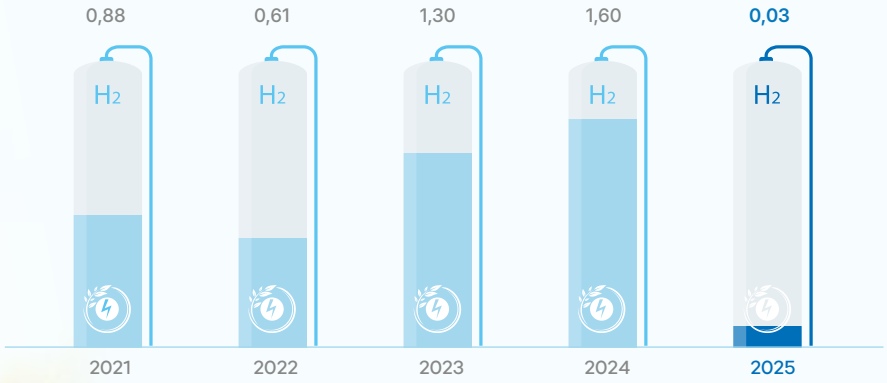

Jumlah Karyawan
Number of Employees

(orang) (person)

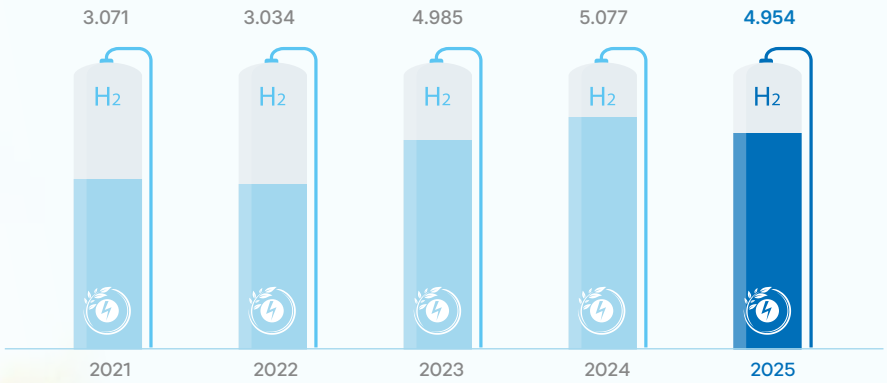

Pencapaian *Key Performance Indicator*/KPI
Achievement of Key Performance Indicator/KPI

(skor) (score)

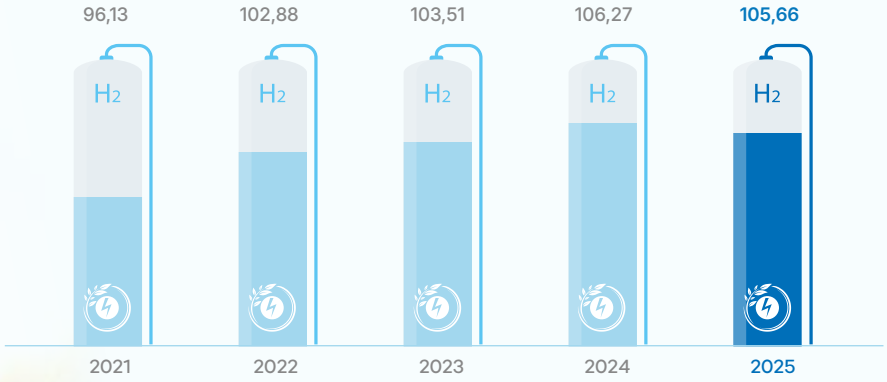

Ikhtisar Saham
Share Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2025, PLN NP tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Until the end of 2025, PLN NP did not conduct share trading. Therefore, there is no information on the highest share price, lowest share price, and closing share price as well as the volume of shares traded.

Ikhtisar Obligasi
Bond Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2025, PLN NP tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2025, PLN NP did not issue bonds, sukuk, and convertible bonds. Therefore, there is no information related to the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest rates/yields, maturity dates, and bonds/sukuk ratings.

Aksi Korporasi
Corporate Actions

Pada tahun 2025, PLN NP tidak melakukan aksi korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

In 2025, PLN NP did not undertake any Corporate Actions related to activities affecting the number of outstanding shares, including stock splits, stock mergers, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares.

Peristiwa Penting 2025
Significant Events of 2025

20 Januari
January

Peresmian PLTS IKN berkapasitas 50 MWac yang digarap oleh PLN NP bersama Sembcorp yang berlokasi di Penajam Paser Utara.
The inauguration of the 50 MWac IKN SPP, developed by PLN NP and Sembcorp, located in North Penajam Paser.

8 April
April

Penandatanganan MoU antara PLN bersama Masdar untuk mengeksplorasi potensi pengembangan proyek floating solar di Waduk Jati Gede, dan penandatanganan *Principles of Agreement* untuk menjajaki perluasan kapasitas proyek PLTS Terapung Cirata yang dikembangkan oleh PLN NP.
The signing of a MoU between PLN and Masdar to explore the potential for developing a floating solar project at Jati Gede Reservoir, and the signing of a Principles of Agreement to explore the expansion of the Cirata Floating SPP project developed by PLN NP.

20 Januari
January

Peresmian PLTA Asahan 3 sebagai bentuk kolaborasi antara PT PLN (Persero) dengan PLN NP yang menjadi penyedia energi bersih dan berkelanjutan di wilayah Sumatera.
The inauguration of the Asahan 3 HPP marks a collaboration between PT PLN (Persero) and PLN NP, which serves as a provider of clean and sustainable energy in the Sumatera region.

15-17 April
April

PLN NP berpartisipasi dalam GHES 2025 dengan menampilkan empat inovasi hidrogen—HFCG, *Hydrogen Refueling Station*, mobil H-E Nusantara, dan teknologi *Green Hydrogen*—guna memperkuat peran Indonesia dalam transisi energi berkelanjutan.
PLN Nusantara Power participated in GHES 2025 by showcasing four hydrogen innovations—HFCG, a hydrogen refueling station, the H-E Nusantara vehicle, and green hydrogen technology—to strengthen Indonesia's role in the sustainable energy transition.

24 Februari
February

Pelaksanaan uji coba pembangkit berbasis hidrogen di Gili Ketapang, Jawa Timur dengan memanfaatkan *Hydrogen Fuel Cell Generator* (HFCG) 100 kVA dari Muara Karang.
The execution of a pilot project for a hydrogen-based power plant in Gili Ketapang, East Java, utilizing a 100 kVA Hydrogen Fuel Cell Generator (HFCG) from Muara Karang.

21 April
April

Penandatanganan MoU antara PLN NP dengan Vertas Development A/S untuk mengeksplorasi potensi pengembangan proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.
Signing of a MoU between PLN NP and Vertas Development A/S to explore the potential for developing NRE-based power plant projects, specifically Wind Power Plants.

28 April
April

PLN NP menegaskan komitmennya pada ekonomi hijau melalui Seminar Bisnis Karbon di Bursa Efek Indonesia yang dihadiri lebih dari 40 perusahaan, sebagai forum untuk membahas potensi pasar karbon, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan mendorong percepatan bisnis karbon di Indonesia.

PLN Nusantara Power reaffirmed its commitment to the green economy through a Carbon Business Seminar held at the Indonesia Stock Exchange, attended by more than 40 companies, as a forum to discuss the potential of the carbon market, strengthen cross-sector collaboration, and accelerate the growth of the carbon business in Indonesia.

30 Mei
May

Pelaksanaan aksi WeNanam yakni gerakan penanaman 10.000 pohon di Hulu Kali Ciliwung dengan berkolaborasi bersama Kementerian Kehutanan dan WWF (World Wide Fund for Nature)-Indonesia.

The WeNanam initiative, a campaign to plant 10,000 trees in the upper reaches of the Ciliwung River, was conducted in collaboration with the Ministry of Forestry and WWF (World Wide Fund for Nature)-Indonesia.

1 Mei
May

Serah terima Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 2 Sumbagut dari PT Sumberdaya Sewatama kepada PLN NP Unit Pembangkitan Arun.

Handover of the Sumbagut 2 GEPP from PT Sumberdaya Sewatama to PLN NP Arun Generation Unit.

12 Juni
June

Pelaksanaan Aksi *Zero Waste Warriors* di Kampung Nelayan Mandala Jaya Bekasi sebagai kolaborasi antara PLN NP dan Kementerian Lingkungan Hidup.

The Zero Waste Warriors initiative in the Mandala Jaya Fishing Village in Bekasi, a collaboration between PLN NP and the Ministry of Environment.

13 Mei
May

Pelaksanaan kegiatan penanaman 1500 bibit pohon dan pelepasliaran 3000 benih ikan, serta penyerahan pupuk FABA dari Unit Pembangkitan Pacitan di Kawasan Telaga Madirda, Jawa Tengah oleh PLN NP bersama Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Bupati Karanganyar.

Planted 1,500 tree seedlings and released 3,000 fish fry, as well as handed over FABA fertilizer from the Pacitan Generation Unit in the Telaga Madirda area, Central Java, by PLN NP together with the Minister of Environment of the Republic of Indonesia and the Regent of Karanganyar.

15 Juli
July

Pelaksanaan Pameran Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas yang berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan & Perikanan sebagai wadah pengenalan berbagai program PLN NP yang mendukung perekonomian laut.

The "Marine Spatial Planning Exhibition for the Blue Economy Toward a Golden Indonesia," held in collaboration with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, serves as a platform to showcase various PLN NP programs that support the marine economy.

16 Juli
July

PLN NP bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan Aksi Hijau Penanaman Pohon di Arboretum Sumber Brantas.
PLN NP, together with the Minister of Environment and Forestry, held a Green Action tree-planting event at the Sumber Brantas Arboretum.

15 Agustus
August

PLN Nusantara Power mendukung transisi energi bersih menuju *Net Zero Emission* melalui peluncuran BioCNG pertama di Indonesia pada Gas Turbin PLTGU Belawan, yang memanfaatkan limbah kelapa sawit dari Sumatera Utara sebagai bahan bakar alternatif pembangkit listrik.
PLN Nusantara Power reinforces its commitment to the clean energy transition toward Net Zero Emissions through the launch of Indonesia's first BioCNG project at the Belawan Combined Cycle Power Plant (PLTGU), utilizing palm oil waste from North Sumatra as an alternative fuel source for power generation.

17 Juli
July

Penandatanganan MoU serah terima jasa pengelolaan operasi dan pemeliharaan (O&M) PLTMG Nias 25 MW kepada PLN NP oleh PT Tripatra Engineers and Constructors dan PT PLN Indonesia Power Services.
Signing of a MoU for the transfer of operation and maintenance (O&M) services for the 25 MW Nias GEPP to PLN NP by PT Tripatra Engineers and Constructors and PT PLN Indonesia Power Services.

22 September
September

Penyelenggaraan NBX 2025 dan penandatanganan 5 perjanjian kerja sama untuk memperkuat kolaborasi dan ekosistem transisi energi di Indonesia dengan kegiatan utama yakni *Supplier Gathering* serta Forum Diaspora yang melibatkan direksi, vendor, dan karyawan PLN NP.
Organized the NBX 2025 and signed 5 cooperation agreements to strengthen collaboration and the energy transition ecosystem in Indonesia, with key events including the Supplier Gathering and the Diaspora Forum, which brought together the Board of Directors, vendors, and employees of PLN NP.

24 Juli
July

Penandatanganan nota kesepahaman oleh PLN NP dan PT Thorcon Power Indonesia dalam eksplorasi kerja sama di bidang pengembangan dan perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
The signing of a memorandum of understanding between PLN NP and PT Thorcon Power Indonesia to explore cooperation in the development and planning of nuclear power plants in the Bangka Belitung Islands Province.

2 Oktober
October

Pelaksanaan Nusantaraversary *Green Fest* yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup, berisi rangkaian aksi penanaman mangrove dan penyerahan donasi bibit mangrove.
The Nusantaraversary Green Fest, attended by the Minister of the Environment, featured a series of mangrove planting activities and the donation of mangrove seedlings.

10 Oktober
October

Penandatanganan kolaborasi strategis dengan BKKBN di 3 Unit Pembangkitan di Jawa Barat untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui program TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak).
Signing of a strategic partnership with BKKBN at 3 Generation Units in West Java to strengthen family resilience through the TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak) program.

21 Oktober
October

Peresmian Unit Produksi Biomassa Bandar Lampung sebagai pabrik biomassa pertama di Indonesia.
The inauguration of the Bandar Lampung Biomass Production Unit as Indonesia's first biomass plant.

2 Desember
December

Pengerahan helikopter untuk menembus wilayah terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara dan Aceh.
Deployment of helicopters to reach areas cut off by flash floods and landslides in North Sumatera and Aceh.

15 Desember
December

Penyerahan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Aceh.
Distribution of aid to communities affected by floods and landslides in several areas of Aceh.

19 November
November

PLN NP memperkenalkan inovasi BioCNG pertama di Indonesia sebagai bahan bakar alternatif pembangkit listrik berbasis gas untuk mendukung pengurangan emisi karbon, diversifikasi sumber energi bersih, serta percepatan transisi menuju sistem ketenagalistrikan yang lebih berkelanjutan.
PLN NP introduced Indonesia's first BioCNG innovation as an alternative fuel for gas-fired power plants, supporting carbon emission reduction, clean energy diversification, and the acceleration of the transition toward a more sustainable power system.

5 Desember
December

Penanaman 3000 pohon di Hutan Organik Megamendung yang bekerja sama dengan Yayasan Hutan Organik guna merehabilitasi lahan kritis melalui program reforestasi berkelanjutan.
Planted 3,000 trees in the Megamendung Organic Forest in collaboration with the Organic Forest Foundation to rehabilitate degraded land through a sustainable reforestation program.

20 November
November

Penandatanganan 3 perjanjian kerja sama strategis di *Electricity Connect* 2025 sebagai kontribusi nyata Perusahaan dalam membangun sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Signing of 3 strategic cooperation agreements at Electricity Connect 2025 as the Company's tangible contribution to building a cleaner and more sustainable energy system.

8 Desember
December

Penyaluran bantuan kepada warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh sebagai komitmen perusahaan terhadap kemanusiaan.
Distributed aid to residents affected by floods and landslides in the Aceh region reflects the Company's commitment to humanitarian causes.

15 Desember
December

Peresmian *Hydrogen Refueling Station* 2.0 Unit Pembangkitan Rembang sebagai komitmen PLN NP dalam menguatkan transisi energi nasional.
The inauguration of Hydrogen Refueling Station 2.0 at the Rembang Generation Unit as part of PLN NP's commitment to strengthening the national energy transition.

Testimoni
Testimonial

"PLN Nusantara Power telah menunjukan dedikasi dan komitmen kuat dalam menghadirkan energi terbarukan dan bahkan energi baru seperti hidrogen dan nuklir di Indonesia. Kolaborasi antara PLN Nusantara Power dan Ditjen EBTKE merupakan bagian penting dalam percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan."
"PLN Nusantara Power has presented strong dedication and commitment in delivering renewable energy and even new energy such as hydrogen and nuclear in Indonesia. The collaboration between PLN Nusantara Power and DG EBTKE is an important part in accelerating the utilization of new and renewable energy."

Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng., IPU
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM
Director General of New, Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources

"PLN Nusantara Power telah hadir selama 30 tahun sebagai pilar PLN dalam menghadirkan listrik seantero tanah air. Semakin kokoh, semakin andal. Kita dukung PLN Nusantara Power menjadi pionir transisi energi, bagi Indonesia bahkan dunia."
"PLN Nusantara Power has been present for 30 years as the PLN pillar in delivering electricity throughout the country. The more solid, the more reliable. We support PLN Nusantara Power to be the pioneer of energy transition, for Indonesia and even the world."

Darmawan Prasodjo
Direktur Utama PT PLN (Persero)
President Director of PT PLN (Persero)

"PLN Nusantara Power terus menjadi pelopor dalam menghadirkan energi bersih, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Saya berharap kolaborasi program Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan inovasi energi hijau milik PLN Nusantara Power akan memperkuat upaya kita menjaga laut, memberdayakan masyarakat pesisir serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia."
"PLN Nusantara Power continues to be a pioneer in delivering clean, sustainable and environmentally friendly energy. I hope that the collaboration of the Blue Economy program of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries with green energy innovation by PLN Nusantara Power will strengthen the efforts to protect the sea, empower coastal communities and support Indonesia's economic growth."

Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia

"PLN Nusantara Power tidak hanya menghadirkan pasokan listrik yang andal, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan, pengembangan energi bersih, serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kami berharap PLN Nusantara Power terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masa depan energi yang ramah lingkungan, tangguh, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang."
"PLN Nusantara Power not only provides reliable electricity supply, but also presents real commitment in supporting environmental conservation, clean energy development, as well as climate change mitigation and adaptation efforts. We expect PLN Nusantara Power keeps being the government's strategic partner in building an environmentally friendly, resilient, and sustainable energy future for future generations."

Sigit Reliantoro

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup
Deputy for Environmental Management and Sustainable Natural Resources, Ministry of Environment

"PLN Nusantara Power has played a pivotal role in delivering reliable energy for Indonesia. As a strategic partner, Masdar is proud to collaborate with PLN Nusantara Power and in advancing renewable energy solutions that supports Indonesia's energy transition and its journey towards a greener future. We believe that through continuous innovation and strong partnership, PLN NP will further strengthened leadership and champion of clean energy, benefitting Indonesia and the world"
"PLN Nusantara Power telah memainkan peran penting dalam menyediakan energi yang andal bagi Indonesia. Sebagai mitra strategis, Masdar bangga dapat berkolaborasi dengan PLN Nusantara Power dan dalam memajukan solusi energi terbarukan yang mendukung transisi energi Indonesia dan perjalanannya menuju masa depan yang lebih hijau. Kami percaya bahwa melalui inovasi berkelanjutan dan kemitraan yang kuat, PLN Nusantara Power akan semakin memperkuat kepemimpinan dan menjadi pelopor energi bersih, yang bermanfaat bagi Indonesia dan dunia."

Abdulla Karmustaji

Manajer Pengembangan & Investasi (APAC), Masdar
Manager, Development & Investment (APAC), Masdar

"Sebagai bagian dari keluarga besar PLN, PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power senantiasa berkolaborasi dan bersinergi untuk mendukung transisi energi, memperkuat ketahanan energi nasional dan mewujudkan target *Net Zero Emission*. Semoga PLN NP terus berinovasi dan menjadi mitra strategis dalam membangun masa depan energi hijau Indonesia"
"As part of the PLN family, PLN Indonesia Power and PLN Nusantara Power consistently collaborate and synergize to support the energy transition, strengthen national energy security, and achieve the Net Zero Emission target. We expect that PLN NP will continue to innovate and become a strategic partner in building Indonesia's green energy future."

Bernadus Sudarmanta

Direktur Utama PLN Indonesia Power
President Director of PLN Indonesia Power

Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Report to Shareholder and Stakeholder

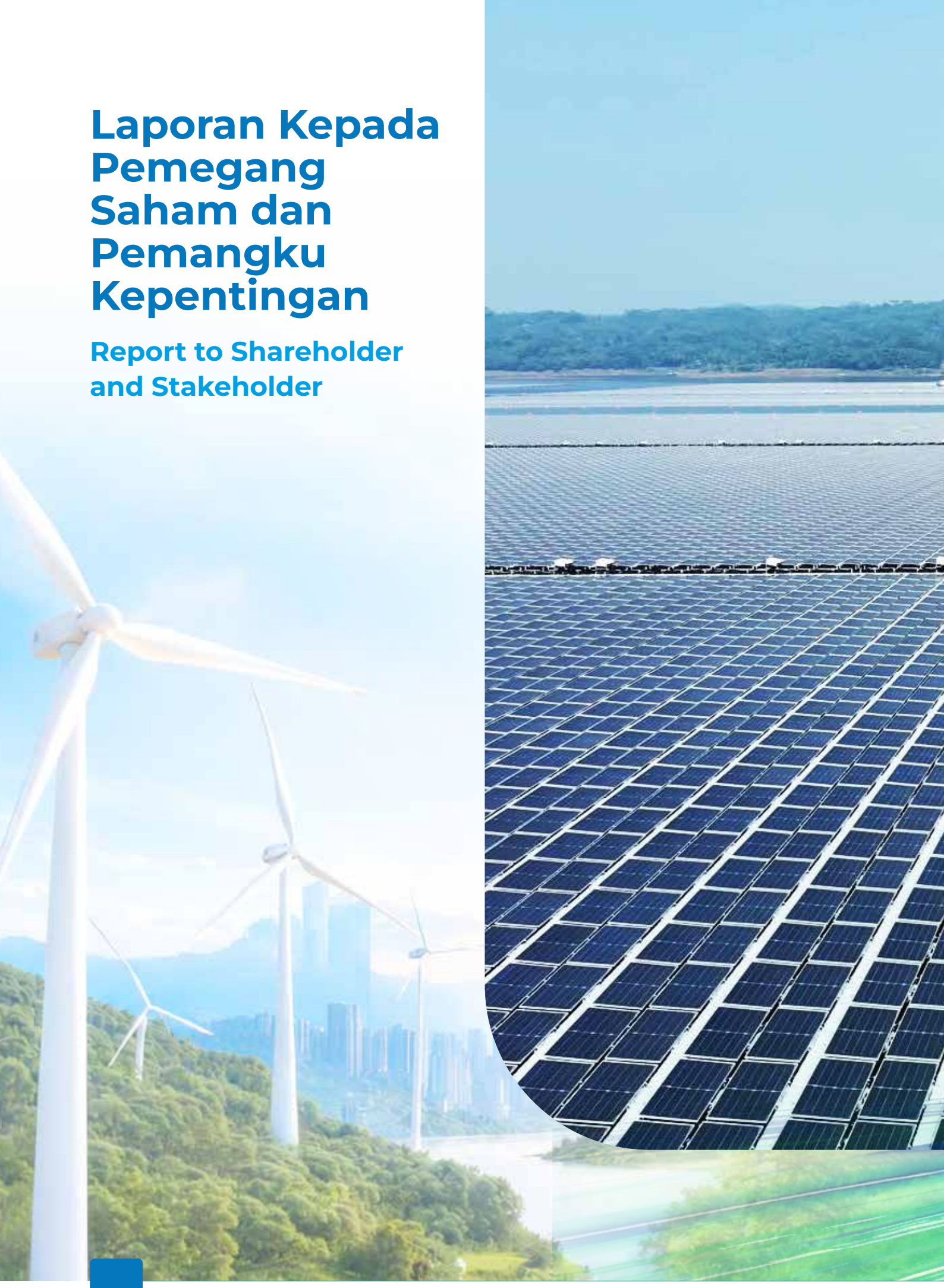

02

Laporan Dewan Komisaris
Report from The Board of Commissioners

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,
Dear Shareholders and Stakeholders,

Perkenankan kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT PLN Nusantara Power ("PLN NP" atau "Perseroan") mampu melalui tahun 2025 dengan kinerja yang solid di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan.

Kindly allow us to express our gratitude to God Almighty for the abundant grace and blessings which enabling PT PLN Nusantara Power ("PLN NP" or the "Company") to navigate 2025 with solid performance amid the challenging dynamics of the global economy.

Pada kesempatan ini, kami mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan selama tahun buku 2025. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris memastikan bahwa pengelolaan PLN NP dilaksanakan secara profesional, prudent, dan selaras dengan kepentingan Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya.

On this occasion, on behalf of the Board of Commissioners, we present a report on the implementation of supervisory function during the 2025 financial year. The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities according the Company's Articles of Association as well as the applicable laws and regulations. In undertaking supervisory function and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners ensures that PLN NP runs the management professionally, prudently, and in line with the interests of Shareholders and other stakeholders.

Laporan ini memuat penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi, pengawasan atas perumusan dan implementasi strategi Perseroan, pandangan terhadap prospek usaha, serta evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik selama tahun 2025. Dewan Komisaris menilai bahwa PLN NP telah menunjukkan kinerja yang baik di tengah perubahan lanskap industri ketenagalistrikan dan meningkatnya tuntutan transformasi bisnis. Berbagai pencapaian yang diraih merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, dan seluruh insan PLN NP dalam menjalankan strategi bisnis, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menjaga keberlanjutan usaha secara konsisten.

This report contains the Board of Commissioners' assessment of the Board of Directors' performance, oversight of the formulation and implementation of the Company's strategy, outlook on business prospects, as well as evaluation of the Good Corporate Governance implementation during 2025. The Board of Commissioners assesses that PLN NP has represented strong performance amidst the changing landscape of the electricity industry and the increasing demands for business transformation. The Company achieved various achievements as the result of strong synergy and collaboration among the Board of Commissioners, Board of Directors, management, and the entire PLN NP personnel in implementing business strategies, strengthening corporate governance, and consistently maintaining business sustainability.

Edi Srimulyanti
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioners

Kondisi Makroekonomi 2025
Macroeconomic Conditions in 2025

Tinjauan Dewan Komisaris atas Kondisi Ekonomi Makro Global dan Indonesia
Review by the Board of Commissioners on Global and Indonesian Macroeconomic Conditions

Sepanjang tahun 2025, kondisi perekonomian global masih diwarnai berbagai tantangan dan ketidakpastian. Tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, volatilitas harga energi dan komoditas, serta kebijakan moneter global yang cenderung ketat masih memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun demikian, perekonomian global tetap menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan sebesar 3,4% yang didukung oleh aktivitas sektor swasta, peningkatan investasi berbasis teknologi, serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter di sejumlah negara utama.

The global economy during 2025 remain characterized by various challenges and uncertainties. Geopolitical tensions, fragmentation of international trade, volatility in energy and commodity prices, and tighter global monetary policies will continue to exert pressure on global economic growth. Nevertheless, the global economy will signify resilience, growing by 3.4%, supported by private sector activity, increased technology-based investment, as well as fiscal and monetary policy support in several key countries.

Kondisi tersebut turut memengaruhi industri ketenagalistrikan, khususnya pada aspek rantai pasok energi primer, fluktuasi harga komoditas, dan biaya pendanaan. Selain itu, arah investasi energi global yang semakin berorientasi pada keberlanjutan juga mendorong pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing usaha.

These conditions will also bring over the electricity industry, particularly in terms of the primary energy supply chain, commodity price fluctuations, and financing costs. Furthermore, the increasingly sustainability-oriented direction of global energy investment will encourage industry players to improve efficiency and strengthen business competitiveness.

Di tingkat domestik, Dewan Komisaris mencermati bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang solid di tengah tekanan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,11%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,03%, didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan kinerja ekspor yang tetap resilien. Stabilitas ekonomi nasional juga tercermin dari tingkat inflasi yang tetap terkendali pada level 2,92%.

Domestically, the Board of Commissioners observes that the Indonesian economy will continue to perform solidly in 2025 in the middle of global economic pressures. National economic growth was recorded at 5.11%, an increase compared to the previous year of 5.03%, supported by domestic consumption, investment, and resilient export performance. National economic stability is also reflected in the controlled inflation rate at 2.92%.

Kondisi makroekonomi nasional yang relatif stabil tersebut menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan sektor ketenagalistrikan nasional. Pertumbuhan aktivitas ekonomi, industrialisasi, digitalisasi, serta meningkatnya kebutuhan energi masyarakat terus mendorong permintaan listrik nasional tetap tumbuh positif. Dewan Komisaris memandang bahwa kondisi tersebut memberikan peluang bagi PLN NP untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pengelolaan operasional yang andal, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan industri.

The national macroeconomic condition is going to be relatively stable and provide a substantial foundation for the growth of the national electricity sector. Growing economic activity, industrialization, digitalization, and the increasing public energy needs continue to drive positive growth in national electricity demand. The Board of Commissioners considers these conditions as providing an opportunity for PLN NP to further strengthen its role in supporting national energy security through reliable, efficient, and adaptive operational management to industrial developments.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya
Assessment and the Basis of the Board of Directors Performance and Its Basis

Dalam menjalankan fungsi pengawasan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi dengan mengacu pada realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), capaian *Key Performance Indicators* (KPI), serta kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), keberlanjutan, dan regulasi yang berlaku.

In performing supervisory function during 2025, the Board of Commissioners assessed the Board of Directors performance by referring to the realization of the Company's Annual Budget and Operational Plan (RKAP), the achievement of Key Performance Indicators (KPIs), and compliance with the principles of good corporate governance (GCG), sustainability, and applicable regulations.

Dewan Komisaris menilai bahwa capaian *Key Performance Indicator* (KPI) PLN NP tahun 2025 sebesar 105,66 tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik karena berada di atas target yang telah ditetapkan Pemegang Saham. Meskipun sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 106,27, Dewan Komisaris memandang bahwa Perseroan tetap mampu menjaga konsistensi kinerja di tengah dinamika industri ketenagalistrikan, tekanan ekonomi global, serta meningkatnya tantangan transformasi bisnis dan transisi energi yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen Direksi dan manajemen dalam menjaga keandalan operasional, memperkuat efisiensi, serta menjalankan strategi bisnis secara adaptif dan berkelanjutan. Dewan Komisaris juga menilai bahwa kemampuan PLN NP mempertahankan capaian KPI pada level yang tinggi secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fundamental bisnis, kapabilitas operasional, dan tata kelola perusahaan yang tetap solid dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan usaha serta penciptaan nilai bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners assessed that PLN NP Key Performance Indicator (KPI) achievement in 2025 of 105.66 still indicated excellent performance, exceeding the target set by the Shareholders. Although slightly lower than the 2024 achievement of 106.27, the Board of Commissioners believes that the Company remained able to maintain consistent performance amidst the dynamics of the electricity industry, global economic pressures, as well as the increasing challenges of increasingly complex business transformation and energy transition. Those signify the strong commitment by the Board of Directors and management to maintaining operational reliability, strengthening efficiency, and implementing business strategies in an adaptive and sustainable manner. The Board of Commissioners also assessed that PLN NP has the capability to maintain KPI achievements at a consistently high level in recent years, which signify that business fundamentals, operational capabilities, and corporate governance remain solid in supporting sustainable business growth and value creation for Shareholders and all stakeholders.

Pandangan Dewan Komisaris atas Kinerja Keuangan Direksi Tahun 2025
Views by the Board of Commissioners Views on the Board of Directors Financial Performance in 2025

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas capaian kinerja keuangan PLN NP sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan hasil yang solid, sehat, dan melampaui ekspektasi. Di tengah dinamika eksternal dan tantangan operasional, Direksi mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan melalui strategi optimalisasi aset, efisiensi operasional, serta pengelolaan investasi yang terukur.

The Board of Commissioners appreciates financial performance by PLN NP throughout 2025, which demonstrated solid and healthy results that exceeded expectations. In the middle of external dynamics and operational challenges, the Board of Directors is able to maintain sustainable growth through asset optimization strategies, operational efficiency, and measured investment management.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memandang bahwa kinerja pendapatan usaha PLN NP tahun 2025 tetap menunjukkan capaian yang positif dan resilien di tengah dinamika industri ketenagalistrikan serta tantangan operasional. Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp98,89 triliun atau mencapai 96,96% dari target RKAP 2025, serta meningkat 7,83% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp91,71 triliun. Meskipun terdapat beberapa segmen usaha yang realisasinya belum sepenuhnya mencapai target, kontribusi utama dari penjualan tenaga listrik tetap terjaga sebesar Rp94,97 triliun dengan pencapaian 97,38% dari target, disertai pendapatan jasa EPC yang melampaui target mencapai 101,89%. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan upaya yang baik dalam menjaga keandalan operasi, mengoptimalkan peluang bisnis, serta memperkuat pengembangan usaha penunjang. Ke depan, PLN NP diharapkan terus meningkatkan efektivitas strategi komersial, memperluas diversifikasi usaha, dan memperkuat sinergi bisnis agar struktur pendapatan menjadi semakin sehat, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Overall, the Board of Commissioners views PLN NP's operating revenue performance in 2025 as positive and resilient amid the dynamics of the electricity industry and operational challenges. The Board of Commissioners assesses that the Company successfully recorded operating revenues of Rp98.89 trillion, reaching 96.96% of the 2025 Annual Budget and Operational Plan (RKAP) target, and an increase of 7.83% compared to the 2024 realization of Rp91.71 trillion. Despite several business segments did not fully achieve the set targets, the primary contribution from electricity sales remained at Rp94.97 trillion, achieving 97.38% of the target, accompanied by EPC service revenues that exceeded the target by 101.89%. The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has represented strong efforts in maintaining operational reliability, optimizing business opportunities, and strengthening the development of supporting businesses. Going forward, PLN NP is expected to continue improving the effectiveness of commercial strategy, expanding business diversification, and strengthening business synergies to ensure a healthier, more sustainable revenue structure capable of supporting the company's long-term growth.

Dari perspektif pengawasan, Dewan Komisaris memandang bahwa posisi keuangan PLN NP tahun 2025 tetap menunjukkan kondisi yang sehat, stabil, dan dikelola secara prudent di tengah dinamika industri ketenagalistrikan. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah aset menjadi Rp357,67 triliun atau tumbuh 0,65% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp355,37 triliun, yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mengoptimalkan pengelolaan modal kerja dan menjaga likuiditas perusahaan secara baik.

In terms of supervisory, the Board of Commissioners believes that PLN NP financial position in 2025 remains healthy, stable, and prudently managed amidst the dynamics of the electricity industry. This is reflected in the increase in total assets to Rp357.67 trillion, increased by 0.65% compared to Rp355.37 trillion in 2024. It all indicates the Company's ability to optimize working capital management and maintain sound liquidity.

Di sisi lain, jumlah liabilitas meningkat 4,40% menjadi Rp42,52 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40,72 triliun. Dewan Komisaris menilai bahwa peningkatan tersebut masih berada pada tingkat yang terkendali dan sejalan dengan adanya peningkatan liabilitas pajak tangguhan dari surplus revaluasi aset tetap. Sementara itu, jumlah ekuitas meningkat 0,16% menjadi Rp315,15 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp314,64 triliun, yang didukung oleh penguatan saldo laba dan penghasilan komprehensif lain. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga struktur permodalan dan stabilitas keuangan secara berkelanjutan.

Conversely, total liabilities increased from 4.40% to Rp42.52 trillion compared to Rp40.72 trillion in the previous year. The Board of Commissioners assesses that this increase remains at a manageable level and is in line with the increase in deferred tax liabilities from the fixed asset revaluation surplus. Meanwhile, total equity increased by 0.16% to Rp315.15 trillion compared to Rp314.64 trillion in 2024, supported by strengthening retained earnings and other comprehensive income. This reflects the Company's ability to maintain its capital structure and financial stability on a sustainable basis.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris senantiasa menelaah struktur modal Perseroan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang efektif. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi PLN NP telah menerapkan kebijakan manajemen risiko keuangan secara memadai untuk meminimalisasi dampak ketidakpastian terhadap kinerja keuangan perusahaan, termasuk dalam pengelolaan berbagai risiko. Selain itu, keberadaan Pedoman Umum Manajemen Risiko juga dinilai telah menjadi acuan penting dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas operasional bisnis dan pengelolaan risiko keuangan guna mendukung keberlanjutan pertumbuhan usaha dan penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan serta pemegang saham.

In running supervisory function, the Board of Commissioners continuously reviews the Company's capital structure, considering the principle of prudence and the implementation of effective risk management. The Board of Commissioners assesses that PLN NP Board of Directors has implemented sufficient financial risk management policies to minimize the impact of uncertainty on the Company's financial performance, including in the management of various risks. Furthermore, the General Guidelines for Risk Management are also considered to be an important reference in maintaining a balance between business operations and financial risk management to support sustainable business growth and long-term value creation for the Company and the shareholders.

Pandangan Dewan Komisaris atas Kinerja Operasional

Views by the Board of Commissioners on Operational Performance

Dewan Komisaris memandang bahwa kinerja operasional PLN NP tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga keandalan pembangkit serta kesinambungan pasokan listrik nasional di tengah dinamika industri ketenagalistrikan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas upaya Direksi dalam menjaga kesiapan operasional pembangkit yang tercermin dari peningkatan EAF unit pembangkitan batubara menjadi 86,86% dan terjaganya EAF unit gas dan non-batubara pada level tinggi sebesar 94,34%. Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan operasi dan pemeliharaan yang semakin efektif dan disiplin.

The Board of Commissioners views operational performance of PLN NP in 2025 as a strong achievement, reflecting the Company's ability to maintain the power plants reliability and the continuity of the national electricity supply amid the dynamics of the electricity industry. The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors efforts in maintaining the power plants operational readiness, as reflected in the increase in the EAF of coal-fired power plants to 86.86% and the maintenance of a high EAF of gas and non-coal units at 94.34%. These achievements signify the increasingly effective and disciplined operations and maintenance management.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa pengendalian gangguan pembangkit dan efektivitas pemeliharaan telah berjalan dengan baik, yang tercermin dari penurunan EFOR dan perbaikan SOF pada sebagian besar unit pembangkitan. Di sisi efisiensi, berbagai upaya optimalisasi operasi dan konsumsi bahan bakar dinilai mampu mendukung peningkatan efisiensi pembangkit sekaligus menjaga daya saing biaya produksi tenaga listrik Perseroan.

The Board of Commissioners also considers that the control of power plant disruptions and maintenance effectiveness have been successful, as reflected in the decrease in EFOR and improvements in SOF at most power plants. Regarding efficiency, various efforts to optimize operations and fuel consumption are considered capable of supporting increased power plant efficiency while maintaining the Company's cost competitiveness in electricity production.

Selain itu, Dewan Komisaris memandang bahwa keberhasilan Perseroan dalam menjaga kapasitas daya mampu netto sebesar 16.157,03 MW serta peningkatan pemanfaatan biomassa merupakan langkah positif dalam mendukung ketahanan energi nasional dan agenda transisi energi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan operasional secara adaptif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja jangka panjang perusahaan.

Furthermore, the Board of Commissioners views that the Company successfully maintains the net power capacity of 16,157.03 MW and increases biomass utilization as positive steps in supporting national energy security and the sustainable energy transition agenda. Overall, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has implemented operational management adaptively, effectively, and oriented towards improving the company's long-term performance.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi beserta seluruh jajaran manajemen dan insan PLN NP atas berbagai capaian yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025. Di tengah dinamika sektor energi dan tantangan transformasi industri, PLN NP tetap mampu menjaga kinerja perusahaan secara solid, yang tercermin dari berbagai penghargaan bergengsi di tingkat internasional maupun nasional. Beberapa penghargaan yang berhasil diraih antara lain ASEAN *Energy Awards* 2025, *Gold Stevie Award for Technology Excellence* 2025, *Asia ESG Positive Impact Award* 2025, *Platinum Rank* ASRRAT 2025, PROPER *Award* 2025, Subroto *Award* 2025, serta *Annual Report Award* (ARA) 2024. Berbagai penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen PLN NP dalam memperkuat *operational excellence*, tata kelola perusahaan, keberlanjutan, dan inovasi bisnis guna mendukung pertumbuhan perusahaan yang berdaya saing global.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors, the entire management, and PLN NP employees for the various achievements achieved throughout 2025. In the middle of dynamics of the energy sector and the challenges of industrial transformation, PLN NP has maintained solid company performance, as reflected in various prestigious awards at the international and national levels. These awards include the 2025 ASEAN Energy Awards, the 2025 Gold Stevie Award for Technology Excellence, the 2025 Asia ESG Positive Impact Award, the 2025 Platinum Rank ASRRAT, the 2025 PROPER Award, the 2025 Subroto Award, and the 2024 Annual Report Award (ARA). These awards signify commitment by PLN NP to strengthening operational excellence, corporate governance, sustainability, and business innovation to support growth and global competitiveness of the Company.

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat Kepada Direksi
Procedures and Frequency of Providing Advice to the Board of Directors

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan objektif guna memastikan pengelolaan Perseroan berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan *checks and balances* yang efektif, serta selaras dengan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi telah dilakukan secara aktif dan berkesinambungan sebagai bagian dari upaya memastikan tercapainya target kinerja perusahaan, keberhasilan implementasi transformasi bisnis, serta pelaksanaan arahan Pemegang Saham dan keputusan RUPS. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah strategis Direksi tetap sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan risiko yang prudent, serta arah pengembangan usaha jangka panjang perusahaan.

The Board of Commissioners carries out the oversight function independently and objectively to ensure that the Company management adheres to the principles of good corporate governance, implements effective checks and balances, and aligns with the interests of Shareholders and other stakeholders. Active and continuous oversight and advice to the Board of Directors are provided as part of efforts to ensure the performance targets achievement of Company, the successful implementation of business transformation, and the implementation of Shareholder directives and GMS decisions. In carrying out these functions, the Board of Commissioners consistently ensures that all policies and strategic steps taken by the Board of Directors remain aligned with the principles of good corporate governance, prudent risk management, and the direction of the Company's long-term business development.

Pemberian nasihat dan arahan dilakukan melalui berbagai mekanisme formal maupun informal. Secara formal, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris, rapat pengawasan bersama Direksi, rapat konsultasi dengan Direksi tertentu, serta rapat bersama Komite di bawah Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan tanggapan, rekomendasi, dan persetujuan melalui mekanisme korespondensi tertulis sesuai kebutuhan dan ketentuan tata kelola perusahaan. Adapun secara informal, komunikasi dan koordinasi dilakukan melalui diskusi strategis, kunjungan kerja, serta forum koordinasi lainnya guna memastikan respons yang cepat terhadap dinamika operasional dan bisnis perusahaan.

The Board of Commissioners provides advice and direction through various formal and informal mechanisms. Formally, the Board of Commissioners organizes internal Board of Commissioners meetings, joint supervisory meetings with the Board of Directors, consultation meetings with specific Directors, and meetings with Committees under the Board of Commissioners. Additionally, the Board of Commissioners provides responses, recommendations, and approvals through written correspondence as needed and according to corporate governance requirements. Informally, the Board of Commissioners conducts communication and coordination through strategic discussions, working visits, and other coordination forums to ensure a prompt response to the operational and business dynamics of the Company.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan melalui pelaksanaan rapat rutin dan kunjungan kerja ke unit pembangkitan maupun entitas anak perusahaan. Melalui berbagai forum tersebut, Dewan Komisaris memberikan pandangan strategis terkait kinerja operasional dan keuangan, perkembangan proyek strategis nasional, implementasi transisi energi, penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta tindak lanjut atas berbagai penugasan dan kebijakan korporasi. Evaluasi terhadap pencapaian RKAP dan KPI Korporat juga dilakukan secara berkala melalui penelaahan laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan tahunan yang menjadi dasar pembahasan bersama Direksi dan manajemen perusahaan.

Throughout 2025, the Board of Commissioners actively oversees by organizing regular meetings and working visits to generation units and subsidiaries. Through these forums, the Board of Commissioners provided strategic insights regarding operational and financial performance, the development of national strategic projects, the implementation of the energy transition, strengthening corporate governance, risk management, and follow-up on various corporate assignments and policies. The Board of Commissioners also periodically evaluates the achievement of the Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and Key Performance Indicators (KPI) through a review of monthly, quarterly, and annual performance reports, which served as the basis for discussions with the Board of Directors and management of the Company.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Oleh Direksi
Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

Dewan Komisaris memandang bahwa arah strategis dan prospek usaha yang disusun Direksi telah mempertimbangkan berbagai dinamika industri dan perkembangan lingkungan bisnis secara komprehensif. Dewan Komisaris menilai, PLN NP telah memiliki prospek usaha yang positif seiring meningkatnya kebutuhan energi listrik nasional, pertumbuhan sektor industri dan ekonomi digital, serta komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi energi nasional.

According to the Board of Commissioners, the strategic direction and business prospects formulated by the Board of Directors have comprehensively considered various industry dynamics and developments within business environment. The Board of Commissioners assesses that PLN NP has positive business prospects, driven by the increasing national electricity demand, the growth of the industrial sector and the digital economy, as well as commitment by the government to driving national energy transformation.

Dalam pandangan Dewan Komisaris, strategi PLN NP yang berfokus pada optimalisasi portofolio pembangkit, pengembangan energi baru dan terbarukan, peningkatan efisiensi operasional, digitalisasi sistem pembangkitan, serta penguatan inovasi teknologi dinilai tepat untuk mendukung daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, pengembangan bisnis berbasis energi bersih, jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit, serta solusi energi terintegrasi juga dipandang mampu menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Perseroan.

The Board of Commissioners views that PLN NP's strategy, which focuses on optimizing that power plant portfolio, developing new and renewable energy, improving operational efficiency, digitizing the power plant system, and strengthening technological innovation, is deemed appropriate to support the Company's long-term competitiveness. Furthermore, the development of clean energy-based businesses, power plant operation and maintenance services, and integrated energy solutions are also seen as potential new sources of growth for the Company.

Di sisi lain, Dewan Komisaris mencermati bahwa tantangan industri ketenagalistrikan ke depan akan semakin kompleks, antara lain terkait perubahan regulasi, kebutuhan investasi, percepatan adopsi teknologi, volatilitas harga energi primer, serta tuntutan penurunan emisi karbon, termasuk kondisi geopolitik. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menekankan pentingnya penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko yang efektif dan terukur, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta disiplin eksekusi dalam implementasi strategi perusahaan. Dengan fundamental bisnis yang kuat, kapasitas operasional yang andal, dan arah transformasi yang semakin jelas, Dewan Komisaris optimistis PLN NP memiliki kemampuan untuk terus bertumbuh, meningkatkan nilai perusahaan, serta berkontribusi secara strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target transisi energi Indonesia menuju Net *Zero Emission tahun* 2060.

Furthermore, the Board of Commissioners observes that future challenges in the electricity industry will become increasingly complex, including regulatory changes, investment needs, accelerated technology adoption, volatility in primary energy prices, and demands for carbon emission reduction, as well as geopolitical conditions. Therefore, the Board of Commissioners emphasizes the importance of strengthening corporate governance, effective and measurable risk management, developing human resource competencies, and disciplined execution in implementing the company's strategy. With strong business fundamentals, reliable operational capacity, and an increasingly clear direction of transformation, the Board of Commissioners is optimistic that PLN NP has the ability to continue growing, increasing the Company's value, and contributing strategically in supporting national energy security and achieving Indonesia's energy transition target towards Net Zero Emission by 2060.

Pandangan Atas Implementasi Tata Kelola Perusahaan
Views on the Corporate Governance Implementation

Dewan Komisaris juga memastikan bahwa implementasi tata kelola perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, integritas, dan pengambilan keputusan yang beretika di seluruh tingkatan organisasi.

The Board of Commissioners also ensures that corporate governance implementation is not solely oriented toward regulatory compliance, but also supports transparency, accountability, integrity, and ethical decision-making at all levels of the organization.

Dewan Komisaris memandang bahwa implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di PLN NP sepanjang tahun buku 2025 telah berjalan secara efektif, konsisten, dan selaras dengan arah transformasi perusahaan menuju perusahaan energi berkelas dunia. PLN NP terus memperkuat pilar-pilar tata kelola perusahaan yang mencakup integritas, perilaku beretika perilaku, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, serta

The Board of Commissioners believes that the Good Corporate Governance (GCG) implementation within PLN NP throughout the 2025 financial year has been effective, consistent, and aligned with the Company transformation toward a world-class energy company. PLN NP remains to strengthen the pillars of corporate governance, which encompass integrity, ethical behavior, transparency, accountability, sustainability, and independence, following GCG basic principles

independensi, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GCG dan praktik terbaik internasional. Penguatan tata kelola tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan sekaligus mendukung penciptaan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

and international best practices. This governance strengthening is a crucial foundation for maintaining trust by the shareholders and stakeholders while supporting the creation of sustainable corporate value.

Dewan Komisaris menilai bahwa komitmen Direksi dalam memperkuat budaya kepatuhan dan integritas organisasi telah ditunjukkan melalui implementasi berbagai inisiatif strategis, antara lain penerapan kode etik perusahaan, penguatan pengendalian gratifikasi, implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001, optimalisasi sistem pengendalian internal, serta kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Upaya tersebut mencerminkan keseriusan perusahaan dalam membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun benturan kepentingan.

The Board of Commissioners assesses that commitment by the Board of Directors to strengthening the organization culture of compliance and integrity has been demonstrated through the implementation of various strategic initiatives, including the implementation of the code of ethics, strengthening gratuity control, implementing the ISO 37001-based Anti-Bribery Management System, optimizing the internal control system, and complying with the submission of State Officials Wealth Reports (LHKPN). These efforts reflect commitment by the Company to building a professional, transparent work culture free from corruption and conflicts of interest.

Penilaian penerapan GCG tahun 2025 juga telah dilakukan dengan metodologi yang komprehensif dan mengacu pada berbagai standar serta regulasi yang berlaku, termasuk ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, PLN NP menunjukkan tingkat kepatuhan dan kualitas implementasi tata kelola perusahaan yang tinggi. Dewan Komisaris memandang capaian tersebut sebagai indikator positif atas efektivitas pengelolaan perusahaan dan keberhasilan transformasi budaya korporasi yang terus dijalankan secara berkesinambungan.

The Company conducted the 2025 GCG implementation assessment using a comprehensive methodology and referenced various applicable standards and regulations, including the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI), and the Financial Services Authority Regulations (POJK). Based on the assessment results, PLN NP reached a high level of compliance and quality of corporate governance implementation. The Board of Commissioners views this achievement as a positive indicator of the effectiveness of company management and the success of the ongoing corporate culture transformation.

Berbagai pengakuan eksternal yang diraih PLN NP sepanjang tahun 2025 turut menjadi cerminan nyata atas implementasi tata kelola perusahaan yang kredibel dan konsisten. Perseroan berhasil memperoleh penghargaan dalam berbagai ajang nasional maupun internasional, termasuk penghargaan dalam *Annual Report Award* (ARA), apresiasi atas kualitas penerapan GCG dan keberlanjutan perusahaan, serta pengakuan dalam ajang yang terkait dengan transparansi pelaporan perusahaan, manajemen risiko, kepatuhan, dan implementasi keberlanjutan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa praktik tata kelola PLN NP tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga telah mengarah pada penerapan standar tata kelola yang kompetitif di tingkat global.

Various external recognitions achieved by PLN NP during 2025 also reflect the credible and consistent implementation of corporate governance. The Company has successfully received awards at various national and international events, including the Annual Report Award (ARA), recognition for the quality of GCG implementation and corporate sustainability, as well as recognition in events related to corporate reporting transparency, risk management, compliance, and sustainability implementation. These achievements indicate that governance practices within PLN Nusantara Power not only meet regulatory compliance requirements but also lead to the implementation of globally competitive governance standards.

Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus memperkuat kualitas implementasi GCG di seluruh tingkatan organisasi, termasuk pada entitas anak dan unit operasi, guna memastikan konsistensi penerapan tata kelola dalam seluruh proses bisnis perusahaan. Penguatan tata kelola yang adaptif, agile, dan berbasis digital dipandang menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan, percepatan transisi energi, serta tuntutan pemangku kepentingan yang semakin kompleks. Dengan fondasi tata kelola yang kuat, Dewan Komisaris optimistis PLN NP akan semakin mampu meningkatkan daya saing, memperkuat keberlanjutan usaha, dan mendukung transformasi sektor energi nasional menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

The Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue strengthening the quality of GCG implementation at all levels of the organization, including subsidiaries and operating units, to ensure consistent governance across all company business processes. Strengthening adaptive, agile, and digital-based governance is seen as a strategic necessity in addressing the dynamics of the electricity industry, the acceleration of the energy transition, and increasingly complex stakeholder demands. With a strong governance foundation, the Board of Commissioners is optimistic that PLN NP will be increasingly able to enhance its competitiveness, strengthen business sustainability, and support the transformation of the national energy sector towards a greener and more sustainable future.

Pandangan Atas Penerapan Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS)
Views on the Implementation of the Whistleblowing System (WBS) Policy

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan *Whistleblowing System* (WBS) merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di PT PLN Nusantara Power. Keberadaan WBS menjadi sarana strategis dalam mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk penyimpangan, seperti korupsi, suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, pencurian aset perusahaan, maupun pelanggaran hukum dan etika lainnya. Selain itu, mekanisme WBS juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dengan seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners considers the implementation of the Whistleblowing System (WBS) to be a crucial component of the internal control system and the implementation of Good Corporate Governance at PT PLN Nusantara Power. The WBS serves as a strategic facility for detecting and preventing various forms of irregularities, such as corruption, bribery, gratuities, abuse of authority, theft of the Company's assets, and other legal and ethical violations. Furthermore, the WBS mechanism reflects the Company's commitment to building transparent, accountable, and integrity-based relationships with all stakeholders.

Dewan Komisaris memberikan dukungan penuh terhadap implementasi WBS dan menekankan pentingnya setiap laporan yang diterima untuk ditindaklanjuti secara serius, objektif, independen, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris juga menegaskan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran merupakan bagian penting dari upaya penegakan disiplin, pencegahan penyimpangan, serta penguatan budaya integritas di lingkungan perusahaan.

The Board of Commissioners fully supports the implementation of the WBS and emphasizes the importance of following up on every report received seriously, objectively, independently, and in line with the applicable regulations. The Board of Commissioners also emphasizes that the application of firm and consistent sanctions against parties found to have committed violations is a crucial part of efforts to enforce discipline, prevent irregularities, and strengthen a culture of integrity within the Company.

Dewan Komisaris menilai bahwa pengelolaan WBS PLN NP telah dilaksanakan secara efektif dan terkoordinasi dengan baik bersama PLN Holding. Tim Penanganan Pengaduan dinilai telah menjalankan tugasnya secara

The Board of Commissioners assesses that the WBS management within PLN NP has been implemented effectively and in a well-coordinated manner with PLN Holding. The Complaint Handling Team is considered

profesional dalam melakukan verifikasi, investigasi, serta tindak lanjut atas setiap laporan pelanggaran yang diterima. Dalam hal pengaduan melibatkan anggota Direksi, Dewan Komisaris akan mengambil alih proses penanganan secara independen dan melakukan telaah secara menyeluruh sebelum menyampaikan hasilnya kepada Pemegang Saham sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

to have undertaken the duties professionally in verifying, investigating, and following up on every report of violations received. In case a complaint involves a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners will independently take over the handling process and conduct a thorough review before conveying the results to the Shareholders following with applicable mechanisms.

Sepanjang tahun 2025, terdapat 4 (empat) laporan pengaduan yang diterima melalui berbagai saluran WBS perusahaan. Setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi secara ketat, sebanyak 3 (tiga) laporan dinyatakan valid dan memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan lebih lanjut. Dewan Komisaris memandang bahwa proses tersebut menunjukkan efektivitas mekanisme penyaringan dan penanganan pengaduan yang telah diterapkan perusahaan guna memastikan setiap laporan diproses secara akurat, adil, dan bertanggung jawab.

Throughout 2025, four complaints were received through the Company's various WBS channels. After undergoing a stringent verification and evaluation process, three reports were declared valid and met the criteria for further investigation. The Board of Commissioners believes this process represents the effectiveness of the company's complaint screening and handling mechanisms, ensuring that each report is processed accurately, fairly, and responsibly.

Ke depan, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus memperkuat efektivitas implementasi WBS melalui peningkatan sosialisasi budaya pelaporan, perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower protection*), penguatan sistem digital pelaporan, serta peningkatan kualitas tindak lanjut dan monitoring atas setiap pengaduan yang masuk. Dengan penerapan WBS yang kredibel dan berintegritas, Dewan Komisaris optimistis PLN Nusantara Power dapat terus memperkuat budaya kepatuhan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

Moving forward, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue strengthening the effectiveness of the WBS implementation by increasing the socialization of reporting culture, protecting whistleblowers, strengthening the digital reporting system, and improving the quality of follow-up and monitoring of each complaint. By implementing a credible and integrated WBS, the Board of Commissioners is optimistic that PLN NP is capable to keep strengthening the compliance culture, increasing stakeholder trust, and maintaining long-term sustainability of the Company.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners Committee

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris. Keberadaan organ pendukung tersebut berperan penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

In carrying out supervisory and advisory functions to the Board of Directors, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, the Investment and Risk Management Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Secretary to the Board of Commissioners. The existence of these supporting committees plays a crucial role in strengthening the effectiveness of oversight and the implementation of good corporate governance.

Seluruh komite menjalankan tugas berdasarkan Piagam Komite (*Committee Charter*) dan Program Kerja Tahunan yang secara berkala ditinjau agar tetap selaras dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan perusahaan. Sementara itu, Sekretaris Dewan Komisaris berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, termasuk koordinasi kegiatan, penyediaan informasi dan dokumen pendukung, serta pengelolaan administrasi dan komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi maupun pemangku kepentingan lainnya.

All committees carry out their duties based on the Committee Charter and Annual Work Program, which are periodically reviewed to ensure they remain aligned with regulatory developments and company needs. Meanwhile, the Secretary to the Board of Commissioners plays a role in supporting the smooth implementation of the Board of Commissioners duties, including coordinating activities, providing information and supporting documents, as well as managing administration and communication between the Board of Commissioners, the Board of Directors and other stakeholders.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai seluruh komite dan Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan ekspektasi serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung efektivitas pengawasan perusahaan. Komite Audit berperan aktif dalam memberikan telaahan dan masukan terkait pengendalian internal, tindak lanjut audit, implementasi GCG, kesiapan ICoFR, hingga penyelesaian laporan keuangan audited. Komite Nominasi dan Remunerasi fokus pada pengawasan pengelolaan human capital, pengembangan talenta, produktivitas pegawai, dan sistem remunerasi. Adapun Komite Investasi dan Manajemen Risiko memberikan perhatian pada evaluasi profil risiko, strategi mitigasi risiko, serta pelaksanaan investasi perusahaan.

Throughout 2025, the Board of Commissioners assessed that all committees and the Secretary to the Board of Commissioners carried out their roles and responsibilities following the expectations and made significant contributions to the effectiveness of the Company oversight. The Audit Committee plays an active role in providing reviews and input regarding internal controls, audit follow-up, GCG implementation, ICoFR readiness, and the completion of audited financial statements. The Nomination and Remuneration Committee focuses on overseeing human capital management, talent development, employee productivity, and the remuneration system. The Investment and Risk Management Committee focuses on risk profile evaluation, risk mitigation strategies, and the investments implementation of the Company.

Kontribusi aktif seluruh komite juga tercermin melalui keterlibatan mereka dalam berbagai rapat koordinasi, evaluasi kebijakan, serta kunjungan lapangan bersama Dewan Komisaris. Dengan pendekatan kerja yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis risiko, keberadaan komite-komite tersebut dinilai telah memberikan nilai tambah dalam mendukung proses pengawasan serta pengambilan keputusan strategis perusahaan. Sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi atas kinerja seluruh komite berdasarkan aspek pelaksanaan tugas, kontribusi, serta kualitas pelaporan kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi masing-masing memperoleh skor penilaian sebesar 9,00 yang mencerminkan kinerja sangat baik dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Active contribution of all committees is also reflected in their involvement in various coordination meetings, policy evaluations, and field visits with the Board of Commissioners. With a systematic, collaborative, and risk-based working approach, these committees are considered to have added value in supporting the company's oversight process and strategic decision-making. As part of its efforts to maintain effective task implementation, the Board of Commissioners periodically evaluates the performance of all committees based on aspects of task implementation, contribution, and the quality of reporting to the Board of Commissioners. Based on the 2025 evaluation results, the Audit Committee, the Investment and Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee received a score of 9.00, respectively, reflecting excellent performance in supporting oversight function by the Board of Commissioners.

Ke depan, Dewan Komisaris akan terus mendorong peningkatan kapabilitas, kompetensi, dan efektivitas kerja seluruh komite agar semakin adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, perkembangan regulasi, serta tantangan industri ketenagalistrikan yang terus berkembang. Dengan demikian, komite-komite diharapkan dapat terus memberikan dukungan strategis dalam menjaga keberlangsungan usaha dan penguatan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Going forward, the Board of Commissioners is going to continue to encourage the improvement of the capabilities, competencies, and work effectiveness of all committees to become more adaptive to changes in the business environment, regulatory developments, and the challenges of the ever-evolving electricity industry. Thus, the committees are expected to continue providing strategic support in maintaining business continuity and strengthening sustainable corporate governance.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Changes to the Board of Commissioners Composition

Sepanjang tahun 2025, PLN NP mengalami beberapa perubahan komposisi Dewan Komisaris sebagai bagian dari dinamika tata kelola perusahaan dan penyesuaian kebijakan pemegang saham. Perubahan tersebut dilakukan melalui pengunduran diri anggota Dewan Komisaris serta keputusan Pemegang Saham dalam RUPS Sirkuler yang menetapkan susunan baru Dewan Komisaris Perseroan. Adapun perubahan komposisi Dewan Komisaris selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

There were several changes to the composition of PLN NP Board of Commissioners during 2025 as part of the dynamics of corporate governance and adjustments to shareholder policies. These changes were made through the resignation of the Board of Commissioners members and through a Shareholder resolution at a Circular GMS that determined the new composition of the Company's Board of Commissioners. The changes to the Board of Commissioners during 2025 are as follows:

Periode Period	**Komisaris Utama** President Commissioners	**Komisaris** Commissioners	**Komisaris Independen** Independent Commissioners
1 Januari 2025 – 30 April 2025 January 1, 2025 – April 30, 2025	• Hendra Iswahyudi (PLT Komisaris Utama) Hendra Iswahyudi (Acting President Commissioners)	• Evy Haryadi • Emir Kresna Wardana • Ida Nuryatin Finahari	• Bagus Puruhito • Kenedy • Widjono Hardjanto
1 Mei 2025 – 25 Juni 2025 May 1, 2025 – June 25, 2025	• Hendra Iswahyudi (PLT Komisaris Utama) Hendra Iswahyudi (Acting President Commissioners)	• Emir Kresna Wardana • Ida Nuryatin Finahari	• Bagus Puruhito • Kenedy
26 Juni 2025 – Saat Ini June 26, 2025 – Present	• Edi Srimulyanti (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) Edi Srimulyanti (President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner)	• Ade Armando • Suharyono • M. Pradana Indraputra • Adam Muhammad • Muhammad Syafi'i	

Perubahan komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2025 diawali dengan pemberhentian Saudara Evy Haryadi pada tanggal 23 April 2026 dikarenakan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN") yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi anggota Direksi BUMN dalam ketentuan Pasal 15B UU BUMN sehingga Pemegang Saham dengan suara bulat memutuskan untuk memberhentikan Sdr. Evy Haryadi dari jabatannya sebagai Komisaris dimana pada saat yang bersamaan, yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Transmisi PT PLN (Persero). Selain itu, pengunduran diri Widjono Hardjanto sebagai Komisaris Independen efektif per 1 Mei 2025 karena pertimbangan pribadi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025, dilakukan perubahan komposisi Dewan Komisaris secara menyeluruh melalui pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebelumnya dan pengangkatan susunan Dewan Komisaris baru yang berlaku efektif sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan.

Changes to the Board of Commissioners composition in 2025 began with the dismissal of Evy Haryadi on April 23, 2026, due to the issuance of Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises ("SOEs Law"), which prohibits concurrent positions for the Board of Directors members of SOEs under Article 15B of the SOE Law. Consequently, Shareholders unanimously decided to dismiss Evy Haryadi from his position as Commissioner, while concurrently serving as Transmission Director of PT PLN (Persero). Furthermore, Widjono Hardjanto's resignation as Independent Commissioner was effective May 1, 2025, due to personal considerations that could potentially create a conflict of interest. Subsequently, based on a Shareholder Decision Outside the GMS (Circular) dated June 26, 2025, a comprehensive change in the composition of the Board of Commissioners was made through the dismissal of the previous Board of Commissioners members and the appointment of new Board of Commissioners effective as of the date of the decision.

Mewakili Dewan Komisaris lainnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi, kontribusi, serta pengabdian yang telah diberikan oleh jajaran Dewan Komisaris sebelumnya dalam mendukung penguatan tata kelola perusahaan dan pencapaian kinerja Perusahaan, sekaligus menyampaikan selamat bergabung kepada jajaran Dewan Komisaris yang baru dan optimistis bahwa dengan pengalaman, kompetensi, serta sinergi yang solid, Dewan Komisaris akan mampu memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan arahan strategis bagi keberlanjutan pertumbuhan Perseroan ke depan.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our appreciation and gratitude for the dedication, contributions, and dedication of the previous Board of Commissioners in supporting the strengthening of corporate governance and performance achievements of the Company. We also congratulate the new Board of Commissioners and are optimistic that, with their experience, competence, and solid synergy, the Board of Commissioners will be able to strengthen their supervisory function and provide strategic direction for the Company's sustainable growth going forward.

Apresiasi
Letter of Appreciation

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas langkah strategis PLN NP yang tetap responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi dan industri ketenagalistrikan sepanjang tahun 2025. Perseroan dinilai mampu menjaga kinerja perusahaan dengan baik melalui penguatan keandalan operasional, peningkatan efisiensi, serta pengembangan bisnis yang mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi beserta seluruh jajaran manajemen dan insan PLN NP atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan sepanjang tahun 2025. Penghargaan turut disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, mitra kerja, pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada Perseroan. Dengan fundamental bisnis yang kuat, kapabilitas operasional yang andal, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, Dewan Komisaris optimistis PLN NP akan mampu terus tumbuh dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners highly appreciates strategic steps by PLN NP, which remain responsive and adaptive in facing the dynamics of the economy and the electricity industry during 2025. The Company is considered capable of maintaining strong performance by strengthening operational reliability, increasing efficiency, and developing businesses that support sustainable business growth.

The Board of Commissioners also expresses the highest appreciation to the Board of Directors, all management, and PLN NP employees for their dedication, hard work, and contributions throughout 2025. We also extend our appreciation to our Shareholders, regulators, partners, customers, and all stakeholders for their continued support and trust in the Company. With strong business fundamentals, reliable operational capabilities, and the support of all stakeholders, the Board of Commissioners is optimistic that PLN NP will be able to continue to grow and create sustainable added value for

Jakarta, 30 Mei 2026
Jakarta, May 30, 2026

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners

Edi Srimulyanti
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner

Laporan Direksi
Report from the Board of Directors

Pada tahun 2025, PLN NP berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp98,89 triliun, tumbuh 7,83% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp91,71 triliun. Segmen dengan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan usaha berasal dari Penjualan Tenaga Listrik sebesar 96,03% atau Rp94,97 triliun. Capaian ini mencerminkan ketangguhan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan melalui penerapan strategi transformasi dan efisiensi.

PLN NP managed to record operating revenues in 2025 of Rp98.89 trillion, 7.83% increase compared to Rp91.71 trillion in 2024. Electricity sales contributed the highest revenue, contributing 96.03%, or Rp94.97 trillion. This achievement reflects resilience of the Company in maintaining sustainable growth through the implementation of transformation and efficiency strategies.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,
Dear Shareholders and Stakeholders

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga PLN Nusantara Power dapat terus menjalankan amanah dalam menyediakan energi yang andal sekaligus mendukung transisi energi nasional. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Perseroan dalam mempercepat transformasi menuju perusahaan energi yang lebih hijau, efisien, dan berdaya saing global. Di tengah dinamika industri ketenagalistrikan, perkembangan teknologi, serta meningkatnya tuntutan keberlanjutan, PLN NP terus memperkuat fondasi bisnis melalui pengembangan energi bersih, digitalisasi operasi, peningkatan efisiensi, dan penguatan tata kelola perusahaan. Sejalan dengan tema “Mempercepat Pertumbuhan Berkelanjutan untuk Energi yang Lebih Hijau”, berbagai inisiatif transformasi yang dijalankan sepanjang tahun 2025 tidak hanya mendukung peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga mempertegas komitmen PLN NP dalam menghadirkan energi yang lebih bersih, andal, dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Praise be to Allah SWT, the Almighty God, for the abundance of grace and blessings so that PLN Nusantara Power was capable to continue the mandate in providing reliable energy while supporting the national energy transition. The Company had a crucial momentum in 2025 in accelerating the transformation towards a greener, more efficient, and globally competitive energy company. Amid the dynamics of the electricity industry, technological developments, and increasing demands for sustainability, PLN NP continues to strengthen business foundations through the clean energy development, operations digitalization, efficiency improvement, and corporate governance strengthening. In line with the theme "Accelerating Sustainable Growth for Greener Energy", PL NP implemented various transformation initiatives throughout 2025, not only to support performance improvement, but also to emphasize PLN NP commitment to providing cleaner, more reliable, and more sustainable energy for Indonesia.

Ruly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

Kondisi Ekonomi Makro Global dan Indonesia

Global and Indonesian Macroeconomic Conditions

Tahun 2025 masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian perekonomian global. Ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan internasional, volatilitas harga energi dan komoditas, serta kebijakan moneter global yang cenderung ketat masih menjadi faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Di tengah berbagai tantangan tersebut, perekonomian global tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik dengan pertumbuhan mencapai 3,4%, yang didukung oleh peningkatan aktivitas sektor swasta, investasi berbasis teknologi, serta penguatan sektor-sektor yang terkait dengan transformasi energi dan ekonomi hijau.

Various challenges and uncertainties in the global economy were still appearing in 2025. Geopolitical tensions, international trade uncertainty, energy and commodity price volatility, and tighter global monetary policy continued to impact the global economic growth. Despite these challenges, the global economy continued to indicate considerable resilience, growing by 3.4%, supported by the increased private sector activity, technology-based investment, and strengthening sectors related to energy transformation and the green economy.

Perkembangan tersebut turut memengaruhi industri energi dan ketenagalistrikan global, terutama pada aspek rantai pasok energi primer, dinamika harga bahan bakar, biaya pendanaan, serta percepatan investasi pada teknologi rendah karbon. Di sisi lain, komitmen berbagai negara dalam mencapai target dekarbonisasi dan transisi energi terus mendorong peningkatan investasi pada energi bersih, efisiensi energi, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang lebih berkelanjutan. Di tengah tantangan global tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,11%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,03%, dengan dukungan konsumsi domestik yang kuat, peningkatan investasi, serta kinerja ekspor yang tetap resilien. Stabilitas ekonomi nasional juga terjaga dengan tingkat inflasi sebesar 2,92%, mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

These developments also brought impacts to the global energy and electricity industry, particularly in the primary energy supply chain, fuel price dynamics, financing costs, and accelerating investment in low-carbon technologies. Meanwhile, various countries committed to achieving decarbonization and energy transition targets continues to drive the increased investment in clean energy, energy efficiency, and the development of more sustainable electricity infrastructure. In the middle of these global challenges, the Indonesian economy continues to demonstrate solid performance. National economic growth in 2025 was projected to reach 5.11%, an increase compared to the previous year of 5.03%, supported by strong domestic consumption, increased investment, and resilient export performance. National economic stability was also maintained, with an inflation rate of 2.92%, reflecting the effectiveness of government policies in maintaining public purchasing power and economic stability.

Kondisi makroekonomi yang relatif stabil tersebut memberikan fondasi yang positif bagi perkembangan sektor ketenagalistrikan nasional. Peningkatan aktivitas ekonomi, ekspansi kawasan industri, akselerasi digitalisasi, serta meningkatnya kebutuhan energi masyarakat terus mendorong permintaan listrik. Momentum ini sekaligus membuka peluang bagi PLN NP untuk memperkuat perannya sebagai penyedia solusi energi yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Menyikapi perkembangan tersebut, PLN NP terus memperkuat strategi bisnis melalui optimalisasi kinerja pembangkitan, peningkatan efisiensi operasional, pengembangan energi baru terbarukan, serta percepatan inovasi dan digitalisasi. Berbagai inisiatif tersebut dilakukan untuk

This relatively stable macroeconomic condition leverages positive foundation for the development at the national electricity sector. Increased economic activity, industrial estate expansion, accelerated digitalization, and rising public energy needs continue to drive electricity demand. This momentum also unlocks opportunities for PLN NP to strengthen its role as a provider of reliable, efficient, and sustainable energy solutions. Responding to these developments, PLN NP continues to strengthen its business strategy by optimizing generation performance, increasing operational efficiency, developing new and renewable energy, and accelerating innovation and digitalization. PLN NP applies these initiatives to ensure the

memastikan Perseroan tetap adaptif terhadap dinamika lingkungan usaha, mampu menangkap peluang yang berkembang, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan energi nasional dan percepatan transisi menuju sistem energi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Company remains adaptive to the dynamics of the business environment, being able to seize emerging opportunities, and brings a tangible contribution to supporting national energy security and accelerating the transition to a greener and more sustainable energy system.

Analisis Atas Pencapaian Kinerja 2025
Analysis of 2025 Performance Achievements

Tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi PLN NP. Di tengah dinamika ekonomi global, volatilitas harga energi, serta percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, Perseroan mampu mempertahankan kinerja yang positif melalui pengelolaan operasional yang andal, efisiensi yang berkelanjutan, serta penguatan portofolio bisnis.

PLN NP went through a period full of challenges and opportunities in 2025. Amidst global economic dynamics, energy price volatility, and the accelerated transition to cleaner and more sustainable energy, the Company was able to maintain positive performance through reliable operational management, ongoing efficiency, and a strengthened business portfolio.

Sepanjang tahun 2025, PLN NP membukukan pendapatan usaha sebesar Rp98,89 triliun, meningkat 7,83% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp91,71 triliun. Pendapatan usaha PLN NP didominasi dari penjualan tenaga listrik yaitu sebesar 96,03%. Selanjutnya, kontributor pendapatan usaha berasal dari jasa O&M sebesar 2,18%, konstruksi sebesar 1,18%, dan pendapatan lainnya 0,61%. Selain itu optimalisasi kinerja pembangkitan, pengelolaan aset yang semakin efektif, serta kontribusi berbagai lini usaha yang terus berkembang. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, Perseroan juga mencatatkan laba usaha sebesar Rp14,70 triliun atau meningkat 6,99% dibandingkan tahun 2024. Adapun laba tahun berjalan mencapai Rp13,06 triliun, meningkat 1,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari keberhasilan Perseroan dalam menjaga keandalan operasi pembangkit, mengoptimalkan dispatch pembangkit yang kompetitif, meningkatkan efisiensi biaya operasional, serta memperkuat pengelolaan portofolio bisnis. Selain itu, berbagai inisiatif transformasi yang dijalankan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas, efektivitas pengelolaan aset, dan kemampuan Perseroan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Throughout 2025, PLN NP recorded operating revenues of Rp98.89 trillion, a 7.83% increase compared to Rp91.71 trillion of the previous year. PLN NP gained operating revenues dominated by electricity sales of 96.03%. Furthermore, operating revenues were contributed by O&M services (2.18%), construction (1.18%), and other income (0.61%). Furthermore, optimization of generation performance, increasingly effective asset management, and the continued growth of various business lines contributed to this growth. In line with the increase in revenue, the Company also recorded an operating profit of IDR 14.70 trillion, a 6.99% increase compared to 2024. Current year profit reached IDR 13.06 trillion, a 1.15% increase compared to the previous year. This achievement is the result of the Company's success in maintaining reliable power plant operations, optimizing competitive power plant dispatch, improving operational cost efficiency, and strengthening business portfolio management. Furthermore, various transformation initiatives consistently implemented over the past few years have positively contributed to increased productivity, asset management effectiveness, and ability to create sustainable added value of the Company.

Dari sisi posisi keuangan, total aset Perseroan meningkat menjadi Rp357,67 triliun pada akhir tahun 2025, didorong oleh surplus revaluasi aset, peningkatan jumlah piutang usaha tenaga listrik (menyesuaikan peningkatan pendapatan penjualan) serta peningkatan nilai penyertaan karena laba investasi yg lebih baik. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan usaha sekaligus memperkuat fondasi bisnis untuk mendukung pengembangan jangka panjang.

In terms of financial position, the Company's total assets increased to Rp357.67 trillion at the end of 2025, driven by an asset revaluation surplus, an increase in electricity accounts receivable (adjusted for increased sales revenue), and an increase in equity participation due to improved investment returns. This reflects the Company's ability to maintain business growth while strengthening business foundation to support the long-term development.

Pada aspek operasional, PLN NP berhasil menjaga keandalan pasokan listrik dengan produksi tenaga listrik mencapai 66.919,39 GWh. Capaian tersebut menunjukkan ketahanan operasional Perseroan dalam memastikan ketersediaan energi listrik yang andal bagi masyarakat, industri, dan sektor usaha di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional.

Operationally, PLN NP successfully maintained a reliable electricity supply, producing 66,919.39 GWh. This achievement indicates the Company has operational resilience in ensuring reliable electricity supply for the public, industry, and business sectors amidst the increasing national energy demand.

Selain pencapaian kinerja keuangan dan operasional, Perseroan juga terus mendorong transformasi melalui pengembangan portofolio energi baru terbarukan, implementasi inisiatif dekarbonisasi, akselerasi digitalisasi, serta peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen risiko. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing dan kesiapan Perseroan dalam menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan yang terus berkembang.

Apart from achieving financial and operational performance, the Company keeps encouraging transformation through the development of the new and renewable energy portfolio, the implementation of decarbonization initiatives, the acceleration of digitalization, as well as the improvement of governance and risk management. These various steps are purposed at strengthening the Company's competitiveness and readiness to face the dynamics of the ever-evolving electricity industry.

Direksi menilai bahwa kinerja tahun 2025 menunjukkan resiliensi Perseroan dalam mengelola tantangan sekaligus menangkap peluang usaha secara optimal. Dengan kapabilitas yang semakin matang dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Perseroan optimistis dapat terus memperluas kontribusinya dalam mendukung penyediaan energi nasional yang lebih bersih, tangguh, dan bernilai tambah bagi pembangunan Indonesia.

The Board of Directors assesses that the 2025 performance indicates resilience of the Company in managing challenges while optimally seizing business opportunities. With increasingly mature capabilities and the support of all stakeholders, the Company is optimistic to be capable to expand contribution to supporting the provision of cleaner, more resilient, and more value-added national energy for Indonesia's development.

Strategi dan Kebijakan Perusahaan
Corporate Strategy and Policy

Dalam menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan, percepatan transisi energi, serta meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan dan daya saing bisnis, PLN NP terus memperkuat strategi transformasi perusahaan sebagai landasan untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Strategi tersebut dirumuskan dengan mengoptimalkan kompetensi inti Perseroan, mempercepat inovasi, serta memperkuat kapabilitas organisasi guna mendukung pencapaian visi perusahaan sebagai penyedia solusi energi terdepan yang berkelanjutan.

In response to the dynamics of the electricity industry, the accelerating energy transition, and the increasing demands for business sustainability and competitiveness, PLN NP keeps strengthening the corporate transformation strategy as a foundation for creating sustainable long-term growth. PLN NP formulates this strategy by optimizing the Company's core competencies, accelerating innovation, and strengthening organizational capabilities to support the vision achievement of the Company as a leading provider of sustainable energy solutions.

Sebagai bagian dari PLN Group, PLN NP menyelaraskan arah pengembangan bisnis dengan *Corporate Transformation* 2.0 PLN NP 2024–2028 yang berfokus pada penciptaan nilai, penguatan daya saing, serta percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih. Strategi tersebut diwujudkan melalui tiga pilar utama (*moonshot*), yaitu *Digital* & *Operation Excellence Moonshot*, *Growth Moonshot*, dan NZE (*Net Zero Emission*) *Moonshot*, yang keseluruhannya diperkuat oleh pilar pendukung (*enabler*) yaitu *Launchpad Moonshot*.

As part of the PLN Group, PLN NP aligns its business development direction with PLN NP's Corporate Transformation 2.0 2024–2028, which focuses on value creation, strengthening competitiveness, and accelerating the transition to cleaner energy. The Company actualizes this strategy through three main pillars (moonshots): the Digital & Operation Excellence Moonshot, the Growth Moonshot, and the NZE (Net Zero Emission) Moonshot, all of which are strengthened by the supporting pillar (enabler), the Launchpad Moonshot.

Digital & Operation Excellence Moonshot difokuskan pada transformasi digital dan peningkatan efisiensi operasional untuk mewujudkan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya melalui penguatan *operational excellence*, digitalisasi proses bisnis, serta optimalisasi portofolio aset. Inisiatif ini diarahkan untuk meningkatkan keandalan dan daya saing perusahaan, menekan biaya operasi dan pemeliharaan, serta mengoptimalkan nilai aset melalui peningkatan kinerja pembangkit dan pengelolaan aset yang berorientasi masa depan.

The Digital & Operation Excellence Moonshot focuses on digital transformation and operational efficiency improvements to achieve leading and reliable generation through strengthening operational excellence, digitizing business processes, and optimizing the asset portfolio. The Company built these initiative in order to improve the company's reliability and competitiveness, reduce operating and maintenance costs, as well as optimize asset value through improved power plant performance and future-oriented asset management.

Growth Moonshot difokuskan pada pembangunan bisnis inovatif untuk mendorong diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan melalui pelaksanaan komitmen RUPTL pada pembangkit konvensional, pengembangan *additional demand* termasuk *captive power*, pengembangan jasa O&M, MRO dan *spare part*, perluasan bisnis *Power Solution* seperti EPC ketenagalistrikan, serta pengembangan layanan *end-to-end asset light* dan *beyond power service*. Melalui

The Growth Moonshot focuses on building innovative businesses to drive diversification and sustainable growth through implementing the RUPTL (Electricity Supply Business Plan) commitments for conventional power plants, developing additional demand, including captive power, developing O&M, MRO, and spare part services, expanding the Power Solution business, such as EPC for electricity power plant, and developing end-to-end asset light and beyond power services. Through

berbagai inisiatif tersebut, Perseroan berupaya memperluas kapasitas usaha, menangkap peluang pasar baru, dan meningkatkan sumber pendapatan di luar bisnis inti pembangkitan.

these initiatives, the Company seeks to expand business capacity, seize new market opportunities, and increase revenue sources beyond the core generation business.

Sementara itu, ***Net Zero Emission (NZE) Moonshot*** menjadi fokus strategis dalam mengakselerasi portofolio bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon. Implementasinya dilakukan melalui empat inisiatif strategis, yaitu ekspansi pembangkit listrik tenaga air, pengembangan *centralized & utility-scale solar* PV, pengembangan *wind power* dan EBT lainnya, serta transisi aset non-EBT melalui program biomassa *co-firing*, de-dieselisasi, *hybrid*, dan gasifikasi. Seluruh inisiatif tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, percepatan transisi energi, serta pencapaian sasaran RJPP Perusahaan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.

Meanwhile, the **Net Zero Emission (NZE)** Moonshot is a strategic focus in accelerating the New and Renewable Energy (NRE) business portfolio to support the achievement of zero carbon emissions. The Company implements this through four strategic initiatives: hydropower plant expansion, centralized and utility-scale solar PV development, wind power and other renewable energy development, and the transition of non-renewable assets through biomass co-firing, de-dieselization, hybrid, and gasification programs. All these initiatives purposes at supporting renewable energy development, accelerating the energy transition, and achieving the Company's Long-Term Development Plan targets towards a more sustainable energy system.

Ketiga pilar *moonshot* utama didukung oleh *Launchpad Moonshot* sebagai enabler yang memperkuat kapabilitas organisasi untuk mendukung kebutuhan bisnis masa depan. Implementasinya dilakukan melalui empat kategori utama, yaitu *Governance, Technology Innovation, Financial Management,* dan *Organizational Development*, yang mencakup penguatan tata kelola, transformasi digital dan inovasi teknologi, pengelolaan kinerja dan keuangan, serta pengembangan organisasi dan kompetensi SDM guna memastikan pelaksanaan strategi perusahaan yang efektif dan berkelanjutan. Melalui penguatan fondasi tersebut, PLN NP memastikan bahwa setiap inisiatif transformasi dapat dijalankan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

The three main moonshot pillars are supported by the Moonshot Launchpad, which acts as an enabler, strengthening organizational capabilities to support future business needs. Implementation is carried out through four main categories: Governance, Technology Innovation, Financial Management, and Organizational Development. These areas encompass governance strengthening, digital transformation and technological innovation, performance and financial management, as well as organizational development and workforce competency enhancement to ensure the effective and sustainable execution of the Company's strategy. By strengthening these foundations, PLN NP ensures that each transformation initiative is able to be implemented effectively, measurably, and sustainably.

Implementasi ketiga pilar transformasi telah memberikan hasil positif sepanjang tahun 2025 melalui peningkatan keandalan dan efisiensi operasi, pengembangan sumber pendapatan baru, serta penguatan peran Perseroan dalam transisi energi. Dengan fondasi yang semakin kuat, PLN NP optimistis dapat terus menciptakan nilai tambah dan mendukung pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional yang lebih berkelanjutan.

The three transformation pillars leverage positive results throughout 2025 through increased operational reliability and efficiency, the development of new revenue sources, and strengthening the Company's role in the energy transition. With an increasingly strong foundation, PLN NP is optimistic be able to keep creating added value and support the development of a more sustainable national electricity system.

Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Processes Undertaken by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

Direksi memastikan implementasi strategi perusahaan berjalan efektif melalui cascading sasaran strategis ke dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), *Key Performance Indicator* (KPI) korporat, KPI unit, dan program kerja seluruh fungsi. Pelaksanaan strategi dimonitor secara berkala melalui rapat manajemen, *Performance Business Review*, *Performance Dialogue*, serta mekanisme pengelolaan risiko terintegrasi untuk memastikan setiap inisiatif strategis berjalan sesuai target.

Untuk menjaga keselarasan pelaksanaan strategi, Direksi melakukan sosialisasi secara terbuka kepada seluruh level organisasi agar arah kebijakan perusahaan dapat dipahami, diinternalisasi, dan dijalankan secara konsisten. Direksi juga memastikan penataan sumber daya manusia yang tepat, mendorong budaya inovasi, serta memperkuat kemampuan adaptasi perusahaan terhadap dinamika bisnis, perkembangan teknologi, dan tuntutan keberlanjutan usaha.

Dalam rangka memantau efektivitas implementasi strategi, Direksi melaksanakan *Performance Business Review* secara berkala setiap bulan sebagai forum evaluasi kinerja perusahaan, baik dari aspek operasional, keuangan, maupun penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan PLN NP Grup. Forum ini dihadiri oleh Direksi, senior leader Kantor Pusat dan Unit, serta perwakilan anak perusahaan. Melalui forum tersebut, Direksi memberikan arahan strategis, mengevaluasi capaian kinerja, serta menetapkan rekomendasi perbaikan yang menjadi tindak lanjut pada periode berikutnya guna memastikan pencapaian target perusahaan secara berkelanjutan.

The Board of Directors ensures the Company effectively implement the strategy by cascading strategic objectives into the Company's Long-Term Plan (LTCP), the Annual Budget and Operational Plan (ABOP), Corporate Key Performance Indicators (KPIs), KPIs unit, and work programs for the entire functions. PLN NP regularly monitors the strategy implementation through management meetings, Performance Business Reviews, Performance Dialogues, and integrated risk management mechanisms to ensure each strategic initiative is on target.

To maintain alignment in strategy implementation, the Board of Directors transparently disseminates to all levels of the organization so that the Company's policy direction is understood, internalized, and implemented consistently. The Board of Directors also ensures appropriate human resource management, fosters a culture of innovation, and strengthens the company's ability to adapt to business dynamics, technological developments, and the demands of business continuity.

To monitor the effectiveness of strategy implementation, the Board of Directors analyses monthly Performance Business Reviews as a forum for evaluating the Company's performance, including operational and financial aspects, as well as strengthening occupational health and safety and (OHS) within the PLN NP Group. This forum is attended by the Board of Directors, senior leaders from the Head Office and Units, and representatives from subsidiaries. Through this forum, the Board of Directors provides strategic direction, evaluates performance achievements, and establishes recommendations for improvement that will be followed up in the following period to ensure the Company's targets are continuously achieved.

Selain *Performance Business Review*, PLN NP juga menyelenggarakan *Performance Dialogue* secara berkala bersama Divisi Pengendalian Kinerja Korporat (DIVPKK). Forum ini bertujuan untuk membahas capaian kinerja perusahaan, mengevaluasi realisasi target, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan. Melalui mekanisme tersebut, PLN NP memastikan pengelolaan kinerja tetap selaras dengan target korporat sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan strategi dan program kerja perusahaan.

More than Performance Business Review, PLN NP also holds regular Performance Dialogues with the Corporate Performance Control Division (DIVPKK). This forum aims to discuss performance achievements of the Company, evaluate target realization, identify challenges faced, and formulate necessary improvement measures. Through this mechanism, PLN NP ensures that performance management remains aligned with corporate targets while strengthening its oversight function regarding the strategies and work programs implementation of the Company.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis
The Board of Directors Role in Formulating Strategic Strategies and Policies

Direksi secara aktif memimpin proses perumusan arah pengembangan perusahaan melalui evaluasi lingkungan bisnis, analisis risiko, kajian prospek industri, serta penyelarasan dengan arah transformasi PLN Group dan kebijakan Pemegang Saham. Proses tersebut dilakukan bersama jajaran manajemen dengan mempertimbangkan RJPP, RKAP, profil risiko, serta aspirasi pemegang saham guna memastikan setiap kebijakan yang ditetapkan selaras dengan visi perusahaan dan kebutuhan pengembangan bisnis jangka panjang.

The Board of Directors actively supervises the process of formulating development direction of the Company through business environment evaluation, risk analysis, industry outlook review, as well as alignment with the PLN Group transformation direction and shareholder policies. PLN NP collaboratively implements it with management, considering the RJPP (Long-Term Plan), ABOP (Annual Budget and Operational Plan), risk profiles, and the shareholders aspirations to ensure that each policy aligns with the vision as well as long-term business development needs of the Company.

Dalam menjalankan peran tersebut, Direksi memastikan bahwa seluruh strategi dan kebijakan perusahaan tidak hanya responsif terhadap berbagai tantangan eksternal, tetapi juga mampu mendorong transformasi internal secara berkelanjutan. Arah pengembangan yang ditetapkan dituangkan secara sistematis ke dalam RJPP dan RKAP sebagai pedoman utama pelaksanaan operasional maupun pengembangan usaha Perseroan. Melalui pendekatan tersebut, PLN NP terus memperkuat kinerja operasional, menjaga keandalan dan efisiensi pembangkit, memperluas sumber pertumbuhan melalui pengembangan bisnis beyond kWh, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

In performing this role, the Board of Directors ensures that all company strategies and policies are not only responsive to various external challenges but also capable of driving sustainable internal transformation. The LTCP and ABOP as the primary guidelines for the Company's operational implementation and business development systematically outlines the established development direction. Through this approach, PLN NP continues to strengthen operational performance, maintain power plant reliability and efficiency, expand growth sources through business development beyond kWh, and create sustainable added value for the entire stakeholders.

Sebagai bagian dari implementasi strategi perusahaan, Direksi senantiasa mengawal proses sinkronisasi antara RJPP dan RKAP PLN NP. Penyelarasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa target jangka panjang perusahaan dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam program kerja tahunan yang bersifat taktis dan operasional. Melalui proses ini, Direksi memastikan

In implementing the Company's strategy, the Board of Directors continuously oversees the synchronization process between PLN NP's LTCP and ABOP. This alignment ensures that the Company's long-term targets are effectively translated into tactical and operational annual work programs. Through this process, the Board of Directors ensures that there is

tidak terdapat kesenjangan (*gap*) antara sasaran strategis jangka panjang dengan rencana kerja tahun 2025 yang dituangkan dalam RKAP. Selain itu, Direksi juga menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Korporat Tahun 2025 sebagai forum strategis untuk membahas isu-isu prioritas perusahaan, merumuskan solusi atas tantangan sektoral, serta memperkuat koordinasi antar unit kerja. Forum yang dihadiri oleh segenap jajaran Direksi, *Senior Leader*, hingga pimpinan unit dan anak perusahaan, menjadi *milestone* penting dalam memastikan seluruh program kerja yang tercantum dalam RKAP 2025 dapat dijalankan secara efektif, terintegrasi, dan akuntabel di seluruh lini direktorat. Dengan arah kebijakan yang terukur dan terintegrasi, Direksi berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing perusahaan, serta memperkuat posisi PLN NP sebagai perusahaan pembangkitan terdepan di tingkat nasional maupun regional.

no gap between the long-term strategic targets and the 2025 work plan outlined in the RKAP. Furthermore, the Board of Directors also held the 2025 Corporate Working Meeting (Raker) as a strategic forum to discuss priority issues, formulate solutions to sectoral challenges, and strengthen coordination between work units within the Company. The forum, attended by all levels of the Board of Directors, Senior Leaders, and heads of units and subsidiaries, is an important milestone in ensuring that all work programs listed in the 2025 RKAP can be implemented effectively, integrated, and accountably across the whole directorate lines. With a measurable and integrated policy direction, the Board of Directors is committed to realizing sustainable business growth, increasing the Company's competitiveness, and strengthening PLN NP's position as a leading generation company at the national and regional levels.

Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan
Comparison between Achieved Results and Targeted Results

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengeksekusi program kerja dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui pemantauan dan evaluasi berkala oleh Direksi, sebagian besar indikator kinerja utama tercatat memenuhi bahkan melampaui target RKAP 2025, mencerminkan efektivitas pengelolaan usaha di tengah berbagai dinamika industri dan ekonomi.

Throughout 2025, the Company represented strong performance in implementing work programs and achieving the established targets. Through regular monitoring and evaluation by the Board of Directors, most key performance indicators fulfilled or even exceeded the 2025 Annual Budget and Operational Plan (ABOP) targets, reflecting effective business management amid the various industry and economic dynamics.

Secara keseluruhan, realisasi *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan mencapai skor 105,66 dari target 100, yang menempatkan kinerja manajemen dalam kategori baik. Capaian tersebut didukung oleh kinerja pada aspek Nilai Ekonomi dan Sosial, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Talenta. Meskipun demikian, Perseroan masih mencermati beberapa indikator yang belum mencapai target, khususnya pada aspek efisiensi konsumsi bahan bakar batubara (SFC Batubara), EPC *& Project Completion*, serta pengendalian penggunaan anggaran investasi sebagai area perbaikan berkelanjutan.

Overall, the Company's Key Performance Indicator (KPI) achieved a score of 105.66 out of a target of 100, placing management performance in the good category. This achievement was supported by performance in the aspects of Economic and Social Value, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Development, and Talent Development. However, the Company is still monitoring several indicators that have not yet achieved their targets, particularly in coal fuel consumption efficiency (SFC Batubara), EPC & Project Completion, and investment budget control as areas for continuous improvement.

Dari sisi keuangan, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp98,89 triliun atau 96,96% dari target RKAP. Meskipun pendapatan berada sedikit di bawah target, Perseroan berhasil mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp13,06 triliun atau mencapai

Financially, the Company recorded operating revenues of Rp98.89 trillion, or 96.96% of the RKAP target. Despite revenue falling slightly below target, the Company managed to record a profit for the year of Rp13.06 trillion, or 126.43% of the target. This

126,43% dari target. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Perseroan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan, tetapi juga berhasil menjaga kualitas pertumbuhan melalui pengelolaan biaya yang lebih efisien, peningkatan usaha lainnya serta kontribusi laba asosiasi PLN NP. Dengan demikian, pertumbuhan yang dicapai tidak semata-mata berasal dari peningkatan volume usaha, tetapi juga dari keberhasilan transformasi operasional yang dijalankan secara konsisten. Pada saat yang sama, total aset Perseroan mencapai Rp357,67 triliun atau 102,11% dari target, sementara ekuitas tercatat sebesar Rp315,15 triliun atau 102,20% dari target, mencerminkan fundamental keuangan yang semakin kuat.

achievement indicates that the Company was not only able to increase revenue but also maintained quality growth through more efficient cost management, improvements in other businesses, and the associated profits contribution of PLN NP. Therefore, the growth achieved was not solely driven by increased business volume, but also by the success of the operational transformation consistently implemented. At the same time, the Company's total assets reached Rp357.67 trillion, or 102.11% of the target, while equity was recorded at Rp315.15 trillion, or 102.20% of the target, reflecting increasingly strong financial fundamentals.

Pada aspek operasional, PLN NP berhasil menjaga keandalan pembangkit pada tingkat yang tinggi. Berbagai indikator utama seperti *Equivalent Availability Factor* (EAF), *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR), dan *Net Capacity Factor* (NCF) baik pada pembangkit batubara maupun gas dan non-batubara umumnya melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan kesiapan pembangkit, optimalisasi pemeliharaan berbasis *operational excellence*, percepatan *recovery* gangguan, serta penguatan pengelolaan risiko aset. Di sisi lain, indikator efisiensi pembangkit batubara seperti NPHR dan SFC Batubara berada sedikit di bawah target sebagai konsekuensi meningkatnya implementasi program *co-firing* biomassa yang memiliki nilai kalor lebih rendah dibandingkan batubara konvensional.

In terms of operational, PLN NP successfully maintained high levels of power plant reliability. Key indicators, such as the Equivalent Availability Factor (EAF), Equivalent Forced Outage Rate (EFOR), and Net Capacity Factor (NCF), for both coal-fired and gas-fired and non-coal-fired power plants, generally exceeded the established targets. This achievement was supported by increased power plant readiness, optimized maintenance based on operational excellence, accelerated disruption recovery, and strengthened asset risk management. Meanwhile, coal-fired power plant efficiency indicators, such as NPHR and SFC, were slightly below target due to the increased implementation of biomass co-firing programs, which have a lower calorific value than conventional coal.

Keandalan operasi tersebut turut mendorong realisasi produksi tenaga listrik sebesar 66.919,39 GWh atau 105,09% dari target serta penjualan tenaga listrik sebesar 63.285,67 GWh atau 105,07% dari target. Perseroan juga berhasil meningkatkan pangsa pasar menjadi 20,63%, melampaui target sebesar 18,07%, yang menunjukkan daya saing dan kontribusi PLN NP dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat.

This operational reliability contributed to electricity production of 66,919.39 GWh, or 105.09% of the target, and electricity sales of 63,285.67 GWh, or 105.07% of the target. The Company also improved the market share to 20.63%, exceeding the target of 18.07%. This demonstrates PLN NP's competitiveness and contribution to meeting the nation's growing electricity demand.

Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, realisasi biaya pendidikan dan pelatihan mencapai Rp18,56 miliar atau 80,48% dari target. Capaian ini dipengaruhi oleh penyesuaian program pengembangan kompetensi dan penerapan pengelolaan pelatihan secara terpusat di lingkungan PLN Group. Meskipun demikian, Perseroan tetap berkomitmen memperkuat kapabilitas SDM sebagai salah satu fondasi utama transformasi dan pertumbuhan jangka panjang.

In the area of human resource development, education and training expenditures reached Rp18.56 billion, or 80.48% of the target. This achievement was influenced by adjustments to competency development programs and the implementation of centralized training management within the PLN Group. Nevertheless, the Company remains committed to strengthening human resource capabilities as a key foundation for long-term transformation and growth.

Dalam pengelolaan kinerja Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), PLN NP berhasil mencapai *zero accident* sepanjang tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap keselamatan kerja. Di bidang pengelolaan lingkungan, PLN NP kembali mencatatkan prestasi yang membanggakan melalui perolehan 4 PROPER Emas, 12 PROPER Hijau, dan 56 PROPER Biru. Capaian ini meneguhkan posisi PLN NP sebagai peraih PROPER Emas terpanjang di lingkungan PLN Group, yakni selama delapan tahun berturut-turut. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, kami terus meningkatkan pengelolaan pembangkit dengan mengacu pada standar kelas dunia, seperti PAS 55 dan sertifikasi ISO 55001:2014, guna memastikan keamanan dan keandalan operasional pembangkit tetap terjaga secara optimal.

In managing Occupational Health, Safety, and Environment (OHSE) performance, PLN NP successfully achieved zero accidents throughout 2025, demonstrating a strong commitment to workplace safety. In environmental management, PLN NP again recorded impressive achievements by obtaining 4 Gold PROPERs, 12 Green PROPERs, and 56 Blue PROPERs. This achievement solidifies PLN NP's position as the longest-record holder of Gold PROPERs within the PLN Group, having achieved eight consecutive years. As part of our ongoing efforts, we continue to improve power plant management by adhering to world-class standards, such as PAS 55 and ISO 55001:2014 certification, to ensure optimal operational safety and reliability.

Direksi menilai bahwa hasil yang dicapai pada tahun 2025 mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, keandalan operasional, efisiensi keuangan, penguatan tata kelola, serta implementasi keberlanjutan. Capaian tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi PLN NP untuk mempercepat pertumbuhan berkelanjutan dan mendukung terwujudnya sistem energi yang lebih hijau, tangguh, dan berdaya saing.

The Board of Directors believes that the results achieved in 2025 reflect the Company's success in maintaining a balance between business growth, operational reliability, financial efficiency, strengthened governance, and sustainability implementation. These achievements provide a strong foundation for PLN NP to accelerate sustainable growth and support the realization of a greener, more resilient, and more competitive energy system.

Kendala yang Dihadapi dan Langkah Penyelesaiannya
Challenges Encountered and Mitigation Measures

Tahun 2025 diwarnai berbagai tantangan yang memengaruhi pencapaian beberapa indikator kinerja utama Perseroan. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan efisiensi operasional pembangkit, penyelesaian proyek strategis, serta optimalisasi pelaksanaan investasi. Perseroan secara proaktif melakukan berbagai langkah perbaikan dan penguatan pengelolaan guna menjaga keandalan operasi, mempercepat penyelesaian proyek, serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan.

Various challenges marked 2025 that leveraged several key performance indicators achievement of the Company. These challenges primarily relate to the operational efficiency of power plants, the completion of strategic projects, and the optimization of investment implementation. The Company proactively implemented various improvement and management strengthening measures to maintain operational reliability, accelerate project completion, and increase the effectiveness of the company's resource utilization.

Berikut tantangan yang dihadapi dan langkah penyelesaiannya:

1. SFC Batubara (95,86% dari target)

   Pencapaian indikator SFC Batubara dipengaruhi oleh produksi pembangkit yang lebih rendah dari asumsi perencanaan, keterbatasan pasokan batubara dengan spesifikasi yang sesuai, serta kualitas energi primer yang belum optimal. Selain itu, nilai kalor biomassa yang relatif rendah turut memengaruhi

The following are the challenges faced and their remedial measures:

1. Coal SFC (95.86% of target)

   Achievement of the Coal SFC indicator was affected by lower-than-planned power plant production, limited coal supply with appropriate specifications, and suboptimal primary energy quality. Furthermore, the relatively low calorific value of biomass also impacted the efficiency of fuel consumption at

efisiensi konsumsi bahan bakar pembangkit. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perseroan melakukan optimalisasi pemenuhan kalori energi primer melalui penyesuaian spesifikasi batubara, penguatan pengelolaan *stockpile*, serta kajian implementasi *coal dryer*. Perseroan juga meningkatkan efisiensi operasi pembangkit melalui evaluasi NPHR, perbaikan peralatan, *combustion tuning*, serta penguatan digitalisasi operasi melalui pemanfaatan iCore dan *Digital Power Plant* (DPP).

2. EPC & *Project Completion* (92,20% dari target)
   Indikator EPC & *Project Completion* belum mencapai target akibat adanya sejumlah proyek strategis yang mengalami penyesuaian jadwal penyelesaian, terutama terkait proses perizinan, penyelesaian dokumen legal, persetujuan regulator, dan pemenuhan berbagai persyaratan administrasi proyek. Sebagai langkah mitigasi, Perseroan mempercepat proses perizinan, memperkuat koordinasi dengan regulator dan pemangku kepentingan terkait, serta melakukan monitoring secara berkala terhadap progres proyek, penyelesaian *due diligence*, dan pemenuhan persyaratan legal guna memastikan pencapaian milestone sesuai target yang telah ditetapkan.

3. Pengendalian Penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2025 (95,09% dari target)

   Pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh belum optimalnya penyerapan anggaran pada beberapa program investasi strategis yang masih dalam tahap pelaksanaan. Untuk meningkatkan efektivitas realisasi investasi, Perseroan memperkuat perencanaan dan pengendalian anggaran melalui optimalisasi rencana investasi, *monitoring* dan evaluasi berkala atas progres pelaksanaan program, serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait guna mempercepat proses penugasan proyek dan penyelesaian mekanisme pelaksanaan investasi. Langkah ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi realisasi anggaran dan percepatan penyelesaian program investasi pada tahun-tahun mendatang.

power plants. To address these challenges, the Company optimized the fulfillment of primary energy calories by adjusting coal specifications, strengthening stockpile management, and reviewing the implementation of coal dryers. The Company also improved power plant operational efficiency through NPHR evaluation, equipment improvements, combustion tuning, and strengthening operational digitalization through the use of iCore and Digital Power Plant (DPP).

2. EPC & Project Completion (92.20% of target)
   The EPC & Project Completion indicator did not reach its target due to several strategic projects experiencing adjustments to their completion schedules, particularly related to the permitting process, legal document completion, regulatory approvals, and fulfilment of various project administrative requirements. As a mitigation measure, the Company expedited the permitting process, strengthened coordination with regulators and relevant stakeholders, and conducted regular monitoring of project progress, due diligence, and legal requirements to ensure milestones were achieved according to the established targets.

3. Control of Investment Budget Utilization in Accordance with the 2025 Work Plan and Budget (95.09% of target)
   The achievement of this indicator was influenced by the suboptimal budget absorption of several strategic investment programs still in the implementation phase. To improve the effectiveness of investment realization, the Company strengthened budget planning and control through investment plan optimization, periodic monitoring and evaluation of program implementation progress, and intensive coordination with various relevant parties to expedite the project assignment process and finalize investment implementation mechanisms. These steps are expected to support budget optimization and accelerated investment program completion in the upcoming years.

Pengelolaan SDM Secara Berkelanjutan
Sustainable Human Resource Management

Dalam rangka memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mendukung transformasi bisnis perusahaan, PLN NP terus mengembangkan kapabilitas karyawan melalui berbagai program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi yang terstruktur. Program pengembangan tersebut disusun berdasarkan hasil *Learning Need Analysis* (LNA) dan pemetaan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan organisasi serta pengembangan karier karyawan.

In the event to strengthen the quality of the Company's human resources and support business transformation, PLN NP continues to develop employee capabilities through various structured training, certification, and competency development programs. These development programs are based on the results of a Learning Needs Analysis (LNA) and competency mapping, aligned with organizational needs and employee career development.

Sepanjang tahun 2025, PLN NP telah memperkuat implementasi *Human Capital Analytics* dan pengembangan sistem pengelolaan SDM berbasis digital guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pengelolaan talenta dan pengembangan kompetensi. Hingga akhir tahun, PLN NP telah menyelenggarakan 547 program pembelajaran yang diikuti oleh 23.808 peserta, mencakup pelatihan teknis dan nonteknis, sertifikasi profesi, serta program persiapan purnabakti.

Throughout 2025, PLN NP strengthened the implementation of Human Capital Analytics and the development of a digital-based HR management system to support more effective decision-making in talent management and competency development. By year's end, PLN NP had organized 547 learning programs, attended by 23,808 participants, including technical and non-technical training, professional certification, and retirement preparation programs.

Berbagai program yang dilaksanakan difokuskan pada penguatan kompetensi di bidang operasional pembangkit, transisi energi, manajemen proyek, pengelolaan risiko, keberlanjutan, digitalisasi, kepemimpinan, dan pengembangan talenta. Melalui pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, PLN NP berkomitmen membangun SDM yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi tantangan industri ketenagalistrikan di masa depan. Adapun realisasi biaya pendidikan dan pelatihan mencapai Rp18,56 miliar atau 80,48% dari target RKAP. Pencapaian yang berada di bawah target terutama dipengaruhi oleh penyesuaian program diklat akibat alokasi anggaran yang ditetapkan PLN bagi PLN NP lebih rendah dari rencana awal, serta penerapan pengelolaan diklat secara terpusat melalui Pusdiklat PLN untuk seluruh PLN Group.

The Company implements various programs focused on strengthening competencies in power plant operations, energy transition, project management, risk management, sustainability, digitalization, leadership, and talent development. Through continuous competency development, PLN NP is committed to developing superior, adaptive human resources that are ready to face the future challenges of the electricity industry. Education and training costs reached Rp18.56 billion, or 80.48% of the RKAP target. The lower-than-target achievement was primarily due to adjustments to the training program due to PLN's lower-than-planned budget allocation for PLN NP, as well as the implementation of the centralized training management through the PLN Training Center (Pusdiklat PLN) for the entire PLN Group.

Sebagai bagian dari pengelolaan SDM yang berkelanjutan, PLN NP juga secara berkala mengukur tingkat keterikatan karyawan terhadap Perusahaan melalui *Employee Experience Survey*. Pada tahun 2025, survei menunjukkan skor sebesar 83,63%", menunjukkan tingginya semangat dan loyalitas karyawan terhadap Perusahaan. Direksi optimis bahwa peningkatan kualitas SDM secara konsisten akan terus mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing PLN NP di tengah persaingan industri ketenagalistrikan yang semakin dinamis.

As part of sustainable HR management, PLN NP also periodically measures employee engagement levels through the Employee Experience Survey. In 2025, the survey showed a score of 83.63%, demonstrating high employee enthusiasm and loyalty to the Company. The Board of Directors is optimistic that consistent improvements in HR quality will continue to drive PLN NP's productivity and competitiveness amidst the increasingly dynamic electricity industry.

Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
Internal Control System and Risk Management

Direksi meyakini bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko yang efektif merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan ketahanan perusahaan, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Perseroan. Oleh karena itu, PLN NP terus memperkuat kedua sistem tersebut secara terintegrasi sebagai bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

The Board of Directors believes that implementing an effective Internal Control System and Risk Management is a primary foundation for maintaining business sustainability, enhancing corporate resilience, and supporting strategic goals achievement of the Company. Therefore, PLN NP continues to strengthen both systems in an integrated manner as part of its implementation of good corporate governance.

Dalam pengelolaan Sistem Pengendalian Internal, PLN NP menerapkan kerangka kerja yang mengacu pada *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) dengan pendekatan *Three Lines Model*. Sistem ini dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan, perlindungan aset perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengendalian internal dilaksanakan melalui penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

In managing Internal Control System, PLN NP applies a framework based on the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) with the Three Lines Model approach. This system is designed to provide a reasonable assurance regarding operational effectiveness and efficiency, reporting reliability, protection of company assets, and compliance with applicable laws and regulations. PLN NP applies internal control through strengthening the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and ongoing monitoring and evaluation.

Sejalan dengan itu, PLN NP juga menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengacu pada prinsip *Enterprise Risk Management* yang selaras dengan standar ISO 31000:2018. Pengelolaan risiko dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi, pengukuran, penanganan, pencatatan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan risiko di seluruh tingkatan organisasi. Pada tahun 2025, Perseroan terus memperkuat kapabilitas manajemen risiko melalui penyempurnaan kebijakan, pengembangan *Early Warning System* (EWS), pengelolaan risiko utama (*top risks*) dan emerging risks, serta optimalisasi pemanfaatan sistem digital I-CARE (*Integrated - Compliance, Risk Management, Effective and Efficient Operation*). Sepanjang tahun 2025, PLN NP mengelola 14 risiko utama yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran strategis perusahaan, meliputi aspek operasional, keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan siber, penyelesaian proyek strategis, pengembangan bisnis, pasokan energi primer, transisi energi, perubahan iklim, kesiapan organisasi dan sumber daya manusia, kepatuhan terhadap regulasi, digitalisasi proses bisnis, serta risiko keuangan. Untuk memastikan

Consistently, PLN NP also implements Integrated Risk Management, which adheres to Enterprise Risk Management principles, aligned with the ISO 31000:2018 standard. The Company carries out the risk management systematically, starting from identification, measurement, handling, recording, to monitoring, evaluation, and reporting of risks at all levels of the organization. In 2025, the Company kept strengthening the risk management capabilities through policy refinement, development of an Early Warning System (EWS), management of top risks and emerging risks, and optimization of the I-CARE (Integrated Compliance, Risk Management, Effective and Efficient Operation) digital system. Throughout 2025, PLN NP managed 14 key risks that could potentially impact the achievement of the Company's strategic objectives, including operational aspects, occupational safety and health, cybersecurity, strategic project completion, business development, primary energy supply, energy transition, climate change, organizational and human resource readiness, regulatory compliance, business process digitalization, and financial risk. To ensure these risks remain at an acceptable level, the Company

risiko-risiko tersebut tetap berada dalam tingkat yang dapat diterima, Perseroan menerapkan berbagai langkah mitigasi melalui penguatan keandalan operasi, peningkatan budaya K3, pengamanan sistem digital, optimalisasi pengelolaan proyek dan energi primer, pengembangan kapabilitas SDM, serta pemanfaatan sistem manajemen risiko yang terintegrasi.

will implement various mitigation measures through strengthening operational reliability, enhancing its OHS culture, securing digital systems, optimizing project and primary energy management, developing human resource capabilities, and utilizing an integrated risk management system.

Direksi secara berkala menerima laporan pengendalian internal dan manajemen risiko dari unit kerja terkait, Satuan Audit Internal, serta Bidang Risk and Compliance untuk memastikan seluruh risiko strategis dan operasional dikelola secara memadai. Hasil pemantauan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kinerja, pengambilan keputusan strategis, serta upaya perbaikan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan dan daya saing perusahaan. Melalui penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko yang terintegrasi, PLN NP berkomitmen menjaga keseimbangan antara pencapaian target bisnis, pengelolaan risiko yang prudent, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Directors regularly receives internal control and risk management reports from the relevant work units, the Internal Audit Unit, and the Risk and Compliance Department to ensure all strategic and operational risks are adequately managed. The results of this monitoring form a fundamental part of the performance evaluation process, strategic decision-making, and continuous improvement efforts to strengthen the company's resilience and competitiveness. By strengthening the integrated Internal Control and Risk Management System, PLN NP is committed to maintaining a balance between achieving business targets, prudent risk management, and creating long-term value for shareholders and all stakeholders.

Komitmen Menjaga Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan

Commitment to Maintaining the Quality of Sustainable Corporate Governance Implementation

Direksi meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) merupakan fondasi utama dalam menciptakan nilai jangka panjang, menjaga keberlanjutan usaha, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, PLN NP senantiasa berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan secara konsisten di seluruh tingkatan organisasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelarasan penerapan GCG dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha, dengan mengedepankan empat pilar utama governansi korporat, yaitu etika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Pilar-pilar ini merupakan pengembangan dari nilai dasar GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness) yang kini menjadi landasan operasional di seluruh lini perusahaan.

The Board of Directors believes that good corporate governance (GCG) is the primary foundation for creating long-term value, maintaining business sustainability, and enhancing the stakeholders trust. Therefore, PLN NP is consistently committed to maintaining and improving the quality of corporate governance implementation at all levels of the organization. The Company actualizes this commitment through GCG implementation alignment in every decision-making process and business activity, prioritizing the four main pillars of corporate governance: ethics, transparency, accountability, and sustainability. These pillars are an extension of the core GCG values (transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness), which now serve as the operational foundation across all levels of the Company.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap perkembangan regulasi GCG di BUMN, PLN NP telah mengadopsi berbagai ketentuan dan regulasi terkini yang relevan, termasuk Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan BUMN yang ditetapkan Pemerintah. Guna memantau implementasi GCG, penilaian GCG tahun 2025 dilakukan menggunakan metodologi ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI), dan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 yang dijelaskan secara rinci melalui Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Hasil penilaian GCG PLN NP tahun 2025 menunjukkan sebagai berikut:

To comply with the evolving GCG regulations in state-owned enterprises (SOEs), PLN NP has adopted various relevant provisions and regulations, including Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, applicable laws and regulations, as well as policies and regulations related to SOE management established by the Government. To monitor GCG implementation, PLN NP assessed the 2025 GCG using the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) methodology, the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI), and FSA Regulation No. 21/POJK.04/2015, which is explained in detail through FSA Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE

96,19 poin points

Level 1: **84,68** poin points
Level 2: **11,51** poin points

KNKG

rekomendasi reccommendations
Apply: **57** *Explain*: **24**

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

rekomendasi reccommendations
Comply: **20** *Explain*: **5**

Pada tahun 2025, PLN NP juga melaksanakan pengukuran *Maturity Level* GCG Korporat dengan capaian skor 3,10 dari target 2,60.

In 2025, PLN NP also assessed the Corporate GCG Maturity Level, achieving a score of 3.10 out of a target of 2.60.

PLN NP juga terus memperkuat budaya integritas melalui implementasi kode etik, pengelolaan benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor. Berbagai inisiatif tersebut menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas.

PLN NP also remains to strengthen the culture of integrity through the implementation of a code of ethics, conflict of interest management, gratuity control, Anti-Bribery Management System (SMAP), and Whistleblowing System (WBS) that ensures confidentiality and protection for whistleblowers. These initiatives are essential to building a professional, transparent, and integrity-based work environment.

PLN NP juga terus mendorong harmonisasi penerapan tata kelola pada seluruh unit operasi dan entitas anak guna memastikan standar pengelolaan yang selaras, efektif, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perseroan mendorong seluruh anak perusahaan untuk melakukan asesmen tata kelola menggunakan Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI) sebagai acuan dalam

PLN NP also continues to promote harmonization of governance implementation across all operating units and subsidiaries to ensure aligned, effective, and sustainable management standards. As part of this effort, the Company encourages all subsidiaries to apply governance assessments using the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) as a reference for measuring the maturity

mengukur tingkat kematangan penerapan governansi, mengidentifikasi area perbaikan, serta memperkuat praktik tata kelola yang sejalan dengan standar nasional dan praktik terbaik yang berlaku.

level of governance implementation, identifying areas for improvement, and strengthening governance practices in line with national standards and applicable best practices.

Sejalan dengan dinamika industri ketenagalistrikan dan percepatan transisi energi, PLN NP terus memperkuat tata kelola yang adaptif, agile, dan berbasis digital. Penguatan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan dan prosedur, pengembangan sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko terintegrasi, penguatan budaya kepatuhan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan.

In line with the dynamics of the electricity industry and the acceleration of the energy transition, PLN NP continues to strengthen its adaptive, agile, and digital-based governance through the refinement of policies and procedures, the development of internal control systems, the implementation of integrated risk management, a strengthened compliance culture, and the optimization of digital technology to support effective oversight and decision-making.

Upaya penguatan tata kelola yang dilakukan secara konsisten juga memperoleh pengakuan eksternal. Pada tahun 2025, PLN NP meraih penghargaan Juara I Kategori BUMN Non Go Publik Non Keuangan Klaster Pendapatan di atas Rp5 Triliun dalam ajang *Annual Report Award* (ARA). Penghargaan ini mencerminkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan kualitas pelaporan korporasi yang memenuhi standar serta praktik terbaik yang berlaku. Pencapaian tersebut semakin memperkuat keyakinan Perseroan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan perusahaan.

Consistent efforts to strengthen governance have also earned external recognition. In 2025, PLN NP won the First Place in the Non-Public Non-Financial State-Owned Enterprises (SOEs) Category with Revenues above IDR 5 Trillion at the Annual Report Awards (ARA). This award reflects the quality of corporate governance implementation, particularly in the aspects of transparency, accountability, information disclosure, and the quality of corporate reporting that meets applicable standards and best practices. This achievement further strengthens the Company's belief that good governance serves not only as a compliance instrument but also a significant foundation for building shareholder and stakeholder trust and supporting sustainable company growth.

Direksi meyakini bahwa tata kelola yang kuat merupakan enabler utama dalam mendukung transformasi bisnis, implementasi ESG, serta penciptaan nilai berkelanjutan. Oleh karena itu, PLN NP akan terus melakukan penyempurnaan praktik tata kelola, memperkuat budaya integritas dan kepatuhan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Melalui tata kelola yang adaptif, agile, dan berorientasi keberlanjutan, Perseroan optimistis dapat mempercepat pertumbuhan berkelanjutan dan mendukung terwujudnya masa depan energi yang lebih hijau.

The Board of Directors believes that strong governance is a key enabler in supporting business transformation, ESG implementation, and sustainable value creation. Therefore, PLN NP will remain to refine its governance practices, strengthen a culture of integrity and compliance, and enhance transparent and accountable decision-making. Through adaptive, agile, and sustainability-oriented governance, the Company is optimistic regarding accelerating sustainable growth and supporting a greener energy future.

Implementasi *Whistleblowing System* (WBS)
Implementation of Whistleblowing System (WBS)

Sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, PLN NP secara konsisten mengimplementasikan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran yang aman, independen, dan terpercaya. Sistem ini menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh lingkungan perusahaan.

As part of commitment to strengthening good corporate governance, PLN NP consistently implements a Whistleblowing System (WBS) as a secure, independent, and reliable facility of reporting suspected violations. This system serves as a crucial instrument in building a culture of integrity, transparency, and accountability throughout the company.

Pengelolaan WBS dilaksanakan oleh Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang bertanggung jawab melakukan penerimaan, verifikasi, dan tindak lanjut atas setiap laporan yang disampaikan melalui berbagai saluran pelaporan yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, PLN NP juga menjamin perlindungan terhadap pelapor, termasuk kerahasiaan identitas dan perlindungan dari segala bentuk tindakan balasan, guna mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga integritas perusahaan.

The WBS is managed by the Whistleblowing Committee, which is responsible for receiving, verifying, and following up on every report submitted through various available reporting channels. In the implementation, PLN NP also guarantees protection for whistleblowers, including confidentiality of their identities and protection from any form of retaliation, to encourage active participation of all stakeholders in maintaining integrity of the Company.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menerima 4 laporan pengaduan. Setelah melalui proses verifikasi, 3 laporan dinyatakan valid dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Dari jumlah tersebut, 2 laporan telah diselesaikan melalui pemberian rekomendasi *Coaching, Mentoring, and Counseling* (CMC), sedangkan 1 laporan masih dalam proses tindak lanjut melalui audit investigasi oleh SPI PT PLN (Persero). Seluruh laporan ditangani secara objektif, independen, dan sesuai ketentuan perusahaan.

Throughout 2025, the Company received four complaints. After a verification process, three were declared valid and followed up following the applicable mechanisms. Of these, two reports have been resolved through recommendations for Coaching, Mentoring, and Counseling (CMC), while one report is still in follow-up stage through an investigative audit by PT PLN (Persero)'s Internal Audit Unit. All reports are handled objectively, independently, and according to regulations of the Company.

Direksi meyakini bahwa efektivitas *Whistleblowing System* merupakan elemen penting dalam mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Oleh karena itu, PLN NP terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkala untuk memastikan WBS tetap efektif, kredibel, dan mampu mendukung terciptanya lingkungan kerja yang berintegritas serta berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.

The Board of Directors believes that an effective Whistleblowing System is a substantial element in supporting the implementation of Good Corporate Governance (GCG). Therefore, PLN NP continues to periodically evaluate and refine the system to ensure that the WBS remains effective, credible, and capable of supporting a work environment with integrity and based on good governance principles.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility

Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan, PLN NP secara konsisten melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs).

As part of its commitment to creating sustainable value for the community and the environment, PLN NP consistently organizes Social and Environmental Responsibility (CSR) program that is integrated with the Company's business strategy and supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Sepanjang tahun 2025, program TJSL dilaksanakan di seluruh wilayah operasional PLN NP melalui pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas tata kelola. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp75,89 miliar, Perseroan merealisasikan program TJSL sebesar Rp62,24 miliar atau 82,01% dari RKAP 2025. Program-program tersebut dijalankan melalui empat pilar utama, yaitu Sosial, Lingkungan, Ekonomi, serta Hukum dan Tata Kelola.

Throughout 2025, the Company implemented CSR program across all PLN NP operational areas through an approach focused on community empowerment, environmental preservation, strengthening the local economy, and improving governance. With a budget allocation of Rp75.89 billion, the Company actualized Rp62.24 billion in CSR programs, or 82.01% of the 2025 Annual Budget and Operational Plan (RKAP). These programs are implemented through four main pillars: Social, Environmental, Economic, and Legal and Governance.

Pada pilar sosial, program TJSL diarahkan untuk mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat secara adil dan inklusif guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Implementasinya dilakukan melalui berbagai program, antara lain peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kelompok rentan, perempuan dan anak, pencegahan *stunting*, penyediaan sarana dan prasarana umum, serta bantuan tanggap bencana.

Within the social pillar, the CSR program is directed at supporting the fulfilment of basic community rights in a fair and inclusive manner to improve quality of life and well-being, through various programs, including improving health and education services, empowering vulnerable groups, women and children, preventing stunting, providing public facilities and infrastructure, and disaster response assistance.

Pada pilar lingkungan, Perseroan berfokus pada upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Program yang dijalankan mencakup konservasi alam, penanaman pohon, edukasi lingkungan, pengembangan ekowisata, serta penyediaan akses air bersih bagi masyarakat.

In the environmental pillar, the Company focuses on environmental conservation and sustainable natural resource management. The programs include nature conservation, tree planting, environmental education, ecotourism development, and providing access to clean water for the community.

Pada pilar ekonomi, TJSL ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan kapasitas usaha dan pemanfaatan potensi lokal. Program yang dilaksanakan meliputi pembinaan dan pengembangan UMK, pemberdayaan kelompok masyarakat, serta dukungan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi.

In terms of economic pillar, CSR purposes to encourage inclusive and sustainable economic growth through business capacity building and utilizing local potential. Programs include fostering and developing MSEs, empowering community groups, and providing support for the provision of facilities and infrastructure to support economic activities.

Sementara itu, pada pilar hukum dan tata kelola, Perseroan mendukung penerapan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif guna memastikan keberlanjutan program. Implementasinya dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan pemantauan, seperti pelaksanaan social mapping, pengukuran *Social Return on Investment* (SROI), survei Indeks Kepuasan Masyarakat, serta penguatan kelembagaan masyarakat melalui penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi penerima manfaat.

Meanwhile, in the legal and governance pillar, the Company supports the implementation of effective, transparent, accountable, and participatory governance to ensure program sustainability, carried out through evaluation and monitoring activities, such as conducting social mapping, measuring Social Return on Investment (SROI), conducting Community Satisfaction Index surveys, and strengthening community institutions through the development of articles of association and bylaws for beneficiary organizations.

Selain mencatatkan kinerja keuangan dan operasional yang positif, PLN NP juga terus memperkuat kontribusinya terhadap agenda keberlanjutan melalui pengembangan energi baru terbarukan, implementasi *co-firing* biomassa, pemanfaatan *Fly Ash Bottom Ash* (FABA), serta berbagai program dekarbonisasi yang mendukung target *Net Zero Emission* Indonesia. Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen Perseroan untuk menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

In addition to achieving positive financial and operational performance, PLN NP continues to strengthen its contribution to the sustainability agenda through the development of new and renewable energy, the implementation of biomass co-firing, the utilization of Fly Ash Bottom Ash (FABA), and various decarbonization programs that support Indonesia's Net Zero Emission target. These initiatives reflect the Company's commitment to creating growth that is not only economically profitable but also benefits the environment and society.

Keberhasilan program TJSL tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dihasilkan bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, PLN NP terus mengembangkan program-program yang bersifat inklusif, adaptif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Melalui pendekatan tersebut, Perseroan berupaya menghadirkan manfaat yang lebih luas sekaligus mendukung terwujudnya pertumbuhan berkelanjutan dan masa depan energi yang lebih hijau.

The success of the CSR program is measured not only by the amount of assistance provided, but also by the long-term impact it generates on society, the environment, and business sustainability. Therefore, PLN NP continues to develop inclusive, adaptive, and sustainable programs through collaboration with the government, communities, academics, and various stakeholders. Through this approach, the Company strives to deliver broader benefits while supporting sustainable growth and a greener energy future.

Berbagai inisiatif tersebut tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga memperoleh pengakuan dari berbagai lembaga independen di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai penghargaan yang diraih sepanjang tahun 2025 menjadi cerminan keberhasilan Perseroan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

These initiatives not only provide tangible benefits to the society and the environment but have also earned recognition from various independent institutions at the national and international levels. The various awards received throughout 2025 reflect the Company's success in integrating sustainability principles into its business strategy and the implementation of its Social and Environmental Responsibility (CSR) program.

Pada tahun 2025, PLN NP meraih penghargaan di bidang sosial, lingkungan, dan keberlanjutan, antara lain *Indonesia Social Responsibility Award* (ISRA) 2025, Asia ESG *Positive Impact Award* 2025, *Platinum Rank Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2025, *Environmental & Social Innovation Awards* (ENSIA) 2025, *Circular Economy Sustainability Award* (CESA) 2025, serta 69 penghargaan PROPER yang terdiri atas 4 PROPER Emas, 10 PROPER Hijau, dan 55 PROPER Biru. Berbagai penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa implementasi TJSL yang dijalankan PLN NP telah memberikan manfaat nyata dan menciptakan nilai bersama (*creating shared value*) bagi masyarakat, lingkungan, dan perusahaan. Ke depan, Perseroan akan terus memperkuat program-program keberlanjutan yang inovatif, inklusif, dan berdampak guna mendukung percepatan pertumbuhan berkelanjutan serta mewujudkan sistem energi yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan bagi Indonesia.

In 2025, PLN NP received awards in the social, environmental, and sustainability sectors, including the 2025 Indonesia Social Responsibility Award (ISRA), the 2025 Asia ESG Positive Impact Award, the 2025 Platinum Rank Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT), the 2025 Environmental & Social Innovation Awards (ENSIA), the 2025 Circular Economy Sustainability Award (CESA), and 69 PROPER awards, consisting of 4 Gold PROPERs, 10 Green PROPERs, and 55 Blue PROPERs. These awards reflect that CSR within PLN NP has delivered tangible benefits and created shared value for the community, the environment, and the company. Going forward, the Company will continue to strengthen innovative, inclusive, and impactful sustainability programs to support the acceleration of sustainable growth and realize a greener, more resilient, and more sustainable energy system for Indonesia.

Prospek Industri Ketenagalistrikan dan Strategi PLN NP ke Depan

Prospects for the Electricity Industry and Future Strategy of PLN NP

Prospek usaha PLN NP pada tahun 2026 diperkirakan tetap positif seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4%, meningkat dibandingkan asumsi tahun 2025 sebesar 5,2%. Kondisi tersebut diperkirakan mendorong peningkatan kebutuhan energi listrik yang tercermin dari proyeksi volume penjualan listrik sebesar 334,3 TWh atau tumbuh sekitar 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat inflasi yang tetap terjaga pada level 2,5% diharapkan dapat mendukung stabilitas aktivitas ekonomi dan iklim usaha nasional. Dari sisi biaya operasional, prospek usaha turut didukung oleh penurunan harga ICP dari USD82 per barel menjadi USD70 per barel, serta penurunan harga HSD sebesar 18% dan harga MFO sebesar 1%. Harga batubara juga relatif stabil dengan penurunan tipis dari Rp1.052/kg menjadi Rp1.049/kg, sementara harga biofuel meningkat terbatas sebesar 1%. Meskipun demikian, Perusahaan tetap mewaspadai potensi dampak pelemahan nilai tukar Rupiah menjadi Rp16.500/USD dan kenaikan harga gas sebesar 5%. Dengan kondisi tersebut, PLN NP akan terus memperkuat efisiensi operasional pembangkit dan optimalisasi biaya untuk menjaga kinerja dan daya saing usaha secara berkelanjutan.

In 2026, PLN NP has business prospects that are expected to remain positive in line with the projected national economic growth of 5.4%, an increase compared to the 2025 assumption of 5.2%. This condition is expected to drive an increase in electricity demand, reflected in the projected electricity sales volume of 334.3 TWh, or growth of around 3% compared to the previous year. Furthermore, the maintained inflation rate at 2.5% is expected to support the stability of economic activity and the national business climate. In terms of operational costs, business prospects are also supported by a decrease in the ICP price from USD82 per barrel to USD70 per barrel, as well as a decrease in the price of HSD by 18% and the price of MFO by 1%. Coal prices are also relatively stable with a slight decrease from IDR 1,052/kg to IDR 1,049/kg, while biofuel prices have increased by a limited 1%. Nevertheless, the Company remains vigilant about the potential impact of the weakening Rupiah exchange rate to Rp16,500/USD and a 5% increase in gas prices. Considering these conditions, PLN NP will continue to strengthen the operational efficiency of its power plants and optimize costs to maintain sustainable business performance and competitiveness.

Dari aspek industri, prospek usaha pada tahun 2026 dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan listrik nasional yang diproyeksikan meningkat menjadi 334,3 TWh dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar 317,6 TWh. Peningkatan kebutuhan listrik tersebut mencerminkan masih kuatnya pertumbuhan konsumsi energi di berbagai sektor ekonomi dan memberikan peluang bagi pelaku usaha ketenagalistrikan untuk meningkatkan pemanfaatan kapasitas pembangkit. Namun demikian, pertumbuhan permintaan listrik sistem tidak sepenuhnya sejalan dengan peningkatan penjualan listrik PLN NP. Penjualan listrik Perusahaan diproyeksikan mencapai 59,46 TWh pada tahun 2026, lebih rendah dibandingkan realisasi unaudited tahun 2025 sebesar 63,29 TWh. Sejalan dengan hal tersebut, market share PLN NP diperkirakan menurun dari 19,9% menjadi 17,8% akibat meningkatnya kontribusi pembangkit non-PLN NP, khususnya *Independent Power Producer* (IPP) dan pembangkit dengan skema kontrak tertentu. Untuk menghadapi kondisi industri yang semakin kompetitif, Perusahaan akan terus meningkatkan keandalan operasional, efisiensi pembangkitan, dan daya saing portofolio usahanya guna mempertahankan kinerja secara berkelanjutan.

From an industrial perspective, the business outlook for 2026 is influenced by the growth in national electricity demand, which is projected to increase to 334.3 TWh compared to 317.6 TWh in 2025. This increase in electricity demand reflects the continued strong growth in energy consumption across various economic sectors and provides opportunities for electricity businesses to increase power plant capacity utilization. However, the growth in system electricity demand is not fully in line with the increased electricity sales of PLN NP. The Company projected its electricity sales to reach 59.46 TWh in 2026, lower than the unaudited realization of 63.29 TWh in 2025. Consequently, PLN NP's market share is expected to decline from 19.9% to 17.8% due to the increasing contribution of non-PLN NP power plants, particularly Independent Power Producers (IPPs) and power plants with specific contract schemes. To address the increasingly competitive industry, the Company will continue to improve operational reliability, power plant efficiency, and the competitiveness of its business portfolio to maintain sustainable performance.

Dari aspek regulasi dan kebijakan, prospek usaha PLN NP pada tahun 2026 dipengaruhi oleh kebijakan operasi sistem ketenagalistrikan yang mengedepankan prinsip keandalan, kualitas, keekonomian, dan keberlanjutan lingkungan. Operasi pembangkit dilakukan berdasarkan *merit order* untuk memastikan efisiensi biaya produksi, sementara perencanaan sistem masih berfokus pada optimalisasi aset eksisting tanpa penambahan kapasitas yang signifikan. Sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) 2060, pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), serta penerapan prinsip ESG, industri ketenagalistrikan terus bergerak menuju sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan. Meskipun permintaan listrik diproyeksikan meningkat, kebijakan dispatch berbasis efisiensi berpotensi meningkatkan persaingan antar pembangkit dan memengaruhi tingkat utilisasi unit tertentu. Untuk itu, Perusahaan akan terus memperkuat efisiensi operasional, optimalisasi aset, dan pengembangan portofolio energi bersih guna menjaga daya saing dan mendukung transisi energi nasional.

In terms of regulatory and policy, PLN NP's business prospects in 2026 are influenced by its electricity system operating policy, which prioritizes the principles of reliability, quality, economy, and environmental sustainability. The Company operates power plant on a merit-based basis to ensure efficient production costs, while system planning remains focused on optimizing existing assets without significant capacity additions. In line with the Government's commitment to achieving the 2060 Net Zero Emission (NZE) target, the development of New and Renewable Energy (NRE), and the implementation of ESG principles, the electricity industry continues to move toward a more efficient and sustainable system. Despite electricity demand is projected to increase, efficiency-based dispatch policies have the potential to increase competition between power plants and impact the utilization rates of certain units. Therefore, the Company will continue to strengthen operational efficiency, asset optimization, and the development of its clean energy portfolio to maintain competitiveness and support the national energy transition.

Pada tahun 2026, kinerja operasional PLN NP diarahkan pada optimalisasi aset eksisting di tengah tekanan penurunan produksi dan penjualan masing-masing sekitar 6% menjadi 62,98 TWh dan 59,46 TWh. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan market share dan prioritas *dispatch*, meskipun kinerja teknis pembangkit relatif terjaga melalui perbaikan EFOR dan EAF dibandingkan RKAP 2025, baik pada PLTU maupun non-PLTU.

In 2026, PLN NP's operational performance will be focused on optimizing existing assets amidst pressure from declining production and sales of approximately 6% to 62.98 TWh and 59.46 TWh, respectively. This decline is primarily driven by declining market share and dispatch priorities, although the technical performance of power plants will be relatively maintained through improvements in EFOR and EAF compared to the 2025 RKAP, both at coal-fired and non-coal-fired power plants.

Dari sisi biaya, dibandingkan 2025 harga jual listrik meningkat 15% menjadi Rp1.728/kWh dan pada BPP naik sebesar 17% menjadi Rp1.510/kWh yang menekan margin dan menuntut efisiensi berkelanjutan. Fokus pengembangan usaha tetap selektif, dengan 510 MW proyek COD 2026 dan kelanjutan proyek prioritas melalui skema P-100 dan *co-investment*. Secara keuangan, perusahaan tetap menjaga kinerja yang sehat dengan EBITDA margin dan NPM yang stabil, meskipun menghadapi risiko utama berupa keterlambatan proyek RUPTL dan gangguan peralatan pembangkit, yang menjadi fokus pengendalian risiko tahun 2026.

In terms of costs, compared to 2025, the electricity selling price increased 15% to Rp1,728/kWh, and the cost of electricity (BPP) increased 17% to Rp1,510/kWh, which puts pressure on margins and demands continued efficiency. The focus on business development remains selective, with a 510 MW COD project in 2026 and the continuation of priority projects through the P-100 scheme and co-investment. Financially, the company maintained healthy performance with a stable EBITDA margin and net profit margin (NPM), despite facing major risks such as delays in the RUPTL project and power plant equipment disruptions, which will be the focus of risk management in 2026.

Direksi memandang bahwa percepatan transisi energi nasional, berkembangnya pasar energi hijau, kebutuhan dekarbonisasi sektor industri, serta meningkatnya permintaan terhadap solusi energi terintegrasi akan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Perseroan. Oleh karena itu, PLN NP akan terus memperluas portofolio energi bersih, mengembangkan model bisnis *beyond* kWh, memperkuat inovasi teknologi, dan meningkatkan kolaborasi strategis guna menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

The Board of Directors believes that the acceleration of the national energy transition, the development of the green energy market, the need for decarbonization in the industrial sector, and the increasing demand for integrated energy solutions will be new sources of growth for the Company. Therefore, PLN NP is going to continue to expand its clean energy portfolio, develop business models beyond kWh, strengthen technological innovation, and enhance strategic collaboration to create sustainable long-term value.

Perubahan Komposisi Direksi
Changes in the Board of Directors Composition

Sepanjang tahun 2025, terdapat satu kali perubahan komposisi Direksi PLN NP yang ditetapkan melalui Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Juni 2025, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 31 tanggal 18 Juli 2025. Berdasarkan keputusan tersebut, Perseroan memberhentikan dengan hormat Sdr. Rachmanoe Indarto dari jabatannya sebagai anggota Direksi PLN NP. Pada saat yang sama, Perseroan mengangkat Sdr. M. Irwansyah Putra, Sdr. Teguh Widhi Harsono, dan Sdr. TB Ari Wibawa Mukti sebagai anggota Direksi.

There was one change in the composition of the PLN NP Board of Directors during 2025, as stipulated in the GMS Circular concerning the Dismissal and Appointment of the Board of Directors Members dated June 26, 2025, as stated in Notarial Deed Number 31 dated July 18, 2025. Based on this decision, the Company honourably dismissed Mr. Rachmanoe Indarto from his position as a member of the PLN NP Board of Directors. At the same time, the Company appointed Mr. M. Irwansyah Putra, Mr. Teguh Widhi Harsono, and Mr. TB Ari Wibawa Mukti as the Board of Directors.

Dengan demikian. Komposisi Direksi PLN NP per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of the PLN NP Board of Directors as of December 31, 2025, is as follows:

Nama Nama	Jabatan Position
Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director
M. Irwansyah Putra	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations
Komang Parmita	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations
Teguh Widhi Harsono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management
Dwi Hartono	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce
TB Ari Wibawa Mukti	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration

Perubahan susunan Direksi tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Perseroan dalam memperkuat kepemimpinan organisasi, meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan, serta mendukung akselerasi pencapaian target bisnis dan transformasi perusahaan. Direksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sdr. Rachmanoe Indarto atas dedikasi, kontribusi, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi PLN NP. Berbagai peran dan tanggung jawab yang dijalankan selama masa jabatan telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung pengembangan usaha serta pencapaian kinerja Perseroan.

The changes in the Board of Directors composition are part of the Company's strategic steps to strengthen organizational leadership, improve the effectiveness of corporate governance, and support the acceleration of business targets and corporate transformation. The Board of Directors would like to express appreciation and gratitude to Mr. Rachmanoe Indarto for his dedication, contributions, and devotion during his tenure as a member of the PLN NP Board of Directors. The various roles and responsibilities he had carried out during his period have positively contributed to supporting business development and achieving the Company's performance.

Dengan komposisi Direksi yang baru, Perseroan berkomitmen untuk terus melanjutkan pengelolaan perusahaan secara profesional, menjalankan strategi bisnis yang telah ditetapkan, serta memperkuat transformasi perusahaan guna menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan yang terus berkembang. Sinergi, kolaborasi, dan koordinasi yang solid antar anggota Direksi akan terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian target perusahaan, memperkuat daya saing, serta mendorong pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan.

With the new composition of the Board of Directors, the Company is committed to continuing to manage the Company professionally, implementing established business strategies, and strengthening the company's transformation to address the ever-evolving dynamics of the electricity industry. Solid synergy, collaboration, and coordination among members of the Board of Directors will continue to be improved to support the achievement of the Company's targets, strengthen competitiveness, and encourage the development of new and renewable energy as part of efforts to realize a sustainable energy transition.

Hingga akhir tahun buku 2025 dan sampai pada tanggal pengesahan Laporan Tahunan ini, tidak terdapat perubahan lebih lanjut dalam susunan Direksi PLN NP.

Until the end of the 2025 financial year and the date of ratification of this Annual Report, there no further changes to the composition of the PLN NP Board of Directors.

Apresiasi
Letter of Appreciation

Direksi meyakini bahwa keberhasilan PLN NP dalam menghadapi berbagai tantangan dan menangkap peluang pertumbuhan tidak terlepas dari fondasi bisnis yang kuat, transformasi yang berkelanjutan, serta dukungan dan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Directors believes that PLN NP's success in facing various challenges and seizing growth opportunities is inseparable from the strong business foundation, ongoing transformation, as well as the support and trust from all stakeholders.

Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, pelanggan, mitra kerja, regulator, masyarakat, dan seluruh insan PLN NP atas kontribusi dan kolaborasi yang telah terjalin sepanjang tahun 2025. Dengan semangat transformasi dan inovasi yang berkelanjutan, PLN NP akan terus memperkuat perannya sebagai perusahaan pembangkitan dan solusi energi terdepan yang mendukung transisi energi nasional, menciptakan nilai jangka panjang bagi bangsa dan negara, serta mewujudkan masa depan energi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan.

Therefore, we express our highest appreciation to the Shareholders, Board of Commissioners, customers, business partners, regulators, the community, and the entire PLN NP employees for their contributions and collaboration throughout 2025. With a spirit of continuous transformation and innovation, PLN NP will continue to strengthen its role as a leading generation and energy solutions company supporting the national energy transition, creating long-term value for the nation and state, and realizing a greener, more resilient, and more sustainable energy future for

Jakarta, 30 Mei 2026
Jakarta, May 30, 2026

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

Ruly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2025 PT PLN Nusantara Power

Statement from the Board of Commissioners on Accountability Over Annual Report 2025 of PT PLN Nusantara Power

Laporan Tahunan 2025 PT PLN Nusantara Power menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola Perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan, laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

PT PLN Nusantara Power Annual Report 2025 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, financial statements for the period ended on December 31, 2025, and other information relevant and significant for the stakeholders.

Kami, segenap Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2025 PT PLN Nusantara Power.

We, the undersigned Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT PLN Nusantara Power Annual Report 2025.

Jakarta, 30 Mei 2026
Jakarta, May 30, 2026

Edi Srimulyanti
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioners

Ade Armando
Komisaris
Commissioner

Suharyono
Komisaris
Commissioner

M. Pradana Indraputra
Komisaris
Commissioner

Adam Muhammad
Komisaris
Commissioner

Muhammad Syafi'i
Komisaris
Commissioner

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2025 PT PLN Nusantara Power

Statement from the Board of Directors on Accountability Over Annual Report 2025 of PT PLN Nusantara Power

Laporan Tahunan 2025 PT PLN Nusantara Power menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola Perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan, laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

PT PLN Nusantara Power's Annual Report 2025 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, financial statements for the period ended on December 31, 2025, and other information relevant and significant for the stakeholders.

Kami, segenap Direksi PT PLN Nusantara Power yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2025 PT PLN Nusantara Power.

We, the undersigned Board of Directors of PT PLN Nusantara Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT PLN Nusantara Power's Annual Report 2025.

Jakarta, 30 Mei 2026
Jakarta, May 30, 2026

Ruly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

M. Irwansyah Putra
Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Director of Coal Power Plant Operations

Teguh Widhi Harsono
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

TB Ari Wibawa Mukti
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

Komang Parmita
Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Gas Power Plant Operations

Dwi Hartono
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce

Pernyataan Direksi Tentang Kecukupan Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko PT PLN Nusantara Power

Statement of the Board of Directors Regarding the Adequacy of the Internal Control System and Risk Management System of PT PLN Nusantara Power

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Ruly Firmansyah
   Jabatan: Direktur Utama
   Alamat Kantor: Jl. TB Simatupang Kav 18, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili: Jl. Legoso Raya No.66, Tangerang Selatan
2. Nama: Teguh Widhi Harsono
   Jabatan: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
   Alamat Kantor: Jl. TB Simatupang Kav 18, Jakarta Selatan
   Alamat Domisili: BSD Cluster Anggrek Loka Sektor II 3 Blok AM No 8, Tangerang Selatan

Menyatakan bahwa:
Sehubungan dengan tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN Nusantara Power dan Entitas Anak Perusahaan untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025, yang ditandatangani pada tanggal 23 April 2026, dalam kaitannya dengan integritas laporan keuangan telah disusun dengan memastikan penerapan dan kecukupan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko Perusahaan secara efektif dan efisien pada seluruh aspek yang material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

On behalf of the Board of Directors, we the undersigned:

1. Name: Ruly Firmansyah
   Position: President Director
   Office Address: Jl. TB Simatupang Kav 18, South Jakarta
   Address of Domicile: Jl. Legoso Raya No.66, South Tangerang
2. Name: Teguh Widhi Harsono
   Position: Finance and Risk Management Director
   Office Address: Jl. TB Simatupang Kav 18, South Jakarta
   Address of Domicile: BSD Anggrek Loka Cluster Sector II/3, Block AM No. 8, South Tangerang

Declare that:
The statement of the Board of Directors regarding the responsibility for the Consolidated Financial Statements of PT PLN Nusantara Power and Subsidiaries for the dates of December 31, 2024, and December 31, 2025, which we signed on April 23, 2026, in relation to the integrity of the financial statements has been prepared by ensuring the implementation and adequacy of the Company's internal control system and risk management system effectively and efficiently in all material aspects.

The declaration has been made truthfully.

Jakarta, 30 Mei 2026
Jakarta, May 30, 2026

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

Ruly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

Teguh Widhi Harsono
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page has been left blank on purpose

Profil Perusahaan

Company Profile

03

Identitas Perusahaan
Company Identity

Sebagai bentuk dukungan terhadap transisi energi, PLN Nusantara Power terus memperbesar kontribusi energi terbarukan dalam bauran pembangkit listriknya. PLN Nusantara Power menunjukkan komitmennya terhadap transisi energi dengan terus meningkatkan porsi energi terbarukan dalam portofolio pembangkit listrik yang dikelolanya.

As a form of support for the energy transition, PLN Nusantara Power continues to increase the contribution of renewable energy in its power plant mix. PLN Nusantara Power demonstrates its commitment to the energy transition by continuously increasing the share of renewable energy in the power plant portfolio it manages.

Nama Perusahaan PT PLN Nusantara Power	**Company Name** PT PLN Nusantara Power
Tanggal Pendirian 3 Oktober 1995	**Date of Establishment** October 3, 1995
Bidang Usaha 1. Pembangkitan tenaga listrik; 2. Usaha yang berkaitan dengan ketenagalistrikan antara lain aktifitas penunjang tenaga listrik lainnya, konstruksi bangunan sipil elektrikal, instalasi listrik, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik dan lain-lain; 3. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan.	**Bidang Usaha** 1. Electric Power Plant; 2. Electricity-related businesses, among others, other electricity support activities, construction of civil electrical buildings, electrical installations, operation of electricity supply installations, and others; 3. Trading and/or supporting business activities to optimize the utilization of resources owned by the Company, including delegating assignments to the Subsidiaries.
Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	**Corporation** Limited Company
Status Perusahaan *Subholding* PT PLN (Persero)	**Company Status** Sub holding of PT PLN (Persero)
Dasar Hukum Pendirian 1. Akta Pendirian PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II, oleh Poerbaningsih Adiwarsito Akta dengan No. 16 tanggal 3 Oktober 1995; 2. Akta Perubahan Nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, oleh Notaris Henny Singgih dengan Akta No. 9 tanggal 3 Agustus 2000; 3. Akta Perubahan Nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali, oleh Notaris Henny Singgih dengan Akta No. 34 tanggal 20 Februari 2001; 4. Akta Perubahan Nama menjadi PT PLN Nusantara Power oleh Notaris Muhammad Hanafi, S.H dengan Akta No. 70 tanggal 30 Desember 2022.	**Legal Basis for Establishment** 1. Deed of Establishment of PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II, by Poerbaningsih Adiwarsito with Deed No. 16 on October 13, 1995; 2. Deed of Name Change to PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, by Notary Henny Singgih with Deed No. 9 on August 3, 2000; 3. Deed of Name Change to PT Pembangkitan Jawa-Bali, by Notary Henny Singgih with Deed No. 34 on February 20, 2001; 4. Deed of Name Change to PT PLN Nusantara Power by Notary Muhammad Hanafi, S.H. with Deed No. 70 on December 30, 2022.

Pemegang Saham 1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 1 dan 308.510.497.998 Saham Seri 2 (99,99%) dan 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 2 (0,01%)	**Shareholders** 1. PT PLN (Persero) has 1 Series-1 Share and 308,510,497,998 Series-2 Shares (99,99%) and 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) 1 Series-2 Share (0,01%)
Modal Dasar Rp617.020.996.000.000	**Authorized Capital** Rp617,020,996,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp154.255.249.000.000	**Issued and Fully Deposited Capital** Rp154,255,249,000,000
Jumlah Karyawan 4.954 karyawan per 31 Desember 2025	**Number of Employees** 4,954 employees as of December 31, 2025
Kantor Pusat Jl. Ketintang Baru, No.11, Surabaya 60231 – Indonesia (+62-31) 828 3180 (*Hunting*) (+62-31) 828 3183 info@plnnusantarapower.co.id	**Headquarters** Jl. Ketintang Baru, No.11, Surabaya 60231 – Indonesia (+62-31) 828 3180 (Hunting) (+62-31) 828 3183 info@plnnusantarapower.co.id
Kantor Strategis Jakarta Gedung 18 Office Park Lantai 2 Jl. TB Simatupang Kav 18 – Jakarta Selatan - perwakilanjkt@plnnusantarapower.co.id	**Jakarta Strategic Office** Building 18 Office Park, 2nd Floor, TB Simatupang, Kav 18 – South Jakarta - perwakilanjkt@plnnusantarapower.co.id
Contact Center (+62-31) 828 3180 (*Hunting*) (+62-31) 828 3183 www.facebook.com/plnnusantarapower @ptpln_np @plnnusantarapower @plnnusantarapower PT PLN Nusantara Power	**Contact Center** (+62-31) 828 3180 (*Hunting*) (+62-31) 828 3183 www.facebook.com/plnnusantarapower @ptpln_np @plnnusantarapower @plnnusantarapower PT PLN Nusantara Power
Website www.plnnusantarapower.co.id	**Website** www.plnnusantarapower.co.id
Wilayah Kerja - 31 (tiga puluh satu) Unit Pembangkitan (UP); - 6 (enam) Unit PLTU; - 1 (satu) Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata); - 21 (dua puluh satu) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan (termasuk jasa O&M IPP); - 1 (satu) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* (MRO); - 2 (dua) Unit Pelaksana Proyek - Kepemilikan saham pada 11 (sebelas) Unit Pembangkit *Independent Power Producer* (IPP); dan - Kepemilikan saham pada Perusahaan Operasi dan Pemeliharaan untuk mengelola 1 (satu) unit pembangkit PLN.	**Working Area** - 31 (thirty-one) Electric Power Generator Units (GU); - 6 (six) CFPP Units; - 1 (one) Research Plant Unit (Cirata SPP); - 21 (twenty one) Operation and Maintenance Services Units (including IPP O&M services); - 1 (one) Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) Unit; - 2 (two) Project Implementation Units - Shareholding in 11 (eleven) Independent Power Producer (IPP) Power Plant Units; and - Shareholding in an Operation and Maintenance Company to manage 1 (one) PLN power plant unit
Anak Perusahaan - PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS); - PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC); - PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR); - PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC); - PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	**Subsidiaries** - PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS); - PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC); - PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR); - PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC); - PT Navigat Innovative Indonesia (NII)

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief Company History

Dalam mendukung agenda transisi energi global, PLN Nusantara Power secara berkelanjutan mengembangkan teknologi energi terbarukan guna meningkatkan kontribusi pembangkit listrik yang rendah emisi dan ramah lingkungan.

In supporting the global energy transition agenda, PLN Nusantara Power continuously develops renewable energy technologies to enhance the contribution of low-emission and environmentally friendly power plants.

Sekilas Pendirian Perusahaan
Company Establishment at A Glance

PT PLN Nusantara Power selanjutnya disingkat "PLN NP atau Perusahaan", memiliki sejarah yang cukup panjang di dunia pembangkit listrik nasional. Sejarah berdirinya PJB tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang PT PLN (Persero) yang selanjutnya disingkat "PLN". Pendirian Perusahaan berawal dari restrukturisasi yang dilakukan PLN pada tahun 1982, dengan melakukan pemisahan unit sesuai fungsinya, yaitu Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan serta Unit PLN Penyaluran. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PLN melakukan restrukturisasi khusus bidang pembangkitan dengan mendirikan 2 (dua) Anak Perusahan, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (sekarang PT PLN Indonesia

PT PLN Nusantara Power, hereinafter abbreviated as "PLN NP or the Company", has a long history in the world of national power plants. The history of the establishment of PJB cannot be separated from the long history of PT PLN (Persero), hereinafter abbreviated as "PLN". The establishment of the Company began with the restructuring of PLN in 1982 by separating units according to their functions, namely the PLN Distribution Unit and the PLN Electric Power Generator Unit, as well as the PLN Distribution Unit. On October 3, 1995, PLN restructured particularly in the electric power generator sector by establishing 2 (two) Subsidiaries, namely PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (now PT

Power) yang berkantor pusat di Jakarta dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (sekarang PT PLN Nusantara Power) yang berkantor pusat di Surabaya.

PLN Indonesia Power) headquartered in Jakarta and PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (now PT PLN Nusantara Power) headquartered in Surabaya.

Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 3 Oktober 1995 oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui SK No. C2-12495-HT.01.01.Th.95 pada tanggal yang sama. Pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Negara No. 9299 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 90.

The Company was established based on Notarial Deed No. 16 dated October 3, 1995, by Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, and had been ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. C2-12495-HT.01.01.Th.95 on the same date. The ratification was announced in State Gazette No. 9299 dated November 10, 1995, Supplement No. 90.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn. Nomor 80 tanggal 22 Oktober 2024, untuk mengubah susunan anggota Direksi PLN NP. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-AH.01.09 tanggal 17 Oktober 2024.

The Company's Articles of Association were last amended by Notarial Deed of Shahreza Annaz, S.H., M.Kn. No. 80 dated October 22, 2024, to change the composition of members of PLN NP's Board of Directors. This amendment deed had been received and recorded at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Decree Number AHU-AH.01.09 dated October 17, 2024.

Keterangan Perubahan Nama Perusahaan
Description of Change in Company Name

Sejak didirikan pada tanggal Oktober 1995, Perusahaan telah merubah namanya sebanyak 3 (tiga) kali.

Since its establishment in October 1995, the Company had changed its name 3 (three) times.

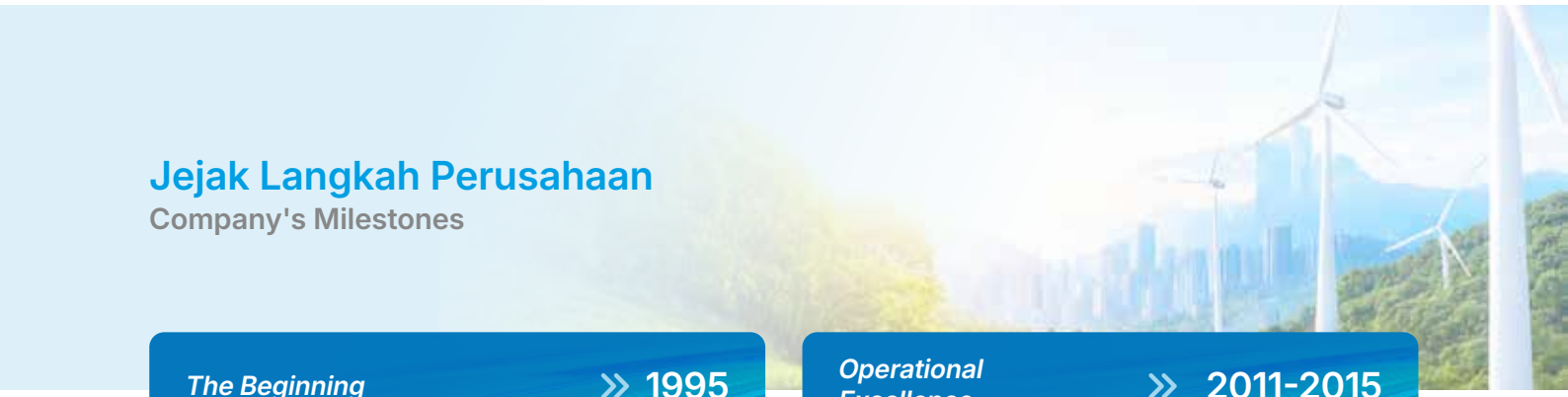

Jejak Langkah Perusahaan
Company's Milestones

The Beginning » 1995

1995
- Berdiri dengan nama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II yang memiliki aset 5 unit pembangkitan dengan total kapasitas 5.068 MW.
  Established under the name PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II which has assets of 5 electric power generator units with a total capacity of 5,068 MW.
- Berbasis *Computerized Maintenance Management System* (CMMS).
  Based on Computerized Maintenance Management System (CMMS).

Stable Growth » 2000-2010

2000 Perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali.
The name changed to PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali.

2001
- Perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Jawa - Bali.
  The name changed to PT Pembangkitan Jawa - Bali.
- Mendirikan anak perusahaan, PT PJB Services dengan bidang usaha O&M pembangkit.
  Established a subsidiary, PT PJB Services, with the business field of power plant O&M.

2003 Penyertaan saham di PT Rekadaya Elektrika, bergerak di bidang jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) pembangkit listrik.
Share investment in PT Rekadaya Elektrika, engaged in Engineering, Procurement and Construction (EPC) services for power plants.

2004 -2006 Penyertaan saham untuk pengembangan pembangkit di sejumlah perusahaan.
Share investment for power plant development in a number of companies.

2009 Mendirikan Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM).
Established O&M Services Business Unit (OMSBU).

Operational Excellence » 2011-2015

2012 Implementasi Manajemen Aset PAS 55 pertama di Asia Pasifik.
Implementation of the first PAS 55 Asset Management in Asia Pacific.

2013 Raih sertifikasi PAS 55 di seluruh unit pembangkit.
Achieved PAS 55 certification in all power plant units.

2014 Integrasi sistem manajemen PJB IMS dan kinerja ekselen tertinggi di Indonesia.
Integration of the PJB IMS management system and highest performance excellence in Indonesia.

2015 Pendirian anak perusahaan, PT PJB Investasi.
Establishment of subsidiary, PT PJB Investasi.

Corporate Transformation I » 2016-2020

2016 Mendirikan Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM).
Established O&M Services Business Unit (OMSBU).

2017 Proper Emas PLTU Paiton.
Gold Proper for Paiton CFPP.

2018 Raih *Brand Industry Leader Baldrige Excellence Framework* pertama di Indonesia.
Achieved the first Industry Leader Baldrige Excellence Framework Brand in Indonesia.

2019 *Commercial Operation Date* (COD) PLTU Jawa 7 Unit 11.000 MW sebagai pembangkit terbesar dan pertama di Indonesia dengan teknologi *boiler ultra super critical*.
Commercial Operation Date (COD) of Jawa 7 Unit #1 CFPP 1.000 MW as the largest and first power plant in Indonesia with ultra-super critical boiler technology.

Corporate Transformation II » 2020-2024

2020

- *Go Live* Komersialisasi *Co-firing* di 3 Pembangkit (PLTU Paiton 1-2, PLTU Ketapang dan PLTU Pacitan).
  Go Live Commercialization of Co-firing in three Plants (Paiton 1-2 CFPP, Ketapang CFPP, and Pacitan CFPP).
- Pendirian PT PJB Investindo, PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata dan PT PJB Masdar Solar Energi.
  Establishment of PT PJB Investindo, PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata and PT PJB Masdar Solar Energi.

2021

- Peluncuran PJB Access.
  Launch of PJB Access.
- COD PLTGU Muara Karang Blok 3.
  COD of Muara Karang Block 3 CCPP.
- *Financial Close* Pendanaan Proyek PLTS Terapung Cirata 145 MWAc.
  Financial Close of Funding Cirata 145 MWAc Floating SPP Project.
- Peresmian PLTS Bawean.
  Inauguration of Bawean SPP.

2022

- Perubahan status menjadi *Subholding* PT PLN (Persero).
  Change in status to PT PLN (Persero) Sub-holding.
- Perubahan nama menjadi PT PLN Nusantara Power.
  Change in name to PT PLN Nusantara Power.
- COD PLTGU Add On Muara Tawar Blok 2 (150 MW).
  COD of Muara Tawar Block 2 Add On CCPP (150 MW).
- Relokasi pembangkit PLTG Jakabaring (3×17 MW) dan PLTG Batanghari (2×30 MW).
  Relocation of Jakabaring GTPP (3 × 17 MW) and Batanghari GTPP (2×30 MW).

2023

- Akuisisi PLTGU Sengkang 315 MW.
  Acquisition of 315 MW Sengkang CCPP.
- Pionir dan terbesar dalam perdagangan karbon di IDX Carbon dengan hampir 1 juta ton CO_2 yang diperdagangkan.
  Pioneer and largest carbon trading on the IDX Carbon with nearly one million tons of CO_2 traded.
- PLTGU Muara Karang menjadi unit pembangkit berbahan bakar gas pertama di Indonesia yang memperoleh Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) Gas Rumah Kaca (GRK).
  Muara Karang CCPP became the first gas-fired power plant unit in Indonesia to obtain a Green House Gas (GHG) Emission Reduction Certificate (SPE).
- Pionir dan peresmian *Green Hydrogen Plant* di Indonesia.
  Pioneer and inauguration of Green Hydrogen Plant in Indonesia.
- *Groundbreaking* Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN berkapasitas 50 MW oleh Presiden RI.
  Groundbreaking of IKN Solar Power Plant (SPP) with a capacity of 50 MW by the President of Indonesia.
- Peresmian PLTS Terapung Cirata 192 MWp oleh Presiden RI.
  Inauguration of the 145 MWAc/192 MWp Cirata Floating SPP by the President of Indonesia.
- Perubahan nama Anak Perusahaan PLN NP yaitu:
  - PT PJB Services (PT PJBS) menjadi PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS);
  - PT Rekadaya Elektrika (PT RE) menjadi PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC);
  - PT PJB Investasi (PT PJBI) menjadi PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR).

  Change of name of PLN NP Subsidiary, namely:
  - PT PJB Services (PT PJBS) to PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS);
  - PT Rekadaya Elektrika (PT RE) to PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC);
  - PT PJB Investasi (PT PJBI) to PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR).
- Pendirian PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE) yaitu JVC untuk proyek PLTS IKN 50 MW.
  Establishment of PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE), a JVC for the 50 MW IKN SPP project.

Jejak Langkah Perusahaan
Company's Milestones

Strengthening The Base, Expanding The Business » 2024-2028

2024

- COD PLTGU Muara Tawar *Add On* Blok 3 dan 4 berkapasitas 650 MW
  COD of Muara Tawar CCPP Add On Block 3 and 4 with a capacity of 650 MW.
- COD Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN berkapasitas 50 MWac
  COD of IKN Solar Power Plant (SPP) with a capacity of 50 MWac.
- Mendapat penghargaan dari BPDP Bangladesh atas penyelesaian O&M Bibiyana
  Received an award from BPDP Bangladesh for the completion of Bibiyana O&M.
- Kesuksesan 2 MRO Project (Betano & Hera *Diesel Power Plant*) di Timor Leste
  Successful 2 MRO Projects (Betano & Hera Diesel Power Plant) in Timor Leste.
- Kesuksesan 3 kontrak *East Coast Rail Link* (ECRL) *Feeder Stations* 1, 2 dan 9 di Malaysia
  Successful completion of 3 contracts of East Coast Rail Link (ECRL) Feeder Stations 1, 2, and 9 in Malaysia.
- Peresmian Pembangkit PLN NP oleh Presiden RI yaitu:
  - PLTA Asahan (2 × 87 MW)
  - PLTS IKN (50 MWac)
  - PLTGU Muara Tawar *Add On* Blok 3 dan 4 (650 MW)

  Inauguration of PLN NP Power Plant by the President of the Republic of Indonesia, namely:
  - Asahan HPP (2 × 87 MW)
  - IKN SPP (50 MWac)
  - Muara Tawar CCPP Add On Block 3 and 4 (650 MW)
- Akuisisi seluruh saham PLN NPC pada PT Prima Power Nusantara (PPN)
  Acquisition of all PLN NPC shares in PT Prima Power Nusantara (PPN).

2025

- COD PLTU MT Sumbagsel 1 berkapasitas 2 × 150 MW
  COD of 2 × 150 MW MT Sumbagsel 1 CFPP
- PLTS Karangkates mencapai PPA *Effective Date* Januari 2025
  Karangkates SPP reached PPA Effective Date in January 2025
- Mendukung bisnis *beyond* KWh PLN Group dengan melepas kepemilikan saham PPN ke Icon Plus
  Supporting PLN Group's beyond KWh business by divesting its shares in PPN to Icon Plus
- Meraih Laba Asosiasi tertinggi se-PLN Group, sebesar 2,4 Triliun Rupiah
  Achieved the highest Associate Profit within the PLN Group, amounting to Rp2.4 trillion

- ***Engineering, Procurement, and Construction* (EPC)**

  1. *Advancing ASEAN Mobility & Energy Transition*
     - Percepatan *East Coast Rail Link* (ECRL) *Electrification* di Malaysia untuk *Feeder Stations* 1 & 9
     - Pendandatanganan MoU dengan PT Asia Pyrochem Technologies Inc. pada *40th Trade Expo* Indonesia terkait konversi Pembangkit Listrik Diesel ke *Biofuel* berkapasitas 10 MW di Filipina dalam mendukung transisi energi regional yang lebih bersih
     - Accelerating the East Coast Rail Link (ECRL) Electrification in Malaysia for Feeder Stations 1 and 9
     - Signing of a MoU with PT Asia Pyrochem Technologies Inc. at the 40th Trade Expo Indonesia regarding the conversion of a 10-MW Diesel Power Plant to Biofuel in the Philippines to support a cleaner regional energy transition

  2. *Powering National Industrial Growth*
     - 3 bulan penyelesaian lebih awal Grid Infrastructure dalam mendukung Operasi Pertambangan (Proyek 30 MVA - gardu induk 150 kV dan saluran udara 20 kV).
       Grid Infrastructure completed three months ahead of schedule to support Mining Operations (30 MVA project—150 kV substation and 20 kV aerial line).

2024-2028

- ***Operating & Maintenance and Maintenance, Repair & Operations (O&M and MRO)***

1. *Keeping Power Running Accross Markets*
   - *Helium Leak Detection Tools* milik PLN NP berhasil mengatasi masalah kritis dan meningkatkan kesiapan sistem untuk PLTU Lombok.
   - PLN NPS memenangkan tender kompetitif di Chandra Asri Petrochemical, menandai masuknya PLN NP ke industri petrokimia.
   - PLN NP's Helium Leak Detection Tools successfully resolved critical issues and improved system readiness for the Lombok CFPP.
   - PLN NPS won a competitive bid at Chandra Asri Petrochemical, marking PLN NPS's entry into the petrochemical industry.

2. Bangladesh *Market*
   - PLN NP memastikan operasi yang stabil selama fase garansi akhir di PLTGU Chandpur (150 MW).
   - *Exchange of Information* (EoI) dengan mitra lokal (Intraco) dalam menjajaki peluang Operasi dan Pemeliharaan (O&M) untuk proyek tender Matarbari yang akan datang.
   - PLN NP ensures stable operations during the final guarantee phase at the Chandpur CCPP (150 MW).
   - Exchange of Information (EoI) with local partners (Intraco) to explore Operations and Maintenance (O&M) opportunities for the upcoming Matarbari tender project.

3. Saudi Arabia *Market*
   - PLN NPS, bersama dengan mitra lokal, mengamankan kontrak O&M selama 1 tahun di Arab Saudi (Saudi Electricity Company (SEC)).
   - Bermitra dengan Ghulam Shabbir Sirajuddin Contracting Co. (GSSC) untuk mendukung ekspansi pasar, termasuk pelatihan dan inisiatif digitalisasi.
   - PLN NPS, together with local partners, secured a one-year O&M contract in Saudi Arabia (Saudi Electricity Company (SEC)).
   - Partnered with Ghulam Shabbir Sirajuddin Contracting Co. (GSSC) to support market expansion, including digitalization initiatives and training.

- ***Sustainable Solutions***

1. *Carbon Credits - Building Indonesia's Carbon Market, and Beyond*
   - IDX Carbon *Internatioal Listings*: Muara Karang #3 dan Muara Tawar *Add On* #2
   - Menyelenggarakan seminar internasional pada kuartal kedua bersama dengan *key carbon market players*.
   - Kontribusi PLN NP sebagai *expert speaker* dalam *Blue Carbon Policy Dialogue*
   - Telah terjual lebih dari 550.000 tCO_2 dalam *carbon trading*
   - IDX Carbon International Listings: Muara Karang #3 and Muara Tawar Add-On #2
   - Hosted an international seminar in the second quarter in collaboration with key carbon market players.
   - PLN NP contributed as an expert speaker at the Blue Carbon Policy Dialogue
   - Sold more than 550,000 tCO2 in carbon trading.

2. *Hydrogen - Pioneering Hydrogen Use*
   - Membawa pasar Pembangkit Listrik Hidrogen sebesar 113.300 Nm3 (1,2 ton)
   - *Supply* kelebihan hidrogen untuk penggunaan industri kepada Perta Daya Gas.
   - Mendukung *event* ramah lingkungan: Q1 - Toyota CNM, Q2 - *The Global Hydrogen Ecosystem Summit* (GHES), Q3 - PLN *Electric Run*, dan Q4 - PAMA *in Electric & Power Indonesia* (EPI)
   - Supplying 113,300 Nm^3 (1.2 tons) of Hydrogen to the Power Plant market
   - Excess hydrogen supply for industrial use to Perta Daya Gas.
   - Supporting eco-friendly events: Q1 - Toyota CNM, Q2 - The Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES), Q3 - PLN Electric Run, and Q4 - PAMA at Electric & Power Indonesia (EPI)

Jejak Langkah Perusahaan
Company's Milestones

2024-2028

3. *Fly Ash & Bottom Ash* (FABA) - *Enabling Greener National Construction* (*utilization of* 1,12 million ton FABA)
   - Penggunaan FABA pada *public facility*, seperti Jembatan Pulau Balang, Jalan Tol IKN, dan Gereja Basilika
   - Mendukung material konstruksi yang rendah karbon, seperti industri semen, industri *precast*, dan industri *paving brick*
   - The use of FABA in public facilities, such as the Pulau Balang Bridge, the IKN Toll Road, and the Basilika Church
   - Supporting low-carbon construction materials, such as the cement industry, the precast industry, and the paving brick industry

4. *Supply Chain - Strengthening a Trusted Global Supply Network*
   - Mendukung clean energy untuk komunitas terpencil (*remote communities*) berupa pengiriman & penyebaran Pembangkit Listrik Hidrogen 100 kVA yang andal ke Gili Ketapang.
   - Supporting clean energy for remote communities through the delivery and distribution of reliable 100 kVA Hydrogen Power Plants to Gili Ketapang.

5. *Asset Management*
   - Pembaharuan *Risk Management Software* (*Dashboard* I-CARE) - *Dasboard* risiko terintegrasi untuk memantau, memprioritaskan, dan mengurangi risiko perusahaan
   - Mendukung Perusahaan *Geothermal* and Energi yang efisien agar sesuai kontrol, dengan mengoptimalkan analisa *Life Cycle Cost*, pemetaan *competency directory*, standarisasi *inventory directory*, dan penyusunan *outage deferral framework*.
   - Risk Management Software Update (I-CARE Dashboard) - An integrated risk dashboard for monitoring, prioritizing, and mitigating corporate risks
   - Supporting efficient Geothermal and Energy Companies to comply with controls by optimizing Life Cycle Cost analysis, mapping competency directories, standardizing inventory directories, and developing an outage deferral framework.

Bidang Usaha
Business Line

PLN Nusantara Power secara konsisten memperkuat langkah menuju nol emisi karbon melalui pengembangan teknologi energi terbarukan serta investasi pada infrastruktur energi yang lebih berkelanjutan.

PLN Nusantara Power consistently advances its steps toward zero carbon emissions through the development of renewable energy technologies and investments in more sustainable energy infrastructure.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar
Business Activities Based on Articles of Association

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas serta melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam rangka menunjang/mendukung kegiatan usaha Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan yang baik dan Kepatutan serta Etika Bisnis pada Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Pembangkitan tenaga Listrik;
b. Aktifitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya;
c. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal;
d. Instalasi Listrik;
e. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
f. Aktivitas Pemrograman berbasis Kecerdasan Artifisial;
g. Aktivitas Konsultansi dan Perancangan IoT;
h. *Green Pozzolan*/Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu;
i. *Green Pozzolan*/Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu;
j. Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;
k. Perdagangan Eceran Mesin dan Perlengkapan Lainnya;
l. Jasa Pengurusan Transportasi;
m. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*fee*) atau Kontrak;
n. Jasa Kalibrasi dan Metrologi;
o. Jasa Pengujian Laboratorium;
p. Analis dan Uji Teknis Lainnya;

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the purpose and objective of the Company is to conduct electricity business based on sound industrial and commercial principles by applying the principles of Limited Liability Companies and to carry out assignments from the Major Shareholders in order to support the Shareholders' business activities by applying the principles of Good Corporate Governance and Appropriateness and Business Ethics in Limited Liability Companies. To achieve the above purposes and objectives, the Company may carry out the following business activities:

a. Electric Power Generator;
b. Other Electricity Support Activities;
c. Electrical Civil Building Construction;
d. Electrical Installation;
e. Operation of Electricity Supply Installation;
f. Artificial Intelligence-based Programming Activities;
g. IoT Design and Consultancy Activities;
h. Green Pozzolan/Wholesale Trading of Cement, Lime, Sand, and Stone;
i. Green Pozzolan/Retail Trading of Cement, Lime, Sand, and Stone;
j. Wholesale Trade in Other Machinery, Equipment, and Supplies;
k. Retail Trade in Machinery and Other Equipment;
l. Transportation Management Services;
m. Wholesale Trade on Fee or Contract Basis;
n. Calibration and Metrology Services;
o. Laboratory Testing Services;
p. Other Technical Analysts and Tests;

q. Portal *Web* dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
r. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
s. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI;
t. Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri;
u. Konstruksi Gedung Industri;
v. Instalasi Minyak dan Gas;
w. Instalasi Saluran Air/Plambing;
x. Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl;
y. Instalasi Pemanas dan *Geothermal*;
z. Reparasi Produk Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap;

aa. Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum;
bb. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol;
cc. Reparasi Motor Listrik, *Generator* dan *Transformator*;

dd. Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik;
ee. Reparasi Peralatan Listrik Lainnya;

Selain kegiatan usaha sebagaimana disebutkan diatas, perseroan dapat melakukan perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan Perseroan.

q. Web Portals and/or Digital Platforms with Commercial Purposes;
r. Other Management Consulting Activities;
s. Wholesale trading of solid, liquid, and gaseous fuels and YBDI products;
t. Special Telecommunication Activities for Personal Use;
u. Industrial Building Construction;
v. Oil and Gas Installation;
w. Waterway/Slope Installation;
x. Other Construction Installations Ytdl;
y. Heating and Geothermal Installation;
z. Repair of Ready-to-install Metal Products for Buildings, Tanks, Water Reservoirs, and Steam Generators;
aa. Repair of Machinery for General Purposes;
bb. Repair of Measuring Instruments, Testing Instruments, and Navigation and Control Equipment;
cc. Repair of Electric Motors, Generators, and Transformers;
dd. Repair of Electric Batteries and Accumulators;
ee. Repair of Other Electrical Equipment;

In addition to the business activities mentioned above, the Company may conduct trading and/or supporting business activities to optimize the utilization of the Company's resources, including providing assignments to the Company's Subsidiaries.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat Ini
Current Business Activities

Kegiatan usaha PLN NP yang dijalankan saat ini adalah:

1. Penyediaan tenaga listrik dengan keandalan yang baik melalui mekanisme Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero) sebagai *single buyer*.
2. Kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha Perusahaan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki PLN NP guna meningkatkan *revenue* dari lini bisnis *asset light* (*beyond* kWh). Usaha lainnya ini adalah untuk menuju *Integrated Power Company*, baik dilakukan langsung oleh PLN NP maupun melalui Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi maupun *Joint Venture Company* (JVC) mencakup bidang usaha berikut:

Currently, PLN NP carries out the following business activities:

1. Electricity provision with good reliability through the Power Purchase Agreement (PPA) mechanism with PT PLN (Persero) as the single buyer.

2. Other Business activities related to the Company business activities in order to fully utilize PLN NP's potential to increase revenue from the asset-light (beyond kWh) business line. These other activities are to achieve an Integrated Power Company, either directly carried out by PLN NP or through the Subsidiaries, Associated Companies, and Joint Venture Companies (JVC), including the following business fields:

a. Pembangkit tenaga listrik melalui kepemilikan dalam *Independent Power Producer* (IPP);
b. Jasa *Operation and Maintenance* (O&M) pembangkit termasuk jasa penunjangnya;
c. Jasa *Maintenance, Repair & Overhaul* (MRO) pembangkit;
d. Jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) pembangkit energi terbarukan dan non terbarukan, transmisi dan gardu induk, serta relokasi pembangkit eksisting, termasuk PLTS Kepulauan;
e. Penyedia material cadang pembangkit (*stockist*);
f. *Power Plant Digitalization* dan *Asset Management*;
g. *Sustainable Solution* melalui pengelolaan FABA, *Asset property*, *Carbon trading Green Hydrogen*; dan
h. *Green Energy Business* (Revitalisasi PLTD, Pembangunan PLTS, Implementasi *Co-Firing*, Gasifikasi, dan Ekosistem *green Hydrogen*);

a. Power plant through ownership in Independent Power Producer (IPP);
b. Operation and Maintenance (O&M) services of power plants, including supporting services;
c. Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) services for power plants;
d. Engineering, Procurement, and Construction (EPC) services for renewable and non-renewable energy power plants, transmission and substations, as well as the relocation of existing power plants, including the Kepulauan SPP;
e. Power plant spare material provider (stockist);
f. Power Plant Digitalization and Asset Management;
g. Sustainable Solutions through FABA management, Asset property, Carbon trading for Green Hydrogen; and
h. Green Energy Business (DPP Revitalization, SPP Development, Co-Firing Implementation, Gasification, and green Hydrogen ecosystem).

Uraian Segmen Usaha
Business Segment Description

Segmen usaha utama PLN NP dibedakan berdasarkan pelanggannya, yang terbagi menjadi 2 (dua), yakni (1) segmen usaha penjualan tenaga listrik dan (2) segmen usaha bisnis lainnya. Pelanggan pada segmen usaha penjualan tenaga listrik terdiri dari pelanggan *grid* dan pelanggan *embedded*. Adapun pelanggan pada segmen usaha bisnis lainnya terdiri dari pelanggan jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M), jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC), jasa *Maintenance, Repair & Overhaul* (MRO) pembangkit dan Jasa Lainnya pada pembangkit milik PT PLN (Persero) maupun pembangkit IPP.

Indikator kinerja pada segmen usaha penjualan tenaga listrik adalah kinerja pembangkit, produksi dan penjualan tenaga listrik. Sedangkan indikator kinerja pada segmen usaha bisnis lainnya berbeda-beda sesuai dengan jenis dari jasa masing-masing. Secara keseluruhan, Direksi menggunakan ukuran pendapatan yang diperoleh untuk menilai kinerja seluruh segmen operasi yang ada.

PLN NP divides the main business segment based on customers into 2 (two), namely (1) the electricity sales business segment and (2) other business segments. Customers in the electricity sales and purchase business segment consist of grid customers and embedded customers. Customers in other business segments consist of Operations and Maintenance (O&M) customers, Engineering, Procurement, and Construction (EPC) services, Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) services for power plants, and Other Services at power plants of PT PLN (Persero) and IPP Power Plant.

Performance indicators on the electricity business sales segment are on the power plant performance, production and sales. Meanwhile performance indicators for other business segments are different following each service types. Overall, the Board of Directors uses the measures of revenue earned to assess performance of all existing operation segments.

Produk dan Jasa
Products and Services

PLN Nusantara Power dan Entitas Anak berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnis yang berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem energi serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

PLN Nusantara Power and its Subsidiaries are committed to continuously developing sustainable businesses to strengthen the energy ecosystem and provide long-term benefits for society and the environment.

Produk utama PLN NP adalah kesiapan operasi Unit Pembangkit dan tenaga listrik yang dihasilkan oleh Unit Pembangkit melalui mekanisme saluran transmisi langsung kepada pelanggan berdasarkan kontrak jual beli yang dinyatakan dengan *Equivalent Availability Faktor* (EAF) *Declare*.

PLN NP memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia tenaga listrik serta penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance*/O&M) pembangkit dengan mengelola pembangkit milik sendiri maupun pihak lain yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua yang terdiri dari:

1. 31 (tiga puluh satu) Unit Pembangkitan (UP);
2. 6 (enam) Unit PLTU;
3. 1 (satu) Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata);
4. 21 (dua puluh satu) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan (termasuk jasa O&M IPP);
5. 1 (satu) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* (MRO);
6. 2 (dua) Unit Pelaksana Proyek
7. Kepemilikan saham pada 11 (sebelas) Unit Pembangkit *Independent Power Producer* (IPP); dan
8. Kepemilikan saham pada Perusahaan Operasi dan Pemeliharaan untuk mengelola 1 (satu) unit pembangkit PLN.

Selain itu juga terdapat beberapa bisnis pendukung lainnya yang dilaksanakan oleh PLN NP maupun Entitas Anak. Profil dan Kinerja Entitas yang tergabung dalam Grup PLN NP disajikan berikutnya pada bagian Profil dan Kinerja Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan *Joint Venture* Bersama dalam Laporan Tahunan ini.

PLN NP's main product is the operational readiness of the Generating Unit and the electric power produced by the Generating Unit through a direct transmission channel mechanism to the customers based on sales and purchase contract, which is stated by the Equivalent Availability Factor (EAF) Declare.

PLN NP has the main business segment as a provider of electricity as well as providing operation and maintenance (O&M) services for power plants by managing its own power plants and those of other parties spread across Java, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, West Nusa Tenggara (NTB), East Nusa Tenggara (NTT), and Papua consisting of:

1. 31 (thirty-one) Electric Power Generator Units (UP);
2. 6 (six) CFPP Units;
3. 1 (one) Research Plant Unit (Cirata SPP);
4. 21 (twenty-one) Operation and Maintenance Services Units (including IPP O&M services);
5. 1 (one) Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) Unit;
6. 2 (two) Project Implementation Units
7. Shareholding in 11 (eleven) Independent Power Producer (IPP) Power Plant Units; and
8. Shareholding in an Operation and Maintenance Company to manage 1 (one) PLN power plant.

Moreover, there are also several other supporting businesses carried out by PLN NP and Subsidiaries. The profile and performance of the entities that are members of the PLN NP Group are presented next in the Profile and Performance of Subsidiaries, Second to Third-Tier Subsidiaries, Associations, and Joint Ventures section in this Annual Report.

Secara singkat, klasifikasi produk dan jasa Perusahaan diuraikan sebagai berikut:

In brief, the Company's product and service classifications are described as follows:

Pembangkit Tenaga Listrik
Electric Power Plant

Unit Bisnis Jasa *Operation and Maintenance* (UBJOM)
Operation and Maintenance Services Business Unit (OMSBU)

Jasa Pembangunan Pembangkit Baru (*Engineering, Procurement and Construction/EPC*)
New Plant Development Services (Engineering, Procurement and Construction/ EPC)

Penyedia Material Cadang Pembangkit (*Stockist*)
Plant Parts Provider (Stockist)

Investasi Pembangkitan
Generation Investment

Bisnis Pendukung Lainnya
Other Supporting Business

Pembangkit Tenaga Listrik
Power Plant

Usaha pembangkitan tenaga listrik dilakukan melalui pengelolaan Unit Pembangkitan (UP) Milik Sendiri. Unit Pembangkitan milik sendiri dengan total kapasitas terpasang sebesar 18.303,90 MW dan 1 Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata 1 MW) yang tersebar di seluruh Indonesia.

PLN NP carries out electricity generation business through the management of its own Generation Unit (UP). The Company's Generation Unit with a total installed capacity of 18.303,90 MW and 1 Research Generation Unit (1 MW Cirata SPP) spread across Indonesia.

Tabel Unit Pembangkitan yang dimiliki dan dikelola PLN NP
Tabel Unit Pembangkitan yang dimiliki dan dikelola PLN NP

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1	UP GU Muara Karang	2.177,42	Gas/BBM Gas/Fuel	Jakarta
2	UP GU Muara Tawar	2.470,55	Gas/BBM Gas/Fuel	Jawa Barat West Java
3	UP GU Gresik	2.222,98	Gas/BBM Gas/Fuel	Jawa Timur East Java
4	UP GU Brantas	281,70	Air Hydro	Jawa Timur East Java
5	UP GU Cirata	1.008,00	Air Hydro	Jawa Barat West Java
6	UP GU Arun	498,25	Gas/Diesel	Aceh
7	UP GU Paiton	1.460,00	Batubara Coal	Jawa Timur East Java
8	UP GU Tenayan	220,00	Batubara Coal	Riau
9	UP GU Indramayu	990,00	Batubara Coal	Jawa Barat West Java
10	UP GU Rembang	630,00	Batubara Coal	Jawa Tengah Central Java
11	UP GU TJ Awar-Awar	700,00	Batubara Coal	Jawa Timur East Java
12	UP GU Pacitan	630,00	Batubara Coal	Jawa Timur East Java
13	UP GU Kaltim Teluk	220,00	Batubara Coal	Kalimantan Timur East Kalimantan
14	UP GU Pulang Pisau	120,00	Batubara Coal	Kalimantan Tengah Central Kalimantan
15	UP GU Sengkang	331,60	Gas	Sulawesi Selatan South Sulawesi
16	UP GU Nagan Raya	220,00	Batubara Coal	Aceh

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
17	UP GU Bukit Asam	260,00	Batubara Coal	Sumatera Selatan South Sumatera
18	UP GU Sebalang	221,50	Batubara/Gas	Lampung
19	UP GU Tarahan	200,00	Batubara Coal	Lampung
20	UP GU Punagaya	220,00	Batubara Coal	Sulawesi Selatan South Sulawesi
21	UP GU Belawan	1.163,30	Gas/Diesel	Sumatera Utara North Sumatera
22	UP GU Pekanbaru	288,30	Gas/Hydro/Diesel	Riau
23	UP GU Kalselteng	170,89	Gas/Diesel	Kalimantan Tengah Central Kalimantan
24	UP GU Kapuas	189,45	Gas/Diesel	Kalimantan Barat West Kalimantan
25	UP GU Kaltimra	126,62	Gas/Diesel	Kalimantan Timur East Kalimantan
26	UP GU Kendari	149,47	Hydro/Diesel	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
27	UP GU Minahasa	222,37	Hydro/Diesel	Sulawesi Utara North Sulawesi
28	UP GU Gorontalo	171,08	Gas/Diesel	Gorontalo
29	UP GU Bandar Lampung	208,01	Gas/Hydro/Diesel	Lampung
30	UP GU Pandan	139,50	Hydro	Sumatera Utara North Sumatera
31	UP GU Bakaru	223,23	Hydro/Diesel	Sulawesi Selatan South Sulawesi
32	PLTU CFPP Tembilahan	14,00	Batubara Coal	Riau
33	PLTU CFPP Ketapang	20,00	Batubara Coal	Kalimantan Barat West Kalimantan
34	PLTU CFPP Kendari (1-2)	24,00	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
35	PLTU CFPP Amurang	50,00	Batubara Coal	Sulawesi Utara North Sulawesi
36	PLTU CFPP Anggrek	55,00	Batubara Coal	Gorontalo
37	PLTU CFPP Ampana	6,50	Batubara Coal	Sulawesi Tengah Central Sulawesi
38	PLTS Cirata (Riset 1 MW) Cirata SPP (1 MW Research)	(Riset 1 MW) (1 MW Research)	Tenaga Surya Solar	Jawa Barat West Java

Unit Bisnis Jasa *Operation & Maintenance* Pembangkit (UBJOM)
Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU)

Pelayanan jasa operasi dan pemeliharaan (O&M) dilakukan dengan mekanisme penyampaian langsung ke pelanggan berdasarkan Kontrak Jasa O&M. Jasa O&M dilakukan langsung oleh PLN NP maupun melalui Entitas Anak (PT PLN NPS) dan Perusahaan Asosiasi (PT Komipo PJB). yang tersebar di 21 (Dua Puluh Satu) lokasi sebagai berikut:

Operation and maintenance (O&M) services are carried out using a direct delivery mechanism to the customers based on an O&M Service Contract. O&M services are provided directly by PLN NP or through Subsidiary (PT PLN NPS) and Associate (PT Komipo PJB), spread across 21 (twenty-one) locations as follows:

Tabel Unit Bisnis Jasa O&M PLN NP
Table of O&M Services Business Unit of PLN NP

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1	PLTU CFPP Air Anyir (Bangka)	2×30	Batubara Coal	Bangka Belitung
2	PLTU CFPP Suge (Belitung Baru)	2×16,5	Batubara Coal	Bangka Belitung
3	PLTU CFPP Bolok	2×16,5	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
4	PLTU CFPP Kendari Unit 3	1×10	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
5	PLTU CFPP Ropa	2×7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
6	PLTU CFPP Tidore	2×7	Batubara Coal	Maluku Utara North Maluku
7	PLTU CFPP Malinau	2×3,5	Batubara Coal	Kalimantan Utara North Kalimantan
8	PLTA HPP Asahan	2×87	Air Hydro	Sumatera Utara North Sumatera
9	PLTA HPP Ampel Gading	2×5,23	Air Hydro	Jawa Timur East Java
10	PLTMG/U GEPP/GSEPP Lombok Peaker	20	Gas	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
11	PLTMG GEPP Sumbawa	50	Gas	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
12	PLTMG GEPP Bima	50	Gas	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
13	PLTMG GEPP Flores	20	Gas	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
14	PLTMG GEPP Maumere	40	Gas	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
15	PLTMG GEPP Bau-Bau	30	Gas	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
16	PLTMG GEPP Kendari	50	Gas	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
17	PLTMG GEPP Seram Peaker	20	Gas	Maluku
18	PLTMG GEPP Ternate	30	Gas	Maluku Utara North Maluku
19	PLTMG GEPP Langgur	20	Gas	Maluku Tenggara Southeast Maluku
20	PLTMG GEPP Tanjung Selor	15	Gas	Kalimantan Utara North Kalimantan
21	PLTA Peusangan Unit 1 dan 2 Peusangan Unit 1 and 2 HPP	88	Air Hydro	Aceh

Jasa Pembangunan Pembangkit Baru (Engineering, Procurement and Construction/ EPC)
New Power Plant Construction Services (Engineering, Procurement, and Construction/EPC)

PLN NP menjalankan jasa pembangunan pembangkit baru (*Engineering Procurement and Construction*/ EPC) melalui Entitas Anak yaitu PT PLN NPC yang tersebar di 10 (Sepuluh) lokasi sebagai berikut:

PLN NP carries out new plant construction services (Engineering Procurement and Construction/EPC) through its Subsidiary, PT PLN NPC, which is spread across 10 (ten) locations as follows:

Tabel Unit Pembangkitan EPC PLN NP
Table of EPC Generation Unit of PLN NP

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1	PLTU CFPP Sorong (Ex.Timika)	4×7 (MW)	Batubara Coal	Papua
2	PLTU CFPP Bima	2×10 (MW)	Batubara Coal	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
3	PLTU CFPP Sofifi	2×3 (MW)	Batubara Coal	Maluku Utara North Maluku
4	PLTMG GEPP Sekupang	50 (MW)	Gas	Batam
5	PLTS Substitusi PS Paiton PS Paiton Substitution SPP	862,31 (kWp)	Surya Solar	Jawa Timur East Java
6	PLTS Substitusi PS Muara Tawar PS Muara Tawar Substitution SPP	202,4 (kWP)	Surya Solar	Jawa Barat West Java
7	PLTS UID Jawa Timur 6 Lokasi 6 locations of East Java UID SPP	400 (kWp)	Surya Solar	Jawa Timur East Java
8	PLTS UID Jawa Timur 16 Lokasi 16 locations of East Java UID SPP	975 (kWp)	Surya Solar	Jawa Timur East Java
9	Relokasi PLTG Jakabaring Jakabaring GTPP Relocation	2×30 (MW)	Gas	Maluku Utara North Maluku
10	Relokasi PLTG Batanghari Batanghari GTPP Relocation	3×17 (MW)	Gas	Maluku Utara North Maluku

Penyedia Material Cadang Pembangkit (*Stockist*)
Power Plant Spare Part Provider (Stockist)

Bidang usaha jasa *stockist* saat ini dikelola langsung oleh Entitas Anak yaitu PT PLN SC, untuk melayani kebutuhan suku cadang pembangkitan, penyediaan *services*, dan dukungan retrofit kepada Pelanggan PLTU dan Pelanggan Non-PLTU di seluruh Indonesia yang berasal dari PT PLN (Persero), PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, dan IPP serta termasuk memberikan dukungan kepada Energi Baru Terbarukan (EBT).

Stockist services business sector is currently managed directly by the Subsidiary, PT PLN SC, to serve the needs of power plants spare parts, provision of services and retrofit support to CFPP customers and non-CFPP customers throughout Indonesia originating from PT PLN (Persero), PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, and IPP and also provide support for New Renewable Energy (NRE).

Tabel Pelanggan *Stockist* – Perusahaan / Non-*Power Plant*
Table of Stockist Customers - Companies/Non-Power Plant

No	Unit/Perusahaan Unit/Company
1	PT Bahtera Adhiguna
2	BUDD Group
3	PT Califpena Sinambung Daya
4	PT Cirebon Electric Power
5	PT Cahaya Semesta Elektrik Indonesia
6	PT Haleyora Power
7	PT Kerinci Merangin Hidro
8	Koperasi Jaya Bersama
9	PLN Electricity Services

No	Unit/Perusahaan Unit/Company
10	PLN Energi Primer Indonesia
11	PLN Indonesia Power
12	PLN IP Maintenance Services Unit
13	PLN NP UMRO
14	PLN Nusantara Power Construction
15	PLN Nusantara Power Services
16	PLN Nusantara Renewables
17	PLN Pusertif
18	PLN Pusharlis

No	Unit/Perusahaan Unit/Company
19	PLN Puslitbang
20	PLN UIW NTT
21	PLN UPK Flores
22	PLN Wilayah NTB – Tambora
23	PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI)

No	Unit/Perusahaan Unit/Company
24	TJB Power Services
25	UIPP Kendari
26	ULPL Paya Pasir
27	Universitas Gadjah Mada

Investasi Pembangkitan
Generation Investment

Usaha Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M
Share Ownership Business in O&M Companies

PT Komipo PJB merupakan entitas ventura bersama PLN NP yang bergerak di bidang jasa O&M, *coal handling*, *jetty* dan *port management* pada PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4 yang berkapasitas 2×661 MW.

PT Komipo PJB is a joint venture with PLN NP that provides O&M services, coal handling, jetty, and port management at the 2×661 MW Tanjung Jati B Units 3 & 4 CFPP.

Usaha Kepemilikan *Independent Power Producer* (IPP)
Independent Power Producer (IPP) Ownership Business

PLN NP mengembangkan pembangkit IPP melalui perusahaan patungan sebesar 5.205 MW sebagai berikut:

PLN NP develops IPP power plants through a joint venture of 5,205 MW as follows:

Tabel Unit Pembangkitan IPP PLN NP
Table of IPP PLN NP Generation Units

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Pembangkit IPP Beroperasi (5.205 MW) IPP Power Plant in Operation (5,205 MW)				
1	PLTA HPP Asahan*	2×90	Tenaga air Hydro	Sumatera Utara North Sumatera
2	PLTU CFPP Banjarsari*	2×110	Batubara Coal	Sumatera Selatan South Sumatera
3	PLTU Jawa 7 Unit 1 dan 2 Jawa 7 Unit 1 and 2 CFPP	2×1.000	Batubara Coal	Banten
4	PLTU Cilacap Unit #1 dan #2 Cilacap Unit #1 and #2 CFPP	2×300	Batubara Coal	Jawa Tengah Central Java
	PLTU Cilacap Unit #3 (Ekspansi 1) Cilacap Unit #3 CFPP (Expansion 1)	1×660	Batubara Coal	Jawa Tengah Central Java
	PLTU Cilacap Unit #4 (Ekspansi 2) Cilacap Unit #4 CFPP (Expansion 2)	1×1.000	Batubara Coal	Jawa Tengah Central Java
5	PLTU CFPP Mamuju	2×25	Batubara Coal	Sulawesi Barat West Sulawesi
6	PLTS Terapung Cirata Cirata Floating SPP	145MWAC/192 MWp	Surya Solar	Jawa Barat West Java
7	PLTS SPP IKN	50	Surya Solar	Kalimantan Timur East Kalimantan
8	PLTU CFPP MT Sumbagsel 1	2×150	Batubara Coal	Sumatera Selatan South Sumatera

* termasuk jasa O&M including O&M service

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Dalam Tahap Pengembangan (645 MW) Under Development Stage (645 MW)				
9	PLTA HPP Batang Toru	4×127,5	Tenaga air Hydro	Sumatera Utara North Sumatera
10	PLTS Terapung Tembesi Tembesi Floating SPP	35MWAc/46 MWp	Surya Solar	Batam, Kep. Riau Batam, Riau Islands
11	PLTS Terapung Karangkates Karangkates Floating SPP	100 MWAc	Surya Solar	Jawa Timur East Java

Bisnis Pendukung Lainnya
Other Supporting Businesses

Usaha Jasa *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO)
Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Services Business

Jasa MRO pembangkit merupakan pekerjaan pemeliharaan unit pembangkit sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mengembalikan kondisi pembangkit kepada performa terbaiknya.

MRO power plant services are maintenance work on generating units according to needs in order to restore the condition of the power plant to its best performance.

Pada tahun 2025, PLN NP melaksanakan jasa MRO diantaranya adalah:

In 2025, PLN NP implemented MRO services, including:

No	Uraian Jasa Description of Service	Penjelasan Explanation
1	Pekerjaan Helium *Leakage Test* PLTU Timor-1 Unit 2 PT Inti Karya Persada Tehnik (IKPT) Helium Leak Test at the Timor-1 Unit 2 CFPP by PT Inti Karya Persada Tehnik (IKPT)	- Melakukan pengetesan kebocoran *Vacuum Condenser* menggunakan metode Gas Helium berdasarkan surat dari Konsorsium 5OC (PT Inti Karya Persada Tehnik – PT PP (Persero) Tbk – ITOCHU Corporation – Sumitomo Heavy Industries, Ltd – PT Medco Power Indonesia) tanggal 22 Desember 2023. - Pengetesan dilakukan dalam dua tahap (tahap 1 pada 12 Maret 2024 dan tahap 2 pada 28-29 Juni 2024) karena pada tahap 1 unit 2 mengalami trip sehingga pencarian kebocoran *Vacuum Condenser* hanya terselesaikan 60%. Tahap 2 dilakukan untuk menyelesaikan 40% sisa pekerjaan serta melakukan uji kembali hasil tindak lanjut rekomendasi Tim PLN Nusantara Power pada tahap 1 dilanjutkan pada tahun 2025. - Conducting a leak test on the Vacuum Condenser using the Helium Gas method based on the letter from the 5OC Consortium (PT Inti Karya Persada Tehnik – PT PP (Persero) Tbk – ITOCHU Corporation – Sumitomo Heavy Industries, Ltd – PT Medco Power Indonesia) dated December 22, 2023. - The testing was conducted in two phases (phase 1 on March 12, 2024, and phase 2 on June 28-29, 2024) because in phase 1, unit 2 experienced a trip, resulting in only 60% of the Vacuum Condenser leak search being completed. Phase 2 was performed to complete the remaining 40% of the work and to retest the follow-up results of the PLN Nusantara Power Team's recommendations from phase 1, which was continued in 2025.
2	*Assessment Performance* Unit PLTA Lodagung PT Jasa Tirta Energi oleh NPS Performance Assessment of the Lodagung HPP Unit of PT Jasa Tirta Energi by NPS	*Assessment* performa PLTA Lodagung dilakukan sebagai respons atas penurunan kinerja pembangkit yang saat ini hanya mampu beroperasi hingga sekitar 60% dari kapasitas penuh (*full load*). Jasa Tirta sebagai pemilik PLTA Lodagung merupakan *customer* baru bagi PLN Nusantara Power *Group*. PLTA Lodagung yang berlokasi di Jawa Timur memiliki nilai strategis bagi NP *Group* karena kedekatan lokasinya dengan Anak Perusahaan NPS serta Unit PLTA Brantas. Melalui pelaksanaan assessment ini diharapkan dapat diidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan penurunan performa pembangkit serta diperoleh rekomendasi langkah perbaikan yang diperlukan. Rekomendasi tersebut selanjutnya berpotensi menjadi peluang pekerjaan atau pengembangan bisnis baru bagi NPS.

No	Uraian Jasa Description of Service	Penjelasan Explanation
		The performance of the Lodagung HPP was evaluated in response to the decline in the plant's performance, which is currently only capable of operating at around 60% of its full capacity (full load). Jasa Tirta, as the owner of Lodagung HPP, is a new customer for PLN Nusantara Power Group. Lodagung HPP, located in East Java, holds strategic value for NP Group due to its proximity to NPS Subsidiaries and the Brantas HPP Unit. Through the implementation of this assessment, the root causes of the decline in power plant performance are expected to be identified, and necessary improvement recommendations can be obtained. These recommendations could potentially become job opportunities or new business developments for NPS.
3	Supervisi Unit 1 Grade C PT Sumber Segara Primadaya (S2P) Supervision of Unit 1, Grade C, PT Sumber Segara Primadaya (S2P)	Pelaksanaan Supervisi Unit 1 *Grade* C pada PT Sumber Segara Primadaya dengan lingkup pekerjaan supervisi, memastikan pekerjaan OH pada PT S2P dilapangan sesuai dengan prosedur kerja, melakukan pengawasan, mengevaluasi pekerjaan dan identifikasi temuan saat OH dan membuat rekomendasi terhadap equipment pembangkit pasca OH. Dengan durasi pekerjaan 20 (Dua Puluh) hari kalender. Dengan hasil eksekusi dan pelayanan yang memuaskan dari tim eksekusi dan sesuai dengan harapan PT S2P, pekerjaan ini merupakan pekerjaan repeat order selama bertahun – tahun. Implementation of Supervision for Unit 1 Grade C at PT Sumber Segara Primadaya with the scope of supervisory work, ensuring that OH work at PT S2P in the field is in accordance with work procedures, conducting supervision, evaluating work, identifying findings during OH, and making recommendations for power plant equipment post-OH. With a work duration of 20 (Twenty) calendar days. With satisfactory execution and service from the execution team, meeting the expectations of PT S2P, this work has been a repeat order for many years.
4	*Borescope Inspection Gas Turbine* PT Bekasi Power Borescope Inspection Gas Turbine, PT Bekasi Power	Pekerjaan *borescope inspection gas turbine* milik PT Bekasi Power, berlokasi di kawasan industri Jababeka. Inspeksi pada bagian *turbine blade gas turbin frame* 6 unit A dan B, dilaksanakan selama 2 hari yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan inspeksi dan paparan. The borescope inspection work is on the gas turbine owned by PT Bekasi Power, located in the Jababeka industrial area. Inspection of the turbine blade section of the gas turbine frame 6 units A and B was carried out over 2 days, followed by the preparation of the inspection report and presentation.

Usaha Jasa *Operation and Maintenance* (O&M)

Operation and Maintenance (O&M) Services Business

Usaha Jasa O&M merupakan segmen usaha bisnis PLN NP dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit. Pada tahun 2025, PLN NP telah melakukan kegiatan:

The O&M Services Business is a business segment of PLN NP that focuses on the operation and maintenance of power plants. In 2025, PLN NP carried out the following activities:

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1	PLTU CFPP Air Anyir (Bangka)	2×30	Batubara Coal	Bangka Belitung
2	PLTU CFPP Suge (Belitung Baru)	2×16,5	Batubara Coal	Bangka Belitung
3	PLTU CFPP Bolok	2×16,5	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
4	PLTU CFPP Kendari Unit 3	1×10	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
5	PLTU CFPP Ropa	2×7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
6	PLTU CFPP Tidore	2×7	Batubara Coal	Maluku Utara North Maluku
7	PLTU CFPP Malinau	2×3,5	Batubara Coal	Kalimantan Utara North Kalimantan
8	PLTA HPP Asahan	2×87	Air Hydro	Sumatera Utara North Sumatera
9	PLTA HPP Ampel Gading	2×5,23	Air Hydro	Jawa Timur East Java
10	PLTMG/U GEPP/GSEPP Lombok Peaker	20	Gas	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
11	PLTMG GEPP Sumbawa	50	Gas	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
12	PLTMG GEPP Bima	50	Gas	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
13	PLTMG GEPP Flores	20	Gas	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
14	PLTMG GEPP Maumere	40	Gas	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
15	PLTMG GEPP Bau-Bau	30	Gas	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
16	PLTMG GEPP Kendari	50	Gas	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
17	PLTMG GEPP Seram Peaker	20	Gas	Maluku
18	PLTMG GEPP Ternate	30	Gas	Maluku Utara North Maluku
19	PLTMG GEPP Langgur	20	Gas	Maluku Tenggara Southeast Maluku
20	PLTMG GEPP Tanjung Selor	15	Gas	Kalimantan Utara North Kalimantan
21	PLTA Peusangan Unit 1 dan 2 Peusangan Unit 1 and 2 HPP	88	Air Hydro	Aceh

Jasa Konsultan Pembangkit Listrik
Power Plant Consulting Services

Jasa konsultan pembangkit listrik menawarkan solusi komprehensif yang didukung keahlian mendalam untuk mengoptimalkan desain, operasional, dan efisiensi pembangkit. Dengan rekam jejak yang solid layanan PLN NP ini mencakup *asset management*, konsultan teknik dan konsultan *co-firing* biomassa. Pada tahun 2025, jasa konsultan yang telah diberikan antara lain:

1. Jasa Konsultan *Life Cycle Cost Analysis* PT Geo Dipa Energi (Persero)
2. Jasa Konsultan Pendamping Teknis *Overhaul* PLTP Dieng 1 PT Geo Dipa Energi
3. Jasa Konsultan Kajian Teknis Perpanjangan *Operational Hours* PLTP Patuha Unit 1
4. Jasa Konsultan Supervisi PT Sumber Segara Primadaya.

Power plant consulting services offer comprehensive solutions supported by in-depth expertise to optimize plant design, operations, and efficiency. With a solid track record, PLN NP's services include asset management, engineering consulting, and biomass co-firing consulting. In 2025, the consulting services that have been provided include:

1. Life Cycle Cost Analysis Consulting Services of PT Geo Dipa Energi (Persero)
2. Technical Support Consulting Services for the Overhaul of the Dieng 1 Geothermal Power Plant (GPP) of PT Geo Dipa Energi
3. Technical Study Consulting Services for the Extension of Operating Hours of the Patuha Unit 1 GPP
4. Supervision Consulting Services of PT Sumber Segara Primadaya.

Sustainable Solution
Sustainable Solution

Sustainable solution untuk produk turunan pembangkit tenaga listrik menawarkan pendekatan inovatif yang mengubah limbah dan *by-product* menjadi sumber daya bernilai, seperti pemanfaatan abu terbang (*fly ash*) untuk bahan bangunan atau daur ulang panas sisa untuk efisiensi energi. Solusi ini mendukung ekonomi sirkular, mengurangi dampak lingkungan dan menciptakan nilai tambah yang be rkelanjutan. Layanan yang diberikan yaitu antara lain: penyewaan lahan dan bangunan, penyewaan alat, *Fly Ash and Bottom Ash* (FABA) dan *carbon trading*.

Pada tahun 2025, *sustainable solution* yang telah dilakukan PLN NP adalah:

Sustainable solutions for power plant derivative products offer innovative approaches that turn waste and by-products into valuable resources, such as the utilization of fly ash for building materials or the recycling of residual heat for energy efficiency. These solutions support a circular economy, reduce environmental impact, and create sustainable added value. The services provided include land and building leasing, equipment leasing, Fly Ash and Bottom Ash (FABA), and carbon trading.

In 2025, the sustainable solutions that have been carried out by PLN NP are:

No	Uraian Jasa Description of Service	Penjelasan Explanation
1	*Carbon Trading*	Penjualan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) proyek PLGU Muara Karang Blok 3, PLTGU Muara Tawar *Add On* Blok 2, dan PLTMG Sumbagut 2 *Peaker* di IDX Carbon. Sale of Greenhouse Gas Emission Reduction Certificates (SPE-GRK) for the Muara Karang Block 3 CCPP project, Muara Tawar CCPP Add On Block 2, and Sumbagut 2 Peaker GEPP at IDX Carbon.
2	Penjualan *Fly Ash Bottom Ash* (FABA) Sales of Fly Ash Bottom Ash (FABA)	Pada tahun 2025, pemanfaatan limbah hasil pembakaran batubara berupa *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) dari operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berhasil dioptimalkan melalui penjualan kepada pihak ketiga dengan total capaian mencapai 414.000 ton, atau senilai Rp11,5 miliar. FABA tersebut dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku industri semen, beton, material konstruksi, serta berbagai kebutuhan infrastruktur lainnya. Upaya ini tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga mendukung penerapan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. In 2025, the utilization of coal combustion waste in the form of fly ash and bottom ash (FABA) from CFPP operations was successfully optimized through sales to third parties, resulting in a total of 414,000 tons worth Rp11.5 billion. The FABA is reused as raw material for the cement industry, concrete, construction materials, and various other infrastructure needs. This effort not only adds economic value to the Company but also supports the implementation of sustainability principles and environmental management in accordance with applicable regulations.
3	*Hydrogen*	1. Sewa HFCG untuk mensuport acara pameran *hydrogen* di JIC dimana NP menyewakan HFCG dengan *include hydrogen* ke PT Toyota selama acara pameran *Hydrogen* di JIC 2. Penjualan *hydrogen* ke PT Perta Daya Gas dimana PDG membutuhkan *hydrogen* untuk menjual lagi ke industrial 1. Rent HFCG to support the hydrogen exhibition event at JIC, where NP rents HFCG, including hydrogen, to PT Toyota during the Hydrogen exhibition event at JIC. 2. Sale of hydrogen to PT Perta Daya Gas, where PDG needs hydrogen to sell again to the industrial sector

Jasa *Engineering, Procurement and Construction*

Engineering, Procurement, and Construction Services

Jasa EPC menawarkan jasa desain proyek (*engineering*), penyediaan peralatan dan materi (*procurement*), serta pembangunan sampai siap digunakan (*construction*). Jasa EPC ini dilakukan oleh anak perusahaan PLN NP yaitu PLN NP Construction (PLN NPC).

EPC services offer project design services (engineering), provision of equipment and materials (procurement), and development until ready for use (construction). This EPC service is carried out by PLN NP's subsidiary, PLN NP Construction (PLN NPC).

Pada tahun 2025, PLN NP telah melakukan kegiatan:

In 2025, PLN NP carried out the following activities.

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Lokasi Location	Status Pekerjaan Work Status
1	PLTU CFPP Sorong (Ex.Timika)	4×7 (MW)	Papua	*Ongoing*
2	PLTU CFPP Bima	2×10 (MW)	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	*Ongoing*
3	PLTU CFPP Sofifi	2×3 (MW)	Maluku Utara North Maluku	Unit 2 TOC, Unit 1 *Commisioning*
4	PLTMG GEPP Sekupang	50 (MW)	Batam	*Ongoing*
5	PLTS Substitusi PS Paiton PS Paiton Substitution SPP	862,31 (kWp)	Jawa Timur East Java	COD

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Lokasi Location	Status Pekerjaan Work Status
6	PLTS Substitusi PS Muara Tawar PS Muara Tawar Substitution SPP	202,4 (kWP)	Jawa Barat West Java	COD
7	PLTS UID Jawa Timur 6 Lokasi 6 locations of East Java UID SPP	400 (kWp)	Jawa Timur East Java	COD
8	PLTS UID Jawa Timur 16 Lokasi 16 locations of East Java UID SPP	975 (kWp)	Jawa Timur East Java	12 Lokasi COD 4 Lokasi Menunggu Lahan bebas 12 COD Locations, 4 Locations Awaiting Available Land
9	Relokasi PLTG Jakabaring Jakabaring GTPP Relocation	2×30 (MW)	Maluku Utara North Maluku	COD
10	Relokasi PLTG Batanghari Batanghari GTPP Relocation	3×17 (MW)	Maluku Utara North Maluku	COD

Digitalisasi *Power Plant*

Power Plant Digitization

PLN NP sebagai pionir & trendsetter digitalisasi pembangkit. **TEKNOLOGI *INTELLIGENCE CENTER OF OPTIMIZATION FOR RELIABILITY & EFFICIENCY* (I-CORE).**

Membantu PLN NP untuk memonitor, menganalisa, dan mendiagnosa kondisi pembangkit secara otomatis.

PLN NP as a pioneer and trendsetter in power plant digitalization. **INTELLIGENCE CENTER OF OPTIMIZATION FOR RELIABILITY & EFFICIENCY (I-CORE) TECHNOLOGY.**

Assists PLN NP in automatically monitoring, analyzing, and diagnosing the condition of power plants.

Skema Penyaluran Tenaga Listrik
Scheme of Electricity Transmission

Dengan semangat inovasi dan keberlanjutan, PLN Nusantara Power memimpin pengembangan energi terbarukan sebagai fondasi masa depan energi Indonesia

With a passion for innovation and sustainability, PLN Nusantara Power leads the development of renewable energy as the basis for Indonesia's energy future

Dalam industri ketenagalistrikan, terdapat 3 (tiga) tahap utama: pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Kontribusi PLN NP dalam rantai pasok bisnis ketenagalistrikan adalah pada lini pembangkitan sebagai penyedia tenaga listrik. Selanjutnya tenaga listrik disalurkan (transmisi) melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sistem Jawa-Bali dan didistribusikan kepada pelanggan industri maupun rumah tangga oleh PLN (Persero).

There are 3 (three) main stages in the electricity industry: electric power generator, transmission, and distribution. PLN NP's contribution to the electricity business supply chain is in the generation line as a provider of electricity. Furthermore, electric power is distributed (transmission) through the Java-Bali High Voltage Air Line (SUTT) system and distributed to industrial and household customers by PLN (Persero).

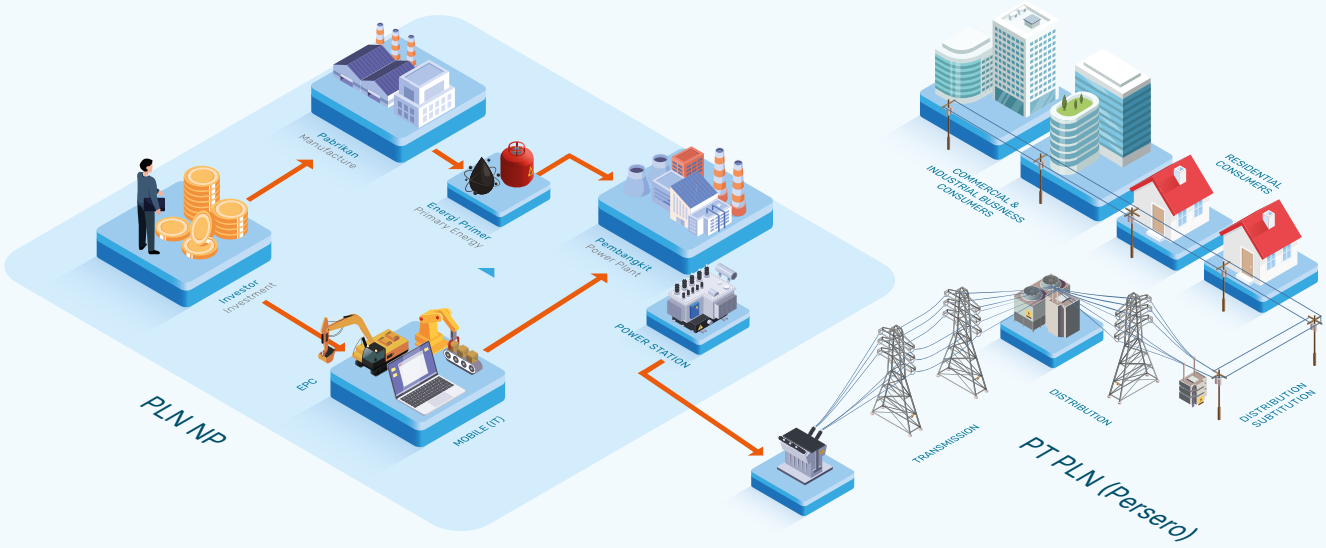

Kontribusi Grup PLN NP Sebagai *Generation Company* 1 pada Penyediaan Tenaga Listrik Nasional

PLN NP Group Contribution as Generation Company 1 to National Electric Power Supply

Grup PLN NP mengintegrasikan pengelolaan organisasi sistem pembangkitan untuk mewujudkan *value creation* yang berkelanjutan melalui aspirasi Visi untuk menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global. Lingkup sinergi usaha Grup PLN NP mencakup bidang rekayasa teknik (EPC); pengelolaan pembangkit milik sendiri; penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit; investasi/penyertaan pada IPP/JVC; penyediaan suku cadang pembangkit serta jasa pendukung ketenagalistrikan lainnya.

PLN NP Group integrates the management of the generation system organization to realize sustainable value creation through the aspiration of the Vision to become the leading and most trusted generation company for sustainable energy in Indonesia and the Global Market. The scope of business synergy of PLN NP Group includes engineering (EPC); management of own power plants; provision of power plant operation and maintenance services; investment/participation in IPP/JVC; provision of power plant spare parts, and other electricity support services.

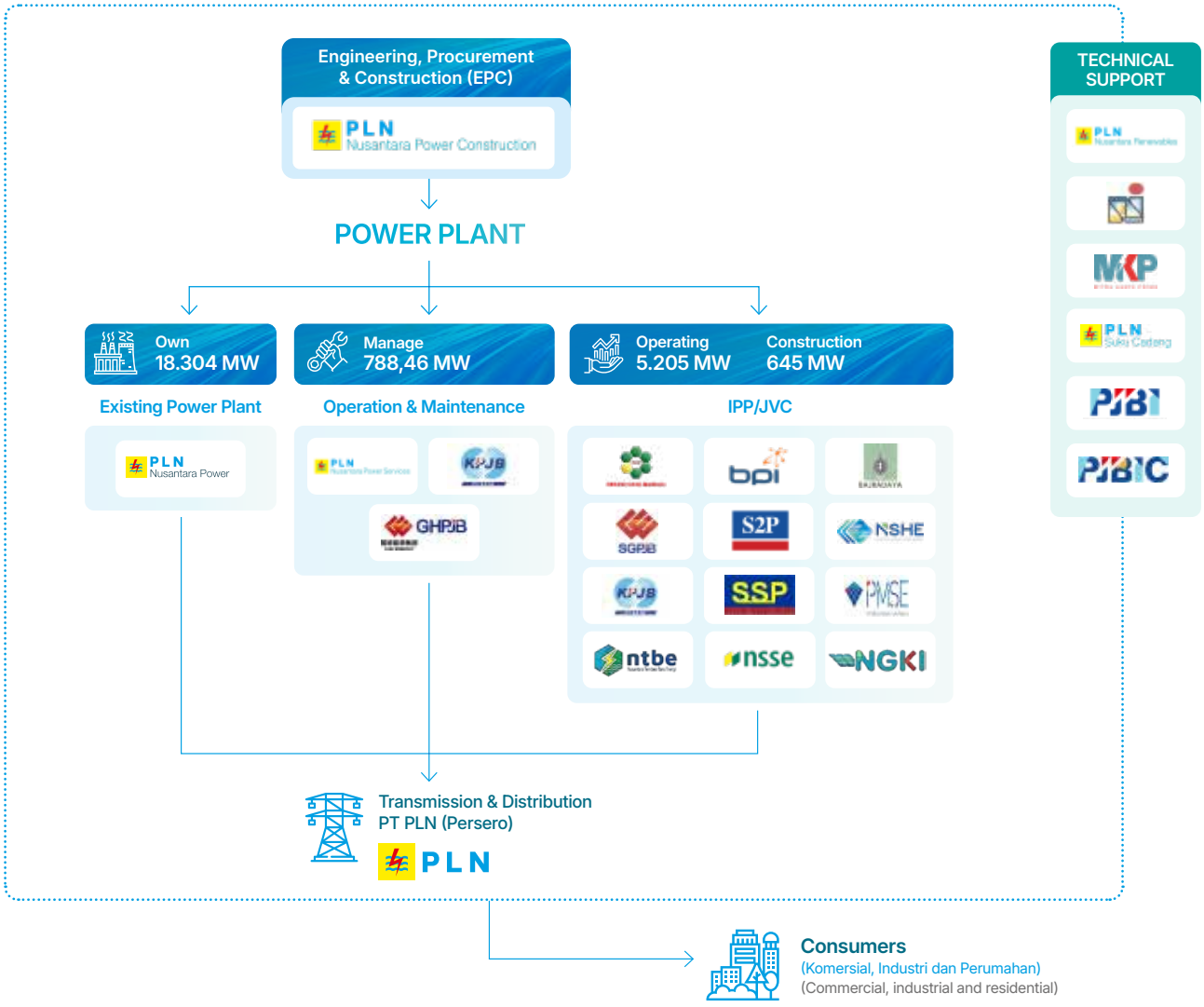

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan dalam Mendukung Energi Berkelanjutan

Company Vision, Mission, and Culture in Supporting Sustainable Energy

PLN Nusantara Power terus memperkuat langkah menuju pasar global melalui pengembangan kompetensi, inovasi, dan solusi energi yang berkelanjutan.

PLN Nusantara Power continues to strengthen its steps toward the global market through the development of competencies, innovation, and sustainable energy solutions.

Dasar Pengesahan Visi dan Misi

Ratification Basis of Vision and Mission

Visi dan Misi Perusahaan telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2024-2028 pada tanggal 8 November 2024 dan Keputusan Rapat Direksi di Luar Rapat No. 025/DIR/2024.

The Company established the Vision and Mission set out in the Company's Long-Term Plan (RJPP) for the 2024-2028 period on November 8, 2024, and the Decision of the Board of Directors' Meeting Outside the Meeting No. 025/DIR/2024.

Visi
Vision

Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global

To become the leading and most trusted generation company for sustainable energy in Indonesia and the Global Market.

Makna Visi Definition of Vision

1. **Perusahaan Terdepan dan Terpercaya**, mengandung pengertian bahwa PLN NP merupakan perusahaan pionir yang menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan tata kelola perusahaan kelas dunia dengan indikator operasional dan finansial terbaik di Asia Tenggara sehingga meningkatkan kredibilitas Perusahaan untuk menjadi pilihan utama bagi partner dalam melakukan bisnis.
2. **Berkelanjutan,** mengandung pengertian bahwa bisnis PLN NP bergerak dan berkembang secara terus menerus dengan menjalankan bisnis eksisting, membangun dan mengembangkan bisnis baru serta berinovasi untuk meningkatkan profit dan value Perusahaan bagi *stakeholders*.
3. **Indonesia dan Pasar Global**, mengandung pengertian bahwa PLN NP berencana untuk *go international* dan menjajaki target *market* yang lebih luas untuk memanfaatkan keahlian saat ini maupun potensi yang akan datang, dan secara ambisius mendapatkan peluang internasional untuk pertumbuhan korporasi.

1. **Leading and Trusted Company**, means that PLN NP is a pioneer that runs and develops its business in accordance with worldclass corporate governance with the best operational and financial indicators in Southeast Asia to enhance the Company's credibility to be the first choice in doing business.
2. **Sustainable**, means that PLN Nusantara Power advances and develops continuously by maintaining its existing businesses, building and developing new businesses, and innovating to increase the Company's profit and value for stakeholders.
3. **Indonesia and Global Markets**, implies that PLN Nusantara Power plans to go international and explore broader target markets to capitalize on current and potential expertise and ambitiously pursue international opportunities for corporate growth.

Misi
Mission

- **Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti**
- **Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan**
- **Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon**
- **Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif**

- To Maintain an Excellent Power Plant Performance as a Core Competency
- To Build a Leading Innovative Business for Diversification and Sustainable Growth
- To accelerate NRE Business Portfolio to Support the Achievement of Zero Carbon Emissions
- To Acquire and Build the Best Talent to Run a Responsive and Adaptive Organization

Makna Misi Definition of Mission

1. **Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti** artinya Fokus utama adalah mempertahankan performa yang unggul dalam pengelolaan pembangkitan, memastikan penyediaan energi yang andal dan efisien kepada pelanggan.
2. **Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan** artinya Perusahaan bertujuan untuk mengembangkan bisnis inovatif yang dapat menghadapi tantangan pasar yang berubah, membuka peluang baru, dan memastikan pertumbuhan jangka panjang.
3. **Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon** artinya Upaya diarahkan pada percepatan investasi dan pengembangan sumber energi terbarukan, untuk mendukung komitmen tercapainya Nol Emisi Karbon, mengurangi dampak lingkungan, dan memanfaatkan pasar energi hijau.
4. **Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif** artinya Memastikan PLN NP dapat menarik, mengembangkan, dan mempertahankan bakat terbaik dalam industri, serta menciptakan organisasi yang responsif dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis.

1. **To Maintain an Excellent Power Plant Performance as a Core Competency** means The primary Focus is on maintaining excellent performance in generation management as well as ensuring the reliable and efficient provision of energy to customers.
2. **To Building a leading Innovative Business for Diversification and Sustainable Growth** means The Company aims to develop innovative businesses that can meet the challenges of a changing market, open up new opportunities, and ensure long-term growth.
3. **To Accelerate NRE Business Portfolio to Support the Achievement of Zero Carbon Emissions** means Efforts are directed at accelerating investment and development of renewable energy sources to support the commitment to achieving Zero Carbon Emissions, reducing environmental impacts, and capitalizing on the green energy market.
4. **To Acquire and Build the Best Talent to Run a Responsive and Adaptive Organization** means Ensuring PLN NP can attract, develop, and retain the best talent in the industry as well as creating an organization that is responsive and able to adapt quickly to changes in the business environment.

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Budaya Perusahaan diartikan sebagai *Core Values* menjadi pondasi dalam membentuk prilaku insan PLN NP. Sebagai Anak Perusahaan BUMN, PLN NP menjadikan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai *core values* di Perusahaan yang diadopsi sejak tanggal 9 November 2020. *Core Values* AKHLAK terdiri atas 6 (enam) nilai dengan panduan perilaku yang terdiri atas 18 (delapan belas) perilaku utama.

Corporate Culture is defined as Core Values imply the foundation in establishing the behavior of PLN NP people. As a Subsidiary of an SOE, PLN NP has made AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) a core value in the Company which was adopted since November 9, 2020. The AKHLAK Core Values consist of 6 (six) values with behavioral guidelines consisting of on 18 (eighteen) major behaviors.

AKHLAK

Core Values	Definisi Definition	Panduan Perilaku Code of Conduct
A **Amanah** Trustworthy	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan Upholding the trust given	- Memenuhi janji dan komitmen - Bertanggung-jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan - Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika - Keeping promises and commitments - Being responsible for the tasks, decisions, and actions taken - Upholding the moral and ethical values
K **Kompeten** Competent	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continuing to learn and develop capabilities	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik - Improving self-competence to respond to ever-changing challenges - Helping others in learning - Completing tasks with the highest quality
H **Harmonis** Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan Caring for each other and respecting differences	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif - Respecting everyone regardless of background - Willing to help others - Building conducive work environment
L **Loyal**	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara Dedicated and prioritizing the interest of the nation and state	- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara - Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar - Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika - Maintaining the good reputation of fellow employees, leaders, SEOs, and the State - Willing to sacrifice to achieve a greater goal - Adhering the leadership as long as it is not against the law and ethics
A **Adaptif** Adaptive	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan Keep innovating and being enthusiastic in driving or facing changes	- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik - Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi - Bertindak proaktif - Quickly adapting to be better - Continuously making improvements to keep up with technological developments - Acting proactively
K **Kolaboratif** Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis Building Synergistic Cooperation	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama - Providing opportunities for various parties to contribute - Open in working together to generate added value - Mobilizing the use of various resources for common goals

Struktur Organisasi
Organizational Structure

Struktur Organisasi yang berlaku di akhir tahun 2025 adalah Struktur Organisasi yang mengacu pada Peraturan Direksi Nomor: 0021.P/DIR/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Adapun skema struktur organisasi PLN NP adalah sebagai berikut:

The Organizational Structure that applies at the end of 2025 is the Organizational Structure that refers to the Board of Directors Regulation Number: 0021.P/DIR/2025 dated August 11, 2025. The scheme of PLN NP organizational structure is as follows.

Catatan Note:
Untuk jabatan senior specialist berada di bawah koordinasi masing-masing Direktur
Senior specialist positions are under the coordination of each Director

Ruly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

- Komite *Sustainability*
  Sustainability Committee
- Komite Investasi
  Investment Committee

Komang Parmita
Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Operation Gas Power Plant

- **Yudhy Bhagaskara**
  Vice President O&M Planning and Control IV
- **I Putu Sudarsa**
  Vice President O&M Planning and Control V
- **Hendrie Bastian**
  Vice President O&M Planning and Control NRE
- **Andi Setyawan**
  Vice President Power Generation Reliability II
- **Abdi Nafi'**
  Vice President Contract Management & Customer Relations II
- **Wasito**
  Vice President Primary Energy Planning & Control II
- General Manager/Senior Manager/ Manager Unit Pembangkit
  General Manager/Senior Manager/ Generating Unit Manager
- General Manager Unit *Maintenance, Repair and Overhaul*
  General Manager Unit Maintenance, Repair and Overhaul

Dwi Hartono
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce

- **Eni Wulansari**
  Vice President Corporate Planning and Sustainability
- **Yama Bellatrixiana**
  Vice President Portfolio Management and Subsidiaries
- **Dedy Marsetioadi**
  Vice President Business Development-Generation I
- **Eko Ariyanto**
  Vice President Business Development-Generation II
- **Adi Apriyanto Wijaya**
  Vice President Bussiness Development Generation Derivatives
- **Judi Rahmanu**
  Vice President Corporate Performance

Teguh Widhi Harsono
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

- **Lusianna Ester**
  Vice President Corporate Finance and Budgeting
- **Yopi Dewi Kumalasari**
  Vice President Treasury and Tax
- **Niken Widhi Nugraheni**
  Vice President Accounting and Insurance
- **Fatkul Mubin**
  Vice President Information Technology and Digital
- **Barid Anna Sophia**
  Vice President Risk Management and Compliance

Tb Ari Wibawa Mukti
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

- **Kunto Wibisono**
  Vice President Human Capital Strategy
- **Eko Widiyanto**
  Vice President Human Capital Development
- **Doddy Nafiudin**
  Vice President Human Capital Services
- **Ika Safitri**
  Vice President Health, Safety, Security and Environment
- **Indarto Purbo Utomo**
  Vice President General Affairs

Sutrisno
Kepala Satuan Supply Chain Management
Head of Supply Chain Management Unit

- **Hendro Susilo**
  Vice President Demand Planning and Sourcing
- **Satrio Adhikusumo**
  Vice President Procurement
- **Deni Susanto**
  Vice President Logistic and System

Agus Muslim
Kepala Satuan Project Management
Head of Project Management Unit

- **Rdw. Manurung**
  Vice President Pre-Construction
- **Hermono Dwi Gunojati**
  Vice President Construction Control
- **Teguh Handoyo**
  Vice President Project Management Office
- Manager Unit Pelaksana Proyek
  Manager of Project Implementation Unit

Edi Srimulyanti
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commisisoner

Dewi Tatiana
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioner

Ade Armando
Komisaris
Commissioner

Suharyono
Komisaris
Commissioner

M. Pradana Indraputra
Komisaris
Commissioner

Adam Muhammad
Komisaris
Commissioner

Muhammad Syafi'i
Komisaris
Commissioner

Komite Audit
Audit Committee

- **Suharyono** — Ketua / Chairman
- **Ade Armando** — Wakil Ketua / Vice Chairman
- **Andi Haslinda** — Sekretaris merangkap Anggota / Secretary concurrent Member
- **Fadilatul Imami** — Anggota / Member

Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee

- **Edi Srimulyanti** — Ketua / Chairman
- **M. Pradana Indraputra** — Wakil Ketua / Vice Chairman
- **Ardhi Tartahadi** — Sekretaris merangkap Anggota / Secretary concurrent Member
- **Awal Susmanto** — Anggota / Member

Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee

- **Muhammad Syafi'i** — Ketua / Chairman
- **Adam Muhammad** — Wakil Ketua / Vice Chairman
- **Gregorius Helmy W.** — Sekretaris merangkap Anggota / Secretary concurrent Member
- **Jaka Setiawan** — Anggota / Member

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Changes in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sepanjang tahun 2025, terdapat tiga kali perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Perubahan pertama dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS di Luar Rapat (Sirkuler) yang menetapkan pemberhentian Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris terhitung sejak 23 April 2025, sebagaimana diaktakan dalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 9 Mei 2025.

Perubahan kedua pada tanggal 01 Mei 2025, sesuai dengan penyampaian surat pengunduran diri Sdr. Widjono Hardjanto sebagai Komisaris Independen pada 29 April 2025.

Perubahan ketiga dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS (Sirkuler) pada tanggal 26 Juni 2025, di mana seluruh anggota Dewan Komisaris sebelumnya diberhentikan, dan RUPS menetapkan Sdri. Edi Srimulyanti, Sdr. Ade Armando, Sdr. Suharyono, Sdr. M. Pradana Indraputra, Sdr. Adam Muhammad, dan Sdr. Muhammad Syafi'I sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru.

Perubahan kedua dan ketiga tersebut diaktakan dalam Akta Notaris Nomor 31 tanggal 18 Juli 2025.

Adapun perubahan komposisi Dewan Komisaris ini dilakukan sebagai bagian dari upaya strategis Perseroan untuk memperkuat tata kelola perusahaan serta mendorong kinerja yang optimal, guna mendukung keberlangsungan operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan.

Throughout 2025, there were three changes in the composition of the Board of Commissioners.

The first change was made based on the Circular GMS resolution, which appointed the dismissal of Mr. Evy Haryadi as Commissioner effective from April 23, 2025, as stated in Notarial Deed Number 5 dated May 9, 2025.

The second amendment on May 1, 2025, in accordance with the submission of Mr. Widjono Hardjanto's resignation letter as Independent Commissioner on April 29, 2025.

The third change was made based on the Circular GMS resolution dated June 26, 2025, where all previous members of the Board of Commissioners were dismissed. Additionally, the GMS appointed Ms. Edi Srimulyanti, Mr. Ade Armando, Mr. Suharyono, Mr. M. Pradana Indraputra, Mr. Adam Muhammad, and Mr. Muhammad Syafi'I as the new members of the Board of Commissioners.

The second and third amendments were notarized in Notarial Deed Number 31 dated July 18, 2025.

The change in the composition of the Board of Commissioners is part of the Company's strategic efforts to strengthen corporate governance and drive optimal performance, in order to support the sustainability of operations and the achievement of the Company's long-term goals.

Tabel Kronologis Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Table of Chronological Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2025 - 22 April 2025 Composition of the Board of Commissioners for January 1-April 22, 2025		Komposisi Dewan Komisaris Periode 23 April 2025 - 30 April 2025 Composition of the Board of Commissioners for April 22-April 30, 2025	
Nama Name	**Jabatan** Position	**Nama** Name	**Jabatan** Position
Hendra Iswahyudi	PLT Komisaris Utama Act. President Commissioner	Hendra Iswahyudi	PLT Komisaris Utama Act. President Commissioner
Evy Haryadi	Komisaris Commissioner	Emir Kresna Wardana	Komisaris Commissioner
Emir Kresna Wardana	Komisaris Commissioner	Ida Nuryatin Finahari	Komisaris Commissioner
Ida Nuryatin Finahari	Komisaris Commissioner	Bagus Puruhito	Komisaris Independen Independent Commissioner
Bagus Puruhito	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kenedy	Komisaris Independen Independent Commissioner
Kenedy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Widjono Hardjanto	Komisaris Independen Independent Commissioner
Widjono Hardjanto	Komisaris Independen Independent Commissioner		
Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Mei 2025 - 25 Juni 2025 Composition of the Board of Commissioners for May 1–June 25, 2025		**Komposisi Dewan Komisaris Periode 26 Juni 2025 - saat ini** Composition of the Board of Commissioners for June 26, 2025 – present	
Nama Name	**Jabatan** Position	**Nama** Name	**Jabatan** Position
Hendra Iswahyudi	PLT Komisaris Utama Act. President Commissioner	Edi Srimulyanti	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner
Emir Kresna Wardana	Komisaris Commissioner	Ade Armando	Komisaris Commissioner
Ida Nuryatin Finahari	Komisaris Commissioner	Suharyono	Komisaris Commissioner
Bagus Puruhito	Komisaris Independen Independent Commissioner	M. Pradana Indraputra	Komisaris Commissioner
Kenedy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Adam Muhammad	Komisaris Commissioner
		Muhammad Syafi'i	Komisaris Commissioner

Komposisi Direksi sepanjang tahun 2025 mengalami satu kali perubahan. Perubahan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 26 Juni 2025, sebagaimana diaktakan dalam Akta Notaris Nomor 31 tanggal 18 Juli 2025.

The composition of the Board of Directors underwent one change throughout 2025. This change was determined based on the Circular GMS Resolution regarding the Dismissal and Appointment of the Board of Directors Members on June 26, 2025, as documented in Notarial Deed Number 31 dated July 18, 2025.

Dalam keputusan tersebut, terdapat pemberhentian Sdr. Rachmanoe Indarto sebagai anggota Direksi PLN NP, serta pengangkatan Sdr. M. Irwansyah Putra, Sdr. Teguh Widhi Harsono, dan Sdr. TB Ari Wibawa Mukti sebagai anggota Direksi PLN NP.

Perubahan komposisi Direksi ini merupakan bagian dari upaya strategis Perseroan untuk memperkuat tata kelola perusahaan serta mendorong kinerja yang optimal, guna mendukung keberlangsungan operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan.

Berikut perubahan komposisi Direksi selama tahun 2025:

In the resolution, there is the dismissal of Mr. Rachmanoe Indarto as a member of the PLN NP Board of Directors, as well as the appointment of Mr. M. Irwansyah Putra, Mr. Teguh Widhi Harsono, and Mr. TB Ari Wibawa Mukti as members of the PLN NP Board of Directors.

This change in the composition of the Board of Directors is part of the Company's strategic efforts to strengthen corporate governance and drive optimal performance, to support the sustainability of operations and the achievement of the Company's long-term goals.

The following are the changes in the composition of the Board of Directors during 2025:

Tabel Kronologis Perubahan Komposisi Direksi
Table of Chronological Changes in the Composition of the Board of Directors

Komposisi Direksi Periode 1 Januari 2025 - 25 Juni 2025 Composition of the Board of Directors for January 1 – June 25, 2025		Komposisi Direksi Periode 26 Juni 2025 - saat ini Composition of the Board of Directors for June 26, 2025 - present	
Nama Name	**Jabatan** Position	**Nama** Name	**Jabatan** Position
Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director	Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director
Dwi Hartono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko merangkap sebagai PLT Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Finance and Risk Management concurrently serving as Act. Director of Business Development and Commerce	M. Irwansyah Putra	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations
Komang Parmita	Direktur Operasi Pembangkit Gas merangkap sebagai PLT Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Gas Power Plant Operations concurrently serving as Act. Director of Human Capital Management and Administration	Komang Parmita	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations
Rachmanoe Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations	Teguh Widhi Harsono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management
		Dwi Hartono	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce
		TB Ari Wibawa Mukti	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Beserta Alasan Perubahannya Setelah Tahun Buku Berakhir

Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Reasons for Changes after the Financial Year Ended

Setelah periode Laporan Tahunan ini berakhir hingga disahkannya laporan ini, tidak terdapat pergantian dan perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan.

After the Annual Report period ends until this report is ratified, there have been no adjustments or changes to the composition of the Company's Board of Commissioners.

Perubahan Komposisi Direksi Beserta Alasan Perubahannya Setelah Tahun Buku Berakhir

Changes in the Composition of the Board of Directors and Reasons for Changes after the Financial Year Ended

Setelah periode Laporan Tahunan ini berakhir hingga disahkannya laporan ini, tidak terdapat pergantian dan perubahan susunan Direksi Perusahaan.

After the Annual Report period ends until this report is ratified, there have been no adjustments or changes to the composition of the Company's Board of Directors.

Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners

Ir. Edi Srimulyanti MM

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commisisoner

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun. Lahir di Kediri, 3 Oktober 1966. Berdomisili di Sidoarjo. Meraih gelar Sarjana Listrik dari Institut Teknologi Sepuluh November, Magister Bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia.

Indonesian citizen, 59 years old. Born in Kediri, on October 3, 1966. Residing in Sidoarjo. She earned a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh November and a Master's degree in Financial Management from Universitas Indonesia.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris Utama sekaligus merangkap sebagai Komisaris Independen melalui Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris).

Periode Jabatan
Periode pertama dan masa jabatan 26 Juni 2025 – saat ini.

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja
- Di PLN NP: -
- Di Perusahaan Lain:
  - Executive Vice President Corporate Transformation & CEO Office PT PLN (Persero) (2019-2022)
  - Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) (2022-2025).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP:
  - Komisaris Independen PT PLN Nusantara Power (2025 - saat ini).
  - Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko PT PLN Nusantara Power (2025 - saat ini).
- Di Perusahaan Lain: Tidak Ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Informasi mengenai Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner through the Shareholders' Resolution of PT PLN Nusantara Power dated June 26, 2025, on Changes in the Company's Management (Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners).

Tenure
First period and term of office of June 26, 2025 - present.

Position History/Work Experience
- In PT PLN NP: -
- In Other Companies:
  - Executive Vice President, Corporate Transformation & CEO Office, PT PLN (Persero) (2019-2022)
  - Director of Retail and Commerce, PT PLN (Persero) (2022-2025).

Concurrent Position
- In PT PLN NP:
  - Independent Commissioner of PT PLN Nusantara Power (2025-present).
  - Chairperson of the Investment and Risk Management Committee of PT PN Nusantara Power (2025-present).
- In Other Companies: None.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but has an affiliation with the Major and Controlling Shareholders.

Statement of Independence, Training, and Share Ownership
Information regarding the Statement of Independence, Training, and Share Ownership is presented separately in the Corporate Governance Chapter of the Board of Commissioners sub-chapter of this Annual Report.

Ade Armando

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berusia 64 tahun. Lahir di Jakarta, 24 September 1961. Berdomisili di Bogor. Meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (1988) dan gelar Master dari Florida State University, College of Social Seciences, Center of Study of Population (1991) serta Doktoral dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (2006). Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Indonesian citizen, 64 years old. Born in Jakarta, on September 24, 1961. Residing in Bogor. He holds a Bachelor's degree in Communication Science (1998) and a Master's degree from Florida State University, College of Social Seciences, Center of Study of Population (1991) and a Ph.D. in Communication Science from Universitas Indonesia. He is a Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris).

Periode Jabatan
Periode pertama dan masa jabatan 2025 – saat ini.

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja
- Di PLN NP: -
- Di Perusahaan Lain:
  - Ketua Program S-1 Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (2001-2003)
  - Ketua Tim Konsultan Program Public Awareness, Badan Pemeriksa Keuangan (2008-2010)
  - Direktur Komunikasi Strategis, Saiful Mujani Research and Consulting (2014-2021).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP:
  - Wakil Ketua Komite Audit PT PLN Nusantara Power (2025 - saat ini).
- Di Perusahaan Lain:
  - Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua (2022 - saat ini)
  - Pemimpin Redaksi Cokro TV (2024 - saat ini).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Informasi mengenai Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as Commissioner through the Shareholders' Resolution of PT PLN Nusantara Power dated June 26, 2025, on Changes in the Company's Management (Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners).

Tenure
First period and term of office of 2025 - present.

Position History/Work Experience
- In PT PLN NP: -
- In Other Companies:
  - Head of the Undergraduate Program, Department of Communication Studies, University of Indonesia (2001-2003)
  - Head of the Consultant Team for the Public Awareness Program, Audit Board (2008-2010)
  - Director of Strategic Communication, Saiful Mujani Research and Consulting (2014-2021)

Concurrent Position
- In PT PLN NP:
  - Vice Chairman of Audit Committee of PT PLN Nusantara Power (2025-present).
- In Other Companies:
  - Chairperson of the Indonesian Movement for All (2022-present)
  - Editor-in-Chief of Cokro TV (2024-present)

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the Major and Controlling Shareholders.

Statement of Independence, Training, and Share Ownership
Information regarding the Statement of Independence, Training, and Share Ownership is presented separately in the Corporate Governance Chapter of the Board of Commissioners sub-chapter of this Annual Report.

Suharyono SIK., S.H., M.H.

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun. Lahir di Temanggung, 2 Desember 1966. Berdomisili di Bandung. Merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian tahun 1992 dan Magister Hukum dari Universitas Eka Sakti tahun 2024. Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Indonesian citizen, 59 years old. Born in Temanggung, on December 2, 1966. Residing in Bandung. He graduated from the Police Academy in 1992 and holds a Master's degree in Law from Universitas Eka Sakti in 2024. He is a Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris).

Periode Jabatan
Periode pertama dan masa jabatan 2025 – saat ini.

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja
- Di PLN NP: -
- Di Perusahaan Lain:
  - Anggota POLRI (1992)
  - Direktur Monitoring pada Badan Intelijen Negara (2016-2020)
  - Penyidik Utama OJK (2020-2022)
  - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (2022-2024).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP:
  - Ketua Komite Audit PT PLN Nusantara Power (2025 - saat ini).

- Di Perusahaan Lain: Tidak Ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Informasi mengenai Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as Commissioner through the Shareholders' Resolution of PT PLN Nusantara Power dated June 26, 2025, on Changes in the Company's Management (Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners).

Tenure
First period and term of office of 2025 - present.

Position History/Work Experience
- In PT PLN NP: -
- In Other Companies:
  - Member of the Indonesian National Police (1992)
  - Director of Monitoring at the State Intelligence Agency (2016-2020)
  - Chief Investigator at the Financial Services Authority (2020-2022)
  - Chief of the West Sumatera Regional Police (2022-2024).

Concurrent Position
- In PT PLN NP:
  - Chairman of Audit Committee of PT PLN Nusantara Power (2025-present).
- In Other Companies: None.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the Major and Controlling Shareholders.

Statement of Independence, Training, and Share Ownership
Information regarding the Statement of Independence, Training, and Share Ownership is presented separately in the Corporate Governance Chapter of the Board of Commissioners sub-chapter of this Annual Report.

M. Pradana Indraputra

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berusia 33 tahun. Lahir di Jakarta, 25 Juni 1992. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2015) dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (2020). Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Indonesian citizen, 33 years old. Born in Jakarta on June 25, 1992. Residing in Jakarta. Earned a Bachelor's degree from the Faculty of Economics and Business at Universitas Indonesia (2015) and a Master's degree in Planning and Public Policy from Universitas Indonesia (2020). He is a Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris).

Periode Jabatan
Periode pertama dan masa jabatan 2025 – saat ini.

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja
- Di PLN NP: -
- Di Perusahaan Lain:
  - Asisten Staf Khusus Presiden RI Bidang Kepemudaan (2017)
  - Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional pada Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal RI (2020-2024).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP:
  - Wakil Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko PT PLN Nusantara Power (2025 - saat ini).
- Di Perusahaan Lain:
  - Direktur Utama PT Istana Karya Propertindo (2019 - saat ini).
  - Direktur Utama PT Sinergi Istana Propertindo (2023 - saat ini).
  - Staf Khusus Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis pada Kementerian ESDM (2024 - saat ini).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Informasi mengenai Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as Commissioner through the Shareholders' Resolution of PT PLN Nusantara Power dated June 26, 2025, on Changes in the Company's Management (Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners).

Tenure
First period and term of office of 2025 - present.

Position History/Work Experience
- In PT PLN NP: -
- In Other Companies:
  - Assistant to the President's Special Staff for Youth Affairs (2017)
  - Special Staff for National Entrepreneur Development at the Ministry of Investment/Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia (2020-2024).

Concurrent Position
- In PT PLN NP:
  - Vice Chairman of Investment and Risk Management Committee of PT PLN Nusantara Power (2025-present).
- In Other Companies:
  - President Director of PT Istana Karya Propertindo (2019–present).
  - President Director of PT Sinergi Istana Propertindo (2023–present).
  - Special Advisor of the Acceleration of Strategic Issue Resolution Division at the Ministry of Energy and Mineral Resources (2024–present).

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but has an affiliation with the Major and Controlling Shareholders.

Statement of Independence, Training, and Share Ownership
Information regarding the Statement of Independence, Training, and Share Ownership is presented separately in the Corporate Governance Chapter of the Board of Commissioners sub-chapter of this Annual Report.

Adam Muhammad ST., M.Si

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Lahir di Makassar, 2 Februari 1986. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Hasanuddin (2010) dan Pascasarjana pada Ilmu Administrasi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (2017). Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Indonesian citizen, 40 years old. Born in Makassar on February 2, 1986. Residing in Jakarta. Earned a Bachelor's degree in Civil Engineering from Universitas Hasanuddin (2010) and a Master's degree in Administration Science from Universitas Prof. Dr. Moestopo (2017). He is a Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris).

Periode Jabatan
Periode pertama dan masa jabatan 2025 – saat ini.

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja
- Di PLN NP: -
- Di Perusahaan Lain:
  - Tenaga Ahli Anggota DPR RI (2014-2019)
  - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil II Sulsel (2019-2024).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP:
  - Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN Nusantara Power (2025 - saat ini).
- Di Perusahaan Lain:
  - Staf Khusus Kementerian Hukum RI (2024 - saat ini)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Informasi mengenai Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as Commissioner through the Shareholders' Resolution of PT PLN Nusantara Power dated June 26, 2025, on Changes in the Company's Management (Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners).

Tenure
First period and term of office of 2025 - present.

Position History/Work Experience
- In PT PLN NP: -
- In Other Companies:
  - Expert Staff to a Member of the Indonesian House of Representatives (2014-2019)
  - Member of the South Sulawesi Provincial DPRD, Electoral District II, South Sulawesi (2019-2024).

Concurrent Position
- In PT PLN NP:
  - Vice Chairman of Nomination and Remuneration Committee of PT PLN Nusantara Power (2025-present).
- In Other Companies:
  - Special Advisor to the Indonesian Ministry of Law (2024-present).

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the Major and Controlling Shareholders.

Statement of Independence, Training, and Share Ownership
Information regarding the Statement of Independence, Training, and Share Ownership is presented separately in the Corporate Governance Chapter of the Board of Commissioners sub-chapter of this Annual Report.

Dr. KH. Romo H.R. Muhammad Syafi'i SH., M.Hum

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berusia 66 tahun. Lahir di Medan, 21 Oktober 1959. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara (1979) dan gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara (2006). Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Indonesian citizen, 66 years old. Born in Medan on October 21, 1959. Residing in Jakarta. Earned a Bachelor's degree in Law from Universitas Sumatera Utara (1979) and a Master's degree in Law from Universitas Sumatera Utara (2006). He is a Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris).

Periode Jabatan
Periode pertama dan masa jabatan 2025 – saat ini.

Riwayat Jabatan/Pengalaman Kerja
- Di PLN NP: -
- Di Perusahaan Lain:
  - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (2004-2009)
  - Anggota DPR RI (2014-2024).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP:
  - Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN Nusantara Power (2025 - saat ini).
- Di Perusahaan Lain:
  - Wakil Menteri Agama RI (2024 - saat ini).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham
Informasi mengenai Pernyataan Independensi, Pelatihan dan Kepemilikan Saham disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as Commissioner through the Shareholders' Resolution of PT PLN Nusantara Power dated June 26, 2025, on Changes in the Company's Management (Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners).

Tenure
First period and term of office of 2025 - present.

Position History/Work Experience
- In PT PLN NP: -
- In Other Companies:
  - Member of the North Sumatra Provincial DPRD (2004-2009)
  - Member of the Indonesian House of Representatives (2014-2024).

Concurrent Position
- In PT PLN NP:
  - Chairman of Nomination and Remuneration Committee of PT PLN Nusantara Power (2025-present).
- In Other Companies:
  - Deputy Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (2024-present).

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the Major and Controlling Shareholders.

Statement of Independence, Training, and Share Ownership
Information regarding the Statement of Independence, Training, and Share Ownership is presented separately in the Corporate Governance Chapter of the Board of Commissioners sub-chapter of this Annual Report.

Profil Direksi
Profile of the Board of Directors

Ruly Firmansyah

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia, berusia 61 tahun. Lahir di Jakarta, 13 Maret 1964. Berdomisili di Tangerang. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia (1990) dan Master of Business Management dari Institut Teknologi Bandung (2002). Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Indonesian citizen, 61 years old. Born in Jakarta, on March 13, 1964. Residing in Tangerang. He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Universitas Indonesia (1990) and a Master's degree in Business Management from Institut Teknologi Bandung (2002). He is a Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi
Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Pembangkitan Jawa-Bali tanggal 21 September 2022 tentang Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Nama dan Logo Perseroan.

Periode Jabatan
2022 – saat ini.

Riwayat Jabatan
- Di PLN NP
  - General Manager Unit Pembangkitan Muara Tawar (2010 - 2011)
  - Kepala Satuan Pengadaan PT PJB (2011)
- Di Perusahaan Lain:
  - General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2012 - 2015)
  - Executive Vice President Pengembangan Regional Kalimantan PT PLN (Persero) (2018 - 2019)
  - Direktur Utama pada PT Bahtera Adhiguna (2019 - 2022).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Tidak ada.
- Di Perusahaan Lain: Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Pernyataan Independensi dan Kepemilikan Saham
Informasi mengenai Pernyataan Independensi dan Kepemilikan Saham disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors
Appointed as President Director based on the the Shareholders' Resolution of PT Pembangkitan Jawa-Bali dated September 21, 2022, on Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as Company's Name and Logo.

Tenure
2022 – present.

Position History
- In PT PLN NP:
  - General Manager of the Muara Tawar Generation Unit (2010-2011)
  - Head of the Procurement Unit at PT PJB (2011).
- In Other Companies:
  - General Manager of the Southern Sumatera Generation Unit at PT PLN (Persero) (2012-2015)
  - Executive Vice President of Kalimantan Regional Development at PT PLN (Persero) (2018-2019)
  - President Director at PT Bahtera Adhiguna (2019-2022).

Concurrent Position
- In PT PLN NP: None.
- In Other Companies: None.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Major and Controlling Shareholders.

Statement of Independence and Share Ownership
Information regarding the Statement of Independence and Share Ownership is presented separately in the Corporate Governance Chapter of the Board of Directors sub-chapter of this Annual Report.

Dwi Hartono

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun. Lahir di Wonogiri, 13 November 1975. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Gadjah Mada (1999) dan Master di Bidang Kelistrikan di Delft University of Technology, Netherlands (2011). Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO).

Indonesian citizen, 50 years old. Born in Wonogiri on November 13, 1975. Residing in Jakarta. Earned a Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Universitas Gadjah Mada (1999) and a Master's degree in Electrical Engineering from Delft University of Technology, Netherlands (2011). He is a Certified Chief Risk Officer (QCRO).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi
- Diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Pembangkitan Jawa-Bali tanggal 21 September 2022 tentang Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Nama dan Logo Perseroan
- Selanjutnya dilakukan perubahan Nomenklatur jabatan Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 1 Juli 2024 tentang Perubahan Nomenklatur Direksi
- Berikutnya, ditetapkan sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris)

Periode Jabatan
2022 – saat ini.

Riwayat Jabatan
- Di PLN NP:
  - Direktur Operasi PT PJB Investasi pada tahun (2017 - 2021)
  - Kepala Satuan Pengadaan PT PJB (2011)
- Di Perusahaan Lain:
  - Teknisi Utama Mesin di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (2003)
  - EVP Manajemen Keuangan Aset PT PLN (Persero) (2021 – 2022)
  - Deputi Manajer Perencanaan IPP PT PLN (Persero) (2015 - 2017)

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Tidak ada.
- Di Perusahaan Lain: Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Pernyataan Independensi dan Kepemilikan Saham
Informasi mengenai Pernyataan Independensi dan Kepemilikan Saham disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors
- Appointed as Director of Finance based on the the Shareholders' Resolution of PT Pembangkitan Jawa-Bali dated September 21, 2022, on Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as Company's Name and Logo.
- Subsequently, the title of Director of Finance was changed to Director of Finance and Risk Management pursuant to the Shareholders' Resolution of PT PLN Nusantara Power dated July 1, 2024, on Changes in the Titles of the Board of Directors
- Appointed as Director of Business Development and Commerce based on the Shareholders' Resolution of PT PLN Nusantara Power dated June 26, 2025, on Changes in the Company's Management (Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners).

Tenure
2022 – present.

Position History
- In PT PLN NP:
  - Director of Operations at PT PJB Investasi (2017-2021)
  - Head of Procurement Unit at PT PJB (2011).
- In Other Companies:
  - Principal Mechanical Technician at PT PLN (Persero) for the South and Central Kalimantan Regions (2003)
  - EVP of Asset Financial Management at PT PLN (Persero) (2021-2022)
  - Deputy Manager of Planning for the IPP at PT PLN (Persero) (2015-2017)

Concurrent Position
- In PT PLN NP: None.
- In Other Companies: None.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Major and Controlling Shareholders.

Statement of Independence and Share Ownership
Information regarding the Statement of Independence and Share Ownership is presented separately in the Corporate Governance Chapter of the Board of Directors sub-chapter of this Annual Report.

Komang Parmita

Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Gas Power Plant Operations

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun. Lahir di Singaraja, 23 Mei 1970. Berdomisili di Tangerang. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya (1993) dan gelar Pascasarjana bidang Teknik Lainnya dari Curtin University of Technology (2008). Beliau memiliki sertifikasi *Certified Risk Governance Professional* (CRGP).

Indonesian citizen, 55 years old. Born in Singaraja on May 23, 1970. Residing in Tangerang. Earned a Bachelor's degree in Engineering from Universitas Brawijaya (1993) and a Postgraduate degree in Other Engineering from Curtin University of Technology (2008). He is a Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi
Diangkat sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pergantian Direksi.

Periode Jabatan
2023 – saat ini.

Riwayat Jabatan
- Di PLN NP:
  - Manajer Produksi PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali (2014-2016)
  - Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali (2021-2022),
- Di Perusahaan Lain:
  - Manajer UPK PLTU Lampung (2011)
  - Manajer Senior Pengelolaan Pembangkit Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) (2016-2018)
  - General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B (2018-2019)
  - Executive Vice President Health, Safety, Security & Environment PT PLN (Persero) (2019 - 2023).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Tidak ada.
- Di Perusahaan Lain: Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Pernyataan Independensi dan Kepemilikan Saham
Informasi mengenai Pernyataan Independensi dan Kepemilikan Saham disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors
Appointed as Director of Gas Power Plant Operations based on the Shareholders' dated August 3, 2023, on Changes in the Board of Directors.

Tenure
2023 – present.

Position History
- In PT PLN NP:
  - Production Manager at PT PLN (Persero) Java-Bali Generation Unit (2014-2016)
  - Commissioner at PT Pembangkitan Jawa Bali (2021-2022)
- In Other Companies:
  - Manager of the Lampung Steam Power Plant (2011)
  - Senior Manager of the Central Java Regional Power Plant Management at PT PLN (Persero) (2016-2018)
  - General Manager of the Tanjung Jati B Main Power Plant Unit at PT PLN (Persero) (2018-2019)
  - Executive Vice President of Health, Safety, Security & Environment at PT PLN (Persero) (2019-2023).

Concurrent Position
- In PT PLN NP: None.
- In Other Companies: None.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Major and Controlling Shareholders.

Statement of Independence and Share Ownership
Information regarding the Statement of Independence and Share Ownership is presented separately in the Corporate Governance Chapter of the Board of Directors sub-chapter of this Annual Report.

M. Irwansyah Putra

Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Director of Coal Power Plant Operations

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun. Lahir di Binjai, 1 November 1969. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Syiah Kuala (1994). Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Indonesian citizen, 56 years old. Born in Binjai, on November 1, 1969. Residing in Jakarta. Earned a Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Universitas Syiah Kuala (1994). He is a Certified Risk Governance Professional (QRGP).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi
Diangkat sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris).

Periode Jabatan
Periode pertama dan masa jabatan 2025 – saat ini.

Riwayat Jabatan
- Di PLN NP: -
- Di Perusahaan Lain:
  - General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Lampung (2017)
  - General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (2017-2019)
  - General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (2019-2021)
  - General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (2021 - 2022)
  - Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Batam (2022 - 2025)
  - Executive Vice President HSSE PT PLN (Persero) (2025)

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Tidak ada.
- Di Perusahaan Lain: Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Pernyataan Independensi dan Kepemilikan Saham
Informasi mengenai Pernyataan Independensi dan Kepemilikan Saham disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors
Appointed as Director of Coal Power Plant Operations based on the Shareholders' Resolution of PT PLN Nusantara Power dated June 26, 2025, on Changes in the Company's Management (Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners).

Tenure
First period and term of office of 2025-present.

Position History
- In PT PLN NP: -
- In Other Companies:
  - General Manager of PT PLN (Persero) Lampung Distribution (2017)
  - General Manager of PT PLN (Persero) Riau and Riau Islands Region (2017-2019)
  - General Manager of PT PLN (Persero) North Sumatera Regional Unit (2019-2021)
  - General Manager of PT PLN (Persero) Central Java and Special Region of Yogyakarta Distribution Unit Yogyakarta (2021 - 2022)
  - President Director of PT Pelayanan Listrik Batam (2022 - 2025)
  - Executive Vice President of HSSE at PT PLN (Persero) (2025)

Concurrent Position
- In PT PLN NP: None.
- In Other Companies: None.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Major and Controlling Shareholders.

Statement of Independence and Share Ownership
Information regarding the Statement of Independence and Share Ownership is presented separately in the Corporate Governance Chapter of the Board of Directors sub-chapter of this Annual Report.

Teguh Widhi Harsono

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun. Lahir di Belitang, 4 Desember 1980. Berdomisili di Tangerang. Meraih gelar Sarjana Manajemen Keuangan dari Universitas Negeri Bengkulu (2005) serta Magister pada Bidang Manajemen Lainnya dari Curtin University (2010). Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Indonesian citizen, 45 years old. Born in Belitang, on December 4, 1980. Residing in Tangerang. Earned a Bachelor's degree in Financial Management from Universitas Negeri Bengkulu (2005) and a Master's degree in Other Management Businesses from Curtin University (2010). He is a Certified Risk Governance Professional (QRGP).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi
Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris).

Periode Jabatan
Periode pertama dan masa jabatan 2025 – saat ini.

Riwayat Jabatan
- Di PLN NP: -
- Di Perusahaan Lain:
  - Executive Vice President (EVP) Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2021-2022)
  - Direktur Keuangan PT Indonesia Comnets Plus (2022-2025).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Tidak ada.
- Di Perusahaan Lain: Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Pernyataan Independensi dan Kepemilikan Saham
Informasi mengenai Pernyataan Independensi dan Kepemilikan Saham disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors
Appointed as Director of Finance and Risk Management based on the Shareholders' Resolution of PT PLN Nusantara Power dated June 26, 2025, on Changes in the Company's Management (Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners).

Tenure
First period and term of office of 2025-present.

Position History
- In PT PLN NP: -
- In Other Companies:
  - Executive Vice President (EVP) of Finance at PT PLN (Persero) Head Office (2021-2022)
  - Finance Director at PT Indonesia Comnets Plus (2022-2025).

Concurrent Position
- In PT PLN NP: None.
- In Other Companies: None.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Major and Controlling Shareholders.

Statement of Independence and Share Ownership
Information regarding the Statement of Independence and Share Ownership is presented separately in the Corporate Governance Chapter of the Board of Directors sub-chapter of this Annual Report.

TB Ari Wibawa Mukti

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

Warga Negara Indonesia, berusia 35 tahun. Lahir di Jakarta, 12 Juli 1990. Berdomisili di Tengerang. Meraih gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (2012), Master of Public Policy Administrations dari University of Bristol (2017). Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Indonesian citizen, 35 years old. Born in Jakarta, on July 12, 1990. Residing in Tangerang. Earned a Bachelor's degree in International Relations from Universitas Indonesia (2012) and a Master's degree in Public Policy Administration from University of Bristol (2017). He is a Certified Risk Governance Professional (QRGP).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi
Diangkat sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris).

Periode Jabatan
Periode pertama dan masa jabatan 2025 – saat ini.

Riwayat Jabatan
- Di PLN NP: -
- Di Perusahaan Lain:
  - TotalEnergies (2012-2013)
  - PT ASDP Indonesia Ferry hingga tahun 2025.

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Tidak ada.
- Di Perusahaan Lain:
  - Head of KOMTAP of Recreational pada KADIN Indonesia
  - Chairman pada PPJI Banten
  - Vice Chairman pada KNPI Banten

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Pernyataan Independensi dan Kepemilikan Saham
Informasi mengenai Pernyataan Independensi dan Kepemilikan Saham disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors
Appointed as Director of Human Capital Management and Administration based on the Shareholders' Resolution of PT PLN Nusantara Power dated June 26, 2025, on Changes in the Company's Management (Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners).

Tenure
First period and term of office of 2025-present.

Position History
- In PT PLN NP: -
- In Other Companies:
  - TotalEnergies (2012-2013).
  - PT ASDP Indonesia Ferry until 2025.

Concurrent Position
- In PT PLN NP: None.
- In Other Companies:
  - Head of KOMTAP of Recreational in KADIN Indonesia
  - Chairman in PPJI Banten
  - Vice Chairman in KNPI Banten

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Major and Controlling Shareholders.

Statement of Independence and Share Ownership
Information regarding the Statement of Independence and Share Ownership is presented separately in the Corporate Governance Chapter of the Board of Directors sub-chapter of this Annual Report.

Jumlah dan Komposisi SDM
HR Number and Composition

Perusahaan terus mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan adaptif guna mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan.

The Company continues to develop outstanding and adaptable human resources to support the achievement of its sustainability goals.

Jumlah Karyawan PLN NP per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 4.954 karyawan, jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebanyak 5.077 karyawan. Penurunan jumlah tersebut terutama disebabkan oleh adanya pegawai yang memasuki masa pensiun serta adanya pegawai yang kembali ke instansi asal setelah menyelesaikan masa penugasan kerjanya. Karyawan aktif PLN NP didominasi oleh Karyawan yang berada pada usia 31 sampai dengan 35 tahun dengan jumlah sebanyak 1881 orang atau sebesar 38% dan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 2493 orang atau sebesar 50% dari jumlah Karyawan. Sedangkan secara jenjang jabatan, karyawan PLN Nusantara Power paling banyak berada pada jenjang *Generalist* 2 dengan jumlah 2295 orang atau 46,3% dari jumlah populasi.

The number of PLN NP employees as of December 31, 2025, was 4,954, which is lower than the 2024 figure of 5,077 employees. The decrease in the number is mainly due to employees entering retirement and employees returning to their original institutions after completing their work assignments. Active employees of PLN NP are predominantly those aged 31 to 35 years, totaling 1,881 people or 38%, and those with a bachelor's degree, totaling 2,493 people or 50% of the total employees. In terms of position levels, most employees of PLN Nusantara Power are at the Generalist 2 level, with 2,295 people or 46.3% of the total population.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023-2025 (orang)
Number of Employees by Gender in 2023-2025 (person)

Jenis Kelamin Gender	2023	2024	2025	Perubahan 2024-2025 Changes in 2024-2025
Laki-laki Male	4.412	4.474	**4.360**	-114
Perempuan Female	573	603	**594**	-9
Jumlah Total	**4.985**	**5.077**	**4.954**	**-123**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2023-2025 (orang)
Number of Employees by Position Level in 2023-2025 (person)

Jenjang Jabatan Position Level	2023	2024	2025	Perubahan 2024-2025 Changes in 2024-2025
Senior Specialist	48	49	**41**	-8
Specialist	139	191	**179**	-12
Kepakaran Expertise	7	7	**7**	0
Generalist 3	761	798	**772**	-26
Generalist 2	2.027	2.358	**2.295**	-63
Generalist 1	790	487	**477**	-10
Manajemen Atas Upper Management	7	7	**7**	0
Manajemen Menengah Middle Management	55	55	**55**	0
Manajemen Dasar Basic Management	187	178	**181**	3
Generalist 3 Struktural Structural Generalist 3	490	444	**444**	0
Generalist 2 Struktural Structural Generalist 2	474	503	**496**	-7
Jumlah Total	**4.985**	**5.077**	**4.954**	**-123**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023-2025 (orang)
Number of Employees by Education Level in 2023-2025 (person)

Tingkat Pendidikan Education Level	2023	2024	2025	Perubahan 2024-2025 Changes in 2024-2025
Strata 3 Doctoral	2	5	**5**	0
Strata 2 Postgraduate	332	346	**412**	66
Strata 1 Undergraduate	2433	2545	**2.493**	-52
Sarjana Muda Fresh Graduated	976	998	**959**	-39
Diploma Diploma	120	114	**112**	-2
SMA Senior High School	1119	1066	**970**	-96
SMP Junior High School	3	3	**3**	0
Jumlah Total	**4.985**	**5.077**	**4.954**	**-123**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023-2025 (orang)
Number of Employees by Employment Status in 2023-2025 (person)

Status Kepegawaian Employment Status	2023	2024	2025	Perubahan 2024-2025 Changes in 2024-2025
Karyawan Tetap Permanent Employees	4.985	5.077	**4.954**	-123
On the Job Training	86	114	**11**	-103
Jumlah Total	**5.071**	**5.191**	**4.965**	**-226**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2023-2025 (orang)
Number of Employees by Age Range in 2023-2025 (person)

Rentang Usia Age Range	2023	2024	2025	Perubahan 2024-2025 Changes in 2024-2025
< 26 tahun years old	109	175	**120**	-55
26 - 30 tahun years old	1.115	871	**617**	-254
31 - 35 tahun years old	1.698	1.889	**1.881**	-8
36 - 40 tahun years old	705	740	**897**	157
41 - 45 tahun years old	409	516	**614**	98
46 - 50 tahun years old	291	189	**179**	-10
51 - 56 tahun years old	658	697	**646**	-51
Jumlah Total	**4.985**	**5.077**	**4.954**	**-123**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2023-2025 (orang)
Number of Employees by Working Area in 2023-2025 (person)

Wilayah Kerja Working Area	2023			2024			2025			Perubahan 2024-2025 Changes in 2024-2025
	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total	
Kantor Pusat Head Office	507	197	704	570	221	791	597	222	819	28
UP GU Gresik	245	30	275	225	27	252	207	28	235	-17
UP GU Muara Karang	265	27	292	251	28	279	244	23	267	-12
UP GU Paiton	241	17	258	232	19	251	217	19	236	-15
UP GU Cirata	138	15	153	128	14	142	124	14	138	-4
UP GU Brantas	131	9	140	130	9	139	128	9	137	-2
UP GU Muara Tawar	239	19	258	227	17	244	218	16	234	-10
Unit MRO (UMRO) MRO Unit (UMRO)	509	49	558	517	58	575	512	58	570	-5
UP GU Indramayu	35	-	35	28	-	28	27	0	27	-1
UP GU Rembang	33	2	35	30	2	32	29	2	31	-1
UP GU Pacitan	34	1	35	29	1	30	29	2	31	1
UP GU Tanjung Awar-Awar	34	1	35	31	1	32	29	2	31	-1
UP GU Kaltim Teluk	33	-	33	27	-	27	27	0	27	0
UP GU Tenayan	28	-	28	27	-	27	27	0	27	0
UP GU Pulang Pisau	32	-	32	27	-	27	27	0	27	0
UP GU Arun	5	-	5	31	7	38	33	7	40	2
Unit Pelaksana Proyek 1 (UPP-1) Project Implementation Unit 1 (UPP-1)	16	-	16	19	1	20	16	1	17	-3
Unit Pelaksana Proyek 2 (UPP-2) Project Implementation Unit 2 (UPP-2)	12	-	12	16	-	16	13	0	13	-3

Wilayah Kerja Working Area	2023			2024			2025			Perubahan 2024-2025 Changes in 2024-2025
	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total	
PJB Academy*	35	13	48	-	-	0	0	0	0	0
UP GU Sambelia	5	-	5	5	-	5	5	0	5	0
UP GU Sengkang	5	-	5	5	-	5	5	0	5	0
UP GU Bakaru	71	10	81	77	10	87	70	10	80	-7
UP GU Balikpapan	56	5	61	-	-	0	0	0	0	0
UP GU Bandar Lampung	71	19	90	77	17	94	71	16	87	-7
UP GU Belawan	267	25	292	241	17	258	234	15	249	-9
UP GU Gorontalo	64	5	69	61	4	65	58	4	62	-3
UP GU Kapuas	111	9	120	111	9	120	103	7	110	-10
UP GU Kendari	125	4	129	121	3	124	115	3	118	-6
UP GU Minahasa	98	6	104	96	6	102	89	6	95	-7
UP GU Kalselteng**	26	1	27	34	2	36	33	3	36	0
UP GU Pandan	84	7	91	103	7	110	102	7	109	-1
UP GU Pekanbaru	118	25	143	125	27	152	125	27	152	0
UP GU Tarakan	37	1	38	-	-	0	0	0	0	0
UP GU Bukit Asam	101	9	110	115	9	124	112	9	121	-3
UP GU Nagan Raya	107	6	113	135	7	142	133	7	140	-2
UP GU Punagaya	129	1	130	130	-	130	124	0	124	-6
UP GU Sebalang	116	10	126	120	10	130	112	11	123	-7
UP GU Tarahan	88	14	102	95	16	111	93	16	109	-2
UP GU Kaltimra***			0	85	6	91	82	6	88	-3
Tugas Karya ke PLN (Grup) Work Assignment to PLN (Group)	46	16	62	91	30	121	97	30	127	6
Tugas Karya ke PLN NPS Work Assignment to PLN NPS	25	2	27	25	2	27	19	1	20	-7
Tugas Karya ke AP/PA Lain Work Assignment to Other Subsidiaries/Associates	90	18	108	77	16	93	74	13	87	-6
Jumlah Total	**4.412**	**573**	**4.985**	**4.474**	**603**	**5.077**	**4.360**	**594**	**4.954**	**-123**

** Pada tahun 2023 terjadi reorganisasi penggabungan Unit PJB Academy ke Pusdiklat PLN
** Perubahan nama unit dari UPDK Palangkaraya menjadi UP Kalselteng
*** Pada tahun 2023 terjadi reorganisasi pembentukan UP Kaltimra yang merupakan penggabungan dari UP Balikpapan dan UP Tarakan

* In 2023, there was a reorganization of the merger of the PJB Academy Unit into the PLN Education and Training Center (Pusdiklat)
** Unit name change from Palangkaraya GCEU to Kalselteng GU
*** In 2023, there was a reorganization of the establishment of the Kaltimra GU, which was a merger of Balikpapan GU and Tarakan GU

Pengembangan Kompetensi SDM
Human Resources Competency Development

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dilakukan secara terarah untuk mendukung transformasi Perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

The Company develops human resource competency in a targeted manner to support the Company transformation towards more sustainable business practices.

Pengembangan Kompetensi untuk Karyawan
Competency Development for Employees

Pengembangan Kompetensi SDM merupakan bagian dari Nawa Karsa Direktorat SDM sebagai manifestasi dari komitmen PLN NP dalam mengutamakan pengembangan karyawan dan keberlanjutan organisasi. PLN NP memandang pentingnya penguatan kompetensi sebagai fondasi utama untuk menjamin kelancaran operasional dan peningkatan kinerja unit-unit pembangkit listrik yang telah diintegrasikan. Program Pengembangan Kompetensi *Human Capital* yang diinisiasi oleh PLN NP disusun dengan cermat melalui analisis kebutuhan pelatihan (*Training Need Analysis*/ TNA) yang komprehensif, mengarah pada penyusunan *Competency Based Training* (CBT), *Performance Based Training* (PBT), dan Program Pembelajaran Strategis.

Human Capital Competency Development is part of the Nawa Karsa (9 Purposes) by Directorate of Human Resources as a manifestation of PLN NP's commitment to prioritizing employee development and organizational sustainability. PLN NP views the importance of competency strengthening as the main foundation to ensure smooth operations and improve the performance of integrated power generation units. PLN NP is carefully prepared Human Capital Competency Development Program initiated through a comprehensive training needs analysis (TNA), leading to the preparation of Competency Based Training (CBT), Performance Based Training (PBT), and Strategic Learning Programs.

Kesetaraan dan Kesempatan yang Sama dalam Pendidikan dan Pelatihan
Equality and Equal Opportunity in Education and Training

Perusahaan memastikan bahwa karyawan di semua wilayah operasional unit pembangkit yang terintegrasi memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mengembangkan bisnis yang dijalankan. PLN NP mengutamakan prinsip kesetaraan dan kesempatan kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi seluruh karyawan tanpa memandang *gender*, suku, agama dan ras (SARA) maupun level jabatan. Komitmen ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PLN NP dengan Serikat Kerja serta kebijakan *Human Capital Management System*, terutama aspek pendidikan dan pelatihan karyawan. Untuk informasi lebih lengkap terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia secara menyeluruh, dapat dilihat pada Bab Aspek Penting Pendukung Bisnis bagian Sumber Daya Manusia dalam Laporan Tahunan ini.

The Company ensures that employees in all operational areas of its integrated power generation units have the skills and knowledge necessary to operate and develop their businesses. PLN NP prioritizes the principle of equality and equal opportunities in developing the competencies of all employees regardless of gender, ethnicity, religion, and race (SARA) or job level. This commitment is stated in the Collective Labor Agreement between PLN NP and the Work Union as well as the Human Capital Management System policy, especially the aspects of employee education and training. More complete information regarding comprehensive Human Resources management is available in the Important Aspects of Business Support chapter in the Human Resources section of this Annual Report.

Anggaran Pengembangan Kompetensi untuk Karyawan
Competency Development Budget for Employees

Perusahaan telah merealisasikan anggaran untuk pengembangan kompetensi karyawan tahun 2025 sebesar Rp18,5 miliar, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp12,8 miliar. Alasan kenaikan anggaran diklat selama tahun 2025 yaitu:

1. Kebutuhan pelaksanaan sertifikasi yang perlu perpanjangan di tahun 2025 yang pelaksanaannya beberapa dilakukan secara mandiri oleh PLN NP.
2. Kebutuhan pengembangan kompetensi P100 melalui sertifikasi, *job shadowing* ataupun pelatihan yang mendukung sasaran strategis tersebut yang tercantum dalam RUPTL.

The Company realized a budget of Rp18.5 billion for employee competency development in 2025, representing an increase compared to Rp12.8 billion in 2024. The increase in the training and development budget during 2025 was attributable to the following factors:

1. The need for certification renewal in 2025, some of which independently undertaken by PLN NP.
2. The need to develop P100 competencies through certification, job shadowing, or training that supports the strategic objectives stated in the RUPTL.

Realisasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)
Employee Education and Training Budget Realization for 2023-2025 (Rp billion)

Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan 2025
Employee Competency Development Plan and Realization for 2025

Pasca *merging* ke Pusdiklat PLN, PJB Academy bertransformasi menjadi UPDL Surabaya, Bidang *Human Capital Development* (BID HTD) berkoordinasi dengan Pusdiklat dan UPDL Surabaya untuk pelaksanaan program pengembangan karyawan. PLN NP telah menyusun rencana berbagai program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Program-program tersebut disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas karyawan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktifitas Perusahaan. Berikut pencapaian rencana program training, seminar & *workshop*, serta sertifikasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025:

After merging with PLN Training Center, PJB Academy transformed into UPDL Surabaya, the Human Capital Development Division (BID HTD) coordinates with the Training Center and UPDL Surabaya for the employee development programs. PLN NP prepared plans for various employee training and development programs to be organized in 2024. The Company designed these programs with the purposes at improving the quality and capabilities of employees so that the ultimately, it would able to increase the Company's productivity. The following are the achievements of the planned training programs, seminars & workshops, and certifications organized throughout 2025:

Tabel Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2025
Employee Competency Development Plan Table for 2025

Jenis Pengembangan Kompetensi Types of Competency Development	Jumlah Judul Number of Titles		Jumlah Peserta Number of Participants	
	Target	Realisasi Realization	Target	Realisasi Realization
Pelatihan Teknik Technical Training	375	168	235	12.907
Pelatihan Non Teknik Non-Technical Training		337		9.039
Sertifikasi Certification		29		1.626
Diklat Purnabakti Retirement Training		13		236
Jumlah Total	**375**	**547**	**235**	**23.808**

Diklat Penjenjangan

Seluruh karyawan harus mengikuti Diklat Penjenjangan yang bersifat *mandatory* sebagai persyaratan kenaikan level atau penyetaraan level kompetensi dengan tanggung jawab pekerjaan. Hal tersebut berlaku bagi seluruh Anak Perusahaan yang telah meratifikasi sistem pembinaan karir dan kompetensi PT PLN (Persero) yaitu *Leadership Development Program* (LDP) merupakan diklat bagi karyawan yang diproyeksikan menduduki jabatan struktural dengan persyaratan kebutuhan kompetensi jabatan di atas level kompetensinya, terdiri dari level LDP-IV untuk Level Supervisor Atas, LDP-III untuk Level Manajemen Dasar, LDP-II untuk Level Manajemen Menengah dan LDP-I untuk Level Manajemen Atas.

Realisasi Diklat Penjenjangan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Grading Training

All employees is required to attend Mandatory Leveling Training as a requirement for level upgrade or equalization of competency level with job responsibilities. This applies to all Subsidiaries that have ratified the career and competency development system of PT PLN (Persero), namely the Leadership Development Program (LDP) which is a training for employees who are projected to occupy structural positions with job competency requirements above their competency level, consisting of level LDP-IV for Upper Supervisor Level, LDP-III for Basic Management Level, LDP-II for Middle Management Level and LDP-I for Upper Management Level.

The Company realized the following Grading Training throughout 2025:

Tabel Diklat Penjenjangan Tahun 2025
2025 Grading Training Table

Jenis Diklat Penjenjangan Types of Upgrading Training	Jumlah Peserta Total Participants	Dalam Proses In the Training Process	Lulus Passed the Training
LDP - I	4	4	-
LDP - II	8	4	4
LDP - III	58	40	18
LDP - IV	106	72	34

Program Pendidikan Formal

Sebagai *Subholding* PLN, Karyawan PLN NP dapat mengikuti Pengembangan kompetensi PLN (PLN Persero) yang salah satunya dalah Porgram Pendidikan Formal. PLN (Persero) membuka kesempatan bagi seluruh Karyawan Grup PLN yang memiliki keminatan dan keinginan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal khususnya pada jenjang Magister maupun Doktoral melalui program pendidikan formal PLN dan Luar PLN, baik dalam Negeri melalui skema Program Belajar Jarak Jauh (PBJJ) maupun Luar Negeri melalui skema Program Tugas Belajar (PTB). Pada tahun 2025, terdapat 138 karyawan PLN NP yang telah ditetapkan sebagai Peserta Program Pendidikan Formal Grup PLN di beberapa Lembaga Pendidikan antara lain:

Formal Education Program

As a PLN Subholding, PLN NP Employees can participate in PLN (PLN Persero) competency development, including Formal Education Program. PLN (Persero) opens opportunities for all PLN Group Employees who have an interest and desire to develop competencies through formal education, especially at the Masters and Doctoral levels through formal education programs at PLN and outside PLN, both domestically through the Distance Learning Program (PBJJ) scheme and abroad through the Study Assignment Program (PTB) scheme. In 2025, there were 138 PLN NP employees appointed as Participants in the PLN Group Formal Education Program at several Educational Institutions, including:

Tabel Program Pendidikan Formal Grup PLN Tahun 2025

Table of PLN Group Formal Education Program for 2025

No	Lembaga Pendidikan Educational Institution	Jurusan Major	Jumlah Karyawan Number of Employees
1	IT PLN	Magister Teknik Elektro Master of Electrical Engineering	9
2	ITB	Digital - Sains Data dan Intelegensi Buatan Digital - Data Science and Artificial Intelligence	1
3	ITB	Magister Logistik Master of Logistics	1
4	ITB	Magister Teknik *Geotermal* - Eksploitasi *Geotermal* Master of Geothermal Engineering - Geothermal Exploitation	4
5	ITB	Magister Teknik *Geotermal* - Rekayasa Utilisasi *Geotermal* Master of Geothermal Engineering - Geothermal Utilization Engineering	7
6	ITB	Magister Teknik Kimia - Biomassa Untuk Energi Master of Chemical Engineering - Biomass For Energy	1
7	ITB	Magister Teknik Kimia - Teknologi Hidrogen dan *Fuel Cell* Master of Chemical Engineering - Hydrogen and Fuel Cell Technology	2
8	ITB	Magister Teknik Mesin - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pembangkitan Daya Master of Mechanical Engineering - Operation and Maintenance of Power Generation Systems	5
9	ITB	Magister Teknik Mesin - Rekayasa Energi Berkelanjutan Master of Mechanical Engineering - Sustainable Energy Engineering	10
10	ITB	*Value Creation* - Pemanfaat Energi Listrik dan Bisnis *Beyond* KWH Value Creation - Utilization of Electrical Energy and Business Beyond KWH	1
11	ITS	Magister Teknik Elektro - EBT Master of Electrical Engineering - NRE	3
12	ITS	Magister Teknik Elektro - *Interconnection* Master of Electrical Engineering - Interconnection	1
13	ITS	Magister Teknik Industri - *Asset Management and Valuation* Master of Industrial Engineering - Asset Management and Valuation	2
14	ITS	Magister Teknik Industri - Konsentrasi Aset *Management and Valuation* Master of Industrial Engineering - Asset Management and Valuation Concentration	2
15	ITS	Magister Teknik Industri - Rekayasa Sistem dan Industri Bidang *Inventory, Operation & Maintenance Management* Master of Industrial Engineering - Systems and Industrial Engineering in Inventory, Operation & Maintenance Management	7
16	ITS	Magister Teknik Industri - Rekayasa Sistem dan Industri Bidang Logistik Master of Industrial Engineering - Systems and Industrial Engineering in Logistics	1
17	ITS	Magister Teknik Industri - Rekayasa Sistem dan Industri Bidang *Operation* & SCM Master of Industrial Engineering - Systems and Industrial Engineering, Operation & SCM	3
18	ITS	Magister Teknik Industri - Rekayasa Sistem dan Industri Bidang Logistik Master of Industrial Engineering - Systems and Industrial Engineering in Logistics	2
19	ITS	Magister Teknik Lingkungan - Bidang Keahlian Perubahan Iklim dan Perdagangan Karbon Master of Environmental Engineering - Expertise Field Climate Change and Carbon Trading	2
20	ITS	Magister Teknik Mesin - Bidang Keahlian Rekayasa Energi Terbarukan dan Berkelanjutan Master of Mechanical Engineering - Renewable and Sustainable Energy Engineering Expertise	3
21	ITS	Magister Teknik Mesin - *Energy Conversion Engineering* Master of Mechanical Engineering - Energy Conversion Engineering	5
22	ITS	Magister Teknik Mesin - *Mechanical System Design* Master of Mechanical Engineering - Mechanical System Design	8
23	ITS	Magister Teknik Mesin - *Mechanical System Design (Smart Power Plant)* Master of Mechanical Engineering - Mechanical System Design (Smart Power Plant)	4
24	ITS	Magister Teknik Mesin - Rekayasa Energi Terbarukan dan Berkelanjutan (*Renewable Energy Engineering*) Master of Mechanical Engineering - Renewable and Sustainable Energy Engineering	2

No	Lembaga Pendidikan Educational Institution	Jurusan Major	Jumlah Karyawan Number of Employees
25	ITS	Magister Teknik Mesin - Rekayasa Energi Terbarukan dan Berkelanjutan (*Renewable Energy Engineering*) Master of Mechanical Engineering - Renewable Energy Engineering	2
26	UGM	Magister Teknik Elektro - *Operation and Maintenance* Master of Electrical Engineering - Operation and Maintenance	1
27	UGM	Magister Teknik Fisika - *Renewable Energy* Master of Engineering Physics - Renewable Energy	2
28	UGM	Magister Teknik Mesin - *Operation and Maintenance* Master of Mechanical Engineering - Operation and Maintenance	6
29	UGM	Magister Teknik Mesin - *Operation and Maintenance* Pemeliharaan Master of Mechanical Engineering - Operation and Maintenance	7
30	UGM	Magister Teknik Sipil - Manajemen Proyek Konstruksi Master of Civil Engineering - Construction Project Management	2
31	UGM	Magister Teknologi Informasi -IT Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran *Machine* Master of Information Technology - Artificial Intelligence and Machine Learning	1
32	UGM	Magister Teknologi Informasi - IT untuk Proses Bisnis Master of Information Technology - IT for Business Processes	2
33	UI	Magister K3 Master of OHS	1
34	UI	Magister Teknik Sistem Energi Master of Energy Systems Engineering	1
36	UNAIR	Magister Ilmu Ekonomi Master of Economics	4
37	UNAIR	Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia Master of Human Resource Development	3
38	Australian National University	Master of Environment (Advanced)	1
39	Delft University of Technology	PhD of Climate Change	1
40	KTH Royal Institute of Technology	MSc Electrical Power Engineering	1
41	KTH Royal Institute of Technology	MSc Sustainable Energy Engineering	2
42	Monash University Indonesia	Master of Data Science	1
43	Northeastern University China	International MBA	2
44	The University of Auckland (QSW:65)	Master of Energy	2
45	The University of Auckland (QSW:65)	Master of Engineering Project	1
46	The University of Melbourne (QS:13)	Master of Energy System	1
47	The University of New South Wales (UNSW) Sydney	Master of Engineering Science	1
48	The University of Queensland (QS:40)	Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)	1
49	The University of Queensland (QS:40)	Master of Sustainable Energy (Management)	1
50	The University of Southampton	Doctor of Philosophy PhD of Engineering and the Environment	1
51	The University of Western Australia (QSW:75)	Master of Renewable and Future Energy	1
52	UNITEN	Master in Data Science	1
53	UNITEN	Master of Engineering Management	1
54	University of Michigan	Master of Science Environtment And Sustainability	1
			138

Program Magang

Perusahaan juga mengadakan Program Magang yang dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu (1) sebagai *reward* bagi peserta *scholarship* agar dapat mengembangkan diri sesuai tujuan PLN NP dalam membentuk SDM unggul dan (2) diinisiasi oleh PLN NP sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Program magang yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah Program *GREEN* merupakan wadah pengkayaan kompetensi karyawan melalui program magang di lingkungan PLN Nusantara Power di bidang konstruksi dan *end-to-end project* PLTS. Telah dilaksanakan tahapan pembelajaran melalui PT PLN (Persero) Pusdiklat meliputi pra konstruksi, PLTS dan *basic sea survival* sebagai rangkaian pra internship program pada M4 Nov - M1 Des 2025 yang terbagi dalam 3 (tiga) *batch*. Jumlah peserta program *GREEN* sebanyak 56 Peserta.

Internship Program

The Company also implements Internship Program in 2 (two) forms, namely (1) as a reward for scholarship participants so that they are able to develop themselves following the PLN NP goals in forming superior human resources and (2) initiated by PLN NP following the Company's needs.

During 2025, the Company carried out the GREEN Program as internship program, a forum for enriching employee competencies through an internship program within the PLN Nusantara Power environment in the field of construction and end-to-end SPP projects. PLN NP carries out those learning stages through PT PLN (Persero) Training Center, including pre-construction, SPP and basic sea survival as a series of pre-internship programs on 4th week of November until 1st week of December 2025 which are divided into 3 (three) batches. The number of GREEN program participants was 56 Participants

Program *Benchmarking*

Program *benchmarking* dilaksanakan dengan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan terkait untuk mendapatkan *experience* secara langsung sehingga dapat diimplementasikan di PLN NP dalam rangka pengembangan dan mendukung kegiatan bisnis yang dijalankan. Pada tahun 2025, Kegiatan *benchmarking* dengan mengunjungi Perusahaan lain diantaranya:

Benchmarking Program

The Company carries out benchmarking program through direct visits to the relevant companies to gain firsthand experience, which can then be implemented at PLN NP to develop and support business activities. By 2025, benchmarking activities involving visits to other companies include the following:

Tabel Program *Benchmarking* PLN NP ke Perusahaan Lain Tahun 2025
Benchmarking Program Table to Other Companies in 2025

No	Nama Perusahaan Company Name	Tema Theme	Jumlah Peserta dari PLN NP Total Participants from PLN NP
7	PT PLN (Persero)	*Benchmarking* dan *Site Visit* Inovasi SuperSUN Benchmarking and Innovation Site Visit SuperSUN	40
8	Chugoku Electric Power	*Benchmarking* teknologi Pemanfaatan FABA Benchmarking teknologi Pemanfaatan FABA	1

Selain itu, PLN NP juga menjadi tujuan *benchmarking* oleh Perusahaan lain. Adapun kunjungan dari Perusahaan lain sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Furthermore, PLN NP has also become a benchmarking destination for other companies. Visits from other companies throughout 2025 are as follows:

Tabel Program *Benchmarking* Perusahaan Lain ke PLN NP Tahun 2025
Table of Benchmarking Programs by Other Companies to PLN NP in 2025

No	Nama Perusahaan Company Name	Tema Theme	Tanggal Pelaksanaan Date
1	PLN Puslitbang PLN Research and Development Center	Proses Bisnis I-CORE I-CORE Business Process	27 Februari 2025 February 27, 2025
2	PLN Batam	Mengenai pengelolaan GCG dan penyusunan buku putih regarding GCG management and preparation of white papers	16 Mei 2025 May 16, 2025
3	PT Pupuk Kaltim	Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) Integrated Management System (IMS)	17 Juli 2025 July 17, 2025

Program Sertifikasi
Certification Program

Program Sertifikasi yang dijalankan Perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kewajiban sertifikasi tenaga kerja di bidang pembangkitan, tetapi juga untuk memperkuat standar kompetensi sumber daya manusia agar mampu menjalankan proses bisnis secara profesional, andal, dan berkelanjutan. Sertifikasi merupakan pengakuan terhadap kompetensi seorang profesional yang telah memenuhi standar profesi pada bidangnya masing-masing. PLN NP kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi yang kridibel untuk melakukan pendampingan dan sertifikasi keinsinyuran bagi karyawan PLN NP agar dapat diakui sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII) serta dapat meningkatkan kinerja Perusahaan.

The Company organizes Certification Program with the purposes not only to fulfill the provisions of laws and regulations regarding the obligation to certify workers in the power generation sector, but also to strengthen the competency standards of human resources so as to be able to carry out business processes in a professional, reliable and sustainable manner. Certification recognizes the competence of professionals who have met professional standards in their respective fields. PLN NP collaborates with credible certification agencies to provide engineering guidance and certification for PLN NP employees so as to be recognized as members of the Indonesian Engineers Association (PII) and improve the Company's performance.

Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Tahun 2023-2025
Table of Implementation of Electrical Engineering Competency Certification for 2023-2025

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Jumlah Karyawan yang Disertifikasi Total Certified Employees		
	2023	2024	2025
Core Competence			
Sertifikasi PMK (Kelas A, B, C & D) PMK Certification (Class A, B, C & D)	329	213	8
Sertifikasi K3 (Listrik, Umum, Kimia, Ketinggian, Ruang Terbatas) OHS Certification (Electricity, General, Chemical, Altitude, Confined Space)	250	219	30
Sertifikasi Operator *Boiler* Boiler Operator Certification	32	23	5
Supporting Competence			
Sertifikasi *Process Safety* Process Safety Certification	-	-	-
Process Safety Certification Management (PSM)	-	-	-
Sertifikasi Manajemen Pelatihan - BNSP Training Management Certification - BNSP	-	-	-
CHRPE	-	-	-
Sertifikasi Auditor SMK3 OHSMS Auditor Certification	30	-	29

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Evaluation of Competency Development Implementation

PLN NP melaksanakan *assessment Human Capital Readiness* (HCR) sebagai salah satu indikator efektivitas program pengembangan kompetensi yang dijalankan. Selain itu, PLN NP senantiasa melakukan evaluasi secara berkesinambungan guna mendapatkan tanggapan, masukan dan penyempurnaan kegiatan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas karyawan. Perusahaan melakukan perbaikan kulitas program pengembangan kompetensi khususnya terkait aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perencanaan & Kebutuhan Pengembangan Kompetensi melalui *Learning Need Analysis* sesuai dengan *gap* kompetensi karyawan ataupun berdasarkan kebutuhan pemenuhan syarat/regulasi dan sasaran strategis lainnya.
2. Aligning Program Pengembangan dengan Rencana Strategis Korporat dengan *checkpoint* berkala bersama *business process owner.*
3. Digitalisasi pelaksanaan pembelajaran dan & Aksesibilitas, serta
4. Metode dan *instrument* Pembelajaran.

PLN NP assess Human Capital Readiness (HCR) as the indicator of the effectiveness of its competency development programs. Furthermore, PLN NP continously evaluates it to obtain feedback, input, and refine competency development activities to increase employee effectiveness and productivity. The Company is improving the quality of its competency development programs, particularly in the following areas:

1. Competency Development Planning and Needs through Learning Needs Analysis, according to employee competency gaps or requirements/ regulations and other strategic objectives.
2. Aligning Development Programs with the Corporate Strategic Plan with regular checkpoints with business process owners.
3. Digitizing learning implementation and accessibility, and
4. Learning Methods and Instruments

Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2026
Employee Competency Development Plan for 2025

Program pengembangan kompetensi dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan kecukupan atas SDM berkualitas yang dimiliki Perusahaan. Pada tahun 2026, PLN NP merencanakan kegiatan pengembangan kompetensi karyawan sebagai berikut:

PLN NP constantly carries out competency development programs to ensure the Company has sufficient qualified human resources. In 2025, PLN NP planned the following employee competency development activities:

Tabel Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2026
Employee Competency Development Plan Table for 2025

Jenis Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development	Jumlah Judul Number of Titles	Target Peserta Target Participants
Program Pelatihan dan Sertifikasi Teknik Engineering Training and Certification Program	104	4.330
Program Pelatihan dan Sertifikasi Non Teknik Non-Engineering Training and Certification Program	197	608
Workshop	108	2.160
Jumlah Total	**409**	**7.098**

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Structure and Composition

Anggaran Dasar pasal 4 menyebutkan, modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp617.020.996.000.000,- (enam ratus tujuh belas triliun dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) terbagi dalam 1.234.041.992.000 saham, terdiri atas 1 (satu) Saham Seri 1 dan 1.234.041.991.999 Saham Seri 2, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah). Modal tersebut telah ditempatkan dengan komposisi sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 (satu) Saham Seri 1 dan 308.510.497.998 Saham Seri 2 dengan nilai nominal sebesar Rp154.255.248.999.500,- (seratus lima puluh empat triliun dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Rupiah);
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 (satu) Saham Seri 2 dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah).

Article 4 of the Articles of Association states that the Company's authorized capital is set at Rp617,020,996,000,000 (six hundred seventeen trillion twenty billion nine hundred ninety-six million Rupiah) divided into 1,234,041,992,000 shares, consisting of 1 (one) Series 1 share and 1,234,041,991,999 Series 2 Shares, each share with a nominal value of Rp500 (five hundred Rupiah). The Company places the capital in the following composition:

1. PT PLN (Persero) with 1 (one) Series 1 Share and 308,510,497,998 Series 2 Shares with a nominal value of Rp154,255,248,999,500 (one hundred fifty-four trillion two hundred fifty-five billion two hundred forty-eight million nine hundred ninety-nine thousand five hundred Rupiah);
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) of 1 (one) Series 2 Share with a nominal value of Rp500 (five hundred Rupiah).

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information on Major and Controlling Shareholders

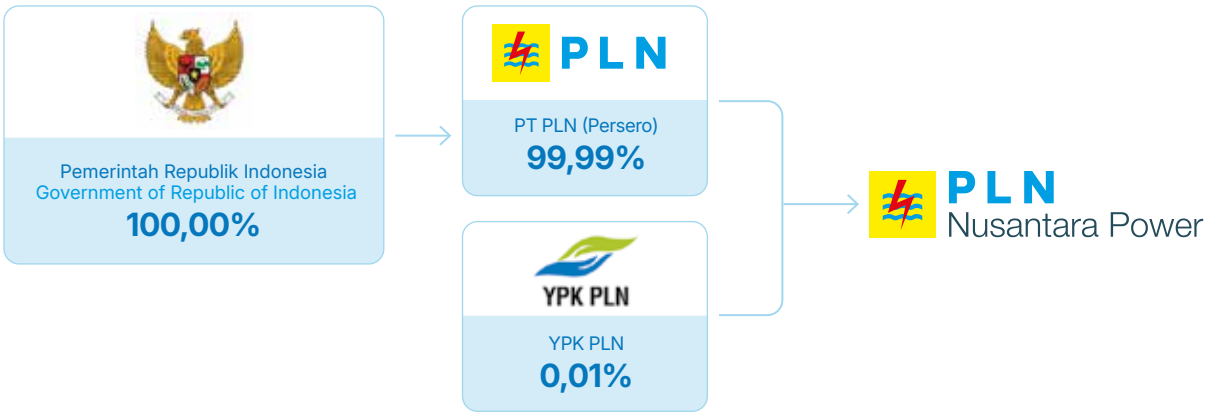

Pemegang Saham utama dan pengendali adalah pemilik saham mayoritas dan memiliki peran untuk mengendalikan kebijakan yang akan diambil oleh manajemen Perusahaan. Pemegang saham PLN NP yaitu PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan YPK PLN dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%. Pemegang saham mayoritas PLN NP adalah PT PLN (Persero) dengan kepemilikan sebesar 99,99% dengan kepemilikan atas 1 (satu) Saham Seri 1

Major and controlling shareholders are the majority share owners and take a role in controlling the policies that will be taken by the Company management. PLN NP shareholders are PT PLN (Persero) with a share ownership of 99.99% and YPK PLN with share ownership of 0.01%. The majority shareholder of PLN NP is PT PLN (Persero), with ownership of 99.99%, consisting of 1 (one) Series 1 Share and 308,510,497,998 Series 2 Shares, so the Major and

dan 308.510.497.998 Saham Seri 2, sehingga Pemegang Saham Utama dan Pengendali PLN NP adalah PT PLN (Persero). Direktur Utama PT PLN (Persero) merupakan representasi pemegang saham utama dan pengendali, dimana secara teknis hubungan dengan pemegang saham berada di bawah Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) Fungsi Hubungan Investor.

Controlling Shareholder of PLN NP is PT PLN (Persero). PT PLN (Persero)'s President Director represents the major and controlling shareholders, where the relationship with the shareholders is technically under the Corporate Secretary of PT PLN (Persero) Investor Relation Function.

Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Komposisi Pemegang Saham dengan persentase kepemilikan 5% atau lebih atas saham PLN NP Januari sampai dengan Desember tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The following is shareholders composition with an ownership percentage of 5% or more of PLN NP shares from January to December 2025:

Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan (%) Ownership (%)
Pemegang Saham dengan kepemilikan 5% atau lebih Shareholders with ownership of 5% or more	
PT PLN (Persero)	99,99%
Pemegang Saham dengan kepemilikan kurang dari 5% Shareholders with ownership of less than 5%	
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	0,01%
Total	**100,00%**

Kepemilikan Saham PLN NP periode Januari sampai dengan Desember tahun 2025 seluruhnya dimiliki oleh institusi lokal yaitu PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) yang seluruhnya berkedudukan di Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:

PLN NP Share Ownership for the period January to December 2025 is entirely owned by local institutions, namely PT PLN (Persero) and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), all of which are domiciled in Indonesia with the following classification:

Jumlah Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi
Total Shareholders by Classification

Status Pemilik Owner Status	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Persentase (%) Percentage (%)
Individu Lokal Local Individual	0	0	0,00%
Individu Asing Foreign Individual	0	0	0,00%
Institusi Lokal Local Institution	2	1.234.041.992.000	100,00%
Institusi Asing Foreign Institution	0	0	0,00%
Jumlah Total	**2**	**1.234.041.992.000**	**100,00%**

Aksi Korporasi
Corporate Action

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat aksi korporasi yang dilakukan oleh PLN NP sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada saham. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi tanggal pelaksanaan aksi korporasi, jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi serta harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.

As of December 31, 2025, PLN NP carried no corporate actions out that resulted in changes to shares. Therefore, there is no information on the date of the corporate action, the number of shares outstanding before and after the corporate action and the share price before and after the corporate action.

Kepemilikan Saham oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Manajemen Senior
Share Ownership by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Senior Management

Seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Manajemen Senior PLN NP yang menjabat sepanjang tahun 2025 tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Sehingga tidak terdapat informasi mengenai persentase kepemilikan saham termasuk pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

All members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Senior Management of PLN NP serving during 2025 did not own any shares in the Company, either directly or indirectly. Thus, there is no information regarding the percentage of share ownership, including shareholders registered in the shareholder register for the purposes of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

Kepemilikan Saham oleh Masyarakat
Share Ownership by Public

Sampai dengan akhir tahun 2025, PLN NP tidak mencatatkan sahamnya di bursa saham, baik di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun di bursa saham lainnya. Sehingga tidak terdapat informasi pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan 5%, lebih dari 5% atau kurang dari 5%.

As of the end of 2025, PLN NP did not list its shares on the stock exchange, either on the Indonesia Stock Exchange (BEI) or on other stock exchanges. Thus, there is no information on public shareholders with ownership of 5%, more than 5%, or less than 5%.

Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Share Listing

Sampai dengan akhir tahun 2025, PLN NP belum pernah melakukan pencatatan saham di bursa, sehingga tidak terdapat informasi terkait kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal.

As of the end of 2025, PLN NP has never listed shares on the stock exchange, thus there is no information regarding the chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of the listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares are listed, including stock split, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and reductions.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listing

Pencatatan di Bursa Karbon Indonesia
Listing on the Indonesian Carbon Exchange

Saat Bursa Karbon diluncurkan, PLN NP menjadi *trader* terbesar dan *pioneer* di bursa karbon Indonesia dengan SPE-GRK sebanyak 900.000 ton CO_2.

When the Carbon Exchange was launched, PLN NP became the largest trader and pioneer in the Indonesian carbon exchange with SPE-GRK of 900,000 tons of CO2.

Sejak peluncuran Bursa Karbon Indonesia, PLN NP menjadi pelaku perdagangan karbon terbesar sekaligus pionir dengan mencatatkan SPE-GRK sebanyak 900.000 ton CO_2. Pada tahun 2025, PLN NP semakin memperkuat portofolio aset karbonnya melalui pencatatan dua proyek baru, yaitu Proyek PLTGU Muara Tawar *Add On* Blok 2 dengan potensi unit karbon sebesar 34.000 ton CO_2 dan Proyek PLTMG Sumbagut 2 Peaker sebesar 277.000 ton CO_2. Penambahan tersebut mencerminkan komitmen PLN NP dalam menciptakan nilai ekonomi dari upaya penurunan emisi serta mendukung pengembangan pasar karbon di Indonesia.

Since the launch of the Indonesian Carbon Exchange, PLN NP has become the leading player in carbon trading and a pioneer by recording SPE-GRK of 900,000 tons of CO_2. In 2025, PLN NP further strengthened its carbon asset portfolio by registering two new projects, namely the Muara Tawar Add On Block 2 CCPP Project with a carbon unit potential of 34,000 tons of CO_2 and the Sumbagut 2 Peaker GEPP Project with 277,000 tons of CO_2. These additions reflect PLN NP's commitment to creating economic value from emission reduction efforts and supporting the development of the carbon market in Indonesia.

PLN NP telah *listing* dan melakukan perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tanggal 23 Oktober 2023 melalui PLTGU Muara Karang Blok 3 sebagai upaya mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Sampai dengan akhir tahun 2025, jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi - Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang telah masuk bursa mencapai lebih dari 1.211.000 ton CO_2 dengan jumlah transaksi lebih dari 632.000 ton CO_2.

PLN NP has listed and conducted carbon trading on the Indonesian Carbon Exchange, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), since October 23, 2023, through the Muara Karang Block 3 CCPP as an effort to support the government in reducing emissions and accelerating the energy transition toward Net Zero Emission (NZE) by 2060. By the end of 2025, the number of Greenhouse Gas Emission Reduction Certificates (SPE-GRK) that have entered the exchange reached more than 1,211,000 tons of CO_2, with a transaction volume of more than 632,000 tons of CO_2.

Sepanjang tahun 2025, PLN Nusantara Power mencatat sejumlah transaksi penjualan karbon di pasar negosiasi dan pasar reguler IDX Carbon. Beberapa perusahaan dan instansi yang tercatat melakukan pembelian di pasar negosiasi antaranya adalah PT General Energy Bali, Sucofindo, dan PT Energy Management Indonesia. Selain itu, di pasar reguler terdapat berbagai instansi lainnya yang turut bertransaksi.

Throughout 2025, PLN Nusantara Power recorded several carbon sales transactions in the negotiation market and the regular IDX Carbon market. Some of the companies and institutions that were noted to have made purchases in the negotiation market include PT General Energy Bali, Sucofindo, and PT Energy Management Indonesia. Additionally, in the regular market, various other institutions also participate in transactions.

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan salah satu pelopor perdagangan karbon di Indonesia melalui pencatatan (*listing*) dan transaksi perdana di Bursa Karbon Indonesia yang dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia pada 23 Oktober 2023 melalui Proyek PLTGU Muara Karang Blok 3. Keikutsertaan PLN NP pada tahap awal pengembangan pasar karbon nasional merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta mempercepat transisi energi menuju target *Net Zero Emission* (NZE) tahun 2060. Pada saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia, PLN NP tercatat sebagai trader terbesar dengan membursakan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) sebesar 900.000 ton CO_2 yang berasal dari Proyek PLTGU Muara Karang Blok 3.

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) is one of the pioneers of carbon trading in Indonesia through the listing and inaugural transaction on the Indonesian Carbon Exchange managed by PT Bursa Efek Indonesia on October 23, 2023, through the Muara Karang Block 3 CCPP Project. PLN NP's participation in the early stages of the national carbon market development is a manifestation of the Company's commitment to supporting efforts to reduce greenhouse gas emissions and accelerate the energy transition toward the Net Zero Emission (NZE) target by 2060. At the launch of the Indonesian Carbon Exchange, PLN NP was recorded as the largest trader, listing Greenhouse Gas Emission Reduction Certificates (SPE-GRK) amounting to 900,000 tons of CO_2 from the Muara Karang Block 3 CCPP Project.

Memasuki tahun 2025, PLN NP semakin memperkuat perannya dalam pengembangan pasar karbon dengan menjadi salah satu peserta awal pada peluncuran perdagangan karbon internasional di Indonesia melalui IDX Carbon. Dalam momentum tersebut, PLN NP mengotorisasi sebagian besar kuota SPE-GRK dari Proyek PLTGU Muara Karang Blok 3 agar dapat diperdagangkan di pasar internasional, sehingga membuka akses bagi aset karbon perusahaan untuk menjangkau pembeli global.

Entering the year 2025, PLN NP further strengthens its role in the development of the carbon market by becoming one of the early participants in the launch of international carbon trading in Indonesia through IDX Carbon. In this momentum, PLN NP authorized the majority of the SPE-GRK quota from the Muara Karang Block 3 CCPP Project to be traded in the international market, thereby opening access for the Company's carbon assets to reach global buyers.

Sebagai bagian dari upaya ekspansi ke pasar internasional, PLN NP mencatatkan Proyek PLTGU Muara Tawar *Add On* Blok 2 yang menghasilkan unit karbon sebesar 34.000 ton CO_2 untuk diperdagangkan di pasar internasional. Antusiasme pasar terhadap aset karbon PLN NP tercermin dari terjual habisnya (*sold out*) seluruh volume unit karbon dari proyek tersebut pada hari pertama peluncuran perdagangan karbon internasional.

As part of its efforts to expand into the international market, PLN NP has recorded the Muara Tawar Add On Block 2 CCPP Project, which generates 34,000 tons of CO_2 carbon units for trade in the international market. The market's enthusiasm for PLN NP's carbon assets is reflected in the complete sell-out (sold out) of the entire volume of carbon units from the project on the first day of the international carbon trading launch.

Di pasar domestik, PLN NP juga terus memperkuat portofolio karbon melalui pencatatan Proyek PLTMG Sumbagut 2 *Peaker* yang menghasilkan unit karbon sebesar 277.000 ton CO_2. Kehadiran proyek ini semakin memperkaya portofolio aset karbon PLN NP dan memperluas kontribusi perusahaan dalam penyediaan kredit karbon di pasar nasional.

In the domestic market, PLN NP continues to strengthen its carbon portfolio through the listing of the Sumbagut 2 Peaker GEPP Project, which generates carbon units amounting to 277,000 tons of CO_2. The presence of this project further enriches PLN NP's carbon asset portfolio and expands the Company's contribution to providing carbon credits in the national market.

Dengan tambahan proyek-proyek tersebut, hingga akhir tahun 2025 total SPE-GRK yang telah dibursakan oleh PLN NP mencapai lebih dari 1.211.000 ton CO_2. Dari jumlah tersebut, realisasi transaksi perdagangan karbon telah melampaui 632.000 ton CO_2. Capaian ini mencerminkan tingginya permintaan pasar terhadap aset karbon PLN NP sekaligus menunjukkan semakin matangnya peran perusahaan dalam ekosistem perdagangan karbon nasional.

With the addition of these projects, by the end of 2025, the total SPE-GRK traded by PLN NP will reach more than 1,211,000 tons of CO_2. Of this amount, the realization of carbon trading transactions has exceeded 632,000 tons of CO_2. This achievement reflects the high market demand for PLN NP's carbon assets and demonstrates the Company's increasingly mature role in the national carbon trading ecosystem.

Pada pasar domestik, transaksi penjualan karbon PLN NP dilakukan melalui mekanisme pasar negosiasi maupun pasar reguler IDX Carbon. Sejumlah perusahaan dan institusi yang tercatat melakukan pembelian kredit karbon PLN NP antara lain PT General Energy Bali, PT Sucofindo, PT Energy Management Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, serta beberapa perusahaan di sektor pertambangan seperti PT Asmin Bara Bronang, PT Suprabari Mapanindo Mineral, dan PT Kalimantan Prima Persada.

In the domestic market, the transaction of PLN NP carbon credit sales is made through negotiation market mechanisms as well as the regular IDX Carbon market. Several companies and institutions that have been recorded purchasing PLN NP carbon credits include PT General Energy Bali, PT Sucofindo, PT Energy Management Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, as well as several companies in the mining sector, such as PT Asmin Bara Bronang, PT Suprabari Mapanindo Mineral, and PT Kalimantan Prima Persada.

Sementara itu, di pasar internasional, kredit karbon PLN NP juga memperoleh respons positif dari berbagai pelaku pasar. Bank BCA dan Bank Mandiri tercatat sebagai institusi yang melakukan pembelian kredit karbon PLN NP yang telah memperoleh otorisasi untuk diperdagangkan di pasar internasional.

Meanwhile, in the international market, PLN NP's carbon credits have also received a positive response from various market players. Bank BCA and Bank Mandiri are listed as institutions that have purchased PLN NP's carbon credits, authorized for trading in the international market.

Rangkaian pencapaian tersebut semakin menegaskan posisi PLN NP sebagai salah satu pemain utama dalam pengembangan pasar karbon Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Melalui optimalisasi aset karbon yang dimiliki, PLN NP tidak hanya menciptakan sumber nilai ekonomi baru bagi perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung agenda dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan serta percepatan transisi energi yang berkelanjutan.

This series of achievements further supports PLN NP's position as one of the key players in the development of Indonesia's carbon market, both locally and internationally. Through the optimization of its carbon assets, PLN NP not only creates new sources of economic value for the Company but also makes a tangible contribution to supporting the decarbonization agenda of the electricity sector and the acceleration of a sustainable energy transition.

Rencana Pencatatan di Bursa Karbon Indonesia ke Depan

Future Plans for Listing on the Indonesian Carbon Exchange

IDX Carbon menargetkan pembukaan akses ke pasar karbon internasional pada tahun 2025. Menyambut hal ini, PLN NP sebagai trader aktif berkomitmen untuk turut serta dalam perdagangan karbon di tingkat global. Partisipasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat kontribusi PLN NP dalam penanggulangan perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang strategis untuk penguatan ekonomi nasional melalui ekosistem karbon yang berkelanjutan dan kompetitif. Sebagai bagian dari langkah dekarbonisasi, PLN NP akan menambah portofolio unit pembangkit energi bersih melalui PLTGU Muara Tawar dengan nilai karbon sebesar 34.960 ton CO_2, dan PLTMG Arun sebesar 277.078 ton CO_2.

Pada tahun 2026, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) berencana untuk terus meningkatkan portofolio aset karbon melalui pencatatan proyek-proyek baru yang saat ini masih dalam tahap pengembangan dan berpotensi menghasilkan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon). Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dari kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung pengembangan pasar karbon Indonesia.

IDX Carbon aims to open access to the international carbon market by 2025. In response to this matter, PLN NP, as an active trader, is committed to participating in carbon trading at the global level. This participation is expected to not only strengthen PLN NP's contribution to climate change mitigation, but also open strategic opportunities for strengthening the national economy through a sustainable and competitive carbon ecosystem. As part of the decarbonization step, PLN NP will add a portfolio of clean energy generation units through Muara Tawar CCPP with a carbon value of 34,960 tons CO_2 and Arun GEPP with 277,078 tons CO_2.

In 2026, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) planned to continue enhancing its carbon asset portfolio by listing new projects that are currently in the development stage and have the potential to generate Greenhouse Gas Emission Reduction Certificates (SPE-GRK) on the Indonesia Carbon Exchange (IDX Carbon). This step is part of the Company's efforts to optimize the economic value of greenhouse gas emission reduction activities while supporting the development of the Indonesian carbon market.

Struktur Grup PLN Nusantara Power
PLN Nusantara Power's Group Structure

Bersama Anak Perusahaan, PLN NP terus berupaya melakukan percepatan transisi energi menjadi fokus strategis perusahaan untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pembangunan energi rendah emisi di Indonesia.

Together with its Subsidiaries, PLN NP continues to strive for accelerating the energy transition as a strategic focus of the Company to maintain national energy resilience while promoting low-emission energy development in Indonesia.

Kemampuan mengelola dan mengembangkan portofolio yang dimiliki Perusahaan menjadi modal utama PLN NP dalam menjalankan amanat PT PLN (Persero) untuk memimpin *Subholding Generation Company* 1 membangun industri ketenagalistrikan Nasional. Struktur Grup PLN NP sebagai *Subholding Generation Company* dari PT PLN (Persero) memiliki 5 Entitas Anak, 4 Cucu-Cicit Perusahaan, 4 Perusahaan asosiasi dan 9 perusahaan *joint venture* baik kepemilikan saham oleh PLN NP maupun Anak Perusahaan.

The ability to manage and develop the Company's portfolio is PLN NP's main capital in carrying out the mandate of PT PLN (Persero) to lead the Sub-holding Generation Company 1 to build the National electricity industry. The PLN NP Group structure as a Sub-holding Generation Company of PT PLN (Persero) has five Subsidiaries, four Second/Third-tier Companies, four Associated Companies, and nine Joint Venture Companies both owned by PLN NP and its Subsidiaries.

Entitas Anak merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh PLN NP, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasionalnya untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Sedangkan untuk Entitas Cucu-Cicit adalah perusahaan yang dikendalikan oleh PLN NP melalui Entitas Anak dengan kepemilikan mayoritas terhadap Entitas Cucu-Cicit.

A Subsidiary is a company controlled by PLN NP, has the power to regulate its financial and operational policies to obtain benefits from the entity's activities. Meanwhile, the Second/Third-Tier Subsidiary is controlled by PLN NP through a Subsidiary with majority and consolidated financial ownership of the Second/Third-Tier Subsidiary.

Entitas Asosiasi merupakan perusahaan dimana PLN NP dan entitas anak mempunyai pengaruh yang signifikan, dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Definisi "Pengaruh Signifikan" adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Entitas Patungan (*Joint Venture*) merupakan perusahaan bersama dimana para pihak mempunyai bagian partisipasi dan diatur oleh persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas. Pada Entitas Patungan, keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitasnya, dipersyaratkan secara konsensus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Struktur Grup PLN NP tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Associates are companies over which PLN NP and its subsidiaries have significant influence and are neither subsidiaries nor participating interests in joint ventures. "Significant Influence" means the power to participate in an investee's financial and operational policy decisions but not to control, and the Group usually owns 20% or more of the voting rights but not more than 50% of the voting rights. A Joint Venture Entity is when the parties have a participating interest and are governed by an agreement to share control over an activity. In a Joint Venture, strategic financial and operational decisions related to its activities are required by consensus of all parties sharing control. The structure of PLN NP Group in 2025 can be described as follows:

100%
Pemerintah Republik Indonesia
99,99%
PT PLN (Persero)
PLN Nusantara Power
99,00%
PT PLN Nusantara Power Services
O&M Services
99,00%
PT PLN Nusantara Power Construction
EPC
51%
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang
Spareparts Provider
99,99%
PT PLN Nusantara Renewables
Investment
72,98%
PT Navigat Innovative Indonesia
92,00%
PT Mitra Karya Prima
10,00%
PT Rekind Daya Mamuju
99,99%
PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo
30,00%
PT Shen Hua Guo Hua PJB
30,00%
PT Guo Hua Taidian PJB
99,99%
PT Pembangkitan Jawa Baskara Investasi Cirata
51,00%
PT PJB Masdar Solar Energi

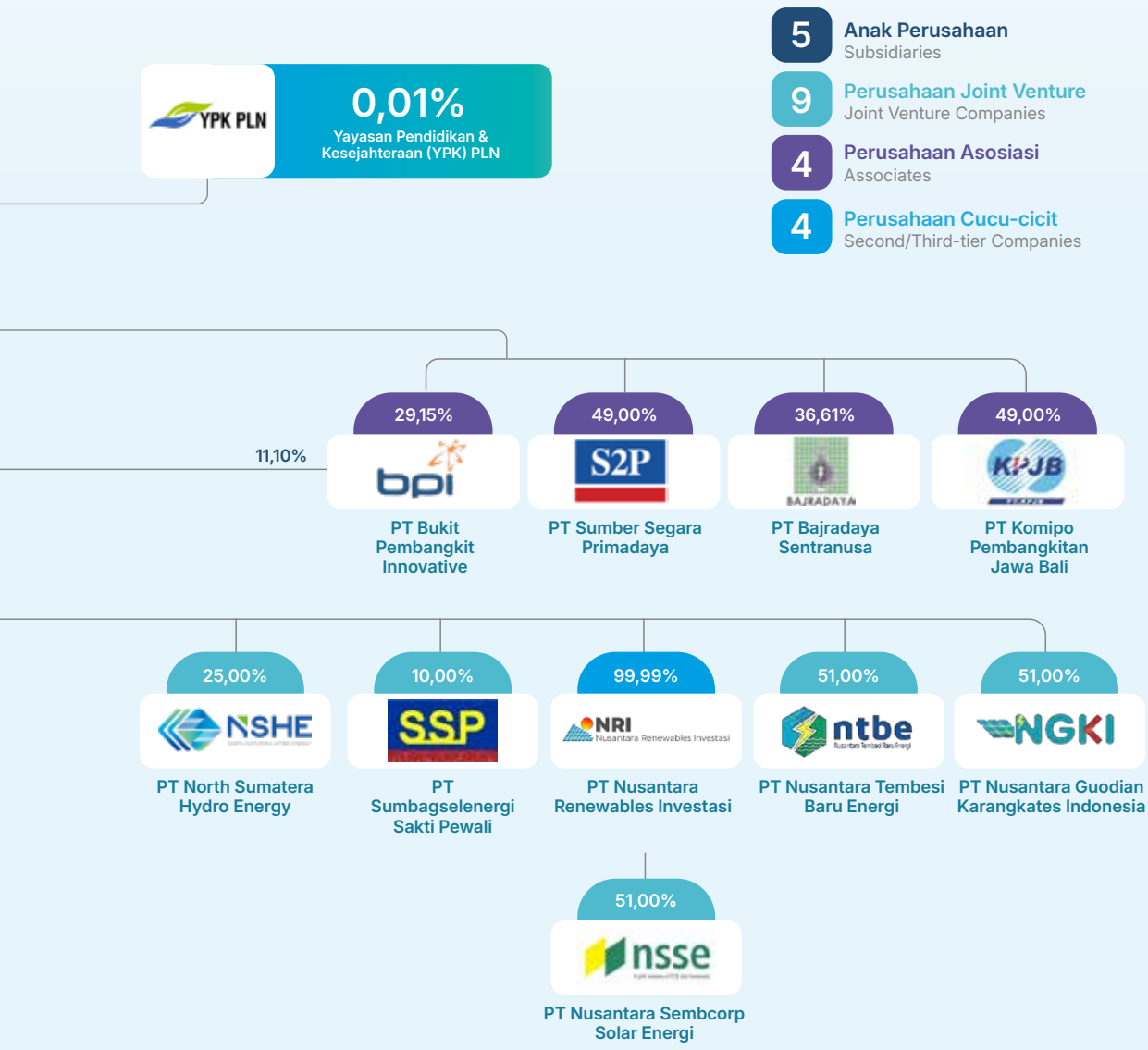
YPK PLN
0,01%
Yayasan Pendidikan & Kesejahteraan (YPK) PLN
5 Anak Perusahaan
Subsidiaries
9 Perusahaan Joint Venture
Joint Venture Companies
4 Perusahaan Asosiasi
Associates
4 Perusahaan Cucu-cicit
Second/Third-tier Companies
11,10%
29,15%
PT Bukit Pembangkit Innovative
49,00%
PT Sumber Segara Primadaya
36,61%
PT Bajradaya Sentranusa
49,00%
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
25,00%
PT North Sumatera Hydro Energy
10,00%
PT Sumbagselenergi Sakti Pewali
99,99%
PT Nusantara Renewables Investasi
51,00%
PT Nusantara Tembesi Baru Energi
51,00%
PT Nusantara Guodian Karangkates Indonesia
51,00%
PT Nusantara Sembcorp Solar Energi

Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama

Subsidiaries, Second/Third-Tier Subsidiaries, Associations, and Joint Ventures

Berikut disajikan daftar Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama yang tergabung dalam Grup PLN NP sampai dengan tahun 2025:

The following is a list of Subsidiaries, Second/Third-Tier Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures that are members of the PLN NP Group until 2025:

Tabel Daftar Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama

Table of List of Subsidiaries, Second/Third-Tier Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

No	Nama Perusahaan Company Name	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham PLN NP PLN NP Share Ownership		Bidang Usaha Line of Business
				Penyertaan Modal Equity Capital	%	
Entitas Anak Subsidiaries						
1	PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS)	30 Maret 2001 March 30, 2001	Beroperasi Operating	Rp103,95 miliar Rp103.95 billion	99,00%	Jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan/(pemasangan) peralatan ketenagalistrikan Operation and maintenance services for power plants and construction/ (installation) of electrical equipment
2	PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC)	29 September 2003 September 29, 2003	Beroperasi Operating	Rp776,1 miliar Rp776.1 billion	99,00%	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan Engineering, procurement and construction, and operation and maintenance of the electricity sector
3	PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	21 Oktober 2002 October 21, 2002	Beroperasi Operating	Rp99,77 miliar Rp99.77 billion	72,97%	Penyediaan tenaga listrik dan perdagangan/keagenan peralatan ketenagalistrikan Supply of electricity and trade/ agency of electricity equipment
4	PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR)	18 Desember 2015 December 18, 2015	Beroperasi Operating	Rp4,59 triliun Rp4.59 trillion	100,00%	Investasi ketenagalistrikan Electricity investment
5	PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC)	16 Juni 2017 June 16, 2017	Beroperasi Operating	Rp76,5 miliar Rp76,5 billion	51,00%	Perdagangan barang dan jasa, enjiniring, rantai pasokan, dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan Trading in goods and services, engineering, supply chain, and consulting in the electricity sector
Entitas Cucu-Cicit Second/Third-tier Companies						
1	PT Mitra Karya Prima (MKP)	23 September 2004 September 23, 2004	Beroperasi Operating	Rp2,5 miliar Rp2.5 billion	92,00%	Pengadaan listrik, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, penyewaan dan ketenagakerjaan dan penunjang usaha lain Electricity procurement, construction, wholesale and retail trade, leasing, labor, and other business supports
2	PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo (PJB Investindo)	7 Juli 2020 July 7, 2020	Beroperasi Operating	Rp23,9 miliar Rp23.9 billion	100,00%	Penempatan investasi di pengadaan listrik Investment placement in electricity procurement
3	PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata (PJBIC)	7 Juli 2020 July 7, 2020	Beroperasi Operating	Rp23,9 miliar Rp23.9 billion	100,00%	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal Financing in the form of capital participation

No	Nama Perusahaan Company Name	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham PLN NP PLN NP Share Ownership		Bidang Usaha Line of Business
				Penyertaan Modal Equity Capital	%	
4	PT Nusantara Renewables Investasi (NRI)	5 November 2024 November 5, 2024	Beroperasi Operating	Rp102,07 miliar Rp102.07 billion	100,00%	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal Financing in the form of capital participation
Entitas Asosiasi Associates						
1	PT Sumber Segara Primadaya (S2P)	12 Mei 2003 May 12, 2003	Beroperasi Operating	Rp437,5 miliar Rp437.5 billion	49,00%	Pembangkit listrik tenaga uap Coal fired power plant
2	PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)	30 Oktober 1995 October 30, 1995	Beroperasi Operating	Rp388,5 miliar Rp388.5 billion	36,61%	Pembangkit listrik tenaga air Hydroelectric power plant
3	PT Bukti Pembangkit Innovative (BPI)	28 Agustus 2006 August 28, 2006	Beroperasi Operating	Rp332,1 miliar Rp332.1 billion	29,15%	Pembangkit listrik tenaga uap Coal fired power plant
4	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)	30 September 2010 September 30, 2010	Beroperasi Operating	Rp11,1 miliar Rp11.1 billion	49,00%	Operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance
Entitas Ventura Bersama Joint Ventures						
1	PT Sumbagselenergi Sakti Pewali (SSPewali)	6 Juni 2018 June 6, 2018	Beroperasi Operating	Rp64,35 miliar Rp64.35 billion	10,00%	Pembangkit listrik tenaga uap Coal fired power plant
2	PT Rekind Daya Mamuju (RDM)	21 Februari 2013 February 21, 2013	Beroperasi Operating	Rp39,36 miliar Rp39.36 billion	10,00%	Pembangkit listrik tenaga uap Coal fired power plant
3	PT Shenhua Guo Hua Pembangkitan Jawa Bali (SGPJB)	13 Januari 2016 January 13, 2016	Beroperasi Operating	Rp1,52 triliun Rp1.52 trillion	30,00%	Pembangkit listrik tenaga uap Coal fired power plant
4	PT Guo Hua Taidian Pembangkitan Jawa Bali (GTPJB)	23 September 2016 September 23, 2016	Beroperasi Operating	Rp2,09 miliar Rp2.09 billion	30,00%	Operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance
5	PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy (PMSE)	7 Juli 2020 July 7, 2020	Beroperasi Operating	Rp82,5 miliar Rp82.5 billion	51,00%	Pembangkit listrik tenaga surya Solar power plant
6	PT North Sumatera Hulu Energy (NSHE)	30 April 2008 April 30, 2008	Tahap Pengembangan Development Stage	Rp1,43 triliun Rp1.43 trillion	25,00%	Pembangkit listrik tenaga air Hydroelectric power plant
7	PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE)	21 Desember 2023 December 21, 2023	Beroperasi Operating	Rp102,47 miliar Rp102.47 billion	51,00%	Pembangkit listrik tenaga surya Solar power plant
8	PT Nusantara Tembesi Baru Energi (NTBE)	4 April 2024 April 4, 2024	Tahap Pengembangan Development Stage	Rp43,37 miliar Rp43.37 billion	51,00%	Pembangkit listrik tenaga surya Solar power plant
9	PT Nusantara Guodian Karangkates Indonesia (NGKI)	20 Desember 2024 December 20, 2024	Tahap Pengembangan Development Stage	Rp154,25 miliar Rp154.25 billion	51,00%	Pembangkit listrik tenaga surya Solar power plant

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama

Profile and Performance Overview of Subsidiaries, Second-Tier Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

Kinerja anak perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan pencapaian target strategis perusahaan secara keseluruhan.

The performance of subsidiaries is one of the crucial factors in supporting business growth and achieving the Company's overall strategic targets.

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Anak

Profile and Performance Overview of Subsidiaries

PT Nusantara Power Services Services (PLN NPS)

PLN NPS merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, pengadaan peralatan ketenagalistrikan, dan pembangunan atau pemasangan peralatan energi listrik. PLN NPS didirikan pada tanggal 30 Maret 2001 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 99,00%.

PLN NPS is a subsidiary of PLN NP which operates in the field of providing operation and maintenance services for power plants, procurement of electrical equipment, and construction or installation of electrical energy equipment. PLN NPS was established on March 30, 2001 with a percentage of share ownership by PLN NP of 99.00%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
Jl. Raya Juanda No. 17 Sidoarjo 61253
(62-31) 8548391, (62-31) 8557909
info@pln-npservices.com
www.pln-npservices.com

Alamat Kantor Perwakilan Representative Office Address
Jl. Tebet Utara VI 6A, Tebet Timur
Jakarta Selatan 12810

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)

Financial Performance in 2023-2025 (Rp billion)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Unaudited)*
Jumlah Aset Total Assets	1.774,69	1.962,99	**3.115,91**
Pendapatan Usaha Revenue	2.570,55	3.024,93	**3.860,93**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	154,54	216,25	**266,92**

PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC)

PLN NPC merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) sektor ketenagalistrikan yang melaksanakan pembangunan pembangkitan, serta fasilitas transmisi dan distribusi. PLN NPC berdiri sejak 20 Oktober 2000 dengan nama PT Delta Rekadaya Mandiri yang kemudian berganti nama menjadi PT Rekadaya Elektrika pada 29 September 2003 dan setelah PLN NP masuk sebagai pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 99,00%. kemudian berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Construction pada tanggal 27 Desember 2023.

PLN NPC is a subsidiary of PLN NP, which operates in the field of Engineering, Procurement and Construction (EPC) in the electricity sector, carrying out the power plant construction, as well as its transmission and distribution facilities. PLN NPC was established on October 20, 2000, under the name PT Delta Rekadaya Mandiri. It later changed its name to PT Rekadaya Elektrika on September 29, 2003, after PLN NP got into it as a shareholder with a percentage of share ownership by PLN NP of 99.00%, and was subsequently renamed PT PLN Nusantara Construction on December 27, 2023.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
Gedung 18 Office Park
Jl. TB Simatupang No.18, RT.2/RW.1, Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

(+62 21) 2787 1818 , +62 (021) 2770 8558
info@plnnpc.com
www.plnnpc.com

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)
Financial Performance in 2023-2025 (Rp billion)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Unaudited)*
Jumlah Aset Total Assets	2.179,11	2.164,92	**2.170,05**
Pendapatan Usaha Revenue	1.156,50	1.148,02	**1.253,40**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	7,10	8,36	**7,67**

PT Navigat Innovative Indonesia (NII)

NII merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang perdagangan, konstruksi dan pertambangan. NII didirikan pada 21 Oktober 2002 dan PLN NP masuk menjadi pemegang saham NII sejak 13 Januari 2012. Kegiatan usaha NII saat ini berupa penyertaan saham sebesar 11,10% di PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) sebagai pengembang IPP PLTU Banjarsari 2×110 MW serta pengembangan beberapa proyek pembangkit di wilayah Sumatera. Persentase kepemilikan saham NII oleh PLN NP adalah sebesar 72,97%.

NII is a subsidiary of PLN NP which operates in the fields of trading, construction and mining. NII was established on October 21, 2002, and PLN NP has become a shareholder of NII since January 13, 2012. NII has current business activities consist of 11.10% share investment in PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) as the developer of the 2×110 MW Banjarsari IPP CFPP as well as the development of several power plant project in the Sumatera region. The percentage of NII share ownership by PLN NP is 72.97%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya 60231
(+62 31) 8283 180 ext. 540,
(+62 31) 8283 183

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)
Financial Performance in 2023-2025 (Rp billion)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Audited)*
Jumlah Aset Total Assets	502,84	510,60	**525,13**
Pendapatan Usaha Revenue	23,54	9,15	**6,35**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	23,54	9,17	**6,36**

PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR)

PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) merupakan entitas anak PLN NP yang berfokus pada investasi kelistrikan dalam ekosistem bisnis kelistrikan terintegrasi guna mengoptimasi daya guna energi baru dan terbarukan dengan investasi hijau. PLN NR didirikan pada tanggal 18 Desember 2015 dengan persentase kepemilikan oleh PLN NP sebesar 99,999% dengan nama PT PJB Investasi (PJBI) kemudian berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) pada tahun 2023.

PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) is a subsidiary of PLN NP which focuses on electricity investment in an integrated electricity business ecosystem to optimize the usability of new and renewable energy with green investment. PLN NR was established on December 18, 2015, with a percentage of ownership by PLN NP of 99.999%, originally established under the name PT PJB Investasi (PJBI), the Company changed its name to PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) in 2023.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
18 Office Park, 19th Floor
Jl. TB Simatupang, No. 18, Jakarta Selatan 12520
(+62 21) 7834 1353
info@ptplnnr.com
www.ptplnnr.com

Alamat Kantor Perwakilan Representative Office Address
PT PLN Nusantara Power
D Building, 1st Floor
Jl. Ketintang Baru, No. 11, Surabaya 60231

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)
Financial Performance in 2023-2025 (Rp billion)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Audited)*
Jumlah Aset Total Assets	8.703,69	10.310,22	**11.261,92**
Pendapatan Usaha Revenue	776,75	935,16	**1.012,08**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	790,26	1.022,91	**1.074,76**

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC)

PLNSC merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang penyediaan spare parts pembangkit dari pabrikan, *reverse engineering*, standarisasi dan *product catalogue database*. PLNSC didirikan pada tanggal 16 Juni 2017 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 51,00%.

PLNSC is a subsidiary of PLN NP which is engaged in providing generator spare parts from manufacturers, reverse engineering, standardization and product catalog database. PLNSC was established on June 16, 2017, with a percentage of share ownership by PLN NP of 51.00%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
Recapital Building, 1st and 3rd Floor
Jl. Adityawarman No. 55 Melawai, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160

(+62 21) 7246184
corsec@plnsc.co.id
www.plnsc.co.id

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)
Financial Performance in 2023-2025 (Rp billion)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Unaudited)*
Jumlah Aset Total Assets	778,25	871,22	**1.754,51**
Pendapatan Usaha Revenue	887,98	1.687,70	**1.928,17**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	29,26	66,10	**189,35**

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Cucu-Cicit
Profile and Performance Overview of the Second to Third-Tier Subsidiaries

PT Mitra Karya Prima (MKP)

MKP merupakan entitas anak dari PLN NPS yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja atau SDM untuk O&M pembangkit listrik. MKP didirikan pada tanggal 23 September 2004 dengan persentase kepemilikan saham PLN NPS sebesar 92,00%.

MKP is a subsidiary of PLN NPS which is engaged in providing labor or human resources for power plant O&M. MKP was established on September 23, 2004, with a PLN NPS share ownership percentage of 92.00%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
Juanda Business Center (JBC)
Blok A, No. 4, 5 & 6,
Jl. Raya Juanda No. 1,
Sidoarjo 61253

(+62 31) 8548595
(+62 31) 8548596
info@mitrakaryaprima.com
www.mitrakaryaprima.com

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)
Financial Performance in 2023-2025 (Rp billion)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Unaudited)*
Jumlah Aset Total Assets	206,03	256,83	**265,05**
Pendapatan Usaha Revenue	542,79	684,73	**805,19**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	31,20	35,76	**39,07**

PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo (PJB Investindo)

PJB Investindo merupakan entitas anak dari PLN NR yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha pengadaan listrik. PJB Investindo didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NR sebesar 99,999%.

PJB Investindo is a subsidiary of PLN NR which operates in the financing sector in the form of capital participation and electricity procurement. PJB Investindo was established on July 7, 2020, with a percentage of share ownership by PLN NR of 99.999%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
18 Office Park, 19th Floor
Jl. TB Simatupang, No. 18, Jakarta Selatan 12520

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)
Financial Performance in 2023-2025 (Rp billion)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Unaudited)*
Jumlah Aset Total Assets	357,87	420,94	**437,61**
Pendapatan Usaha Revenue	40,10	43,77	**9,76**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	45,11	59,82	**14,29**

PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata (PJBIC)

JBIC merupakan entitas anak dari PLN NR yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha pengadaan listrik. PJBIC didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NR sebesar 99,999%.

PJBIC is a subsidiary of PLN NR which operates in the financing sector in the form of capital participation and electricity procurement. PJBIC was established on July 7, 2020, with a percentage of share ownership by PLN NR of 99.999%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
18 Office Park, 19th Floor
Jl. TB Simatupang, No. 18, Jakarta Selatan 12520

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)
Financial Performance in 2023-2025 (Rp billion)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Unaudited)*
Jumlah Aset Total Assets	357,86	420,93	**437,60**
Pendapatan Usaha Revenue	40,10	43,77	**9,76**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	45,14	59,79	**14,29**

PT Nusantara Renewables Investasi (NRI)

NRI merupakan entitas anak dari PLN NR yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha pengadaan listrik. NRI didirikan pada tanggal 5 November 2024 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NR sebesar 99,999%.

NRI is a subsidiary of PLN NR which is engaged in financing in the form of capital participation and electricity procurement business. NRI was established on November 5, 2024 with the percentage of share ownership by PLN NR amounting to 99.999%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
18 Office Park, 19th Floor
Jl. TB Simatupang, No. 18, Jakarta Selatan 12520

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)
Financial Performance in 2023-2025 (Rp billion)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Unaudited)*
Jumlah Aset Total Assets	-	102,25	**117,37**
Pendapatan Usaha Revenue	-	(0,23)	**14,90**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	-	(0,23)	**14,90**

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Asosiasi
Profile and Performance Overview of the Associates

PT Sumber Segara Primadaya (S2P)

S2P merupakan entitas asosiasi PLN NP dengan persentase kepemilikan saham sebesar 49,00%. S2P bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik (IPP) dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap Cilacap 2×300 MW yang beroperasi komersial pada 2 September 2006, Unit 3 dengan kapasitas 1×660 MW yang beroperasi komersial pada 16 Juni 2016, dan Unit 3A dengan kapasitas 1×1000 MW yang beroperasi komersial pada tanggal 9 November 2019.

S2P is an associated entity of PLN NP with a share ownership percentage of 49.00%. S2P is engaged in the field of electricity supply (IPP) by operating the2×300 MW Cilacap steam power plant which started operating commercially since September 2, 2006, Unit 3 with a capacity of 1×660 MW which started operating commercially since June 16, 2016, and Unit 3A with a capacity of 1×1000 MW which started operating commercially since November 9, 2019.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
Gedung Treasury Tower, Lt. 39. SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190
(+62 21) 2912 6888
(+62 21) 2912 6886
jakarta@ssprimadaya.co.id

Alamat Kantor PLTU Cilacap Cilacap CFPP Office Address
Jl. Lingkar Timur Karang Kandri,
Kecamatan Kesugihan, Cilacap
(+62 282) 53886
(+62 282) 538863
cilacap@ssprimadaya.co.id

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)
Financial Performance in 2023-2025 (Rp billion)

Uraian Description	2023	2024	2025 (Unaudited)
Jumlah Aset Total Assets	25.378,71	22.405,27	**21.002,00**
Pendapatan Usaha Revenue	13.640,91	13.625,22	**14.094,14**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	1.875,64	1.652,57	**1.700,88**

PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)

BPI merupakan entitas ventura bersama PLN NP yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik IPP dengan mengoperasikan PLTU Banjarsari 2×110 MW di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. BPI didirikan pada tanggal 28 Agustus 2006 dengan persentase kepemilikan saham PLN NP sebesar 29,15%.

BPI is a joint venture entity with PLN NP which operates in the field of providing IPP electricity by operating the 2×110 MW Banjarsari CFPP in Lahat Regency, South Sumatera. BPI was established on August 28, 2006, with a share ownership percentage of PLN NP of 29.15%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
Graha Surveyor Indonesia Building, Lt. 17, Suite 1703
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950
(+62 21) 5212 463/ 5212 470
(+62 21) 5210 725
secretary@bpi-ipp.com
www.bpi-ipp.com

Alamat Kantor PLTU Banjarsari
Banjarsari CFPP Office Address
Jl. Lintas Tengah Sumatera,
Desa Sirah Pulau & Desa Gunung Kembang

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (USD)
Financial Performance in 2023-2025 (USD)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Audited)*
Jumlah Aset Total Assets	344.227.191	331.513.764	**329.847.880**
Pendapatan Usaha Revenue	69.286.754	59.623.972	**56.988.726**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	13.904.534	5.192.495	**3.472.471**

PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)

BDSN merupakan entitas ventura bersama PLN NP yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik *Independent Power Producer* (IPP) mengoperasikan PLTA Asahan-I 2×90 MW. BDSN didirikan pada tanggal 30 Oktober 1995 dan PJB masuk sebagai pemegang saham pada tanggal 30 November 1996 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 36,61%.

BDSN is a joint venture entity with PLN NP which operates in the field of providing electricity. Independent Power Producer (IPP) operates the 2×90 MW Asahan-I HPP. BDSN was established on October 30, 1995, and PLN NP entered as a shareholder on November 30, 1996, with a percentage of share ownership by PLN NP of 36.61%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
Jl. Wijaya III No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta 12160
(+62 21) 7202 117
bdsn.ho@bajradaya.com
www.bajradaya.com

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (USD)
Financial Performance in 2023-2025 (USD)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Audited)*
Jumlah Aset Total Assets	443.218.391	435.644.379	**432.269.826**
Pendapatan Usaha Revenue	41.474.852	40.286.940	**43.406.702**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	20.341.924	18.843.995	**22.899.033**

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)

KPJB merupakan entitas ventura bersama PLN NP yang bergerak di bidang jasa O&M, *coal handling*, *jetty* dan *port management* pada PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4 yang berkapasitas 2×661 MW. KPJB didirikan pada tanggal 30 September 2010 dengan persentase kepemilikan saham PLN NP sebesar 49,00%.

KPJB is a joint venture entity with PLN NP which operates in the field of O&M, coal handling, jetty and port management services at Tanjung Jati B CFPP, Units 3 & 4 with a capacity of 2×661 MW. KPJB was established on September 30, 2010, with a share ownership percentage of PLN NP of 49.00%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
PLTU Tanjung Jati B Jawa Bali Unit 3 & 4, Desa Tubanan,
Kec. Kembang, Kab. Jepara, Jawa Tengah
(+62 291) 4270 493
(+62 291) 4270 601
www.kpjb.co.id

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)
Financial Performance in 2023-2025 (Rp billion)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Unaudited)*
Jumlah Aset Total Assets	199,94	193,85	**198,32**
Pendapatan Usaha Revenue	232,90	242,94	**249,07**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	13,92	11,53	**12,53**

Profil dan Kilas Kinerja Ventura Bersama
Profile and Performance Overview of the Joint Ventures

PT Sumbagselenergi Sakti Pewali (SSPewali)

SSPewali merupakan entitas asosiasi PLN NR sebagai IPP PLTU MT Sumbagsel 1 2×150 MW yang didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 dengan persentase kepemilikan saham PLN NR sebesar 10,00%. Sampai dengan akhir tahun 2023, SSPewali masih dalam tahap pengembangan.

SSPewali is an associated entity of PLN NR as 2×150 MW Southern Sumatera IPP CFPP MT which was established on June 6, 2018, with a PLN NR share ownership percentage of 10.00%. As of the end of 2023, SSPewali is still in the development stage.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
KYK Building, Jalan Cideng Barat No. 32-33,
Jakarta Pusat

Alamat Unit UnitAddress
Kec. Semidang Aji, Kab. Ogan Komering Ulu,
Sumatera Selatan

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)
Financial Performance in 2023-2025 (Rp billion)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Audited)*
Jumlah Aset Total Assets	3.480,81	5.826,45	**6.330,23**
Pendapatan Usaha Revenue	-	0,00	**1.205,57**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	(24,39)	(2,48)	**(23.25)**

PT Rekind Daya Mamuju (RDM)

REKIND DAYA MAMUJU

RDM merupakan entitas ventura bersama dari PLN NPC dengan persentase kepemilikan saham sebesar 10,00%. RDM didirikan pada tanggal 21 Februari 2013 dengan bidang usaha sebagai pengelola PLTU Mamuju 2×25 MW yang telah COD sejak tanggal 19 September 2018.

RDM is a joint venture entity from PLN NPC with a share ownership percentage of 10.00%. RDM was established on February 21, 2013, with the business sector as manager of 2×25 MW Mamuju CFPP which has been COD since September 19, 2018.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
Gedung Nucira Lt. 4, Jl. MT. Haryono Kav 27
Jakarta Selatan, Jakarta 10230
(+62 21) 8378 9152 / 8378 5961
(+62 21) 8307 578
info@rdm.co.id
www.rdm.co.id

Alamat Kantor PLTU Mamuju
Mamuju CFPP Office Address
Dusun Talaba, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku,
Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (USD)
Financial Performance in 2023-2025 (USD)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Unaudited)*
Jumlah Aset Total Assets	110.450.371	103.678.208	**93.990.243**
Pendapatan Usaha Revenue	17.498.324	12.010.463	**1.723.144**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	(4.746.418)	(5.645.877)	**(13.268.671)**

PT Shenhua Guo Hua Pembangkitan Jawa Bali (SGPJB)

SGPJB merupakan entitas ventura bersama PJBI yang didirikan pada tanggal 13 Januari 2016 dengan persentase kepemilikan saham oleh PJBI sebesar 30,00%. Bidang usaha SGPJB adalah pengelola PLTU yaitu IPP PLTU Jawa-7 2×1000 MW yang telah COD sejak tahun 2019.

SGPJB is a joint venture entity with PLN NR which was established on January 13, 2016, with a share ownership percentage of PLN NR of 30.00%. SGPJB has business line in managing CFPP, namely 2×1000 MW IPP Java-7 CFPP which has been COD since 2019.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
APL Tower Lt. 39,
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat

Alamat Unit Unit Address
Kramatwatu, Kabupaten Serang,
Banten

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (USD)
Financial Performance in 2023-2025 (USD)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Audited)*
Jumlah Aset Total Assets	2.181.071.520	2.081.374.672	**2.044.055.860**
Pendapatan Usaha Revenue	658.103.051	673.330.696	**638.034.433**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	131.254.736	143.252.525	**135.709.370**

PT Guo Hua Taidian Pembangkitan Jawa Bali (GTPJB)

GHPJB merupakan entitas ventura bersama PLN NR sebagai Jasa O&M Pembangkit PLTU Jawa 7 2×1000 MW yang didirikan pada tanggal 23 September 2016 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NR sebesar 30,00%.

GHPJB is a joint venture entity with PLN NR as an O&M Service for the 2×1000 MW Java 7 CFPP which was established on September 23, 2016, with a percentage of share ownership by PLN NR of 30.00%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
APL Tower Lt. 39,
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat

Alamat Unit Unit Address
Cilegon, Banten

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (USD)
Financial Performance in 2023-2025 (USD)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Audited)*
Jumlah Aset Total Assets	2.689.171	2.285.335	**2.272.788**
Pendapatan Usaha Revenue	12.439.864	10.818.657	**9.613.367**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	72.956	79.082	**41.676**

PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PMSE)

PMSE merupakan entitas ventura bersama PLN NR sebagai IPP PLTS Cirata 145 MW yang didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan persentase kepemilikan saham PLN NR sebesar 51,00% yang telah COD sejak tanggal 13 November 2023.

PMSE is a joint venture entity with PLN NR as capacity of 145 MWac or equivalent to 192 MWp IPP Cirata SPP which was established on July 7, 2020, with a PLN NR share ownership percentage of 51.00% which has been COD since November 13, 2023.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
Menara Bidakara 2 Lt. 8
Jl. Jendral Gatot Subroto, Kav 71-73 Jakarta Selatan
(+62 21) 8370 8760

Alamat Unit Unit Address
Waduk Cirata, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (USD)
Financial Performance in 2023-2025 (USD)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Audited)*
Jumlah Aset Total Assets	141.078.402	161.026.514	**155.949.453**
Pendapatan Usaha Revenue	88.360.229	29.842.568	**14.486.359**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	5.154.260	5.414.144	**3.486.568**

PT North Sumatera Hulu Energy (NSHE)

NSHE merupakan ventura bersama PLN NR sebagai IPP PLTA Batang Toru 4×125 MW yang didirikan pada tanggal 30 April 2008 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NR sebesar 25,00%. Sampai dengan akhir tahun 2023, NSHE sedang dalam tahap pengembangan.

NSHE is a joint venture with PLN NR as 4×125 MW IPP Batang Toru HPP which was established on April 30, 2008, with a percentage of share ownership by PLN NR of 25.00%. As of the end of 2024, NSHE is in the development stage.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
Jl. Darmawangsa VII No. 7, Pulo,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Alamat Unit Unit Address
Kabupaten Tapanuli Selatan,
Provinsi Sumatera Utara

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (USD)
Financial Performance in 2023-2025 (USD)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Unaudited)*
Jumlah Aset Total Assets	949.942.226	1.333.854.663	**1.668.815.549**
Pendapatan Usaha Revenue	286.615.583	396.926.524	**324.158.534**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	36.374.785	53.276.007	**76.294.870**

PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE)

NSSE merupakan ventura bersama PLN NR sebagai IPP PLTS IKN 50 MW yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2023 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NR sebesar 51,00%, yang telah COD sejak tanggal 28 Desember 2024.

NSSE is a joint venture with PLN NR as the IPP of the 50 MW IKN solar power plant which was established on December 21, 2023 with a share ownership percentage by PLN NR of 51.00% which has been COD since December 28, 2024.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
18 Office Park, 19th Floor
Jl. TB Simatupang, No. 18, Jakarta Selatan 12520

Alamat Unit Unit Address
Ibukota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (USD)
Financial Performance in 2023-2025 (USD)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Audited)*
Jumlah Aset Total Assets	-	78.203.799	**71.533.074**
Pendapatan Usaha Revenue	-	71.608	**9.049.559**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	-	-28.900	**2.063.098**

PT Nusantara Tembesi Baru Energi (NTBE)

NTBE merupakan ventura bersama PLN NR sebagai IPP PLTS Tembesi 46 MW yang didirikan pada tanggal 4 April 2024 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NR sebesar 51,00%. Sampai dengan akhir tahun 2024, NTBE sedang dalam tahap pengembangan.

NTBE is a joint venture with PLN NR as the 46 MW Tembesi SPP IPP which was established on April 4, 2024, with a 51.00% share ownership percentage by PLN NR. Until the end of 2024, NTBE was in the development stage.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
Jalan Trans Barelang, Ruko Aviari Residence
Blok B3 No. 24, Batam, Kepulauan Riau

Alamat Unit Unit Address
Waduk Trembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam,
Kepulauan Riau

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (Rp miliar)
Financial Performance in 2023-2025 (Rp billion)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Audited)*
Jumlah Aset Total Assets	-	193,78	**290,03**
Pendapatan Usaha Revenue	-	0,00	**0,00**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	-	(0,63)	**(0,65)**

PT Nusantara Guodian Karangkates Indonesia (NGKI)

NGKI merupakan ventura bersama PLN NR sebagai IPP PLTS Karangkates 100 MW yang didirikan pada tanggal 20 Desember 2024 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NR sebesar 51,00%. Sampai dengan akhir tahun 2024, NGKI sedang dalam tahap pengembangan.

NGKI is a joint venture with PLN NR as the IPP of the 100 MW Karangkates SPP, which was established on December 20, 2024, with a 51.00% share ownership by PLN NR. As of the end of 2024, NGKI was in the development stage.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address
18 Office Park, 19th Floor
Jl. TB Simatupang, No. 18, Jakarta Selatan 12520

Alamat Unit Unit Address
Bendungan Sutami, Kabupaten Malang,
Jawa Timur

Kinerja Keuangan Tahun 2023-2025 (USD)
Financial Performance in 2023-2025 (USD)

Uraian Description	2023	2024	2025 *(Audited)*
Jumlah Aset Total Assets	-	18.319.995	**19.949.071**
Pendapatan Usaha Revenue	-	0	**8.639.175**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	-	(83.824)	**523.126**

Wilayah Operasional
Operational Area

Total Kapasitas Unit Pembangkit yang Dimiliki PLN NP
Total Capacity of Generation Units Owned by PLN NP

18.304 MW

Regional: Pulau Sumatera
Regional: Sumatera Island

Pembangkit Batubara
Coal Power Plant

1	UP GU Nagan Raya (220 MW)
2	UP GU Tenayan (220 MW)
3	UP GU Bukit Asam (260 MW)
4	PLTU CFPP Tembilahan (14 MW)
5	UP GU Tarahan (200 MW)
6	UP GU Sebalang (200 MW)

Pembangkit Gas dan Non-Batubara
Gas and Non-Coal Power Plant

1	UP GU Arun (498 MW)
2	UP GU Belawan (1.197 MW)
3	UP GU Pandan (139,5 MW)
4	UP GU Pekanbaru (288,3 MW)
5	UP GU Bandar Lampung (208 MW)
6	UP GU Sebalang (21,5 MW)

Regional: Pulau Jawa
Regional: Java Island

Pembangkit Batubara
Coal Power Plant

1	UP GU Indramayu (990 MW)
2	UP GU Rembang (630 MW)
3	UP GU Tj Awar-Awar (700 MW)
4	UP GU Pacitan (630 MW)
5	UP GU Paiton (1.460 MW)

Pembangkit Gas dan Non-Batubara
Gas and Non-Coal Power Plant

1	UP GU Muara Karang (2.177 MW)
2	UP GU Muara Tawar (2.471 MW)
3	UP GU Cirata (1.008 MW)
4	UP GU Gresik (2.222 MW)
5	UP GU Brantas (281,7 MW)

Perusahaan memanfaatkan wilayah operasionalnya secara terintegrasi untuk mendorong akses energi bersih, efisiensi operasional, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

The Company utilizes its operational areas in an integrated manner to promote access to clean energy, operational efficiency, and contributions to sustainable development.

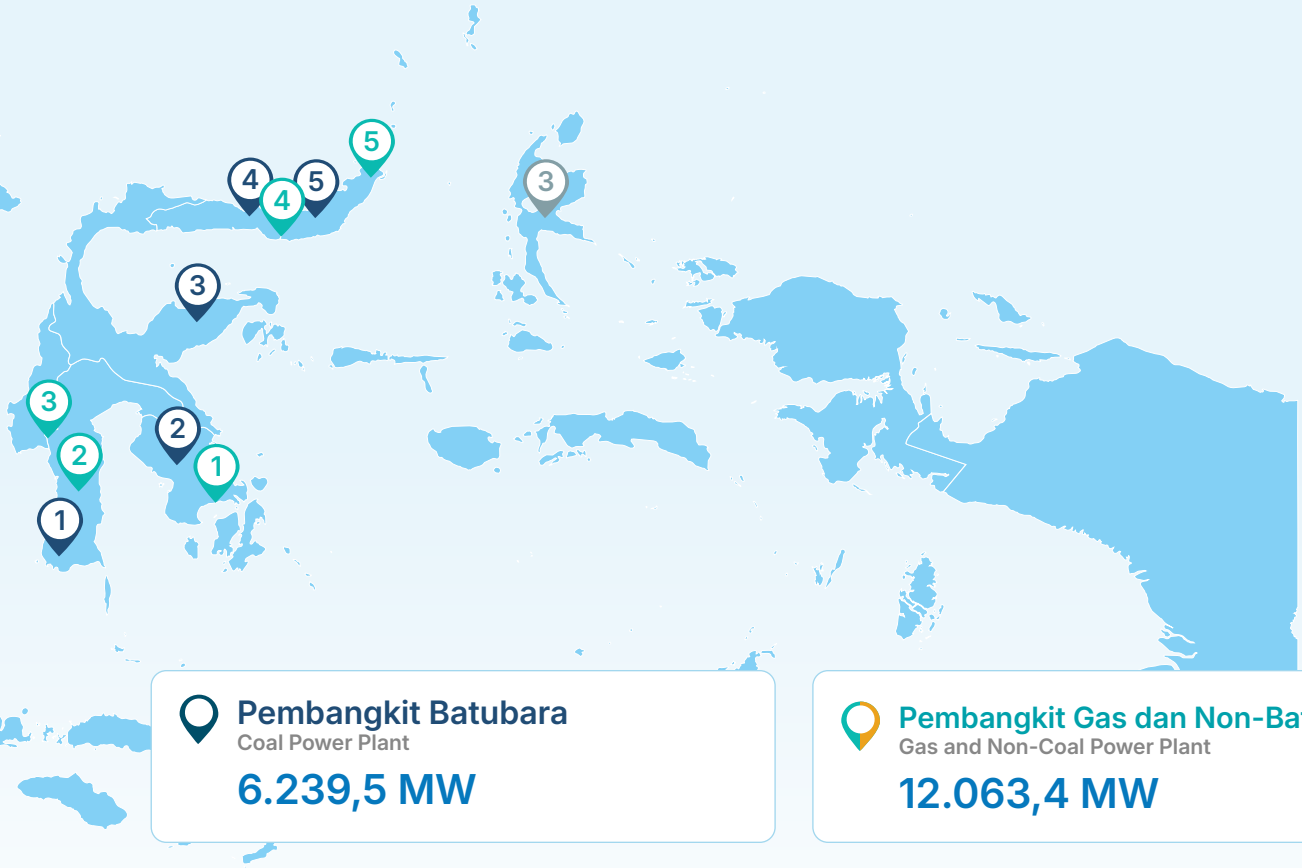

Pembangkit Batubara
Coal Power Plant
6.239,5 MW

Pembangkit Gas dan Non-Batubara
Gas and Non-Coal Power Plant
12.063,4 MW

Regional: Pulau Kalimantan
Regional: Kalimantan Island

Pembangkit Batubara
Coal Power Plant

1	PLTU CFPP Ketapang (20 MW)
2	UP GU Pulang Pisau (120 MW)
3	UP GU Kaltim Teluk (220 MW)

Pembangkit Gas dan Non-Batubara
Gas and Non-Coal Power Plant

1	UP GU Kapuas (189 MW)
2	UP GU Kalselteng (171 MW)
3	UP GU Kaltimra (127 MW)

Regional: Pulau Sulawesi
Regional: Sulawesi Island

Pembangkit Batubara
Coal Power Plant

1	UP GU Punagaya (220 MW)
2	PLTU CFPP Nii Tanasa (24 MW)
3	PLTU CFPP Ampana (6,5 MW)
4	PLTU CFPP Anggrek (55 MW)
5	PLTU CFPP Amurang (50 MW)

Pembangkit Gas dan Non-Batubara
Gas and Non-Coal Power Plant

1	UP GU Kendari (90 MW)
2	UP GU Sengkang (332 MW)
3	UP GU Bakaru (223 MW)
4	UP GU Gorontalo (171 MW)
5	UP GU Minahasa (247 MW)

Pembangkit Riset (Tenaga Surya)
Research Power Plant (Solar)

1	PLTS SPP Cirata (1 MW)

Unit Pendukung
Supporting Units

1	Unit Maintenance, Repair & Overhaul (UMRO)
2	Unit Pelaksana Proyek – 1 Project Implementation Unit - 1
3	Unit Pelaksana Proyek – 2 Project Implementation Unit - 2

Unit Jasa O&M
O&M Services Unit

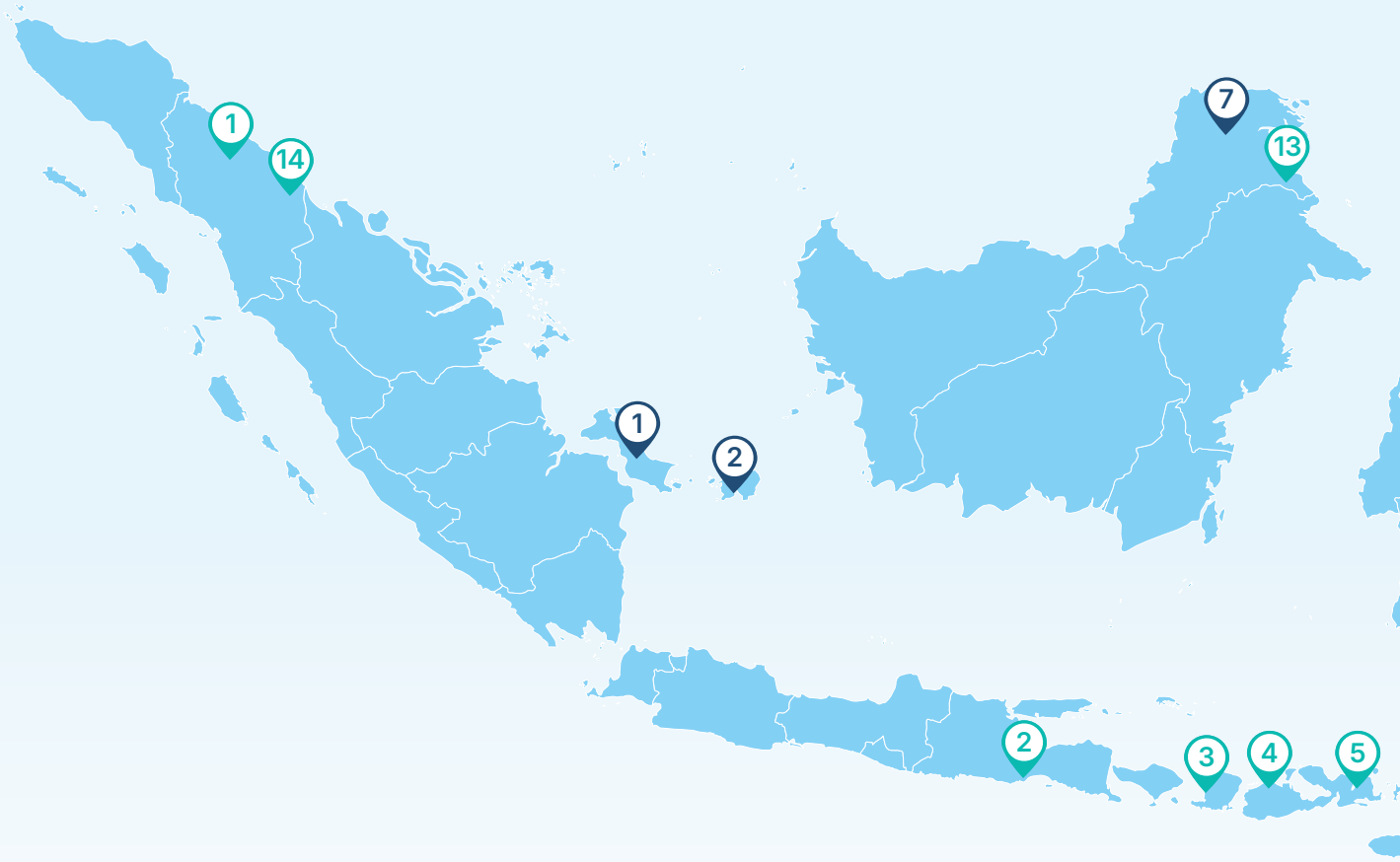

Total Kapasitas Unit Jasa O&M
Total Capacity of O&M Services Unit

4.904 MW

Unit Pembangkit Batubara
Coal Power Plant Unit

171 MW

1	PLTU CFPP Air-Anyir (Bangka) (2×30 MW)
2	PLTU CFPP Suge (Belitung) (2×16,5 MW)
3	PLTU CFPP Kendari #3 (1×10 MW)
4	PLTU CFPP Tidore (2×7 MW)
5	PLTU CFPP Ropa (2×7 MW)
6	PLTU CFPP Bolok (2×16,5 MW)
7	PLTU CFPP Malinau (2×3,5 MW)

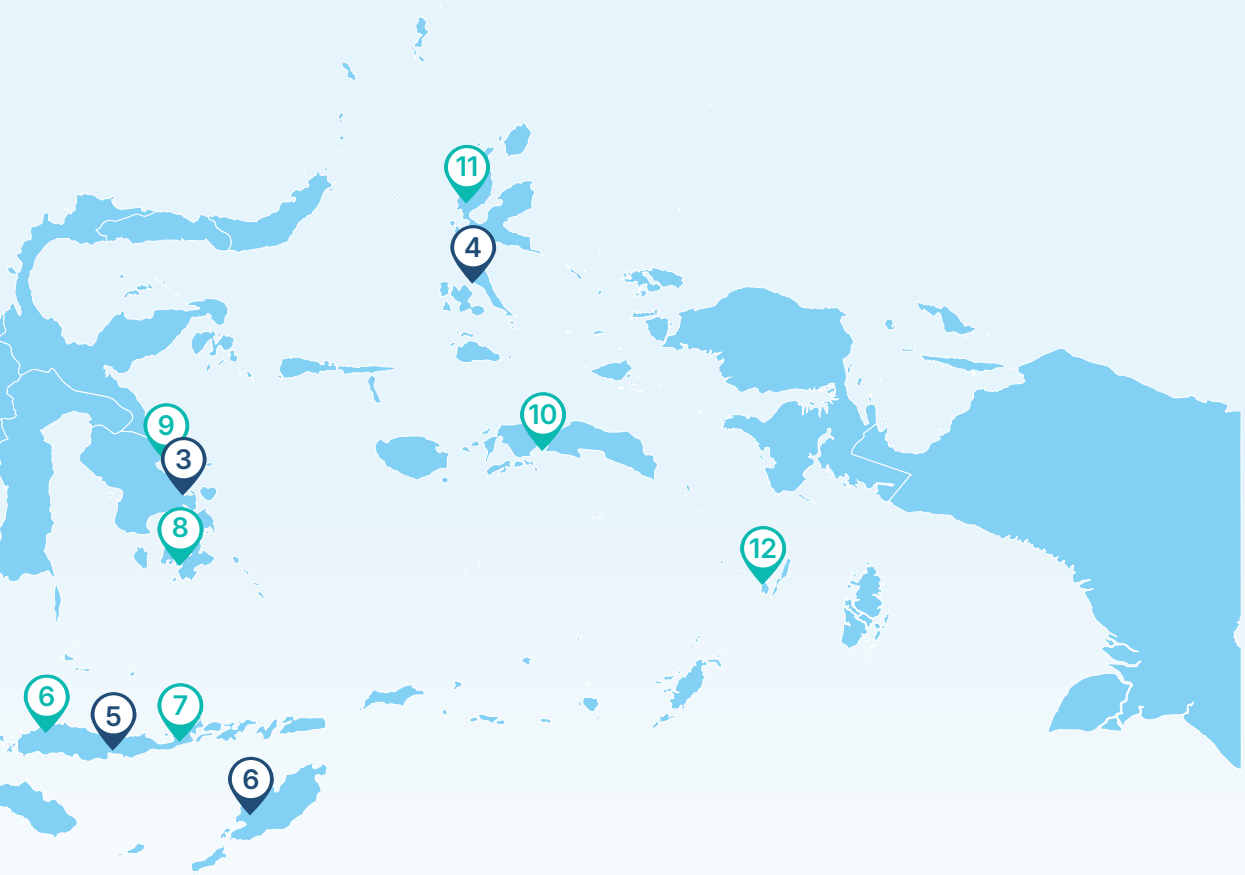

Unit Pembangkit Gas dan Non-Batubara

Gas and Non-Coal Power Plant Unit

659,46 MW

1	PLTA HPP Asahan #3 (2 X 87 MW)
2	PLTA HPP Ampel Gading (2 X 5,23 MW)
3	PLTMG/U GEPP/GSEPP Lombok Peaker (20 MW)
4	PLTMG GEPP Sumbawa (50 MW)
5	PLTMG GEPP Bima (50 MW)
6	PLTMG GEPP Flores (20 MW)
7	PLTMG GEPP Maumere (40 MW)
8	PLTMG GEPP Bau-bau (30 MW)
9	PLTMG GEPP Kendari (50 MW)
10	PLTMG GEPP Seram Peaker (20 MW)
11	PLTMG GEPP Ternate (30 MW)
12	PLTMG GEPP Langgur (20 MW)
13	PLTMG GEPP Tanjung Selor (15 MW)
14	PLTA HPP Peusangan #1&#2 (88 MW)

Kepemilikan Saham IPP/JVC
Share Ownership of IPP/JVC

Beroperasi
Operating

5.205
MW

Konstruksi
Construction

645
MW

Kepemilikan Saham di IPP
Share Ownership of IPP

Beroperasi Operating — **5.205 MW**

1 ASAHAN
PLTA HPP 2×90 MW
(Saham Share PLN NP 36,61%)
*Termasuk Jasa O&M Include O&M Service

2 BANJARSARI
PLTU Batubara CFPP 2×110 MW
(Saham Share PLN NP 29,15%)
*Termasuk Jasa O&M Include O&M Service

3 JAWA 7 (UNIT 1&2), SERANG
PLTU Batubara CFPP 2×1.000 MW
(Saham Share PLN NP 30%)

4 CILACAP
PLTU Batubara CFPP 2×300 MW
Ekspansi Expansion 1: 1×660 MW,
Ekspansi Expansion 2: 1×1.000 MW
(Saham Share PLN NP 49%)

5 MAMUJU
PLTU Batubara CFPP 2×25 MW
(Saham Share PLN NP 10%)

6 PLTS Terapung Floating SPP Cirata
PLTS SPP 145 MWAc/192 MWp
Konsorsium Consortium PLN NR – Masdar
(Saham Share PLN NP 51%)

7 PLTS SPP IKN
PLTS SPP 1×50 MW
(Saham Share PLN NP 51%)

4 SUMBAGSEL 1
PLTU Batubara CFPP 2×150 MW
(Saham Share PLN NP 10%)

Konstruksi
Construction

645 MW

9 BATANG TORU
PLTA HPP 4×127,5 MW
(Saham Share PLN NP 25%)
*Underconstruction
Unit #1: COD 2026
Unit #2: COD 2026
Unit #3: COD 2026
Unit #4: COD 2026

10 PLTS Terapung Floating SPP Tembesi
PLTS SPP 35 MWAc/46 MWp
(Saham Share PLN NP 51%)
*Underconstruction

11 PLTS Terapung Floating SPP Karangkates
PLTS SPP 100 MWAc
(Saham Share PLN NP 51%)
*Underconstruction

Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M
Share Ownership in O&M Company

1.320 MW

1 TANJUNG JATI B#3 DAN AND #4
PLTU Batubara CFPP 2×660 MW
(Jasa O&M dikelola oleh KPJB – JVC PLN NP dengan Komipo)
(O&M Services is managed by KPJB – JVC of PLN NP with Komipo)

Alamat Kantor Pusat, Kantor Strategis dan Unit Usaha

Address of Head Office, Strategic Office, and Business Unit

Alamat Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan

Address of Headquarter and Representative Offices

Kantor Pusat Head Office
Jl. Ketintang Baru No.11
Surabaya 60231, Indonesia
(+62 31) 828 3180 (Hunting)
(+62 31) 828 3183
info@plnnusantarapower.co.id

Kantor Strategis Jakarta
Jakarta Strategic Office
Gedung 18 Office Park, Lantai 2,
TB Simatupang, Kav 18
Jakarta Selatan, Indonesia
perwakilanjkt@plnnusantarapower.co.id

Alamat Unit Usaha

Business Unit Address

Unit Pembangkitan (UP)

Generation Unit (GU)

UP Gresik Gresik GU
Jl. Harun Tohir, Gresik 61112
(+62 31) 3981569, 3984540
(+62 31) 3981568
upgrk@plnnusantarapower.co.id

UP Muara Karang Muara Karang GU
Jl. Raya Pluit Karang Ayu No. 01, Jakarta Utara 14450
(+62 21) 6600054, 6692784
(+62 21) 6692806
upmkr@plnnusantarapower.co.id

UP Muara Tawar Muara Tawar GU
Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1, Desa Segara Jaya,
Kecamatan Taruma Jaya Bekasi, Jawa Barat 17218
(+62 21) 88990052
(+62 21) 88990052
upmtw@plnnusantarapower.co.id

UP Cirata Cirata GU
Desa Cadas Sari, Kecamatan Tegal Waru,
Plered Purwakarta 41162
(+62 264) 270840, 270928
(+62 264) 270859
upcrt@plnnusantarapower.co.id

UP Brantas Brantas GU
Jl. Basuki Rakhmad No. 271, Karangkates
Sumberpucung, Malang 65165
(+62 341) 385545, 385546
(+62 341) 385462
upbrs@plnnusantarapower.co.id

UP Paiton Paiton GU
Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Kecamatan
Paiton, Kabupaten Probolinggo 67291
(+62 -335) 7718059
(+62 335) 771810
upptn@plnnusantarapower.co.id

UP Rembang Rembang GU
Jalan Raya Semarang-Surabaya Km. 130,
Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang 59272
(+62 295) 4552792, (0295) 4552791
(+62 295) 4552791
uprb@plnnusantarapower.co.id

UP Indramayu Indramayu GU
Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra,
Kabupaten Indramayu 45257
(+62 234) 5613236
(+62 234) 5613236
upid@plnnusantarapower.co.id

UP Pacitan Pacitan GU
Jl. Raya Pacitan - Trenggalek KM. 55, Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan
(+62 357) 5173444
(+62 357) 5156698
uppc@plnnusantarapower.co.id

UP Tanjung Awar-awar Tanjung Awar-awar GU
Jl. Tanjung Awar-awar, Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban 62352, Jawa Timur
(+62 356) 320320
(+62 356) 329090
upta@plnnusantarapower.co.id

UP Arun Arun GU
Jl. Medan-Banda Aceh Gate 5.3, Desa Meuria Paloh Kec. Muara Satu Lhokseumawe, Aceh
(+62 645) 8052555
upar@plnnusantarapower.co.id
sekretariat.pjbarun@gmail.com

UP Tenayan Tenayan GU
Simpang Badak, Jl. Ringroad 70 RT 4 RW 2, Kel. Industri Tenayan, Kec.Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau 28285
(+62 811) 7085777/ 7083777
upty@plnnusantarapower.co.id
secretariat.pjbtenayan@gmail.com

UP Teluk Balikpapan (Kaltim Teluk)
Teluk Balikpapan (Kaltim Teluk) GU
UP Jl. PLTU Nomor 1 Kawasan Industri Karangriau KM.13, Kel. Karangriau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
(+62 542) 8530818
upkt@plnnusantarapower.co.id
sekumujktbpn@gmail.com

UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU
Jl. Trans kalimantan, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau
(+62 513) 2027 007
upps@plnnusantarapower.co.id

UP Sengkang Sengkang GU
Jalan PLTGU Sengkang, Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, 90971
(0485) 22228
upsg@plnnusantarapower.co.id

UP Sambelia Sambelia GU
Labuhan Pandan, Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 83656

PLTU Kendari (Nii Tanasa) 1-2
Kendari (Nii Tanasa) 1-2 CFPP
Desa Nii Tanasa, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara 93126

PLTU Ketapang Ketapang CFPP
Suka Bangun Dalam, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat 78813

PLTU Anggrek Anggrek CFPP
Ilangata, Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo 96525

PLTU Amurang Amurang CFPP
Jl. Raya Trans Sulawesi, Amurang – Tawang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95954

PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP
Sungai Perak, Tembilahan
Kabupaten Indragiri Hilir

PLTU Ampana Ampana CFPP
Jl. Trans Sulawesi, Sabo, Ampana Tete
Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah

UP Nagan Raya Nagan Raya GU
Jl. Meulaboh - Tapak Tuan Km. 8,5
Desa Suak Puntong, Nagan Raya 23660
upnr@plnnusantarapower.co.id

UP Bukit Asam Bukit Asam GU
Jl. lingga raya, Lawang Kidul Sumatera Selatan, Tanjungenim, Sumatera Selatan, Indonesia 31711
upba@plnnusantarapower.co.id

UP Sebalang Sebalang GU
Jl.Lintas Sumatera Km.22 Dusun Sebalang Desa Tarahan Kec.Katibung Kab.Lampung Selatan 35452
upsb@plnnusantarapower.co.id

UP Punagaya Punagaya GU
Desa Punagaya, Kec. Bangkala,
Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan
(0411) 1231231
uppy@plnnusantarapower.co.id

UP Tarahan Tarahan GU
Jalan Lintas Sumatera Km. 15, Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung, Lampung Selatan 35214
(0721) 341815
upth@plnnusantarapower.co.id

UP Bakaru Bakaru GU
Jl. H.M. Arsyad No.21, Bukit Indah, Kec. Soreang,
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131
(0421) 25580
upbk@plnnusantarapower.co.id

UP Belawan Belawan GU
Jl. Pulau Sicanang No.1, Belawan Pulau Sicanang
Kota Belawan, Medan, Sumatera Utara 20414
upbw@plnnusantarapower.co.id

UP Pekanbaru Pekanbaru GU
Jl. Tanjung Datuk No.74, Pesisir, Kec. Lima Puluh,
Kota Pekanbaru, Riau 28155
(0761) 41855
uppr@plnnusantarapower.co.id

UP Kalselteng Kalselteng GU
Jl. Ahmad Yani Km.4.5, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238
0511-3250031
uppl@plnnusantarapower.co.id

UP Kapuas Kapuas GU
JL. Adi Sucipto No. 2, Kelurahan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
upks@plnnusantarapower.co.id

UP Kaltimra Kaltimra GU
Jl. PLTU No.1, Kel. Telukwaru, Kariangau, Kec. Balikpapan Bar., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76134
(0542) 8531066
uptr@plnnusantarapower.co.id

UP Minahasa Minahasa GU
Jl. B.W. Lapian, Luaan, Tondano Timur,
Kab. Minahasa, Sulawesi Utara
upmh@plnnusantarapower.co.id

UP Kendari Kendari GU
Jl. Chairil Anwar No.02, Mataiwoi, Kec. Wua-Wua,
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93118
upkd@plnnusantarapower.co.id

UP Pandan Pandan GU
Jl. Prof. M. Hajairin Sibuluan Terpadu, Tukka Pandan,
Tapanuli Tengah, Tapanuli, Sumatera Utara 22614
uppd@plnnusantarapower.co.id

UP Gorontalo Gorontalo GU
Jl. Prof. DR. Jhon Aryo Katili, Paguyaman,
Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128
upgt@plnnusantarapower.co.id

UP Bandar Lampung Bandar Lampung GU
Jl Raden Gunawan II No 4, Rajabasa
Bandar Lampung 35144
(0721) 704384, 781156
(0721) 708436
upbl@plnnusantarapower.co.id

Unit Pendukung
Supporting Unit

Unit *Maintenance Repair & Overhaul* (UMRO)
Maintenance Repair & Overhaul Unit (UMRO)
Jl. Raya Pluit Karang Ayu No. 01, Jakarta Utara 14450
(+62 21) 6620594, 6620595
(+62 21) 6613190
umro@plnnusantarapower.co.id

Unit Pelaksana Proyek – 1
Project Implementation Unit-1
Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1, Desa Segara Jaya,
Kec. Taruma Jaya Bekasi, Jawa Barat 17218

Unit Pelaksana Proyek – 2
Project Implementation Unit-2
Jl. Iyantoa RT.01 RW.01 Desa Geltoli Kec. Maba,
Kab. Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara 97862

Unit Jasa *Operation & Maintenance* (O&M)
Operation & Maintenance (O&M) Service Unit

PLTU Air Anyir Air Anyir CFPP
Jl. Lintas Timur, Desa Air Anyir,
Kec. Merawang, Kab. Bangka,
Kepulauan Bangka Belitung 33172

PLTU Suge Suge CFPP
Desa Suge, Kec. Manggar/Badau,
Kab. Belitung Timur,
Kepulauan Bangka Belitung 33512

PLTU Kendari Kendari CFPP
Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara,
Kab. Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara 93891

PLTU Tidore Tidore CFPP
Kel. Rum Balibunga, Kec. Tidore Utara,
Kota Tidore Kepulauan,
Maluku Utara 97812

PLTU Ropa Ropa CFPP
Desa Ropa, Kec. Ende, Kab. Ende,
Nusa Tenggara Timur 86318

PLTU Bolok Bolok CFPP
Desa Bolok, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang,
Nusa Tenggara Timur 85351

PLTU Malinau Malinau CFPP
Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau,
Kalimantan Utara 77554

PLTA Asahan Asahan HPP
Desa Paritohan, Kec. Pintu Pohan Meranti,
Kab. Toba, Sumatera Utara 22384

PLTA Ampel Gading Ampel Gading HPP
Desa Sidorenggo, Kec. Ampelgading,
Kab. Malang, Jawa Timur 65183

PLTMG Lombok Peaker Lombok Peaker GEPP
Desa Taman Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat 83363

PLTMG Sumbawa Sumbawa GEPP
Labuhan Badas, Kec. Labuhan Badas,
Kab. Sumbawa, NTB 84316

PLTMG Bima Bima GEPP
Desa Belo, Kec. Palibelo,
Kab. Bima, NTB 84181

PLTMG Flores Flores GEPP
Desa Kolisia, Kab. Sikka,
Nusa Tenggara Timur 86111

PLTMG Maumere Maumere GEPP
Kel. Wuring, Kec. Alok Barat, Kab. Sikka,
Nusa Tenggara Timur 86115

PLTMG Bau-Bau Bau-Bau GEPP
Kel. Liabuku, Kec. Bungi, Kota Baubau,
Sulawesi Tenggara 93724

PLTMG Kendari Kendari GEPP
Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara 93891

PLTMG Seram Peaker Seram Peaker GEPP
Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah,
Maluku 97511

PLTMG Ternate Ternate GEPP
Kel. Kastela, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate,
Maluku Utara 97751

PLTMG Langgur Langgur GEPP
Langgur, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara,
Maluku 97611

PLTMG Tanjung Selor Tanjung Selor GEPP
Jl. Poros Bulungan, Tanjung Selor, Kab. Bulungan,
Kalimantan Utara 77212

PLTA Peusangan #1 & #2 Peusangan #1 & #2 HPP
Desa Rembele, Kab. Bener Meriah & Aceh Tengah,
Aceh 24581

Kepemilikan Saham di *Independent Power Producer* (IPP)/JVC
Share Ownership in the Independent Power Producer (IPP)/JVC

PLTA Asahan Asahan HPP
Komplek PT Bajradaya Sentranusa Simangkuk,
Desa Tangga Batu, Kec. Permaksian, Porse,
Kab. Toba Samosir, Sulawesi Utara

PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP
Jl. Lintas Tengah Sumatera, Desa Sirah Pulau &
Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kab.
Lahat, Sumatera Selatan

PLTU Jawa 7 Jawa 7 CFPP
Kantor Proyek PLTU Jawa 7
Jl. Raya Bojonegara, Desa Terate,
Kec. Kramatwatu Serang, Banten 42161

PLTU Mamuju Mamuju CFPP
Belang-Belang, Kalukku, Kabupaten Mamuju,
Sulawesi Barat 91561

PLTA Batang Toru Batang Toru HPP
Desa Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Provinsi Sumatera Utara

PLTU MT Sumbagsel 1 MT Sumbagsel 1 CFPP
Keban Agung, Semidang Aji, Ogan Komering Ulu
Regency, South Sumatra 32156

PLTU Cilacap Cilacap CFPP
Jl. Lingkar Timur Karang Kandri, Kec.Kesugihan, Cilacap
(+62 282) 538863
(+62 282) 538863

PLTS IKN IKN SPP
Desa Pemaluan, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

PLTS Terapung Karangkates
Karangkates Floating SPP
Waduk Karangkates, Desa Sumberpucung Kabupaten Malang Jawa Timur

PLTS Terapung Cirata Cirata Floating SPP
Desa Cadas Sari, Kec.Tegal Waru, Plered, Purwakarta 41162
(+62 264) 270840, 270928
(+62 264) 270859

PLTS Terapung Tembesi Tembesi Floating SPP
Jl. Trans Barelang, Ruko Aviari Residence Blok B3 no 24 Batam, Kep. Riau

Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M
Share Ownership in the O&M Company

Tanjung Jati B #3 dan #4
Tanjung Jati B #3 and #4
Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Sekuping, Tubanan, Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59453
(+62 291) 772121
(+62 291) 4270601

Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

Perusahaan tergabung dalam beberapa organisasi atau asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional. Daftar keanggotaan organisasi atau asosiasi PLN NP sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The Company is part of several industrial organizations or associations both on national and international scale. The list of PLN NP organizations or associations membership until the end of 2025 is as follows:

Tabel Keanggotaan Asosiasi
Table of Association Membership

Nama Asosiasi/Organisasi Name of Association/ Organization	Deskripsi Organisasi Description of Organization	Posisi Perusahaan dalam Organisasi Company Position in the Organization	Lingkup Scope
The Heads of ASEAN Power Utilities (HAPUA)	Organisasi yang terdiri dari Perusahaan Pemasok/ Penyedia Energi Listrik di negara-negara ASEAN yang terdiri dari 5 *Working Groups*. An organization consisting of Electrical Energy Supplier/ Provider Companies in ASEAN countries consisting of five Working Groups.	Anggota Member	Internasional International
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Indonesian Electricity Society	Organisasi *stakeholder* yang bergerak dalam kegiatan pembentukan forum untuk menghasilkan pemikiran guna menumbuh-kembangkan industri ketenagalistrikan di Indonesia, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. A stakeholder organization that facilitates forums and collaborative platforms to generate strategic insights and recommendations for the advancement of Indonesia's electricity industry at both the national and international levels.	Anggota Member	Nasional National
Asosiasi Lingkungan Industri Ketenagalistrikan Nasional (ALLIN) National Association of the Electricity Industry (ALLIN)	Organisasi yang didirikan pada 14 September 2015 untuk menghimpun praktisi lingkungan di sektor Industri Listrik. An organisation established on 14 September 2015 to bring together environmental practitioners in the electricity sector.	Pengurus dan Anggota Management and Member	Nasional National
Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal Internal Audit Unit Communication Forum	FKSPI merupakan Asosiasi Satuan Pengawasan Intern dan atau Audit Internal BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah dan Institusi Swasta yang bersifat profesional, independen dan non politik FKSPI is an association of internal oversight and/ or internal audit units within state-owned enterprises (BUMN), regionally-owned enterprises (BUMD), government agencies and private institutions; it is professional, independent and non-political.	Anggota Member	Nasional National

Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professions

Sepanjang tahun 2025, PLN NP menggunakan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) serta lembaga dan/atau profesi penunjang lainnya sebagai berikut:

Throughout 2025, PLN NP used services of public accountants (PA) and public accounting firms (PAF) as well as other supporting institutions and/or professions as follows:

Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Kantor Akuntan Publik KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
Akuntan Publik Public Accountant	Toto Harsono, S.E., CPA (No. AP.1122)
Alamat Address	WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - Indonesia (+62 21) 5099 2901/ 31192 901 (+62 21) 5290 5555/ 5290 5050 www.pwc.com/id
Periode Penugasan Assignment Period	- Ke-6 untuk Kantor Akuntan Publik 6th year for Public Accounting Firm - Ke-1 untuk Akuntan Publik 1st year for Public Accountant
Lingkup Jasa Audit Scope of Audit Services	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025 Audit of the 2025 Consolidated Financial Statements
Biaya Audit Audit Fees	Rp4.871.353.000
Jasa Non-Audit Non-Audit Services	-
Biaya Non-Audit Non-Audit Fees	-

Notaris
Notary

Shahreza Annaz, S.H.,	Jl. Hang Lekir IX No.1, Kebayoran Baru, Jakarta 12120 (+62 21) 7221 077 (+62 21) 7233 855

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Public Appraisal Services Office (PASO)

KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan Kindo Office Square A5	Jalan Duren Tiga Raya No. 101 Jakarta Selatan 12760 (+62 21) 7918 4336 (+62 21) 7918 4287 pusat@mbpru.com https://kjpp-mbpru.com/

Konsultan Bisnis
Business Consultant

KPMG Siddharta Advisory	35th Floor Wisma GKBI 28, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10210, Indonesia (+62 21) 5742 333/ 2888
Trisakti Sustainability Center (TSC) Universitas Trisakti	Universitas Trisakti, Kampus A, Gedung I Lantai 4 Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat (+62 21) 566 3232 ext. 344-345
PT ITS Tekno Sains	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Gedung Research Center Jl. Teknik Kimia Kampus Lt 2, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111 (+62) 811-3201-1561
PT LAPI ITB	Institut Teknologi Bandung, Gedung B Jl Ganesha No. 15-B, Bandung – Indonesia, 40132 (+62 22) 2534178 Fax. +62 22 2534199
PT Boston Consulting Indonesia	Sampoerna Strategic Square, 19th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, Indonesia (+62 21) 3006 2888 Fax. +62 21 3006 2889

Jasa Penyedia Regulasi
Regulatory Provider Services

Hukum Online	AD Premier 9th floor, Jl. TB Simatupang No.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia (+62 21) 22708910 (+62 21) 22708909

Kantor Konsultan Hukum
Legal Consultant Firm

Nah'R Murdono Law Office	District 8 – Prosperity Tower 20th Floor, Unit E, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 (+62 21) 5030 0817
UMBRA Partnership	Telkom Landmark Tower, Tower 2, 49th Floor, Jakarta (+62 21) 5082 0999
Watson Farley & Williams	88 Market Street, #31-05, CapitaSpring 048948, Singapore (+65) 6532 5335
Maramis, Purba, Santi, Singara Law Firm (MAPS Law Firm)	Sequis Center 7th Floor Unit 706, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia (+62 21) 5223252
FeriSamad Law Firm	Splendor Tower, Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 2-3, Soho, Pancoran, Jakarta 12870 managing@ferisamadlaw.com
Alfonso Law Firm	The H Tower, 15th Floor, Suite G, Jl. H.R Rasuna Said Kav.20, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 021 29533 215 021 29533 216

Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on the Company's Website

Melalui *website* perusahaan, PLN Nusantara Power berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terkini, dan transparan untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Through the website, PLN Nusantara Power is committed to providing accurate, up-to-date, and transparent information to support good corporate governance.

Situs *web* perusahaan berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Situs web memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan informasi secara cepat kepada *stakeholders* seperti karyawan, pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Informasi yang diberikan bisa mencakup berita perusahaan, pembaruan produk ketenagalistrikan, dan pengumuman lainnya. Situs *web* resmi PLN NP menyajikan berbagai informasi terkini, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik.

A company website serves as facility for effectively conveying information to various parties, both internal and external. Websites enable companies to quickly communicate information to stakeholders such as employees, customers, investors, and business partners. The information provided may include news, electricity product updates, and other announcements by the company. PLN NP official website presents a variety of up-to-date, accurate, and accountable information in line with the principles of transparency and public disclosure.

Situs *web* resmi PLN NP dapat diakses pada tautan www.plnnusantarapower.co.id yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta memuat informasi antara lain sebagai berikut:

1. **Informasi terkait Profil Perusahaan**, memuat informasi terkait dengan Tentang Kami, Perjalanan PLN NP, Organisasi, Direksi-Komisaris dan Komite, Lini Bisnis, Penghargaan, Sertifikasi, dan Kinerja Operasional.
2. **Informasi terkait Tata Kelola Perusahaan,** menyajikan berbagai informasi terkait dengan Kebijakan Tata Kelola, Penilaian Tata Kelola Perusahaan, Budaya AKHLAK, Informasi RUPS, Manajemen Risiko dan *Risk Appetite*, *Whistleblowing System* (WBS), Anti Penyuapan, serta K3 & CSR.
3. **Informasi Pengadaan**, menu ini berisikan pilihan informasi terkait dengan Pedoman Pengadaan, Info Pendaftaran CSMS, Pendaftaran CSMS, *E-Procurement* dan Registrasi Daftar Penyedia Perusahaan (DPP).
4. **Informasi terkait Investor**, menyajikan berbagai informasi terkait dengan PLN NP *Carbon Trading*, *Expression Of Interest* (EoI), Laporan Tahunan, Laporan Berkelanjutan, Publikasi Posisi Keuangan, Ikhtisar Data Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan, dan Statistik Perusahaan.
5. **Informasi tentang Media**, memuat informasi terkait dengan Majalah PLN NP, Seputar PLN NP, dan *Press Release*.
6. **Informasi tentang Karir**, memuat informasi terkait Peluang Karir dan Rekrutmen.
7. **Informasi terkait Kontak**, menu ini berisikan pilihan informasi terkait dengan Alamat Kami dan *Feedback Sponsorship*.

The official PLN NP website can be accessed at www.plnnusantarapower.co.id, which is available in Indonesian and English and contains the following information:

1. **Information regarding the Company Profile**, including details on About Us, History, Organization, Board of Directors and Commissioners, Committees, Business Lines, Awards, Certifications, and Operational Performance of PLN NP.
2. **Information regarding Corporate Governance**, presenting various details regarding Governance Policies, Corporate Governance Assessments, the AKHLAK Culture, General Shareholders' Meeting (GSM) Information, Risk Management and Risk Appetite, the Whistleblowing System (WBS), Anti-Bribery, as well as Occupational Health and Safety and (OHS) and Corporate Social Responsibility (CSR).
3. **Procurement Information**, containing information related to Procurement Guidelines, CSMS Registration Information, CSMS Registration, E-Procurement, and Company Supplier List (DPP) Registration.
4. **Investor Information**, presenting various information regarding PLN NP Carbon Trading, Expression of Interest (EoI), Annual Reports, Sustainability Reports, Financial Position Publications, Financial Data Summaries, Annual Financial Statements, and Company Statistics.
5. **Media Information**, containing information related to the PLN NP Magazine, About PLN NP, and Press Releases.
6. **Career Information**, containing information related to Career Opportunities and Recruitment.
7. **Contact Information**, containing options related to Our Address and Sponsorship Feedback.

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Overview

04

Sumber Daya Manusia
Human Capital

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis Perusahaan secara optimal dan berkelanjutan. Melalui penerapan manajemen SDM yang terintegrasi, PLN NP berupaya membangun sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan andal sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kinerja serta keberlanjutan usaha Perusahaan.

Effective Human Capital (HC) Management is one of the crucial factors in supporting the achievement of the Company's business goals optimally and sustainably. Through the implementation of integrated HC, PLN NP strives to build competent, professional, and reliable human capital that can provide maximum contributions to the Company's performance improvement and business sustainability.

Fungsi Pengelola Sumber Daya Manusia
Human Capital Management Functions

Pengelolaan SDM di lingkungan PLN NP diatur melalui Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0045.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa-Bali sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0048.P/DIR/2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0045.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa-Bali. Direktorat ini memiliki tanggung jawab dalam mengelola SDM melalui tiga bidang utama, yaitu Bidang Human Capital Strategy, Bidang Human Capital Development, dan Bidang Human Capital Services. Selain itu, Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi juga memiliki kewenangan atas pengelolaan Bidang Health, Safety, Security and Environment, serta Bidang General Affairs yang mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dengan memastikan keselamatan dan kesehatan kerja yang optimal.

Human Capital (HC) management within PLN Nusantara Power is governed by the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power No. 0045.P/019/DIR/2022 concerning the Implementing Regulation on the Organizational Structure and Workforce Formation of the Human Capital Management and Administration Directorate of PT Pembangkitan Jawa-Bali, as most recently amended by the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power No. 0048.P/DIR/2025 concerning the Second Amendment to the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power No. 0045.P/019/DIR/2022. The Directorate is responsible for managing human capital through three primary divisions, namely Human Capital Strategy, Human Capital Development, and Human Capital Services. In addition, the Human Capital Management and Administration Directorate oversees the Health, Safety, Security and Environment (HSSE) Division and the General Affairs Division, which support the sustainability of the Company's operations by ensuring optimal occupational health and safety.

Tata Kelola Sumber Daya Manusia
Human Capital Governance

Dengan adanya kebijakan HSH, pengelolaan SDM di PLN NP mengacu pada Peraturan Direksi No. 0088.P/019/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis *Human Experience Management System* (HXMS) menggantikan Peraturan Direksi No. 009.P/019/DIR/2020 tentang *Human Capital Management System* (HCMS).

Adapun sasaran dari kebijakan HXMS meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tepat Ukuran (*Right Size*)
   a. Strategi dan Tata Kelola Tenaga Kerja;
   b. Manajemen Proses Bisnis;
   c. Manajemen Organisasi;
   d. Manajemen Budaya dan Perubahan; dan
   e. *Employee Value Preposition.*
2. Tepat Kompetensi (*Right Skill*)
   a. Manajemen Sumber Tenaga Kerja;
   b. Manajemen Akuisisi Karyawan;
   c. Manajemen Talenta dan Karyawan; dan
   d. Manajemen Pengembangan Karyawan.
3. Tepat Pembiayaan (*Right Spend*)
   a. Manajemen Kinerja Karyawan;
   b. Manajemen Penghargaan Karyawan;
   c. Manajemen Hubungan Industrial; dan
   d. Manajemen Pemutusan Hubungan Kerja.
4. Tepat Sistem Informasi (*Right System*)
   a. Sistem Informasi Tenaga Kerja; dan
   b. Manajemen Administrasi dan Pelayanan Karyawan.

With the establishment of the HSH policy, Human Capital management at PLN NP refers to Board of Directors Regulation No. 0088.P/019/DIR/2022 concerning the Strategic Policy for the Human Experience Management System (HXMS), which replaces Board of Directors Regulation No. 009.P/019/DIR/2020 regarding the Human Capital Management System (HCMS).

The objectives of the HXMS policy include the following:

1. Right Size
   a. Workforce Strategy and Governance;
   b. Business Process Management;
   c. Organizational Management;
   d. Culture and Change Management; and
   e. Employee Value Proposition.
2. Right Skill
   a. Workforce Resource Management;
   b. Employee Acquisition Management;
   c. Talent and Employee Management; and
   d. Employee Development Management.
3. Right Spend
   a. Employee Performance Management;
   b. Employee Reward Management;
   c. Industrial Relations Management; and
   d. Employment Termination Management.
4. Right System
   a. Workforce Information Systems; and
   b. Employee Administration and Service Management.

Program Strategis Pengelolaan SDM Tahun 2025
Strategic Human Capital Management Programs in 2025

Program Strategis Pengelolaan SDM bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas tenaga kerja guna mendukung pencapaian tujuan Perusahaan tahun berjalan. Untuk tahun 2025, PLN NP menetapkan program strategis sebagai berikut:

1. P100 *Capability Enhancement Program*;
2. Penyiapan *Global Talent* melalui program *COMPACT Pro - Global Expert Program*;

The Strategic Human Capital Management Programs aim to enhance the quality and effectiveness of the workforce in support of achieving the Company's goals for the current year. For 2025, PLN NP established the following strategic programs:

1. P100 Capability Enhancement Program;
2. c Developing Global Talent through the COMPACT Pro - Global Expert Program;

3. Pengkayaan pengembangan karyawan melalui Program *GREEN* yang berfokus pada PLTS dan konstruksi;
4. Optimasi organisasi dan proses bisnis berbasis digital yang fokus pada pengelolaan portofolio aset dan pengembangannya;
5. Penguatan organisasi *project* P100;
6. Penyelarasan sistem SDM dengan sistem di PT PLN (Persero).

3. Enhancing employee development through the GREEN Program, focusing on SPP and construction;
4. Digital-based optimization of organizational and business processes, focusing on asset portfolio management and development;
5. Strengthening the P100 project organization;
6. Alignment of the HC system with the system at PT PLN (Persero).

Program Penguatan SDM Tahun 2025
Human Capital Strengthening Programs in 2025

Program Penguatan SDM Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya penyelarasan organisasi dengan arah pengembangan bisnis Perusahaan. Adapun penguatan organisasi yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. *Cross competency* karyawan dalam mendukung *clean energy* sebagai salah satu sasaran strategis perusahaan melalui Program *Integration Renewable Energy Internship* GREEN;
2. Mitigasi atas hasil survei jajak minat pegawai HSH untuk menentukan *strategic sourcing* dalam kebutuhan pengisian jabatan;
3. Penyusunan *update* dokumen Sistem Kompetensi dan Direktori Kompetensi;
4. Evaluasi realisasi biaya dan produktivitas pegawai.

The 2025 HC Strengthening Program is part of the effort to align the organization with the Company's business development direction. The organizational strengthening conducted includes the following:

1. Employees' cross-competency development to support clean energy as one of the Company's strategic objectives through the GREEN (Integration Renewable Energy Internship) Program;
2. Follow-up actions based on the results of the HSH employee interest survey to determine strategic sourcing strategies for position fulfillment needs.
3. Preparation of updates to the Competency System and Competency Directory documents;
4. Evaluation of actual costs and employee productivity.

Jumlah dan Komposisi SDM
Number and Composition of Human Capital

Jumlah SDM pada tahun 2025 adalah sebanyak 4.954 karyawan. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebanyak 5.077 karyawan. Penurunan jumlah karyawan ini terutama didorong oleh adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, serta pertimbangan aspek produktivitas kepegawaian.

Jumlah karyawan yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini mencerminkan total karyawan PLN NP, sedangkan penyajian pada Laporan Keuangan *Audited* mencakup karyawan PLN NP beserta Anak Perusahaan. Dalam memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia, PLN NP secara berkala melakukan evaluasi terhadap kecukupan SDM melalui proses *manpower planning* guna memastikan setiap posisi dalam organisasi diisi oleh tenaga kerja

The number of HC in 2025 was 4,954 employees. This figure is lower compared to 2024, which had 5,077 employees. The decrease in the number of employees is primarily driven by employee retirements and the Company's efforts to maintain optimal workforce productivity.

The number of employees presented in this Annual Report reflects PLN NP's total employees, while the presentation in the Audited Financial Statements includes employees of PLN NP and its Subsidiaries. In ensuring the effectiveness of human capital management, PLN NP periodically evaluates the adequacy of human capital through the manpower planning process. It aims to ensure that every position in the organization is filled by competent employees

yang kompeten dengan jumlah yang sesuai kebutuhan operasional dan bisnis Perusahaan. Adapun komposisi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang jabatan, kelompok usia, dan jenis kelamin telah diuraikan pada bagian Profil Perusahaan, subbab Profil SDM dalam Laporan Tahunan ini.

in numbers that meet the operational and business needs of the Company. The composition of employees based on education level, position level, age group, and gender has been outlined in the Company Profile section, Human Capital Profile sub-chapter of this Annual Report.

Realisasi Rekrutmen Karyawan
Employee Recruitment Realization

PLN NP melaksanakan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan formasi yang ditetapkan melalui keputusan Direksi. Proses ini didasarkan pada analisis kebutuhan SDM guna memperkuat kompetensi bisnis serta mendukung pencapaian target kinerja dan pendapatan Perusahaan. Rekrutmen dilaksanakan melalui sistem terpusat di lingkup PLN *Group* yang dikelola oleh PT PLN (Persero) dengan proses seleksi terbuka bagi masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, maupun latar belakang lainnya.

PLN NP conducts recruitment to meet labor needs according to the formation set by the Board of Directors' decision. This process is based on an analysis of HC's needs to strengthen business competencies and support the achievement of the Company's performance and revenue targets. Recruitment is conducted through a centralized system within the PLN Group, managed by PT PLN (Persero), with an open selection process for the public, without discrimination based on ethnicity, religion, race, gender, or any other background.

Proses rekrutmen terdiri dari lima tahap, yaitu: (1) seleksi administrasi, (2) seleksi akademik dan kemampuan umum, (3) seleksi psikologis, (4) seleksi kesehatan, dan (5) seleksi wawancara. Semua tahapan rekrutmen ini dikelola langsung oleh PT PLN (Persero). PLN NP, sebagai *sub holding* dari PT PLN (Persero), mengusulkan kebutuhan tenaga kerja kepada PT PLN (Persero), dan setelah proses seleksi selesai dan peserta yang lolos ditetapkan oleh PT PLN (Persero), selanjutnya proses dilanjutkan oleh PLN NP untuk pelaksanaan program pelatihan atau *On the Job Training* (OJT).

The recruitment process consists of five stages, namely: (1) administrative selection, (2) academic and general ability selection, (3) psychological selection, (4) health selection, and (5) interview selection. All stages of this recruitment process are managed directly by PT PLN (Persero). PLN NP, as a sub-holding of PT PLN (Persero), proposes workforce needs to PT PLN (Persero). After the selection process is completed and the successful participants are determined by PT PLN (Persero), it is resumed by PLN NP to execute the training program or On-the-Job Training (OJT).

Pada tahun 2025, PLN NP menerima karyawan baru sebanyak 1 orang karyawan dengan tingkat rekrutmen sebesar 0,02%.

In 2025, PLN NP hired one new employee, with a recruitment rate of 0.02%.

Tingkat Perputaran Karyawan
Employee Turnover Rate

PLN NP mencatat terdapat sebanyak 119 karyawan meninggalkan Perusahaan, dengan rincian 2 orang karyawan mengundurkan diri, 107 karyawan pensiun dan 10 karyawan meninggal dunia, sehingga tingkat perputaran karyawan (*turnover*) menjadi sebesar 2,38%.

PLN NP recorded that a total of 119 employees left the Company, with details of two employees resigning, 107 employees retiring, and 10 employees passing away, resulting in an employee turnover rate of 2.38%.

Pelatihan Karyawan
Employee Training

Pada tahun 2025, total jam pelatihan yang diberikan mencapai 279.965 jam, dengan rata-rata jam pelatihan sebesar 56,51 jam per karyawan. Pendidikan dan pelatihan SDM secara lebih lengkap telah diuraikan sebelumnya pada bagian Profil Perusahaan serta dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan.

In 2025, the total training hours provided reached 279,965 hours, with an average training time of 56.51 hours per employee. HC education and training have been more comprehensively outlined previously in the Company Profile section as well as in the Company's Sustainability Report.

Sistem Manajemen Kinerja SDM
Human Capital Performance Management System

Sistem Manajemen Kinerja Karyawan (SIMKK) PLN NP menggunakan sistem online yang terbagi dalam beberapa periode untuk memastikan terjadinya komunikasi, diskusi, dan bimbingan yang efektif dari atasan kepada para staf. Pelaksanaan SIMKK mengacu pada prinsip fokus, terukur, transparan, dan objektif. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, SIMKK dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja karyawan.

PLN NP's Employee Performance Management System (SIMKK) uses an online platform, which is divided into several periods to ensure effective communication, discussion, and guidance from supervisors to staff. The implementation of SIMKK is based on the principles of focus, measurability, transparency, and objectivity. In accordance with these principles, SIMKK consists of three stages: planning, monitoring, and employee performance evaluation.

1. **Perencanaan**
   Persetujuan antara Atasan dan Bawahan terkait pekerjaan dan target yang harus diselesaikan.

2. **Pemantauan**
   Atasan memonitor progres pencapaian target bawahannya dan melakukan kegiatan *coaching/ mentoring/counseling*.

1. **Planning**
   An agreement between supervisors and subordinates regarding the tasks and targets to be achieved.
2. **Monitoring**
   Supervisors monitor the progress of their subordinates' target achievements and carry out coaching, mentoring, or counseling activities.

3. Evaluasi
   Atasan melakukan pengukuran nilai sasaran kinerja perorangan dan kompetensi individu karyawan.

PLN NP melaksanakan penilaian kinerja terhadap karyawan pada setiap semester yang dilakukan oleh Bidang *Human Capital Services.*

3. **Evaluation**
   Supervisors assess the individual performance target scores and individual employee competencies.

PLN NP conducts employee performance evaluations every semester, which are carried out by the Human Capital Services.

Employee Experience Survey

Employee Experience Survey adalah survei untuk mengukur pengalaman karyawan PLN Grup dalam seluruh siklus perjalanan yang diukur oleh beberapa dimensi. Hal ini untuk memastikan bahwa karyawan merasa terlibat (*engage*), dihargai, didukung, dan termotivasi untuk berkontribusi secara optimal.

Survei ini dilakukan rutin setiap tahun. Hasil *Employee Experience Survey* pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The Employee Experience Survey is conducted to measure PLN Group employees' experiences throughout the entire employee journey, assessed across several dimensions. The purpose is to ensure that employees feel engaged, valued, supported, and motivated to contribute optimally.

This survey is conducted annually. The results of the Employee Experience Survey in 2025 are as follows:

Tabel Hasil *Employee Experience Survey* tahun 2025
Table of the Results of the 2025 Employee Experience Survey

No.	Indikator Indicator	Skor Score
1.	*Work Engagement*	83,63%
2.	*Experience vs Expectations*	49,59%
3.	*Intent to Stay*	89,02%
4.	*Well-Being*	79,91%
5.	*Inclusion*	78,32%

Pengembangan Karir dan *Talent Management*
Career Development and Talent Management

PLN NP telah melakukan ratifikasi kebijakan jalur karir melalui manajemen talenta yang mengacu pada Peraturan Direksi No. 0031.P/019/DIR/2023 tentang Peraturan Operasional Sistem Manajemen Talenta dan Karyawan. Manajemen talenta dapat diikuti oleh karyawan yang memiliki kompetensi dan potensi terbaik tanpa membedakan *gender* ataupun faktor-faktor lain seperti suku, agama, dan antar golongan.

PLN NP has ratified a career path policy through talent management based on the Board of Directors Regulation No. 0031.P/019/DIR/2023 concerning the Operational Guidelines for the Talent and Employee Management System. Talent management is open to employees who demonstrate the best competencies and potential, regardless of gender or other factors such as ethnicity, religion, or social group.

Suksesi Jabatan
Succession Planning

Suksesi jabatan merupakan serangkaian proses penelusuran, pengidentifikasian, pembinaan dan pengembangan kompetensi dan karir Karyawan dalam mengisi Jabatan yang dibutuhkan Perusahaan. Suksesi jabatan dalam manajemen talenta ini difokuskan untuk pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional Ahli/ *Expertise* di Perusahaan yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Adapun rangkaian proses dalam manajemen talenta terdiri atas:

1. Identifikasi posisi kunci;
2. Akuisisi talenta;
3. Klasifikasi talenta;
4. Pengembangan talenta;
5. Mobilisasi talenta;
6. Retensi talenta;
7. Pengukuran kesiapan talenta.

Dalam tahap identifikasi posisi kunci mempertimbangkan kriteria dampak dan keunikan keahlian yang diklasifikasikan menjadi empat yaitu posisi kunci 1, posisi kunci 2, posisi kunci 3 dan posisi kunci 4 sesuai dengan syarat suksesi jabatan. Selanjutnya akuisisi talenta dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, seleksi dan memetakan talenta ke dalam kelompok *talent pool* untuk diklasifikasikan melalui penetapan PLN *talent profile* dengan pendekatan *capacity* dan *performance*. Dimensi *Capacity* terdiri dari Pengetahuan, Pengalaman, Kompetensi dan Atribut Pribadi sedangkan Dimensi *Performance* didapatkan berdasarkan perhitungan penilaian kinerja Karyawan.

Succession planning is a series of processes for identifying, nurturing, and developing employee competencies and careers to fill positions required by the Company. Succession planning under talent management is focused on filling Structural and Functional Expert positions in the Company and is conducted regularly on an annual basis. The talent management process consists of the following stages:

1. Identification of key positions;
2. Talent acquisition;
3. Talent classification;
4. Talent development;
5. Talent mobilization;
6. Talent retention;
7. Talent readiness measurement.

In the key position identification stage, criteria such as impact and uniqueness of expertise are considered. These are classified into four categories: key position 1, key position 2, key position 3, and key position 4, according to succession planning requirements. Talent acquisition is then carried out through a series of identification and selection processes, followed by talent mapping into a talent pool. This is classified through the establishment of a PLN talent profile using a capacity and performance-based approach. The Capacity dimension consists of Knowledge, Experience, Competency, and Personal Attributes, while the Performance dimension is derived from employee performance appraisal scores.

Gambar PLN *Talent Profile*
Illustration of PLN Talent Profile

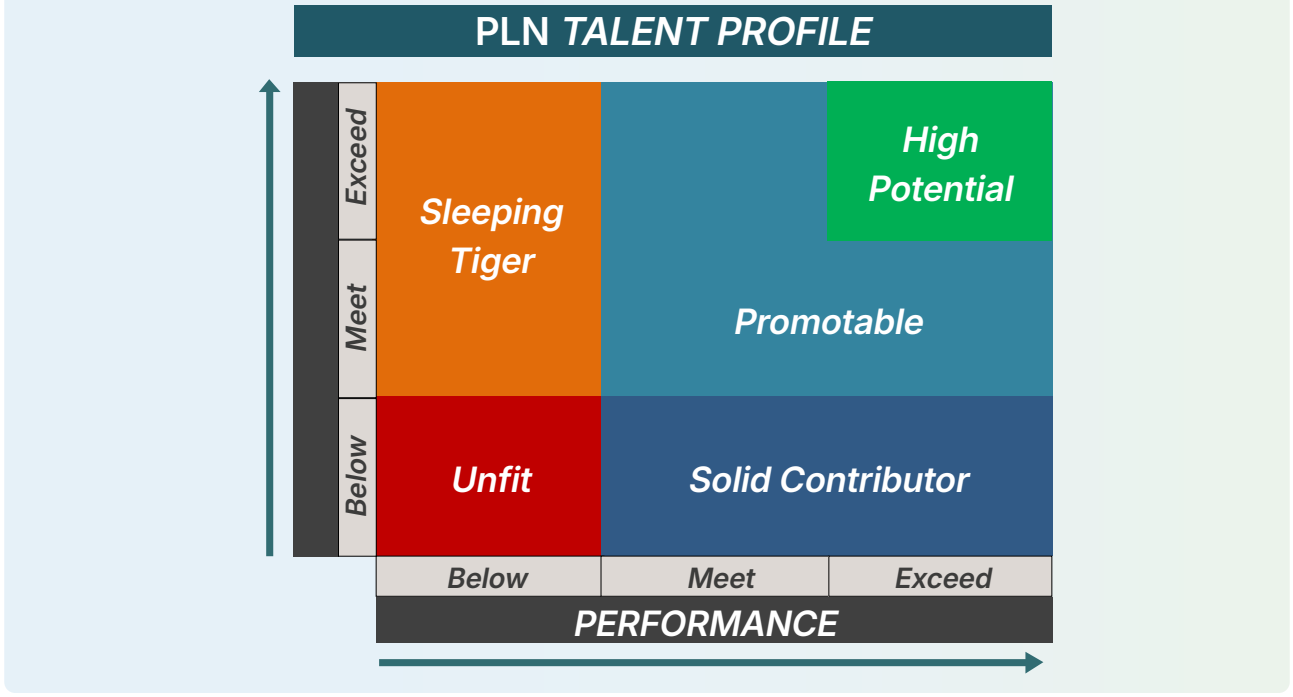

Para Talent yang telah dikelompokkan dalam PLN *Talent Profile* selanjutnya dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan *talent* agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal saat menduduki jabatannya. Pembinaan *Talent* menggunakan metode pengembangan yang berfokus pada 2 (dua) ranah kompetensi yaitu *soft competency* dan *hard competency*. Program pembinaan *talent* yang terdapat di PLN NP adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran;
2. Pendidikan formal;
3. *Knowledge Management*;
4. *Mentoring*;
5. *Coaching*;
6. *Benchmarking*;
7. Magang pada institusi di luar Perusahaan;
8. *Shadowing*;
9. Penugasan pada tim stratejik;
10. Penugasan pada jabatan.

Di samping melaksanakan pembinaan, PLN NP juga melakukan retensi *talent* guna memastikan *talent* yang terpilih tetap bekerja dalam Perusahaan dan berkinerja sesuai dengan yang diharapkan yang terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu *enablement* dan *engagement*.

Talents who have been grouped into the PLN Talent Profile will then undergo development to enhance their capabilities in line with the competencies required by the Company, enabling them to contribute optimally when assuming their positions. Talent development is carried out using methods focused on two areas of competency: soft competencies and hard competencies. The talent development programs implemented at PLN NP include the following:

1. Learning;
2. Formal education;
3. Knowledge management;
4. Mentoring;
5. Coaching;
6. Benchmarking;
7. Internships at external institutions;
8. Shadowing;
9. Assignments in strategic teams;
10. Job assignments.

In addition to development, PLN NP also implements talent retention measures to ensure selected talents remain with the Company and perform as expected. This involves two key aspects: enablement and engagement.

Pada tahap *talent acquisition* dan *talent mobility*, *talent* dipersiapkan melalui program kaderisasi. Kader akan melalui serangkaian penugasan dan evaluasi sebelum dinyatakan mampu untuk naik atau mengisi jabatan tertentu. Sampai dengan tahun 2025, ketersediaan *talent* untuk jabatan struktural tersedia dalam tabel di bawah ini:

At the stages of talent acquisition and mobility, talents are prepared through a cadetship program. Cadets go through a series of assignments and evaluations before being deemed ready to advance or fill specific positions. As of 2025, the availability of talents for structural positions is presented in the following table:

Tabel Pemenuhan Jabatan Struktural
Table of the Fulfillment of Structural Positions

Deskripsi Description	Jumlah *Talent* Number of Talents	Jumlah Formasi Number of Formations
Manajemen Atas Top Management	19	7
Manajemen Menengah Middle Management	223	57
Manajemen Dasar Basic Management	778	186
Generalis 3 (Struktural) Generalist 3 (Structural)	1.814	447
Manajemen Dasar Generalist 2 (Structural)	2.473	504

Selain itu, sebagai bentuk integrasi PLN Group, PLN NP memberikan penugasan dan menerima Karyawan melalui Sistem Tugas Karya. Berikut jumlah Karyawan tugas karya masuk PLN NP dan tugas karya keluar PLN NP pada tahun 2025.

In addition, as part of the PLN Group integration, PLN NP assigns and receives employees through the Secondment System. The number of incoming and outgoing secondees at PLN NP in 2025 is as follows:

Tabel Jumlah Karyawan Tugas Karya Keluar (orang)
Table of the Number of Outgoing Secondees (person)

Nama Perusahaan Company Name	Jumlah Karyawan Keluar Number of Employees Outgoing
PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)	4
PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI)	20
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)	4
PT Perusahaan Listrik Nasional (Persero)	96
PT Indonesia Comnets Plus	2
PT PLN Indonesia Power	5
PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN)	1
PT PLN Nusantara Power Construction (NPC)	7
PT PLN Nusantara Power Services (NPS)	20
PT PLN Renewables	33
PT PLN Suku Cadang (SC)	7
PT Sumber Segara Primadaya (S2P)	4

Tabel Jumlah Karyawan Karya Masuk (orang)
Table of the Number of Secondees Work In (person)

Nama Perusahaan Company Name	Jumlah Karyawan Masuk Number of Employees Entered
PT Perusahaan Listrik Nasional (Persero)	1.764
PT PLN Nusantara Power Services	251
PT PLN Nusantara Power Construction	6
PT PLN Indonesia Power	3
PT PLN Renewables	2

Remunerasi Sumber Daya Manusia
Human Capital Remuneration

PLN NP senantiasa mengimplementasikan strategi remunerasi yang kompetitif di industri tenaga listrik guna menarik, memotivasi individu-individu terbaik yang dimiliki Perusahaan. PLN NP memiliki kebijakan remunerasi yang berlandaskan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022-2024 No. PT PJB 001.K/021/DIR/2022; No. SP PJB 003.K/SP-DPP/2022.

Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), nomenklatur kebijakan remunerasi di PLN NP terdapat istilah Kompensasi dan Sistem Remunerasi 3P. Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dalam bentuk uang yang diberikan pada kurun waktu tertentu (bulanan, semesteran, tahunan, winduan, dan lainnya). Sementara Sistem Remunerasi 3P adalah sistem remunerasi sebagai Kompensasi atas kompetensi individu, tanggung jawab dalam Jabatan, dan prestasi kerja yang diberikan kepada Karyawan dalam bentuk *Pay for Person*, *Pay for Position*, dan *Pay for Performance*. PLN NP menetapkan besaran remunerasi Karyawan dengan mengacu pada Peraturan dan Keputusan Direksi Perusahaan.

Perusahaan telah menerbitkan Peraturan Direksi terkait *Human Experience Management System* (HXMS) dan Peraturan Direksi terkait Sistem Manajemen Penghargaan Karyawan sesuai arahan Pemegang Saham untuk melaksanakan sinkronisasi dan ratifikasi dalam rangka mendukung *talent mobility*.

Sejalan dengan kebijakan HXMS serta Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0001.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Pelaksana Sistem Manajemen Penghargaan Karyawan PT PLN Nusantara Power, terdapat 3 (tiga) jenis remunerasi yang diuraikan sebagai berikut:

PLN NP consistently implements a competitive remuneration strategy in the electricity industry to attract and motivate the best talents within the Company. PLN NP's remuneration policy is based on the Collective Labor Agreement (CLA) 2022–2024 No. PT PJB 001.K/021/DIR/2022; PT PJB 001.K/021/DIR/2022; No. SP PJB 003.K/SP-DPP/2022.

Under the CLA, the nomenclature for remuneration policy in PLN NP includes Compensation and the 3P Remuneration System. Compensation refers to monetary rewards provided by the Company to employees at certain intervals (monthly, semi-annually, annually, etc.). Meanwhile, the 3P Remuneration System is a compensation structure based on individual competence, job responsibility, and work performance, comprising Pay for Person, Pay for Position, and Pay for Performance. PLN NP determines employee remuneration based on applicable Company Regulations and Board of Directors' Decrees.

The Company has issued a Board Regulation on the Human Experience Management System (HXMS) and a Board Regulation on the Employee Reward Management System in alignment with Shareholders' directives to support synchronization and ratification in talent mobility initiatives.

In accordance with the HXMS policy and the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power No. 0001.P/DIR/2025 regarding the Policy for the Implementation of the Employee Reward Management System of PT PLN Nusantara Power, remuneration is categorized into three types, as outlined below:

Pay for Person (P1)

Pay for Person adalah kompensasi yang diberikan Perusahaan kepada Karyawan dengan mempertimbangan kompetensi, kinerja tertentu, termasuk pertimbangan faktor tanggungan istri/suami, dan anak.

Pay for Person is a compensation granted by the Company to employees by considering competence, certain performance metrics, and family-related factors such as spouse and child dependents.

Pay for Position (P2)

Pay for Position adalah kompensasi yang diberikan Perusahaan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan tidak tetap dengan mempertimbangkan faktor tanggung jawab jabatan, lokasi pekerjaan, kekhususan pekerjaan dengan mempertimbangkan kehadiran karyawan.

Pay for Position is a non-fixed allowance provided to employees based on position responsibility, work location, and job specialization, while also considering their attendance.

Pay for Performance (P3)

Pay for Performance adalah kompensasi atas prestasi kerja Karyawan berdasarkan hasil kinerja yang dicapai, baik kinerja individu atau secara kelompok yang merupakan kontribusi nyata dan terukur.

Pay for Performance is compensation based on employees' work achievements, whether individually or in groups, as a form of measurable and tangible contribution.

PLN NP menerapkan kebijakan sistem remunerasi dengan berpedoman pada konsep *Merit System.* Perusahaan juga selalu memastikan telah mentaati seluruh aturan yang berlaku yang terkait dengan sistem remunerasi. Terkait dengan remunerasi, PLN NP senantiasa berupaya agar tidak terjadi *gap* remunerasi terlalu tinggi.

PLN NP implements a remuneration system policy based on the Merit System concept. The Company also ensures compliance with all prevailing rules and regulations related to remuneration. Furthermore, PLN NP strives to prevent excessive remuneration gaps within the organization.

Penerapan *Reward and Punishment*

Implementation of Reward and Punishment

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan dalam bentuk kompensasi dan manfaat karyawan. Untuk Kompensasi Karyawan terdiri dari:

1. Kompensasi tetap, berupa *Pay for Person* (P1).
2. Kompensasi tidak tetap yang terdiri atas:
   a. Kompensasi Jangka Pendek terdiri dari *Pay for Position* (P2), *Pay for Performance* (P3), Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti Tahunan dan Kompensasi Lembur.

Employee rewards are categorized into two types: extrinsic rewards and intrinsic rewards. Extrinsic rewards are given in the form of compensation and employee benefits. Compensation includes:

1. Fixed Compensation, in the form of Pay for Person (P1).
2. Non-Fixed Compensation, consisting of:
   a. Short-term Compensation, which comprises Pay for Position (P2), Pay for Performance (P3), Religious Holiday Allowance (THR), Annual Leave Allowance, and Overtime Compensation.

b. Kompensasi Jangka Panjang, terdiri dari Tunjangan Cuti Besar, Penghargaan Kesetiaan masa Kerja. Kompensasi masa persiapan pensiun, Kompensasi pelepasan dan Kompensasi pensiun dini.

Untuk manfaat Karyawan terdiri atas:

1. Manfaat Umum yang terdiri atas jaminan sosial (pemeliharaan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiunan dan kematian), hak cuti, pakaian dinas, bantuan akomodasi terkait mutasi, dan bantuan pinjaman.

2. Manfaat Khusus (*Perquisites*) yang terdiri atas bantuan/fasilitas kendaraan, fasilitas kerja, fasilitas tenaga pengamanan, keanggotaan profesi, kartu kredit korporat, dan keanggotaan klub tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Dan penghargaan intrinsik yang diberikan dalam bentuk non tunai yang bermakna bagi individu karyawan yang diberikan berupa:

1. Program Pembelajaran dan Sertifikasi Kompetensi/ Profesi, yang merupakan kesempatan yang diberikan kepada Karyawan yang telah memberi kontribusi nyata kepada Perusahaan dan memenuhi kriteria talenta tertentu.
2. Program Keseimbangan Hidup, merupakan penghargaan kepada Karyawan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan berupa kegiatan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan spiritual, fisik dan mental untuk memotivasi Karyawan agar mendapat kinerja yang *excellence*.
3. Bantuan hukum berupa pembelaan atas tuntutan hukum dari pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab di perusahaan.
4. Pengakuan (*Recognition*) merupakan program pengakuan sosial yang diberikan kepada Karyawan yang telah mendapatkan penghargaan Direksi.
5. Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Karyawan bangga (*privilege*), diberikan kepada Karyawan yang telah memberikan prestasi dan kontribusi ekstra dalam mendukung pencapaian kinerja Perusahaan dan atau citra Perusahaan.

Berikut ini disajikan pemberian penghargaan kepada karyawan di sepanjang tahun 2025:

b. Long-term Compensation, which comprises Long Leave Allowance, Long-Service Recognition Awards, Pre-Retirement Compensation, Separation Compensation, and Early Retirement Compensation.

Employee benefits include:

1. General Benefits, such as social security (healthcare benefits,, work accident, old age, pension, and death benefits), leave entitlements, health maintenance, uniforms, relocation accommodation assistance, housing loan or maintenance assistance, and funeral assistance.
2. Special Benefits (Perquisites), including vehicle support, work facilities, security personnel support, professional membership, corporate credit cards, and club memberships based on job requirements.

Intrinsic rewards are non-monetary recognitions that hold personal meaning for employees, including:

1. Learning and Certification Programs, providing opportunities for employees who have made significant contributions and meet certain talent criteria.

2. Work-Life Balance Programs, recognizing employees by facilitating a balance between professional and personal life through initiatives aimed at enhancing spiritual, physical, and mental well-being, motivating employees to deliver excellent performance.

3. Legal Assistance, offering legal defense for claims related to the employee's duties and responsibilities in the Company.
4. Recognition, a social recognition program for employees who have received awards from the Board of Directors.
5. Privilege Opportunities, granted to employees who have demonstrated exceptional performance and contributed significantly to achieving the Company's goals or enhancing its image.

The following table presents the number of employees who received rewards throughout 2025:

Tabel Jumlah Karyawan yang Mendapat *Reward*
Table of the Number of Employees Receiving Rewards

Bentuk Penghargaan Form of Reward	Jumlah Karyawan Number of Employees
Pendidikan Formal Formal Education	138
Penghargaan Winduan Winduan Long-Service Award	488
Bantuan Pinjaman Rumah Housing Loan Assistance	247
Bantuan Pinjaman Kendaraan Vehicle Loan Assistance	105
Bantuan Pinjaman Pendidikan Education Loan Assistance	43
Penghargaan Pensiun Retirement Appreciation Award	69

Sedangkan berikut ini disajikan pemberian sanksi disiplin di tahun 2025:

Meanwhile, the following is a presentation of the imposition of disciplinary sanctions in 2025:

Tabel Jumlah Karyawan yang Mendapat Sanksi Disiplin
Table of the Number of Employees Receiving Disciplinary Sanctions

Bentuk Sanksi Form of Sanctions	Jumlah Karyawan Number of Employees
Sanksi Disiplin Ringan/ Administrasi Minor Disciplinary Sanctions/Administrative	2
Sanksi Disiplin Sedang/ Fundamental Moderate Disciplinary Sanctions/Fundamental	9
Sanksi Disiplin Berat Severe Disciplinary Sanctions	-

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Occupational Health and Safety (OHS)

Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan merupakan elemen krusial dalam operasional bisnis Perusahaan. PLN NP menilai bahwa aspek ini memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan aktivitas operasional. Tingkat kesehatan serta keselamatan karyawan secara langsung mempengaruhi kinerja dan produktivitas mereka, sekaligus berkontribusi terhadap dinamika hubungan antar karyawan. Uraian lebih lanjut mengenai K3 akan dijelaskan di Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah, namun menjadi bagian dari Laporan Tahunan ini.

Employee health and safety are critical elements in the Company's business operations. PLN NP views this aspect as playing a vital role in ensuring the continuity of operational activities. The level of employee health and safety directly affects their performance and productivity, while also contributing to workplace dynamics and employee relations. Further details regarding Occupational Health and Safety (OHS) are provided in the Sustainability Report, which is presented separately but forms an integral part of this Annual Report.

Hubungan Industrial
Industrial Relations

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan hubungan industrial adalah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan. Sedangkan serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. PKB antara PLN NP dengan Serikat Pekerja yang berlaku di tahun 2022 adalah PKB 2022-2024 No. PT PJB 0001.K/021/DIR/2022; No. SP PJB 003.K/SP-DPP/2022. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi:

1. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya;
2. Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi;
3. Menyalurkan aspirasi secara demokratis;
4. Mengembangkan keterampilan, dan keahliannya;
5. Ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Untuk mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif, pertemuan rutin dengan Serikat Pekerja secara berkala diadakan guna membahas isu-isu aktual terkait ketenagakerjaan. Diskusi tersebut berlandaskan pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini dijalankan oleh Tim Juklak PKB, yang bertanggung jawab dalam menginventarisasi serta merumuskan regulasi turunan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Industrial relations refer to the system of relationships formed between the actors involved in the production of goods and/or services, consisting of employers, workers/labor unions, and the government, based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The objective of industrial relations is to create a harmonious, dynamic, conducive, and just working relationship within the Company. Labor unions are organizations formed by, from, and for workers—either within or outside the Company—that are free, open, independent, democratic, and responsible, aimed at fighting for, defending, and protecting the rights and interests of workers as well as improving their welfare and that of their families. The Collective Labor Agreement (CLA) between PLN NP and the Workers Union applicable in 2022 is the 2022–2024 CLA No. PT PJB 0001.K/021/DIR/2022; No. SP PJB 003.K/SP-DPP/2022. In the implementation of industrial relations, workers and their labor unions have the following roles:

1. Performing work in accordance with their responsibilities;
2. Maintaining discipline to ensure production continuity;
3. Conveying aspirations in a democratic manner;
4. Developing their skills and expertise;
5. Contributing to the advancement of the Company and promoting the welfare of members and their families.

To foster a harmonious and conducive industrial relationship, PLN NP holds regular meetings with the Workers Union to discuss current labor-related issues. These discussions are guided by applicable laws and regulations. The process is managed by the CLA Technical Guidelines Team, which is responsible for inventorying and formulating derivative regulations from the CLA.

Rencana Program Kerja SDM Tahun 2026
Human Capital Work Plan for 2026

Sesuai dengan arah pengembangan SDM PLN NP, beberapa program Perusahaan terkait rencana program kerja SDM di tahun 2026 antara lain:

In line with PLN NP's HC development strategy, the following programs have been set as part of the Human Capital work plan for 2025:

1. Pemenuhan kapasitas dan kapabilitas dalam mendukung eksekusi RUPTL *Sub Holding*, termasuk bisnis pengembangan proyek P100 dan *co-investment*;
2. Penyelarasan organisasi dan proses bisnis untuk mendukung eksekusi RUPTL *Sub Holding*, termasuk bisnis pengembangan proyek P100 dan *co-investment*;
3. Implementasi *lean organization* melalui *workforce collaboration*.

1. Fulfillment of capacity and capabilities to support the execution of Sub-Holding's RUPTL, including the P100 project development business and co-investment;
2. Aligning the organization and business processes to support the implementation of Sub-Holding's RUPTL, including the P100 project development business and co-investment;
3. Implementation of lean organization through workforce collaboration.

Teknologi Informasi
Information Technology

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) secara optimal memungkinkan PLN NP meningkatkan efisiensi operasional, mendorong otomatisasi proses bisnis, serta memperkuat kualitas pengambilan keputusan. Implementasi TI yang terintegrasi turut mendukung peningkatan daya saing Perusahaan di tengah dinamika industri yang terus berkembang. Selain itu, pemanfaatan TI secara strategis juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas serta meningkatkan kemampuan adaptasi Perusahaan terhadap perubahan pasar dan perkembangan teknologi yang semakin dinamis.

The optimal utilization of Information Technology (IT) allows PLN NP to enhance operational efficiency, drive business process automation, and strengthen the quality of decision-making. The implementation of integrated IT also supports the enhancement of the Company's competitiveness amidst the continuously evolving industry dynamics. Additionally, the strategic use of IT opens up broader collaboration opportunities and improves the Company's adaptability to market changes and increasingly dynamic technological developments.

Fungsi Pengelola Teknologi Informasi
Information Technology Management Function

Pengelolaan Teknologi Informasi dilakukan oleh Bidang *Information Technology and Digital* yang merupakan sub organisasi PLN NP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0042.P/DIR/2025 tentang Perubahan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0021.P/DIR/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power.

The management of Information Technology is overseen by the Information Technology and Digital Unit, a sub-organization of PLN Nusantara Power, in accordance with the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power No. 0042.P/DIR/2025 concerning the Amendment to the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power No. 0021.P/DIR/2025 regarding the Organization and Work Procedures of PT PLN Nusantara Power.

Bidang *Information Technology and Digital* dipimpin oleh seorang *Vice President Information Technology and Digital* yang bertanggung jawab langsung kepada

Leadership of the Information Technology and Digital Division is vested in a Vice President of Information Technology and Digital, reporting directly to the

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya *Vice President Information Technology and Digital* dapat dibantu Manajer dan staf yang formasi jabatannya sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Peraturan Direksi. Bidang *Information Technology and Digital* membawahi 3 (tiga) Fungsi yaitu *Information Technology Planning, Information Technology Development* dan *Information Technology Operations.*

Director of Finance and Risk Management. To fulfill the division's duties and responsibilities, the Vice President can be assisted by Managers and staff, with specific positions defined based on organizational requirements and formalized through a Director's Regulation. This division supervises three core functions: Information Technology Planning, Information Technology Development, and Information Technology Operations.

Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

Sebagai *subholding* dari PT PLN (Persero), pengelolaan TI PLN NP diselaraskan dengan Tata Kelola TI PT PLN (Persero) selaku *Holding*. Tata kelola TI PLN NP berlandaskan pada Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 067.K/010/DIR/2017 tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi, dan pada tahun 2025 telah bertransisi ke Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor: 0002.P/DIR/2026 tentang Kebijakan Strategis Teknologi Informasi PT PLN Nusantara Power dan *best practice* lainnya seperti *Control Objective for Information Technologies* (COBIT). Secara garis besar pelaksanaan Tata Kelola TI PLN NP dapat dilihat pada gambar berikut:

As a subholding of PT PLN (Persero), PLN Nusantara Power aligns its Information Technology (IT) management with the IT Governance framework of PT PLN (Persero) as the Holding Company. PLN NP's IT governance is founded on the Information Technology Strategic Plan (ITSP), which was previously governed by Board of Directors Decree No. 067.K/010/DIR/2017 concerning General Guidelines and Policies for Information Technology Governance. In 2025, the framework transitioned to the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power No. 0002.P/DIR/2026 concerning the Information Technology Strategic Policy of PT PLN Nusantara Power, while also incorporating other best practices, including the Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT). In general, the implementation of IT Governance at PLN NP is illustrated in the following figure:

Tata Kelola TI PLN NP
IT Governance of PLN NP

Arsitektur Teknologi Informasi
Information Technology Architecture

Arsitektur TI menggambarkan bangunan teknologi informasi, baik aplikasi maupun infrastruktur yang akan dibangun oleh PLN NP sebagai arah pengembangan aplikasi TI di lingkungan Perusahaan, sebagaimana dalam gambar berikut:

The IT architecture outlines the structure of information technology, both applications and infrastructure, that PLN NP will develop as part of its IT application development roadmap within the Company. This architecture serves as a strategic direction for future IT implementation, as illustrated in the following diagram:

Arsitektur Teknologi Informasi
Information Technology Architecture

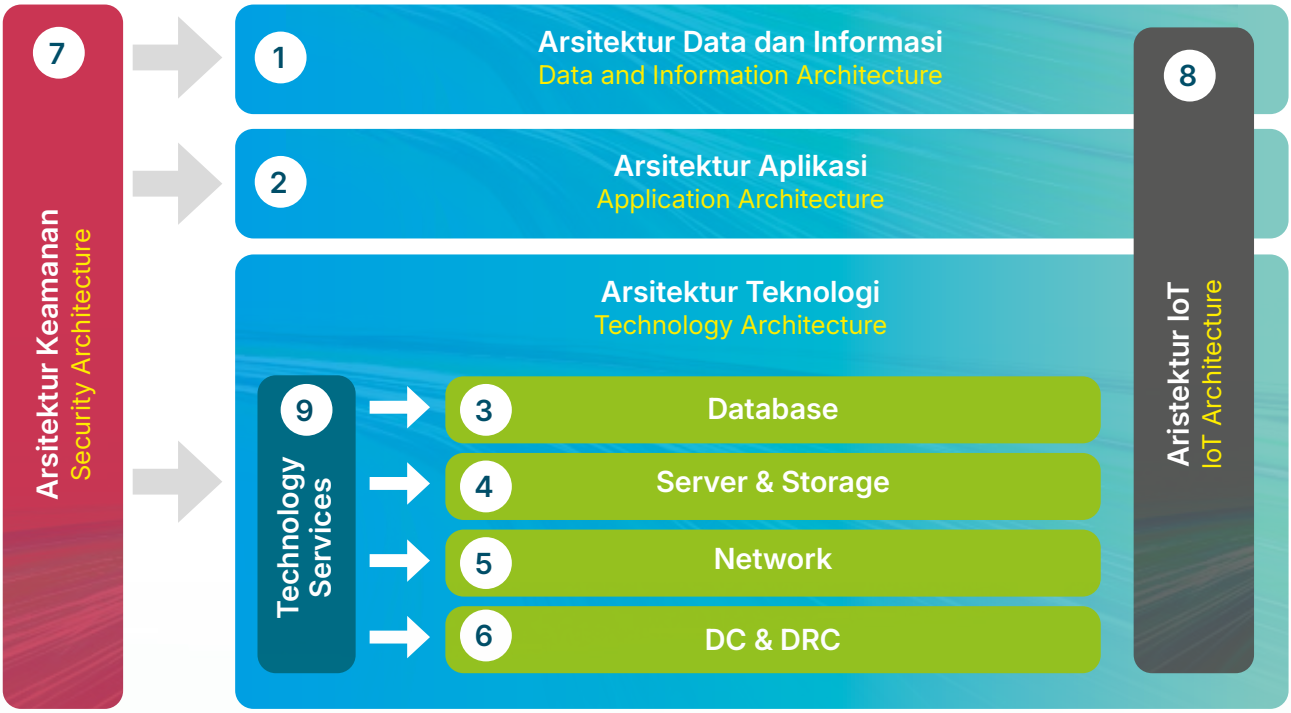

Roadmap Teknologi Informasi
Information Technology Roadmap

Roadmap TI PLN NP disusun sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Periode Tahun 2024-2028 hal ini agar pengembangan TI di PLN NP konsisten dan kontinyu secara berkelanjutan dari tahun ke tahun sebagaimana dalam gambar berikut:

The IT Roadmap of PLN NP is formulated in alignment with the Information Technology Strategic Plan (RSTI) for the 2024–2028 period to ensure that IT development within PLN NP remains consistent and continuously sustainable from year to year, as illustrated in the following diagram:

Roadmap Teknologi Informasi
Information Technology Roadmap

Disaster Recovery Plan (DRP)

Disaster Recovery Plan (DRP) adalah perencanaan yang fokus pada pemulihan sistem dan layanan teknologi informasi yang digunakan secara korporat dalam rangka mendukung strategi *Business Continuity Plan* (BCP). PLN NP telah menerapkan *Disaster Recovery Plan* (DRP) serta melakukan pengujian secara berkala setiap tahun untuk memastikan sistem DRP berjalan dengan baik dan sistem bisa dipulihkan sesuai target *Recovery Time Objective* (RTO) maupun *Recovery Point Objective* (RPO) yang diharapkan.

The Disaster Recovery Plan (DRP) is a plan that focuses on the recovery of corporate-wide information technology systems and services in support of the Business Continuity Plan (BCP) strategy. PLN NP has implemented a Disaster Recovery Plan (DRP) and conducts annual testing to ensure the DRP system functions properly and that systems can be restored in accordance with the targeted Recovery Time Objective (RTO) and Recovery Point Objective (RPO).

Disaster Recovery Center (DRC)

Disaster Recovery Center (DRC) adalah fasilitas atau lokasi yang dirancang untuk memulihkan dan mengembalikan operasional perusahaan atau organisasi setelah terjadinya bencana atau gangguan besar. DRC berfungsi sebagai pusat pemulihan data dan sistem informasi yang penting, serta memastikan kelangsungan operasional dengan menyediakan infrastruktur dan teknologi untuk menggantikan sistem yang rusak atau hilang akibat bencana. Secara rutin telah dilakukan simulasi DRP dan pemeliharaan terhadap perangkat di lokasi DRC PLN NP.

The Disaster Recovery Center (DRC) is a facility or location designed to restore and resume the operations of a company or organization following a disaster or major disruption. The DRC functions as a recovery center for essential data and information systems, ensuring business continuity by providing infrastructure and technology to replace systems damaged or lost due to the disaster. PLN NP regularly conducts DRP simulations and performs maintenance on equipment at the DRC site.

Penguatan *Cyber Security*
Cyber Security Strengthening

Program tata kelola teknologi informasi disusun dengan memastikan bahwa penggunaan dan pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan proses bisnis, aman (maksimum *cyber security*), memberikan nilai tambah secara berkesinambungan, serta mengoperasionalisasi dengan pembentukan *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT).

Information technology governance programs are developed to ensure that the use and development of applications align with business process needs, are secure (maximized cyber security), continuously add value, and are operationalized through the establishment of a Cyber Security Incident Response Team (CSIRT).

Dengan adanya tren peningkatan serangan siber di lingkungan PLN NP, Bidang Teknologi Informasi melakukan penguatan pengamanan siber baik dari segi *People, Process* dan *Technology*. Penguatan *Cyber Security* yang dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi keamanan siber,
2. Pengadaan perangkat *firewall server farm*,
3. Pelaksanaan *assessment* kesiapan *digital power plant*,
4. Pelaksanaan *assessment* keamanan siber,

In response to the rising trend of cyberattacks within PLN NP, the Information Technology Division has strengthened cyber security measures across People, Process, and Technology aspects. Cyber security initiatives include:

1. Cyber security awareness campaigns,
2. Procurement of firewall devices for the server farm,
3. Digital power plant readiness assessments,
4. Cyber security assessments.

Selain itu, dalam rangka optimalisasi pengendalian pengamanan yang berprinsip pada *confidentiality*, *integrity*, *authentication*, *non-repudiation* dan availability atas penggunaan aplikasi di Perusahaan yang terdiri dari aplikasi yang mendukung proses bisnis dan aplikasi yang menambah nilai layanan dari proses bisnis Perusahaan, PLN NP menerbitkan Instruksi Direksi No.0001.I/011/DIR/2022 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Pengendalian Pengamanan Penggunaan Aplikasi pada Fasilitas Komputer PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Additionally, to optimize security controls based on the principles of confidentiality, integrity, authentication, non-repudiation, and availability in the use of applications, including those that support business processes and those that enhance service value, PLN NP issued Director's Instruction No. 0001.I/011/DIR/2022 concerning the Optimization of Application Security Control Implementation on Computer Facilities at PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Risiko Utama dan Disruption Teknologi Informasi
Key Risks and Information Technology Disruptions

Dalam pelaksanaan operasional dan proses bisnis Perusahaan, terdapat berbagai potensi risiko yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bidang Teknologi Informasi PLN NP telah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap risiko internal beserta langkah mitigasi yang diperlukan sepanjang tahun 2025. Adapun risiko dan upaya mitigasi yang telah disusun antara lain sebagai berikut:

In the Company's operations and business processes, there are various potential risks related to the use of Information Technology. To anticipate this, the Information Technology sector of PLN NP has identified and mapped internal risks along with the necessary mitigation steps throughout 2025. The risks and mitigation efforts that have been compiled are as follows:

No.	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
1.	Serangan Cyber. Cyberattack.	1. Pengadaan Internet Security Gateway (Program AI BID ITD 2025); 2. Memperbarui Perdir No. 067.K/010/DIR/2017 tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi agar menyesuaikan dengan isu dan kondisi perkembangan teknologi informasi terkini; 3. Penguatan *Security Operation Center* (SOC) untuk peningkatan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman siber; 4. Implementasi Network dan *Security Device* unit HSH. 1. Procurement of Internet Security Gateway (2025 AI BID ITD Program); 2. Updating Director's Regulation No. 067.K/010/DIR/2017 on Guidelines and General Policies for Information Technology Governance to align with current issues and developments in information technology; 3. Strengthening the Security Operations Center (SOC) to improve the ability to detect and respond to cyber threats; 4. Implementation of Network and Security Device unit HSH.
2.	Arsitektur TI tidak selaras dengan strategi bisnis karena berbagai penyebab yang berdampak mengakibatkan ketidakpuasan dari *stakeholder* kunci. IT architecture is not aligned with business strategy due to various causes, leading to dissatisfaction among key stakeholders.	1. Pekerjaan Pembuatan RSTI 2024 – 2028; 2. Pekerjaan *Review* Perdir Tata Kelola TI. 1. Development of the 2024 – 2028 RSTI; 2. Review of the Board of Directors Regulation on IT Governance.
3.	Eksploitasi infrastruktur *data center* dan keamanan informasi/siber dapat menyebabkan kerugian atau *opportunity loss* maks 2% pendapatan tahunan korporat terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Exploitation of data center infrastructure and information/ cyber security may result in losses or opportunity costs of up to 2% of the Company's annual revenue, in relation to the Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law).	1. Adopsi ketentuan UU PDP ke dalam proses bisnis pengelolaan TI korporat; 2. Mengusulkan rancangan *update* atas klasifikasi informasi dan data agar mengakomodir dokumen sensitif khususnya data pribadi spesifik agar *comply* dengan ketentuan UU PDP; 3. Memperbarui alur pembaruan data kepegawaian sehingga data dan dokumen sensitif (data pribadi spesifik) tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan; 4. Menerapkan enkripsi data pada penyimpanan dokumen sensitif (data pribadi spesifik) pada *Dossier* dan lokasi penyimpanan lainnya, termasuk cadangan (*back-up*) data, sesuai dengan ketentuan SMKI dan UU PDP.

No.	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
		1. Adoption of the provisions of the Personal Data Protection Law into corporate IT management business processes; 2. Proposing a draft update to the classification of information and data to accommodate sensitive documents, particularly specific personal data, to comply with the provisions of PDP Law; 3. Updating the employment data update process so that sensitive data and documents (specific personal data) cannot be accessed by unauthorized parties; 4. Implementing data encryption for the storage of sensitive documents (specific personal data) in Dossier and other storage locations, including data backups, in accordance with SMKI regulations and the PDP Law.
4.	Kehilangan, pencurian, atau penyalahgunaan data dan informasi sensitif melalui fasilitas teknologi informasi korporat berdampak merugikan keuangan perusahaan maksimal 2% dari penerimaan tahunan. Loss, theft, or misuse of sensitive data and information through the Company's information technology facilities may result in financial losses of up to 2% of annual revenue.	Pengujian kesadaran pengguna terhadap serangan *phising*. Testing of user awareness against phishing attacks.
5.	Kerusakan perangkat keras yang mengganggu layanan TI (seperti *Email* Korporat, SIT *Ellipse*, dan *Data Center*) dapat membuat *data center* korporat tidak berfungsi. Hardware failures that disrupt IT services (such as Corporate Email, SIT Ellipse, and Data Center) may cause the corporate data center to become non-operational.	Pemasangan ATS *Genset* 120 kVa Baru. Installation of a New 120 kVA ATS Generator Set.
6.	Pelaksanaan sistem manajemen (layanan dan keamanan) TI tidak optimal dengan berbagai penyebab yang berpotensi kehilangan beberapa sertifikat standar internasional. The implementation of IT management systems (services and security) is not optimal due to various causes, potentially resulting in the loss of several international standard certifications.	Pelaksanaan *workshop refreshment* sistem manajemen berbasis ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 20000-1:2018. Conducting a refresher workshop on management systems based on ISO/IEC 27001:2022 and ISO/IEC 20000-1:2018.

Realisasi Program Strategis Teknologi Informasi Tahun 2025
Realization of Strategic Information Technology Programs in 2025

PLN NP telah melakukan beberapa program strategis TI selama tahun 2025, diantaranya adalah:

1. Implementasi *Digital Power Plant*;
2. Implementasi *Automatic Metering Reading* (AMR);
3. Implementasi HC *Analytics*;
4. Pengembangan *Smart* SCM (*Dashboard Monitoring* Pengadaan; Integrasi fitur DRP *Online* & e-proc);
5. Pengembangan *Monitoring* Inventori (PLJMLM dan PLJMKM) (Laporan Manajemen Material), *Dashboard Inventory*;
6. *Host to Host* Pembayaran;
7. *Financial Consolidation* (FICO);
8. Integrasi e-SPPD dan *e-Meeting*.

PLN NP implemented several strategic IT programs throughout 2025, including the following:

1. Implementation of Digital Power Plant;
2. Implementation of Automatic Metering Reading (AMR);
3. Implementation of HC Analytics;
4. Development of the Smart SCM (Procurement Monitoring Dashboard; Integration of Online DRP and e-proc features);
5. Development of Inventory Monitoring (PLJMLM and PLJMKM) (Material Management Report), Inventory Dashboard;
6. Host-to-Host Payment;
7. Financial Consolidation (FICO);
8. Integration of e-SPPD and e-Meeting.

Realisasi Program Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2025
Realization of Information Technology Development Programs in 2025

Selain menjalankan berbagai program strategis di bidang Teknologi Informasi, PLN NP juga melaksanakan sejumlah pengembangan solusi TI lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan dan kapabilitas teknologi Perusahaan. Adapun pengembangan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pengadaan *Internet Security Gateway*;
2. *Development Digital Twin*;
3. *Roll Out Digital Power Plant*.

In addition to implementing various strategic programs in the field of Information Technology, PLN NP conducts several other IT solution developments as part of efforts to strengthen the Company's technological readiness and capabilities. The developments undertaken include the following:

1. Procurement of Internet Security Gateway;
2. Digital Twin Development;
3. Digital Power Plant Roll Out.

Audit Teknologi Informasi
Information Technology Audit

PLN NP secara konsisten melakukan evaluasi atas implementasi tata kelola Teknologi Informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan dan perbaikan sistem TI yang berkelanjutan. Dalam mendukung efektivitas penerapan tata kelola TI, sepanjang tahun 2025 Perusahaan telah melaksanakan sejumlah audit TI sebagai berikut:

PLN NP consistently evaluates the implementation of Information Technology governance as part of its efforts to develop and improve the IT system sustainably. To support the effectiveness of IT governance implementation, the Company conducted several IT audits throughout 2025, as follows:

Tabel Audit TI Tahun 2025
Table of IT Audit in 2025

No.	Judul Audit Audit Title	Jumlah Temuan Number of Findings	Jumlah OFI/ Rekomendasi Number of OFIs/ Recommenda-tions	Status
1.	Audit Operasional TI oleh SPI PT PLN (Persero) IT Operational Audit by the IAU of PT PLN (Persero)	4	0	4 *Open* (target penyelesaian di bulan Oktober 2026/ semester II 2026) 4 Open (targeted for completion in October 2026/second semester of 2026)
2.	Laporan Hasil Audit (LHA) PLN NP IMS Tahun 2025 2025 Audit Report (LHA) of PLN NP IMS	1	6	*Closed*
3.	Audit Sistem Manajemen berbasis ISO/ IEC 27001:2013 dan ISO/ IEC 20000-1:2018 Audit of Management System based on ISO/ IEC 27001:2013 and ISO/ IEC 20000-1:2018	4	12	2 *Closed*, 12 Open (target penyelesaian di bulan Juni 2026/ semester I 2026) 2 Closed, 12 Open (targeted for completion in June 2026/first semester of 2026)
4.	Audit IT *General Control* oleh PwC Audit of IT General Control by PwC	0	0	-

Assessment Eksternal Teknologi Informasi
External Information Technology Assessment

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas keamanan Teknologi Informasi, PLN NP melaksanakan *Assessment Cyber Security Maturity* (kematangan keamanan siber) yang dilakukan oleh tim independen. Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) aspek yang terdiri dari aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, dan respon. Hasil akhir penilaian yang diperoleh PLN NP adalah di Tingkat Kematangan: **Level 4 (Implementasi Terkelola)**

As part of its efforts to maintain information technology security quality, PLN NP conducted a Cyber Security Maturity Assessment performed by an independent team. The assessment covered five aspects, namely governance, identification, protection, detection, and response. The final result of the assessment placed PLN NP at **Maturity Level 4 (Managed Implementation).**

Rencana Program Kerja Teknologi Informasi Tahun 2026
Information Technology Work Plan for 2026

Rencana Program Kerja TI PLN NP di tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1. Implementasi NuCC;
2. Program Implementasi Digital Twin;
3. Program Implementasi *Single* EAM (Unit Pembangkit Muara Karang, Muara Tawar, Cirata, Gresik, Paiton, Brantas);
4. Implementasi Digitalisasi Pembayaran;
5. Program *Cyber Security Awareness* dan *Security Operation Center* (SOC).

PLN NP's IT work plan for 2026 includes the following programs:
1. Implementation of NuCC;
2. Digital Twin Implementation Program;
3. Single EAM Implementation Program (Muara Karang, Muara Tawar, Cirata, Gresik, Paiton, and Brantas Generation Units);
4. Implementation of Digital Payment;
5. Cyber Security Awareness and Security Operation Center (SOC) Program.

PLN Nusantara Power *Integrated Management System* (PLN NP-IMS)

PLN NP-IMS berbasis *Enterprise Architecture* merupakan cetak biru organisasi yang terintegrasi, mencakup proses bisnis, data, aplikasi, serta infrastruktur Teknologi Informasi. Sistem ini dirancang selaras dengan regulasi yang berlaku, kapabilitas sumber daya manusia, sistem manajemen, manajemen risiko, serta target kinerja Perusahaan guna mendukung operasional yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Enterprise Architecture-based PLN NP-IMS is an integrated organizational blueprint, encompassing business processes, data, applications, and Information Technology infrastructure. This system is designed in accordance with applicable regulations, human resource capabilities, management systems, risk management, and corporate performance targets to support effective, efficient, and sustainable operations.

Penerapan PLN NP Integrated *Management System berbasis Enterprise Architecture* memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung efektivitas pengelolaan bisnis Perusahaan. Sistem ini tidak hanya memperkuat koordinasi antarunit dan meningkatkan akurasi informasi, tetapi juga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan terintegrasi. Melalui pendekatan tersebut, PLN NP semakin siap menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan yang terus berkembang, sekaligus memastikan operasional Perusahaan berjalan lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan kinerja jangka panjang.

The implementation of the Enterprise Architecture-based PLN NP Integrated Management System significantly contributes to supporting the effectiveness of the Company's business management. This system not only strengthens inter-unit coordination and improves information accuracy but also supports faster, more precise, and integrated decision-making processes. Through this approach, PLN NP is increasingly prepared to face the dynamics of the ever-evolving electricity industry, while also ensuring that the Company's operations run more adaptively, measurably, and with a focus on long-term performance sustainability.

Implementasi PLN NP-IMS menjadikan proses bisnis dan dokumentasi pendukung sistem manajemen menjadi lebih ringkas, mengeliminasi duplikasi serta memudahkan pemeliharaan atas berbagai sistem manajemen yang diintegrasikan diantaranya ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14064, ISO 50001, ISO 55001, ISO 17025, ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 22301, ISO 37001, ISO 37301, ISO 31001, ISO 26000, ISO 30414, SMK3, SMK2, dan SMP.

Furthermore, the deployment of PLN NP-IMS rationalizes business processes and associated management system documentation. It eliminates redundancies and simplifies the upkeep of numerous integrated management systems, such as ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14064, ISO 50001, ISO 55001, ISO 17025, ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 22301, ISO 37001, ISO 37301, ISO 31001, ISO 26000, ISO 30414, SMK3, SMK2, and SMP.

Pengelola PLN NP-IMS
PLN NP-IMS Management

PLN NP-IMS dikelola oleh Satuan *Technology Development and Asset Management* Bidang *Asset Management System Implementation,* Sub Bidang *Integrated Management System and Business Process* sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power No. 0006.P/019/DIR/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 0048.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Satuan Technology Development and Asset Management PT Pembangkitan Jawa-Bali.

PLN NP-IMS is managed by the Technology Development and Asset Management Unit in the Asset Management System Implementation Division, a Sub-Division of Integrated Management System and Business Process, as regulated in the PT PLN Nusantara Power Board of Directors Regulation No. 0006.P/019/DIR/2023 concerning Amendments to the PT Pembangkitan Jawa-Bali Board of Directors Regulation No. 0048.P/019/DIR/2022 on the Implementation Regulation of Organizational Structure and Workforce Formation in the Technology Development and Asset Management Unit of PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Tata Kelola dan Lingkup PLN NP-IMS
Governance and Scope of PLN NP-IMS

PLN NP-IMS merupakan penyempurnaan dari berbagai proses sistem integrasi termasuk interelasi diantara proses-proses yang digambarkan dalam bagan Proses Bisnis atau Sistem Kerja. Penerapan PLN NP-IMS ini sesuai dengan Peraturan Direksi No. 003.P/019/DIR/2019 tentang Implementasi PLN NP-IMS di

PLN NP-IMS is an enhancement of various integration system processes, including the interrelation between the processes depicted in the Business Process or Work System chart. The implementation of PLN NP-IMS is in accordance with Board of Directors Regulation No. 003.P/019/DIR/2019 regarding the Implementation

PT Pembangkitan Jawa-Bali dan sesuai dengan Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0004.E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Manajemen Proses Bisnis PT PLN (Persero). Dalam proses penyusunan PLN NP-IMS, PLN NP merujuk pada konsep *Plan Do Check Action* (PDCA) ISO 9001:2015 sebagai kerangka *Integrated Process*.

of PLN NP-IMS at PT Pembangkitan Jawa-Bali and in accordance with PT PLN (Persero) Board of Directors' Circular No. 0004.E/DIR/2023 regarding the Standard Procedure for Business Process Management of PT PLN (Persero). In the process of developing PLN NP-IMS, PLN NP refers to the Plan Do Check Action (PDCA) concept of ISO 9001:2015 as the framework for the Integrated Process.

Skema Proses *Plan Do Check Action* (PDCA)
Plan Do Check Action (PDCA) Scheme

Berikut penjabaran langkah-langkah berdasarkan alur skema yang menggambarkan tahapan berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas dan konsistensi operasional:

The following outlines the steps based on the flowchart illustrating the continuous stages for enhancing operational effectiveness and consistency:

PLAN (Perencanaan)
PLAN (Planning)

1. **Pemetaan Proses Bisnis dan Interaksi Antarproses**

   Menyusun gambaran menyeluruh atas proses bisnis yang berjalan serta mengidentifikasi hubungan dan ketergantungan antarproses lintas bidang/unit untuk membentuk kerangka kerja yang komprehensif.
2. **Identifikasi Kesesuaian Proses Bisnis dengan Tupoksi Organisasi**
   Melakukan kajian terhadap kesesuaian proses dengan fungsi dan peran (*Role & Actor*), dan tanggung jawab masing-masing unit organisasi untuk memastikan relevansi sistem dengan kebutuhan operasional aktual.
3. **Standarisasi Proses dan Penyelarasan Sistem**
   Menetapkan standar dan menyelaraskan prosedur kerja untuk menghindari redundansi, serta menyusun kebijakan, sasaran, dan rencana aksi (*action plan*) sebagai bagian dari desain sistem yang efisien.

1. **Mapping Business Processes and Inter-Process Interactions**
   Developing a comprehensive overview of the ongoing business processes and identifying interrelations and dependencies across functions or units to establish a holistic framework.
2. **Identifying the Alignment of Business Processes with Organizational Duties**
   Conducting an assessment of the alignment between processes and the functions and roles (Role & Actor), as well as the responsibilities of each organizational unit, to ensure that the system remains relevant to actual operational needs.
3. **Process Standardization and System Alignment**
   Defining standards and aligning procedures to prevent redundancy, while formulating policies, objectives, and action plans as part of an efficient system design.

DO (Pelaksanaan)
DO (Implementation)

4. **Penyusunan *Manual* Integrasi dan *General Procedure***
   Menyusun dan mendistribusikan panduan operasional dan *general procedure* yang menjadi acuan pelaksanaan sistem terintegrasi di seluruh unit kerja.
5. **Pelatihan dan Sosialisasi Sistem**
   Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pemahaman yang seragam serta kesiapan dalam mengimplementasikan sistem secara efektif.

4. **Preparation of Integration Manuals and General Procedures**
   Drafting and distributing operational manuals and general procedures that serve as the reference for the implementation of the integrated system across all work units.
5. **System Training and Socialization**
   Conducting training and outreach for all stakeholders to ensure a unified understanding and readiness for effective system implementation.

CHECK & ACTION (Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan)
CHECK & ACTION (Evaluation and Continuous Improvement)

6. **Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan**
   Menerapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi sistem, termasuk pengumpulan umpan balik serta penyesuaian berkala guna mendorong perbaikan berkelanjutan.

6. **Ongoing Monitoring and Evaluation**
   Applying mechanisms to monitor and evaluate system implementation, including collecting feedback and making periodic adjustments to promote continuous improvement.

Adapun sistem manajemen yang diadopsi Perusahaan dalam PLN NP-IMS meliputi beberapa sistem manajemen sebagai berikut:

The management systems adopted by the Company within PLN NP-IMS include the following:

Tabel Sistem Manajemen yang Diadopsi dalam PLN-IMS
Table of Management Systems Adopted in PLN NP-IMS

No.	Sistem Manajemen Management System	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Quality Management System	Seluruh persyaratan klausal diterapkan kecuali Klausul 8.3 *Design and Development*, dikarenakan kegiatan ini tidak dilakukan oleh PLN NP All clause requirements are applied, except for Clause 8.3 Design and Development, as this activity is not conducted by PLN NP.
2.	Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Environmental Management System	seluruh persyaratan klausal diterapkan all clause requirements are applied
3.	Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 ISO 45001:2018 OHS Management System	seluruh persyaratan klausal diterapkan all clause requirements are applied
4.	Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2018 ISO 50001:2018 Energy Management System	seluruh persyaratan klausal diterapkan all clause requirements are applied
5.	Sistem Manajemen Aset ISO 55001:2014 ISO 55001:2014 Asset Management System	seluruh persyaratan klausal diterapkan all clause requirements are applied
6.	Sistem Manajemen Layanan TI ISO 20000-1:2018 ISO 20000-1:2018 IT Services Management System	seluruh persyaratan klausal diterapkan all clause requirements are applied
7.	Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha/Bisnis ISO 22301:2012 ISO 22301:2012 Business Continuity Management System	seluruh persyaratan klausal diterapkan all clause requirements are applied
8.	Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System	seluruh persyaratan klausal diterapkan all clause requirements are applied
9.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 ISO 27001:2013 Information Security Management System	seluruh persyaratan klausal diterapkan all clause requirements are applied
10.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia ISO 30414:2018 ISO 30414:2018 Human Resources Management System	seluruh persyaratan klausal diterapkan all clause requirements are applied
11.	Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 ISO 37301:2021 Compliance Management System	seluruh persyaratan klausal diterapkan (terimplementasi belum tersertifikasi) all clause requirements are applied (implemented but not yet certified)
12.	Sistem Manajemen Risiko ISO 31001:2018 ISO 31000:2018 Risk Management System	seluruh persyaratan klausal diterapkan sebagai *guidance* all clause requirements are applied as guidance
13	Sistem Manajemen Gas Rumah Kaca ISO 14064:2018 ISO 14064:2018 Greenhouse Gas Management System	seluruh persyaratan klausal diterapkan sebagai *guidance for reporting* all clause requirements are applied as guidance for reporting
14.	(KAN) Akreditasi Pengujian Lab ISO 17025:2017 ISO 17025:2017 (KAN) Laboratory Testing Accreditation	seluruh persyaratan klausal diterapkan all clause requirements are applied
15.	Sistem Manajemen Tanggung Jawab Sosial ISO 26000:2010 ISO Social Responsibility Management System 26000:2010	seluruh persyaratan klausal diterapkan sebagai *guidance* all clause requirements are applied as guidance
16.	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	seluruh persyaratan klausal diterapkan all clause requirements are applied
17.	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) Electrical Safety Management System (ESMS)	seluruh persyaratan klausal diterapkan all clause requirements are applied
18.	Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Security Management System (SMS)	seluruh persyaratan klausal diterapkan all clause requirements are applied

Sistem Manajemen Terintegrasi PLN NP
Integrated Management System of PLN NP

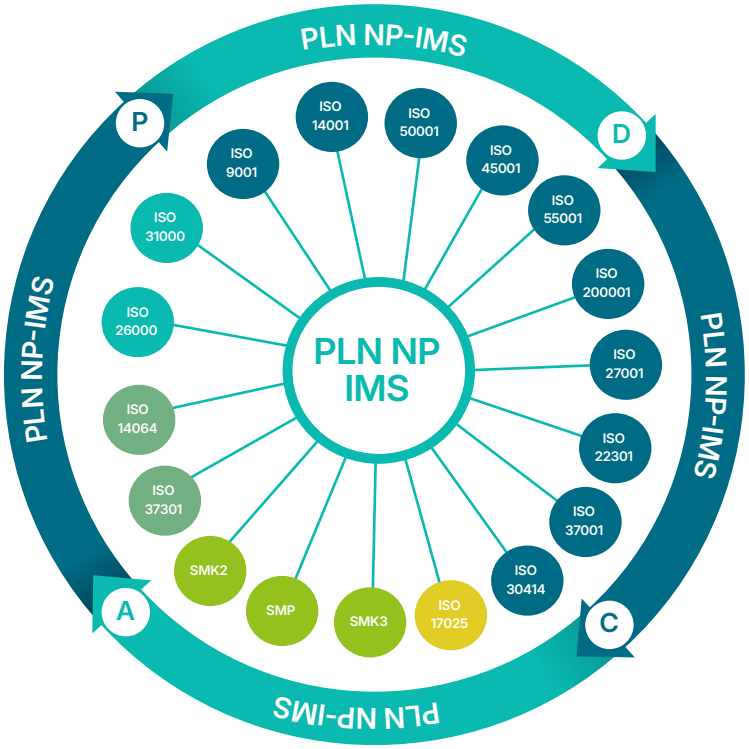

10 ISO Tersertifikasi Integrasi
10 ISO Certified Integration

ISO 9001	Sistem Manajemen Mutu	ISO 9001	Quality Management System
ISO 14001	Sistem Manajemen Lingkungan	ISO 14001	Environmental Management System
ISO 50001	Sistem Manajemen Energi	ISO 50001	Energy Management System
ISO 45001	Sistem Manajemen K3	ISO 45001	OHS Management System
ISO 55001	Sistem Manajemen Aset	ISO 55001	Asset Management System
ISO 20000-1	Sistem Manajemen Layanan IT (Lingkup layanan email)	ISO 20000-1	IT Services Management System (Scope of email services)
ISO 27001	Sistem Manajemen Keamanan Informasi	ISO 27001	Information Security Management System
ISO 22301	Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis	ISO 22301	Business Continuity Management System
ISO 37001	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	ISO 37001	Anti-Bribery Management System
ISO 30414	Sistem Manajemen Pelaporan Sumber Daya Manusia	ISO 30414	Sistem Manajemen Pelaporan Sumber Daya Manusia

1 ISO Tersertifikasi *Partial Unit*
1 ISO Certified Partial Unit

ISO 17025	Akreditasi Lab Pengujian dan Kalibrasi	ISO 17025	Accreditation of Testing and Calibration Laboratory

2 ISO Terimplementasi belum Tersertifikasi
3 ISO Implemented not yet Certified

ISO 37301	Sistem Manajemen Kepatuhan	ISO 37301	Compliance Management System
ISO 14064	Validasi dan verifikasi Gas Rumah Kaca	ISO 14064	Greenhouse gas validation and verification

3 Standar Nasional Tersertifikasi
3 Certified National Standards

SMK3	Sistem Manajemen K3	OHSMS	OHS Management System
SMP	Sistem Manajemen Pengamanan	SMP	Security Management System
SMK2	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	SMK2	Electricity Safety Management System

Standar *Guide* Diimplementasikan
Implemented Guide Standards

ISO 31000	Sistem Manajemen Risiko	ISO 31001	Risk Management System
ISO 26000	Sistem Manajemen Tanggung Jawab Sosial	ISO 26001	Social Responsibility Management System

Perusahaan menjamin bahwa kebijakan, program, sasaran dan proses-proses selalu mutakhir (*up-to-date*) sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka pemenuhan masing-masing standar sistem manajemen yang diimplementasikan. Selain itu, persyaratan standar sistem manajemen ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara sesuai standar terbaru.

The Company ensures that its policies, programs, objectives, and processes remain up to date and aligned with organizational needs to ensure compliance with the requirements of each implemented management system standard. In addition, the requirements of these management system standards are established, implemented, and maintained in accordance with the latest applicable standards.

Realisasi Program Kerja PLN NP-IMS Tahun 2025
Realization of PLN NP-IMS Work Programs in 2025

PLN NP telah melakukan beberapa program kerja dalam rangka menjaga kualitas PLN NP-IMS selama tahun 2025, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dukungan proses bisnis persiapan dan implementasi pengembangan usaha pada kepemilikan penuh - P100;
2. Penyelarasan program SSOT *Business Process Re-engineering* PLN *Holding*;
3. Penyusunan Proses Bisnis *Innovation Center* - NuCC mendukung *Digital Power Plant*;
4. Perluasan sistem manajemen dengan mengadopsi sistem manajemen proyek - ISO 21502 - *Guidance on Project Management*;
5. Melakukan evaluasi tingkat kematangan (*maturity level*) dan efektivitas proses bisnis guna memastikan standarisasi operasional di seluruh unit kerja PLN NP.

PLN NP has implemented several work programs to maintain the quality of PLN NP-IMS during 2025, including the following:

1. Support for business processes related to the preparation and implementation of business development for full ownership - P100;
2. Aligning the SSOT Business Process Re-engineering program with PLN Holding;
3. Developing Business Processes for the Innovation Center - NuCC to support the Digital Power Plant;
4. Expanding the management system by adopting project management standards - ISO 21502 - Guidance on Project Management;
5 Conduct maturity level and business process effectiveness assessments to ensure the standardization of operational practices across all PLN Nusantara Power business units.

Rencana Program Kerja PLN NP-IMS Tahun 2026
PLN NP-IMS Work Program Plan for 2026

Rencana Program Kerja PLN NP-IMS di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi alur kerja organisasi melalui penyesuaian proses bisnis yang adaptif terhadap parameter isu P100;
2. Penyusunan dan *Update* Proses Bisnis mendukung program korporasi;
3. *Go-Live* dan implementasi aplikasi pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Manage* 360) untuk menciptakan standarisasi penerapan sistem manajemen dan proses bisnis yang selaras di seluruh level organisasi;
4. Audit Resertifikasi dan *Surveilance* Sistem Manajemen Terintegrasi PLN NP-IMS dengan melakukan *upgrade* standar terbaru (ISO 55001: 2024 dan ISO 37001:2025).

The planned PLN NP-IMS work programs for 2026 are as follows:

1. Synchronization of organizational workflows through the adjustment of business processes to align with P100 issue parameters.
2. Development and updating of business processes to support corporate programs.
3. Go-live and implementation of the Integrated Management System (Manage 360) application to establish standardized management system practices and harmonized business processes across all organizational levels.
4. Recertification and surveillance audits of the PLN NP Integrated Management System (PLN NP-IMS), including the adoption of the latest standards (ISO 55001:2024 and ISO 37001:2025).

Manajemen Aset
Assets Management

Penerapan manajemen aset di PLN NP mencakup seluruh proses strategis, taktis, hingga operasional dalam pengelolaan aset Perusahaan. Pelaksanaannya mengacu pada standar *Asset Management Performance Excellence* ISO 55001 serta prinsip *Global Forum on Maintenance and Asset Management* (GFMAM) sebagai landasan dalam pengembangan kapabilitas manajemen aset. Implementasi tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang menyeimbangkan aspek risiko, biaya, dan kinerja (*performance*), sekaligus mendukung implementasi Program SOLID dan *Moonshot Launchpad* PLN.

The implementation of asset management at PLN NP encompasses all strategic, tactical, and operational processes in the Company's asset management. It refers to the Asset Management Performance Excellence ISO 55001 standard as well as the principles of the Global Forum on Maintenance and Asset Management (GFMAM) as the foundation for developing asset management capabilities. The implementation is designed to optimize the Company's performance sustainably through an approach that balances risk, cost, and performance aspects, while also supporting the implementation of the SOLID Program and PLN's Moonshot Launchpad.

Pengelola Manajemen Aset
Asset Management Administrator

Satuan Technology Development and *Asset Management* merupakan unit organisasi di Perusahaan yang bertanggung jawab mengelola manajemen aset PLN NP khususnya Bidang Asset Management System Implementation Sub Bidang Asset Management sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power No. 0006.P/019/DIR/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0048.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Satuan *Technology Development and Asset Management* PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Responsibility for overseeing asset management at PLN NP lies with the Technology Development and Asset Management unit, specifically involving the Asset Management System Implementation Sub-Division. This structure is regulated in the PT PLN Nusantara Power Board of Directors Regulation No. 0006.P/019/DIR/2023 concerning Amendments to PT Pembangkitan Jawa-Bali Board of Directors Regulation No. 0048.P/019/DIR/2022 regarding the Implementation Regulations for Organizational Structure and Workforce Formation at the Technology Development and Asset Management Unit of PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Kerangka Kerja Manajemen Aset
Asset Management Framework

Pelaksanaan konsep manajemen aset di Perusahaan mengacu pada standard best practice ISO 55001-2014 yang disesuaikan dengan Aset yang dikelola oleh PLN NP, yaitu aset pembangkit listrik. Pedoman implementasi manajemen aset pembangkitan di PLN NP mengacu pada Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali No. 0024.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Implementasi Manajemen Aset Pembangkitan PT PJB.

The Company's approach to asset management implementation draws upon the best practice standard ISO 55001-2014, specifically tailored for the power plant assets managed by PLN NP. Foundational guidelines for implementing power generation asset management within PLN NP are established in the Board of Directors Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0024.P/019/DIR/2022 regarding the Implementation Regulation for Power Generation Asset Management at PT PJB.

Penerapan manajemen aset pembangkitan akan menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan aset yang berkinerja tinggi. Sinergi antara asset owner, asset manager, dan asset operator akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas aset yang akan menghasilkan kinerja yang maksimal melalui indikator antara lain keandalan, kesiapan, optimasi biaya, dan ramah lingkungan.

Applying power generation asset management principles constitutes a core strength for managing high-performance assets effectively. Continuous enhancement of synergy among asset owners, asset managers, and asset operators is pursued to elevate asset quality. This focus ultimately aims for maximum performance, measured through key indicators including reliability, readiness, cost optimization, and environmental stewardship.

Proses pengelolaan manajemen aset tersebut dituangkan dalam *Framework* Manajemen Aset Pembangkitan pada Peraturan Direksi No. 0024.P/019/DIR/2022, sebagaimana ditunjukkan melalui bagan berikut:

Details of the asset management process are contained within the Power Generation Asset Management Framework, specified in Board of Directors Regulation No. 0024.P/019/DIR/2022, and visually represented in the diagram below:

Kerangka Kerja Manajemen Aset Pembangkitan di PLN NP
Power Generator Asset Management Framework at PLN NP

Adapun isu strategis terkait manajemen aset pembangkitan antara lain:

1. Penyediaan tenaga listrik dengan prinsip keandalan (*reliability*);
2. Penyediaan tenaga listrik dengan prinsip kesiapan (*availability*);
3. Penyediaan tenaga listrik dengan prinsip optimasi biaya (*affordable cost*);
4. Penyediaan tenaga listrik dengan prinsip ramah lingkungan (*green*).

The strategic issues related to power generation asset management include:

1. Electricity supply based on the principle of reliability;
2. Electricity supply based on the principle of availability;
3. Electricity supply based on the principle of affordable cost;
4. Electricity supply based on the principle of environmental friendliness (green).

Strategi Manajemen Aset
Asset Management Strategy

PLN NP mengimplementasikan strategi manajemen aset sebagai kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan aset, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta menyediakan dan mempertahankan aset guna mencapai hasil layanan yang optimal. Strategi manajemen aset ini membantu setiap elemen Perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait aset, untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien, di antaranya:

1. Pemanfaatan seoptimal mungkin aset yang ada;
2. Optimasi investasi baik terkait *asset acquire* maupun *asset operation & maintenance*;
3. Pembuatan keputusan untuk berinvestasi, mempertahankan, atau divestasi aset dengan memperhatikan serta melindungi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

PLN NP implements an asset management strategy as a Company policy for asset management, aiming to meet customer needs as well as to provide and maintain assets in order to achieve optimal service outcomes. This strategy supports all elements of the Company in making decisions related to assets to achieve the desired results effectively and efficiently, including:

1. Maximizing the utilization of existing assets;
2. Optimizing investments related to asset acquisition as well as asset operation and maintenance;
3. Making decisions on whether to invest in, maintain, or divest assets by considering and safeguarding the needs of both present and future generations.

Area yang menjadi sasaran strategis implementasi Manajemen Aset di PLN NP adalah sebagai berikut:

1. *Plant availability & reliability*;
2. Peningkatan efisiensi operasional pembangkit;
3. *Sustainable leadership and culture*;
4. *Sustainable knowledge asset performance*;
5. Mengembangkan kapasitas organisasi dan SDM;
6. *Risk management* dalam pengelolaan aset;
7. Mengoptimalkan komunikasi internal dan eksternal melalui *Stakeholder Management*;
8. Pengelolaan aset pembangkit dilakukan dengan memprioritaskan implementasi *best practices* pada ketentuan regulasi *Health, Safety, and Environment* (HSE).

The strategic target areas for the implementation of Asset Management at PLN NP are as follows:

1. Plant availability and reliability;
2. Improving power plant operational efficiency;
3. Sustainable leadership and culture;
4. Sustainable knowledge asset performance;
5. Developing organizational and human resource capacity;
6. Risk management in asset handling;
7. Optimizing internal and external communication through Stakeholder Management;
8. Power plant asset management prioritizes the implementation of best practices in accordance with Health, Safety, and Environment (HSE) regulations.

Proses Manajemen Aset
Asset Management Process

Proses Manajemen Aset di PLN NP ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

The Asset Management Process at PLN NP is illustrated in the following diagram:

Diagram Proses Manajemen Aset PLN NP
Diagram of PLN NP Asset Management Process

Eksekusi Manajemen Aset
Asset Management Execution

Manajemen aset Perusahaan menerapkan prinsip *life cycle* dan kaidah manajemen risiko yang didukung oleh berbagai sumber daya dan prosedur pengelolaan aset yang dilakukan oleh seluruh unit. Pengelolaan tersebut diwujudkan dengan melakukan *cascading* sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

The Company's asset management is carried out by applying life cycle principles and risk management principles, supported by various resources and asset management procedures implemented across all units. This management process is realized through a cascading approach, as illustrated in the following diagram:

Cascading Manajemen Aset
Asset Management Cascading

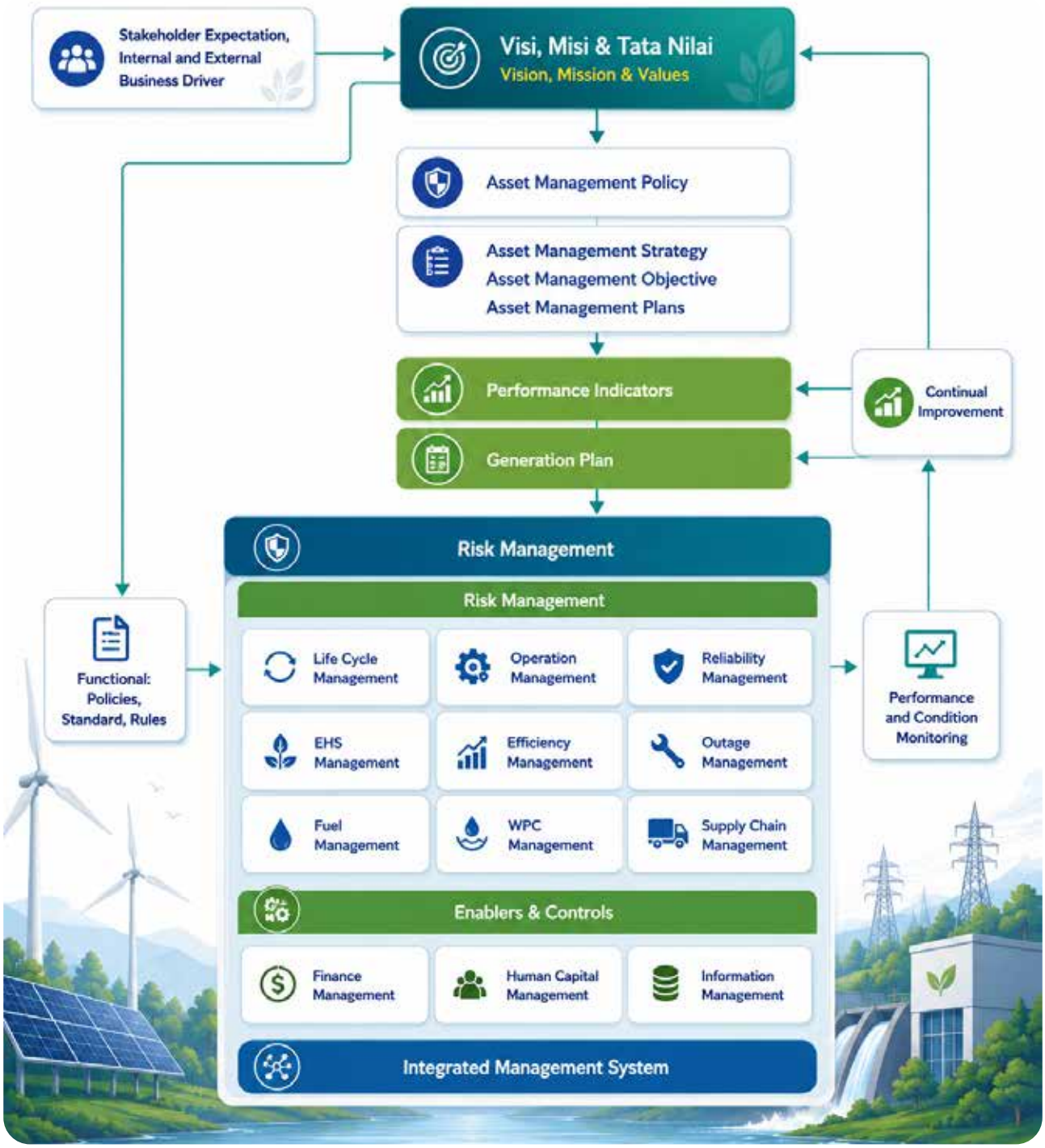

Berdasarkan gambar di atas, untuk eksekusi aset manajemen dimulai dengan tahapan penentuan *performance indicator*, kemudian diterjemahkan dalam *generation plan*, yang selanjutnya diselaraskan dengan 9 *streams* yang terdiri dari *life cycle management, operation management, reliability management*, EHS *management, efficiency management, outage management, fuel management*, WPC *mangement*, dan *supply chain management.*

Based on the diagram above, asset management execution begins with the determination of performance indicators, which are then translated into a generation plan. This plan is subsequently aligned with nine streams, consisting of life cycle management, operation management, reliability management, EHS management, efficiency management, outage management, fuel management, WPC management, and supply chain management.

Realisasi Program Kerja Manajemen Aset Tahun 2025
Asset Management Program Implementation in 2025

Pada tahun 2025, PLN NP telah melaksanakan berbagai program strategis untuk memastikan kualitas Manajemen Aset tetap terjaga dengan baik, di antaranya:

1. *Update* panduan untuk meningkatkan kapabilitas aset manajemen PLN NP, baik dari sisi strategik aset manajemen maupun dari sisi tata kelola pembangkitan;
2. Resertifikasi ISO 55001: Sistem Manajemen Aset pada unit pembangkit PLN NP;
3. Pembinaan proses dan pencapaian *maturity level* tata kelola PLN NP di unit-unit;
4. *Parenting sistering* pada unit-unit;
5. Memperluas pangsa pasar untuk jasa manajemen aset.

In 2025, PLN NP has carried out various strategic programs to ensure the sustained quality of its Asset Management, including:

1. Update of the guidelines to enhance PLN NP's asset management capabilities, both in terms of strategic asset management and generation governance;
2. ISO 55001 recertification: Asset Management System at PLN NP's generation units;
3. Development of processes and achievement of maturity levels in PLN NP governance at unit level;
4. Implementation of Parenting-Sistering at various units;
5. Expansion of market share for asset management services.

Rencana Program Kerja Manajemen Aset Tahun 2026
Asset Management Programs Plan for 2026

Sebagai langkah untuk memastikan pengelolaan manajemen aset yang berkelanjutan, Program Kerja Manajemen Aset untuk tahun 2026 direncanakan sebagai berikut:

1. Pengembangan Tata Kelola Pembangkitan melalui integrasi/ alignment tata kelola dengan proses bisnis;
2. *Parenting* dan *Sistering* pada unit-unit pembangkitan;
3. Penyusunan Materi Pelatihan AM yang spesifik bagi *Asset Owner*, *Asset Manager* dan *Asset Operator*.

As part of efforts to ensure sustainable asset management, the following programs are planned for 2026:

1. Development of Power Generator Governance through the integration/alignment of governance with business processes;
2. Parenting and Sistering in power generator units;
3. Development of AM Training Materials tailored specifically for Asset Owners, Asset Managers, and Asset Operators.

Pengembangan Usaha
Business Development

PLN NP terus mengembangkan kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik sebagai upaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki Perusahaan dalam meningkatkan pendapatan. Pengembangan bisnis dilakukan dengan fokus pada sektor energi yang tidak hanya berbasis *heavy asset*, tetapi juga mencakup pengembangan model *asset light* serta berbagai inovasi energi lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong diversifikasi usaha guna menciptakan pertumbuhan nilai Perusahaan yang berkelanjutan.

PLN NP continues to develop its electric power generator business activities as an effort to optimize the Company's potential in increasing revenue. Business development is executed by focusing on the energy sector, which not only includes heavy asset-based operations but also encompasses the development of asset-light models and various other energy innovations. It is intended to encourage business diversification to create sustainable value growth for the Company.

Pengelola Pengembangan Usaha
Business Development Management

Pengelola Pengembangan Usaha dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0021.P/DIR/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power. Pengelola pengembangan usaha berada di bawah Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga, yang membawahi 6 Bidang yaitu Bidang *Corporate Planning and Sustainability*, Bidang *Portfolio Management and Subsidiaries, Bidang Business Development-Generation* I, Bidang *Business Development-Generation* II, Bidang *Business Development-Generation Derivatives*, dan Bidang *Corporate Performance*.

Business Development management is undertaken by the Business Development and Commercial Directorate in accordance with the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power No. 0021.P/DIR/2025 concerning the Organization and Work Procedures of PT PLN Nusantara Power. The Directorate oversees six divisions: Corporate Planning and Sustainability, Portfolio Management and Subsidiaries, Business Development–Generation I, Business Development–Generation II, Business Development–Generation Derivatives, and Corporate Performance.

Di dalam pelaksanaan pengembangan usaha, bidang-bidang tersebut didukung oleh Anak Perusahaan di bidang Investasi (PT PLN Nusantara Renewables), bidang konstruksi (PT PLN Nusantara Power Construction), bidang jasa O&M, MRO, dan jasa lainnya (PT PLN Nusantara Power Services), bidang penyediaan *spare part* (PT PLN Suku Cadang) serta didukung oleh Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi lainnya.

In the implementation of business development initiatives, these divisions are supported by subsidiaries engaged in investment (PT PLN Nusantara Renewables), construction (PT PLN Nusantara Power Construction), operation and maintenance (O&M), maintenance, repair and overhaul (MRO), and other service activities (PT PLN Nusantara Power Services), as well as spare parts supply (PT PLN Suku Cadang). Additional support is provided by other subsidiaries and affiliated companies.

Tata Kelola Pengembangan Usaha
Business Development Governance

Fokus utama pengembangan usaha adalah mempersiapkan optimasi dari sumber daya internal untuk memberikan kontribusi yang maksimal dari segala peluang bisnis yang akan muncul. PLN NP memiliki kompetensi di bidang pembangkitan fosil dan energi baru dan terbarukan sesuai tren global mendatang dengan pengembangan usaha yang meliputi penjualan tenaga listrik; investasi bidang energi; dan jasa-jasa lainnya untuk meningkatkan *value added* Perusahaan.

Pengembangan usaha PLN NP sampai saat ini fokus pada peningkatan *revenue* yang kemudian diturunkan ke dalam beberapa program strategis Perusahaan antara lain:

1. Penyelesaian proyek penugasan (*Add On* Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4, PLTU MT Sumbagsel-1).
2. Pengembangan Pembangkit EBT dan Non-EBT dalam RUPTL 2025-2034 melalui skema IPP *Majority* dan *Minority Shares*.
3. Inisiasi akuisisi pembangkit *brownfield*, pengembangan *additional demand* di kawasan industri dengan melakukan pengembangan baik ITC, *captive power* maupun akuisisi pembangkit.
4. *Assessment*, Revitalisasi dan EPC melalui PLN NPC baik pembangkit EBT, Non-EBT, dan transmisi.
5. Penambahan potensi penjualan produk MRO, O&M, EPC, *supply chain*, layanan konsultasi, digitalisasi *power plant* serta produk turunan pembangkit/ *sustainable solutions* baik pasar domestik (luar PLN) maupun luar negeri.
6. Perluasan bisnis PLN SC melalui pengembangan bisnis proses dan sistem pada logistik dan *warehousing*.
7. Perluasan bisnis PLN NPC melalui EPC pembangkitan dan transmisi serta turunannya baik pasar domestik maupun ke luar negeri.
8. Pengembangan potensi bisnis melalui solusi berkelanjutan dengan optimalisasi aset *idle*, serta pengembangan bisnis strategis seperti FABA, *Carbon Trading* dan *Hydrogen*.
9. Pengembangan potensi bisnis jasa konsultasi melalui layanan unggulan di bidang manajemen aset, konsultasi *co-firing biomassa*, serta konsultasi teknik yang andal dan inovatif.

At its core, the business development approach aims to optimize internal resources to effectively capitalize on all potential opportunities. PLN NP leverages its significant expertise in both fossil fuel and renewable power generator, staying aligned with global energy developments. Initiatives encompass electricity sales, investments in the energy sector, and various services designed to increase the Company's overall value.

Primarily, business development efforts concentrate on enhancing revenue streams. This focus is actioned through several key strategic programs:

1. Completion of government-assigned projects, including the Muara Tawar Block 2, 3, and 4 Add-On Project and the MT SumBagsel-1 CFPP Project.
2. Development of Renewable and Non-Renewable Power Plants in accordance with the 2025–2034 RUPTL via IPP schemes with majority and minority shareholding [E – Renewable Energy];
3. Acquisition of brownfield plants and development of additional demand in industrial zones through ITC development, captive power, and plant acquisitions;
4. Assessment, Revitalization, and EPC through PLN NPC for both NRE, Non-NRE, and transmission power plants.
5. The addition of potential sales for MRO, O&M, EPC, supply chain products, consulting services, power plant digitalization, as well as derivative products from power plants/sustainable solutions for both the domestic (outside PLN) and international markets.
6. Expansion of PLN SC's business through the development of business processes and systems in logistics and warehousing.
7. Expansion of PLN NPC's business through EPC for electric power generator and transmission and its derivatives abroad.
8. Development of business potential through sustainable solutions with the optimization of idle assets, as well as the development of strategic businesses such as FABA, Carbon Trading, and Hydrogen.
9. Development of business potential in consulting services through leading services in asset management, biomass co-firing consulting, and reliable and innovative technical consulting.

Dalam melaksanakan pengembangan usaha, PLN NP telah dilengkapi dengan perangkat kebijakan tata kelola pengembangan usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan usaha oleh divisi terkait. Selain itu, telah tersedia aplikasi PMO (*Program Management Office*) untuk membantu Project Manager dalam melakukan fungsi kontrol dan monitor proyek mulai dari tahap inisiasi hingga tahap penyelesaian proyek tersebut.

To ensure proper oversight, PLN NP adheres to established governance policies for business development, providing clear guidelines for the responsible divisions. Furthermore, we utilize a Program Management Office (PMO) application to assist Project Managers in effectively controlling and monitoring projects throughout their lifecycle, from initiation to completion.

Realisasi Program Kerja Pengembangan Usaha Tahun 2025
Business Development Program Realization in 2025

Sepanjang tahun 2025, PLN NP telah melaksanakan berbagai program kerja Pengembangan Usaha, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses Konstruksi pada Pengembangan PLTS Tembesi Batam 35 MW;
2. Proses Konstruksi pada Pengembangan PLTS Terapung Karangkates 100 MWac;
3. Proses Konstruksi pada Pengembangan PLTA Batang Toru 510 MW;
4. COD Proyek PLTU MT Sumbagsel 1 (2 × 150 MW);
5. Telah Terbit RUPS penugasan untuk proyek RKAP 2024;
6. Penandatanganan Kerjasama Studi Dalam Rangka Eksplorasi Potensi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia.

Throughout 2025, PLN NP implemented various Business Development programs, including:

1. Construction Process in the Development of the 35 MW Tembesi Batam SPP;
2. Construction Process in the Development of the 100 MWac Karangkates Floating SPP;
3. Construction Process in the Development of the 510 MW Batang Toru HPP;
4. COD for MT Sumbagsel 1 CFPP Project (2 × 150 MW);
5. The issuance of GMS on the assignment for the 2024 WP&B;
6. Signing of a Study Cooperation to Explore the Potential for the Development and Utilization of New and Renewable Energy in Indonesia.

Rencana Program Kerja Pengembangan Usaha Tahun 2026
Business Development Work Plan for 2026

Rencana Program Kerja Pengembangan Usaha PLN NP di tahun 2026 di beberapa pembangkit sebagai berikut:

1. Persetujuan Program Investasi, Penugasan, dan Pendanaan atau Tambahan Modal Disetor untuk Pengembangan *Project* Z Nusantara (RKAP 2026);
2. Pengadaan lelang EPC untuk Proyek PLTMG P100 P0 P0';
3. Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) untuk pengembangan proyek RKAP 2027;
4. Pengembangan Proyek Pembangkit Sewa;
5. Penyusunan dokumen dan pelaksanaan proses pemilihan mitra strategis untuk proyek-proyek P51 untuk proyek RKAP 2024 & 2025 & 2026;
6. Pelaksanaan *due diligence* untuk proyek-proyek P30 untuk proyek RKAP 2024 & 2025 & 2026.

PLN NP's Business Development Work Plan for 2026 includes initiatives at several power plants, as outlined below:

1. Approval of the Investment Program, Assignment, and Funding or Additional Paid-in Capital for the Development of the Z Nusantara Project (2026 WP&B);
2. EPC tender procurement for the P100 P0 P0' GEPP Project;
3. Preparation of a Project Feasibility Study (PFS) for the project development of the 2027 WP&B;
4. Development of Lease Power Plant Project;
5. Preparation of documentation and execution of the strategic partner selection process for P51 projects included in the 2024, 2025, and 2026 WP&B.
6. Execution of due diligence activities for P30 projects included in the 2024, 2025, and 2026 WP&B.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

05

Tinjauan Industri
Industry Overview

Perkembangan kondisi ekonomi makro serta dinamika industri pembangkitan tenaga listrik, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pengaruh terhadap operasional PLN NP. Berbagai perkembangan tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama bagi Perusahaan dalam menetapkan target dan sasaran strategis yang realistis, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan kinerja. Oleh karena itu, pemantauan terhadap tren ekonomi dan perkembangan industri ketenagalistrikan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan Perusahaan.

The development of macroeconomic conditions and the dynamics of the electric power generator industry, both directly and indirectly, influence the operations of PLN NP. These various developments are one of the key considerations for the Company in setting realistic, adaptive, and performance sustainability-oriented strategic targets and objectives. Therefore, monitoring economic trends and developments in the electricity industry is conducted continuously as an important part of the Company's planning and decision-making process.

Sekilas Perkembangan Ekonomi Makro Global
Global Macroeconomic Development at A Glance

Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) pada April 2026, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 adalah sebesar 3,4%, meskipun prospek pertumbuhan global menghadapi tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta volatilitas harga energi dan komoditas. Ketahanan tersebut didukung oleh masih kuatnya aktivitas sektor swasta di sejumlah negara, peningkatan investasi berbasis teknologi termasuk *Artificial Intelligence* (AI), serta keberlanjutan dukungan kebijakan fiskal dan moneter di berbagai negara utama. Sementara itu, inflasi global diperkirakan terus mengalami tren penurunan secara bertahap dari level 4,1% pada tahun 2025, meskipun proses normalisasi inflasi, khususnya di Amerika Serikat, diproyeksikan berlangsung lebih gradual dibandingkan beberapa negara ekonomi besar lainnya.

Based on the World Economic Outlook (WEO) report published by the International Monetary Fund (IMF) in April 2026, global economic growth in 2025 was 3.4%, although the global growth outlook faces pressure due to increasing geopolitical uncertainty, trade fragmentation, and volatility in energy and commodity prices. This resilience is supported by the continued strong activity of the private sector in several countries, increased technology-based investments, including Artificial Intelligence (AI), and the sustained support of fiscal and monetary policies in various major countries. Meanwhile, global inflation is expected to continue its gradual downward trend from 4.1% in 2025. Even though the normalization process of inflation, particularly in the United States, is expected to be more gradual compared to several other major economies.

Meskipun demikian, risiko terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global masih cenderung berada pada sisi penurunan. Ketidakpastian terkait arah kebijakan perdagangan internasional, meningkatnya tensi geopolitik, serta potensi gangguan rantai pasok global dapat menekan aktivitas perdagangan dan investasi dunia. Selain itu, penyesuaian ekspektasi

Nevertheless, the risks to the global economic growth outlook still tend to be on the downside. Uncertainty regarding the direction of international trade policies, rising geopolitical tensions, and the potential for global supply chain disruptions can suppress global trade and investment activities. In addition, adjustments in expectations regarding AI technology productivity

terhadap produktivitas teknologi AI juga berpotensi memicu perlambatan investasi dan koreksi pasar keuangan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas riil. Di sisi lain, peluang pertumbuhan tetap terbuka apabila adopsi AI mampu mendorong efisiensi dan produktivitas secara berkelanjutan, disertai meredanya ketegangan perdagangan global dan stabilitas harga energi. Oleh karena itu, penguatan kebijakan yang berfokus pada stabilitas harga, ketahanan sistem keuangan, pemulihan ruang fiskal, serta percepatan reformasi struktural dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi global jangka menengah.

could potentially trigger a slowdown in investment and corrections in financial markets if not matched by an increase in actual productivity. On the other hand, growth opportunities remain open if AI adoption can drive efficiency and productivity sustainably, accompanied by a reduction in global trade tensions, besides energy price stability. Therefore, strengthening policies that focus on price stability, financial system resilience, fiscal space recovery, and accelerating structural reforms are considered important factors in maintaining the momentum of medium-term global economic growth.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Global
Chat of Global Economic Growth

(%)

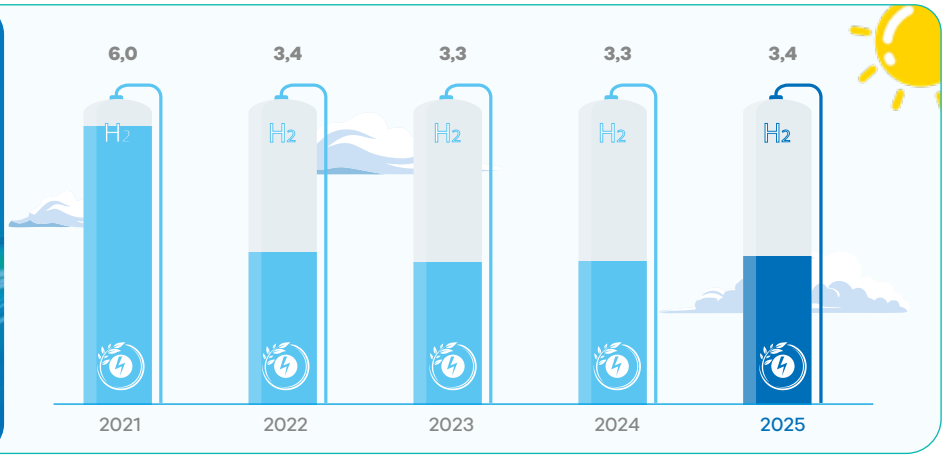

Sumber: *World Economic Outlook* (WEO), International Monetary Fund (IMF) edisi April 2026.

Source: World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF) April 2026 edition.

Sekilas Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia
Indonesia's Macroeconomic Development at a Glance

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang tetap solid di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan arah kebijakan moneter global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta atau setara USD5.083,4. Secara tahunan, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11%, meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang sebesar 5,03% (c-to-c). Capaian tersebut mencerminkan terjaganya aktivitas ekonomi domestik yang didukung oleh konsumsi masyarakat, investasi, serta kinerja ekspor yang tetap resilien.

The Indonesian economy in 2025 showed solid performance amidst the dynamics of the global economy, still marked by geopolitical uncertainties, commodity price fluctuations, and changes in global monetary policy direction. Based on data from Statistics Indonesia, Indonesia's economy, measured by Gross Domestic Product (GDP) at current prices, reached Rp23,821.1 trillion with a per capita GDP of Rp83.7 million or equivalent to US$5,083.4. Year-on-year, Indonesia's economy grew by 5.11%, an increase compared to the 2024 growth of 5.03% (c-to-c). It reflects sustained domestic economic activity supported by consumer spending, investment, and resilient export performance.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh meningkatnya aktivitas pada sektor jasa, seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat dan ekspansi kegiatan usaha. Lapangan Usaha Jasa Lainnya mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93%, diikuti sektor jasa perusahaan serta transportasi dan pergudangan yang juga menunjukkan pertumbuhan kuat. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh paling tinggi sebesar 7,03%, mencerminkan masih terjaganya permintaan eksternal terhadap produk Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Selain itu, konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional yang didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat dan berbagai stimulus pemerintah.

From the production side, economic growth is mainly supported by increased activity in the service sector, in line with the recovery of public mobility and the expansion of business activities. The Other Services Sector recorded the largest increase at 9.93%, followed by the corporate services sector, as well as transportation and warehousing, which also showed a substantial increase. Meanwhile, from the expenditure side, the Goods and Services Export Component increased the most at 7.03%, reflecting the sustained external demand for Indonesian products amid the global economic slowdown. In addition, household consumption remains the main contributor to national economic growth, supported by sustained public purchasing power and various government stimulus.

Stabilitas makroekonomi Indonesia selama tahun 2025 juga tercermin dari tingkat inflasi yang tetap terkendali dalam rentang sasaran pemerintah dan Bank Indonesia. Inflasi tahunan (y-on-y) tercatat sebesar 2,92% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 109,92. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga relatif terjaga meskipun terdapat kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran utama. Stabilitas inflasi yang terpelihara turut memberikan ruang bagi aktivitas konsumsi dan investasi untuk tetap tumbuh secara sehat sepanjang tahun.

Indonesia's macroeconomic stability in 2025 is reflected in the inflation rate, which remains controlled within the target range set by the government and Bank Indonesia. Annual inflation (y-on-y) was recorded at 2.92% with the Consumer Price Index (CPI) reaching 109.92. The condition indicates that price pressures are relatively contained despite price increases in several major expenditure groups. The maintained stability of inflation also provides room for consumption and investment activities to continue increasing healthily throughout the year.

Secara lebih rinci, inflasi y-on-y dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran, terutama kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 13,33%. Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,58%, diikuti kelompok kesehatan sebesar 1,83%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,62%, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,46%. Kelompok transportasi, pendidikan, rekreasi, olahraga dan budaya, pakaian dan alas kaki, serta perlengkapan rumah tangga juga mencatatkan kenaikan indeks harga secara moderat. Di sisi lain, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi sebesar 0,28%, sejalan dengan meningkatnya efisiensi layanan berbasis digital dan kompetisi di sektor teknologi informasi.

In more detail, year-on-year inflation is due to price increases in most expenditure groups, particularly the personal care and other services group, which experienced the highest inflation at 13.33%. Additionally, the food, beverage, and tobacco group had an inflation rate of 4.58%, followed by the health group at 1.83%, the housing, water, electricity, and household fuel group at 1.62%, and the food and beverage/restaurants group at 1.46%. The transportation, education, recreation, sports and culture, clothing and footwear, and household equipment groups also recorded moderate price index increases. On the other hand, the information, communication, and financial services group was the only group to experience deflation of 0.28%, in line with the increasing efficiency of digital-based services and competition in the information technology sector.

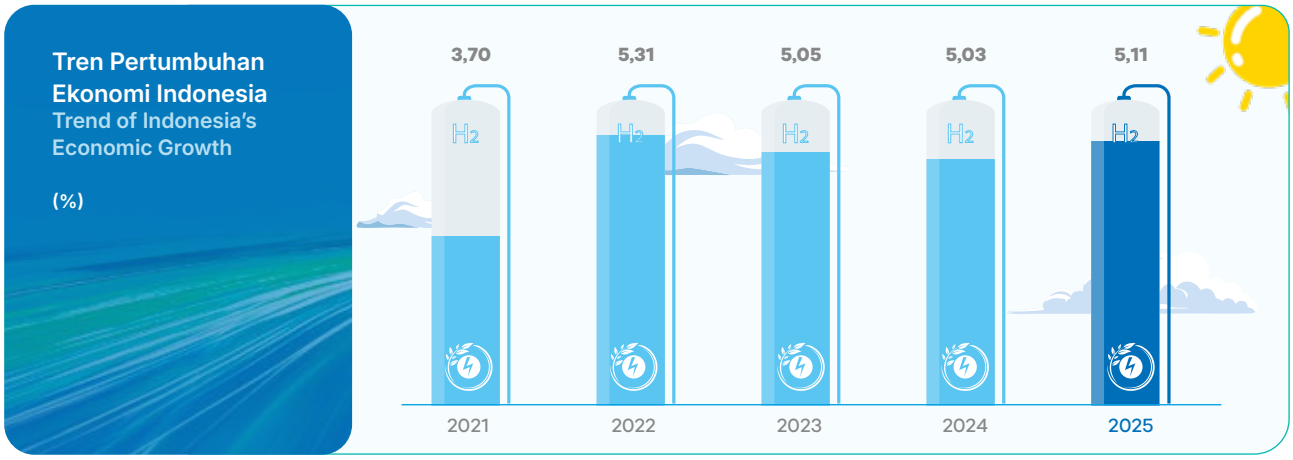

Sumber: Berita Resmi Statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Source: Official Gazette of Statistics by Statistics Indonesia

Dinamika Industri Kelistrikan dan Pembangkit Listrik
Dynamics of the Electricity and Power Plant Industry

Transformasi sektor ketenagalistrikan nasional terus berlangsung seiring meningkatnya kebutuhan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, arah pengembangan industri semakin difokuskan pada penguatan ketahanan energi nasional serta percepatan transisi menuju pemanfaatan energi yang lebih rendah emisi. Langkah tersebut tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menjadi acuan pengembangan sistem ketenagalistrikan Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060.

Sebagai bagian dari implementasi rencana tersebut, kapasitas pembangkit listrik nasional akan terus ditingkatkan guna mengantisipasi pertumbuhan permintaan listrik di berbagai sektor. Dalam periode 2025–2034, penambahan kapasitas pembangkit direncanakan mencapai sekitar 69,5 GW, dengan dominasi energi baru dan terbarukan (EBT) beserta sistem penyimpanan energi yang mencakup sekitar 76% dari total tambahan kapasitas. Komposisi tersebut mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam membangun sistem kelistrikan yang lebih ramah lingkungan, tanpa mengabaikan aspek keandalan pasokan energi yang tetap didukung oleh pembangkit berbasis gas dan batubara selama masa transisi.

The transformation of the national electricity sector continues as the demand for reliable, affordable, and sustainable energy increases. In recent years, the direction of industrial development has significantly focused on strengthening national energy resilience and accelerating the transition toward lower-emission energy. This approach is reflected in the 2025–2034 Electricity Supply Business Plan (RUPTL), which serves as the framework for the improvement of Indonesia's electricity system to support economic growth while achieving the Net Zero Emissions (NZE) target by 2060.

As part of the execution of this plan, the national power plant capacity will continue to be increased to anticipate the growth in electricity demand across various sectors. Between 2025 and 2034, the addition of power plant capacity is planned to reach around 69.5 GW, with a dominance of new and renewable energy (NRE) along with energy storage systems covering about 76% of the total additional capacity. The composition reflects the government's increasing commitment to building a greener electricity system, without neglecting the aspect of energy supply reliability, which remains supported by gas and coal-based power plants during the transition period.

Pengembangan kapasitas pembangkit juga diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan akses energi di seluruh wilayah Indonesia. Selain Pulau Jawa yang masih menjadi pusat konsumsi listrik nasional, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terus diperluas ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga kawasan Indonesia Timur. Berbagai proyek pembangkit berbasis tenaga air, panas bumi, dan surya menjadi bagian penting dalam optimalisasi potensi energi lokal sekaligus memperkuat bauran energi nasional. Dengan arah pengembangan tersebut, industri ketenagalistrikan Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem energi yang semakin andal, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

The development of power plant capacity is also aimed at supporting the equitable distribution of development and improving energy access throughout Indonesia. Besides Java Island, which remains the center of national electricity consumption, the development of electricity infrastructure continues to be expanded to Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, and the eastern regions of Indonesia. Various hydropower, geothermal, and solar power plant projects have become an important part of optimizing local energy potential while also strengthening the national energy mix. With this development direction, the Indonesian electricity industry is expected to create an energy system that is increasingly reliable and sustainable, and capable of supporting long-term national economic growth.

Merespons dinamika transisi energi, termasuk target *Net Zero Emission* Indonesia 2060 serta berbagai risiko dan peluang keberlanjutan, PLN NP secara aktif dan adaptif melakukan penguatan strategi bisnis melalui transformasi portofolio energi, peningkatan efisiensi operasional, pengembangan inovasi berbasis teknologi rendah karbon, serta penguatan terhadap tata kelola dan manajemen risiko keberlanjutan. Implementasi strategi dan inisiasi keberlanjutan dilakukan secara terstruktur melalui integrasi aspek *Environmental,*

Responding to the dynamics of the energy transition, including Indonesia's 2060 Net Zero Emission target and various sustainability risks and opportunities, PLN NP actively and adaptively strengthens its business strategy through energy portfolio transformation, operational efficiency improvements, development of low-carbon technology-based innovations, and enhancement of sustainability governance and risk management. The implementation of sustainability strategies and initiatives is performed in a structured

Social and Governance (ESG) ke dalam perencanaan strategis, operasional, serta pengambilan keputusan investasi. Berbagai inisiatif strategis ini tidak hanya berfokus pada penguatan kinerja operasional, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang melalui pengembangan energi bersih, peningkatan efisiensi, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim.

manner through the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects into strategic planning, operations, and investment decision-making. These various strategic initiatives not only focus on strengthening operational performance but also on creating long-term value through the development of clean energy, increased efficiency, and enhancing resilience to climate change.

Akselerasi Transisi Energi Melalui Pengembangan *Green Flagship Projects*

Accelerating the Energy Transition Through the Development of Green Flagship Projects

Sebagai salah satu *generation company* terbesar di Indonesia, PLN NP terus mengakselerasi transformasi bisnis melalui pengembangan lebih dari 6,30 GW pembangkit energi baru terbarukan (EBT) guna mewujudkan sistem ketenagalistrikan yang lebih bersih, andal, dan berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui *Green Flagship Projects*, sebuah rangkaian proyek unggulan pionir yang dirancang untuk mereduksi emisi karbon secara signifikan sekaligus mendukung target nasional *Net Zero Emission* (NZE) 2060. Melalui langkah strategis ini, Perusahaan memantapkan posisinya sebagai pelopor pembangunan pembangkit listrik berkelanjutan yang menjadi motor penggerak utama transisi energi demi masa depan Indonesia yang lebih hijau.

As one of the largest generation companies in Indonesia, PLN NP continues to accelerate business transformation through the development of more than 6.30 GW of new renewable energy (EBT) power plants to realize a cleaner, more reliable, and sustainable electricity system. This commitment is actualized through the Green Flagship Projects, a series of pioneering flagship projects designed to significantly reduce carbon emissions while supporting the national Net Zero Emission (NZE) 2060 target. Through this strategic step, the Company solidifies its position as a pioneer in the development of sustainable power plants, becoming the key driving force behind the energy transition for a greener future for Indonesia.

Green Flagship Project PLN Nusantara Power
Green Flagship Project of PLN Nusantara Power

1 PLTS Terapung Floating SPP Karangkates

Kapasitas Capacity	130 MWp / 100 MWac
Lokasi Location	Waduk Sutami/ Karangkates, Kab. Malang, Jawa Timur Sutami/Karangkates Reservoir, Malang Regency, East Java
COD	Desember 2026 (estimasi) December 2026 (estimation)
Status	Konstruksi Construstion

34.085 Rumah diterangi
Houses with electricity

3.287.032 ton/tahun emisi terhindarkan
Houses with electricity

2 PLTS Terapung Floating SPP Tembesi Batam

Kapasitas Capacity	46 MWp / 35 MWac
Lokasi Location	Waduk Tembesi, Batam, Prov. Kepulauan Riau Tembesi Reservoir, Batam, Riau Islands Province
COD	2025
Status	Konstruksi Construstion

11.929 Rumah diterangi
Houses with electricity

1.150.461 ton/tahun emisi terhindarkan
ton/year prevented emissions

3 PLTS SPP Ibu Kota Nusantara (IKN)

Kapasitas Capacity	50 MWac / 71,32 MWp + BESS 10 MWh
Lokasi Location	Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan
COD	November 2024
Status	Konstruksi Construstion

17.042 Rumah diterangi
Houses with electricity

1.643.516 ton/tahun emisi terhindarkan
ton/year prevented emissions

4 PLTA HPP Batang Toru

Kapasitas Capacity	510 MW
Lokasi Location	Kec. Sipirok Marancar (Batangtoru), Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Sipirok Marancar District (Batangtoru), South Tapanuli, North Sumatera
COD	2026
Status	Konstruksi Construstion

417.207 Rumah diterangi
Houses with electricity

40.233.276 ton/tahun emisi terhindarkan
ton/year prevented emissions

5 Proyek De-Dieselisasi De-Dieselization Project

Kapasitas Capacity	PV 58,296 MWp & 64,419 MWh BESS
Lokasi Location	48 lokasi di Kalimantan, Sumatera, Jawa & Madura 48 location in Kalimantan, Sumatera, Java & Madura
COD	2025
Status	*Development*

15.338 Rumah diterangi
Houses with electricity

1.479.165 ton/tahun emisi terhindarkan
ton/year prevented emissions

6 PLTB Tanah Laut Tanah Laut WPP

Kapasitas Capacity	70 MW + 10 MW/10 MWh BESS
Lokasi Location	Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan Tanah Laut Regency, South Kalimantan
COD	2026
Status	*Development*

38.175 Rumah diterangi
Houses with electricity

3.681.476 ton/tahun emisi terhindarkan
ton/year prevented emissions

7 *Add Demand* PLTS SPP Subang Smartpolitan

Kapasitas Capacity	17,8 MWp
Lokasi Location	Subang, Jawa Barat Subang, West Java
COD	2025
Status	*Development*

4.771 Rumah diterangi
Houses with electricity

460.186 ton/tahun emisi terhindarkan
ton/year prevented emissions

8 Project X Nusantara

Kapasitas Capacity	1.225,6 MW
Lokasi Location	Tersebar Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara dan Kalimantan Spread across Java, Sumatera, Nusa Tenggara and Kalimantan
COD	25 tahun 25 years
Status	*Initiation*

11.929 Rumah diterangi
Houses with electricity

1.150.461 ton/tahun emisi terhindarkan
ton/year prevented emissions

Kolaborasi untuk Masa Depan Hijau
Collaboration For Green Future

Bersama mitra strategis kami membangun ekosistem energi bersih yang berkelanjutan untuk indonesia.
Together with our strategic partners, we are building a sustainable clean energy ecosystem for Indonesia.

Total Kapasitas
Total Capacity
1.109,1 MW
(terpasang & dalam pengembangan)
(installed & under development)

Total rumah diterangi
Houses with Electricity
551.248
rumah
house

Emisi terhindarkan
Prevented Emissions
53.085.573
ton/tahun
ton/year

Mitra strategis
Strategic Partners
20+
mitra
ton/year

Bersinergi untuk transisi energi Indonesia
Working together for Indonesia's energy transition

Dalam menghadapi tren percepatan transisi energi, PLN NP mendorong peningkatan bauran energi melalui implementasi Roadmap EBT sebagai panduan strategis menuju target NZE tahun 2060. *Roadmap* ini menargetkan pengembangan kapasitas pembangkit EBT mencapai 6,30 GW hingga tahun 2030, yang bersumber dari optimalisasi PLTA/PLTM, PLTB, bioenergi, serta perluasan PLTS skala utilitas dan terapung. Guna menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional, pengembangan ini diintegrasikan dengan teknologi *Battery Energy Storage System* (BESS) serta akselerasi program dedieselisasi.

In addressing the trend of accelerating the energy transition, PLN NP encourages the enhancement of the energy mix through the implementation of the NRE Roadmap as a strategic guide toward the NZE target in 2060. This roadmap aims to develop NRE power plant capacity to reach 6.30 GW by 2030, sourced from the optimization of HPP/MHPP, WPP, bioenergy, and the expansion of utility-scale and floating SPP. To maintain the reliability of the national electricity system, this development is integrated with Battery Energy Storage System (BESS) technology and the acceleration of the dedieselization program.

Kontribusi PLN NP terhadap Pertumbuhan Industri Pembangkit Listrik di Indonesia

PLN NP's Contribution to the Growth of the Power Plant Industry in Indonesia

Sebagai salah satu *subholding* PT PLN (Persero), PLN NP mengoperasikan 31 unit pembangkit listrik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, PLN NP mencatat kontribusi penyediaan tenaga listrik sebesar 66.919,39 GWh. Kontribusi tersebut mencerminkan konsistensi Perusahaan dalam menjaga keandalan operasional pembangkit guna mendukung kebutuhan listrik nasional.

As one of the sub-holdings of PT PLN (Persero), PLN NP operates 31 power plant units spread across various regions of Indonesia. Until the end of 2025, PLN NP recorded a contribution to electricity supply of 66,919.39 GWh. This contribution reflects the Company's consistency to maintaining the operational reliability of power plants to support the national electricity needs.

Dalam mendukung penyediaan tenaga listrik nasional, PLN NP menerapkan tiga prinsip utama ketahanan energi, yaitu *security*, *affordability*, dan *low emission*. Implementasi prinsip tersebut dilakukan melalui berbagai program strategis, antara lain *coal switching, anti-blackout* dan unit *fast response*, swakelola pemeliharaan, optimalisasi pemakaian sendiri melalui PLTS substitusi pemakaian sendiri, penerapan *co-firing*, serta pengembangan budidaya tanaman energi untuk mendukung program *co-firing* pada PLTU batubara.

In supporting the provision of national electricity, PLN NP implements three main principles of energy resilience, namely security, affordability, and low emissions. These principles are actualized through various strategic programs, including coal switching, anti-blackout and fast response units, self-managed maintenance, optimization of self-consumption through SPP substitution, co-firing application, and the development of energy crop cultivation to support the co-firing program at coal-fired CFPPs.

Kontribusi PLN NP terhadap sektor pembangkitan dan penyediaan listrik nasional juga sejalan dengan transformasi PLN yang berlandaskan empat *Moonshot* utama, yaitu *Growth Moonshot*, *Digital Moonshot*, *Net Zero Emission Moonshot*, dan *Launchpad Moonshot*. Selaras dengan arah transformasi tersebut, PLN NP menetapkan fokus pengembangan berdasarkan *Growth Moonshot*, *Digital and Operation Excellence Moonshot*, *Net Zero Emission Moonshot*, serta *Launchpad Moonshot*. Transformasi ini mendorong integrasi aset PLN yang sebelumnya tersebar menjadi lebih terfokus dan berbasis fungsi, sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional.

Additionally, PLN NP's contribution to the national electric power generator and supply sector is in line with PLN's transformation based on four main Moonshots: Growth Moonshot, Digital Moonshot, Net Zero Emission Moonshot, and Launchpad Moonshot. In line with this transformation direction, PLN NP has set development focuses based on Growth Moonshot, Digital and Operation Excellence Moonshot, Net Zero Emission Moonshot, and Launchpad Moonshot. This transformation encourages the integration of PLN's previously scattered assets to become more focused and function-based, thereby increasing the effectiveness of operational management.

Pasca pengalihan wave 1 pada tahun 2023, PLN NP mengelola pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 18 GW. Selain mendukung keandalan sistem ketenagalistrikan nasional melalui pengelolaan pembangkit tersebut, PLN NP juga memberikan kontribusi terhadap implementasi SOLID PLN melalui berbagai inisiatif strategis sebagai berikut:

After the transfer of wave 1 in 2023, PLN NP manages power plants with a total capacity of 18 GW. In addition to supporting the reliability of the national electricity system with the management of these power plants, PLN NP also contributes to PLN's SOLID through various strategic initiatives as follows:

Securing Business Sustainability

a. Menjaga sekuritas Sistem dan *Ramping Rate*.
b. Menjaga stabilitas tegangan Sistem Jawa Bali.
c. Dukungan 6 *line of defense system* Jawa Bali dengan cara penguatan sistem proteksi di semua pembangkit dan fasilitas *blackstart*.

a. Maintaining System security and Ramping Rate.
b. Maintaining the voltage stability of the Java Bali System.
c. Support the six lines of defense for the Java Bali system by strengthening the protection system in all power plants and blackstart facilities.

Optimizing Cost Efficiency

a. Optimasi *Coal Switching* dan keandalan Pembangkit.
b. Optimasi PS untuk *Auxilary* and *Office Building Facilities*.
c. Optimasi biaya dan *Supply Chain* energi primer.
d. Meningkatkan keandalan operasional, suplai dan layanan.

a. Coal Switching optimization and Power Plant reliability.
b. PS optimization for Auxiliary and Office Building Facilities.
c. Primary energy cost and Supply Chain optimization.
d. Improving operational, supply, and service reliability.

Leading Industries Capabilities

a. Meningkatkan *operational excellence* termasuk digitalisasi untuk mencapai *top quartile performance*.
b. Membentuk tim pengembangan bisnis internasional untuk menajamkan strategi *marketing* yang kompetitif di pasar internasional.

a. Improving operational excellence, including digitalization, to achieve top-quartile performance.
b. Establishing an international business development team to sharpen competitive marketing strategies in international markets.

Increasing Profit Contribution

a. Peningkatan kinerja keuangan Anak Perusahaan/ Perusahaan Afiliasi.
b. Peningkatan Laba Perusahaan Asosiasi.
c. Eksekusi pengembangan bisnis penugasan RUPTL

a. Improved financial performance of Subsidiaries/ Affiliated Companies.
b. Increased Profit of Associated Companies.
c. Execution of RUPTL assignment business development.

Developing New Edge

a. Ekspansi Pembangkit Energi Baru Terbarukan dalam meningkatkan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan.
b. Pengembangan *additional demand* untuk pembangkit pada porsi *captive power* atau akuisisi pembangkit.
c. Pengembangan bisnis inovatif.
d. Implementasi *Environmental, Social, dan Governance* (ESG).

a. Expansion of New Renewable Energy Power Plants to increase contribution to environmental sustainability.
b. Development of additional demand for power plant in captive power portion or acquisition of power plant.
c. Innovative business development.
d. Environmental, Social, and Governance (ESG) implementation.

Analisis Operasi Per Segmen Usaha
Operational Analysis per Business Segment

Kinerja PLN NP tahun 2025 mencerminkan kontribusi optimal dari seluruh lini operasional yang didukung oleh sinergi kuat dan efektivitas pelaksanaan kerja. Keandalan serta konsistensi performa pembangkit menjadi pendorong utama tercapainya target operasional secara menyeluruh. Pencapaian tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan Perusahaan, sekaligus menegaskan arah pertumbuhan yang berkelanjutan dan sehat.

The performance of PLN NP in 2025 reflects the optimal contribution from all operational lines supported by strong synergy and effective work execution. The reliability and consistency of power plant performance are the main drivers in achieving operational targets comprehensively. That achievement also has a positive impact on the Company's financial performance improvement, while simultaneously affirming the direction of sustainable and sound growth.

Segmen Usaha Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales Business Segment

PLN NP mengelola portofolio 31 Unit Pembangkitan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang produksi dan penjualan tenaga listrik.

PLN NP manages a portfolio of 31 generation units spread across various regions of Indonesia, which serves as the main foundation for conducting business activities in the field of electricity production and sales.

Struktur pendapatan Perusahaan didominasi oleh penjualan tenaga listrik yang memberikan kontribusi sebesar 96,03% terhadap total pendapatan, yang dihasilkan dari kinerja operasional unit pembangkitan. Aktivitas pada segmen ini mencakup keseluruhan rantai nilai, mulai dari proses pembangkitan hingga penyaluran dan penjualan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

The Company's revenue structure is significantly driven by electricity sales, which contribute 96.03% to total revenue, generated from the power generator unit's operational performance. Activities in this segment encompass the entire value chain, from the generation process to the distribution and sale of electricity to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pengelolaan bisnis dilakukan melalui pendekatan berbasis kinerja dengan menekankan pada pengukuran dan pengendalian indikator utama secara berkelanjutan. Perusahaan memprioritaskan optimalisasi kinerja pembangkit, peningkatan volume produksi, serta penguatan efektivitas komersial. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus mendorong terciptanya efisiensi dan nilai tambah yang berkesinambungan.

Business management is conducted through a performance-based approach with an emphasis on continuous measurement and control of key indicators. The Company prioritizes power plant performance optimization, production volume increase, and commercial effectiveness strengthening. This approach is targeted at ensuring the reliability of the national electricity system while promoting the creation of sustainable efficiency and added value.

Kinerja Unit Pembangkitan
Generation Unit Performance

Kinerja pembangkit PLN NP diukur melalui sejumlah parameter operasional utama yang mencerminkan tingkat keandalan dan efisiensi pengelolaan aset,

The performance of PLN NP power plants is measured using several key operational parameters that reflect the level of reliability and efficiency in asset management,

meliputi faktor ketersediaan, frekuensi gangguan, tingkat efisiensi pembangkit, efektivitas pelaksanaan pemeliharaan, serta kapasitas daya terpasang.

Sepanjang tahun 2025, kinerja operasional pembangkit menunjukkan capaian yang baik. Sejumlah indikator kunci, khususnya efisiensi pembangkit serta ketepatan jadwal dan durasi pemeliharaan, terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Hasil tersebut mencerminkan konsistensi pengelolaan operasional yang disiplin serta penguatan praktik pemeliharaan berbasis kinerja. Capaian ini sekaligus menegaskan peran strategis PLN NP dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional, melalui optimalisasi kinerja pembangkit yang berkelanjutan guna mendukung pemenuhan kebutuhan energi.

Dalam uraian kinerja pembangkitan, PLN NP mengklasifikasikan kinerja Unit Pembangkitan yang terbagi menjadi Unit Pembangkitan Batubara yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara yakni Non PLTU (gas, hydro, diesel).

including availability factor, frequency of disturbances, power plant efficiency, effectiveness of maintenance execution, and installed capacity.

Throughout 2025, the power plant's operational performance showed good achievements. Several key indicators, particularly plant efficiency as well as the timeliness and duration of maintenance, were achieved according to the set targets. The results reflect the consistency of disciplined operational management and the strengthening of performance-based maintenance practices. This achievement simultaneously highlights the strategic role of PLN NP in maintaining the reliability of the national electricity system through the sustainable optimization of power plant performance to support energy needs.

In the description of electric power generator performance, PLN NP classifies the performance of Generation Units which are divided into Coal Generation Units, namely Steam Power Plants (CFPP), and Gas & Non-Coal Generation Units, namely non-CFPP (gas, hydro, diesel).

Faktor Kesiapan dan Keandalan Unit Pembangkitan
Readiness and Reliability Factors of Generation Units

PLN NP mengarahkan strategi bisnis pada optimalisasi nilai melalui peningkatan penjualan tenaga listrik yang dihasilkan dari kinerja pembangkitan, dengan memastikan pencapaian standar keandalan unit pembangkitan yang selaras dengan praktik terbaik global. Pendekatan *cost leadership* diterapkan secara konsisten sebagai landasan dalam menjaga daya saing serta mendukung penciptaan nilai bagi Pemegang Saham.

Keandalan dan kinerja unit pembangkit dievaluasi melalui sejumlah indikator teknis utama, antara lain *Equivalent Availability Factor* (EAF), *Scheduled Outage Factor* (SOF), dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR). Parameter-parameter tersebut menjadi acuan dalam mengukur tingkat kesiapan operasional, efisiensi penggunaan energi, serta efektivitas pengelolaan pembangkit dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik secara andal dan berkelanjutan.

PLN NP directs its business strategy toward value optimization by increasing electricity sales generated from power generator performance, ensuring the achievement of generation unit reliability standards in line with global best practices. The cost leadership approach is consistently applied as a foundation for maintaining competitiveness and supporting value creation for Shareholders.

The reliability and performance of the power plant unit are evaluated using several key technical indicators, including the Equivalent Availability Factor (EAF), Scheduled Outage Factor (SOF), and Net Plant Heat Rate (NPHR). These parameters serve as benchmarks in measuring the level of operational readiness, energy usage efficiency, and the effectiveness of power plant management in meeting the demand for a reliable and sustainable electricity supply.

EAF Unit Pembangkitan
EAF of Generation Unit

EAF adalah indikator yang menunjukkan tingkat kesiapan suatu pembangkit untuk beroperasi menghasilkan energi listrik. EAF menjadi indikator utama Perusahaan dalam mewujudkan pelayanan kepada pelanggan. Nilai EAF berfungsi untuk mengetahui faktor ketersediaan pembangkit untuk beroperasi dengan Daya Mampu Netto (DMN) pada periode tertentu.

Semakin tinggi nilai EAF menunjukkan kinerja pembangkit yang semakin baik.

EAF is the indicator that shows the readiness level of a power plant to operate and produce electricity. EAF is the Company's main indicator in realizing services to customers. The corporate EAF value has the function of knowing the availability factor of the power plant corporately to operate with Net Dependable Capacity (NDC) in a certain period.

The higher the EAF value, the better the power plant performance.

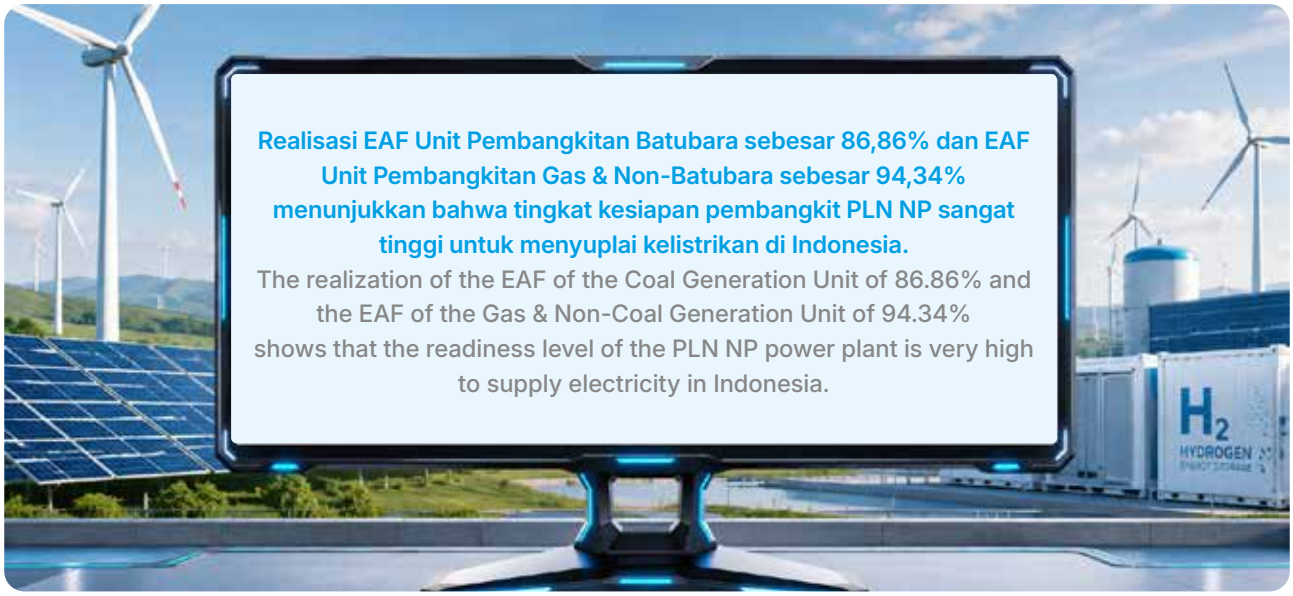

Realisasi EAF Unit Pembangkitan Batubara sebesar 86,86% dan EAF Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara sebesar 94,34% menunjukkan bahwa tingkat kesiapan pembangkit PLN NP sangat tinggi untuk menyuplai kelistrikan di Indonesia.
The realization of the EAF of the Coal Generation Unit of 86.86% and the EAF of the Gas & Non-Coal Generation Unit of 94.34% shows that the readiness level of the PLN NP power plant is very high to supply electricity in Indonesia.

EAF Unit Pembangkitan Batubara

Nilai EAF unit pembangkitan batubara PLN NP pada tahun 2025 adalah 86,86%, yaitu meningkat 4,05% dibandingkan tahun 2024 sebesar 83,48%. Hal ini terutama didukung oleh meningkatnya kesiapan pembangkit, optimasi durasi dalam pelaksanaan pemeliharaan terencana dan percepatan *recovery* pasca *forced outage* dan *derating*.

EAF of Coal Generation Unit

The EAF value of PLN NP's coal generation unit in 2025 is 86.86%, an increase of 4.05% compared to 2024, which was 83.48%. It is mainly driven by the increased readiness of power plants, optimized duration in the execution of planned maintenance, and accelerated recovery after forced outages and deratings.

Tabel EAF Unit Pembangkitan Batubara (%)
Table of EAF of Coal Generation Unit (%)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Paiton Paiton GU	95,12	91,08	83,21	83,77	**92,29**	10,17
UP Paiton-9 (*) Paiton-9 GU			Digabung dengan UP Paiton karena reorganisasi Merged with Paiton GU due to reorganization			-
UP Indramayu Indramayu GU			85,16	79,49	**85,25**	7,25
UP Rembang Rembang GU			87,31	86,61	**88,91**	2,66
UP Pacitan Pacitan GU			88,67	87,89	**84,11**	(4,30)
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU			84,78	88,26	**87,17**	(1,23)
UP Tenayan Tenayan GU			81,32	84,94	**84,70**	(0,28)
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU			82,57	70,65	**81,62**	15,53
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU			85,32	83,47	**83,64**	0,20
UP Bukit Asam Bukit Asam GU			80,42	91,77	**93,87**	2,29
UP Sebalang Sebalang GU			86,28	69,17	**78,84**	13,98
UP Tarahan Tarahan GU			88,21	83,98	**76,08**	(9,41)
UP Nagan Raya Nagan Raya GU			79,38	81,37	**80,93**	(0,54)
UP Punagaya Punagaya GU			87,26	79,29	**81,37**	2,62
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP			89,15	86,70	**85,42**	(1,48)
PLTU Ketapang Ketapang CFPP			88,97	87,30	**83,96**	(3,83)
PLTU Amurang Amurang CFPP			97,83	82,54	**87,64**	6,18
PLTU Anggrek Anggrek CFPP			84,07	74,99	**78,05**	4,08
PLTU Ampana Ampana CFPP			83,55	76,34	**81,36**	6,58
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP			53,12	69,39	**80,39**	15,85
EAF Unit Pembangkitan Batubara (%) EAF of Coal Generation Unit (%)	**95,12**	**84,85**	**84,85**	**83,48**	**86,86**	**4,05**

Belum menjadi aset PLN NP
Not yet an asset of PLN NP

* sejak tahun 2023 kinerja operasi PLTU Paiton 9 digabung dengan PLTU Paiton 1-2 karena adanya reorganisasi menjadi UP Paiton

* since 2023, the operating performance of Paiton 9 CFPP has been merged with Paiton 1-2 CFPP due to reorganization into Paiton GU

Grafik EAF Unit Pembangkitan Batubara
Chart of EAF of Coal Generation Unit

(%)

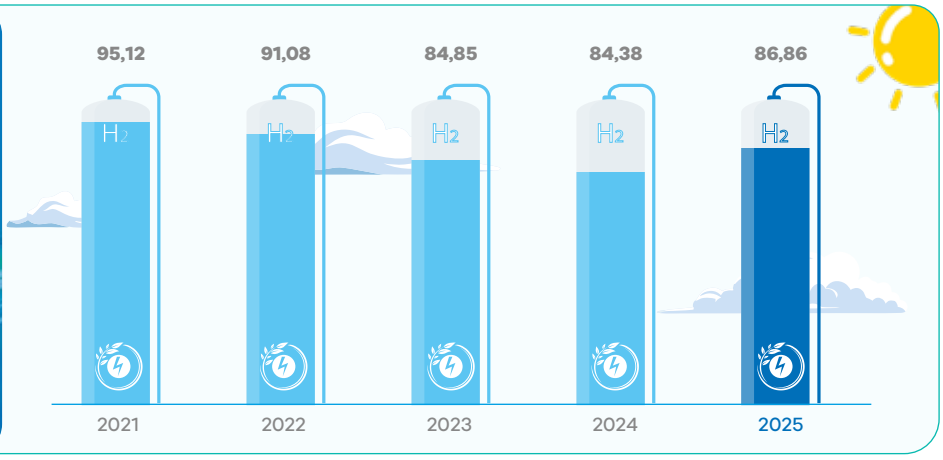

EAF Unit Pembangkitan Gas dan Non-Batubara

Nilai EAF unit pembangkitan gas dan non-batubara PLN NP pada tahun 2025 adalah 94,34%, yaitu sama dengan tahun 2024 sebesar 94,34%. Hal ini terutama disebabkan oleh stabilnya keandalan unit pembangkit melalui optimalisasi operasi dan pemeliharaan pembangkit secara berkelanjutan.

EAF of Gas and Non-Coal Generation Unit

The EAF value of PLN NP's gas and non-coal generation units in 2025 was 94.34%, which is the same as the 2024 figure of 94.34%. This is primarily due to the consistent reliability of the power plant units, achieved through the continuous optimization of power plant operations and maintenance.

Tabel EAF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (%)
Table of EAF of Gas and Non-Coal Generation Unit (%)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Brantas Brantas GU	97,67	97,73	97,88	98,07	**98,12**	0,05
UP Cirata Cirata GU	92,17	91,62	95,19	96,02	**95,20**	(0,85)
UP Muara Karang Muara Karang GU	97,81	93,87	97,15	94,10	**96,71**	2,77
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	93,72	93,87	98,29	95,50	**94,34**	(1,21)
UP Gresik Gresik GU	97,77	96,52	94,56	95,95	**96,52**	0,59
PLTMG Bawean Bawean GEPP	-	-	96,74	99,28	Digabung dengan UP Gresik Merged with Gresik GU	-
PLTD Suppa Suppa DPP	-	-		Digabung dengan UP Bakaru karena reorganisasi Merged with Bakaru GU due to reorganization		-
UP Arun Arun GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		92,97	95,48	**95,74**	0,27
PLTG Sebalang Sebalang GTPP			63,72	76,91	**50,64**	(34,16)
UP Belawan Belawan GU			83,97	87,20	**82,90**	(4,93)
UP Pekanbaru Pekanbaru GU			90,15	94,28	**95,18**	0,95
UP Bandar Lampung Bandar Lampung GU			96,47	96,59	**93,82**	(2,87)
UP Pandan Pandan GU			93,23	95,51	**92,62**	(3,03)
UP Bakaru Bakaru GU			99,69	89,88	**93,16**	3,65
UP Minahasa Minahasa GU			95,36	95,28	**97,19**	2,00
UP Gorontalo Gorontalo GU			95,58	94,94	**91,83**	(3,28)
UP Kendari Kendari GU			93,23	88,68	**96,49**	8,81
UP Kapuas Kapuas GU			94,94	85,35	**84,68**	(0,79)
UP Sengkang Sengkang GU			94,27	94,70	**94,22**	(0,51)
UPDK Balikpapan Balikpapan GCU			97,73	Reorganisasi menjadi UP Kaltimra dan UP Kalselteng Reorganization into Kaltimra GU and Kalselteng GU		-
UPDK Tarakan Tarakan GCU			92,09			-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU			93,78			-
UP Kaltimra Kaltimra GU			-	94,47	**88,68**	(6,13)
UP Kalselteng Kalselteng GU			-	96,15	**95,01**	(1,19)
EAF Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara (%) EAF of Gas & Non-Coal Generation Unit (%)	**95,21**	**95,18**	**94,73**	**94,34**	**94,34**	-

Grafik EAF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara
Chart of EAF of Gas & Non-Coal Generation Unit

(%)

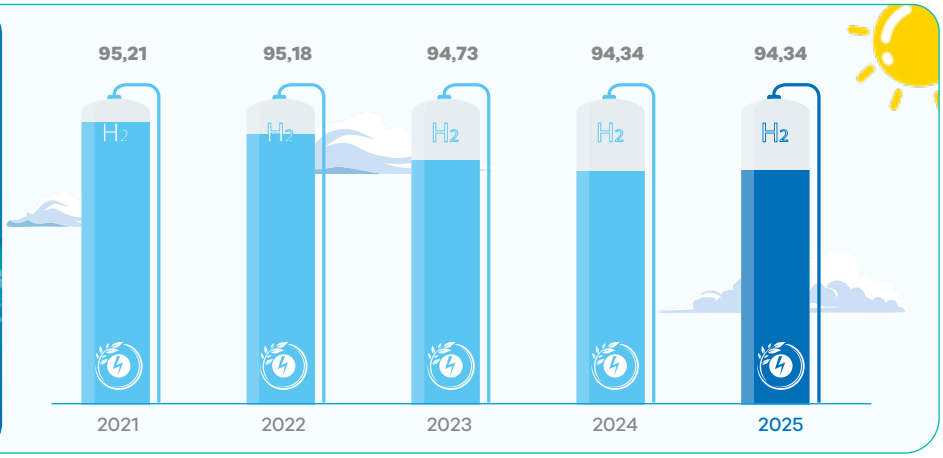

SOF Unit Pembangkitan
SOF of Generation Unit

SOF adalah indikator untuk mengukur tingkat pembangkit keluar sistem karena pemeliharaan terencana, yaitu *Planned Outage Hour dan Maintenance Outage Hour* yang sudah direncanakan sebelumnya. Semakin tinggi nilai SOF menunjukkan pemeliharaan terencana yang dilakukan pada mesin pembangkit lebih banyak (dari sisi durasi).

SOF is the indicator to measure the level of power plant out of the system due to planned maintenance, namely the predetermined Planned Outage Hour and Maintenance Outage Hour. The higher the SOF value, the more planned maintenance is implemented on the power plant (in terms of duration).

Semakin rendah nilai SOF, maka dinilai semakin baik karena menunjukkan optimasi durasi pemeliharaan yang sudah direncanakan sebelumnya.

The lower the SOF value, the better it is due to the optimization of the pre-planned maintenance duration.

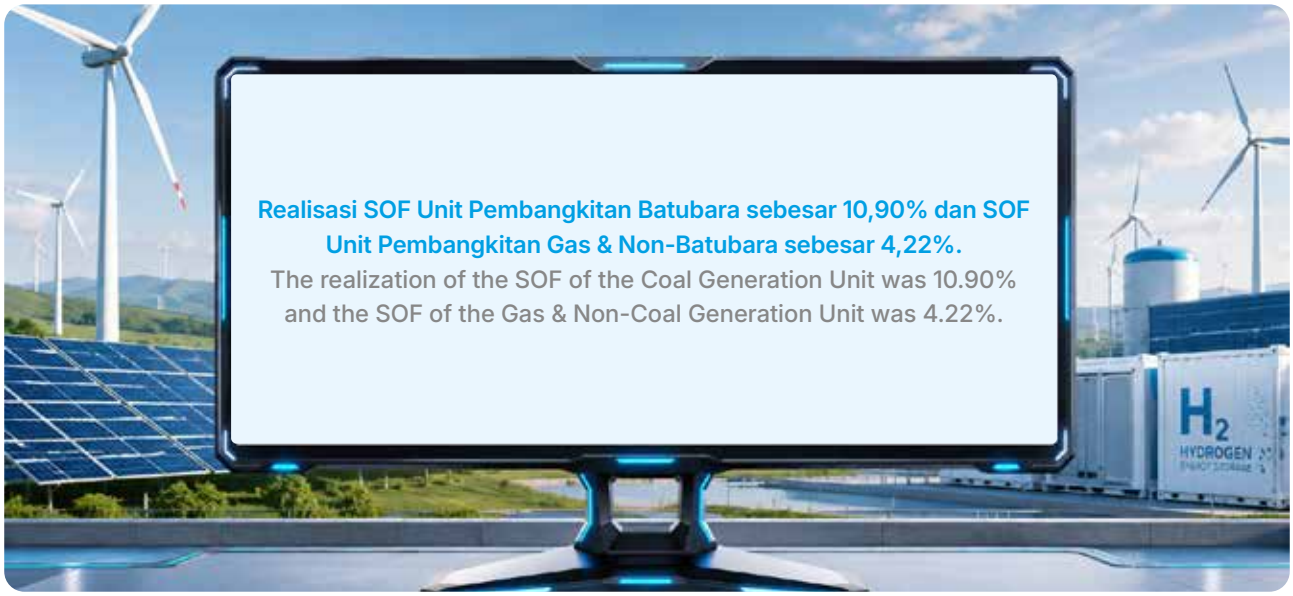

Realisasi SOF Unit Pembangkitan Batubara sebesar 10,90% dan SOF Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara sebesar 4,22%.
The realization of the SOF of the Coal Generation Unit was 10.90% and the SOF of the Gas & Non-Coal Generation Unit was 4.22%.

SOF Unit Pembangkitan Batubara

Nilai SOF unit pembangkitan batubara PLN NP pada tahun 2025 adalah 10,90%, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 13,47%. Hal ini menunjukkan optimasi durasi dalam pelaksanaan pemeliharaan terencana terutama didukung oleh ketepatan perencanaan dan percepatan eksekusi pemeliharaan terencana sesuai dengan Panduan Implementasi Manajemen Aset Pembangkitan.

SOF of Coal Generation Unit

The SOF value of the PLN NP coal generation unit in 2025 was 10.90%. It is lower than the 2024 figure of 11.71%. It shows the optimization of duration in the implementation of planned maintenance, especially supported by the accuracy of planning and the acceleration of the execution of planned maintenance in accordance with the Guidelines for Generation Asset Management Implementation.

Tabel SOF Unit Pembangkitan Batubara (%)
Table of SOF of Coal Generation Unit (%)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Paiton Paiton GU	3,88	8,47	14,98	14,43	**7,35**	(49,06)
UP Paiton-9 (*) Paiton-9 GU			Digabung dengan UP Paiton karena reorganisasi Merged with Paiton GU due to reorganization			-
UP Indramayu Indramayu GU			11,11	18,16	**11,91**	(34,42)
UP Rembang Rembang GU			10,28	12,18	**8,99**	(26,19)
UP Pacitan Pacitan GU			9,17	10,21	**14,20**	39,08
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU			13,16	9,50	**11,12**	17,05
UP Tenayan Tenayan GU			13,22	11,89	**13,06**	9,84
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU			9,71	22,13	**13,53**	(38,86)
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		11,70	13,80	**13,99**	1,38
UP Bukit Asam Bukit Asam GU			9,02	6,71	**4,50**	(32,94)
UP Sebalang Sebalang GU			7,57	19,17	**15,01**	(21,70)
UP Tarahan Tarahan GU			10,50	11,40	**18,06**	58,42
UP Nagan Raya Nagan Raya GU			13,88	11,43	**18,16**	58,88
UP Punagaya Punagaya GU			7,44	12,84	**10,79**	(15,97)
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP			10,28	11,90	**13,40**	12,61
PLTU Ketapang Ketapang CFPP			7,79	8,47	**13,42**	58,44
PLTU Amurang Amurang CFPP			1,31	12,93	**10,98**	(15,08)
PLTU Anggrek Anggrek CFPP			5,27	9,55	**13,56**	41,99
PLTU Ampana Ampana CFPP			13,77	20,50	**16,16**	(21,17)
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP			19,65	15,76	**11,79**	(25,19)
SOF Unit Pembangkitan Batubara (%) **SOF of Coal Generation Unit (%)**	**3,88**	**8,47**	**11,71**	**13,47**	**10,90**	**(19,08)**

* sejak tahun 2023 kinerja operasi PLTU Paiton 9 digabung dengan PLTU Paiton 1-2 karena adanya reorganisasi menjadi UP Paiton

* since 2023, the operating performance of Paiton 9 CFPP has been merged with Paiton 1-2 CFPP due to reorganization into Paiton GU

Grafik SOF Unit Pembangkitan Batubara
Chart of SOF of Coal Generation Unit

(%)

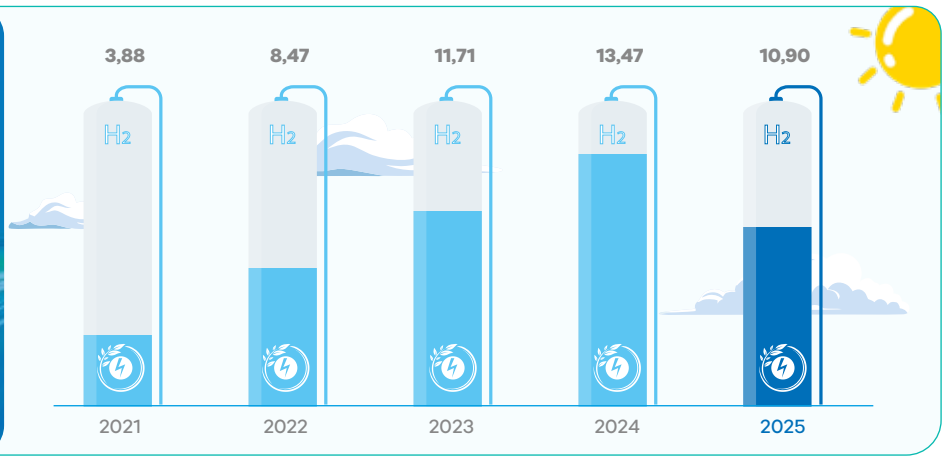

SOF Unit Pembangkitan Gas dan Non-Batubara

Nilai EAF unit pembangkitan gas dan non-batubara PLN NP pada tahun 2025 adalah 4,22%, yaitu meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,01%. Hal ini disebabkan karena adanya pemeliharaan Major pembangkit besar untuk pembangkit Non PLTU.

SOF of Gas and Non-Coal Generation Unit

The SOF value of PLN NP's gas and non-coal generation units in 2025 was 4.22%, an increase compared to 2024 of 4.01%. This is due to major maintenance on large power plants, for Non-CFPP.

Tabel SOF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (%)
Table of SOF of Gas and Non-Coal Generation Unit (%)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Brantas Brantas GU	2,26	2,27	2,12	1,93	**1,86**	(3,63)
UP Cirata Cirata GU	3,13	7,96	4,79	3,88	**4,76**	22,68
UP Muara Karang Muara Karang GU	1,42	5,50	2,43	5,15	**3,01**	(41,55)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	2,83	5,25	1,47	3,78	**5,22**	38,10
UP Gresik Gresik GU	1,04	3,03	3,84	3,32	**3,01**	(9,34)
PLTMG Bawean Bawean GEPP	-	-	3,24	0,70	Digabung dengan UP Gresik Merged with Gresik GU	-
PLTD Suppa Suppa DPP	-	-	0,61	Digabung dengan UP Bakaru karena reorganisasi Merged with Bakaru GU due to reorganization		-
UP Arun Arun GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		4,15	4,60	**3,72**	(19,13)
PLTG Sebalang Sebalang GTPP			7,66	6,83	**0,00**	(100,00)
UP Belawan Belawan GU			5,72	4,84	**6,30**	30,17
UP Pekanbaru Pekanbaru GU			8,95	5,40	**4,29**	(20,56)
UP Bandar Lampung Bandar Lampung GU			3,14	3,39	**6,13**	80,83
UP Pandan Pandan GU			6,40	3,80	**7,36**	93,68

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Bakaru Bakaru GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		0,25	2,53	**5,97**	135,97
UP Minahasa Minahasa GU			4,35	1,99	**2,21**	11,06
UP Gorontalo Gorontalo GU			4,09	2,46	**5,65**	129,56
UP Kendari Kendari GU			3,95	4,60	**5,06**	10,07
UP Kapuas Kapuas GU			3,55	1,65	**3,99**	141,93
UP Sengkang Sengkang GU			3,55	3,71	**4,16**	12,13
UPDK Balikpapan Balikpapan GCU			1,22	Reorganisasi menjadi UP Kaltimra dan UP Kalselteng Reorganization into Kaltimra GU and Kalselteng GU		-
UPDK Tarakan Tarakan GCU			5,09			-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU			5,50			-
UP Kaltimra Kaltimra GU			-	4,22	**7,89**	86,97
UP Kalselteng Kalselteng GU			-	3,11	**4,82**	54,91
SOF Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara (%) SOF of Gas and Non-Coal Generation Unit (%)	**2,57**	**4,35**	**3,53**	**4,01**	**4,22**	**5,24**

Grafik SOF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara
Chart of SOF of Gas and Non-Coal Generation Unit

(%)

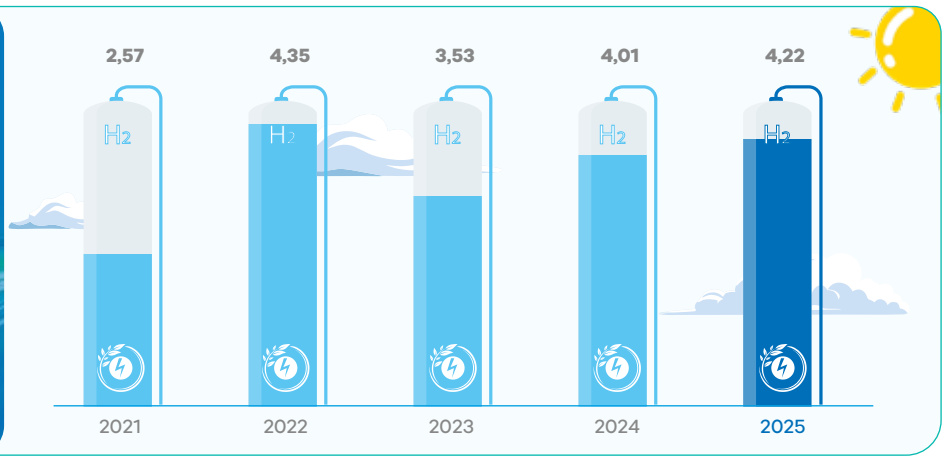

Net Plant Heat Rate (NPHR)

Net Plant Heat Rate (NPHR) merupakan indikator untuk mengukur efisiensi mesin pembangkit thermal. Indikator NPHR bertujuan untuk mengukur efisiensi pemakaian bahan bakar yang dikonversikan ke dalam nilai kalori yang dibutuhkan untuk setiap kWh produksi neto yang dibangkitkan oleh unit pembangkit pada suatu periode.

Semakin rendah nilai *Net Plant Heat Rate* menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien.

Net Plant Heat Rate (NPHR) is an indicator to measure the efficiency of thermal power plants machines. The NPHR indicator aims to measure the efficiency of fuel consumption converted into the calorific value needed for each kWh of net production generated by the power plant unit in a period.

The lower the Net Plant Heat Rate indicates that the power plant is more efficient.

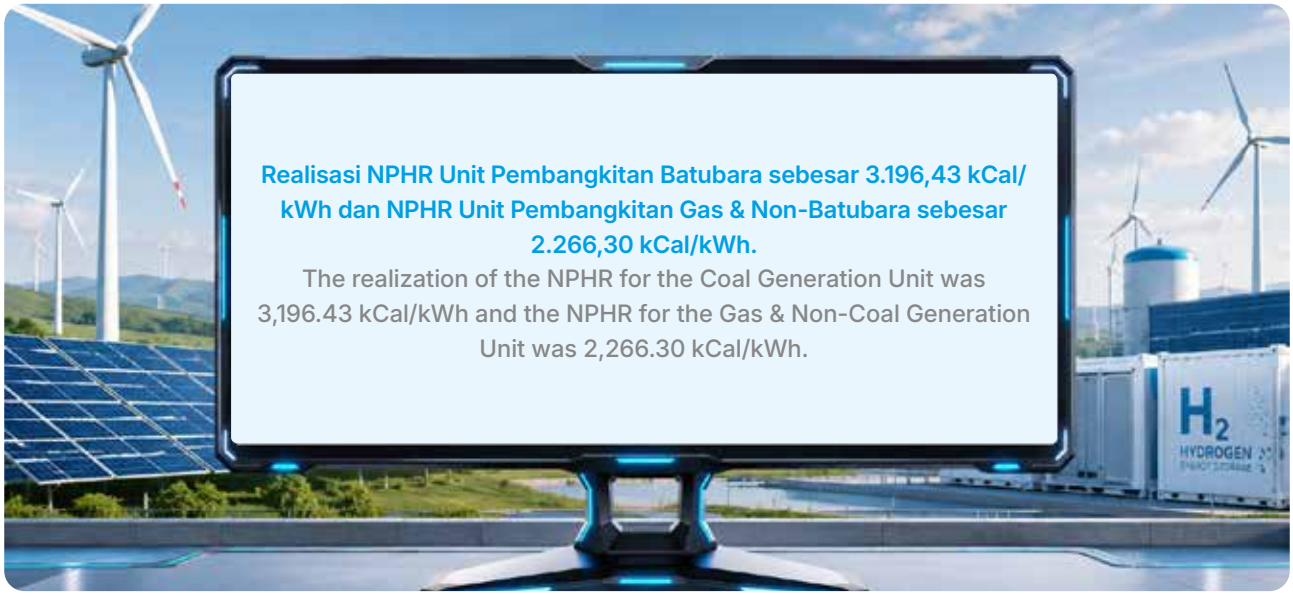

Realisasi NPHR Unit Pembangkitan Batubara sebesar 3.196,43 kCal/kWh dan NPHR Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara sebesar 2.266,30 kCal/kWh.

The realization of the NPHR for the Coal Generation Unit was 3,196.43 kCal/kWh and the NPHR for the Gas & Non-Coal Generation Unit was 2,266.30 kCal/kWh.

NPHR Unit Pembangkitan Batubara

Nilai NPHR unit pembangkitan batubara PLN NP pada tahun 2024 adalah 3.196,43 kCal/kWh, yaitu meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 3.092,48 kCal/kWh. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan volume *cofiring* biomassa yang memiliki nilai kalor lebih rendah dari kalori batubara sehingga mempengaruhi nilai efisiensi pembangkit.

NPHR of Coal Generation Unit

In 2025, the NPHR value of the PLN NP coal generation unit was 3,196.43 kCal/kWh, an increase compared to 2024 of 3,092.48 kCal/kWh. This is mainly influenced by the increase in the volume of biomass cofiring, which has a lower calorific value than coal, thereby affecting the efficiency value of the power plant.

Tabel NPHR Unit Pembangkitan Batubara (kCal/kWh)
Table of NPHR of Coal Generation Unit (kCal/kWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Paiton Paiton GU	2.749,89	2.797,22	**2.737,62**	2.808,25	**2.888,97**	2,87
UP Paiton-9 (*) Paiton-9 GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		Digabung dengan UP Paiton karena reorganisasi Merged with Paiton GU due to reorganization			-
UP Indramayu Indramayu GU			2.875,72	2.951,33	**3.096,12**	4,91
UP Rembang Rembang GU			2.849,05	2.914,85	**3.065,11**	5,15
UP Pacitan Pacitan GU			2.758,66	2.857,42	**2.946,65**	3,12
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU			2.794,54	2.790,36	**2.822,47**	1,15
UP Tenayan Tenayan GU			3.777,20	3.648,62	**3.794,91**	4,01
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU			3.422,34	3343,12	**3.509,30**	4,97
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU			4.052,11	3.908,94	**3.956,67**	1,22
UP Bukit Asam Bukit Asam GU			3.842,42	3.684,18	**3.837,48**	4,16
UP Sebalang Sebalang GU			4.307,74	4.455,53	**4.710,81**	5,73
UP Tarahan Tarahan GU			2.981,92	3.165,54	**3.212,48**	1,48

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Nagan Raya Nagan Raya GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		3.902,88	3.973,63	**4.831,73**	21,59
UP Punagaya Punagaya GU			3.221,75	3.335,69	**4.396,47**	31,80
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP			5.917,39	5841,05	**6.156,83**	5,41
PLTU Ketapang Ketapang CFPP			6.142,17	5.968,41	**6.232,64**	4,43
PLTU Amurang Amurang CFPP			4.561,08	4.549,00	**4.663,35**	2,51
PLTU Anggrek Anggrek CFPP			6.263,24	5.860,47	**5.980,36**	2,05
PLTU Ampana Ampana CFPP			9.735,18	7.395,33	**9.077,30**	22,74
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP			5.780,87	5.877,49	**5.673,50**	(3,47)
NPHR Unit Pembangkitan Batubara NPHR of Coal Generation Unit	**2.749,89**	**2.797,22**	**3.064,73**	**3.092,48**	**3.196,43**	**3,36**

* sejak tahun 2023 kinerja operasi PLTU Paiton 9 digabung dengan PLTU Paiton 1-2 karena adanya reorganisasi menjadi UP Paiton

* since 2023, the operating performance of Paiton 9 CFPP has been merged with Paiton 1-2 CFPP due to reorganization into Paiton GU

Grafik NPHR Unit Pembangkitan Batubara
Chart of NPHR of Coal Generation Unit

(kCal/kWh))

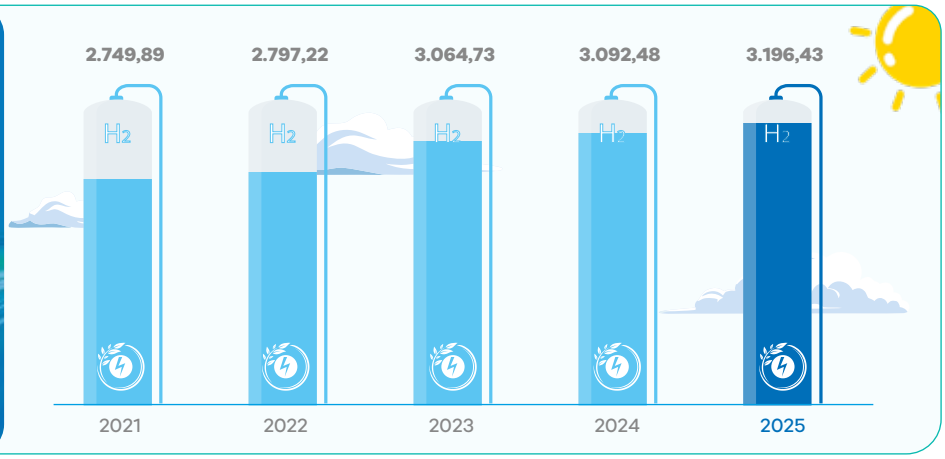

NPHR Unit Pembangkitan Gas dan Non-Batubara

Nilai NPHR unit pembangkitan gas dan non-batubara PLN NP pada tahun 2025 adalah 2.266,30 kCal/kWh, yaitu lebih baik dibandingkan tahun 2024 sebesar 2.294,82 kCal/kWh. Hal ini dikarenakan pembangkit-pembangkit dengan tingkat efisiensi rendah tidak beroperasi (PLTG minyak) serta optimalnya pola operasi *Combine Cycle* pada pembangkit PLTGU.

NPHR of Gas and Non-Coal Generation Unit

In 2025, the NPHR value of the PLN NP coal generation unit was 3,196.43 kCal/kWh, an increase compared to 2024 of 3,092.48 kCal/kWh. This is mainly influenced by the increase in the volume of biomass cofiring, which has a lower calorific value than coal, thereby affecting the efficiency value of the power plant.

Tabel NPHR Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (kCal/kWh)
Table of NPHR of Gas and Non-Coal Generation Unit (kCal/kWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Muara Karang Muara Karang GU	2.354,09	2.238,34	1.958,98	1.969,34	**1.936,37**	(1,67)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	2.461,84	2.363,81	2.317,43	2.391,31	**2.242,32**	(6,23)
UP Gresik Gresik GU	2.321,94	2.288,71	2.359,17	2.357,39	**2.361,39**	0,17
PLTMG Bawean Bawean GEPP	2.672,67	2.624,90	2.646,39	2.602,42	Digabung dengan UP Gresik Merged with Gresik GU	-
PLTD Suppa Suppa DPP	-	-	2.241,28	Digabung dengan UP Bakaru karena reorganisasi Merged with Bakaru GU due to reorganization		-
UP Arun Arun GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		2.254,01	2.192,12	**2.225,98**	1,54
PLTG Sebalang Sebalang GTPP			4.864,41	5.152,48	**15.657,61**	203,88
UP Belawan Belawan GU			2.428,06	2.481,35	**2.450,13**	(1,26)
UP Pekanbaru Pekanbaru GU			2.309,85	2.323,44	**2.405,11**	3,52
UP Bandar Lampung Bandar Lampung GU			3.495,46	3.825,45	**3.559,29**	(6,96)
UP Minahasa Minahasa GU			2.531,05	2.526,30	**2.482,00**	(1,75)
UP Gorontalo Gorontalo GU			2.875,99	2.978,91	**3.249,61**	9,09
UP Kendari Kendari GU			2.474,25	2.566,89	**2.524,52**	(1,65)
UP Kapuas Kapuas GU			2.537,41	2.707,61	**2.714,73**	0,26
UP Sengkang Sengkang GU			2.471,06	2.615,55	**2.399,62**	(8,26)
UPDK Balikpapan Balikpapan GCU			2.605,83	Reorganisasi menjadi UP Kaltimra dan UP Kalselteng Reorganization into Kaltimra GU and Kalselteng GU		-
UPDK Tarakan Tarakan GCU			2.469,66			-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU			2.284,59			-
UP Kaltimra Kaltimra GU			-	2.505,63	**2.489,61**	-
UP Kalselteng Kalselteng GU			-	2.281,96	**2.269,11**	-
NPHR Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara NPHR of Gas & Non-Coal Generation Unit	**2.361,72**	**2.284,33**	**2.243,64**	**2.294,82**	**2.266,30**	**(1,24)**

Grafik NPHR Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara
Chart of NPHR of Gas and Non-Coal Generation Unit

(kCal/kWh))

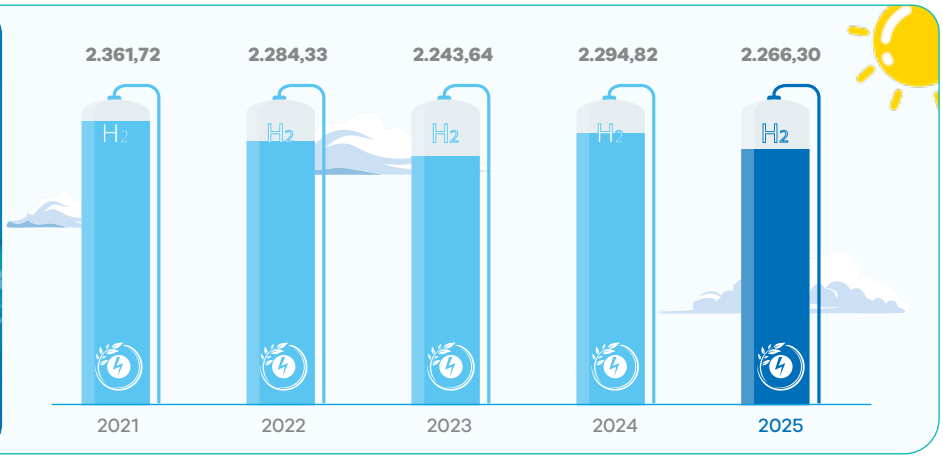

Faktor Gangguan Unit Pembangkitan
Outage Factors of Generation Unit

Faktor gangguan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) dan *Sudden Outage Frequency* (SdOF).

The outage factor of power plants is measured based on the Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) and Sudden Outage Frequency (SdOF) indicators.

EFOR Unit Pembangkitan
EFOR of Generation Unit

EFOR merupakan indikator untuk mengukur tingkat mesin pembangkit keluar paksa atau ketidaksiapan unit untuk beroperasi karena gangguan.

EFOR is the indicator to measure the reliability level of power plants to operate during an outage or the inability of the unit to operate due to interference.

Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan penanganan gangguan semakin cepat.

The lower the EFOR value, the faster the outage is handled.

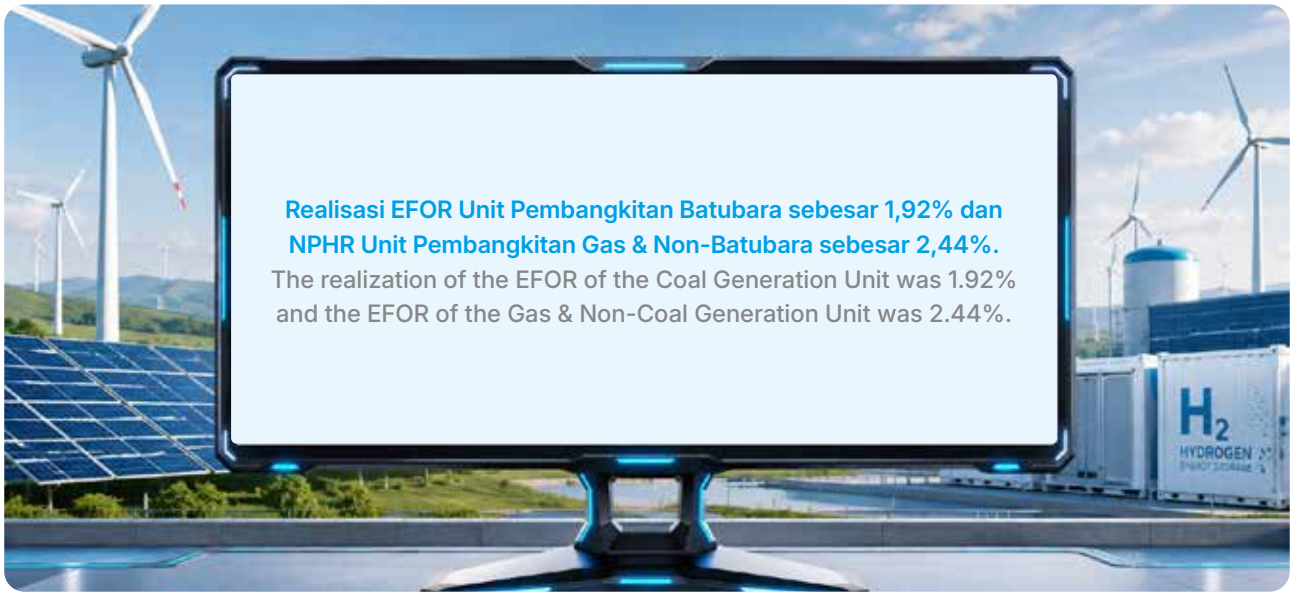

Realisasi EFOR Unit Pembangkitan Batubara sebesar 1,92% dan NPHR Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara sebesar 2,44%.
The realization of the EFOR of the Coal Generation Unit was 1.92% and the EFOR of the Gas & Non-Coal Generation Unit was 2.44%.

EFOR Unit Pembangkitan Batubara

Nilai EFOR unit pembangkitan batubara PLN NP pada tahun 2025 adalah 1,92%, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 2,88%. Hal ini didukung oleh percepatan *recovery* pasca *forced outage* dan *derating*.

EFOR of Coal Generation Unit

In 2025, the EFOR value of PLN NP's coal generation unit was 1.92%, which was lower than in 2024 at 2.88%. This is supported by the accelerated recovery following the forced outage and derating.

Tabel EFOR Unit Pembangkitan Batubara (%)
Table of EFOR of Coal Generation Unit (%)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Paiton Paiton GU	0,92	0,47	**2,04**	1,89	**0,38**	(79,89)
UP Paiton-9 (*) Paiton-9 GU			Digabung dengan UP Paiton karena reorganisasi Merged with Paiton GU due to reorganization			-
UP Indramayu Indramayu GU			2,41	2,41	**2,12**	(12,03)
UP Rembang Rembang GU			0,84	0,97	**1,13**	16,49
UP Pacitan Pacitan GU			2,11	1,94	**1,88**	(3,09)
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU			2,41	0,78	**1,52**	94,87
UP Tenayan Tenayan GU			5,04	2,94	**2,09**	(28,91)
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU			5,91	4,94	**4,04**	(18,22)
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU			3,08	3,09	**2,73**	(11,65)
UP Bukit Asam Bukit Asam GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		11,93	2,40	**3,29**	37,08
UP Sebalang Sebalang GU			6,28	14,17	**7,05**	(50,25)
UP Tarahan Tarahan GU			1,36	5,12	**5,23**	2,15
UP Nagan Raya Nagan Raya GU			8,52	6,77	**1,01**	(85,08)
UP Punagaya Punagaya GU			4,81	7,75	**4,85**	(37,42)
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP			0,67	1,59	**1,37**	(13,84)
PLTU Ketapang Ketapang CFPP			3,22	3,08	**2,99**	(2,92)
PLTU Amurang Amurang CFPP			1,12	5,68	**1,51**	(73,42)
PLTU Anggrek Anggrek CFPP			18,14	16,88	**9,64**	(42,89)
PLTU Ampana Ampana CFPP			2,48	1,49	**1,62**	8,72
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP			11,98	12,69	**6,75**	(46,81)
EFOR Unit Pembangkitan Batubara EFOR of Coal Generation Unit	**0,92**	**0,47**	**3,15**	**2,88**	1,92	**(33,33)**

* sejak tahun 2023 kinerja operasi PLTU Paiton 9 digabung dengan PLTU Paiton 1-2 karena adanya reorganisasi menjadi UP Paiton

* since 2023, the operating performance of Paiton 9 CFPP has been merged with Paiton 1-2 CFPP due to reorganization into Paiton GU

Grafik EFOR Unit Pembangkitan Batubara
Chart of EFOR of Coal Generation Unit

(%)

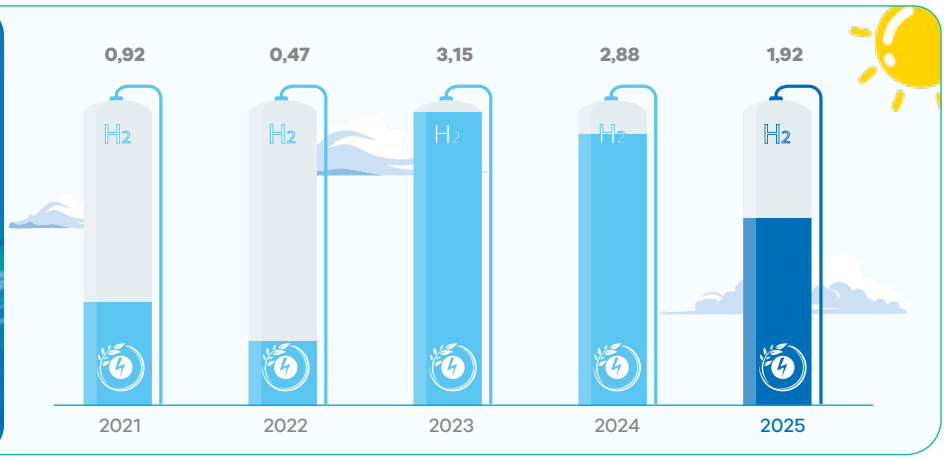

EFOR Unit Pembangkitan Gas dan Non-Batubara

Nilai EFOR unit pembangkitan gas dan non-batubara PLN NP pada tahun 2025 adalah 2,44%, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 2,78%. Hal ini didukung oleh program percepatan *recovery* gangguan pembangkit serta *best effort* operational *excellent* pelaksanaan tata kelola pembangkit.

EFOR of Gas and Non-Coal Generation Unit

In 2025, the EFOR value of PLN NP's gas and non-coal generation unit was 2.44%, which was lower than in 2024 at 2.78%. It is supported by the program to accelerate the recovery of power plant disruptions, as well as the best effort in operational excellence in the implementation of power plant governance.

Tabel EFOR Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (%)
Table of EFOR of Gas and Non-Coal Generation Unit (%)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Brantas Brantas GU	0,09	0,00	0,01	0,01	**0,03**	200,00
UP Cirata Cirata GU	11,51	1,44	0,10	0,44	**0,15**	(65,91)
UP Muara Karang Muara Karang GU	0,60	0,60	0,24	0,63	**0,24**	(61,90)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	8,78	0,63	0,53	1,90	**1,42**	(25,26)
UP Gresik Gresik GU	1,40	0,12	1,97	0,27	**0,50**	85,19
PLTMG Bawean Bawean GEPP	-	-	0,01	0,02	Digabung dengan UP Gresik Merged with Gresik GU	-
PLTD Suppa Suppa DPP	-	-	44,52	Digabung dengan UP Bakaru karena reorganisasi Merged with Bakaru GU due to reorganization		-
UP Arun Arun GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		1,45	0,46	**1,29**	180,43
PLTG Sebalang Sebalang GTPP			85,53	78,48	**99,95**	27,36
UP Belawan Belawan GU			12,66	8,93	**10,48**	17,36
UP Pekanbaru Pekanbaru GU			1,72	0,49	**0,89**	81,63
UP Bandar Lampung Bandar Lampung GU			0,67	0,04	**0,08**	100,00
UP Pandan Pandan GU			0,74	1,32	**0,06**	(95,45)
UP Bakaru Bakaru GU			0,06	9,26	**1,12**	(87,90)
UP Minahasa Minahasa GU			1,03	2,65	**2,35**	(11,32)
UP Gorontalo Gorontalo GU			0,53	4,99	**7,14**	43,09
UP Kendari Kendari GU			8,11	18,25	**6,32**	(65,37)
UP Kapuas Kapuas GU			9,91	32,22	**32,90**	2,11
UP Sengkang Sengkang GU			2,18	1,10	**1,53**	39,09
UPDK Balikpapan Balikpapan GCU			15,35	Reorganisasi menjadi UP Kaltimra dan UP Kalselteng Reorganization into Kaltimra GU and Kalselteng GU		-
UPDK Tarakan Tarakan GCU			3,49			-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU			0,57			-
UP Kaltimra Kaltimra GU			-	2,36	**6,72**	184,75
UP Kalselteng Kalselteng GU			-	1,90	**0,38**	(80,00)
EFOR Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara **EFOR of Gas & Non-Coal Generation Unit**	**3,51**	**0,41**	**2,93**	**2,77**	**2,44**	**(11,91)**

Grafik EFOR Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara
Chart of EFOR of Gas and Non-Coal Generation Unit

(%)

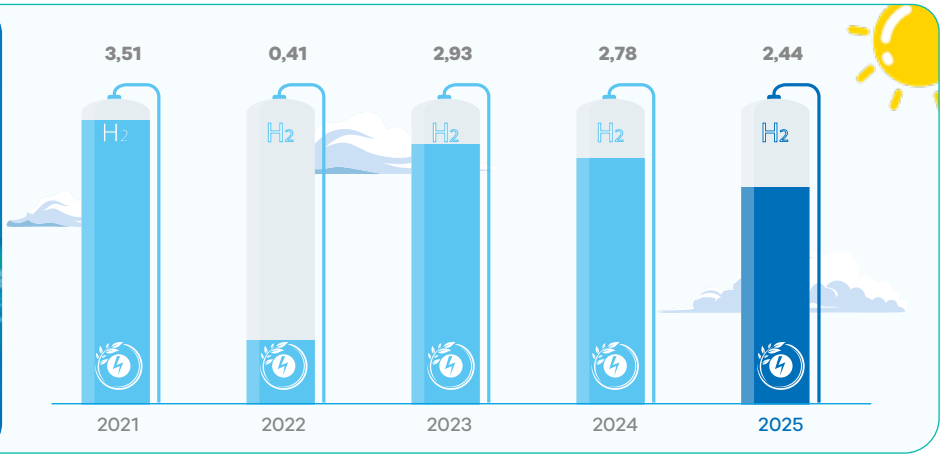

SdOF Unit Pembangkitan
SdOF of Generation Unit

SdOF merupakan indikator yang menunjukkan jumlah gangguan yang terjadi dalam periode tertentu, terutama frekuensi terjadinya gangguan yang berulang. **Semakin rendah nilai SdOF maka semakin baik.**

SdOF is the indicator that shows the number of outages that occurs within a certain period, especially the frequency of repeated outage. **The lower the SdOF value, the better.**

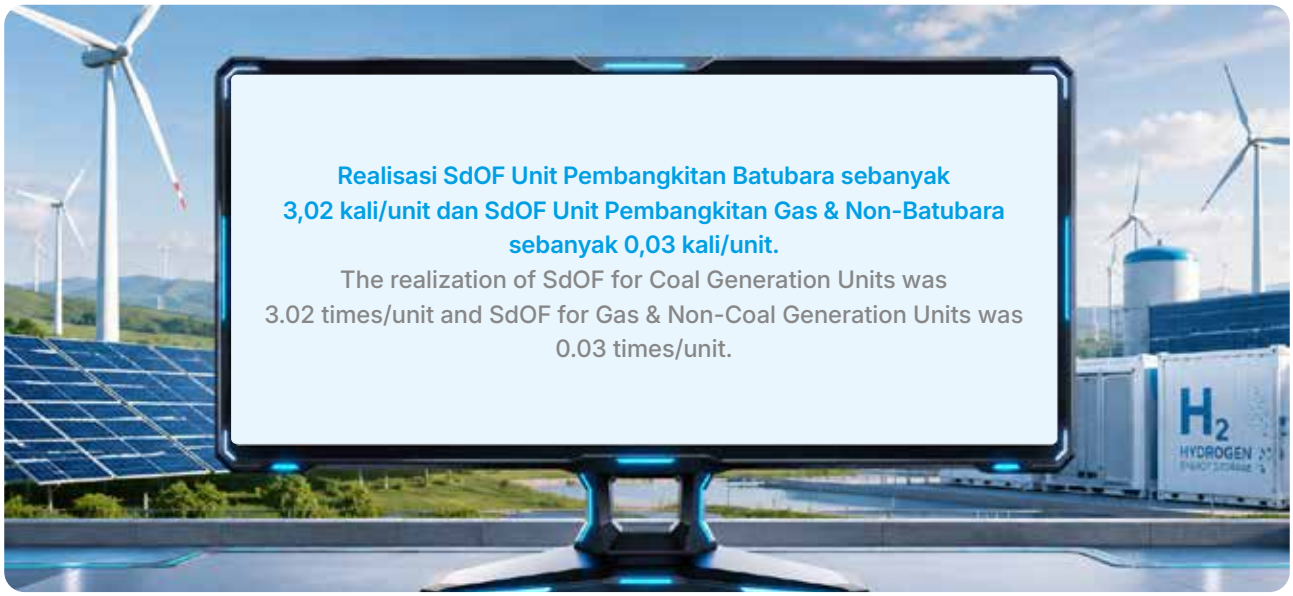

SdOF Unit Pembangkitan Batubara

Nilai SdOF unit pembangkitan batubara PLN NP pada tahun 2025 adalah 3,02 kali/unit, yaitu meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 2,93 kali/unit. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa *chronic* problem pada tahun 2025 yang belum terselesaikan.

SdOF of Coal Generation Unit

In 2025, the SdOF value of PLN NP's coal generation unit was 3.02 times/unit, an increase compared to 2024 of 2.93 times/unit. This is due to several unresolved chronic issues in 2025.

Tabel SdOF Unit Pembangkitan Batubara (kali/unit)
Table of SdOF of Coal Generation Unit (times/unit)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Paiton Paiton GU	2,50	1,00	**0,67**	2,33	**1,67**	(28,33)
UP Paiton-9 (*) Paiton-9 GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		Digabung dengan UP Paiton karena reorganisasi Merged with Paiton GU due to reorganization			-
UP Indramayu Indramayu GU			1,00	1,00	**0,33**	(67,00)
UP Rembang Rembang GU			1,50	2,50	**1,13**	(54,80)
UP Pacitan Pacitan GU			0,50	3,50	**1,88**	(46,29)
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU			0,50	0,50	**1,50**	200,00
UP Tenayan Tenayan GU			1,50	1,50	**5,50**	266,67
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU			3,00	2,50	**3,00**	20,00
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU			2,00	0,00	**0,50**	#DIV/0!
UP Bukit Asam Bukit Asam GU			7,25	4,00	**7,50**	87,50
UP Sebalang Sebalang GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		3,00	2,00	**2,00**	0,00
UP Tarahan Tarahan GU			1,50	1,50	**7,00**	366,67
UP Nagan Raya Nagan Raya GU			5,00	7,00	**5,00**	(28,57)
UP Punagaya Punagaya GU			1,50	2,50	**0,50**	(80,00)
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP			4,00	2,00	**0,50**	(75,00)
PLTU Ketapang Ketapang CFPP			1,50	2,00	**3,00**	50,00
PLTU Amurang Amurang CFPP			0,50	2,50	**0,50**	(80,00)
PLTU Anggrek Anggrek CFPP			9,00	6,50	**5,50**	(15,38)
PLTU Ampana Ampana CFPP			2,50	8,50	**6,00**	(29,41)
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP			6,50	3,50	**2,50**	(28,57)
SdOF Unit Pembangkitan Batubara (kali/unit) SdOF of Coal Generation Unit (times/unit)	**2,50**	**1,00**	**2,81**	**2,93**	**3,02**	**3,07**

* sejak tahun 2023 kinerja operasi PLTU Paiton 9 digabung dengan PLTU Paiton 1-2 karena adanya reorganisasi menjadi UP Paiton

* since 2023, the operating performance of Paiton 9 CFPP has been merged with Paiton 1-2 CFPP due to reorganization into Paiton GU

Grafik EFOR Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara
Chart of EFOR of Gas and Non-Coal Generation Unit

(%)

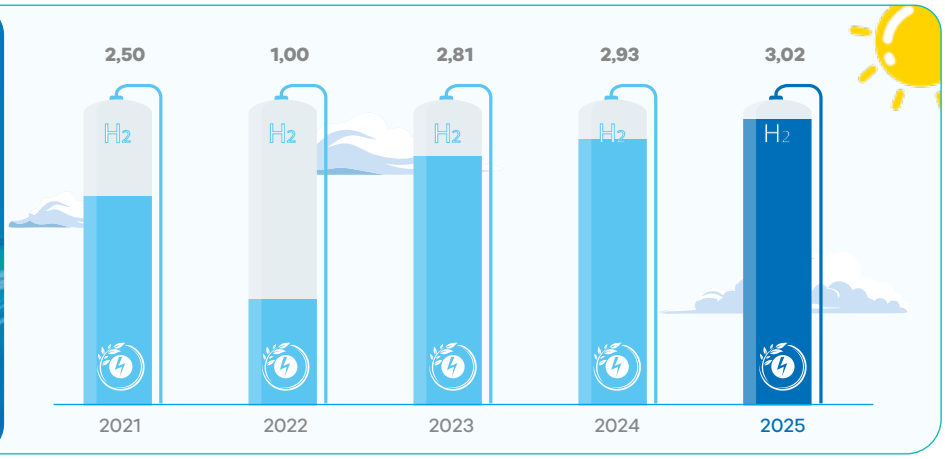

SdOF Unit Pembangkitan Gas dan Non-Batubara

Nilai SdOF unit pembangkitan gas dan non-batubara PLN NP pada tahun 2025 adalah 0,03 kali/unit, yaitu lebih baik dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,60 kali/unit. Hal ini didukung oleh pengelolaan pembangkit yang optimal dengan Tata Kelola Pembangkit melalui *Preventive Maintenance, Predictive Maintenance* maupun *First Line Maintenance.*

SdOF of Gas and Non-Coal Generation Unit

The SdOF value of PLN NP's gas and non-coal generation units in 2025 was 0.03 times/unit, which is better compared to 2024 at 1.60 times/unit. It is supported by optimal power plant management with Power Plant Governance through Preventive Maintenance, Predictive Maintenance, and First-Line Maintenance.

Tabel SdOF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (kali/unit)
Table of SdOF of Gas and Non-Coal Generation Unit (times/unit)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Brantas Brantas GU	0,40	0,04	0,23	0,03	**0,15**	400,00
UP Cirata Cirata GU	1,38	1,00	0,50	0,50	**1,00**	100,00
UP Muara Karang Muara Karang GU	2,50	1,33	0,77	1,23	**0,92**	(25,20)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	1,33	0,85	0,50	1,73	**2,06**	19,08
UP Gresik Gresik GU	0,72	0,39	0,61	0,33	**0,52**	57,58
PLTMG Bawean Bawean GEPP	-	-	1,33	0,00	Digabung dengan UP Gresik Merged with Gresik GU	-
PLTD Suppa Suppa DPP	-	-	13,66	Digabung dengan UP Bakaru karena reorganisasi Merged with Bakaru GU due to reorganization		-
UP Arun Arun GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		0,79	2,08	**2,22**	6,73
PLTG Sebalang Sebalang GTPP			2,00	1,00	**2,00**	100,00
UP Belawan Belawan GU			1,79	2,89	**3,12**	7,96
UP Pekanbaru Pekanbaru GU			3,08	1,33	**4,58**	244,36
UP Bandar Lampung Bandar Lampung GU			0,54	0,25	**0,17**	(32,00)
UP Pandan Pandan GU			0,59	0,50	**0,11**	(78,00)
UP Bakaru Bakaru GU			0,56	0,92	**5,85**	535,87
UP Minahasa Minahasa GU			1,33	2,86	**0,61**	(78,67)
UP Gorontalo Gorontalo GU			1,14	0,67	**0,65**	(2,81)
UP Kendari Kendari GU			0,59	0,46	**0,41**	(11,78)
UP Kapuas Kapuas GU			2,28	3,57	**3,42**	(4,34)
UP Sengkang Sengkang GU			2,00	3,00	**4,67**	55,67
UPDK Balikpapan Balikpapan GCU			0,38	Reorganisasi menjadi UP Kaltimra dan UP Kalselteng Reorganization into Kaltimra GU and Kalselteng GU		-
UPDK Tarakan Tarakan GCU			2,67			-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU			2,06			-
UP Kaltimra Kaltimra GU			-	1,80	**0,24**	(86,67)
UP Kalselteng Kalselteng GU			-	1,73	**2,00**	15,61
SdOF Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara (kali/unit) SdOF of Gas and Non-Coal Generation Unit (times/unit)	**0,88**	**0,61**	**1,30**	**1,60**	**0,03**	**(98,13)**

Grafik SdOF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara
Chart of SdOF of Gas and Non-Coal Generation Unit

(kali/unit) (times/unit)

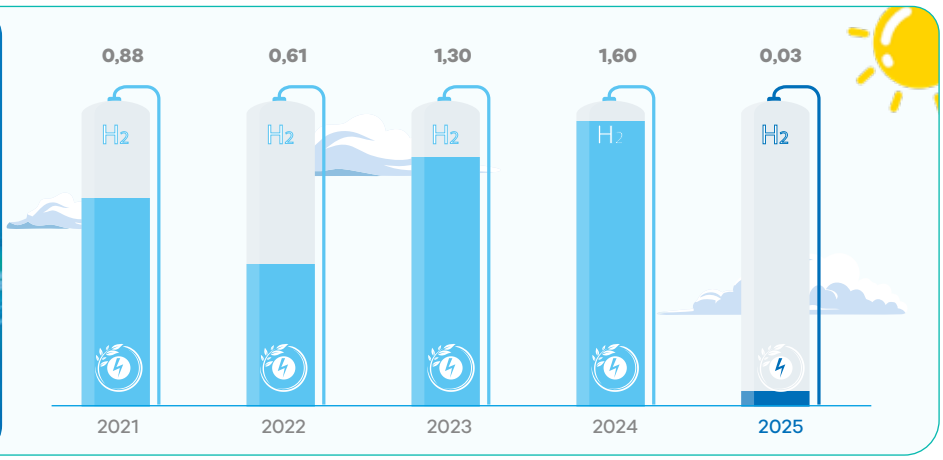

Faktor Efisiensi Pembangkit
Efficiency Factors of Power Plant

Dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional, sejak tahun 2023 PLN NP menerapkan Key Performance Indicator (KPI) Specific Fuel Consumption (SFC) yang diklasifikasikan berdasarkan tiga jenis bahan bakar utama, yakni batubara, gas, dan minyak (BBM). SFC merupakan rasio antara total konsumsi bahan bakar dengan daya listrik yang dihasilkan, sehingga menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi mesin pembangkit sekaligus sebagai penentu utama dalam perhitungan biaya produksi, khususnya biaya bahan bakar. **Semakin rendah nilai SFC, semakin efisien kinerja pembangkit dalam mengonversi energi bahan bakar menjadi tenaga listrik.**

In order to improve operational efficiency, since 2023, PLN NP implemented a Key Performance Indicator (KPI) Specific Fuel Consumption (SFC), which is classified based on three main types of fuel, namely coal, gas, and oil (BBM). SFC is the ratio between total fuel consumption and generated electrical power, becoming a crucial indicator in assessing the efficiency of power plant machinery as well as a key determinant in the calculation of production costs, particularly fuel costs. **The lower the SFC value, the more efficient the power plant's performance in converting fuel energy into electric power.**

Tabel SFC Pembangkit
Table of SFC of Power Plant

SFC	Satuan Unit	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
					%	Nominal
SFC Batubara SFC of Coal	kg/kWh	0,6617	0,6730	**0,7047**	4,71	0,0317
SFC Gas SFC of Gas	MMBTU/kWh	0,0086	0,0087	**0,0087**	0,00	0,0000
SFC Bahan Bakar Minyak (BBM) SFC of Oil (BBM)	Liter/kWh	0,2855	0,2917	**0,2714**	(6,96)	(0,0203)

SFC Batubara pada tahun 2025 adalah sebesar 0,7047kg/kWh, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,6730 kg/kWh. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan volume *co-firing* biomassa yang memiiki nilai kalor lebih rendah dari kalori batubara sehingga mempengaruhi nilai efisiensi pembangkit.

In 2025, the SFC of Coal was 0.7047 kg/kWh, an increase compared to 2024 of 0.6730 kg/kWh. It is primarily influenced by the increase in the volume of biomass co-firing, which has a lower calorific value than coal, thereby affecting the efficiency value of the power plant.

SFC Gas pada tahun 2025 adalah sebesar MMBTU/kWh yaitu sama dengan tahun 2024 sebesar 0,0087 MMBTU/kWh.

SFC BBM pada tahun 2025 adalah sebesar 0,2714 liter/kWh, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,2917 liter/kWh. Hal ini terutama didukung oleh beberapa aktivitas yang telah dilakukan untuk perbaikan SFC diantaranya optimalisasi pola operasi/pembebanan unit, pelaksanaan pemeliharan *preventive* secara rutin dan pelaksanaan pemeliharaan periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan.

The SFC of Gas in 2025 was 0.0087 MMBTU/kWh, which is the same as the 2024 figure of 0.0087 MMBTU/kWh.

In 2025, the SFC of Oil was 0.2714 liters/kWh, an increase compared to 2024 of 0.2917 liters/kWh. It is mainly supported by several activities that have been carried out for SFC improvement, including the optimization of unit operations/loading patterns, the implementation of routine preventive maintenance, and the execution of periodic maintenance according to the predetermined schedule.

Daya Terpasang Unit Pembangkitan
Installed Capacity of Generation Unit

DTP Pembangkit PLN NP adalah sebesar 18.302,90 MW, dan berkontribusi 22,82% terhadap total DTP Indonesia.
The Installed Capacity of PLN NP Power Plants was 18,302.90 MW and contributed 22.82% to Indonesia's Total Installed Capacity.

Daya Terpasang Pembangkit (DTP) merupakan daya yang tertera sesuai dengan setiap mesin pembangkit. Dari total DTP sistem kelistrikan di Indonesia 80.189,32 MW, saat ini PLN NP memiliki kontribusi DTP sebesar 22,82% atau 18.302,90 MW. Dari jumlah kontribusi tersebut, 7,78% atau 6.239,50 MW berasal dari DTP Unit Pembangkitan Batubara dan 15,04% atau 12.063,40 MW berasal dari DTP Unit Pembangkitan Gas dan Non-Batubara.

The Installed Capacity of a Power Plant is the power listed according to each power plant engine. From the total Installed Capacity of the electricity system in Indonesia of 80,189.32 MW, PLN NP currently has an Installed Capacity of Power Plant contribution of 22.82% or 18,302.90 MW. Of the total contribution, 7.78% or 6,239.50 MW came from the Installed Capacity of the Coal Generation Unit, and 15.04% or 12,063.40 MW came from the Installed Capacity of the Gas and Non-Coal Generation Unit.

Tabel Total DTP Unit Pembangkitan
Table of Total Installed Capacity of Generation Unit

Unit Pembangkitan Generation Unit	2023		2024		2025	
	MW	%	MW	%	MW	%
DTP Unit Pembangkitan Batubara Installed Capacity of Coal Generation Unit	6.261,35	8,58	6.239,50	8,22	**6.239,50**	**7,78**
DTP Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara Installed Capacity of Gas & Non-Coal Generation Unit	12.311,89	16,87	12.092,80	15,92	**12.063,40**	**15,04**
Total DTP PLN NP **Total Installed Capacity of PLN NP**	**18.573,24**	**25,45**	**18.332,30**	**24,14**	**18.302,90**	**22,82**
DTP Seluruh Indonesia **Installed Capacity of Power Plant throughout Indonesia**	**72.976,30**	**100**	**75.936,46**	**100**	**80.189,32**	**100**

Sumber DTP Seluruh Indonesia 2025: Statistik PLN 2025 Data Operasional (*Unaudited*)

Source: Installed Capacity of Power Plant throughout Indonesia: PLN 2025 Operational Statistical Data (Unaudited)

Tabel DTP Unit Pembangkitan Batubara
Table of Installed Capacity of Coal Generation Unit

Unit Pembangkitan Generation Unit	2023		2024		2025	
	MW	%	MW	%	MW	%
UP Paiton Paiton GU	1.460	2,00	1.460	2,00	**1.460**	**1,92**
UP Indramayu Indramayu GU	990	1,36	990	1,36	**990**	**1,30**
UP Rembang Rembang GU	630	0,86	630	0,86	**630**	**0,83**
UP Pacitan Pacitan GU	630	0,86	630	0,86	**630**	**0,83**
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU	700	0,96	700	0,96	**700**	**0,92**
UP Tenayan Tenayan GU	220	0,30	220	0,30	**220**	**0,29**
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU	220	0,30	220	0,30	**220**	**0,29**
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU	120	0,16	120	0,16	**120**	**0,16**
UP Bukit Asam Bukit Asam GU	260	0,36	260	0,36	**260**	**0,34**
UP Sebalang Sebalang GU	200	0,27	200	0,27	**200**	**0,26**
UP Tarahan Tarahan GU	200	0,27	200	0,27	**200**	**0,26**
UP Nagan Raya Nagan Raya GU	220	0,30	220	0,30	**220**	**0,29**
UP Punagaya Punagaya GU	241,35	0,33	241,35	0,33	**220**	**0,29**
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	14	0,02	14	0,02	**14**	**0,02**
PLTU Ketapang Ketapang CFPP	20	0,03	20	0,03	**20**	**0,03**
PLTU Amurang Amurang CFPP	50	0,07	50	0,07	**50**	**0,07**
PLTU Anggrek Anggrek CFPP	55	0,08	55	0,08	**55**	**0,07**
PLTU Ampana Ampana CFPP	7	0,01	7	0,01	**6,5**	**0,01**
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP	24	0,03	24	0,03	**24**	**0,03**
DTP Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) **Installed Capacity of Coal Generation Unit (CFPP)**	**6.261,35**	**8,58**	**6.261,35**	**8,58**	**6.239,50**	**8,22**
DTP Seluruh Indonesia **Installed Capacity of Power Plant throughout Indonesia**	**72.976,30**	**100**	**72.976,30**	**100**	**75.936,46**	**100**

Tabel DTP Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara
Table of Installed Capacity of Gas & Non-Coal Generation Unit

Unit Pembangkitan Generation Unit	2023		2024		2025	
	MW	%	MW	%	MW	%
UP Brantas Brantas GU	281,70	0,39	281,70	0,37	**281,70**	**0,35**
UP Cirata Cirata GU	1.008	1,38	1.008	1,33	**1.008**	**1,26**
UP Muara Karang Muara Karang GU	2.177,42	2,98	2.177,42	2,87	**2.177,42**	**2,72**
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	2.700	3,70	2.470,55	3,25	**2.470,55**	**3,08**
UP Gresik Gresik GU	2.218,98	3,04	2.218,98	2,92	**2.218,98**	**2,77**
PLTMG Bawean Bawean GEPP	3,20	0,00	3,20	0,00	**Digabung dengan UP Gresik** Merged with Gresik GU	-
PLTD Suppa Suppa DPP	68,04	0,09	Digabung dengan UP Bakaru karena reorganisasi Merged with Bakaru GU due to reorganization			
UP Arun Arun GU	424,27	0,58	498,25	0,66	**498,25**	**0,62**
PLTG Sebalang Sebalang GTPP	21,50	0,03	21,50	0,03	**21,50**	**0,03**
UP Belawan Belawan GU	1.275,80	1,75	1.197,40	1,58	**1.163,30**	**1,45**
UP Pekanbaru Pekanbaru GU	337,70	0,46	317,70	0,42	**288,30**	**0,36**
UP Bandar Lampung Bandar Lampung GU	208,01	0,29	208,01	0,27	**208,01**	**0,26**
UP Pandan Pandan GU	139,50	0,19	139,50	0,18	**139,50**	**0,17**
UP Bakaru Bakaru GU	149,19	0,20	223,23	0,29	**223,23**	**0,28**
UP Minahasa Minahasa GU	213,87	0,29	247,37	0,33	**222,37**	**0,28**
UP Gorontalo Gorontalo GU	196,08	0,27	171,08	0,23	**171,08**	**0,21**
UP Kendari Kendari GU	90,37	0,12	90,37	0,12	**149,47**	**0,19**
UP Kapuas Kapuas GU	187,51	0,26	189,45	0,25	**189,45**	**0,24**
UP Sengkang Sengkang GU	315	0,43	331,60	0,44	**331,60**	**0,41**
UPDK Balikpapan Balikpapan GCU	56,50	0,08	Reorganisasi menjadi UP Kaltimra dan UP Kalselteng Reorganization into Kaltimra GU and Kalselteng GU			-
UPDK Tarakan Tarakan GCU	83,57	0,11				-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU	155,68	0,21				-
UP Kaltimra Kaltimra GU	-	-	126,62	0,17	**126,62**	**0,16**
UP Kalselteng Kalselteng GU	-	-	170,89	0,23	**170,89**	**0,21**
DTP Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara Installed Capacity of Gas and Non-Coal Generation Unit	**12.311,89**	**16,87**	**12.092,80**	**15,92**	**12.063,40**	**15,04**
DTP Seluruh Indonesia Installed Capacity of Power Plant throughout Indonesia	**72.976,30**	**100**	**75.936,46**	**100,00**	**80.189,32**	**100,00**

Daya Mampu Neto
Net Dependable Capacity

DMN Pembangkit PLN NP adalah sebesar 16.157,03 MW, dan berkontribusi 20,15% terhadap Total DMN Indonesia.
The Net Dependable Capacity of PLN NP Power Plants was 16,157.03 MW and it contributed 20.15% to Indonesia's Total Net Dependable Capacity.

Kapasitas Daya Mampu Neto (DMN) adalah daya mampu pembangkit dalam satuan Mega Watt berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dituangkan dalam Sertifikat Laik Operasi.

PLN NP memiliki kontribusi DMN sebesar 20,15% atau 16.157,03 MW dari total DMN sistem kelistrikan di Indonesia 74.354,34 MW. Dari jumlah kontribusi tersebut, 7,35% atau 5.468,00 MW berasal dari DMN Unit Pembangkitan Batubara dan 14,38% atau 10.689,03 MW berasal dari DMN Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara.

Net Dependable Capacity (NDC) is the power plant's capacity in Mega Watt based on the examination and testing results as outlined in the Commissioning Certificate.

PLN NP has an NDC contribution of 20.15% or 16,157.03 MW of the total NDC of the electricity system in Indonesia of 74,354.34 MW. Of the total contribution, 7.35% or 5,468.00 MW came from the NDC of the Coal Generation Unit, and 14.38% or 10,689.03 MW came from the NDC of the Gas and Non-Coal Generation Unit.

Tabel Total DMN Unit Pembangkitan
Table of Total NDC of Generation Unit

Unit Pembangkitan Generation Unit	2023		2024		2025	
	MW	%	MW	%	MW	%
DMN Unit Pembangkitan Batubara NDC of Coal Generation Unit	5.468	8,14	5.468,00	7,82	**5.468,00**	**7,35**
DMN Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara NDC of Gas & Non-Coal Generation Unit	10.387,67	14,23	10.452,39	14,94	**10.689,03**	**14,38**
Total DMN PLN NP Total NDC of PLN NP	**15.855,67**	**23,60**	**15.920,39**	**20,97**	**16.157,03**	**20,15**
DMN Seluruh Indonesia NDC Throughout Indonesia	**67.190,10**	**100**	**69.967,41**	**100**	**74.354,34**	**100**

Sumber DMN Seluruh Indonesia 2025: Statistik PLN 2025 Data Operasional (*Unaudited*)

Source: DTP throughout Indonesia 2025: PLN 2025 Operational Statistical Data (Unaudited)

Tabel DMN Unit Pembangkitan Batubara
Table of NDC of Coal Generation Unit

Unit Pembangkitan Generation Unit	2023		2024		2025	
	MW	%	MW	%	MW	%
UP Paiton Paiton GU	1.355	2,02	1.355	1,94	1.355	1,82
UP Indramayu Indramayu GU	870	1,29	870	1,24	870	1,17
UP Rembang Rembang GU	560	0,83	560	0,80	560	0,75
UP Pacitan Pacitan GU	560	0,83	560	0,80	560	0,75
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU	646	0,96	646	0,92	646	0,87
UP Tenayan Tenayan GU	175	0,26	175	0,25	175	0,24
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU	180	0,27	180	0,26	180	0,24
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU	90	0,13	90	0,13	90	0,12
UP Bukit Asam Bukit Asam GU	210	0,31	210	0,30	210	0,28
UP Sebalang Sebalang GU	150	0,22	150	0,21	150	0,20
UP Tarahan Tarahan GU	170	0,25	170	0,24	170	0,23
UP Nagan Raya Nagan Raya GU	160	0,24	160	0,23	160	0,22
UP Punagaya Punagaya GU	200	0,30	200	0,29	200	0,27
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	11,5	0,02	11,5	0,02	11,5	0,02
PLTU Ketapang Ketapang CFPP	16	0,02	16	0,02	16	0,02
PLTU Amurang Amurang CFPP	43,5	0,06	43,5	0,06	43,5	0,06
PLTU Anggrek Anggrek CFPP	45	0,07	45	0,06	45	0,06
PLTU Ampana Ampana CFPP	6	0,01	6	0,01	6	0,01
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP	20	0,03	20	0,03	20	0,03
DMN Unit Pembangkitan Batubara NDC of Coal Generation Unit	**5.468**	**8,14**	**5.468,00**	**7,82**	**5.468,00**	**7,35**
DMN Seluruh Indonesia NDC Throughout Indonesia	**67.190,10**	**100**	**69.967,41**	**100**	**74.354,34**	**100**

Tabel DMN Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara
Table of NDC of Gas and Non-Coal Generation Unit

Unit Pembangkitan Generation Unit	2023		2024		2025	
	MW	%	MW	%	MW	%
UP Brantas Brantas GU	275,32	0,41	275,32	0,39	275,32	0,37
UP Cirata Cirata GU	984	1,46	984	1,41	984	1,32
UP Muara Karang Muara Karang GU	1.903,00	2,83	1.903,00	2,72	1.903,00	2,56
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	2.093	3,12	2.326,55	3,33	2.559,34	3,44
UP Gresik Gresik GU	1.934,00	2,88	1.934,00	2,76	1.934,00	2,60
PLTMG Bawean Bawean GEPP	3,00	0,00	3,00	0,00	**Digabung dengan UP Gresik** Merged with Gresik GU	-

Unit Pembangkitan Generation Unit	2023		2024		2025	
	MW	%	MW	%	MW	%
PLTD Suppa Suppa DPP	62,20	0,09	Digabung dengan UP Bakaru karena reorganisasi Merged with Bakaru GU due to reorganization			-
UP Arun Arun GU	398,24	0,59	446,85	0,64	**446,85**	**0,60**
PLTG Sebalang Sebalang GTPP	16,34	0,02	16,34	0,02	**16,34**	**0,02**
UP Belawan Belawan GU	934,70	1,39	869,18	1,24	**869,18**	**1,17**
UP Pekanbaru Pekanbaru GU	276,95	0,41	243,10	0,35	**243,10**	**0,33**
UP Bandar Lampung Bandar Lampung GU	162,06	0,24	159,36	0,23	**159,36**	**0,21**
UP Pandan Pandan GU	129,61	0,19	129,61	0,19	**129,61**	**0,17**
UP Bakaru Bakaru GU	154,89	0,23	217,09	0,31	**217,09**	**0,29**
UP Minahasa Minahasa GU	210,37	0,31	211,13	0,30	**211,13**	**0,28**
UP Gorontalo Gorontalo GU	125,55	0,19	123,23	0,18	**125,53**	**0,17**
UP Kendari Kendari GU	54,41	0,08	58,86	0,08	**59,75**	**0,08**
UP Kapuas Kapuas GU	134,33	0,20	125,05	0,18	**118,55**	**0,16**
UP Sengkang Sengkang GU	314	0,47	205,38	0,29	**212,54**	**0,29**
UPDK Balikpapan Balikpapan GCU	30,78	0,05	Reorganisasi menjadi UP Kaltimra dan UP Kalselteng Reorganization into Kaltimra GU and Kalselteng GU			-
UPDK Tarakan Tarakan GCU	53,36	0,08				-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU	137,60	0,20				-
UP Kaltimra Kaltimra GU	-	-	72,65	0,10	**72,65**	**0,10**
UP Kalselteng Kalselteng GU	-	-	148,70	0,21	**148,70**	0,20
DMN Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara **NDC of Gas and Non- Coal Generation Unit**	**10.387,67**	**15,46**	**10.452,39**	**14,94**	**10.689,03**	**14,38**
DMN Seluruh Indonesia NDC Throughout Indonesia	**67.190,00**	**100**	**69.967,41**	**100,00**	**74.354,34**	**100,00**

Net Capacity Factor (NCF)

Net Capacity Factor (NCF) adalah rasio antara total produksi netto dengan daya mampu netto unit pembangkit dikali dengan jam periode tertentu.

Semakin tinggi nilai NCF maka semakin baik tingkat utilitas unit pembangkit.

Net Capacity Factor (NCF) is the ratio between total net production and net dependable capacity of a power plant unit multiplied by the hours of a certain period.

The higher the NCF value, the better the utility level of power plant unit.

NCF Unit Pembangkitan Batubara
NCF of Coal Generation Unit

Nilai NCF unit pembangkitan batubara PLN NP pada tahun 2025 adalah 69,82%, yaitu meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 68,75%. Hal ini didorong oleh adanya kenaikan kesiapan pembangkit dan *plant factor* yang tinggi.

In 2025, the NCF value of PLN NP's coal generation unit was 69.82%, an increase compared to the 2024 figure at 68.75%. This was driven by an improvement in power plant readiness and a high plant factor.

Tabel NCF Unit Pembangkitan Batubara (%)
Table of NCF of Coal Generation Unit (%)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Paiton Paiton GU	80,80	68,15	59,91	**60,32**	**69,47**	15,17
UP Paiton-9 (*) Paiton-9 GU (*)	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		Digabung dengan UP Paiton karena reorganisasi Merged with Paiton GU due to reorganization			-
UP Indramayu Indramayu GU			77,44	73,06	**74,01**	1,30
UP Rembang Rembang GU			79,05	80,31	**78,01**	(2,86)
UP Pacitan Pacitan GU			74,68	78,20	**73,34**	(6,21)
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU			69,39	75,74	**78,11**	3,13
UP Tenayan Tenayan GU			67,13	68,16	**71,80**	5,34
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU			64,97	62,71	**63,84**	1,80
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU			71,27	76,71	**74,85**	(2,42)
UP Bukit Asam Bukit Asam GU			66,93	46,79	**32,32**	(30,93)
UP Sebalang Sebalang GU			83,80	61,40	**61,20**	(0,33)
UP Tarahan Tarahan GU			84,66	76,98	**65,91**	(14,38)
UP Nagan Raya Nagan Raya GU			67,51	56,50	**39,84**	(29,49)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Punagaya Punagaya GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		78,70	68,73	**77,29**	12,45
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP			77,72	76,87	**77,01**	0,18
PLTU Ketapang Ketapang CFPP			85,70	87,13	**77,69**	(10,83)
PLTU Amurang Amurang CFPP			50,52	48,66	**53,72**	10,40
PLTU Anggrek Anggrek CFPP			29,55	45,52	**45,73**	0,46
PLTU Ampana Ampana CFPP			33,08	35,81	**36,92**	3,10
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP			28,71	40,91	**75,37**	84,23
NCF Unit Pembangkitan Batubara NCF of Coal Generation Unit	**80,80**	**68,15**	**70,18**	**68,75**	**69,82**	**1,56**

* sejak tahun 2023 kinerja operasi PLTU Paiton 9 digabung dengan PLTU Paiton 1-2 karena adanya reorganisasi menjadi UP Paiton

* since 2023, the operating performance of Paiton 9 CFPP has been merged with Paiton 1-2 CFPP due to reorganization into Paiton GU

Grafik NCF Unit Pembangkitan Batubara
Chart of NCF of Coal Generation Unit

(%)

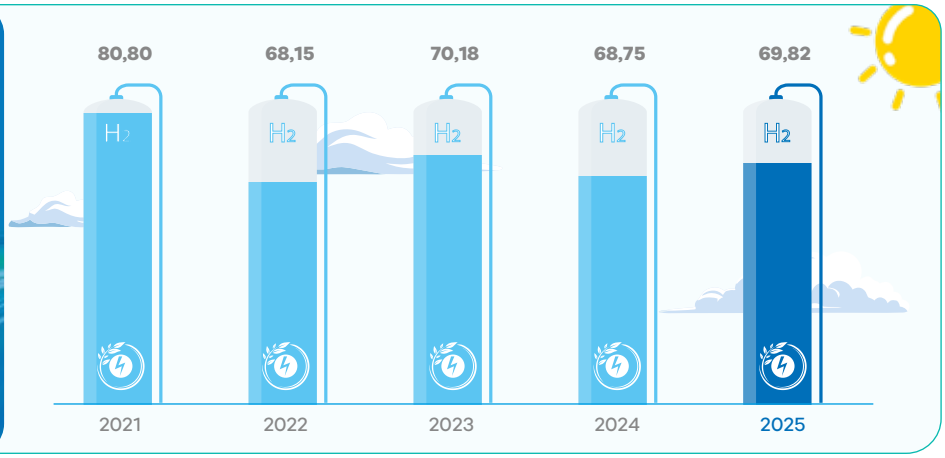

NCF Unit Pembangkitan Gas dan Non-Batubara
NCF of Gas and Non-Coal Generation Unit

Nilai NCF unit pembangkitan gas dan non-batubara PLN NP pada tahun 2025 adalah 32,02%, yaitu meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 27,97%. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan signifikan kinerja pembangkit non-batubara, khususnya pembangkit hidro di Regional Jawa, yang didukung karakteristik musim basah sepanjang 2025 serta peningkatan produksi dari proyek *add-on* PLTGU Muara Tawar.

The NCF value of PLN NP's gas and non-coal generation units in 2025 was 32.02%, an increase compared to the 2024 figure of 27.97%. It is driven by a significant improvement in the performance of non-coal power plants, particularly hydro power plants in the Java region, supported by the characteristics of the wet season throughout 2025 and increased production from the Muara Tawar CCPP add-on project.

Tabel NCF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (%)
Table of NCF of Gas and Non-Coal Generation Unit (%)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Brantas Brantas GU	54,02	60,04	46,08	40,11	**60,69**	51,31
UP Cirata Cirata GU	14,70	18,73	13,82	15,94	**18,21**	14,24

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Muara Karang Muara Karang GU	46,56	28,30	42,42	46,48	**35,55**	(23,52)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	22,33	12,68	11,03	10,09	**13,25**	31,32
UP Gresik Gresik GU	33,54	30,22	40,24	40,95	**37,02**	(9,60)
PLTMG Bawean Bawean GEPP	75,44	78,82	76,93	71,25	**Digabung dengan UP Gresik** Merged with Gresik GU	-
PLTD Suppa Suppa DPP	2,18	11,35	5,99	Digabung dengan UP Bakaru karena reorganisasi Merged with Bakaru GU due to reorganization		-
UP Arun Arun GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		47,36	31,58	**32,12**	1,71
PLTG Sebalang Sebalang GTPP			2,70	3,44	**0,01**	(99,62)
UP Belawan Belawan GU			54,46	66,83	**59,64**	(10,76)
UP Pekanbaru Pekanbaru GU			40,98	57,66	**46,94**	(18,59)
UP Bandar Lampung Bandar Lampung GU			30,71	26,33	**30,25**	14,89
UP Pandan Pandan GU			48,07	48,68	**35,97**	(26,11)
UP Bakaru Bakaru GU			76,70	75,99	**71,17**	(6,34)
UP Minahasa Minahasa GU			33,82	33,94	**43,47**	28,08
UP Gorontalo Gorontalo GU			26,39	26,32	**26,66**	1,30
UP Kendari Kendari GU			25,74	25,75	**19,37**	(24,76)
UP Kapuas Kapuas GU			11,98	29,34	**16,63**	(43,31)
UP Sengkang Sengkang GU			46,71	67,92	**89,34**	31,54
UPDK Balikpapan Balikpapan GCU			2,31	Reorganisasi menjadi UP Kaltimra dan UP Kalselteng Reorganization into Kaltimra GU and Kalselteng GU		-
UPDK Tarakan Tarakan GCU			52,09			-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU			39,53			-
UP Kaltimra Kaltimra GU			-	32,86	**28,70**	(12,66)
UP Kalselteng Kalselteng GU			-	38,01	**44,08**	15,98
NCF Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara NCF of Gas & Non-Coal Generation Unit	**28,12**	**28,02**	**32,71**	**27,97**	**32,02**	**14,48**

Grafik NCF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara
Chart of NCF of Gas and Non-Coal Generation Unit

(%)

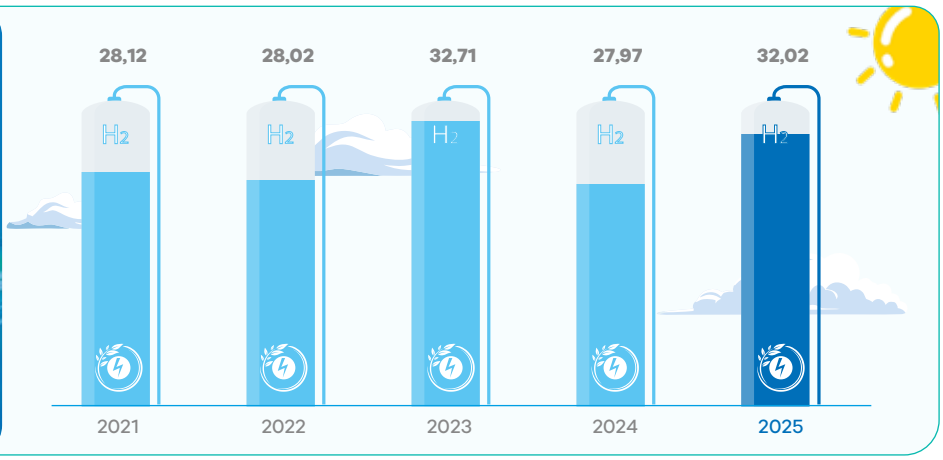

Pemakaian Bahan Bakar
Fuel Consumption

Pemakaian bahan bakar untuk pembangkit di tahun 2025 terdiri dari bahan bakar batubara sebanyak 24.601.275 ton, biomass sebanyak 1.004.590 ton, MFO sebanyak 51.068 kL, Bio Fame sebanyak 81.788 kL, gas alam sebanyak 205.354 BBTU, dan HSD sebanyak 277.672 kL, dengan pemakaian energy mix sebagai berikut:

In 2025, the fuel consumption for power plants consisted of 24,601,275 tons of coal, 1,004,590 tons of biomass, 51,068 kL of MFO, 81,788 kL of Bio Fame, 205,354 BBTU of natural gas, and 277,672 kL of HSD, with the following energy mix:

Tabel Pemakaian Bahan Bakar
Table of Fuel Consumption

Jenis Bahan Bakar Type of Fuel	Satuan Unit	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
					%	Nominal
Batubara Coal	ton	23.711.995	23.378.053	**24.601.275**	5,23	1.223.222
Gas Alam Natural Gas	BBTU	207.288	215.383	**205.354**	(4,66)	(10.030)
HSD	kL	74.849	79.063	**69.618**	(11,95)	(9.445)
Bio HSD	kL	158.950	173.582	**126.265**	(27,26)	(47.317)
MFO	kL	50.891	29.872	**51.068**	70,96	21.197
Bio Fame	kL	68.122	93.178	**81.788**	(12,22)	(11.390)
Biomassa	ton	465.534	778.067	**1.004.590**	29,11	226.524

Produksi Tenaga Listrik
Electricity Production

Produksi tenaga listrik unit pembangkitan PLN NP pada tahun 2025 adalah sebesar 66.919,39 GWh, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 67.094,65 GWh. Hal tersebut terutama disebabkan oleh perubahan pola operasi pembangkit gas seiring beroperasinya

In 2025, the electricity production of PLN NP generation units was 66,919.39 GWh, which was lower than the 2024 figure of 67,094.65 GWh. This is mainly due to changes in the operation patterns of gas power plants following the commissioning of new facilities such as

fasilitas baru seperti IBT Muara Karang dan IBT Krian, sehingga supply pada jaringan 150 kV menurun. Namun hal ini selaras dengan strategi *dispatcher* untuk meningkatkan *dispatch* dari PLTU Batubara.

IBT Muara Karang and IBT Krian, resulting in a decrease in supply on the 150 kV network. However, this aligns with the dispatcher's strategy to increase the dispatch from the Coal CFPP.

Tabel Total Produksi Tenaga Listrik (GWh)
Table of Total Electricity Production (GWh)

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Produksi Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) Electricity Production of Coal Generation Unit (CFPP)	5.670,36	4.797,84	36.531,60	35.895,77	**36.336,07**	1,23	440,29
Produksi Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara (Non PLTU) Electricity Production of Gas & Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP)	14.970,57	12.266,47	30.314,38	31.198,88	**30.583,33**	(1,97)	(615,55)
Total Produksi Tenaga Listrik Total Electricity Production	20.640,93	17.064,31	66.845,98	67.094,65	**66.919,39**	(0,26)	(175,26)

Grafik Total Produksi Tenaga Listrik
Chart of Total Electricity Production

(GWh)

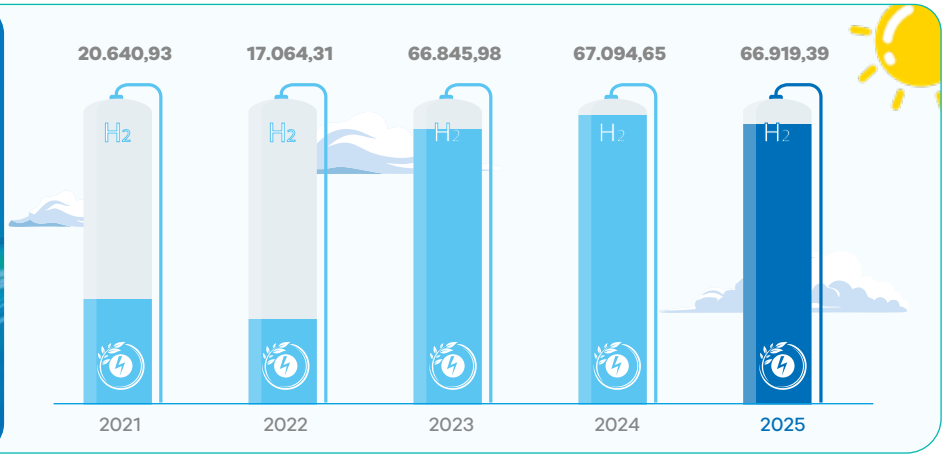

Tabel Produksi Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Batubara (GWh)
Table of Electricity Production of Coal Generation Unit (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	GWh
UP Paiton Paiton GU	5.670,36	4.797,84	7.645,89	7.741,21	**8.857,12**	14,42	1.115,91
UP Indramayu Indramayu GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		6.359,14	6.023,78	**6.084,21**	1,00	60,43
UP Rembang Rembang GU			4.100,52	4.181,63	**4.058,34**	(2,95)	(123,29)
UP Pacitan Pacitan GU			3.888,64	4.078,06	**3.813,55**	(6,49)	(264,51)
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU			4.138,26	4.533,29	**4.664,65**	2,90	131,36
UP Tenayan Tenayan GU			1.187,56	1.210,37	**1.271,06**	5,01	60,68
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU			1.170,67	1.120,30	**1.146,77**	2,36	26,47
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU			655,29	704,53	**687,61**	(2,40)	(16,91)
UP Bukit Asam Bukit Asam GU			1.371,91	964,94	**669,61**	(30,61)	(295,33)
UP Sebalang Sebalang GU			1.244,16	924,89	**928,30**	0,37	3,41
UP Tarahan Tarahan GU			1.422,17	1.302,82	**1.123,42**	(13,77)	(179,40)
UP Nagan Raya Nagan Raya GU			1.082,23	929,23	**677,17**	(27,13)	(252,06)
UP Punagaya Punagaya GU			1.546,36	1.353,16	**1.491,29**	10,21	138,13
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP			93,03	92,05	**92,19**	0,15	0,14
PLTU Ketapang Ketapang CFPP			147,51	151,09	**135,33**	(10,44)	(15,77)
PLTU Amurang Amurang CFPP			228,36	223,24	**243,79**	9,21	20,55
PLTU Anggrek Anggrek CFPP			136,77	209,48	**213,32**	1,83	3,84
PLTU Ampana Ampana CFPP			22,48	24,56	**26,77**	8,97	2,20
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP			90,65	127,14	**151,58**	19,22	24,44
Produksi Unit Pembangkitan Batubara Production of Coal Generation Unit	**5.670,36**	**4.797,84**	**36.531,60**	**35.895,77**	**36.336,07**	**1,23**	**440,29**

Tabel Produksi Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (GWh)
Table of Electricity Production of Gas and Non-Coal Generation Unit (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	GWh
UP Brantas Brantas GU	1.294,96	1.428,47	1.170,14	982,77	**1.480,60**	50,66	497,83
UP Cirata Cirata GU	1.295,38	1.649,36	1.216,77	1.399,85	**1.596,24**	14,03	**196,38**
UP Muara Karang Muara Karang GU	3.093,48	1.878,20	7.287,00	7.988,03	**6.087,22**	(23,80)	1.900,80
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	3.444,12	1.972,92	1.699,87	1.945,80	**3.052,53**	56,88	(1.106,73)
UP Gresik Gresik GU	5.809,60	5.253,00	7.032,84	7.175,74	**6.477,55**	(9,73)	698,19

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	GWh
PLTMG Bawean Bawean GEPP	20,88	21,48	21,05	19,48	Digabung dengan UP Gresik Merged with Gresik GU	-	-
PLTD Suppa Suppa DPP	12,15	63,04	127,01	Digabung dengan UP Bakaru karena reorganisasi Merged with Bakaru GU due to reorganization		-	-
UP Arun Arun GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		1.652,05	1.159,47	**1.282,98**	10,65	123,51
PLTG Sebalang Sebalang GTPP			3,88	5,12	**0,02**	(99,64)	(5,10)
UP Belawan Belawan GU			4.473,19	4.421,14	**4.270,19**	(3,41)	(150,96)
UP Pekanbaru Pekanbaru GU			946,73	1.112,05	**1.020,18**	(8,26)	(91,87)
UP Bandar Lampung Bandar Lampung GU			435,12	374,44	**427,88**	14,27	53,44
UP Pandan Pandan GU			554,91	563,86	**415,34**	(26,34)	(148,53)
UP Bakaru Bakaru GU			993,45	1.060,14	**1.193,91**	12,62	133,77
UP Minahasa Minahasa GU			282,62	273,06	**296,12**	8,45	23,07
UP Gorontalo Gorontalo GU			296,79	291,07	**300,85**	3,36	9,78
UP Kendari Kendari GU			126,80	130,04	**105,65**	(18,76)	(24,40)
UP Kapuas Kapuas GU			131,19	261,35	**182,02**	(30,35)	(79,33)
UP Sengkang Sengkang GU			1.120,90	1.260,39	**1.574,43**	24,92	314,04
UPDK Balikpapan Balikpapan GCU			6,59	Reorganisasi menjadi UP Kaltimra dan UP Kalselteng Reorganization into Kaltimra GU and Kalselteng GU		-	-
UPDK Tarakan Tarakan GCU			249,77			-	-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU			485,72			-	-
UP Kaltimra Kaltimra GU			-	270,26	**235,42**	(12,89)	(34,84)
UP Kalselteng Kalselteng GU			-	504,81	**584,20**	15,73	79,39
Produksi Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara Production of Gas & Non-Coal Generation Unit	**14.970,57**	**12.266,47**	**30.314,38**	**31.198,88**	**30.583,33**	**(1,97)**	**(615,55)**

Pemakaian Sendiri (PS)
Self-Consumption (PS)

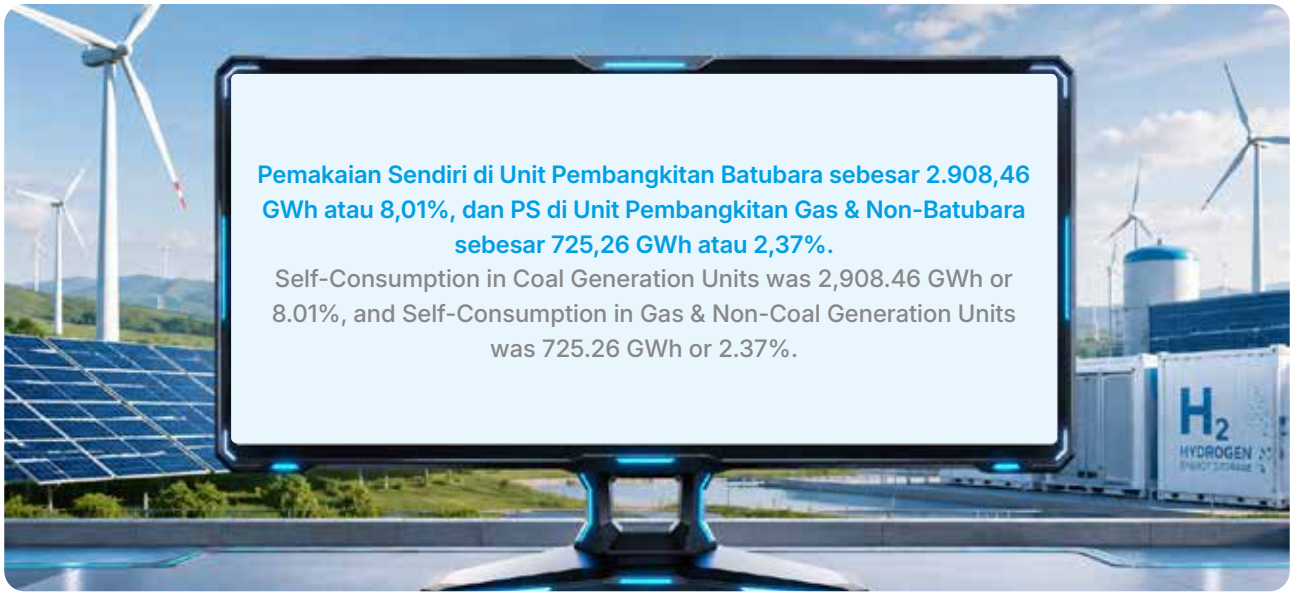

Pemakaian Sendiri (PS) merupakan tenaga listrik yang digunakan untuk aktivitas operasional unit pembangkit.

Self-consumption is electricity used for the operational activities of the power plant unit.

PS Tenaga Listrik di Unit Pembangkitan Batubara
Electricity Self-Consumption in Coal Generation Unit

Persentase PS tenaga listrik di unit pembangkitan batubara PLN NP pada tahun 2025 adalah sebesar 2.908,46 GWh atau 8,01%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 2.876,78 GWh atau 8,01%. Hal ini disebabkan karena adanya penggunaan pemakaian sendiri pada unit pembangkit yang *reserve shutdown* dan adanya peningkatan *start/stop* unit pembangkit.

The percentage of electricity self-consumption in PLN NP's coal generation unit in 2025 was 2,908.46 GWh or 8.01%, which was higher than in 2024 at 2,876.78 GWh or 8.01%. This is due to the self-consumption of the reserve shutdown power plant units and the increased start/stop of the power plant units.

Tabel Pemakaian Sendiri Unit Pembangkitan Batubara (GWh)
Table of Self-Consumption of Coal Generation Unit

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021		2022		2023		2024		2025		Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
UP Paiton Paiton GU	432,63	7,63	372,56	7,78	534,00	7,00	562,06	7,26	**611,36**	**6,90**	49,30	8,77
UP Paiton-9 (*) Paiton-9 GU (*)	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP				Digabung dengan UP Paiton karena reorganisasi Merged with Paiton GU due to reorganization						-	-
UP Indramayu Indramayu GU					457,00	7,19	440,62	7,31	**443,43**	**7,29**	2,81	0,64
UP Rembang Rembang GU					223,00	5,43	230,96	5,52	**231,43**	**5,7**	0,47	0,20

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021		2022		2023		2024		2025		Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
UP Pacitan Pacitan GU					225,00	5,79	231,29	5,67	**215,81**	**5,66**	(15,48)	(6,69)
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU					212,00	5,12	235,60	5,20	**244,52**	**5,24**	8,92	3,79
UP Tenayan Tenayan GU					158,00	13,35	162,63	13,44	**170,44**	**13,41**	7,81	4,80
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU					146,00	12,49	128,73	11,49	**140,18**	**12,22**	11,45	8,90
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU					93,00	14,26	98,11	13,93	**97,50**	**14,18**	(0,61)	(0,62)
UP Bukit Asam Bukit Asam GU					141,00	10,26	101,78	10,55	**75,07**	**11,21**	(26,71)	(26,24)
UP Sebalang Sebalang GU					143,00	11,49	115,84	12,52	**124,17**	**13,38**	8,33	7,19
UP Tarahan Tarahan GU					161,00	11,35	153,33	11,77	**141,87**	**12,63**	(11,46)	(7,47)
UP Nagan Raya Nagan Raya GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP				136,00	12,57	135,19	14,55	**118,71**	**17,53**	(16,48)	(12,19)
UP Punagaya Punagaya GU					167,48	10,83	145,77	10,77	**153,90**	**10,35**	8,13	5,58
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP					14,74	15,85	14,40	15,65	**14,62**	**15,86**	0,22	1,51
PLTU Ketapang Ketapang CFPP					27,40	18,57	28,63	18,95	**26,43**	**19,53**	(2,20)	(7,70)
PLTU Amurang Amurang CFPP					35,84	15,69	37,29	16,70	**39,09**	**16,03**	1,80	4,82
PLTU Anggrek Anggrek CFPP					20,30	14,85	29,54	14,10	**33,04**	**15,49**	3,50	11,85
PLTU Ampana Ampana CFPP					5,09	22,66	5,69	23,16	**7,36**	**27,5**	1,67	29,37
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP					15,19	16,76	19,33	15,20	**19,53**	**12,89**	0,20	1,05
Pemakaian Sendiri Unit Pembangkitan Batubara **Self-utilization of Coal Generation Unit**	**432,63**	**7,63**	**372,56**	**7,78**	**2.915,04**	**7,99**	**2.876,78**	**8,01**	**2.908,46**	**8,01**	**31,68**	**1,10**

* sejak tahun 2023 kinerja operasi PLTU Paiton 9 digabung dengan PLTU Paiton 1-2 karena adanya reorganisasi menjadi UP Paiton

* since 2023, the operating performance of Paiton 9 CFPP has been merged with Paiton 1-2 CFPP due to reorganization into Paiton GU

Grafik Pemakaian Sendiri Unit Pembangkitan Batubara
Chart of Self-Consumption of Coal Generation Unit

(%)

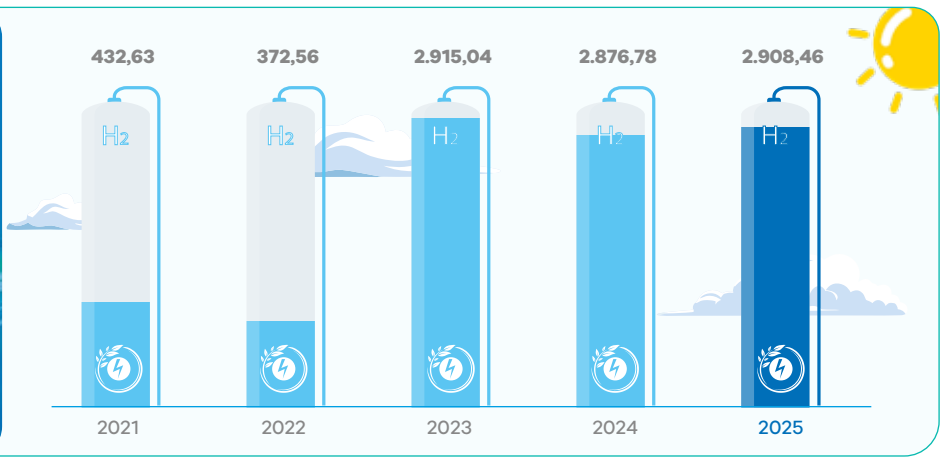

PS Tenaga Listrik di Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara

Electricity Self-Consumption in Gas and Non-Coal Generation Unit

Persentase PS tenaga listrik di unit pembangkitan gas dan non batubara PLN NP pada tahun 2025 adalah sebesar 725,26 GWh atau 2,37%, yaitu lebih lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 802,69 GWh atau 2,57%. Hal ini disebabkan karena adanya pembebanan pembangkit yang lebih optimal, stabil, atau efisien, serta penurunan frekuensi proses *start-stop* pada unit-unit gas.

The percentage of electricity self-consumption in gas and non-coal generation units of PLN NP in 2025 was 725.26 GWh or 2.37%, which was lower than in 2024 at 802.69 GWh or 2.57%. It is due to the more optimal, stable, or efficient loading of the power plants, as well as the reduction in the frequency of start-stop processes in the gas units.

Tabel Pemakaian Sendiri Unit Pembangkitan Batubara (GWh)

Table of Self-Consumption of Gas and Non-Coal Generation Unit (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021		2022		2023		2024		2025		Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
UP Brantas Brantas GU	16,36	1,26	16,09	1,13	13,34	1,14	12,87	1,31	**16,90**	1,14	4,03	31,34
UP Cirata Cirata GU	28,03	2,16	34,76	2,11	25,92	2,13	22,20	1,59	**26,35**	**1,65**	4,14	18,66
UP Muara Karang Muara Karang GU	124,18	4,01	73,65	3,92	215,16	2,95	217,89	2,73	**160,73**	2,64	(57,16)	(26,23)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	62,08	1,80	52,85	2,68	48,87	2,88	46,81	2,41	**81,01**	2,65	34,20	73,05
UP Gresik Gresik GU	127,89	2,20	132,96	2,53	214,76	3,05	219,84	3,06	**196,09**	3,01	(23,74)	(10,80)
PLTMG Bawean Bawean GEPP	1,05	5,04	0,77	3,57	0,84	3,98	0,70	3,61	Digabung dengan UP Gresik Merged with Gresik GU		-	-
PLTD Suppa Suppa DPP	0,26	2,16	1,19	1,89	2,41	1,90	Digabung dengan UP Bakaru karena reorganisasi Merged with Bakaru GU due to reorganization				-	-
UP Arun Arun GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP				27,09	1,64	25,73	2,22	**27,71**	2,16	1,98	7,70
PLTG Sebalang Sebalang GTPP					0,01	0,18	0,18	3,57	**0,00**	0,79	(0,18)	(99,92)
UP Belawan Belawan GU					95,28	2,13	122,65	2,77	**89,53**	2,10	(33,12)	(27,00)
UP Pekanbaru Pekanbaru GU					20,64	2,18	23,31	2,10	**20,60**	2,02	(2,72)	(11,65)
UP Bandar Lampung Bandar Lampung GU					6,40	1,47	5,83	1,56	**5,53**	1,29	(0,30)	(5,16)
UP Pandan Pandan GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP				9,10	1,64	9,60	1,70	**6,92**	1,67	(2,67)	(27,85)
UP Bakaru Bakaru GU					2,48	0,25	11,17	1,02	**15,85**	1,33	4,68	41,94
UP Minahasa Minahasa GU					4,66	1,65	3,64	1,57	**4,32**	1,46	0,68	18,63
UP Gorontalo Gorontalo GU					2,76	0,93	6,90	2,37	**7,66**	2,55	0,76	11,08
UP Kendari Kendari GU					3,84	3,03	3,85	2,96	**3,09**	2,92	(0,76)	(19,83)
UP Kapuas Kapuas GU					6,78	5,17	14,75	5,64	**9,27**	5,10	(5,48)	(37,13)
UP Sengkang Sengkang GU					30,94	2,76	38,44	3,05	**38,54**	2,45	0,10	0,26

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021		2022		2023		2024		2025		Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
UPDK Balikpapan Balikpapan GCU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP				0,36	5,46	Reorganisasi menjadi UP Kaltimra dan UP Kalselteng Reorganization into Kaltimra GU and Kalselteng GU				-	-
UPDK Tarakan Tarakan GCU					5,72	2,29					-	-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU					9,23	1,90					-	-
UP Kaltimra Kaltimra GU					-	-	6,64	2,46	**5,20**	2,21	(1,43)	(21,62)
UP Kalselteng Kalselteng GU					-	-	9,70	1,92	**9,96**	1,71	0,26	2,72
Pemakaian Sendiri Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara Self-Consumption of Gas and Non-Coal Generation Unit	**359,85**	**2,40**	**312,27**	**1,66**	**746,59**	**2,48**	**802,69**	**2,57**	**725,26**	**2,37**	**(77,43)**	**7,51**

Grafik Pemakaian Sendiri Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara
Chart of Self-Consumption of Gas and Non-Coal Generation Unit

(%)

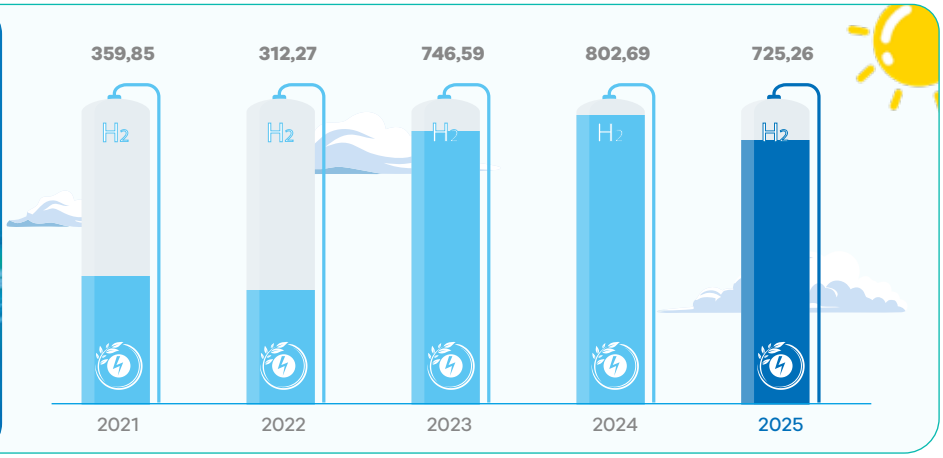

Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales

Penjualan Tenaga Listrik tahun 2025 sebesar 63.285,67 GWh.
In 2025, the Electricity Sales were 63,285.67 GWh.

Penjualan tenaga listrik unit pembangkitan PLN NP pada tahun 2025 adalah sebesar 63.285,67 GWh, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 63.415,18 GWh. Hal tersebut terutama disebabkan oleh perubahan pola operasi pembangkit gas seiring beroperasinya fasilitas baru seperti IBT Muara Karang dan IBT Krian, sehingga *supply* pada jaringan 150 kV menurun. Namun hal ini selaras dengan strategi *dispatcher* untuk meningkatkan *dispatch* dari PLTU Batubara.

The electricity sales of PLN NP generation units in 2025 were 63,285.67 GWh, which was lower than the 2024 figure of 63,415.18 GWh. This is primarily caused by changes in the operation patterns of gas power plants following the commissioning of new facilities such as IBT Muara Karang and IBT Krian, resulting in a decrease in supply on the 150 kV network. However, this aligns with the dispatcher's strategy to increase the dispatch from the Coal Power Plant.

Tabel Total Penjualan Tenaga Listrik (GWh)
Table of Total Electricity Sales (GWh)

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Penjualan Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) Electricity Sales of Coal Generation Unit (CFPP)	5.670,36	4.790,51	33.615,22	33.018,99	**33.427,61**	1,24	408,62
Penjualan Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara (Non PLTU) Electricity Sales of Gas & Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP)	14.610,70	11.954,18	29.563,37	30.396,19	**29.858,06**	(1,77)	(538,12)
Total Penjualan Tenaga Listrik Total Electricity Sales	20.281,06	16.744,69	63.178,59	63.415,18	**63.285,67**	(0,20)	(129,51)

Grafik Total Penjualan Tenaga Listrik
Chart of Self-Chart of Total Electricity Sales

(GWh)

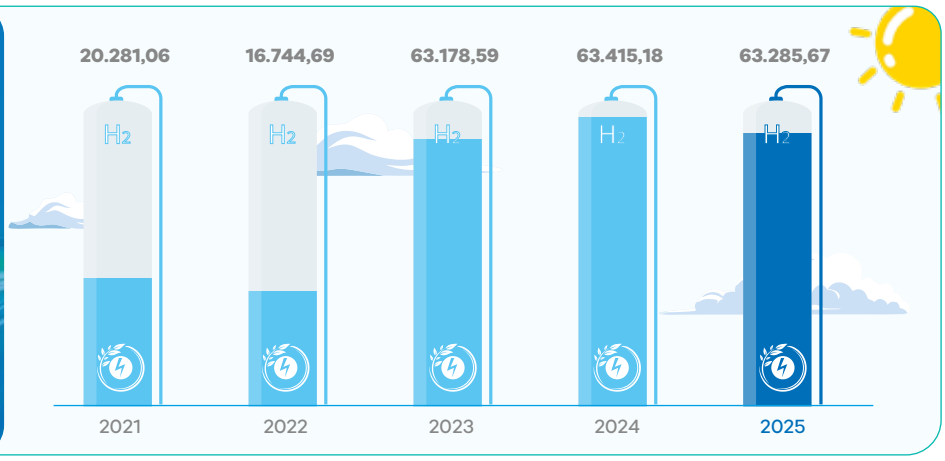

Tabel Penjualan Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Batubara (GWh)
Table of Electricity Sales of Coal Generation Unit (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	GWh
UP Paiton Paiton GU	5.670,36	4.790,51	7.110,90	**7.179,15**	**8.245,76**	14,86	1.066,60
UP Indramayu Indramayu GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		5.901,96	5.583,16	**5.640,78**	1,03	57,62
UP Rembang Rembang GU			3.877,82	3.950,67	**3.826,91**	(3,13)	(123,76)
UP Pacitan Pacitan GU			3.663,53	3.846,77	**3.597,74**	(6,47)	(249,03)
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU			3.926,47	4.297,69	**4.420,13**	2,85	122,44
UP Tenayan Tenayan GU			1.029,14	1.047,75	**1.100,62**	5,05	52,88
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU			1.024,67	991,57	**1.006,59**	1,51	15,02
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU			562,06	606,42	**590,12**	(2,69)	(16,30)
UP Bukit Asam Bukit Asam GU			1.231,19	863,16	**594,54**	(31,12)	(268,62)
UP Sebalang Sebalang GU			1.101,44	809,06	**804,13**	(0,61)	(4,93)
UP Tarahan Tarahan GU			1.260,74	1.149,49	**981,55**	(14,61)	(167,94)
UP Nagan Raya Nagan Raya GU			946,16	794,04	**558,46**	(29,67)	(235,58)
UP Punagaya Punagaya GU			1.378,87	1.207,39	**1.337,40**	10,77	130,01
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP			78,32	77,65	**77,58**	(0,10)	(0,08)
PLTU Ketapang Ketapang CFPP			120,11	122,46	**108,90**	(11,07)	(13,56)
PLTU Amurang Amurang CFPP			192,52	185,94	**204,70**	10,09	18,75
PLTU Anggrek Anggrek CFPP			116,47	179,94	**180,28**	0,19	0,34
PLTU Ampana Ampana CFPP			17,39	18,87	**19,41**	2,81	0,53
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP			75,46	107,81	**132,04**	22,47	24,23
Penjualan Unit Pembangkitan Batubara Sales of Coal Generation Unit	**5.670,36**	**4.790,51**	**33.615,22**	**33.018,99**	**33.427,61**	**1,24**	**408,62**

Tabel Penjualan Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (GWh)
Table of Electricity Sales of Gas and Non-Coal Generation Unit (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	GWh
UP Brantas Brantas GU	1.278,60	1.412,39	1.154,93	969,91	**1.463,70**	50,91	493,80
UP Cirata Cirata GU	1.267,35	1.614,60	1.190,90	1.377,65	**1.569,89**	13,95	**192,24**
UP Muara Karang Muara Karang GU	2.969,29	1.804,53	7.071,84	7.770,14	**5.926,50**	(23,73)	(1.843,64)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	3.382,03	1.920,07	1.651,00	1.898,99	**2.971,52**	56,48	1.072,53
UP Gresik Gresik GU	5.681,71	5.120,04	6.818,08	6.955,91	**6.281,46**	(9,70)	(674,45)
PLTMG Bawean Bawean GEPP	19,83	20,71	20,22	18,78	Digabung dengan UP Gresik Merged with Gresik GU	-	-

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	GWh
PLTD Suppa Suppa DPP	11,89	61,84	124,18	Digabung dengan UP Bakaru karena reorganisasi Merged with Bakaru GU due to reorganization		-	-
UP Arun Arun GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		1.624,96	1.133,75	**1.255,27**	10,72	121,52
PLTG Sebalang Sebalang GTPP			3,87	4,93	**0,02**	(99,63)	(4,91)
UP Belawan Belawan GU			4.378,07	4.298,49	**4.180,66**	(2,74)	(117,83)
UP Pekanbaru Pekanbaru GU			926,06	1.088,73	**999,58**	(8,19)	(89,15)
UP Bandar Lampung Bandar Lampung GU			428,73	368,61	**422,35**	14,58	53,74
UP Pandan Pandan GU			545,85	554,27	**408,41**	(26,31)	(145,85)
UP Bakaru Bakaru GU			991,24	1.048,98	**1.178,06**	12,31	129,08
UP Minahasa Minahasa GU			278,64	269,42	**291,81**	8,31	22,39
UP Gorontalo Gorontalo GU			290,75	284,17	**293,19**	3,17	9,02
UP Kendari Kendari GU			122,94	126,19	**102,56**	(18,73)	(23,64)
UP Kapuas Kapuas GU			124,40	246,60	**172,74**	(29,95)	(73,85)
UP Sengkang Sengkang GU			1.089,93	1.221,96	**1.535,90**	25,69	313,94
UPDK Balikpapan Balikpapan GCU			6,23	Reorganisasi menjadi UP Kaltimra dan UP Kalselteng Reorganization into Kaltimra GU and Kalselteng GU		-	-
UPDK Tarakan Tarakan GCU			244,08			-	-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU			476,48			-	-
UP Kaltimra Kaltimra GU			-	263,62	**230,21**	(12,67)	(33,40)
UP Kalselteng Kalselteng GU			-	495,11	**574,24**	15,98	79,13
Penjualan Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara Sales of Gas and Non-Coal Generation Unit	**14.610,70**	**11.954,18**	**29.563,37**	**30.396,19**	**29.858,06**	**(1,77)**	**(538,12)**

Segmen Usaha Jasa *Operation and Maintenance* (O&M)

Operation and Maintenance (O&M) Services Business Segment

Dalam rangka memperkuat pengembangan usaha sekaligus mengoptimalkan kapabilitas internal, PLN NP menjalankan layanan Jasa Operation and Maintenance (O&M) guna memastikan keandalan operasional pembangkit di berbagai wilayah Indonesia. Pelaksanaan layanan tersebut dilakukan secara mandiri oleh PLN NP untuk area Jawa maupun luar Jawa, serta melalui kolaborasi strategis bersama Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan. Adapun berikut merupakan kinerja pembangkit yang dikelola melalui skema jasa O&M oleh PLN NP:

To strengthen business development while optimizing internal capabilities, PLN NP provides Operation and Maintenance (O&M) services to ensure the operational reliability of power plants in various regions of Indonesia. The implementation of these services is carried out independently by PLN NP for both Java and non-Java areas, as well as through strategic collaborations with Subsidiaries and Joint Ventures. The following are the performance metrics of the power plants managed through the O&M service scheme by PLN NP:

Kinerja Pembangkit Jasa O&M yang dikelola PLN NP
EAF of O&M Service Power Plant managed by PLN NP (%)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2022	2023	2024	2025
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	85,81	Sudah menjadi aset PLN NP It has become PLN NP's asset		
PLTU Rembang Rembang CFPP	71,49			
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	88,07			
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	94,81			
PLTU Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	81,21			
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Blok 2 CCPP	99,23			
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Blok 5 CCPP	98,64			
PLTGU Muara Tawar Blok 3 *Peaker* Muara Tawar Blok 3 Peaker CCPP	95,35			
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	82,57			
PLTU Teluk Balikpapan Teluk Balikpapan CFPP	91,19			
PLTMG Arun Arun GEPP	93,36			
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	89,43			
PLTU Amurang Amurang CFPP	98,41			
PLTU Ampana Ampana CFPP	68,59			
PLTU Ketapang Ketapang CFPP	76,88			
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	90,77			
PLTU Anggrek Anggrek CFPP	90,91			
PLTU Kendari 3 Kendari 3 CFPP	-	-	42,09	**84,56**
PLTU Bangka Bangka CFPP	74,58	79,85	83,98	**85,95**
PLTU Belitung Belitung CFPP	92,92	87,30	91,19	**91,29**
PLTU Bolok Bolok CFPP	95,70	89,69	95,00	**83,53**
PLTU Ropa Ropa CFPP	89,40	85,91	88,64	**84,47**
PLTU Tidore Tidore CFPP	77,90	91,65	89,13	**85,45**
PLTA Asahan Asahan HPP	96,95	93,62	86,97	**97,04**
PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	81,36	79,20	70,37	**70,30**

EFOR Pembangkit Jasa O&M yang dikelola PLN NP (%)
EFOR of O&M Service Power Plant managed by PLN NP (%)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2022	2023	2024	2025
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	4,36	Sudah menjadi aset PLN NP It has become PLN NP's asset		
PLTU Rembang Rembang CFPP	6,22			
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	0,46			
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	1,98			
PLTU Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	3,19			
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Blok 2 CCPP	0,02			

Unit Pembangkitan Generation Unit	2022	2023	2024	2025
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Blok 5 CCPP	0,64	Sudah menjadi aset PLN NP It has become PLN NP's asset		
PLTGU Muara Tawar Blok 3 *Peaker* Muara Tawar Blok 3 Peaker CCPP	0,52			
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	4,60			
PLTU Teluk Balikpapan Teluk Balikpapan CFPP	0,66			
PLTMG Arun Arun GEPP	1,03			
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	2,24			
PLTU Amurang Amurang CFPP	1,09			
PLTU Ampana Ampana CFPP	0,89			
PLTU Ketapang Ketapang CFPP	2,11			
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	0,72			
PLTU Anggrek Anggrek CFPP	5,40			
PLTU Kendari 3 Kendari 3 CFPP	-	-	42,86	**7,25**
PLTU Bangka Bangka CFPP	14,20	8,85	6,56	**3,25**
PLTU Belitung Belitung CFPP	2,78	1,60	0,57	**0,26**
PLTU Bolok Bolok CFPP	0,41	3,40	0,70	**2,39**
PLTU Ropa Ropa CFPP	1,62	0,94	2,58	**3,90**
PLTU Tidore Tidore CFPP	4,71	1,47	1,09	**1,49**
PLTA Asahan Asahan HPP	0,00	0,04	0,55	**0,02**
PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	8,08	8,82	18,49	**13,84**

NPHR Pembangkit Jasa O&M yang dikelola PLN NP (kCal/kWh)

NPHR of O&M Service Power Plant managed by PLN NP (kCal/kWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2022	2023	2024	2025
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	2.856,17			
PLTU Rembang Rembang CFPP	3.059,14			
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	2.674,01			
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	2.818,93			
PLTU Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	2.909,31			
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Blok 2 CCPP	1.993,84			
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Blok 5 CCPP	2.015,84	Sudah menjadi aset PLN NP It has become PLN NP's asset		
PLTGU Muara Tawar Blok 3 *Peaker* Muara Tawar Blok 3 Peaker CCPP	1.695,70			
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	4.111,33			
PLTU Teluk Balikpapan Teluk Balikpapan CFPP	3.324,29			
PLTMG Arun Arun GEPP	1.955,33			
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	3.945,42			
PLTU Amurang Amurang CFPP	4.639,33			

Unit Pembangkitan Generation Unit	2022	2023	2024	2025
PLTU Ampana Ampana CFPP	6.619,07	Sudah menjadi aset PLN NP It has become PLN NP's asset		
PLTU Ketapang Ketapang CFPP	7.077,15			
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	5.831,04			
PLTU Anggrek Anggrek CFPP	5.601,28			
PLTU Kendari 3 Kendari 3 CFPP	-	-	6.370,86	**6.143,26**
PLTU Bangka Bangka CFPP	5.393,16	4.666,50	5.173,72	**5.364,00**
PLTU Belitung Belitung CFPP	5.009,79	4.688,07	4.534,09	**3.886,00**
PLTU Bolok Bolok CFPP	4.154,67	4.111,07	4.191,85	**4.461,26**
PLTU Ropa Ropa CFPP	5.050,87	4.916,59	4.945,04	**5.305,74**
PLTU Tidore Tidore CFPP	5.436,34	4.993,65	4.902,20	**5.054,44**
PLTA Asahan Asahan HPP	-	-	-	-
PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	3.510,94	3.494,78	3.615,75	**3.870,35**

Kepemilikan Pembangkit di *Independent Power Producer* (IPP)
Power Plant Ownership in Independent Power Producer (IPP)

Kepemilikan saham PLN NP pada pembangkit *Independent Power Producer* (IPP) dengan total kapasitas sebesar 5.850 MW meliputi:

PLN NP's shareholding in Independent Power Producer (IPP) power plants with a total capacity of 5,850 MW, includes:

Tabel Kepemilikan Pembangkit/Saham di IPP
Table of Power Plant/Share Ownership in IPP

Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang Installed Capacity	Porsi Saham Stock Portion
PLTA Asahan Asahan HPP	2 × 90 MW	36,61%
PLTU Banjarsari Asahan CFPP	2 × 110 MW	29,15%
PLTU Jawa 7 Asahan CFPP	2 × 1.000 MW	30%
PLTU Cilacap Unit #1 dan #2 Asahan CFPP	2 × 300 MW	49%
PLTU Cilacap Unit #3 Asahan CFPP	1× 660 MW	
PLTU Cilacap Unit #4 Asahan CFPP	1 × 1.000 MW	
PLTU Mamuju Asahan CFPP	2 × 25 MW	10%
PLTA Batang Toru Asahan HPP	4 × 127,5 MW	25%
PLTS Terapung Cirata Asahan SPP	145 MWAc / 192 MWp	51%
PLTU Sumbagsel 1 Asahan CFPP	2 × 150 MW	10%
PLTS IKN Asahan SPP	50 MW	51%
PLTS Terapung Tembesi Asahan SPP	35 MWAc / 46 MWp	51%
PLTS Terapung Karangkates Asahan SPP	100 MWAc	51%

Segmen Usaha Jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC)

Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Services Business Segment

PLN NP turut memperluas portofolio usahanya dengan menyediakan layanan *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) melalui Anak Perusahaan yaitu PT PLN Nusantara Power Construction (dahulu PT Rekadaya Elektrika). Layanan EPC ini mencakup pembangunan pembangkit baru, khususnya di luar Pulau Jawa, yang didukung oleh tenaga profesional berpengalaman serta penguasaan teknologi pembangkitan. Selain itu, PLN NP juga mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi (T&D) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

PLN NP also expanded its business portfolio by providing Engineering, Procurement, and Construction (EPC) services through its subsidiary, PT PLN Nusantara Power Construction (formerly PT Rekadaya Elektrika). This EPC service includes the construction of new power plants, especially outside Java, supported by experienced professionals, and mastery of electric power generator technology. In addition, PLN NP develops transmission and distribution (T&D) networks spread across various parts of Indonesia.

Tabel Proyek EPC yang dikelola PLN NP melalui Anak Perusahaan
Table of EPC Projects managed by PLN NP through its Subsidiaries

Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang Installed Capacity	Lokasi Location	Status Pekerjaan Work Progress
PLTU Timika Timika CFPP	4 × 7 MW	Papua	*On Going*
PLTU Bima Bima CFPP	2 × 10 MW	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	*On Going*
PLTU Sofifi Sofifi CFPP	2 × 3 MW	Maluku Utara North Maluku	• Unit 2: *Taking Over Certificate* (TOC) • Unit 1: *Commisioning*
PLTMG Sekupang Sekupang GEPP	862,31 (kWp)	Jawa Timur	*Ongoing*
PLTS Substitusi PS Paiton Substitution SPP for Self-Consumption in Paiton	202,4 (kWp)	Jawa Barat	*Commercial Operation Date* (COD)
PLTS Substitusi PS Muara Tawar Substitution SPP for Self-Consumption in Muara Tawar	400 (kWp)	Jawa Timur	*Commercial Operation Date* (COD)
PLTS UID Jawa Timur 6 Lokasi East Java UID SPP in 6 Locations	975 (kWp)	Jawa Timur	*Commercial Operation Date* (COD)
PLTS UID Jawa Timur 16 Lokasi East Java UID SPP in 16 Locations	2×30 (MW)	Maluku Utara North Maluku	• 12 Lokasi *Commercial Operation Date* (COD) • 4 Lokasi menunggu Lahan bebas • 12 Locations of Commercial Operation Date (COD) • 4 locations awaiting available land
Relokasi PLTG Jakabaring Jakabaring GTPP Relocation	3×17 (MW)	Maluku Utara North Maluku	*Commercial Operation Date* (COD)
Relokasi PLTG Batanghari Batanghari GTPP Relocation	957 kWp	Madura	*Commercial Operation Date* (COD)

Segmen Usaha *Business Solution/ Beyond* kWh
Business Solution/Beyond kWh Business Segment

Segmen Usaha Lainnya mencakup berbagai proyek yang berada dalam ruang lingkup pengelolaan Bidang *Business Development – Generation Derivatives* PLN NP, yang dibentuk untuk mendukung perencanaan serta pengembangan strategi bisnis secara terintegrasi. Bidang ini menjalankan fungsi strategis dalam pengelolaan produk, pemasaran terpadu, aktivitas penjualan, hingga pengelolaan kontrak guna mendukung pengembangan bisnis derivatif pembangkit. Selain itu, segmen ini turut berperan dalam melakukan evaluasi atas implementasi strategi bisnis, mengelola layanan penunjang seperti jasa *Operation and Maintenance* (O&M), serta mengoptimalkan pemanfaatan aset sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan usaha Perusahaan secara berkelanjutan.

The Other Business Segment includes various projects within the scope of managing the Business Development – Generation Derivatives PLN NP Division, which was established to support the planning and development of integrated business strategies. This field performs strategic functions in product management, integrated marketing, sales activities, and contract management to support the development of the power plant derivative business. In addition, this segment plays a role in evaluating the implementation of business strategies, managing supporting services such as Operation and Maintenance (O&M) services, and optimizing asset utilization as part of efforts to strengthen the Company's business growth sustainably.

Pekerjaan *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO)
Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Work

Pekerjaan Helium *Leakage Test* PLTU Timor-1 Unit 2 PT Inti Karya Persada Tehnik (IKPT)
Helium Leakage Test at Timor-1 Unit 2 CFPP by PT Inti Karya Persada Tehnik (IKPT)

Pengetesan kebocoran Vacuum Condenser menggunakan metode Gas Helium dilakukan berdasarkan permintaan Konsorsium 5OC (PT Inti Karya Persada Tehnik – PT PP (Persero) Tbk – ITOCHU Corporation – Sumitomo Heavy Industries, Ltd – PT Medco Power Indonesia) dalam dua tahap pada tahun 2024. Tahap pertama menyelesaikan 60% pekerjaan sebelum unit mengalami trip, sementara tahap kedua dilakukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sekaligus menguji tindak lanjut rekomendasi Tim PLN Nusantara Power yang akan dilanjutkan pada 2025.

The Vacuum Condenser leak testing using the Helium Gas method was conducted at the request of the 5OC Consortium (PT Inti Karya Persada Tehnik – PT PP (Persero) Tbk – ITOCHU Corporation – Sumitomo Heavy Industries, Ltd – PT Medco Power Indonesia) in two phases in 2024. The first phase completes 60% of the work before the unit experiences a trip. The second phase is conducted to finish the remaining work and test the follow-up recommendations from the PLN Nusantara Power Team, which will continue in 2025.

Assessment Performance Unit PLTA Lodagung PT Jasa Tirta Energi oleh PT PLN Nusantara Power Services
Assessment of Lodagung HPP Unit Performance at PT Jasa Tirta Energi by PT PLN Nusantara Power Services

Assessment performa PLTA Lodagung dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja pembangkit yang saat ini hanya beroperasi sekitar 60% kapasitas penuh. Kegiatan ini juga menjadi peluang

The performance assessment of the Lodagung HPP was conducted to identify the causes of the plant's performance decline, which is currently operating at only about 60% of its full capacity. This activity

strategis bagi PLN NP Group untuk memperkuat kerja sama dengan Jasa Tirta sebagai pelanggan baru, sekaligus membuka potensi pengembangan bisnis dan pekerjaan lanjutan bagi NPS melalui rekomendasi perbaikan performa pembangkit.

also presents a strategic opportunity for the PLN NP Group to strengthen cooperation with Jasa Tirta as a new customer, while also opening up potential for business development and further work for NPS through recommendations for improving the plant's performance.

Supervisi Unit 1 Grade C PT Sumber Segara Primadaya (S2P)

Supervision of Unit 1 Grade C at PT Sumber Segara Primadaya (S2P)

Pelaksanaan Supervisi Unit 1 *Grade* C di PT Sumber Segara Primadaya mencakup pengawasan pekerjaan *overhaul* (OH), evaluasi pekerjaan, identifikasi temuan, dan pemberian rekomendasi pasca-OH untuk memastikan pekerjaan sesuai prosedur. Pekerjaan berdurasi 20 hari kalender ini terus menjadi *repeat order* selama bertahun-tahun berkat hasil eksekusi dan layanan tim yang memuaskan pelanggan.

The Supervision of Unit 1 Grade C at PT Sumber Segara Primadaya includes overseeing overhaul (OH) work, evaluating the work, identifying findings, and providing post-OH recommendations to ensure the work is in accordance with procedures. This 20-day job continues to be a repeat order for years due to the execution results and the team's service that satisfies the customer.

Borescope Inspection Gas Turbine PT Bekasi Power

Borescope Inspection on Gas Turbine at PT Bekasi Power

Pekerjaan *borescope inspection gas turbine* milik PT Bekasi Power, berlokasi di kawasan industri Jababeka. Inspeksi pada bagian *turbine blade* gas turbin frame 6 unit A dan B, dilaksanakan selama 2 hari yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan inspeksi dan paparan.

The borescope inspection work on the gas turbine owned by PT Bekasi Power is located in the Jababeka industrial area. Inspection of the turbine blade section of gas turbine frame 6 units A and B was carried out over two days, followed by the preparation of the inspection report and presentation.

Pekerjaan Non MRO

Non-MRO Work

Life Cycle Cost Analysis (LCCA) PT Geo Dipa Energi (Persero)

Life Cycle Cost Analysis (LCCA) at PT Geo Dipa Energi (Persero)

PT Geo Dipa Energi merupakan pelanggan loyal PLN NP dengan lebih dari 10 kontrak dalam tiga tahun terakhir. Pekerjaan *Life Cycle Cost Analysis* (LCCA) ini diperoleh melalui proses *tender* terbuka untuk mendukung keandalan dan efisiensi pembangkit melalui tata kelola aset yang optimal. LCCA diterapkan untuk menghitung valuasi produktivitas aset dan mendukung pengambilan keputusan strategis manajemen dengan menganalisis seluruh biaya kepemilikan aset, mulai dari investasi awal, operasi dan pemeliharaan, hingga disposal berdasarkan nilai penyusutan.

PT Geo Dipa Energi is a loyal customer of PLN NP with more than 10 contracts in the last three years. This Life Cycle Cost Analysis (LCCA) work was obtained through an open tender process to support the reliability and efficiency of the power plant through optimal asset management. LCCA is applied to calculate the asset productivity valuation and support strategic management decision-making by analyzing the entire cost of asset ownership, from initial investment, operation and maintenance, to disposal based on depreciation value.

Pekerjaan Jasa Lainnya
Other Services Work

Carbon Trading

Penjualan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) proyek PLGU Muara Karang Blok 3, PLTGU Muara Tawar *Add On* Blok 2, dan PLTMG Sumbagut 2 *Peaker* di IDX Carbon. Hingga akhir tahun 2025, PLN NP telah membukukan nilai SPE-GRK yang dibursakan sebesar 1,23 Juta ton CO_2, dengan volume transaksi mencapai 633 ribu ton CO_2.

Sale of Greenhouse Gas Emission Reduction Certificates (SPE-GRK) for the Muara Karang Block 3 CCPP project, Muara Tawar Add On Block 2 CCPP, and Sumbagut 2 GEPP Peaker at IDX Carbon. As of the end of 2025, PLN NP recorded 1.23 million tons of CO_2 in listed SPE-GRK, with a transaction volume of 633,000 tons of CO_2.

Penjualan *Fly Ash Bottom Ash* (FABA)
Fly Ash Bottom Ash (FABA) Sales

Pada tahun 2025, pemanfaatan limbah hasil pembakaran batubara berupa *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) dari operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berhasil dioptimalkan melalui penjualan kepada pihak ketiga dengan total capaian mencapai 414.000 ton, atau senilai Rp11,5 miliar. FABA tersebut dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku industri semen, beton, material konstruksi, serta berbagai kebutuhan infrastruktur lainnya. Upaya ini tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga mendukung penerapan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In 2025, the utilization of coal combustion by-products in the form of fly ash and bottom ash (FABA) generated from coal-fired power plant (CFPP) operations was successfully optimized through sales to third parties, achieving a total volume of 414,000 tons with a transaction value of Rp11.5 billion. The FABA was repurposed as a raw material for the cement and concrete industries, construction materials, and various infrastructure development applications. This initiative not only generated additional economic value for the Company but also reinforced its commitment to sustainability by promoting resource efficiency and environmentally responsible waste management practices in compliance with applicable laws and regulations.

Hydrogen

1. Sewa HFCG untuk mendukung acara pameran *hydrogen* di JIC dimana NP menyewakan HFCG dengan *include hydrogen* ke PT Toyota selama acara pameran Hydrogen di JIC.
2. Penjualan hydrogen ke PT Perta Daya Gas dimana PDG membutuhkan *hydrogen* untuk menjual lagi ke industrial.

1. Lease HFCG to support the hydrogen exhibition event at JIC, where NP rents HFCG, including hydrogen, to PT Toyota during the Hydrogen exhibition event at JIC.
2. Hydrogen sales to PT Perta Daya Gas, where PDG needs hydrogen to sell again to the industrial sector.

Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing and Market Share Aspects

Strategi Pemasaran dan Target Pencapaian Pasar
Marketing Strategy and Market Achievement Target

Sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi pasar dan menjaga tingkat kepuasan pelanggan, PLN NP secara konsisten melaksanakan survei kepuasan pelanggan guna mendukung peningkatan *Customer Experience* secara berkelanjutan. Sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam menghadirkan layanan unggul, PLN NP terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi standar *excellence service*. Pengembangan tersebut juga diarahkan untuk mendukung implementasi prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG) serta *Energy Transition Mechanism* yang tengah didorong oleh PLN (Persero), termasuk peningkatan pemahaman dan penerapan kompetensi terkait ekonomi karbon.

As part of efforts to strengthen market position and maintain customer satisfaction levels, PLN NP consistently conducts customer satisfaction surveys to support the continuous improvement of Customer Experience. In line with the Company's commitment to providing excellent service, PLN NP continuously enhances the competence and capabilities of its human resources to meet excellence service standards. The development is also directed to support the implementation of Environment, Social, and Governance (ESG) principles and the Energy Transition Mechanism currently being promoted by PLN (Persero), including the enhancement of understanding and application of competencies related to the carbon economy.

Dalam pelaksanaannya, PLN NP turut memperkuat pengukuran kinerja ESG secara komprehensif serta mendorong pengembangan yang terintegrasi pada seluruh lini operasional, termasuk sektor pembangkitan. Di saat yang sama, Perusahaan secara berkesinambungan menjalankan transformasi digital dan digitalisasi layanan sebagai bagian dari inovasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada pelanggan.

In its implementation, PLN NP also strengthens comprehensive ESG performance measurement and encourages integrated development across all operational lines, including the generation sector. At the same time, the Company continuously implements digital transformation and service digitization as part of its innovation to improve the quality and effectiveness of customer service.

Pada aspek pengembangan pasar, selain berfokus pada penjualan tenaga Listrik, PLN NP terus mengoptimalkan peluang pertumbuhan bisnis melalui pengembangan portofolio *Beyond* kWh dan energi hijau, penguatan kemitraan strategis dengan pelanggan industri dan mitra usaha, pengembangan layanan *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC), *Operation & Maintenance* (O&M), serta *Asset Management*, pemanfaatan peluang bisnis karbon dan hidrogen hijau, serta penyediaan solusi energi terintegrasi yang mendukung transisi energi dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

In terms of market development, in addition to focusing on electricity sales, PLN NP continues to optimize business growth opportunities through the development of a Beyond kWh and green energy portfolio, strengthening strategic partnerships with industrial customers and business partners, developing Engineering, Procurement, and Construction (EPC), Operation & Maintenance (O&M), and Asset Management services, utilizing carbon and green hydrogen business opportunities, as well as providing integrated energy solutions that support energy transition and sustainable business growth.

Untuk memastikan perencanaan dan pengembangan strategi bisnis, manajemen produk dan pemasaran terintegrasi, serta pengelolaan penjualan dan kontrak dalam mendukung pengembangan bisnis derivatif pembangkit, PLN NP melaksanakan berbagai program strategis sebagai berikut:

To ensure the planning and development of business strategies, integrated product and marketing management, as well as sales and contract management, in supporting the development of power plant derivative businesses, PLN NP implements various strategic programs as follows:

- MRO (*Maintenance, Repair and Overhaul*): layanan *overhaul*, inspeksi, asesmen, supervisi, pengujian, dan konsultansi teknis pembangkit.
- Non-MRO: layanan O&M pembangkit dan konsultansi operasional.
- Bisnis Derivatif Lainnya: pemanfaatan FABA (*Fly Ash Bottom Ash*), *carbon trading*, pengembangan *green hydrogen*, optimalisasi aset, digitalisasi, serta berbagai peluang bisnis *Beyond* kWh lainnya

Implementasi strategi tersebut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, pendapatan bisnis *Beyond* kWh mencapai Rp1.101,48 miliar atau 159,88% dari target RKAP 2025, dengan margin usaha sebesar Rp247,39 miliar dan tingkat margin 22,46%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan PLN NP dalam mengoptimalkan kapabilitas inti perusahaan serta memperluas sumber pendapatan non-kelistrikan melalui pengembangan bisnis jasa dan bisnis derivatif pembangkit.

- MRO (Maintenance, Repair and Overhaul): overhaul, inspection, assessment, supervision, testing, and technical consulting services for power plants.
- Non-MRO: Power plant O&M services and operational consulting.
- Other Derivative Businesses: utilization of FABA (Fly Ash and Bottom Ash), carbon trading, green hydrogen development, asset optimization, digitalization, and various other Beyond kWh business opportunities.

The implementation of that strategy has made a positive contribution to the Company's performance. Until the fourth quarter of 2025, Beyond kWh business revenue reached Rp1,101.48 billion or 159.88% of the 2025 RKAP target, with an operating margin of Rp247.39 billion and a margin rate of 22.46%. This achievement demonstrates PLN NP's success in optimizing the Company's core capabilities and expanding non-electricity revenue sources through the development of service businesses and power plant derivative businesses.

Tabel Pendapatan, Biaya dan Margin *Beyond* kWh Tahun 2025
Table of Beyond kWh Revenue, Cost, and Margin in 2025

Jenis Pekerjaan Type of Work	Pendapatan (Rp Miliar) Revenue (Rp Billion)	Biaya (Rp Miliar) Cost (Rp Billion)	*Margin*	
			(Rp Miliar) (Rp Billion)	%
Jasa O&M dan MRO (PLN NPS) O&M and MRO Services (PLN NPS)	344,12	252,37	91,75	26,66%
Layanan Suku Cadang (PLN SC) Spare Parts Services (PLN SC)	45,32	32,99	12,33	27,21%
Jasa EPC (PLN NPC) EPC Services (PLN NPC)	460,98	427,73	33,25	7,21%
Jasa Lainnya (O&M, MRO, FABA, Carbon, dll) Other Services (O&M, MRO, FABA, Carbon, etc.)	251,06	141,00	110,06	43,84%
Total	**1.101,48**	**854,09**	**247,39**	**22,46%**

Analisis Segmen Pasar dan Kondisi Persaingan
Analysis of Market Segments and Competition Conditions

PLN NP senantiasa memperkuat perannya sebagai perusahaan energi berkelanjutan yang unggul dan terpercaya melalui berbagai inisiatif strategis yang mendukung agenda transisi energi nasional. Dalam implementasinya, Perusahaan berfokus pada pengembangan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan, khususnya melalui pengembangan pembangkit tenaga air (*Hydro*) dan tenaga surya (*Solar* PV), peningkatan pemanfaatan *co-firing* biomassa pada PLTU, serta percepatan implementasi program *De-dieselization* secara terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia.

PLN NP consistently strengthens its role as an excellent and reliable sustainable energy company through various strategic initiatives that support the national energy transition agenda. In its implementation, the Company focuses on developing renewable energy-based power plant capacity, particularly through the development of hydroelectric power plants and solar PV, increasing the utilization of biomass co-firing in CFPP, and accelerating the integrated implementation of the De-dieselization program in various regions of Indonesia.

Sebagai bagian penting dalam sistem ketenagalistrikan nasional, PLN NP juga mencatatkan kinerja operasional yang solid hingga akhir tahun 2025. Perseroan berhasil mencatatkan pangsa pasar (*market share*) sebesar 20,63%. Capaian tersebut berhasil meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 20,51% yang terutama didorong oleh pengaturan sistem, pergeseran Jadwal Pemeliharaan Pembangkit, optimasi durasi pemeliharaan pembangkit serta durasi penanganan saat unit pembangkit sedang mengalami gangguan.

As a crucial part of the national electricity system, PLN NP also recorded solid operational performance until the end of 2025. The Company successfully recorded a market share of 20.63%. The achievement successfully increased compared to the 2024 figure of 20.51%. It is mainly driven by system adjustments, shifts in Power Plant Maintenance Schedules, optimization of power plant maintenance duration, and handling duration during power plant unit disruptions.

Pangsa Pasar
Market Share

Pada tahun 2025 kegiatan pasokan listrik di sistem kelistrikan Indonesia di*supply* oleh *Subholding* (PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power), PLN Tanjung Jati, serta Pembangkit IPP yang lokasinya tersebar dalam beberapa regional. Berikut adalah gambar diagram pangsa pasar PLN NP dalam Sistem Kelistrikan Indonesia:

In 2025, electricity supply activities in the Indonesian electricity system were supplied by Subholding (PLN Nusantara Power and PLN Indonesia Power), PLN Tanjung Jati, and IPP Power Plants, whose locations are scattered in several regions. The following is a diagram of PLN NP's market share in the Indonesian Electricity System:

Grafik Penjualan dan Pangsa Pasar PLN NP dalam Sistem Kelistrikan Indonesia Tahun 2025
Chart of Sales and Market Share of PLN NP in Indonesia's Electricity System in 2025

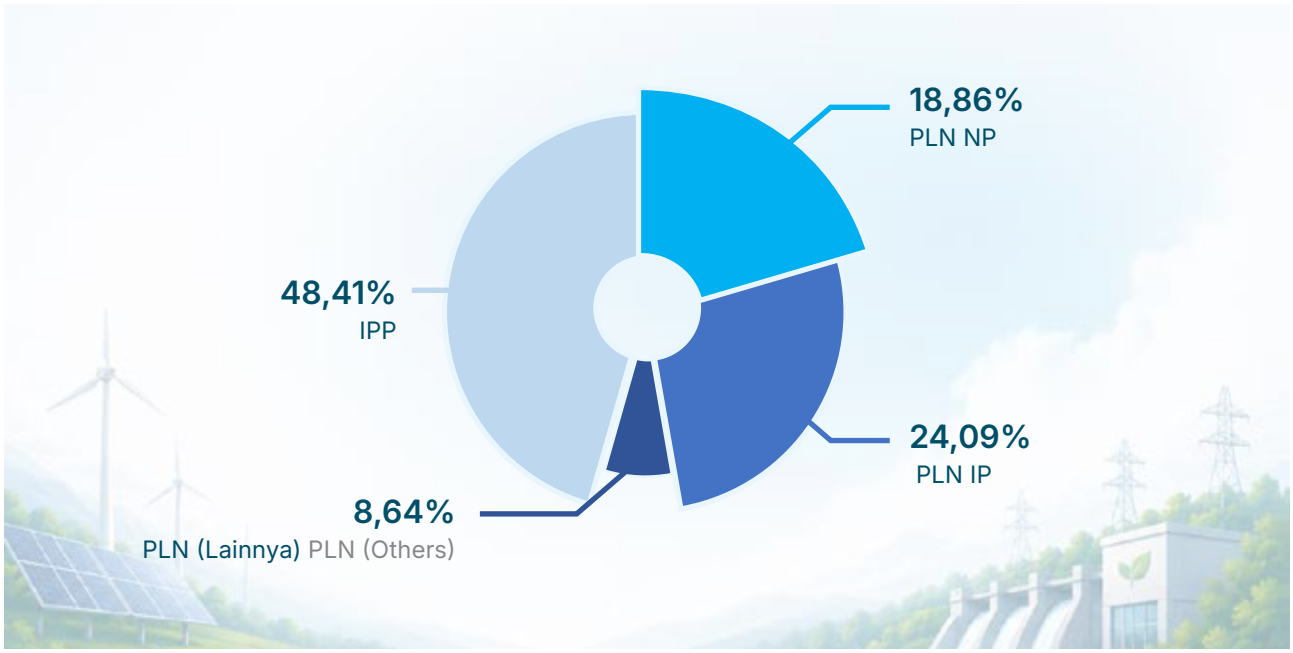

Tabel Penjualan dan Pangsa Pasar PLN NP dalam Sistem Kelistrikan Indonesia
Table of Sales and Market Share of PLN NP in Indonesia's Electricity System

Produsen Producer	2021*		2022*		2023**		2024**		2025**	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
PLN NP	19.779	10,04	16.256	7,79	63.589	21,78	63.415	19,41	**63.286**	**18,86**
UBJOM	24.540	12,45	26.258	12,58	-	-	-	-	-	-
PLN IP	37.426	18,99	35.751	17,13	79.169	27,12	81.831	25,04	**80.843**	**24,09**
UJP	28.709	14,57	30.352	14,55	-	-	-	-	-	-
PLN Lain ((Unit Induk Distribusi/ UID) Other PLN (Distribution Main Unit/UID)	19.018	9,65	19.268	9,23	21.383	7,33	28.209	8,63	**28.988**	**8,64**
IPP (Listrik Swasta) IPP (Private Electricity)	67.568	34,29	80.769	38,71	127.766	43,77	153.317	46,92	**162.472**	**48,41**
Total	**197.039**	**100,00**	**208.654**	**100,00**	**291.907**	**100,00**	**326.772**	**100,00**	**335.589**	**100,00**

Keterangan:
(*) Pangsa pasar pada Sistem Kelistrikan Jawa-Bali (sebelum *Holding Subholding*)
(**) Pangsa pasar pada Sistem Kelistrikan Indonesia (setelah *Holding Subholding*)

Remarks:
(*) : Market share in the Java-Bali Electricity System (before Holding Subholding)
(**) : Market share in the Indonesian Electricity System (after Holding Subholding)

Grafik Pangsa Pasar PLN NP dalam Sistem Kelistrikan Indonesia
Chart of Market Share of PLN NP in Indonesia's Electricity System

(%)

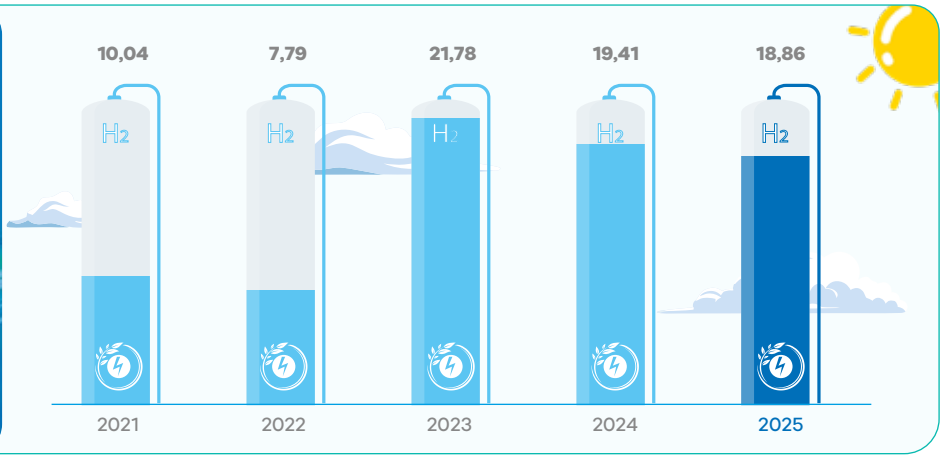

Profitabilitas Per Segmen
Profitability by Segment

Pendapatan Usaha Per Segmen
Revenue by Segment

Pendapatan usaha PLN NP tahun 2025 sebesar Rp98,89 triliun meningkat 7,83% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp91,71 triliun.

PLN NP's revenue in 2025 amounted to Rp98.89 trillion, an increase of 7.83% compared to Rp91.71 trillion in 2024.

Segmen dengan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan usaha berasal dari Penjualan Tenaga Listrik sebesar 96,03% atau Rp94,97 triliun.

The segment with the highest contribution to revenue came from Electricity Sales at 96.03% or Rp94.97 trillion.

Tabel Pendapatan Usaha Per Segmen
Table of Revenue by Segment

Uraian Description	2021		2022		2023		2024		2025	
	Rp Juta Rp Million	%	Rp Juta Rp Million	%	Rp Juta Rp Million	%	Rp Juta Rp Million	%	Rp Juta Rp Million	%
Pendapatan Usaha: Revenue:										
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	24.541.378	83,17	73.690.178	96,95	87.851.149	**97,21**	**88.321.254**	96,30	**94.971.854**	**96,03**
Pendapatan Usaha Lainnya: Other Operating Revenues:										
Jasa Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Services	4.057.567	13,75	888.248	1,17	1.165.705	1,29	1.700.159	1,85	**2.151.462**	**2,18**
Konstruksi Construction	727.224	2,46	845.101	1,11	1.083.838	1,20	1.070.377	1,17	**1.171.361**	**1,18**
Lain-lain Others	181.965	0,62	583.166	0,77	274.915	0,30	621.369	0,68	**598.326**	**0,61**
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya Total Other Revenues	**4.966.756**	**16,83**	**2.316.515**	**3,05**	**2.524.458**	**2,79**	**3.391.905**	**3,70**	**3.921.149**	**3,97**
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenue	**29.508.134**	**100,00**	**76.006.693**	**100,00**	**90.375.607**	**100,00**	**91.713.159**	**100,00**	**98.893.003**	**100,00**

Kontributor pendapatan usaha PLN NP didominasi dari penjualan tenaga listrik yaitu sebesar 96,03%. Selanjutnya, kontributor pendapatan usaha berasal dari jasa O&M sebesar 2,18%, konstruksi sebesar 1,18%, dan pendapatan lainnya 0,61%.

Contributors to PLN NP's revenue were dominated by electricity sales, which was 96.03%. Furthermore, contributors to revenue came from O&M services at 2.18%, construction at 1.18%, and other revenues at 0.61%.

Grafik Kontribusi Pendapatan Per Segmen Tahun 2025
Chart of Revenue by Segment Contribution in 2025

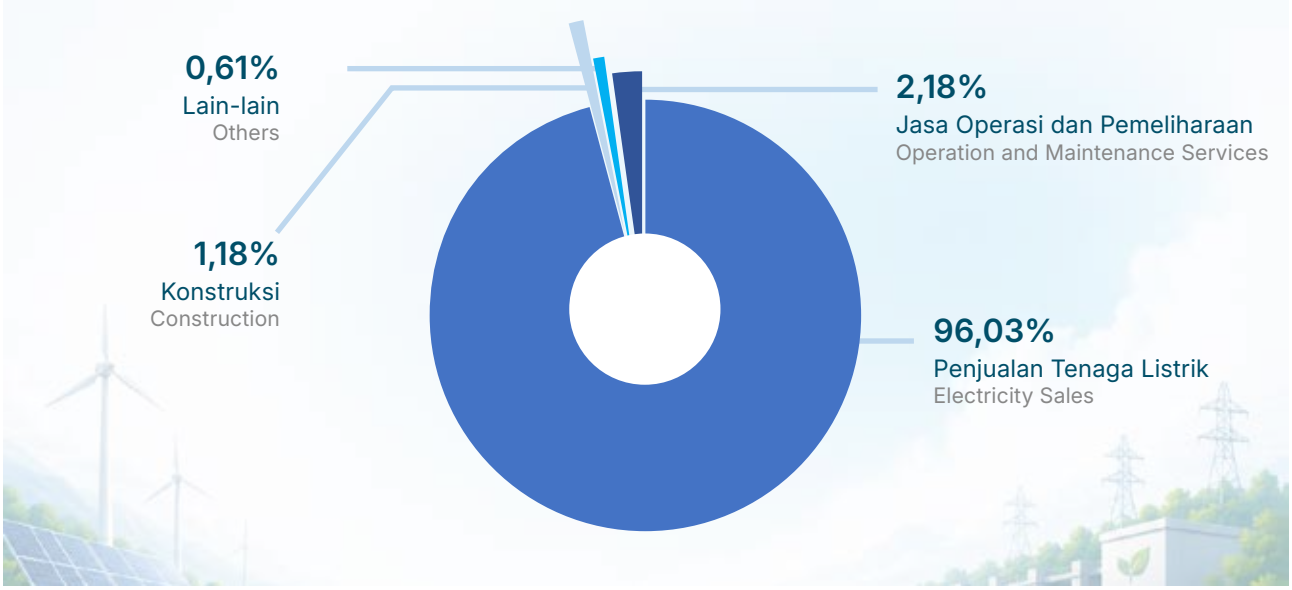

Kontribusi dari Kinerja Anak Perusahaan
Contribution from Subsidiaries' Performance

Kinerja keuangan Anak Perusahaan turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan laba komprehensif PLN NP tahun 2025 sesuai dengan porsi kepemilikan Perseroan pada masing-masing entitas serta mengacu pada ketentuan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian. Secara umum, berikut merupakan capaian laba usaha Anak Perusahaan yang kinerjanya telah dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan PLN NP:

The financial performance of Subsidiaries is also a contributor to the comprehensive income component of PLN NP in 2025 in accordance with PLN NP's ownership portion of the entity and accordance with the recording rules of the Consolidated Financial Statements. In general, the following presents the operating income of Subsidiaries whose performance is consolidated in the Financial Statements of PLN NP:

Tabel Laba Usaha Per Segmen (Rp juta)
Table of Operating Income by Segment (Rp million)

Nama Anak Perusahaan Name of Subsidiaries	2021	2022	2023	2024	2025
PT PLN Nusantara Services (PLN NPS)	169.210	232.152	218.408	218.408	**259.382**
PT PLN Nusantara Construction (PLN NPC)	53.782	(13.613)	29.573	29.573	**26.567**
PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	17.094	51.572	23.546	23.546	**7.050**
PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR)	800.162	1.047.020	803.939	803.939	**775.234**
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC)	19.487	44.566	60.978	60.978	**141.984**
PT Prima Power Nusantara (PPN)	-	-	-	-	**2.234**

Analisis Kinerja Keuangan
Analysis of Financial Performance

Kinerja keuangan PLN NP sepanjang tahun 2025 mencerminkan pertumbuhan yang solid dan berkesinambungan. Peningkatan pendapatan, didukung oleh keandalan operasional pembangkit serta pengelolaan biaya yang efektif, menjadi faktor utama dalam memperkuat tingkat profitabilitas Perusahaan. Melalui optimalisasi pemanfaatan aset dan penerapan strategi bisnis yang adaptif, PLN NP berhasil menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Capaian tersebut menunjukkan fundamental keuangan yang kuat sekaligus mempertegas ketahanan bisnis Perusahaan dalam menghadapi dinamika industri pembangkitan tenaga listrik nasional.

The financial performance of PLN NP throughout 2025 reflects solid and sustainable growth. The increase in revenue, supported by the operational reliability of power plants and effective cost management, has been a key factor in strengthening the Company's profitability. Through the optimization of asset utilization and the implementation of adaptive business strategies, PLN NP manages to create sustainable added value. That achievement shows strong financial fundamentals while also solidifying the Company's business resilience in facing the dynamics of the national electric power generator industry.

Analisis Posisi Keuangan
Analysis of Financial Position

Jumlah aset PLN NP pada tahun 2025 adalah sebesar Rp357,67 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp42,52 triliun, dan jumlah ekuitas sebesar Rp315,15 triliun.

PLN NP's total assets in 2025 amounted to Rp357.67 trillion, total liabilities amounted to Rp42.52 trillion, and total equity amounted to Rp315.15 trillion.

Tabel Posisi Keuangan (Rp juta)
Table of Financial Position (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Aset Lancar Current Assets	32.727.109	34.548.253	48.883.318	56.744.655	**63.930.282**	12,66	7.185.627
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	297.727.450	298.045.438	294.577.850	298.622.579	**293.740.975**	(1,63)	(4.881.604)
Jumlah Aset **Total Assets**	**330.454.559**	**332.593.691**	**343.461.168**	**355.367.234**	**357.671.257**	**0,65**	**2.304.023**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	12.841.591	9.914.987	11.101.047	13.372.162	**13.071.204**	(2,25)	(300.958)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	15.193.664	20.848.901	23.499.297	27.351.078	**29.445.572**	7,66	2.094.494
Jumlah Liabilitas **Total Liabilities**	**28.035.255**	**30.763.888**	**34.600.344**	**40.723.240**	**42.516.776**	**4,40**	**1.793.536**
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	**302.419.30**	**301.829.803**	**308.860.824**	**314.643.994**	**315.154.481**	**0,16**	**510.487**

Aset
Assets

PLN NP mencatatkan Jumlah Aset pada tahun 2025 adalah sebesar Rp357,67 triliun, yaitu meningkat sebesar 0,65% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp355,37 triliun. Peningkatan ini didorong oleh surplus revaluasi aset, peningkatan jumlah piutang usaha tenaga listrik (menyesuaikan peningkatan pendapatan penjualan) serta peningkatan nilai penyertaan karena laba investasi yg lebih baik.

PLN NP recorded total assets of Rp357.67 trillion in 2025, representing an increase of 0.65% compared to Rp355.37 trillion in 2024. This increase is driven by asset revaluation surpluses, an increase in trade receivables from electricity sales (adjusting for the increase in sales revenue), and an increase in investment value due to better investment profits.

Dampak dari peningkatan tersebut adalah semakin kuatnya struktur permodalan dan posisi keuangan perusahaan, yang mencerminkan pertumbuhan skala bisnis PLN NP secara positif.

The impact of this increase is a stronger capital structure and financial position of the Company, which positively reflects the growth of PLN NP's business scale.

Tabel Aset (Rp juta)
Table of Assets (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Aset Lancar Current Assets	32.727.109	34.548.253	48.883.318	56.744.655	**63.930.282**	12,66	7.185.627
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	297.727.450	298.045.438	294.577.850	298.622.579	**293.740.975**	(1,63)	(4.881.604)
Jumlah Aset Total Assets	**330.454.559**	**332.593.691**	**343.461.168**	**355.367.234**	**357.671.257**	**0,65**	**2.304.023**

Grafik Aset
Chart of Assets

(Rp juta) (Rp million)

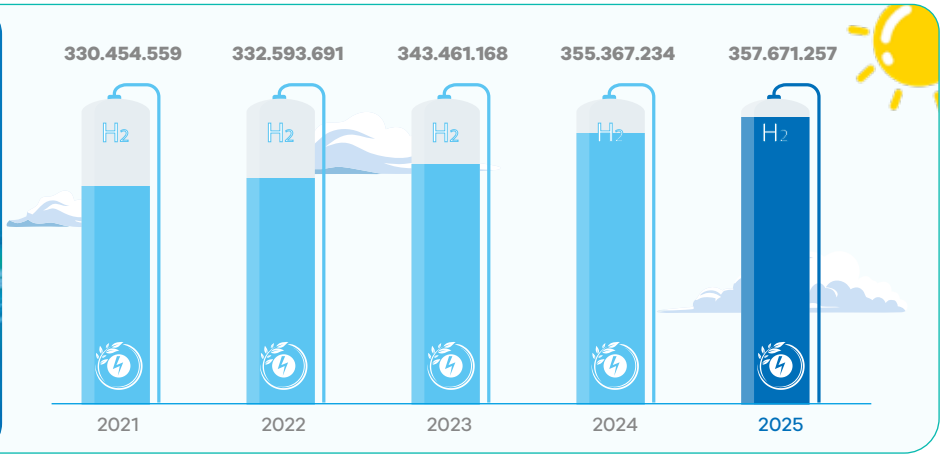

Aset Lancar
Current Assets

Jumlah Aset Lancar tahun 2025 adalah sebesar Rp63,93 triliun, yaitu meningkat 12,66% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp56,74 triliun. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan jumlah piutang usaha tenaga listrik (menyesuaikan peningkatan pendapatan penjualan).

Dampak dari peningkatan tersebut adalah meningkatnya kemampuan perusahaan dalam mendukung aktivitas operasional jangka pendek dan menjaga likuiditas Perusahaan.

Total Current Assets in 2025 amounted to Rp63.93 trillion, an increase of 12.66% compared to 2024 of Rp56.74 trillion. This increase is driven by asset revaluation surpluses, an increase in trade receivables from electricity sales (adjusting for the increase in sales revenue)

The impact of the increase is the enhanced ability of the Company to support short-term operational activities and maintain its liquidity.

Tabel Aset Lancar (Rp juta)
Table of Current Assets (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	7.343.968	8.958.158	6.846.288	7.544.144	**6.126.259**	(18,79)	(1.417.885)
Deposito Berjangka Time Deposits	290.103	491.299	883.722	975.373	**13.414**	(98,62)	(961.959)
Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash in Banks and Time Deposits	206.279	301.420	89.605	152.486	**171.386**	12,39	18.900
Piutang Usaha Trade Receivables	20.320.350	18.885.917	35.841.299	42.323.432	**52.449.496**	23,93	10.126.064
Piutang Lain-lain - Bagian Lancar Other Receivables – Current Portion	252.773	347.981	239.320	309.156	**289.268**	(6,43)	(19.888)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Piutang kepada Ventura Bersama - Bagian Lancar Receivables from Joint Ventures – Current Portion	124.055	67.785	66.916	67.120	**72.689**	8,30	5.569
Persediaan Inventories	3.298.382	4.692.665	4.347.911	4.731.916	**4.056.253**	(14,28)	(675.663)
Pajak Dibayar di Muka Bagian Lancar Prepaid Taxes – Current Portion	755.157	701.465	424.139	484.978	**552.129**	13,85	67.151
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	136.042	101.563	144.118	156.050	**199.388**	27,77	43.338
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**32.727.109**	**34.548.253**	**48.883.318**	**56.744.655**	**63.930.282**	**12,66**	**7.185.627**

Grafik Aset Lancar
Chart of Current Assets

(Rp juta) (Rp million)

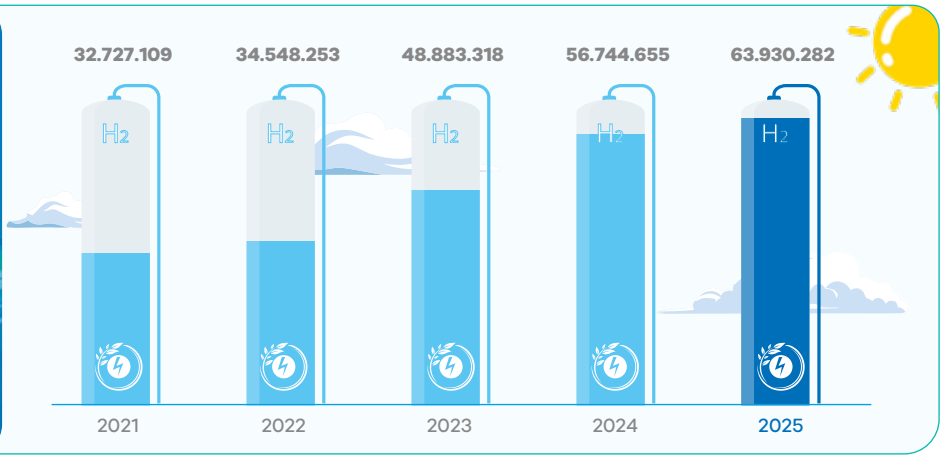

Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

Jumlah Kas dan Setara Kas tahun 2025 adalah sebesar Rp6,13 triliun, lebih rendah 18,79% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp7,54 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh optimasi *cash management* secara PLN Group.

In 2025, the total Cash and Cash Equivalents amounted to Rp6.13 trillion, which was lower by 18.79% compared to Rp7.54 trillion in 2024. This is mainly due to the PLN Group's cash management optimization efforts.

Tabel Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Table of Cash and Cash Equivalents (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Kas Cash on Hand	**1.804**	**1.478**	**2.062**	**2.877**	**3.649**	26,83	772
Bank Cash in Banks	**6.399.519**	**8.375.353**	**6.435.013**	**6.851.393**	**4.630.567**	(32,41)	(2.220.826)
Pihak Berelasi Related Parties	6.261.488	8.318.410	6.360.366	6.836.061	**4.603.915**	(32,65)	(2.232.146)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Pihak Ketiga Third Parties	138.031	56.943	74.647	15.332	**26.652**	73,83	11.320
Deposito Berjangka Time Deposits	**942.645**	**581.327**	**409.213**	**689.874**	**1.492.043**	116,28	802.169
Pihak Berelasi Related Parties	942.533	581.215	409.101	689.762	**1.491.931**	116,30	802.169
Pihak Ketiga Third Parties	112	112	112	112	**112**	-	-
Jumlah Kas dan Setara Kas Total Cash and Cash Equivalents	**7.343.968**	**8.958.158**	**6.846.288**	**7.544.144**	**6.126.259**	**(18,79)**	**(1.417.885)**

Grafik Kas dan Setara Kas
Chart of Cash and Cash Equivalents

(Rp juta) (Rp million)

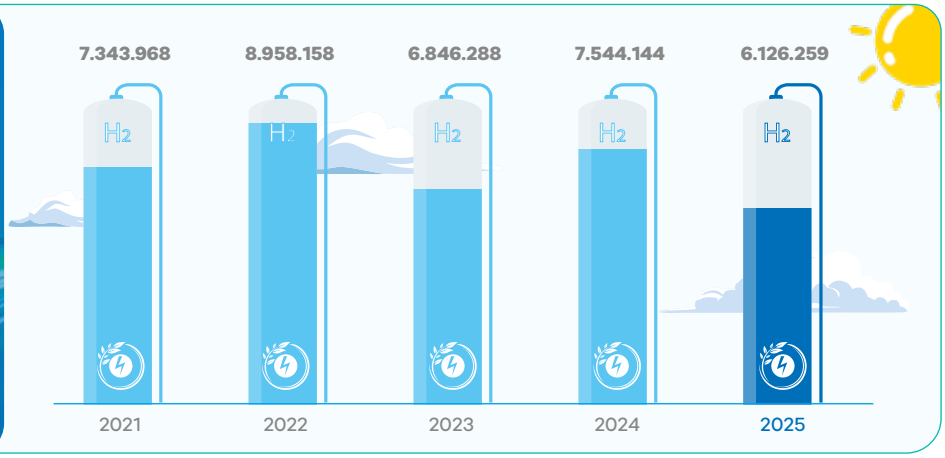

Deposito Berjangka
Time Deposits

Jumlah Deposito Berjangka tahun 2025 adalah sebesar Rp13,41 miliar, yaitu lebih rendah 98,62% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp975,37 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perubahan pencatatan pada *Subsidiary* PLN NP yaitu PLN NR menyesuaikan kebijakan di PLN NP untuk deposito dibawah 3 bulan dicatat pada Kas & Bank.

Total Time Deposits in 2025 amounted to Rp13.41 billion, which was lower by 98.62% compared to Rp975.37 billion in 2024. This increase was primarily driven by a change in recording at PLN NP's subsidiary, PLN NR, which aligned with PLN NP's policy to classify deposits with a maturity of less than three months as Cash on hand & Cash in Banks.

Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya
Restricted Cash in Banks and Time Deposits

Pada tahun 2025, saldo atas jumlah rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dalam jangka pendek sebesar Rp171,39 miliar, yaitu meningkat 12,39% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp152,49 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh perubahan nilai suku bunga dan nilai kurs.

In 2025, the balance of restricted cash in banks and time deposits amounted to Rp171.39 billion, an increase of 12.39% compared to Rp152.49 billion in 2024. This increase was mainly driven by changes in interest rates and exchange rates.

Piutang Usaha
Trade Receivables

Jumlah Piutang Usaha PLN NP pada tahun 2025 adalah sebesar Rp52,45 triliun, yaitu meningkat 23,93% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp42,32 triliun. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pencairan piutang melalui penerimaan tagihan Penjualan Tenaga Listrik yang sejalan dengan kebijakan manajemen kas terpusat PLN (Optimasi *Cash Management* PLN *Holding*).

The amount of PLN NP's Trade Receivables in 2025 amounted to Rp52.45 trillion, an increase of 23.93% compared to Rp42.32 trillion in 2024. This increase is mainly impacted by the low level of receivables collection through the receipt of Electricity Sales invoices, in line with PLN's centralized cash management policy (PLN Holding Cash Management Optimization).

Tabel Piutang Usaha (Rp juta)
Table of Trade Receivables (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Pihak Berelasi Related Parties	20.304.099	18.811.036	35.740.930	42.160.441	**52.295.916**	24,04	10.135.475
Pihak Ketiga Third Parties	39.948	131.219	148.017	215.192	**209.488**	(2,65)	(5.704)
Cadangan kerugian kredit ekspektasian Allowance for expected credit losses	(23.697)	(56.338)	(47.648)	(52.201)	**(55.908)**	7,10	(3.707)
Jumlah Piutang Usaha Total Trade Receivables	**20.320.350**	**18.885.917**	**35.841.299**	**42.323.432**	**52.449.496**	**23,93**	**10.126.064**

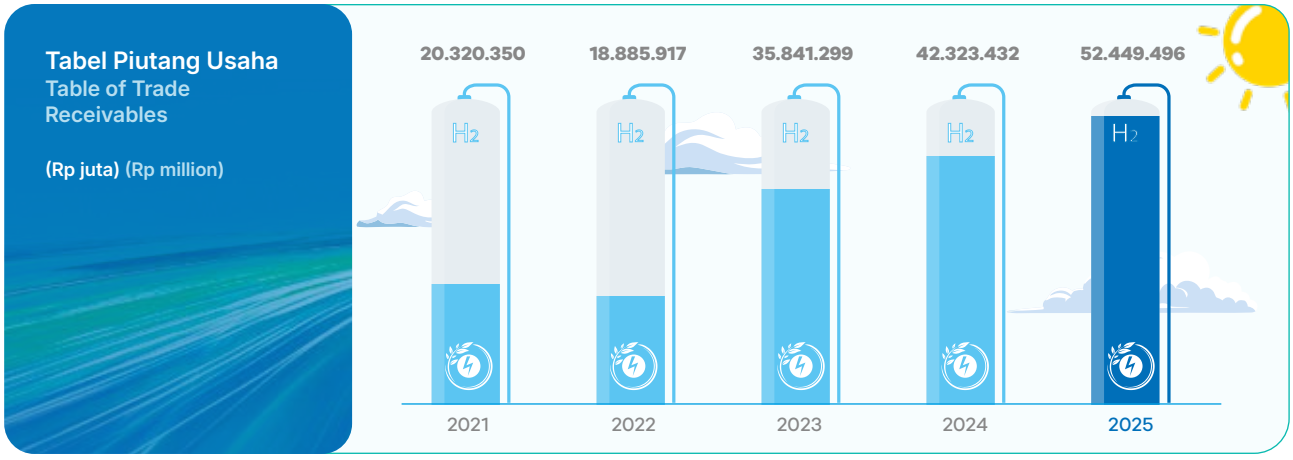

Piutang Lain-lain - Bagian Lancar
Other Receivables – Current Portion

Jumlah Piutang Lain-lain - Bagian Lancar PLN NP pada tahun 2025 adalah sebesar Rp289,27 miliar, yaitu lebih rendah 6,43% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp309,16 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pelunasan dari mitra kerja.

In 2025, the total Other Receivables - Current Portion of PLN NP amounted to Rp289.27 billion, which was lower by 6.43% compared to Rp309.16 billion in 2024. It was mainly influenced by repayment from business partners.

Piutang kepada Ventura Bersama - Bagian Lancar
Receivables from Joint Ventures – Current Portion

Jumlah Piutang kepada Ventura Bersama - Bagian Lancar PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp72,69, yaitu meningkat 8,30% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp67,12 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh pengakuan piutang *Shareholder Loan* kepada Ventura Bersama.

Total Receivables from Joint Ventures-Current Portion of PLN NP in 2025 amounted to Rp72.69, an increase of 8.30% compared to 2024 of Rp67.12 billion. This increase was mainly driven by the recognition of a Shareholder Loan receivables from Joint Ventures.

Persediaan
Inventories

Jumlah Persediaan tahun 2025 adalah sebesar Rp4,06 triliun, yaitu lebih rendah 14,28% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp4,73 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh optimalnya tata Kelola dan perencanaan Material Gudang dan Bahan Bakar.

In 2025, the total Inventory amounted to Rp4.06 trillion, which was lower by 8.83% compared to 2024, which amounted to Rp4.73 trillion. This is primarily due to optimal management and planning of Warehouse Materials and Fuel.

Tabel Persediaan (Rp juta)
Table of Inventories (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Batubara, Bahan Bakar dan Pelumas Coal, Fuel, and Lubricants	2.603.068	4.106.353	3.507.690	3.847.699	**3.208.178**	(16,76)	(645.739)
Material Pemeliharaan Maintenance Materials	731.911	632.411	889.553	952.521	**917.954**	(3,00)	(28.349)
Cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence	(36.597)	(46.099)	(49.332)	(68.304)	**(69.879)**	2,31	(1.575)
Jumlah Persediaan Total Inventories	**3.298.382**	**4.692.665**	**4.347.911**	**4.731.916**	**4.056.253**	**(14,28)**	**(675.663)**

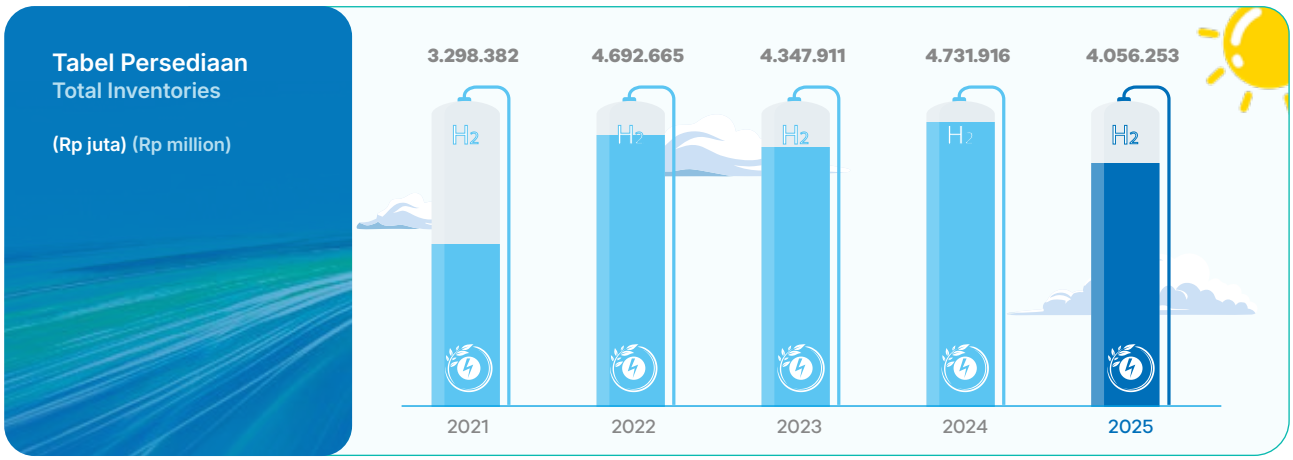

Pajak Dibayar di Muka - Bagian Lancar
Prepaid Taxes – Current Portion

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka - Bagian Lancar PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp552,13 miliar, yaitu meningkat 13,85% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp484,98 miliar. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh adanya peningkatan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan sepanjang tahun 2025, yang sejalan dengan tren peningkatan pendapatan dan proyeksi laba fiskal perusahaan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya

Total Prepaid Tax - Current Portion of PLN NP in 2025 amounted to Rp552.13 billion, an increase of 13.85% compared to Rp484.98 billion in 2024. This increase is mainly caused by an increase in income tax installment payments throughout 2025, in line with the trend of increasing revenue and the Company's projected higher fiscal profit compared to the previous year.

Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka
Prepaid Expenses and Advances

Jumlah Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka tahun 2025 adalah sebesar Rp199,39 miliar, yaitu meningkat 27,77% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp156,05 miliar. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh adanya pengakuan biaya premi asuransi untuk pembangkit PLN NP.

In 2025, the total Prepaid Expenses and Advances amounted to Rp199.39 billion, an increase of 27.77% compared to Rp156.05 billion in 2024. This increase was mainly driven by the recognition of insurance premium expenses for PLN NP power plants.

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

Jumlah Aset Tidak Lancar PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp293,74 triliun, yaitu lebih rendah 1,63% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp298,62 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh berjalannya biaya penyusutan aset tetap di tahun 2025.

In 2025, PLN NP's Non-Current Assets amounted to Rp293.74 trillion, a decrease of 1.63% compared to Rp298.62 trillion in 2024. It was mainly due to the ongoing depreciation of fixed assets in 2025.

Penurunan tersebut berdampak pada menurunnya nilai buku aset tetap dan aset tidak lancar perusahaan, seiring dengan penggunaan aset dalam kegiatan operasional selama tahun berjalan.

The decline impacted the decrease in the book value of the Company's property, plant, and equipment and non-current assets, in line with the use of assets in operational activities throughout the year.

Tabel Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Table of Non-Current Assets (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Aset Tetap Property, Plant, and Equipment	282.105.073	278.979.473	273.868.098	275.957.766	**269.026.596**	(2,51)	(6.931.170)
Properti Investasi Investment Properties	1.460.599	1.577.154	1.630.239	1.540.618	**1.571.321**	1,99	30.703
Investasi pada Entitas Asosiasi/ Ventura Bersama Investment in Associates/Joint Ventures	12.390.846	16.114.319	17.494.224	19.841.653	**21.910.592**	10,43	2.068.939

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash in Banks and Time Deposits	-	37.231	53.134	18.629	**18.123**	(2,72)	(506)
Aset Pajak Tangguhan - Bersih Deferred Tax Assets - Net	47.778	74.566	73.929	60.542	**48.121**	(20,52)	(12.421)
Piutang kepada Ventura Bersama - Bagian Tidak Lancar Receivables from Joint Ventures – Non-Current Portion	692.002	756.068	602.440	425.970	**218.051**	(48,81)	(207.919)
Piutang Lain-lain - Bagian Tidak Lancar Other Receivables – Non-Current Portion	44.028	47.782	109.420	128.419	**146.464**	14,05	18.045
Pajak Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar Prepaid Taxes – Non-Current Portion	752.248	189.478	437.113	345.047	**617.047**	78,83	272.000
Aset Tidak Lancar Lain Other Non-Current Assets	234.876	269.367	309.253	303.935	**184.660**	(39,24)	(119.275)
Jumlah Aset Tidak Lancar **Total Non-Current Assets**	**297.727.450**	**298.045.438**	**294.577.850**	**298.622.579**	**293.740.975**	**(1,63)**	**(4.881.604)**

Grafik Aset Tidak Lancar
Chart of Non-Current Assets

(Rp juta) (Rp million)

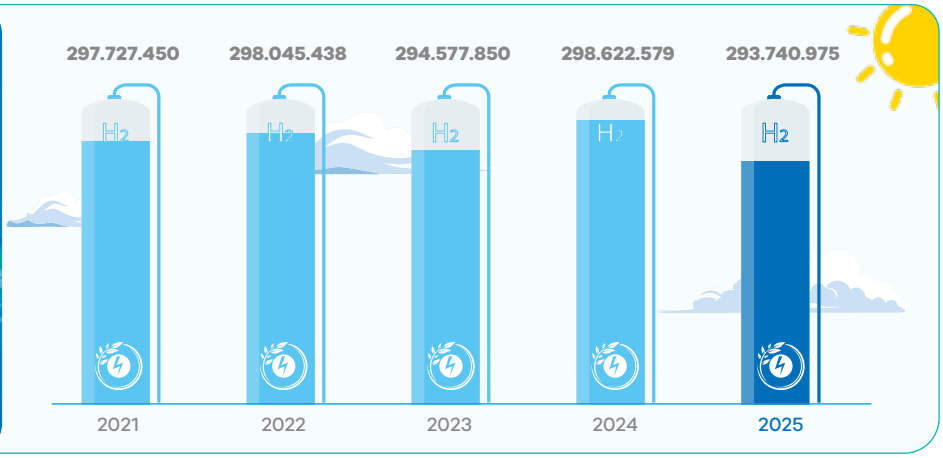

Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Property, Plant, and Equipment and Right-on-Use Assets

Jumlah Aset Tetap PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp269,03 triliun, yaitu lebih rendah 2,51% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp275,96 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh berjalannya biaya penyusutan aset tetap di tahun 2025.

In 2025, PLN NP's Property, Plant, and Equipment amounted to Rp269.03 trillion, which was lower by 2.51% compared to 2024 of Rp275.96 trillion. This is mainly due to the depreciation expense for property, plant, and equipment in 2025.

Tabel Aset Tetap (Rp juta)
Table of Property, Plant, and Equipment and Right-on-Use Assets (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Tanah dan Hak Atas Tanah Land and Land Rights	17.050.809	17.050.809	17.075.712	17.674.439	**17.674.439**	-	-
Bangunan Umum, Waduk, dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	28.162.541	27.753.738	26.949.576	27.242.634	**26.425.085**	(3,00)	(817.549)
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installations and Power Plant	220.143.089	219.390.516	216.197.288	212.181.406	**205.751.579**	(3,03)	(6.429.827)
Perlengkapan Transmisi dan Distribusi Transmissions and Distribution Equipment	4.297.027	4.182.126	3.847.016	13.156.580	**13.208.908**	0,40	52.328
Perlengkapan Pengolahan Data dan Telekomunikasi Telecommunication and Data Processing Equipment	45.143	40.212	35.208	27.914	**7.626**	(72,68)	(20.288)
Perlengkapan Umum General Equipment	935.807	732.071	752.959	646.865	**759.286**	17,38	112.421
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	177.480	116.790	116.390	104.381	**145.868**	39,75	41.487
Material Cadangan Utama Major Spare Parts	289.391	288.307	639.181	292.270	**337.798**	15,58	45.528
Aset Hak Guna Right-on-Use Assets	88.151	2.104.680	2.587.462	2.141.502	**1.985.186**	(7,30)	(156.316)
Aset Dalam Pembangunan Construction in Progress	7.004.989	4.204.527	4.746.689	1.603.498	**2.138.043**	33,34	534.545
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets not Used in Operations	4.243.316	3.451.423	1.256.343	886.277	**592.778**	(33,12)	(293.499)
Penyisihan Penurunan Nilai Provision for Impairment Losses	(332.670)	(335.726)	(335.726)	-	-	-	-
Jumlah Aset Tetap **Total Property, Plant, and Equipment**	**282.105.073**	**278.979.473**	**273.868.098**	**275.957.766**	**269.026.596**	**(2,51)**	**(6.931.170)**

Grafik Aset Tetap
Chart of Property, Plant, and Equipment and Right-on-Use Assets

(Rp juta) (Rp million)

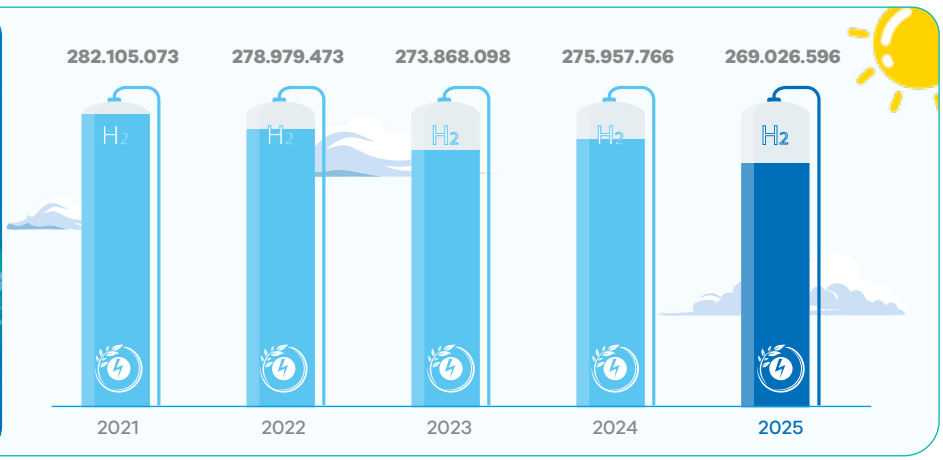

Properti Investasi
Investment Properties

Properti investasi merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Cipeundeuy - Bandung Barat dan Asahan - Sumatera Utara dengan hak legal berupa HGB (Hak Guna Bangunan) berjangka waktu dari 32 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited dan PT Bajradaya Sentranusa.

Investment property is land and buildings owned by the Company located in Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Cipeundeuy - West Bandung, and Asahan - North Sumatra with legal rights in the form of HGB (Right to Build) with a period of 32 to 40 years, maturing in 2032, leased to PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited, and PT Bajradaya Sentranusa.

Jumlah Properti Investasi PLN NP tahun 2024 adalah sebesar Rp1,57 triliun, yaitu meningkat 1,99% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,54 triliun. Peningkatan ini terutama didukung oleh adanya tambahan nilai properti investasi yang disewakan pada tahun 2025.

PLN NP's Investment Property in 2025 amounted to Rp1.57 trillion, an increase of 1.99% compared to Rp1.54 trillion in 2024. This increase is mainly driven by the addition of the value of investment properties leased in 2025.

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Investment in Associates and Joint Ventures

Jumlah Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp21,91 triliun, yaitu meningkat 10,43% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp19,84 triliun. Peningkatan ini terutama didukung oleh adanya peningkatan kinerja entitas asosiasi PLN NP Grup.

Total Investment in Associates and Joint Ventures of PLN NP in 2025 amounted to Rp21.91 trillion, an increase of 10.43% compared to Rp19.84 trillion in 2024. This increase was mainly driven by an improvement in the performance of the PLN NP Group's associates.

Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya
Restricted Cash in Banks and Time Deposits

Jumlah Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp18,12 miliar, yaitu lebih rendah 2,72% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp18,63 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai suku bunga dan nilai kurs.

In 2025, PLN NP's total Restricted Cash in Banks and Time Deposits amounted to Rp18.12 billion, a decrease of 2.72% compared to Rp18.63 billion in 2024. It was due to the change in the values of interest rates and exchange rates.

Aset Pajak Tangguhan - Bersih
Deferred Tax Assets - Net

Jumlah Aset Pajak Tangguhan - Bersih PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp48,12 miliar, yaitu lebih rendah 20,52% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp60,54 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pemanfaatan aset pajak tangguhan terhadap laba kena pajak tahun berjalan di PLN NP Grup.

Total Deferred Tax Assets - Net of PLN NP in 2025 amounted to Rp48.12 billion, a decrease of 20.52% compared to Rp60.54 billion in 2024. This was influenced by the utilization of deferred tax assets to taxable profit for the year at PLN NP Group.

Piutang kepada Ventura Bersama - Bagian Tidak Lancar
Receivables from Joint Ventures – Non-Current Portion

Jumlah Piutang kepada Ventura Bersama - Bagian Tidak Lancar PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp218,05 miliar, yaitu lebih rendah 48,81% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp425,97 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya adanya percepatan pelunasan *Shareholder Loan* untuk proyek Jawa 7.

Total Receivables from Joint Ventures - Non-Current Portion of PLN NP in 2025 amounted to Rp218.05 billion, decreased by 48.81% compared to 2024 amounting to Rp425.97 billion. This was influenced by the accelerated repayment of Shareholder Loan for the Jawa 7 project.

Piutang Lain-lain - Bagian Tidak Lancar
Other Receivables – Non-Current Portion

Jumlah Piutang Lain-lain - Bagian Tidak Lancar PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp146,46 miliar, yaitu meningkat 14,05% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp128,42 miliar. Peningkatan ini terutama didukung oleh adanya pengakuan pekerjaan kepada pelanggan.

In 2025, the total Other Receivables - Non-Current Portion of PLN NP amounted to Rp146.46 billion, an increase of 14.05% compared to 2024 of Rp128.42 billion. This increase was mainly driven by the recognition of work performed for customers.

Pajak Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar
Prepaid Taxes – Non-Current Portion

Jumlah Pajak Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp617,05 miliar, yaitu meningkat 78,83% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp345,05 miliar. Peningkatan ini terutama didukung oleh adanya peningkatan pendapatan dan proyeksi laba fiskal perusahaan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

The total Prepaid Tax - Non-Current Portion of PLN NP in 2025 amounted to Rp617.05 billion, an increase of 78.83% compared to Rp345.05 billion in 2024. This increase is primarily driven by higher revenue and the Company's projected fiscal profits, which are higher than in the previous year.

Aset Tidak Lancar Lain
Other Non-Current Assets

Jumlah Aset Tidak Lancar Lain PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp184,66 miliar, yaitu lebih rendah 39,24% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp303,93 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya reklasifikasi biaya ditangguhkan atas proyek yang tidak dilanjutkan.

PLN NP's Other Non-Current Assets in 2025 amounted to Rp184.66 billion, a decrease of 39.24% compared to Rp303.93 billion in 2024. This was influenced by the reclassification of deferred costs related to discontinued projects.

Liabilitas
Liabilities

Jumlah Liabilitas PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp42,52 triliun, yaitu meningkat 4,40% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp40,72 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya adanya peningkatan liabilitas pajak tangguhan dari surplus revaluasi aset tetap.

In 2025, PLN NP's total Liabilities amounted to Rp42.52 trillion, an increase of 4.40% compared to 2024 of Rp40.72 trillion. This increase was mainly driven by an increase in deferred tax liabilities resulting from the revaluation surplus of property, plant, and equipment.

Peningkatan tersebut berdampak pada penyesuaian kewajiban jangka panjang perusahaan di masa depan, yang mencerminkan pertumbuhan skala neraca PLN NP seiring dengan peningkatan nilai aset secara keseluruhan.

The increase has an impact on the adjustment of the Company's future long-term obligations, reflecting the growth of PLN NP's balance sheet scale alongside the overall increase in asset value.

Tabel Liabilitas (Rp juta)
Table of Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	12.841.591	9.914.987	11.101.047	13.372.162	**13.071.204**	(2,25)	(300.958)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	15.193.664	20.848.901	23.499.297	27.351.078	**29.445.572**	7,66	2.094.494
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**28.035.255**	**30.763.888**	**34.600.344**	**40.723.240**	**42.516.776**	**4,40**	**1.793.536**

Grafik Liabilitas
Chart of Liabilities

(Rp juta) (Rp million)

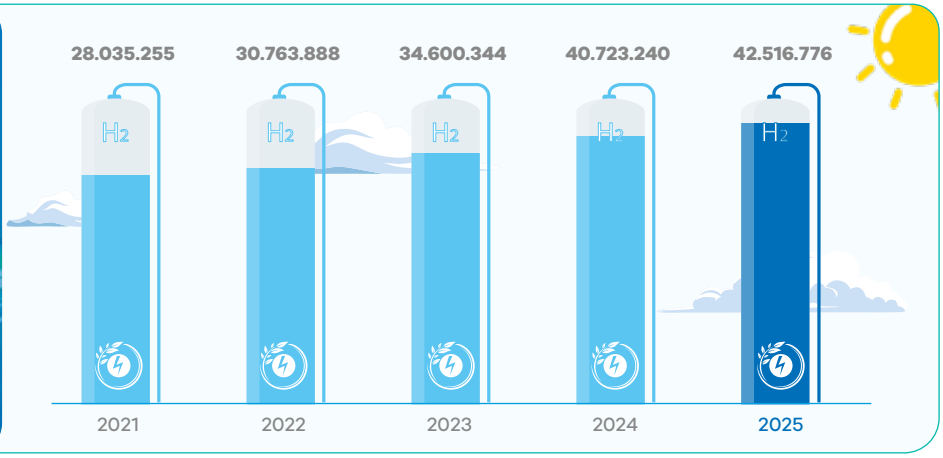

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp13,07 triliun, yaitu lebih rendah 2,25% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp13,37 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang usaha seiring dengan penyelesaian pembayaran kepada pemasok/mitra kerja secara tepat waktu.

The total Current Liabilities of PLN NP in 2025 amounted to Rp13.07 trillion, which was lower by 2.25% compared to Rp13.37 trillion in 2024. This was mainly due to a decrease in trade payables in line with the timely settlement of payments to suppliers/business partners.

Penurunan tersebut berdampak pada pada membaiknya posisi kewajiban jangka pendek perusahaan serta menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan memenuhi kewajiban operasional jangka pendek secara lebih optimal.

The decline had an impact on improving the Company's short-term liability position and demonstrated its ability to manage and meet short-term operational obligations more optimally.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)
Table of Current Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Utang Usaha Trade Payables	10.810.294	7.627.117	7.771.522	9.419.563	**8.969.844**	(4,77)	(449.719)
Utang Lain-lain Other Payables	723.324	810.042	1.572.901	1.861.192	**1.861.881**	0,04	689
Utang Pajak Lainnya Other Taxes Payable	109.124	121.969	192.523	198.670	**219.629**	10,55	20.959
Utang Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Payable	18.239	62.024	3.924	69.142	**25.252**	(63,48)	(43.890)
Beban Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	201.887	74.841	107.988	43.249	**254.018**	487,34	210.769
Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Pendek Lease Liabilities – Short-term Portion	42.552	162.546	316.091	585.475	**583.016**	(0,42)	(2.459)
Pinjaman dari Pemegang Saham - Bagian Jangka Pendek Loans from Shareholders – Short-term Portion	233.979	291.050	287.014	340.062	**344.494**	1,30	4.432
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-term Employee Benefit Liabilities	702.192	765.398	849.084	854.809	**813.070**	(4,88)	(41.739)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**12.841.591**	**9.914.987**	**11.101.047**	**13.372.162**	**13.071.204**	**(2,25)**	**(300.958)**

Grafik Liabilitas Jangka Pendek
Chart of Current Liabilities

(Rp juta) (Rp million)

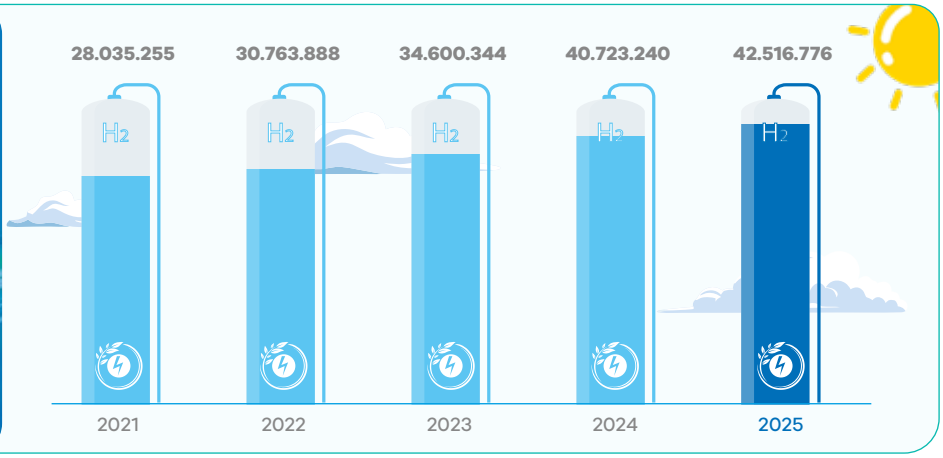

Utang Usaha
Trade Payables

Jumlah utang usaha PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp8,97 triliun, yaitu lebih rendah 4,77% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp9,42 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh penyelesaian pembayaran kepada pemasok/mitra kerja secara tepat waktu

In 2025, PLN NP's total trade payables amounted to Rp8.97 trillion, a decrease of 4.77% compared to Rp9.42 trillion in 2024. This is primarily due to the timely settlement of payments to suppliers/business partners

Tabel Utang Usaha (Rp juta)
Table of Trade Payables (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Pihak berelasi Related parties	6.721.445	4.124.010	2.778.332	5.974.316	**5.354.332**	(10,38)	(619.984)
Pihak ketiga Third parties	4.088.849	3.503.107	4.993.190	3.445.247	**3.615.512**	4,94	170.265
Jumlah Utang Usaha Total Trade Payables	**10.810.294**	**7.627.117**	**7.771.522**	**9.419.563**	**8.969.844**	**(4,77)**	**(449.719)**

Grafik Utang Usaha
Chart of Trade Payables

(Rp juta) (Rp million)

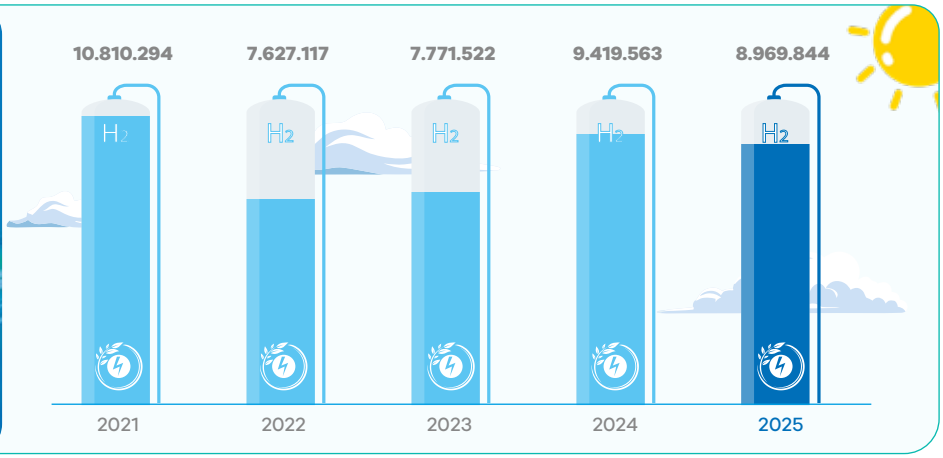

Utang Lain-lain
Other Payables

Jumlah Utang Lain-lain PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp1,86 triliun, yaitu meningkat 0,04% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh pengakuan atas kegiatan pemeliharaan unit pembangkit listrik pada tahun 2025

The total Other Liabilities of PLN NP in 2025 amounted to Rp1.86 trillion, an increase of 0.04% compared to 2024 figure. This increase is mainly driven by the recognition of maintenance activities for power plants in 2025.

Tabel Utang Lain-lain (Rp juta)
Table of Other Payables (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Pihak berelasi Related parties	562.105	496.943	1.217.192	1.391.501	**823.920**	38,33	228.300
Pihak ketiga Third parties	161.219	313.099	355.709	469.691	**1.037.961**	(17,98)	(227.611)
Jumlah Utang Lain-lain Total Other Payables	**723.324**	**810.042**	**1.572.901**	**1.861.192**	**1.861.881**	**0,04**	**689**

Utang Pajak Lainnya
Other Taxes Payables

Jumlah Utang Pajak PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp219,63 miliar, yaitu meningkat 10,55% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp198,67 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan pembelian jasa, material dan bahan bakar seiring dengan peningkatan aktivitas operasional pembangkit Listrik.

In 2025, PLN NP's total Tax Payable amounted to Rp219.63 billion, an increase of 10.55% compared to Rp198.67 billion in 2024. This increase was primarily driven by higher purchases of services, materials, and fuel, in line with increased operational activity at power plants.

Utang Pajak Penghasilan Badan
Corporate Income Tax Payable

Jumlah Utang Pajak Penghasilan Badan PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp25,25 miliar, yaitu lebih rendah 63,48% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp69,14 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan Pajak Dibayar Dimuka yang signifikan di tahun berjalan, sehingga mengurangi porsi sisa kewajiban Utang Pajak Badan yang harus dilunasi pada akhir tahun.

PLN NP's Corporate Income Tax Payable in 2025 amounted to Rp25.25 billion, a decrease of 63.48% compared to Rp69.14 billion in 2024. This is mainly due to a significant increase in Prepaid Taxes during the current year, which reduced the portion of the remaining Corporate Tax Liability that must be paid by the end of the year.

Beban Masih Harus Dibayar
Accrued Expenses

Jumlah Beban Masih Harus Dibayar PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp254,02 miliar, yaitu meningkat 487,34% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp43,25 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh kewajiban manfaat pegawai pada tahun 2025.

PLN NP's total Accrued Expenses in 2025 amounted to Rp254.02 billion, an increase of 487.34% compared to Rp43.25 billion in 2024. This increase was mainly driven by employee benefit liabilities in 2025.

Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Pendek
Lease Liabilities – Short-term Portion

Jumlah Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Pendek tahun 2025 adalah sebesar Rp583,02 miliar, yaitu lebih rendah 0,42% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp585,47 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penyesuaian waktu jatuh tempo kontrak sewa aset hak guna pada tahun 2025.

In 2025, total Lease Liabilities - Short-Term Portion amounted to Rp583.02 billion, a decrease of 0.42% compared to Rp585.47 billion in 2024. This is primarily due to the adjustment of the maturity date of the lease contract for right-of-use assets in 2025.

Pinjaman dari Pemegang Saham - Bagian Jangka Pendek
Loans from Shareholders – Short-term Portion

Pinjaman dari Pemegang Saham - Bagian Jangka Pendek tahun 2025 adalah sebesar Rp344,49 miliar, yaitu meningkat 1,30% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp340,06 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh perubahan nilai suku bunga dan nilai kurs.

Loan from Shareholders - Short Term Portion in 2025 amounted to Rp344.49 billion, an increase of 1.30% compared to Rp340.06 billion in 2024. This increase was mainly driven by changes in the values of interest rate and exchange rate.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek
Short-term Employee Benefit Liabilities

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek tahun 2025 adalah sebesar Rp813,07 miliar, yaitu lebih rendah 4,88% dibandingkan tahun 2024 sebesar sebesar Rp854,81 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh asumsi perhitungan aktuaris pada laporan aktuaria PLN NP pada tahun 2025.

Total Short-Term Employee Benefits Liabilities in 2025 amounted to Rp813.07 billion, a decrease of 4.88% compared to 2024 of Rp854.81 billion. It was mainly due to the assumption of actuarial calculations in PLN NP's actuarial report for 2025.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp29,45 triliun, yaitu meningkat 7,66% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp27,35 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya adanya peningkatan liabilitas pajak tangguhan dari surplus revaluasi aset tetap dan liabilitas imbalan kerja dari perhitungan aktuaris.

In 2025, PLN NP's total Non-Current Liabilities amounted to Rp29.45 trillion, an increase of 7.66% compared to Rp27.35 trillion in 2024. This increase was mainly driven by an increase in deferred tax liabilities arising from the surplus of property, plant, and equipment revaluation and employee benefit liabilities resulting from actuarial calculations.

Peningkatan tersebut berdampak pada Perusahaan memiliki waktu untuk dapat menyusun strategi pengelolaan likuiditas yang lebih terencana dan tidak menekan likuiditas jangka pendek.

The increase has allowed the Company to have time to develop a more planned liquidity management strategy without putting pressure on short-term liquidity.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Table of Non-Current Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih Deferred Tax Liabilities – Net	10.262.345	13.059.609	15.552.012	19.293.753	**21.367.295**	10,75	2.073.542
Pinjaman dari Pemegang Saham - Bagian Jangka Panjang Loan from Shareholders – Long-term Portion	2.183.226	2.376.033	1.997.730	2.058.105	**1.802.157**	(12,44)	(255.948)
Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Panjang Lease Liabilities – Long-term Portion	52.773	1.955.288	2.319.295	1.934.441	**1.854.654**	(4,12)	(79.787)
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	2.695.320	3.457.971	3.630.260	4.064.779	**4.421.466**	8,78	356.687
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-Current Liabilities**	**15.193.664**	**20.848.901**	**23.499.297**	**27.351.078**	**29.445.572**	**7,66**	**2.094.494**

Grafik Liabilitas Jangka Panjang
Chart of Non-Current Liabilities

(Rp juta) (Rp million)

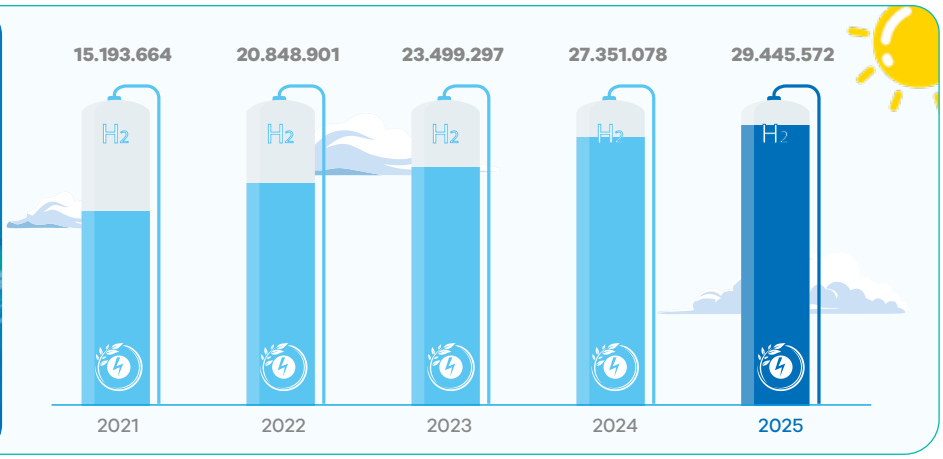

Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih
Deferred Tax Liabilities - Net

Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih tahun 2025 adalah sebesar Rp21,37 triliun, yaitu meningkat 10,75% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp19,29 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya perbedaan temporer kenaikan nilai buku aset serta perbedaan metode atau masa manfaat penyusutan antara akuntansi komersial dan perpajakan (fiskal).

Total Deferred Tax Liabilities - Net in 2025 amounted to Rp21.37 trillion, an increase of 10.75% compared to Rp19.29 trillion in 2024. This increase was mainly due to temporary differences in the book value of assets, and differences in depreciation methods or useful lives between commercial and tax (fiscal) accounting.

Pinjaman dari Pemegang Saham - Bagian Jangka Panjang
Loans from Shareholders – Long-term Portion

Jumlah Pinjaman dari Pemegang Saham - Bagian Jangka Panjang tahun 2025 adalah sebesar Rp1,80 triliun, yaitu lebih rendah 12,44% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp2,06 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran angsuran pokok *Shareholder Loan.*

In 2025, total Loans from Shareholders - Long-Term Portion amounted to Rp1.80 trillion, which was lower by 12.44% compared to Rp2.06 trillion in 2024. This was mainly caused by the payment of principal installments on Shareholder Loan.

Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Panjang
Lease Liabilities – Long-term Portion

Jumlah Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Panjang tahun 2025 adalah sebesar Rp1,85 triliun, yaitu lebih rendah 4,12% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp1,93 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya menyesuaikan waktu jatuh tempo kontrak sewa aset hak guna pada tahun 2025.

Total Lease Liabilities - Long-Term Portion in 2025 amounted to Rp1.85 trillion, a decrease of 4.12% compared to Rp1.93 trillion in 2024. It was mainly due to adjusting the maturity date of the lease contract for the right-of-use asset in 2025.

Liabilitas Imbalan Kerja
Employee Benefit Liabilities

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja tahun 2025 adalah sebesar Rp4,42 triliun, yaitu meningkat 8,78% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp4,06 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya asumsi perhitungan aktuaris pada laporan aktuaria PLN NP Tahun 2025.

Total Employee Benefits Liabilities in 2025 amounted to Rp4.42 trillion, an increase of 8.78% compared to Rp4.06 trillion in 2024. This increase was mainly driven by the actuarial calculation assumptions in PLN's 2025 actuarial report.

Ekuitas
Equity

Jumlah Ekuitas PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp315,15 triliun, yaitu meningkat 0,16% dibandingkan 2024 adalah sebesar Rp314,64 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh perolehan laba tahun berjalan tahun 2025.

In 2025, PLN NP's total Equity amounted to Rp315.15 trillion, an increase of 0.16% compared to 2024, which amounted to Rp314.64 trillion. This increase was mainly driven by profit for the year in 2025.

Peningkatan tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan Perusahaan dalam melakukan pendanaan internal.

This increase had an impact on the Company's ability to conduct internal financing.

Tabel Ekuitas (Rp juta)
Table of Equity (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Modal Saham - Nilai Nominal Rp500 (Nilai Penuh) Per Saham Capital stock - par value of Rp500 (full amount) per share							
Modal Dasar - 1.234.042 juta Saham (Tahun 2022 dan sebelumnya 6.000 juta saham) Authorised - 1,234,042 million shares (6,000 million shares in 2022 and previously)							
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 308.510 juta Saham (Tahun 2022 dan sebelumnya 24.000 juta saham) Subscribed and fully paid-up - 308,510 million shares (24,000 million shares in 2022 and previously)	3.000.000	3.000.000	154.255.249	154.255.249	**154.255.249**	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	2.915.205	2.890.829	(96.808.376)	(96.808.376)	**(96.808.595)**	0,00	(219)
Ekuitas *Merging Entity* Equity of Merging Entity	53.331.368	51.556.044	-	-	-	-	-
Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali Difference in Transaction with Non-Controlling Interest	(62.725)	(62.725)	(62.725)	(62.725)	**(62.725)**	-	-
Saldo Laba: Retained Earnings:							
- Ditentukan Penggunaannya Appropriated	1.429.875	1.429.875	1.429.875	1.429.875	**1.429.875**	-	-
- Tidak Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	30.064.155	30.802.599	37.897.720	37.119.373	**37.254.263**	0,36	134.890

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	211.498.243	211.934.905	211.850.414	218.369.778	**218.670.692**	0,14	300.914
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada: Equity Attributable to:							
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	302.176.121	301.551.527	308.562.157	314.303.174	**314.738.759**	0,14	435.585
- Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	243.183	278.276	298.667	340.820	**415.722**	21,98	74.902
Jumlah Ekuitas Total Equity	**302.419.304**	**301.829.803**	**308.860.824**	**314.643.994**	**315.154.481**	**0,16**	**510.487**

Grafik Ekuitas
Chart of Equity

(Rp juta) (Rp million)

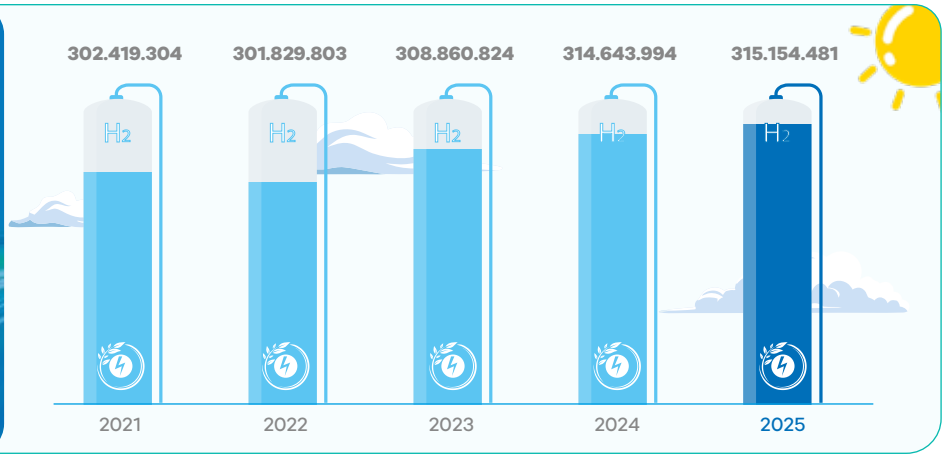

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Subscribed and Fully Paid-up

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh merupakan saham biasa yang memberikan hak untuk membawa satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PLN NP tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar Rp154,26 triliun.

The Subscribed and Fully Paid-up Capital represents ordinary shares, which entitle the holder to carry one vote per share and participate in dividends. The total Subscribed and Fully Paid-Up Capital of PLN NP in 2025 and 2024 was Rp154.26 trillion.

Tambahan Modal Disetor
Additional Paid-in Capital

Tambahan modal disetor berasal dari nilai pengalihan aset tetap, termasuk dana rehabilitasi PLTU Gresik Unit 1 dan 2 dan material pemeliharaan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PLN, pemegang saham dari Perusahaan sebesar Rp2,87 triliun.

The additional paid-in capital was from the value of the transfer of property, plant, and equipment, including rehabilitation funds for Gresik Units 1 and 2 CFPP and maintenance materials from 1996 to 2000 received from PLN, the Company's shareholders, amounting to Rp2.87 trillion.

Pada tahun 2016, tambahan modal disetor berasal dari partisipasi Grup dalam Pengampunan Pajak sebesar Rp44,21 miliar.

In 2016, the additional paid-in capital was from the Group's participation in the Tax Amnesty amounting to Rp44.21 billion.

Pada tahun 2022, PLN NPC membuat perjanjian jual beli saham dengan PT PLN Enjiniring (PLNE), entitas sepengendali. PLN NPC mengakuisisi 125.074.552 saham biasa atau 100% kepemilikan atas PPN dengan mengalihkan 93.411.836 saham biasa atau 99,8% kepemilikan atas Rekadaya Elektrika Consult (REC) kepada PLNE. Selisih Rp24,38 miliar antara nilai imbalan dan nilai buku bersih dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor di akun ekuitas.

In 2022, PLN NPC entered into a share purchase agreement with PT PLN Enjiniring (PLNE), an entity under common control. PLN NPC acquired 125,074,552 ordinary shares or 100% ownership of PPN by transferring 93,411,836 ordinary shares or 99.8% ownership of Rekadaya Elektrika Consult (REC) to PLNE. The difference of Rp24.38 billion between the consideration value and the net book value was recorded as a deduction from additional paid-in capital in the equity account.

Pada tahun 2023, terdapat tambahan modal disetor sebesar Rp99,70 triliun berasal dari selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai buku bersih yang diterima dari PLN akibat adanya pembentukan *subholding*.

In 2023, there was an additional paid-in capital of Rp99.70 trillion resulting from the difference between the amount of compensation transferred and the net book value received from PLN due to the establishment of a subholding.

Pada tahun 2025, pengurang tambahan modal disetor sebesar Rp219 juta berasal dari selisih antara jumlah imbalan yang diterima dan nilai buku bersih PPN yang dijual ke Iconvest sebagai entitas sepengendali.

In 2025, an additional deduction of paid-in capital amounting to Rp219 million was made from the difference between the amount of compensation received and the net book value of PPN sold to Iconvest as a jointly controlled entity.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Equity Attributable to Owners of the Parent

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp314,74 triliun, yaitu meningkat 0,14% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp314,30 triliun. Peningkatan ini didorong oleh perolehan laba tahun berjalan tahun 2025.

In 2025, Total PLN NP's Equity Attributable to Owners of the Parent amounted to Rp314.74 trillion, an increase of 0.14% compared to Rp314.30 trillion in 2024. This increase was driven by profit for the year in 2025.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali
Equity Attributable to Non-Controlling Interest

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp415,72 miliar, yaitu meningkat 21,98% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp340,82 miliar. Peningkatan ini didorong oleh perolehan laba tahun berjalan tahun 2025.

Total Equity Attributable to Non-Controlling Interests of PLN NP in 2025 amounted to Rp415.72 billion, an increase of 21.98% compared to Rp340.82 billion in 2024. This increase was supported by profit for the year in 2025.

Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Analysis of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain (Rp juta)

Table of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Pendapatan Usaha Revenue	29.508.134	76.006.693	90.375.607	91.713.159	**98.893.003**	7,83	7.179.844
Beban Usaha Operating Expense	(25.101.143)	(69.373.751)	(76.008.286)	(77.972.760)	**(84.192.736)**	7,98	(6.219.976)
Laba Usaha Operating Income	4.406.991	6.632.942	14.367.321	13.740.399	**14.700.267**	6,99	959.868
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	7.192.040	8.510.597	16.393.519	15.831.951	**16.208.367**	2,38	376.416
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(1.371.852)	(3.039.879)	(2.725.866)	(2.922.370)	**(3.150.723)**	7,81	(228.353)
Laba Tahun Berjalan **Profit for the Year**	**5.820.188**	**5.470.718**	**13.667.653**	**12.909.581**	**13.057.644**	**1,15**	**148.063**
Penghasilan (kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income (loss) for the Year after Tax	(2.301.389)	446.746	(86.198)	6.525.719	**322.868**	(95,05)	(6.202.851)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive Income for the Year**	**3.518.799**	**5.917.464**	**13.581.455**	**19.435.300**	**13.380.512**	**(31,15)**	**(6.054.788)**
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:							
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	5.810.033	5.435.649	13.643.598	12.865.251	**12.984.152**	0,92	118.901
- Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	10.155	35.069	24.055	44.330	**73.492**	65,78	29.162
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:							
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	5.810.033	5.435.649	13.643.598	12.865.251	**13.301.055**	(31,38)	(6.083.560)
- Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	10.155	35.069	24.055	44.330	**79.457**	56,77	28.772
Laba Per Saham Dasar (Rupiah penuh) **Basic Earnings per Share (full amount)**	**970**	**906**	**44**	**42**	**42**	0,92	-

Pendapatan Usaha
Revenue

Komponen atas Pendapatan Usaha PLN NP terdiri dari Penjualan Tenaga Listrik dan Pendapatan Usaha Lainnya. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan usaha berasal dari penjualan tenaga listrik.

The components of PLN NP's revenue consist of sales of electricity and other operating revenues. The largest contribution to revenue comes from electricity sales.

Pendapatan Usaha PLN NP tahun 2025 sebesar Rp98,89 triliun meningkat 7,83% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp91,71 triliun. Peningkatan ini didorong oleh pencapaian kWh jual untuk menyesuaikan kebutuhan dan mendukung optimasi sistem dan juga peningkatan usaha lainnya (Jasa OM dan EPC).

PLN NP's Revenue in 2025 amounted to Rp98.89 trillion, an increase of 7.83% compared to Rp91.71 trillion in 2024. This increase was driven by the achievement of kWh sales to meet demand and support system optimization, as well as growth in other businesses (OM Services and EPC).

Dampak dari peningkatan tersebut adalah peningkatan jumlah Aset Lancar (Piutang Usaha), peningkatan penerimaan kas operasi penjualan tenaga listrik untuk aktivitas operasional perusahaan serta peningkatan biaya pemakaian bahan bakar.

The impact of this increase is an increase in Current Assets (Trade Receivables), an increase in cash receipts from electricity sales for the Company's operating activities, and an increase in fuel consumption costs.

Tabel Pendapatan Usaha (Rp juta)
Table of Revenue (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	24.541.378	73.690.178	87.851.149	88.321.254	**94.971.854**	7,53	6.650.600
Pendapatan Usaha Lainnya Other Operating Revenues	4.966.756	2.316.515	2.524.458	3.391.905	**3.921.149**	15,60	529.244
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**29.508.134**	**76.006.693**	**90.375.607**	**91.713.159**	**98.893.003**	**7,83**	**7.179.844**

Grafik Pendapatan Usaha
Chart of Revenue

(Rp juta) (Rp million)

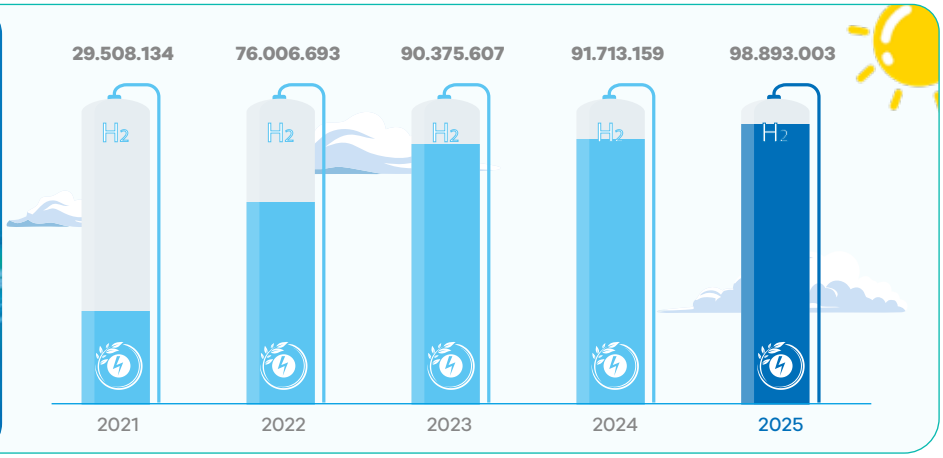

Beban Usaha
Operating Expenses

Jumlah Beban Usaha PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp84,19 triliun meningkat 7,98% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp77,97 triliun.Peningkatan ini didorong oleh adanya :

1. Peningkatan produksi kWh.
2. Kenaikan harga bahan bakar terutama dari Batubara dan gas.
3. Pekerjaan pemeliharaan pembangkit untuk menjaga keandalan pembangkit.

Dampak dari peningkatan tersebut adalah peningkatan Biaya Pokok Produksi Pembangkit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

In 2025, PLN NP's operating expenses amounted to Rp84.19 trillion, an increase of 7.98% compared to Rp77.97 trillion in 2024. This increase was driven by:

1. Increase in kWh production.
2. Increase in fuel prices, particularly for coal and natural gas.
3. Power plant maintenance work to ensure the reliability of the power plant.

The impact of the increase is an increase in the Power Plant Cost of Production when compared to the previous year.

Tabel Pendapatan Usaha (Rp juta)
Table of Operating Expenses (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	14.672.806	49.809.736	54.987.284	55.681.478	**60.826.866**	9,24	5.145.388
Pemeliharaan Maintenance	4.126.561	5.230.185	5.868.781	6.349.593	**7.063.278**	11,24	713.685
Penyusutan Depreciation	3.253.144	9.002.809	9.454.802	9.517.923	**9.923.202**	4,26	405.279
Kepegawaian Employee Costs	1.790.453	2.554.613	3.202.613	3.418.620	**3.461.449**	1,25	42.829
Pembelian Tenaga Listrik Purchased Electricity	333.617	1.095.295	847.199	827.516	**634.450**	(23,33)	(193.066)
Lain-lain Others	924.562	1.681.113	1.647.607	2.177.630	**2.283.491**	4,86	105.861
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	**25.101.143**	**69.373.751**	**76.008.286**	**77.972.760**	**84.192.736**	**7,98**	**6.219.976**

Grafik Beban Usaha
Chart of Operating Expenses

(Rp juta) (Rp million)

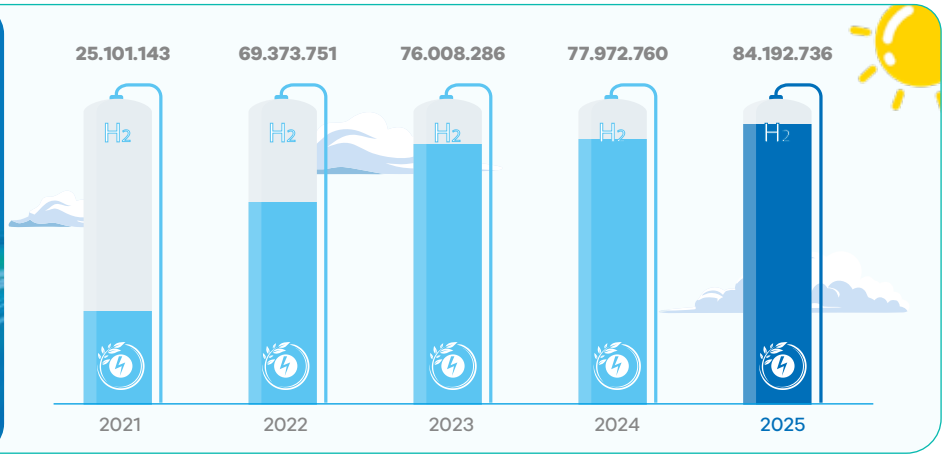

Laba Usaha
Operating Income

Jumlah Laba Usaha PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp14,70 triliun, yaitu meningkat 6,99% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp13,74 triliun. Peningkatan ini didorong oleh adanya pencapaian penjualan kWh yang lebih baik dan optimasi beban usaha.

Dampak dari peningkatan tersebut adalah pencapaian EBITDA yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

In 2025, PLN NP's total Operating Income amounted to Rp14.70 trillion, an increase of 6.99% compared to Rp13.74 trillion in 2024. This increase was driven by better kWh sales achievements and optimization of operating expenses.

As a result of this increase, EBITDA achievements were better than in the previous year.

Komponen Substansial dari Pendapatan dan Beban Lainnya
Substantial Components of Other Revenues and Expenses

Komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya merupakan pos keuangan dan lain-lain bersih yang terdiri dari Penghasilan Keuangan, Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing, Beban Keuangan, Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, dan Penghasilan/(Beban) Lain-lain Bersih. Komponen ini pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1,51 triliun, yaitu lebih rendah 27,90% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,09 trilliun.Penurunan ini disebabkan oleh adanya beban *impairment*/penyusutan dipercepat dan rendahnya pencapaian penghasilan keuangan.

A substantial component of other revenues and expenses is net financial items and others consisting of Finance Income, Gain (Loss) on Foreign Currency Exchange, Finance Costs, Share of Net Profit of Associates and Joint Ventures, and Net Other Income/(Expenses). In 2025, this component amounted to Rp1.51 trillion, a decrease of 27.90% compared to Rp2.09 trillion in 2024. This decline was due to accelerated impairment/depreciation expenses and low achievement of financial income.

Dampak dari penurunan tersebut adalah penurunan kontribusi dalam mendukung capaian laba bersih.

The impact of this decrease is a decline in contribution to support net profit achievement.

Tabel Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih (Rp juta)
Table of Net Financial Items and Others (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Penghasilan Keuangan Finance Income	186.603	182.327	206.202	261.921	**193.524**	(26,11)	(68.397)
Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing – bersih Gain/(Loss) on Foreign Exchange - net	3.924	(865.883)	177.632	5.032	**(12.296)**	(344,36)	(17.328)
Beban Keuangan Finance Costs		(570.469)	(262.772)	(378.045)	**(385.544)**	1,98	(7.499)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share in Net Profit of Associates and joint Ventures	2.868.311	2.854.031	2.114.240	2.350.862	**2.520.399**	7,21	169.537
Penghasilan/(Beban) Lain-lain Bersih Other Income/(Expenses) - net	(273.789)	277.649	(209.104)	(148.218)	**(807.983)**	445,13	(659.765)
Jumlah Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih **Total Net Financial Items and Others**	**2.785.049**	**1.877.655**	**2.026.198**	**2.091.552**	**1.508.100**	**(27,90)**	**(583.452)**

Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Profit before Income Tax

Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp16,21 triliun, yaitu meningkat 2,38% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp15,83 triliun. Peningkatan ini didorong oleh adanya penjualan kWh yang lebih baik dan kontribusi Laba Asosisasi PLN NP.

The total Profit Before Income Tax of PLN NP in 2025 amounted to Rp16.21 trillion, an increase of 2.38% compared to Rp15.83 trillion in 2024. This increase was mainly driven by higher kWh sales and the contribution from PLN NP's Associates' Profit.

Dampak dari peningkatan tersebut adalah peningkatan capaian *Return on Invested Capital* (ROIC) PLN NP tahun 2025.

The impact of this increase is an increase in Return on Invested Capital (ROIC) of PLN NP in 2025.

Beban Pajak Penghasilan
Income Tax Expense

Jumlah Beban Pajak Penghasilan PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp3,15 triliun meningkat 7,81% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp2,92 triliun. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya laba pajak sebelum pajak penghasilan.

In 2025, PLN NP's total Income Tax Expense amounted to Rp3.15 trillion, an increase of 7.81% compared to the figure in 2024 of Rp2.92 trillion. This increase was in line with an increase in tax profit before income tax.

Dampak dari peningkatan tersebut adalah meningkatnya kewajiban pembayaran pajak penghasilan perusahaan kepada negara, yang mencerminkan adanya pertumbuhan kinerja dan profitabilitas Perusahaan.

The result of this increase is a rise in the Company's income tax liability to the state, reflecting the Company's improved performance and profitability.

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

Pada tahun 2025, PLN NP berhasil membukukan Laba Tahun Berjalan PLN NP sebesar Rp13,06 triliun, yaitu meningkat 1,15% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp12,91 triliun. Peningkatan ini didorong oleh

In 2025, PLN NP managed to record its Profit for the Year of Rp13.06 trillion, an increase of 1.15% compared to Rp12.91 trillion in 2024. This growth was driven by an increase in kWh sales to meet demand and

pencapaian kWh jual untuk menyesuaikan kebutuhan dan mendukung optimasi sistem dan juga peningkatan usaha lainnya (Jasa OM dan EPC) serta kontribusi Laba Asosiasi PLN NP.

support system optimization, as well as growth in other businesses (OM Services and EPC), and contributions from PLN NP's Associate Profit.

Dampak dari peningkatan tersebut adalah peningkatan capaian *Return on Invested Capital* (ROIC) PLN NP tahun 2025.

The impact of this achievement is an increase in Return on Invested Capital (ROIC) of PLN NP in 2025.

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan
Other Comprehensive Income for the Year

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah pajak pada tahun 2025 adalah sebesar Rp322,87 miliar, yaitu lebih rendah 95,05% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp6,52 triliun. Penurunan ini didorong oleh tidak adanya surplus revaluasi aset pada tahun 2025.

Total Other Comprehensive Income for the Year after tax in 2025 amounted to Rp322.87 trillion, which was lower by 95.05% than the 2024 figure of Rp6.52 billion. This decline was driven by no surplus from asset revaluation in 2025.

Dampak dari penurunan tersebut adalah penurunan pencapaian Laba Komprehensif jika dibandingkan dengan tahun lalu.

The impact of this decline is a decrease in Comprehensive Income compared to the previous year's figure.

Tabel Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih (Rp juta)
Table of Other Comprehensive Income for the Year (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Items that May be Reclassified Subsequently to Profit or Loss:							
Bagian (Kerugian) Penghasilan Komprehensif Lain dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share in Other Comprehensive (Loss)/Income from Associates and Joint Ventures	(4.868)	969.996	(103.027)	471.469	**399.522**	(15,26)	(71.947)
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba rugi: Items that Will not be Reclassified to Profit or Loss:							
Revaluasi Aset Tetap Revaluation of Property, Plant, and Equipment	(3.154.021)	(7.054)	(4.384)	7.820.712	-	(100,00)	(7.820.712)
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of Defined Benefit Plans	192.415	(664.508)	27.196	(186.182)	**(98.274)**	(47,22)	87.908

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax (Expense)/ Benefits	665.085	148.312	(5.983)	(1.580.280)	**21.620**	(101,37)	1.601.900
Penghasilan/(Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak Other Comprehensive (Loss)/ Income for the Year After Tax	**(2.301.389)**	**446.746**	**(86.198)**	**6.525.719**	**322.868**	**(95,05)**	**(6.202.851)**

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Total Comprehensive Income for the Year

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp13,38 triliun, yaitu lebih rendah 31,15% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp19,43 triliun. Penurunan ini didorong oleh tidak adanya surplus revaluasi aset pada tahun 2025.

Dampak dari penurunan tersebut adalah penurunan pencapaian Laba Komprehensif jika dibandingkan dengan tahun lalu.

In 2025, PLN NP's Total Comprehensive Income for the Year amounted to Rp13.38 trillion, a decrease of 31.15% compared to Rp19.43 trillion in 2024. This decline was driven by no surplus from asset revaluation in 2025.

The impact of this decline is a decrease in Comprehensive Income compared to the previous year's figure.

Laba Per Saham Dasar
Basic Earnings per Share

PLN NP memiliki jumlah saham sebanyak 308.510 juta saham di mana hampir seluruhnya dimiliki oleh PT PLN (Persero). Perhitungan jumlah laba per saham dasar atau biasa disebut laba per saham yang merupakan perhitungan yang dilakukan untuk menemukan pendapatan yang diperoleh perusahaan sesuai dengan jumlah saham beredar yang dimiliki. PLN NP tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

Jumlah Laba Per Saham PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp 42, yaitu sama dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp42. Pencapaian ini didorong oleh adanya pencapaian kWh jual untuk menyesuaikan kebutuhan dan mendukung optimasi sistem dan juga peningkatan usaha lainnya (Jasa OM dan EPC) serta kontribusi Laba Asosiasi PLN NP.

PLN NP has a total of 308,510 million shares, almost entirely owned by PT PLN (Persero). The calculation of the amount of basic earnings per share, or commonly called earnings per share, is a calculation made to find the income earned by the Company in accordance with the number of outstanding shares owned. PLN NP does not have the effect of potentially diluting shares, so basic earnings per share are the same as diluted earnings per share.

The total Earnings Per Share of PLN NP in 2025 was Rp42, or similar to the 2024 figure of Rp42. This achievement was driven by an increase in kWh sales to meet demand and support system optimization, as well as an increase in other businesses (OM Services and EPC), and contributions from PLN NP's Associate Profit.

Dampak dari pencapaian tersebut adalah terjaganya tingkat profitabilitas perusahaan yang tercermin pada stabilnya laba per saham (*earning per share*/EPS), sehingga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kinerja keuangan dan memberikan nilai ekonomi yang konsisten kepada pemegang saham.

The impact of this achievement is the maintenance of the Company's profitability level, reflected in the stable earnings per share (EPS), thereby demonstrating the Company's ability to sustain financial performance and provide consistent economic value to shareholders.

Analisis Arus Kas
Cash Flow Analysis

Jumlah Kas dan Setara Kas PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp6,13 triliun, yaitu lebih rendah 18,79% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp7,54 triliun. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan likuiditas dan optimalisasi *cash management* di lingkungan PLN Grup.

In 2025, PLN NP's total Cash and Cash Equivalents amounted to Rp6.13 trillion, a decrease of 18.79% compared to Rp7.54 trillion in 2024. This is due to adjustments in liquidity needs and the optimization of cash management within the PLN Group.

Dampak dari penurunan tersebut adalah optimalnya perputaran kas di tingkat korporasi, yang mencerminkan strategi penempatan likuiditas yang ketat dan terukur guna mendukung efisiensi pembiayaan di lingkup PLN Grup secara konsolidasi.

The impact of the decline is the optimization of cash turnover at the corporate level, which reflects a strict and measured liquidity placement strategy to support financing efficiency within the consolidated PLN Group.

Tabel Arus Kas (Rp juta)
Table of Cash Flows (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	4.323.208	5.799.978	2.059.188	3.282.939	**2.859.978**	(19,71)	(701.947)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(334.356)	(3.986.039)	(3.416.403)	(2.181.711)	**(3.577.173)**	45,37	(1.116.476)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	(167.500)	(296.994)	(748.644)	(403.577)	**(700.503)**	73,57	(296.926)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	3.821.352	1.516.945	(2.105.859)	697.651	**(1.417.698)**	(303,21)	(2.115.349)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	3.511.113	7.343.968	8.958.158	6.846.288	**7.544.144**	10,19	697.856
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of Changes in Foreign Currency	11.503	97.245	(6.011)	205	**(187)**	(191,22)	(392)
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Total Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	**7.343.968**	**8.958.158**	**6.846.288**	**7.544.144**	**6.126.259**	**(18,79)**	**(1.417.885)**

Grafik Kas dan Setara Kas Akhir Tahun
Chart of Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

(Rp juta) (Rp million)

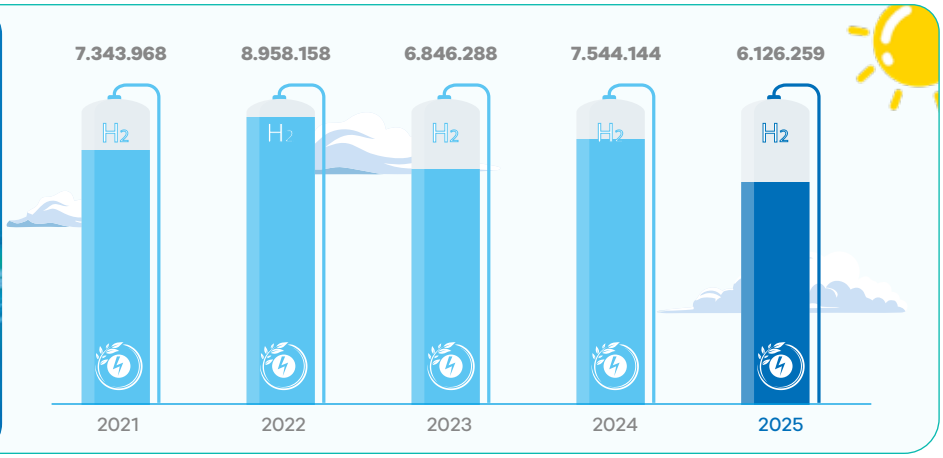

Arus Kas Aktivitas Operasi
Cash Flows from Operating Activities

Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp2,86 triliun, yaitu lebih rendah 19,71% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp3,56 triliun. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian dengan kebutuhan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen kas terpusat PLN (Optimasi *Cash Management* PLN *Holding*).

In 2025, PLN NP's total Net Cash Provided by Operating Activities amounted to Rp2.86 trillion, a decrease of 19.71% compared to Rp3.56 trillion in 2024. This is due to adjustments made to meet operational needs in line with PLN's centralized cash management policy (PLN Holding Cash Management Optimization).

Tabel Arus Kas Aktivitas Operasi (Rp juta)
Table of Cash Flows from Operating Activities (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipt from Customers	15.415.195	63.374.359	60.577.282	66.855.828	**75.051.582**	12,26	8.195.754
Pembayaran Kas kepada Pemasok, Karyawan, dan Lainnya Cash Paid to Suppliers, Employees, and Others	(11.533.375)	(58.091.253)	(58.557.039)	(62.887.474)	**(71.626.168)**	13,90	(8.738.694)
Penerimaan Bunga Interest Received	106.441	225.454	212.591	221.230	**263.305**	19,02	42.075
Pembayaran Bunga Interest Expense Paid		(564.502)	(202.919)	(235.259)	**(385.544)**	63,88	(150.285)
Pembayaran Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Payment of Tax Assessment Letter for Underpayment	(136.172)	-	(2.836)	(5.637)	**(127)**	(97,75)	5.510
Penerimaan Pengembalian atas Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Receipt of Refund Tax Assessment Letter for Underpayment	-	450.195	169.850	-	-	-	-
Penerimaan Restitusi Pajak Penghasilan Badan Cash Receipt for Corporate Income Tax Refund	227.944	234.488	243.779	148.677	**237.885**	60,00	89.208
Penerimaan Restitusi Pajak Penambahan Nilai Cash Receipt for Value-Added Taxes Refund	581.587	424.759	103.324	178.103	**138.626**	(22,17)	(39.477)
Pembayaran PPh Badan & PPh Final Payments of Corporate Income Tax & Final Income Tax	(338.412)	(253.522)	(484.844)	(713.543)	**(819.581)**	14,86	(106.038)
Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi **Total Net Cash Provided by Operating Activities**	**4.323.208**	**5.799.978**	**2.059.188**	**3.561.925**	**2.859.978**	**(19,71)**	**(701.947)**

Arus Kas Aktivitas Investasi
Cash Flows for Investing Activities

Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp2,46 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan realisasi belanja modal (*capital expenditure*/capex) untuk pembangunan, modernisasi, maupun pemeliharaan skala besar atas infrastruktur pembangkitan.

In 2025, PLN NP's total Net Cash Used in Investing Activities amounted to Rp3.58 trillion, an increase of 45.37% compared to Rp2.46 trillion in 2024. This increase was primarily driven by an increase in capital expenditure (capex) for the construction, modernization, and large-scale maintenance of power generator infrastructure.

Tabel Arus Kas Aktivitas Investasi (Rp juta)
Table of Cash Flows for Investing Activities (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Dividend Received from Associates and Joint Ventures	307.069	496.634	666.890	774.118	**856.883**	10,69	82.765
Penempatan Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Addition of Investment in Associated and Joint Ventures	(92.598)	(393.398)	(42.063)	(147.914)	**(157.544)**	6,51	(9.630)
Penambahan Piutang kepada Ventura Bersama Addition of Receivables from Joint Ventures	(9.632)	-	(119.608)	-	-	-	-
Penerimaan atas Piutang kepada Ventura Bersama Receipt of Receivables from Joint Ventures	-	64.720	264.603	-		-	-
Penarikan Deposito Berjangka Withdrawal of Time Deposits	554.372	30.000	322.473	377.900	**530.507**	40,38	152.607
Penempatan deposito berjangka Placement of Time Deposits	-	(231.196)	(475.260)	(443.688)	-	(100,00)	443.688
Penarikan Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Withdrawal of Restricted Cash in Banks and Time Deposits	15.737	972	4.168	99.395	**87.284**	(12,18)	(12.111)
Penempatan Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Placement of Restricted Cash in Banks and Time Deposits	(15.400)	(122.022)	(55.549)	(130.450)	**(99.019)**	(24,09)	31.431
Perolehan Aset Tetap Purchase of Property, Plant, and Equipment	(1.093.904)	(3.789.403)	(3.951.540)	(2.966.520)	**(4.911.456)**	65,56	(1.944.936)
Perolehan Aset Takberwujud Purchase of Intangible Assets	-	(42.346)	(30.517)	(24.328)	**(15.181)**	(37,60)	9.147
Penjualan aset tidak digunkan dalam operasi Sales of assets not used in operations	-	-	-	790	**393**	(50,25)	(397)
Hasil dari penjualan kepemilikan atas entitas anak Proceeds from the sale of ownership in subsidiaries	-	-	-	-	**130.960**	100,00	130.960
Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi **Total Net Cash Used in Investing Activities**	**(334.356)**	**(3.986.039)**	**(3.416.403)**	**(2.460.697)**	**(3.577.173)**	**45,37**	**(1.116.476)**

Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Cash Flows for Financing Activities

Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan PLN NP tahun 2025 adalah sebesar Rp700,50 miliar, yaitu meningkat 73,57% dibandingkan tahun 2024 adalah sebesar Rp403,58 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh pelunasan pokok *Shareholder Loan* dan pembayaran liabilitas sewa.

Total Net Cash Used in Financing Activities of PLN NP in 2025 amounted to Rp700.50 billion, an increase of 73.57% compared to Rp403.58 billion in 2024. This increase was mainly driven by a repayment of the principal amount of Shareholder Loan and payment of lease liabilities.

Tabel Arus Kas Aktivitas Pendanaan (Rp juta)
Table of Cash Flows for Financing Activities (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Penerimaan Pinjaman Pemegang Saham Proceeds of Loans from a Shareholder	227.467	355.940	-	316.985	-	(100,00)	(316.985)
Pembayaran Pinjaman dari Pemegang Saham Payment of Loans from a Shareholder	(334.297)	(358.505)	(362.355)	(313.731)	**(323.579)**	3,14	(9.848)
Penerimaan Setoran Modal dari Kepentingan Non-Pengendali Proceeds of Capital Injection from Non-Controlling Interest	-	-	7	126	-	-	-
Pembayaran Penambahan Kepemilikan pada Entitas Anak dari Kepentingan Non-Pengendali Payment of Additional Ownership in a Subsidiary from Non-Controlling Interest	-	(11.184)	-	-	-	-	-
Penerimaan atas Divestasi Entitas Anak Receipt from Divestment of a Subsidiary	-	8.785	-	-	-	-	-
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Liabilities	(57.991)	(88.345)	(384.332)	(398.299)	**(372.369)**	(6,51)	25.930
Kas Pooling untuk Pendanaan Umum Cash Pooling for General Funding Activities	-	(202.906)	-	-	-	-	-
Pembayaran Dividen oleh Entitas Anak Kepada Kepentingan Non-Pengendali Payment of Dividend by Subsidiaries to Non-Controlling Interest	(2.679)	(779)	(1.964)	(8.658)	**(4.555)**	(47,39)	4.103
Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan **Total Net Cash Used in Financing Activities**	**(167.500)**	**(296.994)**	**(748.644)**	**(403.577)**	**(700.503)**	**73,57**	**(296.926)**

Rasio Keuangan Utama
Main Financial Ratios

Kemampuan Membayar Utang
Solvency

Tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya diukur menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Berikut adalah rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati:

The Company's ability level in fulfilling its obligations is measured using solvency ratios and liquidity ratios. The following is a detail of contractual maturity dates for financial liabilities with the agreed payments:

Tabel Rincian Jatuh Tempo Liabilitas Tahun 2024 (Rp juta)
Table of Liabilities Maturity Details in 2024 (Rp million)

Uraian Description	Jatuh Tempo Due Date				
	Satu tahun One Year	Lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 3 tahun More than 1 year but not more than 3 years	Lebih dari 3 tahun tetapi tidak lebih dari 5 tahun More than 3 years but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun More than 5 years	Jumlah Total
Utang Usaha Trade Payables	8.969.844	-	-	-	8.969.844
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	608.907	726.856	723.793	1.337.735	3.397.291
Utang Lain-lain Other Payables	1.861.881	-	-	-	1.861.881
Biaya yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	254.018	-	-	-	254.018
Pinjaman dari Pemegang Saham Loans from Shareholders	356.426	699.154	680.702	498.425	2.234.707
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**12.051.076**	**1.426.010**	**1.404.495**	**1.836.160**	**16.717.741**

Rasio Solvabilitas
Solvency Ratio

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas dapat dilihat melalui beberapa rasio keuangan diantaranya adalah *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

The solvency ratio is a ratio that measures the Company's ability to pay all its debts, both short and long-term. The solvency ratio can be seen through several financial ratios, including Debt to Assets Ratio (DAR) and Debt to Equity Ratio (DER).

Secara keseluruhan rasio DAR dan DER PLN NP masih sangat kecil dan tidak mengindikasikan adanya risiko *insolvency* dikarenakan perusahaan memiliki nilai ekuitas yang lebih tinggi dari nilai liabilitasnya.

Overall, PLN NP's DAR and DER ratios are still significantly low and do not indicate insolvency risk because the Company has a higher equity value than its liabilities.

Tabel Rasio Solvabilitas (%)
Table of Solvency Ratio (%)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025
Debt to Assets Ratio (DAR)	8,48	9,25	10,07	11,46	**11,89**
Debt to Equity Ratio (DER)	9,27	10,19	11,20	12,94	**13,49**

Debt to Assets Ratio (DAR)

Nilai DAR PLN NP tahun 2025 adalah 11,89% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yaitu 11,46%. Peningkatan ini terutama didorong oleh:

1. Penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan atas Surplus Revaluasi Aset Tahun 2024 (koreksi beda temporer).
2. Peningkatan Liabilitas pemegang saham karena realisasi kurs lebih tinggi dibandingkan perhitungan kurs tahun sebelumnya.

In 2025, the DAR value of PLN NP was 11.89%, which was higher than in 2024, which was 11.46%. This increase is mainly driven by:

1. Addition of Deferred Tax Liabilities on the 2024 Asset Revaluation Surplus (adjustment for temporary differences).
2. An increase in shareholders' liabilities due to the realized exchange rate being higher than the exchange rate used in the previous year's calculations.

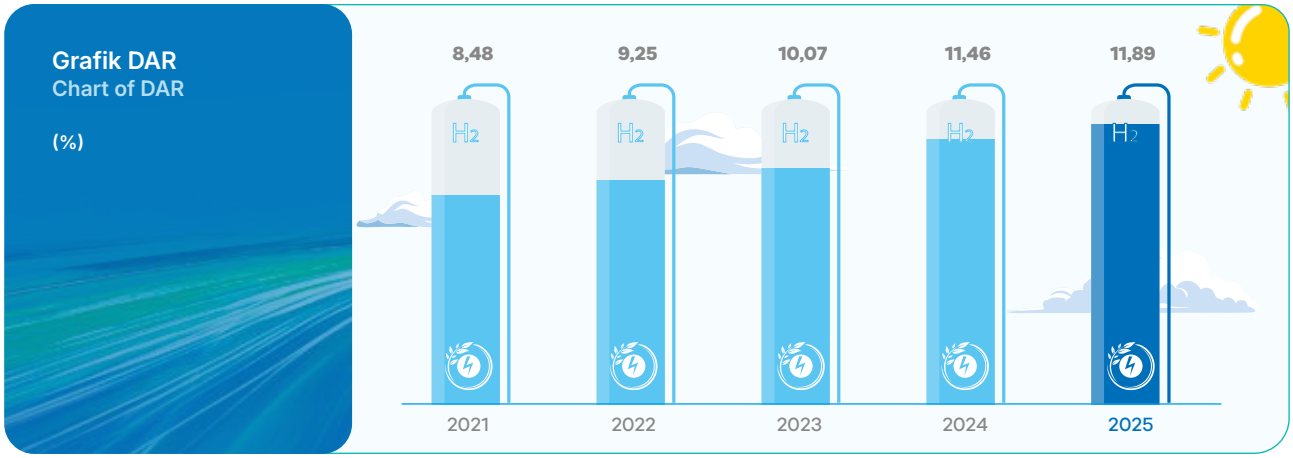

Debt to Equity Ratio (DER)

Nilai DER PLN NP tahun 2025 adalah 13,94% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yaitu 12,94%. Peningkatan ini terutama didorong oleh:

1. Penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan atas Surplus Revaluasi Aset Tahun 2024 (koreksi beda temporer).
2. Peningkatan Liabilitas pemegang saham karena realisasi kurs lebih tinggi dibandingkan perhitungan kurs tahun sebelumnya.

The DER value of PLN NP in 2025 was 13.94%, higher than in 2024, which was 12.94%. This increase is mainly driven by:

1. Addition of Deferred Tax Liabilities on the 2024 Asset Revaluation Surplus (adjustment for temporary differences).
2. An increase in shareholders' liabilities due to the realized exchange rate being higher than the exchange rate used in the previous year's calculations.

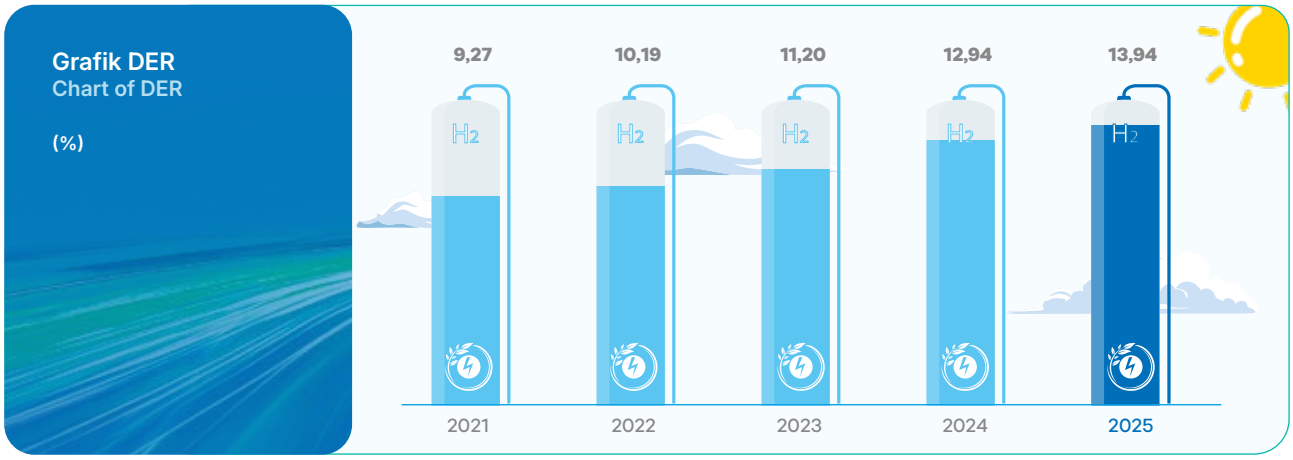

Rasio Likuiditas
Liquidity Ratio

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Rasio yang digunakan untuk menilai rasio likuiditas diantaranya adalah *cash ratio, quick ratio*, dan *current ratio*. Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut, maka mengindikasikan bahwa PLN NP mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo.

The liquidity ratio is used to measure the Company's ability to fulfill its short-term obligations that will be due. The ratios used to assess liquidity ratios include cash ratio, quick ratio, and current ratio. The higher the value of these ratios, the more capable PLN NP is of fulfilling its obligations that will be due.

Tabel Rasio Likuiditas (%)
Table of Liquidity Ratio (%)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025
Cash Ratio	49,85	84,49	57,99	56,42	**46,87**
Quick Ratio	229,17	301,12	401,18	388,96	**458,06**
Current Ratio	254,85	348,44	440,35	424,35	**489,09**

Cash Ratio

Cash Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar. Nilai *Cash Ratio* PLN NP tahun 2025 adalah 46,87% yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yaitu 56,42%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan saldo utang usaha seiring dengan adanya peningkatan pemakaian volume kenaikan dan harga bahan bakar.

The Cash Ratio is used to measure the Company's ability to pay obligations that must be fulfilled immediately with current assets. In 2025, PLN NP's Cash Ratio value was 46.87%, lower than in 2024, which was 56.42%. The decline was mainly influenced by an increase in Trade Payables in line with an increase in fuel consumption volume and prices.

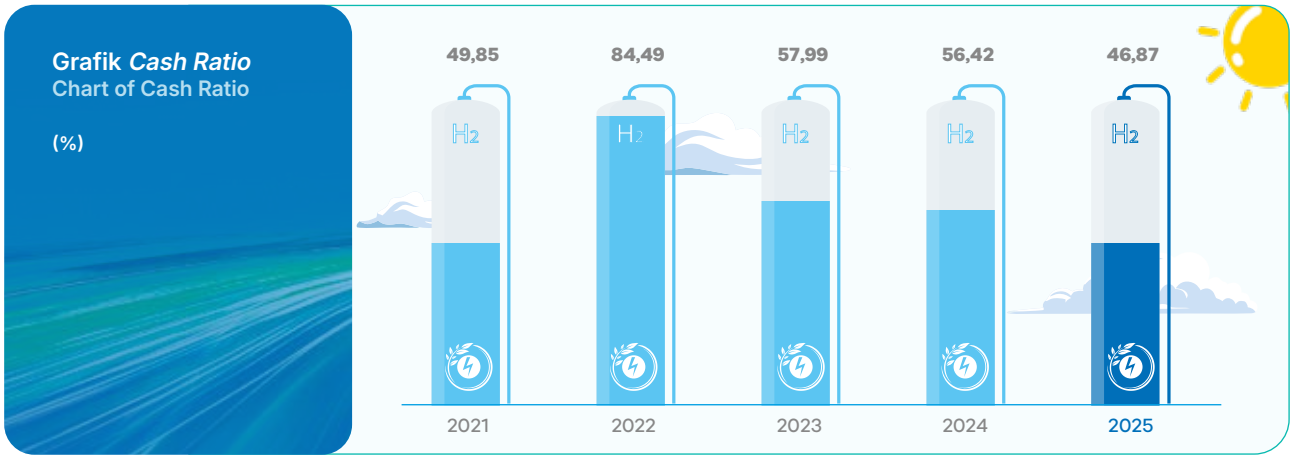

Quick Ratio

Quick Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan Aset Lancar di luar persediaan, karena persediaan dianggap tidak mudah digunakan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo. Nilai *Quick Ratio* PLN NP tahun 2025 adalah 458,06% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yaitu 388,96%. Peningkatan ini terutama didorong oleh rendahnya tingkat pencairan piutang melalui penerimaan tagihan Penjualan Tenaga Listrik sejalan dengan kebijakan manajemen kas terpusat PLN (Optimasi *Cash Management* PLN *Holding*).

The Quick Ratio is used to measure the Company's ability to pay obligations that must be fulfilled immediately with Current Assets outside of inventory, since inventory is considered not easy to be used to fulfill obligations that will be due soon. PLN NP's Quick Ratio value in 2025 was 458.06%, higher than in 2024, which was 388.96%. The increase was mainly driven by the low level of disbursement of receivables through the receipt of Electricity Sales bills in line with PLN's centralized cash management policy (Optimization of PLN Holding Cash Management).

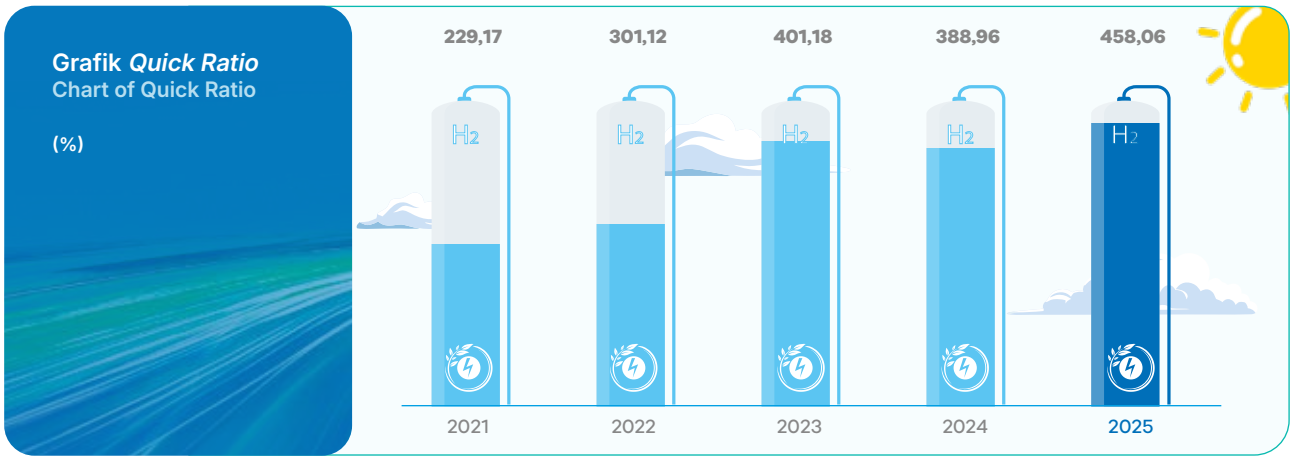

Current Ratio

Current Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo dengan Aset Lancar yang dimilikinya. Nilai *Current Ratio* PLN NP tahun 2025 adalah 489,09% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 adalah 424,35%. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan saldo utang usaha seiring dengan adanya peningkatan pemakaian volume kenaikan harga bahan bakar.

Current Ratio is used to measure the Company's ability to fulfill obligations that will be due soon with its Current Assets. In 2025, PLN NP's Current Ratio value was 489.09%, higher than in 2024, which was 424.35%. The increase was mainly driven by an increase in Trade Payables, in line with an increase in fuel consumption volume and prices.

Grafik *Current Ratio*
Chart of Current Ratio

(%)

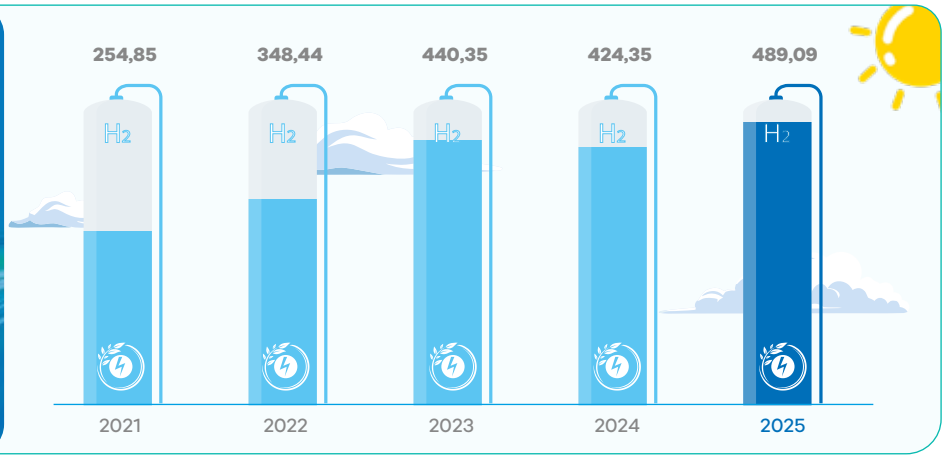

Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectibility

Kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung nilai *Collection Period*. Nilai *Collection Period* semakin kecil maka semakin baik, artinya kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat. Nilai *Collection Period* PLN NP tahun 2025 adalah 175 hari, yaitu lebih lambat dibandingkan tahun 2024 yaitu 156 hari. Peningkatan nilai *collection period* tersebut terutama dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pencairan piutang melalui penerimaan tagihan Penjualan Tenaga Listrik (PTL) menyesuaikan dengan kebijakan manajemen kas terpusat PLN (Optimasi *Cash Management* PLN Holding).

The Company's ability to collect receivables can be known by calculating the Collection Period value. The smaller the Collection Period value, the better, meaning that the Company's ability to collect receivables is getting faster. PLN NP's Collection Period value in 2025 was 175 days, slower than in 2024, which was 156 days. The increase in the collection period value was mainly due to the low level of disbursement of receivables through the receipt of Electricity Sales bills in line with PLN's centralized cash management policy (Optimization of PLN Holding Cash Management).

Grafik *Collection Period*
Chart of Collection Period

(hari) (day)

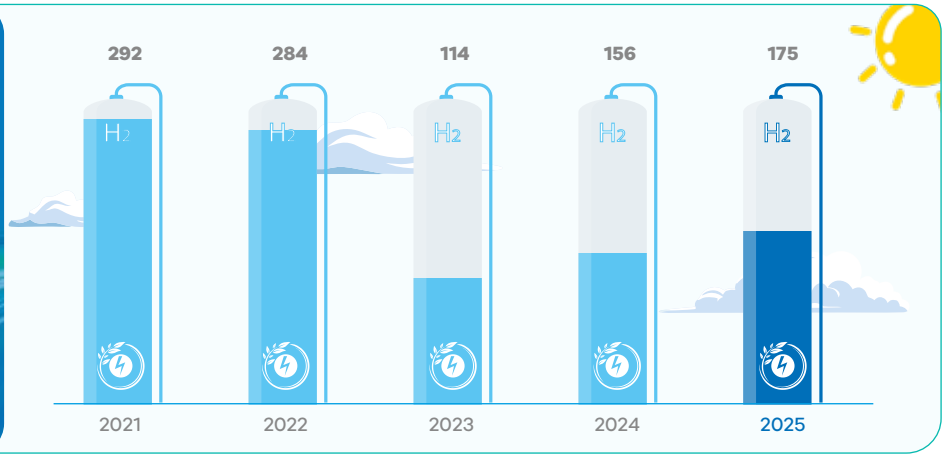

Kemampuan Menghasilkan Laba
Profitability

Rasio yang digunakan Perusahaan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

The ratio used by the Company to measure its ability to generate profits is the profitability ratio consisting of Return on Asset (ROA) and Return on Equity (ROE).

Tabel Rasio Profitabilitas (%)
Table of Profitability Ratio (%)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025
Return on Asset (ROA)	1,76	1,64	3,98	3,63	**3,65**
Return on Equity (ROE)	1,92	1,81	4,43	4,10	**4,14**

Return on Asset (ROA)

ROA digunakan untuk mengukur perolehan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas setiap nilai aset yang ada pada perusahaan. Nilai ROA PLN NP tahun 2025 adalah sebesar 3,65% lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yaitu 3,63%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya kenaikan Laba tahun 2025.

ROA is used to measure the acquisition of profits available for the owners of the Company on each asset value in the Company. The ROA value of PLN NP in 2025 was 3.65%, higher than in 2024, which was 3.63%. The increase was primarily driven by an increase in Profit in 2025.

Grafik ROA
Chart of ROA

(%)

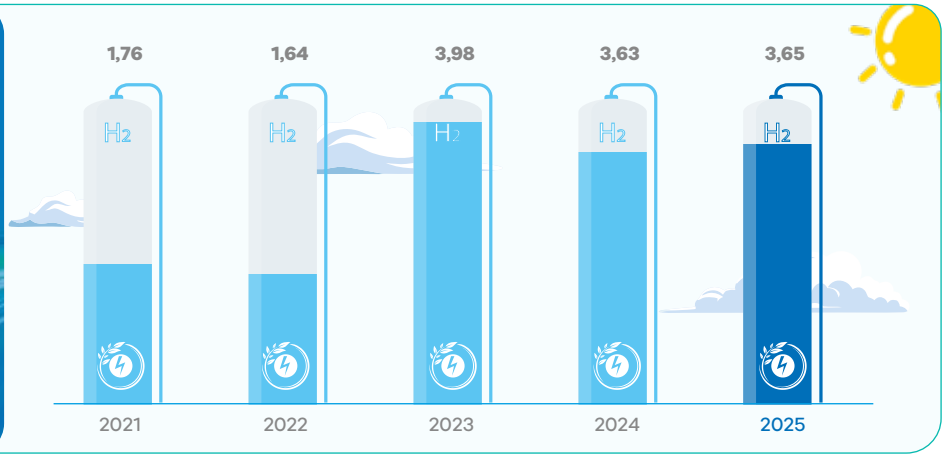

Return on Equity (ROE)

ROE digunakan untuk mengukur perolehan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. Nilai ROE PLN NP tahun 2025 adalah 4,14%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yaitu 4,10%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya kenaikan Laba tahun 2025.

ROE is used to measure the acquisition of profits available for the owners of the Company on the capital invested in the Company. In 2025, PLN NP's ROE value was 4.14%, higher than in 2024, which was 4.10%. The increase was mainly due to an increase in Profit in 2025.

Grafik ROE
Chart of ROE

(%)

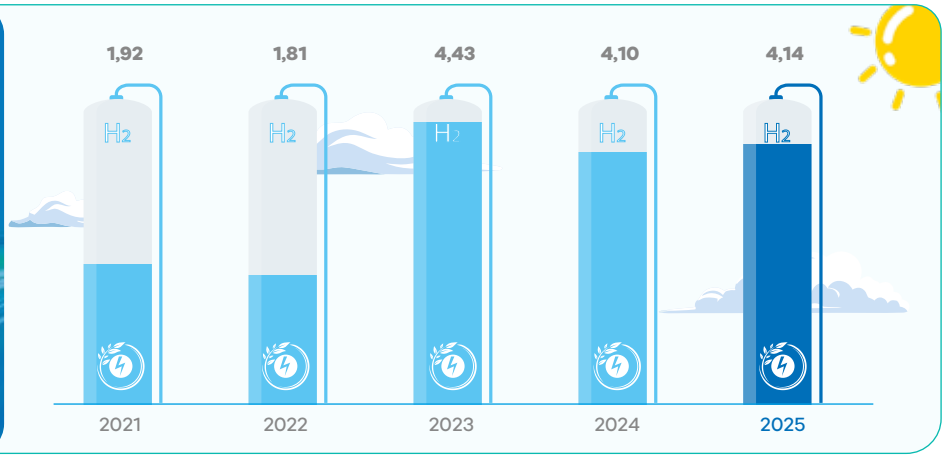

Rasio Aktivitas
Activity Ratio

Rasio aktivitas digunakan untuk memberikan gambaran aktivitas operasional yang dilakukan Perusahaan baik yang berkaitan dengan kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. *Inventory Turn Over* (ITO) dan Total *Asset Turn Over* (TATO) merupakan bagian rasio aktivitas.

Activity ratio is used to provide an overview of the operational activities conducted by the Company both related to sales, purchasing, and other activities. Inventory Turn Over (ITO) and Total Asset Turn Over (TATO) are part of the activity ratio.

Tabel Rasio Aktivitas
Table of Activity Ratio

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2022	2023	2024	2025
Inventory Turn Over (ITO)	hari days	17	13	19	19	**16**
Total Asset Turn Over (TATO)	kali times	0,17	0,16	0,27	0,26	**0,28**

Inventory Turn Over (ITO)

ITO menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari persediaan dan tendensi untuk adanya *overstock*. Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan.

ITO shows the ability of funds embedded in inventory to rotate in a certain period, or the liquidity of inventory and the tendency for overstock. The inventory turnover ratio measures the efficiency of inventory management to assess operational efficiency, which shows how well management controls the capital in inventory.

Nilai ITO PLN NP tahun 2025 adalah 16 hari yaitu lebih cepat dibandingkan tahun 2024 yaitu 19 hari. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pelaksanaan tata kelola dan perencanaan Material Gudang dan Bahan Bakar yang optimal.

In 2025, PLN NP's ITO value was 16 days, faster than in 2024, which was 19 days. It was mainly due to the implementation of optimal governance and planning for Warehouse Materials and Fuel.

Grafik ITO
Chart of ITO

(hari) (day)

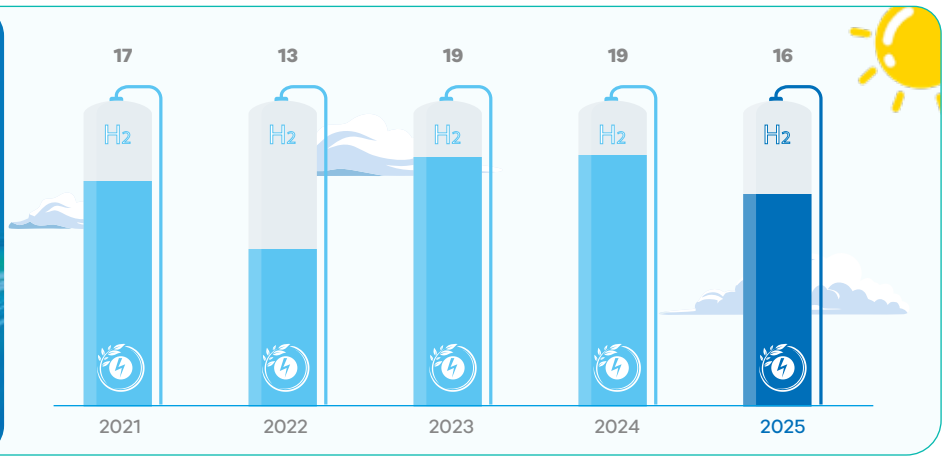

Total Asset Turn Over (TATO)

TATO merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aset diukur dari penjualan. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik yang berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aset dalam menghasilkan penjualan.

TATO is a ratio that describes asset turnover measured from sales. Therefore, the greater this ratio, the better, which means that assets can turn faster and achieve profits and show the more efficient use of overall assets in generating sales.

Nilai TATO PLN NP tahun 2025 adalah 0,28 kali lebih tinggi dibandingkan nilai TATO di tahun 2024 yaitu 0,26 kali. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan tahun 2025.

PLN NP's TATO value in 2025 was 0.28 times, higher than the TATO value in 2024, which was 0.26 times. It was mainly due to an increase in sales in 2025.

Grafik TATO
Chart of TATO

(kali) (times)

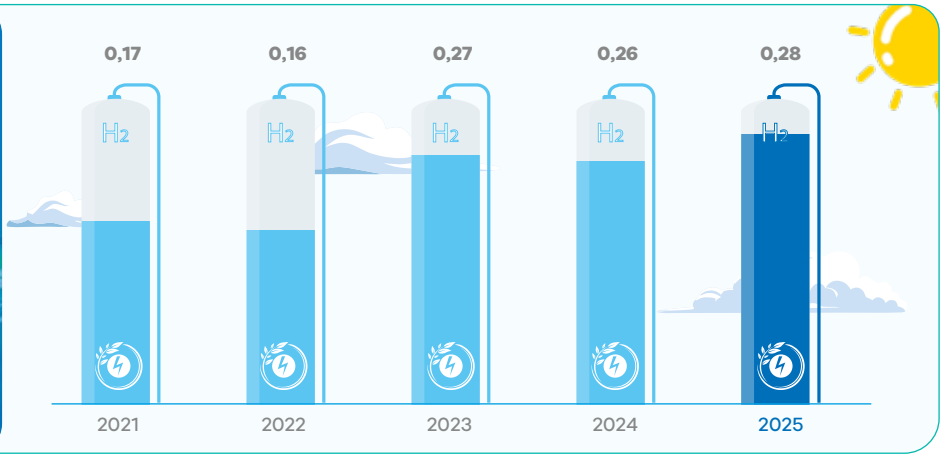

Struktur Modal
Capital Structure

Struktur modal adalah perbandingan antara liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan ekuitas terdiri dari saham disetor dan laba ditahan. PLN NP senantiasa mengelola struktur modal untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan memaksimalkan imbalan bagi Pemegang Saham.

Struktur Modal tahun 2025 didominasi oleh Ekuitas yaitu sebesar Rp315,15 triliun atau 88,11%, sedangkan Liabilitas sebesar Rp42,52 triliun, atau 11,89%.

Capital structure is the comparison between liabilities and equity. Liabilities consist of long-term and short-term, while equity consists of paid-in shares and retained earnings. PLN NP continuously manages its capital structure to support business sustainability and maximize returns for Shareholders.

In 2025, the Capital Structure was dominated by Equity, which amounted to Rp315.15 trillion or 88.11%, while Liabilities amounted to Rp42.52 trillion, or 11.89%.

Tabel Struktur Modal (Rp juta)
Table of Capital Structure (Rp million)

Uraian Description	2024		2025	
Liabilitas Liabilities	40.723.240	11,46%	**42.516.776**	**11,89%**
Ekuitas Equity	314.643.994	88,54%	**315.154.481**	**88,11%**
Aset Assets	**355.367.234**	**100,00%**	**357.671.257**	**100,00%**

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Management Policy on Capital Structure

Manajemen Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

The Company's Management manages capital risk to ensure that they will be able to continue as a going concern and to ensure the fulfillment of capital adequacy ratio limits. The Group's capital structure consists of parent shareholders' equity, which comprises capital stock, additional paid-in capital, and retained earnings.

Direksi secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Board of Directors periodically reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and the associated risks.

Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

The Company strives to minimize the cost of capital so as to maximize the Company's value. Therefore, the Group's policy in seeking funding will always take into account the financial risks that may arise in the future.

Dasar Pemilihan Kebijakan Struktur Modal
Basis for Capital Structure Policy Selection

Dewan Komisaris dan Direksi menelaah serta meninjau struktur modal dengan mempertimbangkan manajemen risiko. PLN NP menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh dari ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas.

The Board of Commissioners and the Board of Directors review the capital structure by considering risk management. PLN NP implements a risk management policy that aims to minimize the effect of uncertain financial risks on the Company's financial performance. The Company's financial risk management objectives and policies are to ensure that adequate financial resources are available for business operations and development and to manage market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk.

Dalam melaksanakan aktivitas manajemen risiko, PLN NP telah memiliki panduan dalam bentuk Pedoman Umum Manajemen Risiko. Pedoman ini mengatur keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko keuangan.

In carrying out risk management activities, PLN NP had guidelines in the form of Guidelines for General Risk Management. This guideline regulates the balance between business operational functions and financial risk management.

Kebijakan Dividen
Dividend Policy

PLN NP terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham melalui penerapan kebijakan dividen yang berkelanjutan. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta keseimbangan antara profitabilitas dan kebutuhan pengembangan usaha, Perusahaan menargetkan distribusi dividen yang optimal guna memberikan imbal hasil yang kompetitif kepada pemegang saham, sekaligus mendukung pendanaan ekspansi bisnis dan penguatan kinerja Perseroan di masa mendatang.

PLN NP continues to strengthen its commitment to creating added value for shareholders through a sustainable dividend policy. By continuing to prioritize the principle of prudence and balancing profitability with the need for business development, the Company targets optimal dividend distribution to provide competitive returns to shareholders, while also supporting business expansion funding and strengthening the Company's performance in the future.

Dasar Penentuan Kebijakan Dividen
Basis for Dividend Policy Determination

Kebijakan Dividen PLN NP diatur berdasarkan Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Power Pasal 26 tentang Penggunaan Laba yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
2. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif,
3. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu,
4. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi,
5. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan,
6. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan,

PLN NP's Dividend Policy is regulated based on the Articles of Association of PT PLN Nusantara Power Article 26 on the Use of Profit, which is as follows:

1. Dividend distribution is decided by the General Meeting of Shareholders,
2. Dividends may only be distributed if the Company has positive retained earnings,
3. Dividends that are not taken within 5 (five) years after being provided to be paid are deposited in a reserve fund specifically designated for that purpose,
4. Dividends in the special reserve fund can be claimed by the entitled Shareholders by submitting proof of their rights to the dividends, which can be received by the Company's Board of Directors on the condition that the collection is not in a lump sum and by paying administrative costs determined by the Board of Directors,
5. Dividends that have been included in the special reserve and not taken within a period of 10 (ten) years will become the rights of the Company,
6. The Company may distribute interim dividends prior to the end of the Company's financial year if requested by Shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the issued shares by taking into account the projected profit and financial capabilities of the Company,

7. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan,
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen nterim.

7. The distribution of interim dividends shall be determined based on the decision of the Board of Directors after obtaining the approval of the Board of Commissioners,
8. In the event that after the end of the financial year, the Company suffers a loss, the interim dividends that have been distributed must be returned by the Shareholders to the Company,
9. The Board of Directors and Board of Commissioners are jointly and severally responsible for the Company's losses if the Shareholders are unable to return the interim dividends.

Penetapan Pembagian Dividen
Determination of Dividend Distribution

Pembagian Dividen Tahun 2025 (Tahun Buku 2024)
Dividend Distribution in 2025 (2024 Financial Year)

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2025, RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Wakil Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan kepada Direktur Utama Perusahaan, No. 68943/MNJ.01.02/F01000000/2025 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2024 PT PLN Nusantara Power tanggal 15 Desember 2025, disampaikan bahwa Laba Bersih Tahun Buku 2024 sebesar Rp12,87 triliun ditetapkan 100% dibagi sebagai dividen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dividen untuk PT PLN (Persero) telah dilakukan *offset* Dividen dibayarkan dengan memperhitungkannya sebagai pelunasan Hutang Pembelian Tenaga Listrik (*Offset* Piutang Komponen A) Piutang Tenaga Listrik sebesar Rp12,86 triliun;
2. Dividen untuk pemegang saham minoritas sebesar Rp2.144 dibayarkan secara tunai.

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders dated June 19, 2025, the GMS authorized the major Shareholders to determine the Use of Net Income for the 2024 Financial Year.

Furthermore, based on the Letter of the President Director of PT PLN (Persero) as the Representative of the Company's Major Shareholders to the Company's President Director, No. 68943/MNJ.01.02/F01000000/2025 concerning Determination of the Use of Net Income for 2024 of PT PLN Nusantara Power dated December 15, 2025, it was conveyed that the Net Income for the 2024 Fiscal Year of Rp12.87 trillion was 100% divided as dividends with the following provisions:

1. The dividend for PT PLN (Persero) has been offset. The dividend paid has been accounted for as the settlement of the Electricity Purchase Debt (Offset of Component A Receivable) with an Electricity Receivable amounting to IDR 12.86 trillion;
2. Dividends for minority shareholders was Rp2,144 paid in cash.

Pembagian Dividen Tahun 2024 (Tahun Buku 2023)
Dividend Distribution in 2024 (2023 Financial Year)

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2024, RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Wakil Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan kepada Direktur Utama Perusahaan, No. 54735/MNJ.01.02/F01000000/2024-SR tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2023, Tantiem 2023 dan Penetapan Penghasilan 2024 Direksi/Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power tanggal 24 September 2024, disampaikan bahwa Laba Bersih Tahun Buku 2023 sebesar Rp13,64 triliun ditetapkan 100% dibagi sebagai dividen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dividen untuk PT PLN (Persero) telah dilakukan offset Dividen dengan Piutang Tenaga Listrik sebesar Rp13,64 triliun;
2. Dividen untuk pemegang saham minoritas sebesar Rp2.274 dibayarkan secara tunai.

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders dated June 28, 2024, the GMS authorized the major Shareholders to determine the Use of Net Income for the 2023 Financial Year.

Furthermore, based on the Letter of the President Director of PT PLN (Persero) as the Representative of the Company's Major Shareholders to the Company's President Director, No. 54735/MNJ.01.02/F01000000/2024-SR concerning Determination of the Use of Net Income for 2023, Tantiem 2023 and Determination of Income for 2024 of the Board of Directors/Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power dated September 24, 2024, it was conveyed that the Net Income for the 2023 Fiscal Year of Rp13.64 trillion was 100% divided as dividends with the following provisions:

1. Dividends for PT PLN (Persero) have been offset with Electricity Receivables of Rp13.64 trillion;
2. Dividends for minority shareholders was Rp2,274 paid in cash.

Rincian Pembagian Dividen
Details of Dividend Distribution

Tabel Rincian Pembagian Dividen
Table of Details of Dividend Distribution

Uraian Description	Satuan Unit	Tahun 2021 (Tahun Buku 2020) 2021 (2020 Financial Year)	Tahun 2022 (Tahun Buku 2021) 2022 (2021 Financial Year)	Tahun 2023 (Tahun Buku 2022) 2023 (2022 Financial Year)	Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) 2024 (2023 Financial Year)	Tahun 2025 (Tahun Buku 2024) 2025 (2024 Financial Year)
Laba Bersih Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Net Profit Attributable to Owners of the Parent	Rp miliar Rp billion	7.661	5.810	6.548	13.644	12.865
Dividen yang Dibagikan Distributed Dividend	Rp miliar Rp billion	7.661	5.810	6.548	13.644	12.865
Dividen per Lembar Dividend per Share	Rp	1.277	968	1.091	44,22	41,70
Dividend Pay Out Ratio	%	100	100	100	100	100

Uraian Description	Satuan Unit	Tahun 2021 (Tahun Buku 2020) 2021 (2020 Financial Year)	Tahun 2022 (Tahun Buku 2021) 2022 (2021 Financial Year)	Tahun 2023 (Tahun Buku 2022) 2023 (2022 Financial Year)	Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) 2024 (2023 Financial Year)	Tahun 2025 (Tahun Buku 2024) 2025 (2024 Financial Year)
Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement		31 Desember 2021 December 31, 2021	8 September 2022 September 8, 2022	10 Agustus 2023 August 10, 2023	24 September 2024 September 24, 2024	15 Desember 2025 December 15, 2025
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payment		3 Januari 2022 January 3, 2022	13 Oktober 2022 October 13, 2022	23 Agustus 2023 August 23, 2023	6 Oktober 2024 October 6, 2024	19 Desember 2025 December 19,2025

Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Wakil Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan kepada Direktur Utama Perusahaan, No. 68943/MNJ.01.02/F01000000/2025 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2024 PT PLN Nusantara Power tanggal 15 Desember 2025, disampaikan bahwa Laba Bersih Tahun Buku 2024 sebesar Rp12,87 triliun ditetapkan 100% dibagi sebagai dividen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dividen untuk PT PLN (Persero) telah dilakukan *offset* Dividen dibayarkan dengan memperhitungkannya sebagai pelunasan Hutang Pembelian Tenaga Listrik (*Offset* Piutang Komponen A) Piutang Tenaga Listrik sebesar Rp12,86 triliun;

2. Dividen untuk pemegang saham minoritas sebesar Rp2.144 dibayarkan secara tunai.

Furthermore, pursuant to the Letter of the President Director of PT PLN (Persero), acting as the Representative of the Majority Shareholder, addressed to the President Director of the Company No. 68943/MNJ.01.02/F01000000/2025 concerning the Determination of the Appropriation of PT PLN Nusantara Power's 2024 Net Profit dated 15 December 2025, the Company's net profit for the 2024 financial year amounting to Rp12.87 trillion was resolved to be distributed in full (100%) as dividends, with the following provisions:

1. The dividend attributable to PT PLN (Persero) was settled through an offset mechanism, whereby the dividend payment was recognized as settlement of the Electricity Purchase Liability (Offset of Component A Electricity Receivables) amounting to Rp12.86 trillion.
2. The dividend attributable to minority shareholders amounting to Rp2,144 was paid in cash.

Grafik Dividen yang Dibagikan
Chart of Distributed Dividend

(Rp miliar) (Rp billion)

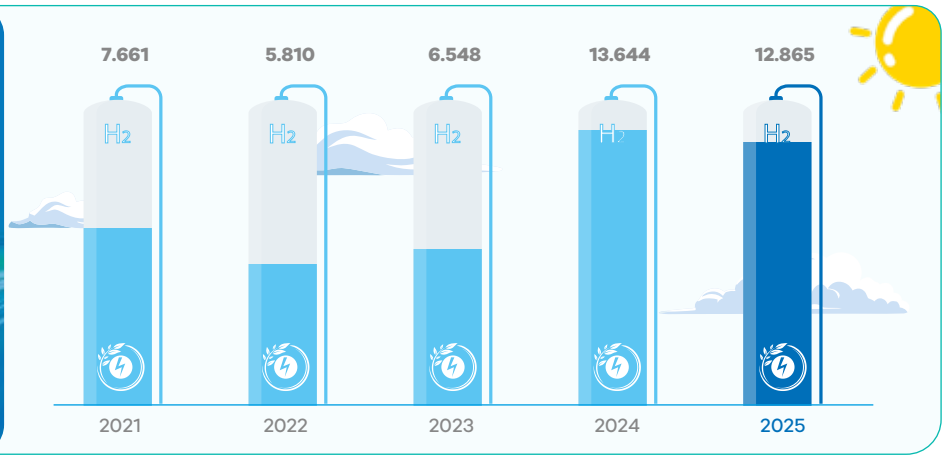

Aspek Perpajakan
Taxation Aspect

PLN NP senantiasa memperkuat kepatuhan dan tata kelola perpajakan secara konsisten sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan. Implementasi kewajiban perpajakan dilakukan secara tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai wujud kontribusi Perusahaan dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

PLN NP consistently strengthens tax compliance and governance as part of the Company's commitment to maintaining transparency, accountability, and integrity in financial management. The implementation of tax obligations is conducted in a timely manner and in accordance with applicable laws and regulations, as a manifestation of the Company's contribution to supporting sustainable national development.

Kebijakan Pengelolaan Perpajakan
Tax Management Policy

Peraturan perpajakan senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan kebijakan pemerintah. Perusahaan berkomitmen tinggi dalam melaksanakan kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawab dan konsekuensi dari kegiatan operasional Perusahaan. Untuk itu dalam pengelolaan perpajakan, Perusahaan selalu memastikan *compliance* terhadap peraturan perpajakan dengan mengaplikasikan ketentuan perpajakan dalam peraturan internal Perusahaan, pengembangan teknologi dan sistem yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan sistem perpajakan, untuk mengoptimalkan pengelolaan perpajakan.

Tax regulations are constantly changing and developing in line with government policies. The Company is highly committed to carrying out the obligation to comply with and carry out tax obligations, which are the responsibility and consequence of the Company's operational activities. For this reason, in managing taxation, the Company always ensures compliance with tax regulations by applying tax provisions in the Company's internal regulations, developing technology and systems that are integrated with the banking system and tax system to optimize tax management.

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kegiatan perpajakan, Perusahaan mengeluarkan kebijakan berupa:

- Edaran Direksi PLN NP No. 0001.E/012/DIR/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan PT PLN Nusantara Power.

- Selain itu, terdapat pedoman lain yang tercantum pada Edaran Direksi PLN NP No. 0045.K/012/DIR/2024 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Kewenangan Verifikasi dan Persetujuan Pembayaran, Kewenangan Penagihan dan Verifikasi Penerimaan, Kewenangan Administrasi L/C serta Kewenangan Pelaporan Pajak.

To optimize and enhance the effectiveness of tax activities, the Company has issued a policy in the form of:

- Circular of the PLN NP Board of Directors No. 0001.E/012/DIR/2023 Regarding Technical Guidelines for the Management of Calculation, Deposit, and Reporting of Value Added Tax and Income Tax for PT PLN Nusantara Power.
- Additionally, other guidelines are outlined in the PLN NP Board of Directors' Circular No. 0045.K/012/DIR/2024, which regulates the Technical Guidelines for Verification and Payment Approval Authority, Billing and Receipt Verification Authority, L/C Administration Authority, and Tax Reporting Authority.

Edaran Direksi tersebut menjadi pedoman internal dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perwujudan tata kelola perusahaan yang baik, PLN NP secara konsisten memperkuat kepatuhan dalam pengelolaan perpajakan. Kepatuhan ini dipandang sebagai pilar utama dalam menjaga transparansi dan integritas pengelolaan keuangan Perusahaan, serta menjadi bentuk nyata kontribusi Perusahaan kepada negara. Sepanjang tahun 2025, PLN NP menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, PLN NP telah menetapkan strategi perpajakan pada tahun 2025 yaitu:

1. Melakukan *improvement* dalam sistem perpajakan dengan mengintegrasikan aplikasi keuangan dengan aplikasi PJAP dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kegiatan perpajakan; serta
2. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh unit dan bidang terkait mengenai ketentuan & sistem aplikasi perpajakan PLN NP sebagai wujud komitmen di bidang perpajakan. Strategi ini telah disetujui oleh manajemen dan dipantau serta dievaluasi secara berkala setiap bulan melalui laporan manajemen yang dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

The Board of Directors' Circular serves as an internal guideline in fulfilling tax obligations in accordance with the applicable laws and regulations.

As a manifestation of good corporate governance, PLN NP consistently strengthens compliance in tax management. This compliance is considered a key pillar in maintaining the transparency and integrity of the Company's financial management, as well as an actual representation of the Company's contribution to the state. Throughout 2025, PLN NP fulfilled its tax obligations in a timely manner and in accordance with the applicable laws and regulations. To support this, PLN NP established a tax strategy in 2025, namely:

1. Making improvements in the tax system by integrating financial applications with PJAP applications to optimize and enhance the effectiveness of tax activities; and
2. Providing education and socialization to all units and related divisions regarding the regulations & application system of PLN NP taxation as a manifestation of commitment in the field of taxation. This strategy has been approved by management and is monitored and evaluated periodically every month through management reports submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners.

Aturan Model Pilar Dua *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD)

Pillar Two Model Rules of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. PMK-136 Tahun 2024 (PMK-136) telah diundangkan di Indonesia, yurisdiksi dimana tempat Perusahaan didirikan, dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Perusahaan berada dalam cakupan ketentuan model OECD Pilar Dua dan menerapkan pengecualian untuk pengakuan serta pengungkapan informasi terkait aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berhubungan dengan pajak penghasilan Pilar Dua mulai 1 Januari 2025.

Entitas induk utama (UPE) dari Perusahaan berada dalam lingkup aturan model OECD Pilar Dua dan telah menerapkan pengecualian untuk mengakui dan mengungkapkan informasi tentang aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan

Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. PMK-136 of 2024 (PMK-136) has been enacted in Indonesia, the jurisdiction where the Company is established, and will take effect on January 1, 2025.

The Company falls within the scope of the OECD Pillar Two model provisions and applies an exemption for the recognition and disclosure of information related to deferred tax assets and liabilities associated with Pillar Two income tax starting January 1, 2025.

The ultimate parent entity (UPE) of the Company falls within the scope of the OECD Pillar Two model rules and has implemented an exemption to recognize and disclose information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income tax starting from

pajak penghasilan Pilar Dua mulai 1 Januari 2025. Undang-undang Pilar Dua telah diundangkan atau hampir diundangkan di beberapa yurisdiksi tempat UPE beroperasi. Undang-undang tersebut mulai berlaku untuk tahun keuangan Perusahaan yang berakhir setelah 31 Desember 2024. UPE tunduk pada undang-undang yang telah diundangkan atau hampir diundangkan tersebut dan telah melakukan penilaian terhadap potensi eksposurnya terhadap pajak penghasilan Pilar Dua.

January 1, 2025. Pillar Two legislation has been enacted or nearly enacted in several jurisdictions where the UPE operates. The law will come into effect for the Company's financial year ending after December 31, 2024. UPE is subject to the enacted or nearly enacted laws and has assessed its potential exposure to Pillar Two income tax.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, tingkat pajak efektif di seluruh yurisdiksi tempat Perusahaan beroperasi berada di atas 15%. Oleh karena itu, tidak diperlukan pajak tambahan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Based on the assessment results, the effective tax rate across all jurisdictions where the Company operates is above 15%. Therefore, no additional tax is required for the year ending December 31, 2025.

Setoran Pajak
Tax Payment

Sebagai wajib pajak yang patuh, Perusahaan secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas berbagai jenis pajak seperti PPN, PPh Unifikasi yang meliputi PPh Pasal 4 (2), 15, 22, 23, 25 dan 26; PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi; dan PPh Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama satu tahun pajak.

As a compliant taxpayer, the Company actively participates in withholding/collecting, depositing, and reporting on various types of taxes such as VAT, Unified Income Tax which includes Income Tax Articles 4 (2), 15, 22, 23, 25, and 26; Income Tax Article 21 on income received by individual taxpayers; and Corporate Income Tax on income received or earned by corporate taxpayers during one tax year.

Jumlah setoran pajak tahun 2025 sebesar Rp4,42 triliun, yaitu meningkat 7,76% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,10 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja operasional Perusahaan serta optimalisasi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

The amount of tax deposits in 2025 amounted to Rp4.42 trillion, an increase of 7.76% compared to the 2024 figure of Rp4.10 trillion. This increase is primarily driven by improvements in the Company's operational performance and enhanced compliance with tax obligations.

Tabel Setoran Pajak (Rp miliar)
Table of Tax Payment (Rp billion)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	177.722	143.155	456.256	513.066	**526.290**	2,58	13.224
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	58.252	55.566	210.481	168.708	**163.038**	(3,36)	(5.670)
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 paragraph 2	21.982	12.960	22.864	24.353	**22.449**	(7,82)	(1.904)
PPh Pasal 15 Income Tax Article 15	591	-	19.938	24.395	**18.926**	(22,42)	(5.469)
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	63.084	76.632	348.730	506.458	**681.885**	34,64	175.427

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	0	0	0	0	**36.298**	-	36.298
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	63	18	19	83	**96**	15,53	13
PPh Badan Corporate Income Tax	0	0	0	0	**62.225**	-	62.225
PBB Land and Building Tax	18.810	25.649	39.405	67.908	**65.050**	(4,21)	(2.858)
PPN Masukan Input VAT	785.104	915.406	2.941.970	2.795.035	**2.841.997**	1,68	46.963
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Payment	**1.125.609**	**1.229.386**	**4.039.663**	**4.100.005**	**4.418.254**	**7,76**	**318.249**

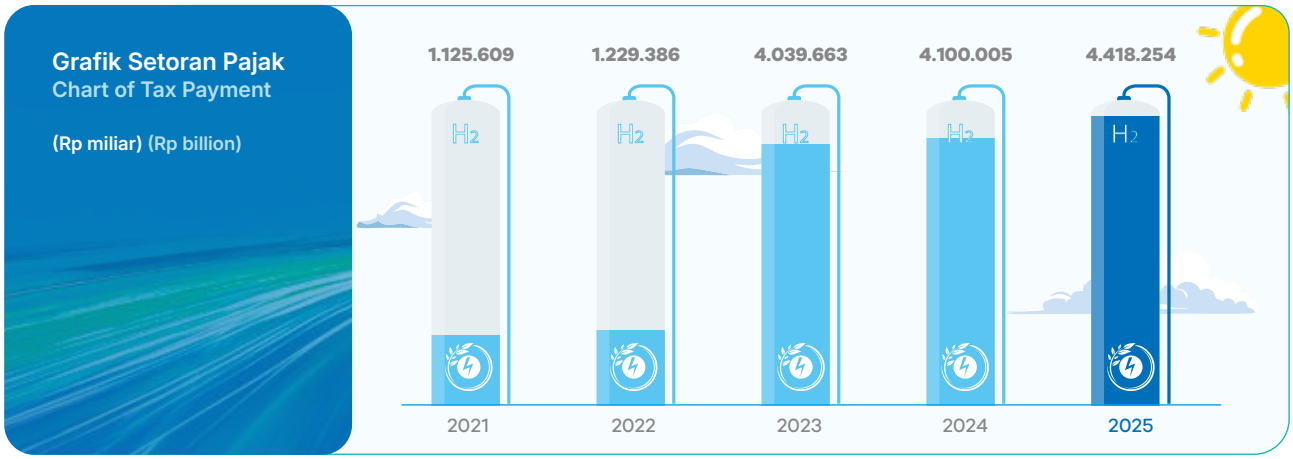

Pajak yang dipungut oleh pihak lain sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp1.129,14 miliar meningkat 99,09% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp567,16 miliar.

Taxes collected by other parties until the end of 2025 amounted to Rp1,129.14 billion, an increase of 99.09% compared to 2024 of Rp567.16 billion.

Tabel Penerimaan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain (Rp miliar)
Table of Tax Revenues Collected by Other Parties (Rp billion)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	202,91	126,09	289,93	289,93	**556,49**	93,27	268,56
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	40,83	23,16	4,33	4,33	**10,67**	146,45	6,34
Jumlah Pungutan Pajak Total Tax Collection	**243,74**	**149,25**	**292,26**	**292,26**	**567,16**	**94,06**	**274,90**

Aspek Kepatuhan terkait Perpajakan
Compliance Aspects related to Taxation

PLN NP berkomitmen mengedepankan kepatuhan dan melaksanakan kegiatan perpajakan secara optimal, tertib, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku demi meminimalkan risiko sanksi serta teguran dari otoritas perpajakan. Pada tahun 2025, PLN NP tidak menerima teguran maupun sanksi administratif dari otoritas perpajakan. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi dan konsistensi Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang relevan.

PLN NP is committed to prioritizing compliance and conducting tax activities optimally, orderly, and in accordance with applicable tax provisions to minimize the risk of sanctions and reprimands from tax authorities. In 2025, PLN NP did not receive any reprimands or administrative sanctions from tax authorities. It reflects the high level of compliance and consistency of the Company in fulfilling all tax obligations in a timely, accurate manner, and in accordance with the applicable and relevant laws and regulations.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Goods Investment

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)
Power Purchase Agreement (PPA)

Perusahaan memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

The Company has several PPAs with PLN. Under these agreements, PLN pays for electricity supply provided by the Company at an amount determined based on a payment formula. The payment includes the components of capacity, energy, operational and maintenance costs, which depend on the level of energy supply as well as other variables determined in the agreement.

Berdasarkan Keputusan Direksi PLN No. 0357.K/DIR/2022 tanggal 28 November 2022 tentang tindak lanjut pembentukan *subholding* PLN Masa/Tahap *Legal End-State*, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sirkuler Perusahaan tanggal 21 September 2022 dan 30 Desember 2022, terdapat perubahan dan pernyataan Kembali atas PJBTL antara Perusahaan dan PLN.

Based on PLN Board of Directors Decision No. 0357.K/DIR/2022 dated November 28, 2022, regarding the follow-up on the establishment of PLN subholding Legal End-State Phase, and the resolutions of the Company's circular General Meeting of Shareholders on September 21, 2022, and December 30, 2022, there are changes and restatements regarding the PPA between the Company and PLN.

Pada tanggal 30 Desember 2022, PLN dan Perusahaan menandatangani 22 amendemen dan pernyataan kembali PJBTL yang terdiri dari: 5 atas wilayah Jawa, Madura, Bali, 7 atas wilayah Sumatra, 4 atas wilayah Kalimantan, 1 atas wilayah Maluku dan 5 atas wilayah Sulawesi. Amendemen dan pernyataan kembali PJBTL tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dengan periode kontrak dari tahun 2023 sampai dengan 2032.

On December 30, 2022, PLN and the Company signed 22 amendments and restatements of PPA consisting of: five for the Java, Madura, Bali region; seven for the Sumatera region; four for the Kalimantan region; one for the Maluku region; and five for the Sulawesi region. The amendments and restatements of the PPA will take effect on January 1, 2023, with a contract period from 2023 to 2032.

Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan
Operation and Maintenance Agreement

Nama Pihak dan Tujuan Perikatan
Name of the Party and Purposes of Commitment

Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengelolaan Aset (AMC) yang terdiri atas:

1. Pengelolaan Aset PLTU Air Anyir Bangka dan PLTU Suge Belitung antara Perusahaan dan PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk memperpanjang durasi perjanjian, dimana perjanjian telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2028.
2. Pengelolaan Aset CNG *Plant* Gresik antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (PLN JBTBN) yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk memperpanjang durasi perjanjian, dimana perjanjian telah diperpanjang sampai dengan Perusahaan ditetapkan sebagai pemilik aset.
3. Pengelolaan Aset PLTU Bolok dan PLTU Ropa antara Perusahaan dan PLN JBTBN yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk memperpanjang durasi perjanjian, dimana perjanjian telah diperpanjang sampai dengan Perusahaan ditetapkan sebagai pemilik aset.

The Company and PLN signed a Master Agreement on Plant Asset Management. This agreement was followed up with an Asset Management Agreement (AMC) consisting of:

1. Asset Management of Air Anyir Bangka CFPP and Suge Belitung CFPP between the Company and the Parent Unit of PLN Bangka Belitung Region which has undergone several changes to extend the duration of the agreement, where the agreement has been extended until December 31, 2028.
2. The management of the Gresik CNG Plant assets between the Company and PLN Regional East Java, Bali, and Nusa Tenggara (PLN JBTBN) has undergone several changes to extend the duration of the agreement, where the agreement has been extended until the Company is designated as the asset owner.
3. Asset Management of Bolok CFPP and Ropa CFPP between the Company and PLN JBTBN has undergone several changes to extend the duration of the agreement, where the agreement has been extended until the Company is determined as the asset owner.

Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Operasi dan Jasa Pemeliharaan yang terdiri atas:

1. Perjanjian PLTU Tidore (2 × 7 MW) tahap *Supporting* yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2026 atau sampai dengan terjadinya transfer Aset PLTU Tidore (mana yang terjadi lebih dahulu).
2. Perjanjian PLTA Ampel Gading (2 × 5 MW) tahap *Performance Based* yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
3. Perjanjian PLTU Sambelia (2 × 50 MW) tahap *Supporting Based* yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

The Company and PLN signed an Operation and Maintenance Services Agreement consisting of:

1. The Tidore CFPP (2 × 7 MW) Supporting stage is valid until December 31, 2026, or until the transfer of Tidore CFPP assets occurs (whichever comes first).
2. The Ampel Gading HPP Agreement (2 × 5 MW) Performance-Based stage, valid until December 31, 2026.
3. The Sambelia CFPP agreement (2 × 50 MW) Supporting-Based stage is valid until December 31, 2026.

Perusahaan dan PLN menandatangani Amandemen II Perjanjian Induk Jasa Pengelolaan Pembangkit yang akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2028. Perjanjian tersebut mencakup pengelolaan beberapa unit pembangkit milik PLN yang berada di wilayah Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

The Company and PLN signed the Second Amendment of the Master Agreement on Power Plant Management Services valid until December 31, 2028. The agreement covers the management of several power plant units owned by PLN located in Sumatera, Kalimantan, and Sulawesi.

Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Jasa Pengelolaan Pembangkit tahap *Performance Based* yang akan berlaku sampai dengan Perusahaan ditetapkan menjadi pemilik aset. Perjanjian tersebut mencakup pengelolaan beberapa unit pembangkit milik PLN yang berada di wilayah Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

The Company and PLN signed a Master Agreement for Power Plant Management Services at the Performance Based stage which is valid until the Company is determined to be the asset owner. The agreement covers the management of several power plant units owned by PLN in the Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua regions.

Sumber Dana
Source of Funds

Pada tahun 2025, PLN NP telah menyediakan sumber dana untuk memenuhi perjanjian pengadaan operasi dan pemeliharaan sebesar Rp5,35 triliun yang berasal dari dana internal perusahaan.

In 2025, PLN NP provided a source of funds to fulfill the operation and maintenance procurement agreement of Rp5.35 trillion, which came from the Company's internal funds.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi
Denominated Currency

Sampai dengan 31 Desember 2025, perincian ikatan material untuk pengadaan operasi dan pemeliharaan berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

Until December 31, 2025, the details of material commitments for operation and maintenance based on currency were Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang
Currency Risk Protection Measures

Dalam hal perikatan pengadaan dan pemeliharaan, PLN NP tidak menggunakan mata uang asing sehingga tidak dilakukan langkah perlindungan risiko dari posisi mata uang asing terkait.

In terms of procurement and maintenance commitments, PLN NP does not use foreign currencies, so that no risk protection measures of the related foreign currency positions.

Pengadaan Bahan Bakar
Fuel Procurement

Sepanjang tahun 2025, PLN NP menjalin sejumlah perikatan material terkait investasi barang modal dalam bentuk pengadaan bahan bakar dengan berbagai pemasok strategis sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Throughout 2025, PLN NP entered into several material commitments related to investment in capital goods in the form of fuel procurement with various strategic suppliers as described below.

Nama Pihak dan Tujuan Perikatan
Name of the Party and Purposes of Commitment

Pengadaan bahan bakar meliputi kontrak pengadaan batubara, gas, serta bahan bakar minyak. Inisiatif tersebut ditujukan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar berkualitas tinggi, dengan tetap

Fuel procurement includes coal, gas, and fuel oil procurement contracts. The initiative is aimed at ensuring the availability of high-quality fuel supply while still paying attention to capital cost efficiency

memperhatikan aspek efisiensi biaya modal. Strategi ini diimplementasikan guna mendukung keandalan operasional pembangkit tenaga listrik secara optimal. Adapun bentuk-bentuk perikatan pengadaan bahan bakar yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

aspects. This strategy is implemented to support the optimal operational reliability of the power plant. The forms of fuel procurement commitments include the following:

Perjanjian Pengadaan Batubara
Coal Procurement Agreement

Pemasok Supplier	Nomor Kontrak Contract Number	Kuantitas (Metric Ton) Quantity (Metric Ton)	Periode Period
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1154.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2025	258.650.000	Desember 2012 - Maret 2032 December 2012 – March 2022
	1217.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2025	2.445.000	Desember 2023 - Desember 2026 December 2023 – December 2026
	2754.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2024	14.568.000	September 2004 - Desember 2031 September 2004 – December 2031
Konsorsium PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa Tbk Consortium of PT Arutmin Indonesia & PT Darma Henwa Tbk	1653.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2024	121.980.000	Agustus 2019 - Agustus 2027 August 2019 - August 2027
Konsorsium PLN Batubara Niaga Sumber Tambang PT Arutmin via PT Jhonlin Group Consortium of PLN Batubara Niaga Sumber Tambang PT Arutmin via PT Jhonlin Group	0719.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2025	1.070.000	Februari 2025 - Desember 2025*) February 2025 - December 2025*)
Konsorsium PT Dwi Guna Laksana dan PT Borneo Indobara Consortium of PT Dwi Guna Laksana and PT Borneo Indobara	2149.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2025	1.890.000	Desember 2009 - Desember 2033 December 2009 - December 2033
Konsorsium PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk dan PT Borneo Indonesia Consortium of PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk and PT Borneo Indonesia	1822.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2024	10.000.000	April 2022 - April 2027 April 2022 - April 2027
PT Indexim Coalindo	1972.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2023	6.100.000	April 2018 - Maret 2028 April 2018 - Maret 2028
Konsorsium PT Antareja Energi Asia PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua dan PT Berkat Murah Energi Consortium of PT Global Energi Lestari and PT Tempirai Energi Resource	0709.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2024	10.100.000	Januari 2022 - Januari 2027 January 2022 - January 2027
PT Bhumi Rantau Energi	2054.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2025	1.597.500	Juni 2024 - Desember 2026 June 2024 - December 2026
	2055.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2025	590.000	Juni 2024 - Desember 2026 June 2024 - December 2026
Konsorsium PT Global Energi Lestari dan PT Tempirai Energi Resource Consortium of PT Global Energi Lestari, PT Era Perkasa Mining, and PT Quasar Inti Nusantara	0092.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2026	5.927.000	Januari 2022 - Desember 2026 January 2022 - December 2026

Pemasok Supplier	Nomor Kontrak Contract Number	Kuantitas (Metric Ton) Quantity (Metric Ton)	Periode Period
Konsorsium PT Global Energi Lestari dan PT Tempirai Energi Resource Consortium of PT Global Energi Lestari, PT Era Perkasa Mining, and PT Quasar Inti Nusantara	3718.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2025	11.075.000	Januari 2022 - Januari 2027 January 2022 - January 2027
PT Bara Tabang	3737.Amd/EPI.01.01/ PLNEPI0100/2025	2.000.000	January 2024 - Desember 2026 January 2024 - December 2026

* Masih dalam tahap perpanjangan

*Currently in renewal process

Selama tahun 2025, harga dasar batubara di tempat penyerahan *stockpile unit* berkisar antara Rp621.498 (nilai penuh) sampai dengan Rp1.422.332 (nilai penuh) per ton, yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature*, *Hardgrove Grindability Index* dan ukuran batubara.

In 2025, the stockpile price of coal ranges from Rp621,498 (full amount) to Rp1,422,332 (full amount) per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, Ash Fusion Temperature, Hardgrove Grindability Index and coal size.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan ditinjau secara periodik setiap 6 (enam) bulanan atau sewaktu-waktu untuk disesuaikan dengan indeks harga batubara acuan.

In accordance with the Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Regulation No. 11 of 2020 concerning the Third Amendment to the Minister of EMR Regulation No. 7 of 2017 on the Procedures for Determining Sales Benchmark Prices for Metal Minerals and Coal, all the basic contract prices above will be reviewed periodically every 6 (six) months or at any time to adjust to the reference coal price index.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

In connection with the coal sale and purchase agreement, the supplier is required to submit collateral.

Perjanjian Pengadaan Gas
Gas Procurement Agreement

Sektor Sector	Pemasok Supplier	Nomor Kontrak Number of Contract	Periode Period	Satuan Unit	Jumlah Total
Gresik	PT Saka Energi Indonesia	2214.Amd/EPI.01.02/ PLN0100/2023	2022 - 2026	TBTU	44,3
Gresik	PT Petrogas Jatim Utama	ZEPC01.PJ/061/2026	2026 - 2027	BBTU	12.385
Gresik	PT PLN Energi Primer Indonesia	ZZB012.PJ/061/2024	2024 - 2027	BBTU	36.510
Gresik	PGN Jambaran Tiung Biru	0670.PJ/EPI.01.02/DIRUT/2017	2022 - 2035	BBTU	511.000
Gresik	PHE WMO, Kodeco Energy Co., Ltd., dan PT Mandiri Madura Barat	0002.Pj/EPI.01.02/ PLNEPI0100/2025	2023 - 2027	BBTU	28.412

Sektor Sector	Pemasok Supplier	Nomor Kontrak Number of Contract	Periode Period	Satuan Unit	Jumlah Total
Gorontalo	PT PLN Energi Primer Indonesia	ZEPC02.PJ/061/2025	2025 - 2025*)	Kargo	-
Muara Tawar	PT Pertamina EP	0021.Pj/EPI.01.02/ PLNEPI0100/2024	2024 - 2026	MMSCF	12.096
Muara Karang	PT PLN Energi Primer Indonesia	ZZB013.PJ/EP/061/2024	2024 - 2030	BBTU	17.076
Muara Karang, Muara Tawar, Arun dan and Belawan	PT PLN Energi Primer Indonesia	ZEPC01.PJ/061/2025	2025 - 2027	Kargo	-
Pekanbaru	PT PLN Energi Primer Indonesia	ZZB004.PJ/061/2024	2024 - 2028	BBTU	8.375
Kaltimra	PT Pertamina EP	ZEPC06.PJ/061/2025	2023 - 2027	BBTU	Sesuai kebutuhan As needed
Kalselteng	Ophir Indonesia (Bangkanai) Limited	-	2016 - 2033	BBTU	130.000
Sengkang	PT PLN Energi Primer Indonesia	ZZB008.PJ/EP/061/2024	2024 - 2027	BBTU	47.100

* Masih dalam tahap perpanjangan

*Currently in renewal process

Harga realisasi pembelian gas pipa dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) pada titik penyerahan di tahun 2025 berkisar antara US$4,94 sampai dengan US$23 dan Rp105.294,96 per *Million British Thermal Unit* (MMBTU)/ *Million Standard Cubic Feet* (MSCF).

The realized purchase price of pipeline gas at the delivery point in 2025 ranges from US$4.94 to US$23 and Rp105,294.96 per Million British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MSCF).

Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar Minyak
Fuel Procurement Agreement

Pada tahun 2024 dan 2025, pembelian volume BBM akan menggunakan formula harga dan kuantitas yang diatur dalam beberapa Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak dengan Patra Niaga yang diperbarui setiap tiga bulan.

In 2024 and 2025, the purchase volume of fuel will use a price and quantity formula regulated in several Fuel Purchase Agreements with Patra Niaga, which will be updated every three months.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo utang usaha atas pembelian bahan bakar kepada Patra Niaga adalah masingmasing sebesar Rp1,16 triliun dan Rp1,13 triliun.

As of December 31, 2025, and 2024, the trade payable balance for fuel purchases from Patra Niaga was Rp1.16 trillion and Rp1.13 trillion, respectively.

Sumber Dana
Source of Funds

Pada tahun 2025, PLN NP telah menyediakan sumber dana untuk memenuhi perjanjian pengadaan bahan bakar sebesar Rp65,82 triliun yang berasal dari dana internal perusahaan.

In 2025, PLN NP provided funding sources to fulfill fuel procurement agreements amounting to Rp65.82 trillion, which came from the Company's internal funds.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi
Denominated Currency

Sampai dengan 31 Desember 2025, perincian ikatan material untuk pengadaan bahan bakar berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

Until December 31, 2025, the details of material commitments for fuel procurement based on currency were Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang
Currency Risk Protection Measures

Perusahaan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang didenominasi dalam mata uang asing, sehingga Perusahaan terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Untuk menghindari risiko terkait beberapa perikatan pengadaan bahan bakar dengan para pemasok termasuk didalamnya risiko keuangan dan risiko pasar (risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko (mitigasi risiko). Dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh dari ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

The Company has exposure to exchange rate fluctuations arising from transactions with customers and suppliers that are denominated in foreign currencies. Thus, the Company is exposed to foreign exchange rate fluctuations. To avoid risks related to several fuel procurement commitments with suppliers, including financial and market risks (foreign currency risk and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk, Management reviews and issues policies to manage each risk (risk mitigation) by implementing risk management policies that aim to minimize the effect of uncertain financial risks on the Company's financial performance.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan ditinjau secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang USD, dan harga dasar bahan bakar minyak HSD untuk industri. Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

In accordance with the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 07 of 2017 concerning Procedures for Determining Sales Benchmark Prices of Metal Minerals and Coal, all of the above basic contract prices will be reviewed periodically every 3 (three) months to be adjusted to the Rupiah exchange rate against the US$, and the basic price of HSD fuel oil for industry. In connection with the coal sale and purchase agreement, the supplier is required to assure guarantees.

Perolehan Barang Modal
Acquisition of Capital Expenditures

Nama Pihak dan Tujuan Perikatan
Name of the Party and Purposes of Commitment

Pada tanggal 19 Desember 2017, Perusahaan telah menandatangani perjanjian novasi dengan PLN dan Konsorsium Doosan Enerbility Co. Ltd dan HK sehubungan dengan Perjanjian Kontrak No. 0125.PJ/DAN.02.01/DIR/2017, tertanggal 29 Maret 2017, untuk proyek *add-on* PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3, dan 4.

On December 19, 2017, the Company has signed a novation agreement with PLN, Consortium of Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd., and PT Hutama Karya (Persero) in connection with Contract Agreement No. 0125.PJ/DAN.02.01/ DIR/2017, dated March 29, 2017, for the add-on project of Muara

Perjanjian tersebut terakhir diubah yaitu Addendum IV, pada tanggal 31 Agustus 2023 terkait kerja tambah untuk *switchyard* serta kerja tambah untuk *transducer* blok 2.

Tawar Block 2, 3, and 4 CCPP. The agreement was last amended, namely Addendum IV, on August 31, 2023, related to additional work for 500 kV switchyard diameters 6, 11, and 12 and additional work for transducer block 2.

Pada tanggal 29 Maret 2023, Perusahaan dengan Konsorsium Mitsubishi Corporation dan PT Wijaya Karya telah menandatangani kesepakatan bersama penerimaan pengalihan kontrak No. 1255.PJ/DAN.02.01/DIR/2016, tertanggal 26 Agustus 2016 terkait proyek PLTGU Muara Karang sebagai akibat pembentukan subholding. Perjanjian tersebut terakhir diubah yaitu Addendum IV, pada tanggal 12 Juni 2023 terkait perubahan pihak dalam kontrak dan nilai kontrak dikarenakan perubahan PPN, serta penambahan ketentuan tentang klaim biaya *overhead*.

On March 29, 2023, the Company and the Consortium of Mitsubishi Corporation and PT Wijaya Karya (Persero) have signed a joint agreement to accept the transfer of contract No.1255.PJ/DAN.02.01/DIR/2016, dated August 26, 2016, related to the Muara Karang CCPP project as a result of the formation of a sub-holding. The agreement was last amended, namely Addendum IV, on June 12, 2023, related to changes in the parties to the contract and contract value due to changes in VAT, as well as the addition of provisions regarding overhead cost claims in the contract.

Sehubungan dengan perjanjian diatas dan kegiatan pembangkit lainnya, Perusahaan mempunyai fasilitas SBLC dengan rincian sebagai berikut:

In relation to the above agreements and other power plant activities, the Company has SBLC facilities with the following details:

Bank Penerbit Issuing Bank	Penerima Manfaat Beneficiary	Mata Uang Currency	Jumlah (satuan penuh) Total (full amount)
Mandiri	Doosan Enerbility Co. Ltd.	EUR	1.388
	Doosan Enerbility Co. Ltd.	US$	1.446.143
	Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	16.884.309
	Mitsubishi Corporation	JPY	104.322.000
	Southern Cable Sdn Bhd	MYR	10.342.873
	Southern Cable Sdn Bhd	MYR	6.540.829
	Southern Cable Sdn Bhd	MYR	8.355.237
BRI	HK	USD	1.747.228

Sumber Dana
Source of Funds

Pada tahun 2025, PLN NP telah menyediakan sumber dana untuk memenuhi perjanjian perolehan barang modal sebesar Rp3,87 triliun yang berasal dari dana internal perusahaan.

In 2025, PLN NP provided funding sources to fulfill the capital goods acquisition agreement of Rp3.87 trillion, which came from the Company's internal funds.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi
Denominated Currency

Sampai dengan 31 Desember 2025, perincian ikatan material untuk perolehan barang modal berdasarkan mata uang adalah Yen Jepang, Won Korea, Dollar Amerika, dan Euro Eropa. Hal ini berdasarkan adanya fasilitas *stand-by letter of credit*.

Until December 31, 2025, the details of material commitments for the acquisition of capital goods by currency are Japanese Yen, Korean Won, US Dollar, and European Euro. It was based on the standby letter of credit facility.

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang
Currency Risk Protection Measures

Perusahaan melakukan penilaian atas kenaikan dan penurunan atas sensitivitas nilai tukar. Di mana untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

The Company assesses the increase and decrease of exchange rate sensitivity. Where every 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currency represents management's assessment of a rational change in exchange rates after considering current economic conditions. The sensitivity analysis includes only the after-tax balances of monetary items denominated in foreign currencies and adjusts the year-end translations for a 10% change in foreign exchange rates.

Selain itu Perusahaan juga melakukan analisis terhadap sensitivitas tingkat suku bunga yang telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun.

In addition, the Company also performs an interest rate sensitivity analysis, which has been determined based on the Group's exposure to interest rates for the outstanding financial instrument balances after tax at the reporting date. This analysis was prepared by assuming that the total balances of assets and liabilities at the end of the reporting period were outstanding throughout the year.

Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin (bp) pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

This sensitivity analysis uses a 50-basis point ("bp") increase or decrease assumption in the relevant interest rate with all other variables held constant. An increase and decrease of 50 bp represents management's assessment of the likelihood of a rational change in interest rates after considering current economic conditions.

Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Goods Investment

PLN NP secara konsisten menjalankan strategi investasi jangka panjang melalui pengadaan dan pengembangan berbagai aset tetap, yang mencakup lahan, bangunan fasilitas umum, infrastruktur waduk, instalasi pembangkit, mesin produksi energi, peralatan transmisi dan distribusi, sarana penunjang, hingga armada operasional. Di samping itu, Perusahaan juga terus memperkuat kapasitas pembangkit serta mendorong ekspansi usaha di sektor pembangkitan energi. Seluruh investasi tersebut diarahkan untuk memperkokoh fundamental operasional, meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kelistrikan, serta mendukung keberlanjutan dan optimalisasi rantai bisnis Perusahaan secara menyeluruh.

PLN NP consistently implements a long-term investment strategy through the procurement and development of various property, plant, and equipment. It includes land, public facility buildings, reservoir infrastructure, power plant installations, energy production machines, transmission and distribution equipment, supporting facilities, and operational fleets. Moreover, the Company continues to strengthen its power plant capacity and encourages business expansion in the energy generation sector. All these investments are aimed at reinforcing operational fundamentals, enhancing the efficiency and reliability of the electrical system, and supporting the sustainability and optimization of the Company's business chain comprehensively.

Investasi Barang Modal pada Aset Tetap
Capital Goods Investment in Property, Plant, and Equipment

Investasi barang modal PLN NP pada aset tetap di tahun 2025 adalah sebesar Rp3,76 triliun, yaitu lebih rendah 2,45% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3,86 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh langkah strategis manajemen dalam prioritasisasi investasi barang modal, guna memastikan efektivitas pemanfaatan dana belanja modal (*capital expenditure*) yang lebih tepat sasaran di tahun berjalan.

PLN NP's capital goods investment in property, plant, and equipment in 2025 amounted to Rp3.76 trillion, which was lower by 2.45% compared to Rp3.86 trillion in 2024. It is primarily influenced by the management's strategic steps in prioritizing capital investment in order to ensure the effective utilization of more targeted capital expenditure funds in the current year.

Tabel Jenis, Tujuan, dan Nilai Investasi Barang Modal Aset Tetap
Table of Type, Purpose, and Value of Capital Goods Investment in Property, Plant, and Equipment

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Goods Investment	Tujuan Investasi Purpose of Investment	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
							%	Nominal
Tanah Land	Pembangunan pembangkit baru Building new power plant	-	-	24.903	185	-	(100,00)	(185)
Bangunan umum, waduk dan prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	Operasional Perusahaan Company Operational	18.646	426.548	42.871	71.428	**98.971**	38,56	27.543
Instalasi dan mesin pembangkit Installations and power plants	Efisiensi dan keandalan pembangkit Power plant efficiency and reliability	77.812	2.167.995	919.677	976.359	**503.379**	(48,44)	(472.980)

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Goods Investment	Tujuan Investasi Purpose of Investment	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
							%	Nominal
Peralatan transmisi dan distribusi Transmissions and distribution equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	26.291	363	29.154	24.919	**28.582**	14,70	3.663
Perlengkapan, Pengolahan data, dan telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	-	3.021	1.988	-	-	-	-
Perlengkapan umum General equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	101.342	113.204	172.828	150.009	**206.171**	37,44	56.162
Kendaraan bermotor Motor vehicles	Operasional Perusahaan Company Operational	11.627	9.862	54.867	8.708	**26.580**	205,24	17.872
Material cadang utama Major spare parts	Operasional Perusahaan Company Operational	-	19.682	382.449	463	**4.203**	807,78	3.740
Aset hak guna Right-of-use assets	Operasional Perusahaan Company Operational	44.991	2.108.947	1.084.541	102.414	**188.118**	83,68	85.704
Aset dalam pembangunan Construction in progress	Operasional Perusahaan Company Operational	858.083	1.519.684	1.958.210	2.522.407	**2.706.226**	7,29	183.819
Aset tidak digunakan dalam operasi Assets not used in operations	Operasional Perusahaan Company Operational	13.537	60.757	-	-	-	-	-
Jumlah Realisasi Kegiatan Investasi **Total Realization of Investment Activities**		**1.152.329**	**6.430.063**	**4.671.488**	**3.856.892**	**3.762.230**	**(99,02)**	**(94.662)**

Investasi Barang Modal pada Pembangkitan, Pengembangan Usaha dan Penugasan

Capital Goods Investment in Electric Power Generator, Business Development, and Assignment

Selain investasi pada barang modal di aset tetap, PLN NP juga melakukan investasi barang modal dimana sebagian besar diprogramkan dalam rangka untuk penguatan kinerja core business aset eksisting dan pembiayaan program pengembangan usaha. Investasi tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar Rp3,50 triliun, yaitu lebih rendah 7,20% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3,77 triliun. Hal tersebut sebagai dampak atas *milestone* progress fisik dan realisasi anggaran investasi pengembangan usaha.

Apart from capital goods investment in property, plant, and equipment, PLN NP also invests in capital goods where the majority are programmed to strengthen the core business performance of the existing assets and finance business development programs. The investment in 2025 amounted to Rp3.50 trillion, a decrease of 7.20% compared to the amount of Rp3.77 trillion in 2024. This is a result of the physical progress milestones and the actualization of the business development investment budget.

Tabel Investasi Barang Modal pada Pembangkitan, Pengembangan Usaha dan Penugasan (Rp juta)
Table of Capital Goods Investment in Electric Power Generator, Business Development, and Assignment (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
						%	Nominal
Penguatan Pembangkitan: Electric Power Generator Strengthening:							
Kapitalisasi Capitalization	134.783	318.376	1.153.535	885.895	**1.078.667**	21,76	**192.772**
Penguatan Sistem Pembangkit Power Plant Strengthening	194.788	99.633	867.173	1.747.147	**1.656.551**	(5,19)	**(90.596)**
Penggantian Peralatan Utama Pembangkit Main Power Plant Equipment Replacement	154.712	79.190	437.418	175.946	**97.648**	(44,50)	**(78.298)**
Sistem dan Sarana Informatika Information Systems and Facilities	37.301	31.236	28.710	3.653	**40.398**	1.005,89	**36.745**
Jumlah Penguatan Pembangkitan Total Electric Power Generator Strengthening	521.584	528.435	2.486.835	2.812.641	**2.873.264**	2,16	**60.623**
Pengembangan Usaha Pembangkitan: Electric Power Generator Business Development:							
Pengembangan Usaha Pembangkitan Electric Power Generator Business Development	759.109	844.552	1.222.341	960.244	**627.786**	(34,62)	**(332.458)**
Jumlah Pengembangan Usaha Pembangkitan Total Electric Power Generator Business Development	759.109	844.552	1.222.341	960.244	**627.786**	(34,62)	**(332.458)**
Jumlah Investasi Barang Modal pada Penguatan dan Pengembangan Usaha Pembangkitan **Total Capital Goods Investment in Electric Power Generator Strengthening and Business Development**	**1.280.693**	**1.372.986**	**3.709.176**	**3.772.886**	**3.501.050**	**(7,20)**	**(271.835)**

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2025
Comparison between Target and Realization of Company Performance in 2025

Kinerja PLN NP sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dan solid. Secara umum, realisasi kinerja operasional berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Keandalan dan konsistensi kinerja pembangkit menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian tersebut, sejalan dengan implementasi strategi operasional yang efektif dan terarah. Capaian operasional tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kinerja keuangan Perusahaan yang berkelanjutan.

The performance of PLN NP throughout 2025 showed positive and solid achievements. In general, the realization of operational performance successfully met and even exceeded the predetermined targets. The reliability and consistency of the power plant's performance are the main factors supporting this achievement, in line with the implementation of effective and targeted operational strategies. The operational achievements also contribute to the sustainable growth of the Company's financial performance.

Realisasi terhadap Target Kinerja Keuangan Tahun 2025
Realization against Financial Performance Target in 2025

Tabel Realisasi terhadap Target Pendapatan dan Laba Tahun 2025 (Rp juta)
Table of Realization against Revenue and Profit Target in 2025 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2025 2025 ABOP Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
Pendapatan Usaha Revenue	101.997.484	98.893.003	96,96%
Beban Usaha Operating Expenses	90.394.343	84.192.736	93,14%
Laba Usaha Operating Income	11.603.140	14.700.267	126,69%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	10.560.780	13.057.644	123,64%

Realisasi terhadap Target Pendapatan Usaha Tahun 2025
Realization against Revenue Target in 2025

Pendapatan usaha yang dimaksud adalah hasil dari penjualan tenaga listrik untuk sistem Jawa Bali, Jasa Operasi & Pemeliharaan (O&M), Jasa Konstruksi, dan Lainnya.

The aforementioned revenues are generated from the sale of electricity for the Java Bali system, Operation & Maintenance (O&M) Services, Construction Services, and Others.

Tabel Realisasi terhadap Target Pendapatan dan Laba Tahun 2025 (Rp juta)
Table of Realization against Revenue Target in 2025 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2025 2025 ABOP Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
Pendapatan dari Penjualan Tenaga Listrik Revenues from Sales of Electricity	97.530.379	94.971.854	97,38%
Pendapatan dari Jasa O&M Revenues from O&M Services	2.584.022	2.151.462	83,26%
Pendapatan dari Jasa Konstruksi Revenues from Construction Services	1.149.613	1.171.360	101,89%
Pendapatan dari Jasa Lainnya Revenues from Other Services	733.470	598.327	81,57%

Realisasi terhadap Target Pendapatan dari Penjualan Tenaga Listrik Tahun 2025
Realization against the Target of Revenue from Sales of Electricity in 2025

Realisasi pendapatan dari penjualan tenaga listrik tahun 2025 adalah sebesar Rp94,97 triliun dengan pencapaian 97,38% dari target RKAP 2025 sebesar Rp97,53 triliun. Pencapaian di bawah target tersebut terutama disebabkan oleh adanya pencapaian kWh jual untuk menyesuaikan kebutuhan dan mendukung optimasi sistem dan juga peningkatan usaha lainnya (Jasa OM dan EPC).

In 2025, the realization of revenue from electricity sales amounted to Rp94.97 trillion with an achievement of 97.38% of the 2025 ABOP target of Rp97.53 trillion. This below-target achievement was primarily due to the adjustment of sold kWh to meet demand and support system optimization, as well as improvements in other businesses (OM Services and EPC).

Realisasi terhadap Target Pendapatan dari Jasa O&M Tahun 2025
Realization against the Target of Revenue from O&M Services in 2025

Realisasi pendapatan dari jasa O&M tahun 2025 adalah sebesar Rp2,15 triliun dengan pencapaian 83,26% dari target RKAP 2025 sebesar Rp2,58 triliun. Pencapaian di bawah target tersebut terutama disebabkan oleh adanya beberapa kontrak OM yang belum terealisasinya sesuai asumsi RKAP.

The realization of revenue from O&M services in 2025 was Rp2.15 trillion with an achievement of 83.26% of the 2025 ABOP target of Rp2.58 trillion. This below-target achievement was mainly due to several OM contracts that had not been fulfilled in accordance with the assumptions in the WP&B.

Realisasi terhadap Target Pendapatan dari Jasa Konstruksi Tahun 2025
Realization against the Target of Revenue from Construction Services in 2025

Realisasi pendapatan dari jasa konstruksi tahun 2025 adalah sebesar Rp1,17 triliun dengan pencapaian 101,89% dari target RKAP 2025 sebesar Rp1,15 triliun. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung oleh adanya beberapa pekerjaan EPC selesai lebih cepat dari jadwal.

In 2025, the realization of revenue from construction services amounted to Rp1.17 trillion with an achievement of 101.89% of the 2025 ABOP target of Rp1.15 trillion. This above-target achievement was mainly driven by several EPC projects being completed ahead of schedule.

Realisasi terhadap Target Pendapatan dari Jasa Lainnya Tahun 2025
Realization against the Target of Revenue from Other Services in 2025

Realisasi pendapatan dari jasa lainnya tahun 2024 adalah sebesar Rp598,33 miliar dengan pencapaian 81,57% dari target RKAP 2025 sebesar Rp733,47 miliar. Pencapaian di bawah target tersebut terutama disebabkan oleh *probing* (eksplorasi kandidat/potensi proyek) usaha lain yang tidak terealisasi.

The realization of revenue from other services in 2025 was Rp598.33 billion with an achievement of 81.57% of the 2025 ABOP target of Rp733.47 billion. This below-target achievement was mainly due to the probing (exploration of potential projects) of other unrealized businesses.

Realisasi terhadap Target Perolehan Laba Tahun 2025
Realization against Profit Acquisition Target in 2025

Realisasi laba tahun berjalan tahun 2025 adalah sebesar Rp13,06 triliun dengan pencapaian 123,64% dari target RKAP 2025 sebesar Rp10,56 triliun. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung oleh pencapaian laba Penjualan Tenaga Listrik yang lebih baik dan kontribusi laba asosiasi.

The realization of profit for the year 2025 was Rp13.06 trillion with an achievement of 123.64% of the 2025 ABOP target of Rp10.56 trillion. It is exceeding the target, primarily due to improved profitability from Electricity Sales and contributions from associates' profits.

Realisasi terhadap Target Posisi Keuangan Tahun 2025
Realization against Financial Position Target in 2025

Kinerja posisi keuangan ditunjukkan pada pencapaian pada target jumlah aset, liabilitas dan ekuitas sebagaimana pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

Financial position performance is indicated in the achievement of targets for total assets, liabilities, and equity as shown in the Consolidated Statement of Financial Position.

Realisasi terhadap Target Jumlah Aset Tahun 2025
Realization against Total Assets Target in 2025

Realisasi jumlah aset tahun 2025 adalah sebesar Rp357,67 triliun dengan pencapaian 102,11% dari target RKAP 2025 sebesar Rp350,29 triliun. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung oleh Surplus Revaluasi Aset, peningkatan jumlah piutang usaha tenaga listrik (menyesuaikan peningkatan pendapatan penjualan) serta peningkatan nilai penyertaan karena laba investasi yg lebih baik.

The realization of total assets in 2025 was Rp357.67 trillion, with an achievement of 102.11% of the 2025 ABOP target of Rp350.29 trillion. This above-target achievement was mainly driven by a Surplus in Asset Revaluation, an increase in trade receivable from electricity (reflecting increased sales revenue), and an increase in the value of investments due to improved returns on investment.

Tabel Realisasi terhadap Target Jumlah Aset Tahun 2025 (Rp juta)
Table of Realization against Target of Total Assets in 2025 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2025 2025 ABOP Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
Aset Lancar Current Assets	64.143.202	63.930.282	99,67%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	286.141.972	293.740.975	102,66%
Jumlah Aset Total Assets	**350.285.174**	**357.671.257**	**102,11%**

Realisasi terhadap Target Aset Lancar Tahun 2025
Realization against the Target of Current Assets in 2025

Realisasi jumlah aset lancar tahun 2025 adalah sebesar Rp63,93 triliun dengan pencapaian 99,67% dari target RKAP 2025 sebesar Rp64,14 triliun. Pencapaian di bawah target tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Kas dan Setara kas lebih rendah karena rendahnya tingkat pencairan piutang melalui penerimaan tagihan Penjualan Tenaga Listrik (PTL) menyesuaikan dengan kebijakan manajemen kas terpusat PLN (Optimasi *Cash Management* PLN *Holding*).
2. Persediaan dapat dioptimalkan lebih rendah dari RKAP dan YoY seiring dengan optimalnya tata Kelola dan perencanaan Material Gudang dan Bahan Bakar.

In 2025, the realization of total current assets amounted to Rp63.93 trillion, with an achievement of 99.67% of the 2025 ABOP target of Rp64.14 trillion. It achieved below the target, mainly caused by:

1. Cash and cash equivalents are lower due to the low collection rate of receivables from the sale of electricity bills (PTL), in line with PLN's centralized cash management policy (PLN Holding Cash Management Optimization).
2. Inventory can be optimized to be lower than the WP&B and YoY in line with the optimal management and planning of Warehouse Materials and Fuel.

Realisasi terhadap Target Aset Tidak Lancar Tahun 2025
Realization against the Target of Non-Current Assets in 2025

Realisasi jumlah aset tidak lancar tahun 2025 adalah sebesar Rp293,74 triliun dengan pencapaian 102,66% dari target RKAP 2025 sebesar Rp286,14 triliun. Pencapaian di atas target tersebut terutama dikarenakan adanya surplus revaluasi aset pada akhir 2024.

The realization of total non-current assets in 2025 was Rp293.74 trillion with an achievement of 102.66% of the 2025 ABOP target of Rp286.14 trillion. It is exceeding the target, primarily driven by a surplus in assets revaluation at the end of 2024.

Realisasi terhadap Target Jumlah Liabilitas Tahun 2025
Realization against Total Liabilities Target in 2025

Realisasi jumlah liabilitas tahun 2025 adalah sebesar Rp42,52 triliun dengan pencapaian 101,46% dari target RKAP 2025 sebesar Rp41,90 triliun. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung oleh:

1. Liabilitas pajak tangguhan meningkat lebih tinggi dari RKAP karena tambahan pajak tangguhan atas surplus revaluasi aset tahun 2024 (koreksi beda temporer).
2. Liabilitas pemegang saham di atas RKAP karena realisasi kurs meningkat dibandingkan perhitungan kurs RKAP.
3. Peningkatan saldo utang usaha dan utang pajak non PPh Badan secara RKAP seiring dengan adanya peningkatan pemakaian volume kenaikan harga bahan bakar.

In 2025, the realization of total liabilities amounted to Rp42.52 trillion with an achievement of 101.46% of the 2025 ABOP target of Rp41.90 trillion. This above-target achievement was mainly driven by:

1. Deferred tax liabilities increased more than the WP&B due to additional Deferred Tax on the 2024 Asset Revaluation Surplus (temporary difference adjustment).
2. Shareholders' Liabilities are above the WP&B due to the realized exchange rate being higher than the WP&B exchange rate.
3. The increase in Trade Payables and Non-Corporate Income Tax Payables compared to the WP&B is in line with the increased fuel volume consumption and prices.

Tabel Realisasi terhadap Target Jumlah Aset Tahun 2025 (Rp juta)
Table of Realization against Target of Total Liabilities in 2025 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2025 2025 ABOP Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	16.259.182	13.071.204	80,39%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	25.645.674	29.445.572	114,82%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**41.904.856**	**42.516.776**	**101,46%**

Realisasi terhadap Target Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2025
Realization against the Target of Current Liabilities in 2025

Realisasi liabilitas jangka pendek tahun 2025 adalah sebesar Rp13,07 triliun dengan pencapaian 80,39% dari target RKAP 2025 sebesar Rp16,26 triliun. Pencapaian di bawah target tersebut terutama disebabkan oleh Utang Pajak dan Lainnya dikarenakan adanya *prepaid tax* yang digunakan untuk mengurangi hutang pajak pada akhir tahun.

The realization of current liabilities in 2025 was Rp13.07 trillion with an achievement of 80393% of the 2025 ABOP target of Rp16.26 trillion. It achieved below the target, mainly caused by Tax Payables and Others, resulting from prepaid taxes used to reduce year-end tax payables.

Realisasi terhadap Target Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2025
Realization against the Target of Non-Current Liabilities in 2025

Realisasi liabilitas jangka panjang tahun 2025 adalah sebesar Rp29,45 triliun dengan pencapaian 114,82% dari target RKAP 2025 sebesar Rp25,65 triliun. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung oleh pajak tangguhan atas surplus revaluasi aset dan hutang usaha yang meningkat seiring pembelian/ pemakaian bahan bakar karena peningkatan aktivitas operasional pembangkit listrik.

In 2025, the realization of non-current liabilities amounted to Rp29.45 trillion with an achievement of 114.82% of the 2025 ABOP target of Rp25.65 trillion. This above-target achievement was mainly driven by Deferred Taxes on a Surplus in Asset Revaluation and Trade Payables, which increased alongside fuel purchases/consumption due to increased operational activity at power plants.

Realisasi terhadap Target Jumlah Ekuitas Tahun 2025
Realization against Total Equity Target in 2025

Realisasi jumlah ekuitas tahun 2025 adalah sebesar Rp315,15 triliun dengan pencapaian 102,20% dari target RKAP 2025 sebesar Rp308,38 triliun. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung seiring dengan pencapaian laba yang lebih baik dari RKAP.

The realization of total equity in 2025 was Rp315.15 trillion with an achievement of 102.20% of the 2025 ABOP target of Rp308.38 trillion. It achieved above the target, mainly supported alongside a better achievement of profit that exceeded the WP&B.

Realisasi terhadap Target Struktur Modal Tahun 2025
Realization against Capital Structure Target in 2025

Tabel Realisasi terhadap Target Struktur Modal Tahun 2025 (Rp juta)
Table of Realization against Target of Capital Structure in 2025 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2025 2025 ABOP Target		Realisasi 2025 2025 Realization	
	Nominal (Rp juta) Nominal (Rp million)	Komposisi (%) Composition (%)	Nominal (Rp juta) Nominal (Rp million)	Komposisi (%) Composition (%)
Liabilitas Liabilities	41.904.856	11,96	42.516.776	11,89
Ekuitas Equity	308.380.318	88,04	315.154.481	88,11
Aset Assets	**350.285.174**	**100,00**	**357.671.257**	**100,00**

Realisasi terhadap Target Aspek Operasional Tahun 2025
Realization against Operational Aspect Target in 2025

Aspek operasional mencakup pada pencapaian faktor kinerja unit pembangkit, produksi tenaga listrik, dan pemakaian listrik.

Operational aspect includes the achievement of performance factors of existing power plants, electricity production, and electricity consumption.

Realisasi terhadap Target Kinerja Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2025
Realization against Coal Generation Unit Performance Target in 2025

Tabel Realisasi terhadap Target Kinerja Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2025
Table of Realization against the Target of Coal Generation Unit Performance in 2025

Uraian Description	Satuan Unit	Target RKAP 2025 2025 ABOP Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
Equivalent Availability Factor (EAF)	%	83,48	86,86	104,05%
Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)	%	3,10	1,92	138,06%
Net Capacity Factor (NCF)	%	65,62	69,82	106,40%
Net Plant Heat Rate (NPHR)	kCal/kWh	3.088,51	3.196,43	96,51%
Specific Fuel Consumption (SFC) Batubara Specific Fuel Consumption (SFC) of Coal	kg/kWh	0,6767	0,7047	95,86%

Realisasi terhadap Target EAF Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2025
Realization against EAF Target of Coal Generation Units in 2025

Realisasi EAF unit pembangkitan batubara tahun 2025 adalah sebesar 86,86% dengan pencapaian 104,05% dari target RKAP 2025 sebesar 83,48%. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung oleh meningkatnya kesiapan pembangkit, optimasi durasi dalam pelaksanaan pemeliharaan terencana dan percepatan *recovery* pasca *forced outage* dan *derating*.

The realization of EAF for coal generation units in 2025 was 86.86% with an achievement of 104.05% of the 2025 ABOP target of 83.48%. It achieved above the target, mainly driven by the improved plant readiness, optimized durations for scheduled maintenance, and accelerated recovery following forced outages and derating.

Realisasi terhadap Target EFOR Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2025
Realization against EFOR Target of Coal Generation Units in 2025

Realisasi EFOR unit pembangkitan batubara tahun 2025 adalah sebesar 1,92% dengan pencapaian 138,06% dari target RKAP 2025 sebesar 3,10%. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung oleh adanya optimalisasi kegiatan *Preventive Maintenance* (PM) dan *Predictive Maintenance* (PdM) serta percepatan *recovery* pasca *forced outage* dan *derating*.

In 2025, the realization of EFOR for coal generation units was 1.92% with an achievement of 138.06% of the 2025 ABOP target of 3.10%. It achieved above the target, mainly driven by the optimization of Preventive Maintenance (PM) and Predictive Maintenance (PdM) activities, as well as faster recovery following forced outages and derating.

Realisasi terhadap Target NCF Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2025
Realization against NCF Target of Coal Generation Units in 2025

Realisasi NCF unit pembangkitan batubara tahun 2025 adalah sebesar 69,82% dengan pencapaian 106,40% dari target RKAP 2025 sebesar 65,62%. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung oleh adanya kenaikan kesiapan pembangkit dan *plant factor* yang tinggi.

In 2025, the realization of NCF for coal generation units was 69.82% with an achievement of 106.40% of the 2025 ABOP target of 65.62%. It achieved above the target, mainly due to an improvement in power plant readiness and a high plant factor.

Realisasi terhadap Target NPHR Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2025
Realization against NPHR Target of Coal Generation Units in 2025

Realisasi NPHR unit pembangkitan batubara tahun 2025 adalah sebesar 3.196,43 kCal/kWh dengan pencapaian 96,51% dari target RKAP 2025 sebesar 3.088,51 kCal/kWh. Pencapaian di bawah target tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan volume *co-firing* biomassa yang memiiki nilai kalor lebih rendah dari kalori batubara.

In 2025, the realization of NPHR for coal generation units was 3,196.43 kCal/kWh with an achievement of 96.51% of the 2025 ABOP target of 3,088.51 kCal/kWh. It achieved below the target, mainly caused by an increase in the volume of biomass co-firing, which has a lower calorific value than coal, thereby affecting the power plant's efficient value.

Realisasi terhadap Target SFC Batubara Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2025
Realization against SFC Target of Coal Generation Units in 2025

Realisasi SFC batubara untuk unit pembangkitan batubara tahun 2025 adalah sebesar 0,7047 kg/kWh dengan pencapaian 95,86% dari target RKAP 2025 sebesar 0,6767 kg/kWh. Pencapaian di bawah target tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan volume *co-firing* biomassa yang memiiki nilai kalor lebih rendah dari kalori batubara sehingga mempengaruhi nilai efisiensi pembangkit.

The realization of SFC for coal generation units in 2025 was 070470 kg/kWh with an achievement of 95.86% of the 2025 ABOP target of 0.6767 kg/kWh. It achieved below the target, mainly caused by an increase in the volume of biomass co-firing, which has a lower calorific value than coal, thereby affecting the power plant's efficient value.

Realisasi terhadap Target Kinerja Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara Tahun 2025

Realization against Gas & Non-Coal Generation Unit Performance Target in 2025

Tabel Realisasi terhadap Target Kinerja Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara Tahun 2025
Table of Realization against the Target of Gas & Non-Coal Generation Unit Performance in 2025

Uraian Description	Satuan Unit	Target RKAP 2025 2025 ABOP Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
Equivalent Availability Factor (EAF)	%	91,56	94,34	103,04%
Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)	%	3,10	2,44	121,41%
Net Capacity Factor (NCF)	%	30,90	32,02	103,64%
Net Plant Heat Rate (NPHR)	kCal/kWh	2.353,64	2.266,30	103,71%
Specific Fuel Consumption (SFC) Gas Specific Fuel Consumption (SFC) of Gas	MMBTU/kWh	0,0090	0,0087	103,37%
Specific Fuel Consumption (SFC) Minyak Specific Fuel Consumption (SFC) of Oil	Liter/kWh	0,2828	0,2714	104,03%

Realisasi terhadap Target EAF Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara Tahun 2025

Realization against EAF Target of Gas & Non-Coal Generation Units in 2025

Realisasi EAF unit pembangkitan gas & non-batubara tahun 2025 adalah sebesar 94,34% dengan pencapaian 103,04% dari target RKAP 2025 sebesar 91,56%. Pencapaian di atas target tersebut terutama disebabkan oleh optimalnya operasional (*operational excellence*) melalui optimalisasi tata kelola pemeliharaan pembangkit, penurunan durasi gangguan (*outage*), serta percepatan waktu pemeliharaan terencana (*planned outage*) pada unit-unit gas dan non-batubara.

In 2025, the realization of EAF for gas & non-coal generation units was 86.85% with an achievement of 94.86% of the 2025 ABOP target of 91.56%. This above-target achievement was primarily driven by operational excellence, achieved through the optimization of power plant maintenance management, a reduction in outage duration, and the acceleration of planned outage schedules for gas and non-coal units.

Realisasi terhadap Target EFOR Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara Tahun 2025

Realization against EFOR Target of Gas & Non-Coal Generation Units in 2025

Realisasi EFOR unit pembangkitan gas & non-batubara tahun 2025 adalah sebesar 2,44% dengan pencapaian 121,41% dari target RKAP 2025 sebesar 3,10%. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung oleh adanya program percepatan *recovery* gangguan pembangkit dengan *best effort Operational Excellence* pelaksanaan tata kelola pembangkit serta adanya penurunan frekuensi dan durasi gangguan mendadak (*forced outage*) pada mesin pembangkit melalui penerapan manajemen risiko aset yang proaktif dan peningkatan efektivitas pemeliharaan preventif serta peningkatan pemenuhan *failed safe*.

The realization of EFOR for gas & non-coal generation units in 2025 was 2.44% with an achievement of 121.41% of the 2025 ABOP target of 3.10%. This above-target achievement was mainly driven by a program to accelerate the recovery from power plant outages through best-effort Operational Excellence in power plant management, as well as a reduction in the frequency and duration of forced outages in power plant units through the implementation of proactive asset risk management, improved effectiveness of preventive maintenance, and enhanced compliance with fail-safe requirements.

Realisasi terhadap Target NCF Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara Tahun 2025

Realization against NCF Target of Gas & Non-Coal Generation Units in 2025

Realisasi NCF unit pembangkitan gas & non-batubara tahun 2025 adalah sebesar 32,02% dengan pencapaian 103,64% dari target RKAP 2025 sebesar 30,90%. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung oleh adanya peningkatan signifikan kinerja pembangkit non-batubara, khususnya pembangkit hidro di Regional Jawa, yang didukung karakteristik musim basah sepanjang 2025 serta peningkatan produksi dari proyek *add-on* PLTGU Muara Tawar.

In 2025, the realization of NCF for gas & non-coal generation units was 32.02% with an achievement of 103.64% of the 2025 ABOP target of 30.90%. It achieved above the target, mainly driven by a significant improvement in the performance of non-coal power plants, particularly hydroelectric power plants in the Java region, supported by the wet season throughout 2025, and increased production from the Muara Tawar CCPP add-on project.

Realisasi terhadap Target NPHR Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara Tahun 2025

Realization against NPHR Target of Gas & Non-Coal Generation Units in 2025

Realisasi NPHR unit pembangkitan gas & non-batubara tahun 2025 adalah sebesar 2.266,30 kCal/kWh dengan pencapaian 103,71% dari target RKAP 2025 sebesar 2.353,64 kCal/kWh. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung oleh adanya peningkatan efisiensi termal operasional, optimalisasi pembebanan unit (*load factor*) yang mendekati kapasitas desain, serta keberhasilan meminimalkan konsumsi energi internal (Pemakaian Sendiri/PS).

The realization of NPHR for gas & non-coal generation units in 2025 was 2,266.27 kCal/kWh, with an achievement of 103.71% of the 2025 ABOP target of 2,353.64 kCal/kWh. It achieved above the target, mainly caused by improved operational thermal efficiency, optimization of unit load factors approaching design capacity, and the successful minimization of internal energy consumption (Self-Consumption).

Realisasi terhadap Target SFC Gas Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara Tahun 2025

Realization against Gas SFC Target of Gas & Non-Coal Generation Units in 2025

Realisasi SFC gas untuk unit pembangkitan gas & non-batubara tahun 2025 adalah sebesar 0,0087 MMBTU/kWh dengan pencapaian 103,37% dari target RKAP 2025 sebesar 0,0090 MMBTU/kWh. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung oleh adanya peningkatan efisiensi pembakaran pada turbin gas, salah satunya adalah adanya proyek *Add-on* Blok 2, 3, dan 4 Muara Tawar, optimalisasi pembebanan unit secara kontinu, serta pasokan energi primer dengan kualitas heating value (nilai kalori) yang stabil.

In 2025, the realization of gas SFC for gas & non-coal generation units was 0.0087 MMBTU/kWh, with an achievement of 103.37% of the 2025 ABOP target of 0.0090 MMBTU/kWh. It achieved above the target, primarily driven by the improved combustion efficiency in gas turbines, including the Muara Tawar Blocks 2, 3, and 4 Add-on Project, continuous optimization of unit load, and a supply of primary energy with a stable heating value.

Realisasi terhadap Target SFC Minyak Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara Tahun 2025

Realization against Oil SFC Target of Gas & Non-Coal Generation Units in 2025

Realisasi SFC minyak untuk unit pembangkitan gas & non-batubara tahun 2025 adalah sebesar 0,2714 liter/kWh dengan pencapaian 104,03% dari target RKAP 2025 sebesar 0,2828 liter/kWh. Pencapaian di atas target tersebut terutama didukung oleh adanya optimasi pola pembebanan unit, terutama saat *order* beban puncak, dengan minimalisasi operasi unit pada beban rendah (*low load*), serta menurunnya durasi *start-stop* pembangkit pada pembangkit BBM yang memiliki efisiensi rendah (PLTG Minyak).

The realization of oil SFC for gas & non-coal generation units in 2025 was 0.2714 liters/kWh, with an achievement of 104.03% of the 2025 ABOP target of 0.2828 liters/kWh. It achieved above the target, mainly due to optimized unit load patterns, particularly during peak load periods, by minimizing unit operation during low-load conditions, as well as by reducing the duration of start-stop cycles at low-efficiency oil-fired power plants (Oil GTPP).

Realisasi terhadap Target Produksi & Penjualan Tenaga Listrik Tahun 2025

Realization against the Target of Electricity Production & Sales in 2025

Tabel Realisasi terhadap Target Kinerja Produksi dan Penjualan Tahun 2025 (GWh)
Table of Realization against the Target of Production and Sales Performance in 2025 (GWh)

Uraian Description	Target RKAP 2025 2025 ABOP Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
Produksi Tenaga Listrik Electricity Production	63.675,78	66.919,39	105,09%
Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sales	60.231,71	63.285,67	105,07%

Realisasi produksi tenaga listrik tahun 2025 adalah sebesar 66.919,39 GWh, dengan pencapaian 105,09% dari target RKAP 2025 sebesar 63.675,78 GWh. Sedangkan untuk realisasi penjualan tenaga listrik tahun 2025 adalah sebesar 63.285,67 GWh, dengan pencapaian 105,07% dari target RKAP 2025 sebesar 60.231,71 GWh. Pencapaian di atas target tersebut terutama didorong oleh adanya kenaikan kesiapan pembangkit dan *plant factor* yang tinggi serta didorong oleh pengaturan sistem yang ditandai dengan tercapainya penjualan terhadap alokasi rencana tahunan 2025 terutama Pembangkit PLN NP di Regional Jamali, Sumatera, dan Kalimantan.

The realization of electricity production in 2025 was 66,919,39 GWh, with an achievement of 105.09% of the 2025 ABOP target of 63,675,78 GWh. Meanwhile, the realization of electricity sales in 2025 was 63,285,67 GWh, with an achievement of 105.07% of the 2025 ABOP target of 60,231,71 GWh. It achieved above the target, primarily driven by improved power plant readiness and high plant factors, as well as by system adjustments marked by the achievement of sales against the 2025 annual plan allocation, particularly for PLN NP power plants in the Jamali, Sumatera, and Kalimantan regions.

Realisasi terhadap Target Aspek Pemasaran Tahun 2025
Realization against Marketing Aspect Target in 2025

Tabel Realisasi terhadap Target Aspek Pemasaran Tahun 2025 (%)
Table of Realization against Target of Marketing Aspect in 2025 (%)

Uraian Description	Target RKAP 2025 2025 ABOP Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
Pangsa Pasar Market Share	18,07	18,86	103,47%

Realisasi pangsa pasar tahun 2025 secara kumulatif adalah sebesar 18,86% dengan pencapaian 104,37% dari target di tahun 2025 sebesar 18,07%. Pencapaian di atas target tersebut terutama didorong oleh pengaturan sistem, pergeseran Jadwal Pemeliharaan Pembangkit, optimasi durasi pemeliharaan pembangkit serta durasi penanganan saat unit pembangkit sedang mengalami gangguan.

The cumulative realization of market share in 2025 was 18.86%, with an achievement of 104.37% of the target in 2025 of 18.07%. It achieved above the target, mainly due to system arrangements, changes to the power plant maintenance schedule, optimization of maintenance durations, and the time required to address issues when a power plant unit is experiencing a malfunction.

Realisasi terhadap Target Pengembangan SDM Tahun 2025
Realization against HR Development Target in 2025

Tabel Realisasi terhadap Target Pengembangan SDM Tahun 2025 (Rp juta)
Table of Realization against Target of HR Development in 2025 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2025 2025 ABOP Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Costs	23.057	18.556	80,48%

Realisasi biaya pendidikan dan pelatihan tahun 2025 adalah sebesar Rp18,56 miliar atau 80,48% dari target RKAP 2025 sebesar Rp23,06 miliar. Pencapaian yang berada di bawah target terutama dipengaruhi oleh penyesuaian program diklat akibat alokasi anggaran yang ditetapkan PLN bagi PLN NP lebih rendah dari rencana awal, serta penerapan pengelolaan diklat secara terpusat melalui Pusdiklat PLN untuk seluruh PLN Group.

The realization of education and training costs in 2025 amounted to Rp18.56 billion or 80.48% of the 2025 RKAP target of Rp23.06 billion. The below-target achievement was mainly influenced by adjustments to the training program due to the budget allocation set by PLN for PLN NP being lower than the initial plan, as well as the implementation of centralized training management through the PLN Education & Training Center for the entire PLN Group.

Key Performance Indicator (KPI)

Pengelolaan KPI yang meliputi penyusunan standar, indikator, target kinerja Perusahaan dan penjabarannya sampai dengan satuan unit kerja terkecil di lingkungan Perusahaan serta seluruh pegawai dilakukan oleh Bidang Corporate Performance yang berada dibawah Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga.

Penetapan KPI tahun 2025 disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN Nusantara Power tanggal 30 Januari 2025 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025, serta Kontrak Manajemen Tahun 2025. Dalam RUPS tersebut, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan menyepakati Kontrak Manajemen atau KPI tahun 2025.

Realisasi Kontrak Manajemen/KPI antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Perusahaan tahun 2025 adalah sebesar 105,66 sebagaimana tabel berikut:

KPI management, which covers the preparation of standards, indicators, Company performance targets, and its elaboration up to the smallest work unit within the Company and all employees, is managed by the Corporate Performance Department under the Directorate of Business Development and Commercial.

The determination of the KPI for 2025 was ratified through the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT PLN Nusantara Power on January 30, 2025, regarding the Ratification of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) for 2025, as well as the Management Contract for 2025. In the GMS, the Company's Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors agreed on the Management Contract or KPI for 2025.

The realization of the Management Contract/KPI between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Company's Shareholders in 2025 is 105.66, as shown in the following table:

Tabel Realisasi Kontrak Manajemen Tahun 2025
Table of Management Contract Realization in 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicator		Unit Description	Bobot Weight	Target 2025 2025 Target	s.d. Desember 2025 until December 2025				
						Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia** Economic and Social Value for Indonesia			**65**					**68,10**	
1	EBITDA	↑	Rp miliar Rp billion	8	23.263,35	23.263,35	27.137,22	110,00%	8,80	●
2	Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkit Cost of Electricity Supply (CES) of Power Plant	↓	Rp/kWh	8	1.440,69	1.440,69	1.283,23	110,00%	8,80	●
3	ROIC	↑	%	5	3,48	3,48	4,21	110,00%	5,50	●
4	Optimalisasi Kesiapan Pasokan Pembangkit Optimizing Power Plant Supply Readiness	↑	%	5	80,00	80,00	85,32	106,65%	5,33	●
5	EFOR PLTU & Non PLTU EFOR of CFPP & Non-CFPP	↓	%	4	3,10	3,10	2,18	110,00%	4,40	●
6	EAF PLTU EAF of CFPP	↑	%	4	83,48	83,48	86,86	104,05%	4,16	●
7	EAF Non PLTU EAF of Non-CFPP	↑	%	4	91,56	91,56	94,34	103,04%	4,12	●
8	SFC Batubara SFC of Coal	↓	Kg/kWh	4	0,6767	0,6767	0,7047	95,86%	3,83	●
9	SFC Gas SFC of Gas	↓	mmbtu/kWh	4	0,009016	0,009016	0,008712	103,37%	4,13	●

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicator		Unit Description	Bobot Weight	Target 2025 2025 Target	s.d. Desember 2025 until December 2025				
						Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
10	SFC BBM SFC of Fuel	↓	Liter/kWh	4	0,2828	0,2828	0,2714	104,03%	4,16	●
11	Program Dedielisasi Dieselization Program	↑	%	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	EPC & *Project Completion*	↑	%	7	100,00	100,00	92,20	92,20%	6,45	●
13	*Advancing in Sustainable Development Goals* (SDGs)	↑	%	8	100,00	100,00	105,37	105,37%	8,42	●
B	**Inovasi Model Bisnis** Business Model Innovation			**7**					**7,70**	
1	Pendapatan dari luar PLN Grup (*beyond* kWh) & Laba Asosiasi Beyond kWh Revenue & Associate Profit	↑	%	4					4,40	●
	a. Pendapatan dari luar PLN Grup Revenue outside PLN Grup				688,92	688,92	1.101,48	110,00%		
	b. Laba Asosiasi Associate Profit				2.006,78	2.006,78	2.520,40	110,00%		
2	Sinergi Antar Sub Holding, Anak Perusahaan Lain & Pusharlis Synergy Among Sub-Holdings, Other Subsidiaries, and Pusharlis	↑	Rp miliar Rp billion	3	1.249,77	1.249,77	2.017,49	110,00%	3,30	●
C	**Kepemimpinan Teknologi** Technology Leadership			**12**					**12,93**	
1	*Digital Power Plant Implementation*	↑	Unit (kumulatif) Unit (cumulative)	2	88	88	94 Laporan Implementasi dan 20 Berita Acara Go Live 94 Implementation Reports and 20 Go Live Agenda	110,00%	2,20	●
2	*Maturity Level* EAM Pembangkitan Maturity Level of Generation EAM	↑	Level	2	3,40	3,40	3,50	102,94	2,05	●
3	*Value Creation*	↑	Rp miliar Rp billion	4	318,00	318,00	452,63	110,00%	4,40	●
4	Umur Persediaan Batubara Coal Inventory Age	→←	Hari Operasi Operating Day	4	15 - 26	15 - 26	19,96	107,09%	4,28	●
D	**Peningkatan Investasi** Energize Investment			**5**					**5,20**	
1	*Carbon Emission Reduction*	↑	%	3	1,26	1,26	1,46	110,00%	3,30	●
2	Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2025 Controlling the use of the Investment Budget in accordance with the 2025 ABOP	→←	%	2	95-100	95-100	90,34%	95,09%	1,90	●
E	**Pengembangan Talenta** Unleash Talent			**6**					**6,45**	
1	*Talent Diversity (Millenial, Women)*	↑	%	2	100% Rasio Millenial 19 Rasio *Women* 32 100% Millennial Ratio 19; Women Ratio 32	100% Rasio Millenial 19 Rasio *Women* 32 100% Millennial Ratio 19; Women Ratio 32	Rasio Milenial 21,28% Rasio *Women* 38,30% Millennial Ratio 21.28%; Women Ratio 38.30%	110,00%	2,20	●

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicator		Unit Description	Bobot Weight	Target 2025 2025 Target	s.d. Desember 2025 until December 2025				
						Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	*Human Capital Readiness* (HCR) & *Organizational Capital Readiness* (OCR) dan Produktivitas Pegawai Human Capital Readiness (HCR) & Organizational Capital Readiness (OCR) and Employee Productivity	↑	%	2	100,00	100,00	102,70	102,70%	2,05	●
3	Lost Time Injury Frequency Rate	↓	Indeks (per 1 juta jam kerja) Index (per 1 million working hours)	2	0,116	0,116	0,029	110,00%	2,20	●
F	**Kepatuhan** Compliance								**0,00**	
1	*Compliance* (GCG, Kepatuhan HSSE, *Auditor, Reporting,* Busev *Alignment,* PACA, *Critial Event*) Compliance (GCG, HSSE Compliance, Auditor, Reporting, Busev Alignment, PACA, Critial Event)			Max (-10)				100,00%	0,00	●
	TOTAL			**95**					**100,38**	
	NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) ORGANIZATIONAL PERFORMANCE SCORE (NKO)			**100**					**105,66**	●

Keterangan :
- Belum dilakukan proses pengukuran
- ● Tercapai (NKO ≥ 100)
- ● Hampir Tercapai (95 ≤ NKO < 100)
- ● Perlu Peningkatan (NKO < 95)

Description:
- No measurement process yet
- ● Achieved (NKO ≥ 100)
- ● Almost Achieved (95 ≤ NKO < 100)
- ● Need Improvement (NKO < 95)

Grafik Pencapaian KPI
Chart of KPI Achievement

(skor) (score)

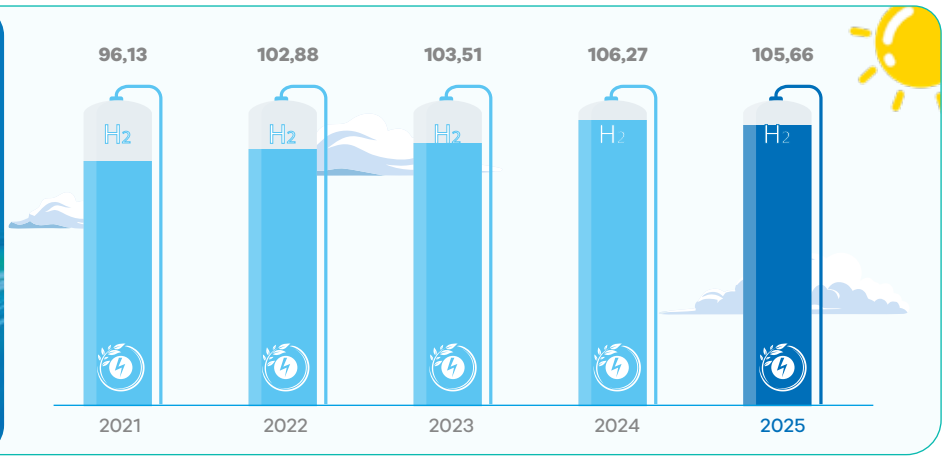

Prospek Usaha
Business Prospect

Prospek Ekonomi Makro Global
Global Macroeconomic Prospect

Perekonomian global pada tahun 2026 menghadapi tekanan yang semakin besar seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, khususnya akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang memicu gangguan terhadap rantai pasok energi dunia. Sebelum konflik terjadi, perekonomian global sebenarnya menunjukkan ketahanan yang cukup baik, ditopang oleh peningkatan investasi berbasis teknologi, kondisi keuangan yang relatif akomodatif, serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter di sejumlah negara. Namun, eskalasi konflik tersebut memberikan tekanan baru terhadap prospek ekonomi global melalui kenaikan harga komoditas, meningkatnya ketidakpastian, dan pengetatan kondisi keuangan global.

The global economy in 2026 is facing increasing pressure due to rising geopolitical tensions, particularly as a result of conflicts in the Middle East that are disrupting the global energy supply chain. Before the conflict occurred, the global economy was actually showing quite good resilience, supported by an increase in technology-based investments, relatively accommodative financial conditions, and fiscal and monetary policy support in several countries. However, the escalation of the conflict has put new pressure on the global economic outlook through increasing commodity prices, rising uncertainty, and stricter global financial conditions.

Dalam proyeksinya, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,1% pada tahun 2026 dan 3,2% pada tahun 2027. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan global periode 2024–2025 yang berada di kisaran 3,4%, sekaligus berada di bawah rata-rata historis sebelum pandemi. Revisi penurunan proyeksi terutama dipengaruhi oleh dampak konflik Timur Tengah terhadap pasar energi dan perdagangan global. Meski demikian, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi pertumbuhan, terutama yang ditopang oleh ekspansi investasi teknologi dan perdagangan sektor digital.

In its projections, the IMF estimates global economic growth to reach 3.1% in 2026 and 3.2% in 2027. These figures are lower than the global growth rate for the 2024–2025 period, which is around 3.4%, and also below the historical average prior to the pandemic. The projections' downward revision is mainly influenced by the impact of the Middle East conflict on global energy markets and trade. Nevertheless, several countries still show growth resilience, especially those supported by the expansion of technology investments and digital sector trade.

Dari sisi inflasi, tekanan global kembali meningkat setelah sebelumnya mulai menunjukkan tren penurunan. IMF memperkirakan inflasi global meningkat dari 4,1% pada tahun 2025 menjadi 4,4% pada tahun 2026 sebelum kembali menurun menjadi 3,7% pada tahun 2027. Kenaikan inflasi terutama dipicu oleh lonjakan harga energi akibat terganggunya pasokan minyak dan gas global, yang kemudian berdampak pada kenaikan biaya produksi, transportasi, pangan, dan berbagai komoditas lainnya. Risiko inflasi juga diperbesar oleh potensi efek lanjutan berupa kenaikan upah dan harga di berbagai negara apabila ekspektasi inflasi tidak terkendali.

From the inflation perspective, global pressure has increased again after previously showing a downward trend. The IMF predicts that global inflation will increase from 4.1% in 2025 to 4.4% in 2026 before declining again to 3.7% in 2027. Increases in inflation are mainly driven by a surge in energy prices due to disruptions in global oil and gas supply. It subsequently impacts the increase in production, transportation, food, and various other commodity costs. The risk of inflation is further complicated by the potential secondary effects of wage and price increases in various countries if inflation expectations are not kept under control.

Di tengah kondisi tersebut, negara berkembang dan negara importir komoditas energi diperkirakan menghadapi tekanan yang lebih berat dibandingkan negara maju. Pelemahan nilai tukar, meningkatnya biaya impor energi dan pangan, serta keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan utama bagi kelompok negara tersebut. Selain itu, ketidakpastian geopolitik yang masih tinggi turut meningkatkan volatilitas pasar keuangan global, mendorong kenaikan imbal hasil obligasi, serta memperkuat posisi dolar AS sebagai aset safe haven. Kondisi ini berpotensi memperketat arus pembiayaan global dan meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi di berbagai kawasan.

Ke depan, prospek ekonomi global masih dibayangi oleh risiko penurunan yang cukup signifikan. IMF menilai bahwa apabila konflik berlangsung lebih lama dan gangguan pasokan energi semakin meluas, pertumbuhan ekonomi global dapat turun hingga mendekati 2% dan inflasi meningkat hingga di atas 6%. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan global menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan sektor keuangan, serta mendorong pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*/AI), dipandang tetap memiliki potensi menjadi sumber pertumbuhan baru yang dapat mendukung produktivitas ekonomi global dalam jangka menengah.

Sumber: *World Economic Outlook* (WEO), International Monetray Fund (IMF) edisi April 2026.

Amidst these conditions, developing countries and energy commodity-importing countries are expected to face heavier pressures compared to developed countries. The depreciation of the exchange rate, the increasing energy and food import fees, and the limited fiscal space have become the main challenges for this group of countries. In addition, the still high geopolitical uncertainty also increases the volatility of global financial markets, drives up bond yields, and strengthens the position of the US dollar as a safe-haven asset. This condition has the potential to tighten global financing flows and increase risks to economic stability in various regions.

In the future, the global economic outlook is still marked by significant downside risks. The IMF assesses that if the conflict lasts longer and energy supply disruptions become more widespread, global economic growth could decrease to around 2% and inflation might increase above 6%. Therefore, global policy coordination becomes increasingly important to maintain price stability, strengthen the financial sector's resilience, and encourage a more sustainable economic recovery. On the other hand, technological developments, particularly artificial intelligence (AI), are still seen as having the potential to become a new source of growth that can support global economic productivity in the medium term.

Source: World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF) April 2026 edition.

Prospek Ekonomi Makro Indonesia
Indonesia's Macroeconomic Outlook

Berdasarkan proyeksi IMF, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat menjadi 3,1% pada 2026 sebelum sedikit meningkat menjadi 3,2% pada 2027. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, kenaikan harga energi, serta terganggunya proses disinflasi akibat konflik di kawasan Timur Tengah. IMF juga memperkirakan inflasi global akan mengalami kenaikan moderat pada 2026 sebelum kembali menurun pada 2027, seiring masih tingginya tekanan harga komoditas dan pengetatan kondisi keuangan global.

Based on IMF projections, global economic growth is expected to slow down to 3.1% in 2026 before slightly increasing to 3.2% in 2027. The slowdown is mainly influenced by increasing global geopolitical uncertainty, increased energy prices, and the disruption of the disinflation process due to conflicts in the Middle East region. The IMF also predicts that global inflation will experience moderate increases in 2026 before declining again in 2027, amidst high commodity price pressures and tightening global financial conditions.

Meskipun menghadapi tekanan global yang meningkat, ekonomi dunia dinilai masih memiliki tingkat resiliensi yang cukup baik, didukung oleh aktivitas sektor swasta yang tetap kuat di sejumlah negara serta prospek produktivitas berbasis teknologi, termasuk pengembangan *artificial intelligence* (AI). Namun demikian, IMF menegaskan bahwa risiko perlambatan ekonomi global masih mendominasi, terutama apabila konflik geopolitik berlangsung lebih panjang, fragmentasi perdagangan semakin meningkat, dan volatilitas pasar keuangan terus berlanjut.

Despite facing increasing global pressures, the world economy is considered to have a fairly good level of resilience, supported by strong private sector activity in several countries and the prospects of technology-based productivity, including the development of artificial intelligence (AI). However, the IMF emphasizes that the risk of a global economic slowdown still dominates, especially if geopolitical conflicts persist longer, trade fragmentation increases, and financial market volatility resumes.

Untuk Indonesia, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0% pada 2026 dan meningkat menjadi 5,1% pada 2027. Proyeksi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan estimasi pada WEO Januari 2026, sejalan dengan meningkatnya tekanan eksternal global dan kenaikan harga energi dunia. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tergolong relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan, didukung oleh kuatnya permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, dan keberlanjutan investasi nasional.

For Indonesia, the IMF projects an economic growth of 5.0% in 2026 and an increase to 5.1% in 2027. This projection is slightly lower than the estimate in the January 2026 WEO, in line with increasing global external pressures and rising world energy prices. Nevertheless, Indonesia's economic growth remains relatively high compared to several countries in the region, supported by strong domestic demand, household consumption, and the sustainability of national investment.

Di tengah tantangan global, Pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional dengan target pertumbuhan sebesar 5,4% pada 2026 dan potensi mencapai 6% melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, percepatan investasi, serta keberlanjutan program prioritas nasional. Optimisme tersebut juga didukung oleh proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 4,9%–5,7%, mencerminkan ketahanan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah dinamika global.

Amidst global challenges, the Government remains optimistic about the national economic outlook with a growth target of 5.4% in 2026 and the potential to reach 6% through strengthening the synergy of fiscal and monetary policies, accelerating investments, and sustaining national priority programs. This optimism is also supported by Bank Indonesia's projection, which estimates economic growth in 2026 to be in the range of 4.9%–5.7%, reflecting the resilience of the domestic economy amidst global dynamics.

Sumber: *World Economic Outlook* (WEO) oleh International Monetray Fund (IMF) edisi April 2026, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (diolah)

Source: World Economic Outlook (WEO) oleh International Monetary Fund (IMF) April 2026 edition, Ministry of Finance, and Bank Indonesia (edited)

Prospek Industri Ketenagalistrikan Ke Depan
Future Prospect of Electricity Industry

Dalam menghadapi dinamika global dan nasional di sektor energi, industri ketenagalistrikan Indonesia terus diarahkan menuju sistem penyediaan energi yang lebih andal, bersih, dan berkelanjutan. PT PLN (Persero) telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai panduan strategis dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek

In addressing global and national dynamics in the energy sector, Indonesia's electricity industry continues to be directed toward a more reliable, clean, and sustainable energy supply system. PT PLN (Persero) has developed the 2025–2034 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) as a strategic guide in planning and implementing long-term electricity

tenaga listrik jangka panjang. Dokumen ini menjadi landasan transisi energi nasional dalam mencapai target *Net Zero Emissions* (NZE) melalui pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang terintegrasi. Arah kebijakan pengembangan pembangkitan menitikberatkan pada pemenuhan target bauran energi baru terbarukan (EBT), termasuk pemanfaatan *Variable Renewable Energy* (VRE). Peningkatan keandalan sistem dilakukan untuk memenuhi kriteria *reserve margin* (RM) dan standar N-1 guna memastikan pengadaan listrik yang andal sekaligus efisien.

Pemerintah dan PLN juga menaruh perhatian besar pada penyediaan akses listrik yang merata, dengan target rasio elektrifikasi mencapai 100% di seluruh wilayah Indonesia pada periode 2025-2029. Secara keseluruhan, rata-rata proyeksi pertumbuhan penjualan listrik nasional diperkirakan mencapai 5,29% per tahun hingga tahun 2029. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, RUPTL merencanakan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 27 GW, jaringan transmisi sepanjang 32,5 ribu kms, serta gardu induk sebesar 70 ribu MVA dalam rentang waktu lima tahun pertama. Pengembangan ini didasari oleh strategi demand driven, di mana pembangunan infrastruktur diselaraskan dengan proyeksi permintaan listrik yang akurat untuk menghindari risiko inefisiensi.

Menanggapi arah perkembangan tersebut, PLN NP menyusun strategi korporat secara komprehensif dan terukur guna mengakselerasi kontribusi perusahaan dalam mendukung transisi energi nasional. Strategi ini dirumuskan melalui pendekatan SWOT analysis untuk memetakan kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan tantangan eksternal yang dihadapi Perusahaan.

PLN NP berkomitmen menjadi pelaku utama dalam pengembangan pembangkit rendah emisi dan optimalisasi infrastruktur eksisting demi mendukung target bauran energi nasional. Di saat yang sama, besarnya kebutuhan investasi nasional yang rata-rata mencapai Rp213,1 triliun per tahun menjadi momentum penting bagi PLN NP untuk memperluas skala usaha secara berkelanjutan. Dengan strategi yang solid dan pemanfaatan mekanisme perencanaan yang terintegrasi secara vertikal maupun horizontal, PLN NP optimis mampu memainkan peran sentral dalam transformasi energi nasional sekaligus memastikan keberlangsungan bisnis yang tangguh, kompetitif, dan ramah lingkungan.

projects. This document serves as the foundation for the national energy transition in achieving the Net Zero Emissions (NZE) target through the development of integrated electricity infrastructure. The direction of the generation development policy emphasizes meeting the target for the mix of new renewable energy (NRE), including the utilization of Variable Renewable Energy (VRE). System reliability improvements are carried out to meet the reserve margin (RM) criteria and N-1 standards to ensure a reliable and efficient electricity supply.

The government and PLN also place great emphasis on providing equitable access to electricity, with a target electrification ratio of 100% across all regions of Indonesia during the 2025-2029 period. Overall, the average projection for national electricity sales growth is estimated to reach 5.29% per year until 2029. To meet this demand, the RUPTL plans to add 27 GW of power plant capacity, a transmission network spanning 32,500 kilometers, and substations with a capacity of 70,000 MVA within the first five years. This development is based on a demand-driven strategy, where infrastructure development is aligned with accurate electricity demand projections to avoid the risk of inefficiency.

In response to this development, PLN NP formulates a comprehensive and measurable corporate strategy to accelerate the Company's contribution to supporting the national energy transition. This strategy was developed using a SWAT analysis approach to map the internal strengths and weaknesses, as well as the external opportunities and challenges faced by the Company.

PLN NP is committed to being a key player in the development of low-emission power plants and the optimization of existing infrastructure to support the national energy mix targets. At the same time, the significant national investment needs, averaging Rp213.1 trillion per year, create an important momentum for PLN NP to expand its business scale sustainably. With a solid strategy and the utilization of vertically and horizontally integrated planning mechanisms, PLN NP is optimistic about playing a central role in the national energy transformation while ensuring a resilient, competitive, and environmentally friendly business continuity.

Strategi dan Peluang PLN NP Ke Depan
PLN NP's Future Strategy and Opportunities

Dalam rangka mendukung percepatan pengembangan industri ketenagalistrikan nasional sekaligus memperkuat peran dan kontribusi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, PLN NP merumuskan strategi yang komprehensif dan terukur. Strategi ini dibangun atas dasar evaluasi menyeluruh melalui analisis internal dan eksternal perusahaan dengan menggunakan metode Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Pendekatan ini memungkinkan PLN NP untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki, sekaligus memetakan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan eksternal. Dengan demikian, strategi yang disusun tidak hanya bersifat adaptif terhadap dinamika pasar dan regulasi, tetapi juga proaktif dalam memanfaatkan potensi serta mengatasi tantangan demi pencapaian visi & misi Perusahaan dan keberlanjutan industri ketenagalistrikan nasional.

In order to support the acceleration of the national electricity industry development while also strengthening the role and contribution of the Company in meeting national energy needs, PLN NP has formulated a comprehensive and measurable strategy. This strategy is built on a comprehensive evaluation through internal and external analysis of the Company using the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis method. This approach allows PLN NP to identify its internal strengths and weaknesses while also mapping out opportunities and threats in the external environment. Thus, the strategy developed is not only adaptive to market dynamics and regulations but also proactive in leveraging potential and overcoming challenges to achieve the Company's vision and mission and the sustainability of the national electricity industry.

Strengths

1. Beberapa Pembangkit PLN NP dalam segi *availability* dan biaya O&M berada di kategori Q1 dan Q2 yang menunjukkan keunggulan operasional yang mengungguli peers dalam hal keandalan dan kinerja.
2. PLN NP mempertahankan margin keuntungan yang stabil, yang mencerminkan manajemen keuangan dan pengambilan keputusan strategis yang kuat. *Bottom-line benefit* yang didapatkan dari IPP tidak berdampak pada liabilitas jangka panjang.
3. *Pipeline* proyek PLN NP mencakup inisiatif dari PLN seperti pengalihan aset dan peluang IPP yang membuka jalan bagi pertumbuhan laba dan perluasan pasar dalam rangka memenuhi demand listrik yang terus meningkat.
4. PLN NP melaksanakan pengembangan bisnis EBT, dengan fokus pada aset pembangkit listrik tenaga air, surya, dan tenaga angin yang selaras dengan Kebijakan PLN dan usaha mendukung praktik ramah lingkungan.
5. PLN NP memiliki tata kelola dan aset manajemen pembangkit listrik yang didukung oleh tenaga ahli (*expertise*) yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam pengelolaan pembangkit.

1. Several PLN NP Power Plants, in terms of availability and O&M costs, are in the Q1 and Q2 categories, indicating operational excellence that surpasses peers in terms of reliability and performance.
2. PLN NP maintains a stable profit margin, reflecting strong financial management and strategic decisionmaking. The bottom-line benefit obtained from IPP does not impact long-term liabilities.
3. The PLN NP project pipeline includes initiatives from PLN, such as asset transfers and IPP opportunities that pave the way for profit growth and market expansion to meet the continuously increasing electricity demand.
4. PLN NP implements NRE business development, focusing on hydropower, solar, and wind power generation assets that align with PLN's policies and efforts to support environmentally friendly practices.
5. PLN NP has governance and power plant asset management supported by experienced experts with expertise in power plant management.

6. PLN NP merupakan Pioneer dalam mengimplementasikan teknologi *Co-Firing* Biomassa di Indonesia melalui PLTU Paiton.
7. PLN NP mengimplementasikan digitalisasi pembangkit listrik (*I-Core*) pada pembangkit yang dimiliki dan dikelola sebagai upaya dalam mengoptimalkan efisiensi pembangkit dan meningkatkan *value creation* Perusahaan.
8. PLN NP mempunyai *Project Green Hydrogen* pertama di Indonesia yaitu di UP Muara Karang.
9. PLN NP menyelesaikan PLTS Terapung Cirata 145 MWac sebagai PLTS terapung pertama di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian NZE.

6. PLN NP is a pioneer in implementing Biomass Co-Firing technology in Indonesia through the Paiton Power Plant.
7. PLN NP implements power plant digitalization (I-Core) at the plants it owns and operates in an effort to optimize plant efficiency and enhance the Company's value creation.
8. PLN NP has the first Green Hydrogen Project in Indonesia, located at Muara Karang GU.
9. PLN NP completed the Cirata Floating SPP with a capacity of 145 MWac, making it the first floating SPP in Indonesia and one of the largest in Southeast Asia, as a manifestation of its commitment to supporting the achievement of NZE.

Weaknesses

1. Beberapa pembangkit PLN NP semakin tua menyebabkan adanya penurunan CF 8% secara *year-on-year*. Oleh karena itu perlu diperhatikan untuk mengelola efisiensi operasional dan memastikan *output* yang optimal.
2. Sebagian besar pembangkit PLN NP masuk dalam kategori Q2/Q3 dari sisi kinerja teknis dan Q3/Q4 dalam hal parameter biaya, menekankan kebutuhan untuk perbaikan dari sisi efektivitas operasional dan manajemen biaya.
3. PLN NP menghadapi tantangan dalam eksekusi proyek baru, seperti EBT, yang menyebabkan terjadinya penundaan terutama adanya proses yang ekstensif pada tahap pra-konstruksi.
4. Terdapat ketergantungan pada mekanisme global bond konvensional dalam PLN *Group*, sehingga akses terhadap sumber pendanaan eksternal terbatas.
5. Penyelarasan pemangku kepentingan PLN NP secara intensif sangat diperlukan dalam pengembangan EBT yang memunculkan tantangan dalam aspek regulasi dan persetujuan yang diperlukan.
6. Kemungkinan adanya ketidakselarasan struktur biaya karyawan Perusahaan terhadap pertumbuhan pendapatan, sehingga terdapat tantangan dalam aspek efisiensi.
7. Jasa O&M yang melayani pembangkit listrik berukuran kecil membatasi peluang nilai keunggulan operasional PLN NP pada operasi yang lebih besar.
8. Transisi energi mendorong adanya kompetensi baru yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan pada personil PLN NP sebagai upaya meningkatkan daya saing.

1. Some PLN NP power plants become outdated, resulting in an 8% year-on-year decrease in CF. Therefore, it is necessary to pay attention to managing operational efficiency and ensuring optimal output.
2. Most of PLN NP's power plants fall into the Q2/Q3 category in terms of technical performance and Q3/Q4 in terms of cost parameters, highlighting the need for improvements in operational effectiveness and cost management.
3. PLN NP faces challenges in executing new projects, such as NRE, which causes delays primarily due to extensive processes in the pre-construction phase.
4. There is a dependence on the conventional global bond mechanism within the PLN Group, resulting in limited access to external funding sources.
5. The intensive alignment of PLN NP stakeholders is crucial in the development of renewable energy, which presents challenges in regulatory aspects and the necessary approvals.
6. The possibility of a misalignment between the Company's employee cost structure and the increase in revenue leads to challenges in efficiency.
7. O&M services that cater to small power plants limit the opportunities for PLN NP's operational excellence in more substantial operations.
8. The energy transition drives the need for new competencies to be developed and enhanced among PLN NP employees to improve competitiveness.

Opportunities

1. Eksplorasi green build-out (seperti: pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, de-dieselisasi) untuk mendukung pencapaian tujuan dekarbonisasi nasional dan internasional melalui IPP.
2. Pengembangan *co-firing* dan CCUS dapat mengurangi emisi GRK dari pengoperasian pembangkit listrik tenaga termal. Dalam jangka pendek, fokus untuk *co-firing* biomassa dan untuk jangka panjang (setelah tahun 2040) teknologi *carbon capture and storage* dapat digunakan.
3. Target net zero dapat mempercepat adanya keputusan untuk menciptakan kebijakan yang dapat mendorong kemajuan teknologi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai *net zero* pada tahun 2050 pada COP 27. Dorongan kuat pemerintah dapat menggalakkan kebijakan yang memberikan subsidi, insentif terkait produksi, dan sebagainya untuk mendorong pemain swasta memasuki bisnis pembangkitan dan mendorong investasi.
4. Tujuan strategis PLN Group untuk mencapai *top quartile performance* akan mendorong efisiensi operasional, di mana teknologi baru akan mendukung transformasi digital PLN NP menuju Q1 *performance* salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital dan *advanced analytics*.
5. Pengalihan aset baru dari PLN *Holding* dapat meningkatkan *market share* PLN NP, dan dengan demikian memposisikannya sebagai pemain yang kuat di pasaran dan bagi investor baik sebagai Pengelola O&M maupun penyedia *spare part.*
6. Dengan semakin berkembangnya kawasan industri, maka dibutuhkan lebih banyak pembangkit listrik captive. Untuk industri tertentu seperti semen, pembangkit listrik captive diperlukan untuk menyediakan uap. PLN NP dapat menjajaki peluang untuk membuat dan mengoperasikan pembangkit listrik *captive* ini atau bermitra dengan konsumen untuk membantu mereka membangun pembangkit tersebut.
7. *Total additional* pembangkitan yang direncanakan di kawasan industri baru di seluruh Indonesia yang tidak termasuk dalam RUPTL mencapai 6 GW, yang tersebar di 13 kawasan industri. Pengembangan dapat dilakukan dengan Kolaborasi melalui IPP serta melalui perluasan pasar EPC, O&M dan *Spare Part.*
8. Peningkatan Kolaborasi dengan produsen dan pemasok spare part serta mendorong penciptaan peluang *independent bidding* untuk Kontrak EPC.

1. Exploration of green build-out (such as hydropower plants, solar power, and de-dieselization) to support the achievement of national and international decarbonization goals through IPP.
2. The development of co-firing and CCUS can reduce GHG emissions from the operation of thermal power plants. In the short term, the focus is on co-firing biomass, and in the long term (after 2040), carbon capture and storage technology can be utilized.
3. The net-zero target can accelerate decisions to create policies that can drive technological advancement. The Indonesian government is committed to achieving net zero by 2050 at COP 27. The strong push from the government can encourage policies that provide subsidies, production-related incentives, and so on to encourage private players to enter the generation business and drive investment.
4. The strategic goal of PLN Group to achieve top quartile performance will drive operational efficiency, where new technologies will support the digital transformation of PLN NP towards Q1 performance, one of which is by utilizing digital technology and advanced analytics.
5. The transfer of new assets from PLN Holding can increase PLN NP's market share, thereby positioning it as a strong player in the market and for investors, both as an O&M Manager and a spare parts provider.
6. With the rapid development of industrial areas, more captive power plants are needed. Particular industries, such as cement and captive power plants, are required to provide steam. PLN NP can explore opportunities to create and operate these captive power plants or partner with consumers to help them build these plants.
7. The total additional generation planned in new industrial areas across Indonesia, not included in the RUPTL, reaches 6 GW, spread across 13 industrial zones. Development can be carried out through collaboration with IPP as well as through the expansion of the EPC, O&M, and Spare parts markets.
8. Enhancing collaboration with manufacturers and spare part suppliers, as well as encouraging the creation of independent bidding opportunities for EPC Contracts.

Threats

1. Tekanan rantai pasokan global dapat menyebabkan kenaikan harga secara tiba-tiba (misalnya, energi primer termasuk bahan baku biomassa, harga solar PV *module*).
2. Perubahan peraturan akibat revisi kebijakan (misalnya mengenai TKDN) dapat mengakibatkan perubahan dinamika pasar.
3. Strategi PLN Group dapat berdampak pada perencanaan pembangkit listrik karena setiap perubahan (misalnya, *coal phase down* PLTU) memerlukan pemikiran ulang strategi *sub-holding.*
4. Kondisi aset yang berbeda-beda yang dialihkan dari PLN Holding memerlukan kesiapan operasional yang lebih baik. Jika aset yang dialihkan dari PLN ke PLN NP merupakan aset dengan kinerja kurang baik (tidak berada dalam kategori *top quartile* dibandingkan dengan tolok ukur global), maka PLN NP memerlukan upaya lebih lanjut agar portofolio pembangkitnya dapat mencapai *top quartile performance*.
5. Pasar O&M dan EPC yang terfragmentasi berarti bahwa kompetitor dapat memperoleh lebih banyak *market share* dan menyaingi PLN NP di pasaran. Sebagai contoh, Pabrikan OEM saat ini memberikan kontrak layanan jangka panjang pasca COD.
6. Jika tren penjualan dari pembangkit listrik konvensional menurun, PLN NP perlu mencari bisnis baru. Penurunan pendapatan dapat dikompensasi dari lini bisnis lain, seperti O&M dan EPC, tetapi hal ini memerlukan pemikiran ulang yang signifikan mengenai strategi jangka panjang.
7. Hambatan teknologi dapat memperlambat rencana transisi energi sehingga PLN NP mungkin perlu mengubah rencana jangka panjangnya
8. Kelesuan ekonomi dapat menyebabkan pemotongan anggaran dan penundaan proyek infrastruktur, sehingga mempengaruhi permintaan suku cadang. Selain itu hal ini juga berpotensi berdampak pada berdampak pada kelayakan finansial proyek IPP.
9. Hambatan teknologi (tertundanya kelangsungan H2 yang ramah lingkungan) dapat menghambat inovasi dan pengadopsian teknologi baru secara global. Diperlukan lebih banyak inovasi untuk mencapai pengadopsian teknologi dalam skala besar seperti *green-hydrogen* dan *carbon capture.*

1. Global supply chain pressures can cause sudden price increases (for example, primary energy, including biomass raw materials, and solar PV module prices).
2. Regulatory changes due to policy revisions (for example, regarding local content requirements) can result in shifts in market dynamics.
3. The PLN Group's strategy can impact power plant planning because any changes (for example, the coal phase-down of coal-fired power plants) require a rethinking of the sub-holding strategy.
4. The varying conditions of the assets transferred from PLN Holding require better operational readiness. If the assets transferred from PLN to PLN NP are underperforming assets (not in the top quartile category compared to global benchmarks), then PLN NP will need further efforts to ensure its power generation portfolio can achieve top quartile performance.
5. The fragmented O&M and EPC market means that competitors can gain more market share and compete with PLN NP in the market. For example, OEM manufacturers currently provide long-term post-COD service contracts.
6. If the sales trend of conventional power plants declines, PLN NP needs to seek new business opportunities. The decline in revenue can be compensated by other business lines, such as O&M and EPC, but this requires significant rethinking of the long-term strategy.
7. Technological constraints can slow down energy transition plans, so PLN NP may need to revise its long-term plans.
8. Economic sluggishness can lead to budget cuts and delays in infrastructure projects, thereby affecting the demand for spare parts. In addition, this could also potentially impact the financial feasibility of IPP projects.
9. Technological barriers (the delay in the sustainability of environmentally friendly H2) can hinder innovation and the global adoption of new technologies. More innovation is needed to achieve large-scale adoption of technologies such as green hydrogen and carbon capture.

Target Kinerja Perusahaan Tahun 2026
Company Performance Target for 2026

Berbekal capaian kinerja yang positif sepanjang tahun 2025, PLN NP menetapkan target kinerja tahun 2026 dengan optimisme yang terukur dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Pencapaian target operasional maupun keuangan pada tahun sebelumnya menjadi fondasi strategis bagi Perusahaan dalam menyusun sasaran yang lebih progresif, guna mendorong penguatan kinerja yang lebih solid di tahun 2026.

Fueled with positive performance achievements throughout 2025, PLN NP sets the performance targets for 2026 with measured optimism and a focus on sustainable growth. The achievement of operational and financial targets in the previous year serves as a strategic foundation for the Company in formulating more progressive goals, aimed at driving stronger performance in 2026.

Target Kinerja Keuangan Tahun 2026
Financial Performance target for 2026

Tabel Target Pendapatan dan Laba Tahun 2026 (Rp juta)
Table of Revenue and Profit Target for 2026 (Rp million)

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	Target RKAP 2026 2026 ABOP Target
Pendapatan Usaha Revenue	98.893.003	107.336.061
- Pendapatan dari Penjualan Tenaga Listrik Revenue from Electricity Sales	94.971.854	102.754.613
- Pendapatan dari Jasa O&M Revenue from O&M Services	2.151.462	2.592.959
- Pendapatan dari Jasa Konstruksi Revenue from Construction Services	1.171.360	1.025.862
- Pendapatan dari Jasa Lainnya Revenue from Other Services	598.327	962.625
Beban Usaha Operating Expenses	84.192.736	93.374.848
Laba Usaha Operating Income	14.700.267	13.961.212
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**13.057.644**	**12.844.364**

Target Pendapatan Usaha Tahun 2026
Revenue Target for 2026

Target pendapatan usaha tahun 2026 adalah sebesar Rp107,34 triliun diproyeksikan naik 8,5% didukung oleh rencana kinerja operasi dan rencana optimasi biaya usaha, baik dari biaya tenaga listrik, biaya jasa O&M ataupun biaya usaha lainnya dengan tetap memperhatikan pertumbuhan keuangan Perusahaaan.

The revenue target for 2026 is Rp107.34 trillion. It is projected to increase by 8.5%, supported by operational performance plans and cost optimization initiatives. This includes optimizing electricity costs, O&M service costs, and other operating expenses, while taking into account the Company's financial growth.

- Pendapatan dari Penjualan Tenaga Listrik diproyeksikan lebih tinggi 8,19% daripada realisasi 2025 dikarenakan Harga Jual Rata-Rata tenaga listrik 2026 diestimasikan naik hingga 15% menjadi Rp 1.728/kWh sebagai akibat dari proyeksi kenaikan Biaya Pokok Produksi (BPP) khususnya kenaikan bahan bakar.
- Pendapatan dari Jasa O&M diproyeksikan lebih tinggi 20,52% daripada realisasi 2025 dikarenakan estimasi penambahan jumlah kontrak Jasa O&M atas aset pembangkit PLN eksisting maupun pembangkit baru yang dijadwalkan pada tahun 2026.
- Pendapatan dari Jasa Konstruksi diproyeksikan lebih rendah 12,42% daripada realisasi 2025 dikarenakan penyesuaian terhadap asumsi jumlah proyek yang akan diikuti pada 2026 dan *progress* penyelesaian proyek yang dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
- Pendapatan dari Jasa Lainnya diproyeksikan lebih tinggi 60,89% daripada realisasi 2025 menunjukkan optimisme pertumbuhan jumlah proyek dari lini pengembangan usaha stockist, IMAP, jasa IT dan *Beyond* kWh yang berpotensi untuk diikuti pada 2026.

- Revenue from Electricity Sales is projected to be 8.19% higher than the 2025 realization due to the estimated 15% increase in the 2026 average selling price of electricity to Rp1,728/kWh as a result of projected increases in the Cost of Production (BPP), particularly the increase in fuel costs.
- Revenue from O&M Services is projected to be 20.52% higher than the 2025 realization due to the projected increase in the number of O&M Service contracts for both existing PLN power plants and new power plants scheduled for 2026.
- Revenue from Construction Services is projected to be 12.42% higher than the 2025 due to adjustments to the assumptions regarding the number of projects to be undertaken in 2026 and the progress of projects that can be completed in the current year.
- Revenue from Other Services is projected to be 60.89% higher than the 2025 realization, indicating optimism regarding the growth in the number of projects in the stockist business development, IMAP, IT services, and Beyond kWh sectors, which are expected to be taken part in 2026.

Target Laba Tahun Berjalan Tahun 2026
Profit for the Year Target for 2026

Target laba tahun berjalan tahun 2026 adalah sebesar Rp12,84 triliun, 1,6% lebih rendah dibandingkan tahun 2025. Hal ini disebabkan karena peningkatan nilai Beban Usaha sebesar 10,9% tidak diikuti dengan kenaikan Pendapatan Usaha yang hanya sebesar 8,5%. Pada tahun 2026 kontribusi perusahaan asosiasi diproyeksikan sebesar Rp2,50 triliun dan akumulasi dividen Rp5,34 triliun menjadi yang menjadi salah satu factor utama penopang profitabilitas dan arus kas PLN NP.

The target profit for the year 2026 is Rp12.84 trillion, 1.6% lower compared to 2025. It is due to the increase in Operating Expenses by 10.9%, not accompanied by an increase in Operating Revenue, which only increased by 8.5%. By 2026, the contribution from associated companies is projected to be Rp2.50 trillion, and the accumulated dividends are Rp5.34 trillion, which are among the main factors supporting the profitability and cash flow of PLN NP.

Target Posisi Keuangan Tahun 2026
Financial Position Target for 2026

Tabel Realisasi terhadap Target Posisi Keuangan Tahun 2026 (Rp juta)
Table of Realization of Financial Position Target for 2026 (Rp million)

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	Target RKAP 2026 2026 ABOP Target
Aset Lancar Current Assets	63.930.282	58.078.816
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	293.740.975	304.576.867

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	Target RKAP 2026 2026 ABOP Target
Jumlah Aset Total Assets	**357.671.257**	**362.655.683**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	13.071.204	12.751.094
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	29.445.572	31.647.937
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**42.516.776**	**44.399.031**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**315.154.481**	**318.256.652**

Target Jumlah Aset Tahun 2026
Total Assets Target for 2026

Target jumlah aset tahun 2026 adalah sebesar Rp362,66 triliun dengan asumsi aset tidak lancar 2026 mengalami kenaikan sekitar 3,6% daripada realisasi 2025 selaras dengan rencana investasi atas penguatan pembangkit dan pengembangan usaha.

The target of total assets in 2026 is Rp362.66 trillion, assuming that non-current assets in 2026 increase by around 3.6% compared to the 2025 figures, in line with the investment plan for power plant upgrades and business development.

Target Jumlah Liabilitas Tahun 2026
Total Liabilities Target for 2026

Target jumlah liabilitas tahun 2026 adalah sebesar Rp44,40 triliun dengan asumsi jumlah liabilitas tidak lancar naik 7,5% setara dengan Rp2,2 triliun karena peningkatan liabilitas pajak tangguhan, dan liabilitas manfaat karyawan, selain itu liabilitas lancar diproyeksikan turun 2,4% setara Rp320 miliar karena realisasi pembayaran hutang pajak 2025, utang usaha, dan angsuran pokok SHL *add on* Muara Tawar pada tahun 2026.

The target of total liabilities in 2026 is Rp44.40 trillion, assuming that non-current liabilities increase by 7.5%, equivalent to Rp2.2 trillion, due to an increase in deferred tax liabilities and employee benefit liabilities. Furthermore, current liabilities are projected to decrease by 2.4%, equivalent to Rp320 billion, due to the settlement of 2025 tax liabilities, trade payables, and principal installments for the Muara Tawar SHL add-on in 2026.

Target Jumlah Ekuitas Tahun 2026
Total Equity Target for 2026

Target jumlah ekuitas tahun 2026 adalah sebesar Rp318,26 triliun dengan asumsi naik 1% atau setara Rp3,1 triliun atas realisasi 2025, hal tersebut dikarenakan adanya *set off* dividen atas laba tahun 2025 terhadap piutang komponen A namun dengan tidak memperhitungkan laba asosiasi sebesar Rp2,4 triliun, serta kenaikan pada kepentingan non pengendali atas rencana penyertaan Danantara pada PLN Nusantara Power Renewables sebesar Rp1,2 triliun yang dilakukan secara bertahap, menyesuaikan rencana kebutuhan investasi IPP di PLN NR.

The target of total equity in 2026 is Rp318.26 trillion, assuming a 1% increase or equivalent to Rp 3.1 trillion over the 2025 realization, due to the set-off of dividends on the 2025 profit against component A receivables but not accounting for the associate profit of Rp2.4 trillion, as well as the increase in non-controlling interest in the Danantara investment plan in PLN Nusantara Power Renewables of Rp1.2 trillion, which will be conducted gradually, adjusting the IPP investment needs plan in PLN NR.

Target Struktur Modal Tahun 2026
Capital Structure Target for 2026

Tabel Target Struktur Modal Tahun 2026 (Rp juta)
Table of Capital Structure Target for 2026 (Rp million)

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization		Target RKAP 2026 2026 ABOP Target	
	Nominal (Rp juta) Nominal (Rp million)	Komposisi (%) Composition (%)	Nominal (Rp juta) Nominal (Rp million)	Komposisi (%) Composition (%)
Liabilitas Liabilities	42.516.776	11,89	44.399.031	12,24
Ekuitas Equity	315.154.481	88,11	318.256.653	87,76
Aset Assets	**357.671.257**	**100,00**	**362.655.684**	**100,00**

Target Aspek Operasional Tahun 2026
Operational Aspect Target for 2026

Target Kinerja Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2026
Target of Coal Generation Unit Performance for 2026

Tabel Target Kinerja Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2026
Table of the Target of Coal Generation Unit Performance for 2026

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2025 2025 Realization	Target 2026 2026 Target
Equivalent Availability Factor (EAF)	%	86,86	83,34
Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)	%	1,92	2,61
Net Capacity Factor (NCF)	%	69,82	62,00
Net Plant Heat Rate (NPHR)	kCal/kWh	3.196,43	3.343,30
Specific Fuel Consumption (SFC) Batubara Specific Fuel Consumption (SFC) of Coal	(kg/kWh)	0,7047	0,7194

Target EAF Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2026
EAF Target of Coal Generation Unit for 2026

PLN NP menetapkan target EAF unit pembangkitan batubara tahun 2026 adalah sebesar 83,34% dengan asumsi berdasarkan tingkat kesiapan pembangkit dan durasi pemeliharaan terencana tahun 2026.

PLN NP sets the EAF target for coal generation units in 2026 at 83.34%, assuming based on the power plants' readiness levels and the duration of scheduled maintenance in 2026.

Target EFOR Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2026
EFOR Target of Coal Generation Unit for 2026

PLN NP menetapkan target EFOR unit pembangkitan batubara tahun 2026 adalah sebesar 2,61% dengan asumsi masih terdapat *chronic problem* pada tahun 2025 yang belum terselesaikan dan akan ditindaklanjuti pada tahun 2026.

PLN NP sets the EFOR target for coal generation units in 2026 at 2.61%, assuming that chronic problems remain unresolved in 2025 and will be followed up in 2026.

Target NCF Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2026
NCF Target of Coal Generation Unit for 2026

PLN NP menetapkan target NCF unit pembangkitan batubara tahun 2026 adalah sebesar 62,00% dengan asumsi berdasarkan tingkat kesiapan pembangkit, pertumbuhan konsumsi listrik nasional dan masuknya pembangkit baru ke sistem kelistrikan nasional.

PLN NP sets the NCF target for coal generation units by 2026 at 62.00%, based on assumptions regarding the operational readiness of power plants, the growth in national electricity consumption, and the addition of new power plants to the national power grid.

Target NPHR Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2026
NPHR Target of Coal Generation Unit for 2026

PLN NP menetapkan target NPHR unit pembangkitan batubara tahun 2026 adalah sebesar 3.343,30 kCal/kWh dengan asumsi adanya peningkatan rasio *co-firing* biomassa dan peningkatan pemakaian sendiri (PS) unit pembangkit.

PLN NP sets the NPHR target for coal generation units by 2026 at 3,343.30 kCal/kWh, assuming an increase in the biomass co-firing ratio and an increase in the power plant's self-consumption (PS).

Target SFC Batubara Unit Pembangkitan Batubara Tahun 2026
Coal SFC Target of Coal Generation Unit for 2026

PLN NP menetapkan target NPHR unit pembangkitan batubara tahun 2026 adalah sebesar 0,7194 kg/kWh dengan asumsi adanya peningkatan rasio *co-firing* biomassa.

PLN NP sets the NPHR target for coal generation units by 2026 at 0.7194 kg/kWh, assuming an increase in the biomass co-firing ratio.

Target Kinerja Unit Pembangkitan Gas & Non-Batubara Tahun 2026
Target of Gas & Non-Coal Generation Unit Performance for 2026

Tabel Target Kinerja Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara Tahun 2025
Table of the Target of Gas & Non-Coal Generation Unit Performance for 2026

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2025 2025 Realization	Target 2026 2026 Target
Equivalent Availability Factor (EAF)	%	94,34	93,22
Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)	%	2,44	2,69
Net Capacity Factor (NCF)	%	32,02	31,75
Net Plant Heat Rate (NPHR)	kCal/kWh	2.266,30	2.304,47
Specific Fuel Consumption (SFC) Gas Specific Fuel Consumption (SFC) of Gas	MMBTU/kWh	0,0087	0,0087
Specific Fuel Consumption (SFC) Minyak Specific Fuel Consumption (SFC) of Oil	liter/kWh	0,2713	0,3064

Target EAF Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara Tahun 2026
EAF Target of Gas & Non-Coal Generation Unit for 2026

PLN NP menetapkan target EAF unit pembangkitan gas & non batubara tahun 2026 adalah sebesar 93,22%

PLN NP sets the EAF target for gas & non-coal generation units by 2026 at 93.22%, assuming an

dengan asumsi terjadinya peningkatan jumlah durasi pemeliharaan terencana (*Scheduled Outage*) yang terprogram, penjadwalan *overhaul* siklus berkala pada unit-unit utama, serta penyesuaian proyeksi kesiapan mesin berdasarkan rencana operasi sistem kelistrikan.

increase in the duration of programmed scheduled outages, the scheduling of periodic cycle overhauls for the main units, and adjustments to equipment availability projections based on the power system operation plan.

Target EFOR Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara Tahun 2026

EFOR Target of Gas & Non-Coal Generation Unit for 2026

PLN NP menetapkan target EFOR unit pembangkitan gas & non batubara tahun 2026 adalah sebesar 2,69% dengan asumsi terjadinya peningkatan keandalan sistem komponen kritis pasca-pemeliharaan besar, efektivitas sistem deteksi dini gangguan (*early warning system*), serta mitigasi risiko yang lebih ketat terhadap potensi gangguan mendadak (*forced outage*).

PLN NP sets the EFOR target for gas & non-coal generation units by 2026 at 2.69%, assuming improved reliability of critical system components following major maintenance, the effectiveness of the early warning system, and stricter risk mitigation measures against potential forced outages.

Target NCF Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara Tahun 2026

NCF Target of Gas & Non-Coal Generation Unit for 2026

PLN NP menetapkan target NCF unit pembangkitan gas & non batubara tahun 2026 adalah sebesar 31,75% dengan asumsi adanya penurunan alokasi pembebanan (*dispatch order*) akibat prioritas optimalisasi PLTU batubara, optimalisasi alokasi pembebanan dari pusat pengatur beban sesuai dengan *merit order* serta peningkatan penetrasi energi baru terbarukan (EBT).

PLN NP sets the NCF target for gas & non-coal generation units by 2026 at 31.75%, assuming a reduction in dispatch orders due to the prioritization of coal CFPP optimization, the optimization of dispatch allocations by the load dispatch center in accordance with merit order, and an increase in the adoption of new and renewable energy (NRE).

Target NPHR Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara Tahun 2026

NPHR Target of Gas & Non-Coal Generation Unit for 2026

PLN NP menetapkan target NPHR unit pembangkitan gas & non batubara tahun 2026 adalah sebesar 2.304,47 kCal/kWh dengan asumsi adanya perubahan komposisi bauran energi primer, penyesuaian proyeksi pola pembebanan oleh pusat pengatur beban, serta estimasi degradasi efisiensi termal alami pada unit-unit yang belum memasuki siklus pemeliharaan besar.

PLN NP sets the NPHR target for gas & non-coal generation units by 2026 at 2,304.47 kCal/kWh, assuming changes in the composition of the primary energy mix, adjustments to load pattern projections by the load dispatch center, and estimates of the natural decline in thermal efficiency of units that have not yet entered a major maintenance cycle.

Target SFC Gas Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara Tahun 2026

Gas SFC Target of Gas & Non-Coal Generation Unit for 2026

PLN NP menetapkan target NPHR unit pembangkitan gas & non batubara tahun 2026 adalah sebesar 0,0087 MMBTU/kWh dengan asumsi sama dengan tahun 2025, di mana pembangkit mampu mempertahankan tingkat efisiensi termal tertinggi secara konsisten, serta mampu mengoptimalkan pola pembebanan yang optimal dari pusat pengatur beban.

PLN NP sets the Gas SFC target for gas & non-coal generation units by 2026 at 0.0087 MMBTU/kWh, assuming the same conditions as in 2025, where power plants are able to consistently maintain the highest level of thermal efficiency and optimize load patterns as directed by the load dispatch center.

Target SFC Minyak Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara Tahun 2026
Oil SFC Target of Gas & Non-Coal Generation Unit for 2026

PLN NP menetapkan target NPHR unit pembangkitan gas & non batubara tahun 2026 adalah sebesar 0,3064 liter/kWh dengan asumsi terjadinya peningkatan alokasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) akibat potensi kendala pasokan gas, peningkatan frekuensi proses *start-up unit*, serta proyeksi pola operasi pembangkit pada beban rendah (*part-load*).

PLN NP sets the Oil SFC target for gas & non-coal generation units by 2026 at 0.3064 liters/kWh, assuming an increase in the allocation of petroleum products due to potential gas supply constraints, an increase in the frequency of unit start-ups, and projected operating patterns for power plants under part-load conditions.

Target Produksi & Penjualan Tenaga Listrik Tahun 2026
Target of Electricity Production & Sales for 2026

Tabel Target Kinerja Produksi dan Penjualan Tahun 2026 (GWh)
Table of the Target of Production and Sales Performance for 2026 (GWh)

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	Target 2026 Target for 2026
MWh Produksi Tenaga Listrik MWh Electricity Production	66.919,39	62.982,55
MWh Penjualan Tenaga Listrik MWh Electricity Sales	63.285,67	59.459,51

Target produksi tenaga listrik tahun 2025 adalah sebesar 62.982,55 GWh dan untuk target penjualan tenaga listrik tahun 2026 adalah sebesar 59.459,51 GWh. Nilai tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi jadwal pemeliharaan, neraca daya sistem, serta kesiapan energi primer.

The target of electricity production in 2026 is 62,982.55 GWh and the target of electricity sales in 2026 is 59,459.51 GWh. The value is determined based on assumptions regarding the maintenance schedule, the system power balance, and the readiness of primary energy sources.

Target Aspek Pemasaran Tahun 2026
Marketing Aspect Target for 2026

Tabel Target Aspek Pemasaran Tahun 2025 (%)
Table of Marketing Aspect Target for 2025 (%)

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	Target 2026 Target for 2026
Pangsa Pasar Market Share	18,86	16,36

Target pangsa pasar tahun 2026 secara kumulatif adalah sebesar 16,36%, yaitu lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2025. Asumsi penerapan target tersebut adalah jadwal pemeliharaan, kebutuhan neraca daya sistem, serta kesiapan energi primer.

The cumulative 2026 market share target is 16.36%, which is lower than the 2025 realization. The assumption of the target implementation is the maintenance schedule, the needs of system power balance, and the readiness of primary energy.

Target Pengembangan SDM Tahun 2026
HR Development Target for 2026

Tabel Target Pengembangan SDM Tahun 2026 (Rp juta)
Table of HR Development Target for 2026 (Rp million)

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	Target 2026 Target for 2026
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Costs	18.556	127.285

Target biaya pendidikan dan pelatihan tahun 2026 adalah sebesar Rp134,06 miliar, yaitu lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025. Target tersebut disusun dengan asumsi pengelolaan anggaran diklat kembali dilakukan secara mandiri oleh PLN NP, penguatan kompetensi untuk mendukung sasaran strategis P100, serta pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi yang tertunda pada tahun sebelumnya akibat keterbatasan sumber daya.

The target for education and training costs by 2026 is Rp134.06 billion, which is higher than the realization in 2025. The target was set with the assumption that the management of the training budget would be independently handled by PLN NP, strengthening competencies to support the strategic goals of P100, and the implementation of training and certification programs that were delayed in the previous year due to resource limitations.

Target Kebijakan Dividen Tahun 2026
Dividend Policy Target for 2026

Terkait kebijakan dividen ke depan, Perusahaan akan menetapkannya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regarding future dividend policy, dividend distribution will be determined through resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with applicable laws and regulations.

Pembagian dividen akan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba sebagaimana ditargetkan dalam RKAP Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pemberian imbal hasil kepada pemegang saham dan kebutuhan pendanaan untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan usaha.

The level of dividend distribution will be determined by considering the Company's profit-generating capacity as set forth in the 2026 Work Plan and Budget (WP&B), while balancing shareholder returns with the funding requirements necessary to sustain long-term business growth.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Transaction Containing Conflict of Interest

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

As of December 31, 2025, there were no transactions containing conflicts of interest.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Transactions with Affiliated/Related Parties

Pihak-Pihak Berelasi

Related Parties

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 224: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi sebagai berikut:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor,
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor, atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain),
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau Ventura Bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,

The Group conducts transactions with related parties as defined by SFAS No. 224: Related Party Disclosures, as follows:

a. A person or their close family member is related to the reporting entity if that person:
   i. Has control or joint control over the reporting entity,
   ii. Has significant influence over the reporter or the reporting entity, or
   iii. Is a key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.
b. An entity is related to the reporting entity if it fulfills any of the following matters:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that the parent, subsidiary, and fellow subsidiary are related to each other),
   ii. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a group of which the other entity is a member),
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party,
   iv. One entity is a joint venture of a third entity, and the other entity is an associate of the third entity,

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor,
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a), atau
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas), atau
viii. Entitas, atau setiap anggota dari kelompok yang menjadi bagiannya, memberikan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

v. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organizes the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity,
vi. Entities controlled or jointly controlled by a person identified in (a),
vii. The person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or the entity's key management personnel (or a parent of the entity),
viii. The entity, or each member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to a parent of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the Government. Government refers to Government agencies and similar agencies, whether local, national, or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kuasa pemegang saham.

Government-related entities can be entities controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance, which is the entity's shareholder, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) as the shareholder's proxy.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang relevan. Secara khusus, transaksi dengan pihak berelasi juga diungkapkan dalam Catatan No. 26.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes to the Consolidated Financial Statements. Specifically, transactions with related parties are also disclosed in Note No. 26.

Sifat Hubungan Pihak Berelasi
Nature of Related Party Relationship

Dalam kegiatan usahanya, PLN NP melakukan transaksi tertentu dengan pihak hubungan berelasi. Berikut adalah penjelasan mengenai sifat hubungan berelasi yang dimiliki oleh PLN NP:
a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN,

In its business activities, PLN NP conducts certain transactions with related parties. The following is an explanation regarding the nature of the related relationships owned by PLN NP:
a. The Government, in this case, is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, who is a shareholder of the Company and SOE, respectively,

b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan,
c. Grup mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama,
d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Grup.

b. The Company has a related relationship with other SOEs jointly owned by the Ministry of Finance,
c. The Group has significant influence over investments in associates or joint ventures,
d. The Board of Commissioners and Board of Directors are the key management personnel of the Group.

Nama Pihak yang Bertransaksi
Name of Transacting Parties

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

The following is a list of related parties that have transactions with the Company:

Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – BRI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank, deposito berjangka, dan bank garansi Placement of cash in banks, time deposits, and bank guarantees
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank, deposito berjangka, bank garansi, dan sewa atas properti investasi Placement of cash in banks, time deposits, bank guarantees, and lease on investment property
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank, deposito berjangka, dan bank garansi Placement of cash in banks, time deposits, and bank guarantees
PT Bank Syariah Indonesia – BSI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank Placement of cash in banks
PT Pertamina (Persero) – Pertamina	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian minyak pelumas dan sewa atas properti investasi Purchase of lubricant oil and lease on investment property
PT Perusahaan Gas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
Negara (Persero) Tbk - PGN	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar minyak Purchase of oil fuels
PT Pertamina Patra Niaga – Patra Niaga	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas dan sewa atas properti investasi Purchase of gas fuel and lease on investment property
PT Pertamina Hulu Energi – PHE	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
PT Pertamina EP Cepu – PEPC	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
PT Pertamina EP - PEP	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel

Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Pertamina Gas – Pertagas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas dan sewa atas properti investasi Regasification services and lease on investment property
Perta Arun Gas – PAG	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian batubara Purchase of coal
PT Nusantara Regas – NR	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pelayanan teknik, survei, dan pengukuran batubara Engineering services, survey, and coal measurement
PT Bukit Asam Tbk – PTBA	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pelayanan teknik, survei, dan pengukuran batubara Engineering services, survey, and coal measurement
PT Asuransi Tugu Pratama - Tugu	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi instalasi dan mesin pembangkit, dan perlengkapan transmisi Insurance services for installation and power plants and transmissions equipment
PT Asuransi Jasa Indonesia – Jasindo	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi instalasi dan mesin pembangkit, dan perlengkapan transmisi Insurance services for installation and power plants and transmissions equipment
PT Hutama Karya (Persero) – HK	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi Construction services
Perum Jasa Tirta – Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian air Purchase of water
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) – PLN	Entitas Induk Pengendali Controlling parent entity	Transaksi penjualan tenaga listrik, jasa pemeliharaan, dan sewa atas properti investasi Sales of electricity, maintenance service, and lease on investment property
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	Pemegang saham minoritas Minority shareholder	Penyertaan modal Paid-in capital
PT PLN Indonesia Power – PIP	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi penjualan barang dan jasa Sales transactions of goods and services
PT PLN Batam – PLN Batam	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi penjualan barang dan jasa Sales transactions of goods and services
PT PLN Energi Primer Indonesia – EPI	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian bahan bakar gas dan biaya manajemen Purchase of gas fuel and management fee
PT PLN Energi Gas – PLN EG	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi sewa *Floating Storage Regasification* Unit Lease of Floating Storage Regasification Unit
PT PLN Energy Services - PLN ES (dahulu formerly PT Haleyora Power)	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
PT Indonesia Comnets Plus – ICON	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
PT PLN Enjinering – PLNE	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services

Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT PLN Nusa Daya – PLN ND	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
PT PLN Batubara Niaga – BBN	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian batubara Purchase of coal
PT Energy Management Indonesia (Persero) – EMI	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
PT Pelayaran Bahtera Adiguna – BAG	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian jasa pelayaran Transaksi pembelian jasa pelayaran
PT Asuransi Perisai Listrik Nasional – APLN	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Asuransi bangunan dan perlengkapan umum Insurance for buildings and general equipment
PT Sumber Segara Primadaya – S2P	Entitas asosiasi Associate	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
PT Rekind Daya Mamuju – RDM	Entitas asosiasi Associate	Transaksi jasa proyek Project services
PT Bajradaya Sentranusa – BDSN	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
PT Bukit Pembangkit Innovative – BPI	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali – SGPJB	Ventura bersama Joint venture	Piutang kepada ventura bersama Receivables from Joint Ventures
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy – PMSE	Ventura bersama Joint venture	Piutang kepada ventura bersama Receivables from Joint Ventures
PT North Sumatera Hydro Energy – NSSE	Ventura bersama Joint venture	Piutang kepada ventura bersama Receivables from Joint Ventures
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali – KPJB	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan, dan piutang dividen Operation and maintenance services, and dividend receivables
Dana pensiun PLN – DP PLN	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Pengelolaan dana pensiun Pension fund manager
Komisaris dan Direktur Commissioner and Director	Personil manajemen kunci Key management personnel	Upah dan tunjangan Salaries and allowances

Tujuan Transaksi dengan Pihak Berelasi
Purpose of Transactions with Related Parties

Transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan profesional dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak (*efficient related party transaction*). Transaksi pihak berelasi menjadi efisien jika menguntungkan pemegang saham pengendali maupun pemegang saham non pengendali.

Affiliated transactions are carried out based on the principle of mutual need and professionalism with the aim of benefiting both parties (efficient related party transaction). Related party transactions are efficient if they benefit both controlling and non-controlling shareholders.

Periode Transaksi
Transaction Period

Nilai transaksi dengan pihak berelasi yang tercatat pada laporan ini adalah nilai saldo yang tercatat per 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai dengan Catatan atas Laporan Keuangan No. 26.

The value of related-party transactions presented in this report represents the outstanding balances as of December 31, 2025 and 2024, in accordance with Note 26 to the Financial Statements.

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi
The Balance and Transactions with Related Parties

Berikut adalah saldo dan transaksi dengan pihak berelasi tahun 2024 dan 2025:

The following are balances and transactions with related parties in 2024 and 2025:

Tabel Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (Rp juta)
Table of Balances and Transactions with Related Parties (Rp million)

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Berelasi Related Parties	2024	2025
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	BNI	2.058.365	2.809.176
	Bank Mandiri	4.319.485	1.549.153
	BRI	1.069.234	1.437.425
	BSI	78.739	300.092
	Jumlah Total	**7.525.823**	**6.095.846**
Piutang usaha Trade receivables	PLN	41.527.071	51.779.866
	PLN Batam	324.748	316.718
	Pertamina	125.934	83.299
	BPI	16.672	19.422
	EPI	79.668	88
	Lain-lain Others	86.348	96.523
	Jumlah Total	42.160.441	52.295.916
Utang usaha Trade payables	EPI	3.117.255	2.920.079
	Patra Niaga	1.125.226	1.158.569
	PTBA	747.779	384.962
	BBN	212.957	163.933
	BAG	112.864	154.379
	HK	98.431	98.431
	Jasa Tirta	25.684	89.130
	PHE	78.961	69.549
	PEPC	76.619	66.116
	PGN	257.932	47.235
	Lain-lain Others	120.609	201.949
	Jumlah Total	5.974.316	5.354.332
Utang lain-lain Other payables	PLN	428.599	672.586
	PLN ND	25.450	63.568
	PLN EG	-	34.714
	PLNE	114.567	27.772
	ICON	17.445	10.544

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Berelasi Related Parties	2024	2025
	Lain-lain Others	9.559	14.736
	Jumlah Total	595.620	823.920
Pinjaman dari pemegang saham Loans from shareholder	PLN	2.398.167	2.146.651
	Jumlah Total	**2.398.167**	**2.146.651**
Penjualan tenaga listrik Sales of electricity	PLN	88.321.254	94.971.854
	Jumlah Total	**88.321.254**	**94.971.854**
Pendapatan usaha lainnya Other operating income	PLN	1.621.486	2.363.299
	PLN Batam	557.636	261.089
	PIP	190.635	180.124
	BPI	85.686	115.683
	BDSN	149.534	106.153
	Lain-lain Others	63.039	116.858
	Jumlah Total	**2.668.016**	**3.143.206**
Pembelian bahan bakar dan pelumas Purchased fuel and lubricants	EPI	14.720.292	25.289.907
	PTBA	5.703.681	5.873.109
	Patra Niaga	3.890.661	3.637.054
	PGN	3.605.137	3.252.638
	BBN	1.669.112	2.120.643
	BAG	2.014.040	1.532.959
	PHE	1.017.343	1.137.633
	PEP	501.419	630.825
	Jasa Tirta	288.182	376.331
	PLN EG	283.615	207.208
	PLNE	118.867	117.963
	Pertagas	171.313	513
	NR	473.004	-
	Perta Arun Gas	298.410	-
	Jumlah Total	34.755.076	44.176.783
Beban pemeliharaan Maintenance expenses	PLN ND	211.303	303.018
	PLNE	186.035	96.722
	Lain-lain Others	69.428	293.886
	Jumlah Total	466.766	693.626
Beban keuangan Finance costs	PLN EG	165.437	157.024
	PLN	170.843	129.457
	Sub Jumlah Sub Total	**336.280**	**286.481**

a. Pinjaman kepada Pemegang Saham

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar AS$280.000.000 dengan tingkat bunga tahunan LIBOR USD enam bulan dengan marjin 0,98%. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai

a. Loans from Shareholders

On March 20, 2018, the Company signed a loan agreement with PLN of US$280,000,000 with an annual interest rate of six-month US$ LIBOR with a margin of 0.98%. This loan is used to fund the add-on project of Muara Tawar Block 2, 3, and 4

proyek *add-on* PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2032. Pada tanggal 31 Oktober 2023, perjanjian ini telah diamandemen untuk mengubah suku bunga dari LIBOR menjadi SOFR.

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar US$280.000.000 dengan tingkat bunga tahunan LIBOR USD enam bulan dengan marjin 0,98%. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek add-on PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2032. Pada tanggal 31 Oktober 2023, perjanjian ini telah diamendemen untuk mengubah suku bunga dari LIBOR menjadi SOFR.
Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp2,147 triliun (setara dengan US$127.381.661) dan Rp2,40 triliun (setara dengan US$146.978.839), dengan porsi jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp344,49 miliar dan Rp340,06 miliar.

CCPPs. The term of the agreement is effective since the signing of this agreement and will expire on May 8, 2032. On October 31, 2023, this agreement has been amended to change the interest rate from LIBOR to SOFR.

On March 20, 2018, the Company signed a loan agreement with PLN of US$280,000,000 with an annual interest rate of six-month US$ LIBOR with a margin of 0.98%. This loan is used to fund the add-on project of Muara Tawar Block 2, 3, and 4 CCPPs. The term of the agreement is effective since the signing of this agreement and will expire on May 8, 2032. On October 31, 2023, this agreement has been amended to change the interest rate from LIBOR to SOFR.

The loan balance on December 31, 2025, and 2024, was Rp2.147 trillion (equivalent to US$127,381,661) and Rp2.40 trillion (equivalent to US$146,978,839), respectively, with the short-term portion on December 31, 2025, and 2024, amounting to Rp344.49 billion and Rp340.06 billion, respectively.

b. Kompensasi Manajemen Kunci

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp55,77 miliar dan Rp63,64 miliar.
Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

b. Compensation for the key Management

The total compensation for the Company's Board of Directors for December 31, 2025, and 2024, amounted to Rp55.77 billion and Rp63.64 billion, respectively.
All compensation to the Board of Commissioners and the Company's Board of Directors is classified as short-term employee benefits.

Kewajaran Transaksi
Transaction Fairness

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perseroan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK Nomor 224 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara wajar. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang relevan.

All transactions with related parties have been in accordance with the policies and terms agreed by both parties, so the Company considers that all transactions are still within reasonable limits in accordance with PSAK Number 224 concerning Related Party Disclosures. This indicates that the Company has fairly conducted transactions with related parties. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes of the Consolidated Financial Statements.

Kebijakan Perusahaan terkait Mekanisme *Review* atas Transaksi
Company Policy Related to Review Mechanism of Transaction

Mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor.

The review mechanism of transactions with related parties is through an audit process conducted by both internal and external auditors. As an effort to ensure the level of fairness of transactions and conformity with accounting standards generally applied in Indonesia, the reports of affiliated transactions above have been audited by the Auditor.

Keterlibatan Organ Perusahaan dalam Proses *Review* Transaksi Pihak Berelasi
Involvement of Company Organs in the Review Process of Related Party Transactions

Mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam proses audit tersebut, Perusahaan melibatkan Organ Perusahaan diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan beberapa Divisi yang terkait.

The review mechanism for transactions with related parties is carried out through an audit process, both by internal and external auditors. In the audit process, the Company involves its organs, including the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and several related Divisions.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komite Audit, Dewan Komisaris berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

Based on the results of the review conducted by the Audit Committee, the Board of Commissioners has a role in providing direction and input to the Board of Directors so that transactions with related parties can be carried out in accordance with the arms-length principle.

Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2025, telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*). Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan pada Catatan No. 26.

The Board of Directors ensures that all transactions with related parties throughout 2025 have gone through adequate procedures and been carried out in accordance with generally accepted business practices and meet the arms-length principle. More detailed information regarding related party transactions has been disclosed in the Company's Consolidated Financial Statements in Notes No. 26.

Kepatuhan terhadap Peraturan yang Berlaku
Compliance with Applicable Regulations

Perseroan tidak menghadapi kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material, terutama dalam tiga tahun terakhir.

The Company did not encounter any cases of non-compliance with laws, rules, and regulations related to significant or material-related party transactions, especially in the past three years.

Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/ Modal

Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

Investasi
Investment

Pada tahun 2025, PLN NP melakukan tiga bentuk investasi yaitu investasi pada kinerja unit dan pengembangan usaha, investasi pada entitas asosiasi/ ventura bersama, dan investasi penyertaan saham pada entitas anak.

In 2024, PLN NP invested in three sectors, including investment in unit performance and business development, investment in associates/joint ventures, and share investment in subsidiaries.

Investasi pada Penguatan Pembangkitan dan Pengembangan Usaha
Investment in Strengthening Electric Power Generator and Business Development

PLN NP mengatur mekanisme investasi ini dalam Peraturan Direksi No. 003.P/019/DIR/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Peraturan Direksi No. 019.P/019/2020 tentang Kebijakan Investasi PT Pembangkitan Jawa – Bali, dan Peraturan Direksi No. 0053.P/2024 tentang Kebijakan Pelaksana Penetapan Perencanaan Program Investasi PLN Nusantara Power. Pada tahun 2026, terdapat *update* atas Peraturan Direksi tersebut yang diatur dalam:

- Peraturan Direksi Nomor 0013.P/DIR/2026 tentang Kebijakan Pelaksana Penetapan Perencanaan Program Investasi PLN Nusantara Power.
- Keputusan Direksi Nomor 0033.K/DIR/2026 tentang Penetapan Pemrakarsa, Evaluator KKP, Tim Verifikasi dan Validasi Investasi (TVV) dan Komite Perencanaan Investasi (KI) serta *Basic Communication* Penetapan Perencanaan Program Investasi PLN Nusantara Power.

PLN NP regulates this investment mechanism in the Board of Directors' Regulation No. 003.P/019/DIR/2020 concerning the Guidelines for Corporate Work Plan and Budget (RKAP), Board of Directors' Regulation No. 019.P/019/2020 concerning the Investment Policy of PT Pembangkitan Jawa – Bali, and Board of Directors' Regulation No. 0053.P/2024 concerning the Implementation Policy for the Investment Program Planning of PLN Nusantara Power. In 2026, an update to these Board of Directors' Regulations is available, as regulated in:

- Board of Directors' Regulation Number 0013.P/ DIR/2026 on the Implementation Policy for the Determination of Investment Program Planning for PLN Nusantara Power.
- Board of Directors' Decision Number 0033.K/ DIR/2026 regarding the Appointment of Initiators, KKP Evaluators, Investment Verification and Validation Team (TVV), and Investment Planning Committee (KI), as well as Basic Communication for the Establishment of PLN Nusantara Power Investment Program Planning.

Realisasi investasi penguatan pembangkit pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2,87 triliun atau lebih tinggi 2,16% bila dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2,81 triliun. Jika dibandingkan dengan RKAP 2025, pencapaiannya sebesar 98,79%. Adapun penyebab peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan dari sisi perencanaan ataupun realisasi atas program kehandalan pembangkit dan pengembangan infrastruktur non pembangkit.

The realization of investment in power plant strengthening in 2025 was Rp2.87 trillion or 2.16% higher than in 2024 of Rp2.81 trillion. When compared to the 2025 ABOP, the achievement was 98.79%. The increase from the previous year was due to improvements in both the planning and execution of power plant reliability programs and the development of non-power plant infrastructure.

Investasi untuk program pengembangan usaha pada tahun 2025 adalah sebesar Rp627,79 miliar atau lebih rendah 34,62% bila dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp960,24 miliar. Jika dibandingkan dengan RKAP 2025, pencapaiannya sebesar 64,91%. Adapun penyebab peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan penilaian yang berdasarkan atas progress pekerjaan proyek.

Investment for business development programs in 2025 was Rp627.79 billion or 34.62% lower than the realization in 2024 of Rp960.24 billion. When compared to the 2025 ABOP, the achievement was 64.91%.The increase compared to the previous year is due to an assessment based on the progress of the project.

Sumber dana yang digunakan untuk investasi ini merupakan alokasi dana internal perusahaan/Anggaran RKAP tahun 2025. Tujuan dari investasi ini telah diuraikan dalam sub bab Realisasi Investasi Barang Modal.

The source of funds used for this investment is the allocation of the Company's internal funds/ABOP Budget in 2025. The purpose of this investment has been described in the Realization of Capital Goods Investment sub chapter.

Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama
Investment in Associates/Joint Ventures

PLN NP melakukan investasi pada perusahaan ventura bersama dan entitas asosiasi sebagai berikut:

PLN NP made investments in joint ventures and associates as follows:

Tabel Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama
Table of Investment in Associates/Joint Ventures

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Operation Year	% Penyertaan % Investment	
				2024	2025
Entitas Asosiasi: Associates:					
PT Sumber Segara Primadaya (S2P)	Cilacap	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2006	49,00	49,00
PT Rekind Daya Mamuju (RDM)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2018	10,00**)	10,00**)
PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2025	10,0**)	10,0**)
Ventura Bersama: Joint Ventures:					
PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)	Palembang	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2015	40,25	40,25
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)	Jepara	Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance	2010	49,00	49,00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa-Bali (SGPJB)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2019	30,00	30,00
PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)	Asahan	Pembangkit Listrik tenaga air Hydro power plant	2011	36,61	36,61
PT North Sumatera Hydro Energy (NHSE)	Jakarta	Pembangkit Listrik Power Plant	*)	25,00	25,00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa-Bali (GTPJB)	Jakarta	Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance	2019	30,00	30,00

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Operation Year	% Penyertaan % Investment	
				2024	2025
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy (PMSE)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya Solar power plant	2023	51,00	51,00
PT Nusantara Sembcorp Jakarta Solar Energy (NSSE)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya Solar power plant	2024	51,00	51,00
PT Nusantara Tembesi Baru Energi (NTBE)	Batam	Pembangkit listrik tenaga surya Solar power plant	*)	51,00	51,00
PT Nusantara Guodian Karangkates Indonesia (NGKI)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya Solar power plant	*)	51,00	51,00

*) Dalam tahap pengembangan
**) Terdapat perwakilan Perusahaan

*) Under development
**) There is a Group representative

Tujuan dari dilakukannya investasi pada entitas diatas terutama terkait potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan. Manajemen meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai.

The purpose of investing in the above entities is mainly related to long-term growth potential, as all of these entities are engaged in the same power industry as the Company's industry. Management believes that there is no indication of impairment.

Sumber dana yang digunakan untuk investasi ini merupakan alokasi dana internal Perusahaan.

The source of funds used for this investment is the Company's internal fund allocation.

Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak
Share Investment in Subsidiaries

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

The Company owns shares of subsidiaries either directly or indirectly as follows:

Tabel Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak
Table of Share Investment in Subsidiaries

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	% Penyertaan % Investment	
			2024	2025
PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS) dan entitas anaknya PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS) and Its Subsidiaries	Surabaya	Jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan/ (pemasangan) peralatan ketenagalistrikan Operation and maintenance services of power plants and construction/(installation) of electricity equipment	99,00	99,00
PT Mitra Karya Prima (MKP)*	Surabaya	Jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik Operation and maintenance services of power plants	92,00	92,00

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	% Penyertaan % Investment	
			2024	2025
PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC)	Jakarta	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan Engineering, procurement and construction, and operation and maintenance of the electricity sector	99,00	99,00
PT Prima Power Nusantara (PPN)**	Jakarta	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan Engineering, procurement and construction, and operation and maintenance of the electricity sector	100,00	-
PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan, dan pertanian Trade, construction, mining, and agriculture	72,97	72,97
PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) dan entitas anaknya PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) and its Subsidiaries	Jakarta	Investasi Ketenagalistrikan Electricity Investment	100,00	100,00
PT Nusantara Renewables Indonesia (NRI)*	Jakarta	Penasihat dan perunding dalam *merger* dan akuisisi Advisor and negotiator in mergers and acquisitions	99,88	99,88
PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo (PJB Investindo)* dan entitas anaknya PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo (PJB Investindo)* and its Subsidiaries	Jakarta	Penempatan investasi di pengadaan listrik Placement of investment in electricity procurement	100,00	100,00
PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata (PJBIC)*	Jakarta	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal Financing in the form of capital investment	100,00	100,00
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC)	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa, enjiniring, rantai pasokan, dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan Trade in goods and services, engineering, supply chain, and consulting in the electricity sector	51,00	51,00

* Kepemilikan tidak langsung
** Pelepasan kepemilikan pada tahun 2025

* Indirect ownership
** Ownership disposal in 2025

Ekspansi
Expansion

PLN NP mengatur mekanisme ekspansi dalam Peraturan Direksi No. 019.P/019/2020 tentang Kebijakan Investasi PT Pembangkitan Jawa – Bali. Pada tahun 2025, PLN NP tidak melakukan aktivitas ekspansi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi, sumber dana, serta hasil kegiatan ekspansi.

PLN NP regulates the expansion mechanism in the Board of Directors Regulation No. 019.P/019/2020 concerning the Investment Policy of PT Pembangkitan Jawa - Bali. In 2025, PLN NP did not conduct any expansion activities, so there is no information regarding the purpose and value of transactions, sources of funds, and results of expansion activities.

Divestasi
Divestment

PLN NP mengatur mekanisme divestasi dalam Peraturan Direksi No. 019.P/019/2020 tentang Kebijakan Investasi PT Pembangkitan Jawa – Bali.

PLN NP regulates the divestment mechanism in the Board of Directors Regulation No. 019.P/019/2020 concerning the Investment Policy of PT Pembangkitan Jawa - Bali.

Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 1 Oktober 2025, dari Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham untuk menjual kepemilikan saham PT Prima Power Nusantara (PPN) ke PT Indonesia Connectivity Investasi (Iconvest). Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham PPN, atau setara dengan 100% kepemilikan, dengan nilai pengalihan sebesar Rp130,96 miliar. Nilai buku bersih PPN untuk porsi kepemilikan Perusahaan pada saat tanggal penjualan adalah sebesar Rp131,18 miliar. Kerugian atas penjualan sebesar Rp219,00 juta dicatat pada perbedaan dari nilai restukturisasi entitas sepengendali.

Based on Notarial Deed No. 02 dated October 1, 2025, from Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company entered into a share purchase agreement to sell its ownership in PT Prima Power Nusantara (PPN) to PT Indonesia Connectivity Investasi (Iconvest). The Company sold its entire ownership in PPN, equivalent to 100% ownership, with a transfer value of Rp130.96 billion. The net book value of PPN for the Company's ownership portion at the time of sale was Rp131.18 billion. The loss from the sale, amounting to Rp219.00 million, was recorded as a difference from the restructuring value of the entity under common control.

Akuisisi
Acquisition

PLN NP mengatur mekanisme akuisisi dalam Peraturan Direksi No. 019.P/019/2020 tentang Kebijakan Investasi PT Pembangkitan Jawa – Bali. Pada tahun 2025, PLN NP tidak melakukan aktivitas akuisisi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi, sumber dana, serta hasil kegiatan akuisisi.

PLN NP regulates the acquisition mechanism in the Board of Directors Regulation No. 019.P/019/2020 regarding the Investment Policy of PT Pembangkitan Jawa - Bali. In 2025, PLN NP did not conduct any acquisition activities, so there is no information regarding the purpose and value of the transaction, the source of funds, and the results of acquisition activities.

Restrukturisasi Utang dan/atau Modal
Debt and/or Capital Restructuring

PLN NP mengatur mekanisme restrukturisasi utang dan/atau modal dalam Peraturan Direksi No. 019.P/019/2020 tentang Kebijakan Investasi PT Pembangkitan Jawa – Bali. Pada tahun 2025, PLN NP tidak melakukan aktivitas restrukturisasi utang dan/atau modal, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi, sumber dana, serta hasil kegiatan restrukturisasi utang dan/atau modal.

PLN NP regulates the mechanism for debt and/or capital restructuring in the Board of Directors Regulation No. 019.P/019/2020 concerning the Investment Policy of PT Pembangkitan Jawa - Bali. In 2025, PLN NP did not carry out debt and/or capital restructuring activities, so there was no information regarding the purpose and value of transactions, sources of funds, and results of debt and/or capital restructuring activities.

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts after the Accountant's Report Date

Dalam kurun waktu setelah tanggal laporan akuntan yaitu 31 Desember 2025, sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan Konsolidasian, terdapat beberapa informasi dan fakta material sebagai berikut:

Within the period after the accountant's report date, namely December 31, 2025, until the issuance of the Consolidated Financial Statements, there are several material information and facts as follows:

Perubahan Anggota Komite Audit

Changes in the Audit Committee Members

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 004.K/DK-PLN NP/2026 tertanggal 17 Maret 2026 tentang perubahan susunan Komite Audit pada Dewan Komisaris Perusahaan, susunan Komite Audit mengalami perubahan sebagai berikut:

Based on the Board of Commissioners' Decision No. 004.K/DK-PLN NP/2026 dated March 17, 2026, regarding changes in the composition of the Audit Committee on the Company's Board of Commissioners, the composition of the Audit Committee has changed as follows:

Jabatan Position	Nama Name
Ketua Chairman	Suharyono
Wakil ketua Vice Chairman	Ade Armando
Sekretaris/Anggota Secretary/Member	Fadilatul Imami
Anggota Member	Awal Susmanto

Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap NSHE

The Ministry of the Environment's Lawsuit Against NSHE

Pada tanggal 30 Januari 2026, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengajukan gugatan tanggung jawab mutlak terhadap NSHE di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait dugaan proyek NSHE yang berkontribusi pada kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat banjir di Sumatra Utara pada Desember 2025, dengan tuntutan senilai Rp201 miliar untuk biaya pemulihan lingkungan. Manajemen NSHE telah mencatat biaya tersebut sebagai aset dalam penyelesaian dan provisi kewajiban penarikan aset dalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2025.

On January 30, 2026, the Ministry of Environment/ Environmental Control Agency (KLH/BPLH) filed a strict liability lawsuit against NSHE in the South Jakarta District Court, related to the alleged NSHE project contributing to environmental damage and pollution due to flooding in North Sumatra in December 2025, with a claim amounting to Rp201 billion for environmental recovery costs. NSHE management recorded the costs as an asset in the settlement and provision for asset drawdown obligations in the consolidated financial statements as of December 31, 2025.

Pada tanggal 16 Maret 2026, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Persetujuan Kegiatan (Konstruksi) PLTA Batang Toru No. 1444 tahun 2026 yang berisi pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala BPLH No. 3559 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada NSHE di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sehingga dengan diterimanya persetujuan ini, NSHE dapat kembali melanjutkan konstruksi PLTA Batang Toru yang sebelumnya sempat dihentikan dengan target commercial operation date tetap sesuai rencana pada akhir 2026.

On March 16, 2026, the Ministry of Environment issued Activity Approval (Construction) for the Batang Toru HPP No. 1444 of 2026, which includes the revocation of the Minister of Environment/Head of BPLH Decision No. 3559 of 2025 regarding the Imposition of Administrative Sanctions in the form of Government Coercion on NSHE in South Tapanuli Regency. Thus, with the acceptance of this approval, NSHE can resume the construction of the Batang Toru HPP, which had previously been halted, with the target commercial operation date remaining as planned at the end of 2026.

Grup berkeyakinan tidak terdapat indikasi penurunan nilai investasi pada NSHE pada tanggal pelaporan.

The group believes there are no indications of a decline in the investment value in NSHE as of the reporting date.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi.

Based on the Consolidated Financial Statements for the 2025 financial year audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners, there is no financial information containing extraordinary and rare events.

Realisasi Dana Penawaran Umum
Realization of Public Offering Proceeds

Sampai dengan 31 Desember 2025, PLN NP bukan merupakan perusahaan terbuka dan belum melakukan penawaran umum saham, baik di bursa dalam maupun luar negeri. Sehingga tidak terdapat informasi mengenai total perolehan, rencana penggunaan, rincian penggunaan, saldo, maupun tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana penawaran umum.

As of December 31, 2025, PLN NP status was not a listed company and had not conducted a public offering. Therefore, there is no information regarding the total funds obtained, the planned use of funds, details of the use of funds, the balance of funds, or the date of the GMS approval of the changes in the use of funds.

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policy

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi
Reason of Changes in Accounting Policy

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

The following are the material accounting policies applied in preparing the Company's consolidated financial statements. These policies have been applied consistently to all years presented unless otherwise stated.

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Compliance with the Financial Accounting Standards (FAS)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The Company's consolidated financial statements have been prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
Basis for Preparation of the Consolidated Financial Statements

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on a going concern assumption, and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area-area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3 dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Audit.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of specific critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements, are disclosed in Note 3 in the Consolidated of Audited Financial Statements.

Uraian Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya
Description on the Changes in Accounting Policy and the Impact

Standar Akuntansi Berlaku Efektif Tahun 2025
Accounting Standards Effective in 2025

Implementasi dari standar-standar baru, amendemen dan penyesuaian tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 disajikan bawah ini:

1. Amendemen PSAK No. 221, “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran”; dan
2. PSAK No. 117, “Kontrak Asuransi”.

The implementation of new standards, amendments, and annual adjustments effective on or after January 1, 2025, is presented below:

1. Amendment to PSAK No. 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability"; and
2. PSAK No. 117, "Insurance Contracts".

Dampak atas Penerapan Standar Akuntansi Berlaku Efektif Tahun 2025
Impact of the Accounting Standard Implementation Effective in 2025

Penerapan dari amandemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi PLN NP dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau sebelumnya.

The application of the amendment to the accounting standards, effective from January 1, 2025, did not result in changes to PLN NP's accounting policies and had no material impact on the amounts reported in the current or previous years.

Standar dan Interpretasi telah Diterbitkan tetapi Tidak Wajib Diterapkan
Issued Standards and Interpretations but Not Mandatory to be Applied

Penerapan dari amendemen standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

1. Amendemen PSAK 109, “Instrumen Keuangan” dan PSAK 107, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan;
2. Amendemen PSAK 109, “Instrumen Keuangan” dan PSAK 107, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam; dan
3. Revisi PSAK No. 338 “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

The implementation of the following standard amendments, effective from January 1, 2026, does not result in substantial changes to the Company's accounting policies and has no material impact on the reported amounts for the current or previous year:

1. Amendment to PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosure" concerning financial instruments classification and measurement;
2. Amendment to PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosure" concerning Contracts Referencing Nature-dependent Electricity; and
3. Revision of PSAK No. 338 "Business Combination of Entities Under Common Control”.

Standar baru dan amandemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027, tetapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

1. PSAK No. 119 dan Amendemen PSAK No. 119 "Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan".

New standards and amendments to published standards, effective for financial years beginning on January 1, 2027, but early adoption is permitted, are as follows:

1. PSAK No. 119 and Amendment to PSAK No. 119 "Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures".

Penerapan dari standar baru berikut berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini:

1. PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan".

The application of the following new standards will be effective from January 1, 2027. Retrospective application is required, so comparative information for the financial year ending December 31, 2026, will be restated in accordance with this standard:

1. PSAK No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements".

Dampak atas Standar dan Interpretasi yang telah Diterbitkan tetapi Tidak Wajib Diterapkan

Impact of Standards and Interpretations Issued but Not Mandatory to be Applied

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan interpretasi pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

As of the date of this consolidated financial report, the Company is studying the potential impact of the application of new standards, amendments, and interpretations on the Company's consolidated financial statements.

Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Regulatory Changes and the Impacts on the Company

Seiring dengan mulai diberlakukannya sejumlah regulasi dan ketentuan baru pada tahun 2025, terdapat berbagai implikasi terhadap kinerja operasional Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menghadapi perubahan tersebut, PLN NP melakukan penyesuaian strategi dan langkah operasional guna memastikan keselarasan dengan ketentuan yang berlaku. Adapun sejumlah regulasi yang memberikan dampak terhadap kinerja PLN NP antara lain sebagai berikut:

With the enactment of several new regulations and provisions in 2025, there were various implications for the Company's operational performance, both directly and indirectly. In facing these changes, PLN NP is adjusting its strategies and operational steps to ensure alignment with the applicable provisions. Several regulations that impact PLN NP's performance include the following:

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Table of Changes in Laws and Regulations and Their Impact on the Company

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP	
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Law Number 1 of 2025 on the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) merubah konsep penyelenggaraan BUMN secara luas. Perubahan konsep penyelenggaraan BUMN tersebut, antara lain sebagaimana berikut: 1. Perubahan definisi status modal BUMN; 2. Penambahan status keuntungan dan kerugian BUMN; 3. Penambahan ketentuan terkait *Business Judgement Rules*; 4. Restrukturisasi Kelembagaan dan Tata Kelola BUMN Group; 5. Penambahan definisi anak usaha BUMN; 6. Penambahan ketentuan penugasan kepada anak usaha BUMN; 7. Penambahan hak monopoli untuk BUMN dan anak BUMN; 8. Penambahan ketentuan Penyelesaian sengketa khusus BUMN Group; 9. Perubahan status karyawan, direksi dan dewan komisaris bukan merupakan penyelenggara negara; 10. Perubahan ketentuan tata cara pengawasan BPK kepada BUMN.	Law Number 1 of 2025 on the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (Law 1/2025) broadly changes the concept of organizing SOEs. The changes to the concept of organizing SOEs include, among others: 1. Change in the definition of SOE capital status; 2. Addition of profit and loss status for SOEs; 3. Addition of provisions related to Business Judgement Rules (BJR); 4. Restructuring of Institutional and Governance of the SOE Group; 5. Addition of the definition of SOE subsidiaries; 6. Addition of assignment provisions to SOE subsidiaries; 7. Addition of monopoly rights for SOE and its subsidiaries; 8. Addition of particular dispute resolution provisions for the SOE Group; 9. Changes in the status of employees, Boards of Directors, and Board of Commissioners do not constitute state organizers; 10. Changes to the procedures for BPK's supervision of SOEs.	Dengan diterbitkannya UU 1/2025 yang merubah konsep penyelenggaraan BUMN, maka terdapat dampak terhadap PLN NP selaku Anak Perusahaan PT PLN (Persero), antara lain: 1. Perubahan status modal PLN NP yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan menjadi kekayaan PLN NP; 2. Penambahan ketentuan terkait status keuntungan dan kerugian PLN NP menjadi keuntungan dan kerugian PLN NP; 3. Perlindungan hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris PLN NP dengan adanya BJR; 4. Penegasan status PLN NP sebagai anak usaha BUMN; 5. Penegasan PLN NP selaku anak usaha BUMN dapat diberikan penugasan oleh Negara; 6. Presiden dapat memberikan hak monopoli PLN NP; 7. Penyelesaian sengketa PLN NP dengan BUMN Group harus melalui mediasi 8. Perubahan status karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris PLN NP menjadi bukan penyelenggara negara; 9. Perubahan tata cara pengawasan BPK kepada PLN NP.	With the enactment of Law 1/2025, which changes the concept of state-owned enterprise management, there were impacts on PLN NP as a Subsidiary of PT PLN (Persero), including: 1. The change in the status of PLN NP's capital, which is part of the state wealth, is separated into PLN NP's wealth; 2. Addition of provisions related to the status of PLN NP's profits and losses to become PLN NP's profits and losses; 3. Legal protection for PLN NP's Board of Directors and Board of Commissioners with the BJR; 4. Affirmation of PLN NP's status as a subsidiary of a SOE; 5. The affirmation that PLN NP, as a subsidiary of SOE, can be assigned tasks by the State; 6. The President can grant monopoly rights to PLN NP; 7. The resolution of the PLN NP dispute with the SOE Group must proceed through mediation. 8. Change in the status of employees, Board of Directors, and Board of Commissioners of PLN NP to no longer be state organizers; 9. Changes in the BPK supervision procedures toward PLN NP.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP	
2.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Law Number 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 16/2025) menyempurnakan konsep penyelenggaraan BUMN berdasarkan UU 1/2025. Perubahan konsep penyelenggaraan BUMN tersebut, antara lain sebagaimana berikut: 1. Restrukturisasi Kelembagaan dan Tata Kelola BUMN; 2. Perubahan status karyawan, direksi dan dewan komisaris; 3. Penambahan ketentuan Direksi BUMN wajib WNI kecuali diatur lain oleh BP BUMN; 4. Perubahan ketentuan tata cara pengawasan BPK kepada BUMN.	Law Number 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (Law 16/2025) refines the concept of SOE organization by Law 1/2025. The changes to the concept include, among others: 1. Restructuring Institutional and Governance of SOEs; 2. Changes in the status of employees, boards of directors, and board of commissioners; 3. Addition of the provision that SOE Boards of Directors must be Indonesian citizens unless otherwise regulated by the SOE Supervisory Board; 4. Changes to the procedures for BPK's supervision of SOEs.	Dengan diterbitkannya UU 16/2025 yang menyempurnakan konsep penyelenggaraan BUMN, maka terdapat dampak terhadap PLN NP selaku Anak Perusahaan PT PLN (Persero), antara lain: 1. Ketentuan terkait status karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris PLN NP bukan penyelenggara negara dihapuskan; 2. Direksi PLN NP wajib WNI kecuali diatur lain oleh BP BUMN; 3. Perubahan tata cara pengawasan BPK kepada PLN NP	With the enactment of Law 16/2025, which refines the concept of state-owned enterprise management, there are impacts on PLN NP as a Subsidiary of PT PLN (Persero), including: 1. Provisions regarding the status of PLN NP's employees, Board of Directors, and Board of Commissioners as non-state organizers have been removed; 2. The PLN NP Board of Directors must be Indonesian citizens unless otherwise regulated by the SOE Regulatory Agency; 3. Changes in BPK's oversight procedures toward PLN NP
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Government Regulation Number 19 of 2025 concerning Types and Tariffs on Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Energy and Mineral Resources	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 mengatur mengenai jenis dan tarif jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), jenis PNBP yang dapat diperoleh oleh Kementerian ESDM termasuk diantaranya PNBP untuk usaha di bidang ketenagalistrikan, antara lain: 1. Administrasi sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; 2. Administrasi nomor registrasi sertifikat badan usaha penunjang tenaga listrik; 3. Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga Listrik; 4. Administrasi nomor registrasi sertifikat produk peralatan dan pemanfaat wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang ketenagalistrikan;	Presidential Regulation Number 19 of 2025 regulates the types and tariffs of Non-Tax State Revenue (PNBP) applicable to the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), including PNBP for activities in the electricity sector, among others: 1. Administration of certification for electricity support service businesses; 2. Administration of the registration number for the electricity supporting business entity certificate; 3. Accreditation of electrical power support service businesses; 4. Administration of registration numbers for product equipment and mandatory use certificates under the Indonesian National Standard (SNI) in the field of electricity;	Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025, maka PLN NP tunduk dan patuh terkait PNBP yang dapat dikenakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), antara lain: 1. Administrasi sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik memiliki biaya mulai dari Rp750.000 hingga Rp3.000.000; 2. Administrasi nomor registrasi sertifikat badan usaha penunjang tenaga listrik memiliki biaya mulai dari Rp75.000 hingga Rp300.000; 3. Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik memiliki biaya Rp3.500.000;	With the issuance of Presidential Regulation Number 19 of 2025, PLN NP is subject to and complies with the Non-Tax State Revenue (PNBP) that can be imposed by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), among others: 1. The administration of certification for electricity supporting service businesses has costs ranging from Rp750,000 to Rp3,000,000. 2. The administration of the registration number for the electricity supporting business certificate has costs ranging from Rp75,000 to Rp300,000. 3. The accreditation of the electrical power supporting service unit costs Rp3,500,000.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP	
		5. Penerbitan nomor registrasi sertifikat laik operasi; 6. Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknis Ketenagalistrikan (NRSKTTK), Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Asesor Kompetensi Ketenagalistrikan (NRSKAKK), Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Asesor Badan Usaha (NRSKABU); 7. Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknis Ketenagalistrikan dan dan Asesor Ketenagalistrikan (Serkom).	5. Issuance of the operational feasibility certificate registration number; 6. Issuance of Registration Numbers for Electrical Technical Workforce Competency Certificates (NRSKTTK), Registration Numbers for Electrical Competency Assessor Certificates (NRSKAKK), Registration Numbers for Business Entity Assessor Competency Certificates (NRSKABU); 7. Issuance of Competency Certificates for Electrical Technical Personnel and Electrical Assessors (Serkom).	4. Administrasi nomor registrasi sertifikat produk peralatan dan pemanfaat wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang ketenagalistrikan memiliki biaya mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000; 5. Penerbitan nomor registrasi sertifikat laik operasi memiliki biaya mulai dari Rp75.000 hingga Rp150.000; 6. Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknis Ketenagalistrikan (NRSKTTK), Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Asesor Kompetensi Ketenagalistrikan (NRSKAKK), Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Asesor Badan Usaha (NRSKABU) memiliki biaya Rp50.000 hingga Rp500.000; 7. Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknis Ketenagalistrikan dan Asesor Ketenagalistrikan (Serkom) memiliki biaya sekitar Rp250.000 hingga Rp650.000.	4. The administration of the registration number for the mandatory National Standard Indonesia (SNI) certificate for electrical equipment and utilization ranges from Rp100,000 to Rp300,000. 5. The issuance of the operational feasibility certificate registration number has a cost ranging from Rp75,000 to Rp150,000. 6. The issuance of the Registration Number for the Competency Certificate of Electrical Technical Personnel (NRSKTTK), the Registration Number for the Competency Assessor Certificate for Electrical Competency (NRSKAKK), and the Registration Number for the Competency Assessor Certificate for Business Entities (NRSKABU) has costs ranging from Rp50,000 to Rp500,000. 7. The issuance of the Technical Competency Certificate for Electrical Power Technicians and Electrical Power Assessors (Serkom) costs around Rp250,000 to Rp650,000.
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Government Regulation Number 28 of 2025 on the Implementation of Risk-Based Business Licensing	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Nomor 28 Tahun 2025) mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Nomor 5 Tahun 2021). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 memiliki konsep yang berbeda dengan yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Dengan diterbitnkannya PP Nomor 28 Tahun 2025, PBBR memiliki beberapa hal baru antara lain:	Government Regulation Number 28 of 2025 on the Implementation of Risk-Based Business Licensing (PP Number 28 of 2025) revokes Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing (PP Number 5 of 2021). The implementation, regulated in PP Number 28 of 2025, has a different concept from that regulated in PP Number 5 of 2021. With the issuance of PP Number 28 of 2025, PBBR has several new details, including:	Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha ketenagalistrikan, PLN NP wajib memenuhi perizinan yang diatur dalam PP Nomor 28 tahun 2025 termasuk memenuhi PB UMKU untuk sub-sektor ketenagalistrikan, antara lain: perizinan Air Laut Selain Energi (ALSE).	In conducting electricity business activities, PLN NP is required to comply with the permits regulated in Government Regulation Number 28 of 2025, including fulfilling PB UMKU for the electricity sub-sector, among others: Sea Water Permits for Non-Energy (ALSE).

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP	
		1. Kepastian penerbitan perizinan berusaha sehingga memberi kepastian bagi pelaku usaha seperti dengan adanya *Service Level Agreement* (SLA) yang jelas, pengaturan jangka Waktu perbaikan bagi pelaku usaha dan proses pemeriksaan, penilaian dan verifikasi yang terstruktur; 2. Simplifikasi penerbitan perizinan berusaha. 3. Pengaturan khusus mengenai Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), seperti perizinan Air Laut Selain Energi (ALSE) untuk pembangkit	1. The certainty of business licensing issuance assures entrepreneurs with a clear Service Level Agreement (SLA), the regulation of repair timeframes for entrepreneurs, and a structured process of inspection, assessment, and verification. 2. Simplification of business licensing issuance. 3. Special regulations regarding Business Licensing to Support Business Activities (PB-UMKU), such as Sea Water Permits for Non-Energy (ALSE) for power plants		
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional Government Regulation Number 40 of 2025 on National Energy Policy	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 (PP 40/2025) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 (PP 79/2014) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dengan terbitnya PP 40/2025, pemerintah memiliki KEN yang akan dilaksanakan hingga periode tahun 2060. KEN yang diatur dalam PP 40/2025 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana umum nasional terkait ketenagalistrikan, minyak, gas, batubara dan energi lainnya.	Government Regulation Number 40 of 2025 (PP 40/2025) on the National Energy Policy (KEN) revokes Government Regulation Number 79 of 2014 (PP 79/2014) on the National Energy Policy (KEN). With the issuance of PP 40/2025, the government has a KEN that will be implemented until 2060. The KEN regulated in PP 40/2025 serves as a guideline in the preparation of the national general plan related to electricity, oil, gas, coal, and other energy sources.	PLN NP akan patuh terhadap kebijakan energi nasional (KEN) baru yang diatur dalam PP 40/2025 khususnya terkait kebijakan ketenagalistrikan. Kepatuhan tersebut juga termasuk mematuhi semua peraturan turunan yang akan diberlakukan dalam rangka melaksanakan PP 40/2025.	PLN NP will comply with the new national energy policy (KEN) regulated in PP 40/2025, particularly regarding the electricity policy. This compliance also includes adhering to all derivative regulations that will be enacted to implement PP 40/2025.
6.	Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Presidential Regulation Number 89 of 2025 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 4 of 2016 on the Acceleration of Electricity Infrastructure Development	Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Perpres 89/2025) menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Perpres 4/2016) dengan menambahkan ketentuan terkait Anak Perusahaan PT PLN (Persero) melaksanakan kerja sama dengan badan usaha dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) dengan kepemilikan saham Anak Perusahaan PT PLN (Persero) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesepakatan	Presidential Regulation Number 89 of 2025 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 4 of 2016 on the Acceleration of Electricity Infrastructure Development (Perpres 89/2025) refines Presidential Regulation Number 4 of 2016 on the Acceleration of Electricity Infrastructure Development (Perpres 4/2016) by adding provisions related to PT PLN (Persero) Subsidiaries collaborating with businesses in the context of Electricity Infrastructure Development (PIK) with the share ownership of PT PLN (Persero) Subsidiaries according to needs, capabilities, and agreements.	Dengan diterbitkannya Perpres 89/2025, maka PLN NP selaku Anak Perusahaan PT PLN (Persero) dapat bekerjasama dengan badan usaha lain dalam rangka PIK dengan kepemilikan saham sesuai kebutuhan, kemampuan dan kesepakatan dengan badan usaha lainnya	With the issuance of Presidential Regulation 89/2025, PLN NP, as a Subsidiary of PT PLN (Persero), can collaborate with other business entities in the context of PIK with share ownership according to needs, capabilities, and agreements with other business entities.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP	
7.	Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional Presidential Regulation Number 110 of 2025 on the Implementation of the Carbon Economic Value Instrument and National Greenhouse Gas Emission Control	Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Perpres 110/2025) bertujuan untuk memberikan pengaturan mengenai pengendalian perubahan iklim melalui penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional. Penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian emisi GRK dilakukan terhadap lingkup bisnis seperti energi, limbah, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; dan/atau Sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Presidential Regulation Number 110 of 2025 concerning the Implementation of the Carbon Economic Value Instrument and National Greenhouse Gas Emission Control (Perpres 110/2025) aims to provide regulations on climate change control through the Carbon Economic Value Instrument (NEK) and national Greenhouse Gas (GHG) emission control. The NEK instrument and GHG emission control are implemented in business sectors. It includes energy, waste, agriculture, forestry, marine and fisheries, and/or other sectors pursuant to the development of science and technology.	Dengan diterbitkannya Perpres 110/2025, PLN NP patuh terhadap kebijakan Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	With the issuance of Presidential Regulation 110/2025, PLN NP complies with the Government's policy in implementing Carbon Economic Value (NEK) and controlling Greenhouse Gas (GHG) emissions
8.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 5 of 2025 concerning Guidelines for Power Purchase Agreements from Power Plants Utilizing Renewable Energy Sources	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Energi Terbarukan (Permen ESDM 5/2025) merupakan peraturan Menteri yang menjadi pedoman bagi PJBL untuk pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan dengan mengatur beberapa hal yang perlu ada dalam PJBL, antara lain: 1. hak dan kewajiban Pengembang Pembangkit Listrik (PPL)dan PT PLN (Persero); 2. alokasi risiko; 3. jaminan pelaksanaan proyek; 4. komisioning dan COD; 5. sertifikasi instalasi tenaga listrik; 6. transaksi jual beli tenaga listrik; 7. pengendalian operasi Sistem Tenaga Listrik; 8. kinerja pembangkit tenaga listrik; 9. berakhirnya PJBL; 10. pengalihan hak; 11. harga dan persyaratan penyesuaian harga; 12. penyelesaian perselisihan; 13. keadaan kahar; 14. penggunaan produk dalam negeri; 15. atribut lingkungan atau nilai ekonomi karbon; 16. *refinancing*; dan 17. bahasa PJBL.	Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 5 of 2025 concerning Guidelines for Power Purchase Agreements (PPA) from Power Plants Utilizing Renewable Energy Sources (Permen ESDM 5/2025) is a Ministerial regulation that serves as a guideline for PPA for power plants utilizing renewable energy sources by regulating several aspects that need to be included in PPA, among others: 1. rights and obligations of the Power Plant Developer (PPL) and PT PLN (Persero); 2. risk allocation; 3. project performance guarantee; 4. commissioning and COD; 5. electrical installation certification; 6. electricity trading; 7. control of Electric Power System operations; 8. power plant performance; 9. the end of PPA; 10. transfer of rights; 11. prices and its adjustment terms; 12. dispute resolution; 13. force majeure; 14. use of domestic products; 15. environmental attributes or carbon economic value; 16. refinancing; and 17. PJBL language.	Dalam rangka mengoperasikan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan, PLN NP melakukan PJBL dengan mengacu pada Permen ESDM 5/2025 sehingga didalam PJBL akan mengatur: 1. hak dan kewajiban PPL dan PT PLN (Persero); 2. alokasi risiko; 3. jaminan pelaksanaan proyek; 4. komisioning dan COD; 5. sertifikasi instalasi tenaga listrik; 6. transaksi jual beli tenaga listrik; 7. pengendalian operasi Sistem Tenaga Listrik; 8. kinerja pembangkit tenaga listrik; 9. berakhirnya PJBL; 10. pengalihan hak; 11. harga dan persyaratan penyesuaian harga; 12. penyelesaian perselisihan; 13. keadaan kahar; 14. penggunaan produk dalam negeri; 15. atribut lingkungan atau nilai ekonomi karbon; 16. *refinancing*; dan 17. bahasa PJB.	To operate power plants that utilize renewable energy sources, PLN NP conducts a PPA in accordance with Permen ESDM 5/2025, so that the PPA will regulate: 1. rights and obligations of PPL and PT PLN (Persero); 2. risk allocation; 3. project performance guarantee; 4. commissioning and COD; 5. electrical installation certification; 6. electricity trading; 7. control of Electric Power System operations; 8. power plant performance; 9. the end of PPA; 10. transfer of rights; 11. prices and its adjustment terms; 12. dispute resolution; 13. force majeure; 14. use of domestic products; 15. environmental attributes or carbon economic value; 16. refinancing; and 17. PJB language.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP	
9.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 19 of 2025 concerning Hybrid Power Plants	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (Permen ESDM 19/2025) merupakan peraturan Menteri yang peraturan perundang-undangan terkait pembangkit lainnya. Didalam peraturan Menteri ini diatur jenis2 pembangkit tenaga listrik hibrida antara lain: 1. Energi Terbarukan dengan Energi Terbarukan; 2. Energi Terbarukan dengan BESS; 3. Energi Terbarukan dengan Energi Terbarukan dan BESS; 4. Energi Terbarukan dengan Energi Baru dan BESS; 5. Energi Terbarukan dengan Energi Tak Terbarukan; atau 6. Energi Terbarukan dan BESS dengan Energi Tak Terbarukan.	Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 19 of 2025 concerning Hybrid Power Plants (Permen ESDM 19/2025) is a Ministerial regulation that is related to other power plant regulations. In this Ministerial Regulation, various types of hybrid power plants are regulated, including: 1. Renewable Energy with Renewable Energy; 2. Renewable Energy with BESS; 3. Renewable Energy with Renewable Energy and BESS; 4. Renewable Energy with New Energy and BESS; 5. Renewable Energy with Non-Renewable Energy with; or 6. Renewable Energy and BESS with Non-Renewable Energy.	Dalam rangka mengoperasikan pembangkit listrik tenaga hibrida seperti: 1. Energi Terbarukan dengan Energi Terbarukan; 2. Energi Terbarukan dengan BESS; 3. Energi Terbarukan dengan Energi Terbarukan dan BESS; 4. Energi Terbarukan dengan Energi Baru dan BESS; 5. Energi Terbarukan dengan Energi Tak Terbarukan; atau 6. Energi Terbarukan dan BESS dengan Energi Tak Terbarukan. PLN NP akan berpedoman kepada Permen ESDM 19/2025sebagai salah satu dasar hukum pengoperasian pembangkit listrik tenaga hibrida.	To operate hybrid power plants such as: 1. Renewable Energy with Renewable Energy; 2. Renewable Energy with BESS; 3. Renewable Energy with Renewable Energy and BESS; 4. Renewable Energy with New Energy and BESS; 5. Renewable Energy with Non-Renewable Energy with; or 6. Renewable Energy and BESS with Non-Renewable Energy. PLN NP will refer to the Regulation of the Minister of EMR 19/2025 as one of the legal basis for the operation of hybrid power plants.

Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Laba Perusahaan
Impact of Price Changes on Company's Revenue and Profit

Dampak Perubahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP)
Impact of Changes in Cost of Electricity Supply (BPP)

Biaya pokok penyediaan tenaga listrik merupakan komponen biaya yang dikeluarkan PLN NP pada sisi pembangkitan, mulai dari pengadaan energi primer hingga tenaga listrik disalurkan dan dijual kepada PLN. Perubahan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) memberikan pengaruh terhadap pendapatan usaha Perseroan. Setiap perubahan sebesar Rp1 pada BPP tercatat berdampak terhadap perubahan pendapatan usaha sebesar Rp74,09 miliar pada tahun 2025 dan sebesar Rp74,31 miliar pada tahun 2024.

The cost of electricity supply is a cost component incurred by PLN NP on the generation side, starting from the procurement of primary energy to the distribution and sale of electricity to PLN.
Changes in the cost of electricity supply (BPP) affect the Company's revenue. Every change of Rp1 in the cost of electricity supply (BPP) impacts the change in revenue by Rp74.09 billion in 2025 and Rp74.31 billion in 2024.

Selain itu, perubahan BPP juga memengaruhi laba operasi Perusahaan. Setiap perubahan sebesar Rp1 pada biaya pokok penyediaan tenaga listrik berdampak terhadap perubahan laba operasi sebesar Rp11,03 miliar pada tahun 2025 dan sebesar Rp10,98 miliar pada tahun 2024.

In addition, changes in BPP affect the Company's operating profit. Each change of Rp1 in the cost of electricity supply affects the change in operating profit by Rp11.03 billion in 2025 and Rp10.98 billion in 2024.

Dampak Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik
Impact of Changes in Electricity Selling Price

Pendapatan dari penjualan tenaga listrik diakui berdasarkan jumlah pemakaian energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PLN dengan mengacu pada formula tarif sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif tersebut mencakup berbagai komponen, antara lain harga kapasitas, biaya tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi, serta variabel lainnya. Dengan demikian, perubahan harga jual tenaga listrik berdasarkan formula tarif akan memengaruhi pendapatan usaha Perusahaan.

Revenue from the sale of electricity is recognized based on the amount of electricity consumption (kWh) supplied to PLN, referring to the tariff formula as stipulated in the power purchase agreement. This tariff formula includes various components, such as capacity price, fixed operation and maintenance costs, fuel price, energy supply rate, and other variables. Therefore, changes in the selling price of electricity based on the tariff formula will affect the Company's business revenue.

Perubahan harga jual tenaga listrik memberikan dampak terhadap pendapatan usaha Perseroan, di mana setiap perubahan sebesar Rp1 pada harga jual listrik memengaruhi perubahan pendapatan usaha sebesar Rp63,28 miliar miliar pada tahun 2025 dan sebesar Rp63,41 miliar pada tahun 2024.

Changes in the selling price of electricity have an impact on the Company's revenue, where each change of Rp1 in the selling price of electricity affects the change in revenue by Rp63.28 billion in 2025 and Rp63.41 billion in 2024.

Selain itu, perubahan harga jual tenaga listrik juga berdampak terhadap laba usaha Perusahaan. Setiap perubahan sebesar Rp1 pada harga jual listrik mengakibatkan perubahan laba usaha sebesar Rp9,43 miliar pada tahun 2025 dan sebesar Rp9,56 miliar pada tahun 2024.

Moreover, changes in the selling price of electricity also impact the Company's operating profit. Each change of Rp1 in the selling price of electricity results in a change in operating profit of Rp9.43 billion in 2025 and Rp9.56 billion in 2024.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

06

Penerapan Governansi Berkelanjutan
Implementation of Sustainable Governance

Tata Kelola Perusahaan (*Governance*) merupakan salah satu *Strategic Goal* sebagai pilar penopang pencapaian visi "Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global".
Melalui penguatan tata kelola perusahaan termasuk *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC); *Environment, Social, and Governance* (ESG); dan *stakeholder management*, PLN NP terus berupaya menjawab tantangan serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan sektor ketenagalistrikan Indonesia melalui setiap lini bisnis yang dijalankan.

Corporate Governance is one of the Strategic Goals as a pillar supporting the achievement of the vision "To become a leading and trusted generation company for sustainable energy in Indonesia and the global market." Through strengthening corporate governance, including Governance, Risk Management, and Compliance (GRC); Environment, Social, and Governance (ESG); and stakeholder management, PLN NP continues to strive to meet challenges and provide added value to stakeholders and the Indonesian electricity sector across every line of business it operates.

Perusahaan menjalankan peran sebagai *Generation Company* 1 (GenCo-1) yang berkontribusi dalam industri pembangkitan tenaga listrik. Kontribusi PT PLN Nusantara Power (PLN NP) menjadi semakin strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN dalam melistriki nusantara. PLN NP terus berupaya meningkatkan pengelolaan pembangkit dengan standar kelas dunia agar keamanan dan keandalan pembangkit terus terjaga dan kualitas aset yang terus meningkat. Selain itu, PLN NP juga terus mendorong eksekusi program EBT dengan mengimplementasikan program *co-firing* guna meningkatkan bauran energi pembangkit yang ramah lingkungan.

Penguatan tata kelola perusahaan merupakan faktor penting untuk memastikan bisnis PLN NP bergerak dan berkembang secara terus menerus dengan menjalankan bisnis eksisting; membangun dan mengembangkan bisnis baru; serta berinovasi untuk meningkatkan *profit* dan *value* perusahaan bagi *stakeholder*. Guna mendukung hal tersebut, PLN NP telah menyusun *strategic initiatives* dari segi *enablers* utama diantaranya:

1. Manajemen risiko, regulasi & stakeholder mencakup upaya perusahaan untuk mengelola risiko, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan Perusahaan.
2. Proses *governance* yang lebih *streamlined* & tata kelola pasca-H/SH termasuk anak perusahaan melalui penyederhanaan proses pengambilan keputusan, penguatan harmonisasi kebijakan serta penyesuaian mekanisme tata kelola.

The Company plays the role of Generation Company 1 (GenCo-1), contributing to the electric power generation industry. The contribution of PT PLN Nusantara Power (PLN NP) has become increasingly strategic in the management of state assets, which have long been at the forefront of PLN's operations in electrifying the archipelago. PLN NP continues to strive to improve power plant management with world-class standards to ensure the safety and reliability of the plants are maintained, and the quality of the assets continues to increase. In addition, PLN NP continues to encourage the execution of the EBT program by implementing a co-firing program to enhance the green energy mix of the power plants.

Strengthening corporate governance is a crucial factor to ensure that PLN NP's business moves and develops continuously by running existing businesses, building and developing new businesses, and innovating to increase profits and the company's value for stakeholders. To support this, PLN NP has formulated strategic initiatives in terms of key enablers, including:

1. Risk management, regulation & stakeholders encompass the Company's efforts to manage risks, ensure compliance with applicable regulations, and build good relationships with the Company's stakeholders.
2. A more streamlined governance process and post-H/SH governance, including subsidiaries, involve simplifying decision-making processes, strengthening policy harmonization, and refining governance mechanisms.

3. Implementasi *framework* ESG dalam proses bisnis sehingga dapat mencapai Tingkat *Maturity Level Sustainability* 4.

3. Implementation of the ESG framework in business processes to achieve a Sustainability Maturity Level 4.

Komitmen dan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan
Commitment to and Implementation of Good Corporate Governance Principles

PLN NP selalu mengedepankan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai dasar membangun organisasi yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dinamika bisnis global yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan meningkatnya harapan pemangku kepentingan, turut mendorong praktik GCG untuk terus berkembang dan beradaptasi. Penerapan prinsip GCG dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu kesadaran etika internal (*ethical driven*) dan kepatuhan pada peraturan (*regulatory driven*). Kematangan dalam menerapkan kedua aspek ini dapat menjadikan tata kelola perusahaan lebih efektif, adaptif dan relevan, guna mendukung Perusahaan mencapai tujuan jangka panjang serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

PLN NP always prioritizes the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles as the foundation for building a healthy, competitive, and sustainable organization. The dynamics of the global business environment, influenced by technological advancements, social changes, and increasing stakeholder expectations, also drive GCG practices to evolve and adapt continuously. The implementation of GCG principles is influenced by two main factors: internal ethical awareness (ethically driven) and compliance with regulations (regulatory driven). Maturity in applying these two aspects can make corporate governance more adaptive and relevant, in order to support the Company in achieving long-term goals and providing added value to all stakeholders sustainably.

Integrasi Prinsip dan Pilar Tata Kelola Perusahaan
Integration of Corporate Governance Principles and Pillars

PLN NP berkomitmen untuk secara konsisten menerapkan prinsip GCG melalui pengelolaan tata kelola yang tidak hanya selaras dan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengacu pada praktik terbaik (*best practices*) global yang terus berkembang. Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh PLN NP dikenal dengan akronim TARIF, yaitu:

PLN NP is committed to consistently implementing GCG principles through governance practices that not only align with and comply with applicable laws and regulations but also follows evolving global best practices. The GCG principles implemented by PLN NP are known by the acronym TARIF, which stands for:

Prinsip-prinsip GCG TARIF
GCG TARIF Principles

Prinsip Principle	Makna Meaning	Implementasi di PLN NP Implementation in PLN NP
Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan Transparency in implementing the decision-making process and transparency in disclosing material and relevant information	1. Informasi melalui situs web, media sosial, buletin internal. 2. Laporan Tahunan Perusahaan 1. Information via website, social media, internal bulletins. 2. Company Annual Report
Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif Clarity of the functions, implementation and accountability of the Company's Organs so that the management of the Company is carried out effectively	1. RUPS Tahunan Perusahaan. 2. Direksi melakukan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan penasihatan kepada Direksi. 1. Company Annual GMS. 2. The Board of Directors manages the Company in accordance with applicable regulations. 3. The Board of Commissioners supervises and advises the Board of Directors.
Responsibilitas/ Pertanggungjawaban Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat Conformity in the management of the Company to the provisions of laws and regulations and healthy corporate principles	1. Laporan Tahunan Perusahaan 2. Kewajiban Perpajakan 3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 4. Laporan AMDAL. 1. Company Annual Report 2. Tax Obligations 3. Joint Working Agreement (PKB). 4 AMDAL Report.
Independensi/ Kemandirian Independency	Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. The Company is managed professionally without conflict of interest and influence/ pressure from any party that is not in accordance with the provisions of laws and regulations and healthy corporate principles.	1. Pakta Integritas. 2. Kebijakan Gratifikasi. 3. Kebijakan Benturan Kepentingan. 4. Direksi dan Dewan Komisaris menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapuun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, dan dari segala pengaruh atau tekanan. 1. Integrity Pact. 2. Gratification Policy. 3. Conflict of Interest Policy. 4. The Board of Directors and Board of Commissioners avoid domination by any party, are not influenced by certain interests, are free from conflicts of interest, and from any influence or pressure.
Fairness Kewajaran	Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising under agreements and statutory regulations.	1. Laporan Berkala kepada Pemegang Saham Minoritas 2. Perlakuan adil terhadap seluruh Pemangku Kepentingan. 1. Periodic reporting to Minority Shareholders 2. Fair treatment of all Stakeholders.

Sebagai penguatan atas prinsip TARIF, PLN NP mengadopsi Empat Pilar Governansi Korporat sesuai Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia, yakni Etika (Perilaku Beretika), Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan yang selanjutnya disingkat menjadi ETAK. Pilar-pilar ini merupakan adaptasi prinsip dasar GCG agar tetap relevan dengan perkembangan lingkungan bisnis, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

To further reinforce the TARIF principles, PLN NP adopts the Four Pillars of Corporate Governance in accordance with the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, namely Ethics (Ethical Behavior), Transparency, Accountability, and Sustainability, abbreviated as ETAK. These pillars are an adaptation of the basic principles of GCG to remain relevant to the developments in the business environment, which are further explained as follows:

Pilar Tata Kelola ETAK
ETAK Governance Pillar

Prinsip Principle	Makna Meaning	Implementasi di PLN NP Implementation in PLN NP
Perilaku Beretika Ethical Behavior	PLN NP mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (respect), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. PLN NP memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, serta dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. PLN NP prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, and consistently builds and maintains moral values and trust. PLN NP considers the interests of Shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality, and is managed independently so that each company organ does not dominate the other and cannot be intervened by other parties.	1. Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan itikad baik dan patuh regulasi 2. Dewan Komisaris menjaga integritas dan menjunjung tinggi moralitas dalam setiap proses pengambilan keputusan 3. Perusahaan memperlakukan Pemangku Kepentingan secara adil. 1. The Board of Directors carries out its duties in good faith and in compliance with regulations. 2. The Board of Commissioners maintains integrity and upholds morality in every decision-making process. 3. The Company treats all stakeholders fairly.
Transparansi Transparansi	PLN NP menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. PLN NP mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. PLN NP provides material and relevant information in a manner that is easily accessible and understandable to stakeholders. PLN NP takes the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations, but also matters that are important for decision-making by Shareholders and other stakeholders.	1. Penyediaan informasi melalui kanal informasi digital. 2. Pengungkapan informasi pada Laporan Tahunan. 3. Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan secara akurat dan dapat dipertanggungjawaban. 4. Direksi memberikan informasi secara jelas dan tepat waktu kepada RUPS dan pemangku kepentingan. 1. Information is provided through digital information channels. 2. Information disclosure is conducted through the Annual Report. 3. The Board of Commissioners submits accurate and accountable supervisory reports. 4. The Board of Directors provides clear and timely information to the GMS and stakeholders.

Prinsip Principle	Makna Meaning	Implementasi di PLN NP Implementation in PLN NP
Akuntabilitas Accountability	PLN NP mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. PLN NP dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. PLN NP is accountable for its performance in a transparent and fair manner. The Company is managed properly, in a measured and responsible way, in line with corporate interests while considering the interests of both Shareholders and stakeholders. Accountability is a fundamental prerequisite for achieving sustainable performance.	1. Pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan. 2. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan dan kebijakan regulasi yang berlaku. 3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan penasihatan pengelolaan perusahaan kepada Direksi. 4. RUPS mengesahkan laporan, mengevaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris sesuai kepentingan pemegang saham. 1. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2. The Board of Directors is responsible for managing the company's operations in accordance with applicable regulations and regulatory policies. 3. The Board of Commissioners supervises and advises the Board of Directors. 4. The GMS ratifies the report, evaluates the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners according to the interests of shareholders.
Keberlanjutan Sustainability	PLN NP mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. PLN NP complies with all applicable laws and regulations and is committed to fulfilling its social and environmental responsibilities. The Company aims to contribute to sustainable development through collaboration with all relevant stakeholders to improve livelihoods in ways that align with business interests and the sustainable development agenda.	1. Perusahaan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional, untuk mendorong kemandirian masyarakat yang selaras dan berdampak pada kepentingan jangka panjang Perusahaan. 2. Praktik tata kelola ESG (*Environmental, Social and Governance*). 1. The Company carries out social and environmental responsibility programs in its operational areas to promote community self-reliance in a manner that aligns with and supports the Company's long-term interests. 2. Implementation of ESG (Environmental, Social, and Governance) governance practices.

PLN NP memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai kerangka penting untuk memastikan keberlanjutan kinerja, menjaga reputasi, serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. Untuk itu, Perusahaan mengimplementasikan prinsip GCG secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam budaya organisasi serta sistem operasional, yang mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan. Melalui penerapan tersebut, Perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, tetapi juga menegaskan komitmen untuk terus berinovasi dan bertransformasi menjadi korporasi kelas dunia yang andal, berwawasan lingkungan, serta bernilai tambah secara ekonomi dan sosial.

PLN NP views the implementation of good corporate governance as an important framework to ensure performance sustainability, maintain reputation, and strengthen stakeholder trust. For this reason, the Company implements GCG principles in an integrated and sustainable manner within organizational culture and operational systems, covering all processes from planning, execution, monitoring, evaluation, to reporting. Through this implementation, the Company not only fulfills its obligations under applicable laws and regulations but also reaffirms its commitment to continuously innovate and transform into a reliable, environmentally conscious, and economically and socially value-adding world-class corporation.

Landasan Hukum Penerapan Governansi Perusahaan
Legal Basis for Corporate Governance Implementation

Perusahaan berkomitmen menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan kegiatan operasional guna melindungi kepentingan pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan. Penerapan tata kelola yang baik juga bertujuan untuk menciptakan nilai perusahaan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Dalam implementasinya, Perusahaan berpedoman pada landasan hukum, ketentuan regulator, serta praktik terbaik di industri. Oleh karena itu, untuk memastikan penerapan GCG dikelola secara efektif, Perusahaan mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang RI No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
7. Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Power;
8. Peraturan dan Kebijakan Perusahaan.

The Company is committed to implementing good corporate governance principles in the management of the organization and the execution of operational activities to safeguard the interests of shareholders and all stakeholders. The implementation of good governance also aims to create sustainable company value, enhance competitiveness, and ensure compliance with applicable regulations and standards. In its implementation, the Company adheres to legal foundations, regulatory provisions, and best practices in the industry. Therefore, the Company refers to various applicable regulations to ensure the effective implementation of GCG, among others:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
3. Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2023 concerning State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organizational Bodies and Human Resources of State-Owned Enterprises;
7. Articles of Association of PT PLN Nusantara Power;
8. Internal Company regulations and policies.

Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Standards for Good Corporate Governance Implementation

Perusahaan menerapkan standar GCG dengan mempertimbangkan kebutuhan internal, dinamika operasional, skala dan kompleksitas bisnis, serta risiko yang dihadapi. Penerapan tersebut diselaraskan dengan *best practices* baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk memastikan implementasi tata kelola perusahaan dilaksanakan secara efektif dan konsisten, Perusahaan merujuk pada berbagai standar dan pedoman tata kelola yang diakui secara luas. Standar tata kelola perusahaan yang menjadi acuan utama antara lain:

1. ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) Tahun 2024;
2. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Tahun 2021;
3. Pedoman Tata Kelola Peusahaan Terbuka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015;
4. Indikator Penilaian *Maturity Level Good Corporate Governance* PLN Grup.

The Company implements GCG standards by considering internal needs, operational dynamics, business scale and complexity, as well as the risks faced. The implementation is aligned with best practices both at the national and international levels. To ensure that corporate governance is implemented effectively and consistently, the Company refers to various widely recognized governance standards and guidelines. The main reference corporate governance standards include:

1. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) 2024;
2. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) by the National Committee for Governance Policy (KNKG) in 2021;
3. Guidelines for Public Company Governance in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015;
4. Indicators for the PLN Group's Good Corporate Governance Maturity Level Assessment.

Roadmap Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Roadmap

PLN Nusantara Power telah menyusun *Corporate Governance* (CG) *Roadmap* yang memuat *grand* strategy dan *milestone* implementasi GCG. CG roadmap yang berlaku merupakan *roadmap* tahun 2024 – 2028, yang merupakan pembaharuan dari periode sebelumnya, CG roadmap dimutakhirkan dalam rangka sebagai upaya Perusahaan untuk memperkuat sistem tata kelola korporasi perusahaan. Perusahaan diharapkan selain tetap dapat mematuhi/ memenuhi seluruh peraturan terkait implementasi tata kelola korporasi yang ditetapkan regulator, juga dapat memenuhi praktik-praktik tata kelola yang diadopsi oleh korporasi di tingkat global, guna memperkuat sistem tata kelola serta menjadi arah dan pedoman bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas praktik tata kelola Perusahaan.

PLN Nusantara Power has developed a Corporate Governance (CG) Roadmap that includes grand strategy and milestones for GCG implementation. The applicable CG roadmap is the 2024-2028 roadmap, which is an update from the previous period, the CG roadmap was updated in order to strengthen the company's corporate governance system. The Company is expected to not only continue to comply with/fulfill all regulations related to the implementation of corporate governance set by regulators, but also to comply with governance practices adopted by corporations at the global level, in order to strengthen the governance system and become a direction and guideline for the Company to continue to improve the quality of Corporate governance practices.

Roadmap Tata Kelola Perusahaan 2024-2028
The 2024-2028 Corporate Governance Roadmap

Leadership in Corporate Governance
(Menjadi Perusahaan yang kompetitif dan beretika melalui Kepemimpinan dalam Praktik Governansi)
To become a competitive and ethical company through leadership in governance practices

2024 - 2025
Penyesuaian dan Penyelerasan Praktik Governansi
Adjustment and Alignment of Governance Practices

IMPLEMENTASI
IMPLEMENTATION

1. Pembelajaran dari *best practices* di tingkat nasional dan internasional.
2. Memastikan kepatuhan terhadap *mandatory regulations*.
3. Peningkatan kapasitas untuk mendukung tata kelola.
4. Penyesuaian dan penyusunan kebijakan/pedoman/prosedur berdasarkan standar praktik governansi terbaik.
5. Mengintegrasikan prinsip governansi ke dalam seluruh proses bisnis.
6. Pemantauan dan evaluasi kinerja tata kelola secara berkala.

1. Learning from best practices at national and international levels.
2. Ensuring compliance with mandatory regulations.
3. Capacity building to support governance.
4. Adjustment and development of policies/guidelines/procedures based on best governance practice standards.
5. Integrating governance principles into all business processes.
6. Periodic monitoring and evaluation of governance performance.

SASARAN INDIKATOR
INDICATOR TARGETS

1. Penguatan aspek pengungkapan dan keterbukaan informasi ke publik.
2. Peningkatan skor governansi berdasarkan penilaian eksternal.
3. Pengurangan insiden ketidakpatuhan.

1. Strengthening disclosure and transparency to the public.
2. Improving governance scores based on external assessments.
3. Reducing incidents of non-compliance.

2026-2027
Peningkatan Berkelanjutan dan Terintegrasi
Continuous improvement and Integrated

IMPLEMENTASI
IMPLEMENTATION

1. Penerapan Kebijakan Remunerasi selaras dengan kinerja jangka Panjang dan tujuan strategis Perusahaan.
2. Penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan
3. Integrasi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dengan standard Governansi Internasional dan Pemenuhan target ESG yang terukur
4. Pemantauan dan Evaluasi kinerja tata kelola secara berkala.

1. Implementation of the Remuneration Policy aligned with long-term performance and the Company's strategic objectives.
2. Strengthening relationships with stakeholders.
3. Integration of ESG (Environmental, Social, and Governance) with international governance standards and achievement of measurable ESG targets.
4. Periodic monitoring and evaluation of governance performance.

SASARAN INDIKATOR
INDICATOR TARGETS

1. Penguatan Kinerja Keberlanjutan dan Ketangguhan
2. Penguatan Struktur dan Komposisi Keanggotaan Dewan serta Peran/Keterlibatan Dewan

1. Strengthening sustainability performance and resilience.
2. Strengthening the structure and composition of the Board membership as well as the roles/involvement of the Board.

2028
Pemantapan dan Kepemimpinan
Consolidation and Leadership

IMPLEMENTASI
IMPLEMENTATION

1. Mempertahankan praktik terbaik dan memastikan adaptasi dengan standar terbaru Prinsip/Praktik Governansi (GCG)
2. Adopsi maksimal standar internasional praktik Governansi
3. Pemantauan dan Evaluasi kinerja tata kelola secara berkelanjutan.

1. Maintaining best practices and ensuring adaptation to the latest governance principles/practices (GCG).
2. Maximizing adoption of international governance practice standards.
3. Continuous monitoring and evaluation of governance performance.

SASARAN INDIKATOR
INDICATOR TARGETS

1. Mencapai tata kelola yang matang dan berkelanjutan.
2. Penghargaan atas pencapaian tata kelola.
3. Perusahaan diakui sebagai pemimpin dan menjadi model bagi Perusahaan lain dalam penerapan praktik tata kelola.
4. Kepercayaan yang meningkat dari pemangku kepentingan.

1. Achieving mature and sustainable governance.
2. Recognition for governance achievements.
3. The company is recognized as a leader and a role model for other companies in implementing governance practices.
4. Increased trust from stakeholders.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure

Keberlanjutan pengelolaan bisnis Perusahaan didukung oleh penerapan struktur tata kelola yang kuat dan efektif. Struktur ini menjadi landasan dalam pelaksanaan operasional serta memastikan setiap pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, berintegritas, dan akuntabel. Oleh karena itu, Perusahaan merancang struktur tata kelola yang selaras dengan kebutuhan internal, perkembangan regulasi, dan praktik terbaik yang berlaku.

Perusahaan juga terus menyempurnakan struktur tersebut guna meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, serta memperkuat kemampuan adaptasi terhadap dinamika bisnis. Dalam perancangannya, Perusahaan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Struktur organ tata kelola PLN Nusantara Power terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh organ pendukung.

The sustainability of the Company's business management is supported by a strong and effective governance structure. This structure serves as the foundation for operational execution and ensures that every decision-making process is conducted transparently, with integrity, and accountability. Therefore, the Company designs a governance structure that aligns with internal needs, regulatory developments, and prevailing best practices.

The Company also continues to refine the structure to improve efficiency, encourage innovation, and strengthen the ability to adapt to business dynamics. In its design, the Company refers to Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The governance structure of PLN Nusantara Power consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors, which, in its implementation, is assisted by the supporting organs.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Organ Structure

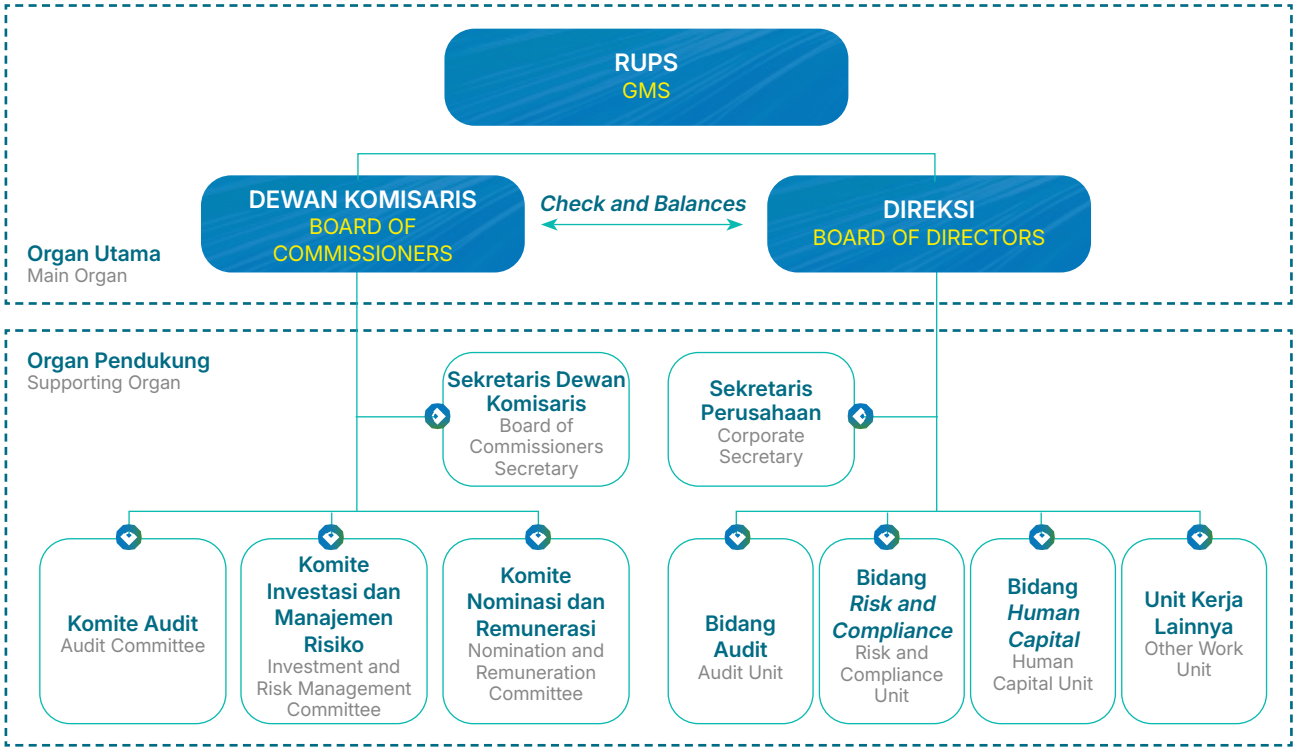

Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Responsibility for Good Corporate Governance Implementation

Berdasarkan Edaran Direksi Nomor 0009.E/012/DIR/2023, PLN NP menetapkan Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi sebagai penanggung jawab penerapan dan pemantauan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perusahaan. Penunjukan ini bertujuan memastikan implementasi tata kelola perusahaan berjalan efektif, transparan, dan mendukung pencapaian tujuan Perusahaan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi didukung oleh Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0042.P/DIR/2025 tentang Perubahan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0021.P/DIR/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja tertanggal 28 November 2025. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan, serta memastikan kelancaran komunikasi antara Direksi dan pemangku kepentingan. Adapun tanggung jawab Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi terkait penerapan dan pemantauan GCG antara lain:

1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga; dan
4. Melaporkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS dan Dewan Komisaris minimal sekali dalam setahun.

Based on Board of Directors Circular No. 0009.E/012/DIR/2023, PLN NP appoints the Director of Human Capital Management and Administration as the person responsible for the implementation and monitoring of Good Corporate Governance (GCG) within the Company. This appointment aims to ensure the implementation of corporate governance runs effectively, transparently, and supports the sustainable achievement of the Company's goals.

In its implementation, the Director of Human Capital Management and Administration is supported by the Corporate Secretary as stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 0042.P/DIR/2025 concerning Amendments to the Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 0021.P/DIR/2025 concerning Organization and Work Procedures dated November 28, 2025. The Corporate Secretary is responsible for managing, monitoring and evaluating the implementation of corporate governance, as well as ensuring smooth communication between the Board of Directors and stakeholders. The responsibilities of the Director of Human Capital Management and Administration regarding the implementation and monitoring of GCG include:

1. Preparing work plans required to ensure the Company complies with the Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance and all other applicable laws and regulations in support of GCG principles;
2. Monitoring and ensuring that the Company's business activities remain compliant with applicable provisions;
3. Monitoring and ensuring the Company's adherence to all agreements and commitments made with third parties; and
4. Reporting on the implementation of Good Corporate Governance to the General Meeting of Shareholders and the Board of Commissioners at least once a year.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Policies

Kebijakan tata kelola perusahaan (*soft structure*) menjadi fondasi penting dalam mengarahkan proses bisnis dan membentuk perilaku seluruh pemangku kepentingan, sehingga pencapaian tujuan Perusahaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, tetapi juga menanamkan budaya perusahaan yang mengedepankan etika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Corporate governance policies (soft structure) serve as an essential basis in directing business processes and shaping the behavior of all stakeholders, ensuring that the Company's objectives can be achieved effectively and efficiently. This policy not only fulfills legal obligations but also instills a corporate culture that prioritizes ethics, transparency, accountability, and sustainability.

Kebijakan tata kelola disusun sebagai pedoman penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, praktik terbaik, dan nilai-nilai budaya Perusahaan. Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, Perusahaan menerapkan pendekatan tiga pilar, yaitu *Objective, Risk, and Control* (ORC), untuk memastikan fungsi tata kelola berjalan optimal, risiko dikelola secara bijak, dan kontrol proses terjaga. Perusahaan secara berkala melakukan peninjauan dan pemutakhiran kebijakan guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan internal, perubahan regulasi, serta best practices dalam penerapan tata kelola perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga menyusun kebijakan pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan strategis dan operasional secara berkelanjutan. Beberapa kebijakan tata kelola yang dimiliki Perusahaan antara lain:

Corporate Governance Policies is formulated as a guideline for Good Corporate Governance (GCG) by referring to laws and regulations, best practices, and the Company's cultural values. As part of its commitment to sustainability, the Company implements a three-pillar approach, Objective, Risk, and Control (ORC), to ensure that governance functions optimally, risks are managed wisely, and process controls are maintained. The Company periodically reviews and updates policies to ensure their alignment with internal developments, regulatory changes, and best practices in corporate governance implementation. In addition, the Company also formulates other supporting policies to meet strategic and operational needs sustainably. Several governance policies held by the Company include:

Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Policies and Guidelines

No.	Kebijakan dan Pedoman Policies and Guidelines	Keterangan Description	
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Code*/CG *Code*) Corporate Governance Guidelines (Corporate Governance Code/CG Code)	Merupakan pedoman yang menjelaskan kaidah-kaidah GCG dan panduan implementasi tata kelola pada Perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, visi, misi, dan tata nilai Perusahaan serta praktik-praktik terbaik GCG, yang menjadi panduan bagi Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan dalam pengelolaan Perusahaan serta menjadi acuan bagi Stakeholder dalam hubungannya dengan Perseroan. Dokumen CG *Code* telah beberapa kali dimutakhirkan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi dan penerapan *best practice* tata kelola perusahaan. Dokumen CG *Code* dilakukan pemutakhiran pada tahun 2024-2025. Sebagai bentuk penegasan komitmen perusahaan terhadap implementasi CG *Code* yang berlaku, Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Code*) pada 15 Januari 2026.	It is a guideline that explains the GCG principles and guidelines for implementing governance in the Company based on applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, the Company's vision, mission, and values, as well as GCG best practices, which serve as a guide for Shareholders, Directors, Board of Commissioners, and Employees in managing the Company and serve as a reference for Stakeholders in their relationship with the Company. The CG Code document has been updated several times to adapt to regulatory developments and the implementation of corporate governance best practices. The CG Code document was updated in 2024-2025. As a form of affirmation of the company's commitment to implementing the applicable CG Code, the Board of Directors and Board of Commissioners signed the Commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Corporate Governance Guidelines on January 15, 2026.

No.	Kebijakan dan Pedoman Policies and Guidelines	Keterangan Description	
2.	Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*/COC) Code of Conduct/ COC and Ethics	Merupakan pedoman yang mengatur tata cara atau perilaku Perusahaan yang berisikan etika bisnis, komitmen serta penegakkan peraturan-peraturan Perusahaan yang berlaku bagi setiap individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya. *Code of Conduct* menjadi pedoman yang harus ditaati setiap individu dalam Perusahaan untuk mengawasi proses agar tidak terjadi penyimpangan. COC dapat digunakan sebagai sebuah instrumen dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Perseroan. *Code of Conduct* menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan sebagai Insan PLN NP dalam mengelola Perusahaan guna mencapai Visi, Misi dan tujuan Perusahaan. Dokumen *Code of Conduct* telah beberapa kali dimutakhirkan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi dan penerapan *best practice* tata kelola perusahaan. Dokumen *Code of Conduct* dilakukan pemutakhiran pada tahun 2024-2025. Sebagai bentuk penegasan komitmen perusahaan terhadap implementasi *Code of Conduct* yang berlaku, Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris atas Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) pada 15 Januari 2026.	The Code of Conduct is a guideline governing the Company's procedures and behavior, containing business ethics, commitments, and enforcement of applicable Company regulations for each individual in conducting business and other activities. The Code of Conduct serves as a guideline that must be adhered to by every individual within the Company to oversee the process to prevent deviations. The Code of Conduct can be used as an instrument in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the Company. The Code of Conduct serves as a behavioral reference for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Employees as PLN NP personnel in managing the Company to achieve the Company's Vision, Mission, and objectives. The Code of Conduct has been updated several times to reflect regulatory developments and the implementation of corporate governance best practices. The Code of Conduct was updated in 2024-2025. To affirm the company's commitment to implementing the applicable Code of Conduct, the Board of Directors and the Board of Commissioners signed the Commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Code of Conduct and Ethics on January 15, 2026.
3.	Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) Board Manual	Merupakan pedoman yang menjelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, serta tata laksana kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. *Board Manual* bertujuan sebagai panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi perusahaan. Sebagai komitmen perusahaan, PLN NP melakukan pengesahan *Board Manual* pada 31 Desember 2024 melalui Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris atas Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*).	This manual explains the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as the work procedures between the Board of Directors and the Board of Commissioners, in order to implement good corporate governance (GCG). The Board Manual serves as a guide for the Board of Directors and the Board of Commissioners, explaining the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand, and consistently implemented manner. Therefore, it can serve as a reference for the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the company's Vision and Mission. As a corporate commitment, PLN NP ratified the Board Manual on December 31, 2024, through the Commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Board Manual.
4.	Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*/BOC *Manual*) Board of Commissioner Manual/BOC Manual	Merupakan pedoman yang bertujuan untuk menjelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lain, serta sebagai panduan bagi organ di bawah Dewan Komisaris mengenai pengawasan Perusahaan yang berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance*. Sebagai komitmen perusahaan, PLN NP melakukan pengesahan BOC *Manual* padaa 2 Juni 2025 melalui Komitmen Dewan Komisaris atas Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (BOC *Manual*).	It is a guideline that aims to explain the duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners, in carrying out its duties for the benefit of the Company above other interests, as well as a guide for organs under the Board of Commissioners regarding Company supervision based on the principles of Good Corporate Governance. As a company commitment, PLN NP ratified the BOC Manual on June 2, 2025 through the Board of Commissioners' Commitment to the Board of Commissioners' Work Procedure Guidelines (BOC Manual).

No.	Kebijakan dan Pedoman Policies and Guidelines	Keterangan Description	
5.	Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi (*Board of Director Manual*/ BOD *Manual*) Board of Director Manual/BOD Manual	Merupakan pedoman yang bertujuan untuk menjelaskan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan di atas kepentingan lain, serta sebagai panduan bagi organ di bawah Direksi mengenai pengelolaan Perseroan yang berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance*. Dokumen *Board of Director Manual* telah beberapa kali dimutakhirkan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi dan penerapan *best practice* tata kelola perusahaan. Dokumen BOD Manual dilakukan pemutakhiran pada tahun 2024-2025. Sebagai bentuk penegasan komitmen perusahaan terhadap implementasi BOD Manual yang berlaku, Direksi menandatangani Komitmen Direksi atas Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi (BOD Manual) pada 15 Januari 2026.	It is a guideline that aims to explain the duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors, in carrying out their duties for the benefit of the Company above other interests, as well as a guide for organs under the Board of Directors regarding the management of the Company based on the principles of Good Corporate Governance. The Board of Directors Manual document has been updated several times to accommodate regulatory developments and the implementation of best practices for corporate governance. The BOD Manual document was updated in 2024-2025. As a form of affirmation of the company's commitment to the implementation of the applicable BOD Manual, the Board of Directors signed the Board of Directors' Commitment to the Board of Directors' Work Procedure Guidelines (BOD Manual) on January 15, 2026.
6.	Pedoman *Subsidiary Governance* (Tata Kelola Komunikasi APPA) Subsidiary Governance Guidelines (APPA Communication Governance)	Merupakan pedoman komunikasi dan koordinasi bagi Perusahaan dalam pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi, guna meningkatkan serta menambah nilai (*added value*) bagi Perusahaan. Pedoman subsidiary governance mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 003.P/019/DIR/2018 tentang Tata Kelola Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi PT PLN Nusantara Power.	These guidelines regulate communication and coordination within the Company regarding the management of Subsidiaries and Associate Companies to enhance and add value to the Company. The subsidiary governance guidelines refer to the PT PLN Nusantara Power Board of Directors Regulation Number 003.P/019/DIR/2018 concerning Governance of Subsidiaries and Associate Companies of PT PLN Nusantara Power.
7.	Kebijakan Pengungkapan Informasi (*Disclosure Information*) Disclosure Information Policy	Merupakan pedoman yang mengatur klasifikasi informasi dan pengamanan informasi, data dan dokumen elektronik dan non elektronik milik Perusahaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kepentingan Perusahaan, yang mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 152.K/010/DIR/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi, Data dan Dokumen Perusahaan PT PLN Nusantara Power. Perusahaan juga memiliki kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan komunikasi korporat, yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 0060.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT PLN Nusantara Power.	It is a guideline that regulates the classification of information and the security of information, data and electronic and non-electronic documents belonging to the Company, in accordance with applicable regulations and the interests of the Company, which refers to the Decree of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 152.K / 010 / DIR / 2010 concerning the Policy for Managing Information, Data and Documents of PT PLN Nusantara Power. The Company also has a policy that regulates the management of corporate communications, which is regulated in the Regulation of the Board of Directors Number 0060.P / DIR / 2025 concerning the Strategic Policy of Corporate Communications and Social and Environmental Responsibility (TJSL) at PT PLN Nusantara Power.
8.	*Audit Internal Charter*	Merupakan dokumen formal yang mendefinisikan mandat fungsi audit internal dan persyaratan lainnya yang bertujuan untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan dan tanggung jawab Auditor Internal serta memberikan kewenangan yang diperlukan Auditor Internal untuk menjalankan tugasnya dalam pencapaian tujuan PT PLN Nusantara Power. Satuan Internal Audit PT PLN Nusantara Power telah memperbaharui Piagam Audit Intern, yang disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama pada 24 Desember 2024.	This formal document defines the mandate and requirements of the internal audit function, serving as the foundation for the duties and responsibilities of Internal Auditors. It grants the necessary authority for Internal Auditors to perform their tasks to achieve PT PLN Nusantara Power's objectives. The Internal Audit Unit has updated the Internal Audit Charter, which was approved by the President Director and the President Commissioner on December 24, 2024.
9.	*Charter* Komite Committee Charter	Piagam Komite Audit, Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko, dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, merupakan pedoman bagi masing-masing komite, sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris, untuk dapat melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, profesional dan independen.	The Audit Committee Charter, Investment and Risk Management Committee Charter, and Nomination and Remuneration Committee Charter provide guidelines for each committee as supporting organs of the Board of Commissioners. These charters enable the committees to carry out their functions, duties, and responsibilities efficiently, effectively, transparently, professionally, and independently.

No.	Kebijakan dan Pedoman Policies and Guidelines	Keterangan Description	
10.	Pedoman Kebijakan Perusahaan Corporate Policy Guidelines	Merupakan pedoman dalam pengelolaan kebijakan di lingkungan Perusahaan, untuk mewujudkan tata kelola kebijakan Perusahaan, secara terintegrasi dan selaras dengan visi dan misi Perusahaan, budaya Perusahaan, prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*), pedoman perilaku (*code of conduct*) dan kebijakan lainnya, yang mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power tentang Kebijakan Pelaksana Arsitektur dan Tata Kelola Kebijakan PT PLN Nusantara Power.	These guidelines govern policy management within the Company to achieve integrated and aligned governance of Company policies with the Company's vision and mission, corporate culture, principles of good corporate governance, code of conduct, and other policies. They refer to the PT PLN Nusantara Power Board of Directors Regulation on the Implementation of Policy Architecture and Governance.
11.	Budaya Perusahaan Corporate Culture	Merupakan panduan dalam implementasi Tata Nilai Perusahaan dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku bagi Insan Perusahaan, serta memberikan panduan dalam perumusan program penguatan Budaya Perusahaan di lingkungan Perusahaan, dalam rangka mendorong implementasi Panduan Perilaku dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku bagi Insan Perusahaan. Panduan ini mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 047.P/019/DIR/2020 tentang Budaya Perusahaan.	This guide supports the implementation of the Company's Core Values in attitudes, actions, and behaviors among the Company's people. It also provides direction for formulating programs to strengthen Corporate Culture within the Company to encourage implementation of behavior guidelines aligned with the Company's Core Values. The guidelines refer to the PT PLN Nusantara Power Board of Directors Regulation Number 047.P/019/DIR/2020 concerning Corporate Culture.
12.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Implementation of Integrated Risk Management	Merupakan pedoman pelaksanaan dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Perusahaan dan Anak Perusahaan, guna melindungi dan menciptakan nilai bagi Perusahaan dan Anak Perusahaan guna meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan, yang mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0047.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Nusantara Power.	These guidelines regulate the implementation of Integrated Risk Management in the Company and its Subsidiaries, aimed at protecting and creating value for the Company and its Subsidiaries by minimizing potential risk impacts that could hinder the achievement of the Company's objectives and targets. They refer to PT PLN Nusantara Power Board of Directors Regulation Number 0047.P/DIR/2024 on Strategic Policy of Integrated Risk Management.
13.	Pedoman Penerapan *Governance, Risk, Compliance* (GRC) Guidelines for the Implementation of Governance, Risk, Compliance (GRC)	Merupakan pedoman dalam penerapan GRC dalam setiap pengambilan keputusan di lingkungan Perusahaan sesuai kewenangannya. Tujuan pedoman ini agar penerapan GRC dapat meningkatkan kualitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan Perusahaan yang memenuhi kaidah GCG sesuai dengan Visi, Misi dan dilandasi dengan budaya Perusahaan. Pedoman Penerapan *Governance, Risk, Compliance* (GRC) dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan, dan terakhir diperbaharui pada Januari 2025, mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0002.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis *Governance, Risk, Compliance* (GRC) PT PLN Nusantara Power.	These guidelines govern the application of GRC in every decision-making process within the Company according to its authority. The purpose is to enhance the quality, harmonization, effectiveness, and efficiency of decision-making processes to support the Company's growth and sustainability in compliance with Good Corporate Governance principles aligned with the Company's Vision, Mission, and culture. The GRC Implementation Guidelines are updated based on the Company's needs, with the latest revision in January 2025, referring to PT PLN Nusantara Power Board of Directors Regulation Number 0002.P/DIR/2025 on Strategic Policy of GRC.
14.	Pedoman Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan Guidelines for Limitations of Decision-Making Authority	Merupakan pedoman dalam pembagian dan pelimpahan kewenangan Direksi, dalam rangka menjaga efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan, serta mendukung kegiatan bisnis perusahaan, dengan tetap memperhatikan kaidah tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman batasan kewenangan mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0030.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Pelaksana Batasan Kewenangan PT PLN Nusantara Power.	It is a guideline for the distribution and delegation of authority of the Board of Directors, in order to maintain the effectiveness and efficiency of decision-making, and support the company's business activities, while still observing the principles of good corporate governance. The guideline for the limitation of authority refers to the Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 0030.P/DIR/2025 concerning the Implementing Policy for the Limitation of Authority of PT PLN Nusantara Power.

No.	Kebijakan dan Pedoman Policies and Guidelines	Keterangan Description	
15.	Pedoman Kebijakan *Anti Fraud* Anti-Fraud Policy Guidelines	Merupakan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris dalam mendukung peningkatan integritas sebagai bagian dari nilai-nilai budaya Perusahaan, yang menjadi landasan dari strategi dan program-program *Anti Fraud*, baik berupa kebijakan, pedoman, prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan ketentuan internal Perusahaan lainnya, sehubungan dengan upaya mencegah, mendeteksi secara dini, serta respon terhadap risiko dan kejadian *Fraud* di lingkungan Perusahaan, yang mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 0017.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Operasional *Fraud Risk Management* PT PLN Nusantara Power.	It is the commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners to support the enhancement of integrity as part of the Company's cultural values, which serve as the foundation for Anti-Fraud strategies and programs, including policies, guidelines, procedures, implementation instructions, and other internal Company provisions, related to efforts to prevent, detect, and respond to fraud risks and incidents within the Company, as referred to in Board of Directors Regulation Number 0017.P/DIR/2025 concerning the Operational Fraud Risk Management Policy of PT PLN Nusantara Power.
16.	Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) Guidelines for Reporting State Officials' Wealth (LKHPN)	Merupakan panduan bagi Wajib LHKPN, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perusahaan dalam jenjang jabatan tertentu dan/atau karena jabatannya wajib membuat dan menyampaikan LHKPN, dalam pelaksanaan pembuatan dan penyampaian LHKPN, yang mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 0013.P/DIR/2025 tentang Pengelolaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	It is a guide for LHKPN Obligors, namely the Board of Commissioners, Directors, and all Company employees at certain levels of office and/or due to their position are required to make and submit LHKPN, in the implementation of making and submitting LHKPN, which refers to the Board of Directors Regulation Number 0013.P/DIR/2025 concerning Management of Reporting of State Officials' Wealth Reports (LHKPN).
17.	Pedoman Benturan Kepentingan Conflict of Interest Guidelines	Merupakan pedoman bagi Insan Perusahaan, termasuk keluarga inti Karyawan yang terdaftar di perusahaan untuk memahami, mencegah dan mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di lingkungan perusahaan. Tujuan kebijakan ini antara lain meningkatkan nilai budaya AKHLAK terutama pada nilai amanah, dan menciptakan kondisi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna mencegah terjadinya kerugian Perusahaan, yang mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0011.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Pelaksana Pengelolaan Benturan Kepentingan PT PLN Nusantara Power.	It is a guideline for Company Personnel, including the immediate families of Employees registered in the company to understand, prevent and take a firm stance against conflicts of interest in the company environment. The objectives of this policy include improving the cultural values of AKHLAK, especially on the value of trust, and creating conditions free from corruption, collusion and nepotism in order to prevent losses to the Company, which refers to the Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 0011.P/DIR/2025 concerning the Implementation Policy for Conflict of Interest Management of PT PLN Nusantara Power.
18.	Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi Guidelines for Implementing Reporting and Controlling Gratification	Merupakan pedoman bagi Insan Perusahaan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap gratifikasi untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bersih, sehat dan bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta memberikan pemahaman, arahan dan acuan bagi Insan Perusahaan yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi di lingkungan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 0012.P/DIR/2025 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi.	It is a guideline for Company Personnel in taking a firm stance against gratification to realize clean, healthy and free Company management from all forms of corruption, collusion and nepotism (KKN), as well as providing understanding, direction and reference for Company Personnel regarding the acceptance, giving and requesting of gratification within the Company environment in order to comply with the principles of Good Corporate Governance (GCG), which refers to the Board of Directors Regulation Number 0012.P/DIR/2025 concerning Management and Control of Gratification.
19.	Pedoman Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* / WBS) Guidelines for Reporting Violations (Whistleblowing System / WBS)	Merupakan panduan bagi internal Perusahaan dalam pengelolaan dan penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan Perusahaan yang disampaikan *Whistleblowing System* (WBS). Dalam penyelenggaran WBS dapat memberikan kepastian dan keyakinan bahwa laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti Perusahaan sekaligus memberikan keamanan Pelapor melalui jaminan kerahasiaan dan perlindungan Pelapor. Panduan ini mengacu pada Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 004.K/021/DIR/2020 dan 007.K/DK-PLNNP/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT PLN Nusantara Power.	These guidelines govern the management and handling of violation reports within the Company submitted through the Whistleblowing System. The system ensures certainty and confidence that reports will be followed up by the Company while providing protection and confidentiality guarantees for the whistleblower. These guidelines refer to the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 004.K/021/DIR/2020 and 007.K/DK-PLNNP/2020 on the Whistleblowing System at PT PLN Nusantara Power.

No.	Kebijakan dan Pedoman Policies and Guidelines	Keterangan Description	
20.	Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi Integrated Management System Policy	Merupakan kebijakan yang berlaku di lingkungan PT PLN Nusantara Power dalam menetapkan kebijakan dan program yang berkaitan dengan proses kegiatan pengelolaan Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Energi, Aset, Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi, Keamanan Informasi, Pelayanan Teknologi Informasi, Risiko, Kesinambungan Bisnis, Pengamanan Obyek Vital, Anti Kecurangan dan Anti Penyuapan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepatuhan, Layanan Pelaksanaan Asesmen Karyawan dan Organisasi, Manajemen Organisasi Pendidikan, Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan, Manajemen Gas Rumah Kaca, Manajemen Pedoman Audit, serta serta pengelolaan sistem manajemen lainnya yang diimplementasikan. yang mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 027.K/020/DIR/2023 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi PT PLN Nusantara Power.	This policy applies throughout PT PLN Nusantara Power and sets out policies and programs related to managing Quality, Environmental, Occupational Health and Safety, Energy, Assets, Testing and Calibration Laboratories, Information Security, IT Services, Risk, Business Continuity, Vital Object Security, Anti-Fraud and Anti-Bribery, Corporate Social Responsibility, Compliance, Employee and Organizational Assessment Services, Educational Organization Management, Electricity Safety Management, Greenhouse Gas Management, Audit Guidelines, and other management systems implemented. It refers to PT PLN Nusantara Power Board of Directors Decree Number 027.K/020/DIR/2023 on Integrated Management System Policy at PT PLN Nusantara Power.
21.	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Guidelines for Procurement of Goods and Services	Merupakan pedoman yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT PLN Nusantara Power, guna meningkatkan efisiensi, mendukung penciptaan nilai tambah di Anak Perusahaan BUMN, menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, serta meningkatkan sinergi antara BUMN/Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, yang mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 0034.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power beserta Kebijakan Pelaksana sebagai kebijakan turunannya.	This is a guideline that regulates the implementation of goods/services procurement within PT PLN Nusantara Power, in order to increase efficiency, support the creation of added value in state-owned enterprise subsidiaries, simplify and accelerate the decision-making process, enhance independence, responsibility, and professionalism, increase the use of domestic production, and enhance synergy between state-owned enterprises/subsidiaries and/or affiliated companies. This refers to Board of Directors Regulation Number 0034.P/DIR/2025 concerning the Strategic Policy for Procurement of Goods/Services of PT PLN Nusantara Power and its implementing policies as derivative policies.
22.	Pedoman Teknologi Informasi Information Technology Guidelines	Merupakan kerangka peraturan atau acuan kepada seluruh unit terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi Perusahaan dalam penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan prosedur agar terjadi sinergi antara pengembangan dan operasional di lingkungan organisasi unit terkait. Sebagai pedoman untuk mewujudkan pola standarisasi kerangka pelaksanaan pengembangan, penerapan dan operasi Teknologi Informasi yang selaras dengan kebutuhan strategis Perusahaan. Pedoman tersebut mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 067.K/010/DIR/2017 tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi PT PLN Nusantara Power yang telah dimutakhirkan pada tahun 2026 melalui Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0002.P/DIR/2026 tentang Kebijakan Strategis Teknologi Informasi PT PLN Nusantara Power.	It is a regulatory framework or reference to all units related to the implementation of Company Information Technology in the preparation and determination of implementation instructions and procedures so that synergy occurs between development and operations within the organizational environment of related units. As a guideline to realize a standardized pattern of the implementation framework for the development, application and operation of Information Technology that is aligned with the Company's strategic needs. The guideline refers to the Decree of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 067.K / 010 / DIR / 2017 concerning Guidelines and General Policies for Information Technology Governance of PT PLN Nusantara Power which has been updated in 2026 through the Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 0002.P / DIR / 2026 concerning the Strategic Policy of Information Technology of PT PLN Nusantara Power.
23.	ESG *Policy*	Merupakan kebijakan perusahaan yang menetapkan komitmen, prinsip, dan pedoman strategis dalam mengelola isu-isu *Environmental, Social, and Governance*. PLN NP memiliki 9 kebijakan ESG antara lain kebijakan aspek sosial Masyarakat; kebijakan K3 dan lingkungan; kebijakan keanekaragaman hayati dan restorasi lahan; kebijakan respectful workplace; kebijakan pengadaan ramah lingkungan; kebijakan pengarusutamaan *gender* dan hak asasi manusia; kebijakan perubahan iklim; kebijakan sosial supplier dan kontraktor; serta kebijakan wellbeing dan social inclusion.	It is a company policy that establishes commitments, principles, and strategic guidelines in managing Environmental, Social, and Governance issues. PLN NP has 9 ESG policies, including a community social policy; an OHS and environmental policy; a biodiversity and land restoration policy; a respectful workplace policy; an environmentally friendly procurement policy; a gender and human rights mainstreaming policy; a climate change policy; a supplier and contractor social policy; and a wellbeing and social inclusion policy.

Proses Tata Kelola Berkelanjutan
Sustainable Governance Process

PLN NP membangun tata kelola perusahaan sebagai kerangka untuk mengarahkan proses, perilaku, dan hubungan antar pemangku kepentingan demi pencapaian tujuan Perusahaan secara berkelanjutan. Sistem tata kelola mencakup kebijakan, aturan, dan mekanisme pengawasan yang memastikan pengelolaan sumber daya, pengendalian internal, dan pelaksanaan arah strategis perusahaan berjalan efektif, selaras dengan prinsip GCG. Perusahaan mengintegrasikan nilai-nilai inti ke dalam setiap proses bisnis, sehingga seluruh kegiatan operasional maupun strategis tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan dampak positif jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

PLN NP establishes corporate governance as a framework to guide processes, behaviors, and relationships between stakeholders to achieve the Company's objectives sustainably. The governance system includes policies, rules, and oversight mechanisms that ensure effective resource management, internal control, and implementation of the Company's strategic direction, in line with GCG principles. The Company integrates core values into every business process, so that all operational and strategic activities are not only oriented towards regulatory compliance, but also provide added value and long-term positive impacts for all stakeholders.

Proses Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Process

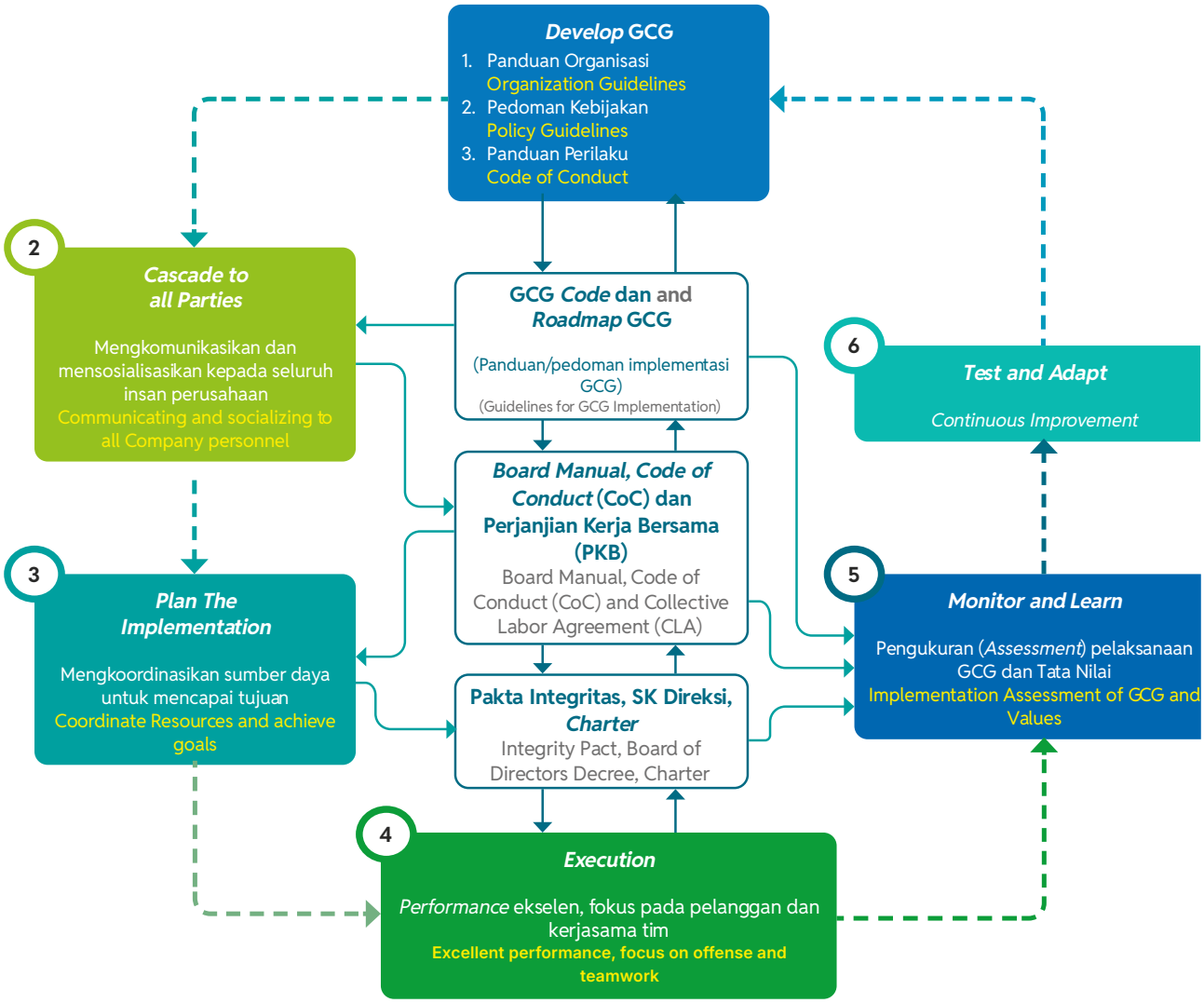

1. *Develop* GCG
   Pengembangan arsitektur GCG dan kebijakan tata kelola dilakukan sebagai upaya Perusahaan dalam memperkuat penerapan GCG secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pengembangan tersebut meliputi penyusunan struktur dan panduan organisasi, pedoman kebijakan, serta panduan perilaku yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Dalam implementasinya, Perusahaan menyusun *Roadmap* GCG dan CG *Code* sebagai pedoman atau *guidance* dalam melaksanakan implementasi GCG di Perusahaan. Kedua guidance tersebut menjadi referensi dalam penyusunan *soft structure* GCG dan pedoman kebijakan tata kelola lainnya. Perusahaan melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala terhadap pedoman tersebut, agar tetap selaras dengan perkembangan kebutuhan bisnis, dinamika organisasi, perubahan regulasi, serta *best practices* tata kelola perusahaan.
2. *Cascade to all Parties*
   Pada awal tahun, Direksi menandatangani kontrak manajemen korporat, yang memuat aspirasi, target, serta arahan strategis pemegang saham, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Direksi mengkomunikasikan arah dan tujuan Perusahaan kepada seluruh Insan Perusahaan, guna memastikan keselarasan pemahaman dan pelaksanaan strategi di seluruh lini organisasi. Perusahaan secara berkala melaksanakan sosialisasi dan refereshment atas soft structure GCG dan pedoman kebijakan tata kelola lainnya kepada seluruh Insan Perusahaan, untuk meningkatkan kepatuhan dan memastikan implementasi tata kelola berjalan secara konsisten. Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan pedoman perilaku dan etika, seluruh karyawan menandatangani komitmen atas kepatuhan terhadap pedoman perilaku dan etika setiap tahunnya.
3. *Plan the Implementation*
   Proses penerapan tata kelola dilakukan melalui pengoordinasian seluruh sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Insan Perusahaan melaksanakan proses bisnis sesuai dengan arah strategis Perusahaan, dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, kebijakan internal dan prinsip etika bisnis. Direksi menetapkan dan mengesahkan berbagai peraturan direksi sebagai pedoman operasional dan pengambilan keputusan di

1. Develop GCG
   The development of the GCG architecture and governance policies is carried out as part of the Company's efforts to strengthen the comprehensive and sustainable implementation of GCG. This development includes the preparation of organizational structures and guidelines, policy guidelines, and behavioral guidelines that serve as the foundation for implementing corporate governance. In its implementation, the Company has prepared a GCG Roadmap and CG Code as guidelines for implementing GCG within the Company. These two guidelines serve as references in the preparation of the GCG soft structure and other governance policy guidelines. The Company periodically evaluates and refines these guidelines to ensure they remain aligned with evolving business needs, organizational dynamics, regulatory changes, and corporate governance best practices.
2. Cascade to all Parties
   At the beginning of the year, the Board of Directors signs a corporate management contract, which contains the aspirations, targets, and strategic directions of shareholders, as a guideline for implementing company management. The Board of Directors communicates the Company's direction and objectives to all Company Personnel, to ensure alignment in understanding and implementation of strategy across all lines of the organization. The Company periodically conducts socialization and reviews of the GCG soft structure and other governance policy guidelines to all Company Personnel, to improve compliance and ensure consistent implementation of governance. As a form of commitment to the implementation of the code of conduct and ethics, all employees sign a commitment to comply with the code of conduct and ethics every year.
3. Plan the Implementation
   The process of implementing good corporate governance is carried out through the coordination of all resources to support the achievement of objectives effectively and sustainably. Company personnel carry out business processes in accordance with the Company's strategic direction, while adhering to applicable regulations, internal policies, and ethical business principles. The Board of Directors establishes and ratifies various board regulations as operational guidelines and decision-

lingkungan perusahaan. Selain itu, komite dewan komisaris menyusun *charter* komite sebagai pedoman tata laksana pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing komite.

4. *Execution*
   Tahapan pelaksanaan prinsip GCG dalam operasional perusahaan. Seluruh kebijakan, pedoman, dan arahan yang telah disusun diimplementasikan oleh seluruh insan perusahaan dalam menjalankan proses bisnis sehari-hari, dengan berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, serta kepatuhan terhadap peraturan dan etika bisnis yang berlaku.
5. *Monitor & Learn*
   Tahapan pengelolaan dan pemantauan proses kegiatan bisnis yang dilaksanakan Perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola. Dalam rangka mengevaluasi kualitas penerapan tata kelola perusahaan, Perusahaan melakukan penilaian atas pelaksanaan GCG secara berkala setiap tahun, dengan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. Penilaian tersebut dilaksanakan melalui *assessment* GCG, yang dilaksanakan oleh asesor independen pada tahun genap dan melalui *self assessment* pada tahun ganjil. Perusahaan juga melakukan evaluasi terhadap tingkat maturitas penerapan tata kelola melalui pengukuran *maturity level* GCG sesuai dengan metodologi dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang saham.
6. *Test & Adapt*
   Sebagai tindak lanjut atas proses pengukuran dan evaluasi penerapan GCG, Perusahaan melaksanakan pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) guna meningkatkan efektivitas dan kualitas implementasi tata kelola perusahaan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemutakhiran atas kebijakan dan pedoman tata kelola agar selaras dengan perkembangan regulasi dan best practices yang berlaku. Perusahaan secara konsisten menindaklanjuti rekomendasi atas hasil penilaian GCG. Tindak lanjut tersebut sebagai komitmen perusahaan untuk memperkuat sistem tata kelola, meningkatkan tingkat maturitas GCG, serta memastikan penerapan prinsip GCG berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

making within the company. In addition, the board of commissioners' committees develop committee charters as guidelines for the implementation of the duties, functions, and responsibilities of each committee.

4. Execution
   This phase involves the application of GCG principles in daily company operations. All policies, guidelines, and directives developed are implemented by all employees in conducting business processes, adhering to the principles of transparency, accountability, integrity, and compliance with applicable regulations and business ethics.

5. Monitor & Learn
   The stages of management and monitoring of the Company's business activities are carried out by taking into account the principles of good corporate governance. In order to evaluate the quality of corporate governance implementation, the Company conducts annual GCG assessments, referring to standards set by the Shareholders. These assessments are carried out through GCG assessments, conducted by independent assessors in even-numbered years and through self-assessments in odd-numbered years. The Company also evaluates the maturity level of governance implementation by measuring the GCG maturity level in accordance with the methodology and provisions set by the Shareholders.

6. Test & Adapt
   As a follow-up to the GCG implementation measurement and evaluation process, the Company carries out continuous improvement to enhance the effectiveness and quality of corporate governance implementation. This effort is carried out through updating governance policies and guidelines to align with regulatory developments and applicable best practices. The Company consistently follows up on recommendations based on the GCG assessment results. This follow-up demonstrates the company's commitment to strengthening its governance system, increasing GCG maturity, and ensuring the effective and sustainable implementation of GCG principles.

Strategi dan Inisiatif Unggulan dalam Penguatan Praktik Tata Kelola Perusahaan

Key Strategies and Initiatives in Strengthening Corporate Governance Practices

Strategi dan inisiatif unggulan PLN NP dalam memperkuat praktik tata kelola perusahaan difokuskan pada tiga area utama. Pertama, manajemen risiko, regulasi, dan pemangku kepentingan, yang bertujuan mengelola risiko secara efektif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Kedua, penyederhanaan proses *governance* dan tata kelola pasca *holding/subholding*, termasuk pada anak perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pengambilan keputusan di seluruh entitas Perusahaan. Ketiga, implementasi framework ESG dalam proses bisnis, yang diarahkan untuk mencapai target *Maturity Level* Implementasi GCG dan *Maturity Level Sustainability*, sehingga praktik tata kelola tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola secara komprehensif.

PLN NP's leading strategies and initiatives in strengthening corporate governance practices are focused on three main areas. First, risk, regulatory, and stakeholder management, which aims to manage risks effectively, ensure regulatory compliance, and build harmonious relationships with all stakeholders. Second, simplification of governance and post-holding/subholding governance processes, including at subsidiaries, to improve efficiency, transparency, and effectiveness of decision-making across all Company entities. Third, implementation of the ESG framework in business processes, which is directed at achieving the GCG Implementation Maturity Level and Sustainability Maturity Level targets, so that governance practices not only comply with regulations but also support comprehensive environmental, social, and governance sustainability.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Perusahaan sebagai wujud dari implementasi strategi tersebut sepanjang tahun 2025 dalam Penguatan Tata Kelola Perusahaan, antara lain:

1. **Pemutakhiran *Soft Structure* GCG**

   Praktik tata kelola perusahaan diwujudkan melalui penerapan struktur yang kuat, baik dalam bentuk struktur organ perusahaan maupun kebijakan tata kelola (*soft structure*), yang mendukung efektivitas operasional dan kualitas pengambilan keputusan. Dalam konteks *soft structure*, penyusunan pedoman kebijakan tata kelola disesuaikan dengan proses bisnis, kondisi dan kebutuhan Perusahaan, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik yang berlaku, sekaligus mampu menghadapi berbagai tantangan dan dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang. *Soft structure* mencakup kebijakan, peraturan, pedoman, atau panduan yang menjadi acuan bagi seluruh insan Perusahaan. PLN NP memastikan seluruh kebijakan, peraturan, dan pedoman tata kelola tetap relevan dengan perkembangan penerapan GCG. Pada tahun 2025, PLN NP telah memutakhirkan berbagai kebijakan, peraturan, dan pedoman pendukung tata kelola perusahaan, antara lain:

Several efforts that the Company has undertaken as part of the implementation of that strategy throughout 2025 in Strengthening Corporate Governance, among others:

1. **Updating the Soft Structure of GCG**

   Corporate governance practices are realized through the implementation of a strong structure, both in the form of corporate organ structures and governance policies (soft structures), which support operational effectiveness and quality decision-making. In the context of soft structures, the development of governance policy guidelines is tailored to the business processes, conditions and needs of the Company, and refers to applicable laws and regulations and best practices, while being able to face various challenges and dynamics of the ever-evolving business environment. Soft structures include policies, regulations, guidelines, or guides that serve as a reference for all Company personnel. PLN NP ensures that all governance policies, regulations, and guidelines remain relevant to the developments in GCG implementation. In 2025, PLN NP updated various policies, regulations, and guidelines supporting corporate governance, among others:

a. Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*);
b. Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi (*Board of Director Manual*);
c. *Corporate Governance Roadmap* (CG *Roadmap*);
d. Pedoman Tata Kelola (*Corporate Governance Code*); dan
e. Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*).

2. Pembinaan GCG

Perusahaan terus meningkatkan pemahaman GCG tidak hanya pada fungsi yang bertanggung jawab, tetapi juga bagi seluruh karyawan di Kantor Pusat dan Unit, serta memberikan pembinaan tata kelola kepada Anak Perusahaan. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 terkait pembinaan GCG antara lain:

a. Pelaksanaan *Assessment* GCG Anak Perusahaan PT PLN NP tahun 2024 berdasarkan surat nomor 0844/MRK.01.03/PLNNP120000/2025;
b. *Kick off meeting* pelaksanaan *assessment* GCG PLN NP dan *awareness* penerapan GCG pada 17 Februari 2025;
c. Pembahasan pelaksanaan *self assessment* GCG Anak Perusahaan pada 16 Mei 2025;
d. Sosialisasi dan Refreshment GCG Tahun 2025 kepada seluruh karyawan Kantor Pusat, Unit dan Anak Perusahaan PT PLN NP pada 25 Juni 2025;
e. Internalisasi dan *survey* pemahaman GCG tahun 2025 kepada direksi, dewan komisaris, seluruh karyawan Kantor Pusat dan Unit PLN NP pada 1-19 September 2025;
f. Pembahasan hasil *assessment* GCG Anak Perusahaan PLN NP tahun implementasi 2024 pada 1 Oktober 2025;
g. Pembahasan *area of improvement* aspek pemegang saham *assessment* GCG Anak Perusahaan PLN NP pada 14 Oktober 2025; dan
h. Pelaksanaan *workshop* tata kelola perusahaan untuk Bidang Kantor Pusat dan Anak Perusahaan PLN NP pada 17 Desember 2025.

3. Penerapan GCG Korporat

Strategi pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi tata kelola perusahaan diimplementasikan melalui penilaian penerapan GCG, baik oleh pihak independen maupun secara internal (*self-assessment*), disertai tindak lanjut atas hasil penilaian tersebut. Penerapan GCG yang telah dilakukan PLN NP sepanjang tahun 2025 antara lain:

a. Board of Commissioner Manual;
b. Board of Director Manual;
c. Corporate Governance Roadmap;
d. Corporate Governance Code; and
e. Code of Conduct.

2. GCG Capacity Building

The Company continues to enhance the understanding of GCG not only among the responsible functions but also for all employees at the Head Office and Units, as well as providing governance training to Subsidiaries. Activities conducted in 2025 related to GCG training include:

a. Implementation of the 2024 GCG Assessment of PT PLN NP's Subsidiaries based on letter number 0844/MRK.01.03/PLNNP120000/2025;
b. Kick-off meeting for the implementation of the PLN NP GCG assessment and awareness of GCG implementation on February 17, 2025;
c. Discussion of the implementation of the Subsidiary's GCG self-assessment on May 16, 2025;
d. Socialization and Refreshment of the 2025 GCG for all employees at the Head Office, Units, and Subsidiaries of PT PLN NP on June 25, 2025;
e. Internalization and survey of GCG understanding for the 2025 GCG for the board of directors, board of commissioners, and all employees at the Head Office and Units of PLN NP on September 1-19, 2025;
f. Discussion of the results of the 2024 GCG assessment of PLN NP's Subsidiaries on October 1, 2025;
g. Discussion of areas of improvement regarding the shareholder assessment of PLN NP's subsidiaries' GCG on October 14, 2025; and
h. Implementation of a corporate governance workshop for PLN NP's Head Office and Subsidiaries on December 17, 2025.

3. Corporate GCG Implementation

The strategy for managing, monitoring, and evaluating corporate governance is implemented through the assessment of GCG implementation, both by independent parties and through internal self-assessment, accompanied by follow-up actions based on the assessment results. The implementation of GCG performed by PLN NP throughout 2025 includes:

a. Pelaksanaan *Assessment* GCG dengan menggunakan metode ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) tahun 2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (POJK-21/2015).
b. Penyusunan Program Tindak Lanjut Area of Improvement Hasil *Assessment* GCG pada Aspek 1, 4, 5 dan 6
c. *Monitoring* penyelesaian *Area of Improvement* hasil *assessment* GCG.
d. Pelaksanaan pengukuran *Maturity Level* GCG Korporat tahun 2025 dengan capaian skor 3,10 dari target 2,60

4. Program Tata Kelola Terintegrasi

PLN NP telah melaksanakan berbagai program kegiatan pada tahun 2025 untuk mendorong pencapaian sasaran strategis dalam penerapan tata kelola terintegrasi, antara lain:

a. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024.
b. Penandatanganan Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power.
c. Penandatangan Dokumen Pakta Integritas, Daftar Khusus dan dokumen lainnya oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
d. Penetapan Peraturan Direksi tentang Kebijakan Strategis *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) PT PLN Nusantara Power.
e. Penetapan Peraturan Direksi tentang Kebijakan Pengelolaan Kepatuhan di PT PLN Nusantara Power.
f. Pelatihan ISSB (IFRS S1 dan S2) pada tanggal 18-20 Februari 2025, untuk mendukung proses penyusunan *Sustainability Report*.
g. *Awareness* Metode *Assessment* GCG (SK 16, ACGS, PUGKI, dan POJK 21) oleh Asesor Independen, pada tanggal 17 Februari 2025.
h. Penetapan Peraturan Direksi tentang Kebijakan Strategis Sistem Pengendalian Internal PT PLN Nusantara Power dan Kebijakan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal (SPIN).
i. Penetapan Peraturan Direksi tentang Kebijakan Pelaksana Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi.

a. Implementation of a GCG Assessment using the ASEAN Corporate Governance Scorecard method, the 2021 General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI), and Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance (POJK-21/2015).
b. Preparation of a Follow-up Program for Areas of Improvement based on GCG Assessment Results in Aspects 1, 4, 5, and 6.
c. Monitoring the completion of Areas of Improvement based on GCG assessment results.
d. Implementation of the Corporate GCG Maturity Level measurement in 2025, with a score of 3.10 achieved out of a target of 2.60.

4. Integrated Governance Program

PLN NP implemented various programs in 2025 to support the achievement of strategic objectives in the implementation of integrated governance, including:

a. Approval of the 2024 Work Plan and Budget.
b. Signing of the Anti-Bribery Management System Commitment by the Board of Directors and Board of Commissioners.
c. Signing of Integrity Pact documents, special lists, and other related documents by the Board of Directors and Board of Commissioners.
d. Determination of the Board of Directors' Regulation on the Strategic Policy for Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) at PT PLN Nusantara Power.
e. Adoption of a Board of Directors Regulation on Compliance Management Policy at PT PLN Nusantara Power.
f. ISSB Training (IFRS S1 and S2) on February 18–20, 2025, to support the preparation of the Sustainability Report.
g. Awareness on GCG Assessment Methods (SK 16, ACGS, PUGKI, and POJK 21) conducted by an Independent Assessor on February 17, 2025.
h. Determination of the Board of Directors' Regulation on the Strategic Policy for the Internal Control System of PT PLN Nusantara Power and the Implementation Policy for the Internal Control System (SPIN).
i. Determination of the Board of Directors' Regulation on the Implementation Policy for the General Guidelines on Integrated Risk Management.

j. *Assessment* GCG periode implementasi tahun 2024 oleh Asesor Independen, dengan menggunakan metode SK/16 BUMN/2012, ACGS, PUG-KI dan POJK-21/2015.
k. Penerbitan Annual Report dan *Sustainability Report* Tahun Buku 2024.
l. Persetujuan dan Penetapan Laporan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2024.
m. Pengesahan BOC *Manual* – Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris pada 2 Juni 2025.
n. Sosialisasi dan *refreshment* pemahaman GCG kepada seluruh karyawan pada tanggal 25 Juni 2025.
o. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power.
p. Penandatangan Dokumen Pakta Integritas, Daftar Khusus dan dokumen lainnya oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang baru.
q. Induksi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru pada 3 Juli 2025.
r. Pengesahan CG *Roadmap* - Peta Penguatan Praktik Tata Kelola pada 4 Agustus 2025.
s. Pelaksanaan sosialisasi, *refreshment* dan survey pemahaman tata kelola kepada seluruh Direksi, Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya, dan seluruh karyawan pada tanggal 1 – 19 September 2025.
t. Penyusunan program tindak lanjut *Area of Improvement* (Hasil Rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2024) serta *monitoring* progres tindak lanjut AOI.
u. Penilaian *Maturity Level* GCG Korporat.
v. *Workshop* Metodologi Tata Kelola Perusahaan, sebagai pembinaan GCG, kepada Anak Perusahaan pada tanggal 17 Desember 2025.

j. GCG assessment for the 2024 implementation period conducted by an independent assessor, using the methods outlined in SK/16 BUMN/2012, ACGS, PUG-KI, and POJK-21/2015.
k. Issuance of the Annual Report and Sustainability Report for the 2024 fiscal year.
l. Approval and Determination of the Annual Calculation Report for the 2024 fiscal year.
m. Ratification of the BOC Manual on June 2, 2025.
n. Socialization and refreshment on corporate governance for all employees on June 25, 2025.
o. Changes to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power.
p. Signing of the Integrity Pact, Special Register, and other documents by the new Board of Directors and Board of Commissioners.
q. Induction of the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners on July 3, 2025.
r. Ratification of the CG Roadmap, Roadmap for Strengthening Corporate Governance Practices, on August 4, 2025.
s. Conducting socialization, refreshment, and a survey on corporate governance understanding for all members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and their supporting organs, and all employees on September 1-19, 2025.
t. Development of a follow-up program for Areas of Improvement (Results of the 2024 GCG Assessment Recommendations) and monitoring of AOI follow-up progress.
u. Corporate GCG Maturity Level Assessment.
v. Workshop on Corporate Governance Methodology, as GCG guidance, for Subsidiaries on December 17, 2025.

Penilaian Implementasi Governansi Perusahaan
Corporate Governance Implementation Assessment

1. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN (SK-16/BUMN/2012). Pada tahun 2025, PLN NP tidak melakukan asesmen GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.

1. Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SK-16/BUMN/2012). In 2025, PLN NP will not conduct a GCG assessment based on Decree of the

MBU/2012 karena ketentuan tersebut telah dicabut melalui Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012, sehingga tidak lagi menjadi acuan penilaian penerapan GCG pada BUMN.

Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 because the provision has been revoked through Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-12/S.MBU/08/2023 concerning the Revocation of Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012. Therefore, it is no longer used as a reference for assessing GCG implementation in State-Owned Enterprises.

2. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

2. ASEAN Corporate Governance Scorecard

Tabel Pencapaian Skor ACGS PLN NP Tahun 2025
Table of ACGS Score Achievement of PLN NP in 2025

Prinsip Penilaian ACGS ACGS Grading Principles	Skor 2025 Score 2025
Level 1	
Prinsip A - Hak-Hak dan Perlakuan Setara kepada Pemegang Saham Principle A - Shareholder Rights and Equal Treatment	15,333
Prinsip B - Keberlanjutan dan Ketahanan Principle B - Sustainability and Resilience	13,636
Prinsip C - Pengungkapan dan Transparansi Principle C - Disclosure and Transparency	22,059
Prinsip D – Tanggung Jawab Dewan Principle D - Board Responsibilities	33,651
Total Level 1	**84,679**
Level 2	
Bonus	16,667
Penalti Penalty	-5,154
Total Level 2	**11,513**
Skor Total Total Score	**96,19**

3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia

3. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance

Tabel Status Pemetaan PUG-KI PLN NP Tahun 2025
Table of PUG-KI Mapping Status of PLN NP in 2025

No	Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Status		*Area of Improvement*	
				Apply	*Explain*	Saran Suggestion	Tidak Ada Saran No Suggestion
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Role and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	7	31	24	7	4	5
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners	2	11	4	7	7	4

No	Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Status		*Area of Improvement*	
				Apply	*Explain*	Saran Suggestion	Tidak Ada Saran No Suggestion
3	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners	3	5	5	0	0	0
4	Perilaku Etis dan Bertanggung jawab Ethical and Responsible Behavior	3	4	3	1	3	0
5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance	4	6	6	0	1	0
6	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	3	9	7	2	1	3
7	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection of Shareholder Rights	3	11	5	6	8	3
8	Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan Respect for Stakeholders	3	4	3	1	1	0
Total		**28**	**81**	**57**	**24**	**25**	**15**

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

4. Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines

Tabel Hasil Pemetaan GCG POJK 21/POJK.04/2015 PLN NP Tahun 2025
Table of GCG Mapping Results POJK 21/POJK.04/2015 of PLN NP in 2025

No	Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Status		*Area of Improvement*
				Apply	*Explain*	
1	Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Relationship of Public Companies with Shareholders in Guaranteeing Shareholder Rights	2	5	4	1	3
2	Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Functions and Roles of the Board of Commissioners	2	6	6	0	1
3	Fungsi dan Peran Direksi Functions and Roles of the Board of Directors	2	6	5	1	0
4	Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholder Participation	1	6	3	3	4
5	Keterbukaan Informasi Information Disclosure	1	2	2	0	0
Total		**8**	**25**	**20**	**5**	**8**

5. *Maturity Level Good Corporate Governance* (GCG)

5. Maturity Level Good Corporate Governance (GCG)

Tabel Hasil Penilaian Maturity *Level Good Corporate Governance* (GCG) PLN NP Tahun 2025
Table of Results of the Maturity Level Assessment of PLN NP Good Corporate Governance (GCG) in 2025

No	Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation
1	Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Diklat/ Sertifikasi terkait GCG Implementation of Meeting/Training/Certification Activities related to GCG	3	4
2	Pelaksanaan Pengukuran atas Implementasi GCG (Asesmen/Self Asesmen) Implementation of GCG Implementation Measurement (Assessment/Self-Assessment)	3	4
3	Pemantauan *Area of Improvement* GCG (AoI GCG) Monitoring of GCG Area of Improvement (GCG AoI)	3	2
4	Penerapan Teknologi Informasi terkait GCG Implementation of Information Technology related to GCG	1	1
5	Penyampaian *Annual Report & Sustainability Report* Perusahaan Submission of the Company's Annual Report & Sustainability Report	2	3
6	*Sustainability Report* Perusahaan Company Sustainability Report	4	4
7	Pelaksanaan *Benchmarking* GCG Implementation of GCG Benchmarking	1	2
8	Pencapaian Penghargaan terkait GCG (misal: risiko, GRC, transparansi dll) GCG related award achievements (e.g. risk, GRC, transparency etc.)	2	4
9	Tata Kelola ESG ESG Governance	3	3
10	Kebijakan dan Implementasi ESG ESG Policy and Implementation	4	4
***Maturity Level* Rata-Rata Average Maturity Level**		**2,6**	**3,1**

Penjelasan lebih lanjut terkait evaluasi penilaian penerapan pedoman governansi Perusahaan Tahun 2025 dijelaskan di Bab Tata Kelola Perusahaan pada sub bab Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Further explanation regarding the evaluation of the assessment of the implementation of the 2025 Corporate Governance Guidelines is explained in the Corporate Governance Chapter in the Implementation of Corporate Governance Guidelines sub-chapter in this Annual Report.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam tata kelola Perusahaan yang mewakili kewenangan para pemegang saham. Melalui RUPS, pemegang saham menggunakan haknya untuk mengambil keputusan strategis serta menetapkan hal-hal penting yang tidak menjadi kewenangan Dewan Komisaris maupun Direksi. Forum ini menjadi sarana utama bagi pemegang saham dalam menentukan arah dan kebijakan utama Perusahaan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Company's governance, representing the authority of the shareholders. Through the GMS, shareholders exercise their rights to make strategic decisions and determine important matters that are not within the authority of the Board of Commissioners or the Board of Directors. This forum serves as the main means for shareholders to determine the Company's direction and key policies.

RUPS memiliki kewenangan antara lain untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi serta Dewan Komisaris, menyetujui rencana kerja Perusahaan, menetapkan penggunaan laba, mengevaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, mengesahkan laporan tahunan, menunjuk akuntan publik, serta menetapkan besaran dan jenis kompensasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan dalam RUPS dapat dilakukan melalui rapat yang dihadiri pemegang saham atau melalui keputusan sirkuler tanpa pertemuan fisik dengan tetap menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Komposisi kepemilikan saham Perusahaan menempatkan PT PLN (Persero) sebagai pemegang saham utama sekaligus pengendali dengan kepemilikan sebesar 99,99%, sementara 0,01% saham dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero). Direktur Utama PT PLN (Persero) bertindak sebagai representasi pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan. Secara teknis, hubungan dengan anak perusahaan dikelola oleh Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero) melalui Divisi Manajemen Portofolio.

Dalam menjalankan kewenangannya, keputusan Pemegang Saham didasarkan pada kepentingan terbaik bagi Perusahaan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, kesetaraan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali bertanggung jawab untuk:

1. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
2. Mengungkapkan informasi mengenai Pemegang Saham Pengendali hingga Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*) kepada pihak berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran atau atas permintaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan akuntabilitas serta kejelasan hubungan antara Perusahaan dengan entitas lain yang berada di bawah kendalinya.

The GMS has the authority, among other things, to approve amendments to the Articles of Association, appoint and dismiss the Board of Directors and the Board of Commissioners, approve the Company's work plan, determine the use of profits, evaluate the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners, ratify the annual report, appoint public accountants, and determine the amount and type of compensation for the Board of Directors and the Board of Commissioners. Decision-making in the GMS can be conducted through a meeting attended by shareholders or a circular resolution without a physical meeting, while upholding the principles of transparency and accountability.

The Company's shareholding composition places PT PLN (Persero) as the primary and controlling shareholder with 99.99% ownership, while 0.01% of the shares are owned by the PT PLN (Persero) Education and Welfare Foundation. The President Director of PT PLN (Persero) acts as a representative of the Company's primary and controlling shareholder. Technically, relations with subsidiaries are managed by the Director of Corporate Planning and Business Development of PT PLN (Persero) through the Portfolio Management Division.

In exercising its authority, the Shareholders' decisions are based on the best interests of the Company, taking into account the principles of fairness, equality, and sustainability. Therefore, the Controlling Shareholders are responsible for:

1. Taking into account the interests of minority shareholders and other stakeholders in accordance with the Articles of Association and regulations.
2. Disclosing information regarding Controlling Shareholders to Ultimate Shareholders to the authorities in case of suspected violations or upon request in accordance with applicable provisions.
3. Ensuring accountability and clarity of the relationship between the Company and other entities under its control.

Hak Pemegang Saham
Shareholder Rights

Perusahaan melindungi serta memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak pemegang saham antara lain:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, dengan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan satu suara.
2. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan teratur.
3. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya.
4. Hak semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham diperlakukan setara yang didukung aturan dan prosedur Perseroan, atau hak untuk menerima pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.
5. Hak lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company safeguards and facilitates the exercise of Shareholders' rights and ensures equitable treatment for all Shareholders, including minority Shareholders. Shareholder rights include:

1. Attend and vote at the GMS, provided that 1 (one) share entitles the shareholder to cast one vote.
2. Obtain material information regarding the Company in a timely, measurable, and regular manner.
3. Receive distributions of the Company's profits allocated to shareholders in the form of dividends and remaining assets resulting from liquidation, in proportion to the number of shares/capital owned.
4. The right of all shareholders of the same series within one share class to be treated equally, as supported by the Company's rules and procedures, or the right to receive disclosure of such rules and procedures, as well as disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control disproportionate to their share ownership.
5. Other rights as stipulated in the Articles of Association, Corporate Governance Guidelines, and applicable laws and regulations.

Ketentuan Penyelenggaraan RUPS
Provisions for GMS Implementation

Pelaksanaan RUPS mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, serta Corporate Governance Code (CG Code). RUPS Perusahaan terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan untuk membahas dan menyetujui Laporan Tahunan serta Pengesahan Perhitungan Tahunan, serta Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). RUPS terkait Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan dilaksanakan paling lambat akhir Juni atau 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sementara itu,

The GMS implementation refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company's Articles of Association, and the Corporate Governance Code (CG Code). The Company's General Meeting of Shareholders (GMS) consists of the Annual GMS and the Extraordinary GMS. The Annual GMS is organized to discuss and approve the Annual Report and the Ratification of the Annual Calculation, as well as the Approval of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP). The GMS related to that matter is held no later than the end of June or 6 (six) months

RUPS untuk persetujuan RKAP dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Perusahaan apabila dianggap perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPSLB paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

after the end of the financial year. Meanwhile, the GMS for the approval of the ABOP is held no later than 30 (thirty) days after the start of the current budget year. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) can be held at any time as needed by the Company if deemed necessary by the Board of Directors, Board of Commissioners, or Shareholders. The Board of Directors is obliged to hold the EGMS no later than 15 (fifteen) days after receiving a Request for the convening of a General Meeting of Shareholders (GMS) from the Board of Commissioners or Shareholders.

Mekanisme Pemanggilan RUPS
GMS Summons Procedure

Penyelenggaraan RUPS diawali dengan pemanggilan kepada para pemegang saham melalui surat tercatat yang memuat tanggal, waktu, tempat, serta tata cara pelaksanaan rapat. Dalam pemanggilan tersebut juga disampaikan bahwa bahan yang akan dibahas dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal pemanggilan hingga pelaksanaan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS diselenggarakan.

The organization of the General Meeting of Shareholders (GMS) begins with a summons to shareholders via registered letter covering the date, time, place, and procedures for conducting the meeting. In the summons, the materials to be discussed in the GMS are available at the Company's office from the date of the summons until the GMS. The summons for the GMS is made no later than 14 days before the GMS.

Tata Tertib Pelaksanaan RUPS
GMS Rules of Procedure

Tata tertib pelaksanaan RUPS ditetapkan untuk memastikan rapat berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tata tertib ini mengatur mekanisme pelaksanaan rapat, penyampaian pendapat, penggunaan hak suara, serta proses pengambilan keputusan. Tata tertib pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Peserta Rapat:
   a. Pemegang Saham Perusahaan (PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero);
   b. Direksi Perusahaan;
   c. Komisaris Perusahaan;
   d. Para pejabat (BOD-1) dari Perusahaan;
   e. Para Pejabat dari (PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), sebagai pendamping Pemegang Saham.
3. Rapat dipimpin oleh Kuasa Pemegang Saham Mayoritas (Pemegang Saham Seri 1)

The rules of procedure for the GMS are established to ensure that the meeting runs orderly, effectively, and in accordance with the applicable provisions. These rules govern the mechanisms for conducting the meeting, expressing opinions, exercising voting rights, and the decision-making process. The rules for the GMS implementation are as follows:

1. The meeting is held in Bahasa Indonesia.
2. Meeting participants include:
   a. Shareholders of the Company (PT PLN (Persero) and the Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero);
   b. The Board of Directors;
   c. The Board of Commissioners;
   d. BOD-1 level officials of the Company;
   e. Officials from PT PLN (Persero) and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) accompanying the Shareholders.
3. The meeting is chaired by the Proxy of the Major Shareholder (Series 1 Shareholder).

4. Kuorum Rapat
   a. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 25 Ayat (1) huruf a, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundangan-undangan dan/atau anggaran dasar menentukan lain.
   b. Selain itu, berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.;
5. Pengambilan Keputusan Rapat
   a. Hanya Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
   b. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
   c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika:
      i. Disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan;
      ii. Sesuai dengan Pasal 25 Ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, apabila dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif suara dengan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
   d. Mekanisme pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung ataupun menggunakan aplikasi pendukung (secara elektronik).
6. Pihak terundang atas permintaan Pimpinan Rapat dapat memberikan sumbangan pikiran namun masukan hanya untuk bahan pertimbangan Pemegang Saham dan masukan tersebut tidak dimuat dalam Risalah Rapat;

4. Meeting Quorum
   a. In accordance with Article 25 Paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, a General Meeting of Shareholders may be held if more than 51% (fifty-one percent) of the total number of shares with voting rights are present or represented, unless laws and/or regulations and/or the articles of association stipulate otherwise.
   b. In addition, based on Article 25 Paragraph (2) of the Company's Articles of Association, Shareholders, either individually or represented by a power of attorney, have the right to attend the General Meeting of Shareholders and exercise their voting rights in proportion to the number of shares they own.
5. Meeting Decision-Making
   a. Only Shareholders have the right to express opinions and vote at the Meeting.
   b. All decisions are made by deliberation to reach consensus;
   c. If a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, the decision is valid if:
      i. It is approved by more than 1/2 (one half) of the total votes cast as stipulated in Article 25 Paragraph (7) of the Company's Articles of Association;
      ii. In accordance with Article 25 Paragraph (8) of the Company's Articles of Association, if a proposal has more than two alternatives and the voting results do not result in one alternative receiving more than 1/2 (one half) of the total votes cast, a re-vote will be held for the two proposals that received the most votes, so that one proposal receives more than 1/2 (one half) of the total votes cast.
   d. The decision-making mechanism can be carried out directly or using a supporting application (electronically).
6. Invited parties, at the request of the Meeting Chair, may contribute ideas, but their input is only for the consideration of Shareholders and will not be included in the Minutes of the Meeting.

7. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat berdasarkan persetujuan Pemegang Saham.

7. Any matters not covered in these rules will be determined by the Chairperson with the approval of the Shareholders.

Mekanisme Pemungutan Suara
Voting Mechanism

Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 25 ayat 7 mengatur dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain, dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

Article 25 paragraph 7 of the Company's Articles of Association stipulates that in the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total number of votes cast, unless these Articles of Association stipulate otherwise, with the provision that voting regarding a person is carried out by means of a closed letter that is not signed.

Risalah RUPS
GMS Minutes

Dokumentasi RUPS dimuat dalam risalah yang mencantumkan waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan rapat. Risalah wajib ditandatangani oleh Ketua RUPS dan minimal 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, kecuali jika dibuat sebagai Akta Notaris.

Documentation of the GMS is contained in minutes that list the time, agenda, participants, opinions expressed at the GMS, and meeting decisions. The minutes must be signed by the Chairperson of the GMS and at least one Shareholder appointed by and from the GMS participants, unless otherwise drawn up as a Notarial Deed.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2025
2025 GMS Implementation

Pada tahun 2025, RUPS Tahunan diselenggarakan dua kali yang dihadiri seluruh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 308.510.498.000 saham. RUPS tentang Pengesahan RKAP 2025 dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025 dan RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025.

In 2025, the Annual GMS was held twice, attended by all shareholders and/or their proxies/representatives, collectively representing 308,510,498,000 shares. The GMS on the Approval of the 2025 ABOP was held on January 30, 2025. The GMS on the Approval of the Annual Report and the Ratification of the 2024 Financial Statements was held on June 19, 2025.

Hasil Penyelenggaran RUPS RKAP Tahun 2025
Results of the 2025 ABOP GMS

Pemanggilan RUPS:
Surat No 0679/000/PLNNP010000/2025 tanggal 15 Januari 2025

GMS Notice:
Letter No. 0679/000/PLNNP010000/2025 dated January 15, 2025

Tanggal Pelaksanaan RUPS:
30 Januari 2025

Date of GMS:
January 30, 2025

Lokasi:
PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jakarta

Venue:
Head Office of PT PLN (Persero), Jakarta

Pimpinan Rapat:
PT PLN (Persero)

Meeting Chair:
PT PLN (Persero)

Pihak Independen:
Miryany Usman, S.H., M.Kn. sebagai Notaris

Independent Party:
Miryany Usman, S.H., M.Kn. as Notary

Berita Acara:
Akta Notaris Nomor 11 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PLN Nusantara Power tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025

Minutes of Meeting:
Notarial Deed No. 11 Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PLN Nusantara Power concerning the Ratification of the 2025 Annual Budget and Operational (ABOP), on January 30, 2025.

Agenda Rapat 1: **Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PLN Nusantara Power Tahun 2025**	**Meeting Agenda 1:** **Approval and Ratification of PT PLN Nusantara Power's 2025 Company's Annual Budget and Operational Plan.**
Keputusan: RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2025 dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Laporan Laba (Rugi) dan Komprehensif Konsolidasian; 2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; 3. Laporan Arus Kas Konsolidasian; dan 4. Investasi.	**Resolution:** The GMS resolved to approve and ratify the 2025 ABOP, comprising the following key components: 1. Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income; 2. Consolidated Statement of Financial Position; 3. Consolidated Statement of Cash Flows; and 4. Investment.
Tindak Lanjut/Realisasi: 1. RKAP Tahun 2025 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung 2. Risalah RUPS Persetujuan RKAP dan Kontrak Manajemen Tahun 2025.	**Follow-up/ Realization:** 1. The 2025 ABOP was ratified during the GMS. 2. Minutes of Meeting concerning the Approval of the 2025 ABOP and Management Contract were issued.
Agenda Rapat 2: **Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen PT PLN Nusantara Power Tahun 2025**	**Meeting Agenda 2:** **Approval and Ratification of the 2025 Management Contract of PT PLN Nusantara Power**
Keputusan: 1. RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/ *Key Performance Indicator* (KPI) 2025 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan. 2. Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* (KPI) 2025 Perseroan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisah dari risalah ini.	**Resolution:** 1. The GMS approved and ratified the 2025 Management Contract/KPIs between the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Shareholders. 2. The Company's 2025 Management Contract/Key Performance Indicators (KPIs), as attached, is an integral part of this minutes.
Tindak Lanjut/Realisasi: 1. Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* (KPI) Tahun 2025 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung. 2. Risalah RUPS Persetujuan RKAP dan Kontrak Manajemen Tahun 2025.	**Follow-up/Realization:** 1. The 2025 Management Contract/KPIs were ratified during the GMS. 2. Minutes of Meeting concerning the Approval of the 2025 ABOP and Management Contract were issued.

Hasil Penyelenggaran RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024

Results of the GMS Approval of the Annual Report for the 2024 Financial Year

Pemanggilan RUPS:
Surat No 7048/MNJ.01.02/PLNNP010000/2025 tanggal 26 Mei 2025

Tanggal Pelaksanaan RUPS:
19 Juni 2025

Lokasi:
PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jakarta

Pimpinan Rapat:
PT PLN (Persero)

Pihak Independen:
Miryany Usman, S.H., M.Kn. sebagai Notaris

Berita Acara:
Akta Notaris Nomor 23 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PLN Nusantara Power Tanggal 19 Juni 2025.

GMS Notice:
Letter No. 7048/MNJ.01.02/PLNNP010000/2025 dated May 26, 2025

Date of GMS:
June 19, 2025

Venue:
PT PLN (Persero) Head Office, Jakarta

Meeting Chair:
PT PLN (Persero)

Independent Party:
Miryany Usman, S.H., M.Kn. as Notary

Minutes of Meeting:
Notarial Deed No. 23 Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PLN Nusantara Power on June 19, 2025.

Agenda Rapat 1:
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Keputusan:
1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024.
3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam laporannya No 00890/2.1457/AU.1/02/0241-5/1/V/2025 tanggal 16 Mei 2025.

Meeting Agenda 1:
Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Report, Approval of the Supervisory Board of Commissioners' Report for the 2024 Financial Year. Moreover, granting Full Release and Discharge of Responsibility (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors for the Company's Management Actions and the Board of Commissioners for the Company's Supervisory Actions carried out during the 2024 Financial Year, as long as these actions are not criminal acts and are reflected in the Company's books, including the Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year.

Resolutions:
1. The GMS approved and accepted the Annual Report on the Company's condition and performance for the 2024 Fiscal Year, comprising the Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report.
2. The GMS approved and accepted the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2024 Fiscal Year.
3. The GMS ratified the Company's Financial Statements for th 2024 Fiscal Year, including the Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Statement of Cash Flows, and Consolidated Statement of Changes in Equity, along with the accompanying notes, audited by Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners with an "Fair in all material respects" as stated in report No. 00890/2.1457/AU.1/02/0241-5/1/V/2025 on May 16, 2025.

4. RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, tercermin dalam pembukuan Perseroan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan.
5. Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.

Tindak Lanjut/Realisasi:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 serta Pemberian Pembebasan Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, telah disahkan pada saat RUPS berlangsung.
2. Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024.

4. The GMS grants full discharge (Volledig Acquit Et De Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision responsibilities, respectively, performed during the 2024 Fiscal Year, provided that such actions do not conflict with the applicable laws and regulations and are reflected in the Financial Statements audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners.
5. The approval and discharge of such responsibilities do not release the Board of Directors and/or the Board of Commissioners from legal liability in the event that the disclosed reports are proven to violate applicable laws and procedures and/or if it is subsequently found that there were any deviant actions and/or actions detrimental to the Company.

Follow-up/ Realization:
1. The approval and ratification of the 2024 Fiscal Year's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2024 Fiscal Year and the Grant of Volledige Acquit Et De Charge to the Board of Directors and Board of Commissioners for the Management and Supervisory conducted in the 2024 Fiscal Year, had been ratified during the GMS.
2. Minutes of the GMS concerning the Approval of the 2024 Fiscal Year's Annual Report.

Agenda Rapat 2: **Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024**	**Meeting Agenda 2:** **Determination of the Use of Net Profit for the 2024 Fiscal Year**
Keputusan: RUPS Memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024.	**Resolution:** The GMS granted authority to the Major Shareholder to determine the allocation of Net Profit for the 2024 Fiscal Year.
Tindak Lanjut/Realisasi: PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 melalui Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Wakil Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan kepada Direktur Utama Perusahaan, nomor 68943/MNJ.01.02/F01000000/2025 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2024 PT PLN Nusantara Power tanggal 15 Desember 2025.	**Follow-up/Realization:** PT PLN (Persero), as the Major Shareholder, determined the allocation of the 2024 net profit through a letter from the President Director of PT PLN (Persero) acting on behalf of the Major Shareholder, addressed to the Company's President Director, No.68943/MNJ.01.02/F01000000/2025 regarding the Determination of the Use of Net Profit in 2024 of PT PLN Nusantara Power, dated December 15, 2025.

Agenda Rapat 3: **Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024**	**Meeting Agenda 3:** **Determination of Salaries/Honorarium, Facilities, and Allowances for the 2025 Fiscal Year, as well as Tantiem/ Performance Incentives/Special Performance Incentives for the 2024 Fiscal Year for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, and Employee Bonuses for the 2024 Fiscal Year**
Keputusan: RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/ Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024.	**Resolution:** The GMS grants authority to the major shareholders to determine the Salary/Honorarium, with Facilities and Allowances for the 2025 Financial Year, as well as Tantiem/Performance Incentives/ Special Performance Incentives for the 2024 Financial Year for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, and Employee Bonuses for the 2024 Financial Year.

Tindak Lanjut/Realisasi: PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan bahwa RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024 yang tertuang dalam Risalah RUPS LPT Tahun 2024. Namun hingga saat ini masih belum diterbitkan ketetapan lebih lanjut terkait besarannya.	**Follow-up/Realization:** PT PLN (Persero), as the Major Shareholder, determined that the GMS grants authority to the major shareholders to set the Salary/Honorarium, with Facilities and Allowances for the 2025 Financial Year, as well as Tantiem/Performance Incentives/ Special Performance Incentives for the 2024 Financial Year for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, and Employee Bonuses for the 2024 Financial Year as stated in the Minutes of the 2024 GMS. However, until now, no further determination regarding the amount has been issued.
Agenda Rapat 4: **Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025**	**Meeting Agenda 4:** **Appointment of the Public Accounting Firm to Audit the 2025 Fiscal Year's Financial Statements**
Keputusan: RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2025 adalah sama dengan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit PT PLN (Persero).	**Resolution:** The GMS appointed the Public Accounting Firm as the auditor to audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report for the 2025 Financial Year, which is the same as the one that audits PT PLN (Persero).
Tindak Lanjut/Realisasi: Surat EVP Akuntansi PT PLN (Persero) nomor 42756/DAN.01.02/F01070400/2025 kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan World Trade Centre (WTC) 3 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa *Repeat Order* Pekerjaan Jasa Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN (Persero) dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025.	**Follow-up/Realization:** Letter from the EVP of Accounting of PT PLN (Persero) number 42756/DAN.01.02/F01070400/2025 to the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Partners World Trade Center (WTC) 3 regarding the Appointment of Goods/Services Provider for Repeat Order of Public Accountant Services for the Consolidated Financial Statements of PT PLN (Persero) and Subsidiaries for the Year Ended December 31, 2025.

Dalam RUPS Tahunan, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan hadir untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara kolegial maupun individu dan memberikan masukan serta tanggapannya atas pengembangan Perusahaan. Kehadiran mereka dalam RUPS Pengesahan RKAP 2025 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut:

During the Annual GMS, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are present to deliver their accountability for the execution of their duties both collegially and individually, and to provide input and responses regarding the Company's development. Their presence at the GMS for the Approval of the 2025 ABOP and the GMS for the Approval of the 2024 Financial Year's Annual Report is as follows:

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS
Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the GMS

Nama Name	Jabatan Position	RUPS RKAP ABOP GMS	RUPS LPT Annual GMS
Evy Haryadi	Komisaris Utama President Commissioner	✓	–*
Hendra Iswahyudi	Komisaris Utama President Commissioner	✓	✓
Emir Kresna Wardana	Komisaris Commissioner	✓	✓
Ida Nuryatin Finahari	Komisaris Commissioner	✓	✓
Bagus Puruhito	Komisaris Commissioner	✓	✓
Kenedy	Komisaris Commissioner	✓	✓

Nama Name	Jabatan Position	RUPS RKAP ABOP GMS	RUPS LPT Annual GMS
Widjono Hardjanto	Komisaris Commissioner	✓	–*
Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director	✓	✓
Rachmanoe Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations	✓	✓
Komang Parmita	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	✓	✓
Dwi Hartono	Direktur Keuangan Finance Director	✓	✓

*) Keterangan:
1. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 23 April 2025, memberhentikan dengan hormat Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris
2. Berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Widjono Hardjanto tanggal 1 Mei 2025

*) Note:
1. Based on the Shareholders' Resolution outside the GMS (Circular) dated April 23, 2025, Mr. Evy Haryadi was honorably dismissed as Commissioner.
2. Based on Mr. Widjono Hardjanto's resignation letter dated May 1, 2025

Sepanjang tahun 2025, RUPS Luar Biasa direalisasikan melalui keputusan sirkuler untuk hal-hal yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham sesuai Anggaran Dasar. Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler meliputi hal-hal berikut:

Throughout 2025, the Extraordinary GMS was actualized through circular resolutions for matters requiring Shareholders' approval in accordance with the Articles of Association. The circular Shareholders' resolutions included the following matters:

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Tahun 2025
Circular Shareholders' Resolutions in 2025

No.	Perihal Description	Tanggal Date
1	Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dismissal of Members of the Company's Board of Commissioners	23 April 2025 April 23, 2025
2	Perubahan Pengurusan Perseroan. Changes in the Company's Management	26 Juni 2025 June 26, 2025
3	Persetujuan Alokasi Pengembangan Pembangkit, Pelaksanaan Pengadaan *Engineering, Procurement and Construction* (EPC), dan Pengalihan Alokasi Modal dan Migrasi Anggaran Program Investasi dari PT PLN (Persero) kepada PT PLN Nusantara Power. Approval of Power Plant Development Allocations, Implementation of Engineering, Procurement, and Construction (EPC), and the Transfer of Capital Allocations and Budget Reallocations for Investment Programs from PT PLN (Persero) to PT PLN Nusantara Power.	19 September 2025 September 19, 2025

Seluruh rekomendasi dari Keputusan Pemegang Saham sepanjang tahun buku 2025 telah direalisasikan seluruhnya, baik yang diberikan melalui keputusan RUPS RKAP, RUPS Persetujuan Laporan Tahunan maupun Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler. Tindak lanjut dan status realisasi dari keputusan serta arahan RUPS senantiasa dimonitoring secara berkelanjutan yang kemudian dilaporkan progres tindak lanjutnya kepada Pemegang Saham dalam bentuk penyajian Laporan Triwulanan.

All recommendations from the Shareholders' Resolutions throughout the 2025 fiscal year had been fully realized, whether given through the GMS ABOP resolution, the GMS Annual Report Approval, or the circular Shareholders' Resolutions. The follow-up and status of the resolutions and GMS directives are continuously monitored and then reported to the Shareholders in the form of a Quarterly Report.

Keputusan, Realisasi dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Resolutions, Realization, and Follow-up of the Previous Year's GMS Resolutions

Keputusan RUPS sebelum tahun buku telah dilaksanakan seluruhnya pada tahun buku tersebut. Kepurusan RUPS tersebut meliputi RUPS Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 dan RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 pada tanggal 30 Mei 2024 dengan realisasi sebagai berikut:

The GMS resolutions before the fiscal year had been fully implemented in that fiscal year. These GMS resolutions include the Annual GMS on the Ratification of the ABOP for 2024 held on January 31, 2024, and the Annual GMS on the Approval of the Annual Report and the Ratification of the Financial Statements for the 2023 Fiscal Year on May 30, 2024, with the following realizations:

Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Realization of the Previous Year's GMS Resolutions

Keputusan RUPS GMS Resolution		Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	
RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2024 dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Laporan Laba (Rugi) dan Komprehensif Konsolidasian 2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 3. Laporan Arus Kas Konsolidasian 4. Investasi	The GMS resolved to approve and ratify the 2024 ABOP, comprising the following key components: 1. Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income; 2. Consolidated Statement of Financial Position; 3. Consolidated Statement of Cash Flows; and 4. Investment.	1. RKAP Tahun 2024 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung 2. Risalah RUPS Persetujuan RKAP dan Kontrak Manajemen Tahun 2024	1. The 2024 ABOP was ratified during the GMS. 2. Minutes of Meeting concerning the Approval of the 2024 ABOP and Management Contract were issued.
RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* (KPI) 2024 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.	The GMS approved and ratified the 2024 Management Contract/KPIs between the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Shareholders.	1. Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* (KPI) Tahun 2024 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung. 2. Risalah RUPS Persetujuan RKAP dan Kontrak Manajemen Tahun 2024	1. The 2024 Management Contract/KPIs were ratified during the GMS. 2. Minutes of GMS concerning the Approval of the 2024 ABOP and Management Contract.
1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenal Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. 2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023. 3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dimaksud dalam laporannya No. 00578/2.1025/AU.1/02/0241-4/1/IV/2024 tanggal 5 bulan April 2024.	1. The GMS approved and accepted the Annual Report on the Company's condition and performance for Fiscal Year 2023, comprising the Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report. 2. The GMS approved and accepted the Board of Commissioners' Supervisory Report for Fiscal Year 2023. 3. The GMS ratified the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2023, including the Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Statement of Cash Flows, and Consolidated Statement of Changes in Equity, along with the accompanying notes, audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with an "Fair in all material respects" as stated in report No. 00578/2.1025/AU.1/02/0241-4/1/IV/2024 on April 5, 2024.	1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 serta Pemberian Pembebasan Sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, telah disahkan pada saat RUPS berlangsung. 2. Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023.	1. The approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2023 Financial Year, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2023 Financial Year, as well as the granting of a full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory duties performed during the 2023 Financial Year, were approved and ratified at the GMS. 2. Minutes of Meeting concerning the Approval of the 2023 Annual Report were issued.

Keputusan RUPS GMS Resolution		Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	
4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. 5. Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.	4. The General Meeting of Shareholders (GMS) grants full discharge (Volledig Acquit Et De Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision responsibilities, respectively, performed during the Fiscal Year 2023, provided that such actions do not conflict with the applicable laws and regulations and are reflected in the Financial Statements audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners. 5. The approval and discharge of such responsibilities do not release the Board of Directors and/or the Board of Commissioners from legal liability in the event that the disclosed reports are proven to violate applicable laws and procedures and/or if it is subsequently found that there were any deviant actions and/or actions detrimental to the Company.		
RUPS memberikan Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023.	The GMS granted authority to the Major Shareholder to determine the allocation of net profit for Fiscal Year 2023.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 melalui Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Wakil Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan kepada Direktur Utama Perusahaan, nomor 54735/MNJ.01.02/F01000000/2024-SR tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2023, Tantiem 2023 dan Penetapan Penghasilan 2024 Direksi/Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power tanggal 24 September 2024.	PT PLN (Persero), as the Major Shareholder, determined the allocation of the 2023 net profit through a letter from the President Director of PT PLN (Persero) acting on behalf of the Major Shareholder, addressed to the President Director of the Company, No. 54735/MNJ.01.02/F01000000/2024-SR regarding the Determination of the Use of Net Profit for 2023, 2023 Tantiem, and the 2024 Remuneration for the Board of Directors/Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power, on September 24, 2024.
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2023.	The GMS granted authority to the Major Shareholder to determine the 2023 Tantiem and 2024 Income for the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the 2023 Employee Bonus.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2023 melalui Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Wakil Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan kepada Utama Perusahaan, nomor 54735/MNJ.01.02/Direktur F01000000/2024-SR tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2023, Tantiem, 2023 dan Penetapan Penghasilan 2024 Direksi/Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power tanggal 24 September 2024.	PT PLN (Persero), as the Major Shareholder, determined the 2023 Tantiem and 2024 Income for the Board of Directors and Board of Commissioners, and the 2023 Employee Bonus through a letter from the President Director of PT PLN (Persero) acting on behalf of the Major Shareholder, addressed to the Company's President Director, No. 54735/MNJ.01.02/Direktur F01000000/2024-SR regarding the Determination of the Use of Net Profit for 2023, Tantiem, and the 2024 Remuneration for the Board of Directors/Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power, on September 24, 2024.

Keputusan RUPS GMS Resolution		Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2024.	The GMS granted authority to the Major Shareholder to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report for Fiscal Year 2024.	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 melalui Surat EVP Akuntansi PT PLN (Persero) nomor 56511/KEU.02.04/ F01070400/2024 kepada KAP PwC tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Audit Laporan Keuangan Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024.	PT PLN (Persero), as the Major Shareholder, appointed the Public Accounting Firm to audit the Company's 2024 Financial Statements through Letter No. 56511/KEU.02.04/ F01070400/2024 from the EVP of Accounting of PT PLN (Persero) to PwC regarding the Work Commencement Order (SPMK) for the 2024 Financial Statement Audit, dated October 1, 2024.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan. Dewan Komisaris bekerja secara kolegial sebagai suatu majelis, sehingga setiap anggota, termasuk Komisaris Utama, memiliki kedudukan yang setara. Pengambilan keputusan tidak dilakukan secara individu, melainkan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat yang berlandaskan Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris memberikan arahan strategis dan rekomendasi kepada Direksi guna memastikan Perusahaan dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Seluruh pelaksanaan tugas tersebut senantiasa mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, serta tanggung jawab, dengan orientasi pada kepentingan terbaik Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners is a corporate organ tasked with overseeing and advising the Board of Directors in the management of the Company. The Board of Commissioners works collegially as a council, so that each member, including the President Commissioner, holds an equal position. Decision-making is not conducted individually, but rather through a mechanism of deliberation and consensus based on the Articles of Association and applicable laws and regulations. The Board of Commissioners provides strategic direction and recommendations to the Board of Directors to ensure the Company is managed effectively, efficiently, and sustainably. The entire execution of these duties always prioritizes the principles of integrity, accountability, transparency, and responsibility, with a focus on the best interests of the Company and all stakeholders.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris
Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

Penetapan serta pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mengacu pada Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ

The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners are performed through the GMS in accordance with the Company's Articles of Association and the provisions of the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and

dan Sumber Daya Manusia BUMN. Proses tersebut juga wajib melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Pelaksanaannya mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* yang mencakup profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Penetapan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS dilakukan berdasarkan mekanisme pencalonan sesuai pedoman yang berlaku. Seluruh calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, meliputi persyaratan materiil, persyaratan formal, serta ketentuan lainnya.

Human Resources. The process must also undergo a fit and proper test. Its implementation prioritizes the principles of Good Corporate Governance, which include professionalism, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. The appointment of members of the Board of Commissioners by the GMS is conducted by the nomination mechanism in accordance with the applicable guidelines. All candidates for the Board of Commissioners must meet the established requirements, including material and formal requirements, and other provisions.

Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan seperti:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau keuangan Negara.
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau keuangan Negara.
6. Mengundurkan diri.
7. Alasan lain yang dinilai tepat menurut RUPS demi kepentingan dan tujuan Peseroan.

The Board of Commissioners can be dismissed at any time on the following grounds:

1. Unable to perform their duties properly.
2. Failure to comply with statutory provisions and/or the Articles of Association.
3. Involvement in actions detrimental to the Company and/or state finances;
4. Engaging in conduct that violates ethics and/or propriety expected of a member of the Board of Commissioners;
5. Has been named a suspect or defendant by the authorities in an action that is detrimental to the Company and/or state finances.
6. Resignation;
7. Other reasons deemed appropriate by the GMS in the interest of and for the purposes of the Company.

Susunan Dewan Komisaris
Composition of the Board of Commissioners

Penetapan susunan Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan Perusahaan. Melalui keputusan RUPS tersebut, susunan anggota Dewan Komisaris PLN NP mengalami dua kali perubahan sepanjang tahun 2025. Perubahan komposisi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan serta penyesuaian kebutuhan tata kelola perusahaan. Dengan adanya perubahan tersebut, maka per Desember 2025, jumlah anggota Dewan Komisaris PLN NP tercatat sebanyak 6 (enam) orang. Adapun susunan Dewan Komisaris PLN NP yang menjabat selama periode Januari hingga Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The determination of the Board of Commissioners composition is performed by the Shareholders through the GMS mechanism as the highest forum in the Company's decision-making. Following the GMS decision, the composition of the PLN NP Board of Commissioners underwent two changes throughout 2025. These composition changes are part of the organizational dynamics to support the effectiveness of supervision and the adjustment of corporate governance needs. Therefore, as of December 2025, the number of members of PLN NP's Board of Commissioners is recorded as 6 (six) people. The composition of those serving from January to December 2025 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris Tahun 2025
Composition of the Board of Commissioners in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Hendra Iswahyudi[3]	PLT Komisaris Utama Acting President Commissioner	• Pertama kali diangkat sebagai PLT Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tanggal 19 Desember 2017. • Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tentang Pengangkatan Definitif sebagai Komisaris pada 12 November 2020. • Sesuai dengan bunyi keputusan dalam Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tentang Pengangkatan Bapak Hendra Iswahyudi sebagai Komisaris Utama tanggal 4 Juli 2024, bahwa periode menjabat yang bersangkutan terhitung sejak 12 November 2020. • Dikarenakan proses penetapan pejabat Komisaris Utama definitif belum selesai dilakukan, maka pada tanggal 13 November 2024 terbit Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tentang penetapan Bapak Hendra Iswahyudi sebagai PLT Komisaris Utama PT PLN Nusantara Power. • First appointed as Acting Commissioner through the Circular Shareholders' Resolution dated December 19, 2017. • The Circular Shareholders' Resolution on Definitive Appointment as Commissioner on November 12, 2020. • In accordance with the Circular Shareholders' Resolution regarding the appointment of Mr. Hendra Iswahyudi as the President Commissioner dated July 4, 2024, his term of office is effective from November 12, 2020. • Due to the ongoing process of appointing a definitive President Commissioner, a Circular Shareholders' Resolution was issued on November 13, 2024, regarding the appointment of Mr. Hendra Iswahyudi as the Acting President Commissioner of PT PLN Nusantara Power.	2017 - 2025
Evy Haryadi[1]	Komisaris Commissioner	• Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Utama melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tentang Pengangkatan Definitif sebagai Komisaris Utama pada 21 September 2022. • Selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2024, terbit Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan Perubahan Nomenklatur Komisaris, sehingga terjadi perubahan nomenklatur Bapak Evy Haryadi menjadi Komisaris. • Pada tanggal 23 April 2025, terbit Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang memberhentikan Bapak Evy Haryadi dari jabatannya sebagai Komisaris PLN NP. • First appointed as President Commissioner via the Circular Shareholders' Resolution regarding Definitive Appointment as President Commissioner on September 21, 2022. • Subsequently, on July 4, 2024, a Circular Shareholders' Resolution was issued regarding the Appointment of President Commissioner and the Change in Commissioners Nomenclature, resulting in the change of Mr. Evy Haryadi's title to Commissioner. • On April 23, 2025, a Circular Shareholders' Resolution was issued, dismissing Mr. Evy Haryadi from his position as PLN NP's Commissioner.	2022 - 2025
Emir Kresna Wardana[3]	Komisaris Commissioner	• Pertama kali diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) Pengangkatan Definitif sebagai Komisaris pada 30 Desember 2021. • Selanjutnya diangkat kembali sebagai Komisaris pada 21 September 2022 melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). • First appointed as Commissioner through the Circular Shareholders' Resolution for Definitive Appointment as Commissioner on December 30, 2021. • Subsequently reappointed as Commissioner on September 21, 2022, through a Circular Shareholders' Resolution.	2021-2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Ida Nuryatin Finahari[3]	Komisaris Commissioner	• Pertama kali diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tentang Pengangkatan Definitif sebagai Komisaris pada 16 Juni 2023. • First appointed as Commissioner through the Circular Shareholders' Resolution regarding Definitive Appointment as Commissioner on June 16, 2023.	2023-2027
Bagus Puruhito[3]	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Pertama kali diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tentang Pengangkatan Definitif sebagai Komisaris pada 30 Desember 2021. • Kemudian diangkat kembali sebagai Komisaris pada 21 September 2022 melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). • Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Independen sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tanggal 4 Juli 2024 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan Komisaris Independen. • First appointed as Commissioner through the Circular Shareholders' Resolution regarding Definitive Appointment as Commissioner on December 30, 2021. • Subsequently reappointed as Commissioner on September 21, 2022, through a Circular Shareholders' Resolution. • Subsequently appointed as Independent Commissioner pursuant to the Circular Shareholders' Resolution dated July 4, 2024, regarding the Appointment of President Commissioner and Independent Commissioner.	2021-2025
Kenedy[3]	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Pertama kali diangkat melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tentang Pengangkatan Definitif sebagai Komisaris pada 14 Desember 2022. • Kemudian diangkat sebagai Komisaris Independen sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tanggal 4 Juli 2024 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan Komisaris Independen. • First appointed as Commissioner through the Circular Shareholders' Resolution regarding Definitive Appointment as Commissioner on December 14, 2022. • Subsequently appointed as Independent Commissioner pursuant to the Circular Shareholders' Resolution dated July 4, 2024, regarding the Appointment of President Commissioner and Independent Commissioner	2022 - 2025
Widjono Hardjanto[2]	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Pertama kali diangkat melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) sebagai Komisaris pada 4 Juli 2024 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan Komisaris Independen. • First appointed through the Circular Shareholders' Resolution as Commissioner on July 4, 2024, regarding the Appointment of President Commissioner and Independent Commissioner.	2024-2025
Edi Srimulyanti[3]	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	• Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama sekaligus merangkap sebagai Komisaris Independen melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris). • First appointed as President Commissioner while concurrently serving as Independent Commissioner through the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025, regarding Changes in the Company's Management (Changes in the Board of Directors and Board of Commissioners Composition).	2025-2029

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Ade Armando[3]	Komisaris	• Diangkat pertama kali sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris). • First appointed as Commissioner through the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025, regarding Changes in the Company's Management (Changes in the Board of Directors and Board of Commissioners Composition).	2025-2029
Suharyono[3]	Komisaris Commissioner	• Diangkat pertama kali sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris). • First appointed as Commissioner through the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025, regarding Changes in the Company's Management (Changes in the Board of Directors and Board of Commissioners Composition).	2025-2029
M. Pradana Indraputra[3]	Komisaris Commissioner	• Diangkat pertama kali sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris) • First appointed as Commissioner through the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025, regarding Changes in the Company's Management (Changes in the Board of Directors and Board of Commissioners Composition).	2025-2029
Adam Muhammad[3]	Komisaris Commissioner	• Diangkat pertama kali sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris). • First appointed as Commissioner through the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025, regarding Changes in the Company's Management (Changes in the Board of Directors and Board of Commissioners Composition).	2025-2029
Muhammad Syafi'i[3]	Komisaris Commissioner	• Diangkat pertama kali sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris). • First appointed as Commissioner through the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025, regarding Changes in the Company's Management (Changes in the Board of Directors and Board of Commissioners Composition).	2025-2029

Keterangan:
1. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 23 April 2025, memberhentikan dengan hormat Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris.
2. Berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Widjono Hardjanto tanggal 1 Mei 2025.
3. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025, dilakukan pemberhentian dan penetapan anggota Dewan Komisaris.

Remarks:
1. Honorably dismissed Mr. Evy Haryadi as Commissioner based on the Circular Shareholders' Resolution dated April 23, 2025.
2. Based on the resignation letter from Mr. Widjono Hardjanto dated May 1, 2025
3. Dismissal and appointment of the Board of Commissioners members based on the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Penetapan Komisaris Independen mengacu pada Permen BUMN No. 2 Tahun 2023 Pasal 15 Ayat (3) dan Ayat (4), yang mensyaratkan tidak adanya hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, maupun hubungan keluarga atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi independensi. Peran Komisaris Independen adalah memastikan kebijakan dan keputusan manajemen sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance serta kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan. PLN NP menetapkan jumlah Komisaris Independen secara proporsional untuk mendukung pengawasan yang objektif serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Per 31 Desember 2025, Dewan Komisaris berjumlah 6 orang, dengan 1 orang (17%) sebagai Komisaris Independen, yaitu Sdri Edi Srimulyanti.

The appointment of Independent Commissioners refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. 2 of 2023 Article 15 Paragraph (3) and Paragraph (4), which requires the absence of financial, management, ownership, or family relationships or other interests that may affect independence. The role of Independent Commissioners is to ensure that management policies and decisions are in line with the principles of Good Corporate Governance and the interests of the company and stakeholders. PLN NP determines the number of Independent Commissioners proportionally to support objective supervision and strengthen transparency and accountability. As of December 31, 2025, the Board of Commissioners consists of 6 people, with 1 person (17%) as an Independent Commissioner, namely Ms. Edi Srimulyanti.

Ketentuan Masa Jabatan
Term of Office

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan selama 4 (empat) tahun, tanpa mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Setelah berakhirnya masa jabatan tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

The term of office for members of the Board of Commissioners is set for 4 (four) years, without reducing the authority of the GMS to dismiss them at any time. After the end of the term, they may be reappointed for 1 (one) additional term.

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan
Statement of Independence and Potential Conflict of Interest

Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PLN NP tercermin dari upaya memastikan seluruh anggota Dewan Komisaris menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat secara objektif. Dalam hal ini, setiap anggota dituntut untuk menghindari benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan terbaik perusahaan serta para pemangku kepentingan.

The commitment to Good Corporate Governance at PLN NP is reflected in efforts to ensure that all members of the Board of Commissioners maintain integrity and independence in performing objective supervisory and advisory functions. In this regard, each member is required to avoid conflicts of interest and always prioritize the best interests of the Company and its stakeholders.

Guna mempertegas komitmen tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan independensi serta komitmen bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, keterbukaan informasi juga diwujudkan melalui kewajiban pelaporan kepemilikan saham pribadi maupun keluarga, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan setiap tahun sebagai bentuk penegasan independensi, yang menyatakan bahwa:

1. Akan melaksanakan tugas dan wewenang maupun pengembangan karir serta mengambil keputusan dalam keadaan mandiri, tidak berada di bawah tekanan dan/atau bebas dari pengaruh maupun intervensi dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas pada intervensi dari partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*independency*).
2. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya oleh karenanya tidak akan menyalahgunakan kewenangan jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan pihak manapun termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan pribadi, partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*duty care and loyalty*).
3. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan memanfaatkan posisi dan menyalahgunakan jabatan pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait, atau pihak yang terafiliasi, partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*conflict of interest*) yang menimbulkan risiko fraud.
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik yang secara langsung maupun tidak langsung dan sanggup menjalankan perusahaan dengan berintegritas dan berpegang teguh pada prinsip tidak akan meminta, tidak akan menawarkan/tidak menjanjikan untuk memberi/menerima hadiah, upeti, suap, sogok, gratifikasi apapun dan/atau bentuk imbalan lainnya dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan menjadi hak secara sah dan secara hukum dari pihak manapun.

To reinforce this commitment, each member of the Board of Commissioners is required to sign an Integrity Pact that contains a statement of independence and a commitment to being free from conflicts of interest. In addition, transparency is actualized through the obligation to report personal or family share ownership, both in PLN NP and in other companies that may cause a conflict of interest. The signing of the Integrity Pact is conducted annually as a form of reaffirming independence, which states that:

1. They will perform their duties and exercise their authority or career development and make decisions independently, not under pressure, and/or free from influence or intervention from any party, including but not limited to political parties, groups, or certain factions (independence).
2. They will perform their duties and exercise their authority and make decisions prioritizing the interests of the Company above all else and therefore will not misuse their authority for the benefit of any party, including but not limited to personal interests, political parties, groups, or certain factions (duty of care and loyalty).
3. They will carry out their duties and authorities and, in making decisions, will not take advantage of their position and abuse their position in this Company, either directly or indirectly, for personal interests or the purpose of doing something for their own benefit, as well as benefiting related parties, or affiliated parties, political parties, groups, or particular groups (conflict of interest) that pose a risk of fraud.
4. In carrying out duties and authorities and in making decisions, will not practice corruption, collusion, and nepotism (KKN) either directly or indirectly and be willing to run the Company with integrity and adhere to the principle of not asking, not offering/ not promising to give/receive gifts, tribute, bribes, kickbacks, any gratuities and/or other forms of compensation in the form of money or other forms that are not legally and legally entitled from any party.

5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam penetapan harga pembelian, pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan.
6. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan pemahaman/ penguasaan yang cukup tentang berbagai ketentuan dan peraturan yang terkait (*prudent person role*), dan mematuhi serta melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*duly abiding the laws*).
7. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan serta pelanggaran sehubungan dengan transaksi kesempatan perusahaan (*corporate opportunity*).
8. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan pelanggaran sehubungan dengan transaksi dengan perusahaan yang bersangkutan, baik yang dilaksanakan oleh pribadi atau secara tidak langsung melalui anggota keluarga atau keluarga dekat (*self dealing*).
9. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang dibantu oleh orang dalam (*insider information*).

5. In carrying out duties and authorities and in making decisions, they will not take actions that result in irregularities in the determination of purchase prices, extravagance, and leakage of company finances.
6. They will carry out their duties and authorities and make decisions with sufficient understanding/ mastery of various relevant provisions and regulations (prudent person role), and comply with and implement all applicable laws and regulations (duly abiding the laws).
7. In carrying out duties and authorities and in making decisions, they will not make transactional decisions that contain conflicts of interest and violations in connection with corporate opportunity transactions.
8. In carrying out duties and authorities and in making decisions, they will not commit violations in connection with transactions with the company concerned, whether carried out personally or indirectly through family members or close relatives (self-dealing).
9. In carrying out duties and authorities and in making decisions, they will not commit violations in connection with insider-assisted transactions (insider information).

Penandatanganan Pakta Integritas Dewan Komisaris
Signing of the Board of Commissioners Integrity Pact

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Penandatanganan Signing Date
Hendra Iswahyudi[3]	PLT Komisaris Utama Act. President Commissioner	26 Februari 2025 February 26, 2025
Evy Haryadi[1]	Komisaris Commissioner	26 Februari 2025 February 26, 2025
Emir Kresna Wardana[3]	Komisaris Commissioner	26 Februari 2025 February 26, 2025
Ida Nuryatin Finahari[3]	Komisaris Commissioner	26 Februari 2025 February 26, 2025
Bagus Puruhito[3]	Komisaris Independen Independent Commissioner	26 Februari 2025 February 26, 2025
Kenedy[3]	Komisaris Independen Independent Commissioner	26 Februari 2025 February 26, 2025
Widjono Hardjanto[2]	Komisaris Independen Independent Commissioner	26 Februari 2025 February 26, 2025
Edi Srimulyanti[3]	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commisisoner	31 Agustus 2025 August 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Penandatanganan Signing Date
Ade Armando[3]	Komisaris Commissioner	31 Agustus 2025 August 31, 2025
Suharyono[3]	Komisaris Commissioner	31 Agustus 2025 August 31, 2025
M. Pradana Indraputra[3]	Komisaris Commissioner	31 Agustus 2025 August 31, 2025
Adam Muhammad[3]	Komisaris Commissioner	31 Agustus 2025 August 31, 2025
Muhammad Syafi'i[3]	Komisaris Commissioner	31 Agustus 2025 August 31, 2025

Keterangan:
1. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 23 April 2025, memberhentikan dengan hormat Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris.
2. Berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Widjono Hardjanto tanggal 1 Mei 2025.
3. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025, dilakukan pemberhentian dan penetapan anggota Dewan Komisaris.

Remarks:
1. Honorably dismissed Mr. Evy Haryadi as Commissioner based on the Circular Shareholders' Resolution dated April 23, 2025.
2. Based on the resignation letter from Mr. Widjono Hardjanto dated May 1, 2025
3. Dismissal and appointment of the Board of Commissioners members based on the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025.

Pakta Integritas Dewan Komisaris
Board of Commissioners Integrity Pact

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris
Affiliation of Members of the Board of Commissioners

Selama tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris PLN Nusantara Power tidak memiliki hubungan afiliasi pada perusahaan lain yang dilarang sesuai ketentuan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tidak terdapat hubungan afiliasi di antara anggota organ utama perusahaan. Hubungan

During 2025, all members of the Board of Commissioners of PLN Nusantara Power did not have any prohibited affiliations with other companies in accordance with internal regulations or applicable laws. In addition, there were no affiliations among members of the Company's main organs. The referred affiliations include family and/

afiliasi yang dimaksud mencakup hubungan keluarga dan/atau keuangan antara sesama anggota Dewan Komisaris, antara Dewan Komisaris dengan Direksi, serta antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Kondisi ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi serta memastikan penerapan prinsip independensi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Adapun informasi mengenai hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris PLN Nusantara Power selama tahun buku 2025 adalah sebagai berikut:

or financial relations among members of the Board of Commissioners, between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as between the Board of Commissioners and the Major Shareholders and/or Controlling Shareholders. It reflects the Company's commitment to maintaining transparency and ensuring the application of independence principles in the execution of oversight functions. The information regarding the affiliations of members of PLN Nusantara Power's Board of Commissioners for the 2025 fiscal year is as follows:

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris
Affiliate Relationship of Members of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Hendra Iswahyudi[3]	PLT Komisaris Utama Act. President Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Evy Haryadi[1]	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Emir Kresna Wardana[3]	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Ida Nuryatin Finahari[3]	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Bagus Puruhito[3]	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Kenedy[3]	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Widjono Hardjanto[2]	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Edi Srimulyanti[3]	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Ade Armando[3]	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Suharyono[3]	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
M. Pradana Indraputra[3]	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Adam Muhammad[3]	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Muhammad Syafi'i[3]	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Keterangan:
1. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 23 April 2025, memberhentikan dengan hormat Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris.
2. Berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Widjono Hardjanto tanggal 1 Mei 2025.
3. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025, dilakukan pemberhentian dan penetapan anggota Dewan Komisaris.

Remarks:
1. Honorably dismissed Mr. Evy Haryadi as Commissioner based on the Circular Shareholders' Resolution dated April 23, 2025.
2. Based on the resignation letter from Mr. Widjono Hardjanto dated May 1, 2025
3. Dismissal and appointment of the Board of Commissioners members based on the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025.

Anggota Dewan Komisaris secara berkala menyampaikan laporan kepemilikan saham, baik atas nama pribadi maupun keluarga, pada Perusahaan dan/atau perusahaan lain untuk dicatat dalam Daftar Khusus. Adapun kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang menjabat sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Members of the Board of Commissioners periodically report their share ownership, both in their personal and family names, in the Company and/or other companies to be recorded in the Special Register. The share ownership of the Members of the Board of Commissioners who served throughout 2025 is as follows:

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Beserta Keluarga
Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and Their Families

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Oleh Pribadi Pada Personal Share Ownership In		Kepemilikan Saham Oleh Keluarga Pada Family Share Ownership In	
		Perusahaan Companies	Perusahaan Lain Other Companies	Perusahaan Companies	Perusahaan Lain Other Companies
Hendra Iswahyudi[3]	PLT Komisaris Utama ACT. President Commissioner	-	-	-	-
Evy Haryadi[1]	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Emir Kresna Wardana[3]	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Ida Nuryatin Finahari[3]	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Bagus Puruhito[3]	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-
Kenedy[3]	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-
Widjono Hardjanto[2]	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-
Edi Srimulyanti[3]	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	-	-	-	-

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Oleh Pribadi Pada Personal Share Ownership In		Kepemilikan Saham Oleh Keluarga Pada Family Share Ownership In	
		Perusahaan Companies	Perusahaan Lain Other Companies	Perusahaan Companies	Perusahaan Lain Other Companies
Ade Armando[3]	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Suharyono[3]	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
M. Pradana Indraputra[3]	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Adam Muhammad[3]	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Muhammad Syafi'i[3]	Komisaris Commissioner	-	-	-	-

Keterangan:
1. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 23 April 2025, memberhentikan dengan hormat Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris.
2. Berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Widjono Hardjanto tanggal 1 Mei 2025.
3. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025, dilakukan pemberhentian dan penetapan anggota Dewan Komisaris.

Remarks:
1. Honorably dismissed Mr. Evy Haryadi as Commissioner based on the Circular Shareholders' Resolution dated April 23, 2025.
2. Based on the resignation letter from Mr. Widjono Hardjanto dated May 1, 2025
3. Dismissal and appointment of the Board of Commissioners members based on the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Work Guidelines

Dalam rangka memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PLN NP menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris sebagai acuan dalam pelaksanaan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Pedoman ini mengacu pada Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Seiring dengan kebutuhan penguatan tata kelola, pedoman tersebut dimutakhirkan dan ditetapkan menjadi Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris atau *Board of Commissioners Manual* (BoC *Manual*) pada 2 Juni 2025.

In order to strengthen the implementation of Good Corporate Governance, PLN NP has prepared the Board of Commissioners' Work Guidelines as a reference for the execution of their roles, duties, and responsibilities. It refers to the Articles of Association and applicable laws and regulations, to ensure that the supervisory and advisory functions of the Board of Directors are performed professionally, independently, and accountably. In line with the need to strengthen governance, the guidelines were updated and established as the Board of Commissioners Manual (BoC Manual) in June 2, 2025.

Dewan Komisaris juga menggunakan *Board Manual* sebagai pedoman kerja bersama dengan Direksi. *Board Manual* ini memberikan panduan yang terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga dapat diterapkan secara konsisten oleh kedua organ dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai visi dan misi Perseroan. Adapun ruang lingkup *Board Manual* meliputi:

1. Tata Laksana Direksi dan Dewan Komisaris sebagai Organ Perusahaan;
2. Tata Laksana Kerja terkait Jabatan Direksi dalam Hubungannya dengan Fungsi Dewan Komisaris;

The Board of Commissioners also uses the Board Manual as a joint manual with the Board of Directors. This Board Manual provides structured, systematic, and easy-to-understand guidelines. Hence, it can be applied consistently by both organs in carrying out their duties to achieve the Company's vision and mission. The scope of the Board Manual includes:

1. Governance procedures for the Board of Directors and Board of Commissioners as corporate organs;
2. Work procedures relating to the position of the Board of Directors in relation to the supervisory function of the Board of Commissioners;

3. Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perencanaan Strategis, Kegiatan Usaha Signifikan dan Pelaporan; dan
4. Mekanisme Formal dan Alur Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris.

BoC *Manual* merupakan penjabaran lebih lanjut dari *Board Manual* yang bersifat teknis dan lebih terfokus pada pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara spesifik. Ruang lingkup BoC *Manual* meliputi:

1. Ketentuan Umum Jabatan Dewan Komisaris;
2. Pembagian Tugas/Kewajiban dan Wewenang Dewan Komisaris;
3. Organ Pendukung Dewan Komisaris
4. Pengawasan Tata Kelola Perseroan oleh Dewan Komisaris
5. Pengambilan Keputusan dan Rapat Dewan Komisaris
6. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara berkala meninjau dan mengevaluasi isi BoC *Manual* untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan internal perusahaan maupun ketentuan regulasi yang berlaku. Apabila diperlukan, dilakukan pembaruan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan serta menjaga agar pedoman kerja tetap relevan dengan kondisi dan tantangan strategis yang dihadapi perusahaan.

3. Joint procedures for the Board of Directors and Board of Commissioners in strategic planning, significant business activities, and reporting; and
4. Formal mechanisms and authority flows between the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The BoC Manual serves as a more detailed and technical elaboration of the Board Manual, specifically focused on the functions, authorities, and responsibilities of the Board of Commissioners. Its scope includes:

1. General provisions on the position of the Board of Commissioners;
2. Distribution of duties, obligations, and authorities within the Board of Commissioners;
3. Supporting organs of the Board of Commissioners;
4. Corporate governance oversight by the Board of Commissioners;
5. Decision-making and meetings of the Board of Commissioners;
6. Performance evaluation and accountability of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners periodically reviews and evaluates the contents of the BoC Manual to ensure its relevance to the Company's internal developments and applicable regulations. Updates are made when necessary to enhance the effectiveness of oversight and maintain alignment with the Company's strategic challenges and governance needs.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Pelaksanaan peran Dewan Komisaris didasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Board Manual dan BoC Manual. Secara umum, Dewan Komisaris berfungsi melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan perusahaan oleh Direksi serta memberikan nasihat dan rekomendasi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris memiliki kewenangan pengawasan pada tingkat strategis sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan operasional sehari-hari.

The implementation of the Board of Commissioners' role is based on the provisions of the Company's Articles of Association, further elaborated in the Board Manual and BoC Manual. In general, they oversee the Company's management policies by the Board of Directors and provide advice and recommendations to support the achievement of the Company's strategic goals. In carrying out this function, the Board of Commissioners has supervisory authority at the strategic level in accordance with applicable regulations, without diminishing the responsibility of the Board of Directors in daily operational management. They are also not

Dewan Komisaris juga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional, kecuali untuk hal-hal tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan.

Pemisahan peran ini diterapkan untuk menjaga prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di mana Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas, sementara Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Adapun ruang lingkup pengawasan Dewan Komisaris mencakup seluruh aspek bisnis perusahaan dengan tugas dan tanggung jawab utama sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan pelaksanaan pengurusan Perusahaan yang dilakukan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Perusahaan.
5. Memberikan persetujuan terhadap hal strategis sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, audit BPK, audit BPKP, dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

involved in operational decision-making, except for certain matters regulated in the Articles of Association or legislation.

This separation of roles is applied to uphold the principles of good corporate governance, where the Board of Commissioners acts as the supervisor, while the Board of Directors is responsible for the management of the Company. The scope of the Board of Commissioners' supervision covers all aspects of the Company's business, with the following main duties and responsibilities:

1. Supervising management policies and their implementation, and providing advice to the Board of Directors;
2. Advising the Board of Directors, including oversight of the implementation of the Long-Term Plan, Work Plan and Corporate Budget, and ensuring compliance with the Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations, in the interest of the Company and in accordance with its objectives;
3. Refraining from participating in operational decision-making, except as explicitly permitted under the Articles of Association or applicable laws and regulations;
4. Ensuring that any operational decisions made by the Board of Commissioners, when allowed, remain part of the supervisory role and do not relieve the Board of Directors of its management responsibilities;
5. Approving strategic matters as stipulated in the Articles of Association;
6. Adhering to and implementing binding work guidelines and rules of procedure for all members of the Board of Commissioners;
7. Ensuring that the Board of Directors follows up on findings from Internal Audit, External Audit, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), and/or other regulatory oversight institutions in accordance with applicable laws and regulations;

8. Memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan lain, termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku yang meliputi rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.
9. Melakukan pengawasan atas pengelolaan risiko dan peluang yang terkait dengan *sustainability*, tidak terbatas pada *climate change*.

8. Ensuring the annual report contains information on each member's identity, primary occupation, positions in other companies, meetings attended during the fiscal year, including internal meetings and joint meetings with the Board of Directors, as well as honorarium, facilities, and/ or other benefits received from the Company;
9. Overseeing the management of risks and opportunities related to sustainability, including but not limited to climate change.

Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris
Division of Duties Among the Board of Commissioners

Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sebagai organ utama tata kelola Perusahaan secara kolegial, di mana seluruh aktivitas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dilakukan secara bersama-sama. Setiap keputusan terkait fungsi pengawasan tidak ditetapkan secara individual, melainkan melalui pembahasan dan kesepakatan dalam forum Dewan Komisaris. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris membagi penugasan di antara para anggotanya. Masing-masing anggota diberi fokus pengawasan pada area tertentu dalam pengelolaan perusahaan. Pembagian tersebut tetap berlandaskan prinsip kolegialitas, sehingga tidak mengurangi tanggung jawab bersama seluruh anggota Dewan Komisaris atas hasil pengawasan secara keseluruhan.

The Board of Commissioners conducts its duties as the main corporate governance organ collegially, where all supervisory and advisory activities to the Board of Directors are performed collectively. Every decision related to the supervisory function is not made individually, but rather through discussion and agreement within the Board of Commissioners forum. To enhance the effectiveness of supervision implementation, the Board of Commissioners divides assignments among its members. Each member is assigned a supervisory focus on specific areas in the Company's management. The division is based on the principle of collegiality, so it does not diminish the collective responsibility of all members of the Board of Commissioners for the overall supervision results.

Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Pengawasan Supervisory Duties	
Hendra Iswahyudi[3]	PLT Komisaris Utama Act. President Commissioner	Koordinator atas semua tugas dan kewajiban Dewan Komisaris diantaranya: 1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan pelaksanaan pengurusan Perusahaan yang dilakukan dan memberikan nasihat kepada Direksi. 2. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.	The Coordinator oversees all duties and responsibilities of the Board of Commissioners, which include: 1. Supervising the management policies and their implementation conducted by the Board of Directors, and providing advice to the Board of Directors. 2. Providing guidance to the Board of Directors, including supervision over the implementation of the Long-Term Plan, Work Plan, and Corporate Budget, as well as ensuring compliance with the Articles of Association, General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions, and applicable laws and regulations, all in the best interest of the Company and in accordance with its objectives.

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Pengawasan Supervisory Duties	
		3. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	3. Refraining from participating in operational decision-making, except as explicitly stipulated in the Articles of Association or relevant laws and regulations.
		4. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Perusahaan.	4. Ensuring that any operational decisions made by the Board of Commissioners within its supervisory role do not diminish the Board of Directors' responsibility for managing the Company's operations.
		5. Memberikan persetujuan terhadap hal strategis sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.	5. Providing approval on strategic matters in accordance with the provisions of the Articles of Association.
		6. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris .	6. Maintaining binding guidelines and rules of procedure applicable to every member of the Board of Commissioners.
		7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, audit BPK, audit BPKP, dan/ atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .	7. Ensuring that the Board of Directors follows up on findings from Internal Audit, External Audit, Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), and/or other regulatory authorities in compliance with prevailing laws and regulations.
		8. Memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan lain, termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku yang meliputi rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan .	8. Ensuring the annual report contains information on each Board member's identity, primary occupation, positions in other companies, details of meetings held during the fiscal year—including internal meetings and joint meetings with the Board of Directors—as well as honoraria, facilities, and/or other benefits received from the Company.
		9. Melakukan pengawasan atas pengelolaan risiko dan peluang yang terkait dengan *sustainability*, tidak terbatas pada *climate change*.	9. Overseeing risk management and opportunities related to sustainability, including but not limited to climate change.
Evy Haryadi[1]	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan dalam bidang pengelolaan SDM dan Organisasi. 2. Pengawasan kebijakan nominasi dan remunerasi 3. Pengawasan terkait dengan Teknologi Informasi 4. Pengawasan dalam bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3).	1. Supervision in the areas of HR and Organizational Management. 2. Supervision of nomination and remuneration policies. 3. Supervision related to Information Technology. 4. Supervision in the area of Occupational Health and Safety (OHS).
Emir Kresna Wardana[3]	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan dalam bidang pengelolaan SDM dan Organisasi. 2. Pengawasan kebijakan nominasi dan remunerasi 3. Pengawasan terkait dengan Teknologi Informasi 4. Pengawasan dalam bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3).	1. Supervision in the areas of HR and Organizational Management. 2. Supervision of nomination and remuneration policies. 3. Supervision related to Information Technology. 4. Supervision in the area of Occupational Health and Safety (OHS).
Ida Nuryatin Finahari[3]	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi. 2. Pengawasan dalam bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3). 3. Pengawasan dalam biang Teknologi Informasi.	1. Human Resources (HR) and Organizational Supervision 2. Occupational Health and Safety (OHS) Supervision 3. Information Technology (IT) Supervision

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Pengawasan Supervisory Duties	
Bagus Puruhito[3]	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Pengawasan dalam bidang Operasi dan Pemeliharaan. 2. Pengawasan dalam bidang *Stakeholder Management*. 3. Pengawasan dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Peralatan Pembangkit.	1. Operations and Maintenance Supervision 2. Stakeholder Management Supervision 3. Occupational Health and Safety (OHS) Supervision
Kenedy[3]	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Pengawasan kegiatan audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal maupun Auditor Eksternal 2. Pengawasan pelaksanaan Sistem pengendalian Manajemen Perusahaan meliputi antara lain pengendalian mutu, pengendalian aset dan keuangan perusahaan 3. Memastikan terlaksananya fungsi pengawasan GCG (*Good Corporate Governance*).	1. Supervision of audit activities conducted by the Internal Audit Unit and External Auditors 2. Supervision of the implementation of the Company's Management Control System, including quality control, asset control, and company finances 3. Ensuring the implementation of the Good Corporate Governance (GCG) oversight function.
Widjono Hardjanto[2]	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Pengawasan kegiatan audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal maupun Auditor Eksternal 2. Pengawasan pelaksanaan Sistem pengendalian Manajemen Perusahaan meliputi antara lain pengendalian mutu, pengendalian aset dan keuangan perusahaan 3. Memastikan terlaksananya fungsi pengawasan GCG (*Good Corporate Governance*).	1. Supervision of audit activities conducted by the Internal Audit Unit and External Auditors 2. Supervision of the implementation of the Company's Management Control System, including quality control, asset control, and company finances 3. Ensuring the implementation of the Good Corporate Governance (GCG) oversight function.
Edi Srimulyanti[3]	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissione	Koordinator atas semua tugas dan kewajiban Dewan Komisaris diantaranya: 1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan pelaksanaan pengurusan Perusahaan yang dilakukan dan memberikan nasihat kepada Direksi. 2. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. 3. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Perusahaan.	The Coordinator oversees all duties and responsibilities of the Board of Commissioners, which include: 1. Supervising the management policies and their implementation conducted by the Board of Directors, and providing advice to the Board of Directors. 2. Providing guidance to the Board of Directors, including supervision over the implementation of the Long-Term Plan, Work Plan, and Corporate Budget, as well as ensuring compliance with the Articles of Association, General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions, and applicable laws and regulations, all in the best interest of the Company and in accordance with its objectives 3. Refraining from participating in operational decision-making, except as explicitly stipulated in the Articles of Association or relevant laws and regulations. 4. Ensuring that any operational decisions made by the Board of Commissioners within its supervisory role do not diminish the Board of Directors' responsibility for managing the Company's operations.

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Pengawasan Supervisory Duties	
		5. Memberikan persetujuan terhadap hal strategis sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 6. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris . 7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, audit BPK, audit BPKP, dan/ atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 8. Memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan lain, termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku yang meliputi rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan . 9. Melakukan pengawasan atas pengelolaan risiko dan peluang yang terkait dengan *sustainability*, tidak terbatas pada *climate change*.	5. Providing approval on strategic matters in accordance with the provisions of the Articles of Association. 6. Maintaining binding guidelines and rules of procedure applicable to every member of the Board of Commissioners. 7. Ensuring that the Board of Directors follows up on findings from Internal Audit, External Audit, Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), and/or other regulatory authorities in compliance with prevailing laws and regulations. 8. Ensuring the annual report contains information on each Board member's identity, primary occupation, positions in other companies, details of meetings held during the fiscal year—including internal meetings and joint meetings with the Board of Directors—as well as honoraria, facilities, and/or other benefits received from the Company. 9. Overseeing risk management and opportunities related to sustainability, including but not limited to climate change.
Ade Armando[3]	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan kegiatan audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal maupun Auditor Eksternal 2. Pengawasan pelaksanaan Sistem pengendalian Manajemen Perusahaan meliputi antara lain pengendalian mutu, pengendalian aset dan keuangan perusahaan 3. Memastikan terlaksananya fungsi pengawasan GCG (*Good Corporate Governance*).	1. Supervision of audit activities conducted by the Internal Audit Unit and External Auditors 2. Supervision of the implementation of the Company's Management Control System, including quality control, asset control, and company finances 3. Ensuring the implementation of the Good Corporate Governance (GCG) oversight function.
Suharyono[3]	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan kegiatan audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal maupun Auditor Eksternal 2. Pengawasan pelaksanaan Sistem pengendalian Manajemen Perusahaan meliputi antara lain pengendalian mutu, pengendalian aset dan keuangan perusahaan 3. Memastikan terlaksananya fungsi pengawasan GCG (Good Corporate Governance).	1. Supervision of audit activities conducted by the Internal Audit Unit and External Auditors 2. Supervision of the implementation of the Company's Management Control System, including quality control, asset control, and company finances 3. Ensuring the implementation of the Good Corporate Governance (GCG) oversight function.
M. Pradana Indraputra[3]	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 2. Pengawasan bidang investasi dan pengembangan usaha. 3. Pengawasan dalam bidang *Stakeholder Management*.	1. Risk Management and Compliance Supervision 2. Investment and Business Development Supervision 3. Stakeholder Management Supervision

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Pengawasan Supervisory Duties	
Adam Muhammad[3]	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan kegiatan audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal maupun Auditor Eksternal 2. Pengawasan pelaksanaan Sistem pengendalian Manajemen Perusahaan meliputi antara lain pengendalian mutu, pengendalian aset dan keuangan perusahaan 3. Memastikan terlaksananya fungsi pengawasan GCG (*Good Corporate Governance*).	1. Supervision of audit activities conducted by the Internal Audit Unit and External Auditors 2. Supervision of the implementation of the Company's Management Control System, including quality control, asset control, and company finances 3. Ensuring the implementation of the Good Corporate Governance (GCG) oversight function.
Muhammad Syafi'i[3]	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan kegiatan audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal maupun Auditor Eksternal 2. Pengawasan pelaksanaan Sistem pengendalian Manajemen Perusahaan meliputi antara lain pengendalian mutu, pengendalian aset dan keuangan perusahaan 3. Memastikan terlaksananya fungsi pengawasan GCG (*Good Corporate Governance*).	1. Supervision of audit activities conducted by the Internal Audit Unit and External Auditors 2. Supervision of the implementation of the Company's Management Control System, including quality control, asset control, and company finances 3. Ensuring the implementation of the Good Corporate Governance (GCG) oversight function.

Keterangan:
1. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 23 April 2025, memberhentikan dengan hormat Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris.
2. Berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Widjono Hardjanto tanggal 1 Mei 2025.
3. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025, dilakukan pemberhentian dan penetapan anggota Dewan Komisaris.

Remarks:
1. Honorably dismissed Mr. Evy Haryadi as Commissioner based on the Circular Shareholders' Resolution dated April 23, 2025.
2. Based on the resignation letter from Mr. Widjono Hardjanto dated May 1, 2025
3. Dismissal and appointment of the Board of Commissioners members based on the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh organ pendukung, khususnya komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai rencana kerja dan pedoman yang telah ditetapkan. Untuk menjaga sinergi dan optimalisasi fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menugaskan anggotanya sebagai Ketua dan Wakil Ketua pada masing-masing komite berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal perusahaan.

Penempatan anggota pada komite-komite tersebut didasarkan pada pertimbangan kompetensi, latar belakang keahlian, serta kemampuan yang relevan dengan bidang komite terkait. Hal ini dilakukan agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara menyeluruh, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

In order to support the effectiveness of supervision implementation, the Board of Commissioners ensures that all supporting organs, especially the committees under the Board of Commissioners, can carry out their duties and responsibilities according to the established work plans and guidelines. To maintain synergy and optimize the supervisory function, the Board of Commissioners assigns its members as Chairperson and Vice Chairperson of each committee based on the provisions of laws and regulations, as well as the Company's internal policies.

The placement of members on these committees is based on considerations of competence, expertise background, and abilities relevant to the respective committee's field. It is performed so that the oversight function can operate comprehensively, accountably, and in accordance with the principles of good corporate governance.

Susunan Anggota Dewan Komisaris pada Komite Dewan Komisaris (Januari - Juni 2025)
Composition of Members of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners Committee (January – June 2025)

Komite Committee	Ketua Chairman	Wakil Ketua Vice Chairman
Komite Audit Audit Committee	Kenedy	Widjono Hardjanto
Komite Investasi dan Manajemen Risiko Investment and Risk Management Committee	Bagus Puruhito	Hendra Iswahyudi
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Emir Kresna Wardana	Ida Nuryatin Finahari

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi Dewan Komisaris maka, Susunan anggota Dewan Komisaris yang ditugaskan pada komite di bawah organ Dewan Komisris adalah sebagai berikut:

In connection with the change in the composition of the Board of Commissioners, the composition of the members of the Board of Commissioners assigned to the committee under the Board of Commissioners organ is as follows:

Susunan Anggota Dewan Komisaris pada Komite Dewan Komisaris (Juni 2025 - saat ini)
Composition of Members of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners Committee (June 2025 - present)

Komite Committee	Ketua Chairman	Wakil Ketua Vice Chairman
Komite Audit Audit Committee	Suharyono	Ade Armando
Komite Investasi dan Manajemen Risiko Investment and Risk Management Committee	Edi Srimulyanti	M. Pradana Indraputra
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Muhammad Syafi'i	Adam Muhammad

Jenis Keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
Types of Decisions Requiring Board of Commissioners' Approval

Sebagaimana diatur dalam *Board Manual* dan Anggaran Dasar Perusahaan, terdapat beberapa jenis keputusan yang wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, yaitu:

1. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dengan ketentuan transaksi, pekerjaan, kerja sama, kontrak atau kegiatan tersebut nilai per transaksi sebagaimana diatur dalam Keputusan RUPS.
2. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun).

As regulated in the Board Manual and the Company's Articles of Association, the following decisions require approval from the Board of Commissioners:

1. Entering into transactions, contracts, agreements, memoranda of understanding, and/or partnerships with other entities/parties, provided that the transaction, work, cooperation, contract, or activity value per transaction is as regulated by the General Meeting of Shareholders (GMS) resolution.
2. Pledging fixed assets as collateral for short-term credit facilities (up to one year).

3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun), kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Seluruh pinjaman kepada Anak Perusahaan, termasuk pinjaman jangka pendek, dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Laporan Triwulanan.
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, tidak termasuk pengangkatan pejabatnya.
7. Melakukan perubahan pos anggaran maupun peruntukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan.
8. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Patungan dan atau Anak Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis. Kriteria Perusahaan Patungan dan/atau Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi tidak signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis adalah Perusahaan Patungan dan/atau Anak Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan dengan nilai kurang dari 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perusahaan Patungan dan/atau Anak Perusahaan tersebut yang didasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit.
9. Pelaksanaan wewenang Direksi dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Perseroan, yang berkedudukan langsung dibawah Direktur Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama yaitu:
   a. Seorang Kepala yang melaksanakan fungsi Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
   b. Seorang Sekretaris Perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

3. Receiving or extending medium/long-term loans (over one year), except for loans granted to Subsidiaries, which must be reported to the Board of Commissioners. All loans to Subsidiaries, including short-term loans, must be reported to the Board of Commissioners through quarterly reports.
4. Writing off uncollectible receivables and obsolete inventory from the accounting records.
5. Disposing of movable fixed assets with an economic life of up to five years, as generally applicable in the industry.
6. Determining the organizational structure one level below the Board of Directors, excluding the appointment of personnel.
7. Making budget reclassifications or reallocations within the approved Corporate Annual Budget and Operational (ABOP).
8. Nominating the Company's representatives as candidates for Board of Directors and/or Board of Commissioners positions in Joint Venture Companies and/or Subsidiaries that do not meet the criteria of significant contribution and/or strategic value to the Company. Joint Venture Companies and/or Subsidiaries deemed not to provide significant contribution to the Company and/or possess strategic value are those in which the Company holds shares representing less than 20% (twenty percent) of the equity value of the respective Joint Venture Company and/or Subsidiary, based on the latest audited financial year.
9. Execution of Board of Directors' authority concerning the appointment and dismissal of Company Officials reporting directly to the President Director, specifically:
   a. The Head of Internal Audit, appointed and dismissed by the President Director based on internal mechanisms, with the approval of the Board of Commissioners.
   b. The Corporate Secretary, appointed and dismissed by the President Director based on internal mechanisms, with the approval of the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Fungsi Dewan Komisaris
Implementation of the Board of Commissioners' Duties

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pedoman kerja yang berlaku. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dijalankan secara independen, objektif, dan profesional, dengan cakupan antara lain aspek operasional, keuangan, manajemen risiko, kepatuhan, serta isu strategis yang memengaruhi keberlanjutan usaha dan penciptaan nilai jangka panjang. Dewan Komisaris juga memberikan arahan dan rekomendasi melalui forum resmi seperti Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta koordinasi dengan komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Secara garis besar, pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris selama tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Korporat
   a. Berperan sesuai fungsinya pada persiapan dan penyelenggaraan RUPS tahunan yakni RUPS Persetujuan RKAP dan RUPS Pertanggungjawaban Tahunan (LPT).
   b. Memberikan laporan pelaksanaan pengawasan tahun 2025 yang dilaporkan kepada Pemegang Saham.
   c. Arahan dalam penyusunan RKAP 2025.
   d. *Monitoring* pelaksanaan RJPP dan RKAP serta kebutuhan revisinya.
   e. Penasehatan dalam penyusunan Tata Kelola Korporasi, Risiko Korporat, Risiko Bisnis, Kepatuhan, Agenda Korporat dan lain-lain.
   f. Pembaharuan Pedoman Manajemen Risiko sesuai dengan ISO 31000:2018.
   g. Pembaharuan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

2. Niaga dan Operasi - Pemeliharaan
   a. Produksi/penjualan KWh dan pengendalian Biaya Pokok Produksi.
   b. Analisa *market share* Perusahaan di Sistem Kelistrikan Indonesia.
   c. *Energy mix* dan *security of supply* energi primer.
   d. Program dan realisasi pemeliharaan unit pembangkit.

The Board of Commissioners performs its duties and responsibilities in accordance with the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, and prevailing work guidelines. The supervisory and advisory functions to the Board of Directors are conducted independently, objectively, and professionally, covering aspects such as operations, finances, risk management, compliance, and strategic issues that affect business sustainability and long-term value creation. The Board of Commissioners also provides direction and recommendations through official forums such as its Meetings, Joint Meetings with the Board of Directors, and coordination with committees under the Board of Commissioners. In general, the implementation of the Board of Commissioners' functions during 2025 includes the following matters:

1. Corporate Aspects
   a. Play a role in the preparation and implementation of the annual GMS, namely the GMS for Approval of the Annual Budget and Operational (ABOP) and the Annual Accountability GMS (LPT).
   b. Provide a report on the implementation of supervision for 2025, which will be reported to Shareholders.
   c. Provide guidance in the preparation of the 2025 ABOP.
   d. Monitor the implementation of the Long-Term Plan and ABOP and the need for revisions.
   e. Provide advice on the preparation of Corporate Governance, Corporate Risk, Business Risk, Compliance, Corporate Agenda, and other matters.
   f. Update the Risk Management Guidelines in accordance with ISO 31000:2018.
   g. Update the Board of Commissioners and Directors' Work Procedures (Board Manual).

2. Commerce and Operations - Maintenance
   a. KWh production/sales and Cost of Goods Sold control.
   b. Analyze the Company's market share in the Indonesian Electricity System.
   c. Energy mix and security of primary energy supply.
   d. Generation unit maintenance programs and implementation.

e. Bisnis O&M baik yang dilaksanakan oleh Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
f. Bisnis lain di luar O&M ketenagalistrikan dengan kompetensi unggul yang dimiliki.
g. Aspek K3L atas seluruh unit pembangkit untuk manjaga *Zero Accident* dan tingkat PROPER.

3. Pengembangan Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan
   a. Arahan dalam menindaklanjuti penugasan yang diterima dari Pemegang Saham, termasuk dalam penyiapan SDM dan sumber daya lainnya.
   b. Evaluasi dan rekomendasi atas pelaksanaan program kemitraan IPP termasuk pemilihan partner/mitra bisnis.
   c. Evaluasi atas pembentukan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dan setoran sahamnya.
   d. Pengawasan dan penasehatan atas kemajuan seluruh proyek penugasan.
   e. Mendorong dan mendampingi Direksi dan Manajemen dalam pengembangan usaha di bidang energi baru terbarukan.
   f. Pengawasan dan penasehatan dengan program strategis Perusahaan yaitu *Beyond* Kwh dan *Revenue Growth*.

4. SDM dan Organisasi
   a. Pemilihan Direksi & Komisaris pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
   b. Penyusunan organisasi dan pembagian tugas.
   c. Evaluasi dan analisa atas Efektivitas Organisasi.
   d. Review atas proses bisnis seluruh fungsi dengan mengacu pada standar APQC (*American Productivity Quality Center*) dan keselarasannya dengan teknologi informasi melalui penyusunan *Enterprise Architecture*.
   e. *Review* atas kebijakan aspek K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan).
   f. *Review Talent Mobility* untuk memastikan adaptasi lebih cepat terhadap perubahan transformasi dengan cara menyebarkan dan memindahkan kompetensi utama Talent lintas proyek atau lintas bisnis saat diperlukan.

5. Audit
   a. Review rencana kerja Satuan Internal Audit serta pelaksanaannya, termasuk evaluasi temuan-temuan penting.

e. O&M business, both carried out by the Company and its subsidiaries.
f. Other businesses outside of electricity O&M, with superior competencies.
g. K3L aspects for all Generation units to maintain Zero Accidents and PROPER levels.

3. Business Development and Development of Subsidiaries
   a. Guidance on following up on assignments received from Shareholders, including the preparation of human resources and other resources.
   b. Evaluation and recommendations on the implementation of IPP partnership programs, including the selection of business partners.
   c. Evaluation of the establishment of Subsidiaries and Affiliated Companies and their share payments.
   d. Supervision and advice on the progress of all assigned projects.
   e. Encouraging and assisting the Board of Directors and Management in business development in the new and renewable energy sector.
   f. Supervision and advice on the Company's strategic programs, namely Beyond Kwh and Revenue Growth.

4. Human Resources and Organization
   a. Election of Directors and Commissioners in Subsidiaries and Affiliated Companies.
   b. Organizational structure and division of duties.
   c. Evaluation and analysis of Organizational Effectiveness.
   d. Review of business processes across all functions with reference to APQC (American Productivity Quality Center) standards and their alignment with information technology through the development of Enterprise Architecture.
   e. Review of Occupational Health, Safety, and Environment (K3L) policies.
   f. Review of Talent Mobility to ensure faster adaptation to transformational changes by deploying and transferring core talent competencies across projects or across businesses as needed.

5. Audit
   a. Review of the Internal Audit Unit work plan and its implementation, including evaluation of key findings.

b. Memantau pelaksanaan *Risk Based Audit* dan memberikan arahan dalam pelaksanaan *Three Line of Defences*.
c. Memantau kebijakan dan pelaksanaan ICOFR (*Internal Control Over Financial Report*).
d. Evaluasi hasil audit eksternal (KAP dan auditor eksternal lainnya).
e. *Monitoring* tindak lanjut keputusan dan arahan RUPS.
f. *Monitoring* pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) serta revisi terhadap pedomannya.
g. Memberikan masukan mengenai pengkinian Piagam Audit Intern Perusahaan.

b. Monitor the implementation of Risk-Based Audits and provide direction on the implementation of the Three Lines of Defense.
c. Monitor the policy and implementation of Internal Control Over Financial Reports (ICOFR).
d. Evaluate external audit results (KAP and other external auditors).
e. Monitor follow-up to GMS decisions and directives.
f. Monitoring the implementation of the Whistleblowing System (WBS) and revising its guidelines.
g. Providing input on updating the Company's Internal Audit Charter.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris
Site Visits by the Board of Commissioners

Dewan Komisaris secara rutin melakukan kunjungan kerja ke Unit Pembangkit dan Anak Perusahaan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai kondisi operasional, kinerja, serta tantangan yang dihadapi. Kegiatan ini juga digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan strategis, efektivitas program kerja, serta kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan. Selain itu, kunjungan kerja menjadi sarana bagi Dewan Komisaris untuk memberikan arahan dan masukan atas isu-isu strategis maupun operasional di lapangan. Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan sejumlah kunjungan kerja sebagai bagian dari agenda pengawasan rutin, dengan rincian sebagai berikut:

The Board of Commissioners regularly conducts work visits to the Power Plant Units and Subsidiaries to gain a direct understanding of the operational conditions, performance, and challenges faced. Additionally, this activity is used to evaluate the implementation of strategic policies, the effectiveness of work programs, and compliance with corporate governance principles. Moreover, work visits serve as a means for the Board of Commissioners to provide guidance and input on strategic and operational issues in the field. During 2025, the Board of Commissioners conducted several working visits as part of their routine supervision agenda, with the following details:

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners Working Visit

No.	Lokasi Location	Waktu Time
1	Surabaya	18 Januari 2025 January 18, 2025
2	Semarang	18 April 2025 April 18, 2025
3	Pacitan	7 Mei 2025 May 7, 2025
4	Lampung	29 Mei 2025 May 29, 2025
5	Surabaya	28 Juni 2025 June 28, 2025
6	Balikpapan (IKN)	31 Juli 2025 July 31, 2025
7	Belawan, Medan	27 Agustus 2025 August 27, 2025
8	Paiton, Gresik, Brantas, Jawa Timur	12-14 September 2025 September 12-14, 2025

No.	Lokasi Location	Waktu Time
9	Cirata, Purwakarta	19 September 2025 September 19, 2025
10	Muara Karang, Jakarta	20 September 2025 September 20, 2025
11	Paiton, Probolinggo	9 Oktober 2025 October 9, 2025
12	Karangkates, Malang	17 Desember 2025 December 17, 2025

Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Approvals and Recommendations

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan rekomendasi kepada Direksi terkait pengelolaan perusahaan sesuai batas kewenangan yang mengacu pada Anggaran Dasar serta ketentuan internal yang berlaku. Persetujuan dan rekomendasi tersebut disampaikan melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dituangkan dalam notulen, maupun melalui surat resmi Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan rekomendasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggapan Usulan Penempatan Wakil PT PLN NP pada Anak Perusahaan PT PLN NP.
2. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris terhadap Rencana Pelepasan Seluruh Kepemilikan Saham PT PLN NP pada PT Prima Power Nusantara dan Pengalihan kepada PT Indonesia Connectivity Investasi.
3. Tanggapan Usulan Penempatan Wakil PT PLN NP pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT PLN NP.
4. Tanggapan Usulan Penempatan Wakil PT PLN NP pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT PLN NP.
5. Tanggapan Usulan Penempatan Wakil PT PLN NP pada Perusahaan Afiliasi PT PLN NP.
6. Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan PT. PLN Nusantara Power serta Anak Usaha Tahun Buku 2025.
7. Permohonan Persetujuan atas Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2025, Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus Karyawan Tahun 2024.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners provides approval and recommendations to the Board of Directors regarding the management of the Company within the limits of authority as stipulated in the Articles of Association and applicable internal regulations. The approval and recommendations are conveyed through the decisions of the Board of Commissioners' meetings or the joint meetings with the Board of Directors, which are recorded in the minutes, or via official letters from the Board of Commissioners. Throughout 2025, the Board of Commissioners provided approvals and recommendations covering the following matters:

1. Response to the Proposed Placement of a Representative of PT PLN NP in a Subsidiary of PT PLN NP.
2. Written Response of the Board of Commissioners to the Plan to Divest All of PT PLN NP's Share Ownership in PT Prima Power Nusantara and Transfer it to PT Indonesia Connectivity Investasi.
3. Response to the Proposed Placement of a Representative of PT PLN NP in a Subsidiary and Affiliated Company of PT PLN NP.
4. Response to the Proposed Placement of a Representative of PT PLN NP in a Subsidiary and Affiliated Company of PT PLN NP.
5. Response to the Proposed Placement of a Representative of PT PLN NP in an Affiliated Company of PT PLN NP.
6. Proposal to Appoint a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Financial Statements of PT. PLN Nusantara Power and Subsidiaries for Fiscal Year 2025.
7. Request for Approval of the Proposed Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2025, Bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners, and Employee Bonuses for 2024.

8. Permohonan Persetujuan atas Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2025, Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus Karyawan Tahun 2024.
9. Tanggapan Usulan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.
10. Rekomendasi atas Usulan Perubahan Organisasi.
11. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris atas Revisi AI PLTGU Muara Karang.
12. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris terhadap Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris atas Revisi AKI Program PLTA Jawa Bali (Kuota) Tersebar untuk PLTA Wado 50 MW.
13. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris terhadap Permohonan Tanggapan Tertulis atas Program Investasi, Revisi RKAP Tahun 2025, Penugasan, dan/atau Pendanaan/Tambahan Modal Disetor untuk Pengembangan Proyek P0 dan P0'.
14. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris terhadap Permohonan Persetujuan *Partnership* Pengembangan PLTU MT Kalselteng-3 dan PLTGU Jawa-3.
15. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Penyampaian Usulan RKAP PT PLN Nusantara Power Tahun 2026.
16. Tanggapan atas Usulan Perubahan Organisasi.
17. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris terhadap Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris atas Revisi AKI PLTA Sulbagsel (Kuota) Tersebar (COD 2028) untuk PLTA Salu Uro 95 MW.
18. Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Rekomendasi Persetujuan Izin Baru atas Penghapusbukuan ATTB dengan Nilai Ekonomis di Atas 5 (Lima) Tahun.
19. Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Izin Baru atas Persetujuan Penghapusbukuan ATTB dengan Nilai Ekonomis Sampai dengan 5 (Lima) Tahun.

8. Request for Approval of the Proposed Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2025, Bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners, and Employee Bonuses for 2024.
9. Response to the Proposed Appointment of the Corporate Secretary.
10. Recommendations for Proposed Organizational Changes.
11. Written Response from the Board of Commissioners to the Request for Approval of the Board of Commissioners for the Revision of the AI for the Muara Karang Combined Cycle Power Plant (CI).
12. Written Response from the Board of Commissioners to the Request for Approval of the AKI for the Distributed Java-Bali Hydroelectric Power Plant Program (Quota) for the 50 MW Wado Hydroelectric Power Plant.
13. Written Response from the Board of Commissioners to the Request for Written Response to the Investment Program, Revised 2025 Annual Budget and Operational (ABOP), Assignments, and/or Funding/Additional Capital Paid for the Development of P0 and P0' Projects.
14. Written Response of the Board of Commissioners to the Request for Approval of the Partnership for the Development of the MT Kalselteng-3 Steam-Fired Power Plant (PLTU) and the Java-3 Combined Cycle Power Plant (PLTGU).
15. Written Response of the Board of Commissioners to the Submission of the Proposed 2026 PT PLN Nusantara Power Annual Budget and Operational (ABOP).
16. Response to the Proposed Organizational Changes.
17. Written Response of the Board of Commissioners to the Request for Approval of the Board of Commissioners for the Revision of the AKI of the Sulbagsel Hydroelectric Power Plant (Quota) Distributed (COD 2028) for the 95 MW Salu Uro Hydroelectric Power Plant.
18. Response of the Board of Commissioners to the Request for Recommendation for Approval of a New Permit for the Write-Off of ATTB with an Economic Value of Over 5 (Five) Years.
19. Response of the Board of Commissioners to the Request for Approval of a New Permit for the Approval of the Write-Off of ATTB with an Economic Value of Up to 5 (Five) Years.

Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Meetings

Kebijakan terkait Rapat Dewan Komisaris, baik Rapat Internal maupun Rapat Pengawasan, diatur dalam BoC Manual dan Board Manual, dengan ketentuan masing-masing dilaksanakan minimal satu kali setiap bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat menghadiri Rapat Konsultasi yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membahas aspek operasional dan pengelolaan keuangan perusahaan.

Ketentuan tersebut menjadi dasar penyusunan rencana rapat tahunan yang disiapkan sebelum tahun berjalan, mencakup Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Pengawasan yang masing-masing dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. Secara umum, Rapat Internal membahas tindak lanjut rapat sebelumnya, pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, serta laporan manajemen, kinerja, dan komite. Sementara itu, Rapat Pengawasan berfokus pada laporan kinerja, tindak lanjut keputusan rapat sebelumnya, serta progres proyek dan penugasan. Sebelum dibahas dalam Rapat Pengawasan atau Konsultasi, materi terlebih dahulu dikaji dalam Rapat Internal Dewan Komisaris maupun rapat komite berdasarkan laporan yang disampaikan oleh manajemen.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan 22 kali Rapat Internal dan 12 kali Rapat Pengawasan dengan frekuensi serta tingkat kehadiran masing-masing anggota Komisaris sebagai berikut:

Policies related to the Board of Commissioners' Meetings, both Internal Meetings and Supervisory Meetings, are regulated in the BoC Manual and Board Manual, with the stipulation that each is held at least once a month. Additionally, they may also attend Consultation Meetings organized by the Board of Directors to discuss operational aspects and the Company's financial management.

These provisions serve as the basis for preparing the annual meeting plan and are prepared before the current year. It includes the Internal Board of Commissioners Meeting and the Supervisory Meeting, each of which is held at least once a month. In general, the Internal Meeting discusses the follow-up of previous meetings, the execution of the Board of Commissioners' duties, as well as management, performance, and committee reports. Meanwhile, the Supervisory Meeting focuses on performance reports, follow-up on previous meeting decisions, and the progress of projects and assignments. Before being discussed in the Supervisory or Consultation Meeting, the material was first reviewed at the Internal Meeting or committee meetings based on reports submitted by management.

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 22 Internal Meetings and 12 Supervisory Meetings, with the following frequency and attendance levels for each Commissioner:

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan Rapat Pengawasan Tahun 2025
Attendance of the Board of Commissioners in Internal Meetings and Supervisory Meetings in 2025

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting			Rapat Pengawasan Supervisory Meeting			Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders		
	Total Rapat Total Average	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Total Rapat Total Average	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Total Rapat Total Average	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Hendra Iswahyudi[3]	6	6	100%	6	6	100%	2	2	100%
Evy Haryadi[1]	3	1	33%	2	2	100%	1	1	100%
Emir Kresna Wardana[3]	6	4	67%	6	4	67%	2	2	100%
Ida Nuryatin Finahari[3]	6	5	83%	6	6	100%	2	2	100%
Bagus Puruhito[3]	6	6	100%	6	6	100%	2	2	100%

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting			Rapat Pengawasan Supervisory Meeting			Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders		
	Total Rapat Total Average	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Total Rapat Total Average	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Total Rapat Total Average	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Kenedy[3]	6	6	100%	6	6	100%	2	2	100%
Widjono Hardjanto[2]	4	0	0%	4	2	50%	1	1	100%
Edi Srimulyanti[3]	16	14	88%	6	6	100%	-	-	-
Ade Armando[3]	16	16	100%	6	6	100%	-	-	-
Suharyono[3]	16	16	100%	6	6	100%	-	-	-
M. Pradana Indraputra[3]	16	16	100%	6	6	100%	-	-	-
Adam Muhammad[3]	16	15	94%	6	5	83%	-	-	-
Muhammad Syafi'i[3]	16	14	88%	6	4	67%	-	-	-

Keterangan:
1. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 23 April 2025, memberhentikan dengan hormat Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris.
2. Berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Widjono Hardjanto tanggal 1 Mei 2025.
3. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025, dilakukan pemberhentian dan penetapan anggota Dewan Komisaris.

Remarks:
1. Honorably dismissed Mr. Evy Haryadi as Commissioner based on the Circular Shareholders' Resolution dated April 23, 2025.
2. Based on the resignation letter from Mr. Widjono Hardjanto dated May 1, 2025
3. Dismissal and appointment of the Board of Commissioners members based on the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025.

Penyampaian Undangan Rapat Dewan Komisaris
Distribution of Board of Commissioners' Meeting Invitations

Penyampaian undangan atau panggilan rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam *Board Manual* dan BoC *Manual*, yaitu disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat berlangsung. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keterlambatan dalam penyampaian undangan atau panggilan rapat kepada seluruh peserta rapat Dewan Komisaris.

The distribution of meeting invitations or notices to the Board of Commissioners was conducted in accordance with the provisions outlined in the Board Manual and BoC Manual, which stipulate that such invitations must be delivered no later than 3 (three) working days prior to the meeting. Throughout 2025, there were no delays in the delivery of meeting invitations to the Board of Commissioners.

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2026
Board of Commissioners' Meeting Plan for 2026

Mengacu pada ketentuan dalam BoC *Manual*, Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala dengan frekuensi minimal satu kali setiap bulan. Rencana pelaksanaan rapat disusun sebelum tahun berjalan dengan pembagian agenda menjadi agenda rutin dan non-rutin. Agenda rutin mencakup antara lain evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, laporan kinerja

Referring to the provisions in the BoC Manual, the Board of Commissioners meetings are held periodically with a minimum frequency of once a month. The meeting schedule is prepared before the current year, dividing the agenda into regular and irregular items. The routine agenda includes, among other things, the evaluation of follow-up actions from previous meetings, corporate

korporat, serta perkembangan pengembangan usaha dan agenda sejenis lainnya. Sementara itu, agenda non-rutin membahas hal-hal di luar agenda rutin yang memerlukan perhatian atau persetujuan Dewan Komisaris, seperti usulan Direksi, tindak lanjut arahan atau keputusan RUPS, serta pelaporan tindak lanjut atas arahan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

performance reports, as well as updates on business development and other similar agendas. Meanwhile, the non-routine agenda discusses matters outside the routine agenda that require the attention or approval of the Board of Commissioners, such as proposals from the Board of Directors, follow-up on directives or decisions from the GMS, and reporting on follow-up on directives from the Board of Commissioners and/or GMS.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Competency Development Program for the Board of Commissioners

Program pengembangan Dewan Komisaris dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan kegiatan usaha perusahaan, guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Ketentuan mengenai pengembangan kompetensi ini diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Manual*) dan *Board Manual*. Sepanjang tahun 2025, anggota Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

The Board of Commissioners development program is conducted to enhance their knowledge and competency in areas relevant to the Company's business, thereby supporting the effectiveness of their duties and responsibilities. The provisions governing this program is stipulated in the Board of Commissioners Work Guidelines (Board of Commissioners Manual) and the Board Manual. In 2025, members of the Board of Commissioners participated in the following competency development activities:

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Competency Development Program of the Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Resource Person	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
1	Ade Armando	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Pengawasan Tata Kelola Risiko (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	12-13 November 2025 November 12-13, 2025	LSP MKS, Jakarta
2	Suharyono	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Pengawasan Tata Kelola Risiko (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	12-13 November 2025 November 12-13, 2025	LSP MKS, Jakarta
3	M Pradana Indraputra	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Pengawasan Tata Kelola Risiko (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	12-13 November 2025 November 12-13, 2025	LSP MKS, Jakarta
4	Adam Muhammad	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Pengawasan Tata Kelola Risiko (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	12-13 November 2025 November 12-13, 2025	LSP MKS, Jakarta
5	Muhammad Syafi'i	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Pengawasan Tata Kelola Risiko (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	12-13 November 2025 November 12-13, 2025	LSP MKS, Jakarta

Program Pengenalan Bagi Dewan Komisaris Baru
Induction Program for Newly Appointed Board of Commissioners Members

Ketentuan mengenai program pengenalan (induksi) bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Manual*) dan Board Manual. Program ini dapat dilaksanakan dalam bentuk presentasi, pertemuan, kunjungan ke Unit Perusahaan/Anak Perusahaan, serta pengkajian dokumen atau bentuk kegiatan lain yang dianggap relevan dengan kondisi PLN NP. Pelaksanaan program pengenalan dilakukan melalui koordinasi antara Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris. Adapun materi yang disampaikan dalam program pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya sesuai dengan RJPP Perusahaan;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan;
4. Keterangan mengenai audit internal dan eksternal, sistem pengendalian internal dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
5. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sebagai berikut:

The provisions regarding the induction program for newly appointed members of the Board of Commissioners are regulated in the Board of Commissioners Manual and the Board Manual. This program includes presentations, meetings, visits to Company Units/Subsidiaries, as well as document reviews or other activities deemed relevant to the conditions of PLN NP. The induction program is performed through coordination between the Corporate Secretary and the Secretary of the Board of Commissioners. The materials presented in the induction program include:

1. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within the Company;
2. An overview of the Company, including its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short- and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic matters in accordance with the Company's Long-Term Corporate Plan (RJPP);
3. Information on delegated authorities;
4. Information regarding internal and external audits, the internal control system, and internal control policies, including those related to the Audit Committee; and
5. Information on the roles and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

In 2025, an induction program was conducted for newly appointed members of the Board of Commissioners as follows:

Program Induksi Anggota Dewan Komisaris Baru Tahun 2025
Induction Program for New Board of Commissioners Member in 2025

No.	Tanggal Date	Agenda		Anggota Dewan Komisaris Member of the Board of Commissioners
1	3 Juli 2025 July 3, 2025	1. Profil Perusahaan 2. Rencana Jangka Panjang Perusahaan 3. Kinerja Perusahaan 4. *Good Corporate Governance* (GCG)	1. Company Profile 2. Company's Long-Term Plans 3. Company Performance 4. Good corporate Governance (GCG)	1. Edi Srimulyanti 2. Ade Armando 3. Suharyono 4. M Pradana Indraputra 5. Adam Muhammad 6. Muhammad Syafi'i

Penilaian Kinerja Komite–Komite di Bawah Dewan Komisaris
Performance Evaluation of Board of Commissioners' Committees

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tata kelola, Dewan Komisaris memastikan agar komite-komite di bawahnya dapat menjalankan fungsi secara optimal, relevan dengan kebutuhan Perusahaan, dan sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Untuk itu, dilakukan evaluasi kinerja komite secara berkala oleh Dewan Komisaris. Sebagai bagian dari proses penilaian tersebut, Dewan Komisaris menilai pelaksanaan tugas komite berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam BoC *Manual* dan *Board Manual*. Penilaian mencakup beberapa aspek, antara lain pencapaian target rencana kerja tahunan, kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan di masing-masing bidang, serta kontribusi komite terhadap efektivitas kerja Dewan Komisaris secara keseluruhan. Hasil evaluasi kinerja masing-masing komite dijabarkan lebih rinci pada bagian tersendiri yang membahas Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

In order to ensure the effectiveness of governance implementation, the Board of Commissioners ensures that the committees under it can perform their functions optimally, relevant to the needs of the Company, and in accordance with the principles of Good Corporate Governance. To that end, the performance of the committees is evaluated periodically by the Board of Commissioners. As part of the evaluation process, the Board of Commissioners assesses the performance of the committees based on the provisions outlined in the BoC Manual and Board Manual. The evaluation covers several aspects, including the achievement of annual work plan targets, the quality of supervisory function in each field, and the committees' contribution to the overall effectiveness of the Board of Commissioners' work. The results of the performance evaluation of each committee are explained in more detail in separate sections discussing the Audit Committee, Investment and Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee.

Penilaian Kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris
Performance Evaluation of the Board of Directors by the Board of Commissioners

Dewan Komisaris memastikan bahwa pelaksanaan tugas Direksi tetap sejalan dengan strategi perusahaan, prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam BoC *Manual* dan *Board Manual*, Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi kinerja Direksi. Proses evaluasi tersebut dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan dengan melibatkan komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas penilaian. Penilaian didasarkan pada laporan manajemen yang disampaikan secara rutin, baik bulanan maupun triwulanan, serta dibahas dalam rapat pengawasan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, evaluasi tahunan dilakukan melalui pengukuran pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI), baik secara kolegial maupun individual, termasuk hasil penilaian penerapan GCG pada Direksi. Uraian lebih rinci mengenai proses dan hasil penilaian kinerja Direksi disajikan pada bagian tersendiri yang membahas Direksi.

The Board of Commissioners ensures that the execution of the Board of Directors' duties remains in line with the Company's strategy, the principles of Good Corporate Governance, and the interests of stakeholders. In carrying out its supervisory function as outlined in the BoC Manual and Board Manual, they periodically evaluates the performance of the Board of Directors. The evaluation process is run quarterly and annually, involving their committees to maintain the objectivity and accountability of the assessment. The assessment is based on management reports submitted regularly, both monthly and quarterly, and discussed in supervisory meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors. In addition, annual evaluations are performed through the measurement of Key Performance Indicators (KPI) achievements, both collegially and individually, including the assessment results of GCG implementation for the Board of Directors. A more detailed description of the process and results of the Board of Directors' performance evaluation is presented in a separate section that discusses the Board of Directors.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Performance Evaluation of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan penilaian kinerja mandiri (*self-assessment*) pada setiap akhir tahun buku sebagai bagian dari penguatan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat selama tahun berjalan.

The Board of Commissioners consistently conducts a self-assessment at the end of each fiscal year to strengthen the implementation of Good Corporate Governance principles. This evaluation is used to assess the effectiveness of the supervisory and advisory functions conducted during the year.

Penilaian *self-assessment* tersebut dilakukan bersamaan dengan evaluasi kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, *Board Manual*, dan BoC *Manual*. Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan pembagian tugas pengawasan masing-masing anggota sebagai dasar evaluasi kinerja individu Dewan Komisaris. Adapun kriteria *self-assessment* Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The self-assessment evaluation is conducted simultaneously with the performance evaluation of the committees under the Board of Commissioners, referring to the Company's Articles of Association, Board Manual, and BoC Manual. Additionally, the assessment considers the distribution of supervisory duties among the members as the basis for the individual performance evaluation of the Board of Commissioners. The criteria for the self-assessment of the Board of Commissioners are as follows:

Self-assessment Individu Dewan Komisaris
Board of Commissioners Individual Self-Assessment

Tugas Pengawasan Supervisory Task	Edi Srimulyanti	Ade Armando	Suharyono	M Pradana Indraputra	Adam Muhammad	Muhammad Syafi'i
Koordinator atas semua tugas dan kewajiban Dewan Komisaris terkait dengan fungsi pengawasan. Coordinator of all duties and obligations of the Board of Commissioners related to the supervisory function.	√					
Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi. Supervision in the field of HR and Organization.	√				√	√
Pengawasan dalam bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3). Supervision in the field of Occupational Health and Safety (K3).	√				√	√
Pengawasan dalam bidang Teknologi Informasi. Supervision in the field of Information Technology.	√				√	√
Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Supervision in the field of Risk Management and Compliance.	√			√		
Pengawasan bidang investasi dan pengembangan usaha. Supervision in the field of investment and business development.	√			√		
Pengawasan dalam bidang *Stakeholder Management.* Supervision in the field of Stakeholder Management.	√					

Tugas Pengawasan Supervisory Task	Edi Srimulyanti	Ade Armando	Suharyono	M Pradana Indraputra	Adam Muhammad	Muhammad Syafi'i
Pengawasan dalam bidang Operasi dan Pemeliharaan. Supervision in the field of Operation and Maintenance.	√	√	√			
Pengawasan dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Peralatan Pembangkit. Supervision in the field of Health and Safety of Generation Equipment.	√	√	√			

Hasil dari evaluasi tersebut tidak hanya menjadi bahan penilaian internal bagi Dewan Komisaris, tetapi juga dimanfaatkan sebagai acuan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan serta memperkuat kontribusi strategis Dewan Komisaris di masa mendatang.

The results of the evaluation not only serve as internal assessment material for the Board of Commissioners but are also utilized as a reference to enhance the effectiveness of supervisory functions and strengthen the strategic contributions of the Board of Commissioners in the future.

Selain itu, RUPS juga melaksanakan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris berdasarkan beberapa aspek utama, antara lain Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang disampaikan Dewan Komisaris, implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaan tugas, serta capaian *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja tahunan. Adapun kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian KPI tahun 2025 disajikan pada uraian berikut:

In addition, the GMS conducts an assessment of the performance of the Board of Commissioners based on several key aspects, including the Supervisory Task Report submitted by the Board of Commissioners, the implementation of Good Corporate Governance principles in task execution, and the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) set as annual performance indicators. The performance of the Board of Commissioners based on the achievement of the 2025 KPIs is available in the following description:

Realisasi *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris 2025
Realization of Key Performance Indicators of the Board of Commissioners 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Bobot Weight	Nilai Capaian Achievement Value
1.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Preparing draft work plans and budgets for the Board of Commissioners.	10	10
2.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Provide feedback/recommendations to Shareholders regarding:		
	RKAP ABOP	15	15
	Laporan Tahunan Annual Report	15	15
3.	Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris: Holding Board of Commissioners Meetings		
	Rapat Internal Dewan Komisaris (RID) Board of Commissioners Internal Meetings (RID)	10	10
	Rapat Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi (RDD) Board of Commissioners Supervisory Meetings (RDD)	10	10
4.	Memberikan tanggapan tertulis/persetujuan/nasihat/saran terkait rencana strategis yang diajukan Direksi Providing written feedback/approval/advice/suggestionregarding the strategic plan submitted by the Board of Directors	10	10

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Bobot Weight	Nilai Capaian Achievement Value
5.	*Review* tindak lanjut hasil temuan audit internal/eksternal Review of follow-up on internal/external audit findings	10	10
6.	Menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham kepada Pemegang Saham Submitting the Board of Commissioners' supervisory report to Shareholders	10	10
7.	Pengusulan auditor eksternal kepada Pemegang Saham Proposal of an external auditor to the Shareholders	5	5
8.	Peningkatan kompetensi melalui pelatihan/seminar dll Improving competence through training/seminars, etc.	5	5
	Nilai Kinerja Performance Value	**100**	**100**

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Results of the Board of Commissioners Performance Assessment

Skor Pencapaian KPI Kolegial Dewan Komisaris Board of Commissioners Individual KPI Achievement Score	100% dari target 100%	100% of the target of 100%
Skor Pencapaian KPI Individu Dewan Komisaris Board of Commissioners Individual KPI Achievement Score	• Edi Srimulyanti sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen mencapai 100,11% dari target 100% • Ade Armando sebagai Komisaris mencapai 100,11% dari target 100% • Suharyono sebagai Komisaris mencapai 100,11% dari target 100% • M Pradana Indraputra sebagai Komisaris mencapai 100,11% dari target 100% • Adam Muhammad sebagai Komisaris mencapai 100,11% dari target 100% • Muhammad Syafi'i sebagai Komisaris mencapai 100,11% dari target 100%	• Edi Srimulyanti as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner, achieved 100.11% of the 100% target • Ade Armando as Commissioner, achieved 100.11% of the 100% target • Suharyono as Commissioner, achieved 100.11% of the 100% target • M Pradana Indraputra as Commissioner achieved 100.11% of the 100% target • Adam Muhammad as Commissioner achieved 100.11% of the 100% target • Muhammad Syafi'i as Commissioner achieved 100.11% of the 100% target

Direksi
Board of Directors

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Direksi mengarahkan pengembangan PLN NP melalui strategi berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan kinerja keuangan dan operasi, keandalan pasokan energi, penyelesaian proyek strategis, kontribusi terhadap SDGs, pengembangan bisnis di luar PLN Group, transformasi digital, pengurangan emisi karbon, pengelolaan investasi yang efektif. serta penguatan organisasi dan talenta. Melalui upaya tersebut, Perusahaan diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri energi berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan dengan kinerja yang terus tumbuh secara berkelanjutan.

The Board of Directors is responsible for the management and administration of the Company in accordance with the aims and objectives, and represents the Company as stipulated in the Articles of Association. The Board of Directors directs the development of PLN NP through sustainable strategies that focus on improving financial and operational performance, energy supply reliability, strategic project completion, contribution to SDGs, business development outside the PLN Group, digital transformation, carbon emission reduction, effective investment management. as well as strengthening the organization and talent. Through these efforts, the Company is expected to further strengthen its position as a leader in the sustainable energy industry, as well as make a positive contribution to society and the environment with performance that continues to grow sustainably.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
Appointment and Dismissal of the Board of Directors

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai Anggaran Dasar. Proses pengangkatan Direksi dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memenuhi persyaratan materiil, formal, dan persyaratan lainnya serta melalui tahapan nominasi, yang meliputi penjaringan, seleksi, serta pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023. Direksi juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan tertentu sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundangan dan/atau Anggaran Dasar.
2. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi.
3. Tidak melaksanakan tugas dengan baik.
4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau keuangan Negara.
5. Adanya perubahan strategi bisnis pada Perseroan.
6. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan.
7. Melakukan tindakan yang melanggar kode etik Direksi Perseroan.
8. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS in accordance with the Articles of Association. The appointment is conducted transparently and accountably by meeting material, formal, and other requirements, as well as through the nomination stages, which include screening, selection, and the implementation of fit and proper tests, referring to the SOEs Ministerial Regulation No. PER-3/MBU/03/2023. The Board of Directors may also be dismissed at any time for the following specific grounds:

1. Failure to comply with or violation of prevailing laws and/or the Articles of Association.
2. Inability to fulfill obligations as set forth in the Management Contract and Annual Management Contract of the Board of Directors.
3. Failure to perform duties properly.
4. Involvement in actions that cause harm to the Company and/or state finances.
5. Changes in the Company's business strategy.
6. Engagement in unethical and/or improper conduct.
7. Violation of the Board of Directors' code of ethics.
8. Being found guilty by a final and binding court decision.

9. Berhalangan tetap, termasuk sakit keras/sakit berkepanjangan.
10. Mengundurkan diri.
11. Alasan lain yang dinilai tepat menurut RUPS demi kepentingan dan tujuan Peseroan.

9. Permanent incapacity, including serious or prolonged illness.
10. Voluntary resignation.
11. Other reasons deemed appropriate by the GMS in the interest of the Company's objectives.

Susunan Direksi
Composition of the Board of Directors

Susunan Direksi PLN NP terdiri dari 6 (enam) nomenklatur jabatan yang tercantum dalam struktur organisasi Perusahaan dan ditetapkan melalui keputusan RUPS. Struktur ini dirancang untuk memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap fungsi strategis dan operasional dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, susunan Direksi PLN NP yang menjabat adalah sebagai berikut:

The composition of the PLN NP Board of Directors consists of 6 (six) positions listed in the Company's organizational structure and determined through a GMS resolution. This structure is designed to ensure a clear division of duties and responsibilities, so that each strategic and operational function can be carried out effectively and efficiently. From January to December 2025, the composition of the incumbent PLN NP Board of Directors is as follows:

Susunan Direksi Tahun 2025
Board of Directors Composition 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director	Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Pembangkitan Jawa-Bali tanggal 21 September 2022 tentang Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Nama dan Logo Perseroan Appointed as the President Director based on the Shareholders' Resolution of PT Pembangkitan Jawa-Bali dated September 21, 2022, regarding the Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Company's Name and Logo.	2022-2026
Rachmanoe Indarto[1]	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	- Diangkat sebagai PLT Direktur Operasi-2 melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 12 November 2020 - Ditetapkan sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara melalui RUPS berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PJB tanggal 21 September 2022. - Appointed as Act. Director of Operations-2 through the Circular GMS dated November 12, 2020 - Appointed as Director of Coal Power Plant Operations through the Circular GMS Resolution regarding the Appointment of Members of PT PJB's Board of Directors dated September 21, 2022.	2020-2025
M. Irwansyah Putra[1,2]	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	Diangkat sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris) Appointed as Director of Coal Power Plant Operations based on the PT PLN Nusantara Power Shareholders' Resolution dated June 26, 2025, on the Changes in the Company's Management (Changes in the Board of Directors and Board of Commissioners Composition).	2025-2029

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Komang Parmita	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	Diangkat sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pergantian DireksiAppointed as Director of Gas Power Plant Operations based on the Shareholders' Resolution dated August 3, 2023, on the Changes in the Board of Directors	2023-2027
Teguh Widhi Harsono[2]	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris) Appointed as Director of Finance and Risk Management based on the PT PLN Nusantara Power Shareholders' Resolution dated June 26, 2025, on the Changes in the Company's Management (Changes in the Board of Directors and Board of Commissioners Composition).	2025-2029
Dwi Hartono	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business and Commercial Development	- Diangkat sebagai Direktur Keuangan merangkap sebagai PLT. Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PJB tanggal 21 September 2022. - Ditetapkan sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris) - Appointed as Finance Director concurrently serving as Act. Director of Business Development and Commerce based on the Circular GMS Resolution on the Appointment of Members of PT PJB's Board of Directors dated September 21, 2022. - Appointed as Director of Business Development and Commerce based on the PT PLN Nusantara Power Shareholders' Resolution dated June 26, 2025, on the Changes in the Company's Management (Changes in the Board of Directors and Board of Commissioners Composition).	2022-2026
TB Ari Wibawa Mukti[2]	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Diangkat sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Pengurus Perseroan (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris) Appointed as Director of Human Capital Management and Administration based on the PT PLN Nusantara Power Shareholders' Resolution dated June 26, 2025, on the Changes in the Company's Management (Changes in the Board of Directors and Board of Commissioners Composition).	2025-2029

Keterangan:
1. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025, dilakukan pemberhentian Sdr. Rachmanoe Indarto dari Jabatannya Sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara dan menetapkan Sdr M. Irwansyah Putra sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara.
2. Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak tanggal tanggal 26 Juni 2025

Remark:
1. Based on the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025, Mr. Rachmanoe Indarto was dismissed from his position as Director of Coal Power Plant Operations, and Mr. M. Irwansyah Putra was appointed as Director of Coal Power Plant Operations.
2. Served as Director of the Company since June 26, 2025

Ketentuan Masa Jabatan
Term of Office

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Members of the Board of Directors are appointed for a term of four (4) years, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders (GMS) to dismiss any member at any time. Upon the end of their term, Directors may be reappointed for one (1) additional term.

Pedoman dan Tata kerja
Board Guidelines and Working Procedures

Direksi telah memiliki pedoman dan tata kerja yang dituangkan dalam Board of Directors Manual (BoD *Manual*) sebagai penjabaran dari *Board Manual.* Kedua pedoman tersebut terakhir diperbarui pada Desember 2024 dan ditetapkan melalui kesepakatan bersama Direksi dan Dewan Komisaris. Pedoman ini menjadi landasan bagi pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja antar organ Perusahaan.

The Board of Directors has guidelines and work procedures outlined in the Board of Directors Manual (BoD Manual), which elaborates on the Board Manual. Both guidelines were last updated in December 2024 and established through a mutual agreement between the Board of Directors and the Board of Commissioners. These guidelines serve as the foundation for the implementation of duties, authorities, responsibilities, and working relationships between the Company's organs.

Ruang lingkup *Board Manual* mencakup seluruh aspek pengelolaan dan pengawasan yang mendukung tercapainya tata kelola perusahaan yang profesional dan berkelanjutan, meliputi:

1. Tata Laksana Direksi dan Dewan Komisaris sebagai Organ Perusahaan;
2. Tata Laksana Kerja terkait Jabatan Direksi dalam Hubungannya dengan Fungsi Dewan Komisaris;
3. Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perencanaan Strategis, Kegiatan Usaha Signifikan dan Pelaporan; dan
4. Mekanisme Formal dan Alur Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris.

The scope of the Board Manual encompasses all aspects of management and supervision that support the achievement of professional and sustainable corporate governance, including:

1. Governance of the Board of Directors and the Board of Commissioners as Corporate Organs;
2. Work Procedures regarding the Role of the Board of Directors in Relation to the Board of Commissioners;
3. Work Procedures of the Board of Directors and the Board of Commissioners in Strategic Planning, Significant Business Activities, and Reporting;
4. Formal Mechanisms and the Flow of Authority between the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Ruang lingkup BoD Manual meliputi:

1. Ketentuan Umum Jabatan Direksi;
2. Pembagian Tugas/Kewajiban dan Wewenang Direksi;
3. Organ Pendukung Direksi
4. Pelaksanaan Tugas Tata Kelola Perseroan oleh Direksi

The BoD Manual covers the following areas:

1. General Provisions Regarding the Position of Directors;
2. Distribution of Duties/Responsibilities and Authorities among Directors;
3. Supporting Organs of the Board of Directors;
4. Execution of Corporate Governance Duties by the Board of Directors;

5. Pengambilan Keputusan dan Rapat Direksi
6. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja Direksi

Perusahaan secara berkala melakukan peninjauan dan pemutakhiran Board Manual dan Board of Directors Manual (BoD Manual) untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan strategis perusahaan, dinamika organisasi, serta perkembangan peraturan yang berlaku. Sebagai bagian dari proses pemutakhiran tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris kembali menandatangani komitmen penerapan BoD *Manual* pada 15 Januari 2026. Langkah ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menjaga efektivitas tata kelola yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

5. Decision-Making and Board of Directors' Meetings;
6. Performance Evaluation and Accountability of the Board of Directors.

The Company periodically reviews and updates the Board Manual and Board of Directors Manual (BoD Manual) to ensure their alignment with the company's strategic needs, organizational dynamics, and applicable regulatory developments. As part of this updating process, the Board of Directors and Board of Commissioners re-signed a commitment to implement the BoD Manual on January 15, 2026. This step reflects the Company's commitment to maintaining effective, adaptive, accountable, and sustainable governance.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, yang dijabarkan lebih rinci dalam *Board Manual* dan BoD *Manual* sebagai pedoman utama tata kelola profesional. Secara umum, tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

The Board of Directors performs its duties and responsibilities in accordance with the Company's Articles of Association, which are further detailed in the Board Manual and the BoD Manual as the main guidelines for professional governance. In general, the Board of Directors' duties and responsibilities include:

1. Ensuring the execution of the Company's business and activities in accordance with its purposes and business objectives;
2. Preparing the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Budget, and any amendments thereto, and submitting them to the Board of Commissioners and Shareholder for GMS approval;
3. Explaining the Long-Term Plan and the Work Plan and Budget to the GMS;
4. Preparing the Shareholder Register, Special Register, minutes of the GMS, and minutes of Board of Directors' meetings;
5. Preparing the Annual Report as a form of accountability, along with the Company's financial documents in accordance with applicable laws on corporate documentation;
6. Establishing an accounting system based on Financial Accounting Standards and internal control principles, particularly for management, recording, safekeeping, and monitoring functions;

7. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
8. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
9. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
10. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
11. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perseroan, meliputi Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya.
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham.
14. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
15. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari:
    a. Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Audit Intern;
    b. Auditor Eksternal;
    c. Nasihat dan hasil pengawasan Dewan Komisaris;
    d. Laporan BPK;
    e. Laporan BPKP; dan/atau
    f. Temuan dan rekomendasi lain yang wajib ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengawasan risiko serta peluang yang terkait dengan *sustainability*, tidak terbatas pada *climate change*.

7. Developing the Company's organizational structure along with detailed roles and responsibilities;
8. Preparing Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submitting them for external audit;
9. Submitting the Annual Report, including the Financial Statements, to the GMS for approval and ratification;
10. Providing clarifications on the Annual Report to the GMS;
11. Submitting the ratified Balance Sheet and Income Statement to the Minister of Law and Human Rights in accordance with prevailing laws;
12. Maintaining and safeguarding key documents at the Company's registered office, including the Shareholder Register, Special Register, minutes of the GMS, minutes of the Board of Commissioners' and Board of Directors' meetings, Annual Reports, financial statements, and other corporate documents;
13. Submitting periodic reports in accordance with applicable provisions and other reports upon request from the Board of Commissioners and/or Shareholder;
14. Providing clarifications on matters requested by members of the Board of Commissioners and/or Shareholders;
15. Carrying out other obligations in accordance with the Articles of Association and GMS resolutions based on applicable regulations;
16. Following up on findings and recommendations from:
    a. Risk Management, Compliance, and Internal Audit functions;
    b. External Auditor;
    c. Advice and oversight of the Board of Commissioners;
    d. Reports from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK);
    e. Reports from the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP); and/or
    f. Other findings and recommendations that must be acted upon in accordance with prevailing regulations;
17. Monitoring, managing, and supervising risks and opportunities related to sustainability, including but not limited to climate change.

Pembagian Tugas Anggota Direksi
Division of Duties among Board Members

Direksi menerapkan kepemimpinan kolektif dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas sesuai nomenklatur jabatan dan kebutuhan strategis operasional. Pembagian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memperbolehkan RUPS menetapkan tugas Direksi atau menyerahkannya pada keputusan internal Direksi. Sebagai implementasi, Direksi Perusahaan menetapkan pembagian tugas dan wewenang melalui Keputusan Direksi Nomor: 042.P/DIR/2025 tanggal 28 November 2025. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi adalah sebagai berikut:

The Board of Directors implements collective leadership with a clear division of duties and authorities according to the nomenclature of positions and strategic operational needs. This division refers to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which allows the GMS to determine the duties of the Board of Directors or delegate them to internal decisions of the Board of Directors. As an implementation, the Company's Board of Directors determines the division of duties and authorities through Board of Directors Decree Number: 042.P/DIR/2025 dated November 28, 2025. The division of duties and responsibilities of members of the Board of Directors is as follows:

Pembagian Tugas Anggota Direksi
Division of Duties of Board of Directors Members

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and responsibilities	
Direktur Utama President Director	1. Memimpin, membina dan memastikan arah, kebijakan dan strategi Perusahaan sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	1. Lead, guide, and ensure the Company's direction, policies, and strategies align with the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Annual Budget and Operational (ABOP).
	2. Memimpin, membina, dan memastikan kinerja Perusahaan dan Direktorat sesuai visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan, dan program kerja yang ditetapkan.	2. Lead, guide, and ensure the performance of the Company and all Directorates is in accordance with the established vision, mission, business objectives, strategies, policies, and work programs.
	3. Menyelaraskan seluruh inisiatif internal Perusahaan dan memastikan peningkatan kemampuan bersaing Perusahaan.	3. Align all internal initiatives to strengthen the Company's competitive capabilities.
	4. Memastikan bahwa Perusahaan terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi shareholders.	4. Ensure sustainable Company growth and continuous value creation for shareholders.
	5. Melaksanakan dan bertindak sebagai pengguna barang/jasa dalam rangka pengadaan untuk kebutuhan dan proses bisnis Direktoratnya berdasarkan batasan kewenangan dan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perusahaan.	5. Conduct and act as the user of goods and services in the context of procurement for the Directorate's needs and business processes, based on the limits of authority and the Company's applicable procurement provisions.
	6. Melaksanakan fungsi *corporate leader* untuk memastikan engagement seluruh anggota Perusahaan sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan semua sumber daya Perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Perusahaan.	6. Act as the corporate leader to foster engagement across all levels of the Company and serve as an inspirer and motivator, steering all resources toward achieving the Company's vision, mission, and goals.
	7. Mengoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional Sekretariat Perusahaan, Satuan Internal Audit, Satuan Technology Development and Asset Management, Satuan Corporate Legal, Satuan Supply Chain Management and Procurement, dan Bidang Project 8. Management Office.	7. Coordinate the strategic and operational implementation of the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Technology Development and Asset Management, Corporate Law, Supply Chain Management, and Project Management units.
	8. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, kepatuhan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (K3KL), tata kelola data dan keamanan informasi serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan.	8. Ensure the implementation of corporate culture, compliance, Occupational Health and Safety, Security and Environment (K3KL), and management systems aligned with the Company's vision and mission.
	9. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko Perusahaan.	9. Ensure the implementation of risk identification and mitigation throughout the Company.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and responsibilities	
Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	1. Memimpin, membina dan mengoptimalkan pengelolaan kinerja operasi dan pemeliharaan Unit Pembangkit sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 2. Memimpin, membina dan mengoptimalkan perencanaan operasi dan pemeliharaan Unit Pembangkit berdasarkan prioritas pembebanan terkait Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). 3. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan terlaksananya kebijakan strategi dan operasional Unit Pembangkit. 4. Memimpin, membina, monitoring dan evaluasi kinerja operasi dan pemeliharaan, serta pengendalian energi primer Unit Pembangkit dengan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3KL) pada Unit Pembangkit. 5. Memimpin, membina dan mengoptimalkan kebijakan strategi dan operasional niaga tenaga listrik, pengelolaan dan evaluasi standar sistem manajemen energi, serta Jasa O&M atau AMC kepada Anak Perusahaan atau pihak lainnya pada Unit Pembangkit. 6. Melaksanakan dan bertindak sebagai pengguna barang/jasa dalam rangka pengadaan untuk kebutuhan dan proses bisnis Direktoratnya berdasarkan batasan kewenangan dan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perusahaan. 7. Mengoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional Bidang O&M Planning and Control IV, Bidang O&M Planning and Control V, Bidang NRE Power Generation O&M Planning and Control, Bidang Power Generation Engineering and Reliability II, Bidang Contract Management and Customer Relations II, Bidang Primary Energy Planning and Control II, UP, dan UMRO. 8. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, kepatuhan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (K3KL), tata kelola data dan keamanan informasi serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan. 9. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko pada Direktorat Operasi Pembangkit Gas. 10. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja pada Direktorat Operasi Pembangkit Gas.	1. Lead, develop, and optimize the management of the Generation Unit's operational and maintenance performance in accordance with the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Annual Budget and Operational (ABOP). 2. Lead, develop, and optimize the planning of the Generation Unit's operational and maintenance based on the priority of charges related to the Power Purchase Agreement (PPA). 3. Establish, develop, evaluate, and ensure the implementation of the Generation Unit's strategic and operational policies. 4. Lead, develop, monitor, and evaluate the performance of the Generation Unit's operational and maintenance, as well as primary energy control, by prioritizing Occupational Health and Safety, Security, and the Environment (K3KL) within the Generation Unit. 5. Lead, guide, and optimize the strategic and operational policies for electricity trading, management and evaluation of energy management systems, and provision of O&M or AMC services to subsidiaries or other parties within Power Generation Units. 6. Conduct and act as the user of goods and services in the context of procurement for the Directorate's needs and business processes, based on the limits of authority and the Company's applicable procurement provisions. 7. Coordinate the strategic and operational implementation of the O&M Planning and Control IV, O&M Planning and Control V, NRE Power Generation O&M Planning and Control, Power Generation Engineering and Reliability II, Contract Management and Customer Relations II, Primary Energy Planning and Control II, UP, and UMRO. 8. Ensure the implementation of corporate culture, compliance, Occupational Health and Safety, Security, and Environment (K3KL), data governance and information security, and the company's management systems in accordance with the company's vision and mission. 9. Ensure the implementation of risk identification and mitigation in the Gas Plant Operations Directorate. 10. Ensure the management and control of work programs, budgets, and monitoring of work program implementation in the Gas Plant Operations Directorate.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and responsibilities	
Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	1. Memimpin, membina dan mengoptimalkan pengelolaan kinerja operasi dan pemeliharaan Unit Pembangkit sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 2. Memimpin, membina dan mengoptimalkan perencanaan kebutuhan energi primer dan operasi dan pemeliharaan Unit Pembangkit berdasarkan prioritas pembebanan terkait Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). 3. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan terlaksananya kebijakan strategi dan operasional Unit Pembangkit. 4. Memimpin, membina, monitoring dan evaluasi kinerja operasi dan pemeliharaan, serta pengendalian energi primer Unit Pembangkit dengan mengutamakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada Unit Pembangkit. 5. Memimpin, membina dan mengoptimalkan kebijakan strategi dan operasional niaga tenaga listrik, pengelolaan dan evaluasi standar sistem manajemen energi, serta Jasa O&M atau AMC kepada Anak Perusahaan atau pihak lainnya pada Unit Pembangkit. 6. Melaksanakan dan bertindak sebagai pengguna barang/jasa dalam rangka pengadaan untuk kebutuhan dan proses bisnis Direktoratnya berdasarkan batasan kewenangan dan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perusahaan. 7. Mengoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional Bidang O&M Planning and Control I, Bidang O&M Planning and Control II, Bidang O&M Planning and Control III, Bidang Power Generation Reliability I, Bidang Contract Management and Customer Relations I, Bidang Primary Energy Planning and Control I, Unit Pembangkitan. 8. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, kepatuhan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3KL), tata kelola data dan keamanan informasi serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan. 9. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko pada Direktorat Operasi Pembangkit Batu bara. 10. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja serta kontrak sehubungan dengan kewenangannya dalam menjalankan tugas pokok pada Direktorat Operasi Pembangkit Batu bara.	1. Lead, develop, and optimize the management of the operational and maintenance performance of the Generation Unit in accordance with the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Annual Budget and Operational (ABOP).. 2. Lead, develop, and optimize the planning of primary energy requirements and the operation and maintenance of the Generation Unit based on the priority of loading related to the Power Purchase Agreement (PPA). 3. Establish, develop, evaluate, and ensure the implementation of strategic and operational policies for Power Generation Units. 4. Lead, guide, monitor, and evaluate operational and maintenance performance as well as primary energy control in Power Generation Units, prioritizing Health, Safety, Security, and Environment (K3KL). 5. Lead, guide, and optimize the strategic and operational policies for electricity trading, management and evaluation of energy management systems, and provision of O&M or AMC services to subsidiaries or other parties within Power Generation Units. 6. Conduct and act as the user of goods and services in the context of procurement for the Directorate's needs and business processes, based on the limits of authority and the Company's applicable procurement provisions. 7. Coordinating the strategic and operational implementation of the O&M Planning and Control I Sector, O&M Planning and Control II Sector, O&M Planning and Control III Sector, Power Generation Reliability I Sector, Contract Management and Customer Relations I Sector, Primary Energy Planning and Control I Sector, Generation Unit. 8. Ensure the implementation of corporate culture, compliance, Occupational Health and Safety, Security and Environment (K3KL), data governance and information security, and the company's management system in accordance with the company's vision and mission. 9. Ensure the implementation of risk identification and mitigation in the Coal Plant Operations Directorate. 10. Ensure the management and control of work programs, budgets, and monitoring of work program and contract implementation in accordance with its authority in carrying out its main duties in the Coal Plant Operations Directorate.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and responsibilities	
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	1. Memimpin, membina dan mengoptimalkan pengelolaan perencanaan strategis Perusahaan dan portofolio AP/PA sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	1. Lead, develop, and optimize the management of the Company's strategic planning and AP/PA portfolio as stipulated in the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Annual Budget and Operational (ABOP).
	2. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan penetapan perencanaan dan target Perusahaan jangka panjang/menengah dalam bentuk RJPP serta mengoordinasikan penyusunan Rencana Jangka Panjang Unit (RJPU) di seluruh Unit Kerja Perusahaan.	2. Establish, develop, evaluate, and ensure the establishment of long-term/medium-term Company planning and targets in the form of the RJPP and coordinate the preparation of Long-Term Unit Plans (RJPU) across all Company Work Units.
	3. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan terlaksananya kebijakan strategi dan operasional manajemen investasi dan portofolio bisnis Perusahaan dan AP/PA,	3. Establish, develop, evaluate, and ensure the implementation of strategic and operational policies on investment and business portfolio management for the Company and Subsidiaries/Affiliates.
	4. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan terlaksananya kebijakan strategi dan operasional bisnis pengembangan pembangkitan Independent Power Producer (IPP) dan non IPP pada Energi Baru Terbarukan (EBT) dan thermal.	4. Establish, develop, evaluate, and ensure the implementation of strategic and operational policies for IPP and non-IPP generation business development in renewable and thermal energy.
	5. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan terlaksananya kebijakan strategi dan operasional pengembangan bisnis derivatif pembangkit.	5. Establish, develop, evaluate, and ensure the implementation of strategic and operational policies for the development of the power generation derivative business.
	6. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan terlaksananya kebijakan strategi dan operasional pengelolaan manajemen kinerja Perusahaan sesuai standar kinerja unggul yang selaras dengan RJPP, RKAP dan arahan dari PT PLN (Persero).	6. Establish, develop, evaluate, and ensure the implementation of strategic and operational policies for the Company's performance management in accordance with superior performance standards aligned with the RJPP, ABOP, and directives from PT PLN (Persero).
	7. Melaksanakan dan bertindak sebagai pengguna barang/jasa dalam rangka pengadaan untuk kebutuhan dan proses bisnis Direktoratnya berdasarkan batasan kewenangan dan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perusahaan.	7. Implement and act as a user of goods/services in procurement for the needs and business processes of their Directorate based on the limits of authority and applicable procurement provisions within the Company.
	8. Mengoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional Bidang Corporate Planning and Sustainability, Bidang Portfolio and Subsidiaries Management, Bidang Generation Business Development I, Bidang Generation Business Development II, Bidang Generation Derivative Business Development, Bidang Corporate Performance dan UIP.	8. Coordinate the strategic and operational implementation of the Corporate Planning and Sustainability Division, Portfolio and Subsidiaries Management Division, Generation Business Development I Division, Generation Business Development II Division, Generation Derivative Business Development Division, Corporate Performance Division, and UIP Division.
	9. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, kepatuhan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (K3KL), tata kelola data dan keamanan informasi serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan.	9. Ensuring the implementation of Company culture, compliance, Occupational Health and Safety, Security and Environment (K3KL), data governance and information security as well as management systems implemented by the company in accordance with the Company's vision and mission.
	10. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko pada Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga.	10. Ensure the identification and mitigation of risks within the Director of Business Development and Commerce.
	11. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja pada Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga.	11. Ensure the management and control of work programs, budgets, and monitoring of work program realization within the Director of Business Development and Commerce.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and responsibilities	
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	1. Memimpin, membina dan mengoptimalkan pengembangan sistem keuangan, kebijakan perbendaharaan, kebijakan dan strategi pengelolaan akuntansi termasuk pengembangan sistem akuntansi, serta perencanaan strategis pengembangan, kebijakan, prosedur dan tata kelola teknologi informasi.	1. Leading, guiding, and optimizing the development of financial systems, treasury policies, accounting management policies and strategies—including accounting system development—and the strategic planning of information technology development, policies, procedures, and governance.
	2. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pendanaan dan kebutuhan pendanaan Perusahaan dan Anak Perusahaan, serta penagihan piutang dan pengelolaan debt and equity sebagai peluang pendanaan untuk pengembangan aset Perusahaan.	2. Establishing, developing, evaluating, and ensuring the strategy for planning, implementation, and control of funding policies and funding requirements for the Company and its Subsidiaries, as well as accounts receivable collection and the management of debt and equity as funding opportunities for asset development.
	3. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi kebijakan, pedoman penyusunan dan koordinasi penyusunan RKAP serta konsolidasi dengan Unit Kerja dan Anak Perusahaan, identifikasi isu strategis dan target utama Perusahaan dalam RKAP, monitoring dan pengendalian pencapaian RKAP, prioritisasi dan ketepatan alokasi anggaran serta verifikasi arus kas penerimaan dan pengeluaran sesuai RKAP.	3. Establishing, developing, evaluating, and ensuring the strategy for policies and guidelines, as well as coordination in the preparation of the Corporate Annual Budget and Operational (ABOP), including consolidation with Work Units and Subsidiaries, identification of strategic issues and key targets in the ABOP, monitoring and control of ABOP achievement, prioritization and accuracy of budget allocation, and verification of cash inflows and outflows in accordance with the ABOP.
	4. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi pelaksanaan verifikasi administrasi keuangan, strategi pengelolaan operasional perbendaharaan, strategi pengelolaan manajemen kas dan likuiditas perusahaan, strategi pengelolaan penerbitan dan pendistribusian invoice, dan strategi pengelolaan pendapatan dan penerimaan piutang tertagih serta *revenue assurance system*.	4. Establishing, developing, evaluating, and ensuring strategies for financial administration verification, treasury operations management, corporate cash and liquidity management, invoice issuance and distribution, as well as management of revenue and collection of receivables, including the implementation of the revenue assurance system.
	5. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi pemanfaatan non-cash loan dari PT PLN (Persero) dan pengurusan jaminan Bank serta pengelolaan dan administrasi perpajakan.	5. Establishing, developing, evaluating, and ensuring strategies for the utilization of non-cash loans from PT PLN (Persero), the administration of bank guarantees, and the management and administration of taxation.
	6. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi pengelolaan, penyusunan kajian dan ketersediaan laporan keuangan, penyempurnaan sistem akuntansi, komponen biaya penjualan tenaga listrik dan bisnis derivatif pembangkitan, kebijakan akuntansi dan asuransi aset serta pengembangan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR).	6. Establishing, developing, evaluating, and ensuring strategies for managing financial reporting, preparation of financial reviews and reports, refinement of accounting systems, cost components for electricity sales and generation derivative businesses, accounting and asset insurance policies, and the development of Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR).
	7. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi penyusunan dan pelaksanaan architecture solution dan business case layanan dan infrastruktur teknologi informasi.	7. Establishing, developing, evaluating, and ensuring strategies for preparing and implementing IT architecture solutions and business cases related to information technology services and infrastructure.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and responsibilities	
	8. Memastikan strategi kebijakan, pengelolaan dan *monitoring* sistem manajemen risiko dan *business continuity management* untuk meningkatkan pencapaian *maturity level Enterprise Risk Management* (ERM) Perusahaan dan Unit Kerja.	8. Ensuring policy strategies, management, and monitoring of risk management systems and business continuity management to enhance the maturity level of the Company's and Work Units' Enterprise Risk Management (ERM).
	9. Memastikan strategi pengelolaan, monitoring dan pelaporan risiko strategis dan Korporat.	9. Ensuring strategies for the management, monitoring, and reporting of strategic and corporate risks.
	10. Memastikan strategi pengelolaan dan pelaksanaan pemberian masukan pemetaan risiko pada Unit Kerja secara berkala serta peran sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	10. Ensuring strategies for managing and implementing risk mapping inputs for Work Units on a periodic basis, as well as the role as the Gratification Control Unit (UPG) and monitoring of State Official Wealth Report (LHKPN) submissions.
	11. Memastikan strategi pengelolaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan risiko potensi kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan, penyuapan serta kepatuhan terhadap seluruh regulasi, perizinan baik perizinan internal maupun eksternal (*vendor*) dan sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).	11. Ensuring strategies for managing, monitoring, and evaluating fraud risk, conflicts of interest, bribery, and compliance with all applicable regulations, internal and external licensing (including vendors), and Human Capital competency certifications.
	12. Memastikan strategi pengelolaan, *monitoring*, dan evaluasi prosedur kepatuhan (*compliance procedure*), Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).	12. Ensuring strategies for managing, monitoring, and evaluating compliance procedures, the Whistleblowing System, and the Anti-Bribery Management System (SMAP).
	13. Memastikan strategi pengelolaan dan evaluasi strategi budaya kepatuhan serta strategi pelaksanaan peran sebagai *probity advisor* dalam proses pengadaan barang/jasa.	13. Ensuring the management and evaluation of compliance culture strategies and the implementation of the role as probity advisor in procurement processes.
	14. Mengoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional Bidang Corporate Budgeting and Finance, Bidang Treasury and Tax, Bidang Accounting and Insurance, Bidang Information Technology and Digital, dan Bidang Risk Management and Compliance.	14. Coordinating the strategic and operational implementation of Corporate Finance, Treasury and Tax, Accounting and Insurance, Information and Digital Technology, and Risk Management and Compliance divisions.
	15. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, kepatuhan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (K3KL), tata kelola data dan keamanan informasi serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan.	15. Ensuring the implementation of the Company's culture, compliance, Occupational Health and Safety, Security, and Environment (K3KL), as well as management systems in alignment with the Company's vision and mission.
	16. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko pada Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko.	16. Ensuring the implementation of risk identification and mitigation within the Directorate of Finance and Risk Management
	17. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja pada Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko.	17. Ensuring the management and control of work programs, budgets, and the monitoring of work program realization within the Finance Directorate.
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	1. Memimpin, membina, dan mengoptimalkan kebijakan pengelolaan human capital dan pengembangan organisasi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RJPP dan RKAP.	1. Leading, guiding, and optimizing human capital management policies and organizational development to achieve the targets set out in the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and ABOP.
	2. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi, dan memastikan strategi penyusunan, evaluasi, dan pengendalian anggaran biaya kepegawaian, kebutuhan human capital jangka pendek dan jangka panjang, serta evaluasi struktur organisasi dan formasi tenaga kerja.	2. Establishing, developing, evaluating, and ensuring strategies for the preparation, evaluation, and control of personnel cost budgets, short- and long-term human capital needs, and evaluation of organizational structures and workforce formations.
	3. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi, dan memastikan strategi pengelolaan implementasi rekrutmen, perencanaan karir dan kaderisasi karyawan, administrasi karyawan, fasilitas kesejahteraan karyawan, sistem manajemen kinerja karyawan, serta internalisasi budaya Perusahaan dan pencapaian kinerja Perusahaan.	3. Establishing, developing, evaluating, and ensuring strategies for managing recruitment implementation, career planning and employee succession, employee administration, employee welfare facilities, employee performance management systems, and internalization of the Company's culture and performance achievement.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and responsibilities	
	4. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan proses penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AP dan PA.	4. Establishing, developing, evaluating, and ensuring the process of appointing members of the Boards of Directors and Commissioners of Subsidiaries and Associated Companies.
	5. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi, dan memastikan strategi kebijakan, pedoman dan pengelolaan serta implementasi program strategis dan kegiatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3KL), serta pelaporan Environmental, Social and Governance (ESG) stream Lingkungan.	5. Establishing, developing, evaluating, and ensuring strategies, guidelines, and management of strategic programs and activities in Occupational Health and Safety (K3), Security and Environment, and environmental stream reporting within the Environmental, Social, and Governance (ESG) framework.
	6. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi, memastikan dan mengkoordinasikan strategi pengelolaan fasilitas, pendayagunaan aset, perizinan aset, serta anggaran administrasi Perusahaan.	6. Establishing, developing, evaluating, ensuring, and coordinating strategies for facility management, asset utilization, asset licensing, and the Company's administrative budget.
	7. Melaksanakan dan bertindak sebagai pengguna barang/jasa dalam rangka pengadaan untuk kebutuhan dan proses bisnis Direktoratnya berdasarkan batasan kewenangan dan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perusahaan.	7. Conducting and acting as the user of goods and services in the context of procurement for the Directorate's needs and business processes, based on the limits of authority and the Company's applicable procurement provisions.
	8. Mengoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional Bidang Human Capital Strategy, Bidang Human Capital Development, Bidang Human Capital Services, Bidang Health, Safety, Security and Environment, dan Bidang General Affairs.	8. Coordinating the strategic and operational implementation of Human Capital Strategy, Human Capital Development, Human Capital Services, Health, Safety, Security and Environment, General Affairs, and PJB Academy Unit.
	9. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, kepatuhan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (K3KL), tata kelola data dan keamanan informasi serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan.	9. Ensuring the implementation of the Company's culture, compliance, Occupational Health and Safety, Security, and Environment (K3KL), as well as management systems aligned with the Company's vision and mission.
	10. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko pada Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi.	10. Ensuring the implementation of risk identification and mitigation within the Directorate of Human Capital and Administration Management.
	11. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja pada Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi.	11. Ensuring the management and control of work programs, budgets, and the monitoring of work program realization within the Director of Human Capital Management and Administration.

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan
Statement of Independence and Potential Conflicts of Interest

Untuk memastikan pengelolaan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab, Perusahaan mendorong Direksi menjaga independensi dan menghindari benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. Tindakan Direksi harus semata-mata untuk kepentingan terbaik Perusahaan, dengan menjunjung integritas dan etika tata kelola.

To ensure professional, transparent, and responsible management, the Company encourages the Board of Directors to maintain independence and avoid conflicts of interest in every decision-making process. The actions of the Board of Directors must be solely in the best interest of the Company, upholding integrity and governance ethics.

Sebagai bentuk komitmen, setiap anggota Direksi Perusahaan wajib menandatangani Pakta Integritas dan melaporkan kepemilikan saham pribadi maupun keluarga di PLN Nusantara Power dan perusahaan

As a form of commitment, every member of the Company's Board of Directors is required to sign the Integrity Pact and report personal and family share ownership in PLN Nusantara Power and other

lain secara berkala. Hal ini menunjukkan pelaksanaan tugas secara independen, bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau pihak lain. Setiap anggota Direksi juga menyampaikan pernyataan independensi yang menyatakan bahwa:

1. Akan melaksanakan tugas dan wewenang maupun pengembangan karir serta mengambil keputusan dalam keadaan mandiri, tidak berada di bawah tekanan dan/atau bebas dari pengaruh maupun intervensi dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas pada intervensi dari partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*independency*).
2. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya oleh karenanya tidak akan menyalahgunakan kewenangan jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan pihak manapun termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan pribadi, partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*duty care and loyalty*).
3. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan memanfaatkan posisi dan menyalahgunakan jabatan pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait, atau pihak yang terafiliasi, partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*conflict of interest*) yang menimbulkan risiko *fraud*.
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik yang secara langsung maupun tidak langsung dan sanggup menjalankan perusahaan dengan berintegritas dan berpegang teguh pada prinsip tidak akan meminta, tidak akan menawarkan/tidak menjanjikan untuk memberi/menerima hadiah, upeti, suap, sogok, gratifikasi apapun dan/atau bentuk imbalan lainnya dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan menjadi hak secara sah dan secara hukum dari pihak manapun.
5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam penetapan harga pembelian, pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan.

companies periodically. It demonstrates the execution of duties independently, free from the influence of personal interests or other parties. Each member of the Board of Directors also submits a statement of independence stating that:

1. They will perform their duties, exercise their authority, and pursue career development and decision-making independently, free from pressure and/or influence or intervention from any party, including but not limited to political parties, interest groups, or particular affiliations (independency).
2. They will carry out their duties and responsibilities and make decisions by prioritizing the Company's interests above all else and will not misuse their authority—either directly or indirectly—for the benefit of any party, including but not limited to personal interests, political parties, interest groups, or specific affiliations (duty of care and loyalty).
3. In carrying out their duties and authorities and in making decisions, they shall not use their position or misuse their office within the Company, either directly or indirectly, for personal interests or purposes, for their own benefit, or to benefit related parties, affiliated parties, political parties, certain groups, or particular interests, in a manner that may give rise to a conflict of interest and increase the risk of fraud.
4. In carrying out their duties and authorities and in making decisions, they shall not engage in corrupt, collusive, or nepotistic practices (KKN), whether directly or indirectly, and shall conduct the Company's business with integrity. They shall adhere to the principle of neither requesting, offering, promising, giving, nor accepting any gifts, gratuities, bribes, kickbacks, facilitation payments, or any other form of remuneration, whether monetary or non-monetary, that is not legally and rightfully due to them from any party.
5. In carrying out their duties and authorities and in making decisions, they shall not engage in any actions that may result in unreasonable procurement pricing, wasteful expenditures, or financial leakage within the Company.

6. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan pemahaman/ penguasaan yang cukup tentang berbagai ketentuan dan peraturan yang terkait (*prudent person role*), dan mematuhi serta melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*duly abiding the laws*).
7. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan serta pelanggaran sehubungan dengan transaksi kesempatan perusahaan (*corporate opportunity*).
8. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan pelanggaran sehubungan dengan transaksi dengan perusahaan yang bersangkutan, baik yang dilaksanakan oleh pribadi atau secara tidak langsung melalui anggota keluarga atau keluarga dekat (*self dealing*).
9. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang dibantu oleh orang dalam (*insider information*).

6. They will carry out their responsibilities and decisions based on adequate knowledge and understanding of applicable laws and regulations (prudent person role), and they will fully comply with all prevailing laws and regulations (duly abiding the laws).
7. In carrying out duties and authorities and in making decisions, they will not make transactional decisions that contain conflicts of interest and violations in connection with corporate opportunity transactions.
8. In carrying out duties and authorities and in making decisions, they will not commit violations in connection with transactions with the company concerned, whether carried out personally or indirectly through family members or close relatives (self-dealing).
9. In carrying out duties and authorities and in making decisions, they will not commit violations in connection with insider-assisted transactions (insider information).

Selama tahun 2025, anggota Direksi tidak menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Seluruh anggota juga menegaskan independensinya melalui Pakta Integritas yang ditandatangani saat pengangkatan dan diperbarui setiap awal tahun.

During 2025, members of the Board of Directors did not face situations that could potentially lead to conflicts of interest in decision-making. All members also affirm their independence through the Integrity Pact signed upon their appointment and renewed at the beginning of each year.

Penandatanganan Pakta Integritas Direksi
Signing of the Board of Directors Integrity Pact

Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Signing Date
Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director	• 28 Februari 2025 February 28, 2025 • 11 Agustus 2025 August 11, 2025
Rachmanoe Indarto[1]	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	28 Februari 2025 February 28, 2025
M. Irwansyah Putra[2]	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	11 Agustus 2025 August 11, 2025
Komang Parmita	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	• 28 Februari 2025 February 28, 2025 • 11 Agustus 2025 August 11, 2025
Teguh Widhi Harsono[2]	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	11 Agustus 2025 August 11, 2025
Dwi Hartono	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business and Commercial Development	• 28 Februari 2025 February 28, 2025 • 11 Agustus 2025 August 11, 2025
TB Ari Wibawa Mukti[2]	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	11 Agustus 2025 August 11, 2025

Keterangan:
1. Efektif menjabat sebagai Direktur Perusahaan sampai dengan tanggal 26 Juni 2025
2. Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak tanggal tanggal 26 Juni 2025

Remarks:
1. Served as the Company's Director until June 26, 2025
2. Served as the Company's Director since June 26, 2025

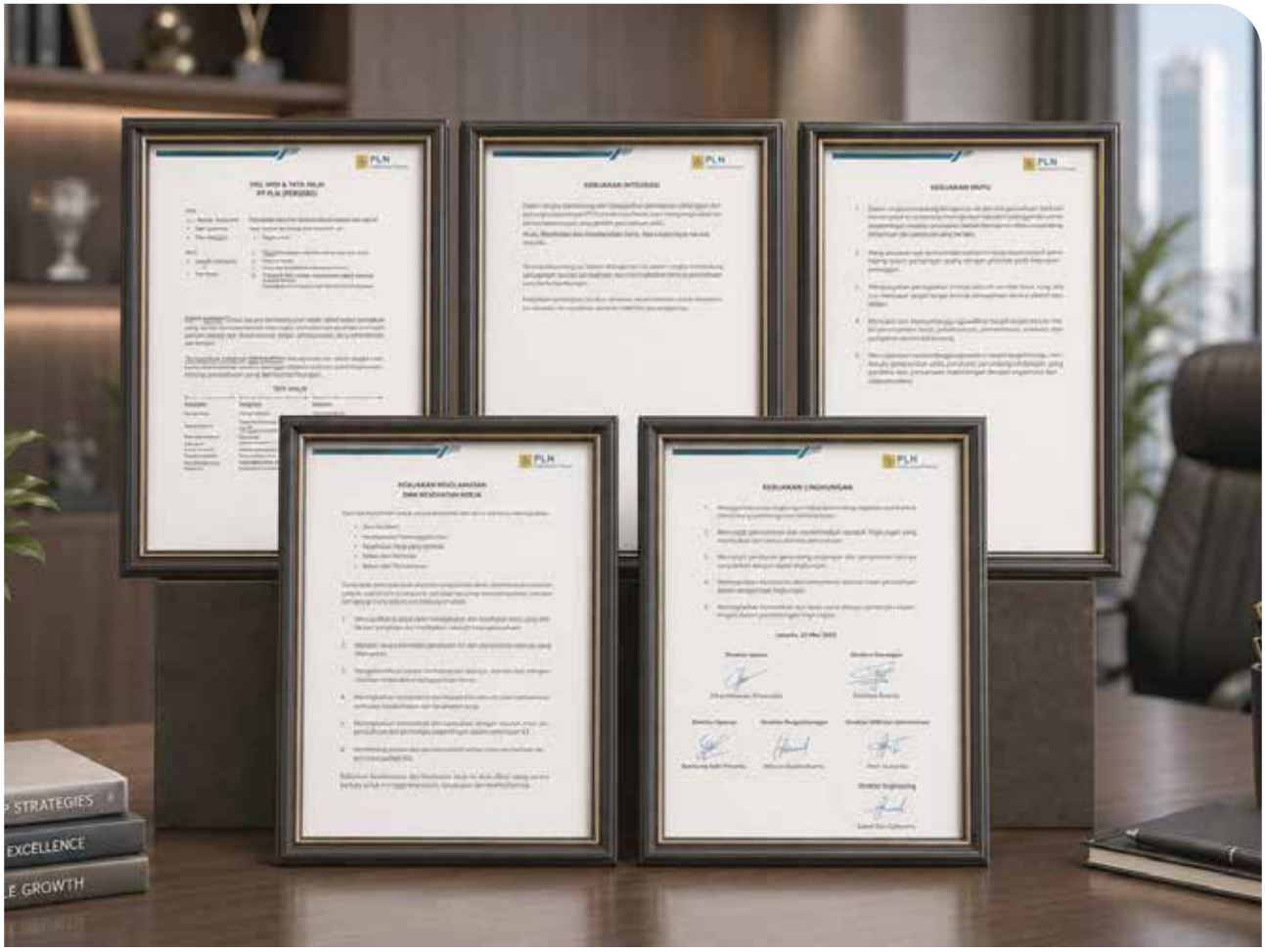

Rangkap Jabatan Anggota Direksi
Concurrent Positions by Members of the Board of Directors

Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi Direksi tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board of Directors* (BoD *Manual*). Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggota Direksi pada BUMN dan badan usaha lainnya;
2. Anggota Dewan Komisaris pada BUMN dan badan usaha lainnya;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

The provisions regarding the prohibition of concurrent positions for the Board of Directors are stated in the Company's Articles of Association and th BoD Manual. The Board of Directors is prohibited from holding concurrent positions, with the following details:

1. Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises and other business entities;
2. Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises and other business entities;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
4. Other positions in accordance with statutory provisions;

5. Pengurus partai politik, pengurus dan/atau anggota legislatif atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
7. Calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

5. Political party administrators, administrators and/or members of the legislature, or regional heads/deputy regional heads;
6. Other positions that may give rise to a conflict of interest; and/or
7. Legislative candidates or regional head/deputy regional head candidates.

Hubungan Afiliasi dan Kepemilikan Saham Anggota Direksi
Affiliation and Share Ownership of Members of the Board of Directors

Perusahaan berkomitmen mencegah benturan kepentingan serta menjaga independensi, integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan strategis dengan memantau hubungan afiliasi anggota Direksi. Hubungan afiliasi ini meliputi hubungan keluarga dan/atau keuangan antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris, sesama Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama atau Pengendali. Informasi lebih lanjut mengenai hubungan afiliasi anggota Direksi selama periode tersebut disajikan sebagai berikut:

The Company is committed to preventing conflicts of interest and maintaining independence, integrity, transparency, and accountability in strategic decision-making by monitoring the affiliated relationships of the Board of Directors members. These affiliate relationships include family and/or financial relationships between members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, fellow Directors, or with the major or Controlling Shareholders. Further information regarding the affiliation of the Board of Directors during the period is available as follows:

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi
Affiliate Relationship of Board of Directors Members

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Rachmanoe Indarto[1]	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
M. Irwansyah Putra[2]	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Komang Parmita	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Teguh Widhi Harsono[2]	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Dwi Hartono	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business and Commercial Development	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
TB Ari Wibawa Mukti[2]	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Keterangan:
1. Efektif menjabat sebagai Direktur Perusahaan sampai dengan tanggal 26 Juni 2025
2. Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak tanggal tanggal 26 Juni 2025

Remarks:
1. Served as the Company's Director until June 26, 2025
2. Served as the Company's Director since June 26, 2025

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain yang dilarang sesuai ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Throughout 2025, none of the members of the Board of Directors had any affiliations with other companies that were prohibited under the Company's internal provisions and laws and regulations.

Anggota Direksi juga secara berkala melaporkan kepemilikan sahamnya baik atas nama pribadi maupun keluarga pada Perusahaan dan/atau perusahaan lainnya untuk dicatat dalam Daftar Khusus. Kepemilikan saham Anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Members of the Board of Directors periodically report their share ownership, both personally and on behalf of their family members, in the Company and/or other companies for recording in the Special Register. The share ownership of the Board members who served throughout 2025 is as follows:

Kepemilikan Saham Anggota Direksi beserta keluarga
Share Ownership of Board of Directors and their families

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Oleh Pribadi Pada Share Ownership by Individuals in		Kepemilikan Saham Oleh Keluarga Pada Share Ownership by Families in	
		Perusahaan Companies	Perusahaan Lain Other Companies	Perusahaan Companies	Other Companies
Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director	-	✓	-	✓
Rachmanoe Indarto[1]	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	-	-	-	-
M. Irwansyah Putra[2]	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	-	-	-	-
Komang Parmita	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	-	-	-	-
Teguh Widhi Harsono[2]	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	-	-	-	-
Dwi Hartono	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business and Commercial Development	-	-	-	-
TB Ari Wibawa Mukti[2]	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	-	✓	-	✓

Keterangan:
1. Efektif menjabat sebagai Direktur Perusahaan sampai dengan tanggal 26 Juni 2025
2. Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak tanggal tanggal 26 Juni 2025

Remarks:
1. Served as the Company's Director until June 26, 2025
2. Served as the Company's Director since June 26, 2025

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Execution of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi secara konsisten mengacu pada tujuan strategis yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan serta Key Performance Indicators (KPI) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja.

Direksi melaksanakan berbagai program kerja yang mencakup manajemen organisasi, efisiensi operasional, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan produk dan layanan berkelanjutan. Selain itu, Direksi juga aktif mendorong inovasi dan penerapan teknologi untuk memperkuat daya saing Perusahaan di tengah dinamika industri energi yang terus berkembang. Berikut adalah inisiatif yang telah diimplementasikan Direksi sepanjang tahun 2025 untuk mendukung pencapaian target RKAP dan KPI:

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors consistently refers to the strategic objectives outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP). Subsequently, these objectives are detailed in the Annual Budget and Operational (ABOP) and Key Performance Indicators (KPI) as benchmarks for performance achievement.

The Board of Directors implements various work programs that cover organizational management, operational efficiency, financial management, service quality improvement, as well as the development of sustainable products and services. In addition, they are actively promoting innovation and the application of technology to strengthen the Company's competitiveness amidst the ever-evolving dynamics of the energy industry. The following are the initiatives that the Board of Directors implemented throughout 2025 to achieve ABOP and KPI targets:

Inisiatif Upaya Pencapaian Target RKAP dan KPI di tahun 2025
Initiatives to Achieve ABOP and KPI Targets in 2025

Aspek Aspect	Program kerja Work program	
Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia Economic and Social Value	1. Monitoring EBITDA 2. Monitoring Efisiensi Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit 3. Mengukur *Return on Invested Capital* (ROIC) 4. Mengoptimalkan Kesiapan Pasokan Pembangkit 5. Memastikan Capaian Angka *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) PLTU & Non PLTU 6. Memastikan Capaian Angka *Equivalent Availabiltiy Factor* (EAF) PLTU 7. Memastikan Capaian Angka *Equivalent Availabiltiy Factor* (EAF) Non PLTU 8. Mengukur Tingkat *Specific Fuel Consumption* (SFC) Batubara 9. Mengukur Tingkat *Specific Fuel Consumption* (SFC) Gas 10. Mengukur Tingkat *Specific Fuel Consumption* (SFC) BBM 11. Mengimplementasikan Program Dedieselisasi 12. *Monitoring* EPC & *Project Completion* 13. *Advancing in Sustainable Development Goals* (SDGs)	1. Monitoring EBITDA 2. Monitoring Cost Efficiency of Power Generation Supply 3. Measuring Return on Invested Capital (ROIC) 4. Optimizing Power Plant Supply Readiness 5. Ensuring Achievement of Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) Targets for CFPP & Non-CFPP 6. Ensuring Achievement of Equivalent Availability Factor (EAF) Targets for CFPP 7. Ensuring Achievement of Equivalent Availability Factor (EAF) Targets for Non-CFPP 8. Measuring Specific Fuel Consumption (SFC) Levels for Coal 9. Measuring Specific Fuel Consumption (SFC) Levels for Gas 10. Measuring Specific Fuel Consumption (SFC) Levels for Fuel 11. Implementing Dedieselization Program 12. Monitoring EPC & Project Completion 13. Advancing in Sustainable Development Goals (SDGs)
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	1. Meningkatkan Pendapatan dari luar PLN Grup (*beyond* kWh) & Laba Asosiasi 2. Mengoptimalkan Sinergi Antar Sinergi Antar *Sub Holding*, Anak Perusahaan Lain & Pusharlis	1. Increasing Revenue outside PLN Grup (beyond kWh) & Associate Profit 2. Optimizing Synergy Among Sub-Holdings, Other Subsidiaries, and Pusharlis
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	1. Mengimplementasikan *Digital Power Plant* 2. Mengukur *Maturity Level* EAM Pembangkitan 3. Memastikan Dukungan *Value Creation* 4. *Monitoring* Umur Persediaan Batubara	1. Implementing Digital Power Plant 2. Measuring EAM Maturity Level of Power Generator 3. Ensuring Value Creation Support 4. Monitoring Coal Inventory Age

Aspek Aspect	Program kerja Work program	
Peningkatan Investasi Energize Investment	1. Mengukur *Carbon Emission Reduction* 2. Mengendalikan Penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2025	1. Measuring Carbon Emission Reduction 2. Managing the Use of the Investment Budget according to the 2025 ABOP
Pengembangan Talenta Unleash Talent	1. Mengukur *Talent Diversity* (*Millenial, Women*) 2. Mengukur *Human Capital Readiness* (HCR) & *Organizational Capital Readiness* (OCR) dan Produktivitas Pegawai 3. Mengukur *Lost Time Injury Frequency Rate*	1. Measuring Talent Diversity (Millenial, Women) 2. Measuring Human Capital Readiness (HCR) & Organizational Capital Readiness (OCR) and Employee Productivity 3. Measuring Lost Time Injury Frequency Rate
Aspek Kepatuhan Compliance Aspects	1. Mematuhi aspek *Good Corporate Governance*, kepatuhan HSSE, Auditor, *Reporting*, Busdev *Alignment*, PACA, *Critical Event*)	1. Complying with the Good Corporate Governance, HSSE Compliance, Auditor, Reporting, Busdev Alignment, PACA, Critical Event Aspects

Direksi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan arahan Pemegang Saham dan rekomendasi Dewan Komisaris dari RUPS. Tindak lanjut atas arahan dan rekomendasi tersebut sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The Board of Directors monitors the implementation of the Shareholders' directives and the Board of Commissioners' recommendations from the GMS. The follow-up on these directives and recommendations throughout 2025 is as follows:

Monitoring Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham dan Rekomendasi Dewan Komisaris
Monitoring Follow-up on Shareholders' Directives and Board of Commissioners' Recommendations

RUPS GMS	Arahan Pemegang Saham Shareholders' Direction				Rekomendasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Recommendation			
	Jumlah Total	Selesai Completed	Selesai Berkelanjutan Completed Ongoing	Proses Tindak Lanjut Follow-up Process	Jumlah Total	Selesai Completed	Selesai Berkelanjutan Completed Ongoing	Proses Tindak Lanjut Follow-up Process
LPT 2022 (13 Juni 2023) LPT 2022 (June 13, 2023)	32	2	16	14	19	3	12	4
RKAP 2024 (31 Januari 2024) 2024 ABOP (January 31, 2024)	56	44	11	1	5	2	3	0
LPT 2023 (28 Juni 2024) LPT 2023 (June 28, 2024)	45	19	26	0	18	3	15	0
RKAP 2025 (15 Januari 2025) 2025 ABOP (January 15, 2025)	65	34	31	0	20	8	11	1
LPT 2024 (19 Juni 2025) LPT 2024 (June 19, 2025)	Tidak ada arahan Pemegang Saham No instructions from Shareholders							
Total	**150**	**84**	**72**	**40**	**55**	**21**	**38**	**14**

Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

Rapat Direksi merupakan forum resmi untuk diskusi dan pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan secara berkala, minimal satu kali setiap bulan sesuai dengan ketentuan dalam BoD *Manual* dan *Board Manual*. Selain rapat rutin, rapat insidental juga dapat dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan berpengaruh langsung terhadap kelangsungan bisnis Perusahaan.

The Board of Directors meeting is an official forum for discussion and strategic decision-making held periodically, at least once a month, in accordance with the provisions in the BoD Manual and Board Manual. In addition to regular meetings, incidental meetings can be held to discuss urgent matters that directly impact the continuity of the Company's business.

Selain itu, Direksi menyelenggarakan Rapat Konsultasi yang melibatkan anggota Dewan Komisaris guna membahas berbagai aspek operasional, manajerial, dan keuangan perusahaan, serta mengikuti Rapat Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja dan pembahasan isu strategis utama.

Moreover, the Board of Directors holds Consultation Meetings involving members of the Board of Commissioners to discuss various operational, managerial, and financial aspects of the Company, as well as attend the Supervisory Board of Commissioners Meeting as part of the performance evaluation process and discussion of key strategic issues.

Penyampaian Undangan Rapat Direksi
Delivery of Board of Directors Meeting Invitations

Penyampaian undangan/panggilan rapat Direksi telah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam BOD Manual adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Selama tahun 2025 tidak terdapat keterlambatan penyampaian undangan/panggilan rapat kepada peserta rapat Direksi.

The delivery of invitations/calls for Board of Directors meetings has complied with the policy stipulated in the BoD Manual, which requires invitations to be sent no later than 3 (three) working days prior to the meeting, or within a shorter time frame if in urgent circumstances, excluding the date of the invitation and the meeting date itself. Throughout 2025, there were no delays in delivering meeting invitations to Board members.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi
Frequency and Level of Attendance of the BOD

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan sebanyak 43 kali Rapat Internal Direksi, 11 kali Rapat Pengawasan, dan 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Throughout 2025, the Board of Directors held 43 Internal Board Meetings, 11 Supervisory Meetings, and two General Meetings of Shareholders, with the following frequency and attendance levels:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal dan Rapat Pengawasan Tahun 2025
Frequency and Level of Attendance of the Board of Directors in Internal Meetings and Supervisory Meetings in 2025

Nama Name	Rapat Internal Internal Meetings			Rapat Pengawasan Supervisory Meetings		
	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Ruly Firmansyah	43	43	100%	11	11	100%
Rachmanoe Indarto[1]	16	16	100%	6	6	100%
M. Irwansyah Putra[2]	27	27	100%	6	6	100%
Komang Parmita	43	43	100%	11	9	81,82%
Teguh Widhi Harsono[2]	27	27	100%	6	6	100%
Dwi Hartono	43	43	100%	11	11	100%
TB Ari Wibawa Mukti[2]	27	27	100%	6	6	100%

Keterangan:
1. Efektif menjabat sebagai Direktur Perusahaan sampai dengan tanggal 26 Juni 2025
2. Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak tanggal tanggal 26 Juni 2025

Remarks:
1. Served as the Company's Director until June 26, 2025
2. Served as the Company's Director since June 26, 2025

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2025
Frequency and Attendance Level of the Board of Directors at the 2025 General Meeting of Shareholders

Tanggal Date	Agenda	Nama Direksi Name of Directors						
		Ruly Firmansyah	Rachmanoe Indarto[1]	M. Irwansyah Putra[2]	Komang Parmita	Teguh Widhi Harsono[2]	Dwi Hartono	TB Ari Wibawa Mukti[2]
30 Januari 2025 January 30, 2025	RUPS Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PLN Nusantara Power Tahun 2025 GMS Approval and Ratification of PT PLN Nusantara Power's Work Plan and Budget for 2025	√	√	-	√	-	√	-
19 Juni 2025 June 19, 2025	RUPS Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT PLN Nusantara Power Tahun Buku 2024 GMS Approval and Ratification of PT PLN Nusantara Power's Financial Report for the 2024 Fiscal Year	√	√	-	√	-	√	-

Keterangan:
1. Efektif menjabat sebagai Direktur Perusahaan sampai dengan tanggal 26 Juni 2025
2. Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak tanggal tanggal 26 Juni 2025

Remarks:
1. Served as the Company's Director until June 26, 2025
2. Served as the Company's Director since June 26, 2025

Rencana Rapat Direksi Tahun 2025
Board of Directors Meeting Plan for 2025

Sesuai dengan BOD *Manual*, Rapat Direksi diselenggarakan minimal sekali setiap bulan. Rencana rapat disusun sebelum tahun berjalan dengan menetapkan agenda yang terdiri dari agenda rutin dan non-rutin. Agenda rutin mencakup pembahasan Laporan Kondisi Pasar, Posisi Perusahaan, Laporan Kemajuan Proyek Strategis/Konstruksi, serta Laporan Manajemen. Sementara itu, agenda non-rutin meliputi topik strategis dan insidental yang tidak termasuk dalam agenda tetap, seperti laporan khusus kepada Direksi, permohonan persetujuan inisiatif tertentu, serta pembahasan arahan atau keputusan dari Dewan Komisaris maupun RUPS.

In accordance with the BoD Manual, Board of Directors meetings are held regularly at least once a month. The meeting schedule is prepared before the start of the year, establishing an agenda that includes routine and non-routine items. Routine agendas cover discussions on Market Condition Reports, Company Position, Progress Reports on Strategic Projects/Construction, and Management Reports. Non-routine agendas include strategic or incidental topics not included in the regular agenda, such as special reports to the Board, requests for approval of specific initiatives, or discussions on directives/decisions from the Board of Commissioners or the GMS.

Keputusan atau Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris
Decisions or Authorities of the Board of Directors Requiring Approval from the Board of Commissioners

Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris untuk:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun).
2. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan /atau kerjasama dengan badan usaha / pihak lain dengan ketentuan pekerjaan, kerjasama, kontrak atau kegiatan tersebut nilai per transaksinya melebihi 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perusahaan yang telah diaudit tahun buku terakhir. Pembatasan tersebut diberikan tanpa memperhatikan jangka waktu pelaksanaan kerjasama/kontrak/kegiatan dimaksud.
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang (lebih dari 1 (satu) tahun), kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris; Seluruh Pinjaman kepada anak perusahaan, termasuk pinjaman jangka pendek, dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Laporan Manajemen Triwulanan.

The following actions by the Board of Directors require prior written approval from the Board of Commissioners:

1. Pledging fixed assets as collateral for short-term credit withdrawals (up to 1 (one) year).
2. Entering into transactions, contracts, agreements, arrangements, and/or cooperation with other business entities or parties, where the value of each transaction exceeds 2% (two percent) and up to 10% (ten percent) of the Company's equity based on the latest audited financial statements, regardless of the duration of the collaboration/contract/activity.
3. Receiving or granting medium- to long-term loans (exceeding 1 (one) year), except for loans (whether payable or receivable) provided to subsidiaries. Any loans granted to subsidiaries shall be reported to the Board of Commissioners, while all loans to subsidiaries, including short-term loans, shall be reported to the Board of Commissioners through the Quarterly Management Report.

4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, tidak termasuk pengangkatan pejabatnya.
7. Melakukan perubahan pos anggaran maupun peruntukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan.
8. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patugan dan/atau anak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis.

Sepanjang tahun 2025, keputusan atau kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP) terkait Pelepasan Seluruh Kepemilikan Saham PT PLN NP Pada PT Prima Power Nusantara dan Pengalihan kepada PT Indonesia Connectivity Investasi (Iconvest), tanggal 10 Maret 2025.
2. Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025, Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan 2024, tanggal 11 Juni 2025.
3. Permohonan Pengesahan Dokumen Rencana Darurat (*Contingency Plan*) PT PLN Nusantara Power Tahun 2025, tanggal 17 Juni 2025.
4. Permohonan Persetujuan Perubahan Organisasi pada Bidang Business Development-Generation, Bidang Corporate Finance dan Bidang GCG, Secretary And Protocol Tahun 2025, tanggal 9 Juli 2025.
5. Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris PLN NP terkait Permohonan Persetujuan Penugasan dan Pagu Tambahan Modal Disetor (TMD) kepada Pemegang Saham untuk Pengembangan *Project* Y Nusantara, tanggal 31 Juli 2025.

4. Writing off bad debts and obsolete inventory from the books.
5. Disposing of movable fixed assets with a commonly accepted economic lifespan in the industry of up to 5 (five) years.
6. Establishing organizational structures one level below the Board of Directors, excluding the appointment of officials.
7. Making changes to budget items or allocations within the Annual Budget and Operational (ABOP) that has been established.
8. Proposing the Company's representative candidates for membership of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that do not meet significant contribution criteria to the Company and/or strategic value.

Throughout 2025, the decisions or authorities of the Board of Directors that required the approval of the Board of Commissioners in accordance with the Company's Articles of Association were as follows:

1. Request for a Written Response from the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power (PLN NP) regarding the Disposal of All Share Ownership of PT PLN NP in PT Prima Power Nusantara and the Transfer to PT Indonesia Connectivity Investasi (Iconvest), dated March 10, 2025.
2. Request for a Written Response from the Board of Commissioners regarding the Proposed Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2025, Bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners, and Employee Bonuses for 2024, dated June 11, 2025.
3. Request for Approval of the 2025 PT PLN Nusantara Power Contingency Plan Document, dated June 17, 2025.
4. Request for Approval of Organizational Changes in the Business Development-Generation, Corporate Finance, and GCG, Secretary and Protocol Divisions for 2025, dated July 9, 2025.
5. Request for a Written Response from the Board of Commissioners of PLN NP regarding the Request for Approval of Assignments and the Additional Paid-in Capital (TMD) to Shareholders for the Development of Project Y Nusantara, dated July 31, 2025.

6. Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris atas Revisi AI PLTGU Muara Karang, tanggal 27 Agustus 2025.
7. Permohonan Persetujuan Izin Baru atas Persetujuan Penghapusbukuan ATTB dan Material Hapus Umur Ekonomis Sampai Dnegan 5 (Lima) Tahun, tanggal 2 September 2025.
8. Permohonan Rekomendasi dan Persetujuan Izin Baru atas Persetujuan Penghapusbukuan ATTB Umur Ekonomis di Atas 5 (Lima) Tahun, tanggal 2 September 2025.
9. Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris atas Revisi AKI PLTA Jawa Bali (Kuota) Tersebar untuk PLTA Wado 50 MW, tanggal 5 September 2025.
10. Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris PLN NP atas Program Investasi, Revisi RKAP Tahun 2025, Penugasan, dan/atau Pendanaan/Tambahan Modal Disetor untuk Pengembangan Proyek P0 Dan P0', tanggal 11 September 2025.
11. Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris untuk Persetujuan Partnership IPP PLTU MT Kalselteng-3, tanggal 23 September 2025.
12. Permohonan Persetujuan Perubahan Organisasi pada Satuan Technology Development and Asset Management, Satuan Supply Chain Management, Satuan Corporate Law, Satuan Project Management dan Bidang Risk Management and Compliance Tahun 2025, tanggal 26 September 2025.
13. Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris Untuk Persetujuan Partnership IPP PLTGU Jawa-3, tanggal 29 September 2025.
14. Permohonan Konfirmasi Dewan Komisaris PT PLN NP atas Proyek PLTS Belitung 5 MW dan BESS 2,5 MWh, tanggal 21 Oktober 2025

.
15. Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris atas Revisi AKI PLTA Sulbagsel (Kuota) Tersebar (COD 2028) untuk PLTA Salu Uro 95 MW, tanggal 22 Oktober 2025.
16. Permohonan Rekomendasi dan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Usulan RKAP PT PLN Nusantara Power Tahun 2026, tanggal 22 Oktober 2025.
17. Permohonan Pengesahan Strategi Risiko PT PLN Nusantara Power Tahun 2026, tanggal 30 Oktober 2025.

6. Request for Approval of the Board of Commissioners for the Revision of the AI for the Muara Karang Combined Cycle Power Plant (PLTGU), dated August 27, 2025.
7. Request for Approval of a New Permit for the Approval of the Write-Off of ATTB and Material Write-Off with an Economic Life of Up to 5 (Five) Years, dated September 2, 2025.
8. Request for Recommendation and Approval of a New Permit for the Approval of the Write-Off of ATTB with an Economic Life of Above 5 (Five) Years, dated September 2, 2025.
9. Request for Approval of the Board of Commissioners for the Revision of the AKI for the Java-Bali Hydroelectric Power Plant (Quota) for the 50 MW Wado Hydroelectric Power Plant, dated September 5, 2025.
10. Request for Written Response from the PLN NP Board of Commissioners regarding the Investment Program, Revised 2025 Annual Budget and Operational (ABOP), Assignments, and/or Funding/ Additional Paid-in Capital for the Development of Projects P0 and P0', dated September 11, 2025.
11. Request for Written Response from the Board of Commissioners for Approval of the IPP Partnership for the MT Kalselteng-3 Steam Power Plant (PLTU), dated September 23, 2025.
12. Request for Approval of Organizational Changes in the Technology Development and Asset Management Unit, Supply Chain Management Unit, Corporate Law Unit, Project Management Unit, and Risk Management and Compliance Division in 2025, dated September 26, 2025.
13. Request for Written Response from the Board of Commissioners for Approval of the IPP Partnership for the Java-3 Combined Cycle Power Plant (CCPP), dated September 29, 2025.
14. Request for Confirmation from the Board of Commissioners of PT PLN NP for the 5 MW Belitung Solar Power Plant and 2.5 MWh BESS Projects, dated October 21, 2025.
15. Request for Approval of the Board of Commissioners for the Revision of the AKI for the Sulbagsel Hydroelectric Power Plant (Quota) Distributed (COD 2028) for the 95 MW Salu Uro Hydroelectric Power Plant, October 22, 2025.
16. Request for Recommendations and Written Responses from the Board of Commissioners on the Proposed 2026 Work Plan and Budget of PT PLN Nusantara Power, October 22, 2025.
17. Request for Approval of the 2026 Risk Strategy of PT PLN Nusantara Power, October 30, 2025.

Keputusan atau Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris

Decisions and Authorities of the Board of Directors Requiring GMS Approval Following a Written Response from the Board of Commissioners

Direksi hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan tertulis RUPS untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun).
2. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain, termasuk penambahan modal pada Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan.
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
6. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau avalist) dan jaminan lainnya (*Corporate Guarantee* dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan *Stanby Letter of Credit*/SBLC, *Letter of Credit*/LC yang timbul karena transaksi bisnis tetap mengacu pada ketentuan ayat 8 huruf b Pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan.
7. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan /atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dengan ketentuan pekerjaan, kerjasama, kontrak atau kegiatan tersebut nilai per transaksinya melebihi kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) huruf b Anggaran Dasar Perusahaan atau ditentukan lain oleh Anggaran Dasar dan/atau RUPS.
8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
10. Menetapkan blue print organisasi Perusahaan;
11. Menetapkan dan merubah logo Perusahaan;

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Directors may only take the following actions after obtaining a written response from the Board of Commissioners and written approval from the GMS:

1. Pledging fixed assets as collateral for medium- or long-term loans (exceeding one year).
2. Equity participation in other companies, including additional capital in subsidiaries and/or joint ventures.
3. Establishing subsidiaries and/or joint ventures.
4. Divesting capital in subsidiaries and/or joint ventures.
5. Merging, consolidating, acquiring, separating, or dissolving subsidiaries and/or joint ventures.
6. Binding the Company as a guarantor (borg or avalist) or through other guarantees (Corporate Guarantee or equivalent), except for the issuance of Standby Letters of Credit (SBLCs) or Letters of Credit (LCs) arising from regular business transactions, which are governed by Article 11 Paragraph 8(b) of the Company's Articles of Association.
7. Entering into transactions, contracts, agreements, or partnerships with other entities in which the value of each transaction exceeds the authority of the Board of Commissioners as stated in Article 11 Paragraph 8(b) of the Company's Articles of Association, or as otherwise determined by the Articles of Association or the GMS.
8. Waiving the collection of written-off bad debts.
9. Releasing or writing off the Company's fixed assets, except for movable fixed assets with a generally accepted economic life of up to five years in the industry.
10. Establishing the Company's organizational blueprint.
11. Determining or changing the Company's logo.

12. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan, yang belum ditetapkan dalam RKAP, termasuk melakukan perubahan RKAP, kecuali untuk perubahan pos anggaran maupun peruntukannya wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang berdampak bagi Perusahaan;
14. Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
15. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis.

Sepanjang tahun 2025, keputusan atau kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Persetujuan Penempatan Wakil PT PLN NP pada Anak Perusahaan, tanggal 3 Maret 2025.
2. Permohonan Persetujuan Penempatan Wakil PT PLN NP pada Perusahaan Afiliasi (PT KPJB dan PT BDSN), tanggal 28 Mei 2025.
3. Permohonan Persetujuan Penempatan Wakil PT PLN NP pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi (PT PLN NPS dan PT BPI), tanggal 11 Juni 2025.
4. Usulan Penggunaan Laba Bersih PT PLN Nusantara Power Tahun Buku 2024, tanggal 12 Juni 2025.
5. Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan PT. PLN Nusantara Power serta Anak Usaha Tahun Buku 2025, tanggal 12 Juni 2025.
6. Persetujuan atas Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2025, Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus Karyawan Tahun 2024, tanggal 13 Juni 2025.
7. Permohonan Persetujuan Pemegang Saham untuk Penetapan Mitra Strategis atas Rencana Pengembangan Proyek IPP PLTU MT Kalselteng-3, tanggal 30 Oktober 2025.

12. Taking actions described in Article 11 Paragraph 8 of the Company's Articles of Association that are not included in the ABOP, including amendments to the ABOP, except for changes in budget items or their allocations, which require approval from the Board of Commissioners.
13. Establishing foundations, organizations, or associations, whether directly or indirectly related to the Company and having an impact on the Company.
14. Charging the Company's fixed and routine expenses to support activities of such foundations, organizations, or associations.
15. Nominating the Company's representatives to serve as candidates for the Boards of Directors and Commissioners of joint ventures or subsidiaries that provide significant contributions or are considered strategic to the Company.

Throughout 2025, the decisions or authorities of the Board of Directors that required GMS approval after obtaining written responses from the Board of Commissioners were as follows:

1. Application for Approval of the Placement of a Representative of PT PLN NP in a Subsidiary, dated March 3, 2025.
2. Application for Approval of the Placement of a Representative of PT PLN NP in an Affiliated Company (PT KPJB and PT BDSN), dated May 28, 2025.
3. Application for Approval of the Placement of a Representative of PT PLN NP in a Subsidiary and Affiliated Company (PT PLN NPS and PT BPI), dated June 11, 2025.
4. Proposal for the Use of PT PLN Nusantara Power's Net Profit for the 2024 Fiscal Year, dated June 12, 2025.
5. Proposal for the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Financial Statements of PT. PLN Nusantara Power and its Subsidiaries for the 2025 Financial Year, June 12, 2025.
6. Approval of the Proposed Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2025, Bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners, and Employee Bonuses for 2024, June 13, 2025.
7. Request for Shareholder Approval for the Determination of a Strategic Partner for the MT Kalselteng-3 PLTU IPP Project Development Plan, dated October 30, 2025.

8. Permohonan Persetujuan Pemegang Saham untuk Penetapan Mitra Strategis atas Rencana Pengembangan Proyek PLTGU Jawa-3, tanggal 30 Oktober 2025.

8. Request for Shareholder Approval for the Determination of a Strategic Partner for the Java-3 Combined Cycle Power Plant Project Development Plan, dated October 30, 2025.

Pengembangan Kompetensi Direksi
Board of Directors Competency Development

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi, Perusahaan melaksanakan program pengembangan kompetensi dengan mengacu pada Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi (*Board of Directors Manual*) dan *Board Manual*. Sepanjang tahun 2025, anggota Direksi telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, yang rinciannya disajikan dalam tabel berikut:

In order to enhance the knowledge and competencies that support the duties and responsibilities of the Board of Directors, the Company implements a competency development program based on the Board of Directors Manual and Board Manual. Throughout 2025, members of the Board of Directors participated in various competency development activities, the details of which are presented in the following table:

Program Pengembangan Kompetensi Direksi
Board of Directors Competency Development Program

No.	Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Resource Person	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
1	Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director	Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* Qualified Risk Governance Professional Certification	1 Agustus 2025 August 1, 2025	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS), LSP MKS; *online*
2			*Vocal Improvement Training*	8 Agustus 2025 August 8, 2025	Sinergi Bicara, PLN NP Kantor Pusat Surabaya Synergy Talk, PLN NP Head Office Surabaya
3			CEO *Vision* & *Workshop* Rencana Strategis PLN PLN CEO Vision & Strategic Plan Workshop	8 Oktober 2025 October 8, 2025	PT PLN (Persero); Lokasi: Audtorium PLN PT PLN (Persero); Location: PLN Auditorium
4			*Workshop* Penyampaian Rencana Strategis Perusahaan BUMN & Anak Perusahaan BUMN Workshop on Submitting Strategic Plans for State-Owned Enterprises and Subsidiaries	24 Oktober 2025 October 24, 2025	Danantara; Wisma Danantara
5	Komang Parmita	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Coal Power Plant Operations	Seminar Pembekalan *Assessment* GCG, ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka PT PLN Nusantara Power - Penyelenggara GCG Assessment Briefing Seminar, ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) and Guidelines for Public Company Governance of PT PLN Nusantara Power - Organizer	17 Februari 2025 February 17, 2025	PT Multi Utama Indojasa; *online*

No.	Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Resource Person	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
6			Sertifikasi *Qualified Chief Risk Officer* Sertifikasi Qualified Chief Risk Officer	6 Agustus 2025 August 6, 2025	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS), *online*
7			*Vocal Improvement Training*	8 Agustus 2025 August 8, 2025	Sinergi Bicara, PLN NP Kantor Pusat Surabaya Synergy Talk, PLN NP Head Office Surabaya
8			Sertifikasi QCRO (*Qualified Chief Risk Officer*) QCRO Certification (Qualified Chief Risk Officer)	15 Agustus 2025 August 15, 2025	LSP MKS, Lokasi : *Online* LSP MKS, Location: Online
9	M.Irwansyah Putra	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations	Sertfikasi *Qualified Risk Governance Professional* Qualified Risk Governance Professional Certification	13 Desember 2025 December 13, 2025	LSP MKS, Lokasi : *Online* LSP MKS, Location: Online
10	Dwi Hartono	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	*Vocal Improvement Training*	8 Agustus 2025 August 8, 2025	Sinergi Bicara, PLN NP Kantor Pusat Surabaya Synergy Talk, PLN NP Head Office Surabaya
11			Sertifikasi *Qualified Chief Risk Officer* Qualified Chief Risk Officer Certification	15 Agustus 2025 August 15, 2025	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS), *online*
12	Teguh Widhi Harsono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	*Executive Workshop* Pengendalian Korupsi Efektif Menuju Tata Kelola BUMN Kompetitif Tahun 2025 Executive Workshop on Effective Corruption Control Towards Competitive State-Owned Enterprise Governance by 2025	19 November 2025 November 19, 2025	BPKP; Kantor Pusat BPKP BPKP; BPKP Head Office
13			*Chartered Accountant*	29 Oktober 2025 October 29, 2025	IAI; *online*
14			*Certified Integrity Officer*	15 Juli 2025 July 15, 2025	BNSP
15			*Vocal Improvement Training*	8 Agustus 2026 August 8, 2025	Sinergi Bicara; PLN NP Kantor Pusat Surabaya Synergy Talk; PLN NP Surabaya Head Office
16			CEO *Vision* & *Workshop* Rencana Strategis PLN PLN CEO Vision & Strategic Plan Workshop	9 Oktober 2025 October 9, 2025	PT PLN (Persero); Auditorium PLN PT PLN (Persero); Auditorium PLN
17			*Workshop* Strategi Pengendalian Internal Biaya RKAP Workshop on Internal Control Strategy for ABOP Costs	16-17 Agustus 2025 August 16-17, 2025	PT PLN (Persero); *online*

No.	Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Resource Person	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
18			*Workshop* Penyusunan *Profile Risk* - Strategi *Risk* 2026 NP dan *Alignment* dengan PLN Workshop on Risk Profile Preparation - 2026 NP Risk Strategy and Alignment with PLN	10 Juli 2025 July 10, 2025	PLN NP; *online*
19	TB Ari Wibawa Mukti	Direktur Manajemen Human Capital & Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	*Vocal Improvement Training*	8 Agustus 2026 August 8, 2025	Sinergi Bicara; PLN NP Kantor Pusat Surabaya Synergy Talk; PLN NP Surabaya Head Office
20			CEO *Development Program*	20 September 2025 September 20, 2025	bizniz.id, Lokasi : The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan bizniz.id, Location: The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan
21			*Workshop / Forum Group Discussion* (FGD) Hubungan Industrial PLN Group Semester II Tahun 2025 Workshop / Forum Group Discussion (FGD) on Industrial Relations of PLN Group Semester II 2025	9 Oktober 2025 October 9, 2025	PT PLN (Persero) - Lokasi : Graha Corpu PT PLN (Persero) Pusdiklat PT PLN (Persero) - Lokasi : Graha Corpu PT PLN (Persero) Pusdiklat
22			CEO Vision & *Workshop* Rencana Strategis PLN PLN CEO Vision & Strategic Plan Workshop	9 Oktober 2025 October 9, 2025	PT PLN (Persero) - Lokasi : Online PT PLN (Persero) - Location: Online
23			*Leaders Talk* dan *Workshop Sustainability* Tahun 2025 tema "*Culture Drives Execution*: Membangun Kepemimpinan Transformatif" Leaders Talk and Sustainability Workshop 2025 theme "Culture Drives Execution: Building Transformative Leadership"	21 November 2025 November 21, 2025	PT PLN (Persero) - Lokasi : Auditorium PT PLN (Persero) Kantor Pusat PT PLN (Persero) - Location: Auditorium PT PLN (Persero) Head Office
24			*Workshop* Direktorat Legal dan Manajemen *Human Capital* 2025 Tema "*Driving Continuous Tranformation for Sustainable Impact"* 2025 Legal Director and Human Capital Management Workshop: "Driving Continuous Transformation for Sustainable Impact"	23 - 25 November 2025 November 22-25, 2025	PT PLN (Persero) - Lokasi : Horison Resort Dieng PT PLN (Persero) - Location: Horison Resort Dieng
25			Sertifikasi QRGP QRGP Certification	18 Desember 2025 December 18, 2025	LSP MKS, Lokasi : Online LSP MKS, Location: Online

Program Pengenalan Direksi
Induction Program for the Board of Directors

Perusahaan memiliki kebijakan Program Induksi bagi anggota Direksi baru, sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi (*Board of Directors Manual*) dan *Board Manual*. Program ini meliputi presentasi, pertemuan, kunjungan ke Unit Perusahaan atau Anak Perusahaan, serta pengkajian dokumen atau kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab melaksanakan Program Induksi bagi Direksi yang baru diangkat. Pada tanggal 3 Juli 2025, program ini telah dilaksanakan untuk Sdr. M. Irwansyah Putra, Sdr. Teguh Widhi Harsono, dan Sdr. TB Ari Wibawa Mukti sebagai anggota Direksi baru, dengan materi pengenalan meliputi:

1. Profil Perusahaan
2. Rencana Jangka Panjang Perusahaan
3. Kinerja Perusahaan
4. *Good Corporate Governance* (GCG)

The Company has an Induction Program policy for new Board members, as outlined in the Board of Directors Manual and Board Manual. This program includes presentations, meetings, visits to Company Units or Subsidiaries, as well as document reviews or other activities that meet the Company's needs. The Corporate Secretary is responsible for implementing the Induction Program for newly appointed Directors. On July 3, 2025, this program was conducted for Mr. M. Irwansyah Putra, Mr. Teguh Widhi Harsono, and Mr. TB Ari Wibawa Mukti as new members of the Board of Directors, with the following orientation materials:

1. Company Profile
2. Company's Long-Term Plans
3. Company Performance
4. Good corporate Governance (GCG)

Penilaian Kinerja Komite dan Unit Kerja atau Organ Pendukung Tata Kelola dan Pengendalian Internal di Bawah Direksi
Performance Evaluation of Committees and Work Units or Governance and Internal Control Supporting Organs under the Board of Directors

Struktur organisasi PLN Nusantara Power saat ini dinilai memadai untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas Direksi, mengingat skala bisnis perusahaan. Sebagai bagian dari komitmen penerapan prinsip keberlanjutan, Direksi membentuk Komite Sustainability yang bertugas menjalankan dan mengembangkan inisiatif terkait. Direksi secara rutin mengevaluasi kinerja Komite *Sustainability* berdasarkan pencapaian target di setiap *workstream*. PLN NP juga memantau performa sustainability secara berkelanjutan, sejalan dengan upaya peningkatan manajemen risiko *Environmental, Social, Governance* (ESG) melalui pengukuran tingkat kematangan (*maturity level*) *sustainability*.

PLN Nusantara Power's organizational structure is currently deemed adequate to support the effectiveness of the Board of Directors' functions and duties, considering the scale of the Company's business. As part of the commitment to implementing sustainability principles, the Board of Directors established a Sustainability Committee tasked with executing and developing related initiatives. The Board of Directors regularly evaluates the performance of the Sustainability Committee based on the achievement of targets in each workstream. PLN NP also continuously monitors sustainability performance, in line with efforts to improve Environmental, Social, Governance (ESG) risk management through the measurement of sustainability maturity levels.

Selain itu, untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan pengendalian internal, Perusahaan memiliki sejumlah organ pendukung strategis, antara lain Sekretaris Perusahaan, Satuan Internal Audit, Satuan Corporate Legal, dan unit kerja lainnya. Setiap organ pendukung menjalankan tugas sesuai tanggung

In addition, to support the implementation of good corporate governance (GCG) and internal control, the Company has a number of strategic supporting organs, including the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Corporate Legal Unit, and other work units. Each supporting organ carries out its duties according to its responsibilities with reference to the key performance

jawabnya dengan acuan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator*) yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Penilaian efektivitas dan pencapaian kinerja organ pendukung dilakukan secara berkala oleh Direktur Utama, menggunakan parameter kelengkapan dan pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja. Evaluasi ini bertujuan memastikan seluruh organ pendukung berfungsi optimal dalam mendukung pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

indicators (KPIs) that have been determined and mutually agreed upon. Assessment of the effectiveness and performance achievement of supporting organs is carried out periodically by the President Director, using parameters of the completeness and implementation of the tasks of each work unit. This evaluation aims to ensure that all supporting organs function optimally in supporting the professional, transparent, and accountable management of the Company.

Penilaian Kinerja Direksi
Performance Assessment of the Board of Directors

Dalam upaya mendorong efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi secara rutin melakukan evaluasi pencapaian target sebagai bagian dari penilaian kinerja mandiri (*self-assessment*). Penilaian ini dilakukan setiap bulan dan secara menyeluruh pada akhir tahun buku, dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, Board Manual, dan BoD *Manual*. Evaluasi dilakukan baik secara individual maupun kolegial, berdasarkan pencapaian KPI dan realisasi RKAP, dan hasilnya disusun dalam laporan kinerja yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Pengawasan. Selain itu, Direksi secara berkala melaporkan manajemen, termasuk pencapaian program kerja, realisasi KPI korporat, dan KPI individu tiap anggota Direksi, baik triwulanan maupun tahunan, kepada Pemegang Saham.

In an effort to encourage the effectiveness of task and responsibility execution, the Board of Directors regularly conducts target achievement evaluations as part of the self-assessment performance evaluation. This assessment is conducted monthly and comprehensively at the end of the fiscal year, referring to the Company's Articles of Association, Board Manual, and BoD Manual. The evaluation is conducted both individually and collegially, based on KPI achievements and ABOP realizations, and the results are compiled into a performance report submitted to the Board of Commissioners through the Supervisory Meeting. In addition, the Board of Directors periodically reports on management, including the achievement of work programs, realization of corporate KPIs, and individual KPIs of each Board member, both quarterly and annually, to the Shareholders.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan melalui penilaian kinerja kolegial dan individual Direksi, yang didasarkan pada laporan manajemen dan realisasi KPI sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengevaluasi kinerja Direksi secara menyeluruh dengan merujuk pada berbagai dokumen kinerja, antara lain Laporan Keuangan Audit, Laporan Realisasi RKAP, Laporan Tahunan, realisasi KPI, serta penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The Board of Commissioners performs its supervisory function by evaluating collegial and individual performance of the Board of Directors, based on management reports and KPI realization as part of the accountability mechanism. Furthermore, the GMS thoroughly evaluates the performance of the Board of Directors by referring to various performance documents, including the Audited Financial Statements, ABOP Realization Report, Annual Report, KPI realization, and the implementation of Good Corporate Governance principles.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Direksi sebagai organ kolektif tercermin dari pencapaian KPI Korporat Tahun 2025, yang menjadi indikator utama pengukuran kinerja oleh RUPS. Adapun capaian KPI Korporat dan individu Direksi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The success of the Board of Directors' duties as a collective organ is reflected in the achievement of the 2025 Company's KPI, which serves as the main performance measurement indicator by the GMS. The achievements of the Corporate and individual KPIs of the Board of Directors in 2025 are as follows:

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2025
Criteria for the Board of Directors Performance Evaluation in 2025

No.	Jabatan Position	Kriteria Penilaian Assessment criteria	
1.	**Kolegial Direksi dan Direktur Utama** Board of Directors and President Director	**A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia** EBITDA, BPP Pembangkit, ROIC, Optimalisasi Kesiapan Pembangkit, EFOR PLTU & Non PLTU, EAF PLTU, EAF Non PLTU, SFC Batubara, SFC Gas, SFC BBM, Program Dedieselisasi, EPC & *Project Completion*, *Advancing in* SDGs. **B. Inovasi Model Bisnis** Pendapatan dari luar PLN Grup (*beyond* KWh) & Laba Asosiasi, Sinergi Antar Sub Holding, Anak Perusahaan Lain & Pusharlis **C. Kepemimpinan Teknologi** *Digital Power Plant*, *Maturity Level* EAM Pembangkitan, *Value Creation*, Umur Persediaan Batubara **D. Peningkatan Investasi** *Carbon Emission Reduction*, Pengendalian Penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2025 **E. Pengembangan Talenta** *Talent Diversity*, HCR & OCR dan Produktivitas Pegawai, *Lost Time Injury Frequency Rate* **F. Aspek Kepatuhan** *Compliance* (GCG, Kepatuhan HSSE, *Auditor*, *Reporting*, Busdev *Alignment*, PACA, *Critical Event*)	**A. Economic and Social Value for Indonesia** EBITDA, Power Plant Cost, ROIC, Optimizing Power Plant Readiness, EFOR of CFPP & Non-CFPP, EAF of CFPP, EAF of Non-CFPP, SFC of Coal, SFC of Gas, SFC of Fuel, Dedieselization Program, EPC & Project Completion, Advancing in SDGs. **B. Business Model Innovation** Revenue outside PLN Grup (beyond kWh) & Associate Profit, Synergy Among Sub-Holdings, Other Subsidiaries, and Pusharlis **C. Technology Leadership** Digital Power Plant, Generation EAM Maturity Level, Value Creation, Coal Inventory Age **D. Increased Investment** Carbon Emission Reduction, Control of Investment Budget Usage in accordance with 2025 ABOP **E. Talent Development** Talent Diversity, HCR & OCR and Employee Productivity, Lost Time Injury Frequency Rate **F. Compliance Aspects** Compliance (GCG, HSSE Compliance, Auditor, Reporting, Busdev Alignment, PACA, Critical Event)
2.	**Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara** Director of Coal Power Plant Operations	**A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia** EBITDA, BPP Pembangkit, ROIC, Optimalisasi Kesiapan Pembangkit, EFOR PLTU & Non PLTU, EAF PLTU, SFC Batubara, Program Dedieselisasi, *Advancing in* SDGs. **B. Inovasi Model Bisnis** Pendapatan dari luar PLN Grup (*beyond* KWh) & Laba Asosiasi, Sinergi Antar *Sub Holding*, Anak Perusahaan Lain & Pusharlis **C. Kepemimpinan Teknologi** *Digital Power Plant*, *Maturity Level* EAM Pembangkitan, *Value Creation*, Umur Persediaan Batubara **D. Peningkatan Investasi** *Carbon Emission Reduction*, Pengendalian Penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2025 **E. Pengembangan Talenta** *Lost Time Injury Frequency Rate* **F. Aspek Kepatuhan** *Compliance* (GCG, Kepatuhan HSSE, Auditor, *Reporting*, Busdev *Alignment*, PACA, *Critical Event*)	**A. Economic and Social Value for Indonesia** EBITDA, Power Plant Cost, ROIC, Optimizing Power Plant Readiness, EFOR of CFPP & Non-CFPP, EAF of CFPP, SFC of Coal, Dedieselization Program, Advancing in SDGs. **B. Business Model Innovation** Revenue outside PLN Grup (beyond kWh) & Associate Profit, Synergy Among Sub-Holdings, Other Subsidiaries, and Pusharlis **C. Technology Leadership** Digital Power Plant, Generation EAM Maturity Level, Value Creation, Coal Inventory Age **D. Increased Investment** Carbon Emission Reduction, Control of Investment Budget Usage in accordance with 2025 ABOP **E. Talent Development** Lost Time Injury Frequency Rate **F. Compliance Aspects** Compliance (GCG, HSSE Compliance, Auditor, Reporting, Busdev Alignment, PACA, Critical Event)

No.	Jabatan Position	Kriteria Penilaian Assessment criteria	
3.	**Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga** Director of Business Development and Commerce	**A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia** EBITDA, BPP Pembangkit, ROIC, Program Dedieselisasi, EPC & *Project Completion, Advancing in* SDGs. **B. Inovasi Model Bisnis** Pendapatan dari luar PLN Grup (*beyond* KWh) & Laba Asosiasi, Sinergi Antar *Sub Holding*, Anak Perusahaan Lain & Pusharlis **C. Kepemimpinan Teknologi** *Digital Power Plant*, *Maturity Level* EAM Pembangkitan **D. Peningkatan Investasi** Pengendalian Penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2025 **E. Pengembangan Talenta** N/A **F. Aspek Kepatuhan** *Compliance* (GCG, Kepatuhan HSSE, Auditor, *Reporting*, Busdev *Alignment*, PACA, *Critical Event*)	**A. Economic and Social Value for Indonesia** EBITDA, Power Plant Cost, ROIC, Dedieselization Program, EPC & Project Completion, Advancing in SDGs. **B. Business Model Innovation** Revenue outside PLN Grup (beyond kWh) & Associate Profit, Synergy Among Sub-Holdings, Other Subsidiaries, and Pusharlis **C. Technology Leadership** Digital Power Plant, Generation EAM Maturity Level **D. Increased Investment** Control of Investment Budget Usage in accordance with 2025 ABOP **E. Talent Development** N/A **F. Compliance Aspects** Compliance (GCG, HSSE Compliance, Auditor, Reporting, Busdev Alignment, PACA, Critical Event)
4.	**Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi** Director of Human Capital Management and Administration	**A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia** EBITDA, BPP Pembangkit, ROIC, EPC & *Project Completion, Advancing in* SDGs. **B. Inovasi Model Bisnis** Pendapatan dari luar PLN Grup (*beyond* KWh) & Laba Asosiasi, Sinergi Antar *Sub Holding*, Anak Perusahaan Lain & Pusharlis **C. Kepemimpinan Teknologi** N/A **D. Peningkatan Investasi** *Carbon Emission Reduction*, Pengendalian Penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2025 **E. Pengembangan Talenta** *Talent Diversity*, HCR & OCR dan Produktivitas Pegawai, *Lost Time Injury Frequency Rate* **F. Aspek Kepatuhan** *Compliance* (GCG, Kepatuhan HSSE, Auditor, *Reporting*, Busdev *Alignment*, PACA, *Critical Event*)	**A. Economic and Social Value for Indonesia** EBITDA, Power Plant Cost, ROIC, EPC & Project Completion, Advancing in SDGs. **B. Business Model Innovation** Revenue outside PLN Grup (beyond kWh) & Associate Profit, Synergy Among Sub-Holdings, Other Subsidiaries, and Pusharlis **C. Technology Leadership** N/A **D. Increased Investment** Carbon Emission Reduction, Control of Investment Budget Usage in accordance with 2025 ABOP **E. Talent Development** Talent Diversity, HCR & OCR and Employee Productivity, Lost Time Injury Frequency Rate **G. Compliance Aspects** Compliance (GCG, HSSE Compliance, Auditor, Reporting, Busdev Alignment, PACA, Critical Event)
5.	**Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko** Director of Finance and Risk Management	**A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia** EBITDA, BPP Pembangkit, ROIC, Program Dedieselisasi, EPC & *Project Completion, Advancing in* SDGs. **B. Inovasi Model Bisnis** Pendapatan dari luar PLN Grup (*beyond* KWh) & Laba Asosiasi, Sinergi Antar *Sub Holding*, Anak Perusahaan Lain & Pusharlis **C. Kepemimpinan Teknologi** *Digital Power Plant, Value Creation* **D. Peningkatan Investasi** *Carbon Emission Reduction*, Pengendalian Penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2025 **E. Pengembangan Talenta** N/A **F. Aspek Kepatuhan** *Compliance* (GCG, Kepatuhan HSSE, Auditor, *Reporting*, Busdev *Alignment*, PACA, *Critical Event*)	**A. Economic and Social Value for Indonesia** EBITDA, Power Plant Cost, ROIC, Dedieselization Program, EPC & Project Completion, Advancing in SDGs. **B. Business Model Innovation** Revenue outside PLN Grup (beyond kWh) & Associate Profit, Synergy Among Sub-Holdings, Other Subsidiaries, and Pusharlis **C. Technology Leadership** Digital Power, Value Creation **D. Increased Investment** Carbon Emission Reduction, Control of Investment Budget Usage in accordance with 2025 ABOP **E. Talent Development** N/A **F. Compliance Aspects** Compliance (GCG, HSSE Compliance, Auditor, Reporting, Busdev Alignment, PACA, Critical Event)

No.	Jabatan Position	Kriteria Penilaian Assessment criteria
6.	**Direktur Operasi Pembangkit Gas** Director of Gas Power Plant Operations	**A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia** EBITDA, BPP Pembangkit, ROIC, Optimalisasi Kesiapan Pembangkit, EFOR PLTU & Non PLTU, EAF Non PLTU, SFC Gas, SFC BBM, *Advancing in* SDGs. **B. Inovasi Model Bisnis** Pendapatan dari luar PLN Grup (*beyond* KWh) & Laba Asosiasi, Sinergi Antar *Sub Holding*, Anak Perusahaan Lain & Pusharlis **C. Kepemimpinan Teknologi** Digital Power Plant, Maturity Level EAM Pembangkitan, Value Creation **D. Peningkatan Investasi** *Carbon Emission Reduction*, Pengendalian Penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2025 **E. Pengembangan Talenta** *Lost Time Injury Frequency Rate* **F. Aspek Kepatuhan** *Compliance* (GCG, Kepatuhan HSSE, Auditor, *Reporting*, Busdev *Alignment*, PACA, *Critical Event*) **A. Economic and Social Value for Indonesia** EBITDA, Power Plant Cost, ROIC, Optimizing Power Plant Readiness, EFOR of CFPP & Non-CFPP, EAF of Non-CFPP, SFC of Gas, SFC of Fuel, Advancing in SDGs. **B. Business Model Innovation** Revenue outside PLN Grup (beyond kWh) & Associate Profit, Synergy Among Sub-Holdings, Other Subsidiaries, and Pusharlis **C. Technology Leadership** Digital Power Plant, Generation EAM Maturity Level, Value Creation **D. Increased Investment** Carbon Emission Reduction, Control of Investment Budget Usage in accordance with 2025 ABOP **E. Talent Development** Lost Time Injury Frequency Rate **F. Compliance Aspects** Compliance (GCG, HSSE Compliance, Auditor, Reporting, Busdev Alignment, PACA, Critical Event)

Realisasi *Key Performance Indicators* Direksi (Kolegial) Tahun 2025
Realization of Key Performance Indicators for the Board of Directors (Collegial) in 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Bobot Weight	Nilai Capaian Achievement Value
1.	Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia	65	68,10
2.	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	7	7,7
3.	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	12	12,93
4.	Peningkatan Investasi Increased Investment	5	5,2
5.	Pengembangan Talenta Talent Development	6	6,45
6.	Aspek Kepatuhan Compliance Aspects	Max (-10)	0
	Nilai Kinerja Performance Value	**100**	**105,66**

Realisasi Key Performance Indicators Direksi (Kolegial) Tahun 2025
Individual Performance Assessment of the Board of Directors in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Skor Pencapaian KPI KPI Achievement Score
Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director	105,59% dari target 100% 105.59% of target 100%
M. Irwansyah Putra	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	105,69% dari target 100% 105.69% of target 100%
Komang Parmita	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	106,17% dari target 100% 106.17% of target 100%
Teguh Widhi Harsono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	105,75% dari target 100% 105.75% of target 100%
Dwi Hartono	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	103,78% dari target 100% 103.78% of target 100%
TB Ari Wibawa Mukti	Direktur Manajemen *Human Capital* dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	104,42% dari target 100% 104.42% of target 100%

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Working Relationship Between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Hubungan kerja yang sinergis antara Direksi dan Dewan Komisaris menjadi landasan penting dalam memastikan setiap Organ Perseroan dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal. Sinergi yang baik ini memungkinkan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan, sekaligus mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi diatur secara jelas dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) Perusahaan. Pedoman ini mengedepankan prinsip check and balances, yang dirancang untuk menjaga keseimbangan peran, kewenangan, serta pengawasan, sehingga tercipta mekanisme kerja yang transparan, akuntabel, dan profesional. Prinsip tersebut dimaksudkan agar:

1. Direksi dan Dewan Komisaris memahami hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan Perseroan. Hal tersebut penting sehingga masing-masing mampu melaksanakan tugas secara profesional, efisien, efektif, dan berkualitas.
2. Direksi dan Dewan Komisaris menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
3. Direksi dan Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perseroan dan wewenang Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan.
4. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki persamaan persepsi dan pemahaman agar saling menghargai dan menghormati fungsi dan peran masing-masing semata-mata demi kepentingan Perseroan.
5. Meningkatkan peranan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan lebih aktif memberikan penasihatan kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan.

A synergistic working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners is a crucial foundation in ensuring that each Corporate Organ can perform its functions and responsibilities optimally. This good synergy enables the achievement of effectiveness and efficiency in the Company's management, while also supporting the implementation of good corporate governance.

The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is clearly regulated in the Company's Board Manual for the Work Procedures of the Board of Directors and the Board of Commissioners. This manual emphasizes the principle of checks and balances, designed to maintain a balance of roles, authority, and oversight, thus creating a transparent, accountable, and professional working mechanism. This principle is intended to:

1. Ensuring that both the Board of Directors and the Board of Commissioners fully understand their respective rights, obligations, authorities, and responsibilities in directing and overseeing the Company's operations. This is vital to enable each party to carry out its duties professionally, efficiently, effectively, and with high quality.
2. Preventing domination by any party, avoiding influence from particular interests, and ensuring freedom from conflicts of interest and external pressures, so that decision-making can be conducted objectively.
3. Respecting the authority of the Board of Directors in managing the Company and the authority of the Board of Commissioners in supervising and providing advice on corporate management policies.
4. Promoting mutual understanding and alignment of perspectives between the Board of Directors and the Board of Commissioners to foster mutual respect and appreciation of each other's functions and roles, solely in the best interest of the Company.
5. Strengthening the role of the Board of Commissioners in conducting oversight and providing more proactive advice to the Board of Directors in managing the Company.

6. Meningkatkan peranan Direksi dalam mengendalikan pengurusan Perseroan dan lebih aktif dalam mengantisipasi permasalahan internal Perseroan.
7. Memberikan kejelasan fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan penting dengan tepat dan akurat.
8. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan terjalinnya koordinasi yang baik antara Direksi dan Dewan Komisaris.

6. Enhancing the role of the Board of Directors in exercising control over the Company's management and in being more responsive to internal challenges within the organization.
7. Providing clear delineation of functions, authorities, and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners to enable accurate and well-informed decision-making on critical matters.
8. Fostering a harmonious working relationship and effective coordination between the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Nominasi Dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Keberlanjutan kepemimpinan dalam tata kelola perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Hal ini bergantung pada efektivitas fungsi nominasi dan remunerasi. Proses nominasi yang adil, akuntabel, dan objektif serta remunerasi yang kompetitif tidak hanya memperkuat kepemimpinan, tetapi juga mendukung tata kelola yang berkelanjutan. Sebagai anak perusahaan BUMN PT PLN (Persero), mekanisme nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris di PLN NP mengikuti Peraturan Menteri BUMN serta kebijakan internal PT PLN (Persero). Hal ini memastikan keselarasan dengan prinsip tata kelola yang baik serta pencapaian visi dan misi perusahaan. Regenerasi kepemimpinan melalui pengembangan talenta dan pengelolaan SDM yang efektif menjadi kunci keberlanjutan organisasi. Di sisi lain, remunerasi yang adil, transparan, dan kompetitif mendorong motivasi, meningkatkan kinerja, serta membantu menarik dan mempertahankan talenta terbaik.

The sustainability of leadership in corporate governance is significantly influenced by the quality and competence of human resources. It depends on the effectiveness of the nomination and remuneration functions. A fair, accountable, and objective nomination process, along with competitive remuneration, not only strengthens leadership but also supports sustainable governance. As a subsidiary of the state-owned enterprise PT PLN (Persero), the nomination and remuneration mechanisms for the Board of Directors and Board of Commissioners at PLN NP follow the Minister of State-Owned Enterprises Regulation and the internal policies of PT PLN (Persero). It ensures alignment with good governance principles as well as the achievement of the Company's vision and mission. Leadership regeneration through talent development and effective HR management is key to organizational sustainability. On the other hand, fair, transparent, and competitive remuneration drives motivation, enhances performance, and helps attract and retain the best talent.

Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris
Nomination of the Board of Directors and Board of Commissioners

Proses penetapan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme nominasi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023, mencakup tahapan penjaringan, penilaian, hingga penetapan calon secara sistematis dan terukur. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, serta rekam jejak yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi perusahaan. Suksesi Direksi menjadi bagian penting dari fungsi nominasi di tingkat tertinggi, sebagai upaya menyiapkan regenerasi kepemimpinan yang mampu menjaga kesinambungan kinerja dan arah bisnis Perusahaan.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan mengedepankan prinsip GCG. Proses pencalonan dilaksanakan secara objektif dan transparan sesuai pedoman yang berlaku, dengan mempertimbangkan kesesuaian kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi.

Seluruh calon wajib memenuhi persyaratan materiil, formal, dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, termasuk aspek integritas, kapabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan penerapan proses nominasi yang disiplin dan berbasis prinsip tata kelola yang baik, perusahaan dapat memastikan tersedianya jajaran pimpinan yang profesional, kredibel, serta mampu memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan.

The process of appointing the Board of Directors and Board of Commissioners is conducted through a nomination mechanism, referring to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023, covering the stages of screening, assessment, and systematic and measurable candidate determination. Each stage is created to ensure that the selected candidates possess the competence, integrity, and track record that align with the Company's needs and strategy. Director succession is an essential part of the nomination function at the highest level, as an effort to prepare for the regeneration of leadership capable of maintaining the continuity of the Company's performance and business direction.

The Board of Directors and Board of Commissioners are appointed by the GMS with an emphasis on GCG principles. The nomination process is conducted objectively and transparently pursuant to applicable guidelines, taking into account the suitability of competence, experience, and organizational needs.

All candidates must meet the predetermined material, formal, and other requirements, including aspects of integrity, capability, and compliance with laws and regulations. With the implementation of a disciplined nomination process based on good governance principles, the Company can ensure the availability of a professional, credible leadership team that is capable of adding value and supporting the achievement of the Company's long-term goals.

Persyaratan Materiil Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Material Requirements for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu :
1. Keahlian;
2. Integritas;
3. Kepemimpinan;
4. Pengalaman;

To be appointed as a member of the Board of Directors, a candidate must meet the following material requirements:
1. Expertise;
2. Integrity;
3. Leadership;
4. Experience;

5. Jujur;
6. Perilaku yang baik; dan
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu:

1. Integritas;
2. Dedikasi;
3. Memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan;
5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
6. Harus memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan di mana yang bersangkutan dicalonkan.

5. Honesty;
6. Good behavior; and
7. Strong dedication to advancing and developing the Company.

To be appointed as a member of the Board of Commissioners, a candidate must meet the following material requirements:

1. Integrity;
2. Dedication;
3. Understanding of corporate management issues related to at least one management function;
4. Adequate knowledge in the business area in which they are nominated;
5. Sufficient availability of time to perform their duties; and
6. A strong willingness and enthusiasm to contribute to the advancement and development of the Company.

Persyaratan Formal Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Formal Requirements for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Persyaratan formal merupakan persyaratan konkrit yang harus dipenuhi oleh orang perseorangan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang meliputi:

1. Orang perseorangan;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Perseroan, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Persyaratan formal merupakan persyaratan konkrit yang harus dipenuhi oleh orang perseorangan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, yang meliputi:

The formal requirements are specific and concrete conditions that must be fulfilled by an individual to be appointed as a member of the Board of Directors, including:

1. An individual (natural person);
2. Legally capable of performing legal acts;
3. Has not been declared bankrupt within the past five (5) years prior to the appointment;
4. Has not served as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company, subsidiary, or other business entity to go bankrupt within the past five (5) years;
5. Has not been convicted of a criminal offense that harmed state finances, SOEs, the Company, subsidiaries, other business entities, and/or related to the financial sector within the past five (5) years.

The formal requirements for appointment as a member of the Board of Commissioners are similar and include:

1. Orang perseorangan.
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Perseroan, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

1. An individual (natural person);
2. Legally capable of performing legal acts;
3. Has not been declared bankrupt within the past five (5) years prior to the appointment;
4. Has not served as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company, subsidiary, or other business entity to go bankrupt within the past five (5) years;
5. Has not been convicted of a criminal offense that harmed state finances, the Company, subsidiaries, other business entities, and/or related to the financial sector within the past five (5) years.

Persyaratan Lain
Other Requirements

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, selain memenuhi syarat materiil dan formal, wajib untuk memenuhi persyaratan berikut:

1. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah
3. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada Perseroan atau Anak Perusahaan selama 2 (dua) periode;
4. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris pada perseroan lain, anggota Direksi pada perseroan lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
5. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
6. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.
7. Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan

In addition to meeting the material and formal requirements, candidates for the Board of Directors must also fulfill the following conditions:

1. Not a political party manager, legislative candidate, and/or legislative member of the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial Regional Representative Council, and Regency/City Regional Representative Council;
2. Not a candidate for regional head or deputy regional head, including incumbent or acting regional heads/deputies;
3. Not serving as a member of the Board of Directors in the Company or its subsidiaries for more than two (2) terms;
4. Not concurrently holding positions in ministries/agencies, as members of the Board of Commissioners or the Board of Directors of other companies or subsidiaries, or other business entities;
5. Not holding a position that is prohibited by prevailing laws and regulations from being held concurrently with the position of Director;
6. Demonstrates full dedication and availability to carry out the duties of the position, supported by a written statement;
7. Physically and mentally healthy, with no illness that may hinder the execution of duties as a Director, evidenced by a medical certificate from a hospital;

8. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, selain memenuhi syarat materiil dan formal, perlu untuk memenuhi persyaratan berikut:

1. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah.
3. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan.
4. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perseroan atau Anak Perusahaan selama 2 (dua) periode.
5. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris.
6. Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

8. Possesses a Tax Identification Number (NPWP) and has fulfilled tax obligations for the past two (2) years.

For candidates for the Board of Commissioners, the following additional requirements apply:

1. Not a political party manager, legislative candidate, and/or legislative member of the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial Regional Representative Council, and Regency/City Regional Representative Council.
2. Not a candidate for regional head or deputy regional head, including incumbent or acting regional heads/deputies;
3. Not currently holding a position that may lead to a conflict of interest with the Company;
4. Not serving as a member of the Board of Commissioners in the Company or its subsidiaries for more than two (2) terms;
5. Not holding a position that is prohibited by prevailing laws and regulations from being held concurrently with the position of Commissioner;
6. Physically and mentally healthy, with no illness that may hinder the execution of duties as a Commissioner, evidenced by a medical certificate from a hospital;
7. Possesses a Tax Identification Number (NPWP) and has fulfilled tax obligations for the past two (2) years.

Mekanisme Nominasi Direksi
Directors Nomination Mechanism

Pembentukan Tim Evaluasi
Evaluation Team Establishment

Pemegang Saham membentuk Tim Evaluasi untuk:
- Melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Calon Anggota Direksi;
- Menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna mendapatkan penetapan;
- Menunjuk 1 (satu) atau lebih Lembaga Profesional untuk melakukan Asesmen Calon Anggota Direksi, jika diperlukan.
- Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna disampaikan oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris BUMN dan/atau Menteri Negara BUMN, jika diperlukan.

The Shareholders establish Evaluation Team for the following:
- Electing and assessing the prospective Board of Directors.
- Determining the final result of the evaluation to be delivered to the Board of Directors of SOEs/Shareholders in order to obtain the approval.
- Appoint 1 (one) or more Professional Institutions to conduct an Assessment of Candidates for Members of the Board of Directors, if necessary.
- Preparing evaluation result determined by the Board of Directors of SOEs/ Shareholders to be delivered to the Board of Commissioners and/or Ministry of State- Owned Enterprises of Indonesia, if necessary.

Proses Penjaringan
Election Process

- Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal Calon Anggota Direksi dari berbagai sumber.
- Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan adçministrasi yang ditetapkan (daftar riwayat hidup, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun Daftar Bakal Calon (*long list*) sebanyak minimal 5 (lima) orang calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi.
- Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon (*long list*) kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan.

- The Evaluation Team receives the recommendation and collects information concerning the prospective Board of Directors from various sources.
- The Evaluation Team conducts selection based on stipulated administrative criteria and requirements (CV, other documents, and other information collected) to enlist the candidates in the long list with at least 5 (five) prospective Candidates.
- The Evaluation Team submits the Prospective Candidate List (long list) to the State Owned Enterprises Board of Directors/ Shareholders for approval.

Proses Penetapan
Determination Process

- Direksi BUMN/ Pemegang Saham melakukan evaluasi akhir atas hasil Penilaian untuk menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi.
- Direksi BUMN/ Pemegang Saham mengajukan Calon Anggota Direksi untuk ditetapkan dalam RUPS menjadi anggota Direksi Perusahaan.
- Pengajuan untuk ditetapkan dalam RUPS dilakukan setelah Calon AnggotaDireksi yang bersangkutan menandatangani Kontrak Manajemen.
- Keputusan Pemegang Saham baik di dalam RUPS maupun di luar RUPS menetapkan calon Direksi terpilih sebagai Anggota Direksi Perusahaan.

- The Board of Directors of SOEs/ Shareholder conducts a final evaluation of the Assessment results to determine 1 (one) candidate for each position of Member of the Board of Directors.
- The Board of Directors of SOEs/Shareholder submits the Candidate for the position of Member of the Board of Directors to be determined in the GMS as a member of the Company's Board of Directors.
- The submission to be stipulated in the GMS is made after the relevant Prospective Member of the Board of Directors signs the Management Contract.
- The Shareholders' decision either in the GMS or outside the GMS determines the elected candidate as a member of the Board of Directors of the Company.

Proses Penilaian
Assessment Process

- Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal calon yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon Anggota Direksi (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN/Pemegang Saham untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN/Pemegang Saham sebagai Calon Anggota Direksi.
- Dalam hal Asesmen dilakukan oleh Lembaga Profesional, hasil Asesmen disampaikan oleh Lembaga Profesional kepada tim evaluasi untuk dievaluasi.
- Hasil Asesmen ditetapkan oleh tim evaluasi dalam Daftar Calon Anggota Direksi (*short list*) yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dengan peringkat nilai terbaik.
- Tim evaluasi menyampaikan Daftar Calon Anggota Direksi (short list) kepada Direksi BUMN/Pemegang Saham untuk penetapan Calon Direksi terpilih disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.

- The Evaluation Team assesses the candidates whose names are listed in the List of Candidates for Members of the Board of Directors (long list) that has been approved by the Board of Directors of SOEs/Shareholders to obtain the best candidates who will be proposed to the Board of Directors of SOEs/ Shareholders as Candidates for Members of the Board of Directors.
- In the event that the Assessment is conducted by a Professional Institution, the results of the Assessment are submitted by the Professional Institution to the evaluation team for evaluation.
- The results of the Assessment are determined by the evaluation team in a List of Candidates for Members of the Board of Directors (short list) consisting of 3 (three) people for each position of members of the Board of Directors with the best score ranking.
- The Evaluation Team submits the List of Candidates for the Board of Directors (short list) to the Board of Directors of SOEs/ Shareholders for the determination of the elected Candidates for the Board of Directors accompanied by an explanation of the determination process and an attachment of the complete assessment results.

Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan Dewan Komisaris
Commissioner Nomination Mechanism

Pembentukan Tim Evaluasi
Evaluation Team Establishment

Pemegang Saham membentuk Tim Evaluasi untuk:
- Melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris;
- Menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna mendapatkan penetapan;
- Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna disampaikan oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris BUMN dan/atau Menteri Negara BUMN, jika diperlukan.

The Shareholders establish Evaluation Team for the following:
- Electing and assessing the prospective Board of Commissioners;
- Determine the final evaluation results of the assessment to be submitted to the Board of Directors of SOEs/Shareholders for determination;
- Preparing evaluation result determined by the Board of Directors of SOEs/ Shareholders to be delivered to the Board of Commissioners and/or Ministry of State- Owned Enterprises of Indonesia, if necessary.

Proses Penjaringan
Election Process

- Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dari berbagai sumber.
- Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (daftar riwayat hidup, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun Daftar Bakal Calon (long list) paling sedikit 3 (tiga) kali lipat jumlah jabatan Dewan Komisaris yang lowong untuk jabatan anggota Dewan Komisaris.
- Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon (long list) kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan.

- The Evaluation Team receives the recommendation and collects information concerning the prospective Board of Commissioners from various sources.
- The Evaluation Team conducts selection based on stipulated administrative criteria and requirements (CV, other documents, and other information collected) to enlist the candidates in the long list with at least 3 (three) prospective Candidates of the Board of Commissioners.
- The Evaluation Team submits the Prospective Candidate List (long list) to the State Owned Enterprises Board of Directors/ Shareholders for approval.

Proses Penetapan
Determination Process

- Direksi BUMN/ Pemegang Saham melakukan evaluasi akhir atas hasil Penilaian untuk menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Dewan Komisaris.
- Direksi BUMN/ Pemegang Saham mengajukan Calon Anggota Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS menjadi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
- Keputusan Pemegang Saham baik di dalam RUPS maupun di luar RUPS menetapkan Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan

- The Board of Directors of the SOEs/ Shareholder conducts a final evaluation of the Assessment results to determine 1 (one) candidate for each position of Member of the Board of Commissioners.
- The Board of Directors of the SOEs/Shareholder proposes the Candidate for Member of the Board of Commissioners to be determined in the GMS to become a Member of the Board of Commissioners of the Company.
- Resolution of the Shareholders either in the GMS or outside the GMS stipulates the elected Prospective Member of the Board of Commissioners as a Member of the Board of Commissioners of the Company.

Proses Penilaian
Assessment Process

- Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal Calon Anggota Dewan Komisaris yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN /Pemegang Saham untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN /Pemegang Saham sebagai Calon Anggota Dewan Komisaris.
- Hasil penilaian ditetapkan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Komisaris (*short list*) yang terdiri dari 2 (dua) kali lipat jabatan Anggota Dewan Komisaris yang lowong dengan peringkat nilai terbaik.
- Tim evaluasi menyampaikan Daftar Calon Anggota Dewan Komisaris (*short list*) kepada Direksi BUMN/Pemegang Saham untuk penetapan Calon Direksi terpilih disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.

- The Evaluation Team assesses prospective candidates for members of the Board of Commissioners whose names are listed in the List of Candidates for Members of the Board of Commissioners (long list) approved by the Board of Directors of SOEs/Shareholders to obtain the best candidates to be proposed to the Board of Directors of SOEs/Shareholders as Candidates for Members of the Board of Commissioners.
- The results of the assessment are determined in the List of Candidates for Members of the Board of Commissioners (short list) consisting of 2 (two) times the vacant position of Members of the Board of Commissioners with the best score ranking.
- The Evaluation Team submits the List of Candidates for Members of the Board of Commissioners (short list) to the Board of Directors of the SOE/ Shareholder for the determination of the selected Candidates for the Board of Directors, accompanied by an explanation of the determination process and an attachment of the complete assessment results.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Pemberian remunerasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris merupakan bentuk penghargaan atas peran, tanggung jawab, dan kontribusinya dalam mencapai tujuan perusahaan. Pemberiannya disesuaikan dengan tugas, wewenang, serta kewajiban masing-masing, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Remuneration provided to the Board of Directors and Board of Commissioners is a form of appreciation for their roles, responsibilities, and contributions to achieving company goals. The remuneration is tailored to each individual's duties, authorities, and obligations, in accordance with applicable laws and regulations.

Dalam implementasinya, PLN Nusantara Power menyusun dan menjalankan kebijakan remunerasi berdasarkan arahan PT PLN (Persero) sebagai pemegang saham utama dan pengendali perusahaan, serta mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Secara internal, kebijakan tersebut juga diatur melalui Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 0094.P/019/DIR/2022 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris.

In its implementation, PLN Nusantara Power develops and implements a remuneration policy based on the direction of PT PLN (Persero), as the company's primary and controlling shareholder, and in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning State-Owned Enterprises' Organs and Human Resources. Internally, this policy is also regulated through PT Pembangkitan Jawa-Bali Board of Directors Regulation No. 0094.P/019/DIR/2022 concerning the Remuneration of Directors and Board of Commissioners.

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remuneration Structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan telah diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 0094.P/019/DIR/2022 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemberian remunerasi dilaksanakan secara terukur, transparan, serta selaras dengan prinsip GCG dan kinerja Perusahaan.

The remuneration structure for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners has been regulated in the Board of Directors Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 0094.P/019/DIR/2022 concerning the Income of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali. This regulation aims to ensure that the provision of remuneration is conducted in a measured and transparent manner, in line with GCG principles and the Company's performance.

Setiap komponen remunerasi dirancang secara proporsional dengan mempertimbangkan kompleksitas tugas, tanggung jawab, serta kontribusi masing-masing organ Perusahaan. Dengan demikian, struktur remunerasi tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan keberlanjutan Perusahaan secara berkesinambungan.

Each component of remuneration is designed proportionally, taking into account the complexity of tasks, responsibilities, and contributions of each Company organ. Thus, the remuneration structure not only serves as compensation but also as an instrument to encourage the continuous improvement of performance, accountability, and sustainability of the Company.

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remuneration Structure of the Board of Directors and Board of Commissioners

Komponen Remunerasi Remuneration Components	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Gaji/Honorarium Salary/Honorarium	Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45%(empat puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. Honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Komisaris Utama. The Honorarium of the President Commissioner is set at 45% (forty five percent) of the President Director's Salary. The Honorarium of the Commissioner is set at 90% (ninety percent) of the Honorarium of the President Commissioner.	Gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Pemegang Saham. Gaji Direktur yang lain ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. The salary of the President Director is determined by the Shareholders. The salaries of other Directors are set at 85% (eighty five percent) of the President Director's Salary.
Tunjangan Cuti Tahunan dan Cuti Besar Annual and Grand Leave Allowance	Tidak diberikan Not given	Tidak diberikan Not given
Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Tunjangan hari raya diberikan sebesar I (satu) kali Honorarium. Holiday allowance is given in the amount of 1 (one) time the Honorarium.	diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji 1 (one) times the Salary

Komponen Remunerasi Remuneration Components	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Fasilitas /Tunjangan Perumahan Housing Facilities/ Allowance	-	1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapan pemeliharaan, utilitas, dan pengamanannya ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan. Apabila Perusahaan tidak menyediakan fasilitas rumah jabatan, maka Perusahaan dapat memberikan tunjangan perumahan 1 (one) Official Residence along with maintenance equipment, utilities, and security are fully borne by the Company. If the Company does not provide official residence facilities, the Company can provide housing allowances
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris. Transportation allowance is given in the amount of 20% (twenty percent) of the Honorarium of each member of the Board of Commissioners.	-
Asuransi Purna Jabatan Post-Service Insurance	Ketentuan mengenai asuransi purna jabatan anggota Direksi mutatis mutandis berlaku bagi penetapan asuransi purna jabatan anggota Dewan Komisaris. The provisions regarding post-employment insurance for members of the Board of Directors apply mutatis mutandis to the determination of post-employment insurance for members of the Board of Commissioners.	Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Direksi yang statusnya definitif. 2. Tidak diberikan untuk anggota Direksi yang berstatus pegawai PT PLN (Persero) grup. 3. Premi yang ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun. 4. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan,sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian . Post-employment insurance is provided with the following provisions: 1. Directors with definitive status. 2. Not given to members of the Board of Directors who are employees of PT PLN (Persero) group. 3. The premium borne by the company is a maximum of 25% (twenty five percent) of the Salary in one year. 4. The provision of premiums, contributions or other relevant terms for post-employment insurance, already includes premiums for accident and death insurance.
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	-	Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) Fasilitas kendaraan dari perusahaan. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Members of the Board of Directors are only entitled to 1 (one) vehicle facility from the company. Vehicle facilities including maintenance and operational costs are provided by taking into account the company's financial condition.
Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Ketentuan mengenai Fasilitas kesehatan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas kesehatan anggota Dewan Komisaris. The provisions regarding Health Facilities for members of the Board of Directors, apply mutatis mutandis to Health Facilities for members of the Board of Commissioners.	Fasilitas kesehatan diberikan berupa : a) Rawat jalan dan obat; b) Rawat inap dan obat; dan c) *Medical check up.* Health facilities are provided in the form of: a) Outpatient and medication; b) Inpatient and medication; and c) Medical check up.

Komponen Remunerasi Remuneration Components	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facilities	Ketentuan mengenai Fasilitas bantuan hukum anggota Direksi dan mantan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris serta mantan anggota Dewan Komisaris. The provisions regarding Legal Aid Facilities for members of the Board of Directors and former members of the Board of Directors, apply mutatis mutandis to Legal Aid Facilities for members of the Board of Commissioners and former members of the Board of Commissioners.	Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan. Legal aid facilities are provided in the form of financing for the services of a lawyer/legal consultant office which includes the examination process as a witness, suspect, and defendant in a judicial institution.
Tantiem/Insentif Kinerja/ Insentif Khusus Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives	Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama; dan Anggota Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama. Tantiem is determined by the Shareholders with the composition of the amount of the President Commissioner 45% of the President Director; and Members of the Commissioner 90% of the President Commissioner.	Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama. Tantiem is determined by the Shareholders with the composition of the size of other members of the Board of Directors 85% of the President Director.
LTI (*long term incentive*)	Tidak diberikan Not given	Tidak diberikan Not given

Prosedur Penetapan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Procedure for Determining Remuneration Proposals for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Direksi menyampaikan usulan remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan memperoleh persetujuan sebelum diteruskan kepada Pemegang Saham. Dalam proses ini, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang melakukan kajian secara menyeluruh terhadap usulan yang diajukan Direksi, dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kinerja, kondisi perusahaan, serta ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, usulan remunerasi tersebut diajukan kepada Pemegang Saham melalui RUPS untuk mendapatkan penetapan. Penghasilan yang berupa gaji/honorarium dan tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dan disampaikan melalui surat penetapan tersendiri berdasarkan keputusan RUPS. Sementara itu, komponen tunjangan dan fasilitas diberikan berdasarkan ketentuan PT PLN (Persero) selaku pemegang saham mayoritas, dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Penetapan penghasilan yang bersifat tetap, yaitu gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti

The Board of Directors submits the remuneration proposal to the Board of Commissioners for review and approval before being forwarded to the Shareholders. In this process, the Board of Commissioners is assisted by the Nomination and Remuneration Committee, which conducts a thorough review of the proposal submitted by the Board of Directors, considering its alignment with performance, company conditions, and applicable regulations. Subsequently, the proposal is submitted to the Shareholders through the GMS for approval. Income in the form of salary/honorarium and tantiem is determined by the Shareholders and communicated via a separate determination letter based on the GMS resolution. Meanwhile, the components of allowances and facilities are provided based on the provisions of PT PLN (Persero) as the major shareholder, referring to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and Human Resources.

The determination of fixed income, such as salaries or honorariums, allowances, and facilities, is carried out by considering various factors such as the scale

skala usaha, kompleksitas bisnis, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor relevan lainnya, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penghasilan yang bersifat variabel, seperti Tantiem dan Insentif Kinerja ditetapkan berdasarkan pencapaian kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan, disertai pertimbangan faktor lain yang relevan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem remunerasi tidak hanya adil dan kompetitif, tetapi juga selaras dengan pencapaian kinerja jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan.

of the business, business complexity, inflation rate, the Company's financial condition and capability, and other relevant factors, while adhering to the applicable laws and regulations. As for variable income, such as Tantiem and Performance Incentives, it is determined based on the Company's performance achievements and financial capability, along with consideration of other relevant factors. This mechanism is designed to ensure that the remuneration system is not only fair and competitive but also aligned with the Company's short-term and long-term performance achievements.

Mekanisme Penetapan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Mechanism for Determining the Proposed Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Usulan Remunerasi oleh Direksi **Remuneration Proposal by the Board of Directors**	Direksi mengajukan usulan remunerasi kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. The Board of Directors submits the remuneration proposal to the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee.
Pembahasan dengan Komite Nominasi dan Remunerasi **Pembahasan dengan Komite Nominasi dan Remunerasi**	Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penelaahan atas kompensasi yang diberikan di pasar untuk pekerjaan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama. Dengan memperhitungkan kinerja usaha perusahaan dan kontribusi masing-masing individu, kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyiapkan rekomendasi. The Nomination and Remuneration Committee reviews the compensation provided in the market for the work concerned in other companies with the same business field and status. By considering the Company's business performance and the contribution of each individual, a discussion is then conducted by the Nomination and Remuneration Committee to prepare recommendations.
Pembahasan dan Persetujuan oleh Dewan Komisaris **Discussion and Approval with the Board of Commissioners**	Dewan Komisaris melakukan pembahasan lanjutan dan persetujuan atas usulan remunerasi yang diajukan. The Board of Commissioners conducts further discussion and approval of the proposed remuneration.
Penyampaian Usulan **Proposal Submission**	Usulan remunerasi disampaikan kepada pemegang saham untuk mendapat persetujuan dan penetapan. The remuneration proposal is submitted to shareholders for approval and determination.
Persetujuan dan Penetapan Remunerasi **Approval and Determination of Remuneration**	Pemegang Saham memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi melalui RUPS. Shareholders approve and determine remuneration through the GMS.

Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Total Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun 2025 dilakukan oleh Pemegang Saham melalui Surat Keputusan Pemegang Saham Mayoritas PLN NP Nomor 71797/MNJ.01.02/F01000000/2025-SR tanggal 31 Desember 2025 tentang Penetapan Bonus Kinerja 2024, dan Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Tahun 2025 Direksi/Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power. Berdasarkan penetapan tersebut, rincian remunerasi untuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The determination of the remuneration of the Company's Board of Commissioners and Directors for 2025 is carried out by the Shareholders through the Decree of the Majority Shareholders of PLN NP Number 71797/MNJ.01.02/F01000000/2025-SR dated December 31, 2025 concerning the Determination of the 2024 Performance Bonus, and Salary/Honorarium and Allowances and Facilities for 2025 of the Directors/Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power. Based on this determination, the details of the remuneration for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

Remunerasi Direksi

Remuneration of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan Monthly Remuneration			Tunjangan Tahunan Annual Allowance	Gaji dan Tunjangan 2025 Salary and Allowance 2025 (Rp)	Tantiem (Rp)
		Gaji Perbulan Monthly Salary (Rp)	Tunjangan Per Bulan Monthly Allowance (Rp)	Total (Rp)	THR (Rp)		
Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director	271.000.000	25.000.000	296.000.000	271.000.000	3.823.000.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
Rachmanoe Indarto[1]	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	230.350.000	23.500.000	253.850.000	230.350.000	1.753.450.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
M. Irwansyah Putra[2]	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	230.350.000	23.500.000	253.850.000	0	1.523.100.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
Komang Parmita	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	230.350.000	23.500.000	253.850.000	230.350.000	3.276.550.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
Teguh Widhi Harsono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	230.350.000	23.500.000	253.850.000	230.350.000	1.523.100.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan Monthly Remuneration			Tunjangan Tahunan Annual Allowance	Gaji dan Tunjangan 2025 Salary and Allowance 2025 (Rp)	Tantiem (Rp)
		Gaji Perbulan Monthly Salary (Rp)	Tunjangan Per Bulan Monthly Allowance (Rp)	Total (Rp)	THR (Rp)		
Dwi Hartono	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	230.350.000	23.500.000	253.850.000	230.350.000	3.276.550.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
TB Ari Wibawa Mukti	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	230.350.000	23.500.000	253.850.000	0	1.523.100.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized

Keterangan:
1. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025, dilakukan pemberhentian Sdr. Rachmanoe Indarto dari Jabatannya Sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara dan menetapkan Sdr M. Irwansyah Putra sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara.

Remark:
1. Based on the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025, Mr. Rachmanoe Indarto was dismissed from his position as Director of Coal Power Plant Operations, and Mr. M. Irwansyah Putra was appointed as Director of Coal Power Plant Operations.

Remunerasi Dewan Komisaris
Remuneration of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan Monthly Remuneration				Tunjangan Tahunan Annual Allowance	Honorarium dan Tunjangan 2025 Honorarium and Allowance 2025 (Rp)	Tantiem (Rp)
		Honor Per Bulan Honor Per Month (Rp)	Tunjangan Transport Per Bulan Transportation Allowance (Rp)	Tunjangan Komunikasi Per Bulan Communication Allowance Per Month (Rp)	Total (Rp)	THR THR (Rp)		
Hendra Iswahyudi[1]	PLT Komisaris Utama Act. President Commissioner	121.950.000	24.390.000	1.000.000	147.340.000	121.950.000	1.005.990.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
Edi Srimulyanti[3]	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	121.950.000	24.390.000	1.000.000	147.340.000	0	884.040.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
Evy Haryadi[1]	Komisaris Commissioner	0	0	0	0	0	0	Belum Direalisasikan Not Yet Realized

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan Monthly Remuneration				Tunjangan Tahunan Annual Allowance	Honorarium dan Tunjangan 2025 Honorarium and Allowance 2025 (Rp)	Tantiem (Rp)
		Honor Per Bulan Honor Per Month (Rp)	Tunjangan Transport Per Bulan Transportation Allowance (Rp)	Tunjangan Komunikasi Per Bulan Communication Allowance Per Month (Rp)	Total (Rp)	THR THR (Rp)		
Emir Kresna Wardana[3]	Komisaris Commissioner	109.755.000	21.951.000	1.000.000	132.706.000	109.755.000	905.991.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
Ida Nuryatin Finahari[3]	Komisaris Commissioner	109.755.000	21.951.000	1.000.000	132.706.000	109.755.000	905.991.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
Bagus Puruhito[3]	Komisaris Independen Independent Commissioner	109.755.000	21.951.000	1.000.000	132.706.000	109.755.000	905.991.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
Kenedy[3]	Komisaris Independen Independent Commissioner	109.755.000	21.951.000	1.000.000	132.706.000	109.755.000	905.991.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
Widjono Hardjanto[2]	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0	0	0	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
Ade Armando[3]	Komisaris Commissioner	109.755.000	21.951.000	1.000.000	132.706.000	0	796.236.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
Suharyono[3]	Komisaris Commissioner	109.755.000	21.951.000	1.000.000	132.706.000	0	796.236.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
M Pradana Indraputra[3]	Komisaris Commissioner	109.755.000	21.951.000	1.000.000	132.706.000	0	796.236.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
Adam Muhammad[3]	Komisaris Commissioner	109.755.000	21.951.000	1.000.000	132.706.000	0	796.236.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized
Muhammad Syafi'i[3]	Komisaris Commissioner	109.755.000	21.951.000	1.000.000	132.706.000	0	796.236.000	Belum Direalisasikan Not Yet Realized

Keterangan:
1. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 23 April 2025, memberhentikan dengan hormat Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris.
2. Berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Widjono Hardjanto tanggal 1 Mei 2025.
3. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025, dilakukan pemberhentian dan penetapan anggota Dewan Komisaris.

Remarks:
1. Honorably dismissed Mr. Evy Haryadi as Commissioner based on the Circular Shareholders' Resolution dated April 23, 2025.
2. Based on the resignation letter from Mr. Widjono Hardjanto dated May 1, 2025
3. Dismissal and appointment of the Board of Commissioners members based on the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Policy on Performance-Based Long-Term Compensation

Hingga akhir tahun 2025, kebijakan remunerasi Perusahaan masih berfokus pada komponen penghasilan jangka pendek dan belum mencakup skema insentif jangka panjang berbasis kinerja. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 0094.P/019/DIR/2022 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dan Peraturan Direksi Nomo 0001.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Pelaksana Sistem Manajemen Penghargaan Karyawan, PLN Nusantara Power belum mengimplementasikan *Long Term Incentive* (LTI) bagi manajemen maupun karyawan.

Perusahaan juga belum memiliki kebijakan yang mengatur kompensasi atau insentif jangka panjang berbasis kinerja, seperti program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP). Selain itu, belum tersedia informasi terkait jumlah alokasi saham dalam program ESOP/MSOP beserta realisasinya, jangka waktu pelaksanaan, kriteria atau persyaratan bagi manajemen dan/atau karyawan yang berhak, serta mekanisme penetapan harga pelaksanaan.

Until the end of 2025, the Company's remuneration policy still focuses on short-term income components and does not yet include a long-term performance-based incentive scheme. As stipulated in Board of Directors Regulation Number 0094.P/019/DIR/2022 concerning Income for Directors and Board of Commissioners and Board of Directors Regulation Number 0001.P/DIR/2025 concerning the Implementation Policy for the Employee Reward Management System, PLN Nusantara Power has not implemented Long Term Incentives (LTI) for management or employees.

The Company also does not yet have a policy regulating long-term performance-based compensation or incentives, such as a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP). Additionally, there is no available information on the number of shares allocated in the ESOP/MSOP programs, along with their realization, the implementation period, the criteria or requirements for management and/or employees who are eligible, and the exercise price determination mechanism.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Policy on Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Keberagaman dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk struktur kepemimpinan yang kuat dan berimbang. Penerapan prinsip ini mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih komprehensif serta berorientasi pada keberlanjutan Perusahaan. Keberagaman tersebut mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta latar belakang demografis seperti usia dan jenis kelamin, guna menghadirkan perspektif yang lebih luas, adaptif, dan tepat sasaran.

Diversity in the nomination process of the Board of Commissioners and Directors is one of the important factors in shaping a strong and balanced leadership structure. The application of this principle supports more comprehensive strategic decision-making and is oriented toward the sustainability of the Company. This diversity includes aspects of knowledge, skills, experience, as well as demographic backgrounds such as age and gender, in order to present broader, more adaptive, and targeted perspectives.

Perusahaan telah menetapkan kebijakan tertulis terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada Anggaran Dasar, ketentuan Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023.

The Company has established a written policy regarding the diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors composition, referring to the Articles of Association, Shareholders' provisions, and applicable laws and regulations, including the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris PLN Nusantara Power Tahun 2025
Diversity in the Composition of the Board of Commissioners of PLN Nusantara Power in 2025

Jabatan Position	Terdapat 1 (satu) orang Komisaris Independen	There are 1 (one) Independent Commissioners
Jenis Kelamin Gender	Terdapat 1 (satu) orang Dewan Komisaris yang berjenis kelamin Wanita dari total 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris	There is 1 (one) female member of the Board of Commissioners out of a total of 6 (six) members
Usia Age	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang cukup produktif dan tingkat kematangan (mature), yaitu: • Usia 30-39 tahun 1 (satu)) orang • Usia 40-49 tahun 1 (satu)) orang • Usia 50-59 tahun 2 (dua) orang • Usia 60-69 tahun 2 (dua) orang	The age diversity among members of the Board of Commissioners falls within a productive and mature range, as follows: • Aged 30–39 years: 1 (one) person • Aged 40–49 years: 1 (one) person • Aged 50–59 years: 2 (two) people • Aged 60–69 years: 2 (two) people
Pendidikan Education	Jenjang pendidikan anggota Dewan Komisaris meliputi tingkat Sarjana, Magister dan Doktor dengan berbagai bidang pendidikan seperti Manajemen Keuangan, Teknik Elektro, Ilmu Komunikasi, Ilmu Sosial, Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Perencanaan dan Kebijakan Publik, Teknik Sipil dan Ilmu Administrasi.	The educational levels of the members of the Board of Commissioners include Bachelor's, Master's and Doctoral degrees in various fields of education such as Financial Management, Electrical Engineering, Communication Sciences, Social Sciences, Law, Economics and Business, Planning and Public Policy, Civil Engineering and Administrative Sciences.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pengalaman kerja yang beragam, antara lain menjadi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau General Manager dan/atau Executive Vice President dan/atau Vice President, Konsultan dan/atau posisi penting lainnya pada Bidang Ketenagalistrikan, Pembangkit, Hukum, Pemerintahan, dan Lembaga Negara.	They also possess diverse professional experience, including roles as members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors, and/or General Managers, and/or Executive Vice Presidents, and/or Vice Presidents, as well as other key positions in sectors such as Electricity, Power Plant, Law, Government, and National Agencies.

Keberagaman Komposisi Direksi PLN Nusantara Power Tahun 2025
Diversity in the Composition of the Board of Directors of PLN Nusantara Power in 2025

Usia Age	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang cukup produktif dan tingkat kematangan (*mature*), yaitu: • Usia 30-39 tahun 1 (satu) orang • Usia 40-49 tahun 1 (satu) orang • Usia 50-59 tahun 3 (tiga) orang • Usia 60-69 tahun 1 (satu) orang	The age diversity among members of the Board of Directors falls within a productive and mature range, as follows: • Aged 30–39 years: 1 (one) person • Aged 40–49 years: 1 (one) person • Aged 50–59 years: 3 (three) people • Aged 60–69 years: 1 (one) person
Pendidikan Education	Jenjang pendidikan anggota Dewan Direksi meliputi tingkat Sarjana, dan Magister dengan berbagai bidang pendidikan seperti Manajemen, Hubungan Internasional, Kebijakan Publik, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Teknik lainnya.	The educational background of the members of the Board of Directors includes Bachelor's and Master's degrees in various fields such as Management, International Relations, Public Policy, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, and other Engineering disciplines.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pengalaman kerja yang beragam, antara lain menjadi Direksi dan/atau General Manager dan/atau Executive Vice President dan/atau atau posisi penting lainnya pada Bidang Ketenagalistrikan, Pembangkit, Pengadaan, Logistik dan Transportasi, Keuangan, Energi, Lingkungan & K3 dan Perencanaan Korporat.	Diverse work experience, including being a Director and/or General Manager and/or Executive Vice President and/or or other important positions in the fields of Electricity, Generation, Procurement, Logistics and Transportation, Finance, Energy, Environment & K3 and Corporate Planning.

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi telah menandatangani Kontrak Manajemen yang memuat Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicators*/ KPI), termasuk indikator terkait keterwakilan perempuan dalam nominated talent serta generasi milenial (usia <42 tahun) dalam nominated talent. Pencantuman indikator ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam mendorong keberagaman dan regenerasi kepemimpinan secara terukur dan berkelanjutan.

The Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors have signed a Management Contract which includes Key Performance Indicators (KPIs) related to women in nominated talent and millennials (<42 years old) in nominated talent. The inclusion of this indicator reflects the Company's commitment to promoting diversity and leadership development in a measured and sustainable manner.

Implementasi indikator tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian kinerja, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya pipeline talenta yang inklusif, kompetitif, dan adaptif terhadap dinamika bisnis. Dengan demikian, Perusahaan dapat memastikan tersedianya calon pemimpin yang memiliki perspektif beragam, kapasitas kepemimpinan yang kuat, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Adapun tujuan dari implementasi keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan indikator tersebut meliputi:

1. Untuk percepatan karir dengan ide-ide kreatif dari *talent milenial*.
2. Untuk peningkatan pemberdayaan dan kesetaraan perempuan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

The implementation of these indicators not only serves as a performance control tool but also as a driver for creating an inclusive, competitive, and adaptive talent pipeline in response to business dynamics. Thus, the Company can ensure the availability of future leaders with diverse perspectives, strong leadership capacity, and readiness to face future challenges. The objectives of implementing diversity in the Board of Directors and Board of Commissioners, based on these indicators, include:

1. To accelerate careers through creative ideas from millennial talent.
2. To increase women's empowerment and equality in order to improve company performance.

Implementasi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas arahan Pemegang Saham melalui RUPS agar Perusahaan secara konsisten memperhatikan dan memenuhi target komposisi talenta perempuan serta talenta milenial. Pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis kinerja rasio *talent* perempuan dan rasio talent pada *Subholding* dan Anak Perusahaan PT PLN (Persero), sehingga tercipta keselarasan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan grup.

This implementation follows up on the Shareholders' directives through the GMS to ensure the Company consistently prioritizes and meets its target composition of female and millennial talent. The implementation refers to the technical guidelines for the performance of female talent ratios and talent ratios in PT PLN (Persero) Subholdings and Subsidiaries, thus creating alignment in the management and development of human resources within the group.

Sebagai tindak lanjut, sepanjang tahun 2025 Perusahaan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mencapai target tersebut sekaligus memperkuat aspek keberagaman dalam kepemimpinan. Upaya-upaya tersebut antara lain meliputi:

1. Proses *talent acquisition* dan *talent classification* untuk menyiapkan *longlist talent*.
2. Proses *Talent Committee Meeting* (TCM) untuk menentapkan *top talent* muda dan *top talent* perempuan.

As a follow-up, throughout 2025, the Company undertook various strategic efforts to achieve that target while also strengthening diversity aspects in leadership. These efforts include:

1. Talent acquisition and talent classification process to prepare longlist talent.
2. Proses Talent Committee Meeting (TCM) to determine millennial top talent dan women top talent.

3. Penyampaian surat *selected talent* kepada Komut PLN NP dilampirkan BA TCM.
4. Penyampaian surat *nominated talent* kepada Direktur Legal dan *Human Capital* (LHC) PT PLN (Persero) pada 27 Maret 2025.
5. Perencanaan dan realisasi program pengembangan 2025 dengan capaian 100%.
6. Monitoring berkala program pengembangan.
7. Monitoring *talent mobility*.
8. Laporan evaluasi kesiapan talenta.

Keberhasilan penerapan keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dari capaian kinerja Perusahaan yang melampaui target yang telah ditetapkan. Rasio *talent* milenial mencapai 21,28% dari target 19% dengan tingkat pencapaian target sebesar 112%, sementara rasio talent perempuan mencapai 38,30% dari target 32% dengan tingkat pencapaian target sebesar 120%.

Capaian ini menunjukkan efektivitas upaya Perusahaan dalam mendorong keterwakilan generasi muda dan perempuan dalam kaderisasi kepemimpinan, sekaligus memperkuat komitmen terhadap keberagaman dan keberlanjutan organisasi.

3. Submission of the selected talent letter to PLN NP President Commissioner is attached with BA TCM.
4. Submission of nominated talent letters to the Director of Legal and Human Capital (LHC) of PT PLN (Persero) by March 27, 2025.
5. Planning and implementation of the 2025 development program with 100% achievement.
6. Regular monitoring of the development program.
7. Monitoring of talent mobility.
8. Talent readiness evaluation report.

The success of implementing diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is reflected in the Company's performance achievements, which have exceeded the set targets. The ratio of millennial talent reached 21.28% of the target 19%, with a target achievement rate of 112%. Moreover, the ratio of female talent reached 38.30% of the target 32%, with a target achievement rate of 120%.

This achievement demonstrates the effectiveness of the Company's efforts in promoting the representation of young people and women in the leadership pipeline, while also reinforcing the commitment to organizational diversity and sustainability.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of the Board of Commissioners

Pembentukan Organ Pendukung Dewan Komisaris di Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang setara, dan dapat membentuk komite lainnya sesuai kebutuhan.

The establishment of Supporting Organizations for the Board of Commissioners in the Company refers to the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs and Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organizations and Human Resources. Based on these provisions, in order to support the effectiveness of the implementation of supervisory duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to establish at least the Secretariat of the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclatures with equivalent functions, and may establish other committees as needed.

Hingga akhir tahun 2025, Organ Pendukung Dewan Komisaris PLN Nusantara Power telah dibentuk secara memadai dan berfungsi untuk memperkuat kualitas pengawasan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih komprehensif. Adapun Organ Pendukung Dewan Komisaris PLN Nusantara Power terdiri dari:

1. Sekretaris Dewan Komisaris;
2. Komite Audit;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Komite Lainnya dengan nomenklatur Komite Investasi dan Manajemen Risiko.

Until the end of 2025, the Supporting Organ of the Board of Commissioners of PLN Nusantara Power had been adequately formed and functions to strengthen the quality of supervision and support more comprehensive decision-making. The Supporting Organ consists of:

1. Board of Commissioners' Secretariat;
2. Audit Committee;
3. Nomination and Remuneration Committee;
4. Other Committees under the title of Investment and Risk Management Committee.

Bagan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung
Chart of the Board of Commissioners and Supporting Organs

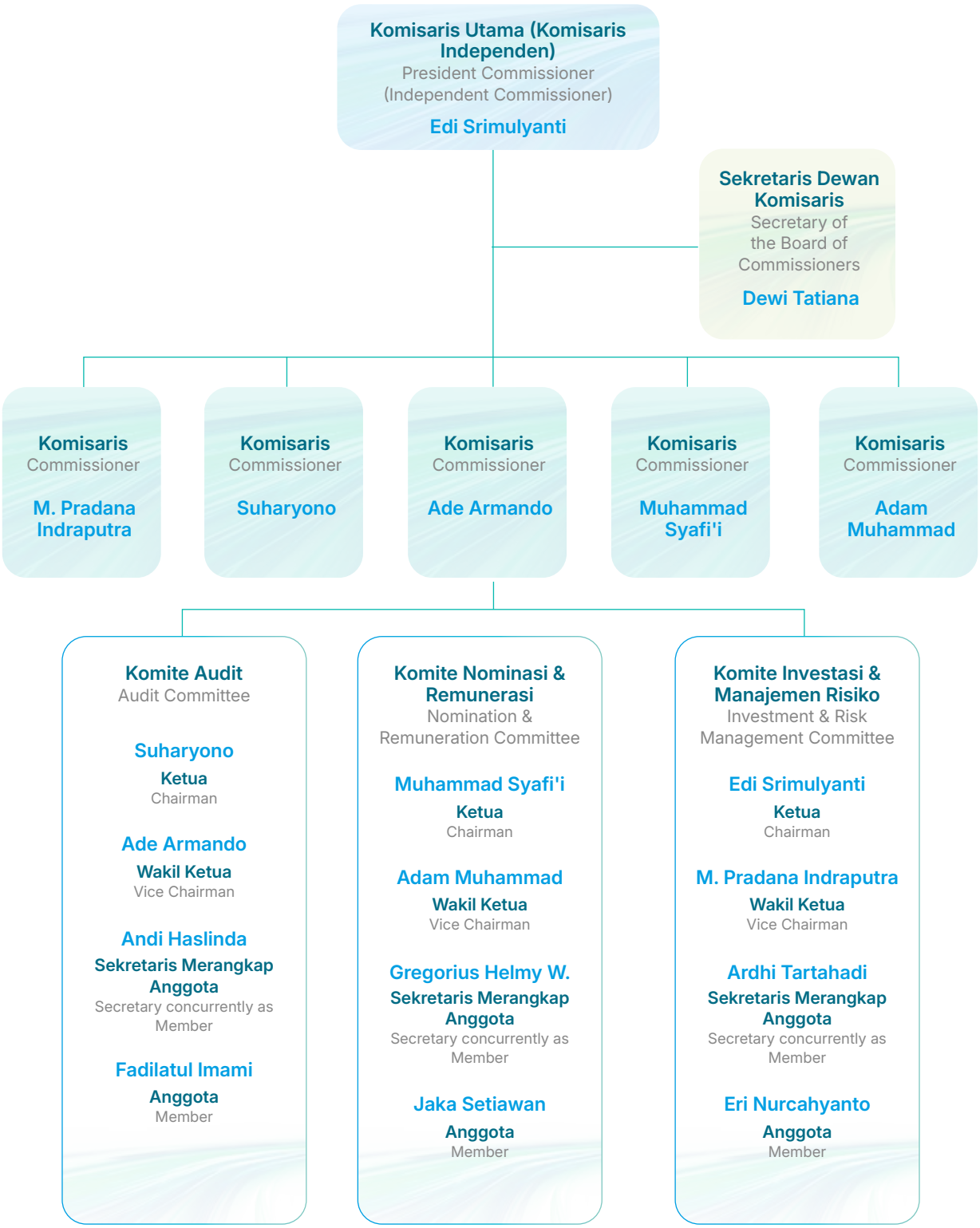

Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Secretary

Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan didukung oleh staf yang memiliki kompetensi administratif serta pemahaman tata kelola perusahaan. Pengangkatan dan pemberhentiannya sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Komisaris. Untuk menjaga independensi dan objektivitas, Sekretaris berasal dari luar struktur operasional perusahaan, sehingga fungsi pengawasan tetap bebas dari pengaruh manajemen dan memiliki integritas yang kuat.

Sebagai organ pendukung, Sekretariat Dewan Komisaris berperan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Tugasnya meliputi koordinasi kegiatan pengawasan, penyusunan agenda kerja, penyampaian informasi strategis, serta pendokumentasian keputusan, kebijakan, dan risalah rapat. Selain itu, Sekretariat menjamin bahwa setiap pengambilan keputusan didasarkan pada data yang akurat, relevan, dan mutakhir, serta didukung oleh administrasi yang tertib, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

The Board of Commissioners' Secretariat is led by a Secretary who is directly responsible to the Board of Commissioners and supported by staff with administrative competence and an understanding of corporate governance. The appointment and dismissal are entirely the authority of the Board of Commissioners. To maintain independence and objectivity, the Secretary comes from outside the Company's operational structure, ensuring that the supervisory function remains free from management influence and possesses robust integrity.

As a supporting organ, they play a role in ensuring the smooth execution of the Board of Commissioners' duties and functions. Its duties include coordinating supervisory activities, preparing work agendas, delivering strategic information, and documenting decisions, policies, and meeting minutes. Additionally, the Secretariat ensures that every decision-making process is based on accurate, relevant, and up-to-date data, supported by orderly, transparent, and well-documented administration.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners' Secretary

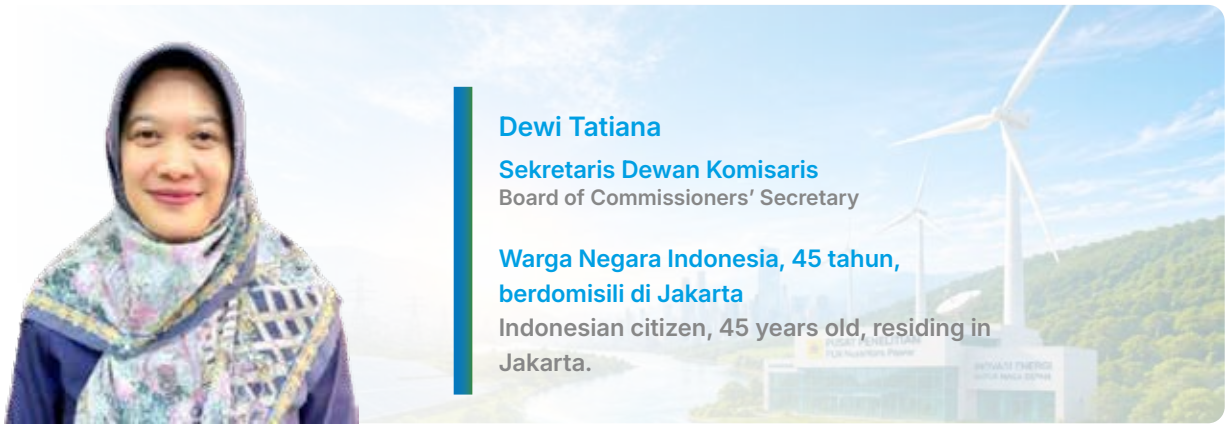

Dewi Tatiana

Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Secretary

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 45 years old, residing in Jakarta.

Dasar Pengangkatan
Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 004.K/DK-PLN NP/2025 tanggal 25 Juni 2025.

Basis for Appointment
Appointed as Secretary to the Board of Commissioners in 2025 based on the Board of Commissioners Decree No. 004.K/DK-PLN NP/2025 on June 25, 2025.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri dari Universitas Gadjah Mada tahun 2004 dan saat ini tengah melanjutkan pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Negeri Padang. Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Certified Human Resource General Manager (CHRGM) dari BNSP.

Rangkap Jabatan
- Di PT PLN NP: -
- Di Perusahaan/Instansi Lain: Vice President Perencanaan Dan Evaluasi Tenaga Kerja PT PLN (Persero)

Riwayat Pekerjaan
Berkarir sebagai Vice President Manajemen Kinerja Human Capital PT PLN (Persero) (2024 - 2025), Vice President Pengembangan Talenta Area 1 PT PLN (Persero) (2023 - 2024), Manager Pengembangan Talenta UID Jakarta Raya PT PLN (Persero) (2022 -2023), Manager Pengembangan Talenta UID Sumatera Utara dan UIP Sumbagut PT PLN (Persero (2021 - 2022) dan Manager Pengembangan SDM UID Sumatera Utara PT PLN (Persero) (2018-2021).

Education
She completed her Bachelor's degree in Industrial Engineering from Universitas Gadjah Mada in 2004 and is currently pursuing a Master's degree in Management at Universitas Negeri Padang. In addition, she completed non-formal education programs to obtain certifications, including the Certified Human Resource General Manager (CHRGM) from BNSP.

Concurrent Positions
- At PLN NP: None
- At Other Companies/Institutions: Vice President of Workforce Planning and Evaluation of PT PLN (Persero)

Career Milestones
Served as Vice President of Human Capital Performance Management of PT PLN (Persero) (2024–2025), Vice President of Talent Development for Area 1 of PT PLN (Persero) (2023–2024), Talent Development Manager for Jakarta Raya UID of PT PLN (Persero) (2022–2023), Talent Development Manager for the North Sumatera UID and Sumbagut UIP of PT PLN (Persero) (2021–2022), and Human Capital Development Manager for the North Sumatera UID of PT PLN (Persero) (2018–2021).

Pedoman Kerja dan Tugas Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris
Work Guidelines and Duties of the Secretary to the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai *Corporate Governance Code*, *Board Manual*, dan BoC *Manual* dalam mendukung kelancaran tugas Dewan Komisaris. Sekretariat juga bertanggung jawab menjaga ketertiban administrasi serta memastikan seluruh dokumen kegiatan terdokumentasi dan tersimpan dengan baik guna mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Sekretaris memberikan dukungan administrasi dan koordinasi untuk membantu fungsi pengawasan serta memastikan penerapan prinsip GCG berjalan secara konsisten dan efektif. Adapun tugas dan tanggung jawabnya antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
   a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat Dewan Komisaris.
   b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

The Board of Commissioners' Secretary adheres to the principles of good corporate governance pursuant to the Corporate Governance Code, Board Manual, and BoC Manual to support the smooth execution of the Board of Commissioners' duties. The Secretariat is also responsible for maintaining administrative order and ensuring that all activity documents are well-documented and stored to support transparency and accountability. In addition, she provides administrative and coordination support to assist the oversight function and ensure the consistent and effective implementation of GCG principles. The duties and responsibilities include, among others, the following:

1. Carrying out activities to support the Board of Commissioners in performing its duties, such as:
   a. Preparing meetings, including supporting materials for the Board of Commissioners' meetings.
   b. Drafting meeting minutes in accordance with the provisions of the Articles of Association.

c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
d. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
e. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

2. Memastikan Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
3. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
4. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
5. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
6. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perseroan.

c. Administering incoming and outgoing correspondence, meeting minutes, and other documents of the Board of Commissioners.
d. Preparing draft work plans and budgets for the Board of Commissioners.
e. Drafting reports of the Board of Commissioners.
f. Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners.

2. Ensuring the Board of Commissioners complies with prevailing laws and regulations and upholds the principles of good corporate governance.
3. Providing the Board of Commissioners with the required information on a regular basis and/or as requested.
4. Coordinating with committee members, when necessary, to facilitate the duties of the Board of Commissioners.
5. Acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and external parties.
6. Ensuring proper storage and safekeeping of documents related to the Board of Commissioners' activities within the Company.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris
Implementation of Duties by the Secretary to the Board of Commissioners

Berdasarkan *Corporate Governance Code*, *Board Manual*, dan *Board of Commissioners Manual* (BoC *Manual*), Sekretaris Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 melaksanakan tugasnya untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap kegiatan operasional dan tata kelola perusahaan. Pelaksanaan peran tersebut mencakup berbagai aspek administrasi dan koordinasi, yang secara umum meliputi:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris.
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Dewan Komisaris.

Based on the Corporate Governance Code, Board Manual, and Board of Commissioners Manual (BoC Manual), throughout 2025, the Board of Commissioners' Secretary performed her duties to support the effectiveness of the Board of Commissioners' supervisory function over the Company's operational activities and governance. The implementation of this role encompasses various aspects of administration and coordination, which generally include:

1. Preparing meetings, including supporting materials (briefing sheet) for the Board of Commissioners.
2. Drafting minutes of meeting for the Board of Commissioners.
3. Administering the Board of Commissioners'' documents.
4. Preparing draft work plans and budgets for the Board of Commissioners.
5. Performing administrative affairs of the Board of Commissioners.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris
Performance Assessment of Board of Commissioners' Secretary

Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. Penilaian dilakukan menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan mengacu pada berbagai indikator kinerja yang relevan. Fokus utama evaluasi mencakup tingkat pencapaian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris, khususnya dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, serta indikator lain yang dinilai penting oleh Dewan Komisaris.

Performance evaluation of the Board of Commissioners' Secretariat is conducted periodically, at least once a year. The assessment is performed using methods established by the Board of Commissioners, referring to various relevant performance indicators. The main focus of the evaluation includes the level of achievement in the execution of her duties and responsibilities, particularly in supporting the supervisory function of the Board of Commissioners, as well as other indicators deemed important by the Board of Commissioners.

Komite Audit
Audit Committee

Pembentukan Komite Audit mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

The establishment of the Audit Committee refers to applicable legal regulations, including Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOEs Organs and Human Capital.

Sebagai organ pendukung yang bersifat independen, Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan perannya, Komite Audit memiliki posisi strategis dalam memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi audit, penerapan sistem pengendalian internal, serta berbagai kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

As an independent supporting organ, the Audit Committee is formed to assist the Board of Commissioners in conducting supervisory and advisory functions to the Board of Directors. In performing its role, the Audit Committee holds a strategic position in ensuring the effectiveness of audit function implementation, the application of internal control systems, and various other supervisory activities pursuant to those assigned by the Board of Commissioners.

Pengangkatan dan Pemberhentian serta Ketentuan Masa Jabatan Komite Audit
Appointment, Dismissal, and Provisions of the Audit Committee's Term of Office

Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PER-3/MBU/03/2023. Keanggotaan komite mengharuskan sekurang-kurangnya satu anggota memiliki latar belakang

Audit Committee members must meet the requirements as stipulated in PER-3/MBU/03/2023. Committee membership requires at least one member to have an independent background or expertise in accounting

independen atau keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, serta sekurang-kurangnya satu anggota lainnya memiliki pemahaman tentang industri atau bisnis Perseroan.

or finance, and at least one other member to have an understanding of the Company's industry or business.

Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan Ketua dan anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris memiliki masa jabatan yang mengikuti masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Komite Audit yang tidak berasal dari Dewan Komisaris menjabat paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dewan Komisaris tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Komite Audit sewaktu-waktu.

The Board of Commissioners appoints and dismisses the Chairperson and members of the Audit Committee. Audit Committee members from the Board of Commissioners have a term of office that follows the term of office as members of the Board of Commissioners, as determined by the GMS. Those who are not from the Board of Commissioners serve for a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum period of 2 (two) years. The Board of Commissioners retains the authority to dismiss Audit Committee members at any time.

Susunan dan Periode Jabatan Komite Audit
Composition and Period of Office of the Audit Committee

Komite Audit memiliki seorang Ketua yang berasal dari anggota Dewan Komisaris. Komite Audit juga dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang tidak berasal dari Dewan Komisaris. Salah satu anggota tersebut merangkap sebagai Sekretaris Komite. Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan Ketua serta anggota Komite Audit melalui Keputusan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2025, Komite Audit mengalami beberapa kali perubahan susunan. Keputusan Dewan Komisaris PLN NP Nomor 004.K/DK-PLN NP/2024 tanggal 10 Juli 2024 menetapkan susunan Komite Audit sebagai berikut:

The Audit Committee has a Chairperson who is a member of the Board of Commissioners. Additionally, the Audit Committee is assisted by at least 2 (two) members who are not from the Board of Commissioners. One of these members also serves as the Committee Secretary. The Board of Commissioners appoints and dismisses the Chairperson and members of the Audit Committee through a Board of Commissioners Decision. Throughout 2025, the Audit Committee underwent several changes in its composition. The Board of Commissioners of PLN NP Decision Number 004.K/DK-PLN NP/2024 dated July 10, 2024, determined the composition of the Audit Committee as follows:

Susunan Komite Audit Periode 1 Januari - 30 Juni 2025
Composition of the Audit Committee in January 1-June 30, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office
Kenedy	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Hukum Law	Kesatu First
Widjono Hardjanto	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	Hukum Law	Kesatu First
Ericson Saragi Sidabutar	Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently serving as Member	Akuntansi, Keuangan dan Internal Audit Accounting, Finance, and Internal Audit	Kesatu First
Andi Haslinda	Anggota Member	Akuntansi, Keuangan dan Manajemen Risiko Accounting, Finance, and Risk Management	Kesatu First

Komite Audit selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PLN NP Nomor 007.K/DK-PLN NP/2025 tanggal 25 Juni 2025 dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

The Audit Committee subsequently underwent changes based on the Board of Commissioners' Decision Number 007.K/DK-PLN NP/2025 dated June 25, 2025, with the following composition:

Susunan Komite Audit Periode 1 Juli 2025 - 3 Juli 2025
Composition of the Audit Committee in July 1-July 3, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office
Kenedy	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Hukum Law	Kesatu First
Andi Haslinda	Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently serving as Member	Akuntansi, Keuangan dan Manajemen Risiko Accounting, Finance, and Risk Management	Kesatu First
Fadilatul Imami	Anggota Member	Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management	Kesatu First

Komite Audit kembali mengalami perubahan dikarenakan Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) tanggal 26 Juni 2025, dilakukan pemberhentian dan penetapan anggota Dewan Komisaris. Kemudian berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PLN NP Nomor 009.K/DK-PLN NP/2025 tanggal 4 Juli 2025 ditetapkan susunan Komite Audit sebagai berikut:

The Audit Committee was again changed based on the Circular Shareholders' Resolution dated June 26, 2025, for the dismissal and appointment of the Board of Commissioners member. Subsequently, based on Decision of the Board of Commissioners of PLN NP Number 009.K/DK-PLN NP/2025 dated July 4, 2025, with the following Audit Committee composition:

Susunan Komite Audit 4 Juli - 31 Desember 2025
Composition of the Audit Committee in July 4-December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office	Masa Jabatan Term of Office
Suharyono	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Intelijen keamanan dan penyidikan Security intelligence and investigations	Kesatu First	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan Following the term of office of the Board of Commissioners in the Company
Ade Armando	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	Komunikasi Communication	Kesatu First	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan Following the term of office of the Board of Commissioners in the Company
Andi Haslinda	Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently serving as Member	Akuntansi, Keuangan dan Manajemen Risiko Accounting, Finance, and Risk Management	Kesatu First	Sejak 10 Juli 2024 – 31 Desember 2025 10 July 2024 – 31 December 2025
Fadilatul Imami	Anggota Member	Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management	Kesatu First	Sejak 4 Juli 2025 – saat ini 4 July 2025 - present

Profil Anggota Komite Audit
Profile of Audit Committee Members

Suharyono

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun. Berdomisili di Bandung.
Indonesian citizen, 59 years old, residing in Bandung.

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta (2001) dan gelar Magister di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Eka Sakti, Padang (2024). Beliau memiliki sertifikasi Certified in Risk Governance Professional (CRGP).

Dasar Pengangkatan
Diangkat sebagai Ketua Komite Audit melalui Keputusan Dewan Komisaris PLN NP Nomor 009.K/DK-PLN NP/2025 tanggal 4 Juli 2025.

Riwayat Jabatan
Memulai karir di Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat terakhir IRJEN POL - Kapolda Sumatera Barat. Berbagai jabatan di Kepolisian pernah didudukinya di antaranya menempati posisi sebagai Direktur Monitoring BIN (2018), Kapolresta Banjarmasin (2011), Kapolres Sukoharjo (2009), Kasat Intelkam - Polda Jateng (2007), Wakapolres KPPP Tanjung Perak dan Pasuruan (2003). Beliau juga terlibat dalam penugasan operasi khusus pada penanganan konfil Aceh dan Konflik Ambon. Selain itu beliau juga pernah mendapat penugasan luar negeri diantaranya International Law Enforcement Academy (ILEA) Bangkok, Sistem Kepolisian di Jepang, pelatihan di Mexico, Jerman, Perancis, Belanda dan OPS PAM RI-1 di India. Selanjutnya, karir di luar Kepolisian yang pernah dijalani oleh beliau diantaranya LO DPR RI (2016) dan Penyidik Utama OJK (2020)

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
- Di Perusahaan/Instansi Lain: Tidak Ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Education Background
He earned a Bachelor's degree from the Police Academy in Jakarta (2001) and a Master's degree in Law from Universitas Eka Sakti in Padang (2024). He holds a Certified Risk Governance Professional (CRGP) certification.

Basis for Appointment
Appointed as Chairman of the Audit Committee by the Board of Commissioners' Decision No. 009.K/DK-PLN NP/2025 dated July 4, 2025.

Position Milestones
Starting a career in the Republic of Indonesia Police with the last rank of IRJEN POL - West Sumatera Regional Police Chief. He has held various positions in the police force, including serving as the Director of Monitoring at BIN (2018), Chief of Police in Banjarmasin (2011), Chief of Police in Sukoharjo (2009), Head of Intelligence and Security at Central Java Police (2007), and Deputy Chief of Police at KPPP Tanjung Perak and Pasuruan (2003). He was also involved in special operations assignments in handling the Aceh conflict and the Ambon conflict. In addition, he has also received overseas assignments, including the International Law Enforcement Academy (ILEA) in Bangkok, the Police System in Japan, training in Mexico, Germany, France, the Netherlands, and OPS PAM RI-1 in India. Next, his career outside the Police Force included positions such as LO DPR RI (2016) and Senior Investigator at OJK (2020).

Concurrent Position
- In PLN NP: Member of the Company's Board of Commissioners
- In Other Companies/Institutions: None.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the Major and Controlling Shareholders.

Ade Armando

Wakil Ketua Komite Audit
Vice Chairman of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 64 tahun.
Berdomisili di Bogor.
Indonesian citizen, 64 years old, residing in Bogor.

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Sarjana di bidang Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia, gelar Master of Science di bidang *Centre of Study of Population* dari Florida State University (1991) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia. Beliau memiliki sertifikasi *Certified in Risk Governance Professional* (CRGP).

Dasar Pengangkatan
Diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Audit melalui Keputusan Dewan Komisaris PLN NP Nomor 009.K/DK-PLN NP/2025 tanggal 4 Juli 2025.

Riwayat Jabatan
Mengawali karir di bidang jurnalistik dan memimpin beberapa redaksi, serta pengisi tetap kolom di berbagai media diantaranya Madinaonline.id, majalah Madina, Ulbersih.org, Harian Republika, Jurnal Prisma hingga saat ini memimpin Redaksi Cokro TV. Beliau juga aktif di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga pernah menduduki beberapa posisi manajerial profesional, diantaranya Ketua Program S-1 Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesi (2001-2003), Ketua Tim Konsultan Program Public Awareness, Badan Pemeriksa Keuangan (2008-2010), dan Direktur Komunikasi Strategis, Saiful Mujani Research and Consulting (2014-2021).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
- Di Perusahaan/Instansi Lain: Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua dan Pemimpin Redaksi Cokro TV

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Education Background
He holds a Bachelor's degree in Communication Science from the Universitas Indonesia, a Master's degree in the Centre of Study of Population from Florida State University (1991), and a Ph.D. in Communication Science from Universitas Indonesia. He is a Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Basis for Appointment
Appointed as Vice Chairman of the Audit Committee through the PLN NP Board of Commissioners' Decision No. 009.K/DK-PLN NP/2025 dated July 4, 2025.

Position Milestones
He began his career in journalism and has led several editorial teams, as well as serving as a regular columnist for various media outlets, including Madinaonline.id, Madina magazine, Ulbersih.org, Harian Republika, and Jurnal Prisma; he currently leads the editorial team at Cokro TV. He is also active in several non-governmental organizations and had held several professional managerial positions, including Head of the Undergraduate Program in the Department of Communication Science at Universitas Indonesia (2001–2003), Head of the Public Awareness Program Consultant Team at the Audit Board (2008–2010), and Director of Strategic Communications at Saiful Mujani Research and Consulting (2014–2021).

Concurrent Position
- In PLN NP: Member of the Company's Board of Commissioners
- In Other Companies/Institutions: Chairperson of the Indonesian Movement for All and Editor-in-Chief of Cokro TV

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the Major and Controlling Shareholders.

Andi Haslinda

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 45 years old, residing in Jakarta.

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi dari Universitas Hasanuddin tahun 2002 dan S2 Manajemen Keuangan dari Universitas Hasanuddin tahun 2007.
Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya *Certified Risk Governance Proffesional* (CRGP), *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO), dan *Certified Internal Audit Executive* (CIAE).

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power 004.K/DK-PLN NP/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Riwayat Pekerjaan
Berkarir sebagai VP Manajemen Risiko Keuangan dan Niaga PT PLN (Persero) (2024-sekarang), VP Manajemen Risiko Komersial, Digital dan Enabler PT PLN (Persero) (2021-2024), Senior Manajer Keuangan PLN UIW MMU (2019-2021), Manajer Akuntansi PLN UIP Sulbagsel (2013-2019).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Tidak Ada
- Di Perusahaan/Instansi Lain: Vice President Manajemen Risiko Keuangan dan Niaga PT PLN (Persero)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali.

Education Background
Completed a Bachelor's degree in Accounting from Universitas Hasanuddin in 2002 and a Master's degree in Financial Management from Universitas Hasanuddin in 2007.
Apart from that, non-formal education that has been attended to obtain certification includes Certified Risk Governance Professional (CRGP), Qualified Chief Risk Officer (QCRO), and Certified Internal Audit Executive (CIAE).

Basis for Appointment
Appointed based on the Decision of the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power 004.K/DK-PLN NP/2024 dated July 10, 2024.

Position Milestones
Her career as VP of Financial and Commercial Risk Management of PT PLN (Persero) (2024-present), VP of Commercial, Digital, and Enabler Risk Management of PT PLN (Persero) (2021-2024), Senior Finance Manager of PLN UIW MMU (2019-2021), Accounting Manager of PLN UIP South Sulawesi (2013-2019).

Concurrent Position
- In PLN NP: None
- In Other Companies/Institutions: Vice President of Financial and Commercial Risk Management of PT PLN (Persero)

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, but she has affiliation with the Major and Controlling Shareholders.

Fadilatul Imami

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 40 years old, residing in Jakarta.

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya tahun 2007 dan saat ini tengah melanjutkan pendidikan S2 Magister Bisnis Administrasi di SBM Institut Teknologi Bandung. Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya *Qualified Risk Management Officer* (QRMO), *Certified International Professional Negotiator* (CIPN), *Certified Risk Governance Professional* (CRGP).

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power 006.K/DK-PLN NP/2025 tanggal 25 Juni 2025.

Riwayat Pekerjaan
Berkarir sebagai VP Pendanaan dan Hibah Dalam Negeri PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2024-sekarang), Manajer Pendanaan dan Hibah Luar Negeri PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2024), Manajer Pengelolaan dan Pembayaran Pinjaman PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2022-2024), Manajer Administrasi Pinjaman PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2021-2022).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Tidak Ada
- Di Perusahaan/Instansi Lain: VP Pendanaan dan Hibah Dalam Negeri PT PLN (Persero)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali.

Education Background
She earned her Bachelor's degree in Industrial Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember in Surabaya in 2007 and is currently pursuing a Master's degree in Business Administration at the SBM Institut Teknologi Bandung. In addition, she has completed non-formal training programs to obtain certifications such as Qualified Risk Management Officer (QRMO), Certified International Professional Negotiator (CIPN), and Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Basis for Appointment
Appointed based on the Decision of the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power 006.K/DK-PLN NP/2025 dated June 25, 2025.

Position Milestones
She currently serves as Vice President of Domestic Funding and Grants of PT PLN (Persero) Head Office (2024–present); previously served as Manager of Foreign Funding and Grants of PT PLN (Persero) Head Office (2024); Manager of Loan Management and Payments of PT PLN (Persero) Head Office (2022–2024); Loan Administration Manager of PT PLN (Persero) Head Office (2021–2022).

Concurrent Position
- In PLN NP: None
- In Other Companies/Institutions: Vice President of Domestic Funding and Grants of PT PLN (Persero)

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, but she has affiliation with the Major and Controlling Shareholders.

Independensi Komite Audit
Independence of the Audit Committee

Independensi Komite Audit aspek penting dalam menjaga objektivitas dan integritas pada setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan, evaluasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas pengendalian internal. Anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The independence of the Audit Committee is an essential aspect in maintaining objectivity and integrity in every implementation of supervisory activities, financial report evaluations, compliance with regulations, and the effectiveness of internal controls. The members of the Audit Committee have met the following independence criteria:

Independensi Komite Audit
Independence of the Audit Committee

Kriteria Independensi Independence Criteria	Suharyono	Ade Armando	Andi Haslinda	Fadilatul Imami
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person in a public accounting firm, legal consultant firm, or other party who provided audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Does not own shares either directly or indirectly in the Company.	✓	✓	✓	✓
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last six months.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda. Not having blood family relationships with members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners up to the second degree, either in a straight line or sideways or by marriage.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan Has no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities; and	✓	✓	✓	✓
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Not currently in an institution whose business activities are providing services to the Company.	✓	✓	✓	✓

Pedoman Kerja Komite Audit
Audit Committee Work Guidelines

Piagam Komite Audit disusun sebagai pedoman kerja bagi Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai dasar pengaturan ketentuan kerja Komite Audit. Piagam tersebut secara berkala dikaji dan dapat diperbarui

The Audit Committee Charter is prepared as a work guideline for the Audit Committee, established by the Board of Commissioners on December 31, 2018, as the basis for regulating the work provisions of the Audit Committee. The charter is periodically reviewed and

apabila diperlukan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan dinamika organisasi, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan praktik terbaik (*best practices*).

Ruang lingkup Piagam Komite Audit PLN Nusantara Power meliputi beberapa ketentuan, yaitu Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta dasar hukum. Bab II Keanggotaan dan Masa Jabatan yang mencakup pembentukan Komite Audit, keanggotaan, masa jabatan anggota, hubungan kerja dengan organ pendukung Direksi dan Dewan Komisaris, serta evaluasi anggota. Bab III Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan yang mengatur tugas dan tanggung jawab, kewenangan, kode etik, independensi, serta pertanggungjawaban. Bab IV Rapat, Pelaporan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Komite Audit yang meliputi ketentuan rapat, pelaporan, anggaran, dan evaluasi kinerja. Sementara itu, Bab V memuat ketentuan penutup.

can be updated if necessary to ensure its alignment with organizational dynamics, applicable laws and regulations, and the implementation of best practices.

The scope of the PLN Nusantara Power Audit Committee Charter includes several provisions as follows: Chapter I Introduction, which contains the background, purposes and objectives, and legal basis. Chapter II Membership and Term of Office, which covers the establishment of the Audit Committee, membership, term of office of members, working relationship with the supporting organs of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and member evaluation. Chapter III Duties, Responsibilities, and Authority; it regulates duties and responsibilities, authority, code of conduct, independence, and accountability. Chapter IV Meetings, Reporting, Budget, and Performance Evaluation of the Audit Committee, which includes provisions on meetings, reporting, budget, and performance evaluation. Meanwhile, Chapter V contains the closing provisions.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Komite Audit memiliki tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan perannya, Komite Audit bekerja secara kolektif untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian konsultasi terkait penerapan audit internal, efektivitas pengendalian internal, serta kecukupan proses pelaporan keuangan. Adapun tugas pokok Komite Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi, dan sistem audit Perusahaan.
2. Melakukan analisis dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal maupun Auditor Eksternal.
3. Bersama dengan komite lainnya, melakukan analisis dan memberikan masukan sesuai kompetensi yang relevan kepada Dewan Komisaris atas:
   a. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan;

The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners in performing its duties. In performing its role, the Audit Committee works collectively to support the Board of Commissioners in implementing supervisory and advisory functions related to the implementation of internal audits, the effectiveness of internal controls, and the adequacy of financial reporting processes. The main duties of the Audit Committee, as outlined in its Charter, are as follows:

1. Analyze and provide input to the Board of Commissioners on the Company's policies, guidelines, strategies, and audit systems.
2. Analyze and provide input to the Board of Commissioners on the implementation of audit activities conducted by the Internal Audit Unit and External Auditors.
3. Together with other committees, analyze and provide input, according to relevant competencies, to the Board of Commissioners on:
   a. Implementation of the Company's Articles of Association and Board Manual;

b. Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
d. Laporan Tahunan, Triwulanan, dan Laporan Kinerja Bulanan;
e. *Good Corporate Governance*;
f. *Key Performance Indicator* Perseroan; dan
g. *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris.

4. Melakukan analisis, memberikan masukan, dan usulan kepada Dewan Komisaris khususnya atas kebijakan dan pelaksanaan:
   a. *Three Lines of Defense;* dan
   b. *Whistle Blowing System.*
5. Mempelajari, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap Laporan Manajemen dan Kinerja Keuangan yang disusun oleh Direksi.
6. Melakukan analisis dan pemantauan atas PKAT (Program Kerja Audit Tahunan) yang dilaksanakan oleh Satuan Internal Audit, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan Perusahaan.
7. Melakukan analisis dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan serta pelaksanaan sistem pengendalian manajemen Perusahaan, meliputi antara lain pengendalian mutu, pengendalian aset, dan keuangan Perusahaan.
8. Melakukan analisis dan memastikan telah terdapat prosedur serta peraturan Perusahaan yang menjamin ketaatan terhadap GCG (*Good Corporate Governance*), serta merekomendasikan kepada Dewan Komisaris langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaannya.
9. Melakukan pemantauan dan memastikan arahan, tanggapan, penugasan, serta hasil-hasil RUPS telah terlaksana, serta merekomendasikan kepada Dewan Komisaris langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaannya.
10. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Komite Audit, melaksanakan rapat-rapat komite, membuat risalah rapat, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas komite secara berkala kepada Dewan Komisaris.
11. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan penyelesaiannya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban Komite Dewan Komisaris.
12. Menjaga kerahasiaan data serta informasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.

b. The Company's Long-Term Plan;
c. The Company's Work Plan and Budget;
d. Annual, Quarterly, and Monthly Performance Reports;
e. Good Corporate Governance;
f. The Company's Key Performance Indicators; and
g. The Board of Commissioners' Key Performance Indicators.

4. Analyze, provide input, and propose to the Board of Commissioners, particularly on the policies and implementation of:
   a. Three Lines of Defense; and
   b. Whistleblowing System.
5. Study, evaluate, and provide input on the Management and Financial Performance Reports prepared by the Board of Directors.
6. Analyze and monitor the Annual Audit Work Program (PKAT) implemented by the Internal Audit Unit, and provide recommendations to the Board of Commissioners for Company improvements.
7. Analyze and provide recommendations regarding the improvement and implementation of the Company's management control system, including quality control, asset control, and financial management.
8. Analyze and ensure that Company procedures and regulations are in place to ensure compliance with Good Corporate Governance (GCG), and recommend corrective and enhancement measures to the Board of Commissioners.
9. Monitor and ensure that the directives, responses, assignments, and results of the GMS have been implemented, and recommend corrective and enhancement measures to the Board of Commissioners.
10. Prepare the Audit Committee's activity plan and budget, conduct committee meetings, prepare meeting minutes, and submit periodic reports on the implementation of the committee's duties to the Board of Commissioners.
11. Identify matters requiring attention, ensure their resolution, and carry out other duties assigned by the Board of Commissioners within the scope of the Committee's duties and responsibilities.
12. Maintain the confidentiality of Company data and information in accordance with the provisions applicable to the Board of Commissioners.

Tanggung Jawab Komite Audit Terkait Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Responsibilities of the Audit Committee on the Appointment and Dismissal of External Auditors

Tanggung jawab Komite Audit terkait penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal mencakup pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon auditor eksternal yang akan ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan, dengan mempertimbangkan independensi, kompetensi, serta pengalaman auditor. Selain itu, Komite Audit juga melakukan evaluasi terhadap kinerja auditor eksternal selama masa penugasan, termasuk menilai kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku. Dalam hal tertentu, Komite Audit dapat memberikan rekomendasi pemberhentian auditor eksternal apabila terdapat kondisi yang tidak lagi memenuhi persyaratan independensi, kualitas, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Audit Committee's responsibility regarding the appointment and dismissal of external auditors includes providing recommendations to the Board of Commissioners regarding candidates for external auditors to be appointed to audit the Company's financial statement, considering the independence, competence, and experience of the auditors. Additionally, the Audit Committee also evaluates the performance of external auditors during the assignment period, including assessing compliance with applicable audit standards. In certain cases, the Audit Committee may recommend the dismissal of external auditors if there are conditions that no longer meet the requirements of independence, quality, or applicable legal regulations.

Rencana Program Kerja Komite Audit

Work Program Plan of the Audit Committee

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit berjalan efektif dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, disusun program kerja sebagai pedoman kegiatan tahunan. Rencana program kerja tersebut disusun setiap tahun oleh Komite Audit dengan mengacu pada tugas pokok yang tercantum dalam Piagam Komite Audit, dan merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris. Adapun rencana program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan rutin yang terdiri dari:
   a. Kegiatan internal Komite Audit yang mencakup :
      1) Evaluasi Laporan Manajemen dan Kinerja Korporat.
      2) Penyiapan surat Dewan Komisaris sesuai bidang tugas Komite Audit.
      3) Melakukan *monitoring* KPI Dewan Komisaris dan *monitoring* arahan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham sesuai RUPS.
      4) Penyiapan dan penyampaian Laporan Kinerja Komite Audit.

As a guideline for annual activities, a work program is prepared to ensure the effective execution of the Audit Committee's duties and responsibilities in supporting the Board of Commissioners' supervisory function. This work program is prepared annually by the Audit Committee, referring to the main tasks outlined in the Audit Committee Charter, and is part of the Board of Commissioners' Annual Work and Budget Plan. The Audit Committee's work program for the year 2025 is as follows:

1. Routine activities consisting of:
   a. Internal activities of the Audit Committee, including:
      1) Evaluation of Management Reports and Corporate Performance.
      2) Preparation of letters from the Board of Commissioners in line with the Audit Committee's duties.
      3) Monitoring the Board of Commissioners' KPIs and ensuring compliance with the directives of the Board of Commissioners and Shareholders according to the GMS.
      4) Preparation and submission of the Audit Committee's Performance Report.

b. Kegiatan Koordinasi Komite Audit Dengan Satuan Internal Audit, mencakup:
   1) *Review* dan Evaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
   2) Pembahasan berkala mengenai Hasil Audit Satuan Internal Audit dan Hasil Audit Eksternal.
   3) Supervisi terhadap pelaksanaan Risk Based Audit (RBA), evaluasi pengendalian internal korporat, implementasi *Quality Assurance Review*, dan Fungsi Satuan Internal Audit diluar Audit
   4) Koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP), SPI PT PLN (Persero) dan auditor eksternal lainnya.
2. Kegiatan Khusus/Non Rutin yang terdiri dari:
   a. Review dan pengkinian atas dokumen Piagam Komite Audit.
   b. Review dan Evaluasi mengenai penerapan *Three Lines of Defense* di Perusahaan
   c. Evaluasi atas rencana korporat untuk melaksanakan *Internal Control for Financial Reporting* (ICoFR)
   d. Koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris lainnya.
3. Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit.

b. Coordination activities between the Audit Committee and the Internal Audit Unit, including:
   1) Review and Evaluation of the Annual Audit Work Program (PKAT).
   2) Regular discussions on Internal Audit Unit Audit Results and External Audit Results.
   3) Supervision of the implementation of Risk-Based Audit (RBA), evaluation of corporate internal control, implementation of Quality Assurance Review, and Internal Audit Unit functions beyond audit.
   4) Coordination with Public Accounting Firms (KAP), IAU of PT PLN (Persero), and other external auditors.
2. Special/Non-Routine activities, including:
   a. Review and update of the Audit Committee Charter.
   b. Review and Evaluation of the implementation of the Three Lines of Defense in the Company.
   c. Evaluation of the corporate plan to implement Internal Control over Financial Reporting (ICoFR).
   d. Coordination with the Secretary of the Board of Commissioners and other Board Committees.
3. Competency Development Program for the Audit Committee.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit
Execution of Audit Committee Duties

Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit dalam pelaksanaan tugasnya yang dituangkan dalam rencana program kerja Komite Audit. Dalam implementasinya, Komite Audit melaksanakan berbagai kegiatan yang mencakup kegiatan telaah, pemberian masukan atau rekomendasi, serta partisipasi dalam rapat-rapat bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran manajemen, termasuk pertemuan lainnya. Komite Audit juga melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan.

The Audit Committee has an Audit Committee Charter as a guideline in the execution of its duties, which are outlined in the Audit Committee's work program plan. In its implementation, the Audit Committee performed various activities that include review activities, providing input or recommendations, as well as participating in meetings with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all levels of management, including other meetings. The Audit Committee also conducts working visits with the Board of Commissioners to support the implementation of the supervisory function.

Komite Audit menyampaikan laporan realisasi program kerja kepada Dewan Komisaris secara triwulanan. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2025 Komite Audit telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pendampingan serta memberikan masukan, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:

The Audit Committee submits quarterly reports on the realization of the work program to the Board of Commissioners. Overall, throughout 2025, the Audit Committee carried out supervisory and advisory functions and provided input on, among other things, the following matters:

1. Pembahasan strategi pencapaian Kontrak Manajemen PLN NP.
2. Arahan dalam penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2025.
3. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit.
4. Memastikan penerapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan.
5. Memastikan kesiapan progress implementasi *Internal Control Over Finansial Report* (ICoFR).
6. Penyelesaian Laporan Keuangan Audited bersama KAP.
7. Pembahasan usulan dan penghapusan Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB)
8. Pembahasan update progress kewajiban perizinan.
9. Responsif terhadap keandalan pembangkit terutama persiapan hari raya atau agenda nasional.
10. Mengikuti dan memberikan masukan pada kegiatan yang diinisiasi oleh komite lainnya.

1. Discussion of the strategy for achieving the PLN NP Management Contract
2. Guidelines for the preparation of the 2025 Annual Audit Work Program (PKAT)
3. Resolution of audit findings follow-up
4. Ensuring the implementation of Good Corporate Governance in the Company
5. Ensuring the readiness of the progress in implementing Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR).
6. Completion of the Audited Financial Statements with Public Accounting Firm (KAP)
7. Discussion of the proposal and removal of Non-Operating Fixed Assets
8. Discussion on the update progress of licensing obligations.
9. Responsive to the reliability of power plants, especially in preparation for holidays or national agendas.
10. Participating and providing input on activities initiated by other committees.

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meetings

Pelaksanaan rapat Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang menetapkan bahwa rapat diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk mendukung penyelesaian Program Kerja Komite Audit. Selain itu, BoC *Manual* juga mengatur bahwa Komite Audit wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait, khususnya fungsi keuangan dan Internal Audit, guna membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali.

The implementation of Audit Committee meetings is based on the Audit Committee Charter, which stipulates that meeting is held regularly at least once a month to support the completion of the Audit Committee's Work Program. Additionally, the BoC Manual also stipulates that the Audit Committee must hold regular meetings with the Board of Commissioners at least once a month, as well as meetings with related functions, particularly the finance and Internal Audit functions, to discuss the Company's developments and activities, both periodically and as needed. Throughout 2025, the Audit Committee held meetings 32 (thirty-two) times.

Frekuensi Rapat Internal dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit
Frequency of Internal Meetings and Attendance of Audit Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Suharyono	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	15	15	100%
Ade Armando	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	15	15	100%
Kenedy	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	17	17	100%

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Widjono Hardjanto	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	17	17	100%
Ericson Saragi Sidabutar	Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently serving as Member	17	17	100%
Andi Haslinda	Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently serving as Member	32	32	100%
Fadilatul Imami	Anggota Member	15	14	93%

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Competency Development Program for the Audit Committee

Salah satu program kerja Komite Audit adalah pengembangan kompetensi anggota Komite Audit yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, serta kemampuan teknis dan strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2025, kegiatan pengembangan kompetensi Komite Audit dilaksanakan sebagai berikut:

One of the Audit Committee's work programs is the development of the Audit Committee members' competencies, aimed at enhancing understanding, insight, as well as technical and strategic abilities in supporting the Board of Commissioners' supervisory function. Throughout 2025, the activities for the development of the Audit Committee's competencies were performed as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Competency Development Program for the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Development Program	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation
Suharyono	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	*Qualified Risk Governance Professional*	12-13 November 2025 November 12-13, 2025
Ade Armando	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	*Qualified Risk Governance Professional*	12-13 November 2025 November 12-13, 2025
Fadilatul Imami	Anggota Member	*Qualified Risk Governance Professional*	12-13 November 2025 November 12-13, 2025

Penilaian Kinerja Komite Audit
Performance Evaluation of the Audit Committee

Untuk memastikan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Audit, dilakukan evaluasi kinerja secara berkala oleh Dewan Komisaris maupun melalui penilaian mandiri (*self-assessment*). Dewan Komisaris menetapkan prosedur serta kriteria penilaian kinerja Komite Audit yang dilaksanakan sebagai bagian dari agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ pendukungnya. Adapun hasil penilaian kinerja Komite Audit tahun 2025 adalah sebagai berikut:

To ensure and enhance the effectiveness of the Audit Committee's duties, performance evaluations are conducted periodically by the Board of Commissioners or through a self-assessment. The Board of Commissioners establishes procedures and criteria for the Audit Committee's performance evaluation, implemented as part of the internal evaluation meeting agenda of the Board of Commissioners and its supporting organs. The results of the Audit Committee's performance evaluation in 2025 are as follows:

Penilaian Kinerja Komite Audit
Performance Assessment for the Audit Committee

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Andi Haslinda	Fadilatul Imami
1	Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris. Timeliness of the Board of Commissioners' activity agenda.	9	9
2	Kualitas pekerjaan. Quality of work.	9	9
3	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris. Contribution to the activities of the Board of Commissioners.	9	9
4	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID). Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID).	9	9
5	Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM). Implementation of meetings (RID, RDD, RKM).	9	9
6	Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Preparation of the Board of Commissioners Supervisory Report.	9	9
Rata-Rata Skor Average Score		**9,00**	**9,00**

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Perusahaan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai organ independen dalam struktur tata kelola perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi. Komite ini melakukan penelaahan, pengawasan, dan pemberian rekomendasi terkait pengelolaan talenta, sistem penilaian kinerja, proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan anak, kebijakan remunerasi, serta struktur organisasi Perusahaan.

The Company established the Nomination and Remuneration Committee as an independent organ within the corporate governance structure based on the applicable laws and regulations, namely Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

In carrying out its functions, the committee supports the Board of Commissioners in performing supervisory and advisory duties to the Board of Directors. This committee conducts reviews, oversight, and provides recommendations related to talent management, performance appraisal systems, the nomination process for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in subsidiary companies, remuneration policies, and the organizational structure of the Company.

Pengangkatan dan Pemberhentian serta Ketentuan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Appointment, Dismissal, and Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

Dewan Komisaris menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Ketua serta anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Anggota Komite yang berasal dari luar Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023.

The Board of Commissioners determines the appointment and dismissal of the Chair and members of the Nomination and Remuneration Committee. Committee members from outside the Board of Commissioners must meet the requirements as stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023.

Bagi anggota yang merangkap sebagai Dewan Komisaris, masa jabatan Komite mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris memiliki masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, tanpa mengurangi kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

For members who also serve as the Board of Commissioners, their term follows the Board of Commissioners' term as determined by the GMS. Those who are not from the Board of Commissioners have a term of no more than 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without reducing the authority of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Susunan dan Periode Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Composition and Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan anggota Dewan Komisaris yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang berasal dari luar Dewan Komisaris. Salah satu anggota non-Dewan Komisaris tersebut juga merangkap sebagai Sekretaris Komite. Pengangkatan dan pemberhentian Ketua serta anggota Komite ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris.

The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee is a member of the Board of Commissioners who, in its implementation, is assisted by at least 2 (two) members from outside the Board of Commissioners. One of these non-Board members also serves as the Committee Secretary. The appointment and dismissal of the Committee's Chairman and members are determined by the Board of Commissioners through a Board of Commissioners Decision.

Komite Nominasi dan Remunerasi mengalami beberapa kali perubahan susunan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PLN NP Nomor 009.K/DK-PLN NP/2025 tanggal 23 Desember 2024, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

The Nomination and Remuneration Committee underwent several changes in its composition throughout 2025. Based on the Board of Commissioners' Decision of PLN NP Number 009.K/DK-PLN NP/2025 dated December 23, 2024, the composition Committee is as follows:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi periode 1 Januari 2025 - 3 Juli 2025
Nomination and Remuneration Committee Composition January 1–July 3, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Emir Kresna Wardhana	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	*Stakeholder Management, Risk Management*	Kesatu First
Ida Nuryatin Finahari	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner	Ketenagalistrikan, manajemen risiko Electricity, risk management	Kesatu First
Elif Doka Marliska	Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently serving as Member	Ketenagalistrikan Electricity	Kesatu First
Gregorius Helmy Widyapamungkas	Anggota Member	Manajemen SDM HC Management	Kesatu First

Komite Nominasi dan Remunerasi kemudian mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris PLN NP Nomor 011.K/DK-PLN NP/2025 tertanggal 4 Juli 2025, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

The composition of the Nomination and Remuneration Committee was subsequently amended based on the PLN NP Board of Commissioners Decision No. 011.K/DK-PLN NP/2025 on July 4, 2025, with the following composition:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi periode 4 Juli 2025 - 31 Oktober 2025
Nomination and Remuneration Committee Composition July 4- October 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office	Masa Jabatan Term of Office
Muhammad Syafi'i	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Hukum, Kepatuhan Law, Compliance	Kesatu First	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan Following the term of office of the Board of Commissioners in the Company
Adam Muhammad	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner	Manajemen SDM HC Management	Kesatu First	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan Following the term of office of the Board of Commissioners in the Company
Gregorius Helmy Widyapamungkas	Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently serving as Member	Manajemen SDM HC Management	Kesatu First	23 Desember 2024 - saat ini December 23, 2024 - present
Elif Doka Marliska	Anggota Member	Ketenagalistrikan Electricity	Kesatu First	1 Agustus 2024 - 31 Oktober 2025 August 1, 2024 - October 31, 2025

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi periode 1 November 2025 - 31 Desember 2025
Nomination and Remuneration Committee Composition November 1-December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office	Masa Jabatan Term of Office
Muhammad Syafi'i	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Hukum, Kepatuhan Law, Compliance	Kesatu First	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan Following the term of office of the Board of Commissioners in the Company

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office	Masa Jabatan Term of Office
Adam Muhammad	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner	Manajemen SDM HC Management	Kesatu First	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan Following the term of office of the Board of Commissioners in the Company
Gregorius Helmy Widyapamungkas	Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently serving as Member	Manajemen SDM HC Management	Kesatu First	23 Desember 2024 - saat ini December 23, 2024 - present
Jaka Setiawan	Anggota Member	Hukum, Kepatuhan Law, Compliance	Kesatu First	31 Oktober 2025 – saat ini October 31, 2025 - present

Keterangan:
1) Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power Nomor 016.K/DK-PLN NP/2025 terkait Pemberhentian dengan hormat Sdr. Elif Doka Marliska
2) Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power Nomor 017.K/DK-PLN NP/2025 terkait pengangkatan Sdr. Jaka Setiawan
3) Perubahan susunan anggota komite berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power Nomor 018.K/DK-PLN NP/2025 tanggal 23 Desember 2025 namun baru berlaku pada 1 Januari 2026.

Remarks:
1) PT PLN Nusantara Power Board of Commissioners Decree Number 016.K/DK-PLN NP/2025 regarding the honorable discharge of Mr. Elif Doka Marliska
2) PT PLN Nusantara Power Board of Commissioners Decree Number 017.K/DK-PLN NP/2025 regarding the appointment of Mr. Jaka Setiawan
3) Change in the composition of the committee members based on the PT PLN Nusantara Power Board of Commissioners Decree Number 018.K/DK-PLN NP/2025 dated December 23, 2025, which, however, shall only take effect on January 1, 2026.

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Muhammad Syafi'i

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 66 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 66 years old, residing in Jakarta

Riwayat Pendidikan
Meraiih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara (1979-1988), gelar Pascasarjana bidang Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara (2004-2007), dan saat ini tengah melanjutkan pendidikan Doktoral Tafsir Qur-an di Universitas PTIQ Jakarta (2018-sekarang).

Dasar Pengangkatan
Diangkat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Keputusan Dewan Komisaris PLN NP Nomor 011.K/DK-PLN NP/2025 tertanggal 4 Juli 2025.

Education Background
He earned a Bachelor's degree in Law from Universitas Sumatera Utara (1979–1988), a Master's degree in Law from Universitas Sumatera Utara (2004–2007), and is currently pursuing a doctoral degree in Qur'anic Exegesis at Universitas PTIQ Jakarta (2018–present).

Basis of Appointment
Appointed as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee by Decision of the Board of Commissioners of PLN NP No. 011.K/DK-PLN NP/2025 dated July 4, 2025.

Riwayat Jabatan
Memulai karier di bidang pendidikan sebagai guru di beberapa sekolah pada periode 1982–1995 serta penatar P4 di BP7 Sumatera Utara, kemudian berlanjut sebagai dosen Agama Islam pada 1999–2000. Selanjutnya, ia memasuki dunia politik sebagai anggota DPRD Kota Medan (1997–1999) dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara (2004–2009). Kariernya terus berkembang di tingkat nasional sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra (2014–2024), dengan peran di Komisi III, Badan Legislasi DPR RI, dan Badan Pengkajian MPR RI. Puncaknya, sejak 2024 hingga sekarang, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia.

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
- Di Perusahaan/Instansi Lain: Wakil Menteri Agama Republik Indonesia.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Position Milestones
He began his career in education as a teacher at several schools from 1982 to 1995 and as a P4 instructor at BP7 North Sumatera, then went on to serve as a lecturer in Islamic Studies from 1999 to 2000. Subsequently, he entered the world of politics as a member of the Medan City Council (1997–1999) and Chair of the North Sumatera Provincial Council Faction (2004–2009). His career continued to advance at the national level as a member of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) from the Gerindra Party Faction (2014–2024), serving on Commission III, the DPR RI Legislation Body, and the MPR RI Research Body. Most notably, since 2024 to the present, he has served as Deputy Minister of Religion of the Republic of Indonesia.

Concurrent Position
- In PLN NP: Member of the Company's Board of Commissioners
- In Other Companies/Institutions: Deputy Minister of Religion of the Republic of Indonesia.

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Major and Controlling Shareholders.

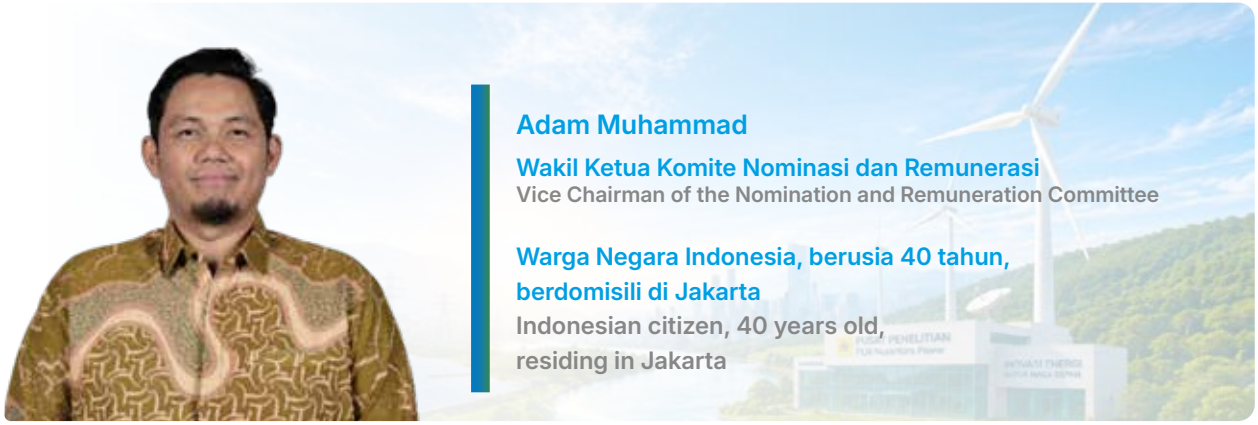

Adam Muhammad

Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Vice Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 40 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian citizen, 40 years old, residing in Jakarta

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil Universitas Hasanuddin (2003), dan melanjutkan pascasarjana Ilmu Administrasi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (2017).

Dasar Pengangkatan
Diangkat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Keputusan Dewan Komisaris PLN NP Nomor 011.K/DK-PLN NP/2025 tertanggal 4 Juli 2025.

Education Background
He earned a Bachelor's degree in Civil Engineering from Hasanuddin University (2003) and subsequently obtained a Master's Degree in Administrative Sciences from Prof. Dr. Moestopo University in 2017.

Basis of Appointment
Appointed as Vice Chairman of the Nomination and Remuneration Committee by Decision of the Board of Commissioners of PLN NP No. 011.K/DK-PLN NP/2025 dated July 4, 2025.

Riwayat Jabatan
Memiliki pengalaman di bidang pemerintahan dan legislatif, dengan mengawali karier sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI pada periode 2014–2019. Selanjutnya menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil II Sulsel pada periode 2019–2024, serta saat ini mengemban amanah sebagai Staf Khusus Kementerian Hukum RI sejak tahun 2024.

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
- Di Perusahaan/Instansi Lain: Staf Khusus Kementerian Hukum RI

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Position Milestones
He has experience in government and the legislative sector, starting his career as an Expert Staff Member of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) from 2014 to 2019. He then served as a Member of the DPRD of South Sulawesi Province, Electoral District II of South Sulawesi from 2019 to 2024, and currently serves as Special Staff to the Indonesian Ministry of Law since 2024.

Concurrent Position
- In PLN NP: Member of the Company's Board of Commissioners
- In Other Companies/Agencies: Special Staff of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Major and Controlling Shareholders.

Gregorius Helmy Widyapamungkas

Sekretaris dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Secretary and Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat
Indonesian citizen, 45 years old, residing in Bekasi, West Java

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta tahun 2005 dan saat ini tengah melanjutkan pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Negeri Padang.
Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Certified Human Resource Professional (CHRP) dari Universitas Atma Jaya Jakarta, dan Certified Human Resource General Manager (CHRGM) dari BNSP.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power Nomor 009.K/DK-PLN NP/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Education Background
Completed a Bachelor's degree in Psychology from Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta in 2005 and is currently pursuing a Master's degree in Management at Universitas Negeri Padang.
Additionally, he has participated in non-formal education programs for certifications, including Certified Human Resource Professional (CHRP) from Universitas Atma Jaya Jakarta, and Certified Human Resource General Manager (CHRGM) from BNSP.

Basis of Appointment
Appointed based on the PT PLN Nusantara Power Board of Commissioners' Decision No. 009.K/DK-PLN NP/2024 on December 23, 2024.

Riwayat Pekerjaan
Berkarir sebagai VP Pengembangan Talenta Korporat PT PLN (Persero) (2024 - sekarang), VP Pelayanan Remunerasi Human Capital PT PLN (Persero) (2022 - 2024), Manager Healthcare Provider PT PLN (Persero) (2021 - 2022), dan Manager Kebijakan Benefit PT PLN (Persero) (2016-2021)

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Tidak Ada
- Di Perusahaan/Instansi Lain: *Vice President* Pengembangan Talenta Korporat PT PLN (Persero)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali.

Position Milestones
Currently serving as the Vice President of Corporate Talent Development at PT PLN (Persero) since 2024. Previously served as the Vice President of Human Capital Remuneration Services at PT PLN (Persero) from 2022 to 2024, Manager of Healthcare Providers at PT PLN (Persero) from 2021 to 2022, and Manager of Benefit Policies at PT PLN (Persero) from 2016 to 2021.

Concurrent Position
- In PLN NP: None
- In Other Companies/Institutions: Vice President of Corporate Talent Development at PT PLN (Persero)

Affiliation
No affiliation with members of the Board of Commissioners or the Board of Directors; however, he has an affiliation with the Major & Controlling Shareholder.

Jaka Setiawan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan, Banten
Indonesian citizen, 39 years old, residing in South Tangerang, Banten.

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknologi Industri & Desain – UPI Y.A.I Jakarta, Magister Kajian Stratejik Intelijen - Universitas Indonesia tahun 2012, dan saat ini tengah melanjutkan Pendidikan S3 Sekolah Kajian Stratejik dan Global - Universitas Indonesia.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power Nomor 017.K/DK-PLN NP/2025 tanggal 31 Oktober 2025.

Education Background
He earned a Bachelor's degree in Industrial Technology & Design from UPI Y.A.I Jakarta, a Master's Degree in Strategic Intelligence Studies from the University of Indonesia in 2012, and is currently pursuing a Doctoral Degree at the School of Strategic and Global Studies, University of Indonesia.

Basis of Appointment
Appointed based on the PT PLN Nusantara Power Board of Commissioners' Decision No. 017.K/DK-PLN NP/2025 on October 31, 2025.

Riwayat Pekerjaan
Memiliki pengalaman profesional di bidang data scientist dan konsultansi di industri investasi dan layanan keuangan berbasis teknologi, dengan fokus pada pengembangan strategi bisnis, tata kelola, dan inovasi keuangan.

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Tidak Ada
- Di Perusahaan/Instansi Lain: Tidak Ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama Pengendali.

Position Milestones
He has professional experience in data science and consulting within the investment and technology-based financial services industries, focusing on business strategy development, governance, and financial innovation.

Concurrent Position
- In PLN NP: None
- In Other Companies/Institutions: None

Affiliation
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Major and Controlling Shareholders.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak secara independen dan profesional, serta memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Objektivitas dan integritas dalam setiap pelaksanaan fungsi pengawasan dijaga melalui independensi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai prinsip dasar, yang sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan terbaik dalam mencapai tujuan Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

In carrying out its duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee acts independently and professionally, and is directly accountable to the Board of Commissioners. Objectivity and integrity in the execution of supervisory functions are maintained through their independence as a fundamental principle, which is fully directed toward the best interests of achieving the Company's goals. In this regard, all members of the Nomination and Remuneration Committee have met the following independence criteria:

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Kriteria Independensi Independence Criteria	Muhammad Syafi'i	Adam Muhammad	Gregorius Helmy Widyapamungkas	Jaka Setiawan
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. The individual is not a person from an accounting firm, law consulting firm, or any other party that provides audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	✓	✓	✓	✓

Kriteria Independensi Independence Criteria	Muhammad Syafi'i	Adam Muhammad	Gregorius Helmy Widyapamungkas	Jaka Setiawan
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. The individual does not hold any shares, either directly or indirectly, in the Company.	✓	✓	✓	✓
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir. The individual does not have authority or responsibility for planning, leading, and/or controlling the Company within the last six months.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda. The individual has no familial relationship by blood with members of the Board of Directors and the Board of Commissioners up to the second degree, either in a direct or collateral line, or by marriage.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan The individual does not have a direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. The individual is not currently affiliated with an institution whose business activities provide services to the Company.	✓	✓	✓	✓

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Guidelines for the Nomination and Remuneration Committee

Pedoman pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dirumuskan dalam Piagam Komite SDM dan Organisasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris pada bulan Desember 2018, pada periode ketika Komite Nominasi dan Remunerasi masih menggunakan nomenklatur Komite SDM dan Organisasi. Piagam tersebut ditelaah secara berkala dan dapat diperbarui apabila diperlukan, guna memastikan keselarasan isinya dengan perkembangan organisasi, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik terbaik (*best practices*).

Adapun ruang lingkup Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PLN NP mencakup Bab I mengenai Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, serta dasar hukum; Bab II mengenai Keanggotaan dan Persyaratan yang meliputi keanggotaan, persyaratan, masa jabatan anggota

The guidelines for the Nomination and Remuneration Committee's duties were formulated in the HR and Organization Committee Charter, which was ratified by the Board of Commissioners in December 2018, during the period when the Nomination and Remuneration Committee still used the nomenclature of the HR and Organization Committee. The charter is reviewed periodically and can be updated as necessary to ensure its alignment with organizational developments, applicable laws and regulations, as well as best practices.

The scope of the PLN NP Nomination and Remuneration Committee Charter includes Chapter I on Introduction, which outlines the background, purposes and objectives, and legal basis; Chapter II on Membership and Requirements, covering membership, requirements, term of office for Committee members, working

Komite, hubungan kerja dengan organ pendukung Direksi dan Dewan Komisaris, serta evaluasi anggota; Bab III mengenai Tugas dan Kewenangan yang mencakup tugas, kewenangan, kode etik, dan pertanggungjawaban; Bab IV mengenai Rapat, Pelaporan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Komite yang mengatur rapat Komite, pelaporan, anggaran, serta evaluasi kinerja; serta Bab V sebagai Penutup.

relationships with the supporting organs of the Board of Directors and Board of Commissioners, and member evaluation; Chapter III on Duties and Authorities, which includes duties, authorities, code of conduct, and accountability; Chapter IV on Meetings, Reporting, Budget, and Committee Performance Evaluation, which regulates Committee meetings, reporting, budget, and performance evaluation; and Chapter V as the Conclusion.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan perannya secara kolegial, khususnya terkait dengan sistem pengelolaan talenta, sistem penilaian kinerja, serta kebijakan remunerasi. Adapun tugas pokok Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi dan sistem SDM termasuk melakukan reviu secara berkala atas pengelolaan sistem pengelolaan talenta (*Talent Management System*), melakukan *monitoring*, evaluasi terhadap sistem dan prosedur termasuk pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi.
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*selected talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta Terminasi (*nominated talent*) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.
4. Melakukan analisis, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan Organisasi yang dilakukan oleh Perusahaan.
5. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

In order to support the supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee performs its role collegially, particularly concerning the talent management system, performance evaluation system, and remuneration policy. The main duties of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Analyze, provide input, and recommendations to the Board of Commissioners on HR policies, guidelines, strategies, and systems, including conducting periodic reviews of the Talent Management System, monitoring, and evaluating systems and procedures, including their implementation.
2. Evaluate the Talent classification systems and procedures implemented by the Board of Directors.
3. Validate and calibrate selected talent proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners, to produce a list of nominated talent nominated by the Board of Commissioners to the GMS.
4. Analyze, provide input, and recommendations to the Board of Commissioners on the implementation of HR and organizational management activities carried out by the Company.
5. Prepare development program proposals for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

6. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris.
7. Melakukan evaluasi terhadap calon yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS.
8. Bersama komite lainnya menilai dan memberi masukan sesuai dengan bidang komite kepada Dewan Komisaris atas :
   a. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan;
   b. Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP);
   c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
   d. Laporan Tahunan, Triwulanan dan Laporan Kinerja bulanan;
   e. *Good Corporate Governance* (GCG);
   f. *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan;
   g. *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris.
9. Melakukan analisis, memberi masukan dan usulan kepada Dewan Komisaris khususnya atas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan:
   a. Kriteria Penilaian Kinerja Unggul dan *Malcolm Baldrige*
   b. Pengembangan Teknologi Informasi
10. Mempelajari, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap Laporan Manajemen, Kinerja SDM dan Organisasi dan Laporan K3L yang disusun oleh Direksi.
11. Melakukan analisa, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan Direksi dalam:
    a. Program Pengembangan SDM dan Organisasi yang mendukung *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR);
    b. Nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
    c. Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
12. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan LK3 (Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja) perusahaan.

6. Evaluate employee remuneration policies that require approval/response from the Board of Commissioners.
7. Evaluate candidates proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of Subsidiaries before submitting them to the GMS.
8. Together with other committees, assess and provide input to the Board of Commissioners, in accordance with the committee's areas of expertise, on:
   a. Implementation of the Company's Articles of Association and Board Manual;
   b. Long-Term Work Plan (RJPP);
   c. Annual Budget and Operational (ABOP);
   d. Annual, Quarterly, and Monthly Performance Reports;
   e. Good Corporate Governance (GCG);
   f. Company Key Performance Indicators (KPIs);
   g. Key Performance Indicators for the Board of Commissioners.
9. Analyze, provide input, and make recommendations to the Board of Commissioners, particularly regarding policies and implementation of activities:
   a. Superior Performance Assessment Criteria and Malcolm Baldrige
   b. Information Technology Development
10. Study, evaluate, and provide input on Management Reports, Human Resource and Organizational Performance, and K3L Reports prepared by the Board of Directors.
11. Analyze, provide input, and make recommendations to the Board of Commissioners on the Board of Directors' proposals in:
    a. Human Resource and Organizational Development Programs that support Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR);
    b. Nomination of officials one level below the Board of Directors.
    c. Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
12. Analyze, provide input, and recommendations to the Board of Commissioners on the company's policies, strategies, and implementation of LK3 (Occupational Health and Safety Environment) management.

13. Melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Perusahaan serta integrasi pengelolaannya.
14. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan budaya perusahaan, hubungan industrial serta pelaksanaan *reward and punishment* pegawai serta menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menerapkan sistem Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) yang mengacu pada *best practice.*
15. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi, melaksanakan rapat-rapat komite, membuat risalah rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas komite secara berkala kepada Dewan Komisaris.
16. Mengidentifikan hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan selesainya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban Komite Dewan Komisaris.
17. Menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.

13. Analyze and provide recommendations to the Board of Commissioners on the policies, strategies, and implementation of the company's information systems management, as well as their integration.
14. Analyze, provide input, and recommendations to the Board of Commissioners on the policies, strategies, and implementation of corporate culture management, industrial relations, and employee reward and punishment. Review and monitor to ensure that the Board of Directors has implemented the PT PLN (Persero) Nomination and Remuneration system in accordance with best practices.
15. Prepare the Nomination and Remuneration Committee's activity plan and budget, conduct committee meetings, prepare meeting minutes, and submit periodic reports on the implementation of the committee's duties to the Board of Commissioners.
16. Identify matters requiring attention, ensure their completion, and carry out other duties assigned by the Board of Commissioners within the scope of the Board of Commissioners' Committee's duties and responsibilities.
17. Maintain the confidentiality of company data and information in accordance with the provisions applicable to the Board of Commissioners.

Rencana Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Work Program of the Nomination and Remuneration Committee

Rencana program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2025 disusun dengan mengacu pada tugas pokok yang telah ditetapkan dalam Piagam Komite, serta merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris. Penyusunan tersebut dilakukan setiap tahun sebagai upaya untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Adapun program kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1 Pengawasan kebijakan dan strategi pengembangan SDM, organisasi, nominasi & remunerasi.

2 Pengawasan kebijakan dan strategi HSSE dan PROPER.

3 Pengawasan kebijakan dan strategi pengelolaan Proses Bisnis: Review business process PLN NP berdasarkan metode APQC (*American Productivity & Quality Center*) -Kerangka Klasifikasi Proses.

The work program plan of the Nomination and Remuneration Committee in 2025 was prepared with reference to the main tasks established in the Committee Charter, and is part of the Annual Work and Budget Plan of the Board of Commissioners. This preparation is carried out annually as an effort to ensure the effectiveness of the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee in supporting the Board of Commissioners' supervisory function. The work program is as follows:

1 Monitoring policy and strategy programs on HR development, organization, nomination, and remuneration.

2 Supervision of HSSE and PROPER policies and strategies.

3 Supervision of business process management policies and strategies: Review of PLN NP business processes based on the APQC (American Productivity & Quality Center) Process Classification Framework.

4 Pengawasan implementasi Alih SDM dan Sistem Pengelolaan SDM *Sub Holding.*
5 Pengawasan implementasi Hubungan Industrial & Skema Pengelolaan Tenaga Alih Daya.
6 Pengawasan terhadap kebijakan dan strategi *Culture Integration*.
7 Pengawasan kebijakan dan strategi Penguatan Kompetensi Inti dan Pendukung Pengelolaan Pembangkitan.
8 Pengawasan kebijakan dan strategi CSR.
9 Pengawasan kebijakan dan strategi IMS 2.0 / EA (Perkuatan fungsi *Governance, Risk & Compliance* - GRC).
10 Pengawasan kebijakan implementasi teknologi (isu digitalisasi, *data analytic*).
11 *Review* Document Management dan HRIS.
12 *Site Visit*/Kunjungan Kerja.

4 Supervision of the implementation of HR Transfer and the HR Management System of the Sub-Holding.
5 Supervision of the implementation of Industrial Relations & Outsourced Management Schemes.
6 Supervision of Culture Integration policies and strategies.
7 Supervision of policies and strategies for Strengthening Core and Supporting Competencies in Power Generation Management.
8 Supervision of CSR policies and strategies.
9 Supervision of IMS 2.0 / EA policies and strategies (Strengthening Governance, Risk & Compliance (GRC) functions).
10 Supervision of technology implementation policies (digitalization and data analytics issues).
11 Review of Document Management and HRIS.
12 Site Visits/Work Visits.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
Execution of the Nomination and Remuneration Committee's Duties

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan fungsi pengawasan, pendampingan, serta pemberian masukan, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui telaah isu strategis, pemberian rekomendasi, keikutsertaan dalam rapat bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen, partisipasi dalam pertemuan lainnya, serta kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris. Seluruh kegiatan dilaksanakan berpedoman pada Piagam Komite yang telah diintegrasikan dalam rencana program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, serta dilaporkan secara triwulanan kepada Dewan Komisaris sebagai realisasi program kerja, sebagai berikut:

1 Pertemuan berkala dan terjadwal yaitu:
   a. Rapat koordinasi KNR dengan Satuan/Bidang yang mengelola *Human Capital* dan Satuan/Bidang lain di PT PLN Nusantara Power yang terkait dengan fungsi pengawasan KNR secara berkala dan jika diperlukan;
   b. Apabila diperlukan, KNR dapat mengundang jajaran Manajemen Perseroan PT PLN Nusantara Power untuk memberikan informasi yang diperlukan;
   c. Rapat internal Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee conducted supervisory, assistance, and advisory functions, including the following matters. It was implemented through the review of strategic issues, the provision of recommendations, participation in meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, and management, participation in other meetings, and joint working visits with the Board of Commissioners. All activities were conducted in accordance with the Committee Charter, integrated into the work program plan of the Nomination and Remuneration Committee, and reported quarterly to the Board of Commissioners as the realization of the work program, as follows:

1 Regular, scheduled meetings, namely:
   a. Coordination meetings between the KNR and the units/divisions responsible for Human Capital management, as well as other relevant units/divisions at PT PLN Nusantara Power, regarding the KNR's supervisory functions, held periodically and as needed;
   b. If necessary, KNR may invite the management of PT PLN Nusantara Power to provide the necessary information;
   c. Internal meetings of the Nomination and Remuneration Committee, held at least once a month;

d. Melakukan kunjungan lapangan ke ke unit kerja PT PLN Nusantara Power untuk memastikan kebijakan dan pengelolaan human capital diimplementasikan sesuai dengan perencanaan.

2 Kegiatan Khusus:
   a. *Monitoring* dan Review Implementasi pengelolaan *talent management*;
   b. Monitoring dan *Review* Implementasi Peningkatan produktivitas Pegawai dan ROI HC;
   c. Monitoring dan *Review* Implementasi pengendalian RKAP biaya kepegawaian dan aspek AC/NAC;
   d. *Monitoring* dan *Review* Implementasi pengembangan peningkatan pengelolaan *human capital services*;
   e. *Monitoring* dan *Review Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR).
3 Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi.

d. Conducting field visits to PT PLN Nusantara Power's operational units to ensure that human capital policies and management are implemented as planned..

2 Special Activities:
   a. Monitoring and Review of the implementation of talent management;
   b. Monitoring and Review of the Implementation of Employee Productivity Improvements and HC ROI;
   c. Monitoring and Review of the Implementation of controls for the ABOP on personnel expenses and AC/NAC aspects;
   d. Monitoring and Review of the Implementation of improvements in human capital services management;
   e. Monitoring and Review of the Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR).
3 Competency Development Program for the Nomination and Remuneration Committee.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Meetings of the Nomination and Remuneration Committee

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada Piagam Komite yang mengatur bahwa rapat diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dalam rangka mendukung penyelesaian Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu, BoC Manual juga mengatur bahwa Komite wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, serta dapat melakukan pertemuan dengan fungsi terkait untuk membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan, khususnya terkait pelaksanaan nominasi dan remunerasi, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali.

The Nomination and Remuneration Committee meetings are guided by the Committee Charter, which stipulates that meetings are held regularly at least once a month to support the completion of the Nomination and Remuneration Committee's Work Program. In addition, the BoC Manual stipulates that the Committee is required to hold regular meetings with the Board of Commissioners at least once a month, and may hold meetings with related functions to discuss the Company's developments and activities, particularly regarding the implementation of nominations and remuneration, either periodically or as needed. Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee held meetings 18 (eighteen) times.

Frekuensi Rapat Internal dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Frequency of Internal Meetings and Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Emir Kresna Wardana	Ketua Komite Chairman of the Committee	12	12	100%
Ida Nuryatin Finahari	Wakil Ketua Komite Vice Chairman of the Committee	12	12	100%

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Muhammad Syafi'i	Ketua Komite Chairman of the Committee	6	6	100%
Adam Muhammad	Wakil Ketua Komite Vice Chairman of the Committee	6	6	100%
Elif Doka Marliska	Sekretaris Komite Secretary of the Committee	16	16	100%
Gregorius Helmy Widyapamungkas	Sekretaris Komite Secretary of the Committee	18	18	100%
Jaka Setiawan	Anggota Member	2	2	100%

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Competency Development Program for the Nomination and Remuneration Committee

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai bagian dari program kerja Komite yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, serta kemampuan teknis dan strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2025, kegiatan pengembangan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Members of the Nomination and Remuneration Committee participate in a competency development program as part of the Committee's work program, aimed at enhancing understanding, insights, as well as technical and strategic abilities to support the Board of Commissioners' supervisory function. Throughout 2025, the competency development activities of the Nomination and Remuneration Committee were as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Competency Development Program

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Development Program	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
Muhammad Syafi'i	Ketua Komite Chairman of the Committee	*Qualified Risk Governance Professional*	12-13 November 2025 November 12-13, 2025
Adam Muhammad	Wakil Ketua Komite Vice Chairman of the Committee	*Qualified Risk Governance Professional*	12-13 November 2025 November 12-13, 2025

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugasnya, kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris serta melalui penilaian mandiri (*self-assessment*). Dewan Komisaris menetapkan prosedur dan kriteria penilaian kinerja

To ensure the effectiveness of its duties, the Nomination and Remuneration Committee's performance is periodically evaluated by the Board of Commissioners, and through a self-assessment. The Board of Commissioners establishes the procedures and criteria

Komite Nominasi dan Remunerasi, yang pelaksanaannya menjadi bagian dari agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ pendukungnya. Adapun hasil penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

for evaluating the performance of the Nomination and Remuneration Committee, which are implemented as part of the internal evaluation meeting agenda of the Board of Commissioners and its supporting organs. The results of their performance evaluation in 2025 were as follows:

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Table of Nomination and Remuneration Committee Performance Evaluation

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Gregorius Helmy Widyapamungkas	Jaka Setiawan
1	Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris. Timeliness of the Board of Commissioners' activity agenda	9,00	9,00
2	Kualitas pekerjaan. Quality of work	9,00	9,00
3	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris. Contribution to the Board of Commissioners' activities	9,00	9,00
4	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID). Presentation at the Board of Commissioners' Internal Meeting (RID)	9,00	9,00
5	Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM). Meeting implementation (RID, RDD, RKM)	9,00	9,00
6	Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Preparation of the Board of Commissioners' Supervisory Report	9,00	9,00
Rata-Rata Skor Average Score		**9,00**	**9,00**

Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee

Sebagai organ pendukung tata kelola perusahaan, Komite Investasi dan Manajemen Risiko dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi yang bersifat independen. Komite ini memiliki peran strategis dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan, telaah, serta memberikan masukan terhadap kebijakan dan strategi perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan aspek risiko dan investasi.

As a supporting organ of corporate governance, the Investment and Risk Management Committee is established to support the supervisory and independent advisory functions of the Board of Commissioners to the Board of Directors. This committee plays a strategic role in assisting the Board of Commissioners in supervising, reviewing, and providing input on the Company's policies and strategies, particularly those related to risk and investment aspects.

Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

The establishment of the Investment and Risk Management Committee is conducted in accordance with the applicable laws and regulations, including Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

Pengangkatan dan Pemberhentian serta Ketentuan Masa Jabatan Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Appointment, Dismissal, and Term of Office of the Investment and Risk Management Committee

Penetapan dan pemberhentian Ketua serta anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris. Bagi anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko, masa jabatannya mengikuti periode jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang bukan berasal dari Dewan Komisaris memiliki masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun, dengan tetap memperhatikan kewenangan Dewan Komisaris untuk melakukan pemberhentian sewaktu-waktu. Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko dari unsur selain Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023.

The appointment and dismissal of the Chair and members of the Investment and Risk Management Committee are conducted by the Board of Commissioners. For members of the Board of Commissioners who also serve as members of the Investment and Risk Management Committee, their term of office follows the Board of Commissioners' terms, as determined in the GMS. As for those who are not from the Board of Commissioners, their term of office is a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for one additional term of a maximum of 2 (two) years, while still considering the authority of the Board of Commissioners to dismiss them at any time. Members of the Investment and Risk Management Committee from outside the Board of Commissioners must meet the qualification requirements as stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023.

Susunan dan Periode Jabatan Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Composition and Term of Office of the Investment and Risk Management Committee

Struktur Komite Investasi dan Manajemen Risiko terdiri atas seorang Ketua yang berasal dari anggota Dewan Komisaris, serta didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang berasal dari luar Dewan Komisaris. Salah satu anggota dari unsur non-Dewan Komisaris tersebut juga merangkap sebagai Sekretaris Komite. Pengangkatan maupun pemberhentian Ketua dan anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris.

The structure of the Investment and Risk Management Committee consists of a Chairperson who is a member of the Board of Commissioners, supported by at least 2 (two) members from outside the Board of Commissioners. One of the non-Board members also serves as the Committee Secretary. The appointment and dismissal of the Chairman and members of the Investment and Risk Management Committee are determined by the Board of Commissioners through a Board of Commissioners' Decision.

Susunan Komite Investasi dan Manajemen Risiko mengalami perubahan pada tahun 2025. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 008.K/DK-PLN NP/2024 tanggal 23 Desember 2024, susunan Komite Investasi dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

The composition of the Investment and Risk Management Committee changed in 2025. Based on the Board of Commissioners' Decision Number 008.K/DK-PLN NP/2024 dated December 23, 2024, the composition of the Investment and Risk Management Committee is as follows:

Susunan Komite Investasi dan Manajemen Risiko 23 Desember 2024 - 3 Juli 2025
Investment and Risk Management Committee Composition December 23, 2024-July 3, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Bagus Puruhito	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Manajemen, Manajemen Risiko Management, Risk Management	Kesatu First
Hendra Iswahyudi	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	Perencanaan, Ekonomi, Manajemen Risiko Planning, Economics, Risk Management	Kesatu First
Evy Haryadi	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	Ketenagalistrikan, Manajemen, Manajemen Risiko Electricity, Management, Risk Management	Kesatu First
Eri Nurcahyanto	Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently serving as Member	Ketenagalistrikan, Manajemen, Manajemen Risiko Electricity, Management, Risk Management	Kedua Second
Djoko Dwijatno	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Manajemen Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik Business Management of Electricity Supply	Kesatu First

Komite Investasi dan Manajemen Risiko selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 010.K/DK-PLN NP/2025 tanggal 4 Juli 2025 dengan susunan sebagai berikut:

The Investment and Risk Management Committee subsequently underwent a change based on the Board of Commissioners' Decision Number 010.K/DK-PLN NP/2025 dated July 4, 2025, with the following composition:

Susunan Komite Investasi dan Manajemen Risiko 4 Juli 2025 - 31 Desember 2025
Investment and Risk Management Committee Composition July 4-December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office	Masa Jabatan Term of Office
Edi Srimulyanti	Ketua (Komisaris) Chairperson (Commissioner)	Ketenagalistrikan, Manajemen, Manajemen Risiko Electricity, Management, Risk Management	Kesatu First	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan Following the term of office of the Board of Commissioners in the Company
M. Pradana Indraputra	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	Ekonomi, Perencanaan dan Kebijakan Publik, Manajemen Risiko Economics, Public Planning and Policy, Risk Management	Kesatu First	Mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan Following the term of office of the Board of Commissioners in the Company
Ardhi Tartahadi	Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently serving as Member	Ketenagalistrikan, Manajemen, Manajemen Risiko Electricity, Management, Risk Management	Kesatu First	Sejak Juli 2025 – Saat ini Since July 2025-Present
Eri Nurcahyanto	Anggota Member	Ketenagalistrikan, Manajemen, Manajemen Risiko Electricity, Management, Risk Management	Kedua Second	Sejak Februari 2023 – 31 Maret 2026 Since February 2023-March 31, 2026

Profil Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Profile of Investment and Risk Management Committee Members

Edi Srimulyanti

Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Chairman of the Investment and Risk Management Committee

Warga Indonesia, berusia 59 tahun, berdomisili di Sidoarjo
Indonesian, 59 years old, residing in Sidoarjo

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 1989 dan gelar Master Keuangan dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2005.

Dasar Pengangkatan
Diangkat sebagai Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 010.K/DK-PLN NP/2025 tanggal 4 Juli 2025.

Education Background
She earned a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) in 1989 and a Master's degree in Finance from Universitas Indonesia (UI) in 2005

Basis for Appointment
Appointed as Chairperson of the Investment and Risk Management Committee by the Board of Commissioners Decision No. 010.K/DK-PLN NP/2025 dated July 4, 2025.

Riwayat Jabatan
Bekerja di PT PLN (Persero) pada tahun 1992, Beliau pernah memegang beberapa posisi penting pada bidang retail, komersial, dan pelayanan pelanggan antara lain sebagai Manager Area, Manajer Senior Niaga dan Layanan Pelanggan dan Vice President Metering. Beliau menjabat sebagai Vice President Change Management pada tahun 2019, dan Executive Vice President Change Management Office pada tahun 2020 yang berubah struktur Organisasi Menjadi EVP Corporate Transformation and CEO Office pada tahun 2022. Beliau diangkat sebagai Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) sejak bulan September 2022 dan menjabat hingga bulan Juni 2025. Disamping itu Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT PLN Tarakan, salah satu anak perusahaan PLN.

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
- Di Perusahaan/Instansi Lain: Tidak Ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama Pengendali.

Position Milestones
She worked at PT PLN (Persero) starting in 1992 and has held several key positions in the retail, commercial, and customer service sectors, including Area Manager, Senior Manager of Commerce and Customer Service, and Vice President of Metering. She served as Vice President of Change Management in 2019, and as Executive Vice President of the Change Management Office in 2020, a role that was restructured into EVP of Corporate Transformation and CEO Office in 2022. She was appointed as Director of Retail and Commerce at PT PLN (Persero) in September 2022 and served until June 2025. Additionally, she previously served as a Commissioner at PT PLN Tarakan, one of PLN's subsidiaries.

Concurrent Positions
- At PLN NP: Member of the Company's Board of Commissioners
- At Other Companies/Institutions: None

Affiliation
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major & Controlling Shareholder.

M. Pradana Indraputra

Wakil Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Vice Chairman of the Investment and Risk Management Committee

Warga Negara Indonesia berusia 33 tahun, berdomisili di Jakarta.
Indonesian, 33 years old, residing in Jakarta

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Sarjana Ekonomi (2015) dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (2020) dari Universitas Indonesia.

Dasar Pengangkatan
Diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 010.K/DK-PLN NP/2025 tanggal 4 Juli 2025.

Education Background
He earned a Bachelor's degree in Economics (2015) and a Master's degree in Public Planning and Policy (2020) from Universitas Indonesia.

Basis for Appointment
Appointed as Vice Chairman of the Investment and Risk Management Committee by the Board of Commissioners Decision No. 010.K/DK-PLN NP/2025 dated July 4, 2025.

Riwayat Pekerjaan
Saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Sektor ESDM pada Kementerian ESDM RI (2024 - saat ini). Di samping itu, menjabat sebagai Direktur Utama PT Istana Karya Propertindo (2019 – saat ini) dan Direktur Utama PT Sinergi Istana Propertindo (2023 – saat ini). Sebelumnya, menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional pada Kementerian Investasi/BKPM RI (2020–2024).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Anggota Dewan Komisaris Perusahaan

- Di Perusahaan/Instansi Lain:
  - Staf Khusus Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Sektor ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  - Direktur Utama PT Istana Karya Propertindo
  - Direktur Utama PT Sinergi Istana Propertindo

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama Pengendali.

Position Milestones
He currently serves as Special Staff for the Acceleration of Strategic Issue Resolution in the Energy and Mineral Resources Sector at the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia (2024 - present). He also serves as President Director of PT Istana Karya Propertindo (2019 - present) and President Director of PT Sinergi Istana Propertindo (2023 - present). Previously, he served as Special Staff for National Entrepreneur Development at the Ministry of Investment/BKPM of the Republic of Indonesia (2020–2024).

Concurrent Positions
- At PLN NP: Member of the Company's Board of Commissioners
- At Other Companies/Institutions:
  - Special Staff for Accelerating the Resolution of Strategic Issues in the Energy and Mineral Resources Sector, Ministry of Energy and Mineral Resources
  - President Director of PT Istana Karya Propertindo
  - President Director of PT Sinergi Istana Propertindo

Affiliation
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major & Controlling Shareholder.

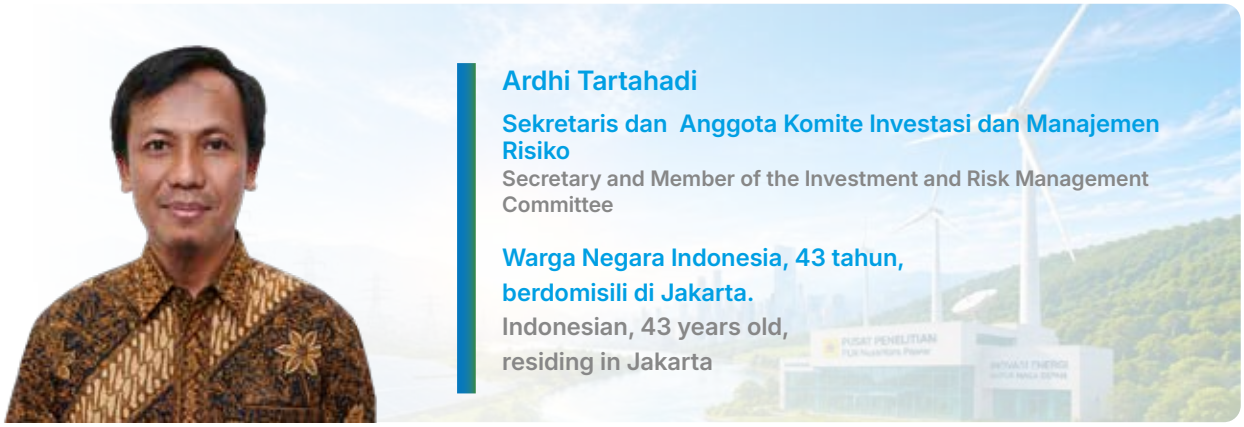

Ardhi Tartahadi

Sekretaris dan Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Secretary and Member of the Investment and Risk Management Committee

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, berdomisili di Jakarta.
Indonesian, 43 years old, residing in Jakarta

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro - Universitas Hasanuddin tahun 2001 dan Master of Business Administration (MBA) - Asian Institute of Management (AIM) Manila - Philipina tahun 2010. Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya *Qualified Risk Governance Profesional* (QRGP) tahun 2025 dan *Certified Risk Governance Profesional* (CRGP) tahun 2023.

Education Background
He earned a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Universitas Hasanuddin in 2001 and a Master's degree in Business Administration (MBA) from the Asian Institute of Management (AIM) in Manila, Philippines, in 2010. In addition, non-formal education courses completed to obtain certifications include the Qualified Risk Governance Professional (QRGP) in 2025 and the Certified Risk Governance Professional (CRGP) in 2023.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power Nomor 021.K/DK-PLN NP/2025, tanggal 23 Desember 2025.

Riwayat Pekerjaan
Saat ini berkarir di PT PLN (Persero) Kantor Pusat Divisi Perencanaan Koorporat sebagai Vice President Perencanaan Investasi Terpusat. Pernah berkarir di berbagai posisi operasional sebagai Manager Sektor Pembangkitan dan Senior Manager Transmisi dan Distribusi di Unit IndukPLN (2022) dan Vice President Resiko Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (Juli-Oktober 2022) dan Vice President Manajemen Risiko Distribusi (2022-2023).

Rangkap Jabatan
- Di PT PLN NP: Tidak Ada
- Di Perusahaan/Instansi Lain: Vice President Perencanaan Investasi Terpusat.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama Pengendali.

Basis for Appointment
Appointed based on the PT PLN Nusantara Power Board of Commissioners' Decision No. 021.K/DK-PLN NP/2025 dated December 23, 2025.

Position Milestones
He currently works at PT PLN (Persero) Head Office Corporate Planning Division as Vice President of Centralized Investment Planning. He has worked in various operational positions as Generation Sector Manager and Senior Manager of Transmission and Distribution at PLN Main Unit (2022) and Vice President of Regional Risk for Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara (July-October 2022) and Vice President of Distribution Risk Management (2022-2023).

Concurrent Positions
- At PLN NP: None
- At Other Companies/Institutions: Vice President of Centralized Investment Planning.

Affiliation
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major & Controlling Shareholder.

Eri Nurcahyanto

Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Member of the Investment and Risk Management Committee

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian, 44 years old, residing in Jakarta

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro - Universitas Diponegoro tahun 2004 dan Magister Teknik Tenaga Listrik dan Energi - Universitas Indonesia tahun 2009.
Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat III (2019), Leadership Development Program 1 PT PLN (Persero) (2023), Certified Risk Officer in Public Sector (2024), Certified Risk Governance Professional (2024), Sertifikasi Asesor Usaha Penjualan Madya (2024).

Education Background
Completed a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Universitas Diponegoro in 2004 and a Master's degree in Electrical Power and Energy Engineering from Universitas Indonesia in 2009.
In addition, has participated in non-formal education programs to obtain certifications, including Level III Leadership Training (2019), Leadership Development Program 1 by PT PLN (Persero) (2023), Certified Risk Officer in Public Sector (2024), Certified Risk Governance Professional (2024), and Intermediate Business Sales Assessor Certification (2024).

Dasar Pengangkatan
Diangkat kembali berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power Nomor 008.K/DK-PLN NP/2024, tanggal 23 Desember 2024.

Riwayat Pekerjaan
Saat ini berkarir di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya - Koordinator Rencana dan Laporan (2024-sekarang), sebelumnya sebagai Koordinator Pokja Tarif dan Subsidi Listrik (2022-2024), Senior Researcher on Energy, Asia Pacific Energy Research Centre, Japan (2021-2022), Kepala Subdirektorat Harga Tenaga Listrik (2018-2021), Kepala Seksi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik (2015-2018).

Rangkap Jabatan
- Di PT PLN NP: Tidak Ada
- Di Perusahaan/Instansi Lain: Analis Kebijakan Ahli Madya - Koordinator Rencana dan Laporan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan – KESDM.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama Pengendali.

Basis for Appointment
Reappointed based on the Decision of the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power Number 008.K/DK-PLN NP/2024 on December 23, 2024.

Position Milestones
Currently serves as Intermediate Policy Analyst – Coordinator for Planning and Reporting at the Directorate General of Electricity (2024–present), previously served as Coordinator of the Electricity Tariff and Subsidy Working Group (2022–2024), Senior Researcher on Energy at the Asia Pacific Energy Research Centre, Japan (2021–2022), Head of the Electricity Pricing Sub-Directorate (2018–2021), and Head of Electricity Sale Price and Network Rental Section (2015–2018).

Concurrent Positions
- At PLN NP: None
- At Other Companies/Institutions: Intermediate Policy Analyst – Coordinator for Planning and Reporting at the Directorate General of Electricity – MEMR.

Affiliation
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major & Controlling Shareholder.

Independensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Independence of the Investment and Risk Management Committee

Komite Investasi dan Manajemen Risiko bertindak secara independen dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, serta memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Prinsip independensi tersebut menjadi dasar utama dalam memastikan objektivitas dan integritas pada setiap pelaksanaan fungsi pengawasan, yang diarahkan semata-mata untuk kepentingan terbaik dalam pencapaian tujuan Perusahaan. Dengan demikian, seluruh anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Investment and Risk Management Committee acts independently and professionally in carrying out its duties, and is directly accountable to the Board of Commissioners. The principle of independence serves as the main basis for ensuring objectivity and integrity in every execution of the supervisory function, which is solely directed toward the best interests of achieving the Company's goals. Thus, all members of the Investment and Risk Management Committee have met the following independence criteria:

Independensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Independence of the Investment and Risk Management Committee

Kriteria Independensi Independence Criteria	Edi Srimulyanti	M. Pradana Indraputra	Ardhi Tartahadi	Eri Nurcahyanto
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. The individual is not a person from an accounting firm, law consulting firm, or any other party that provides audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	✓	✓	✓	✓

Kriteria Independensi Independence Criteria	Edi Srimulyanti	M. Pradana Indraputra	Ardhi Tartahadi	Eri Nurcahyanto
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. The individual does not hold any shares, either directly or indirectly, in the Company.	✓	✓	✓	✓
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir. The individual does not have authority or responsibility for planning, leading, and/or controlling the Company within the last six months.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda. The individual has no familial relationship by blood with members of the Board of Directors and the Board of Commissioners up to the second degree, either in a direct or collateral line, or by marriage.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan The individual does not have a direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. The individual is not currently affiliated with an institution whose business activities provide services to the Company.	✓	✓	✓	✓

Pedoman Kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Charter of the Investment and Risk Management Committee

Ketentuan pedoman kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada Desember 2018. Komite Investasi dan Manajemen Risiko menggunakan nomenklatur Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Piagam Komite dikaji secara berkala dan dapat diperbarui apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan organisasi, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik terbaik (*best practices*).

The provisions of the working guidelines for the Investment and Risk Management Committee are regulated in the Risk Management and Compliance Committee Charter established by the Board of Commissioners in December 2018. The Investment and Risk Management Committee uses the nomenclature of the Risk Management and Compliance Committee. The Committee Charter is reviewed periodically and may be updated as necessary to ensure its alignment with organizational developments, applicable legal regulations, and best practices.

Adapun ruang lingkup Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko PLN Nusantara Power meliputi Bab I Pendahuluan yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, serta dasar hukum; Bab II Keanggotaan dan Masa Jabatan yang mencakup pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko, keanggotaan,

The scope of the Investment and Risk Management Committee Charter of PLN Nusantara Power includes Chapter I Introduction, which covers the background, purposes and objectives, and legal basis; Chapter II Membership and Term of Office, which includes the establishment of the Investment and Risk Management

masa jabatan anggota Komite, hubungan kerja dengan organ pendukung Direksi dan Dewan Komisaris, serta evaluasi anggota; Bab III Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan yang mencakup tugas dan tanggung jawab, kewenangan, kode etik, independensi, serta pertanggungjawaban; Bab IV Rapat, Pelaporan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Komite yang mencakup rapat, pelaporan, anggaran, serta evaluasi kerja; serta Bab V Penutup.

Committee, membership, term of office of Committee members, working relationship with the supporting organs of the Board of Directors and Board of Commissioners, and member evaluation; Chapter III Duties, Responsibilities, and Authority, which includes duties and responsibilities, authority, code of conduct, independence, and accountability; Chapter IV Meetings, Reporting, Budget, and Committee Performance Evaluation, which includes meetings, reporting, budget, and work evaluation; and Chapter V Closing.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Duties and Responsibilities of the Investment and Risk Management Committee

Komite Investasi dan Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan menjalankan peran secara kolegial untuk mendukung fungsi pengawasan serta pemberian konsultasi terkait kebijakan dan strategi perusahaan, baik dari aspek risiko maupun investasi. Adapun tugas pokok Komite Investasi dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis, memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi dan sistem manajemen risiko dan kepatuhan Perusahaan.
2. Melakukan analisis, memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan oleh Perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Bersama dengan Komite lainnya, melakukan analisis dan memberi masukan sesuai dengan kompetensi yang relevan kepada Dewan Komisaris atas:
   a. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan
   b. Rencana Jangka Panjang Perusahaan
   c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
   d. Laporan Tahunan, Triwulanan dan Laporan Kinerja Bulanan
   e. *Good Corporate Governance*
   f. *Key Performance Indicator* Perseroan
5. Melakukan analisis, memberi masukan dan usulan kepada Dewan Komisaris khususnya atas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan:

   a. Investasi
   b. Pengembangan Usaha

The Investment and Risk Management Committee is accountable to the Board of Commissioners. They perform their role collegially to support the supervisory and advisory functions related to the Company's policies and strategies, both from the risk and investment aspects. The main duties of the Investment and Risk Management Committee are as follows:

1. Analyze and provide input to the Board of Commissioners on the Company's risk management and compliance policies, guidelines, strategies, and systems.
2. Analyze and provide input to the Board of Commissioners on the Company's risk management and compliance activities.
3. Provide recommendations to the Board of Commissioners for the improvement of Integrated Governance policies.
4. Together with other Committees, analyze and provide input, according to relevant competencies, to the Board of Commissioners on:
   a. Implementation of the Company's Articles of Association and Board Manual
   b. The Company's Long-Term Plan
   c. The Company's Work Plan and Budget
   d. Annual, Quarterly, and Monthly Performance Reports
   e. Good Corporate Governance
   f. The Company's Key Performance Indicators
5. Analyze, provide input, and make recommendations to the Board of Commissioners, particularly on the policies and implementation of the following activities:
   a. Investment
   b. Business Development

6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan selesainya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup tugas dan kewajiban Pelaksana Tugas Khusus Pendamping Dewan Komisaris.
7. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Komite Investasi dan Manajemen Risiko, melaksanakan rapat-rapat Komite, membuat risalah rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas Komite secara berkala kepada Dewan Komisaris.
8. Mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan selesainya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban Komite Dewan Komisaris.
9. Menjaga kerahasiaan data serta informasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.

6. Identify matters requiring attention, ensure their completion, and carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners in accordance with the scope of duties and obligations of the Special Acting Assistant to the Board of Commissioners.
7. Prepare the activity plan and budget for the Investment and Risk Management Committee, conduct Committee meetings, prepare meeting minutes, and submit periodic reports on the implementation of the Committee's duties to the Board of Commissioners.
8. Identify matters requiring attention, ensure their completion, and carry out other duties assigned by the Board of Commissioners within the scope of the Committee's duties and responsibilities.
9. Maintain the confidentiality of Company data and information in accordance with applicable regulations within the Board of Commissioners.

Rencana Program Kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Work Program Plan of the Investment and Risk Management Committee

Rencana kerja disusun guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam menunjang fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Rencana program kerja ditetapkan setiap tahun dengan mengacu pada tugas pokok Komite sebagaimana diatur dalam Piagam Komite dan menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris. Adapun rencana program kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1 Kegiatan rutin yang terdiri dari:
   a. Kegiatan internal Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang mencakup :
      1) Evaluasi Laporan Manajemen dan Kinerja Korporat.
      2) Penyiapan surat Dewan Komisaris sesuai bidang tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko.
      3) Melakukan *monitoring* KPI Dewan Komisaris dan *monitoring* arahan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham sesuai RUPS.
      4) Penyiapan dan penyampaian Laporan Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko.

The work plan is prepared to support the effectiveness of the Investment and Risk Management Committee's duties and responsibilities in supporting the Board of Commissioners' supervisory function. The work program plan is established annually with reference to the main duties of the Committee as stipulated in the Committee Charter and becomes part of the Annual Work and Budget Plan of the Board of Commissioners. The work program plan of the Investment and Risk Management Committee in 2025 is as follows:

1 Routine activities:
   a. Internal activities of the Investment and Risk Management Committee, which include:
      1) Evaluation of Management Report and Corporate Performance.
      2) Preparation of a letter from the Board of Commissioners in accordance with the Investment and Risk Management Committee's areas of duty.
      3) Monitoring the Board of Commissioners' KPIs and ensuring compliance with the directives of the Board of Commissioners and Shareholders in accordance with the GMS.
      4) Preparation and submission of the Investment and Risk Management Committee's Performance Report.

b. Kegiatan Koordinasi Komite Investasi dan Manajemen Risiko dengan Manajemen PLN NP, mencakup:
   1) *Review* dan Evaluasi Laporan Pemantauan Profil Risiko tahun 2025.
   2) *Review* Strategi Risiko dan Profil Risiko 2026.
   3) Pembahasan Usulan RKAP tahun 2026.
   4) *Review* dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi tahun 2025.
   5) Evaluasi pencapaian target investasi tahun 2025.

2 Kegiatan Khusus/Non Rutin yang terdiri dari:
   a. *Review* dan pengkinian atas dokumen Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko
   b. Evaluasi kebutuhan Anggaran Investasi pada RKAP 2025
   c. Koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris lainnya.

3 Program Pengembangan Kompetensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko.

b. Coordination activities between the Investment and Risk Management Committee and PLN NP Management, including:
   1) Review and Evaluation of the 2025 Risk Profile Monitoring Report.
   2) Review of the 2026 Risk Strategy and Risk Profile.
   3) Discussion of the Proposed 2026 ABOP.
   4) Review and Evaluation of Investment Implementation in 2025.
   5) Evaluation of achievement of investment targets in 2025.

2 Special/Non-Routine Activities:
   a. Review and update of the Investment and Risk Management Committee Charter
   b. Evaluation of Investment Budget needs in the 2025 ABOP
   c. Coordination with the Secretary of the Board of Commissioners and Its other Committees.

3 Competency Development Program for the Investment and Risk Management Committee.

Pelaksanaan Tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Implementation of the Duties of the Investment and Risk Management Committee

Komite Investasi dan Manajemen Risiko menyusun rencana program kerja mengacu pada Piagam Komite dalam memastikan efektivitas tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaannya mencakup kegiatan telaah, pemberian masukan atau rekomendasi, keikutsertaan dalam rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan jajaran manajemen, serta kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris. Realisasi program kerja disampaikan secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Secara umum, sepanjang tahun 2025 Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan pengawasan, pendampingan, dan pemberian masukan, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Laporan Profil Risiko (*Risk Profile*) tahun 2025.
2. Evaluasi Strategi Risiko dan Profil Risiko tahun 2026.
3. Evaluasi pencapaian target investasi tahun 2025.
4. Evaluasi/Pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko Triwulanan.
5. *Review* kebijakan dan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

The Investment and Risk Management Committee prepares a work program plan referring to the Committee Charter to ensure the effectiveness of its duties and responsibilities. The implementation includes review activities, providing input or recommendations, participation in meetings with the Board of Commissioners, Directors, and management, as well as joint working visits with the Board of Commissioners. The realization of the work program is reported quarterly to the Board of Commissioners. In general, throughout 2025, the Investment and Risk Management Committee carried out supervision, assistance, and provided input, among others, on the following matters:

1. Evaluation of the 2025 Risk Profile Report.
2. Evaluation of the 2026 Risk Strategy and Risk Profile.
3. Evaluation of the achievement of the 2025 investment targets.
4. Quarterly evaluation/monitoring of risk mitigation implementation.
5. Review of the policy and implementation of Integrated Governance.

6. *Review* atas kebutuhan anggaran investasi pada RKAP 2025.
7. Menelaah usulan investasi baru untuk anggaran tahun 2026.
8. Evaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal terkait risiko.
9. Pembahasan Draft RKAP Tahun 2026.

6. Review of investment budget needs in the 2025 ABOP.
7. Reviewing new investment proposals for the 2026 budget.
8. Evaluate the effectiveness of the Internal Control System related to risks.
9. Discussion of the 2026 ABOP Draft.

Rapat Komite Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Committee Meetings of the Investment and Risk Management Committee

Rapat Komite Investasi dan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Piagam Komite yang menetapkan bahwa rapat diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dalam rangka penyelesaian Program Kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Selain itu, BoC *Manual* juga mengatur bahwa Komite wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, serta dapat melakukan pertemuan dengan fungsi terkait untuk membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan terkait pelaksanaan investasi dan manajemen risiko, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sepanjang tahun 2025, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali.

The Investment and Risk Management Committee meetings are held in accordance with the Committee Charter, which stipulates that meetings are conducted regularly at least once a month to address the Work Program of the Investment and Risk Management Committee. Additionally, the BoC Manual mandates that the Committee must hold regular meetings with the Board of Commissioners at least once a month, and may meet with related functions to discuss the Company's developments and activities related to investment and risk management, either regularly or as needed. Throughout 2025, the Investment and Risk Management Committee held meetings 18 (eighteen) times.

Frekuensi Rapat Internal dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Frequency of Internal Meetings and Attendance Level of Investment and Risk Management Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Bagus Puruhito	Ketua (Komisaris) Chairperson (Commissioner)	8	8	100%
Edi Srimulyanti	Ketua (Komisaris) Chairperson (Commissioner)	10	10	100%
Hendra Iswahyudi	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	8	8	100%
Evy Haryadi	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	8	8	100%
M. Pradana Indraputra	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	10	10	100%
Ardhi Tartahadi	Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently serving as Member	10	10	100%
Eri Nurcahyanto	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	18	18	100%
Djoko Dwijatno	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	8	8	100%

Program Pengembangan Kompetensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Program for Competency Development of the Investment and Risk Management Committee

Komite Investasi dan Manajemen Risiko mengikuti pengembangan kompetensi sebagai bagian dari program kerja Komite yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, serta kemampuan teknis dan strategis para anggota dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Adapun pengembangan kompetensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The Investment and Risk Management Committee follows competency development as part of the Committee's work program aimed at enhancing the understanding, insights, as well as the technical and strategic capabilities of its members in supporting the supervisory functions of the Board of Commissioners. The competency development of the Investment and Risk Management Committee throughout 2025 is as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee Competency Development Program

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Development Program	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
M. Pradana Indraputra	Wakil Ketua Komite Vice Chairman of the Committee	*Qualified Risk Governance Professional*	12-13 November 2025 November 12-13, 2025
Ardhi Tartahadi	Sekretaris Komite Secretary of the Committee	*Qualified Risk Governance Professional*	12-13 November 2025 November 12-13, 2025

Penilaian Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Performance Assessment of the Investment and Risk Management Committee

Evaluasi kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko dilakukan secara berkala oleh Dewan Komisaris serta melalui penilaian mandiri (*self-assessment*) sebagai upaya memastikan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite. Prosedur dan kriteria penilaian ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dilaksanakan sebagai bagian dari agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya. Adapun hasil penilaian kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The performance evaluation of the Investment and Risk Management Committee is conducted periodically by the Board of Commissioners and through a self-assessment as an effort to ensure and enhance the effectiveness of the Committee's duties. The evaluation procedures and criteria are established by the Board of Commissioners and implemented as part of the internal evaluation meeting agenda of the Board of Commissioners and its supporting organs. The results of the performance evaluation of the Investment and Risk Management Committee in 2025 are as follows:

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee Performance Assessment Table

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Ardhi Tartahadi	Eri Nurcahyanto
1	Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris. Timeliness of the Board of Commissioners' activity agenda	9,00	9,00
2	Kualitas pekerjaan. Quality of work	9,00	9,00

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Ardhi Tartahadi	Eri Nurcahyanto
3	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris. Contribution to the Board of Commissioners' activities	9,00	9,00
4	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID). Presentation at the Board of Commissioners' Internal Meeting (RID)	9,00	9,00
5	Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM). Meeting implementation (RID, RDD, RKM)	9,00	9,00
6	Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Preparation of the Board of Commissioners' Supervisory Report	9,00	9,00
Rata-Rata Skor Average Score		**9,00**	**9,00**

Komite di Bawah Direksi
Committees Under the Board of Directors

Direksi dapat membentuk komite di bawah Direksi sesuai kebutuhan pelaksanaan fungsi pengelolaan Perusahaan, dengan nama dan tugas yang disesuaikan. Dalam hal ini, PLN NP mempertimbangkan skala bisnis, struktur organisasi Perusahaan, serta lingkup tanggung jawab dan koordinasi lintas Direktorat. PLN NP telah membentuk Komite *Sustainability* sejak tahun 2024, yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap kinerja keberlanjutan Perusahaan.

The Board of Directors may form committees under them as needed to carry out the Company's management functions, with names and tasks adjusted accordingly. In this case, PLN NP considers the scale of business, the organizational structure of the Company, as well as the scope of responsibilities and cross-Directorate coordination. PLN NP established a Sustainability Committee in 2024, which is responsible for coordinating and overseeing the Company's sustainability performance.

Komite *Sustainability*
Sustainability Committee

Sebagai wujud komitmen PLN NP dalam mengimplementasikan dan mengembangkan prinsip-prinsip keberlanjutan, maka Perusahaan membentuk Komite Sustainability. Komite ini berada di bawah pembinaan Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, yang dalam pelaksanaannya melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh unit kerja terkait, baik di tingkat pusat maupun operasional pada setiap Unit Pembangkitan.

As a manifestation of PLN NP's commitment to implementing and developing sustainability principles, the Company established a Sustainability Committee. This committee is under the Director of Human Capital Management and Administration's and the Director of Finance and Risk Management's guidance. In its implementation, it coordinates and collaborates with all related units, both at the central level and operationally at each Generation Unit.

Struktur Keanggotaan serta Tugas dan Tanggung Jawab Komite *Sustainability*
Membership Structure, Duties, and Responsibilities of the Sustainability Committee

Komite *Sustainability* memiliki struktur keanggotaan yang terdiri dari *Steering Committee*, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator, serta anggota yang berasal dari lima stream dan mewakili berbagai bidang terkait. Penunjukan dan penetapan struktur keanggotaan Komite *Sustainability* dilakukan oleh PLN NP melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 0028.K/DIR/2024 tentang Pembentukan Komite *Sustainability* PT PLN Nusantara Power. Masa jabatan anggota Komite *Sustainability* mengikuti masa jabatan mereka dalam struktur organisasi Perusahaan.

The Sustainability Committee has a membership structure consisting of a Steering Committee, Chairperson, Vice Chairperson, Secretary, Coordinator, and members from five streams representing various related fields. The appointment and establishment of the Sustainability Committee membership structure are conducted by PLN NP through the Board of Directors Decree Number 0028.K/DIR/2024 concerning the Establishment of the Sustainability Committee of PT PLN Nusantara Power. The term of office for the Sustainability Committee members follows their term in the Company's organizational structure.

Struktur Keanggotaan Komite *Sustainability*
Structure of Sustainability Committee Membership

Struktur Structure	Keanggotaan Membership	
Steering Committee	1. Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi 2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	1. Diretor of Human Capital Management and Administration 2. Director of Finance and Risk Management
Ketua Chairman	Kepala Satuan Technology Development and Asset Management	Head of Technology Development and Asset Management Unit
Wakil Ketua Vice Chairman	1. Kepala Satuan Corporate Law 2. Kepala Satuan Internal Audit 3. Kepala Satuan Supply Chain Management 4. Kepala Satuan Project Management 5. Sekretaris Perusahaan	1. Head of Corporate Law Unit 2. Head of Internal Audit Unit 3. Head of Supply Chain Management Unit 4. Head of Project Management Unit 5. Corporate Secretary
Sekretaris Secretary	1. VP Corporate Planning and Sustainability 2. VP, GCG, Secretary, and Protocol 3. Manager Corporate Transformation and Sustainability 4. Manager GCG and Corporate Reporting	1. VP of Corporate Planning and Sustainability 2. VP of GCG, Secretary, and Protocol 3. Corporate Transformation and Sustainability Manager 4. GCG and Corporate Reporting Manager
Koordinator Coordinator	Terdiri dari berbagai Bidang terkait baik di pusat maupun di Tingkat operasional pada setiap UP yang dikelompokan kedalam lima stream yaitu *Stream* Lingkungan, *Stream* Dekarbonisasi Pembangkit Tenaga Fosil, *Stream* Ekspansi Bisnis EBT, *Stream* Sosial dan *Stream* Tata Kelola.	Consists of various related fields both at the central and operational levels in each GU, which are grouped into five streams, namely Environmental Stream, Fossil Power Plant Decarbonization Stream, NRE Business Expansion Stream, Social Stream, and Governance Stream.
Anggota Member		

Komite Sustainability memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kinerja keberlanjutan perusahaan, yang mencakup proses identifikasi isu-isu keberlanjutan hingga penyusunan dan pengembangan strategi pencapaian tujuan keberlanjutan. Selain itu, Komite *Sustainability* juga melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh unit kerja terkait, baik di tingkat pusat maupun operasional pada setiap Unit Pembangkit PLN NP, serta melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) dalam rangka menyelaraskan inisiatif dan target keberlanjutan PLN NP dengan *holding*.

The Sustainability Committee is responsible for managing the company's sustainability performance, which includes the process of identifying sustainability issues, preparing, and developing strategies to achieve sustainability goals. In addition, the Sustainability Committee coordinates and collaborates with all related units, both at the central and operational levels in each PLN NP Generation Unit, as well as coordinating with PT PLN (Persero) to align PLN NP's sustainability initiatives and targets with the holding.

Informasi terkait struktur keanggotaan serta tugas dan tanggung jawab Komite *Sustainability* diuraikan lebih lanjut di Bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Laporan Tahunan ini dan Laporan Keberlanjutan tahun 2025.

Information regarding the membership structure as well as the duties and responsibilities of the Sustainability Committee is further elaborated in the Social and Environmental Responsibility Chapter of this Annual Report and the 2025 Sustainability Report.

Profil Komite *Sustainability*
Profile of the Sustainability Committee

Hery Artady
Ketua Komite *Sustainability*
Chairman of the Sustainability Committee

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, berdomisili di Surabaya. Menjabat sebagai Ketua Komite Sustainability berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0028.K/DIR/2024 tentang Pembentukan Komite *Sustainability* PT PLN Nusantara Power.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Mesin (Tahun 2000) dan S2 Bidang Permesinan (Tahun 2009) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Sertifikasi Insinyur Profesional (Tahun 2020), serta *Enterprise Risk Management Associate Professional* (ERMAP)/ *Enterprise Risk Management Certified Professional* (ERMCP) (Tahun 2022).

Riwayat Pekerjaan
Pernah berkarir sebagai Vice President O&M Planning and Control I (2023-2024); Kepala Divisi Perencanaan & Evaluasi Operasi Pemeliharaan-2 (2022); Kepala Bidang Technical Support (2017-2021); serta General Manager UBJOM PLTU Pacitan (2015-2016).

Rangkap Jabatan
- Di PLN NP: Kepala Satuan Technology Development and Asset Management
- Di Perusahaan/Instansi Lain: Tidak ada

An Indonesian citizen, 51 years old, domiciled in Surabaya. Serving as Chairman of the Sustainability Committee based on the Board of Directors' Decision Number 0028.K/DIR/2024 on the Establishment of PT PLN Nusantara Power Sustainability Report.

Education
Completed a Bachelor's degree in Mechanical Engineering (2000) and a Master's degree in Mechanical Engineering (2009) from Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Additionally, has undertaken non-formal education programs and obtained certifications, including Professional Engineering Certification (2020), Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) or Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) (2022).

Career History
Previously served as Vice President of O&M Planning and Control I (2023–2024); Head of Maintenance Operations Planning & Evaluation Division-2 (2022); Head of Technical Support Division (2017–2021); and General Manager of UBJOM PLTU Pacitan (2015–2016).

Concurrent Positions
- At PLN NP: Head of Technology Development and Asset Management Unit
- At Other Companies/Institutions: None

Profil *Steering Committee* pada Komite *Sustainability* yang terdiri dari unsur Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan. Profil Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Internal Audit dapat dilihat pada Bab Tata Kelola (Governansi) Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Steering Committee on the Sustainability Committee, which consists of members of the Board of Directors, can be found in the Company Profile Chapter. The profile of the Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Unit can be found in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Independensi Komite *Sustainability*
Independence of the Sustainability Committee

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite Sustainability bertindak secara independen dengan berorientasi pada kepentingan serta pencapaian tujuan Perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Setiap keputusan yang diambil dipastikan bebas dari intervensi yang dapat memengaruhi atau mengurangi objektivitas pelaksanaannya.

In carrying out its duties and functions, the Sustainability Committee acts independently, focusing on the interests and achievement of the Company's short-term and long-term goals. Every decision made is ensured to be free from interventions that could influence or diminish the objectivity of its implementation.

Pedoman Komite *Sustainability*
Guidelines of the Sustainability Committee

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Sustainability berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0028.K/DIR/2024 tentang Pembentukan Komite *Sustainability* PT PLN Nusantara Power. Selain itu, pelaksanaannya juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023.

In carrying out its duties and responsibilities, the Sustainability Committee is guided by the Board of Directors' Decree Number 0028.K/DIR/2024 concerning the Establishment of the Sustainability Committee of PT PLN Nusantara Power. Additionally, its implementation also refers to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-1/MBU/03/2023.

Pelatihan Komite *Sustainability*
Training of the Sustainability Committee

Pengembangan kompetensi Komite Sustainability dilakukan melalui berbagai program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta kapasitas anggota dalam mendukung pelaksanaan fungsi keberlanjutan perusahaan. Pelatihan tersebut mencakup berbagai materi yang relevan dengan isu-isu *sustainability*, tata kelola keberlanjutan, serta praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, kegiatan pelatihan Komite *Sustainability* dilaksanakan oleh eksternal adalah sebagai berikut:

The development of the Sustainability Committee's competencies is conducted through various training programs aimed at enhancing the understanding, knowledge, and capacity of its members in supporting the implementation of the Company's sustainability functions. The training includes various materials relevant to sustainability issues, sustainability governance, and applicable best practices. Throughout 2025, the training activities of the Sustainability Committee conducted by external parties are as follows:

Pelatihan Komite *Sustainability* oleh Eksternal
Sustainability Committee Training by External Party

No.	Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/*Workshop*/Narasumber Training/Seminar/Workshop/Resource Person	Waktu Pelaksanaan Date
1	Rina Sri Novrianti	Sekretaris Komite *Sustainability* Secretary of the Sustainability Committee	*Workshop Roadmap Net Zero Emision* (NZE) *Sub Holding* dan Anak Perusahaan Workshop on Roadmap Net Zero Emision (NZE) of Sub Holding and Subsidiaries	16 s/d 17 April 2025 April 16-17, 2025
2			*Workshop Energy Transition Business and Change Management:* 1. *Addressing Resistance to the Climate Change and Consensus* 2. *Renewable Energy Advancement* 3. *Enabler - Energy Procurement* 4. *Program I Module 5:* a. *Enabler - Financing, Regulations and Certification* b. *Non-electricity business opportunities in energy sector 1 – Sustainability* c. *Non-electricity business opportunities in energy sector 2 - Standars & Certification in energy Transition*	14 Mei 2025 May 14, 2025
3	Ryan Ahmed Maulana	Anggota Komite *Sustainability* Member of the Sustainability Committee	*Workshop* Implementasi Undangan *Environmental and Social Management System* (ESMS) dan Rencana Kerja *Energy Transition Acceleration Programme* (ETAP) Workshop on the Implementation of the Environmental and Social Management System (ESMS) and the Energy Transition Acceleration Programme (ETAP) Work Plan Invitation	15 s/d 16 Desember 2025 December 15-16, 2025
4	Alda Erfian			
5	Tania Revina Yasin			
6	Fallah Mandiriana	Sekretaris Komite *Sustainability* Secretary of the Sustainability Committee	ISSB *Standards Training & Certification* (*Reporting with* IFRS S1 & IFRS S2)	18-20 Februari 2025 February 18-20, 2025
7	Qurrotul Ainiyah			
8	Marcellia Dwi Anti	Anggota Komite *Sustainability* Member of the Sustainability Committee	ISSB *Standards Training & Certification* (*Reporting with* IFRS S1 & IFRS S2)	18-20 Februari 2025 February 18-20, 2025
9	Fallah Mandiriana	Sekretaris Komite *Sustainability* Secretary of the Sustainability Committee	*Certified Sustainability Reporting Specialist*, GRI *Standards* 2021 *Training Update for* CSRS *Holder*	2 September 2025 September 2, 2025
10	Qurrotul Ainiyah			

Selain itu, kegiatan pelatihan Komite *Sustainability* juga dilaksanakan secara internal (*inhouse training*) sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

In addition, the Sustainability Committee also conducted in-house training throughout 2025, as follows:

Pelatihan Komite *Sustainability* oleh Internal
Sustainability Committee Training by Internal Party

No.	Nama Name	Pelatihan/Seminar/*Workshop*/Narasumber Training/Seminar/Workshop/Resource Person	Waktu Pelaksanaan Date
1	Anggota Komite *Sustainability* Member of the Sustainability Committee	*Workshop Maturity Level Sustainability* PLN Nusantara Power Semester 1 Tahun 2025 Workshop on Maturity Level Sustainability of PLN Nusantara Power for the First Semester of 2025	3 - 4 Juni 2025 June 3-4, 2025

No.	Nama Name	Pelatihan/Seminar/*Workshop*/Narasumber Training/Seminar/Workshop/Resource Person	Waktu Pelaksanaan Date
2	Anggota Komite *Sustainability* Member of the Sustainability Committee	*Workshop Carbon Disclosure Project* (CDP) *Rating* dan *Awareness Alignment* IFRS Workshop on Carbon Disclosure Project (CDP) Rating and Awareness Alignment IFRS	21 - 22 Juli 2025 July 21-22, 2025
3	Anggota Komite *Sustainability* dan Perwakilan Unit Pembangkit Member of the Sustainability Committee and Representation of Power Plant Unit	*Workshop* ESG *Sustainability Culture & Deployment* Unit *Knowledge Sharing* terkait: Workshop on ESG Sustainability Culture & Deployment Unit Knowledge Sharing related to: 1. *Sustainability Mindset* 2. *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) 3. *Sustainability Procurement*	29 - 30 September 2025 September 29-30, 2025

Rapat Komite *Sustainability*
Meeting of the Sustainability Committee

Rapat Komite *Sustainability* merupakan forum koordinasi yang diselenggarakan untuk membahas pelaksanaan tugas, perkembangan program, serta isu-isu terkait keberlanjutan perusahaan. Kebijakan rapat Komite *Sustainability* menetapkan bahwa rapat dilaksanakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Sepanjang tahun 2025, Komite *Sustainability* telah melaksanakan rapat sebagai berikut:

The Sustainability Committee meeting is a coordination forum held to discuss task implementation, program developments, and issues related to corporate sustainability. The Sustainability Committee meeting policy stipulates that meetings be held routinely at least once per month. Throughout 2025, the Sustainability Committee held the following meetings:

Rapat Komite *Sustainability*
Meetings of the Sustainability Committee

No.	Nama Kegiatan Name of Activity	Tanggal Pelaksanaan Date	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Level
1	*Weekly/ Monthly Meeting Maturity Level Sustainability* dan CDP *Rating* Weekly/ Monthly Meeting on Maturity Level Sustainability and CDP Rating	• 25 Maret 2025 March 25, 2025 • 14 April 2025 April 14, 2025 • 23 April 2025 April 23, 2025 • 9 Mei 2025 May 9, 2025 • 26 Mei 2025 May 26, 2025 • 1 Juli 2025 July 1, 2025 • 22 Juli 2025 July 22, 2025 • 10 dan 15 Oktober 2025 October 10 and 15, 2025 • 7 November 2025 November 7, 2025 • 21 November 2025 November 21, 2025	*Weekly/ Monthly*	Tingkat kehadiran terpenuhi 100% berdasarkan kebutuhan rapat dan penugasan PIC terkait The attendance rate was 100% based on meeting requirements and related PIC assignments.
2	*Workshop Maturity Level Sustainability* PLN Nusantara Power Semester 1 Tahun 2025 Workshop on Maturity Level Sustainability of PLN Nusantara Power for the First Semester of 2025	3 s/d 4 Juni 2025 June 3-4, 2025	1x	Tingkat kehadiran terpenuhi 100% berdasarkan kebutuhan rapat dan penugasan PIC terkait The attendance rate was 100% based on meeting requirements and related PIC assignments.

No.	Nama Kegiatan Name of Activity	Tanggal Pelaksanaan Date	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Level
3	Finalisasi *Evidence Maturity Level Sustainability* PLN Nusantara Power: 1. Semester 1 Tahun 2025 2. Tahap I Periode Semester 2 Tahun 2025 Finalization of the Evidence Maturity Level Sustainability for PLN Nusantara Power: 1. First Semester of 2025 2. Phase I, Second Semester of 2025	Semester 1: 05 Juni 2025 Semester 2: 20 Oktober 2025 First Semester: June 5, 2025 Second Semester: October 20, 2025	Semesteran Quarterly	Tingkat kehadiran terpenuhi 100% berdasarkan kebutuhan rapat dan penugasan PIC terkait The attendance rate was 100% based on meeting requirements and related PIC assignments.
4	*Workshop* ESG *Topics*: 1. *Carbon Disclosure Project* (CDP) *Rating* dan and *Awareness Alignment* IFRS 2. ESG *Sustainability Culture & Deployment Unit*	1. 21 s/d 22 Juli 2025 2. 29 s/d 30 September 2025 1. July 21-22, 2025 2. September 29-30, 2025	Sesuai kebutuhan As needed	Tingkat kehadiran terpenuhi 100% berdasarkan kebutuhan rapat dan penugasan PIC terkait The attendance rate was 100% based on meeting requirements and related PIC assignments.
5	Finalisasi *Submission* CDP *Rating* PLN Nusantara Power tahun 2025 Finalization of CDP Rating Submission of PLN Nusantara Power in 2025	8 September 2025 September 8, 2025	1x	Tingkat kehadiran terpenuhi 100% berdasarkan kebutuhan rapat dan penugasan PIC terkait The attendance rate was 100% based on meeting requirements and related PIC assignments.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite *Sustainability*

Implementation of the Duties and Responsibilities of the Sustainability Committee

Pelaksanaan tugas Komite Sustainability dilakukan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi serta ketentuan yang berlaku di perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Sustainability berfokus pada pengelolaan kinerja keberlanjutan yang mencakup identifikasi isu-isu sustainability, penyusunan strategi, serta pengawasan pencapaian target keberlanjutan perusahaan. Selain itu, Komite *Sustainability* juga melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh unit terkait, baik di tingkat pusat maupun operasional pada setiap Unit Pembangkit PLN NP, serta berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk memastikan keselarasan inisiatif dan target keberlanjutan dengan arah kebijakan *holding*. Sepanjang tahun tahun 2025, Komite *Sustainability* telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

The Sustainability Committee's duties are implemented based on the guidelines established in the Board of Directors' Decision and the applicable provisions of the Company. In carrying out its duties, the Sustainability Committee focuses on managing sustainability performance, which includes identifying sustainability issues, formulating strategies, and overseeing the achievement of the Company's sustainability targets. In addition, the Sustainability Committee coordinates and collaborates with all related units, both at the central and operational levels in each PLN NP Power Plant Unit, as well as coordinating with PT PLN (Persero) to ensure the alignment of sustainability initiatives and targets with the holding's policy direction. Throughout 2025, the Sustainability Committee ran several activities, including:

Kegiatan Komite *Sustainability*
Sustainability Committe Activities

No.	Rincian Kegiatan Details of Activity	
1	***Maturity Level Sustainability*:** 1. Pelaksanaan FGD dan *Workshop Maturity Level Sustainability* PLN NP Semester 1 Tahun 2025. 2. Penyusunan *action plan* dan pemenuhan *evidence* ML *Sustainability* Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2025. 3. Pelaksanaan *Biweekly/monthly meeting progress* pengumpulan dan finalisasi *evidence*. 4. Pelaksanaan *Workshop Sustainability Culture* (*Sustainability Mindset, Sustainability Procurement*, dan *Gender Equality, Diversity, and Social Inclusion* (GEDSI)). 5. *Assessment* ML *Sustainability* periode Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2025 dengan Divisi Transisi Energi dan Keberlanjutan (DIV TEK) PLN.	**Maturity Level Sustainability:** 1. Conducting FGDs and Workshops on the Sustainability Maturity Level of PLN NP for the First Semester of 2025. 2. Development of an action plan and fulfillment of Sustainability ML evidence for the First and Second Semesters of 2025. 3. Conducting biweekly/monthly progress meetings on the collection and finalization of evidence. 4. Conducting a Sustainability Culture Workshop (Sustainability Mindset, Sustainability Procurement, and Gender Equality, Diversity, and Social Inclusion (GEDSI)). 5. ML Sustainability Assessment for the First and Second Semesters of 2025 with PLN's Energy Transition and Sustainability Division (DIV TEK).
2	***Alignment* Indikator IFRS S1 dan S2:** 1. Melakukan FGD dan *Workshop* terkait *alignment* IFRS S1 dan S2 dan dokumen internal PLN NP (*Sustainability Report, Annual Report*, Buku Profil Risiko, Buku RJPP 2024-2028, Buku RKAP 2025, dll). 2. *Meeting*/wawancara dalam rangka pengumpulan informasi dan data untuk penyusunan *Gap Analysis* kriteria IFRS S1 dan S2. 3. Penyusunan *Gap Analysis* dan *Report Alignment* IFRS S1 dan S2 *Indicator*. 4. Sosialisasi Draft *Report Alignment* IFRS S1 dan S2 *Indicator* dengan *Business Process Owner* (BPO) terkait.	**Alignment of IFRS S1 and S2 Indicators:** 1. Conducting FGDs and Workshops on the alignment of IFRS S1 and S2 with PLN NP's internal documents (Sustainability Report, Annual Report, Risk Profile Book, 2024–2028 RJPP Book, 2025 ABOP Book, etc.). 2. Meeting/interview to gather information and data for the preparation of a Gap Analysis of the IFRS S1 and S2 criteria. 3. Preparation of Gap Analysis and Report Alignment for IFRS S1 and S2 Indicator. 4. Socialization of the Draft Report on the IFRS S1 and S2 Indicators Alignment with the relevant Business Process Owners (BPOs).
3	***Assessment* ESG *Rating* melalui *Carbon Disclosure Project* (CDP) *Rating*:** 1. Pelaksanaan *Training* dan *Awareness* terkait kriteria CDP Rating 2025 2. Melakukan *peers benchmarking/desk study* dengan Perusahaan energi sejenis untuk aspek ESG pada penilaian CDP, diantaranya namun tidak terbatas pada aspek *Water Securiry* dan *Climate Change*. 3. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD)/diskusi secara berkala dengan BPO terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi penunjang kuisioner CDP. 4. Pengisian kuisioner dan *Scoring* CDP *Rating*. 5. Penyusunan *Gap Analysis* dan rencana tindak lanjut *report* CDP	**Assessment ESG Rating through Carbon Disclosure Project (CDP) Rating:** 1. Conducting Training and Awareness on the 2025 CDP Rating criteria 2. Conducting peer benchmarking/desk studies with similar energy Companies regarding ESG aspects in the CDP assessment, including but not limited to Water Security and Climate Change. 3. Conducting Focus Group Discussions (FGDs) or regular discussions with relevant BPOs to collect supporting data and information for the CDP questionnaire. 4. Filling out the questionnaire and CDP Rating Scoring. 5. Preparation of a Gap Analysis and follow-up plan for the CDP report
4	***Deployment Roadmap Maturity Level Sustainability* Unit Pembangkitan 2025 - 2029:** 1. Sosialisasi kriteria *Maturity Level Sustainability* ke seluruh Unit Pembangkitan PLN Nusantara Power. 2. Pendampingan (1 on 1) penyusunan *roadmap Maturity Level Sustainability*. 3. Pengesahan *Roadmap* ML *Sustainability Unit* untuk periode 2025-2029	**Deployment Roadmap Maturity Level Sustainability of Generation unit for 2025 - 2029:** 1. Dissemination of the Sustainability Maturity Level criteria to all Generation Units of PLN Nusantara Power. 2. One-on-one guidance on developing a Sustainability Maturity Level roadmap. 3. Approval of the ML Sustainability Unit Roadmap for the 2025–2029 period

Evaluasi Kinerja Komite *Sustainability*
Sustainability Committee Performance Evaluation

Penilaian kinerja Komite Sustainability dilakukan oleh Direksi dengan mengacu pada tingkat pencapaian target dari setiap inisiatif program pada masing-masing *workstream*. Sejalan dengan itu, PLN NP juga melaksanakan pemantauan performa sustainability sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko *Environmental, Social, Governance* (ESG) melalui pengukuran *maturity level sustainability*. Pada tahun 2025, perusahaan berhasil mencapai skor *maturity level* sustainability sebesar 3,89 atau 105,14% dari target 3,70. Secara keseluruhan, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan fungsi keberlanjutan, sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan, ketepatan kebijakan, dan implementasi inisiatif sustainability di Perusahaan.

The performance assessment of the Sustainability Committee is conducted by the Board of Directors, referring to the achievement level of targets from each program initiative of each workstream. In line with that matter, PLN NP also conducts sustainability performance monitoring as part of strengthening Environmental, Social, Governance (ESG) risk management by measuring sustainability maturity levels. In 2025, the Company successfully achieved a sustainability maturity level score of 3.89 or 105.14% of the target 3.70 Overall, the evaluation results serve as the basis for continuous improvement in the implementation of sustainability functions, while strengthening the effectiveness of supervision, policy accuracy, and the implementation of sustainability initiatives in the Company.

Komite Lain
Other Committees

Komite lain dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan kebutuhan, dengan nama dan tugas yang disesuaikan, serta terdiri atas ketua dan anggota. Dalam hal ini, PLN NP mempertimbangkan skala bisnis, struktur organisasi Perusahaan, serta kecukupan organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi yang saat ini dinilai telah memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan.

Other committees may be formed by the Board of Commissioners and the Board of Directors as needed, with adjusted names and duties, and consisting of a chairperson and members. In this case, PLN NP considers the scale of business, the Company's organizational structure, and the adequacy of the supporting organs of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which are currently deemed sufficient to support the implementation of supervisory functions.

Dengan adanya Komite Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta Komite Direksi yaitu Komite Sustainability, pembentukan komite lain di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dipandang belum diperlukan. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2025 tidak terdapat informasi mengenai profil, pelaksanaan tugas, maupun penilaian kinerja komite lainnya di bawah Dewan Komisaris dan Direksi.

With the Board of Commissioners Committee, such as the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Investment and Risk Management Committee, as well as the Board of Directors Committee, namely the Sustainability Committee, the formation of other committees under the Board of Commissioners and Board of Directors is not deemed necessary. Therefore, throughout 2025, there was no information regarding the profiles, task execution, or performance assessments of other committees under the Board of Commissioners and Board of Directors.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi penting sebagai pendukung penerapan tata kelola perusahaan sekaligus memastikan kelancaran tugas Direksi. Fungsinya tidak hanya administratif, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap peraturan, khususnya terkait keterbukaan informasi. Selain itu, Sekretaris Perusahaan menjadi penghubung antara perusahaan dan para pemangku kepentingan—seperti regulator, investor, dan masyarakat—guna menjaga komunikasi yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Sekretaris Perusahaan memegang peran kunci dalam struktur organisasi, terutama dalam mendukung keterbukaan informasi, pelaporan, dan komunikasi. Pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku serta kebijakan internal perusahaan.

The Corporate Secretary plays an important role in supporting the implementation of corporate governance while ensuring the smooth operation of the Board of Directors' duties. Its function is not only administrative but also ensures compliance with regulations, particularly regarding information disclosure. In addition, the Corporate Secretary serves as a liaison between the Company and stakeholders—such as regulators, investors, and the public—to maintain transparent, effective, and accountable communication.

The Corporate Secretary plays a key role in the organizational structure, specifically in supporting information transparency, reporting, and communication. Its implementation refers to Law Number 19 of 2003 concerning SOEs and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners in accordance with applicable provisions and the Company's internal policies.

Profil Sekretaris Perusahaan
Profile of the Corporate Secretary

Hamidi Hamid
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, 50 Tahun dan berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif sejak 1 Juli 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor K.0628/426/PNP/2025 tanggal 17 Juni 2025.

Indonesian, 50 years old, residing in Jakarta. Has served as Corporate Secretary effective on July 1, 2025, based on the Board of Directors' Decree of PT PLN Nusantara Power No. K.0628/426/PNP/2025 dated June 17, 2025.

Pendidikan
- S1 Mesin – Universitas Bung Hatta (1993 - 1999)
- S2 Bidang Administrasi Bisnis – Institut Teknologi Bandung (2020 - 2022)

Riwayat Pekerjaan
Beliau pernah menjabat sebagai:
- Senior Manager Komunikasi dan Umum PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali pada tahun 2025-2025
- Sekretaris Perusahaan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam pada tahun 2023-2025
- Corporate Secretary PT Pelayanan Listrik Nasional Batam pada tahun 2022
- PLT Corporate Secretary PT Pelayanan Listrik Nasional Batam pada tahun 2021
- Senior Specialist II Business Development & Enterprise PT PEB pada tahun 2019-2021
- Senior Engineer II Fuel Gas & Lubricant PT PEB pada tahun 2019
- Engineer Fuel, Gas, & Lubricant PT PEB pada tahun 2018
- General Manager Generation & Transmission PT Pelayanan Listrik Nasional Batam pada tahun 2016-2018
- Head of Procurement Management PT Pelayanan Listrik Nasional Batam pada tahun 2014-2016
- Senior Manager Procurement PT Pelayanan Listrik Nasional Batam pada tahun 2013-2014

Education
- Bachelor's degree in Mechanical Engineering - Bung Hatta University (1993-1999)
- Master's degree in Business Administration - Bandung Institute of Technology (ITB) (2020-2022)

Career History
He previously served as:
- Communication and General Affairs Senior Manager of PT PLN (Persero) for Bali Distribution Main Unit in 2025
- Corporate Secretary of PT Pelayanan Listrik Nasional Batam in 2023-2025
- Corporate Secretary of PT Pelayanan Listrik Nasional Batam in 2022
- Acting Corporate Secretary of PT Pelayanan Listrik Nasional Batam in 2021
- Business Development & Enterprise Senior Specialist II of PT PEB in 2019-2021
- Fuel Gas & Lubricant Senior Engineer II of PT PEB in 2019
- Engineer Fuel, Gas, & Lubricant of PT PEB in 2018
- General Manager of Generation & Transmission of PT Pelayanan Listrik Nasional Batam in 2016-2018
- Head of Procurement Management of PT Pelayanan Listrik Nasional Batam in 2014-2016
- Procurement Senior Manager of PT Pelayanan Listrik Nasional Batam in 2013-2014

Kedudukan dan Struktur Organ Sekretariat Perusahaan
Position and Organizational Structure of the Corporate Secretary

Sekretariat Perusahaan berfungsi sebagai unit pendukung Direksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan ditetapkan sebagai pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin Sekretariat Perusahaan.

The Corporate Secretary functions as a support unit for the Board of Directors, which is under and directly responsible to the President Director. The Corporate Secretary is appointed as an official one level below the Board of Directors, who leads the Corporate Secretariat.

Struktur organisasi Sekretariat Perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0042.P/DIR/2025 tentang Perubahan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0021.P/DIR/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja tertanggal 28 November 2025 serta Peraturan Direksi Nomor 0056.P/DIR/2025 tentang Perubahan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0024.P/DIR/2025 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Sekretariat Perusahaan PT PLN Nusantara Power tertanggal 15 Desember

The organizational structure of the Corporate Secretary refers to the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power Number 0042.P/DIR/2025 concerning the Amendment of the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power Number 0021.P/DIR/2025 concerning Organization and Work Procedures dated November 28, 2025, and the Board of Directors Regulation Number 0056.P/DIR/2025 concerning the Amendment of the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power Number 0024.P/DIR/2025 concerning the Implementation Regulations of the

2025. Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Perusahaan membawahi dua bidang, yaitu Bidang Good Corporate Governance (GCG), Secretary and Protocol (BID GCG) serta Bidang Corporate Communication and Corporate Social Responsibility (CSR) (BID COM).

Organizational Structure and Workforce Formation at the Corporate Secretary of PT PLN Nusantara Power dated December 15, 2025. In its implementation, the Corporate Secretary supervises two divisions: the Good Corporate Governance (GCG), Secretary and Protocol Department (BID GCG), as well as the Corporate Communication and Corporate Social Responsibility (CSR) Department (BID COM).

Struktur Organ Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretariat Organ Structure

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Work Guidelines

Dasar pedoman kerja Sekretaris Perusahaan merujuk pada Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0042.P/DIR/2025 tentang Perubahan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0021.P/DIR/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja tertanggal 28 November 2025 serta Peraturan Direksi Nomor 0056.P/DIR/2025 tentang Perubahan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0024.P/DIR/2025 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Sekretariat Perusahaan PT PLN

The basis for the work guidelines of the Corporate Secretary refers to the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power Number 0042.P/DIR/2025 concerning the Amendment of the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power Number 0021.P/DIR/2025 concerning Organization and Work Procedures dated November 28, 2025, and the Board of Directors Regulation Number 0056.P/DIR/2025 concerning the Amendment of the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power Number 0024.P/

Nusantara Power tertanggal 15 Desember 2025 yang mengatur lingkup tanggung jawab dan garis koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga berpedoman pada Corporate Secretary Manual sebagai panduan operasional dalam menjalankan fungsinya. *Corporate Secretary Manual* merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Corporate Governance Code* Perusahaan yang memuat kebijakan dan prosedur kerja guna mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

DIR/2025 concerning the Implementation Regulations of the Organizational Structure and Workforce Formation at the Corporate Secretary of PT PLN Nusantara Power dated December 15, 2025, which regulate the scope of responsibilities and lines of coordination in the execution of duties. Additionally, the Corporate Secretary refers to the Corporate Secretary Manual as an operational guideline in carrying out its functions. The Corporate Secretary Manual is an integral part of the Company's Corporate Governance Code, which contains policies and work procedures to support the implementation of good corporate governance.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Perusahaan melalui fungsi yang selaras dengan tata kelola perusahaan yang baik. Fungsinya mencakup pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan secara efektif dan berkelanjutan, pengelolaan informasi publik yang transparan dan akurat, serta penanganan krisis yang responsif. Peran ini bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan dan membangun citra positif perusahaan guna mendukung pencapaian strategi korporasi secara menyeluruh. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan strategis dan operasional pada Sekretariat Perusahaan.
2. Memastikan strategi pengelolaan, *monitoring* dan evaluasi tata kelola Perusahaan, laporan Perusahaan, pedoman dan program korporat, protokoler internal dan eksternal, pendokumentasian kegiatan strategis Perusahaan serta pemilihan kegiatan award yang diikuti Perusahaan.
3. Memastikan strategi pengelolaan pembinaan, pemenuhan dan asesmen GCG.
4. Memastikan strategi pengelolaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi Direksi dan Dewan Komisaris antara lain meliputi kesekretariatan, remunerasi, fasilitas, protokoler dan program pengembangan.
5. Memastikan strategi pengelolaan, monitoring dan evaluasi kebijakan kesekretariatan.

The Corporate Secretary plays a crucial role in supporting the achievement of the Company's long-term goals through functions aligned with good corporate governance. These functions include the effective and sustainable management of stakeholder relationships, the transparent and accurate management of public information, and responsive crisis handling. This role aims to create harmonious relationships with all stakeholders and build a positive company image to support the comprehensive achievement of corporate strategy. The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Formulating and evaluating strategic and operational policies within the Corporate Secretariat.
2. Ensuring strategies for managing, monitoring, and evaluating corporate governance, Company reports, guidelines and corporate programs, internal and external protocol, documentation of strategic Company activities, and selection of award events participated in by the Company.
3. Ensuring strategies for managing GCG development, compliance, and assessments.
4. Ensuring strategies for managing, monitoring, and evaluating the administration of the Board of Directors and Board of Commissioners, including secretariat, remuneration, facilities, protocol, and development programs.
5. Ensuring strategies for managing, monitoring, and evaluating the secretarial policies.

6. Memastikan pelayanan terhadap Direktur Utama termasuk namun tidak terbatas pada prioritisasi agenda, penyiapan materi paparan, notulen, sambutan dan evaluasi atas dokumen yang akan ditandatangani oleh Direktur Utama.
7. Memastikan strategi pengelolaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi komunikasi internal dan eksternal, penyediaan informasi publik dan corporate branding, serta pembinaan ke seluruh Unit Kerja dalam kegiatan komunikasi Perusahaan.
8. Memastikan strategi pengelolaan stakeholder management, pengendalian potensi krisis komunikasi, serta menjalankan fungsi mediator dalam penyelesaiaan masalah yang dihadapi Perusahaan.
9. Memastikan strategi pengelolaan pelaksanaan dan pelaporan *Environment, Social and Governance* (ESG) pada stream social dan governance.
10. Melaksanakan dan bertindak sebagai pengguna barang/jasa dalam rangka pengadaan untuk kebutuhan dan proses bisnis Satuannya dan Satuan Internal Audit berdasarkan batasan kewenangan dan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perusahaan.
11. Mengoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional pada Bidang GCG, Secretary and protocol dan Bidang Corporate Communication and CSR.
12. Memastikan dukungan resources terhadap pengembangan bisnis kepada fungsi yang mengelola pengembangan bisnis.
13. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, Kepatuhan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3KL), tata kelola data dan keamanan informasi serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan.
14. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko Sekretariat Perusahaan.
15. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan *monitoring* realisasi program kerja pada Sekretariat Perusahaan.

6. Ensuring service to the President Director, including but not limited to prioritizing agendas, preparing presentation materials, minutes, speeches, and evaluations of documents to be signed by the President Director.
7. Ensuring strategies for the development, control, and evaluation of internal and external communication strategies, public information disclosure, corporate branding, and communications development across all Work Units.
8. Ensuring stakeholder management strategies, communication crisis control, and serving as mediator in resolving corporate issues.
9. Ensuring the implementation and reporting of Environment, Social, and Governance (ESG) aspects within the social and governance streams.
10. Implementing and acting as the user of goods/services in the procurement process for the needs and business processes of the Unit and the Internal Audit Unit based on the authority limits and procurement provisions applicable in the Company.
11. Coordinating strategic and operational execution in the GCG, Secretary and Protocol Division, and the Corporate Communication and CSR Division.
12. Ensuring resource support for business development functions.
13. Ensuring the implementation of Company culture, compliance, occupational health and safety, security and environment (K3KL), data governance, information security, and the management systems applied in alignment with the Company's vision and mission.
14. Ensuring risk identification and mitigation within the Corporate Secretariat.
15. Ensuring the management and control of work programs, budgeting, and monitoring of program realization within the Corporate Secretariat.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan
Implementation of Corporate Secretary Duties

Sekretaris Perusahaan secara berkala menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Perusahaan yang disampaikan kepada Direksi. Laporan ini memuat realisasi program kerja dari masing-masing bidang di bawah Sekretariat Perusahaan, yang tidak hanya menggambarkan capaian kinerja, tetapi juga menjadi bahan evaluasi efektivitas fungsi strategis serta dasar perbaikan berkelanjutan ke depan. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup berbagai aspek penting yang mendukung operasional perusahaan secara menyeluruh, antara lain:

1. Bidang GCG, Secretary and Protocol
    a. Melaksanakan Rapat Direksi, yang selama 2025 telah terselenggara sebanyak 43 kali dengan waktu penyelesaian draf risalah Rapat Direksi rata-rata selama 4 hari.
    b. Koordinasi pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris-Direksi (Konsultasi dan Pengawasan), yang selama 2025 telah terselenggara sebanyak 12 kali.
    c. Koordinasi pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan yang selama 2025 terlaksana sebanyak 2 kali, yaitu RUPS Pengesahan RKAP 2025 pada 30 Januari 2025 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 pada tanggal 19 Juni 2025.
    d. Monitoring penyelesaian M-*Action* korporat (arahan RUPS dan Radir) dilakukan setiap triwulan dengan capaian penyelesain sebesar 100%.
    e. Pelaksanaan *roadshow empowering* nusantara pada 8 Unit.
    f. Pengelolaan agenda Direksi dan kegiatan protokoler termasuk pengelolaan administratif dan kesekretariatan/kearsipan.
    g. Menyelenggarakan Rapat Kerja tahun 2025 dalam 2 tahap yaitu Rapat Kerja Semester I tanggal 3 Februari 2025 dan Rapat Kerja Semester II pada tanggal 17-18 Juli 2025.
    h. Menerbitkan Laporan Kinerja Bulanan, yang selama 2025 terbit sebanyak 8 Laporan.
    i. Menyusun Laporan Manajemen Perusahaan yang diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Laporan tersebut terdiri atas:

The Corporate Secretary periodically prepares the Corporate Secretariat Performance Report, submitted to the Board of Directors. This report contains the actualization of work programs from each field under the Corporate Secretariat, which not only illustrates performance achievements but also serves as a basis for evaluating the effectiveness of strategic functions and a foundation for continuous future improvement. Throughout 2025, the implementation of the Corporate Secretary's functions encompassed various important aspects that support the Company's overall operations, including:

1. GCG, Secretary, and Protocol Division
    a. Held 43 Board of Directors Meetings in 2025, with an average completion time of 4 days for drafting the meeting minutes.
    b. Coordinated 12 joint meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors (Consultation and Supervision) during 2025.
    c. Coordinated two Annual General Meetings of Shareholders in 2025, namely the GMS for the 2025 ABOP Approval on January 30, 2025, and the GMS for Annual Report and Financial Statement Approval for the 2024 Fiscal Year on June 19, 2025
    d. Conducted quarterly monitoring of the completion of corporate M-Actions (GMS and Board directives), achieving a 100% completion rate.
    e. Organized Empowering Nusantara roadshows at eight units.
    f. Managed the Directors' agendas and protocol activities, including administrative and secretarial/archival matters.
    g. Held the 2025 Work Meeting in two stages: Semester I on February 3, 2025, and Semester II on July 17-18, 2025.
    h. Issued eight Monthly Performance Reports in 2025.
    i. Compiled the Management Reports submitted to Shareholders and the Board of Commissioners, consisting of:

1) Laporan Manajemen Tahunan *Unaudited* tahun 2024,
2) Laporan Manajemen Tahunan *Audited* tahun 2024,
3) Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2025,
4) Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2025,
5) Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2025;

j. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2024 yang telah didistribusikan kepada stakeholder Perusahaan serta telah diunggah di website Perusahaan.
k. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta pihak ketiga lainnya.
l. Menyusun *Corporate Presentation* Tahun 2025 untuk setiap triwulan.
m. Menyusun buku Statistik Perusahaan Tahun 2024.
n. Penerapan GCG Korporat tercermin melalui kegiatan *Assessment* GCG Periode Implementasi Tahun 2024 oleh Asesor Independen dengan capaian skor sebesar 95,90 yang merupakan tertinggi di PLN Grup.
o. Penyusunan Penyusunan Program Tindak Lanjut Area of Improvement Hasil *Assessment* GCG pada Aspek 1, 4, 5 dan 6.
p. Pelaksanaan *Assessment* GCG Anak Perusahaan untuk Periode Implementasi Tahun 2024.
q. Pelaksanaan pengukuran *Maturity Level* GCG Korporat tahun 2025 dengan capaian skor 3,10 dari target 2,60.
r. Penyusunan Pemutakhiran dan Pengesahan *Soft Structure* GCG (*Board Manual*, CG *Roadmap*, *Code of Conduct, Corporate Governance Code* dan BOD *Manual*)
s. Sosialisasi, *Awareness* & *Refreshment* GCG kepada seluruh karyawan dan anak perusahaan mengenai pembinaan scope dalam *Good Corporate* seperti Standar Etika Perusahaan, Tata Nilai Perusahaan, Gratifikasi, LHKPN, Kebijakan *Anti Fraud*, Benturan Kepentingan, ISO 37001 Anti Penyuapan, *Compliance* dan *Whistle Blowing System*. Telah dilaksanakan 2 kali dalam setahun secara *online* tanggal 17 Februari 2025 dan 25 Juni 2025, serta pelaksanaan survei pemahaman tata kelola tanggal 1 September s.d 19 September 2025.

1) 2024 Unaudited Annual Management Report
2) 2024 Audited Annual Management Report
3) Q1 2025 Management Report
4) Q2 2025 Management Report
5) Q3 2025 Management Report

j. Prepared the 2024 Annual Report and Sustainability Report, which were distributed to stakeholders and uploaded to the Company's website.
k. Provided data and information services to stakeholders including Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and third parties.
l. Developed the 2025 Corporate Presentation on a quarterly basis.
m. Compiled the 2024 Company Statistics Book.
n. Corporate GCG practices were reflected in the Assessment of the 2024 GCG Implementation by Independent Assessor, with a score of 95.90, the highest within the PLN Group.
o. Preparation of a Follow-Up Program for Areas of Improvement Identified in the GCG Assessment for Aspects 1, 4, 5, and 6.
p. Conducted GCG assessments for subsidiaries for the 2024 implementation period.
q. Implementation of the Corporate GCG Maturity Level measurement in 2025, with a score achievement of 3.10 of a target of 2.60.
r. Preparation, Update, and Ratification of the GCG Soft Structure (Board Manual, CG Roadmap, Code of Conduct, Corporate Governance Code, and BOD Manual)
s. Socialization, Awareness & Refreshment of GCG to all employees and subsidiaries regarding the scope development in Good Corporate, such as Code of Conduct, Company Values, Gratification, LHKPN, Anti-Fraud Policy, Conflict of Interest, ISO 37001 Anti-Bribery, Compliance, and Whistle Blowing System. It was conducted twice a year online on February 17, 2025, and June 25, 2025, as well as the implementation of a governance comprehension survey from September 1 to September 19, 2025.

t. Melaksanakan Induksi Dewan Komisaris selama tahun 2025 sebanyak 1 kali pertemuan pada 3 Juli 2025.

2. Bidang Corporate Communication and CSR
   a. Pelaksanaan dan pelaporan evaluasi kegiatan engagement kepada stakeholder PLN Nusantara Power sebanyak 6 laporan.
   b. Pembinaan Komunikasi Korporat pada seluruh Unit tercapai 107,07%.
   c. Penyusunan rencana publikasi terhadap beragam kegiatan sesuai agenda setting PLN tercapai skor 1.074.755.600 poin dari 111 rilis korporat.
   d. Penyusunan rencana konten media sosial serta pelaksanaan publikasi konten media sosial sesuai dengan program atau kegiatan korporat tercapai 7.295.290 poin dari 1.634 konten.
   e. Pengelolaan Kampanye Komunikasi sesuai standar AMEC sebanyak 2 Kampanye Internal dan 3 Kampanye Eksternal
   f. Tindaklanjut OFI to AFI hasil survei index Persepsi yang dilakukan PLN tercapai 113%.
   g. Perencanaan dan pelaksanaan publikasi melalui media informasi internal Watt's Up Nusantara sebanyak 33 rilis.
   h. Pengelolaan kegiatan sponsorship dan iklan sebagai bentuk partisipasi Perusahaan kepada *stakeholders* meliputi pendokumentasian *sponsorship*, evaluasi dan tindak lanjut.
   i. Melakukan koordinasi pelaksanaan kunjungan dan *benchmark* tahun 2025 dari eksternal sebanyak 209 kunjungan.
   j. Media Relation: *Press Release* & *Press Conference* sebanyak 111 rilis korporat.
   k. *Monitoring* Media Koran Cetak sebanyak 300 rilis dan Media *Online* sebanyak 8.246 link.
   l. Koordinator pelaksanaan event korporat antara lain kegiatan HUT PLN NP dan kegiatan lainnya sebanyak 61 event.
   m. Koordinator program (Pembina) CSR Perusahaan yang dilaksanakan di unit kerja.
   n. Penyusunan Laporan CSR Korporat TW I, TW II, TW III, dan TW IV tahun 2025.
   o. Membuat Peraturan Direksi Terkait strategi komunikasi dan TJSL

t. Held one Induction session for the Board of Commissioners on July 3, 2025

2. Corporate Communication and CSR Division
   a. Implementation and reporting of engagement activity evaluations to PLN Nusantara Power stakeholders, totaling 6 reports.
   b. Corporate Communication Development across all Units achieved 107.07%.
   c. The preparation of the publication plan for various activities according to PLN's agenda setting achieved a score of 1,074,755,600 points from 111 corporate releases.
   d. The preparation of social media content plans and the execution of social media content publication in accordance with corporate programs or activities achieved 7,295,290 points from 1,634 pieces of content.
   e. Management of Communication Campaigns according to AMEC standards, consisting of 2 Internal Campaigns and 3 External Campaigns.
   f. Follow-up OFI to AFI on the perception index survey conducted by PLN achieved 113%.
   g. Planning and execution of publications through the internal information media, Watt's Up Nusantara, totaling 33 releases.
   h. Management of sponsorship and advertising activities as a form of the Company's participation with stakeholders includes documentation of sponsorship, evaluation, and follow-up.
   i. Coordinating the implementation of visits and benchmarks in 2025 from external sources, totaling 209 visits.
   j. Media Relations: Press Release & Press Conference with a total of 111 corporate releases.
   k. Monitoring of Newspapers with 300 releases and Online Media with 8,246 links.
   l. Coordinator for the implementation of corporate events, including PLN NP anniversary activities and other activities, totaling 61 events.
   m. Coordinator of the CSR Program (Mentor) of the Company implemented in the work unit.
   n. Preparation of the Corporate CSR Report for Q1, Q2, Q3, and Q4 of 2025.
   o. Creating Board of Directors Regulations Related to Communication Strategy and CSR

p. Melakukan fungsi pembinaan pada Unit-unit terkait tata Kelola dan arah CSR Korporat
q. Membuat dan melaporkan kajian resiko sub Bidang CSR
r. Penyusunan Laporan RKA CSR Korporat setiap bulannya ke PT PLN (Persero)

s. Pengukuran Nilai Social *Return on Investment* (SROI) tahun 2025 tercapai sebagai berikut:

1) UP Muara Tawar (1,87)
2) UP Indramayu (2,15)
3) UP Rembang (2,86)
4) UP Muara Karang (2,19)
5) UP Gresik (3,59)
6) UP Paiton (2,54)
7) UP Punagaya (2,65)
8) UP Cirata (1,70)
9) UP Pacitan (1,32)
10) UP Tenayan (2,16)

t. Memastikan capaian Tingkat Proper Unit *Beyond Compliance* (Proper Hijau dan Emas) pada tahun 2025 sebanyak 4 Unit Proper Emas dan 12 Unit Proper Hijau.
u. Mengukur tingkat keberhasilan program CSR dengan indeks kepuasan pada masyarakat di 32 Unit PLN NP
v. Melaksanakan kegiatan untuk penguatan serta peningkatan kompetensi Tim CSR seluruh Unit PLN NP.
w. Melakukan Perencanaan, pelaksanaan serta *monitoring* untuk keterlibatan karyawan pada program lingkungan serta sosial kemasyarakatan melalui program Nusantara *Volunteering Program* (NVP)
x. Melaksanakan program CSR kolaborasi bersama PT PLN Persero
y. Pengelolaan Kerja Praktek.
z. Pengelolaan Bantuan Sosial serta kegiatan keagamaan
aa. Pemenuhan Audit internal dan Audit PT PLN (Persero)
bb. Keikutsertaan pada *Awarding* sesuai Sasaran Award:
- Asia *Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT)
- Stevie *Award*
- TOP Digital PR *Award*
- PROPER *Beyond Compliance*
- Subroto *Award*
- *Annual Report Award* (ARA)
- Indonesia *Human Capital Brilliance Awards* (IHCBA)

p. Conducting coaching functions for Units related to Governance and Corporate CSR direction.
q. Creating and reporting risk studies in the CSR subfield
r. Preparation of the Corporate CSR Budget & Operational Plan Report every month to PT PLN (Persero)
s. The measurement of the Social Return on Investment (SROI) value for the year 2025 is as follows:
1) Muara Tawar GU (1,87)
2) Indramayu GU (2,15)
3) Rembang GU (2,86)
4) Muara Karang GU (2,19)
5) Gresik GU (3,59)
6) Paiton GU (2,54)
7) Punagaya GU (2,65)
8) Cirata GU (1,70)
9) Pacitan GU (1,32)
10) Tenayan GU (2,16)
t. Ensuring the achievement of Beyond Compliance Proper Level (Green and Gold Proper) in 2025, 4 Units with Gold Proper and 12 Units with Green Proper.
u. Measuring the success level of the CSR program with a satisfaction index among the community in 32 PLN NP Units
v. Carrying out activities to strengthen and enhance the competence of the CSR Team across all PLN NP Units.
w. Conducting planning, implementation, and monitoring for employee involvement in environmental and community social programs through the Nusantara Volunteering Program (NVP).
x. Implementing a CSR program in collaboration with PT PLN Persero
y. Management of Practical Work.
z. Management of Social Assistance and Religious Activities
aa. Fulfillment of Internal Audit and Audit of PT PLN (Persero)
bb. Participation in the Awarding according to the Award Target:
- Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)
- Stevie Award
- TOP Digital PR Award
- PROPER Beyond Compliance
- Subroto Award
- Annual Report Award (ARA)
- Indonesia Human Capital Brilliance Awards (IHCBA)

- Aneka EBT
- GRC *Award*
- CID *Award* PLN
- Corcom *Award* PLN
- *Culture Fest* PLN
- LIKE PLN
- PLN *Risk Award*

cc. Keikutsertaan pada *Awarding* lainnya:

- BKKBN Genting *Collaboration Summit* (GCS) Award
- BRIN AIDeaNation 2025
- *Future Innitiative Award* 2025
- Asia ESG *Positive Impact Award* 2025
- ASEAN *Energy Awards* 2025
- Lestari *Award* 2025
- ENSIA 2025
- Investortrust BUMN *Awards* 2025
- *Circular Economy Sustainability Award* 2025
- Apresiasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Terpatuh
- ISRA 2025
- *Power Awards*

- Aneka EBT
- GRC Award
- CID Award PLN
- Corcom Award PLN
- Culture Fest PLN
- LIKE PLN
- PLN Risk Award

cc. Participation in other Awards:

- BKKBN Genting Collaboration Summit (GCS) Award
- BRIN AIDeaNation 2025
- Future Innitiative Award 2025
- Asia ESG Positive Impact Award 2025
- ASEAN Energy Awards 2025
- Lestari Award 2025
- ENSIA 2025
- Investortrust BUMN Awards 2025
- Circular Economy Sustainability Award 2025
- Recognition of the Most Compliant Marine Space Permits (KKPRL)
- ISRA 2025
- Power Awards

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Competency Development of the Corporate Secretary

Program pengembangan kompetensi bagi Sekretaris Perusahaan dan seluruh staf Sekretariat Perusahaan bertujuan meningkatkan efektivitas fungsi serta mendukung pencapaian kinerja optimal. Program ini merupakan bagian dari strategi pengembangan SDM untuk meningkatkan kapabilitas, profesionalisme, dan kesiapan menghadapi dinamika bisnis. Pelatihan difokuskan pada penguatan peran strategis Sekretaris Perusahaan, meliputi tata kelola perusahaan, keterbukaan informasi, komunikasi korporat, kepatuhan, serta pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan dan bidang terkait lainnya guna mendukung keberlanjutan Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, program pengembangan kompetensi yang telah diikuti antara lain:

The competency development program for the Corporate Secretary and all Company Secretariat staff aims to enhance functional effectiveness and support the achievement of optimal performance. This program is part of the HR development strategy to improve capabilities, professionalism, and readiness to deal with business dynamics. The training is focused on strengthening the strategic role of the Corporate Secretary. It includes corporate governance, information disclosure, corporate communication, compliance, and managing relationships with stakeholders and other related fields to support the Company's sustainability. Throughout 2025, the competency development programs that have been participated in include:

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Competency Development Program

No.	Jabatan Position	Nama Sertifikasi/Pelatihan Name of Certification/ Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
1.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	*Leadership Development Program* (LDP) I Batch I	16 Oktober 2025 October 16, 2025	PT PLN (Persero) UPDL Jakarta
2.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	*Executive Development Program Managing Business Partnership*	26-27 September 2023 September 26-27, 2023	PPM Manajemen

No.	Jabatan Position	Nama Sertifikasi/Pelatihan Name of Certification/ Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
3.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	*Executive Education* II	26 Agustus – 15 Desember 2021 August 26 - December 15, 2021	PT PLN (Persero) UPDL Jakarta
4.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	*Leaders as Meaning Makers* (LAMM)	22-23 Maret 2021 March 22-23, 2021	ACT Consulting International
5.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	*Executive Education* III	20 Juli – 19 Desember 2017 July 20 - December 19, 2017	PT PLN (Persero) UPDL Jakarta
6.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Metode *Assessment Good Corporate Governance* (GCG) PUG-KI dan ACGS Good Corporate Governance (GCG) Assessment Methods: PUG-KI and ACGS	17 Desember 2025 December 17, 2025	KNKG
7.	Vice President GCG, Secretary and protocol	Metode *Assessment Good Corporate Governance* (GCG) PUG-KI dan ACGS Good Corporate Governance (GCG) Assessment Methods: PUG-KI and ACGS	17 Desember 2025 December 17, 2025	KNKG
8.	Officer GCG and Corporate Reporting	GRI *Standards* 2021 *Training Update for* CSRS *Holder*	2 September 2025 September 2, 2025	NCCR
9.	Manager/ Senior/ Officer GCG and Corporate Reporting	ISSB *Standards Training & Certification* (*Reporting with* IFRS S1 & IFRS S2)	18-20 Februari 2025 February 18-20, 2025	NCCR
10.	Senior/ Officer GCG and Corporate Reporting	*Public Speaking* Juru Bicara Perusahaan Public Speaking by Corporate Spokesperson	22-23 Oktober 2025 October 22-23, 2025	PLN Pusdiklat
11.	Officer GCG and Corporate Reporting	Pelatihan *Certified Governance* Professional dan Sertifikasi Certified Governance Professional Training and Certification	8 - 11 Juli 2025 July 8-11, 2025	CRMS
12.	Manager/ Senior/ Officer GCG and Corporate Reporting	Metode *Assessment Good Corporate Governance* (GCG) PUG-KI dan ACGS Metode Assessment Good Corporate Governance (GCG) PUG-KI dan ACGS	17 Desember 2025 December 17, 2025	KNKG
13.	Specialist Protocoler	*Public Speaking* Juru Bicara Perusahaan Public Speaking by Corporate Spokesperson	18-19 September 2025 September 18-19, 2025	PLN Pusdiklat
14.	Senior Officer Corporate Management	*Public Speaking* Juru Bicara Perusahaan Public Speaking by Corporate Spokesperson	18-19 September 2025 September 18-19, 2025	PLN Pusdiklat
15.	Specialist Stakeholder Mngmt & Investor Relations	Pelatihan Pengantar Pembekalan Purnabakti PT PLN NP 2025 PT PLN NP 2025 Retirement Orientation Training	04-05 Juni 2025 June 4-5, 2025	UPDL Surabaya

No.	Jabatan Position	Nama Sertifikasi/Pelatihan Name of Certification/ Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
16.	Officer Stakeholder Management And Investor Relation	*Self Learning* Fundamental Manajemen Risiko Self-Learning, Fundamentals of Risk Management	29 April-31 Desember 2025 April 29-December 31, 2025	UPDL Makassar
17.	Specialist Stakeholder Mngmt & Investor Relations	*Self Learning* Fundamental Manajemen Risiko Self-Learning, Fundamentals of Risk Management	29 April-31 Desember 2025 April 29-December 31, 2025	UPDL Makassar
18.	Senior Officer Stakeholder Management And Investor Relation	*Self Learning* Fundamental Manajemen Risiko Self-Learning, Fundamentals of Risk Management	29 April-31 Desember 2025 April 29-December 31, 2025	UPDL Makassar
19.	Manager Stakeholder Management And Investor Relation	*Self Learning* Fundamental Manajemen Risiko Self-Learning, Fundamentals of Risk Management	29 April-31 Desember 2025 April 29-December 31, 2025	UPDL Makassar
20.	Junior Officer Corporate Social Responsibility	*Self Learning* Fundamental Manajemen Risiko Self-Learning, Fundamentals of Risk Management	29 April-31 Desember 2025 April 29-December 31, 2025	UPDL Makassar
21.	Officer Corporate Social Responsibility	*Self Learning* Fundamental Manajemen Risiko Self-Learning, Fundamentals of Risk Management	29 April-31 Desember 2025 April 29-December 31, 2025	UPDL Makassar

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Performance Evaluation

Penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan merupakan bagian dari sistem pengawasan dan evaluasi kinerja Perusahaan untuk memastikan pelaksanaan fungsi berjalan optimal, profesional, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Direksi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif berdasarkan indikator kinerja utama, dua kali dalam setahun. Sekretaris Perusahaan telah mencapai target sebesar 103,19% pada semester I 2025 dan 104,21 % pada semester II 2025.

Hasil evaluasi tidak hanya menjadi dasar penilaian tahunan, tetapi juga acuan pengembangan berkelanjutan melalui pelatihan, penyempurnaan prosedur kerja, dan peningkatan dukungan terhadap fungsi strategis Perusahaan. Dengan demikian, fungsi Sekretaris Perusahaan terus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan dinamika lingkungan usaha.

The performance evaluation of the Corporate Secretary is part of the Company's monitoring and evaluation system to ensure that the function is carried out optimally, professionally, and in accordance with the principles of good corporate governance. The evaluation is conducted twice a year, periodically, by the Board of Directors using a quantitative and qualitative approach based on key performance indicators. The Corporate Secretary achieved a target of 103,19% in the first semester of 2025 and 104,21% in the second semester of 2025.

The evaluation results not only serve as the basis for the annual assessment but also as a reference for continuous development through training, refinement of work procedures, and enhancement of support for the Company's strategic functions. Thus, the role of the Corporate Secretary continues to be tailored to the organization's needs and the dynamics of the business environment.

Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

Unit Audit Internal merupakan salah satu fungsi pendukung dalam sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan di PLN NP. Unit Audit Internal dibentuk dengan nomenklatur Satuan Internal Audit dan berfungsi sebagai organ independen yang melakukan audit (*assurance*) dan konsultasi, dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas operasional, manajemen risiko, dan praktik *corporate governance*. Satuan Internal Audit tidak hanya menilai kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis, penguatan kontrol, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas setiap unit kerja.

Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Internal Audit yang diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. KSPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, memastikan independensi dan objektivitas pelaksanaan audit internal berdasarkan Piagam Audit Intern dan program audit tahunan yang mencakup seluruh aspek operasional perusahaan, termasuk evaluasi risiko, pengendalian internal, kepatuhan hukum, dan efektivitas manajemen.

The Internal Audit Unit is one of the supporting functions in the internal control system and corporate governance at PLN NP. The Internal Audit Unit is established under the nomenclature of the Internal Audit Unit. It functions as an independent organ that conducts audits (assurance) and consultations, with the main goal of enhancing operational effectiveness, risk management, and corporate governance practices. The Internal Audit Unit not only assesses compliance with procedures and policies but also provides recommendations for business process improvements, control strengthening, and enhancing the efficiency and effectiveness of each work unit.

The Internal Audit Unit is led by the Head of the Internal Audit Unit appointed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The HIAU is directly responsible to the President Director, ensuring the independence and objectivity of the internal audit implementation based on the Internal Audit Charter and the annual audit program, which covers all operational aspects of the Company, including risk evaluation, internal control, legal compliance, and management effectiveness.

Profil Kepala Satuan Internal Audit
Profile of the Head of Internal Audit Unit

Wahyu Prasetyo, CIA, CISA, CFE

Warga Negara Indonesia, Usia 49 tahun, dan berdomisili di Jakarta Timur.
Indonesian citizen, 49 years old, and domiciled in East Jakarta.

Menjabat sebagai Kepala Satuan Internal Audit berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor K.3066/426/PNP/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Surat Dewan Komisaris Nomor 0078/SDM.00.02/PLNNP010001/2024-R tanggal 2 Juli 2024.

Served as Head of Internal Audit Unit based on Decision of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number K.3066/426/PNP/2024 dated July 30, 2024, and Letter of the Board of Commissioners Number 0078/SDM.00.02/PLNNP010001/2024-R dated July 2, 2024.

Pendidikan
S1 Teknik Industri – Universitas Mpu Tantular Tahun 2001.
Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya *Certified Internal Auditor* (CIA), *Certified Information Systems Auditor* (CISA) dan *Certified Fraud Examiners* (CFE).

Riwayat Pekerjaan
Beliau memiliki pengalaman panjang di bidang audit dan Internal Audit, antara lain menjabat sebagai Vice President Strategi Audit Satuan Internal Audit PT PLN (Persero) pada periode 2022–2024, Kepala Satuan Pengawas Internal PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (2020–2022), dan Kepala Satuan Pengawas Internal PT Cogindo Daya Bersama (2017–2020). Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Manager Audit Internal PT Perta Daya Gas (2014–2017) dan Ahli Audit Teknik PT PLN Indonesia Power (2008–2014).

Education
Bachelor's Degree in Industrial Engineering – Universitas Mpu Tantular, 2001.
In addition, has completed non-formal education programs and obtained certifications, including Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA) and Certified Fraud Examiners (CFE).

Professional Experience
He has years of experience in audit and internal audit, among others, serving as Vice President of Audit Strategy, Internal Audit Unit of PT PLN (Persero) (2022–2024), Head of Internal Audit Unit of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (2020–2022), Head of Internal Audit Unit of PT Cogindo Daya Bersama (2017–2020) Internal Audit Manage of PT Perta Daya Gas (2014–2017), and Technical Auditor of PT PLN Indonesia Power (2008–2014)

Struktur Organ dan Kedudukan Satuan Internal Audit
Organizational Structure and Position of the Internal Audit Unit

Satuan Internal Audit secara struktural berada di bawah Direktur Utama, namun memiliki akses komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk memastikan koordinasi dan pelaporan hasil audit berjalan efektif. Struktur organisasi Satuan Internal Audit ditetapkan melalui beberapa Peraturan Direksi, antara lain Nomor 0042.P/DIR/2025 sebagai perubahan Peraturan Direksi Nomor 0021.P/019/DIR/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, serta Peraturan Direksi Nomor 0055.P/DIR/2025 mengenai Kebijakan Operasional Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Satuan Internal Audit PT PLN Nusantara Power. Dengan pengaturan ini, Satuan Internal Audit dapat menjalankan tugas pengawasan internal secara mandiri dan optimal, mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

The Internal Audit Unit is structurally under the President Director. However, it has direct communication access with the Board of Commissioners through the Audit Committee to ensure effective coordination and reporting of audit results. The organizational structure of the Internal Audit Unit is established pursuant to several Board of Directors' Regulations, including Regulation Number 0042.P/DIR/2025 as an amendment to Board of Directors' Regulation Number 0021.P/019/DIR/2025 concerning the Organization and Work Procedures of PT PLN Nusantara Power, and Board of Directors' Regulation Number 0055.P/DIR/2025 regarding the Operational Policy on the Organizational Structure and Workforce Formation of the Internal Audit Unit of PT PLN Nusantara Power. With this arrangement, the Internal Audit Unit can carry out its internal supervision duties independently and optimally, supporting the Company's transparency and accountability.

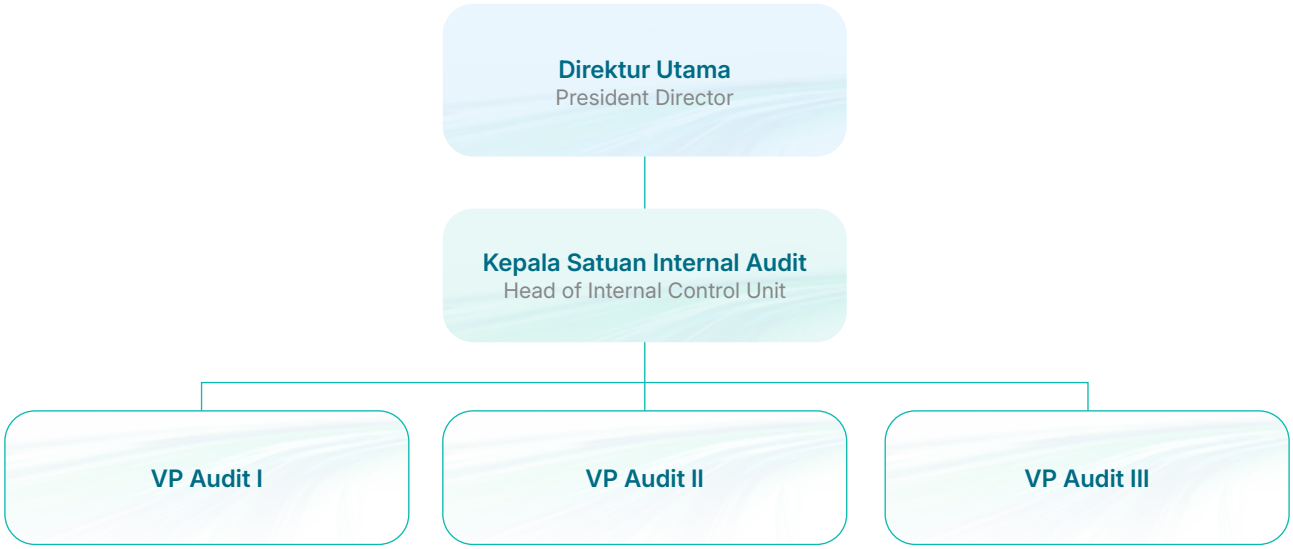

Kebijakan Tata Kelola Satuan Internal Audit
Governance Policy of the Internal Audit Unit

Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan efektivitas pengawasan internal, Perusahaan telah menetapkan kebijakan yang mengatur pelaksanaan fungsi Satuan Internal Audit. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam setiap proses pengawasan, sekaligus mengadopsi standar dan praktik terbaik internasional di bidang audit internal. Dengan landasan kebijakan yang jelas dan terstruktur, Satuan Internal Audit berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan secara berkelanjutan. Kebijakan tata kelola Satuan Internal Audit diantaranya:

1. *Global Internal Audit Standards* (GIAS) 2024 yang dirilis oleh Institute of Internal Auditor (IIA), merupakan panduan praktik audit internal profesional di seluruh dunia dan berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas fungsi audit internal;
2. Piagam Audit Intern, yang disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama terakhir pada 24 Desember 2024, merupakan dokumen formal yang mendefinisikan mandat fungsi audit internal dan persyaratan lainnya yang bertujuan untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan dan tanggung jawab Auditor Internal serta memberikan kewenangan yang diperlukan Auditor Internal untuk menjalankan tugasnya guna pencapaian tujuan PT PLN Nusantara Power;

As part of efforts to strengthen corporate governance and ensure the effectiveness of internal supervision, the Company has established a policy governing the implementation of the Internal Audit Unit function. This policy is designed to support transparency, accountability, and integrity in every supervisory process, while also adopting international standards and best practices in the field of internal auditing. With a clear and structured policy framework, the Internal Audit Unit plays a crucial role in supporting the sustainable achievement of the Company's strategic objectives. The Internal Audit Unit governance policies include:

1. Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024, released by the Institute of Internal Auditors (IIA), serves as a guide for professional internal audit practices worldwide and functions as a basis for evaluating and improving the quality of the internal audit function.
2. The Internal Audit Charter, last ratified by the President Director and the President Commissioner on December 24, 2024, is a formal document that defines the mandate of the internal audit function and other requirements aimed at serving as the basis for the implementation and responsibilities of the Internal Auditor, as well as providing the necessary authority for the Internal Auditor to perform their duties in achieving the objectives of PT PLN Nusantara Power;

3. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power No.0032.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Audit Internal (KSAI) PT PLN Nusantara Power, yang disahkan 03 November 2025, yang menjadi pedoman utama pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Internal Audit dalam menjalankan audit dan advisory terhadap pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

3. Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power No.0032.P/DIR/2025 concerning the Strategic Policy for Internal Audit (KSAI) of PT PLN Nusantara Power was ratified on November 3, 2025. It serves as the main guideline for the implementation of the duties and authority of the Internal Audit Unit in conducting audit and advisory functions on the implementation of internal control, risk management, and corporate governance.

Tugas dan Tanggung Jawab Serta Lingkup Pekerjaan Satuan Internal Audit

Duties, Responsibilities, and Scope of Work of the Internal Audit Unit

Satuan Internal Audit memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi audit dan konsultasi secara independen dan objektif untuk memastikan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta tata kelola perusahaan di seluruh lingkungan Perusahaan, termasuk Anak Perusahaan dan Afiliasinya, dengan persetujuan Direktur Utama sebagai Kuasa Pemegang Saham. Pelaksanaan audit dan evaluasi menggunakan pendekatan berbasis risiko, baik pada aspek strategis maupun operasional, dengan mempertimbangkan prioritas risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan. Satuan Internal Audit juga berkomitmen memberikan nilai tambah melalui rekomendasi perbaikan yang konstruktif dan berkelanjutan. Secara rinci, tugas dan ruang lingkup utama Satuan Internal Audit meliputi:

1. Menyusun dan menyempurnakan strategi Satuan Internal Audit sesuai visi dan misi Perusahaan;
2. Mengembangkan Piagam Audit Internal, Kebijakan Strategis Audit Internal, serta Rencana Jangka Panjang Satuan Internal Audit selaras dengan Perusahaan;
3. Menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
4. Melakukan evaluasi kualitas audit dan konsultansi secara internal maupun oleh pihak independen;
5. Menyusun laporan hasil audit untuk Manajemen dan pihak eksternal, mengelola anggaran serta pelaporan realisasi PKAT;
6. Mengembangkan organisasi Satuan Internal Audit, SDM, pendidikan, serta administrasi dan kesekretariatan;
7. Melakukan koordinasi dengan unit internal, lembaga pengawas, dan instansi terkait guna mendukung pencapaian target dan peningkatan kinerja;

The Internal Audit Unit plays an important role in performing audit and consulting functions independently and objectively to ensure the effectiveness of risk management, internal control systems, and corporate governance within the Company, including Subsidiaries and Affiliates, with the approval of the President Director as the Shareholder's Proxy. The implementation of audits and evaluations uses a risk-based approach, both in strategic and operational aspects, considering the priority of risks that may impact the achievement of the Company's objectives. The Internal Audit Unit is also committed to providing added value through constructive and sustainable improvement recommendations. In detail, the main tasks and scope of the Internal Audit Unit include:

1. Developing and refining the Internal Audit Unit strategy in alignment with the Company's vision and mission;
2. Developing the Internal Audit Charter, Strategic Internal Audit Policy, and the Internal Audit Unit's Long-Term Plan, in line with the Company's;
3. Developing the Annual Audit Work Program (PKAT);
4. Evaluating the quality of audits and consulting services conducted internally or by independent parties;
5. Preparing audit reports for Management and external parties, managing the budget, and reporting on PKAT realizations;
6. Developing the Internal Audit Unit organization, HR, education, as well as administration and secretarial duties;
7. Coordinating with internal units, audit agencies, and relevant institutions to support target achievement and performance improvement;

8. Memastikan sistem pengendalian internal berjalan efisien dan efektif;
9. Melaksanakan audit operasional dan audit khusus;
10. Memberikan konsultansi dan rekomendasi perbaikan kepada Manajemen;
11. Mengelola *Whistle Blowing System* (WBS) dengan menindaklanjuti semua pelaporan, termasuk anonim, guna menciptakan iklim kondusif dan mendorong pelaporan potensi kerugian finansial maupun non-finansial serta menjaga citra Perusahaan.

8. Ensuring the internal control system of the Company is efficient and effective;
9. Performing operational audits and special audits;
10. Providing consultation and improvement recommendations to Management;
11. Managing the Whistle Blowing System (WBS) by following up on all reports, including those made anonymously, to create a conducive environment, encourage reporting of potential financial or non-financial losses, and uphold the Company's reputation.

Formasi dan Kualifikasi Auditor Satuan Internal Audit
Formation and Qualifications of Internal Audit Unit Auditors

Pelaksanaan tugas Satuan Internal Audit telah didukung oleh auditor yang memiliki kompetensi profesional, pengetahuan relevan, serta keahlian teknis sesuai standar kualifikasi dan sertifikasi di bidang audit internal. Formasi Satuan Internal Audit PLN NP ditetapkan berdasarkan analisis beban kerja secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas fungsi Kepala Satuan Internal Audit, sekaligus mempertimbangkan kompleksitas proses bisnis dan kebutuhan strategis organisasi. Hingga akhir tahun 2025, jumlah pegawai Satuan Internal Audit tercatat sebanyak 42 orang, tidak termasuk Kepala Satuan Internal Audit, dengan komposisi personel sebagai berikut:

The implementation of Internal Audit Unit duties has been supported by auditors who possess professional competence, relevant knowledge, and technical expertise in accordance with qualification and certification standards in the field of internal audit. The formation of the PLN NP Internal Audit Unit is determined based on a comprehensive workload analysis to ensure the effectiveness of the internal supervision function, while also considering the complexity of business processes and the organization's strategic needs. Until the end of 2025, the number of employees in the Internal Audit Unit was 42 people, excluding Head of Internal Audit Unit, with the following personnel composition:

Formasi dan Kualifikasi Auditor Satuan Internal Audit
Formation and Qualifications of Internal Audit Unit Auditors

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	
Wahyu Prasetyo	Kepala Satuan Internal Audit Head of Internal Audit Unit	S1 Teknik Industri	Bechelor's degree in Industrial Engineering
Nurusobah	Vice President Audit I	S1 Hukum	S1 Law
Mochammad Agustian	Vice President Audit II	S1 Teknik Elektro S2 Bidang Manajemen S2 Bidang Kelistrikan	S1 Electrical Engineering S2 Management S2 Electrical Engineering
Hairul Aswad	Vice President Audit III	S1 Akutansi S2 Ekonomi Syariah	S1 Accounting S2 Islamic Economics
Agus Priyo Kusuma	Senior Specialist Audit Consulting - A	S1 Teknik Industri	Bechelor's degree in Industrial Engineering
Sugito	Senior Specialist Audit Consulting-A	S1 Teknik Mesin	S1 Mechanical Engineering
Nursiyanto	Senior Specialist Audit Consulting-A	S1 Informatika	S1 Informatics
Diah Listia Respati	Senior Specialist Audit Consulting-B	S1 Informatika	S1 Informatics

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	
Ruchiyadi Tarmadi	Senior Specialist Audit Consulting-B	S1 Teknik Elektro	S1 Electrical Engineering
Hadeyanti Sylviani	Senior Specialist Audit Consulting-B	S1 Akutansi S2 Manajemen	S1 Accounting S2 Management
Ahmad Fajar Ridlo	Specialist Audit I	S1 Teknik Elektro S2 Manajemen Teknologi	S1 Electrical Engineering S2 Technology Management
Ali Umar Sjafi'i	Specialist Audit I	S1 Informatika	S1 Informatics
Karinakandi Krisnawardani	Specialist Audit I	S1 Hukum S2 Kenotariatan	S1 Law S2 Notary
Rona Noviartha Nauli Siregar	Specialist Audit I	S1 Akutansi	S1 Accounting
Lisna Mery Teodora	Senior Officer Audit I	S1 Manajemen S2 Manajemen	S1 Management S2 Management
Andon Wicaksono	Senior Officer Audit I	S1 Manajemen	S1 Management
Achmad Farizal Imanudin	Senior Officer Audit I	S1 Teknik Industri	S1 Industrial Engineering
Lahmsa Alkautsa Harysa	Officer Audit I	S1 Manajemen	S1 Management
Fadianto Mirza	Officer Audit I	S1 Teknik Elektro	S1 Electrical Engineering
Riyo Hussain Muhammad	Officer Audit I	S1 Teknik Fisika	S1 Physics Engineering
Listyani Nirmalasari	Officer Audit I	S1 Informatika	S1 Informatics
Suherman	Senior Officer Audit II	S1 Teknik Elektro	S1 Electrical Engineering
Dyah Maya Safithri	Specialist Audit II	S1 Akutansi	S1 Accounting
Rachmad Lutfi	Specialist Audit II	S1 Teknik Mesin	S1 Mechanical Engineering
Adi Kusno	Specialist Audit II	S1 Ekonomi	S1 Economics
Arsintya Winda Meitasari	Senior Officer Audit II	S1 Manajemen	S1 Management
Ika Ramadhina	Senior Officer Audit II	S1 Manajemen	S1 Management
Tri Wuryani	Senior Officer Audit II	S1 Hukum S2 Manajemen	S1 Law S2 Management
Bima Surya Sofhananda	Officer Audit II	S1 Teknik Industri	S1 Industrial Engineering
Rachmatika Anjani Kuncahyo	Officer Audit II	S1 Manajemen	S1 Management
Elvira Saris Virmania	Officer Audit II	S1 Akutansi	S1 Accounting
Sumantri	Specialist Audit III	S1 Teknik Elektro	S1 Electrical Engineering
Alfret Parulian Sinambela	Specialist Audit III	S1 Akutansi	S1 Accounting
Rachmatsyah	Specialist Audit III	S1 Informatika S2 Bidang Kelistrikan	S1 Informatics S2 Electrical Engineering
Elly Rahmad	Specialist Audit III	S1 Teknik Elektro S2 Manajemen	S1 Electrical Engineering S2 Management
Muhammad Nur Said	Senior Officer Audit III	S1 Teknik Elektro	S1 Electrical Engineering

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	
Ratna Budiyanti Nursita Dewi	Senior Officer Audit III	S1 Teknik Industri	S1 Industrial Engineering
Ratna Puspitasari	Senior Officer Audit III	S1 Hukum	S1 Law
Malinda Dinna Auliya	Officer Audit III	S1 Teknik Elektro	S1 Electrical Engineering
Fitratus Shiddiq Swastika Putra	Officer Audit III	S1 Hukum	S1 Law
Dendi Mahawarman	Officer Audit III	S1 Elektronika	S1 Electronics
Muhammad Zemmy Isnugroho	Senior Officer Methodology And QA-B	S1 Teknik Mesin S2 Manajemen	S1 Mechanical Engineering S2 Management
Okky Gati Hambali	Officer Methodology & QA - B	S1 Teknik Elektro	S1 Electrical Engineering
Arizky Aryantio	Officer Methodology & QA - B	S1 Teknik Industri	S1 Industrial Engineering
Dika Adi Khrisna	Senior Officer Counterpart	S1 Teknik Elektro	S1 Electrical Engineering
Anindita Pradana	Senior Officer Counterpart-B	S1 Ilmu Ekonomi S2 Manajemen	S1 Economics S2 Management

Sertifikasi Auditor Satuan Internal Audit
Internal Audit Unit Auditor Certification

Sertifikasi Profesi Professional Certification	Jumlah Auditor Number of Auditors
Qualified Internal Auditor (QIA) Manajerial Qualified Internal Auditor (QIA) Managerial	30
Qualified Internal Auditor (QIA) Lanjutan Qualified Internal Auditor (QIA) Advanced	10
Qualified Internal Auditor (QIA) Dasar Qualified Internal Auditor (QIA) Basic	2
Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	15
Qualified Risk Management Officer (QRMO)	18
Enterprise Risk Management Associate/Certified Professional	3
Certified Fraud Examiners (CFE)	1
Certified Internal Auditor (CIA)	1
Certified Information System Auditor (CISA)	1

Pelaksanaan Kegiatan Satuan Internal Audit
Implementation of Internal Audit Unit Activities

Berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Internal Audit 2025, Satuan Internal Audit menyusun kegiatan utama yang bertujuan memastikan efektivitas pengendalian internal, kepatuhan, dan pengelolaan risiko di seluruh lingkungan Perusahaan. Setiap kegiatan dirancang dengan pendekatan berbasis risiko (RBIA) dan mengacu pada sasaran strategis Perusahaan, sehingga mendukung pencapaian tujuan, memperkuat tata kelola, serta memberikan nilai tambah operasional dan strategis. Kegiatan utama Program Kerja Audit Tahunan Satuan Internal Audit 2025 meliputi antara lain:

1. Penugasan audit operasional;
2. Penugasan audit tematik;
3. Penugasan audit sistem manajemen;
4. Penugasan audit ICOFR;
5. Penugasan audit khusus;
6. Penugasan audit investigasi;
7. Layanan advisory;
8. Penguatan kompetensi & *networking Stakeholders*;
9. Penguatan Tata Kelola Satuan Internal Audit;
10. Counterpart auditor eksternal; dan
11. Koordinasi dengan Komite Audit

Satuan Internal Audit secara rutin mengadakan rapat koordinasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit untuk membahas pelaksanaan fungsi Internal Audit, menyampaikan hasil audit, serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan. Rapat ini bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian internal, sekaligus mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional di Perusahaan. Satuan Internal Audit menghadiri rapat yang diselenggarakan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

Based on the 2025 Annual Audit Work Program (PKAT) of the Internal Audit Unit, they have outlined key activities aimed at ensuring the effectiveness of internal controls, compliance, and risk management throughout the Company's environment. Each activity is designed with a risk-based approach (RBIA) and refers to the Company's strategic objectives, thereby supporting the achievement of goals, strengthening governance, and providing operational and strategic added value. The main activities of Annual Audit Work Program Internal Audit Unit 2025 include, among others:

1. Operational audit assignment;
2. Thematic audit assignment;
3. Management system audit assignment;
4. ICOFR audit assignment;
5. Specific audit assignment;
6. Investigation audit assignment;
7. Advisory services;
8. Strengthening Stakeholders competence & networking;
9. Strengthening the Internal Audit Unit governance;
10. External auditor counterpart; and
11. Coordination with the Audit Committee.

The Internal Audit Unit regularly holds coordination meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee to discuss the implementation of internal oversight functions, present audit results, and follow up on improvement recommendations. It aims to ensure transparency, accountability, and effectiveness of internal control, while also supporting strategic and operational decision-making within the Company. The Internal Audit Unit attended meetings organized by the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Board of Commissioners Committees throughout 2025 as follows:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Satuan Internal Audit dalam Rapat
Frequency and Level of Internal Audit Unit Attendance at Meetings

Rapat Meetings	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Tingkat kehadiran Attendance rate
Rapat Direksi Board of Directors Meeting	43	43	100%
Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	11	11	100%
Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting	11	11	100%

Pelaksanaan Audit Internal
Internal Audit Implementation

Pelaksanaan audit internal mencakup berbagai jenis audit, antara lain audit operasional, audit sistem manajemen, audit khusus, dan audit proses bisnis. Pada tahun 2025, Satuan Internal Audit melaksanakan audit terhadap sejumlah objek yang telah ditetapkan, meliputi:

The implementation of internal audits includes various types of audit, among others, operational audits, management system audits, special audits, and business process audits. In 2025, audits were carried out on the following audit objects:

Pelaksanaan Audit Operasional
Implementation of Operational Audit

No.	Obyek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
Triwulan I Quarter I		
1	Unit Pembangkitan Paiton Paiton Generation Unit	15 Januari – 22 Februari 2025 January 15-February 22, 2025
2	Unit Pembangkitan Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar Generation Unit	20 Januari – 26 Februari 2025 January 20-February 26, 2025
3	Unit Pembangkitan Pacitan Pacitan Generation Unit	22 Januari – 28 Februari 2025 January 22-February 28, 2025
4	Unit Pembangkitan Rembang Rembang Generation Unit	22 Januari – 28 Februari 2025 January 22-February 28, 2025
Triwulan II Quarter II		
5.	Unit Pembangkitan Brantas Brantas Generation Unit	21 April – 5 Juni 2025 April 21-June 5, 2025
6.	Unit Pembangkitan Cirata Cirata Generation Unit	21 April – 5 Juni 2025 April 21-June 5, 2025
7.	Unit Pembangkitan Gresik Gresik Generation Unit	28 April – 13 Juni 2025 April 28-June 13, 2025
8.	Unit Pembangkitan Muara Karang Muara Karang Generation Unit	28 April – 13 Juni 2025 April 28-June 13, 2025
Triwulan III Quarter III		
9.	Unit Pembangkitan Arun Arun Generation Unit	16 Juni – 18 Juli 2025 June 16-July 18, 2025
10.	Unit Pembangkitan Pulang Pisau Pulang Pisau Generation Unit	23 Juni – 25 Juli 2025 June 23-July 25, 2025
11.	Unit Pembangkitan Punagaya Punagaya Generation Unit	23 Juni – 25 Juli 2025 June 23-July 25, 2025
12.	Unit Pembangkitan Kaltimra Kaltimra Generation Unit	23 Juni – 25 Juli 2025 June 23-July 25, 2025
13.	Unit Pembangkitan Sengkang Sengkang Generation Unit	30 Juni – 01 Agustus 2025 June 30-August 1, 2025
14.	Unit Pembangkitan Muara Tawar Muara Tawar Generation Unit	11 Agustus – 22 September 2025 August 11-September 22, 2025
15.	Unit Pembangkitan Kalselteng Kalselteng Generation Unit	14 Agustus – 19 September 2025 August 14-September 19, 2025
Triwulan IV Quarter IV		
16.	Unit Pembangkitan Belawan Belawan Generation Unit	22 September – 17 Oktober 2025 September 22-October 17, 2025

Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen
Implementation of Management System Audit

No.	Obyek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
Triwulan I Quarter I		
1.	Unit Pembangkitan Paiton Paiton Generation Unit	15 Januari – 22 Februari 2025 January 15-February 22, 2025
2.	Unit Pembangkitan Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar Generation Unit	20 Januari – 26 Februari 2025 January 20-February 26, 2025
3.	Unit Pembangkitan Pacitan Pacitan Generation Unit	22 Januari – 28 Februari 2025 January 22-February 28, 2025
4.	Unit Pembangkitan Rembang Rembang Generation Unit	22 Januari – 28 Februari 2025 January 22-February 28, 2025
Triwulan II Quarter II		
5.	Unit Pembangkitan Brantas Brantas Generation Unit	21 April – 5 Juni 2025 April 21-June 5, 2025
6.	Unit Pembangkitan Cirata Cirata Generation Unit	21 April – 5 Juni 2025 April 21-June 5, 2025
7.	Unit Pembangkitan Gresik Gresik Generation Unit	28 April – 13 Juni 2025 April 28-June 13, 2025
8.	Unit Pembangkitan Muara Karang Pacitan Generation Unit	28 April – 13 Juni 2025 April 28-June 13, 2025
Triwulan II Quarter II		
9.	Unit Pembangkitan Arun Arun Generation Unit	16 Juni – 18 Juli 2025 June 16-July 18, 2025
10.	Unit Pembangkitan Pulang Pisau Pulang Pisau Generation Unit	23 Juni – 25 Juli 2025 June 23-July 25, 2025
11.	Unit Pembangkitan Punagaya Punagaya Generation Unit	23 Juni – 25 Juli 2025 June 23-July 25, 2025
12.	Unit Pembangkitan Kaltimra Kaltimra Generation Unit	23 Juni – 25 Juli 2025 June 23-July 25, 2025
13.	Unit Pembangkitan Sengkang Sengkang Generation Unit	30 Juni – 01 Agustus 2025 June 30-August 1, 2025
14.	Unit Pembangkitan Tarahan Tarahan Generation Unit	30 Juni – 18 Juli 2025 June 30-July 18, 2025
15.	Unit Pembangkitan Pekanbaru Pekanbaru Generation Unit	30 Juni – 18 Juli 2025 June 30-July 18, 2025
16.	ISO 37001 SMAP Kantor Pusat ISO 37001 SMAP Kantor Pusat	14 Juli – 25 Juli 2025 July 14-July 25, 2025
17.	Unit Pembangkitan Indramayu Indramayu Generation Unit	21 Juli – 08 Agustus 2025 July 21-August 8, 2025
18.	Unit Pembangkitan Minahasa Minahasa Generation Unit	21 Juli – 08 Agustus 2025 July 21-August 8, 2025
19.	Unit Pembangkitan Muara Tawar Muara Tawar Generation Unit	11 Agustus – 22 September 2025 August 11-September 22, 2025
20.	ISO 22301 BCMS Kantor Pusat ISO 22301 BCMS of Head Office	11 Agustus – 29 Agustus 2025 August 11-August 29, 2025
21.	ISO 22301 BCMS Kaltim Teluk ISO 22301 BCMS of Kaltim Teluk	11 Agustus – 29 Agustus 2025 August 11-August 29, 2025
22.	ISO 22301 BCMS Tenayan ISO 22301 BCMS of Tenayan	11 Agustus – 29 Agustus 2025 August 11-August 29, 2025
23.	Unit Pembangkitan Kalselteng Kalselteng Generation Unit	14 Agustus – 19 September 2025 August 14-September 19, 2025
24.	ISO 20000-1 ITSM & 27001 SMKI Kantor Pusat ISO 20000-1 ITSM & 27001 SMKI of Head Office	25 Agustus – 28 Agustus 2025 August 25-August 28, 2025

No.	Obyek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
Triwulan II Quarter II		
25.	Unit Pembangkitan Belawan Belawan Generation Unit	22 September – 17 Oktober 2025 September 22-October 17, 2025

Pelaksanaan Audit Tematik
Implementation of Thematic Audit

No.	Obyek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
Triwulan III Quarter III		
1.	Evaluasi Efektifitas Manajemen Risiko Evaluation of Risk Management Effectiveness	11 Agustus – 4 September 2025 August 11-September 4, 2025
2.	Jasa O&M PLN NPS O&M Services of PLN NPS	11 Agustus – 19 September 2025 August 11-September 19, 2025

Pelaksanaan Audit Investigasi
Implementation of Investigation Audit

No.	Obyek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
Triwulan II Quarter II		
1.	Unit Pembangkitan Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar Generation Unit	21 April – 30 Mei 2025 April 21 - May 30, 2025
Triwulan III Quarter III		
2.	Unit Pembangkitan Pulang Pisau Pulang Pisau Generation Unit	18 Agustus – 12 September 2025 August 18-September 12, 2025

Pelaksanaan ICOFR
Implementation of ICOFR

No.	Obyek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
Triwulan I Quarter I		
1.	ICOFR End Year Tahun 2024 Year-End ICOFR of 2024	17 Februari – 11 Maret 2025 Febraury 17-March 11, 2025
Triwulan III Quarter III		
2.	ICOFR Mid Year Tahun 2025 Mid Year ICOFR of 2025	22 September – 10 Oktober 2025 September 22-October 10, 2025

Pelaksanaan ATTB
Implementation of ATTB

No.	Obyek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
Triwulan I Quarter I		
1.	Unit Pembangkitan Muara Karang Muara Karang Generation Unit	18 Maret 2025 March 18, 2025
2.	Unit Pembangkitan Paiton Paiton Generation Unit	19 Maret 2025 March 19, 2025
Triwulan II Quarter II		
3.	Unit Pembangkitan Pandan Pandan Generation Unit	22 Juli – 24 Juli 2025 July 22-July 24, 2025
4.	Unit Pembangkitan Bandar Lampung Bandar Lampung Generation Unit	7 Agustus – 8 Agustus 2025 August 7-August 8, 2025
Triwulan IV Quarter IV		
5.	Unit Pembangkitan Bukit Asam Bukit Asam Generation Unit	30 Oktober – 31 Oktober 2025 October 30-October 31, 2025
6.	Unit Pembangkitan Muara Karang Muara Karang Generation Unit	2 Desember 2025 December 2, 2025
7.	Unit Pembangkitan Cirata Cirata Generation Unit	3 Desember – 4 Desember 2025 December 3-December 4, 2025
8.	Unit Pembangkitan Paiton Paiton Generation Unit	4 Desember 2025 December 4, 2025
9.	Unit Pembangkitan Gresik Gresik Generation Unit	5 Desember 2025 December 5, 2025
10.	Unit Pembangkitan Rembang Rembang Generation Unit	2 Desember 2025 December 2, 2025
11.	Unit *Maintenance Repair Overhaul* Barat West Unit Maintenance Repair Overhaul	2 Desember 2025 December 2, 2025
12.	Unit *Maintenance Repair Overhaul* Timur East Unit Maintenance Repair Overhaul	5 Desember 2025 December 5, 2025

Pelaksanaan Layanan *Advisory*
Implementation of Consultation Services

Satuan Internal Audit juga melakukan layanan *advisory* yaitu kegiatan pemberian saran, pendapat, nasihat, atau jasa lain yang dibutuhkan dan disepakati dengan penerima layanan yang bertujuan memberi nilai tambah terhadap aspek pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Layanan *advisory* diberikan oleh Auditor Internal dengan senantiasa mempertahankan independensi dan objektivitas tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari manajemen. Layanan *advisory* yang dilakukan Satuan Internal Audit sampai dengan akhir tahun 2025 adalah:

The Internal Audit Unit also provides advisory services, which involve providing advice, opinions, recommendations, or other services needed and agreed upon with the service recipients, aimed at adding value to aspects of control, risk management, and corporate governance in accordance with laws and company policies. Advisory services are provided by Internal Auditors while maintaining independence and objectivity without any transfer of management's responsibility. The advisory services provided by Internal Audit Unit until the end of 2025 are:

Penugasan *Advisory*
Advisory Assignments

No.	Klien / Unit Kerja Client/Work Unit	Tanggal Pelaksanaan Date
1.	Kantor Pusat (BID FIN dan BIDACT) - Fact Finding Penyerapan Anggaran Investasi Head Office (BID FIN and BIDACT) - Fact Finding for Investment Budget Absoption	3 Februari – 7 Maret 2025 February 3-March 7, 2025
2.	Kantor Pusat (DITMHC) - Evaluasi Implementasi HXMS di PT PLN NP Head Office (DITMHC) Evaluation of the HXMS Implementation at PT PLN NP	28 April - 26 Juni 2025 April 28-June 26, 2025
3.	Kantor Pusat (BID BDD, BID BDG dan SPRO) Pengembangan Usaha dan Proyek Pembangkitan Head Office (BID BDD, BID BDG dan SPRO) Development of Generation Business and Project	27 Oktober 2025 – 15 Januari 2026 October 27, 2025 – January 15, 2026

Counterparting Auditor Eksternal
External Auditor Counterparting

Peran Satuan Internal Audit dalam mendukung efektivitas pengendalian internal juga mencakup pelaksanaan fungsi Counterparting terhadap auditor eksternal, dimana sepanjang tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

Internal Audit Unit's role in supporting the effectiveness of internal controls also includes performing a counterparting function with external auditors. Throughout 2025, several activities have been carried out, as follows:

Counterparting Auditor Eksternal
Counterparting External Auditor

No.	Auditor Eksternal External Auditor	Kegiatan Activities	
1	Badan Pemeriksa Keuangan Audit Board	1. Berdasarkan Surat Tugas BPK RI No.2/ST/I/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 untuk melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999,07) – Subsidi Listrik dan Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999,08) – Kompensasi Listrik Tahun 2024 PT PLN (Persero), subholding, anak perusahaan, serta instansi terkait lainnya. 2. Berdasarkan Surat Tugas BPK RI No.72/T/ST/ANGGOTA-VII/PBN.01/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja atas penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero) *Sub Holding* dan AP serta evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan PT PLN (Persero).	1. Based on the Audit Board Assignment Letter No.2/ST/I/01/2025 dated January 10, 2025, to conduct an audit of the Financial Statements of the Subsidy Expenditure Budget Section (BA 999.07) – Electricity Subsidy and Other Expenditure Budget Section (BA 999.08) – Electricity Compensation for 2024 of PT PLN (Persero), subholding, subsidiaries, and other related agencies. 2. Based on the Audit Board Assignment Letter No.72/T/ST/ANGGOTA-VII/PBN.01/08/2025 dated August 14, 2025, to conduct a performance audit on the electricity supply by PT PLN (Persero) Sub Holding and Subsidiaries, as well as an evaluation of the implementation of the Financial Statement audit of PT PLN (Persero).

No.	Auditor Eksternal External Auditor	Kegiatan Activities	
2	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC Indonesia	Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.56551/KEU.02.04/F01070400/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Audit Laporan Keuangan Tahun 2024. Pada tanggal 19 September 2025 telah dilakukan *kickoff meeting* audit laporan keuangan PT PLN (Persero) Tahun Buku 2025.	Based on the Work Commencement Order (SPMK) No.56551/KEU.02.04/F01070400/2024 dated October 1, 2024, regarding the Work Commencement Order (SPMK) for the 2024 Financial Statement Audit. On September 19, 2025, a kick-off meeting for the audit of PT PLN (Persero) Financial Statements for the 2025 Financial Year was held.
3	Bea Cukai Customs	Berdasarkan Surat Tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I Nomor ST-1729/WBC.11/2025 tanggal 12 September 2025 untuk melakukan audit kepabeanan dan/atau cukai serta melakukan penindakan seperlunya terhadap PT PLN Nusantara Power.	Based on the Assignment Letter from the East Java I Directorate General of Customs and Excise Number ST-1729/WBC.11/2025 dated September 12, 2025, to conduct a customs and/or excise audit and take necessary actions against PT PLN Nusantara Power.
4	Satuan Internal Audit PT PLN (PERSERO) IAU of PT PLN (PERSERO)	1. Berdasarkan Surat Tugas Satuan Internal Audit PT PLN (Persero) No.0344.STG/SPI.01.04/F01000200/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal melakukan Evaluasi *Blakout* Sistem Sulutgo pada PT PLN (Persero) termasuk Sub Holding dan Anak Perusahaan dari tanggal 16 Desember 2024 s.d 31 Januari 2025. KEBT/SPI.01.04/F01000203/2024 tanggal 13 Maret 2024. 2. Berdasarkan Surat Tugas KSPI PLN No.0117.STG/ SPI.01.02/F01000200/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Audit Operasional End to End Security of Supply Pasokan Batubara pada Direktorat/Divisi/Unit/Subholding/Anak Perusahaan/Anak Perusahaan dari Anak Perusahaan serta turunan selanjutnya yang pelaporan keuangannya terkonsolidasi pada PT PLN (Persero) dari tanggal 21 April s.d 19 Juni 2025. 3. Berdasarkan Surat Tugas KSPI PLN No.0118.STG/ SPI.01.02/F01000200/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Audit Operasional End to End Availability Pembangkit pada Direktorat/Divisi/Unit/Subholding/Anak Perusahaan/Anak Perusahaan dari Anak Perusahaan serta turunan selanjutnya yang pelaporan keuangannya terkonsolidasi pada PT PLN (Persero) dari tanggal 21 April s.d 19 Juni 2025. 4. Berdasarkan Surat Tugas KSPI PLN No.0126.STG/ SPI.01.02/F01000200/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Audit Operasional *End to End Anti Black Out* dari tanggal 21 April s.d 19 Juni 2025. 5. Berdasarkan Surat Tugas Satuan Internal Audit PT PLN (Persero) No.0144.STG/AUDIT HC/SPI.01.04/F01000200/2025.rev tanggal 29 April 2025 perihal melakukan Audit Ad Hoc Human Capital Implementasi HXMS pada PLN Group dari tanggal 28 April s.d 26 Juni 2025 dan dilakukan perpanjangan waktu hingga 24 Juli 2025 sesuai Surat Tugas Satuan Internal Audit PT PLN (Persero) No.0144.STG/AUDIT HC/SPI.01.04/F01000200/2025.rev.1 tanggal 25 Juni 2025.	1. Based on the PT PLN (Persero) IAU Assignment Letter No.0344.STG/SPI.01.04/F01000200/2024 dated December 13, 2024, regarding the Evaluation of the Sulutgo System Blackout at PT PLN (Persero), including its Sub-Holdings and Subsidiaries, from December 16, 2024, to January 31, 2025. KEBT/SPI.01.04/F01000203/2024 dated March 13, 2024. 2. Based on the PLN KSPI Assignment Letter No.0117.STG/ SPI.01.02/F01000200/2025 dated April 10, 2025, regarding the End-to-End Operational Audit of the Coal Supply Chain at the Directorates/Divisions/Units/Subholdings/Subsidiaries/Subsidiaries of Subsidiaries, as well as any further subsidiaries whose financial statements are consolidated by PT PLN (Persero), from April 21 to June 19, 2025. 3. Based on the PLN KSPI Assignment Letter No.0118.STG/ SPI.01.02/F01000200/2025 dated April 10, 2025, regarding the End-to-End Operational Availability Audit of Power Plant at the Directorates/Divisions/Units/Subholdings/Subsidiaries/Subsidiaries of Subsidiaries, as well as any further subsidiaries whose financial statements are consolidated by PT PLN (Persero), from April 21 to June 19, 2025. 4. Based on the PLN KSPI Assignment Letter No.0126.STG/ SPI.01.02/F01000200/2025 dated April 15, 2025, regarding the End-to-End Operational Audit to Anti Black Out from April 21 to June 19, 2025. 5. Based on the PT PLN (Persero) IAU Assignment Letter No.0144.STG/AUDIT HC/SPI.01.04/F01000200/2025.rev dated April 29, 2025, regarding the Ad Hoc Human Capital Audit on the Implementation of HXMS at the PLN Group from April 28 to June 26, 2025, with an extension until July 24, 2025, in accordance with the IAU of PT PLN (Persero) Assignment Letter No. 0144.STG/AUDIT HC/SPI.01.04/F01000200/2025.rev.1 dated June 25, 2025.

No.	Auditor Eksternal External Auditor	Kegiatan Activities	
		6. Berdasarkan Surat Tugas KSPI PLN No.0149.STG/POAUDITENDTOEND/SPI.01.02/F01000200/2025 tanggal 30 April 2025 perihal Audit Operasional End to End Implementasi ESG di PT PLN (Persero) Group.	6. Based on the PLN KSPI Assignment Letter No.0149.STG/POAUDITENDTOEND/SPI.01.02/F01000200/2025 dated April 30, 2025, regarding the End-to-End Operational Audit of ESG Implementation at the PT PLN (Persero) Group.
		7. Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0094.K/DIR/2025 tentang Pembentukan Tim Penilai *Risk Maturity Index* (RMI) di Lingkungan PLN Group.	7. Based on the PT PLN (Persero) Board of Directors' Decision No. 0094.K/DIR/2025 Regarding the Establishment of the Risk Maturity Index (RMI) Assessment Team within the PLN Group.
		8. Berdasarkan Surat Tugas KSPI PLN No. 011.STG/PO AUDIT END TO END/SPI.01.02/F01000205/2025.Rev tanggal 28 Agustus 2025 perihal Audit Operasional *End to End* TJSL CID dan Non-CID PLN *Holding* dan SH/AP.	8. Based on the PLN KSPI Assignment Letter No. 011.STG/PO AUDIT END TO END/SPI.01.02/F01000205/2025.Rev dated August 28, 2025, regarding the End-to-End Operational Audit of CSR for CID and Non-CID Units of PLN Holding and SH/AP.
		9. Berdasarkan Surat Tugas KSPI PLN No.0472.Stg/PO AUDIT END TO END/SPI.01.02/F01000200/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Audit Operasional *End To End Supply* Pasokan Gas.	9. Based on the PLN KSPI Assignment Letter No.0472.Stg/PO AUDIT END TO END/SPI.01.02/F01000200/2025 dated October 14, 2025, regarding the End-to-End Operational Audit of the Gas Supply Chain.
		10. Berdasarkan Surat Tugas KSPI PLN No.0476.STG/PO AUDIT END TO END/SPI.01.02/F01000200/2025 tanggal 16 Oktober 2025 dan Surat Tugas perpanjangan waktu audit No.0476.STG/PO AUDIT END TO END/SPI.01.02/F01000200/2025.rev perihal Audit Operasional End To End Korporasi SH/AP.	10. Based on the PLN KSPI Assignment Letter No.0476.STG/PO AUDIT END TO END/SPI.01.02/F01000200/2025 dated October 16, 2025, and Audit Extension Assignment Letter No. 0476.STG/PO AUDIT END TO END/SPI.01.02/F01000200/2025.rev regarding the End-to-End Operational Audit of SH/AP Corporation.
		11. Berdasarkan Surat Tugas KSPI PLN No.017.STG/PO AUDIT END TO END/SPI.01.02/F01000205/2025.Rev tanggal 04 Desember 2025 perihal Audit Operasional End To End Keamanan Data Perusahaan.	11. Based on the PLN KSPI Assignment Letter No.017.STG/PO AUDIT END TO END/SPI.01.02/ F01000205/2025.Rev dated December 4, 2025, regarding the End-to-End Operational Audit of Corporate Data Security.
		12. Berdasarkan Surat Tugas KSPI PLN No.0467.STG/SPI.01.04/F01000200/2025 perihal Audit Audit AdHoc Evaluasi Gangguan Meluas Sub sistem Aceh.	12. Based on the PLN KSPI Assignment Letter No.0467.STG/SPI.01.04/F01000200/2025 regarding Ad Hoc Audit to Evaluate Widespread Disruptions in the Aceh Subsystem.

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit
Monitoring of Audit Follow-Up

Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit merupakan bagian dari kegiatan Satuan Internal Audit yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan rekomendasi audit telah ditindaklanjuti dengan baik. Hasil pemantauan tersebut disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komite Audit. Rekapitulasi pemantauan tindak lanjut hasil audit tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Monitoring the follow-up on audit results is part of the Internal Audit Unit continuous activities to ensure that audit recommendations have been properly followed up on. The results of this monitoring are periodically reported to the Board of Directors and the Audit Committee. The recap of the follow-up monitoring on audit results in 2025 is as follows:

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Audit Unit
Recapitulation of Internal Audit Unit Audit Results Follow-up

Tahun Year	Temuan Findings	*Closed*	*In Progress*	Prosentase Penyelesaian Percentage of Completion
2023	237	237	0	100%
2024	124	124	0	100%
2025	156	115	41	74%

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal
Recapitulation of External Audit Results Follow-up

Auditor Eksternal External Auditor	Temuan Findings	*Closed*	*In Progress*	Prosentase Penyelesaian Percentage of Completion
BPK RI Audit Board of the Republic of Indonesia	0	-	-	-
KAP (Tindak Lanjut Audit 2024) KAP (2024 Audit Follow-up)	2	2	0	100%
Satuan Internal Audit PLN (Tindak Lanjut Audit 2024) IAU of PLN (2024 Audit Follow-up)	40	38	2	95%
Satuan Internal Audit PLN (Tindak Lanjut Audit 2025) IAU of PLN (2025 Audit Follow-up)	24	12	12	50%

Program Pengembangan Auditor Satuan Internal Audit
Auditor Development Program of the Internal Audit Unit

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif, Satuan Internal Audit terus meningkatkan kompetensi auditor melalui berbagai program pengembangan. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang untuk memperoleh sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) maupun sertifikasi kompetensi lainnya, serta partisipasi dalam seminar dan lokakarya di bidang audit internal. Sepanjang tahun 2025, program pengembangan auditor Satuan Internal Audit antara lain meliputi:

In order to support the effective implementation of supervisory duties, Internal Audit Unit continues to enhance auditor competence through various development programs. These efforts are carried out, among others, through tiered education and training to obtain the Qualified Internal Auditor (QIA) certification or other competency certifications, as well as participation in internal audit seminars and workshops. Throughout 2025, the Internal Audit Unit auditor development program includes:

Program Pengembangan Auditor Satuan Pengawasan Internal
Competency Development Program for Head of Internal Audit Unit

No.	Pelatihan Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Durasi (hari) Duration (days)	Penyelenggara Organizer
1.	Agile Audit	45	8	YPIA
2.	Internal Control COSO - 2013	13	16	YPIA
3.	QIA Tingkat Dasar Basic-Level QIA	6	72	YPIA
4.	Konferensi Auditor Internal & Forum Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (FKSPI) Internal Auditor Conference & Internal Audit Unit Forum (FKSPI)	1	16	YPIA
5.	Konferensi Nasional IIA Indonesia IIA Indonesia National Conference	1	16	IIA Indonesia
6.	*Certified Energy Risk Associated* (CERA)	6	24	PT SMART RISK
7.	QIA Tingkat Dasar Basic-Level QIA	2	48	YPIA
8.	QIA Tingkat Lanjutan Advanced-Level QIA	8	48	YPIA
9.	QIA Tingkat Manajerial Managerial-Level QIA	2	64	YPIA
10.	*Awareness* ISO 50001	1	16	PT Sucofindo

Quality Assurance Review Audit Internal
Internal Audit Quality Assurance Review

Sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kualitas fungsi audit internal, *Quality Assurance Review* (QAR) dilaksanakan secara berkala setiap tahun, baik melalui penilaian oleh pihak eksternal independen maupun melalui self assessment. Evaluasi ini bertujuan menilai efektivitas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara menyeluruh dengan mengacu pada *International Professional Practices Framework* (IPPF) Standar 1300.

Pelaksanaan QAR oleh pihak eksternal independen terakhir dilakukan pada tahun 2023 dengan menunjuk PT BAI berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 485. SPK/061/BGAF/2023 tanggal 12 Oktober 2023. Hasil asesmen menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian Satuan Internal Audit PLN Nusantara Power terhadap Standar dan Kode Etik Audit Internal berada pada kategori **Sebagian Sesuai (*Partially Conforms*).**

Selanjutnya, pada tahun 2024 dan 2025 dilakukan *self assessment* QAR oleh SPI PT PLN (Persero). Hasil penilaian ini menjadi dasar tindak lanjut peningkatan kualitas fungsi audit internal, sekaligus melengkapi proses perbaikan atas temuan QAR eksternal sebelumnya. Adapun hasil *Self Assessment* QAR tahun 2025 adalah sebagai berikut:

As part of efforts to preserve and enhance the quality of internal audit functions, the Quality Assurance Review (QAR) is conducted periodically every year, both through assessments by independent external parties and through self-assessment. This evaluation aims to assess the effectiveness of the quality assurance program and the overall improvement of the internal audit function by referring to the International Professional Practices Framework (IPPF) Standard 1300.

The last implementation of the QAR by an independent external party was in 2023, by appointing PT BAI based on Work Order Number 485.SPK/061/BGAF/2023 dated October 12, 2023. The assessment results indicate that the level of compliance of the Internal Audit of PLN Nusantara Power with the Internal Audit Standards and Code of Conduct falls into the **Partially Conforms** category.

Next, in 2024 and 2025, a self-assessment QAR was conducted by the IAU of PT PLN (Persero). The results of this assessment serve as the basis for follow-up actions to improve the quality of the internal audit function, while also completing the improvement process for previous external QAR findings. The results of the 2025 Self-Assessment QAR are as follows:

Hasil *Self Assessment* QAR Tahun 2025
QAR Self Assessment Results 2025

No.	Jenis *Assessment* Type of Assessment	Hasil *Assessment* Assessment Results
1	*Assesment* kesesuaian terhadap Global Internal Audit Standards (GIAS) Compliance Assessment Against the Global Internal Audit Standards (GIAS)	Secara umum telah tercapai (*Generally Achieves*) Generally Achieved
2	Assessment Maturitas berdasarkan Institute Internal Audit (IIA) Model Maturity Assessment Based on the Institute of Internal Auditors (IIA) Model	3,56 (*Defined*) dari 5,00 (Optimized) 3,56 (Defined) out of 5,00 (Optimized)
3	Survei kepuasan *Board of Director* Board of Directors Satisfaction Survey	3,79 dari skala 4,00 3.79 out of 4.00
4	Survei kepuasan *Board of Commissioners* Board of Commissioners Satisfaction Survey	3,53 dari skala 4,00 3.53 out of 4.00

Evaluasi Kinerja Satuan Internal Audit
Evaluation of Internal Audit Unit Performance

Direksi secara berkala mengevaluasi pelaksanaan fungsi Internal Audit melalui forum rapat yang melibatkan Satuan Internal Audit. Evaluasi ini juga mempertimbangkan hasil *Quality Assurance Review* (QAR), baik internal maupun eksternal, untuk menilai efektivitas pelaksanaan audit intern. Selain itu, kinerja Satuan Internal Audit dipantau melalui indikator kinerja utama (KPI) yang dievaluasi dua kali dalam setahun. Pada tahun 2025, Satuan Internal Audit mencatat pencapaian kinerja sebesar 102,47% dari target KPI yang ditetapkan, mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung fungsi pengendalian internal Perusahaan.

The Board of Directors periodically evaluates the implementation of the internal oversight function through meetings involving the Internal Audit Unit. This evaluation also considers the results of the Quality Assurance Review (QAR), both internal and external, to assess the effectiveness of the internal audit implementation. Moreover, the performance of the Internal Audit Unit is monitored through key performance indicators (KPIs) evaluated twice a year. In 2025, the Internal Audit Unit recorded a performance achievement of 102.47% of the set KPI target, reflecting excellent performance in supporting the Company's internal control function.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal untuk mendukung pencapaian visi, misi Perusahaan secara berkesinambungan serta mewujudkan bisnis Perusahaan yang sistematis, efektif dan efisien. Organisasi fungsi dan kewenangan Sistem Pengendalian Internal, meliputi: (1) Dewan Komisaris, (2) Direksi, (3) Komite Audit sebagai organ pengelola risiko di bawah Dewan Komisaris (4) Direktur Pembina Sistem Pengendalian Internal, (5) Unit Kerja sebagai lini pertama SPIN , (6) Unit Kerja pengelola SPIN sebagai lini kedua Pelaksana SPIN dan (7) Satuan Internal Audit sebagai lini ketiga. Penerapan Sistem Pengendalian Internal, meliputi: (1) Kepemimpinan dan Komitmen, (2) Integrasi, (3) Desain, (4) Implementasi, (5) Evaluasi dan (6) Perbaikan.

Pengendalian internal bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan perusahaan melalui efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam implementasinya, tujuan pengendalian internal mencakup aspek operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Untuk memastikan efektivitas pengendalian internal, Perusahaan menerapkan tiga tingkatan pengendalian, yaitu *Entity Level Control* (ELC), *Transactional Level Control* (TLC), dan IT *General Control* (ITGC). Penerapan pengendalian tersebut mempertimbangkan berbagai aspek penting, antara lain risiko utama (*top risks*), risiko operasional prioritas, proses dan subproses yang signifikan untuk diuji, manajemen *fraud*, pelaporan keuangan, serta aspek kepatuhan (*compliance*).

1. *Entity Level Control* (ELC) merupakan control yang memiliki efek yang luas, serta mendukung lingkungan pengendalian internal yang efektif secara high level.
2. *Transactional Level Control* (TLC) merupakan kontrol yang terintegrasi dalam operasional / proses bisnis Perusahaan.
3. IT *General Control* (ITGC) merupakan kontrol dalam proses TI yang menyediakan lingkungan operasi yang andal dan mendukung pengoperasioan kontrol aplikasi yang efektif.

The Company implements an internal control system to support the continuous achievement of its vision and mission, as well as to realize a systematic, effective, and efficient business. The organization of functions and authorities of the Internal Control System includes: (1) Board of Commissioners, (2) Board of Directors, (3) Audit Committee as the risk management organ under the Board of Commissioners, (4) Director of Internal Control System, (5) Work Unit as the first line of SPIN, (6) Work Unit managing SPIN as the second line of SPIN implementers, and (7) Internal Supervision Unit as the third line. The implementation of the Internal Control System includes: (1) Leadership and Commitment, (2) Integration, (3) Design, (4) Implementation, (5) Evaluation, and (6) Improvement.

Internal control aims to provide adequate assurance of the achievement of the Company's objectives through operational effectiveness and efficiency, the reliability of reporting, and compliance with applicable laws and regulations. In its implementation, the objectives of internal control encompass operational, reporting, and compliance aspects. To ensure the effectiveness of internal controls, the Company implements three levels of control: Entity Level Control (ELC), Transactional Level Control (TLC), and IT General Control (ITGC). The implementation of these controls considers various important aspects, including top risks, priority operational risks, significant processes and subprocesses to be tested, fraud management, financial reporting, and compliance aspects.

1. Entity Level Control (ELC) is a control that has a broad effect and supports an effective high-level internal control environment.
2. Transactional Level Control (TLC) is a control that is integrated into the Company's operational/business processes.
3. IT General Control (ITGC) is a control in the IT process that provides a reliable operating environment and supports the effective operation of application controls.

Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System Framework

Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal menggunakan kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) sebagai kerangka kerja internasional yang diakui. Prinsip penerapan Sistem Pengendalian Internal, meliputi:

1. Berorientasi strategis;
2. Berwawasan *forward-looking* dan preventif;
3. Terinternalisasi dalam kegiatan bisnis;
4. Menggunakan teknologi dan metodologi pelaporan yang efektif;
5. Pendekatan berbasis Risiko; dan
6. Memberikan nilai tambah.

Beberapa Peraturan Direksi yang menjadi dasar kebijakan sistem pengendalian internal, antara lain:

1. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0005.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Sistem Pengendalian Internal;

2. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0014.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal (SPIN);

3. Edaran Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0002.PTs/DIR/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Internal PT PLN Nusantara Power
4. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0032.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Audit Internal PT PLN Nusantara Power;

5. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0047.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Nusantara Power;
6. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0055.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Kepatuhan PT PLN Nusantara Power;

The Company implements an internal control system using the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) framework as a recognized international framework. The principles of implementing the Internal Control System include:

1. Strategic-oriented;
2. Forward-looking and preventive perspective;
3. Internalized in business activities;
4. Using effective reporting technology and methodology;
5. Risk-based Approach; and
6. Providing added value.

Several Board of Directors Regulations that form the basis of the internal control system policy, among others:

1. Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 0005.P/DIR/2025 concerning Strategic Policy of the Internal Control System;
2. Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 0014.P/DIR/2025 concerning the Implementation Policy of the Internal Control System (SPIN);
3. Circular of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 0002.PTs/DIR/2025 regarding Technical Guidelines for the Internal Control Implementation of PT PLN Nusantara Power;
4. Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 0032.P/DIR/2025 concerning the Strategic Policy of Internal Audit of PT PLN Nusantara Power;
5. Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 0047.P/DIR/2024 concerning the Strategic Policy of Integrated Risk Management of PT PLN Nusantara Power;
6. Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 0055.P/DIR/2024 concerning the Compliance Management System Policy of PT PLN Nusantara Power;

Arsitektur Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System Architecture

Arsitektur Sistem Pengendalian Internal menggunakan kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) yang terdiri dari 5 (lima) komponen dengan 17 Prinsip , meliputi

The architecture of the Internal Control System uses the framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), which consists of 5 (five) components with 17 Principles, including:

1. **Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)**
   Perusahaan membangun lingkungan pengendalian yang kuat dengan,
   a. Menunjukkan komitemen terhadap intergitas dan nilai-nilai etika
   b. Menjalankan tanggung jawab pengawasan
   c. Menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab
   d. Menunjukan komitmen terhadap kompetensi
   e. Menegakkan akuntabilitas atas sistem *internal control*

2. **Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)**
   Penerapan Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) adalah sebagai berikut:
   a. Menentukan tujuan yang sesuai;
   b. Mengidentifikasi dan menganalisis Risiko;
   c. Menilai Risiko *fraud*; dan
   d. Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan signifikan

3. **Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)**
   Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) dilaksanakan di seluruh lingkungan Perusahaan, pada seluruh proses bisnis, dan teknologi yang dapat berupa tindakan preventif atau korektif dan meliputi aktivitas manual dan automatisasi seperti persetujuan (*Approvals*), otorisasi (*Authorizations*), verifikasi, rekonsiliasi, *review* kinerja operasi dan pemisahan fungsi (*Segregation Of Duties*). Penerapan aktivitas pengendalian (*Control activities*) adalah sebagai berikut:
   a. Penentuan dan pengembangan Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*);
   b. Penentuan dan pengembangan kontrol umum atas teknologi informasi;
   c. Implementasi melalui kebijakan dan prosedur

4. **Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)**
   Perusahaan wajib memastikan informasi yang relevan dan berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui komunikasi yang efektif. Hal ini berkaitan dengan proses identifikasi, perolehan dan pertukaran informasi. Penerapan informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:
   a. Penggunaan informasi yang relevan dan berkualitas;
   b. Komunikasi Internal; dan
   c. Komunikasi Eksternal

1. **Control Environment**
   The Company builds a robust control environment by:
   a. Showing commitment to integrity and ethical values
   b. Carrying out supervisory responsibilities
   c. Establishing structure, authority, and responsibility
   d. Showing commitment to competence
   e. Enforcing accountability over the internal control system

2. **Risk Assessment**
   The implementation of Risk Assessment is as follows:
   a. Setting appropriate goals;
   b. Identifying and analyzing risks;
   c. Assessing fraud risk; and
   d. Identifying and analyzing significant changes.

3. **Control Activities**
   Control Activities are implemented throughout the Company's environment, across all business processes and technology, which can include preventive or corrective actions and encompass both manual and automated activities such as approvals, authorizations, verifications, reconciliations, operational performance reviews, and segregation of duties. The implementation of control activities is as follows:
   a. Determination and development of Control Activities;
   b. Determination and development of general controls over information technology;
   c. Implementation through policies and procedures.

4. **Information and Communication**
   The Company is required to ensure relevant and quality information in order to carry out its duties and responsibilities through effective communication. It is related to the processes of identification, acquisition, and exchange of information. The application of information and communication is as follows:
   a. The use of relevant and high-quality information;
   b. Internal Communication; and
   c. External Communication

5. **Pemantauan dan Evaluasi**
   Aktivitas Pemantauan (*Monitoring*) mencakup aktivitas Manajemen dan pengawasan setiap saat (*on-going*) dalam operasional Perusahaan, dan juga aktivitas periodik oleh Manajemen Tengah. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring*) ini juga mencakup proses pelaporan dan remediasi atas defisiensi Pengendalian Internal dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku. Penerapan aktivitas pemantauan (*Monitoring*) adalah sebagai berikut:
   a. Evaluasi berkelanjutan;
   b. Evaluasi terpisah; dan
   c. Mengevaluasi dan mengomunikasikan defisiensi

5. Monitoring and Evaluation
   Monitoring activities encompass management and supervision activities at all times (on-going) in the Company's operations, as well as periodic activities by Middle Management. These Monitoring activities also include the reporting and remediation processes for Internal Control deficiencies to comply with applicable provisions. The implementation of monitoring activities is as follows:

   a. Continuous evaluation;
   b. Separate evaluation; and
   c. Evaluating and communicating deficiencies.

Model Tiga Lini (*Three Lines Model*)
Three Lines Model

Struktur Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal (SPIN) menggunakan pendekatan kepada Model Tiga Lini (*Three Lines Model*), meliputi:

1. **Lini 1 (*Risk Owner*)**
   Pemilik Proses Bisnis sebagai pemilik risiko yang bertanggung jawab untuk secara langsung mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses bisnisnya.
   a. Melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai dengan rancang bangun kriteria yang disusun oleh Lini 2;
   b. Memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif dalam menjalankan proses bisnis; dan
   c. Menerapkan kebijakan manajemen risiko, yaitu memastikan identifikasi seluruh risiko, kecukupan mitigasi risiko, dan memantau efektivitas tindak lanjutnya.

2. **Lini 2 (Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan)**

   Fungsi yang berwenang untuk melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan Perusahaan dan memberikan advice kepada lini pertama, serta bertanggungjawab terhadap pengembangan budaya risiko di Perusahaan.
   a. Memastikan efektivitas rancang bangun sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Lini 1;

The structure of the Internal Control System Governance (SPIN) uses the Three Lines Model approach, which includes:

1. Line 1 (Risk Owner)
   Business Process Owner as the risk owner responsible for directly identifying and managing risks in their business process.

   a. Implementing the internal control system according to the design criteria prepared by Line 2;
   b. Ensuring a conducive control environment in conducting business processes; and

   c. Implementing risk management policies, namely ensuring the identification of all risks, the adequacy of risk mitigation, and monitoring the effectiveness of follow-up actions.

2. **Line 2 (Risk Management and Compliance Function)**
   The function that is authorized to conduct measurement, monitoring, and aggregate risk control, develop Company methodologies and policies, provide advice to the first line, and be responsible for the development of a risk culture in the Company.

   a. Ensuring the effectiveness of the internal control system design implemented by Line 1;

b. Mereview rancang bangun sistem pengendalian internal secara periodik sesuai kebutuhan mempertimbangkan usulan Lini 1 dan rekomendasi Lini 3.
c. Melakukan fungsi pembinaan, supervisi, pengendalian, sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi atas proses dan hasil kepada Lini 1; dan
d. Membina, mengarahkan, dan memantau pelaksanaan manajemen risiko sesuai Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan PT PLN Nusantara Power.

3. **Lini 3 (Fungsi Audit Internal dan Audit Eksternal)**
Fungsi yang berwenang untuk memastikan tata kelola dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif oleh Perusahaan.
a. Melakukan audit berbasis risiko untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Lini 1 dan Lini 2 telah berjalan dengan efektif;
b. Memberikan rekomendasi untuk memastikan adanya peningkatan kualitas secara berkelanjutan (*continous improvement*) terhadap proses bisnis Perusahaan; dan
c. Melakukan *advisory* dan pendampingan kepada Lini 1 dan Lini 2 guna penyempurnaan sistem pengendalian internal berdasarkan hasil audit.

b. Reviewing the design and development of the internal control system periodically as needed, considering Line 1's proposals and Line 3's recommendations.
c. Performing the functions of guidance, supervision, control, socialization, coordination, and evaluation of processes and results for Line 1; and
d. Mentoring, directing, and monitoring the implementation of risk management in accordance with the Risk Management Implementation Policy within PT PLN Nusantara Power.

3. **Line 3 (Internal Audit and External Audit Functions)**
The function that is authorized to ensure that governance and risk control are effectively implemented by the Company.
a. Conducting a risk-based audit to ensure that the internal control systems implemented by Line 1 and Line 2 are functioning effectively;
b. Provide recommendations to ensure continuous improvement in the quality of the Company's business processes; and
c. Providing advisory and support to Line 1 and Line 2 to improve the internal control system based on audit results.

Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System Implementation Mechanism

Sistem Pengendalian Internal diterapkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan (*reliability*), ketepatan waktu (*timeliness*), transparansi (*transparency*) laporan, dan ketaatan perusahaan terhadap hukum dan peraturan eksternal dan internal. Untuk memastikan efektivitasnya, setiap komponen Sistem Pengendalian Internal dijalankan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya serta terintegrasi dalam seluruh proses bisnis perusahaan.

Sesuai Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0014.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIN), mekanisme pelaksanaan SPIN di lingkungan Perusahaan dilakukan melalui alur sebagai berikut:

The Internal Control System is implemented to support the effectiveness and efficiency of operations, reliability, timeliness, transparency of reports, and the Company's compliance with external and internal laws and regulations. To ensure its effectiveness, each component of the Internal Control System (ICS) is executed according to its functions and responsibilities and is integrated into all business processes of the Company.

In accordance with the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power Number 0014.P/DIR/2025 concerning the Policy for the Implementation of the Internal Control System (SPIN), the mechanism for implementing ICS within the Company is carried out through the following process:

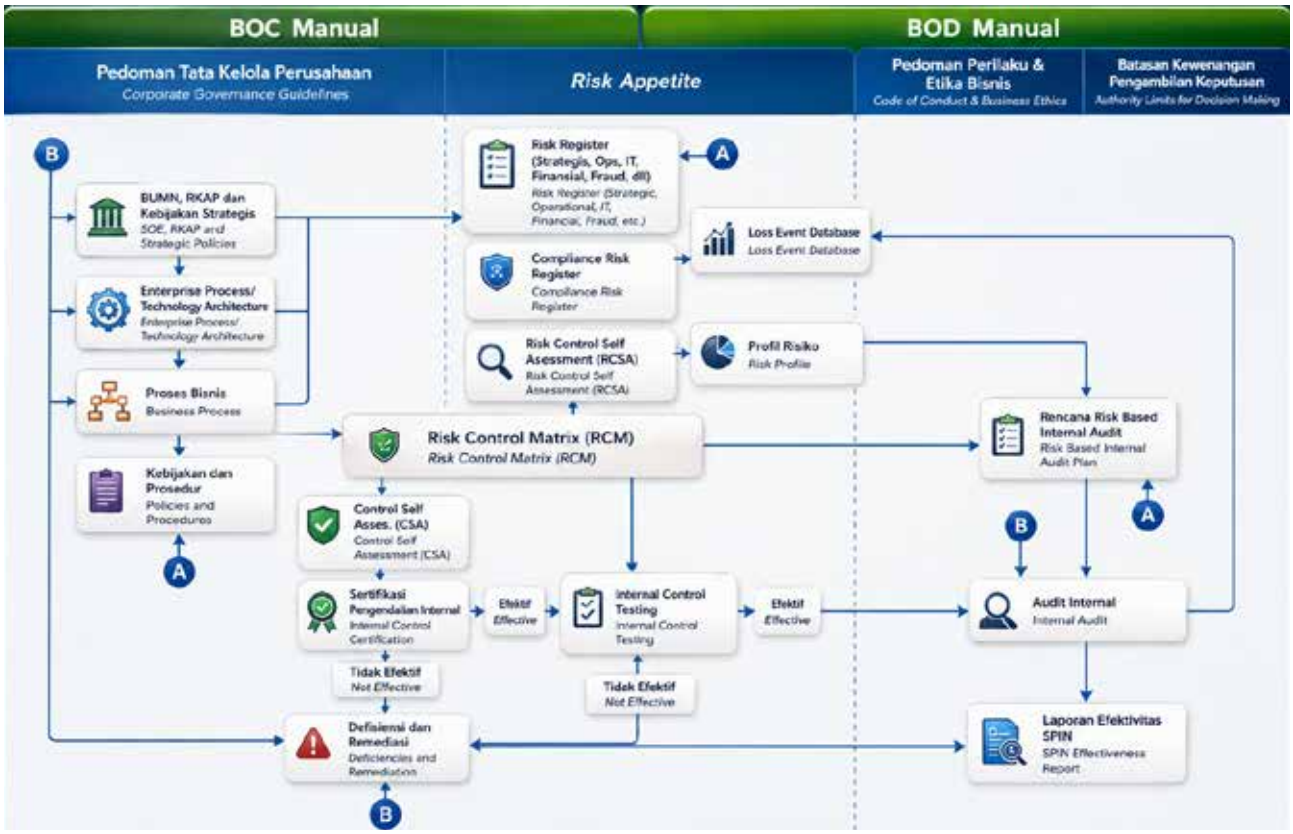

A Kebijakan dan Prosedur yang berlaku
Applicable policies and procedures

B Laporan Hasil Audit
Report of Audit Result

Diagram tersebut menggambarkan kerangka implementasi dan evaluasi **Sistem Pengendalian Internal (SPIN)** yang terintegrasi dengan manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal berdasarkan konsep ***Three Lines Model.***

Proses diawali dengan penetapan arah dan tata kelola perusahaan yang dituangkan dalam BOC *Manual* dan BOD Manual, seperti Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Risk Appetite, Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, serta Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan. Pedoman tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan pengendalian internal perusahaan.

The diagram illustrates the framework for the implementation and evaluation of the **Internal Control System** (ICS) integrated with risk management, compliance, and internal audit based on the **Three Lines Model** concept.

The process begins with the establishment of the Company's direction and governance, outlined in the BOC Manual and BOD Manual, such as the Corporate Governance Guidelines, Risk Appetite, Code of Conduct, and Decision-Making Authority Limits. These guidelines serve as the basis for the implementation of the Company's internal control.

Pada **Lini 1** sebagai pemilik proses bisnis (*risk owner*), perusahaan menyusun RJPP, RKAP, kebijakan strategis, proses bisnis, serta kebijakan dan prosedur operasional. Berdasarkan proses bisnis tersebut dilakukan identifikasi dan pengelolaan risiko melalui penyusunan *Risk Register* dan *Compliance Risk Register* yang mencakup risiko strategis, operasional, IT, finansial, *fraud*, dan risiko lainnya. Risiko yang teridentifikasi kemudian dipetakan ke dalam *Risk Control Matrix* (RCM) untuk menentukan kontrol utama sebagai mitigasi risiko.

In Line 1, as the business process owner (risk owner), the Company prepares the Long-Term Business Plan (RJPP), the Annual Budget and Operational Plan (ABOP), strategic policies, business processes, as well as operational policies and procedures. Based on these business processes, risk identification and management are conducted through the preparation of the Risk Register and Compliance Risk Register, which include strategic, operational, IT, financial, fraud, and other risks. Identified risks are then mapped into the Risk Control Matrix (RCM) to determine key controls for risk mitigation.

Selanjutnya, unit kerja melakukan *Control Self Assessment* (CSA) untuk menilai efektivitas pengendalian yang telah diterapkan. Hasil CSA menjadi dasar dalam proses Sertifikasi Pengendalian Internal guna menilai efektivitas kontrol dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian.

Next, the work unit conducts a Control Self Assessment (CSA) to evaluate the effectiveness of the controls that have been implemented. The results of the CSA serve as the basis for the Internal Control Certification process to assess the effectiveness of the controls and identify control weaknesses.

Pada **Lini 2**, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan melakukan pengawasan melalui *Internal Control Testing* untuk memastikan kontrol dalam RCM dijalankan secara konsisten, sesuai prosedur, dan efektif dalam memitigasi risiko. Pengelolaan risiko juga didukung oleh Loss Event Database sebagai sarana pencatatan kejadian risiko dan kerugian aktual perusahaan. Hasil identifikasi dan pengujian tersebut digunakan dalam penyusunan Profil Risiko perusahaan.

In Line 2, the risk management and compliance functions conduct oversight through Internal Control Testing to ensure that controls in the RCM are implemented consistently, according to procedures, and effectively in mitigating risks. Risk management is also supported by the Loss Event Database as a means of recording the Company's actual risk events and losses. The results of the identification and testing are used in the preparation of the Company's Risk Profile.

Apabila dalam CSA, sertifikasi, maupun *Internal Control Testing* ditemukan kontrol yang tidak efektif, kondisi tersebut dikategorikan sebagai **defisiensi pengendalian internal**. Defisiensi dapat berupa kontrol yang belum tersedia, belum dijalankan secara memadai, tidak konsisten, atau belum mampu memitigasi risiko secara efektif. Atas kondisi tersebut, unit kerja wajib melakukan remediasi melalui perbaikan kontrol, penyempurnaan prosedur, peningkatan monitoring, atau penguatan implementasi pengendalian hingga kontrol dinyatakan efektif.

If ineffective controls are found in the CSA, certification, or Internal Control Testing, the condition is categorized as an **internal control deficiency**. The deficiency can be in the form of controls that are not yet available, not adequately implemented, inconsistent, or incapable to effectively mitigate risks. In light of these conditions, the work unit is required to carry out remediation through control improvements, procedure enhancements, increased monitoring, or strengthening control implementation until the controls are deemed effective.

Pada **Lini 3**, fungsi Audit Internal menyusun *Risk Based Internal Audit* berdasarkan profil risiko, hasil pengujian pengendalian, serta area berisiko tinggi. Audit Internal kemudian melakukan evaluasi independen terhadap efektivitas implementasi SPIN dan menghasilkan Laporan Efektivitas SPIN sebagai bentuk *assurance* kepada manajemen dan Dewan Komisaris.

In Line 3, the Internal Audit function prepares a Risk-Based Internal Audit based on the risk profile, control testing results, and high-risk areas. The Internal Audit then conducts an independent evaluation of the effectiveness of ICS implementation and results in the ICS Effectiveness Report as an assurance to management and the Board of Commissioners.

Secara keseluruhan, implementasi SPIN merupakan proses yang terintegrasi mulai dari identifikasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kontrol, pengujian efektivitas, remediasi defisiensi, hingga evaluasi independen oleh Audit Internal. Mekanisme ini bertujuan memastikan risiko perusahaan dikelola secara efektif, kepatuhan tetap terjaga, serta proses bisnis berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Overall, the implementation of ICS is an integrated process starting from risk identification, setting and executing controls, testing effectiveness, remediating deficiencies, to independent evaluation by Internal Audit. This mechanism aims to ensure that the Company's risks are managed effectively, compliance is maintained, and business processes operate in accordance with the principles of good corporate governance.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Operasional
Operational Internal Control Implementation

Untuk memastikan pencapaian tujuan strategis dan perlindungan aset perusahaan, Perusahaan menerapkan pengelolaan operasional yang efektif dan efisien di seluruh unit kerja. Setiap Lini bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai prosedur dan program kerja yang ditetapkan, termasuk pencapaian sasaran kinerja yang terukur. Pelaksanaan Pengendalian Internal melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pemahaman Lingkungan, mencakup pengenalan, analisis dan kajian mendalam terhadap berbagai sumber-sumber risiko baik eksternal maupun internal yang dapat berpengaruh terhadap sasaran proses bisnis;
2. Identifikasi Risiko dan pengendalian dari BPM, melalui pendekatan *top-down approach* dan *bottom-up approach*;
3. Penyusunan RCM disusun oleh BPO bersama Unit Kerja Pengelola Sistem Pengendalian Internal;
4. Sertifikasi Pelaporan CSA, BPO melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kontrol secara mandiri/ *Control Self Assessment* (CSA). Sertifikasi kontrol dinyatakan efektif apabila kontrol tersebut efektif secara desain/rancangan dan efektif secara pelaksanaannya (transaksi yang berjalan dalam suatu periode);
5. *Internal Control Testing* , meliputi:
   a. *Internal Control Testing*, Unit Kerja Pengelola Sistem Pengendalian Internal melakukan evaluasi desain berupa *Internal Control Testing* atas Kontrol yang dinyatakan efektif hasil *Control Self Assessment* (CSA) berdasarkan sampel yang dipilih setiap triwulan;
   b. *Test of Design Effectiveness* (TOD) dan *Test of Operating Effectiveness* (TOE), Satuan Internal Audit melakukan TOD dan TOE atas kontrol yang dinyatakan efektif hasil dari *Internal Control Testing*.

To ensure the achievement of strategic goals and the protection of company assets, the Company implements effective and efficient operational management across all work units. Each Line is responsible for carrying out tasks according to established procedures and work programs, including achieving measurable performance targets. Implementation of Internal Control through the following stages:

1. Understanding the Environment, which includes the introduction, analysis, and in-depth study of various sources of risks, both external and internal, that can affect the objectives of business processes;
2. Risk identification and control from BPM, through a top-down approach and bottom-up approach;
3. The preparation of the RCM is conducted by the BPO together with the Internal Control System Management Work Unit;
4. CSA Reporting Certification, BPO conducts an assessment of the implementation of controls independently/Control Self-Assessment (CSA). Control certification is considered effective if the control is effective in design and effective in its implementation (transactions that occur within a certain period);
5. Internal Control Testing, including:
   a. Internal Control Testing, the Internal Control System Management Unit conducts a design evaluation in the form of Internal Control Testing on Controls deemed effective based on the Control Self Assessment (CSA) results from samples selected quarterly;
   b. Test of Design Effectiveness (TOD) and Test of Operating Effectiveness (TOE), the Internal Audit Unit conducts TOD and TOE on controls deemed effective as a result of Internal Control Testing;

6. Defisiensi dan Remediasi Pengendalian Internal, BPO melakukan remediasi sebagai tindak lanjut hasil pengujian yang menunjukkan adanya defisiensi serta BPO melakukan remediasi berdasarkan defisiensi yang diperoleh dari hasil *Control Self Assessment* (CSA), *Internal Control Testing*, dan Audit Internal.
7. Pelaporan Efektivitas SPIN, Satuan Internal Audit menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk remediasi atas pelaksanaan Audit Internal.

Direksi menerima laporan berkala dari seluruh unit kerja, termasuk dari Bidang Risk Management and Compliance dan Satuan Internal Audit, baik melalui rapat koordinasi maupun laporan tertulis. Kedua Satuan Kerja tersebut juga menyampaikan laporan pengawasan khusus kepada Dewan Komisaris dan berkoordinasi dengan Komite Audit serta Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Direksi membahas capaian kinerja operasional secara menyeluruh bersama Dewan Komisaris, yang juga melakukan kunjungan rutin ke unit bisnis untuk memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola dan kebijakan strategis yang berlaku.

6. Deficiencies and Remediation of Internal Control, BPO conducts remediation as a follow-up to test results that indicate deficiencies, and BPO conducts remediation based on deficiencies obtained from the results of Control Self Assessment (CSA), Internal Control Testing, and Internal Audit.
7. Reporting the Effectiveness of ICS, the Internal Audit Unit prepares recommendations and follow-up plans for remediation based on the implementation of the Internal Audit.

The Board of Directors receives periodic reports from all work units, including from the Risk Management and Compliance Division and the Internal Audit Unit, both through coordination meetings and written reports. These two work units also submit special oversight reports to the Board of Commissioners and coordinate with the Audit Committee as well as the Investment and Risk Management Committee. The Board of Directors discusses the overall operational performance achievements with the Board of Commissioners, who also conduct regular visits to business units to ensure the company's operations run in accordance with applicable governance principles and strategic policies.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Keuangan
Financial Internal Control Implementation

internal Perusahaan yang fokus pada pengelolaan aspek keuangan. Pengawasan ICoFR berada di bawah tanggung jawab manajemen puncak dan unit terkait, yang bersama-sama memastikan proses pengendalian keuangan berjalan efektif dan berkesinambungan. Tujuannya adalah memberikan keyakinan terhadap keandalan laporan keuangan, menjaga kredibilitas informasi, serta melindungi aset perusahaan dari risiko penyimpangan atau kehilangan, sekaligus mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas pelaporan keuangan.

Pelaksanaan ICoFR dilakukan melalui tiga tahap terintegrasi: pertama, penyusunan pedoman dan rancangan pengendalian yang mencakup identifikasi proses bisnis, pemetaan risiko, dan penetapan titik pengendalian utama; kedua, pengujian dan pemutakhiran rancangan pengendalian untuk memastikan efektivitas dan melakukan perbaikan bila diperlukan; ketiga, penyusunan pernyataan berjenjang sebagai bentuk pertanggungjawaban mulai dari pelaksana hingga manajemen tertinggi.

An internal company that focuses on managing financial aspects. The oversight of ICoFR is under the responsibility of top management and related units, who together ensure that the financial control processes run effectively and sustainably. It aims to provide assurance regarding the reliability of financial statements, maintain the credibility of information, and protect the Company's assets from the risk of misuse or loss, while also supporting transparency, accountability, and integrity in financial reporting.

The implementation of ICoFR is carried out through three integrated stages: first, the preparation of guidelines and control designs that include business process identification, risk mapping, and the establishment of key control points; second, the testing and updating of control designs to ensure effectiveness and make improvements if necessary; third, the preparation of tiered statements as a form of accountability from the implementers to the top management.

Sebagai bentuk komitmen terhadap integritas laporan keuangan, Perusahaan secara rutin menyusun dan menyampaikan Laporan ICoFR setiap tahun. Laporan ini juga menjadi bagian dari audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero), untuk memastikan laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi dan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.

As a form of commitment to the integrity of financial reports, the Company routinely prepares and submits the ICoFR Report annually. This report is also part of the external audit by the Public Accounting Firm (KAP) appointed by PT PLN (Persero), to ensure that the financial reports are presented in accordance with accounting standards and can be trusted by all stakeholders.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Regulatory Compliance

Untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan kontrak, Perusahaan menempatkan Direksi sebagai pihak yang memegang tanggung jawab utama. Pelaksanaan tanggung jawab ini didukung secara khusus oleh Bidang Risk Management and Compliance dan Satuan Corporate Law, serta oleh seluruh unit kerja operasional sesuai ruang lingkup dan kewenangan masing-masing.

To ensure compliance with laws, regulations, and contractual provisions, the Company places the Board of Directors as the party holding key responsibility. The execution of this responsibility is specifically supported by the Risk Management and Compliance Division and the Corporate Law Unit, as well as by all operational work units according to their respective scopes and authorities.

Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas, Perusahaan secara rutin melibatkan auditor eksternal independen untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kontrak yang relevan. Berdasarkan pengujian untuk tahun buku 2025, auditor menyimpulkan bahwa Perusahaan telah mematuhi seluruh ketentuan yang diuji secara material. Hasil ini menunjukkan komitmen Perusahaan terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan risiko hukum yang melekat pada seluruh kegiatan operasionalnya.

To maintain integrity and accountability, the Company routinely engages independent external auditors to assess compliance with relevant laws, regulations, and contracts. Based on the audit for the 2025 fiscal year, the auditor concluded that the Company has complied with all materially tested provisions. This result demonstrates the Company's commitment to good governance and the management of legal risks inherent in all its operational activities.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Review of Internal Control System Effectiveness

Efektivitas sistem pengendalian internal secara berkala dievaluasi untuk memastikan operasional yang efisien, laporan keuangan yang akurat, kepatuhan hukum, dan perlindungan aset. Evaluasi dilakukan melalui audit internal oleh Satuan Internal Audit dan audit eksternal oleh KAP, BPKP, dan BPK, menggunakan metode pengumpulan dokumen, wawancara, observasi, dan review analitis. Direksi secara berkala menyatakan tanggung jawab atas penerapan sistem pengendalian internal.

The effectiveness of the internal control system is periodically evaluated to ensure efficient operations, accurate financial statements, legal compliance, and asset protection. The evaluation is conducted through internal audits by the Internal Audit Unit and external audits by KAP, BPKP, and the Audit Board, using methods such as document collection, interviews, observations, and analytical reviews. The Board of Directors periodically declares responsibility for the internal control system.

PT PLN NP melakukan evaluasi menggunakan metodologi Model C, yakni audit menyeluruh pada beberapa unit kerja, yakni pada tahun 2025 melakukan audit operasional pada 16 unit pembangkit dan kantor pusat, menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Hasil audit independen tahun buku 2025 menunjukkan kepatuhan material, sehingga Direksi dan Dewan Komisaris menilai sistem pengendalian internal Perusahaan memadai dan efektif.

PT PLN NP conducted an evaluation using the Model C methodology, which involves a comprehensive audit of several work units. In 2025, an operational audit was conducted on 16 power plant units and the head office, resulting in recommendations to improve the effectiveness of internal controls. The independent audit results for the 2025 financial year showed material compliance, leading the Board of Directors and Board of Commissioners to assess that the Company's internal control system is adequate and effective.

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

Kemampuan Perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tidak hanya bergantung pada strategi bisnis, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan risiko yang dijalankan. Melalui penerapan manajemen risiko yang sistematis, Perusahaan berupaya mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, serta memantau berbagai potensi ancaman maupun peluang yang timbul dari seluruh aktivitas usaha. Perusahaan merancang kerangka manajemen risiko yang memungkinkan pengenalan dini terhadap peluang dan risiko, sekaligus memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara tepat. Pengelolaan risiko yang terstruktur dan transparan tidak hanya mendukung ketahanan dan pertumbuhan Perusahaan (*corporate resilience*), tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Dengan adanya proses yang akuntabel dan pengawasan yang berlapis, Perusahaan menunjukkan komitmen dalam mengelola risiko secara profesional, sehingga mampu menciptakan nilai yang berkelanjutan sekaligus memperkuat keyakinan publik terhadap integritas dan kinerja Perusahaan.

The Company's ability to face uncertainty while maintaining business continuity does not only depend on business strategy but also on the effectiveness of risk management being implemented. Through the systematic implementation of risk management, the Company strives to identify, measure, control, and monitor various potential threats and opportunities arising from all business activities. The Company designs a risk management framework that enables early identification of opportunities and risks, while also ensuring that resource allocation is carried out appropriately. Structured and transparent risk management not only supports corporate resilience and growth but also serves as the foundation for building and maintaining stakeholder trust. With accountable processes and layered auditing, the Company demonstrates its commitment to managing risks professionally, thereby creating sustainable value while strengthening public confidence in its integrity and performance.

Sejalan dengan pemutakhiran kebijakan tahun 2025, sistem manajemen risiko PLN NP diperkuat melalui pengaturan yang lebih operasional, meliputi pedoman umum manajemen risiko terintegrasi, petunjuk teknis penyusunan strategi risiko, pemodelan risiko, pengelolaan *Early Warning System* dan *Loss Event*,

In line with the 2025 policy update, the PLN NP risk management system is strengthened by incorporating more operational regulations, including general guidelines for integrated risk management, technical instructions for risk strategy formulation, risk modeling, management of the Early Warning System and Loss

serta instruksi kerja pengelolaan Risiko Utama dan *Emerging Risk*. Penguatan ini menegaskan bahwa manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai perangkat kepatuhan, tetapi juga sebagai mekanisme *early warning*, dasar pengambilan keputusan, serta sarana perlindungan dan penciptaan nilai bagi Perusahaan.

Event, as well as work instructions for managing Key Risks and Emerging Risks. This strengthening emphasizes that risk management not only functions as a compliance tool but also as an early warning mechanism, a basis for decision-making, and a means of protection and value creation for the Company.

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

Pengelolaan risiko di Perusahaan dijalankan secara menyeluruh melalui keterlibatan aktif Direksi, pengawasan Dewan Komisaris, serta dukungan kebijakan, prosedur, dan strategi risiko yang memadai. Seluruh prosesnya mulai dari identifikasi, pengukuran, penanganan, pencatatan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan risiko dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dalam sistem informasi manajemen risiko. Setiap risiko dikelola oleh masing-masing risk owner yang didukung oleh risk officer di setiap unit kerja, serta dikoordinasikan oleh fungsi Risk and Compliance. Proses identifikasi dan penilaian risiko mengacu pada pendekatan *Enterprise Risk Management* yang selaras dengan standar internasional ISO 31000:2018, sehingga memastikan seluruh tahapan dilakukan secara terstruktur, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik.

Risk management in the Company is conducted comprehensively through the active involvement of the Board of Directors, supervision by the Board of Commissioners, and support from adequate policies, procedures, and risk strategies. The entire process, from identification, measurement, handling, recording, to monitoring, evaluation, and reporting of risks, is run systematically and integrated within the risk management information system. Each risk is managed by its respective risk owner, supported by a risk officer in each work unit, and coordinated by the Risk and Compliance function. The risk identification and assessment process refers to the Enterprise Risk Management approach aligned with the international standard ISO 31000:2018, ensuring that all stages are conducted in a structured, consistent, and well-documented manner.

Sebagai pedoman utama, Perusahaan mengadopsi kerangka kerja *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. Pendekatan ini diintegrasikan dengan konsep Three Lines Model sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan, sehingga tercipta mekanisme pengelolaan risiko yang efektif sekaligus adaptif terhadap perubahan. Secara khusus, dalam pengelolaan risiko pada aset pembangkit, Perusahaan menerapkan pendekatan yang sejalan dengan standar PAS 55 – ISO 55000. Berbagai metode analisis digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, seperti *Risk Evaluation and Prioritization* (REAP), *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA), *Root Cause Failure Analysis* (RCFA), serta *Life Cycle Cost* (LCC). Penerapan teknik-teknik ini memberikan landasan analitis yang kuat dalam menentukan prioritas penanganan risiko sekaligus memastikan efisiensi biaya sepanjang siklus hidup aset.

As the main guideline, the Company adopts the dynamic and sustainable Plan-Do-Check-Act (PDCA) framework. This approach is integrated with the Three Lines Model concept as part of the internal control and corporate governance system, thereby creating an effective risk management mechanism that is also adaptive to changes. Specifically, in the risk management of generation assets, the Company applies an approach in line with the PAS 55 – ISO 55000 standards. Various analytical methods are applied to support strategic decision-making, such as Risk Evaluation and Prioritization (REAP), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Root Cause Failure Analysis (RCFA), and Life Cycle Cost (LCC). The application of these techniques provides a solid analytical basis for determining risk handling priorities while ensuring cost efficiency throughout the asset's life cycle.

Kebijakan Manajemen Risiko
Risk Management Policy

Implementasi manajemen risiko Perusahaan dibangun dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Perusahaan juga mengadopsi standar internasional ISO 31000:2018 sebagai panduan praktik terbaik. Agar tetap relevan, PLN NP secara periodik melakukan peninjauan dan pemutakhiran kebijakan manajemen risiko. Upaya ini untuk memastikan bahwa strategi perlindungan Perusahaan tetap selaras dengan dinamika regulasi terbaru, tren global, serta perkembangan skala dan kompleksitas bisnis yang terus bertumbuh. Adapun instrumen kebijakan utama yang menjadi pilar penerapan manajemen risiko di lingkungan PLN NP meliputi:

1. Peraturan Direksi No. 0047.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Nusantara Power;
2. Edaran Direksi No. 0012.E/DIR/2024 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Edaran Direksi No. 0013.E/DIR/2024 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko;
4. Edaran Direksi No. 0014.E/DIR/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di PT PLN Nusantara Power;
5. Edaran Direksi No. 0015.E/DIR/2024 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Taksonomi Risiko;
6. *Statement of Corporate Intent* No. 01.K/020/DIR/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Pembangkitan Jawa-Bali;
7. Peraturan Direksi No. 0030.P/019/DIR/2021 tentang Penerapan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC);
8. Keputusan Direksi No. 0035.K/020/DIR/2021 tentang Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS).

Instrumen kebijakan dan pedoman teknis yang memperkuat penerapan manajemen risiko tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The implementation of the Company's risk management is built on the SOE Ministerial Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. The Company also adopts the international standard ISO 31000:2018 as a best practice guide. To remain relevant, PLN NP periodically reviews and updates its risk management policies. This effort is to ensure that the Company's protection strategy remains aligned with the latest regulatory dynamics, global trends, and the growing scale and complexity of the business. The main policy instruments that serve as the pillars of risk management implementation within the PLN NP include:

1. Directors' Regulation No. 0047.P/DIR/2024 on Strategic Policy for Integrated Risk Management at PT PLN Nusantara Power;
2. Directors' Circular Letter No. 0012.E/DIR/2024 on Technical Guidelines for Integrated Risk Management Planning;
3. Directors' Circular Letter No. 0013.E/DIR/2024 on Technical Guidelines for Risk Monitoring and Evaluation;
4. Directors' Circular Letter No. 0014.E/DIR/2024 on Technical Guidelines for the Assessment of the Risk Maturity Index at PT PLN Nusantara Power;
5. Directors' Circular Letter No. 0015.E/DIR/2024 on Technical Guidelines for Risk Taxonomy Mapping;
6. Statement of Corporate Intent No. 01.K/020/DIR/2021 on the Implementation of Integrated Risk Management at PT Pembangkitan Jawa-Bali;
7. Directors' Regulation No. 0030.P/019/DIR/2021 on the Implementation of Governance, Risk Management and Compliance (GRC);
8. Directors' Decree No. 0035.K/020/DIR/2021 on the Establishment of the Risk Appetite Statement (RAS).

Policy instruments and technical guidelines that strengthen the implementation of risk management in 2025 are as follows:

No.	Instrumen Instrument	Penguatan Substansi Substantive Strengthening
1	Peraturan Direksi No. 0010.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Pelaksana Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi Board of Directors' Regulation No. 0010.P/DIR/2025 regarding the Implementation Policy of the General Guidelines for Integrated Risk Management	Memperjelas ruang lingkup pelaksanaan manajemen risiko, mulai dari organisasi, strategi, proses, sistem informasi, budaya risiko, pengelolaan dengan Anak Perusahaan, RMI, hingga dokumentasi dan pelaporan. Clarifying the scope of risk management implementation, starting from the organization, strategy, process, information systems, risk culture, management with subsidiaries, RMI, to documentation and reporting.

No.	Instrumen Instrument	Penguatan Substansi Substantive Strengthening
2	Edaran Direksi No. 0008.PTs/DIR/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Strategi Risiko Board of Directors' Circular No. 0008.PTs/DIR/2025 on Technical Guidelines for Risk Strategy Development	Menjadi pedoman teknis dalam penyusunan strategi risiko, termasuk penetapan *Risk Appetite Statement, risk limit*, metrik strategi risiko, dan kriteria risiko. Becoming a technical guideline in the formulation of risk strategies, including the establishment of the Risk Appetite Statement, risk limits, risk strategy metrics, and risk criteria.
3	Edaran Direksi No. 0010.PTs/DIR/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemodelan Risiko Board of Directors' Circular No. 0010.PTs/DIR/2025 on Technical Guidelines for Risk Modeling	Mengatur prinsip, tujuan, tahapan, parameter, skenario, klasifikasi, hasil pemodelan, validasi, *review*, dan dokumentasi model risiko. Setting the risk model principles, objectives, stages, parameters, scenarios, classifications, modeling results, validation, review, and documentation.
4	Edaran Direksi No. 0004.PTs/DIR/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan *Early Warning System* dan *Loss Event* Board of Directors' Circular No. 0004.PTs/DIR/2025 on Technical Guidelines for Managing the Early Warning System and Loss Event	Memperkuat proses deteksi dini berbasis KRI, *threshold*, *trigger*, pelaporan *Loss Event*, dan tindak lanjut mitigasi sebelum dampak risiko berkembang menjadi lebih material. Strengthening the early detection process based on KRI, threshold, trigger, Loss Event reporting, and mitigation follow-up before the impact of risk becomes more material.
5	Instruksi Kerja IKKP-126-11.1.3.1-01 tentang Pengelolaan Risiko Utama dan *Emerging Risk* Work Instruction IKKP-126-11.1.3.1-01 on the Management of Key Risks and Emerging Risks	Menetapkan alur baku pengelolaan Risiko Utama dan *Emerging Risk* mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, pemantauan, eskalasi, pelaporan, hingga review dan perbaikan berkelanjutan. Establishing a standard flow for managing Key Risks and Emerging Risks, starting from identification, analysis, evaluation, treatment, monitoring, escalation, reporting, review, and continuous improvement.

Struktur dan Tanggung Jawab Manajemen Risiko
Risk Management Structure and Responsibilities

Perusahaan menerapkan mekanisme pengelolaan risiko yang terintegrasi di seluruh tingkatan, mulai dari struktur organisasi tertinggi hingga ke level individu. Setiap personel memiliki peran strategis dan tanggung jawab spesifik dalam mendukung efektivitas manajemen risiko. Adapun kerangka kerja dan pembagian tugas para pengelola risiko di lingkup PLN NP berpedoman pada Keputusan No. 0047.P/DIR/2024 mengenai Kebijakan Strategis Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengadopsi Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini. Dalam model tersebut, lini pertama bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengelola risiko pada proses bisnisnya, lini kedua berperan mengukur, memantau, serta mengembangkan metodologi dan kebijakan manajemen risiko, sedangkan lini ketiga memberikan *assurance* independen atas efektivitas tata kelola, pengendalian, dan penerapan manajemen risiko. Struktur dan pembagian tanggung jawab tersebut disajikan dengan rincian sebagai berikut:

The Company implements an integrated risk management mechanism at all levels, from the highest organizational structure to the individual level. Each member has a strategic role and specific responsibilities in supporting the effectiveness of risk management. The framework and division of tasks for risk managers within PLN NP are guided by Decision No. 0047.P/DIR/2024 on the Strategic Policy for the Implementation of Integrated Risk Management, which adopts the Three Lines of Defense Risk Governance Model. In this model, the first line is responsible for identifying and managing risks in its business processes, the second line plays a role in measuring, monitoring, and developing risk management methodologies and policies, while the third line provides independent assurance on the effectiveness of governance, control, and risk management implementation. The structure and division of responsibilities are presented in detail as follows:

Struktur dan Tanggung Jawab dalam Organ Pengelola Risiko
Structure and Responsibilities in Risk Management Organs

No.	Pengelola Manager	Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities	
1.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	1. Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan serta strategi manajemen risiko. 2. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi; dan 3. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan/ kebijakan internal Perusahaan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/ pemilik modal	1. Evaluating and approving risk management policies and strategies. 2. Evaluating the accountability of the Board of Directors in implementing risk management policies and strategies. 3. Supervising and providing advice on the implementation of the Risk Management function in accordance with the Company's internal regulations/policies, applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders/capital owners.
2.	Direksi Board of Directors	1. Menyusun dan mengusulkan kebijakan strategis manajemen risiko secara komprehensif; 2. Melaksanakan kebijakan manajemen risiko; 3. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; 4. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; 5. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; 6. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: a. Keakuratan metodologi penilaian risiko; b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; c. Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan batasan risiko dan ambang batas risiko 7. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan/kebijakan internal Perusahaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/ pemilik modal.	1. Developing and proposing comprehensive strategic risk management policies. 2. Implementing risk management policies. 3. Promoting a risk management culture throughout all levels of the organization. 4. Enhancing the competencies of human resources related to risk management. 5. Ensuring the Risk Management function operates independently. 6. Conducting regular reviews to ensure: a. The accuracy of risk assessment methodologies; b. The adequacy of the risk management information system implementation; c. The appropriateness of risk management policies and procedures, including the determination of risk limits and risk thresholds. 7. Carrying out other Risk Management functions in accordance with the Company's internal regulations/policies, applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/ or resolutions of the General Meeting of Shareholders/capital owners.
3.	Komite Audit Audit Committee	1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi Komite Audit; 2. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern dan audit eksternal; 3. Memastikan objektivitas dan independensi auditor internal dan auditor eksternal; 4. Memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perusahaan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit; 5. Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal; 6. Memastikan Satuan Internal Audit melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan auditor eksternal;	1. Accessing all relevant Company information related to the duties and functions of the Audit Committee. 2. Monitoring and reviewing the effectiveness of internal and external audit implementations. 3. Ensuring the objectivity and independence of internal and external auditors. 4. Ensuring the credibility and objectivity of the Company's financial statements to be published to external parties and regulators, including follow-up on complaints and/or findings of irregularities in the reports during the Audit Committee's review period. 5. Monitoring and reviewing the financial reporting process audited by external auditors. 6. Ensuring Internal Audit Unit communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, and external auditors.

No.	Pengelola Manager	Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities	
		7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Internal Audit;;	7. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding audit planning, scope, and budget of Internal Audit Unit.
		8. Mengevaluasi laporan auditor internal berkala dan merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Internal Audit;;	8. Evaluating periodic internal audit reports and recommending corrective actions to address control weaknesses, fraud, non-compliance with policies and regulations, or other issues identified and reported by Internal Audit Unit.
		9. Mengevaluasi kinerja Satuan Internal Audit;;	9. Evaluating the performance of Internal Audit.
		10. Memastikan Satuan Internal Audit; menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;	10. Ensuring that Internal Audit Unit upholds integrity in the execution of its duties.
		11. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Intern Perusahaan maupun Anak Perusahaan;	11. Monitoring and evaluating the alignment of financial policies and Internal Audit implementation within the Company and Subsidiaries.
		12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Intern Perusahaan dan Audit Intern Anak Perusahaan;	12. Providing recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effectiveness and accuracy of the financial reporting process and alignment of Internal Audit policies between the Company and Subsidiaries.
		13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan / kebijakan internal Perusahaan, ketentuan peraturan dan/atau kebijakan perusahaan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/ pemilik modal; dan	13. Monitoring and evaluating other Internal Audit functions in accordance with the Company's internal regulations/policies, applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders/capital owners.
		14. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.	14. Carrying out other authorities, duties, and responsibilities related to its function
4.	Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko;	1. Accessing all relevant Company information related to the duties and functions of the Risk Oversight Committee.
		2. Melakukan komunikasi dengan pimpinan Satuan Kerja dalam Perusahaan untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;	2. Communicating with the heads of Work Units within the Company to obtain information, clarification, and request necessary documents and reports.
		3. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap Laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait Manajemen Risiko Perusahaan dan Anak Perusahaan;	3. Monitoring and reviewing the Risk Management Report and other reports related to the Risk Management of the Company and its Subsidiaries.
		4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan dan Anak Perusahaan;	4. Monitoring and evaluating the alignment of the risk management policies and strategies of the Company and its Subsidiaries.
		5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dan Anak Perusahaan;	5. Providing recommendations to the Board of Commissioners on matters that support effective risk management and alignment of risk management policies between the Company and Subsidiaries.
		6. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan/ kebijakan internal Perusahaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan pemegang saham;	6. Monitoring and reviewing the implementation of other Risk Management functions in accordance with the Company's internal regulations/policies, applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of shareholders.
		7. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lainnya yang terkait dengan fungsinya.	7. Carrying out other authorities, duties, and responsibilities related to its function.

No.	Pengelola Manager	Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities	
5.	Direktur yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Directors who carry out the Risk Management function	1. Melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai fungsi Manajemen Risiko yang sesuai dengan ketentuan peraturan / kebijakan internal Perusahaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan pemegang saham; 2. Melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan Satuan Kerja fungsi Manajemen Risiko yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi, dan kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan; 3. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG); 4. Melaksanakan penetapan langkah yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 5. Melaksanakan pemantauan dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada pihak eksternal; 6. Melaksanakan pengembangan organisasi kerja sehingga Perusahaan memiliki kebijakan, prosedur, dan metode yang handal dalam menerapkan manajemen risiko; 7. Melaksanakan pemantauan kepatuhan dan pengawasan pada semua Satuan Kerja dengan fungsi Manajemen Risiko; 8. Membentuk Satuan Kerja dengan fungsi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi: a. Memantau pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi; b. Memantau profil risiko, peta risiko, realisasi perhitungan risiko inheren dan risiko residual dan realisasi pelaksanaan perlakuan risiko dan biaya; c. Melakukan *internal control testing* dan *stress testing*; d. Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko; e. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko; f. Memberikan rekomendasi kepada lini pertama dan/atau Komite Pemantau Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki; g. Menyusun dan menyampaikan laporan manajemen risiko kepada Direktur yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko secara berkala; dan	1. Managing the Company in accordance with the Risk Management function and in compliance with the Company's internal regulations/policies, applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or shareholder resolutions. 2. Establishing strategies and policies for Work Units responsible for Risk Management by aligning with the Company's vision, strategies, and policies. 3. Coordinating and providing direction for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. 4. Establishing necessary measures to ensure compliance with applicable laws and regulations and to prevent business operations from deviating from such regulations. 5. Monitoring and ensuring the Company's compliance with all agreements and commitments made with external parties. 6. Developing the organizational structure to ensure the Company has reliable policies, procedures, and methods in applying risk management. 7. Monitoring compliance and overseeing all Work Units with Risk Management functions. 8. Establishing a Work Unit with Risk Management functions that reports directly to the Director in charge of Risk Management, with the authority and responsibilities including: a. Monitoring the implementation of risk management strategies approved by the Board of Directors; b. Monitoring the risk profile, risk map, realization of inherent and residual risk calculations, and the implementation of risk treatment and related costs; c. Conducting internal control testing and stress testing; d. Periodically reviewing the risk management process; e. Evaluating the accuracy of models and the validity of data used for risk measurement; f. Providing recommendations to the first line and/or Risk Oversight Committee within their authority; g. Preparing and submitting risk management reports to the Risk Management Director and Risk Oversight Committee regularly;

No.	Pengelola Manager	Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities	
		h. Melaksanakan pengurusan Perusahaan di bidang Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan/kebijakan internal Perusahaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau keputusan Pemegang Saham	h. Managing the Company in the field of Risk Management in accordance with the Company's internal regulations/policies, applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or shareholder resolutions.
6.	Direktur yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Directors who carry out the Financial Management function	1. Melaksanakan pengurusan Perusahaan di bidang pengelolaan keuangan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan / kebijakan internal Perusahaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau keputusan Pemegang Saham; 2. Melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan terkait fungsi keuangan pada Satuan Kerja Perusahaan dan Anak Perusahaan, serta berkoordinasi dengan Direktur lainnya; 3. Melaksanakan penyusunan dan penetapan pengaturan terkait keuangan dengan memperhatikan kebijakan Perusahaan dan prinsip kehati-hatian; 4. Melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan; 5. Melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lainnya yang terkait dengan fungsinya.	1. Managing the Company in the area of financial management in accordance with the Company's internal regulations/policies, applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/ or shareholder resolutions. 2. Establishing financial strategies and policies for Work Units in the Company and its Subsidiaries, and coordinating with other Directors. 3. Preparing and setting financial arrangements while considering the Company's policies and prudence principles. 4. Preparing and presenting the Company's financial statements. 5. Carrying out other authorities, duties, and responsibilities related to its function.
7.	Satuan Internal Audit Internal Audit Unit	1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan dan Anak Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Internal Audit; 2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit; 3. Melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit; 4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal; 5. Memberikan konsultasi dan dukungan terkait hal yang bersifat strategis, baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional; 6. Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Satuan Internal Audit; 7. Memastikan anggota Satuan Internal Audit mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Perusahaan; 8. Melakukan penyusunan dan pengkajian piagam audit internal secara berkala; 9. Melakukan penyusunan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi Internal Audit; 10. Memastikan pelaksanaan pengawasan internal sesuai dengan rencana; 11. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat; 12. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;	1. Accessing all relevant information about the Company and its Subsidiaries related to the duties and functions of Internal Audit Unit. 2. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee. 3. Holding regular and ad-hoc meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee. 4. Coordinating activities with external auditors. 5. Providing consultation and support on strategic matters during both planning and execution of operational activities. 6. Selecting competent human resources according to the needs of Internal Audit duties. 7. Ensuring that Internal Audit members participate in continuous professional development and other training aligned with the growing complexity of the Company's business. 8. Preparing and reviewing the internal audit charter periodically. 9. Preparing the annual audit plan and allocating budgets for the internal audit function. 10. Ensuring the internal audit is conducted in accordance with the plan. 11. Reporting significant findings to the President Director and Board of Commissioners for immediate corrective action. 12. Monitoring corrective actions for significant findings

No.	Pengelola Manager	Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities	
		13. Melaporkan hasil pemantauan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris; 14. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan; 15. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 16. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas pengawasan internal: a. Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal untuk aktivitas Satuan Internal Audit, mengingat penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara; b. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Satuan Internal Audit; c. Pihak eksternal mematuhi piagam audit internal Perusahaan. 17. Memastikan bagi Satuan Internal Audit Perusahaan: a. Menentukan strategi pelaksanaan audit internal Anak Perusahaan; b. Merumuskan prinsip audit internal yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan c. Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Anak Perusahaan. 18. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan; 19. Mengikuti rapat yang bersifat strategis; 20. Memastikan pelaksanaan fungsi Internal Audit sesuai dengan standar profesional audit internal dan kode etik audit internal; dan 21. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.	13. Reporting the results of monitoring and recommendations for follow-up actions to the President Director and Board of Commissioners. 14. Maintaining the confidentiality of Company information and/or data related to internal audit duties and responsibilities, except as permitted by applicable laws and/or court decisions. 15. Maintaining the confidentiality of information obtained during tenure in accordance with applicable laws and regulations. 16. Ensuring that if external services are used for internal audit activities: a. Knowledge transfer from external experts to Internal Audit occurs, considering such use is temporary; b. Use of external parties does not compromise Internal Audit's independence and objectivity; c. External parties comply with the Company's internal audit charter. 17. Ensuring the Internal Audit Unit: a. Determines audit strategies for Subsidiaries; b. Develops internal audit principles, including audit methodology and quality control procedures; c. Monitors the internal audit implementation in each Subsidiary. 18. Evaluating the effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance processes in accordance with laws and Company policies. 19. Participating in strategic meetings. 20. Ensuring the internal audit function is performed in accordance with professional standards and the internal audit code of ethics. 21. Conducting reviews and assessments of efficiency and effectiveness in finance, operations, human resources, information technology, and other activities.

Fungsi Pelaksana Program Manajemen Risiko
Risk Management Program Implementing Function

Perusahaan membentuk Bidang Risk and Compliance sebagai pelaksana utama yang mengawal seluruh proses manajemen risiko di PLN NP. Bidang ini berkoordinasi secara luas, mulai dari unit kerja hingga Dewan Komisaris, serta bersinergi dengan Divisi Manajemen Risiko Strategis PT PLN (Persero) terkait pengambilan keputusan bisnis yang kritikal. Secara legal, fungsi ini ditetapkan melalui Peraturan Direksi Nomor 0049.P/DIR/2024 dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Risk and Compliance berperan sebagai lini kedua yang melakukan koordinasi, penyusunan metodologi, fasilitasi, reviu, validasi, pemantauan profil risiko, pelaporan risiko, serta penguatan budaya risiko. Sementara itu, kepemilikan risiko tetap berada pada masing-masing *risk owner* sebagai lini pertama, sehingga prinsip akuntabilitas risiko dan independensi fungsi pemantauan tetap terjaga.

The company established the Risk and Compliance Division as the main executor overseeing the entire risk management process at PLN NP. This division coordinates extensively, from work units to the Board of Commissioners, and synergizes with the Strategic Risk Management Division of PT PLN (Persero) regarding critical business decision-making. Legally, this function is established through the Board of Directors' Regulation Number 0049.P/DIR/2024 and is directly responsible to the Directorate of Finance and Risk Management. In carrying out its duties, the Risk and Compliance Division acts as the second line, coordinating, developing methodologies, facilitating, reviewing, validating, monitoring risk profiles, reporting risks, and strengthening the risk culture. Meanwhile, risk ownership remains with each risk owner as the first line, ensuring that the principles of risk accountability and the independence of the monitoring function are maintained.

Bagan berikut menggambarkan struktur pelaporan fungsi Risk Management and Compliance dalam pelaksanaan tugas pengelolaan risiko di PLN NP. Fungsi ini berada di bawah koordinasi Direktur yang membidangi Keuangan dan Manajemen Risiko, sebagai bagian dari mekanisme tata kelola risiko yang terintegrasi.

The following chart illustrates the reporting structure of the Risk Management and Compliance function in the implementation of risk management tasks at PLN NP. This function is under the coordination of the Director in charge of Finance and Risk Management, as part of the integrated risk governance mechanism.

Struktur Pelaporan Fungsi *Risk Management and Compliance*
Reporting Structure of the Risk Management and Compliance Function

Bidang Risk and Compliance diperkuat oleh tenaga ahli profesional yang kompeten di bidang manajemen risiko. Kualifikasi tersebut dibuktikan melalui kepemilikan berbagai sertifikasi profesi sebagai berikut:

The Risk and Compliance field is strengthened by professional experts who are competent in risk management. This qualification is proven by the possession of various professional certifications as follows:

Sertifikasi Profesi Personel Bidang *Risk Management and Compliance*
Professional Certification of Personnel in Risk Management and Compliance

Jenis Sertifikasi Profesi Type of Professional Certification	Jumlah Total
Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	3
Certified Risk Management Professional (CRMP)	3
Certified Risk Management Officer (CRMO)	1
Qualified Risk Management Analysis (QRMA)	5
Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP)	2

Sistem Informasi Manajemen Risiko
Risk Management Information System

Dalam upaya meningkatkan efektivitas manajemen risiko, Perusahaan mengimplementasikan I-CARE (*Integrated -Compliance, Risk Management, Effective and Efficient Operation*), sebuah sistem informasi berbasis aplikasi yang terintegrasi. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi seluruh unit kerja dan bidang di kantor pusat dalam mengakses, mengolah, serta mengambil data secara lebih mudah. Kehadiran I-CARE memastikan setiap keputusan strategis didukung oleh data yang akurat, konsisten, dan transparan.

In an effort to enhance risk management effectiveness, the Company is implementing I-CARE (Integrated - Compliance, Risk Management, Effective and Efficient Operation), an integrated application-based information system. This platform is designed to facilitate all the head office's work units and departments in accessing, processing, and retrieving data more easily. The I-CARE ensures that every strategic decision is supported by accurate, consistent, and transparent data.

Cakupan fitur dalam I-CARE sangat komprehensif, mulai dari penetapan ruang lingkup (*scope*), identifikasi risiko, hingga penyusunan rencana mitigasi (*Action Plan*). Selain itu, aplikasi ini mengakomodasi pencatatan *Loss Event*, survei risiko, evaluasi dan prioritas risiko (REAP), serta sistem manajemen kelangsungan bisnis. Keunggulan lain dari I-CARE adalah ketersediaan alat ukur untuk menilai efektivitas program mitigasi yang dijalankan, sehingga setiap *risk owner* dapat melakukan penyesuaian secara responsif apabila suatu program dinilai kurang optimal. Melalui pengawasan digital ini, Perusahaan memastikan pengelolaan risiko berkontribusi langsung terhadap pencapaian target organisasi secara menyeluruh, termasuk melalui integrasi data

The scope of features in I-CARE is very comprehensive, ranging from scope definition, risk identification, to the development of mitigation plans (Action Plan). Additionally, this application accommodates the recording of Loss Events, risk surveys, risk evaluation and prioritization (REAP), as well as business continuity management systems. Another advantage of I-CARE is the availability of measurement tools to assess the effectiveness of the mitigation programs implemented, enabling each risk owner to make responsive adjustments if a program is deemed less than optimal. Through this digital oversight, the Company ensures that risk management directly contributes to the overall achievement of organizational targets, including through

risiko, pemantauan *action plan* dan *Loss Event*, serta pengembangan *Early Warning System* (EWS) berbasis indikator risiko utama, *threshold*, dan *trigger*. Dengan adanya EWS, Perusahaan dapat mendeteksi potensi eksposur risiko lebih dini dan mempercepat tindak lanjut sebelum risiko menimbulkan dampak material terhadap sasaran korporat.

the integration of risk data, monitoring of action plans and Loss Events, as well as the development of an Early Warning System (EWS) based on key risk indicators, thresholds, and triggers. With the EWS, the Company can detect potential risk exposures earlier and expedite follow-up actions before risks cause material impacts on corporate objectives.

Selera Risiko Perusahaan
Company's Risk Appetite

Selera risiko (risk appetite) menjadi acuan dalam menentukan kriteria dampak yang diterjemahkan dari kapasitas risiko yang telah ditetapkan serta didistribusikan ke seluruh unit kerja dan Anak Perusahaan (AP) menggunakan pendekatan proyeksi *revenue* atau *value creation*. Selera risiko PLN NP ditentukan berdasarkan 4 postur yang selaras dengan postur KBUMN, yaitu Tidak Toleran, Konservatif, Moderat dan Strategis. Penjelasan mengenai postur risiko PLN dapat dilihat pada tabel berikut:

Risk appetite serves as a reference in determining impact criteria, which are translated from the established risk capacity and distributed to all work units and Subsidiaries (AP) using a revenue projection or value creation approach. PLN NP's risk appetite is determined based on 4 stances that align with the KBUMN posture, namely Intolerant, Conservative, Moderate, and Strategic. The explanation regarding PLN's risk posture is available in the table below:

Postur terhadap risiko
Posture to risk

Postur terhadap risiko Posture to risk	Penjelasan Explanation	
Tidak Toleran Intolerant	PLN NP sangat berhati-hati dalam mengambil risiko dan lebih memilih menjaga stabilitas dan konsistensi dalam operasi bisnis. Keputusan bisnis didasarkan pada pemeliharaan modal.	PLN NP is highly cautious in taking risks and prefers to maintain stability and consistency in its business operations. Business decisions are based on capital preservation.
Konservatif Conservative	PLN NP berhati-hati dalam mengambil risiko, dengan memilih beberapa risiko yang terkendali tetapi tetap memprioritaskan kestabilan usaha. Keputusan bisnis didasarkan pada upaya untuk melindungi nilai dari risiko besar yang tidak terduga termasuk didalamnya menghindari paparan terhadap fluktuasi pasar yang signifikan serta dapat menanggung beban yang kecil.	PLN NP exercises caution in taking risks, opting for certain controlled risks while still prioritizing business stability. Business decisions aim to protect value from significant unexpected risks, including avoiding exposure to major market fluctuations, while being able to bear only minimal impact.
Moderat Moderate	PLN NP bersedia mengambil risiko dalam batas tertentu untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan, tetapi tetap memperhatikan perlindungan terhadap kerugian besar. Keputusan bisnis mempertimbangkan peluang pertumbuhan dan dampak risiko secara bersamaan dan dapat menanggung beban yang sedang.	PLN NP is willing to take risks within defined limits to achieve growth and profitability, while still considering protection against major losses. Business decisions weigh growth opportunities alongside risk impacts and are able to tolerate moderate levels of exposure.
Strategis Strategic	PLN NP secara aktif menerapkan strategi yang melibatkan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari rencana bisnis, mengambil risiko lebih tinggi dalam rangka mencapai pertumbuhan dan inovasi yang lebih besar. Keputusan bisnis didasarkan pada analisis risiko dan potensi pengembalian investasi jangka panjang serta dapat menanggung beban yang besar.	PLN NP actively implements strategies that incorporate risk management as an integral part of its business planning, taking on higher risks to pursue greater growth and innovation. Business decisions are based on risk analysis and the potential for long-term investment returns, with the capacity to absorb significant impacts.

Demi mendukung pertumbuhan bisnis dan visi perusahaan, PLN NP menetapkan pernyataan selera risiko (risk appetite statement) tingkat korporat. Pernyataan selera risiko dirumuskan menggunakan kombinasi pendekatan top-down untuk menyerap aspirasi pimpinan serta pemangku kepentingan utama, dan pendekatan bottom-up untuk mengintegrasikan masukan dari seluruh bidang, unit, serta anak perusahaan. Pernyataan selera risiko didokumentasikan ke dalam penyusunan strategi risiko yang memastikan keterkaitan antara kapasitas risiko, toleransi risiko, *risk limit*, *risk appetite,* kriteria risiko, dan keputusan perlakuan risiko. Dengan demikian, setiap eksposur risiko dapat dipantau terhadap batas yang telah ditetapkan, sehingga potensi pelampauan limit dapat segera direspons melalui eskalasi, penguatan mitigasi, atau penyesuaian strategi. Pernyataan selera risiko didokumentasikan kedalam tabel berikut sebagai berikut:

To support business growth and the Company's vision, PLN NP establishes a corporate-level risk appetite statement. The risk appetite statement is formulated using a combination of a top-down approach to absorb the aspirations of leaders and key stakeholders, and a bottom-up approach to integrate input from all fields, units, and subsidiaries. The risk appetite statement is documented in the formulation of a risk strategy that ensures the interconnection between risk capacity, risk tolerance, risk limits, risk appetite, risk criteria, and risk treatment decisions. Thus, each risk exposure can be monitored against the established limits, allowing for immediate response to potential limit breaches through escalation, enhanced mitigation, or strategy adjustment. The risk appetite statement is documented in the following table:

Risk Appetite Statement
Risk Appetite Statement

No.	Postur Postur	*Risk Apetite Statement*	
1	Strategis Strategic	Perusahaan menetapkan selera risiko Strategis (*High Appetite*) pada aktivitas transisi energi.	The Company determines Strategic risk appetite (High Appetite) for energy transition activities.
2		Perusahaan menetapkan selera risiko Strategis (*High Appetite*) pada aktivitas *business development*.	The Company determines Strategic risk appetite (High Appetite) for business development activities.
3		Perusahaan menetapkan selera risiko Strategis (*High Appetite*) pada aktivitas *management digital*.	The Company determines Strategic risk appetite (High Appetite) for digital management activities.
4		Perusahaan menetapkan selera risiko Strategis (*High Appetite*) pada aktivitas operasional pembangkitan strategis.	The Company determines Strategic risk appetite (High Appetite) for strategic generation operations.
5	Moderat Moderate	Perusahaan menetapkan selera risiko Moderat (*Medium Appetite*) terhadap pengelolaan management human capital.	The Company determines Moderate risk appetite (Medium Appetite) for human capital management.
6	Konservatif Conservative	Perusahaan menetapkan selera risiko Konservatif (*Low Appetite*) terhadap keuangan pembangkitan.	The Company determines Conservative risk appetite (Low Appetite) for power generator finance.
7		Perusahaan menetapkan selera risiko Konservatif (*Low Appetite*) terhadap konstruksi pembangkitan.	The Company determines Conservative risk appetite (Low Appetite) for power generator construction.
8		Perusahaan menetapkan selera risiko Konservatif (*Low Appetite*) terhadap operasional pembangkitan.	The Company determines Conservative risk appetite (Low Appetite) for power generator operations.
9	Tidak Toleran Intolerant	Perusahaan menetapkan selera risiko Tidak Toleran (*Zero Appetite*) terhadap Risiko terkait Hukum, Reputasi, dan Kepatuhan.	The Company determines Intolerant risk appetite (Zero Appetite) for Legal, Reputational, and Compliance Risks.

Profil dan Mitigasi Risiko
Risk Profile and Mitigation

Identifikasi risiko di PLN NP dilakukan dengan merujuk pada sasaran strategis (*Strategic Objective*) yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan. Sasaran tersebut telah diselaraskan dengan lima pilar utama Kementerian BUMN, yakni nilai ekonomi dan sosial, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, serta pengembangan talenta. Pengelolaan Risiko utama dan *emerging risk* dilakukan secara terstruktur melalui tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, pemantauan, pelaporan, eskalasi, dan reviu. Emerging risk perlu diidentifikasi sebagai risiko yang baru muncul atau semakin relevan serta berpotensi mempengaruhi sasaran strategis Perusahaan, termasuk yang berasal dari perubahan teknologi, transisi energi, regulasi, iklim, geopolitik, keamanan siber, rantai pasok, dan model bisnis.

Risk identification at PLN NP is run by referring to the strategic objectives outlined in the Company's Long-Term Plan (RJP). These objectives have been aligned with the five main pillars of the Ministry of SOEs, namely economic and social value, business model innovation, technology leadership, investment enhancement, and talent development. The management of key risks and emerging risks is executed in a structured manner through the stages of identification, analysis, evaluation, treatment, monitoring, reporting, escalation, and review. Emerging risks need to be identified as newly arising or increasingly relevant risks with the potential to impact the Company's strategic objectives. It includes those arising from technological changes, energy transitions, regulations, climate, geopolitics, cybersecurity, supply chain, and business models.

Pada tahun 2025, telah ditetapkan 14 risiko utama (*top risk*) korporat dengan rincian penyelarasan sebagai berikut:

In 2025, the Company identified 14 corporate top risks with the following alignment details:

Profil dan Mitigasi Risiko Tahun 2025
Risk Profile and Mitigation 2025

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
1.	**Risiko :** Gangguan Peralatan Pembangkit Listrik	**Risk:** Power Plant Equipment Malfunctions
	Mitigasi : 1. Eksekusi program RKAP 2025 *Boiler*. 2. Eksekusi program RKAP 2025 Turbin. 3. Eksekusi program RKAP 2025 *Eletrical* (*generator* dan trafo). 4. Eksekusi program RKAP 2025 *Common*. 5. Pembuatan *baseline tuning boiler*. 6. *Refreshment stream* tatakelola pembangkitan. 7. Penyusunan kriteria dan *mapping gap fail safe gas* turbin. 8. Standarisasi pelaporan parameter kimia pembangkit untuk WTP (PLTD & PLTMG). 9. Pelaksanaan Forum *Engineering* Kimia Pembangkit. 10. Program PGD/FGD/*Parenting*/*workshop* untuk masing-masing unit *wave* 2. 11. Melakukan *asesment* kondisi peralatan *pretreatment* dan membuat rekomendasi untuk program penormalan *pretreatment* PLTU. 12. Melakukan asesment kondisi *online analyzer* dan membuat rekomendasi untuk program penormalan *online analyzer* PLTU. 13. *Review setting* proteksi main *equipment electrical* disesuaikan dengan standar. 14. Pengadaan *Strategic Spare*	**Mitigation :** 1. Implementation of the 2025 ABOP for Boiler Program. 2. Implementation of the 2025 ABOP for Turbine Program. 3. Implementation of the 2025 ABOP for Electricity (generator dan trafo) Program. 4. Implementation of the 2025 ABOP for Common Program. 5. Production of baseline tuning boiler. 6. Refreshment stream of generation governance. 7. Development of criteria and gap-mapping for fail-safe gas turbines. 8. Standardization of reporting on power plant chemical parameters for WTP (DPP & GEPP). 9. Implementation of the Power Plant Chemical Engineering Forum. 10. PGD/FGD/Parenting/Workshop Programs for each unit in wave 2. 11. Assess the condition of pre-treatment equipment and make recommendations for a pre-treatment normalization program at CFPP. 12. Assess the condition of the online analyzer and make recommendations for a program to restore online analyzer at CFPP. 13. Review the protection settings for the main electrical equipment to comply with standards. 14. Procurement of Strategic Spare.

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
2.	**Risiko :** Terjadinya Kecelakaan Kerja	Risk: Occupational Accidents
	Mitigasi : 1. Pelaksanaan Sertifikasi Peralatan K3. 2. *Endorsement* Program AI terkait Normalisasi FPS di Unit. 3. Berkoordinasi dengan Bid HTD untuk Pemenuhan FTK K3 di Unit Pembangkit. 4. Penyusunan dokumen *Process Hazard Analysis* (PHA). 5. *Monitoring* Penerapan Ijin Kerja, *Live Audit*, di aplikasi WPO+. 6. *Monitoring* Aktivitas Patrol dalam *Dashboard* Kinerja K3 yang di rilis mingguan oleh Bidang HSE. 7. *Monitoring* Pelaksanaan Sertifikasi Peralatan K3 Unit oleh Bidang HSE. 8. Standardisasi Kompetensi K3 (Matriks Kompetensi K3) dan jabatan penerima sesuai dengan tugasnya, dan dikirimkan ke Bidang HTD.	Mitigation: 1. Implementation of OSH Equipment Certification. 2. AI Endorsement Program regarding FPS Normalization in the Unit. 3. Coordinate with the HTD Division to Comply with FTK OSH at the Power Plant Unit. 4. Preparation of the Process Hazard Analysis document (PHA). 5. Monitoring the Implementation of Work Permits and Live Audits in the WPO+ App. 6. Monitoring of Patrol Activities in the OSH Performance Dashboard, which is released weekly by the HSE Division. 7. Monitoring of the Implementation of Unit OSH Equipment Certification by the HSE Division. 8. Standardize OSH competencies (OSH Competency Matrix) and the positions of the recipients in accordance with their duties, and submit them to the HTD Division.
3.	**Risiko :** Serangan *Cyber*	**Risk:** Cyberattack
	Mitigasi : 1. Pengadaan *Internet Security Gateway* (Program AI BID ITD 2025). 2. Memperbarui Perdir 067.K/010/DIR/2017 tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi agar menyesuaikan dengan isu dan kondisi perkembangan teknologi informasi terkini. 3. Penguatan *Security Operation Center* (SOC) untuk peningkatan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman siber. 4. Implementasi *Network* dan *Security Device unit* HSH. 5. Melakukan *maturity assesment* di seluruh Unit PLN Group. 6. Menyusun Kebijakan Penataan Klasifikasi Data yang tidak boleh dikonsumsi publik pada *Holding*, *Subholding* dan Anak.	**Mitigation :** 1. Procurement of Internet Security Gateway (AI BID ITD 2025 Program). 2. Updating Board of Directors' Regulation No. 067.K/010/DIR/2017 on Guidelines and General Policies for Information Technology Governance to align with current issues and developments in information technology. 3. Strengthening the Security Operations Centre (SOC) to improve the ability to detect and respond to cyber threats. 4. Implementation of the Network and Security Device by the HSH unit. 5. Conducting a maturity assessment across all units of the PLN Group. 6. Developing a Policy for Classifying Data that is not intended for public consumption at the Holding, Sub-holding, and Subsidiary.
4.	**Risiko :** Hambatan penyelesaian proyek-proyek	**Risk:** Obstacles to project completion
	Mitigasi : 1. Mengajukan jadwal dan *load profile* guna pelaksanaan komisioning/pengujian proyek (ROH, ROM, dan ROB) dan mengkoordinasikan kesiapan energi primer komisioning. 2. Pekerjaan di site tetap dimulai dengan terbatas pada persiapan konstruksi. 3. Supervisi proses reinstall di site untuk equipment major yang mengalami kerusakan. 4. Meminta pendampingan hukum pihak ketiga (eksternal). 5. Pemantauan kebutuhan FTK untuk proyek baru dan usulan SK Organisasi. 6. Reviu klaim oleh BPKP (Badan) untuk nilai klaim. 7. Pembuatan mekanisme pengambil alihan pekerjaan melalui mekanisme *urgent repair* untuk *pending item* dan *warranty defect item* yang bersifat kritikal. 8. *High level meeting* antara manajemen atas PLN NP dengan *stakeholder*.	Mitigation: 1. Submit schedules and load profiles for project commissioning/testing (ROH, ROM, and ROB) and coordinate the readiness of primary energy sources for commissioning. 2. Work at the site began with limited construction preparation. 3. Supervise the on-site reinstallation process for major equipment that has malfunctioned. 4. Seek legal assistance from a third party (external). 5. Monitoring FTK requirements for new projects and proposed Organizational Decrees. 6. Claim review by the BPKP (Agency) on the claim value. 7. Establishment of a mechanism for taking over work through the urgent repair mechanism for critical pending items and warranty defect items. 8. High-level meeting between PLN NP's top management and stakeholders.

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
5.	**Risiko :** Hambatan dalam Proses Pengembangan Bisnis Pembangkit	**Risk:** Obstacles in the Power Plant Business Development Process
	Mitigasi : 1. Melibatkan konsultan *legal* dalam negosiasi SHA. 2. Melibatkan konsultan *legal* dalam negosiasi PPA/PPTL. 3. Penajaman dalam kajian Pre-FS/FS dengan sensitivity analysis yang beragam. 4. Pemilihan skema pendanaan "*Corporate Financing* dan/atau *Project Financing* dan/atau *Equity Financing*". 5. Penyusunan *Longlist Strategic Partner* Melalui EoI. 6. Pelaksanaan program pengembangan bisnis pembangkit di RKAP 2025. 7. Melaksanakan *Investor Day*. 8. Memproses Aksi Korporasi untuk pendirian JVC dan Tambahan Modal Disetor yang diajukan AP (Equitas). 9. Memproses Dokumen Pendukung yang diperlukan AP dalam memperoleh Pendanaan (Porsi *Debt*). 10. Optimalisasi IPortis untuk memantau progres Bisnis Pengembangan Usaha yang dilakukan oleh AP. 11. Memproses optimasi dan penggunaan return investasi (dalam bentuk deviden) dari bisnis Pembangkitan yang dilakukan AP.	Mitigation: 1. Involve legal counsel in the SHA negotiations. 2. Involve legal counsel in the PPA/PPTL negotiations. 3. Refinement of the Pre-FS/FS study through various sensitivity analyses. 4. Selection of a financing scheme: "Corporate Financing and/or Project Financing and/or Equity Financing". 5. Preparation of the Longlist Strategic Partner via EoI. 6. Implementation of the power plant business development program in the 2025 ABOP. 7. Implementation of Investor Day. 8. Processing the Corporate Action for the establishment of JVC and Paid-in Capital proposed by Subsidiaries (Equity). 9. Processing the Supporting Documents required by Subsidiaries to obtain Financing (debt portion). 10. Optimizing IPortis to monitor the progress of Business Development conducted by Subsidiaries. 11. Processing the optimization and utilization of the return on investment (in the form of dividends) from the Generation business conducted by Subsidiaries.
6.	**Risiko :** Ketidakefisiensian unit Pembangkit	**Risk:** Inefficiency of Power Plant units
	Mitigasi : 1. Eksekusi program AI pendukung efisiensi (Pengadaan barang dan jasa pendukung efisiensi). 2. PGD *Value Creation* dan SFC. 3. Parenting dari KP untuk pendampingan dan efisiensi manajemen. 4. Program *Sootblowing Optimation* dan *Combustion Optimation*. 5. Peningkatan teknologi untuk peningkatan efisiensi (Pengadaan *Tool Mill*).	Mitigation: 1. Implementation of an AI efficiency support program (Procurement of goods and services to support efficiency). 2. PGD on Value Creation and SFC. 3. Parenting from KP for guidance and management efficiency. 4. Sootblowing Optimation and Combustion Optimation program. 5. Technological advancements to improve efficiency (Procurement of Tool Mill).
7.	**Risiko :** Perubahan Iklim dan Gangguan Alam	**Risk:** Climate Change and Natural Disasters
	Mitigasi : 1. Evaluasi pelaksanaan TMC UP Cirata, UP Bakaru, UP Brantas. 2. Pelaksanaan simulasi BCP.	**Mitigation:** 1. Evaluation of TMC implementation in Cirata GU, Bakaru GU, Brantas GU. 2. BCP simulation.
8.	**Risiko :** Hambatan dalam Implementasi Program Transisi Energi	**Risk:** Obstacles in the Implementation of Energy Transition Program
	Mitigasi : 1. Peningkatan kompetensi dalam pengembangan pembangkit EBT. 2. Penyusunan tata kelola pengembangan bisnis pembangkit. 3. Penyusunan Pre-FS/FS dengan bekerjasama dengan konsultan yang kredibel. 4. Pelaksanaan program pembangkit EBT di RKAP 2025. 5. Melibatkan konsultan dalam *monitoring* regulasi terkait TKDN guna mendapatkan nilai EPC yang kompetitif. 6. Melakukan pemantauan usulan program infrastuktur *co firing* PNP. 7. Membuat kebijakan terkait harga koefisien 1.2x HPT.	**Mitigation**: 1. Enhancing competence in the development of NRE power plants. 2. Preparation of a power plant business development governance. 3. Preparation of the Pre-FS/FS in collaboration with a reputable consultant. 4. Implementation of the NRE power plant program in the 2025 ABOP. 5. Involving consultants to monitor regulations related to TKDN in order to secure a competitive EPC value. 6. Monitoring the proposed PNP co-firing infrastructure program. 7. Establishing a policy regarding the 1.2x HPT price coefficient.

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
	8. Menunjuk konsultan terkait biaya pengadaan jasa transportasi biomassa. 9. Usulan ke PLN EPI terkait potensi pasokan biomassa di sekitar unit PLTU. 10. Melakukan *due diligence* kepemasok biomassa sebelum di kirim ke unit. 11. Meningkatkan jumlah unit yang melakukan uji coba *High Ratio Co-firing*. 12. Melibatkan konsultan dalam konsultasi implementasi *co-firing*.	8. Appointing a consultant regarding the costs of procuring biomass transportation services. 9. Proposal to PLN EPI regarding the potential for biomass supply around the CFPP unit. 10. Conducting due diligence on biomass suppliers before the biomass is shipped to the unit. 11. Increasing the number of units conducting High Ratio Co-firing tests. 12. Involving consultants in consultations regarding co-firing implementation.
9.	**Risiko :** Kesiapan Organisasi dan *Human Capital*	**Risk:** Organizational Readiness and Human Capital
	Mitigasi : 1. Melaksanakan program shifting *mindset* karyawan dari O&M *Company* menjadi *Generation Company* secara massif. 2. Mengevaluasi dan mengusulkan penguatan kapabilitas organisasi dalam mengeksekusi penugasan pengembangan pembangkit baru. 3. Menyusun dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM dalam mengeksekusi penugasan pengembangan pembangkit baru pada setiap stream (Bisnis/teknologi/*finance*/proyek). 4. Melaksanakan program kebersamaan antara manajemen dengan serikat pekerja. 5. Membentuk Tim dedicated yang melepas tanggung jawab jabatannya pada karyawan yang memiliki *grade* tertentu. 6. Menyiapkan pipeline jangka panjang untuk proyeksi pengisian jabatan kritikal. 7. *Melaksanan* program kesehatan fisik dan mental yang mandatory pada seluruh karyawan. 8. Pengembangan *dashboard* HR *Analytic*. 9. Mengidentifikasi dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan *hygiene factors* karyawan. 10. Menyediakan ruangan khusus untuk pembelajaran *online* dengan skema pembelajaran yang khusus. 11. Menyusun *strategic sourcing* melalui *workforce collaboration* dengan Anak Perusahaan.	**Mitigation:** 1. Implementing a large-scale program to shift employees' mindset from an O&M Company to a Generation Company. 2. Evaluating and proposing ways to strengthen the organization's capabilities in executing new power plant development assignments. 3. Developing and implementing a HC competency development program to execute new power plant development assignments across all streams (Business/technology/finance/project). 4. Implementing a collaboration program between management and the labor union. 5. Establishing a dedicated team that relieves employees of certain grades of their job responsibilities. 6. Developing a long-term pipeline for filling critical positions. 7. Implementing mandatory physical and mental health programs for all employees. 8. Developing an HR Analytics dashboard. 9. Identifying and striving to fulfill employees' hygiene factors. 10. Providing a special room for online learning with a specific learning program. 11. Developing strategic sourcing through workforce collaboration with Subsidiaries.
10.	**Risiko :** Hambatan dalam Pemenuhan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah	**Risk:** Challenges in the Fulfilment of Government Policies and Regulations
	Mitigasi : 1. PLN *Group* melalui Kementerian ESDM terus berupaya mengusulkan formulasi optimal agar biaya Pajak Air Permukaan (PAP) tidak mengalami kenaikan yang signifikan. 2. Memaksimalkan perdagangan internal NP serta mengusulkan anggaran Pajak Karbon ke PLN *Holding*. 3. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan (PROPER).	Mitigation: 1. The PLN Group, through the Ministry of EMR, strives to propose an optimal formula to ensure that the Surface Water Tax (PAP) does not increase significantly. 2. Maximizing internal trading within NP and proposing a Carbon Tax budget to PLN Holding. 3. Monitoring environmental management (PROPER).

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
11.	**Risiko :** Hambatan Pengembangan Bisnis *Generation Derivatives*	**Risk:** Challenges to the Generation Derivatives Business Development
	Mitigasi : 1. Integrasi *resource* PLN NP Group (unit dan NPS). 2. Optimasi biaya *costructure* (struktur biaya) dan eksekusi proyek. 3. Melakukan proses inkubasi bisnis produk inovasi sebelum di komersialisasi. 4. Memproses usulan AP terkait kebutuhan Perijinan untuk mendukung bisnis Beyond KWh. 5. Memproses usulan AP terkait pendanaan dalam pengembangan bisnis *Beyond* kWh dan memberikan bantuan pendanaan. 6. Kajian Optimasi Organisasi dan SDM AP untuk mendukung pengembangan Bisnis AP. 7. Evaluasi Proses Bisnis AP untuk *competitiveness* produk / jasa yang ditawarkan.	Mitigation: 1. PLN NP Group resource integration (unit and NPS). 2. Optimizing cost structure and project execution. 3. Conducting a business incubation process for innovative products prior to commercialization. 4. Processing Subsidiary's proposals related to licensing requirements to support the Beyond kWh business. 5. Processing Subsidiary's proposals related to funding for the development of the Beyond kWh business and providing funding assistance. 6. Study on the Optimization of Subsidiary's Organizational Structure and HC to Support its Business Development. 7. Evaluation of Subsidiary's Business Processes for the competitiveness of the products and services offered.
12.	**Risiko :** Hambatan terkait Energi Primer	**Risk:** Obstacles related to Primary Energy
	Mitigasi : 1. *Supplier gathering* semua pemasok Energi primer (Batubara). 2. Bersama PLN EPI melakukan *due diligence* untuk untuk memastikan pasokan energi primer. 3. Eksekusi program AI pendukung kehandalan CHF. 4. Mengusulkan opsi tambahan penyediaan energi primer ke penyediaan energi primer/PLN EPI. 5. Memastikan kontrak surveyor dan manajemen jetty dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan/ standar. 6. Pemenuhan material dan jasa non rutin terkait energi primer (misalnya pengadaan *valve* gas dll). 7. Perijinan terkait legalitas operasional *jetty*. 8. Pelaksanaan program *dredging* untuk unit pembangkit	**Mitigation:** 1. Supplier gathering of all Primary Energy suppliers (Coal). 2. Conducting due diligence with PLN EPI to ensure primary energy supply. 3. Implementing an AI program to support CHF reliability. 4. Proposing additional options for primary energy supply to PLN EPI. 5. Ensuring that contracts for surveyors and jetty management are executed in accordance with requirements/standards. 6. Meeting non-routine material and service related to primary energy (e.g., procurement of gas valves, etc.). 7. Permits related to the legitimacy of jetty operations. 8. Implementation of a dredging program for the power plant unit
13.	**Risiko :** Hambatan pada digitalisasi pembangkit dan proses bisnis	**Risk:** Obstacles to the digitalization of power plants and business processes
	Mitigasi : 1. Pengadaan *Internet Security Gateway* (Program AI BID ITD 2025). 2. Memperbarui Perdir 067.K/010/DIR/2017 tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi agar menyesuaikan dengan isu dan kondisi perkembangan teknologi informasi terkini. 3. Penguatan *Security Operation Center* (SOC) untuk peningkatan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman siber. 4. Implementasi *Network* dan *Security Device* unit HSH. 5. Melakukan set up EAM *wave* 2. 6. Peningkatan kompetensi melalui *training* atau *workshop*. 7. Peningkatan lisensi *firewall* dan penambahan *backup database*. 8. Penggantian server yang sudah *lifetime*. 9. Permintaan penambahan personel *engineer*. 10. Penambahan *server* backup isolir. 11. Pengembangan *Digital Power Plant*. 12. Pengembangan aplikasi pendukung digitalisasi	Mitigation: 1. Procurement of an Internet Security Gateway (AI BID ITD 2025 Program). 2. Updating Board of Directors' Regulation No. 067.K/010/DIR/2017 on Guidelines and General Policies for Information Technology Governance to align with current issues and developments in information technology. 3. Strengthening the Security Operations Centre (SOC) to enhance detection and response capabilities against cyber threats. 4. Implementation of Network and Security Device of the HSH unit. 5. Set up EAM Wave 2. 6. Enhance competencies through training or workshops. 7. Upgrade firewall licenses and add database backups. 8. Replace servers that have reached the end of their lifecycle. 9. Request for additional engineering personnel 10. Addition of an isolated backup server. 11. Development of a Digital Power Plant. 12. Development of a digitalization support application

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
14.	**Risiko :** Depresiasi Rupiah dalam Valuta Asing	**Risk:** Depreciation of the Rupiah Against Foreign Currencies
	Mitigasi : 1. Melakukan revisi atau rekomposisi anggaran. 2. Percepatan proses pencairan Komponen A.	**Mitigation:** 1. Revising or restructuring the budget. 2. Accelerating the disbursement process for Component A.

Dari hasil asesmen risiko, diperoleh peta risiko setelah dilakukan pengendaliannya (*control* eksisting) dengan residual *risk mapping* (*actual risk*) pada akhir 2025 adalah sebagai berikut:

From the risk assessment results, a risk map was obtained after implementing controls (existing control) with residual risk mapping (actual risk) at the end of 2025 as follows:

Peta Risiko
Risk Map

Tingkat Keunggulan / Possibility			1 Sangat Rendah / Very Low	2 Rendah / Low	3 Moderat / Moderate	4 Tinggi / High	5 Sangat Tinggi / Very High
	Hampir Pasti Terjadi / Almost Certain	E	[14] Low to Moderate 7	[8] [9] [10] [11] Moderate 12 [12]	[1] Moderate to High 17	High 22	[1] High 25
	Sangat Mungkin Terjadi / Highly Likely	D	[9] [14] Low 4 [11] [12]	Low to Moderate 9	[6] Moderate 14	[4] [5] Moderate to High 19	High 24
	Bisa Terjadi / Possible	C	[8] [10] Low 3	[4] [5] [6] Low to Moderate 8 [13]	[7] Moderate 13	Moderate to High 18	High 23
	Jarang Terjadi / Rare	B	[13] Low 2	[7] Low to Moderate 6	Low to Moderate 11	Moderate to High 16	[2] [3] High 21
	Sangat Jarang Terjadi / Very Rare	A	Low 1	[3] Low 5	[2] Low to Moderate 10	Moderate 15	High 20
			Tingkat Dampak / Impact Level				

Note: Sesuai PER-2/MBU/03/2023
Note: In accordance with PER-2/MBU/03/2023

Level Risiko Inherent 2025 Inherent Risk Level 2025
Level Risiko Residu TW IV 2025 Residual Risk Level Q4 2025

1	Gangguan Peralatan Pembangkit Listrik	Power Plant Equipment Malfunctions
2	Terjadinya Kecelakaan Kerja	Occupational Accidents
3	Serangan *cyber*	Cyberattack

4	Hambatan penyelesaian proyek-proyek	Obstacles to project completion
5	Hambatan dalam Proses Pengembangan Bisnis Pembangkit	Obstacles in the Power Plant Business Development Process
6	Ketidakefisienan unit Pembangkit	Inefficiency of Power Plant units
7	Perubahan Iklim dan Gangguan Alam	Climate Change and Natural Disasters
8	Hambatan dalam Implementasi Program Transisi Energi	Obstacles in the Implementation of Energy Transition Program
9	Kesiapan Organisasi dan *Human Capital*	Organizational Readiness and Human Capital
10	Hambatan dalam Pemenuhan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah	Challenges in the Fulfilment of Government Policies and Regulations
11	Hambatan Pengembangan Bisnis *Generation Derivatives*	Challenges to the Generation Derivatives Business Development
12	Hambatan terkait Energi Primer	Obstacles related to Primary Energy
13	Hambatan pada digitalisasi pembangkit dan proses bisnis	Obstacles to the digitalization of power plants and business processes
14	Depresiasi Rupiah dalam Valuta Asing	Depreciation of the Rupiah Against Foreign Currencies

Program Kerja Manajemen Risiko
Risk Management Work Program

Program kerja Manajemen Risiko PLN NP disusun sebagai implementasi kebijakan Perusahaan yang didukung oleh *roadmap* strategis dan *roadmap* peningkatan maturitas risiko. Program kerja tersebut mencakup tindak lanjut atas hasil *gap analysis Risk Maturity Index* (RMI) beserta rencana perbaikannya, penguatan kapabilitas *risk owner,* peningkatan kualitas data dan sistem informasi risiko, pemantauan efektivitas mitigasi, serta penguatan integrasi hasil *monitoring* risiko ke dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Berikut adalah realisasi program kerja penerapan manajemen risiko sepanjang tahun 2025:

The PLN NP Risk Management work program is formulated as an implementation of the Company's policy, supported by a strategic roadmap and a risk maturity improvement roadmap. The work program includes follow-up on the results of the gap analysis of the Risk Maturity Index (RMI) along with its improvement plan, strengthening the capabilities of risk owners, enhancing the quality of risk data and information systems, monitoring the effectiveness of mitigation, and strengthening the integration of risk monitoring results into the management decision-making process. The following is the realization of the risk management implementation work program throughout 2025:

Realisasi Program Kerja Manajemen Risiko
Realization of Risk Management Work Program

No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization	
1	Penyusunan Edaran Direksi Petunjuk Teknis Penyusunan Strategi Risiko Drafting of the Board of Directors' Circular on Technical Guidelines for Risk Strategy Development	Sudah disahkan Edaran Direksi Nomor 0008. PTs/DIR/2025 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Strategi Risiko PT PLN NP pada tanggal 3 Oktober 2025.	Board of Directors' Circular No. 0008.PTs/DIR/2025 regarding Technical Guidelines for the Development of PT PLN NP's Risk Strategy was ratified on October 3, 2025.

No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization	
2	Penyusunan Peraturan Direksi *Framework* Manajemen Risiko Preparation of Board of Directors' Regulations on the Risk Management Framework	Sudah disahkan Peraturan Direksi No 0010.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Pelaksana Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi pada tanggal 28 Mei 2025.	Board of Directors' Circular No. 0010.P/DIR/2025 regarding the Implementation Policy of the General Guidelines for Integrated Risk Management was ratified on May 28, 2025.
3	Kegiatan *Awareness* Manajemen Risiko kepada Bidang Kantor Pusat, Unit dan Anak Perusahaan Risk Management Awareness Activities for the Head Office, Units, and Subsidiaries	Pada tahun 2025 sudah dilakukan *knowledge* sharing/sosialisasi/*workshop* sebagai berikut: 1. Sosialiasi Manajemen Risiko Unit tahun 2025 yang dilaksanakan pada 12-13 Maret 2025 2. Penerbitan *Risk Look* atau *Strategic Risk Brief, flyer* untuk mensosialisasikan risiko terupdate yang dihadapi korporat di tahun 2025 antara lain : a. Januari dengan teman "*Deepfake* Ancaman Baru di Era Digital". b. Februari dengan tema "AS Tarik Diri dari Paris *Agreement*! Siapa yang Terdampak ?". c. Maret dengan tema "*Contingency Plan*". d. April dengan tema "Kebijakan Reciprocal *Tariffs* AS". e. Mei dengan tema "Risiko Kebakaran Pembangkit". f. Juni dengan tema " Lonjakan Kasus Covid-19, Apa yang harus kita lakukan". g. Juli dengan tema " Arsitektur Sistem Kepatuhan". h. *Strategic Risk Brief* : *Mitigation Strategies for the* 400 MW Bantaeng Gas *Turbine Project* : Edisi 21, Agustus 2025. i. *Strategic Risk Brief* Edisi 22, 10 September 2025 : Strategi Percepatan COD *Project* Prioritas P100. j. *Strategic Risk Brief* Edisi 23, 30 September 2025 : *Work Force Productivity* VS *Productios Loss*. k. *Strategic Risk* Brief Edisi 24, November 2025 : *Screening Impairment Asset* Pembangkit - *Turning Uncertainty Into Sustainable Growth*. l. *Strategic Risk Brief* Edisi 25, Desember 2025 : Membangun Ketahanan Operasional - *Lesson Learned* dari Dampak Bencana Alam Sumatera terhadap Keandalan Pembangkit PLN Nusantara Power. 3. Sosialisasi Kriteria Konkin Manajemen Risiko Unit Tahun 2025 dan Pemenuhan kriteria ISO 22301 BCMS pada 20-21 Mei 2025. 4. *Workshop* Manajemen Risiko Terintegrasi, *Risk Modelling*, i-Care pada tanggal 23-24 Juni 2025. 5. *Workshop* Pembahasan Profil Risiko Korporat 2026 PT PLN Nusantara Power 10-11 Juli 2025. 6. Pembinaan ERM Unit Pembahasan terkait Konkin ERM pada 1 Agustus 2025.	In 2025, the following knowledge-sharing/socialization/workshops was conducted: 1. Socialization of Unit Risk Management in 2025 on March 12-13, 2025 2. Publication of the Risk Look or Strategic Risk Brief, a flyer to socialize the updated risks faced by the corporation in 2025, including: a. January, with the theme "Deepfakes: A New Threat in the Digital Age". b. February, with the theme "The U.S. Withdraws from the Paris Agreement! Who Is Affected?"; c. March with the theme "Contingency Plan"; d. April with the theme "U.S. Reciprocal Tariff Policy"; e. May with the theme "Power Plant Fire Risks"; f. June with the theme "Surge in COVID-19 Cases: What should we do?" g. July, with the theme "Compliance System Architecture". h. Strategic Risk Brief: Mitigation Strategies for the 400 MW Bantaeng Gas Turbine Project: Issue 21, August 2025. i. Strategic Risk Brief Issue 22, September 10, 2025: Strategies for Accelerating the P100 Priority Project's COD. j. Strategic Risk Brief Issue 23, September 30, 2025: Workforce Productivity vs. Production Loss. k. Strategic Risk Brief Issue 24, November 2025: Power Plant Asset Impairment Screening—Turning Uncertainty into Sustainable Growth. l. Strategic Risk Brief Issue 25, December 2025: Building Operational Resilience—Lessons Learned from the Impact of the Sumatera Natural Disaster on the Reliability of PLN Nusantara Power's Power Plants. 3. Socialization of the 2025 Unit Risk Management Criteria and Compliance with ISO 22301 BCMS Criteria on May 20–21, 2025. 4. Workshop on Integrated Risk Management, Risk Modeling, and i-Care on June 23–24, 2025. 5. Workshop on the 2026 Corporate Risk Profile of PT PLN Nusantara Power on July 10–11, 2025. 6. Unit ERM Training, Discussion on Konkin ERM on August 1, 2025.

No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization	
4	Menuangkan Implementasi Manajemen Risiko dalam Kontrak Kinerja Bidang Kantor Pusat Pouring the Implementation of Risk Management in the Head Office Field Performance Contract	Sebagai upaya meningkatkan pengelolaan manajemen risiko yang terintegrasi serta peningkatan budaya dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan manajemen risiko perusahaan, maka mulai tahun 2020 telah dituangkan Implementasi Manajemen Risiko pada konkin tiap-tiap Bidang di Kantor Pusat. Pada tahun 2025 target konkin di semester 1 sebesar 82,50%, dan di semester 2 sebesar 85% dengan parameter penilaiannya konsistensi dalam melakukan *review* dan update risiko setiap bulan.	To further enhance integrated risk management and promote a culture of risk awareness across the Company, since 2020, the implementation of risk management has been incorporated into the performance contracts of all Divisions at Head Office. In 2025, the performance contract target was set at 82.50% for the first semester and 85% for the second semester, with evaluation parameters based on the consistency of monthly risk reviews and updates.
5	Penyusunan Profil Risiko Korporat tahun 2025 dan RKAP berbasis Risiko 2025 Preparation of the 2025 Corporate Risk Profile and 2025 Risk-based RKAP	Profil risiko tahun 2025 sudah disahkan pada 28 Oktober 2024 oleh seluruh direksi PLN Nusantara Power, dan telah disusun buku RKAP berbasis Risiko 2025. Saat ini *risk mitigation plan* yang sudah di identifikasi akan dilakukan *monitoring* dan *review* per triwulan.	The 2025 risk profile was approved on October 28, 2024, by the entire Board of Directors of PLN Nusantara Power and has been used as the basis for the Risk-Based 2025 Annual Budget and Operational (ABOP). Identified risk mitigation plans will be monitored and reviewed on a quarterly basis.
6	*Review* dan Validasi Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan (DMRK) Review and Validation of the Risk Management and Compliance Document (DMRK)	Sebagai implementasi pelaksanaan GRC, dalam pengambilan keputusan strategis oleh Direksi dipersyaratkan adanya Dokumen Manajemen Risiko dan Evaluasi Kepatuhan. Dokumen DMRK ini dibuat oleh pemilik proses bisnis dan direview dan divalidasi oleh Bidang Risk Management and Compliance, serta dimintakan legal opinion kepada Bidang Litigation, Permitting & Property Asset Legal. Pada TW IV 2025 telah dilakukan *review* dan validasi untuk DMRK sebagai berikut : 1. DMRK Persetujuan Permohonan Penugasan Project Y Nusantara Melalui RUPS PLN NP. 2. DMRK Persetujan Pemuktahiran Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Darat (KKPR) & Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) PLTG Maleo, Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Darat (KKPR) PLTMG Kendari Nii Tanasa dan Pelepasan Tersus PLTG Maleo untuk mendukung Project Regasifikasi PLN EPI. 3. DMRK Persetujuan Usulan Program Anggaran Investasi Pengembangan Usaha Tahun 2025 atas Proyek PLTA Kalseltengtimra (Kuota) Tersebar 200 MW. 4. DMRK Pelepasan Seluruh Kepemilikan Saham PT PLN Nusantara Power (PLN NP) di PT Prima Power Nusantara (PPN) kepada PT Iconvest (Iconvest). 5. DMRK Penugasan Jasa O&M PLTU Batubara >50 MW (ex UBJOM), dll.	As part of the Company's GRC implementation, every strategic decision made by the Board of Directors must be supported by a Risk Management and Compliance Evaluation Document (DMRK). This document is prepared by the business process owner, reviewed and validated by the Risk Management and Compliance Division, and submitted for legal opinion to the Litigation, Permitting & Property Asset Legal Division. In 2025, the following DMRK documents were reviewed and validated: 1. DMRK on Approval of the Request for Assignment of Project Y Nusantara Through the PLN NP GMS. 2. DMRK on Approval of the Update to the Land Use Conformity Plan (KKPR) & Marine Use Conformity Plan (KKPRL) for the Maleo GTPP, the Land Use Conformity Plan (KKPR) for the Kendari Nii Tanasa GEPP, and the Release of the Maleo GTPP to support the PLN EPI Regasification Project. 3. DMRK on Approval of the Proposed 2025 Business Development Investment Budget Program for the 200 MW Kalseltengtimra HPP Project (Quota). 4. DMRK on Divestment of Entire Shareholding of PT PLN Nusantara Power (PLN NP) in PT Prima Power Nusantara (PPN) to PT Iconvest (Iconvest). 5. DMRK on Assignment of O&M Services for the >50 MW Coal CFPP (formerly UBJOM), etc.

Program Pengembangan Kompetensi dan Kegiatan *Awareness* Bidang Risiko

Competency Development Program and Risk Awareness Activities

Efektivitas penerapan manajemen risiko sangat bergantung pada tingkat kepedulian, pemahaman, dan kompetensi seluruh elemen Perusahaan. Untuk mendukung pencapaian target dan peningkatan maturitas risiko, Perusahaan memprioritaskan program pengembangan kompetensi melalui *public training* dan *in-house training* yang tidak hanya meningkatkan awareness, tetapi juga memperkuat kemampuan teknis dalam pengelolaan risiko, termasuk penyusunan strategi dan pemodelan risiko, identifikasi *emerging risk*, penggunaan *Early Warning System* (EWS), pencatatan loss event, serta penyusunan evidence Risk Maturity Index (RMI). Berikut adalah daftar program pengembangan kompetensi dan peningkatan kesadaran (*awareness*) manajemen risiko yang dijalankan sepanjang tahun 2025:

The effectiveness of risk management implementation highly depends on the level of concern, understanding, and competence of all elements within the Company. To support the achievement of targets and the improvement of risk maturity, the Company prioritizes competency development programs through public training and in-house training that not only enhance awareness but also strengthen technical capabilities in risk management, including strategy formulation and risk modeling, identification of emerging risks, use of the Early Warning System (EWS), recording of loss events, and preparation of evidence for the Risk Maturity Index (RMI). The following is a list of competency development and risk management awareness programs implemented throughout 2025:

Program Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko
Risk Management Competency Development Program

No.	Program Pengembangan Development Program	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date
1	*Qualified Risk Management Analysis* (QRMA)	5 Orang people	15-18 Juli 2025 dan 24-26 November 2025 July 15-18, 2025 and November 24-26, 2025

Kegiatan *Awareness* Manajemen Risiko
Risk Management Awareness Activities

No.	Kegiatan Activity	Tanggal Date
1	Sosialisasi Kebijakan Manajemen Risiko kepada Unit. Dissemination of Risk Management Policies to Units.	12-14 Februari 2025 February 12-14, 2025
2	Sosialiasi Pemenuhan Kriteria ISO 22301 BCMS Socialization of ISO 22301 BCMS Compliance	21 Mei 2025 May 21, 2025
3	Sosialisasi Kriteria Konkin Manajemen Risiko Unit tahun 2025. Socialization of the 2025 Unit Risk Management Performance Contract Criteria.	20 Mei 2025 May 20, 2025
4	*Workshop* Manajemen Risiko Terintegrasi, *Risk Modelling*, Serta Pelatihan Penggunaan Aplikasi *I-Care* PLN Nusantara Power. Workshop on Integrated Risk Management, Risk Modeling, and Training on the Use of the I-Care Application at PLN Nusantara Power.	23-24 Juni 2025 June 23-24, 2025
5	Pembinaan Kesiapan BCMS 22301 dengan Unit BCMS 22301 Readiness Training with the Unit	23 Juli 2025 July 23, 2025
6	Pembinaan ERM Unit Pembahasan terkait Konkin ERM ERM Unit Training, Discussion Related to ERM Performance Contract	1 Agustus 2025 August 1, 2025

Evaluasi Kinerja Manajemen Risiko
Risk Management Performance Evaluation

Pada tahun 2025, dilakukan penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) untuk tahun buku 2024 dengan nilai akhir sebesar 2,85 berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai PT PLN Grup. *Assessment Maturity Level Enterprise Risk Management* (ERM) pada unit yang dikelola PLN NP dilaksanakan satu kali dalam setahun oleh asesor yang ditunjuk oleh bidang kinerja korporat, baik untuk anak perusahaan maupun unit, dan dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Penilaian RMI menggunakan skala 1 sampai dengan 5 yang mencakup aspek dimensi dan kinerja, termasuk budaya dan kapabilitas risiko, organisasi dan tata kelola, proses dan kontrol, kerangka risiko dan kepatuhan, serta model, data, dan teknologi risiko. Nilai RMI sebesar 2,85 menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah berkembang dan mendekati praktik yang baik. Berikut hasil penilaian *maturity level* yang dilakukan oleh unit-unit PLN NP:

In 2025, a Risk Maturity Index (RMI) assessment for the 2024 fiscal year was conducted, resulting in a final score of 2.85 based on the evaluation by the PT PLN Group Assessment Team. The Enterprise Risk Management (ERM) Maturity Level assessment for units managed by PLN NP is conducted once a year by an assessor appointed by the corporate performance division, both for subsidiaries and units, and is carried out at the end of 2025. The RMI assessment uses a scale of 1 to 5 that encompasses aspects of dimensions and performance, including risk culture and capability, organization and governance, processes and controls, risk and compliance framework, as well as risk models, data, and technology. An RMI score of 2.85 indicates that the implementation of risk management has developed and is close to achieving good practices. The following are the results of the maturity level assessment conducted by PLN NP units:

Hasil *Assessment Maturity Level* ERM Unit
Results of ERM Unit Maturity Level Assessment

No.	Unit	Target	Nilai Konsolidasi Consolidated Value
1	UP Indramayu Indramayu GU	100%	104,77
2	UP Pacitan Pacitan GU	100%	105,35
3	UP Paiton Paiton GU	100%	104,9
4	UP Rembang Rembang GU	100%	109,04
5	UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU	100%	109,38
6	UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU	100%	108,5
7	UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU	100%	103,18
8	UP Tenayan Tenayan GU	100%	108,51
9	UP Bukit Asam Bukit Asam GU	100%	88,83
10	UP Nagan Raya Nagan Raya GU	100%	100,7
11	UP Sebalang Sebalang GU	100%	108,85
12	UP Tarahan Tarahan GU	100%	106,61
13	UP Punagaya Punagaya GU	100%	100,12
14	UP Sambelia Sambelia GU	100%	105,61
15	UP Gresik Gresik GU	100%	110
16	UP Muara Karang Muara Karang GU	100%	104,45
17	UP Muara Tawar Muara Tawar GU	100%	107,01
18	UP Arun Arun GU	100%	103,18

No.	Unit	Target	Nilai Konsolidasi Consolidated Value
19	UP Belawan Belawan GU	100%	104,88
20	UP Pekanbaru Pekanbaru GU	100%	106,69
21	UP Kalselteng Kalselteng GU	100%	109,27
22	UP Kaltimra Kaltimra GU	100%	106,22
23	UP Kapuas Kapuas GU	100%	106,11
24	UP Gorontalo Gorontalo GU	100%	106,2
25	UP Kendari Kendari GU	100%	105,87
26	UP Sengkang Sengkang GU	100%	108,5
27	UP Brantas Brantas GU	100%	107,14
28	UP Cirata Cirata GU	100%	105,38
29	UP Bandar Lampung Bandar Lampung GU	100%	106,24
30	UP Pandan Pandan GU	100%	106,14
31	UP Bakaru Bakaru GU	100%	103,47
32	UP Minahasa Minahasa GU	100%	106,32
33	UMRO	100%	110

Direksi bersama Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko saat ini telah memadai dan terus dikembangkan melalui pengawasan atas efektivitas kebijakan, keselarasan strategi risiko dengan regulasi, serta penerapan proses manajemen risiko yang didukung sistem informasi yang memadai. Ke depan, penguatan difokuskan pada integrasi proses perencanaan, pemantauan, *Early Warning System* (EWS), *loss event*, pemodelan risiko, pengelolaan risiko utama dan *emerging risk*, serta tindak lanjut hasil *Risk Maturity Index* (RMI) guna meningkatkan peran manajemen risiko sebagai enabler pencapaian sasaran strategis, penjaga ketahanan korporat, dan pencipta nilai berkelanjutan bagi PLN NP.

The Board of Directors, together with the Board of Commissioners, assesses that the current risk management system is adequate and continues to be developed through the supervision of policy effectiveness, alignment of risk strategies with regulations, and the implementation of risk management processes supported by an adequate information system. In the future, the strengthening is focused on the integration of planning processes, monitoring, Early Warning System (EWS), loss events, risk modeling, management of key and emerging risks, as well as follow-up on the Risk Maturity Index (RMI) results to enhance the role of risk management as an enabler of achieving strategic objectives, a guardian of corporate resilience, and a creator of sustainable value for PLN NP.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Perusahaan

Company Information Disclosure Policy

Kualitas keputusan yang diambil perusahaan sangat bergantung pada bagaimana data dan informasi dikelola. Pengelolaan data yang baik akan menghasilkan informasi yang bernilai, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta memastikan pencapaian target dan perlindungan aset secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk mengelola informasi penting secara transparan dengan tetap menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan resmi mengenai pengelolaan data, informasi, dan dokumen di lingkungan Perusahaan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 152.K/010/DIR/2010 tanggal 4 Desember 2010. Kebijakan tersebut mengatur secara rinci beberapa hal, yaitu:

(1) Klasifikasi Informasi;
(2) Pengungkapan informasi meliputi prinsip dasar pengungkapan informasi, pengelola, juru bicara, dan akses terhadap pengungkapan informasi;
(3) Mekanisme pemberian informasi, baik internal dan eksternal (publik);
(4) Pengamanan Informasi meliputi tugas dan tanggung jawab keamanan informasi, pengendali dan administrasi informasi, data dan dokumen Perusahaan, tanggung jawab pihak lain atas informasi sangat rahasia dan informasi rahasia, rumor, hubungan dengan komunitas investasi dan media;
(5) Sanksi; serta
(6) Panduan teknis.

Perusahaan juga telah mengeluarkan Peraturan Direksi No.038.P/DIR/2024 tentang Pedoman Pelaksana Komunikasi Perusahaan sebagai upaya untuk mendukung efektivitas pengelolaan informasi. Selain itu, Pedoman Etika dan Perilaku turut mengatur klasifikasi informasi perusahaan, yang dikelompokkan sesuai tingkat kerahasiaan dan penggunaannya sebagai berikut:

1. Informasi Sangat Rahasia
   Informasi yang sifatnya tidak dapat diungkapkan kepada pihak manapun, kecuali kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan pihak lain yang mendapat persetujuan Direktur Utama atau kuasanya. Informasi ini hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan.

The quality of decisions made by the Company greatly depends on how data and information are managed. Good data management will generate valuable information, support accurate decision-making, and ensure the achievement of targets and the sustainable protection of assets. Therefore, the Company is committed to managing important information transparently while ensuring its confidentiality, integrity, and availability. This commitment is realized through an official policy regarding the management of data, information, and documents within the Company, as outlined in the Board of Directors' Decree Number 152.K/010/DIR/2010 dated December 4, 2010. The policy details several matters, namely:

(1) Information classification;
(2) Information disclosure, including basic disclosure principles, managers, spokespersons, and access to the conveyed information;
(3) Mechanisms for providing information for internal and external (public) purposes;
(4) Information security, covering security duties and responsibilities, control and administration of company information, data, and documents, as well as the responsibilities of related parties regarding highly confidential and confidential information, including rumors and relations with the investment community and media;
(5) Sanctions; and
(6) Technical guidelines.

The Company has also issued Board of Directors Regulation No.038.P/DIR/2024 regarding Guidelines for Corporate Communication Implementation as an effort to support the effectiveness of information management. Additionally, the Code of Conduct also regulates the classification of company information, which is grouped according to its level of confidentiality and usage as follows:

1. Highly Confidential Information
   Information that cannot be disclosed to anyone except Shareholders, the Board of Commissioners, and other parties approved by the President Director on behalf of the Board of Directors or other authorized individuals, and will be used for investigation or examination purposes in court proceedings.

2. Informasi Rahasia
   Informasi yang karena sifatnya tidak dapat diungkapkan kepada pihak internal Perusahaan yang tidak memiliki kewenangan atau kepentingan, maupun kepada publik, karena dapat merugikan kepentingan perusahaan dan pemegang saham atau melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Terbatas
   Informasi yang tidak termasuk kategori sangat rahasia atau rahasia, ditujukan untuk keperluan internal perusahaan namun tidak untuk kepentingan publik. Informasi ini dapat dibagikan oleh pejabat yang berwenang dengan jenjang Manajemen Atas atau Manajemen Menengah.
4. Informasi Biasa
   Informasi yang tidak termasuk dalam kategori sangat rahasia, rahasia, atau terbatas, dan tidak menimbulkan dampak negatif jika diungkapkan kepada publik.
5. Informasi Tidak Terklasifikasi
   Informasi lain yang sifat, isi, dan kondisinya belum dapat dikategorikan ke dalam empat klasifikasi di atas.

2. Confidential Information
   Information that, due to its nature, cannot be disclosed to internal parties of the Company who do not have authority or interest, nor to the public, because it may harm the interests of the Company and shareholders or violate laws and regulations.
3. Restricted Information
   Information that does not fall into the category of highly confidential or confidential, intended for internal company purposes, but not for public interest. This information can be shared by authorized officials at the Top Management or Middle Management.
4. General Information
   Information that does not fall into the categories of highly confidential, confidential, or restricted, which would not negatively impact the Company if disclosed to the public.
5. Unclassified Information
   Other information that, based on its nature, content, and condition, has not yet been categorized according to the four classifications above.

Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, perlindungan data menjadi hal yang sangat penting. Namun, perusahaan juga harus menegakkan prinsip transparansi sebagai wujud akuntabilitas terhadap seluruh pemangku kepentingan. Menjaga keseimbangan antara perlindungan informasi dan keterbukaan inilah yang menjadi kunci dalam membangun serta mempertahankan kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata publik.

As part of good corporate governance, data protection is highly crucial. However, the Company must also uphold the principle of transparency as a form of accountability to all stakeholders. Maintaining a balance between information protection and transparency is the key to building and maintaining the trust and reputation of the Company in the public's eyes.

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Corporate Information and Data

Perusahaan menyediakan akses informasi bagi pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, regulator, mitra bisnis, dan publik melalui kanal resmi, media sosial, dan laporan berkala, dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akurasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui kebijakan dan infrastruktur yang memadai, pengelolaan data dan informasi yang efektif ini mendukung tata kelola Perusahaan, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan memastikan keberlanjutan usaha jangka panjang.

The Company provides access to information for stakeholders, including shareholders, regulators, business partners, and the public via official channels, social media, and periodic reports, upholding the principles of transparency, accuracy, and regulatory compliance. Through adequate policies and infrastructure, effective data and information management support the Company's governance, build stakeholder trust, and ensure long-term business sustainability.

Infrastruktur teknologi informasi telah diperkuat untuk mendukung keterbukaan data, tetap dengan memperhatikan keamanan dan perlindungan informasi. Sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi mempermudah akses data yang relevan sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing fungsi, sekaligus mendukung pengambilan keputusan strategis, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh unit kerja. Akses terhadap informasi dan data di perusahaan dijalankan secara terstruktur, efektif, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

The information technology infrastructure has been strengthened to support data transparency, while still considering security and information protection. The integrated information management system facilitates access to relevant data according to the authority and responsibilities of each function, while also supporting strategic decision-making, enhancing operational efficiency, and strengthening transparency and accountability across all work units. Access to information and data in the Company is conducted in a structured, effective manner, and based on the principle of prudence.

Akses Informasi bagi Internal Perusahaan
Internal Access to Information

Data dan informasi bagi internal Perusahaan dapat diakses melalui berbagai media atau sistem yang telah ditentukan, dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan dan kendali akses. Pengelompokan informasi berdasarkan klasifikasi bertujuan menjaga kerahasiaan data strategis sekaligus memastikan efisiensi distribusi untuk mendukung operasional. Dalam implementasinya, data dan informasi yang termasuk Informasi Terbatas dan Informasi Biasa dapat diakses oleh pihak internal sesuai ketentuan. Akses ini diberikan berdasarkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak, dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan dan kendali akses, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan, diantanya melalui:

1. Intranet, Aplikasi Manajemen Surat (AMS Korporat), dan Email Serentak (*Email Blast*)
   Konten dan pembaruan Intranet serta AMS Korporat dikelola secara kolaboratif oleh Sekretaris Perusahaan, Bidang Information Technology and Digital, dan pihak terkait. Email serentak hanya memuat informasi pekerjaan atau perusahaan, serta berbagi pengetahuan manajerial, tanpa mengandung unsur SARA atau politik, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

Data and information for the internal Company can be accessed via various predetermined media or systems, while prioritizing the principles of security and access control. The classification-based grouping of information aims to maintain the confidentiality of strategic data while ensuring efficient distribution to support operations. In its implementation, data and information classified as Restricted Information and General Information can be accessed by internal parties in accordance with regulations. This access is granted based on the level of authority and responsibility of each party, while prioritizing the principles of security and access control, as regulated in the Company's Information Management Policy, including through:

1. Intranet, Corporate Correspondence Management System (Corporate AMS), and Email Blast
   The Corporate Secretary, the Information Technology and Digital Division, and related parties collaboratively manage content and updates of the Intranet and Corporate AMS. Mass emails only contain work or company information, as well as sharing managerial knowledge, without including elements of SARA or politics, and are not used for personal interests that could cause unrest within the internal or external company environment.

2. MyPower
   Aplikasi *smartphone* yang dikembangkan perusahaan memuat berbagai informasi penting, termasuk kontak seluruh karyawan dan tautan ke aplikasi korporat lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan data kepegawaian seperti gaji, absensi, perjalanan dinas, dan pelatihan, serta agenda dan publikasi korporat, sehingga memudahkan akses informasi perusahaan secara menyeluruh.

3. Komunikasi secara formal dapat melalui forum rapat harian khusus di unit (*daily meeting*), rapat mingguan (*weekly meeting*), rapat bulanan, rapat kerja, upacara bendera, pesan Direksi, dan pertemuan manajemen dengan Serikat Pekerja. Sedangkan secara informal komunikasi dilakukan melalui BoD *Talk*, Safari Ramadhan, dan kegiatan lainnya.

2. MyPower
   The smartphone application developed by the Company contains various important information, including contacts for all employees and links to other corporate applications. Additionally, this application provides employee data such as salaries, attendance, business trips, and training, as well as corporate agendas and publications, making it easier to access comprehensive company information.
3. Formal communication can take place through special daily unit meetings (daily meetings), weekly meetings, monthly meetings, work meetings, flag ceremonies, Board of Directors messages, and management meetings with the Labor Union. Meanwhile, informal communication is performed through BoD Talk, Ramadan Safari, and other activities.

Akses Informasi bagi Eksternal Perusahaan
External Access to Information

Perusahaan berkomitmen tidak hanya menyediakan informasi untuk kepentingan internal, tetapi juga memberikan akses bagi publik sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas. Informasi Biasa dapat diakses secara terbuka melalui berbagai kanal yang disediakan, sesuai standar keterbukaan dan ketentuan GCG, sehingga masyarakat memperoleh data yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui:

1. *Website*
   Perusahaan menyediakan website Perusahaan yang dapat diakses melalui situs www.plnnusantarapower.co.id dan disajikan secara bilingual yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa inggris. Informasi yang tersedia *Website* PLN NP diantaranya Tentang Kami (Visi & Misi, Budaya Perusahaan, Jejak Langkah, Komitmen Pimpinan, Struktur Grup, Struktur Organisasi, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta Proyek & Prestasi), Keberlanjutan (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola), Bisnis & Produk (MRO, O&M, EPC, Manajemen Aset dan sebagainya), Hubungan Investor (Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan, Highlight Laporan Keuangan, Profil Perusahaan dan Statistik Perusahaan), serta Pengadaan (Pendaftaran CSMS dan *E-procurement*).

The Company is committed not only to providing information for internal purposes but also to granting public access as a form of transparency and accountability. General information can be accessed openly via various available channels, in accordance with transparency standards and GCG provisions. Hence, the public can obtain accurate, reliable, and easily accessible data. That data and information can be obtained through:

1. Website
   The Company provides a corporate website that can be accessed at www.plnnusantarapower.co.id and is presented in a bilingual format, in both Bahasa Indonesia and English. Information available on the PLN NP website includes About Us (Vision & Mission, Corporate Culture, Milestones, Leadership Commitment, Group Structure, Organizational Structure, Board of Directors and Board of Commissioners, as well as Projects & Achievements), Sustainability (Environment, Social, and Governance), Business & Products (MRO, O&M, EPC, Asset Management, etc.), Investor Relations (Annual Reports, Sustainability Reports, Financial Statements, Financial Statements Highlights, Company Profile, and Company Statistics), and Procurement (CSMS Registration and E-procurement).

2. Surat elektronik (email)
   Sarana komunikasi elektronik dengan alamat email info@plnnusantarapower.co.id yang dikelola oleh Bidang Information Technology and Digital. Fungsi Komunikasi Korporasi bertugas memonitor, mengidentifikasi email yang masuk untuk selanjutnya memberikan respon yang memadai.

3. Media Elektronik Interaktif
   Perusahaan menyediakan media elektronik interaktif berupa Kiosk, LCD TV di kantor pusat & unit. Kiosk merupakan media informasi interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh tamu PLN NP untuk mengakses *company profile* dan pengumuman lelang PLN NP. Media informasi lain display LCD TV tersedia di kantor pusat & unit yang menayangkan *company profile*, informasi terbaru terkait PLN NP dalam bentuk foto dan video dan informasi lain yang perlu diketahui oleh karyawan dan tamu Perusahaan.

4. Events
   Partisipasi acara/pameran/*events* diupayakan memiliki ruang lingkup promosi, publikasi, dan cakupan kegiatan yang berskala nasional, atau acara/ pameran/ *events* kedaerahan yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah operasi, atau kegiatan atau rencana pengembangan Perusahaan dimasa depan, atau yang bersifat *career expo* sesuai dengan kebutuhan SDM PLN NP.
5. *Sponsorship* & Iklan Non-Media
   Partisipasi sponsor ataupun iklan pada kegiatan atau materi cetakan tertentu diupayakan semaksimal mungkin untuk kegiatan atau materi cetakan yang memiliki ruang lingkup promosi, publikasi dan cakupan kegiatan yang berskala nasional, atau kegiatan yang bersifat edukasi bagi banyak pihak.
6. Media Massa (cetak dan elektronik)
   Wawancara dengan media cetak atau elektronik yang melibatkan pihak internal PLN NP wajib didampingi oleh perwakilan Sekretaris Perusahaan (Kantor Pusat) atau bidang Umum dari unit terkait, seperti Unit Pembangkitan (UP), Unit Maintenance Repair and Overhaul (UMRO), Unit Pelaksana Proyek, dan unit lainnya.
7. Media Sosial
   Perusahaan juga mengelola media sosial, antara lain Facebook (plnnusantarapower), Instagram (plnnusantarapower), Twitter (ptpln_np), dan YouTube (plnnusantarapower).

2. Email
   Electronic communication facility with the email address info@plnnusantarapower.co.id managed by the Information Technology and Digital Department. The Corporate Communication function is responsible for monitoring, identifying incoming emails, and subsequently providing an adequate response.
3. Interactive Electronic Media
   The Company provides interactive electronic media in the form of Kiosks and LCD TVs at the head office and units. The Kiosk is an interactive information medium that can be utilized by PLN NP guests to access the company profile and PLN NP bidding announcements. Another information medium, the LCD TV display, is available at the head office and units, showcasing the company profile, the latest information related to PLN NP in the form of photos and videos, and other information that employees and company guests need to know.
4. Events
   Participation in events/exhibitions is aimed at having a scope of promotion, publication, and activities that are on a national scale, or regional events/ exhibitions that are closely related to the operational area, or activities or future development plans of the Company, or those that are career expos in accordance with the HR needs of PLN NP.

5. Sponsorships & Non-Media Advertisements
   The participation of sponsors or advertisements in certain activities or printed materials is maximized for activities or printed materials that have a scope of promotion, publication, and national-scale coverage, or activities that are educational for many parties.
6. Mass Media (Print and Digital)
   Interviews with print or electronic media involving internal parties of PLN NP must be accompanied by a representative from the Corporate Secretary (Head Office) or the General Affairs division of the relevant unit, such as the Generation Unit (UP), Maintenance Repair and Overhaul Unit (UMRO), Project Implementation Unit, and other units.
7. Social Media
   The Company also manages social media, including Facebook (plnnusantarapower), Instagram (plnnusantarapower), Twitter (ptpln_np), and YouTube (plnnusantarapower).

Informasi tentang Perusahaan juga dapat diperoleh melalui Sekretaris Perusahaan yang beralamat di:

Information about the Company can also be obtained through the Corporate Secretary at:

Publikasi dan Pemberitaan Perusahaan
Corporate Publications and Media Coverage

Sebagai bagian dari strategi komunikasi korporat, perusahaan melakukan pemantauan dan publikasi pemberitaan, baik melalui kanal resmi maupun media eksternal, untuk memperkuat dan menjaga citra perusahaan di mata publik. Publikasi resmi mencakup Laporan Tahunan (*Annual Report*), Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*), dan 111 press release. Sepanjang tahun 2025, media eksternal memberitakan perusahaan sebanyak 8.246 kali di media *online* dan 300 kali di media cetak.

As part of its corporate communication strategy, the Company monitors and publishes news through official channels and external media to strengthen and maintain the Company's image in the public's eyes. Official publications include the Annual Report, Sustainability Report, and 111 press releases. Throughout 2025, external media reported on the Company 8,246 times in online media and 300 times in print media.

Kebijakan Komunikasi Perusahaan dengan Pemegang Saham atau Investor
Communication Policy with Shareholders and Investors

Perusahaan telah menetapkan Pedoman Pelaksana Komunikasi melalui Peraturan Direksi No.038.P/DIR/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang mengatur ketentuan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemegang Saham dan Investor dan Peraturan Direksi Nomor 0060.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT PLN Nusantara Power. Dalam menjalankan ketentuan ini, Insan PLN NP selalu berkomitmen menjalin komunikasi yang jujur dan efektif, menjaga kerahasiaan data dan informasi, serta menyediakan informasi yang aktual,

The Company has determined the Communication Implementation Guidelines through Board of Directors' Regulation No. 038.P/DIR/2024 dated June 12, 2024, which regulates communication provisions with all stakeholders, including Shareholders and Investors, and Board of Directors' Regulation No. 0060.P/DIR/2025 on the Corporate Communication Strategic Policy and Social and Environmental Responsibility (TJSL) at PT PLN Nusantara Power. In implementing these provisions, PLN NP employees are committed to maintaining honest and effective communication, safeguarding data and information confidentiality, and providing

akurat, dan prospektif. Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan menekankan hubungan yang harmonis dan komunikatif dengan Pemegang Saham, serta menghormati hak-hak mereka secara adil. Pedoman ini juga mengatur hubungan dengan Investor, di mana Insan PLN NP berkomitmen menjaga kepercayaan investor dan memberikan peluang yang sama bagi semua calon investor.

current, accurate, and prospective information. The Company's Code of Conduct emphasizes harmonious and communicative relationships with Shareholders, as well as fairly respecting their rights. This guideline also regulates relationships with Investors, where PLN NP employees are committed to maintaining investor trust and providing equal opportunities for all prospective investors.

Pertemuan dengan *Stakeholders*
Stakeholder Engagement

Sepanjang tahun 2025, perusahaan telah mengadakan berbagai pertemuan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai bagian dari implementasi komunikasi dua arah, baik secara tatap muka maupun melalui platform virtual. Pertemuan ini merupakan upaya strategis untuk membangun kepercayaan, memperkuat hubungan, dan menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan dengan seluruh stakeholder. PLN NP juga telah menetapkan Pedoman Pelaksana Tata Kelola Stakeholder melalui Peraturan Direksi No.039.P/DIR/2024 tanggal 12 Juni 2024, sehingga perusahaan dapat menjaga sinergi yang harmonis sekaligus memperkuat reputasinya di lingkungan sosial dan bisnis.

Throughout 2025, the Company held various meetings with stakeholders as part of two-way communication, both face-to-face and via virtual platforms. These meetings are a strategic effort to build trust, strengthen relationships, and create sustainable collaboration with all stakeholders. PLN NP has also established the Guidelines for Stakeholder Governance Implementation through Board of Directors Regulation No.039. P/DIR/2024 dated June 12, 2024, so that the Company can maintain harmonious synergy while strengthening its reputation in the social and business environment.

Pertemuan dengan *Stakeholders*
Meeting with Stakeholders

Stakeholder	Jenis Pertemuan Type of Meeting	Jumlah Total
Pemegang Saham Shareholders	Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Work Meeting and Coordination Meeting	2 kali twice
	Performance Dialogue	8 kali 8 times
Karyawan Employee	BOD *Talk*	1 kali once
	Safari Ramadhan	8 kali 8 times
	Serikat Pekerja Labor Union	14 kali 14 times
	Employee Gathering	1 kali once
Pelanggan Customer	*Customer Gathering*	1 kali (Regional masing-masing) Once (Each region)
Pemerintah Government	Rapat dan Kunjungan Kerja Work Meeting and Visit	7 kali 7 times
Pemasok/Mitra Kerja Supplier/Partner	*Supplier Gathering*	1 kali (Regional masing-masing) Once (Each region)
Masyarakat Community	- Kegiatan CSR - Pelatihan Masyarakat - Forum koordinasi - CSR Activities - Community Training - Coordination Forum	Sepanjang tahun sesuai dengan kebutuhan Throughout the year if needed

Stakeholder	Jenis Pertemuan Type of Meeting	Jumlah Total
Media	*Media Gathering*	5 kali 5 times
Akademisi Academics	- Riset dan pengembangan - Konsultasi - Research and development - Consultation	Sesuai dengan kebutuhan penelitian dan pengembangan perusahaan Based on the Company's research and development needs

Perlindungan Hak-Hak Kreditur
Protection of Creditors' Rights

Pedoman Perilaku dan Etika mengatur hubungan dengan kreditur dalam ketentuan mengenai hubungan dengan investor. Insan PLN NP diwajibkan menjaga kepatuhan terhadap kewajiban kepada kreditur dengan memastikan pemenuhan persyaratan pinjaman (*covenants*) serta membangun komunikasi yang terbuka dan transparan terkait perkembangan usaha, rencana strategis, dan potensi risiko. Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen Perusahaan dalam melindungi hak-hak kreditur sebagai wujud penerapan prinsip GCG, khususnya pada aspek akuntabilitas dan tanggung jawab, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan dalam hubungan pembiayaan.

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati dan memenuhi hak-hak kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian yang berlaku, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Komitmen ini dilandasi oleh pandangan bahwa kreditur merupakan salah satu pemangku kepentingan strategis yang berperan dalam mendukung keberlangsungan usaha dan stabilitas keuangan jangka panjang. Terkait dengan hak-hak kreditur Perusahaan berupaya memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Perlindungan Hak Kreditur
   Perusahaan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam hubungan dengan kreditur. Perusahaan menghormati semua hak kreditur sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit maupun peraturan yang berlaku.
2. Transparansi dan Keterbukaan Informasi
   Perusahaan menyediakan akses terhadap informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada kreditur untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan dan penilaian risiko.

The Code of Conduct regulates relationships with creditors in the provisions regarding relationships with investors. PLN NP employees are required to maintain compliance with obligations to creditors by ensuring the fulfillment of loan covenants and establishing open and transparent communication regarding business developments, strategic plans, and potential risks. It is part of the Company's commitment to protecting creditor rights as a manifestation of the GCG principles, particularly in terms of accountability and responsibility, while also maintaining integrity and trust in financing relationships.

The Company is committed to respecting and fulfilling the rights of creditors in accordance with applicable laws and regulations, existing agreements, and the principles of good corporate governance. This commitment is based on the view that creditors are one of the strategic stakeholders who play a role in supporting business continuity and long-term financial stability. Regarding the rights of the Company's creditors, which include fulfilling several matters as follows:

1. Recognition and Protection of Creditors' Rights
   The Company upholds the principles of fairness and accountability in its relationships with creditors. It fully respects all creditor rights as stipulated in loan agreements and applicable regulations.
2. Transparency and Information Disclosure
   The Company provides access to relevant, accurate, and timely information to creditors to assist them in decision-making and risk assessment. This information includes financial statements,

Informasi tersebut mencakup laporan keuangan, informasi operasional, dan kepatuhan terhadap kewajiban finansial, atau informasi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.

3. Kepatuhan terhadap Perjanjian dan Komitmen
   Perusahaan selalu berupaya untuk memenuhi seluruh kewajiban dan ketentuan dalam perjanjian kredit, termasuk pelunasan utang tepat waktu dan pemenuhan financial covenant yang berdampak langsung kepada Perusahaan. Setiap potensi pelanggaran atau kejadian penting lainnya disampaikan kepada kreditur secara terbuka dan segera.
4. Penyelesaian Sengketa
   Perusahaan memberikan perhatian serius terhadap setiap potensi sengketa dengan kreditur dan menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum dan kontraktual.
5. Prinsip Keadilan
   Perusahaan berkomitmen untuk memperlakukan seluruh kreditur secara adil, tanpa diskriminasi, serta tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu yang dapat merugikan kreditur lainnya.

Sampai dengan tahun 2025, PLN NP tidak memiliki kreditur eksternal selain pinjaman dari pemegang saham. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Indenture *Global Bond* yang diterbitkan oleh PT PLN (Persero), yang mewajibkan PLN NP sebagai anak perusahaan untuk mematuhi pembatasan penambahan utang baru (*limitation on additional indebtedness*). Salah satu fasilitas pinjaman tersebut berasal dari PT PLN (Persero) yang diperoleh melalui perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada 20 Maret 2018 untuk mendanai proyek *add-on* PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3, dan 4, dengan jangka waktu perjanjian hingga 8 Mei 2032.

operational information, and compliance with financial obligations, or other information as regulated by laws and/or agreements.

3. Compliance with Agreements and Commitments
   The Company always strives to fulfill all obligations and provisions in the credit agreement, including timely debt repayment and compliance with financial covenants that directly impact the Company. Any potential violations or other significant events are communicated to creditors openly and promptly.
4. Dispute Resolution
   The Company treats any potential dispute with creditors seriously and provides a resolution mechanism that is fair, transparent, and aligned with legal and contractual provisions.
5. Principle of Fairness
   The Company is committed to treating all creditors fairly and without discrimination, and does not grant preferential treatment to any party that could harm the interests of other creditors.

Until the year 2025, PLN NP did not have external creditors other than loans from shareholders. This is in line with the provisions in the Global Bond Indenture issued by PT PLN (Persero), which requires PLN NP as a subsidiary to comply with the limitation on additional indebtedness. One of the loan facilities comes from PT PLN (Persero), obtained through a loan agreement signed on March 20, 2018, to fund the add-on project of Muara Tawar CCPP Blocks 2, 3, and 4, with an agreement term until May 8, 2032.

Kebijakan Pengungkapan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Policy on Disclosure of Share Ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners

Hingga akhir tahun 2025, PLN NP masih berstatus sebagai perusahaan non-publik dan tidak terdapat kepemilikan saham Perusahaan oleh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris. Dengan kondisi

Until the end of 2025, PLN NP was a non-public company, and there was no share ownership in the Company by members of the Board of Directors or the Board of Commissioners. Under these conditions, the Company

ini, Perusahaan belum memiliki dan menerapkan kebijakan pengungkapan informasi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik terkait kepemilikan baru maupun perubahan kepemilikan, sebagaimana biasanya diwajibkan untuk dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan.

had not yet established or implemented a policy for disclosing information on the Board of Directors' and Board of Commissioners' share ownership, whether related to new ownership or changes in ownership, as is usually required to be conducted no later than 3 (three) working days after the change occurs.

Meskipun demikian, anggota Direksi dan Dewan Komisaris tetap menjalankan praktik tata kelola yang transparan melalui penyusunan Daftar Khusus secara berkala setiap tahun yang telah diungkapkan dalam uraian Direksi dan Dewan Komisaris pada bab *Good Corporate Governance* (GCG) dalam buku Laporan Tahunan ini. Daftar ini mencatat kepemilikan saham pribadi maupun keluarga, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, sebagai bentuk akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik.

Nevertheless, the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners continue to practice transparent governance by periodically preparing a Special Register, which has been disclosed in the description of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the Good Corporate Governance (GCG) chapter of this Annual Report. This list records personal and family share ownership, in accordance with the provisions outlined in the Company's Articles of Association, as a form of accountability and compliance with good governance principles.

Kebijakan Terkait *Insider Trading*
Policy on Insider Trading

Sepanjang tahun 2025, PLN NP tidak menerima pengaduan terkait dugaan penyebaran informasi non-publik untuk kepentingan pihak tertentu. Seluruh Insan PLN NP diwajibkan untuk tidak melakukan praktik penjualan informasi perusahaan (*insider trading*), sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku dan Etika yang menegaskan bahwa praktik ini tidak ditolerir dan akan dikenai tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Throughout 2025, PLN NP did not receive any complaints regarding the alleged dissemination of non-public information for the benefit of certain parties. All PLN NP employees are required not to engage in the practice of selling company information (insider trading), in accordance with the provisions of the Code of Conduct, which states that this practice is not tolerated and will be subject to legal action in accordance with applicable regulations.

Selama tiga tahun terakhir, tidak terdapat kasus perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang melibatkan Direksi, Komisaris, manajemen, maupun karyawan. Hingga akhir tahun 2025, PLN NP masih berstatus sebagai subholding dalam grup PLN dan belum merupakan Perusahaan Terbuka, dengan mayoritas saham dimiliki oleh PT PLN (Persero). Oleh karena itu, Perusahaan belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur secara rinci larangan perdagangan saham oleh pihak internal sebagaimana yang lazim diterapkan pada Perusahaan Terbuka.

In the past three years, there have been no insider trading cases involving the Board of Directors, Commissioners, management, or employees. Until the end of 2025, PLN NP remained a subholding within the PLN group and was not yet a Public Company, with the majority of its shares owned by PT PLN (Persero). Therefore, the Company does not yet have a specific policy that outlines the prohibition of stock trading by internal parties, as is commonly applied to Public Companies.

Kode Etik Perusahaan
Code of Conduct

Perusahaan menjaga lingkungan kerja yang menjunjung tinggi etika melalui penerapan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas. Seluruh insan PLN Nusantara Power diharapkan menjadikan etika sebagai landasan dalam bersikap dan mengambil keputusan, sehingga tercipta budaya kerja yang sehat, transparan, dan berkelanjutan serta hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan. Sebagai pedoman perilaku, Perusahaan menetapkan Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) yang menjadi standar bagi seluruh insan Perusahaan dalam bertindak sekaligus acuan untuk menilai kepatuhan terhadap nilai-nilai etika.

The Company maintains a work environment that upholds ethics through the application of integrity, professionalism, and responsibility in every activity. All PLN Nusantara Power employees are expected to make ethics the basis for their attitudes and decision-making, thereby creating a sound, transparent, and sustainable work culture as well as harmonious relationships with stakeholders. As a code of conduct, the Company establishes the Code of Conduct, which serves as a standard for all Company employees in their actions and as a reference for assessing compliance with ethical values.

Pedoman ini telah disahkan melalui penandatanganan bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Desember 2024. Untuk memperkuat komitmen penerapannya, halaman komitmen telah diperbarui dan ditandatangani kembali oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 15 Januari 2026. Pedoman tersebut juga dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan bisnis, lingkungan, dan sosial Perusahaan.

This guideline was ratified through a joint signing by the Board of Commissioners and Board of Directors in December 2024. To reinforce the commitment to its implementation, the commitment page was updated and re-signed by the Board of Commissioners and Board of Directors on January 15, 2026. The guidelines are also periodically evaluated to remain relevant to the Company's business, environmental, and social developments.

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Perusahaan telah mengimplementasikan nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai Budaya Perusahaan (*Core Values*). Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga diterapkan dalam setiap aspek operasional dan keseharian insan Perusahaan. Nilai-nilai AKHLAK merupakan "*the way we do things around here*" sebagai cerminan atas nilai, sikap, dan norma yang membentuk karakter serta perilaku setiap individu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 047.P/019/DIR/2020 tentang Budaya Perusahaan. Nilai tersebut menjadi identitas korporasi yang membedakan PLN Nusantara Power di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang. Melalui penerapan AKHLAK, Perusahaan membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan kolaboratif untuk meningkatkan daya saing serta memberikan nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

The Company has implemented the AKHLAK values (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) as the Company Culture (Core Values). These values not only serve as behavioral guidelines but are also applied in every operational aspect and daily life of the Company's employees. The AKHLAK values, "the way we do things around here," are a reflection of the values, attitudes, and norms that shape the character and behavior of each individual, as established by Board of Directors Regulation No. 047.P/019/DIR/2020 on Corporate Culture. These values become the corporate identity that distinguishes PLN Nusantara Power amidst the ever-evolving business dynamics. Following the implementation of AKHLAK, the Company builds a work culture that is integral, professional, and collaborative to improve competitiveness and provide sustainable value for stakeholders.

AKHLAK

A Amanah
Trustworthy

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Upholding the trust given

Panduan Perilaku
1. Memenuhi janji dan komitmen.
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

1. Fulfilling promises and commitments.
2. Taking responsibility for tasks, decisions, and actions undertaken.
3. Upholding moral and ethical values.

K Kompeten
Competent

Terus belajar mengembangkan kapabilitas.
Continuing to learn and develop capabilities

Panduan Perilaku
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

1. Continuously improving personal competence to respond to ever-changing challenges.
2. Helping others to learn.
3. Completing tasks with the highest quality.

H Harmonis
Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Caring for each other and respecting differences

Panduan Perilaku
1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

1. Respecting everyone regardless of their background.
2. Willingly helping others.
3. Creating a conducive work environment.

L Loyal
Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Dedicated and prioritizing the interest of the nation and state

Panduan Perilaku
1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

1. Upholding the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the Nation.
2. Willing to make sacrifices to achieve greater goals.
3. Obeying superiors as long as it does not conflict with laws and ethics.

A Adaptif
Adaptive

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan.
Keep innovating and being enthusiastic in driving or facing changes

Panduan Perilaku
1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
3. Bertindak proaktif.

1. Quickly adapting to become better.
2. Continuously making improvements in line with technological developments.
3. Acting proactively.

K Kolaboratif
Collaborative

Membangun kerja sama yang sinergis.
Building Synergistic Cooperation

Panduan Perilaku
1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

1. Providing opportunities for various parties to contribute.
2. Being open to collaboration in creating added value.
3. Mobilizing the use of various resources for shared goals.

Internalisasi Budaya Perusahaan
Internalization of Corporate Culture

Perusahaan secara konsisten melakukan internalisasi Budaya Perusahaan guna memastikan nilai-nilai yang dianut tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan dalam perilaku kerja sehari-hari. Proses ini dilakukan melalui berbagai program komunikasi, sosialisasi, dan penguatan nilai yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi, sehingga setiap insan Perusahaan memiliki pemahaman yang selaras terhadap nilai dan prinsip yang menjadi pedoman bersama. Internalisasi budaya juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, kampanye budaya, forum komunikasi, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia, termasuk proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja. Dengan pendekatan tersebut, nilai-nilai Budaya Perusahaan diharapkan dapat tertanam kuat dalam pola pikir dan perilaku kerja seluruh insan Perusahaan.

The Company consistently internalizes Corporate Culture to ensure that the values embraced are not only understood but also applied in daily work behavior. This process is performed through various communication, socialization, and value reinforcement programs integrated into organizational activities; thus, every employee of the Company has a coherent understanding of the values and principles that serve as a common guideline. Cultural internalization is also actualized through various activities such as training, cultural campaigns, communication forums, and the integration of cultural values into the human resource management system, including recruitment processes, competency development, and performance evaluation. With this approach, the values of the Corporate Culture are expected to be deeply ingrained in the mindset and conduct of all Company employees.

Aspek Penguatan Budaya
Culture Strengthening Aspect

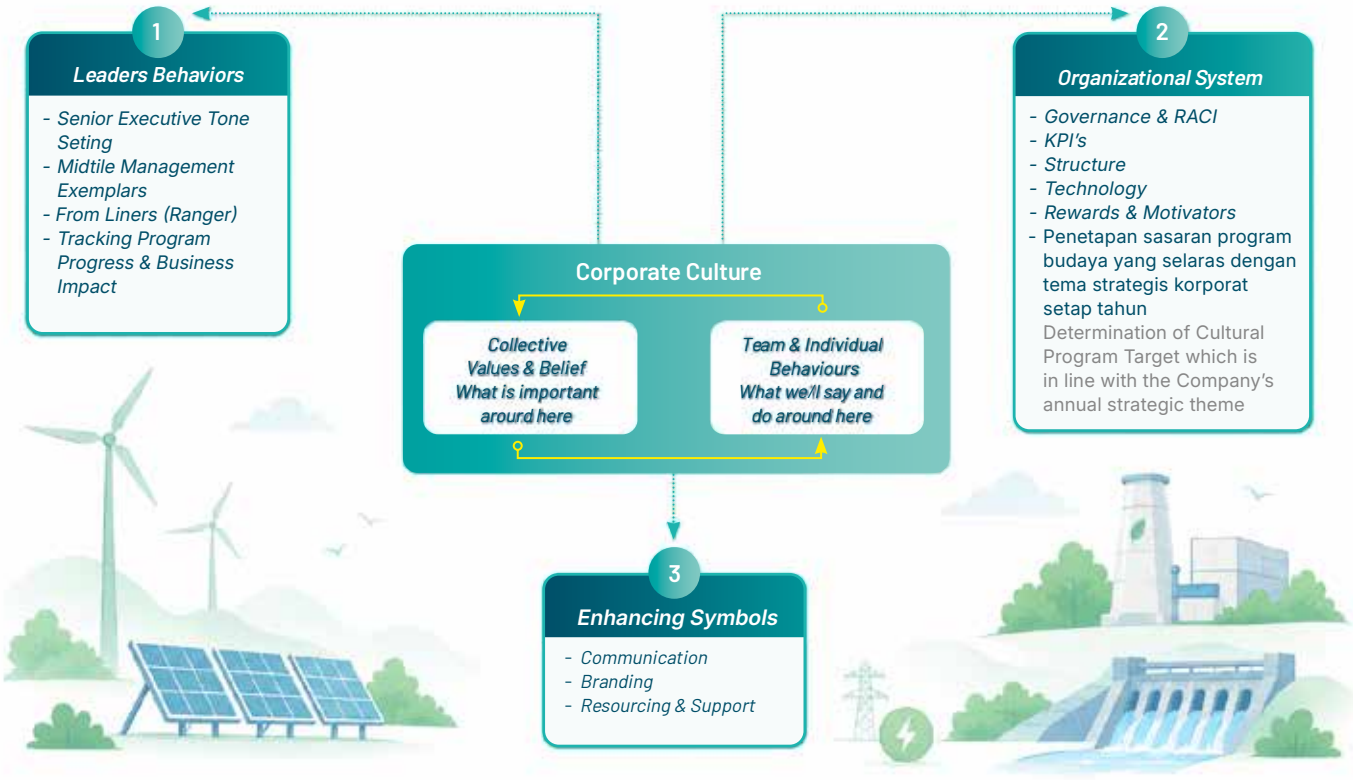

PLN Nusantara Power terus memperkuat pelaksanaan Program Budaya sebagai bagian dari komitmen untuk membangun dan mempercepat terwujudnya budaya Perusahaan yang selaras dengan nilai-nilai AKHLAK. Upaya ini dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami sebagai prinsip normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam pola pikir, sikap, dan perilaku kerja seluruh insan Perusahaan. Penguatan Program Budaya juga diarahkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai AKHLAK terintegrasi dalam berbagai proses bisnis dan pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari komunikasi internal, pengembangan kompetensi, hingga penguatan kepemimpinan dan kolaborasi di lingkungan kerja. Program penguatan budaya tahun 2025 masih berfokus pada proses Transformasi 2.0 PT PLN (Persero) Moonshot dan 4 (empat) Sasaran Program Budaya sebagai berikut:

1. Budaya *Safety* (Nol Kecelakaan Kerja)
2. Penghapusan Kemubadziran (Efektivitas/ Efisiensi RKAP)
3. *Wellbeing*
4. *Beyond* kWh *Revenue*

PLN Nusantara Power continues to strengthen the implementation of the Cultural Program as part of its commitment to build and accelerate the realization of a Company culture that aligns with AKHLAK values. These efforts are executed in a planned and sustainable manner so that these values are not only understood as normative principles but are truly implemented in the mindset, attitudes, and work behaviors of all Company employees. Additionally, the strengthening of the Cultural Program is aimed at ensuring that AKHLAK values are integrated into various business processes and human resource management, ranging from internal communication, competency development, to strengthening leadership and collaboration in the workplace. The cultural reinforcement program in 2025 still focused on the Transformation 2.0 process of PT PLN (Persero) Moonshot and the 4 (four) Cultural Program Targets as follows:

1. Safety Culture (Zero Work Accident)
2. Waste Elimination (ABOP Effectiveness/Efficiency)
3. Wellbeing
4. Beyond kWh Revenue

Pokok Muatan Kode Etik Perusahaan
Key Elements of the Company Code of Conduct

Pedoman Perilaku dan Etika merupakan standar perilaku bagi seluruh insan Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan aktivitas kerja lainnya. Pedoman ini memuat prinsip etika bisnis, komitmen terhadap integritas, serta kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan yang berlaku.

Berbagai kebijakan penting, seperti pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, serta pencegahan kecurangan (*anti fraud*), termasuk ketentuan terkait keterlibatan dalam kegiatan politik juga terangkum dalam Pedoman Perilaku dan Etika. Pokok muatan dalam Pedoman Perilaku dan Etika meliputi:

The Code of Conduct serves as a behavioral standard for all Company employees in conducting business activities and other work-related tasks. This guideline contains principles of business ethics, a commitment to integrity, and compliance with applicable Company regulations.

Various important policies, such as anti-money laundering and counter-terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, and anti-fraud measures, including provisions related to involvement in political activities, are also included in the Code of Conduct. The main contents include:

Pokok Muatan Pedoman Perilaku dan Etika
Main Content of the Code of Conduct and Ethics

Komitmen Penandatanganan Komitmen Direksi dan Komitmen Dewan Komisaris serta pengesahan atas Pedoman Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*).	**Commitment** The signing of the Commitment by the Board of Directors and the Commitment by the Board of Commissioners, along with the ratification of the Code of Conduct.
Pendahuluan Memuat Istilah yang Digunakan, Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct* / COC), Budaya Perusahaan dan Referensi.	**Introduction** Includes definitions of key terms, the Code of Conduct (COC), the Corporate Culture, and references.
Benturan Kepentingan Standar prilaku yang harus dilakukan Insan PLN NP dalam pencegahan Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan.	**Conflict of Interest** Standards of conduct that must be followed by all PLN NP personnel to prevent conflicts of interest within the Company.
Gratifikasi Perilaku yang harus ditaati oleh seluruh Insan PLN NP mengenai gratifikasi.	**Gratification** Behavioral guidelines that must be observed by all PLN NP personnel in relation to gratification.
Anti Suap dan Korupsi Seluruh Insan PLN NP bersama Stakeholder PLN NP dalam menerapkan SMAP mempunyai komitmen memegang teguh prinsip 4 NO's.	**Anti-Bribery and Corruption** All PLN NP personnel, together with PLN NP stakeholders, are committed to upholding the principles of the Anti-Bribery Management System (SMAP) based on the "4 NO's" principle.
Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Insan PLN NP berperan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap *Fraud* dan/atau pelanggaran termasuk menyampaikan pengaduan apabila terdapat indikasi adanya *Fraud* dan/atau pelanggaran melalui sarana pengaduan yang disediakan.	**Whistleblowing System** PLN NP personnel are expected to actively participate in the prevention of fraud and/or violations, including reporting any indication of fraud and/or misconduct through the available whistleblowing channels.
Kepedulian Terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan Memuat apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja mecakup Perilaku Insan PLN NP, Aspek K3, Aspek Keamanan dan Aspek Lingkungan.	**Occupational Health, Safety, Security, and Environmental Awareness** Outlines the dos and don'ts related to occupational health and safety, covering employee behavior, OHS aspects, security, and environmental considerations.
Etika Bekerja Insan PLN NP Komitmen Insan PLN NP terhadap Pengembangan Diri; Kemajuan dan Perkembangan Perusahaan; Anti Diskriminasi; Etika Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); Tanggung Jawab Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); Pelaksanaan Pelaporan; *Whistleblowing System*; Masyarakat dan Lingkungan (TJSL).	**Work Ethics of PLN NP Personnel** Covers PLN NP personnel's commitment to personal development, corporate progress and growth, anti-discrimination, ethical conduct in the procurement of goods and services, asset disclosure obligations (LHKPN), reporting mechanisms, whistleblowing system, and social and environmental responsibility (TJSL).
Integritas Proses dan Data Pelaporan Keuangan Memuat standar perilaku Insan PLN NP terkait Integritas dan Pelaporan Keuangan.	**Integrity in Financial Reporting Processes and Data** Contains standards of conduct for PLN NP personnel related to integrity and financial reporting.
Perlindungan Informasi, HAKI dan Penggunaan Media Sosial Standar perilaku yang harus ditaati Insan PLN NP terkait Perlindungan Informasi, HAKI dan Penggunaan Media Sosial; Perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset*; Informasi Orang Dalam; Hak atas Kekayaan Intelektual; Peraturan Penggunaan Media Sosial.	**Information Protection, Intellectual Property Rights, and Social Media Use** Behavioral standards that must be observed by PLN NP personnel regarding information protection, intellectual property rights, and social media use; including protection of Company information and intangible assets, insider information, intellectual property rights, and social media regulations.
Perlindungan Aset Perseroan Memuat standar perilaku yang sebaiknya dilakukan sebagai Insan PLN NP untuk menjaga integritas dalam perlindungan Aset Perusahaan.	**Protection of Company Assets** Outlines expected standards of conduct for PLN NP personnel in maintaining integrity when protecting Company assets.
Perlindungan Hak-Hak Kreditur Memuat standar perilaku mengenai hak-hak kreditur sebagai salah satu pemangku kepentingan penting yang berperan dalam mendukung keberlangsungan usaha dan stabilitas keuangan jangka panjang.	**Protection of Creditor Rights** Contains behavioral standards regarding creditors' rights as one of the important stakeholders who play a role in supporting business continuity and long-term financial stability.

Kegiatan Politik dan Sosial Perusahaan Memuat standar perilaku terkait Panduan Berpolitik bagi Insan PLN NP dan Kegiatan Sosial Perusahaan.	**Company's Political and Social Activities** Describes behavioral standards regarding political guidance for PLN NP personnel and the Company's social activities.
Hubungan dengan *Stakeholder* Standar perilaku yang sebaiknya dilakukan sebagai Insan PLN NP terkait Kepemimpinan; serta hubungan dengan Pelanggan, Mitra Kerja/Pemasok, Perusahaan Pesaing, Investor, Pemerintah/DPR, Masyarakat, Media Massa, Organisasi Profesi/Institusi Pendidikan, Penegak Hukum, sesama Insan PLN, Pemegang Saham, LSM dan Ormas, Auditor Eksternal, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Terafiliasi	**Relationships with Stakeholders** Standards of conduct expected of PLN NP personnel in relation to leadership and interactions with customers, partners/suppliers, competitors, investors, government/legislators, the public, the media, professional organizations/educational institutions, law enforcement, fellow PLN personnel, shareholders, NGOs and mass organizations, external auditors, subsidiaries, associate companies, and affiliates.
Mekanisme Penegakan Pedoman Perilaku dan Etika Penerapan Budaya Perusahaan, Pedoman Perilaku dan Etika menjadi tanggung jawab Insan PLN NP, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan Perusahaan.	**Enforcement Mechanism of the Code of Conduct** The implementation of the Corporate Culture and Code of Conduct is the responsibility of all PLN NP personnel, including the Board of Commissioners and Board of Directors within the Company.
Pelanggaran dan Sanksi Insan PLN NP yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Budaya Perusahaan, Pedoman Perilaku dan Etika akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang belaku di Perusahaan. Jenis dan mekanisme pemberian sanksi mengacu ketentuan yang berlaku di Perusahaan.	**Violations and Sanctions** PLN NP personnel found to have violated the Corporate Culture or Code of Conduct shall be subject to sanctions in accordance with the applicable Company regulations. The types of sanctions and their enforcement mechanisms refer to the prevailing rules within the Company.
Pelaporan dan Sistem Pelaporan Pelaporan terhadap pelanggaran Budaya Perusahaan serta Pedoman Perilaku dan Etika dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS).	**Reporting and Reporting System** Reporting violations of Company Culture and the Code of Conduct is carried out through the Whistleblowing System (WBS).

Pemberlakuan Kode Etik Perusahaan Bagi Seluruh Level Organisasi
Enforcement of the Company's Code of Conduct Across All Organizational Levels

Sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan, Pedoman Perilaku dan Etika dijadikan salah satu target kinerja unit dalam aspek OCR. Setiap insan PLN Nusantara Power diwajibkan menjalankan Budaya Perusahaan, memahami kebijakan yang berlaku, menjunjung tinggi integritas, menghindari pelanggaran, serta berani melaporkan setiap isu yang berkaitan dengan nilai dan etika Perusahaan.

As part of the effort to build a healthy, integrity-driven, and sustainable work environment, the Code of Conduct has been set as one of the performance targets for units in the OCR aspect. Every individual at PLN Nusantara Power is required to uphold the Company Culture, understand the applicable policies, maintain integrity, avoid violations, and courageously report any issues related to the Company's values and ethics.

Penerapan pedoman ini diperkuat melalui Pernyataan Kepatuhan yang harus ditandatangani setiap tahun oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan, baik tetap maupun kontrak. Pemberlakuan resmi Pedoman Perilaku dan Etika ditetapkan melalui penandatanganan bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris, menandai komitmen seluruh jajaran dalam menjadikan pedoman ini sebagai landasan perilaku dan pengendalian terhadap potensi penyimpangan.

The implementation of these guidelines is reinforced through a Statement of Compliance, which must be signed annually by the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees, both permanent and contract. The official enactment of the Code of Conduct is established through a joint signing by the Board of Directors and Board of Commissioners, emphasizing the commitment of all levels to make these guidelines the basis for behavior and control against potential deviations.

Sosialisasi Kode Etik Perusahaan
Dissemination of the Company's Code of Conduct

PLN Nusantara Power aktif melakukan sosialisasi Budaya Perusahaan dan Pedoman Perilaku dan Etika untuk memastikan seluruh insan Perusahaan, serta pihak eksternal terkait, memahami dan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Perusahaan berkomitmen melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan efektif melalui beberapa langkah berikut:

1. Menyelenggarakan sosialisasi Budaya Perusahaan dan Pedoman Perilaku dan Etika bagi seluruh insan PLN Nusantara Power maupun pihak eksternal, dengan penyegaran secara berkala untuk memastikan pemahaman tetap terjaga.
2. Memastikan setiap insan PLN Nusantara Power dapat mengakses informasi Budaya Perusahaan melalui aplikasi web Komando di https://budaya.pln.co.id/.
3. Melakukan evaluasi terhadap pemahaman dan penerapan Budaya Perusahaan serta Pedoman Perilaku dan Etika, baik pada masa orientasi maupun selama masa kerja, untuk memastikan nilai-nilai perusahaan dijalankan secara konsisten.
4. Mengkaji secara berkala Budaya Perusahaan dan Pedoman Perilaku dan Etika, serta mengembangkannya sesuai kebutuhan, termasuk jika diperlukan untuk dijabarkan lebih rinci dalam kebijakan dan peraturan Perusahaan.

PLN Nusantara Power actively conducts socialization of the Corporate Culture and Code of Conduct to ensure that all Company employees, as well as related external parties, understand and apply it in their daily activities. The Company is committed to conducting a comprehensive and effective socialization through the following steps:

1. Organizing the socialization of Corporate Culture and Code of Conduct for all PLN Nusantara Power employees and external parties, with periodic updates to ensure understanding is maintained.
2. Ensuring that every individual at PLN Nusantara Power can access the Company Culture information via the Komando web application at https://budaya.pln.co.id/.
3. Conduct evaluations of the understanding and implementation of Corporate Culture and the Code of Conduct, both during the orientation period and throughout the employment period, to ensure that the Company's values are upheld consistently.
4. Periodically reviewing the Corporate Culture and Code of Conduct, and developing them as needed, including, if necessary, to be detailed further in the Company's policies and regulations.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Perusahaan
Sanctions for Violations of the Company's Code of Conduct

Sanksi disiplin terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dan Etika diberikan secara berjenjang, menyesuaikan tingkat pelanggaran dengan tindakan korektif yang tepat. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai etika, memberikan efek jera, memperkuat budaya kepatuhan, serta memitigasi risiko fraud yang berpotensi memengaruhi kinerja operasional dan reputasi Perusahaan. PLN Nusantara Power menegakkan Kode Etik Perusahaan melalui mekanisme disiplin internal sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang berlandaskan

Disciplinary sanctions for violations of the Code of Conduct are imposed in stages, adjusting the level of violation with appropriate corrective actions. The implementation of these sanctions aims to uphold ethical values, provide a deterrent effect, strengthen a culture of compliance, and mitigate the risk of fraud that could potentially impact the Company's operational performance and reputation. PLN Nusantara Power enforces its Code of Conduct through internal disciplinary mechanisms as part of efforts to build a work culture based on integrity, professionalism,

integritas, profesionalisme, dan kepatuhan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dan Etika dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 0009.P/019/DIR/2021 tentang Peraturan Disiplin Karyawan. Adapun pengelompokan sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dan Etika adalah sebagai berikut:

and compliance. Any form of violation of the Code of Conduct is subject to sanctions in accordance with the provisions outlined in the Board of Directors Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 0009.P/019/DIR/2021 concerning Employee Discipline Regulations. The classification of sanctions for violations of the Code of Conduct is as follows:

Sanksi Disiplin Pedoman Perilaku dan Etika
Disciplinary Sanctions Code of Conduct and Ethics

Jenis Hukuman Type of Punishment	Sanksi Sanction		
	Pokok Main		Tambahan Additional
Disiplin Ringan Light Discipline	1. Peringatan tertulis yang berlaku selama 3 (tiga) bulan; atau 2. Peringatan tertulis yang berlaku selama 6 (enam) bulan.	1. Written warning valid for 3 (three) months; or 2. Written warning valid for 6 (six) months.	-
Disiplin Sedang Medium Discipline	1. Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian (PPS). 2. Peringatan tertulis 2 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan: a. Pemotongan Tunjangan Posisi (P2) sebesar 75%; dan b. Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian (PPS). 3. Peringatan tertulis 2 terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP). 4. Peringatan tertulis 3 terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP). 5. Peringatan tertulis 1 terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan: a. Pemotongan Tunjangan Posisi (P2) sebesar 100%; b. Kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP); dan c. Penurunan 1 *grade*.	1. Written warning 1 valid for 6 (six) months with Talent Criteria Needs Adjustment (PPS). 2. Written warning 2 valid for 6 (six) months with: a. Deduction of Position Allowance (P2) by 75%; and b. Talent Criteria Needs Adjustment (PPS). 3. The last 2 written warnings valid for 6 (six) months with Talent Criteria Really Needs Adjustment (SPP). 4. The last 3 written warnings valid for 6 (six) months with Talent Criteria Really Needs Adjustment (SPP). 5. The last 1 written warning valid for 6 (six) months with: a. Deduction of Position Allowance (P2) by 100%; b. Talent Criteria Really Needs Adjustment (SPP); and c. Decrease of 1 grade.	1. Demosi 2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1. Demotion 2. Claims for Compensation (TGR)
Disiplin Berat Heavy Discipline	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Termination of Employment (PHK)	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Claim for Compensation (TGR)

Penegakan Kode Etik Perusahaan
Enforcement of the Company's Code of Conduct

Setiap insan PLN Nusantara Power memiliki peran penting dalam menerapkan Budaya Perusahaan dan Pedoman Perilaku dan Etika. Pihak-pihak yang wajib mematuhi antara lain Dewan Komisaris beserta perangkatnya, Direksi, seluruh karyawan termasuk Karyawan Tugas Karya, karyawan yang ditempatkan di anak perusahaan atau perusahaan afiliasi, wakil Perusahaan yang ditugaskan sebagai Direksi atau Komisaris di anak perusahaan atau perusahaan asosiasi, karyawan PKWT, tenaga kerja alih daya, siswa *On the Job Training* atau calon karyawan, serta mitra usaha. Setiap pihak diwajibkan segera melaporkan potensi atau tindakan pelanggaran terhadap Budaya Perusahaan, Pedoman Perilaku dan Etika, maupun kebijakan Perusahaan melalui dua saluran yang tersedia: laporan kepada atasan langsung atau melalui *Whistleblowing System* (WBS).

Each employee at PLN Nusantara Power plays an important role in implementing its Corporate Culture and Code of Conduct. The parties required to comply include the Board of Commissioners and its apparatus, the Board of Directors, all employees, including Secondees, employees placed in subsidiaries or affiliated companies, company representatives assigned as Directors or Commissioners in subsidiaries or associated companies, PKWT employees, outsourced, On-the-Job Training students or prospective employees, as well as business partners. Each party is required to immediately report any potential or actual violations of the Company's Culture, Code of Conduct, or Company policies through the two available channels: reporting to a direct supervisor or via the Whistleblowing System (WBS).

Perusahaan secara aktif melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pedoman Perilaku dan Etika dan menindak tegas setiap pelanggar sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Perusahaan juga memberikan penghargaan kepada individu atau tim yang secara konsisten menjalankan nilai dan etika Perusahaan, sebagai insentif positif untuk mendorong kepatuhan. Selama tahun 2025, terdapat 4 (empat) bentuk pelanggaran disiplin di Perusahaan. Kualitas penegakan kode etik selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

The Company actively monitors compliance with the Code of Conduct and takes strict action against any violators in accordance with applicable regulations. On the other hand, the Company also rewards individuals or teams who consistently uphold the Company's values and ethics, as a positive incentive to encourage compliance. During 2025, there were 4 (four) forms of disciplinary violations in the Company. The quality of code of conduct enforcement over the past five years can be seen in the following chart:

Penegakan Pelanggaran Standar Etika Perusahaan Tahun 2021-2025
Enforcement of Violations of the Code of Conduct in 2021-2025

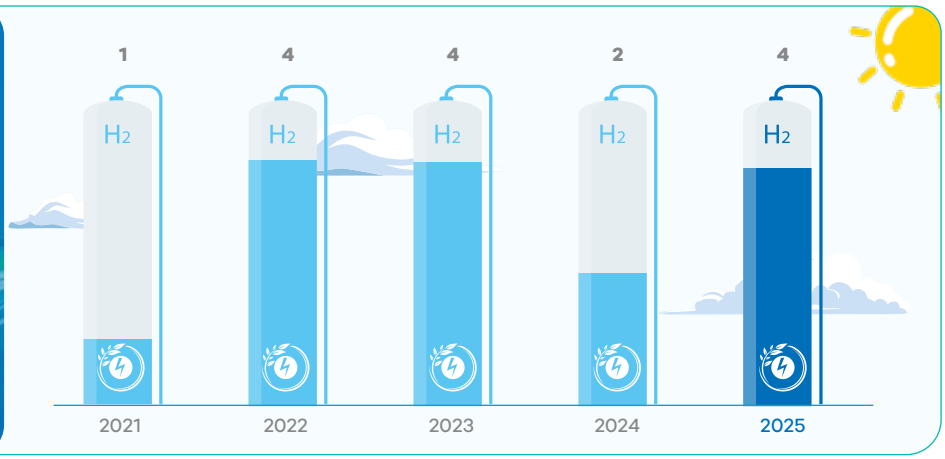

Setiap insan Perusahaan yang melanggar etika atau disiplin kerja diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan sesuai mekanisme internal. Hasil pemeriksaan menjadi dasar pemberian sanksi, disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan tingkat dampaknya, untuk memberikan efek korektif sekaligus mencegah pelanggaran serupa. Berikut rincian bentuk pelanggaran dan sanksi yang diberikan selama tahun 2025:

Every employee of the Company who violates ethics or work discipline is examined by the Employee Discipline Violation Inspection Team according to internal mechanisms. The results of the examination serve as the basis for imposing sanctions, adjusted according to the type of violation and its impact level, to provide a corrective effect while also preventing similar violations. The following are the details of the types of violations and the sanctions imposed during 2025:

Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Pelanggaran Standar Etika
Forms of Violations and Types of Sanctions for Violations of Ethical Standards

Bentuk Pelanggaran Form of Violation	Jumlah Karyawan Terkena Sanksi Disiplin Number of Employees Subject to Disciplinary Sanctions	Jenis Sanksi Type of Sanctions	Hukuman Punishment
• Melakukan penerimaan uang dari pihak pemangku kepentingan. • Melakukan aktivitas luar dinas yang dapat mempengaruhi independensi atau obyektivitas pribadi maupun rekan kerja dalam melaksanakan pekerjaan. • Accepting money from stakeholders. • Engaging in outside activities that could compromise personal or colleagues' independence or objectivity in performing their duties.	2	Ringan Light	Peringatan tertulis yang berlaku selama 6 (enam) bulan A written warning valid for 6 (six) months
• Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur • Melakukan penerimaan uang dari pihak ketiga • Pemalsuan • Penghimpunan dana dari transaksi ilegal • Performing work in violation of procedures • Accepting money from third parties • Forgery • Collecting funds from illegal transactions	5	Sedang Medium	Sanksi Pokok: Peringatan tertulis 1 terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan: a. Pemotongan Tunjangan Posisi (P2) sebesar 100%; b. Kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP); dan c. Penurunan 1 *grade* Sanksi Tambahan : Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Primary Sanctions: The final written 1 warning, valid for 6 (six) months, with: a. A 100% reduction in the Position Allowance (P2); b. Talent Criteria Needs Adjustment (SPP); and c. A one-grade demotion. Additional Sanction: Claim for Compensation (TGR)
Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur Performing work in a manner that does not comply with procedures	1	Sedang Medium	Sanksi Pokok: Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian Sanksi Tambahan: Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Primary Sanctions: The written 1 warning, valid for 6 (six) months, with Talent Criteria Needs Adjustment Additional Sanction: Claim for Compensation (TGR)

Bentuk Pelanggaran Form of Violation	Jumlah Karyawan Terkena Sanksi Disiplin Number of Employees Subject to Disciplinary Sanctions	Jenis Sanksi Type of Sanctions	Hukuman Punishment
• Ikut serta dalam pengambilan keputusan ketika rangkap jabatan (conflict of interest) • Melakukan persetujuan terhadap pembayaran pekerjaan kepada perusahaan lain (fiktif) • Participating in decision-making while serving a concurrent position (conflict of interest) • Approving payments for work to other (fictitious) companies	3	Sedang Medium	Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian The written 1 warning, valid for 6 (six) months, with Talent Criteria Needs Adjustment

Evaluasi Implementasi Kode Etik Perusahaan
Evaluation of the Implementation of the Company's Code of Conduct

Untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan mendukung tata kelola unggul, PLN Nusantara Power melibatkan karyawan secara aktif dalam pengembangan, penyempurnaan, dan peninjauan implementasi Pedoman Perilaku dan Etika. Keterlibatan ini bertujuan menggali perspektif, kebutuhan, dan harapan insan Perusahaan, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap pedoman sebagai bagian dari budaya Perusahaan.

To strengthen a work culture that is integrity-driven and supports excellent governance, PLN Nusantara Power actively involves employees in the development, refinement, and review of the Code of Conduct. This involvement aims to explore the perspectives, needs, and expectations of the Company's employees, while also reinforcing a sense of ownership toward the guidelines as part of the Company's culture.

Secara berkala, Perusahaan juga mengevaluasi muatan pedoman serta efektivitas sosialisasi (*refreshment*) yang telah dijalankan, untuk memastikan seluruh insan Perusahaan memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai etika secara konsisten. Langkah ini sekaligus memastikan pedoman tetap relevan dengan dinamika internal dan eksternal, kebijakan korporasi, peraturan perundang-undangan, serta ekspektasi pemangku kepentingan, sambil menyesuaikan perangkat pendukung agar penerapan etika berjalan optimal dan berkontribusi pada penciptaan nilai berkelanjutan.

Periodically, the Company also evaluates the content of the guidelines and the effectiveness of the socialization (refreshment) that has been conducted, to ensure that all Company employees understand, internalize, and consistently apply ethical values. This step also ensures that the guidelines remain relevant to internal and external dynamics, corporate policies, legislation, and stakeholder expectations, while adjusting supporting tools so that the application of ethics runs optimally and contributes to the creation of sustainable value.

Penanganan Perkara Hukum dan Sanksi Administrasi

Legal Cases Handling and Administrative Sanctions

Penerapan prinsip kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan internal merupakan elemen penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Selain sebagai kewajiban hukum, kepatuhan juga berfungsi melindungi Perusahaan dari berbagai risiko yang dapat timbul akibat pelanggaran. Oleh karena itu, Perusahaan mengelola risiko hukum melalui pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas operasional agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga potensi dampak negatif terhadap kinerja keuangan, operasional, dan reputasi dapat diminimalkan.

The application of compliance principles with laws, regulations, and internal policies is a crucial element in supporting good corporate governance. In addition to being a legal obligation, compliance also serves to protect the Company from various risks that may arise due to violations. Therefore, the Company manages legal risks through the supervision and evaluation of all operational activities to ensure compliance with applicable provisions, thereby minimizing the potential negative impact on financial performance, operations, and reputation.

Penerapan kepatuhan tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu Perusahaan menghindari sengketa hukum dengan pihak ketiga, sanksi dari regulator, serta potensi hilangnya kepercayaan dari investor, pelanggan, dan mitra usaha. Perusahaan telah membentuk Satuan Corporate Legal yang berfungsi untuk menangani kepentingan Perusahaan dari sisi hukum dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

The implementation of compliance not only enhances operational efficiency but also helps the Company avoid legal disputes with third parties, sanctions from regulators, and the potential loss of trust from investors, customers, and business partners. The Company has established a Corporate Legal Unit to handle the Company's legal affairs and to ensure the Company's compliance with applicable laws and regulations.

Perkara Hukum

Legal Cases

Perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan operasional dan dinamika bisnis yang terus berkembang, potensi munculnya permasalahan hukum tetap dapat terjadi, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Permasalahan hukum tersebut dapat melibatkan Perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, maupun anggota Direksi, baik dalam kapasitas sebagai pihak penggugat atau tergugat, maupun sebagai pihak yang melaporkan atau dilaporkan.

The Company is committed to conducting its business activities in accordance with the applicable laws and regulations. However, in the implementation of operations and the continuously evolving business dynamics, the potential for legal issues to arise does exist, whether in the form of litigation or non-litigation. These legal issues may involve the Company, subsidiaries, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors, either in the capacity as plaintiffs or defendants, or as parties reporting or being reported.

Perkara Hukum Perusahaan

Legal Cases Faced by the Company

Perkara hukum dapat timbul terkait dengan proses perizinan yang ada di Perusahaan, karena adanya sengketa perdata dan sebagai akibat dari adanya dugaan tindak pidana yang terkait dengan proses bisnis Perusahaan. Sampai dengan akhir tahun 2025, kasus hukum yang dihadapi PLN NP adalah sebagai berikut:

Legal cases may arise related to the licensing process within the Company, due to civil disputes,, and as a result of alleged criminal acts related to the Company's business processes. Until the end of 2025, the legal cases faced by PLN NP are as follows:

Jumlah Perkara Hukum Perusahaan
Number of Company's Legal Cases

Jenis Perkara Type of Case	Total	Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap) Completed (Has Permanent Legal Force)	Proses Penyelesaian Settlement Process
Perkara Perdata/ Arbitrase Civil Cases/ Arbitration	1	1	0
Kasus Korupsi Corruption Cases	0	0	0
Kasus Hubungan Industrial Industrial Relations Cases	0	0	0
Kasus Lain-lain Other Cases	0	0	0

Penyelesaian Perkara Hukum Perusahaan
Corporate Legal Case Settlement

Para Pihak The Parties	Pokok Perkara Main Case	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Effort	Pengaruh/ Risiko Terhadap Perusahaan Influence/Risks on the Company
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 283/ Pdt.G/2024/PN.CKR Penggugat: Ahli Waris H. Serih Bin Madang Tergugat: 1. Budiawan Susantio 2. BPN Kab Bekasi 3. PT PLN (Persero) cq PT PLN NP 4. Pemerintah Desa Segara Jaya Turut Tergugat 1. PPATS Dwy Sigit Andrian 2. Ir. Ronald Manurung 3. Maudin Pangaribuan 4. Anno Widodo Agogo Damanik Unlawful Act Lawsuit No. 283/Pdt.G/2024/PN.CKR Plaintiff: Heirs of H. Serih Bin Madang Defendant: 1. Budiawan Susantio 2. BPN Bekasi Regency 3. PT PLN (Persero) cq PT PLN NP 4. Segara Jaya Village Government Co-Defendant: 1. PPATS Dwy Sigit Andrian 2. Ir. Ronald Manurung 3. Maudin Pangaribuan 4. Anno Widodo Agogo Damanik	Para Penggugat merupakan Ahli Waris Serih Bin Madang yang memiliki Girik C 694. Pada tahun 2018 Para Penggugat melakukan jual-beli tanah Girik tersebut kepada Turut Tergugat II, III, dan IV. Atas dasar itu Para Penggugat mengklaim bahwa Buku Tanah 205 milik Tergugat I bukanlah bukti kepemilikan yang sah. PT PLN membebaskan sebagian lahan milik Tergugat I dengan bukti kepemilikan tanah SHM 205 milik Tergugat I yang selanjutnya telah disertifikatkan oleh PT PLN. The Plaintiffs are the heirs of Serih Bin Madang, who held land ownership under Girik C 694. In 2018, the Plaintiffs sold this land to Co-Defendants II, III, and IV. Based on this transaction, the Plaintiffs claim that Land Book No. 205 held by Defendant I does not constitute valid proof of ownership. PT PLN acquired part of the land from Defendant I, who possessed Land Certificate (SHM) No. 205, which was subsequently registered under PT PLN's name.	Telah menerima Putusan Kasasi Nomor 2867.K/ Pdt/2025 tanggal 15 September 2025 yang menyatakan menolak Permohonan Kasasi Para Penggugat sehingga dalam hal ini PLN NP kembali memenangkan perkara. Has received Appeal Decision Number 2867.K/ Pdt/2025 dated September 15, 2025, which states the rejection of the Plaintiffs' Appeal Petition; thus, PLN NP won the case again in this instance.	1. Telah melakukan pengamanan dan penguasaan fisik terhadap aset tanah. 2. Telah rutin mengikuti persidangan (proses jawab jinawab) tingkat pertama hingga tingkat kasasi baik secara langsung maupun *e-court*. 1. Has secured and taken physical possession of the land assets. 2. Has routinely attended trials (question-and-answer process) from the first instance to the appeal level, both in person and via e-court.	Terdapat potensi tumpang tindih alas hak atas tanah yang telah dilewati pipa gas UP Muara Tawar sehingga dapat menimbulkan permasalahan sengketa baru pembatalan sertifikat tanah PT PLN Selain itu terdapat potensi kerugian senilai Rp Rp9.502.000.000,- (sembilan miliar lima ratus dua juta rupiah) apabila kasus ini dimenangkan oleh penggugat. There is a potential overlap of land rights on the land traversed by the Muara Tawar GU gas pipeline, which could lead to new disputes over the cancellation of PT PLN's land certificate. In addition, there is a potential loss amounting to Rp9,502,000,000 (nine billion five hundred two million rupiah) if the plaintiff wins the case.

Perkara Hukum Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat
Legal Cases Involving the Serving Board of Commissioners and Board of Directors

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum, baik perdata maupun pidana, yang berdampak material dan melibatkan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang sedang menjabat di Perusahaan.

Throughout 2025, there were no legal cases, whether civil or criminal, with material impact involving the serving members of the Board of Commissioners or Board of Directors.

Perkara Hukum Anak Perusahaan
Legal Cases of Subsidiaries

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum, baik perdata maupun pidana, yang dihadapi oleh Anak Perusahaan. Informasi lebih lanjut mengenai perkara hukum pada Anak Perusahaan disampaikan secara terperinci dalam Laporan Tahunan masing-masing entitas.

Throughout 2025, no legal cases, either civil or criminal, were faced by the Subsidiary. Further information regarding legal cases at the Subsidiary is provided in detail in the Annual Report of each entity.

Sanksi dari Otoritas Terkait
Sanctions from Relevant Authorities

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak menerima sanksi administrasi atau tindakan lain dari Otoritas Terkait. Selain itu, tidak terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, atau aturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan maupun material, dan tidak ada keputusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2025, juga tidak terjadi pelanggaran hukum terkait perburuhan, ketenagakerjaan, konsumen, kepailitan, komersial, persaingan, maupun lingkungan.

Throughout 2025, the Company, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors did not receive administrative sanctions or other actions from the Relevant Authorities. In addition, there have been no cases of non-compliance with laws, regulations, or rules related to significant or material related party transactions, and there have been no guilty verdicts from the highest tax court regarding tax issues in the past three years. In 2025, there were also no legal violations related to labor, employment, consumer, bankruptcy, commercial, competition, or environmental matters.

Whistleblowing System

Perusahaan terus memperkuat praktik tata kelola berkelanjutan dengan menempatkan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai bagian dari kerangkan kebijakan utama dalam membangun kepercayaan. Perusahaan menetapkan kebijakan tersebut melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 004.K/021/DIR/2020 dan Nomor 007.K/DK-PJB/2020 sebagai penyempurnaan dari Keputusan Direksi Nomor 095.K/010/DIR/2012. Melalui kebijakan tersebut, Perusahaan berupaya menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, terpercaya, dan mudah diakses bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyampaikan dugaan pelanggaran. Mekanisme ini bertujuan mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran sejak dini, baik yang berkaitan dengan hukum, kode etik, maupun kebijakan internal Perusahaan.

The Company continues to strengthen sustainable governance practices by placing the Whistleblowing System (WBS) as part of the main policy framework in building trust. The Company established the policy through the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 004.K/021/DIR/2020 and Number 007.K/DK-PJB/2020 as a refinement of the Board of Directors Decree Number 095.K/010/DIR/2012. Through this policy, the Company strives to provide a reporting mechanism that is safe, reliable, and easily accessible for all stakeholders to report alleged violations. This mechanism aims to detect and address potential violations early on, whether related to the law, code of conduct, or the Company's internal policies.

Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System Management Committee

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran bertanggung jawab atas operasional sistem pelaporan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 004.K/021/DIR/2020 dan Nomor 007.K/DK-PJB/2020. Struktur dan keanggotaan komite ini telah diperbarui melalui Keputusan Direksi Nomor 0014.K/020/DIR/2023 tanggal 26 April 2023, dengan Kepala Satuan Internal Audit sebagai Ketua Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran. Setiap laporan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Khusus dugaan pelanggaran yang melibatkan karyawan, proses pemeriksaan dilakukan lebih lanjut oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK) untuk memastikan penanganan yang objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

The Whistleblowing Management Committee is responsible for the operational aspects of the reporting system as regulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 004.K/021/DIR/2020 and Number 007.K/DK-PJB/2020. The structure and membership of this committee have been updated through the Board of Directors' Decree Number 0014.K/020/DIR/2023 dated April 26, 2023, with the Head of the Internal Audit Unit serving as the Chairperson of the Whistleblowing Management Committee. Each violation report is followed up on according to its authority. Specifically, for alleged violations involving employees, the examination process is further conducted by the Employee Disciplinary Violation Inspection Team (TP2DK) to ensure objective handling in accordance with applicable regulations.

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
Whistleblowing Management Committee

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran merupakan tim yang dibentuk dari berbagai fungsi strategis di dalam Perusahaan, seperti pengawasan internal, hukum, dan kepatuhan. Keberadaan komite ini berperan penting dalam memastikan terjaganya integritas serta akuntabilitas dalam seluruh kegiatan operasional Perusahaan. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran

The Whistleblowing Management Committee is a team established from various strategic functions within the Company, such as internal audit, legal, and compliance. This committee plays a crucial role in ensuring the integrity and accountability of all operational activities within the Company. The Whistleblowing Management Committee is mainly responsible for managing all

memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola seluruh proses yang berkaitan dengan pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan Perusahaan. Proses tersebut mencakup penerimaan laporan pelanggaran, melakukan verifikasi, serta analisis dan seleksi atas laporan yang masuk guna menentukan apakah diperlukan investigasi lanjutan. Selain itu, komite juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan bagi pelapor sesuai kebijakan perusahaan, terutama dalam menjaga kerahasiaan identitas serta menjamin keamanan pelapor. Untuk mendukung hal tersebut, anggota komite dapat memperoleh akses terhadap bantuan hukum, keuangan, maupun operasional jika dibutuhkan.

processes related to reporting alleged violations within the Company. The process includes receiving violation reports, conducting verification, and analyzing and selecting incoming reports to determine whether further investigation is needed. In addition, the committee is responsible for implementing a whistleblower protection program in accordance with company policy, particularly in maintaining the confidentiality of identities and ensuring the safety of whistleblowers. To support this, committee members can access legal, financial, or operational assistance if needed.

Guna memastikan penanganan pengaduan berjalan optimal, Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran diberikan kewenangan untuk berkoordinasi dengan berbagai unit kerja atau fungsi terkait lainnya di dalam perusahaan. Koordinasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan atau klarifikasi yang relevan sehingga setiap laporan dapat ditangani secara menyeluruh, akurat, dan tepat. Lebih lanjut, demi menjaga independensi dan efektivitas kinerja, komite juga memiliki akses langsung untuk melaporkan atau mengeskalasi kasus tertentu kepada Direktur Utama maupun Dewan Komisaris. Mekanisme ini bertujuan agar pengaduan yang bersifat strategis atau berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha dan reputasi perusahaan dapat memperoleh perhatian serta penanganan yang tepat dari manajemen tingkat tertinggi.

In order to ensure optimal handling of complaints, the Whistleblowing Management Committee is granted the authority to coordinate with various work units or other related functions within the Company. This coordination aims to obtain additional information or relevant clarifications so that each report can be handled comprehensively, accurately, and appropriately. Furthermore, to maintain independence and performance effectiveness, the committee also has direct access to report or escalate certain cases to the President Director or the Board of Commissioners. This mechanism aims to ensure that complaints of a strategic nature or those significantly impacting the continuity of business and the Company's reputation receive appropriate attention and handling from top management.

Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan
Employee Disciplinary Violation Investigation Team

Sebagai instrumen penegakan disiplin di lingkungan Perusahaan, PT PLN NP telah menetapkan Peraturan Disiplin Karyawan sebagai landasan hukum utama dalam setiap proses pemeriksaan. Selaras dengan pedoman tersebut, telah dibentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK) berdasarkan Keputusan Direksi No.0012.K/DIR/2026 Tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 0028.K/DIR/2025 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK). Tim ini memegang mandat untuk melakukan investigasi mendalam dan objektif terhadap setiap laporan dugaan pelanggaran yang masuk.

As an instrument for enforcing discipline within the Company, PT PLN NP established the Employee Discipline Regulations as the main legal basis in every inspection process. In line with these guidelines, the Employee Disciplinary Violation Examination Team (TP2DK) was established based on the Board of Directors' Decision No.0012.K/DIR/2026 Regarding the Amendment of the Board of Directors' Decision No.0028.K/DIR/2025 on the Establishment of the Employee Disciplinary Violation Examination Team (TP2DK). This team is mandated to conduct thorough and objective investigations into every incoming report of alleged violations.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, TP2DK akan menyusun rekomendasi sanksi yang adil dan proporsional sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan. Rekomendasi tersebut kemudian diserahkan kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS) untuk diputuskan secara resmi. Adapun penentuan PYBMS bergantung pada lokasi tugas karyawan.

If the inspection results indicate that a violation has occurred, TP2DK will prepare a fair and proportional sanction recommendation according to the weight of the offense committed. Subsequently, the recommendation is submitted to the Authorized Sanctioning Officer (PYBMS) for an official decision. The determination of the PYBMS depends on the employee's work location.

Perlindungan Terhadap Pelapor
Whistleblower Protection

Keamanan dan perlindungan bagi pelapor merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan publik maupun internal. Perusahaan berkomitmen penuh menciptakan iklim kerja yang sehat dan berintegritas dengan menjamin keamanan setiap individu yang berani melaporkan dugaan pelanggaran. Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, kerahasiaan identitas pelapor serta isi laporan akan dijaga secara permanen dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak berwenang melalui sistem pengelolaan informasi yang ketat. Identitas tersebut tidak akan dibuka kepada publik kecuali terdapat kebutuhan mendesak dalam proses hukum yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lebih jauh lagi, bagi pelapor yang merasa terancam atau membutuhkan jaminan keamanan ekstra, tersedia opsi untuk mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 10, dan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Security and protection for whistleblowers are important aspects in building both public and internal trust. The Company is fully committed to creating a healthy and integrity-driven work environment by ensuring the safety of every individual who is brave enough to report suspected violations. As a tangible form of support for good corporate governance, the confidentiality of the whistleblower's identity and the contents of the report will be permanently maintained and can only be accessed by authorized parties through a strict information management system. The identity will not be disclosed to the public unless there is an urgent need in the legal process in accordance with the applicable regulations. Furthermore, for whistleblowers who feel threatened or need extra security guarantees, there is an option to apply for protection from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as regulated in Article 5, Article 10, and Article 28 paragraph (3) of Law Number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims.

Implementasi WBS di dalam Perusahaan merupakan wujud kepatuhan terhadap regulasi hukum dan penerapan standar praktik terbaik (best practices). Komitmen ini secara langsung memperkuat struktur kepercayaan terhadap Perusahaan, karena menunjukkan bahwa operasional Perusahaan dijalankan di atas koridor hukum yang jelas dan transparan. Sebagai langkah nyata dalam menjaga integritas tersebut, Perusahaan menerapkan standar perlindungan pelapor yang ketat melalui ketentuan-ketentuan berikut:

1. Jika Pelapor adalah pihak internal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:

The implementation of WBS within the Company is a manifestation of compliance with legal regulations and the application of best practices. This commitment directly strengthens the trust structure toward the Company, as it shows that its operations are conducted within a clear and transparent legal framework. As a concrete step in maintaining that integrity, the Company implements strict whistleblower protection standards through the following provisions:

1. If the Whistleblower is an internal party of the Company, it will get standard protection from the Company against adverse treatment such as:

a. Pemecatan yang tidak adil;
b. Penurunan jabatan atau pangkat;
c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk;
d. Catatan merugikan dalam personal file record.

2. Jika Pelapor adalah pihak eksternal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atas tindakan balasan dari Terlapor atau Organisasi seperti:
   a. Diskriminasi dalam kerjasama usaha;
   b. Diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
3. Jika Pelapor adalah Justice Collaborator, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atas laporan yang disampaikan. Apabila dalam proses investigasi Pelapor terbukti ikut bersalah dalam pelanggaran yang dilaporkan, maka kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan terhadap sanksi yang direkomendasikan TP2DK kepada PYBMS.
4. Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum (jika diperlukan) sebagaimana diatur pada pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pasal 12 Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
   a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
   b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
   c. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
   d. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau
   e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

a. Unfair dismissal;
b. Demotion or rank;
c. Harassment or discrimination in all forms;
d. Adverse record in the personal file record.

2. If the Whistleblower is an external party of the Company, it will get standard protection from the Company against adverse treatment for retaliation from the Reporting Party or Organization such as:
   a. Discrimination in business cooperation;
   b. Discrimination in service delivery.
3. If the Whistleblower is a Justice Collaborator, he/she will receive standard protection from the Company against adverse treatment for the report submitted. If in the investigation process the Whistleblower is proven to be guilty of the reported violation, then his/her testimony can be used as a mitigating consideration for the sanctions recommended by the TP2DK to PYBMS.
4. In addition to the above protection, for Whistleblowers who are in good faith, the Company will also provide legal protection (if needed) as stipulated in article 5 and article 10 of Law No.31 of 2014 concerning Amendments to Law No.13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection and article 12 of Government Regulation No.43 of 2018 concerning Procedures for Implementing Community Participation and Awarding in the Prevention and Eradication of Corruption, namely:
   a. Protection from criminal and/or civil charges;
   b. Protection of personal security, and/or the Whistleblower's family from physical and/or mental threats;
   c. Protection of the Whistleblower's property;
   d. Confidentiality and disguise the identity of the Whistleblower; and/or
   e. Providing information without meeting face to face with the Reported Party at every level of case examination in the event that the violation is included in a court dispute.

Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Mechanism for Submitting and Handling Reporting of Violations

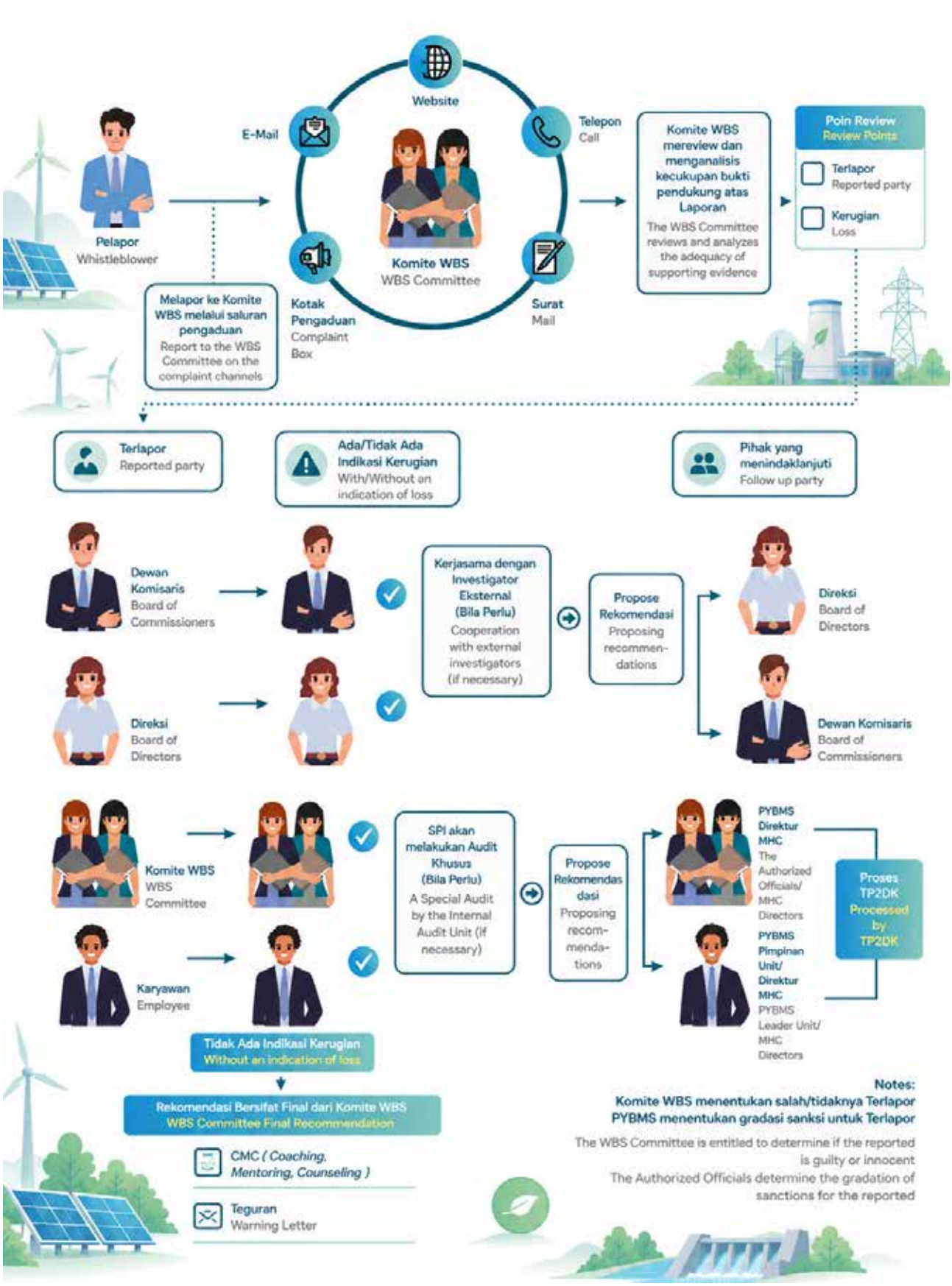

Demi menjamin penanganan yang objektif dan akurat, Perusahaan telah menetapkan prosedur serta ketentuan khusus bagi siapa saja yang ingin melaporkan indikasi pelanggaran di lingkungan Perusahaan. Setiap laporan yang masuk akan diproses secara profesional dan tepat sasaran. Adapun rincian mengenai standar umum dan tata cara dalam penyampaian laporan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan pelanggaran wajib disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan disertai bukti pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran, diantaranya meliputi:
   a. Pelanggaran yang dilaporkan;
   b. Pihak yang terlibat/Terlapor;
   c. Waktu terjadinya pelanggaran;
   d. Tempat terjadinya pelanggaran;
   e. Bagaimana kejadiannya.
2. Saluran yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah:
   a. Web Pengaduan PT PLN dengan alamat cos.pln.co.id
   b. Surat menyurat dengan alamat:
      Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran PT PLN Nusantara Power
      Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231 Indonesia
   c. Kotak Pengaduan:
      1) Gedung PT PLN Nusantara Power Kantor Pusat;
      2) Gedung Administrasi seluruh Unit Kerja PT PLN Nusantara Power.
   d. *Website* Pengaduan PT PLN Nusantara Power dengan alamat www.plnnusantarapower.co.id/wbs.
   e. *Email* Pengaduan PT PLN Nusantara Power dengan alamat pengaduan@plnnusantarapower.co.id.
   f. Telepon/SMS/WhatsApp dengan nomor 08113388448.
3. Saluran pelaporan di Unit Kerja dikelola oleh Unit Kerja dan dikomunikasikan secara periodik ke Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran.
4. Untuk mempermudah proses komunikasi dan klarifikasi, dapat dilakukan dengan cara:
   a. Tatap muka; dan/atau
   b. Telepon; dan/atau
   c. *Email*; dan/atau
   d. Surat menyurat/kotak pos; dan/atau
   e. Sarana komunikasi lainnya.

To ensure objective and accurate handling, the Company has established specific procedures and provisions for anyone who wishes to report indications of violations within the Company. Each incoming report will be processed professionally and accurately. The details regarding the general standards and procedures for submitting report are as follows:

1. Reports must be submitted clearly, be accountable, and supported by relevant evidence, including:
   a. The type of violation being reported;
   b. The involved party(ies)/Reported individual(s);
   c. The time of the violation;
   d. The location of the violation;
   e. A description of how the incident occurred.
2. Available channels for reporting violations include:
   a. PT PLN's complaint website: cos.pln.co.id
   b. Correspondence addressed to:
      Whistleblowing Management Committee of PT PLN Nusantara Power
      Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231 Indonesia
   c. Suggestion boxes located at:
      1) PT PLN Nusantara Power Head Office building;
      2) Administration buildings of all PT PLN Nusantara Power work units.
   d. PLN Nusantara Power's complaint website: www.plnnusantarapower.co.id/wbs
   e. Email: pengaduan@plnnusantarapower.co.id
   f. Phone/SMS/WhatsApp: +62 811 3388 448
3. Reporting channels at work units are managed by the units themselves and are periodically communicated to the Whistleblowing Complaint Management Committee.
4. Communication and clarification may be conducted via:
   a. Face-to-face meetings;
   b. Telephone;
   c. Email;
   d. Correspondence/mail;
   e. Other communication methods.

'Perusahaan berkomitmen penuh dalam menjaga kepercayaan dengan menanggapi setiap laporan mengenai indikasi penyimpangan secara serius. Oleh karena itu, segala bentuk tindak lanjut terhadap pengaduan dugaan pelanggaran yang melibatkan insan Perusahaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Seluruh proses pemeriksaan hingga pengambilan keputusan tersebut wajib dijalankan dengan mematuhi standar serta ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib menerima laporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal, baik dari Pelapor yang mencantumkan identitas maupun yang tidak (anonim). Semua laporan yang diterima wajib diproses lebih lanjut sepanjang dapat memberikan bukti-bukti kuat, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengarah kepada fitnah.
2. Laporan pelanggaran ditujukan ke Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui saluran pelaporan yang tersedia.
3. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi untuk selanjutnya memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan pelanggaran tidak benar (tidak sesuai fakta) dan tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran (sesuai fakta) yang disertai bukti permulaan yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
5. Dalam proses verifikasi dan penentuan tindak lanjut, Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran mengklasifikasikan Terlapor sebagai berikut:
   a. Bila Terlapor adalah Karyawan
      1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada PYBMS untuk proses lebih lanjut. Usulan rekomendasi dapat berupa pemeriksaan lebih lanjut oleh TP2DK bila jenis pelanggaran memiliki indikasi fraud;
      2) Bila tidak ada indikasi *fraud* maka usulan rekomendasi dapat berupa *Coaching Mentoring Conseling* (CMC) dan teguran kepada Karyawan yang bersangkutan;

The Company is fully committed to maintaining trust by seriously responding to every report of potential deviation. Therefore, any follow-up on reports of alleged violations involving company employees must be conducted transparently and in an accountable manner. The entire process of investigation up to decision-making must be executed in accordance with the established standards and regulations as follows:

1. The Company shall accept reports of violations from both internal and external parties, whether submitted with the reporter's identity disclosed or anonymously. All reports received shall be processed further provided that they are supported by sufficient, reliable, and accountable evidence and do not constitute defamatory allegations.
2. Reports of violations should be submitted to the Whistleblowing Complaint Management Committee through the available reporting channels.
3. The Whistleblowing Complaint Management Committee shall conduct a verification process to determine whether a further investigation is required. The verification process shall be completed within 30 (thirty) days and may be extended for a maximum additional period of 30 (thirty) days.
4. If the verification results indicate that the reported violation is unfounded (not supported by facts) and lacks sufficient preliminary evidence, the report shall not be processed further. Conversely, if the verification results indicate that the reported violation is substantiated by facts and supported by sufficient preliminary evidence, the report may proceed to the investigation stage.
5. In the process of verification and determination of follow-up actions, the Whistleblowing Complaint Management Committee shall classify the Reported Party as follows:
   a. If the Reported is an Employee
      1) The Whistleblowing Complaint Management Committee verifies, summarizes the case, and submits a recommendation to PYBMS for further processing. If the violation indicates fraud, the case may be forwarded to TP2DK for further review.
      2) Where no indication of fraud is identified, the recommendations may include Coaching, Mentoring, Counseling (CMC), and/or an official warning to the employee concerned.

3) Apabila berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran bersifat kompleks, rumit dan memerlukan analisa bukti-bukti yang lebih mendalam, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta kepada Direksi untuk menugaskan Satuan Internal Audit melakukan audit khusus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh TP2DK sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Bila Terlapor adalah Direksi
   1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut;
   2) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal. Hasil proses lebih lanjut ini dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

c. Bila Terlapor adalah Dewan Komisaris
   1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Direksi untuk proses lebih lanjut;

   2) Direksi melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal. Hasil proses lebih lanjut ini dilaporkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.

d. Bila Terlapor adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris
   1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut;

   2) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal.

3) If, based on the nature of the violation, the case is deemed complex and requires a more in-depth analysis of the available evidence, the Whistleblowing Complaint Management Committee may request the Board of Directors to assign the Internal Audit Unit to conduct a preliminary review before a further examination is carried out by TP2DK in accordance with the applicable provisions.

b. If the Reported is the Board of Directors
   1) The Committee verifies and reports a summary of the case with recommendations to the Board of Commissioners.

   2) The Board of Commissioners shall conduct further review of the reported violation, including determining whether the involvement of an external investigator is required. The results of such review shall be reported by the Board of Commissioners to the Shareholders.

c. If the Reported is the Board of Commissioners
   1) The Whistleblowing Complaint Management Committee shall verify the report, prepare a case summary, and submit its recommendations to the Board of Directors for further action.
   2) The Board of Directors shall conduct further review of the reported violation, including determining whether the involvement of an external investigator is required. The results of such review shall be reported by the Board of Directors to the Shareholders.

d. If the Reported is a Supporting Body of the Board of Commissioners
   1) The Whistleblowing Complaint Management Committee shall verify the report, prepare a case summary, and submit its recommendations to the Board of Commissioners for further action.
   2) The Board of Commissioners shall conduct further review of the reported violation involving a member of a Supporting Body of the Board of Commissioners, including determining whether the involvement of an external investigator is required.

e. Bila Terlapor adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran, maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan untuk sementara sampai menunggu hasil verifikasi dan investigasi. Apabila tidak terbukti, maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali, namun apabila terbukti maka Direksi dapat melakukan penggantian keanggotaan Komite.

6. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau Pejabat Lain yang diberi kuasa oleh Pemegang Saham sebagai Pejabat Penyerah Perkara.

e. If the Reported Person is a Member of the Violation Complaint Management Committee
If the person reported for committing a violation is a Member of the Violation Complaint Management Committee, they must be temporarily suspended pending the results of the verification and investigation. If proven untrue, they will be reinstated. However, if proven false, the Board of Directors may replace the Committee membership.

6. If the investigation confirms that the violation constitutes a criminal offense, the case may be forwarded to legal authorities. The handover will be conducted by the Board of Directors or another officer authorized by the Shareholders.

Pengaduan dan Tindak Lanjut Pelaporan
Complaints and Follow-Up in 2025

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah menerima total 4 (empat) laporan pengaduan dari berbagai saluran. Setelah melalui proses verifikasi yang ketat, terdapat 3 (tiga) laporan yang dinyatakan valid dan memenuhi syarat untuk diteruskan ke tahap tindak lanjut. Adapun rincian mengenai penanganan dan penyelesaian terhadap laporan-laporan tersebut adalah sebagai berikut:

Throughout 2025, the Company received a total of 4 (four) complaint reports from various channels. After undergoing a rigorous verification process, 3 (three) reports were deemed valid and qualified to proceed to the follow-up stage. The details regarding the handling and resolution of these reports are as follows:

Penanganan Pelaporan Tahap Tindak Lanjut
Handling of Follow-up Stage Reporting

No.	Kategori Pelapor Whistleblower Category	Kategori Laporan Pelanggaran Violation Report Category	Tindak Lanjut Pengaduan Complaint Follow-up	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
1	Vendor	Pelanggaran SOP Perusahaan terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi. Violations of Company SOPs primarily related to the procurement of goods and services, the provision of benefits and remuneration.	Direkomendasikan untuk diberikan *Coaching, Mentoring, Counseling* (CMC) Recommended to be given Coaching, Mentoring, Counseling (CMC)	Selesai Done
2	Eksternal External	Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap Perusahaan atau merugikan kepentingan Perusahaan. Any action that may cause financial or non-financial loss to the Company or be detrimental to the interests of the Company.	Direkomendasikan untuk diberikan CMC Recommended to be given CMC	Selesai Done

No.	Kategori Pelapor Whistleblower Category	Kategori Laporan Pelanggaran Violation Report Category	Tindak Lanjut Pengaduan Complaint Follow-up	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
3	Anonim Anonymous	Pelanggaran SOP Perusahaan terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi. Violations of Company SOPs primarily related to the procurement of goods and services, the provision of benefits and remuneration.	Direkomendasikan untuk dilakukan audit investigasi oleh Satuan Internal Audit PT PLN (Persero) It is recommended to conduct an investigative audit by the Internal Audit Unit of PT PLN (Persero)	Proses tindak lanjut Follow-up process

Evaluasi Pelaksanaan *Whistleblowing System*
Evaluation of Whistleblowing System Implementation

Perusahaan secara rutin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap WBS. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas sistem tersebut, memetakan berbagai kendala di lapangan, serta menyusun strategi perbaikan demi kemajuan kualitas WBS yang berkelanjutan. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran menyusun laporan implementasi WBS secara periodik. Laporan ini diserahkan setiap semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai wujud pertanggungjawaban sekaligus instrumen *monitoring*. Cakupan laporan tersebut meliputi data penerimaan pengaduan, status tindak lanjutnya, hingga realisasi program sosialisasi WBS yang telah dijalankan oleh komite terkait.

The Company routinely conducts a comprehensive evaluation of the WBS. The evaluation is conducted to measure the effectiveness of the system, map out various obstacles in the field, and develop improvement strategies for the continuous advancement of WBS quality. The Whistleblower Complaint Management Committee prepares periodic WBS implementation reports. This report is submitted every semester to the President Director and the Board of Commissioners as a form of accountability and a monitoring instrument. The scope of the report includes data on complaint reception, the status of follow-up actions, and the manifestation of the WBS socialization program carried out by the relevant committee.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

Sebagai bagian dari strategi untuk menjaga keberlanjutan bisnis, melindungi aset, dan mempertahankan kinerja perusahaan, PLN NP berkomitmen dalam pencegahan tindak korupsi. Upaya ini juga merupakan komponen penting dalam penguatan tata kelola perusahaan yang baik serta mitigasi risiko *fraud* dan potensi permasalahan hukum yang dapat menyebabkan inefisiensi operasional. Upaya ini juga berkontribusi dalam memperkuat reputasi perusahaan di hadapan pelanggan, mitra usaha, regulator, dan pemegang saham. Walaupun tidak diatur dalam satu kebijakan tersendiri, prinsip pencegahan korupsi telah

As part of the strategy to maintain business sustainability, protect assets, and uphold company performance, PLN NP is committed to preventing acts of corruption. These efforts are also a crucial component in strengthening good corporate governance as well as mitigating the risk of fraud and potential legal issues that can cause operational inefficiencies. These efforts also contribute to strengthening the Company's reputation in the eyes of customers, business partners, regulators, and shareholders. Although not regulated in a separate policy, the principle of preventing corruption has been integrated into various company policies. Its

diintegrasikan ke dalam berbagai kebijakan perusahaan. Implementasinya tercermin dalam Standar Etika Perusahaan, Program Anti-*Fraud*, Kebijakan Benturan Kepentingan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016, pengendalian gratifikasi, serta kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

implementation is reflected in the Company's Code of Conduct, Anti-Fraud Program, Conflict of Interest Policy, ISO 37001:2016-based Anti-Bribery Management System (SMAP), gratification control, and compliance with State Officials' Wealth Reporting.

Kebijakan *Anti-Fraud*
Anti-Fraud Policy

Kebijakan Anti-Fraud di PLN NP secara formal merupakan hasil ratifikasi dari kebijakan *Anti-Fraud* PT PLN (Persero). Seiring dengan penguatan tata kelola kepatuhan perusahaan, pada tahun 2025 pengaturan terkait *Anti-Fraud* secara umum telah terintegrasi dalam Kebijakan Strategis Sistem Manajemen Kepatuhan yang diterbitkan pada tahun 2024, sebagai hasil ratifikasi Kebijakan Strategis Sistem Manajemen Kepatuhan PT PLN (Persero). Selanjutnya, untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan potensi risiko *fraud* secara lebih spesifik, PLN NP menetapkan Kebijakan Operasional *Fraud* Risk Management sebagai turunan dan implementasi lebih lanjut dari Kebijakan Strategis Sistem Manajemen Kepatuhan tersebut, sebagaimana di atur pada Peraturan Direksi Nomor 0017.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Operasional Fraud Risk Management PT PLN Nusantara Power. Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi Standar Etika Perusahaan sekaligus mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan seluruh proses bisnis secara etis dengan menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

The Anti-Fraud policy at PLN NP is formally the result of the ratification of the Anti-Fraud policy of PT PLN (Persero). Along with the strengthening of corporate compliance governance, in 2025, regulations related to Anti-Fraud were integrated into the Strategic Policy of the Compliance Management System issued in 2024, as a result of the ratification of the Strategic Policy of the Compliance Management System of PT PLN (Persero). Furthermore, to identify, analyze, and map potential fraud risks more specifically, PLN NP establishes the Operational Fraud Risk Management Policy as a derivative and further implementation of the Strategic Policy of the Compliance Management System, as regulated in the Board of Directors' Regulation Number 0017.P/DIR/2025 concerning the Operational Fraud Risk Management Policy of PT PLN Nusantara Power. This policy is part of the implementation of the Company's Code of Conduct and reflects the Company's commitment to conducting all business processes ethically by upholding integrity and compliance with applicable provisions.

Sebagai instrumen kebijakan, Kebijakan *Anti-Fraud* berperan penting dalam memperkuat pencegahan tindak korupsi serta mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini juga menyediakan kerangka kerja yang jelas dalam mengidentifikasi, mengelola, dan merespons risiko kecurangan secara efektif.

As a policy instrument, the Anti-Fraud Policy plays a crucial role in strengthening the prevention of corruption and supporting the realization of clean, transparent, and accountable corporate governance. This policy also provides a clear framework for effectively identifying, managing, and responding to fraud risks.

Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

Seluruh insan Perusahaan wajib mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lain, serta menjaga independensi agar setiap keputusan dapat diambil secara objektif dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan, Direksi dan Dewan Komisaris tidak diperkenankan terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait.

All Company employees must prioritize the interests of the Company above personal, family, or other parties' interests, and maintain independence so that every decision can be made objectively and in accordance with the principles of good corporate governance. In the event of a potential conflict of interest, the Board of Directors and Board of Commissioners are not permitted to be involved in the related decision-making process.

Seluruh insan Perusahaan juga wajib menyampaikan Pakta Integritas setiap tahun yang menyatakan bebas dari benturan kepentingan serta kesediaan untuk mencegah dan menangani potensi konflik. Direksi dan Dewan Komisaris pun wajib menandatangani serta memperbarui Pakta Integritas secara berkala. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan benturan kepentingan PLN Nusantara Power yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0013.P/DIR/2025 tentang Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam mengidentifikasi, menghindari, dan menangani potensi konflik secara profesional dan transparan.

All employees of the Company are also required to submit an Integrity Pact annually, stating that they are free from conflicts of interest and are willing to prevent and address potential conflicts. The Board of Directors and Board of Commissioners are also required to sign and periodically update the Integrity Pact. The provisions constitute an integral part of PLN Nusantara Power's conflict of interest management policy, as set forth in the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power No. 0013.P/DIR/2025 concerning the Guidelines for Conflict of Interest Management. This policy serves as a guideline in identifying, avoiding, and handling potential conflicts professionally and transparently.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Anti-Bribery Management System (ABMS)

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PLN Nusantara Power yang mengacu pada standar internasional ISO 37001:2016 merupakan bagian dari penguatan sistem pengendalian internal serta tata kelola perusahaan. Standar ini digunakan sebagai pedoman bagi organisasi sektor publik, swasta, maupun nirlaba dalam membangun adequate procedures untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik penyuapan yang berpotensi menimbulkan risiko korupsi. Implementasinya juga menegaskan komitmen perusahaan terhadap budaya anti-penyuapan melalui prinsip *No Bribery, No Kickback, No Gift*, dan *No Luxurious Hospitality*. Dalam pelaksanaannya, SMAP mengacu pada berbagai ketentuan, antara lain Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010, Surat Kementerian BUMN Nomor S-17/S.MBU/02/2020 mengenai kewajiban sertifikasi ISO 37001:2016 bagi BUMN, serta kebijakan internal perusahaan terkait Manajemen *Anti-Fraud.*

The implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) at PLN Nusantara Power, which refers to the international standard ISO 37001:2016, is part of strengthening the internal control system and corporate governance. This standard is used as a guideline for public, private, and non-profit sector organizations in establishing adequate procedures to prevent, detect, and address bribery practices that may pose a risk of corruption. Its implementation also reaffirms the Company's commitment to an anti-bribery culture through the principles of No Bribery, No Kickback, No Gift, and No Luxurious Hospitality. In its implementation, ABMS refers to various regulations, including Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1999, Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010, and the Ministry of SOEs Letter Number S-17/S.MBU/02/2020 regarding the obligation of ISO 37001:2016 certification for SOEs, as well as the Company's internal policies related to Anti-Fraud Management.

PLN NP telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 untuk Kantor Pusat dan sejumlah unit bisnis strategis. Capaian ini menunjukkan kesesuaian sistem pengendalian anti penyuapan dengan standar internasional sekaligus memperkuat komitmen perusahaan terhadap integritas dan akuntabilitas. Penguatan implementasi SMAP juga dilakukan melalui penandatanganan Komitmen Integritas oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 3 Februari 2025 dan diperbaharui pada 18 Juli 2025 berkenaan dengan adanya pergantian jajaran Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan SMAP di seluruh proses bisnis. Untuk mempertahankan sertifikasi tersebut, dilakukan audit internal oleh Satuan Internal Audit pada Bulan Juli 2025 untuk kantor pusat dan UP Muara Karang, UP Brantas, UP Pacitan dan UP Indramayu, serta *audit surveillance* eksternal pada Agustus s.d Oktober 2025. Selain itu, pada tahun 2025 juga dilakukan pengukuran *maturity level* kepatuhan berdasarkan pedoman PLN, dengan hasil sebesar 3,73 dengan target 3,80.

PLN NP successfully obtained ISO 37001:2016 certification for the Head Office and several strategic business units. This achievement demonstrates the alignment of the anti-bribery control system with international standards while also strengthening the Company's commitment to integrity and accountability. The strengthening of SMAP implementation was also carried out through the signing of the Integrity Commitment by the Board of Commissioners and Board of Directors on February 3, 2025, and renewed on July 18, 2025, in relation to the changes in the Board of Commissioners and Board of Directors as a form of support for the implementation of SMAP in all business processes. To maintain the certification, an internal audit was conducted by the Internal Audit Unit in July 2025 for the head office and Muara Karang GU, Brantas GU, Pacitan GU, and Indramayu GU, as well as an external surveillance audit from August to October 2025. In addition, in 2025, a compliance maturity level measurement was conducted based on PLN guidelines, with a result of 3.73 of a target of 3.80.

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

Perusahaan menjalankan kebijakan pengendalian gratifikasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 0012.P/DIR/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi, yang juga menjadi dasar pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

The Company implements a sustainable gratification control policy as part of its efforts to achieve clean, integrity-based, and corruption-free corporate governance. This policy refers to Board of Directors' Regulation Number 0012.P/DIR/2025 concerning the Guidelines for the Prevention and Control of Gratification, which also serves as the basis for the establishment of the Gratification Control Unit (UPG).

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam pelaksanaannya mengelola laporan penolakan dan penerimaan gratifikasi yang disampaikan karyawan melalui aplikasi COS dan diteruskan ke sistem GOL KPK. Untuk insan Perusahaan non-karyawan, pelaporan dilakukan secara manual menggunakan formulir dari KPK yang kemudian juga diteruskan ke GOL KPK. Setiap tanggal 1 setiap bulan, UPG secara rutin mengirimkan email konfirmasi kejadian gratifikasi dan konflik kepentingan kepada seluruh karyawan, baik di Kantor Pusat maupun Unit, sebagai bagian dari penguatan pengendalian dan kepatuhan internal.

The Gratification Control Unit (UPG) manages reports of the rejection and acceptance of gratifications submitted by employees via the COS application and forwarded to the KPK GOL system. For non-employees, reporting is conducted manually using forms from the KPK, which are then also forwarded to the KPK GOL. On the 1st of every month, UPG routinely sends confirmation emails of gratification incidents and conflicts of interest to all employees, both at the Head Office and Units, as part of strengthening internal control and compliance.

Tingkat partisipasi Konfirmasi Kejadian Gratifikasi tahun 2025 melalui Aplikasi COS di PLN Nusantara Power secara keseluruhan mencapai 97%. Sementara itu, sepanjang tahun 2025 Unit Pengendalian Gratifikasi mencatat total 39 laporan yang berasal dari seluruh unit dan anak perusahaan. Laporan tersebut terdiri dari 5 laporan penolakan gratifikasi, 24 laporan penerimaan, dan 10 laporan pemberian gratifikasi.

The participation rate in the Confirmation of Gratification in 2025 via the COS Application at PLN Nusantara Power overall reached 97%. Meanwhile, throughout 2025, the Gratification Control Unit recorded a total of 39 reports from all units and subsidiaries. These reports consisted of 5 reports of gratification rejections, 24 reports of acceptance, and 10 reports of gratification provision.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
State Officials' Wealth Report (LHKPN)

Sebagai bagian dari sistem tata kelola PLN NP, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan perusahaan saat ini mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 0013.P/DIR/2025 tentang Pedoman LHKPN di Lingkungan PLN NP. Ketentuan tersebut mengatur pelaporan LHKPN bagi pejabat yang termasuk kategori wajib lapor. Perusahaan secara konsisten melaksanakan pelaporan LHKPN bagi pejabat yang termasuk kategori wajib lapor sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara.

As part of the PLN NP governance system, the implementation of the State Official's Wealth Report (LHKPN) within the Company currently refers to Board of Directors' Regulation Number 0013.P/DIR/2025 concerning the LHKPN Guidelines within PLN NP. This regulation governs the LHKPN reporting for officials categorized as mandatory reporters. The Company consistently implements LHKPN reporting for officials categorized as mandatory reporters as part of a State-Owned Enterprise.

Ketentuan tersebut dirancang untuk memastikan insan perusahaan, khususnya yang memiliki posisi strategis dan kewenangan dalam pengambilan keputusan, dapat menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi integritas serta terhindar dari potensi konflik kepentingan. Kebijakan LHKPN tersebut mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pasal 2, angka (7) – Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
3. Permen BUMN No. PER-10/MBU/06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/01/2018 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
4. Peraturan Direksi PT PLN Nomor 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT PLN (Persero).

Pengelolaan LHKPN di lingkungan PLN dilakukan oleh Admin Instansi yang berada pada Bidang Risiko dan Kepatuhan di Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan LHKPN. Fungsi Admin Unit e-LHKPN pada PLN NP dijalankan oleh Bidang Kepatuhan Kantor Pusat yang juga memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan LHKPN. Dalam pelaksanaannya, Bidang Kepatuhan Kantor Pusat berkoordinasi dengan fungsi kepatuhan di unit, anak perusahaan, serta perusahaan asosiasi (AP/PA) untuk memastikan kelancaran pelaporan LHKPN di seluruh unit.

Pelaporan LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor dilakukan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya yang memuat uraian dan rincian informasi harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, serta data pendukung lainnya. Ketentuan mengenai Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 0013.P/DIR/2025 tentang

The provision is intended to ensure that company employees, especially those in strategic positions and with decision-making authority, can perform their duties with high integrity and avoid potential conflicts of interest. The LHKPN policy refers to:

1. Law No. 28 of 1999 on the State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, Article 2, point (7) – Clean and KKN-Free State Officials;
2. The Corruption Eradication Commission (KPK) Regulation No. 2 of 2020, amending KPK Regulation No. 7 of 2016 on Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth Reports (LHKPN);
3. Ministry of SOEs Regulation No. PER-10/MBU/06/2021, amending Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/01/2018 on LHKPN Reporting within the Ministry of State-Owned Enterprises;
4. PT PLN Directors Regulation No. 0074.P/DIR/2017 on LHKPN Guidelines within PT PLN (Persero).

The management of LHKPN within PLN is carried out by the Institutional Admin located in the Risk and Compliance Division of the Risk and Compliance Management Division, which has special authority in managing LHKPN. The e-LHKPN Unit Admin function at PLN NP is served by the Compliance Division of the Head Office, which also has special authority in managing LHKPN. In its implementation, the Head Office Compliance Division coordinates with the compliance functions in units, subsidiaries, and associated companies (AP/PA) to ensure the smooth reporting of LHKPN across all units.

LHKPN reporting by Mandatory Reporting Officials is carried out in printed form and/or other forms that contain descriptions and details of wealth information, personal data, including income, expenses, and other supporting data. The provisions regarding Mandatory Reporters of LHKPN, as regulated in the Board of Directors Regulation Number 0013.P/DIR/2025

Pedoman LHKPN di Lingkungan PLN NP pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Karyawan Perusahaan pada jenjang jabatan struktural yang meliputi Manajemen Atas, Manajemen Menengah dan Manajemen Dasar;
4. Karyawan yang memangku jabatanFungsional Kepakaran dan Fungsi Spesialis;
5. Karyawan yang memangku jabatan Generalist 3 tertentu;
6. Wakil Perusahaan yang ditugaskan sebagai Direksi atau Komisaris di Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi; dan
7. Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan.

concerning the LHKPN Guidelines within PLN NP Article 4, are as follows:

1. Board of Commissioners;
2. Board of Directors;
3. Company Employees at the structural level, which includes Top Management, Middle Management, and Basic Management;
4. Employees holding Functional Expertise and Specialist Function positions;
5. Employees holding the position of Generalist 3;
6. Company Representatives assigned as the Board of Directors or Commissioners in Subsidiaries and Affiliated Companies; and
7. Procurement Planning Officer and Procurement Implementation Officer.

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Perusahaan tiap periodenya mengalami perubahan jumlah yang dimonitoring oleh Bidang Kepatuhan. Perusahaan melakukan monitoring kepatuhan Perusahaan terhadap pelaporan LHKPN pejabat wajib lapor melalui e-filing. Penyampaian LHKPN Tahun 2024 kepada KPK telah dilakukan secara tepat waktu oleh 909 Wajib LHKPN melalui e-lhkpn.kpk.go.id atau telah mencapai 100 % dari total Wajib LHKPN. Sampai dengan akhir tahun 2025, terdapat 909 wajib LHKPN dengan rincian sebagai berikut :

The Compliance Division monitors the changes in the number of mandatory LHKPN officials within the Company each period. The Company monitors compliance with the reporting of LHKPN by mandatory reporting officials by using e-filing. The submission of the 2024 LHKPN to the KPK has been carried out on time by 909 mandatory LHKPN reporters at e-lhkpn. kpk.go.id, achieving 100% compliance from the total mandatory LHKPN reporters. As of the end of 2025, there were 909 mandatory LHKPN reporters with the following details:

Daftar Wajib Lapor dan Kepatuhan LHKPN Tahun 2025
List of Mandatory Reporting and Compliance of LHKPN 2025

No.	Jenjang Jabatan Position Level	Jumlah Total
1	Direksi Board of Directors	7
2	Komisaris Commissioner	6
3	Direksi Anak Perusahaan Board of Directors of Subsidiaries	38
4	Komisaris Anak Perusahaan Commissioner of Subsidiaries	10
5	Manajemen Atas Top Management	19
6	Manajemen Menengah Middle Management	55
7	Manajemen Dasar Basic Management	275
8	Fungsional	4
9	Supervisor Atas Top Supervisor	451
10	Supervisor Dasar Pelaksana Pengadaan Basic Supervisor Procurement Implementer	44
Jumlah Total		**909**

Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2025
Compliance of 2025 LHKPN Reporting

Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy Training and Socialization

Kegiatan sosialisasi kebijakan anti-korupsi dilaksanakan melalui diseminasi informasi dan program peningkatan kompetensi yang mencakup berbagai instrumen kebijakan perusahaan, seperti Kebijakan *Anti-Fraud*, Kebijakan Benturan Kepentingan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016, mekanisme pengendalian gratifikasi, serta kepatuhan pelaporan LHKPN. Selama tahun 2025, telah dilaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut:

1. Edukasi mengenai LHKPN pada 6 Januari 2025
2. Edukasi mengenai SMAP Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Juli 2025
3. Edukasi mengenai Sosialisasi Anti Gratifikasi pada 24 Oktober 2025
4. Edukasi mengenai larangan gratifikasi, *fraud* dan awareness WBS kepada pemasok/mitra usaha pada 30 Oktober 2025
5. Refreshment Pengelolaan SMAP kepada Unit dan Anak Perusahaan pada 19-21 November 2025
6. Edukasi mengenai penerapan SMAP di PLN NP (*Survey* SMAP kepada seluruh *Vendor*) pada 30 Oktober – 15 Desember 2025

The socialization activities of the anti-corruption policy are conducted through information dissemination and competency enhancement programs that encompass various company policy instruments, such as the Anti-Fraud Policy, Conflict of Interest Policy, ISO 37001:2016-based Anti-Bribery Management System (SMAP), gratification control mechanisms, and compliance with LHKPN reporting. Throughout 2025, various socialization and training activities have been conducted as follows:

1. Education on LHKPN on January 6, 2025
2. Education on SMAP (Anti-Bribery Management System) in July 2025
3. Education on Anti-Gratification Socialization on October 24, 2025
4. Education on the prohibition of gratification and fraud, and WBS awareness for suppliers/business partners on October 30, 2025
5. Refreshment on SMAP Management for Units and Subsidiaries on November 19–21, 2025
6. Education on the application of SMAP at PLN NP (SMAP Survey to All Vendors) from October 30 to December 15, 2025

Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement

Pengadaan barang dan jasa di PLN NP menjadi bagian penting dalam mendukung operasional dan kelancaran proses produksi perusahaan. Dalam pelaksanaannya, PLN NP menerapkan prinsip *Value for Money* yang menekankan pencapaian nilai optimal dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, tujuan sosial ekonomi, dan harga. Pendekatan ini memastikan keputusan pengadaan tidak hanya berorientasi pada harga terendah, tetapi pada manfaat paling optimal bagi Perusahaan.

Untuk itu, PLN NP menetapkan kebijakan pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui Peraturan Direksi Nomor 0034.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power beserta Kebijakan Pelaksana sebagai kebijakan turunannya. Seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara terencana dan terstruktur dengan mengacu pada prinsip tata kelola yang baik, guna menjamin ketersediaan material secara tepat waktu, jumlah, dan mutu sesuai kebutuhan operasional.

The procurement of goods and services at PLN NP is a crucial part of supporting the Company's operations and the smoothness of its production processes. In its implementation, PLN NP applies the Value for Money principle, which emphasizes achieving optimal value in terms of quality, quantity, time, location, socio-economic objectives, and price. This approach ensures that procurement decisions are not solely based on the lowest price, but on the greatest benefit to the Company.

For this reason, PLN NP determines a procurement policy that is transparent, efficient, and accountable through Board of Directors' Regulation Number 0034.P/DIR/2025 concerning the Strategic Policy for the Procurement of Goods/Services of PT PLN Nusantara Power, along with the Implementing Policy as its derivative policy. The entire procurement process is carried out in a planned and structured manner, adhering to the principles of good governance, to ensure the timely availability of materials in the right quantity and quality according to operational needs.

Pelaksana Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa
Executor of the Goods and Services Procurement Function

Untuk mendukung efektivitas operasional Perusahaan, PLN NP mengelola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan struktur organisasi serta pembagian kewenangan yang telah ditetapkan. Di Kantor Pusat, pengadaan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Direksi, sedangkan di tingkat unit menjadi tanggung jawab pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit sesuai kewenangannya. Seluruh ketentuan ini mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 0034.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power, untuk memastikan proses berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.

Pengadaan Barang/Jasa harus didasarkan pada konsep *value for money* (VfM)/nilai beli yang sepadan, yaitu mengacu pada kombinasi optimum dari 6 (enam) rights (6 Rs) sasaran Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kebutuhan dari Pengguna Barang/Jasa. Hasil dari suatu Pengadaan Barang/Jasa harus merupakan pengembalian terbaik (*best return*) dari investasi yang mempertimbangkan kriteria evaluasi yang sudah ditentukan.

To support the operational effectiveness of the Company, PLN NP manages the procurement of goods and services based on the established organizational structure and division of authority. At the Head Office, procurement is carried out by officials appointed by the Board of Directors, while at the unit level, it is the responsibility of officials designated by the Unit Leader according to their authority. All these provisions refer to Board of Directors' Regulation Number 0034.P/DIR/2025 concerning the Strategic Policy for the Procurement of Goods/Services of PT PLN Nusantara Power, to ensure the process runs orderly, transparently, and accountably.

Procurement of Goods/Services must be based on the concept of value for money (VfM), which refers to the optimal combination of the 6 rights (6 Rs) of the Procurement of Goods/Services that meet the needs of the Users of Goods/Services. The result of a Procurement of Goods/Services must be the best return on investment, considering the predetermined evaluation criteria.

Value for Money (VfM) bergantung pada kombinasi yang tepat antara kompetisi, cara inovatif Pengadaan Barang/Jasa termasuk bentuk Perjanjian/Kontrak, dan juga pengelolaan risiko yang efektif. Praktik Pengadaan Barang/Jasa yang baik berfokus pada *Value for Money* (VfM) sebagai prinsip fundamental.

Kebijakan ini mengadopsi konsep *Value for Money* (VfM) dengan menempatkan 6 Rs dalam proporsi yang tepat, sesuai dengan tujuan dan strategi Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi Perusahaan.

Value for Money (VfM) depends on the right combination of competition, innovative methods of Procurement of Goods/Services including the form of Agreements/Contracts, and effective risk management. Good Procurement of Goods/Services practices focus on Value for Money (VfM) as a fundamental principle.

This policy adopts the concept of Value for Money (VfM) by placing the 6 Rs in the right proportions, in accordance with the goals and strategies of Goods/Services Procurement to achieve the best results for the Company.

Metode Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
Goods and Services Provider Selection Method

Perusahaan menetapkan metode pemilihan penyedia barang dan jasa berdasarkan pertimbangan strategis, tidak hanya dari nilai pengadaan tetapi juga tingkat kritikalitas kebutuhan, kondisi pasar, serta pemahaman terhadap karakteristik penyedia. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penyedia yang memberikan nilai terbaik bagi perusahaan. Secara umum, PLN NP menggunakan beberapa metode pemilihan penyedia yang disesuaikan dengan klasifikasi kebutuhan dan tingkat kompleksitas pengadaan, yaitu:

1. *E-Purchasing*
   Metode pengadaan untuk Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan sudah melalui evaluasi untuk memperoleh *value for money* yang terbaik.
2. Pelelangan Terbatas
   Dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang terdapat dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT). Pelelangan Terbatas dapat berupa pelelangan internasional, nasional, dan lokal. Pelelangan Terbatas dengan DPT merupakan strategi utama Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pelelangan Terbuka
   Dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa, yang diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi melalui proses prakualifikasi maupun pascakualifikasi, untuk mengikuti pelelangan.

The Company determines methods for selecting goods and service providers based on strategic considerations, not only from the procurement value but also the criticality level of the needs, market conditions, and understanding of the provider's characteristics. It aims to obtain providers that offer the best value for the Company. In general, PLN NP uses several supplier selection methods tailored to the classification of needs and the level of procurement complexity, namely:

1. E-Purchasing
   Method for Goods/Services that are already listed in the electronic catalog and have undergone evaluation to obtain the best value for money.

2. Limited Tendering
   Conducted by inviting suppliers from the Selected Provider List (DPT). Limited tendering can be international, national, or local. Limited Tendering with DPT is the main strategy for Goods and Services Procurement.

3. Open Tendering
   Conducted by inviting Goods/Services Providers, widely announced to provide qualified Goods/Services Providers the opportunity to participate in the auction through prequalification or post-qualification processes.

4. *Tender* Terbatas
   Tender Terbatas dilakukan secara terbatas, dilakukan dengan mengundang calon Penyedia Barang/Jasa yang terdapat pada Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) atau *Shortlist*.
5. *Tender* Cepat
   Tender Cepat merupakan metode Pengadaan Barang/Jasa pada Penyedia Barang/Jasa yang telah terkualifikasi dengna membandingkan harga tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi dan teknis, sanggah dan sanggah banding.
6. *Tender* Terbuka
   Tender Terbuka dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan.

4. Limited Tender
   A Limited Tender is conducted in a limited manner, by inviting prospective Goods/Services Providers listed in the Selected Providers List (DPT) or Shortlist.
5. Quick Tender
   A Quick Tender is a method of Goods/Services Procurement for qualified Providers of Goods/Services by comparing prices without requiring qualification assessment, administrative and technical offer evaluation, rebuttal, and appeals.
6. Open Tender
   An Open Tender is conducted openly and broadly announced to provide opportunities for Providers of Goods/Services who meet the requirements.

Metode Penawaran
Offer Methods

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan dilakukan melalui mekanisme penawaran yang disesuaikan dengan kategori pengadaannya. Setiap kategori memiliki metode dan prosedur tersendiri untuk memastikan proses berjalan transparan, efisien, dan akuntabel. Secara umum, metode penawaran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Request for Quotations* (RFQ)/Permintaan Penawaran
   Merupakan metode permintaan penawaran untuk pengadaan yang bersifat kecil atau rutin dengan spesifikasi yang mudah ditemui di pasar.
2. *Invitation to Bid* (ITB)/Undangan *Tender*
   Merupakan metode penawaran untuk kebutuhan yang spesifikasinya dapat dibuat secara jelas dan lengkap.
3. *Request for Proposals* (RFP)/Permintaan Proposal
   Merupakan metode penawaran untuk kebutuhan yang spesifikasinya tidak dapat dilakukan secara penuh pada saat undangan penawaran diumumkan.

Procurement of goods and services within the Company is conducted through an offer mechanism tailored to its procurement categories. Each category has its own methods and procedures to ensure the process runs transparently, efficiently, and accountably. In general, the offer methods used are as follows:

1. Request for Quotations (RFQ)
   It is a method of requesting offers for small or routine procurements with specifications easily found in the market.
2. Invitation to Bid (ITB)
   It is a bidding method for needs whose specifications can be clearly and completely determined.
3. Request for Proposals (RFP)
   It is a bidding method for needs whose specifications cannot be fully determined when the invitation to bid is announced.

Pengadaan Khusus
Special Procurements

Pengadaan Khusus adalah metode pengadaan yang memanfaatkan perjanjian atau kontrak yang telah ditetapkan oleh pihak ketiga yang berwenang. Mekanisme ini digunakan untuk mendukung efisiensi operasional serta mempermudah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, baik yang bersifat rutin maupun strategis, dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Adapun kegiatan yang termasuk dalam kategori Pengadaan Khusus adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Energi Primer
2. Pengadaan untuk Proyek Eksternal
3. Sewa Menyewa dan Sewa Beli
4. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
5. *Build, Maintenance and Transfer* (BMT)
6. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (Alih Daya)
7. Pengadaan Asuransi
8. Pengadaan *parts* Pembangkit *Reverse Engineering* dan *Re-Engineering*

Special Procurement is a procurement method that utilizes agreements or contracts established by an authorized third party. This mechanism is used to support operational efficiency and facilitate the fulfillment of goods and services needs, both routine and strategic, while still adhering to the applicable provisions. The activities included in the Special Procurement category are as follows:

1. Primary Energy Procurement
2. Procurement for External Project
3. Leasing and Rent-to-Own
4. Leasing
5. Build, Maintenance, and Transfer (BMT)
6. Handover of part of the work implementation to another company (Outsourcing)
7. Insurance Procurement
8. Power Plant Parts Reverse Engineering and ReEngineering Procurement.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Implementation of Goods and Services Procurement

Perusahaan menerapkan prinsip kesetaraan (level playing field) dalam seluruh proses pengadaan. Prinsip ini diwujudkan dengan memberikan informasi yang sama kepada seluruh calon penyedia barang dan jasa secara bersamaan, sehingga setiap pihak memiliki kesempatan yang adil dalam mengakses informasi. Hal ini memungkinkan calon penyedia mempersiapkan dan menyampaikan penawaran secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terdiri dari:

The Company applies the principle of equality (level playing field) in the entire procurement process. This principle is actualized by providing the same information to all prospective suppliers of goods and services simultaneously, so that each party has a fair opportunity to access the information. It allows prospective suppliers to prepare and submit their offers optimally in accordance with the applicable provisions. In general, the stages of the procurement process for goods and services consist of:

Proses Pelaksanaan Pengadaan
Procurement Process Implementation

Peningkatan Kemampuan Pemasok
Supplier Capability Enhancement

Sebagai bentuk komitmen dalam membangun ekosistem pengadaan yang berkelanjutan, Perusahaan melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi pemasok. Kegiatan ini meliputi pembinaan, pelatihan, serta penyediaan akses informasi dan regulasi agar pemasok mampu memenuhi standar mutu, efisiensi, dan kepatuhan yang ditetapkan. Melalui penguatan kapasitas tersebut, Perusahaan tidak hanya memperkuat rantai pasok, tetapi juga mendorong pertumbuhan serta daya saing penyedia lokal dan UMKM. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan Perusahaan antara lain:

1. Program Sosialisasi terkait Pengadaan
   Perusahaan secara berkala mengadakan pelatihan teknis dan sosialisasi kebijakan pengadaan bagi para pemasok. Kegiatan ini mencakup pemahaman prosedur pengadaan, standar mutu, kepatuhan regulasi, serta penggunaan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*).

As a form of commitment to building a sustainable procurement ecosystem, the Company undertakes various efforts to enhance the capacity and competence of suppliers. These activities include mentoring, training, and providing access to information and regulations so that suppliers can meet the established standards of quality, efficiency, and compliance. Through this capacity building, the Company not only strengthens the supply chain but also encourages the growth and competitiveness of local suppliers and MSMEs. Several efforts conducted by the Company include:

1. Procurement Socialization Program
   The Company regularly conducts technical training and procurement policy socialization for suppliers. The materials presented include procurement procedures, quality standards, compliance with regulations, and the use of the electronic procurement system (e-procurement).

2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
   Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi lokal, Perusahaan memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses registrasi sebagai pemasok maupun penyusunan dokumen penawaran. Serta pembinaan UMKM yang dapat mendukung pengembangan pembangkit melalui pengolahan bahan baku biomassa.
3. Penilaian dan Umpan Balik Berkala
   Pemasok dievaluasi secara berkala melalui sistem penilaian kinerja yang meliputi aspek kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan administratif. Hasil evaluasi tersebut disampaikan sebagai umpan balik untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
4. Kemitraan Jangka Panjang dan Transfer Pengetahuan
   Perusahaan menjalin kemitraan strategis dengan pemasok utama melalui perjanjian jangka panjang yang didukung program knowledge sharing, seperti pelatihan teknis, penerapan standar mutu industri, dan pengenalan teknologi baru.
5. Penyederhanaan Proses Registrasi dan Akses Informasi
   Dalam rangka meningkatkan inklusivitas, Perusahaan menyederhanakan proses pendaftaran mitra penyedia serta menyediakan akses informasi melalui portal pengadaan yang transparan dan mudah diakses.

2. Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)
   To support local economic development, the Company assists MSMEs in the registration process as suppliers and in the preparation of bid documents. Additionally, it offers guidance to MSMEs that can support the development of power plants through the processing of biomass raw materials.
3. Periodic Assessment and Feedback
   Each supplier is periodically evaluated through a performance assessment system that includes aspects of quality, timeliness, and administrative compliance. The evaluation results are provided as constructive feedback to encourage continuous improvement.
4. Long-Term Partnerships and Knowledge Transfer
   The Company builds strategic partnerships with key suppliers through long-term agreements accompanied by knowledge-sharing programs, including technical training, the implementation of industry quality standards, and the introduction of new technologies.
5. Simplification of the Registration Process and Access to Information
   To enhance inclusivity, the Company simplifies the registration process for supplier partners and opens access to information through a transparent and easily accessible procurement portal.

Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengadaan
Transparency and Accountability in Procurement Process

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa menjadi bagian dari komitmen Perusahaan untuk mewujudkan praktik *good procurement.* Kedua prinsip ini memastikan setiap tahapan pengadaan berlangsung terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, efisiensi, dan pencegahan penyimpangan. Dengan demikian, proses pengadaan diarahkan agar selaras dengan tata kelola yang baik dan prinsip integritas. Sebagai wujud penerapan transparansi dan akuntabilitas, Perusahaan telah melakukan beberapa hal berikut:

The application of transparency and accountability principles in the procurement of goods and services is part of the Company's commitment to achieving good procurement practices. These two principles ensure that every stage of procurement is run openly, responsibly, and support the enhancement of stakeholder trust, efficiency, and the prevention of deviations. Thus, the procurement process is directed to align with good governance and integrity principles. As a manifestation of the implementation of transparency and accountability, the Company has undertaken the following actions:

1. Pemanfaatan Media Pengumuman Pengadaan berbasis *Web*
   Pengumuman Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya wajib dilakukan secara terbuka untuk umum yang dapat diakses secara luas antara lain melalui *website* Perusahaan.
2. Penerapan Masa Sanggah
   Dalam upaya menjamin transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam setiap proses pengadaan barang/jasa, penyedia barang/jasa yang keberatan atas pengumuman pemenang pengadaan diberikan hak untuk mengajukan sanggah secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan dengan disertai bukti pendukung. Sanggah yang diajukan hanya terkait dengan kesesuaian pelaksanaan pengadaan terhadap prosedur dan tata cara yang tercantum dalam Dokumen Tender/RKS. Pengajuan sanggah dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diumumkannya pemenang pengadaan, dan Pejabat Pelaksana Pengadaan wajib memberikan jawaban atas sanggah tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan sanggah.
3. Menyediakan Media Pengaduan Pengadaan melalui Komite WBS
   Laporan atas dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat disampaikan melalui *Whistleblowing System*, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 004.K/021/DIR/2020 dan Nomor 007.K/DK-PJB/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

1. Utilizing Web-Based Procurement Announcements
   The announcement of the Procurement of Goods/Construction Work/Other Services must be conducted openly to the public and can be broadly accessed, including through the Company's website.
2. Implementation of Objection Period
   In an effort to ensure transparency and equal treatment in every procurement process of goods/services, suppliers who object to the announcement of the procurement winner are granted the right to submit a written objection to the Procurement Officer, accompanied by supporting evidence. The objection submitted is only related to the compliance of the procurement implementation with the procedures and methods outlined in the Tender Document/RKS. The rebuttal can be submitted no later than 2 (two) working days from the announcement of the procurement winner, and the Procurement Officer is obliged to respond to the rebuttal no later than 7 (seven) working days from the receipt of the rebuttal submission.
3. Providing Procurement Complaint Media through the WBS Committee
   Complaints regarding violations in the procurement of goods and services can be reported through the Whistleblowing System in accordance with the Joint Decree (SKB) between the Board of Directors and the Board of Commissioners Number: 004.K/021/DIR/2020 and Number: 007.K/DK-PJB/2020 concerning the Whistleblowing System.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Penerapan Pedoman Governansi Perusahaan merupakan bagian dari upaya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, memperkuat kepercayaan dan penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi Perusahaan, serta mendukung pencapaian kinerja jangka panjang yang berkelanjutan. Implementasi Pedoman Governansi Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada berbagai standar utama, antara lain pedoman Kementerian BUMN, Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI), ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015, yang secara konsisten diterapkan oleh Perusahaan sebagai acuan dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

The implementation of the Guidelines for Corporate Governance is part of the effort to comply with applicable legal provisions, strengthen trust and value creation for stakeholders, enhance the Company's reputation, and support the achievement of sustainable long-term performance. The implementation of the Guidelines for Corporate Governance is carried out by referring to various key standards, including the guidelines from the Ministry of SOEs, the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI), the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), and the Guidelines for Public Company Governance as regulated in OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015, which are consistently applied by the Company as a reference in achieving good governance.

Standar Kementerian BUMN

Ministry of SOEs Standards

Perusahaan memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya regulasi Kementerian BUMN. Sebagai Subholding BUMN di sektor ketenagalistrikan, penerapan GCG di PLN NP mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan yang sekaligus mencabut Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012. Meskipun demikian, Perusahaan tetap melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil penilaian tahun sebelumnya berdasarkan parameter tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga peningkatan kualitas penerapan GCG. Adapun tindak lanjut hasil penilaian GCG berdasarkan parameter SK-16/S.MBU/2012 adalah sebagai berikut:

The Company ensures that all business activities operate in accordance with the provisions of laws and regulations, particularly the regulations of the Ministry of SOEs. As a SOE Subholding in the electricity sector, the implementation of GCG at PLN NP refers to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities, which simultaneously revokes the Secretary of the Ministry of SOE Decree Number SK-16/S.MBU/2012. Nevertheless, the Company continues to monitor the follow-up on the previous year's assessment results based on these parameters as part of efforts to maintain the improvement in the quality of GCG implementation. The follow-up on the GCG assessment results based on the SK-16/S.MBU/2012 parameters are as follows:

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG Periode Tahun 2023 berdasarkan SK-16/BUMN/2012

Follow-up Recommendations of GCG Assessment Results for the 2023 Period based on SK-16/BUMN/2012

No.	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up
ASPEK 1 Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan **ASPECT 1 Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance**		
1	Melaksanakan *survey* pemahaman Dewan Komisaris dan organ pendukungnya atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku Perusahaan serta memperoleh tingkat pencapaian pemahaman yang Sangat Baik. Conducted a survey to assess the Board of Commissioners and its supporting organs' understanding of the Good Corporate Governance Guidelines and the Company's Code of Conduct, resulting in a "Very Good" level of understanding.	Pelaksanaan *survey* pemahaman atas implementasi Tata Kelola Perusahaan PT PLN Nusantara Power Tahun 2025 kepada Direksi, Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, serta seluruh karyawan, serta dilakukan perhitungan tingkat pencapaian pemahaman. The implementation of a comprehension survey on the Corporate Governance of PT PLN Nusantara Power in 2025 to the Board of Directors, Board of Commissioners, and supporting organs, as well as all employees, and the calculation of the level of comprehension achievement.
2	Melaksanakan survey pemahaman Dewan Komisaris dan organ pendukungnya atas kebijakan pengendalian gratifikasi serta memperoleh tingkat pencapaian pemahaman yang Sangat Baik. Conducted a survey to assess the Board of Commissioners and its supporting organs' understanding of the gratification control policy, also resulting in a "Very Good" level of understanding.	Pelaksanaan survey pemahaman kebijakan pengelolaan gratifikasi kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya. Implementation of a survey on the understanding of the gratification management policy for the Board of Commissioners and its supporting organs.
3	Melakukan pemutakhiran Kebijakan WBS sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023. Updated the Whistleblowing System (WBS) Policy in line with the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023.	Proses penyusunan Draft Peraturan Direksi WBS sesuai dengan Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023. The process of drafting the Board of Directors Regulation on WBS in accordance with Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023.
ASPEK 2 PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL Proses tindak lanjut atas hal ini menjadi kewenangan pada PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Saham Perusahaan **ASPECT 2 SHAREHOLDERS AND GMS/CAPITAL OWNERS** The follow-up process for this matter is under the authority of PT PLN (Persero) as the Company's shareholder		
1	Menetapkan jabatan Direksi secara definitif selambat-lambatnya 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. Appoint definitive members of the Board of Directors no later than 30 days after the end of their term of office.	Telah dilakukan penetapan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Nusantara Power pada tanggal 26 Juni 2025. Tidak terdapat periode kosong selama pemberhentian dan pengangkatan pada Direksi dan Dewan Komisaris tersebut. The appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners has been made through a Circular Shareholders' Resolution of PT PLN Nusantara Power on June 26, 2025. There was no gap period during the dismissal and appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners.
2	Menetapkan jumlah Dewan Komisaris minimal sama dengan Direksi. Determine the number of members of the Board of Commissioners to be at least equal to that of the Board of Directors.	Telah dilakukan penetapan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) PT PLN Nusantara Power pada tanggal 26 Juni 2025. Penetapan RUPS tersebut terdiri dari 6 anggota Direksi dan 6 anggota Dewan Komisaris. Sehingga ini jumlah Dewan Komisaris sama dengan jumlah Direksi. The appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners has been made through the Circular Shareholders' Resolution of PT PLN Nusantara Power on June 26, 2025. The GMS resolution consists of 6 members of the Board of Directors and 6 members of the Board of Commissioners. Thus, the number of the Board of Commissioners is equal to the number of the Board of Directors.

No.	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up
3	Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang Anggota Dewan Komisaris. Set the maximum number of Board of Commissioner positions that may be held by a single Commissioner.	Meratifikasi penuh Permen BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 untuk kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris: 1. Diperkenankan merangkap komisaris pada badan usaha non-BUMN dengan syarat kehadiran rapat ≥75% setahun sebagai prasyarat tantiem. 2. Dilarang rangkap sebagai komisaris di BUMN lain (kecuali penugasan Menteri), rangkap sebagai Direksi pada BUMN/badan usaha mana pun, jabatan yang dilarang peraturan, atau yang menimbulkan benturan kepentingan. 3. Mewajibkan Surat Pernyataan (Lampiran PER-3) termasuk tidak menjadi pengurus/calon partai politik dan pernyataan anti-rangkap. Fully ratifying Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 for the concurrent position policy of the Board of Commissioners: 1. Allowed to concurrently serve as a commissioner in non-SOEs, with the condition of attending meetings ≥75% per year as a prerequisite for a bonus. 2. Prohibited from holding concurrent positions as a commissioner in another SOE (except for Ministerial assignments), holding concurrent positions as a Board of Directors in any SOE/business entity, positions prohibited by regulations, or positions that create a conflict of interest. 3. Requiring a Statement Letter (Appendix PER-3), including not being an administrator/candidate of a political party and an anti-concurrent position statement.
4	RUPS memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RKAP secara tepat waktu. The GMS approves the draft ABOP in a timely manner.	RUPS RKAP PT PLN Nusantara Power telah diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2025. Telah sesuai dengan UU Perseroan Terbatas yang menyatakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diajukan kepada RUPS harus disetujui paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan. The GMS for ABOP of PT PLN Nusantara Power was held on January 30, 2025. It is in accordance with the Limited Liability Company Law, which states that the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) submitted to the GMS must be approved no later than 30 days after the current fiscal year.
5	Pemegang Saham memberikan persetujuan KPI Dewan Komisaris. Shareholders grant approval for the KPI of the Board of Commissioners.	Sesuai dengan Permen BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Pasal 17 bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas dewan, komite, dan setiap individu komisaris. Evaluasi tahunan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri. In accordance with Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 Article 17, the Board of Commissioners is required to conduct an annual objective evaluation to determine the effectiveness of the board, committees, and each commissioner. The Board of Commissioners submitted this annual evaluation to the GMS/Minister.
6	Menyusun pedoman/kebijakan dividen. Prepare dividend guidelines or policies.	Perhitungan Dividen dilakukan berdasarkan parameter: 1. Pemenuhan Saldo Laba sebagai Cadangan Wajib 2. Kondisi Likuiditas 3. Kecukupan Modal Kerja 4. Pemenuhan Pendanaan internal untuk Investasi 2025 5. Optimasi Struktur Permodalan Dividend calculations are based on the following parameters: 1. Fulfillment of Profit Balance as Mandatory Reserve 2. Liquidity Condition 3. Working Capital Adequacy 4. Fulfillment of Internal Funding for Investment 2025 5. Optimization of Capital Structure
ASPEK 3 : DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS **ASPECT 3: BOARD OF COMMISSIONERS/SUPERVISORY BOARD**		
1	Menetapkan pembagian tugas Anggota Dewan Komisaris dengan mencakup seluruh bidang tugas Direksi. Assign responsibilities to each member of the Board of Commissioners to cover all areas of the Board of Directors' duties.	Pembuatan SK pembagian tugas Komite yang mencakup anggota Dewan Komisaris untuk mengakomodir pembagian tugas pengawasan seluruh direktorat. The drafting of a decree on the distribution of committee tasks, which includes members of the Board of Commissioners, to accommodate the distribution of supervisory tasks across all directorates.
2	Mendokumentasikan surat penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP. Document the submission letter of the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners to the Board of Directors to be included as part of the RKAP.	1. RKA Dewan Komisaris disusun dalam waktu yang bersamaan dengan penyusunan RKAP. 2. Memastikan penyampaian RKA kepada Direksi. 1. The Board of Commissioners' Budget and Operational Plan (BOP) is prepared simultaneously with the preparation of the ABOP. 2. Ensuring the delivery of the Board of Directors' BOP.

No.	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up
3	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan. Submit the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners in writing to the Shareholders for approval.	Memastikan RKA Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham melalui surat Komisaris Utama setelah RKA Dewan Komisaris terbit. Ensuring that the Board of Commissioners' BOP is communicated to the Shareholders via a letter from the President Commissioner after the Board of Commissioners' BOP is issued.
4	Melengkapi BOC *Manual* dengan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham Complete the BOC Manual with selection criteria for prospective Directors and procedures for proposing such candidates to the Shareholders.	BOC *Manual* telah mencantumkan mengenai kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham. The BOC Manual has included the selection criteria for prospective Board of Directors and the proposal of these candidates to the Shareholders.
5	Melampirkan Pakta Integritas pada setiap persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Direksi dan dilampirkan pada saat pengajuan persetujuan kepada Pemegang Saham/ RUPS. Attach an Integrity Pact to every Board of Commissioners' approval of proposals from the Board of Directors, and include it when submitting approvals to the Shareholders/ GMS.	Pakta integritas hanya diwajibkan bagi pihak yang mengajukan program/ usulan (dalam hal ini Direksi). Sehingga Dewan Komisaris tidak berkewajiban menandatangani Pakta Integritas apabila keputusan Dewan Komisaris bersifat persetujuan/tanggapan. Dewan Komisaris akan membuat Pakta Integritas apabila pihak yang mengajukan program/usulan adalah Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. The integrity pact is only mandatory for the party proposing the program/ proposal (in this case, the Board of Directors). Therefore, the Board of Commissioners is not obligated to sign the integrity pact if their decision is of an approval/response nature. The Board of Commissioners will create an integrity pact if the party proposing the program/proposal is the Board of Commissioners to the Shareholders, based on the Articles of Association and applicable regulations.
6	Penyampaian KPI Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Submit the KPI of the Board of Commissioners to the Shareholders for approval.	Penyampaian KPI Dewan Komisaris dilakukan bersamaan dengan penyampaian RKA Dewan Komisaris. The submission of the Board of Commissioners' KPIs is conducted simultaneously with the submission of the Board of Commissioners' BOP.
7	Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat. The Board of Commissioners or its Committees evaluate the performance of each Commissioner, and the results are documented in meeting minutes.	1. Memastikan penyusunan sistem penilaian capaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris dengan pembagian tugas masing-masing. 2. Evaluasi capaian kinerja Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris. 1. Ensuring the development of a performance evaluation system for each member of the Board of Commissioners with their respective task assignments. 2. The evaluation of the performance achievements of the Board of Commissioners is documented in the minutes of the internal Board of Commissioners meeting.
8	Mendorong tingkat kehadiran Anggota Dewan Komisaris bagi anggota Dewan Komisaris yang tingkat kehadiran kurang dari 85% dari total rapat. Encourage attendance for Member of the Board of Commissioners with participation rates below 85% of total meetings.	1. Memastikan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam setiap rapat internal Dewan Komisaris. 2. Dilakukan sosialisasi terkait Board Manual yang mencakup tingkat kehadiran rapat. 1. Ensuring the presence of the Board of Commissioners members at every internal Board of Commissioners meeting. 2. Socialization was conducted regarding the Board Manual, which includes the level of meeting attendance.
9	Menyediakan dan menyampaikan bahan-bahan rapat kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat. In the meeting invitation, a point is included regarding the timing of material submission, which is expected to be submitted prior to the meeting.	Di dalam undangan rapat dicantumkan poin terkait waktu penyampaian materi yang diharapkan dapat disampaikan sebelum rapat dimulai. Provide and distribute meeting materials to participants no later than three (3) days prior to the meeting.
10	Mendokumentasikan progress *monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris (status selesai, proses dan belum). Document the progress of monitoring the follow-up of decisions, recommendations, and directions from the Board of Commissioners (categorized as completed, in progress, or pending).	Akan dibuat media untuk progress *monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris. Provide and distribute meeting materials to participants no later than three (3) days prior to the meeting.
11	Memutakhirkan Piagam Komite dengan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-3/ MBU/03/2023. Update Committee Charters in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 and Number PER-3/MBU/03/2023.	Akan dilakukan pemutakhiran Piagam Komite yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-3/MBU/03/2023. The Committee Charter will be updated pursuant to the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 and the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023.

No.	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up
12	Melengkapi program kerja Komite dengan self assessment kinerja komite. Include a self-assessment of committee performance in the committee's work program.	Memasukan *self assessment* kinerja komite ke dalam program kerja Komite. Incorporating the committee's self-assessment into the committee's work program.
ASPEK 4 DIREKSI **ASPECT 4 BOARD OF DIRECTORS**		
1	Menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan yaitu 15 September sebelum tahun RKAP. Deliver the ABOP draft to the Board of Commissioners on time or according to the specified schedule, which is September 15, before the ABOP year.	1. Mengirimkan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Rancangan RKAP 2026 disampaikan kepada Dewan Komisaris tanggal 17 Oktober 2025 (sesuai dengan ketentuan pada *Board Manual* PT PLN Nusantara Power). 1. Sending the ABOP draft to the Board of Commissioners in accordance with the applicable provisions. 2. The draft ABOP 2026 was submitted to the Board of Commissioners on October 17, 2025 (in accordance with the provisions in the Board Manual of PT PLN Nusantara Power).
2	Mengesahkan draft Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) PLN Nusantara Power Tahun 2024-2028. Ratifying the draft of the Information Technology Strategic Plan (RSTI) for PLN Nusantara Power for the years 2024-2028.	Pengesahan Draft Rencana Strategis Teknologi Informasi PLN NP 2024 - 2028. Approval of the Draft Strategic Plan for Information Technology of PLN NP 2024 - 2028.
3	Mendokumentasikan penyampaian laporan hasil audit TI kepada Dewan Komisaris. Documenting the delivery of the IT audit report to the Board of Commissioners.	Telah dilakukan audit operasional TI oleh Satuan Internal Audit PT PLN (Persero) tahun 2024 dan hasil audit. operasional TI sudah disampaikan oleh Satuan Internal Audit PT PLN NP melalui buku laporan kegiatan Satuan Internal Audit triwulan IV 2024 kepada Komite Audit. An IT operational audit was conducted by the Internal Audit Unit of PT PLN (Persero) in 2024, and the results of the IT operational audit have been submitted by the Internal Audit Unit of PT PLN NP through the Internal Audit Unit activity report book for the fourth quarter of 2024 to the Audit Committee.
4	Nilai HPS disajikan secara terbuka dan bersifat tidak rahasia. The HPS value is presented openly and is not confidential.	1. Pedoman pengadaan barang dan jasa telah disusun dan disahkan. 2. Sosialisasi pedoman pengadaan barang/jasa yang beru telah dilakukan. 3. HPS diumumkan jika proses pengadaan memberlakukan ketentuan penawaran yang terlalu rendah dari HPS dinyatakan gugur. 1. The guidelines for the procurement of goods and services have been drafted and approved. 2. The socialization of the new procurement guidelines for goods/services has been carried out. 3. HPS is announced if the procurement process enforces the provision that bids below the HPS are declared disqualified.
5	Mengesahkan draft Kebijakan Sistem Pengendalian Internal. Ratifying the draft of the Internal Control System Policy.	Kebijakan sistem pengendalian internal PLN NP telah disusun dan disahkan. 1. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Powerr Nomor 0005.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Pengendalian Internal tanggal 23 April 2025 2. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0014.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal tanggal 13 Juni 2025 The internal control system policy of PLN NP has been drafted and approved. 1. Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 0005.P/DIR/2025 concerning Strategic Policy for Internal Control dated April 23, 2025 2. Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power Number 0014.P/DIR/2025 concerning the Implementation Policy of the Internal Control System dated June 13, 2025
6	Menyusun kebijakan kreditur secara khusus. Formulating creditor policies specifically.	*Code of Conduct* telah disahkan dan tercantum mengenai hak-hak kreditur. The Code of Conduct has been approved and includes provisions regarding creditor rights.
7	Melaksanakan RUPS RKAP tepat waktu yaitu paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan. Conduct the GMS for ABOP on time, which is no later than 30 days after the fiscal year begins.	RUPS RKAP 2026 telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2026 (telah sesuai ketentuan target waktu). The GMS for ABOP 2026 was held on January 27, 2026 (in accordance with the scheduled target time).

No.	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up
ASPEK 5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi ASPECT 5 Information Disclosure and Transparency		
1	Meraih penghargaan terbaik/tertinggi dalam ajang *Annual Report Award* (ARA). Achieving the best/highest award in the Annual Report Award (ARA) event.	1. Melakukan perbaikan pada susunan SK Tim Penyusun ARSR (menambahkan Koordinator dan Wakil Koordinator untuk masing-masing stream bab ARSR). 2. Melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari ARA tahun sebelumnya. 3. Melakukan penyusunan konten AR dan SR sesuai dengan kriteria ARA. 4. Membuat materi induksi untuk persiapan wawancara ARA. 1. Make improvements to the composition of the ARSR Drafting Team SK (adding Coordinators and Deputy Coordinators for each ARSR chapter stream). 2. Make improvements according to the recommendations from the previous year's ARA. 3. Preparing AR and SR content according to ARA criteria. 4. Creating induction materials for ARA interview preparation.
ASPEK 6 : Aspek Lainnya ASPECT 6: Other Aspects		
1	Mencapai kinerja terbaik di sektor usaha BUMN atau di industrinya sehingga menjadi *best practices* atau menjadi tujuan benchmark bagi Perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun Perusahaan swasta) Achieving the best performance in the SOE business sector or in its industry, thereby becoming a best practice or a benchmark goal for other companies (both SOE and private companies).	Pelaksanaan benchmark oleh perusahaan lain mengenai *best practice* PLN NP. The implementation of a benchmark by another company regarding PLN NP's best practices.

ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

Penguatan penerapan GCG dilakukan melalui implementasi praktik tata kelola yang mengacu pada ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), dengan mengadopsi standar regional yang selaras dengan prinsip internasional, termasuk OECD *Principles of Corporate Governance*. Evaluasi kesesuaian praktik tata kelola perusahaan terhadap indikator ACGS dilakukan oleh PLN NP melalui proses pemetaan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi capaian yang telah diperoleh serta area yang masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar regional.

The GCG implementation is strengthened through the implementation of governance practices referring to the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), by adopting regional standards that align with international principles, including the OECD Principles of Corporate Governance. Evaluation of the conformity of corporate governance practices to the ACGS indicators is conducted by PLN NP through a comprehensive mapping process to identify the achievements that have been made and the areas that still need improvement to meet regional standards.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Perusahaan juga melakukan *monitoring* tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri periode tahun 2024 berdasarkan parameter ACGS. Adapun tindak lanjut hasil penilaian mandiri penerapan GCG berdasarkan parameter ACGS adalah sebagai berikut:

As part of this process, the Company also conducts follow-up monitoring on the results of the self-assessment for the 2024 period based on ACGS parameters. The follow-up on the self-assessment results of GCG implementation based on ACGS parameters is as follows:

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG Periode Tahun 2024 berdasarkan ACGS

Follow-up Recommendations of GCG Assessment Results for the 2024 Period based on ACGS

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow up
Prinsip A - Hak-Hak Pemegang Saham Principle A - Shareholder Rights		
1	Perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum rapat dimulai. The Company disclosed the voting procedures used before the meeting began.	1. Prosedur terkait pemungutan suara terdapat dalam tata tertib RUPS RKAP 2025 dan RUPS LPT 2024. 2. Memastikan prosedur terkait pemungutan suara terdapat dalam tata tertib RUPS RKAP 2026 dan RUPS LPT 2025, yang diungkapkan pada website. 1. The procedures related to voting are included in the rules of order for the GMS for the 2025 Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and 2024 Annual Accountability Report (AAR). 2. Ensuring that the procedures related to voting are included in the rules of the GMS for the 2026 ABOP and the 2025 AAR, as stated on the website.
2	Risalah RUPST memuat pertanyaan yang diajukan pemegang saham serta jawaban pertanyaan. The Company disclosed that the entire Board of Commissioners attended the AGMS on the Company's website.	1. Dalam Berita Acara RUPS RKAP 2025 telah memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab. 2. Sedang dilakukan penyusunan Berita Acara RUPS LPT 2024. 3. Memastikan RUPS RKAP 2026 dan RUPS LPT 2025 memuat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan jawaban pertanyaan, dimana RUPS RKAP 2026 dan RUPS LPT 2025 akan dilaksanakan pada tahun 2026. 1. The Minutes of the GMS for the 2025 ABOP included questions raised by shareholders and the answers provided by the meeting chairperson or the responding party. 2. The preparation of the Minutes of the GMS for the 2024 AAR is currently underway. 3. Ensuring that the GMS for the 2026 ABOP and 2025 AAR include questions submitted by Shareholders and their answers, where the GMS for the 2026 ABOP and 2025 AAR will be held in 2026.
3	Perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh Dewan Komisaris menghadiri RUPST pada *website* Perusahaan. The Company disclosed that the entire Board of Commissioners attended the AGMS on the Company's website.	1. *Website* perusahaan telah diungkapkan bahwa seluruh dewan komisaris menghadiri RUPS RKAP. 2. Akan ditambahkan pengungkapan pada website untuk RUPS LPT 2024. 3. Memastikan pengungkapan pada website kehadiran Dewan Komisaris RUPS RKAP 2026 dan RUPS LPT 2025 baru akan dilaksanakan pada tahun 2026. 1. The Company's website has stated that the entire board of commissioners attended the ABOP GMS. 2. Disclosure will be added to the website for the 2024 AAR GMS. 3. Ensuring the disclosure on the website of the Board of Commissioners' attendance at the 2026 ABOP GMS and the 2025 AAR GMS will only be carried out in 2026.
4	Perusahaan memberikan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terbaru. The Company voted via a poll (not by raising hands) for all decisions at the latest GMS.	1. Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk menyampaikan aspirasi pada RUPS RKAP 2025 dan RUPS LPT 2024. 2. Memastikan RUPS RKAP 2026 dan RUPS LPT 2025 untuk memberikan penyampaian mekanisme pemungutan suara, dimana RUPS RKAP 2026 dan RUPS LPT 2025 akan dilaksanakan pada tahun 2026. 3. Mekanisme pemungutan suara (tata tertib RUPS) diungkapkan pada website. 1. The meeting chairperson provided an opportunity for the Shareholders to express their aspirations at the ABOP 2025 GMS and the AAR 2024 GMS. 2. Ensuring the GMS for the 2026 ABOP and the 2025 AAR provide the presentation of the voting mechanism, where the GMS for 2026 ABOP and the 2025 AAR will be held in 2026. 3. The voting mechanism (GMS rules) is disclosed on the website.
5	Perusahaan mengungkapkan menunjuk pihak independen (pengawas/pemeriksa) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara dalam RUPST. The Company appoints an independent party (supervisor/examiner) to count and/or validate the votes in the AGMS.	1. Dalam RUPS RKAP 2025 dan RUPS LPT 2024 telah ditunjuk notaris sebagai pihak independen. Dalam KAK penunjukan notaris telah disampaikan terkait lingkup pekerjaan, yaitu Menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS serta mengungkapkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Memastikan RUPS RKAP 2026 dan RUPS LPT 2025 menunjuk notaris sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara dalam RUPS. 1. In the 2025 ABOP and 2024 AAR GMS, a notary has been appointed as an independent party. In the KAK, the appointment of the notary has been communicated regarding the scope of work, which includes counting and/or validating votes in the GMS and documenting them in the Minutes of the GMS. 2. Ensuring that the GMS for 2026 ABOP and the 2025 AAR appoint a notary as an independent party to count and/or validate the votes in the GMS.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow up
6	Perusahaan mengumumkan kepada publik pada hari kerja berikutnya hasil pemungutan suara pada RUPST/RUPSLB terkini untuk semua keputusan. On the next business day, the Company announces to the public the voting results of the latest AGMS/EGMS for all resolutions.	1. Hasil RUPS RKAP 2025 dan RUPS LPT 2024 telah disampaikan dan dimuat dalam akun sosial media korporat. 2. Memastikan hasil pemungutan RUPS RKAP 2026 dan RUPS LPT 2025 disampaikan pada *website*. 1. The results of the 2025 ABOP GMS and the 2024 AAR GMS have been communicated and posted on the corporate social media accounts. 2. Ensuring the results of the 2026 ABOP GMS and 2025 AAR GMS voting are posted on the website.
7	Perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk setiap agenda RUPS dalam pemanggilan RUPS yang disampaikan The Company provides reasons and explanations for each agenda item of the GMS in the notice of the GMS.	1. Telah disampaikan agenda RUPS dalam surat undangan pelaksanaan RUPS RKAP 2025 dan RUPS LPT 2024. 2. Memastikan penjelasan setiap agenda RUPS diungkapkan pada website. 1. The agenda for the GMS has been conveyed in the invitation letter for the GMS for 2025 ABOP and 2024 AAR. 2. Ensuring that the explanation of each GMS agenda is disclosed on the website.
8	Perusahaan menerjemahkan undangan RUPS ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada waktu yang sama dalam versi bahasa Indonesia. The Company translated the GMS invitation into English and published it simultaneously in Bahasa Indonesia.	Memastikan pelaksanaan RUPS RKAP 2026 dan RUPS LPT 2025 akan disampaikan undangan dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia. Ensuring the implementation of the GMS for 2026 ABOP and the 2025 AAR will have invitations sent in English and Bahasa Indonesia.
9	Undangan RUPS menginformasikan identifikasi auditor eksternal dengan jelas terkait agenda penunjukkan/penunjukkan kembali. The GMS invitation clearly informs the identification of the external auditor related to the appointment/reappointment agenda.	Memastikan penjelasan agenda RUPS memuat informasi calon auditor eksternal yang akan ditunjuk/ditunjuk kembali. The GMS invitation clearly informs the identification of the external auditor related to the appointment/reappointment agenda.
10	Undangan RUPS menyampaikan informasi terkait dengan ketersediaan dan kemudahan diperolehnya surat kuasa bagi pemegang saham. The GMS invitation conveys information regarding the availability and ease of obtaining a power of attorney for shareholders.	1. Informasi terkait ketersediaan dan kemudahan diperolehnya surat kuasa bagi pemegang saham tertuang dalam tata tertib RUPS RKAP 2025 dan RUPS LPT 2024. 2. Memastikan ketersediaan surat kuasa bagi pemegang saham tertuang dalam tertib RUPS yang dilaksanakan tahun 2026. 1. Information on the availability and ease of obtaining a power of attorney for shareholders is outlined in the rules of the GMS for 2025 ABOP and 2024 AAR. 2. Ensuring the availability of a power of attorney for shareholders as outlined in the order of the GMS held in 2026.
Prinsip B - Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham **Principle B - Equal Treatment of Shareholders**		
1	Perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris melakukan review setiap tahun untuk memastikan struktur modal dan utang Perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait. The Company disclosed that the Board of Commissioners conducts an annual review to ensure that the Company's capital structure and debt align with strategic objectives and associated risk appetite.	*Review* dalam hal memastikan struktur modal dan utang Perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko akan disampaikan dalam Tanggapan Dewan Komisaris, yang diungkapkan pada Laporan Tahunan. The review in terms of ensuring the Company's capital structure and debt align with strategic goals and risk appetite will be conveyed in the Board of Commissioners' Response, as expressed in the Annual Report.
2	Perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas perlindungan hak-hak kreditur. (Pada Laporan Tahunan yang dipublikasikan dalam *website* Perusahaan). The Company discloses policies and practices that address the protection of creditor rights. (In the Annual Report published on the Company's website).	1. Penyusunan perlindungan hak-hak kreditur pada Pedoman Perilaku dan Etika. 2. Mengungkapkan kebijakan dan praktik perlindungan hak-hak kreditur pada Laporan Tahunan. 3. Penyusunan rancangan kebijakan kreditur secara khusus serta hak-hak kreditur. 1. The preparation of creditor rights protection in the Code of Conduct. 2. Disclosing policies and practices for creditor rights protection in the Annual Report. 3. Preparation of a special creditor policy draft and creditor rights.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow up
3	Perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja Perusahaan dalam jangka panjang. (dapat mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-3/MBU/03/2023). The Company has a reward/compensation policy that takes into account the Company's long-term performance. (can refer to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No.PER-3/MBU/03/2023).	1. Akan dilakukan pembaharuan Peraturan Direksi terkait Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris merujuk pada Permen BUMN No 03 Tahun 2023 dan surat dari Pemegang Saham. 2. PT PLN Nusantara Power memiliki kebijakan pemberian insentif jangka penjang kepada karyawan tertuang dalam Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0001.P/DIR/2025 Tentang Kebijakan Pelaksana Sistem Manajemen Penghargaan Karyawan PT PLN Nusantara Power. 1. The renewal of the Board of Directors Regulation regarding the Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners will be carried out in reference to Regulation of the Minister of SOEs No. 03 of 2023 and the letter from the Shareholders. 2. PT PLN Nusantara Power has a long-term incentive policy for employees outlined in the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power Number 0001.P/DIR/2025 Regarding the Implementation Policy of the Employee Reward Management System of PT PLN Nusantara Power.
Prinsip C- Peran Pemangku Kepentingan **Principle C – Role of Stakeholders**		
1	Laporan Tahunan Perusahaan memuat pernyataan yang menyatakan kepatuhan Perusahaan sejalan dengan Pedoman Tata Kelola serta mengungkapkan identifikasi dan penjelasan/alasan jika ada ketidakpatuhan. (PUGKI "*apply or explain*" dan/atau POJK21 "*comply or explain*"). The Company's Annual Report contains a statement declaring its compliance with the Governance Guidelines and discloses identification and explanation/reasons if there is any non-compliance. (PUGKI "apply or explain" and/or POJK21 "comply or explain").	*Annual Report* tahun 2024 telah mengungkapkan kepatuhan yang sejalan dengan Tata Kelola serta mengungkapkan identifikasi dan penjelasan/alasan jika ada ketidakpatuhan. The 2024 Annual Report revealed compliance in line with Governance and disclosed identification and explanations/reasons for any non-compliance.
2	Perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, fasilitas serta imbalan lainnya, yaitu insentif berdasarkan ukuran kinerja jangka panjang) untuk anggota Direksi termasuk Direktur Utama. (Pada Laporan Tahunan yang dipublikasikan dalam *website* Perusahaan). The Company discloses its remuneration policies/practices (costs, allowances, facilities, and other rewards, incentives based on long-term performance metrics) for members of the Board of Directors, including the President Director. (In the Annual Report published on the Company's website).	Pengungkapan kebijakan/praktik remunerasi untuk anggota Direksi termasuk Direktur Utama telah disampaikan dalam AR tahun 2024. Disclosure of the remuneration policy/practice for members of the Board of Directors, including the President Director, has been provided in the 2024 AR.
3	Perusahaan menerbitkan Laporan Tahunan secara tepat waktu yaitu 120 hari dari akhir tahun buku. The Company publishes the Annual Report on time, which is 120 days from the end of the fiscal year.	AMS penyampaian Laporan Tahunan/ Annual Report telah dikirimkan pada : 1. Dewan Komisaris (31 Mei 2025) 2. Pemegang Saham (31 Mei 2025) AMS submission of the Annual Report has been sent on: 1. Board of Commissioners (May 31, 2025) 2. Shareholders (May 31, 2025)
4	*Website* Perusahaan mengungkapkan Anggaran Dasar Perusahaan. The Company's website discloses the Company's Articles of Association.	Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 152.K/010/DIR/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi, Data dan Dokumen Perusahaan PT Pembangkitan Jawa-Bali, Anggaran Dasar termasuk dalam dokumen dengan kategori Informasi Terbatas dimana penggunaannya ditujukan untuk kepentingan internal Perusahaan dan tidak untuk kepentingan publik, sehingga tidak bisa diungkapkan pada *website* Perusahaan. Based on the Board of Directors' Decision of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 152.K/010/DIR/2010 regarding the Policy on the Management of Information, Data, and Company Documents of PT Pembangkitan Jawa-Bali, the Articles of Association fall under the category of Limited Information documents, which are intended for internal Company purposes and not for public use, and therefore cannot be disclosed on the Company's website.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow up
Prinsip D – Pengungkapan dan Transparansi **Principle D – Disclosure and Transparency**		
1	Perusahaan memiliki Komisaris independen setidaknya 50% dari total Dewan Komisaris The Company has independent commissioners comprising at least 50% of the total Board of Commissioners.	Penetapan Komisaris PLN NP ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga hal ini menjadi wewenang PT PLN (Persero). The appointment of PLN NP Commissioners is determined through the GMS; thus, this becomes the authority of PT PLN (Persero).
2	Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Komisaris Independen The Nomination Committee mostly consists of Independent Commissioners.	Saat ini hanya ada 1 Komisaris Independen di PLN NP dan menjabat sebagai Ketua KIMR sehingga dalam KNR tidak terdapat Komisaris Independen. Currently, there is only one Independent Commissioner at PLN NP who serves as the Chairman of the Investment and Risk Management Committee (IRMC). Therefore, no Independent Commissioner is in the Nomination and Remuneration Committee (NRC).
3	Ketua Komite Nominasi berasal dari Komisaris Independen The chairperson of the Nomination Committee comes from an Independent Commissioner.	Saat ini hanya ada 1 Komisaris Independen di PLN NP dan menjabat sebagai Ketua KIMR sehingga dalam KNR tidak terdapat Komisaris Independen. Currently, there is only one Independent Commissioner at PLN NP who serves as the Chairman of IRMC. Therefore, no Independent Commissioner is in the NRC.
4	Ketua Komite Remunerasi berasal dari Komisaris independen. The chairperson of the Remuneration Committee is an independent Commissioner.	Saat ini hanya ada 1 Komisaris Independen di PLN NP dan menjabat sebagai Ketua KIMR sehingga di dalam KNR tidak terdapat Komisaris Independen. Currently, there is only one Independent Commissioner at PLN NP who serves as the Chairman of IRMC. Therefore, no Independent Commissioner is in the NRC.
5	Masing-masing Komisaris menghadiri setidaknya 75% dari total rapat Direksi/ Dewan Komisaris yang diadakan dalam setahun. Each Commissioner attends at least 75% of the total Board of Directors/Board of Commissioners meetings held in a year.	1. Memastikan kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat. 2. Memonitor persentase kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat. 1. Ensuring the Board of Commissioners is at the meeting. 2. Monitoring the attendance percentage of the Board of Commissioners in meetings.
6	Perusahaan menetapkan minimal kuorum 2/3 dalam menentukan keputusan Direksi dan keputusan Dewan Komisaris The Company establishes a minimum quorum of 2/3 for making decisions by the Board of Directors and Board of Commissioners.	Perusahaan mengusulkan untuk menetapkan kebijakan minimal kuorum 2/3 dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar. The Company proposes to establish a minimum quorum policy of 2/3 in the Proposed Amendment to the Articles of Association.
7	Surat undangan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris diberikan kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diadakan. The Board of Directors submits the meeting materials to the Board of Commissioners no later than 5 (five) working days before the meeting.	Direksi menyampaikan materi rapat kepada Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diadakan The invitation letter for the Board of Directors meeting and the Board of Commissioners meeting is provided to them no later than 5 (five) working days before the meeting is held.
8	Perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Komisaris baru. (Pada Laporan Tahunan yang dipublikasikan dalam *website* Perusahaan). The Company disclosed the criteria used in selecting the new Commissioner. (In the Annual Report published on the Company's website).	Kriteria yang digunakan dalam memilih komisaris baru telah diungkapkan pada laporan tahunan The criteria used in selecting the new commissioners have been disclosed in the annual report.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow up
9	Perusahaan mempunyai standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi Direktur dan Manajemen Senior dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan, seperti pemberian claw back provision (penerapan pengambilan kembali dana/keuntungan kepada individu jika penerima tidak memenuhi syarat yang disepakati/ melanggar kontrak) dan bonus yang ditangguhkan. The Company has measurable standards to align performance-based remuneration for the Board of Directors and Senior Management with the long-term interests of the Company, such as the provision of claw-back provisions (the application of reclaiming funds/profits from individuals if the recipients do not meet the agreed-upon conditions/breach the contract) and deferred bonuses.	1. Akan dilakukan pembaharuan Peraturan Direksi terkait Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris merujuk pada Permen BUMN Nomor 03 Tahun 2023 dan surat dari Pemegang Saham. 2. DIV HST PLN bersama dengan konsultan menyediakan Kajian Imbangan Remunerasi Eksekutif untuk Direktur dan Dewan Komisaris sebagai bahan masukan Kepada DIV PFM dalam RADIR Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan secara berkala setiap Tahun yang persyaratannya sesuai Peraturan ketentuan pada Menteri BUMN No.PER-3/MBU/03/2023, Serta Kesetaraan Internal dan Eksternal. DIV HST melakukan endrorsement atas kebijakan Kompensasi Jangka Pendek termasuk insentif berbasis kinerja dalam bentuk Insentif Kinerja Individu (P3-1A) dan Insentif Kinerja Perusahaan (P3-1B) Bagi Manajer Senior (BoD-1). PT PLN Nusantara Power memiliki kebijakan pemberian Kompensasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada Pegawai tertuang dalam Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0001.P/DIR/2025 Tentang Kebijakan Pelaksana Sistem Manajemen Penghargaan Karyawan PT PLN Nusantara Power 1. The Board of Directors Regulation regarding the Income of the Board of Directors and Board of Commissioners will be updated in reference to Regulation of the Minister of SOEs No. 03 of 2023 and the letter from the Shareholders. 2. DIV HST PLN, together with consultants, provides an Executive Remuneration Balance Study for the Board of Directors and Board of Commissioners as input to DIV PFM in the BOD Meeting Decision-Making process conducted periodically every year, in accordance with the regulations set forth by the Minister of SOEs No.PER-3/MBU/03/2023, as well as Internal and External Equivalence. DIV HST endorses the Short-Term Compensation policy, including performance-based incentives in the form of Individual Performance Incentives (P3-1A) and Company Performance Incentives (P3-1B) for Senior Managers (BoD-1). PT PLN Nusantara Power has a policy for providing Short-Term and Long-Term Compensation to Employees as outlined in the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power Number 0001.P/DIR/2025 Regarding the Implementation Policy of the Employee Reward Management System of PT PLN Nusantara Power.
10	Pengangkatan dan pemberhentian Auditor Internal memerlukan persetujuan dari Komite Audit The appointment and dismissal of the Internal Auditor require approval from the Audit Committee.	Menyampaikan informasi mengenai perubahan struktur auditor internal kepada Komite Audit. Komite Audit mendapatkan informasi mengenai perubahan struktur Auditor Internal dan Dewan Komisaris melakukan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Auditor Internal atas evaluasi dari Komite Audit. Conveying information regarding changes in the internal auditor structure to the Audit Committee. The Audit Committee receives information regarding changes in the Internal Auditor structure, and the Board of Commissioners approves the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit based on the Audit Committee's evaluation.
11	Komisaris Utama adalah seorang Komisaris Independen. The President Commissioner is an Independent Commissioner.	1. Penetapan Komisaris PLN NP ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga hal ini menjadi wewenang PT PLN (Persero). 2. Penetapan Komisaris Utama PLN NP berdasarkan RUPS PLN NP tanggal 26 Juni 2025 telah ditetapkan Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen 1. The appointment of PLN NP Commissioners is determined through the General Meeting of Shareholders; thus, this becomes the authority of PT PLN (Persero). 2. The appointment of the President Commissioner of PLN NP based on the PLN NP GMS on June 26, 2025, has been established as the President Commissioner and also as an Independent Commissioner.
12	Perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan masing-masing Dewan Komisaris/ Direksi serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaiannya. (Pada Laporan Tahunan yang dipublikasikan dalam *website* Perusahaan). The Company conducts an annual performance evaluation of each Board of Commissioners/Directors and discloses the criteria and evaluation process. (In the Annual Report published on the Company's website).	1. Pelaporan kinerja Direksi secara bulanan disampaikan ke PLN setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Kriteria kinerja KPI Individu BOD merupakan cascading dari Kontrak Manajemen PLN NP dan bottom up dari bidang-bidang di bawahnya (KPI Direktorat). Penilaian mengikuti ketentuan Juknis Kontrak Manajemen PLN NP dan pedoman penilaian kontrak kinerja Unit dan Bidang Kantor Pusat. 2. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris disampaikan kepada PLN melalui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 1. The monthly performance report of the Board of Directors is submitted to PLN by the 10th of the following month. The performance criteria for the Individual BOD KPI are a cascading effect from the PLN NP Management Contract and a bottom-up approach from the departments below (Directorate KPI). The assessment follows the provisions of the PLN NP Management Contract Guidelines and the performance contract evaluation guidelines for Units and Central Office Divisions. 2. The performance evaluation of the Board of Commissioners is submitted to PLN through the Board of Commissioners' Supervisory Report.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow up
Bonus/Penalti Bonus/Penalty		
1	Perusahaan menerbitkan panggilan RUPS (dengan rincian agenda dan surat edaran yang jelas) yang diumumkan pada Pemegang Saham, paling lambat 28 hari sebelum tanggal rapat (RUPS). The Company issues a call for the GMS (with a detailed agenda and clear circular) announced to the Shareholders, no later than 28 days before the meeting date (GMS).	Memastikan undangan RUPS RKAP 2026 dan RUPS LPT 2025 disampaikan 28 hari sebelum tanggal rapat. Ensuring that the invitations for the GMS for the 2026 ABOP and the 2025 AAR are sent 28 days before the meeting date.
2	*Whistle Blowing System* Perusahaan dikelola oleh pihak/institusi yang independen. The Company's Whistleblowing System is managed by an independent party/ institution.	1. Sesuai Arahan Rapat Direksi tgl 14 November 2024 bahwa WBS masih dikelola internal PLN NP oleh Fungsi Kepatuhan dan Komite WBS. 2. Berdasarkan statistik laporan pengaduan pelanggaran di PLN NP yang didominasi oleh pelanggaran operasional kepegawaian maka pengelolaan laporan WBS lebih efektif dan efisien dikelola internal PLN NP dibanding dengan dikelola Pihak Eksternal, selain itu juga untuk mengeliminir kerahasiaan informasi tersebar di publik. 3. Pengelolaan WBS di PLN juga dilakukan oleh internal yaitu Divisi Kepatuhan PLN. 4. SH/AP PLN wajib melakukan pengelolaan WBS Terintegrasi PLN Grup dimana media pelaporan dan tindak laporan WBS menggunakan aplikasi COS PLN agar terregister dan termonitor penanganannya oleh Divisi Kepatuhan PLN. 1. According to the Board of Directors' Meeting Directive on November 14, 2024, the WBS is still managed internally by PLN NP by the Compliance Function and the WBS Committee. 2. Based on the statistics of violation complaint reports at PLN NP, which are dominated by operational employee violations, the management of WBS reports is more effective and efficient when handled internally by PLN NP compared to being managed by external parties. Additionally, this also helps to eliminate the dissemination of confidential information to the public. 3. The management of the WBS at PLN is also carried out internally by the PLN Compliance Division. 4. SH/AP of PLN is required to manage the Integrated WBS of the PLN Group, where the reporting media and follow-up actions of the WBS use the PLN COS application to ensure they are registered and monitored by the PLN Compliance Division.
3	Laporan keuangan tahunan audited dirilis dalam waktu 60 hari dari akhir tahun keuangan. The audited annual financial statements are released within 60 days of the end of the financial year.	Laporan Keuangan Tahunan Audited menunggu hasil audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). The Audited Annual Financial Statements are awaiting the audit results from the Public Accounting Firm (KAP).
4	Setidaknya satu orang Komisaris Independen berasal dari perempuan. At least one Independent Commissioner must be a woman.	1. Penetapan Komisaris PLN NP ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga hal ini menjadi wewenang PT PLN (Persero). 2. Penetapan Komisaris Utama PLN NP berdasarkan RUPS PLN NP tanggal 26 Juni 2025 telah ditetapkan Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen. 1. The appointment of PLN NP Commissioners is determined through the GMS; thus, this becomes the authority of PT PLN (Persero). 2. The appointment of the President Commissioner of PLN NP based on the PLN NP GMS on June 26, 2025, has been established as the President Commissioner and also as an Independent Commissioner.
5	Perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan indikator tujuan atas implementasi keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris termasuk laporan perkembangan atas pencapaian tujuan tersebut (dapat melalui Laporan Tahunan yang dipublikasikan). The Company has a policy and discloses target indicators for the implementation of diversity in the Board of Directors and Board of Commissioners, including progress reports on the achievement of these targets (which can be included in the published Annual Report).	Kebijakan terkait keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris telah di cantumkan pada BOD Manual dan BOC *Manual*, indikator implementasi keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris telah di cantumkan pada Annual Report tahun 2024. The policy regarding the diversity of the Board of Directors and Board of Commissioners has been included in the BOD Manual and BOC Manual, and the indicators for the implementation of the diversity of the Board of Directors and Board of Commissioners have been included in the 2024 Annual Report.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow up
6	Komposisi Dewan Komisaris lebih dari 50% komisaris independen dan ketua Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. The composition of the Board of Commissioners consists of more than 50% independent commissioners, and the chairman of the Board of Commissioners is an independent commissioner.	1. Penetapan Komisaris PLN NP ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham , sehingga hal ini menjadi wewenang PT PLN (Persero). 2. Penetapan Komisaris Utama PLN NP berdasarkan RUPS PLN NP tanggal 26 Juni 2025 telah ditetapkan Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen. 3. Adapun komposisi Dewan Komisaris lebih dari 50% merupakan berasal dari pihak ekseternal (PLN *Group*) / independen. 1. The appointment of PLN NP Commissioners is determined through the GMS; thus, this becomes the authority of PT PLN (Persero). 2. The appointment of the President Commissioner of PLN NP based on the PLN NP GMS on June 26, 2025, has been established as the President Commissioner and also as an Independent Commissioner. 3. The composition of the Board of Commissioners is more than 50% from external parties (PLN Group) / independent.
7	Seluruh Ketua Komite hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). All Committee Chairpersons attended the GMS.	Memastikan seluruh ketua komite hadir dalam RUPS RKAP 2026 dan RUPS LPT 2025. Ensuring all committee leaders are present at the GMS for the 2026 ABOP and the 2025 AAR.
8	Mengungkapkan kesepakatan Pemegang Saham (Anggaran Dasar). Disclosing the Shareholders' Agreement (Articles of Association).	Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 152.K/010/DIR/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi, Data dan Dokumen Perusahaan PT Pembangkitan Jawa-Bali, Anggaran Dasar termasuk dalam dokumen dengan kategori Informasi Terbatas dimana penggunaannya ditujukan untuk kepentingan internal Perusahaan dan tidak untuk kepentingan publik, sehingga tidak bisa diungkapkan pada *website* Perusahaan. Based on the Board of Directors' Decision of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 152.K/010/DIR/2010 regarding the Policy on the Management of Information, Data, and Company Documents of PT Pembangkitan Jawa-Bali, the Articles of Association fall into the category of Limited Information documents, where their use is intended for the internal interests of the Company and not for public interest. Therefore, it cannot be disclosed on the Company's website.

Penilaian penerapan GCG berdasarkan parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) juga dilaksanakan oleh Perusahaan pada periode tahun 2025. Adapun rekomendasi hasil penilaian atas penerapan GCG berdasarkan parameter ACGS adalah sebagai berikut:

The assessment of GCG implementation based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) parameters was also conducted by the Company in 2025. The recommendations from the assessment of GCG implementation based on ACGS parameters are as follows:

Rekomendasi Hasil Assessment GCG Perusahaan Periode Tahun 2025 berdasarkan ACGS
Recommendations for the Company's GCG Assessment Results for the 2025 Period based on ACGS

No.	Aspek Principle	Rekomendasi Recommendation
1	Prinsip A - Hak-Hak dan Perlakuan Setara kepada Pemegang Saham Principle A - Shareholder Rights and Equal Treatment	1. Perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPS Tahunan pada website Perusahaan. 2. Perusahaan melakukan pemungutan suara melalui jajak pendapat (pemungutan suara tertulis, bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPS Tahunan terbaru. 3. Perusahaan mengungkapkan menunjuk pihak independen (pengawas/pemeriksa) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara dalam RUPS Tahunan. 4. Undangan RUPS setidaknya 21 hari sebelumnya untuk semua RUPS dan RUPS Luar Biasa. 1. The Company disclosed that all members of the Board of Directors and Board of Commissioners attended the Annual GMS on the Company's website. 2. The Company conducted a vote through a poll (written vote, not by raising hands) for all decisions at the latest Annual GMS. 3. The Company announced the appointment of an independent party (supervisor/examiner) to count and/or validate the votes in the Annual GMS. 4. The invitation to the GMS must be sent at least 21

No.	Aspek Principle	Rekomendasi Recommendation	
		5. Perusahaan menerjemahkan undangan RUPS ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada waktu yang sama dalam versi bahasa Indonesia.	5. The company translated the GMS invitation into English and published it simultaneously in Bahasa Indonesia.
		6. Undangan RUPS menginformasikan identifikasi auditor eksternal dengan jelas terkait agenda penunjukkan/penunjukkan kembali.	6. The GMS invitation clearly informs the identification of the external auditor related to the appointment/reappointment agenda.
		7. Undangan RUPS menyampaikan informasi terkait dengan ketersediaan dan kemudahan diperolehnya surat kuasa bagi pemegang saham.	7. The GMS invitation conveys information on the availability and ease of obtaining a power of attorney for shareholders.
2	Prinsip B - Keberlanjutan dan Ketahanan Principle B - Sustainability and Resilience	1. Perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris melakukan *review* setiap tahun untuk memastikan struktur modal dan utang Perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait.	1. The Company disclosed that the Board of Commissioners conducts an annual review to ensure that the Company's capital structure and debt align with strategic objectives and associated risk appetite.
		2. Perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/ kompensasi yang memperhitungkan kinerja Perusahaan dalam jangka panjang. (dapat mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-3/MBU/03/2023).	2. The Company has a reward/compensation policy that takes into account the company's long-term performance. (It can refer to Regulation of the Minister of SOEs No.PER-3/MBU/03/2023).
3	Prinsip C - Pengungkapan dan Transparansi Principle C - Disclosure and Transparency	1. Perusahaan mengungkapkan kebijakan/ praktik remunerasi (biaya, tunjangan, fasilitas serta imbalan lainnya, yaitu insentif berdasarkan ukuran kinerja jangka panjang) untuk anggota Direksi termasuk Direktur Utama. (Pada Laporan Tahunan yang dipublikasikan dalam *website* Perusahaan).	1. The Company discloses its remuneration policies/practices (costs, allowances, facilities, and other rewards, namely incentives based on long-term performance metrics) for members of the Board of Directors, including the President Director. (In the Annual Report published on the Company's website).
		2. Perusahaan menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit dalam waktu 120 hari dari akhir tahun.	2. The Company publishes the audited Annual Financial Statements within 120 days from the end of the year.
		3. Perusahaan menerbitkan Laporan Tahunan secara tepat waktu yaitu 120 hari dari akhir tahun buku.	3. The Company publishes the Annual Report on time, which is 120 days from the end of the fiscal year.
		4. *Website* Perusahaan mengungkapkan Anggaran Dasar Perusahaan.	4. The Company's website discloses its Articles of Association.
4	Prinsip D – Tanggung Jawab Dewan Principle D - Board Responsibilities	1. Perusahaan memiliki Komisaris independen setidaknya 50% dari total Dewan Komisaris.	1. The Company has independent commissioners making up at least 50% of the total Board of Commissioners.
		2. Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Komisaris Independen.	2. The Nomination Committee is mostly composed of Independent Commissioners.
		3. Ketua Komite Nominasi berasal dari Komisaris Independen.	3. The Chairman of the Nomination Committee is an Independent Commissioner.
		4. Ketua Komite Remunerasi berasal dari Komisaris independen.	4. The Chairman of the Remuneration Committee is an independent Commissioner.
		5. Ketua Komite Audit berasal dari Komisaris Independen.	5. The Chairman of the Audit Committee is an Independent Commissioner.
		6. Terdapat Komisaris Independen dalam komposisi Komite Audit, serta memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)	6. There is an Independent Commissioner in the composition of the Audit Committee, and they possess accounting expertise (qualifications or accounting experience).
		7. Masing-masing Komisaris menghadiri setidaknya 75% dari total rapat Direksi/ Dewan Komisaris yang diadakan dalam setahun.	7. Each Commissioner attends at least 75% of the total Board of Directors/Board of Commissioners meetings held in a year.

No.	Aspek Principle	Rekomendasi Recommendation	
		8. Surat undangan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris diberikan kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diadakan.	8. The invitation letter for the Board of Directors meeting and the Board of Commissioners meeting is provided to them no later than 5 (five) working days before the meeting is held.
		9. Perusahaan mempunyai standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi Direktur dan Manajemen Senior dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan, seperti pemberian *claw back provision* (penerapan pengambilan kembali dana/keuntungan kepada individu jika penerima tidak memenuhi syarat yang disepakati/melanggar kontrak) dan bonus yang ditangguhkan.	9. The Company has measurable standards to align performance-based remuneration for Directors and Senior Management with the long-term interests of the Company, such as the implementation of claw-back provisions (the recovery of funds/profits from individuals if the recipients do not meet the agreed-upon conditions/breach the contract) and deferred bonuses.
		10. Pengangkatan dan pemberhentian Auditor Internal memerlukan persetujuan dari Komite Audit	10. The appointment and dismissal of the Internal Auditor require the approval of the Audit Committee.
5	Bonus	1. Penerapan pemungutan suara elektronik yang aman dan real time secara in absentia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1. The implementation of secure and real-time electronic voting in absentia at the GMS.
		2. *Whistle Blowing System* Perusahaan dikelola oleh pihak/institusi yang independen.	2. The Company's Whistleblowing System is managed by an independent party/ institution.
		3. Laporan keuangan tahunan audited dirilis dalam waktu 60 hari dari akhir tahun keuangan.	3. The audited annual financial statements are released within 60 days of the end of the financial year.
		4. Komposisi Dewan Komisaris lebih dari 50% komisaris independen dan ketua Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	4. The composition of the Board of Commissioners consists of more than 50% independent commissioners, and the chairman of the Board of Commissioners is an independent commissioner.
6	Penalti Penalties	1. Ketua Komisaris (Komisaris Utama) dan Ketua Komite hadir dalam RUPS.	1. The Chairman of Commissioner (President Commissioner) and the Chairman of the Committee attended the GMS.
		2. Pengungkapan kesepakatan antar Pemegang Saham	2. Disclosure of Shareholders' Agreement.

Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia

Indonesia's General Guidelines for Corporate Governance

Komitmen Perusahaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola terus ditunjukkan melalui penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 yang diterbitkan oleh KNKG. Pedoman ini dirancang untuk menyelaraskan praktik GCG nasional dengan standar internasional. Dalam implementasinya, PLN NP melakukan pemetaan terhadap rekomendasi PUG-KI dengan pendekatan *apply or explain*. Langkah ini mencerminkan upaya berkelanjutan Perusahaan untuk memastikan tata kelola tetap relevan, adaptif, serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

The Company's commitment to improving governance quality is continuously demonstrated through the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) 2021 issued by KNKG. These guidelines are designed to align national GCG practices with international standards. In its implementation, PLN NP maps the PUG-KI recommendations using an apply or explain approach. This step reflects the Company's ongoing efforts to ensure governance remains relevant, adaptive, and adds value to stakeholders.

Hasil pemetaan atas prinsip dan rekomendasi PUG-KI tahun 2025, yang mencakup kesesuaian, ketidaksesuaian, serta aspek yang tidak relevan dengan implementasi di PLN NP, disajikan dalam tabel status pemetaan PUG-KI sebagai berikut:

The results of the mapping of the principles and recommendations of PUG-KI in 2025, which include compliance, non-compliance, and aspects that are not relevant to the implementation at PLN NP, are presented in the PUG-KI mapping status table as follows:

Pemetaan Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)

Mapping the Implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI)

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
	Prinsip 1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Principle 1. Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners		
1.1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi** Roles and Responsibilities of the Board of Directors		
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*). To achieve sustainable value creation, the Board of Directors shall exercise its leadership role and strive to deliver the following governance outcomes: a. Competitiveness with a focus on long-term performance; b. Ethical and responsible business practices; c. Positive contributions to society and the environment; and d. Corporate resilience and growth.	*Apply*	Perusahaan telah menetapkan sasaran strategis yang berorientasi pada penciptaan nilai berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan usaha. Direksi secara konsisten menjalankan perannya melalui penetapan dan pencapaian target kinerja jangka panjang guna memperkuat daya saing Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Direksi memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dikelola secara etis dan bertanggung jawab dengan mengacu pada pedoman perilaku dan etika yang berlaku. Komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan diwujudkan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Selain itu, Direksi juga memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan Perusahaan melalui inisiatif pengembangan bisnis yang terarah dan berkelanjutan. The Company has set strategic goals oriented toward creating sustainable value as part of efforts to maintain business continuity. The Board of Directors consistently performs its role by setting and achieving long-term performance targets to strengthen the Company's competitiveness. In its implementation, the Board of Directors ensures that all business activities are managed ethically and responsibly by adhering to the applicable conduct and ethics guidelines. Commitment to social and environmental responsibility is realized through the implementation of the Social and Environmental Responsibility (TJSL) program, which adds value to stakeholders. Additionally, the Board of Directors also ensures the sustainability and growth of the Company through targeted and sustainable business development initiatives.
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the Company's mission, vision, objectives, targets, strategies, and annual and mid-term plans are aligned with its long-term goals and are supported by effective use of innovation and technology.	*Apply*	Direksi memastikan bahwa seluruh perencanaan strategis perusahaan meliputi visi, misi, tujuan, dan strategi, telah disusun secara selaras dan konsisten dengan RJPP dan RKAP. Perusahaan berhasil menciptakan berbagai keunggulan strategis, mencakup inovasi dalam pengembangan pembangkit berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT), penerapan teknologi digital dalam operasional. Perusahaan mendukung secara penuh inovasi teknologi melalui ide inovasi oleh seluruh insan PLN NP sesuai dengan inisiasi strategi inovasi perusahaan dalam RJPP PLN NP (D.5 R&D mengenai *advanced clean energy/next gen renewables* (misalnya energi pasang surut, baterai, *hydrogen*, SMR/PLTN dll) Perusahaan melakukan tinjauan pembaruan strategi perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternal dan internal terkini. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan arah strategis perusahaan tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika bisnis dan kebijakan sektor ketenagalistrikan.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
		The Board of Directors ensures that all of the Company's strategic planning, including vision, mission, goals, and strategies, has been developed in alignment and consistency with the Long-term Plan and ABOP. The Company has successfully created various strategic advantages, including innovations in the development of power plants based on New and Renewable Energy (NRE), and the implementation of digital technology in operations. The Company fully supports technological innovation through innovative ideas from all PLN NP personnel in accordance with the Company's innovation strategy initiation in the PLN NP Long-term Plans (D.5 R&D regarding advanced clean energy/next-gen renewables (tidal energy, batteries, hydrogen, SMR/NPP, etc.). The Company conducts a review of the updated corporate strategy tailored to the current external and internal environmental conditions. This update aims to ensure that the Company's strategic direction remains relevant and adaptive to the dynamics of the business and the electricity sector policies.
1.1.3 Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the Company implements an appropriate and effective risk management and internal control system that aligns with its vision, mission, objectives, and strategies, and complies with prevailing laws and standards.	*Apply*	Direksi memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif melalui proses bisnis manajemen risiko yang komprehensif, yang mencakup penetapan kebijakan dan tata kelola manajemen risiko terintegrasi, penyusunan indeks kematangan pengelolaan risiko (*risk maturity index*), serta penguatan budaya risiko di seluruh lini organisasi. Penerapan manajemen risiko tersebut telah selaras dengan visi, misi, sasaran, dan strategi korporasi (sesuai dengan RJP 2024 - 2028 Analisa Risiko Korporasi), serta mengacu pada Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi PLN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023. Seluruh implementasi manajemen risiko didokumentasikan secara memadai dan diungkapkan dalam Laporan Manajemen Risiko sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Perusahaan. Selain itu, Direksi telah menyusun pedoman sistem pengendalian internal melalui Kebijakan Strategis Sistem Pengendalian Internal yang selaras dengan pencapaian visi dan misi Perusahaan secara berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya proses bisnis yang sistematis, efektif, dan efisien. Direksi juga memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal berjalan secara efektif dan efisien melalui penetapan Kebijakan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal, serta melakukan evaluasi secara berkala yang didokumentasikan dalam Laporan Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal PT PLN Nusantara Power Tahun 2025. The Board of Directors ensures the effective implementation of risk management through a comprehensive risk management business process, which includes the establishment of integrated risk management policies and governance, the development of a risk maturity index, and the strengthening of a risk culture across all lines of the organization. The implementation of risk management has been aligned with the corporate vision, mission, goals, and strategies (in accordance with the 2024 - 2028 Corporate Risk Analysis Strategic Plan), as well as referring to PLN's Integrated Risk Management Strategic Policy and Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023. All risk management implementations are adequately documented and disclosed in the Risk Management Report as a form of the Company's accountability and transparency. Additionally, the Board of Directors has developed internal control system guidelines through the Strategic Policy of the Internal Control System, which aligns with the sustainable achievement of the Company's vision and mission, and supports the realization of systematic, effective, and efficient business processes. The Board of Directors also ensures the internal control system runs effectively and efficiently through the establishment of the Internal Control System Implementation Policy, and conducts periodic evaluations documented in the 2025 PT PLN Nusantara Power Internal Control System Effectiveness Evaluation Report.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the Company's accounting and financial reporting systems and guarantees the timely and accurate disclosure of all material information regarding the Company.	*Apply*	Direksi memastikan integritas proses akuntansi serta keandalan sistem pelaporan keuangan Perusahaan. Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas, Direksi menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan setiap tahun. Perusahaan juga senantiasa menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pemegang Saham secara tepat waktu serta mengungkapkan kinerja keuangan secara transparan dalam Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan. The Board of Directors ensures the integrity of the accounting process and the reliability of the Company's financial reporting system. To fulfill the principle of accountability, the Board of Directors annually signs the Statement of Accountability for the Financial Statements. The Company also consistently delivers Financial Reports to Shareholders promptly and transparently discloses financial performance in Quarterly and Annual Reports.
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting is properly prepared.	*Apply*	Laporan Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Report*) Tahun 2024 telah disusun dengan memperhatikan serta mengacu pada prinsip-prinsip pengungkapan yang relevan sesuai dengan karakteristik sektor utilitas ketenagalistrikan. Laporan ini mencakup berbagai aspek material, meliputi kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola (*Environmental, Social, and Governance*/ESG). The Company's Sustainability Report for 2024 has been prepared with consideration and reference to relevant disclosure principles in accordance with the characteristics of the electricity utility sector. This report covers various material aspects, including economic, environmental, social, and governance performance (Environmental, Social, and Governance/ESG).
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establishes an IT governance framework that aligns with the Company's business needs and priorities, enhances business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports the Company's objectives and strategies.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki kerangka governansi TI korporasi yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0002.P/DIR/2026 tentang Kebijakan Strategis Teknologi Informasi PT PLN Nusantara Power. Kebijakan ini menjadi acuan resmi dalam penyelenggaraan TI perusahaan agar selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendukung pencapaian tujuan dan strategi perusahaan, mendorong peluang serta kinerja bisnis, dan memperkuat pengelolaan risiko TI. Hal tersebut tercermin antara lain dari pengaturan mengenai prinsip-prinsip tata kelola TI, organisasi dan kewenangan, perencanaan strategis TI, pengelolaan sumber daya TI, pengelolaan risiko TI, pengelolaan keamanan TI, pengelolaan proyek dan layanan TI, serta monitoring dan evaluasi. Kebijakan ini juga menegaskan adanya peran Direksi, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Bidang pengelola TI dalam memastikan TI memberikan nilai tambah, selaras dengan RJPP dan RKAP, serta mendukung proses bisnis perusahaan secara efektif, efisien, aman, dan terukur. The Company has determined a corporate IT governance framework set forth by the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power Number 0002.P/DIR/2026 on the Strategic Information Technology Policy of PT PLN Nusantara Power. This policy serves as the official reference in the Company's IT to align with corporate business needs and priorities, support the achievement of corporate goals and strategies, drive business opportunities and performance, and strengthen IT risk management. This is reflected, among others, in the regulations regarding IT governance principles, organization and authority, IT strategic planning, IT resource management, IT risk management, IT security management, IT project and service management, as well as monitoring and evaluation. This policy also emphasizes the roles of the Board of Directors, the IT Steering Committee, and the IT management field in ensuring that IT adds value, aligns with the Long-Term Business Plan and ABOP, and supports the Company's business processes effectively, efficiently, safely, and measurably.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For Companies operating under Sharia principles, the Board of Directors shall ensure that the Sharia Supervisory Board is granted the necessary authority and adequate resources to fulfill its duties effectively.	*Explain*	Perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah maupun perangkat pendukung lainnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip Syariah dalam operasional bisnis Perusahaan. The Company does not conduct business activities based on Sharia principles. Therefore, the Company does not have a Sharia Supervisory Board or other supporting devices related to the implementation of Sharia principles in the Company's business operations.
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is reviewed periodically. The allocation of individual directors' roles may be outlined in the Charter or by way of a Board resolution.	*Apply*	Piagam Direksi atau BOD *Manual* secara berkala ditinjau dan dimutakhirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Telah dilakukan review dan pemutakhiran pada BOD Manual, serta telah disahkan pada 2026. BOD *Manual* mencakup tugas, pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi. Pembagian tugas dan tanggungjawab anggota Direksi ditetapkan berdasarkan nama jabatan dalam pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS. Pembagian tugas dan tanggungjawab setiap anggota Direksi diatur pada Peraturan Direksi. The Board of Directors Charter or BOD Manual is periodically reviewed and updated in accordance with applicable regulations. A review and update of the BOD Manual has been conducted, and it was ratified in 2026. The BOD Manual includes the duties, division of duties, and responsibilities of the Board of Directors members. The division of duties and responsibilities of the Board of Directors members is determined based on the job titles in the appointment of Board of Directors members by the GMS. The division of duties and responsibilities of each Board of Directors member is regulated in the Board of Directors Regulations.
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy that requires any director involved in financial crimes and proven misconduct to resign from their position.	*Apply*	Direksi telah memiliki kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan, yang tercantum pada dokumen *Board of Director Manual* (BOD *Manual*) Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi Perusahaan Tahun 2026 pada Sub Bab 2.12 Independensi dan Akuntabilitas poin 15 "Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan yakni yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Direksi". The Board of Directors has a policy for the resignation of Board members involved in financial crimes, as stated in the Board of Director Manual (BOD Manual) Guidelines for the Work Procedures of the Company's Board of Directors for 2026 in Sub-Chapter 2.12 Independence and Accountability point 15 "Board members involved in financial crimes, those who have received a legally binding verdict, are required to resign from their position as Board members."
1.2	**Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya** Performance Evaluation – Board of Directors and Its Members		
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners shall conduct an annual formal evaluation, objectively and independently, to assess the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	*Apply*	Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi secara berkala setiap bulan berdasarkan Kontrak Manajemen serta *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing anggota Direksi. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi. Selanjutnya, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya dalam pengambilan keputusan terkait penilaian kinerja serta penetapan remunerasi dan tantiem Direksi. The Board of Commissioners conducts regular monthly monitoring and evaluation of the Board of Directors' performance based on the Management Contract and the Key Performance Indicators (KPIs) of each Board member. The evaluation results are documented in the Board of Commissioners' Supervisory Report as a form of supervisory function over the Board of Directors' performance. Following that, the Board of Commissioners' Supervision Report is submitted to the Shareholders as a consideration in the GMS, particularly in decision-making related to performance evaluation and the determination of the Board of Directors' remuneration and bonuses.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. With input from the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners is responsible for determining the performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki kebijakan bahwa Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi, baik secara kolegial maupun individu, berdasarkan Kontrak Manajemen Tahunan yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta mengacu pada tolok ukur kinerja yang disusun sebagai dasar evaluasi. Komite Nominasi dan Remunerasi turut membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicator* (KPI) individu anggota Direksi. Di sisi lain, Direksi juga melakukan penilaian kinerja secara kolegial dan individu, yang selanjutnya disampaikan dalam Rapat Pengawasan sebagai bagian dari mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi, baik secara kolektif maupun individu, yang hasilnya disampaikan dalam Rapat Internal Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hasil evaluasi kinerja Direksi. Telah menjawab *Area of Improvement Assessment* sebelumnya yaitu "Mendokumentasikan keterlibatan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam proses persetujuan kriteria evaluasi kinerja anggota Direksi secara individu". The Company has a policy that the Board of Commissioners conducts performance evaluations of the Board of Directors, both collegially and individually, based on the Annual Management Contract established by the GMS, and refers to the performance benchmarks prepared as the basis for evaluation. The Nomination and Remuneration Committee also assists the Board of Commissioners in evaluating the proposed individual Key Performance Indicators (KPIs) for Board of Directors members. On the other hand, the Board of Directors also conducts performance evaluations both collegially and individually, which are subsequently presented in the Supervisory Meeting as part of the performance reporting and evaluation mechanism. The Nomination and Remuneration Committee has evaluated the performance of the Board of Directors, both collectively and individually, and the results are available in the Internal Meeting of the Board of Commissioners as a consideration in determining the performance evaluation results of the Board of Directors. Has answered the previous Area of Improvement Assessment, namely "Documenting the involvement of the Nomination and Remuneration Committee in the process of approving individual performance evaluation criteria for Board of Directors members."
1.3	**Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners		
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the Company's strategy at least annually and approves the mission, vision, and strategies proposed by the Board of Directors. It also reviews, advises on, and approves the Company's long-term business and financial plans as well as the short-term financial plan. The Board of Commissioners provides advice and oversees the implementation managed by the Board of Directors. Both Boards are involved in key corporate decisions as stipulated in the Company's Articles of Association.	*Apply*	Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disampaikan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris telah terlibat dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan. The Board of Commissioners reviewed the draft of the Company's ABOP submitted by the Board of Directors. Throughout 2025, the Board of Directors and Board of Commissioners were involved in the decision-making process in accordance with the provisions outlined in the Company's Articles of Association and Board Manual.

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. The types of decisions that require Board of Commissioners' approval must be disclosed in the Annual Report.	*Apply*	Laporan Tahunan Perusahaan telah mengungkapkan jenis-jenis keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*. The Company's Annual Report revealed the types of decisions made by the Board of Directors that require the Board of Commissioners' approval, pursuant to the provisions outlined in the Company's Articles of Association and Board Manual.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur non diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. Based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the GMS for resolution. In doing so, the Board upholds diversity, non-discrimination, and equal opportunity principles regardless of ethnicity, religion, race, inter-group affiliation, or gender. The nomination and selection process must be formal and transparent.	*Explain*	Perusahaan telah memiliki kebijakan yang mengatur salah satu tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan telaah dan/atau penelitian terhadap calon anggota Direksi sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. Dalam hal ini, Dewan Komisaris berperan dalam proses pencalonan anggota Direksi serta mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai dengan kebijakan dan kriteria seleksi yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris selanjutnya mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh keputusan terkait pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2025, terdapat pergantian susunan anggota Dewan Komisaris. (konfirmasi kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, apakah terdapat keterlibatan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mengusulkan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS. The Company has a policy that regulates one of the Nomination and Remuneration Committee's duties, which is to assist the Board of Commissioners in reviewing and/or researching prospective members of the Board of Directors before they are submitted to the Shareholders. In this case, the Board of Commissioners plays a role in the nomination process of the Board of Directors members and proposes candidates to the Shareholders in accordance with the established policies and selection criteria. Taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners subsequently proposes to the GMS to obtain a decision regarding the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. In 2025, there was a change in the composition of the Board of Commissioners. (Confirm with the Nomination and Remuneration Committee whether the Nomination and Remuneration Committee is involved in proposing candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners to the GMS.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the committee in charge of nomination functions shall establish a succession policy for director candidates. The Board reviews annual reports on development and succession plans submitted by the President Director.	*Explain*	Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi, termasuk kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi serta mekanisme pengusulan kepada Pemegang Saham. Perusahaan juga telah menerapkan Sistem Pengelolaan Talenta sebagai bagian dari upaya penyiapan calon pimpinan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan penelaahan terhadap talenta yang diusulkan oleh Direksi (*selected talent*), untuk selanjutnya menetapkan daftar talenta yang akan dinominasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai *nominated talent*. Selain itu, Dewan Komisaris melakukan peninjauan atas laporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan oleh Direksi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan. The Company has a policy that regulates one of the Nomination and Remuneration Committee's duties, which is to assist the Board of Commissioners in reviewing and/or researching prospective members of the Board of Directors before they are submitted to the Shareholders. In this case, the Board of Commissioners plays a role in the nomination process of the Board of Directors members and proposes candidates to the Shareholders in accordance with the established policies and selection criteria. Taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners subsequently proposes to the GMS to obtain a decision regarding the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. In 2025, there was a change in the composition of the Board of Commissioners. (Confirm with the Nomination and Remuneration Committee whether the Nomination and Remuneration Committee is involved in proposing candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners to the GMS.)

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
1.3.5	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. a. The Board of Commissioners submits to the GMS, possibly upon a proposal from the Remuneration Committee, the remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners, ensuring it aligns with the Company's sustainable growth and long-term interests of the Company and shareholders; b. The Board periodically reviews the remuneration system for both Boards.	*Apply*	Dewan Komisaris memiliki kebijakan yang mengatur salah satu tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang memerlukan persetujuan atau tanggapan dari Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga mengusulkan tantiem atau insentif kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kinerja Direksi, yang didukung oleh hasil telaah Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan dan menelaah kebijakan terkait pengusulan remunerasi oleh Direksi, serta menyampaikan usulan remunerasi yang meliputi gaji, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kinerja kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). The Board of Commissioners has a policy that regulates one of the tasks of the Nomination and Remuneration Committee, which is to evaluate the remuneration policy for employees that requires approval or feedback from the Board of Commissioners. The Board of Commissioners also proposes bonuses or performance incentives in accordance with applicable regulations, taking into account the performance of the Board of Directors, supported by the review results of the Nomination and Remuneration Committee. Additionally, the Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, establishes and reviews policies related to the remuneration proposals by the Board of Directors, and submits remuneration proposals, including salaries, allowances, facilities, and performance bonuses/incentives, to the GMS.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners oversees the effectiveness of the corporate governance policies and their implementation, and proposes revisions as needed.	*Apply*	Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemantauan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di perusahaan. Dewan Komisaris memastikan bahwa implementasi serta pengukuran penerapan tata kelola tersebut dilaksanakan secara efektif dan konsisten. The Board of Commissioners supervises and monitors the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Company. The Board of Commissioners ensures that the implementation and measurement of governance practices are run effectively and consistently.
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the implementation of sound and effective risk management and internal control systems, aligned with the Company's objectives, targets, and strategies, and in compliance with laws, codes of conduct, and applicable standards.	*Apply*	Dewan Komisaris memastikan, mengawasi, dan mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko serta sistem pengendalian internal yang berlaku di Perusahaan, agar selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Komite Investasi dan Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris melalui penilaian atas kajian risiko yang disusun oleh Manajemen perusahaan, serta melakukan analisis, memberikan masukan, dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Komite Audit telah melakukan pembahasan terkait evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, dan Komite Investasi dan Manajemen Risiko melakukan penelaahan/tanggapan atas kebijakan dan implementasi manajemen risiko di Perusahaan. The Board of Commissioners ensures, supervises, and evaluates the implementation of Risk Management and the internal control system in the Company, so that it aligns with corporate goals, objectives, and strategies. In the execution of this function, the Investment and Risk Management Committee assists the Board of Commissioners by evaluating risk studies prepared by the Company's Management, conducting analyzes, providing input, and delivering recommendations to the Board of Commissioners. In addition, the Audit Committee conducted discussions regarding the evaluation of the effectiveness of the internal control system, and the Investment and Risk Management Committee has reviewed/responded to the policies and implementation of risk management in the Company.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners oversees and ensures the integrity of the Company's accounting and financial reporting systems, and the independence of both internal and external audit functions.	*Apply*	Dewan Komisaris memastikan terjaganya integritas pelaporan akuntansi dan Laporan Keuangan Perusahaan melalui fungsi pengawasan yang efektif. Laporan Keuangan direviu oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham maupun dipublikasikan kepada publik dalam Laporan Tahunan. Selain itu, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan audit internal dan eksternal guna memastikan independensi dan objektivitas proses audit, tanpa melakukan intervensi terhadap proses maupun hasil audit. The Board of Commissioners ensures the integrity of the Company's accounting reporting and Financial Statements through effective oversight functions. The Financial Statements are reviewed by the Audit Committee and the Board of Commissioners before being submitted to the Shareholders or published to the public in the Annual Report. In addition, the Board of Commissioners supervises the implementation of internal and external audits to ensure the independence and objectivity of the audit process, without intervening in the audit process or results.
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, ensures their integrity, and oversees the Company's disclosure and communication processes.	*Apply*	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan, penelaahan, dan persetujuan atas Laporan Tahunan, serta memastikan integritas laporan dan mengawasi proses pengungkapan serta pengkomunikasiannya. Hal ini dibuktikan melalui penandatanganan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT PLN Nusantara Power Tahun 2024. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah menerima informasi mengenai pengungkapan laporan tersebut melalui situs resmi Perusahaan. The Board of Commissioners has conducted monitoring, review, and approval of the Annual Report, as well as ensured the integrity of the report and supervised the disclosure and communication processes. This is evidenced by the signing of the Statement Letter by the Board of Commissioners and Board of Directors regarding accountability for the Annual Report and Sustainability Report of PT PLN Nusantara Power in 2024. In addition, the Board of Commissioners also received information regarding the disclosure of the report via the Company's official website.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners' Charter is subject to periodic review.	*Apply*	Piagam Dewan Komisaris dalam bentuk *Board of Commissioners Manual* (BOC *Manual*) atau Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris telah ditinjau secara berkala dan terakhir disahkan pada Juni 2025. Penyusunan dan peninjauan pedoman tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. The Board of Commissioners Charter, in the form of the Board of Commissioners Manual (BOC Manual) or the Work Guidelines for the Board of Commissioners, was reviewed periodically and was last approved in June 2025. The preparation and review of these guidelines refer to Regulation of the Minister of SOEs Number PER-02/MBU/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs and Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOEs Organization and Human Capital.
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy that requires any commissioner proven to be involved in financial crimes or misconduct to resign.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan, yang tercantum pada dokumen Board of Commissioner Manual (BOC *Manual*) Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2025 pada Sub Bab 2.11 Independensi dan Akuntabilitas poin 15 "Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan yakni yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris". The Board of Commissioners has a policy for the resignation of Board of Commissioners members involved in financial crimes, as stated in the Board of Commissioner Manual (BOC Manual) Guidelines for the Work Procedures of the Company's Board of Commissioners in 2025 in Sub-Chapter 2.11 Independence and Accountability point 15 "Members of the Board of Commissioners involved in financial crimes, namely those who have obtained a legally binding decision, are required to resign from their position as members of the Board of Commissioners."

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent Commissioners are expected to actively contribute to Board discussions in an honest, objective, and constructive manner.	*Apply*	Per tanggal 31 Desember 2025, fungsi Komisaris Independen dirangkap oleh Komisaris Utama. Meskipun demikian, fungsi independensi tetap dijalankan secara efektif melalui pemberian arahan yang objektif, profesional, dan bebas dari benturan kepentingan dalam setiap rapat Dewan Komisaris. As of December 31, 2025, the function of the Independent Commissioner was held concurrently by the President Commissioner. Nevertheless, the independence function is still effectively executed through the provision of objective, professional, and conflict-of-interest-free guidance in every Board of Commissioners meeting.
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as the Board's coordinator and ensures its effectiveness. They promote a culture of openness and constructive dialogue, facilitate the development of appropriate Board agendas, and ensure sufficient time is allocated for discussing each agenda item. The Board should also have opportunities to meet with the Board of Directors and senior management.	*Explain*	Dalam hal jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, salah satu anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Penetapan Komisaris Utama tersebut dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penetapan anggota Dewan Komisaris. Komisaris Utama memimpin Dewan Komisaris serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan perannya, Komisaris Utama memastikan penyusunan dan penetapan agenda rapat Dewan Komisaris, bertindak sebagai pimpinan rapat, serta memastikan terselenggaranya Rapat Pengawasan sebagai forum dialog antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan manajemen senior. Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur penugasan Komisaris Utama untuk mewakili Dewan Komisaris dalam berhubungan dengan pihak di luar Dewan Komisaris. In the case where the number of members of the Board of Commissioners exceeds 1 (one) person, one of the members of the Board of Commissioners is appointed as the President Commissioner. The appointment is conducted by means of a decision of the GMS regarding the appointment of members of the Board of Commissioners. The President Commissioner leads the Board of Commissioners and coordinates the execution of the Board of Commissioners' duties and activities. In carrying out their role, the President Commissioner ensures the preparation and establishment of the Board of Commissioners' meeting agenda, acts as the meeting chairperson, and ensures the conduct of Supervisory Meetings as a dialog forum between the Board of Commissioners and the Board of Directors and senior management. However, there are currently no specific regulations governing the assignment of the President Commissioner to represent the Board of Commissioners in dealings with parties outside the Board of Commissioners.
1.4	**Pembentukan Komite** Establishment of Committees		
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Company shall establish committees under the Board of Commissioners, at minimum including: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Oversight Committee.	*Apply*	Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan perusahaan, Perusahaan membentuk 1. Komite Audit 2. Komite Nominasi dan Remunerasi 3. Komite Investasi dan Manajemen Risiko To support the effectiveness of task and responsibility execution in company supervision, the Company establishes: 1. Audit Committee 2. Nomination and Remuneration Committee 3. Investment and Risk Management Committee
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all Audit Committee members are independent, and that other committees are majority-independent. All committee members must possess adequate competencies, commitment, and authority to carry out their duties effectively and independently.	*Explain*	Saat ini, Ketua Komite Audit tidak dijabat oleh Komisaris Independen. Namun demikian, seluruh anggota Komite Audit, baik yang berasal dari unsur Komisaris maupun non-Komisaris, merupakan pihak independen atau profesional yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan. Seluruh anggota komite telah memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, seluruh anggota komite telah menyampaikan pernyataan independensi, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Currently, the Chairman of the Audit Committee is not held by an Independent Commissioner. However, all members of the Audit Committee, whether from the Commissioner or non-Commissioner elements, are independent parties or professionals who do not have affiliation with the Company. All committee members possess expertise and competence appropriate to their respective fields. In addition, all committee members have submitted independence statements, as disclosed in the Annual Report.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure objective and independent oversight by the Audit Committee, the President Commissioner may not serve as its chair—except in exceptional cases, which must be explained in the Annual Report.	*Apply*	Saat ini, jabatan Ketua Komite Audit dipegang oleh Bapak Suharyono, yang tidak merangkap sebagai Komisaris Utama. Currently, the position of Chairman of the Audit Committee is served by Mr. Suharyono, who does not concurrently serve as the President Commissioner.
1.5	**Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya** Performance Evaluation – Board of Commissioners and Its Members		
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal and objective evaluation to assess the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.	*Explain*	Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolegial maupun individual. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan objektif untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, baik pada tingkat Dewan Komisaris secara keseluruhan, organ pendukung Dewan Komisaris, maupun masing-masing individu Komisaris. Penilaian dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengawasi perusahaan. *Self-assessment* ini merupakan bagian dari upaya evaluasi internal guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris belum melibatkan konsultan eksternal independen untuk mendukung proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris. The performance evaluation of the Board of Commissioners is executed both collegially and individually. The Board of Commissioners conducts periodic and objective performance evaluations to assess the effectiveness of the supervisory function, both at the level of the entire Board of Commissioners, its supporting organs, and each individual Commissioner. The assessment and measurement of performance are conducted through a self-assessment mechanism based on the execution of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in overseeing the Company. This self-assessment is part of the internal evaluation efforts to ensure the effectiveness of the execution of the Board of Commissioners' duties and responsibilities. However, in practice, the Board of Commissioners has not yet involved an independent external consultant to support the Board of Commissioners' performance evaluation process.
1.6	**Benturan Kepentingan** Conflict of Interest		
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Any member of the Board of Directors holding concurrent positions outside the Company must obtain approval from the Board of Commissioners. Commissioners must inform the Board and the Nomination Committee Chair before accepting new appointments as directors or commissioners of public companies, or any other positions that may significantly affect their time commitment.	*Explain*	Seluruh anggota Direksi yang saat ini menjabat tidak memiliki rangkap jabatan di luar korporasi. Direksi juga telah memiliki kebijakan dan ketentuan terkait rangkap jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar serta *Board of Directors Manual* (BoD *Manual*) Perusahaan, dan ketentuan tersebut telah diterapkan secara konsisten. Belum menjawab *Area of Improvement* (AOI) hasil *assessment* sebelumnya yaitu "Memuat pengaturan dalam *Board Manual* terkait jumlah Perusahaan yang diizinkan dirangkap oleh Direksi sebagai Komisaris di Anak Perusahaan". All current members of the Board of Directors do not hold concurrent positions outside the corporation. The Board of Directors also has policies and provisions regarding multiple positions regulated in the Articles of Association and the Company's Board of Directors Manual (BoD Manual). These provisions have been applied consistently. Has not yet addressed the Area of Improvement (AOI) from the previous assessment, which is "Contains regulations in the Board Manual regarding the number of companies in which the Board of Directors is permitted to serve as Commissioners in Subsidiaries."

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest involving management, the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders, including misuse of corporate assets or related-party transactions. Commissioners with conflicts of interest must recuse themselves from discussions and decisions related to the conflict.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki kebijakan Benturan Kepentingan yang mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki potensi dan/atau benturan kepentingan wajib mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan terkait. Perusahaan juga menerapkan sanksi tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala menandatangani surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. The Company has a Conflict of Interest policy that stipulates that members of the Board of Commissioners and Board of Directors who have potential and/or actual conflicts of interest must withdraw from the related decision-making process. The Company also imposes strict sanctions on any party proven to have committed the acts. In addition, the Board of Commissioners and Board of Directors periodically sign a statement of no conflict of interest as a form of commitment to Good Corporate Governance.
1.7	**Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris** Capacity Building for the Board of Directors and Board of Commissioners		
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that all members of both Boards understand their roles and responsibilities, the Company's characteristics and operations, relevant laws and standards, and other applicable obligations. The Board of Directors, through the Corporate Secretary, supports all Board members in updating and enhancing their skills and knowledge as needed for their respective roles.	*Apply*	Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan dan pengawasan Perusahaan. Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait program peningkatan kapabilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Program pengembangan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Dalam rangka mendukung pembaruan pengetahuan (knowledge update), anggota Direksi dan Dewan Komisaris difasilitasi untuk mengikuti program peningkatan kapabilitas yang berkelanjutan, baik melalui self-study maupun partisipasi dalam pendidikan khusus, pelatihan, workshop, seminar, dan konferensi. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Directors and Board of Commissioners understand their respective roles and responsibilities in the Company's management and supervision. The Company has a policy regarding capability enhancement programs for them. The development program is run continuously to enhance the competence and capability of the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their functions, duties, and responsibilities. To support knowledge updates, members of the Board of Directors and Board of Commissioners are facilitated to participate in continuous capability enhancement programs, either through self-study or in specialized education, training, workshops, seminars, and conferences. These programs are expected to enhance the effectiveness of the Board of Directors' and Board of Commissioners' functions.
	Prinsip 2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Principle 2. Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1	**Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris** Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In nominating candidates for the Board of Directors, the Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, does not rely solely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners may utilize independent sources to identify qualified candidates.	*Explain*	Dewan Komisaris memiliki kebijakan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam melakukan telaah dan/atau penelitian atas calon-calon Direksi perusahaan sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. Dewan Komisaris juga menetapkan kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi, termasuk dalam proses pengusulan calon kepada Pemegang Saham. Sehubungan dengan adanya pergantian susunan anggota Direksi pada tahun 2025, perlu dikonfirmasi apakah Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi telah menggunakan sumber independen dalam menentukan kandidat yang memenuhi persyaratan. Dalam proses nominasi anggota Dewan Komisaris, pengangkatan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Pengangkatan tersebut dilakukan oleh RUPS melalui proses pencalonan yang mengacu pada pedoman yang berlaku. Usulan calon anggota Direksi terlebih dahulu ditetapkan sebagai bakal calon untuk mengikuti tahapan seleksi. Dalam proses tersebut, tim evaluasi melakukan pengumpulan serta penelusuran informasi terhadap bakal calon anggota Direksi yang berasal dari berbagai sumber yang relevan.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
		The Board of Commissioners has a policy that the Nomination and Remuneration Committee assists them in reviewing and/or researching candidates for the Company's Board of Directors before being submitted to the Shareholders. The Board of Commissioners also establishes policies and selection criteria for candidates of the Board of Directors, including in the process of proposing candidates to the Shareholders. In connection with the change in the composition of the Board of Directors in 2025, it is necessary to confirm whether the Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, used independent sources in determining qualified candidates. In the process of nominating members of the Board of Commissioners, the appointment is based on the principles of Good Corporate Governance, namely professionalism, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. The GMS appoints them through a nomination process that refers to the applicable guidelines. The proposal for prospective members of the Board of Directors is first determined as candidates to undergo the selection stages. In this process, the evaluation team collects and traces information on the prospective members of the Board of Directors from various relevant sources.
2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the selection criteria for members of the Board of Directors include, at a minimum, the knowledge, skills, and expertise necessary to fulfill the Board's roles effectively, while also considering diversity within the Board of Directors.	*Explain*	Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai kriteria seleksi bagi calon Direksi. Kualifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi meliputi persyaratan materiil dan formal, yang mencakup aspek keahlian, kepemimpinan, serta pengalaman. Perusahaan juga memiliki kebijakan terkait komposisi Direksi yang dirancang sebagai kombinasi karakteristik yang tepat, baik dari sisi organ Direksi maupun masing-masing individu anggota Direksi, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penentuan komposisi Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian keahlian, pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman dengan pembagian tugas serta fungsi jabatan Direksi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, aspek keberagaman usia dan kesetaraan gender turut menjadi pertimbangan. Pada tahun 2025, sehubungan dengan adanya pergantian susunan anggota Direksi, komposisi Direksi telah mencerminkan keberagaman dalam hal keahlian, pengetahuan, pendidikan, pengalaman, serta usia. Namun demikian, hingga tahun 2025 belum terdapat keterwakilan perempuan dalam Direksi. The Board of Commissioners has a policy regarding the selection criteria for prospective Directors. The qualifications or requirements include material and formal requirements, which encompass aspects of expertise, leadership, and experience. The Company also has a policy regarding the composition of the Board of Directors, designed as a combination of appropriate characteristics, both from the BOC's perspective as an organ and each member of the Board of Directors, in accordance with the Company's needs. The composition of the Board of Directors is determined by considering the suitability of expertise, knowledge, education, and experience with the division of tasks and functions of the Board of Directors to achieve the Company's objectives. In addition, aspects of age diversity and gender equality are also taken into consideration. In 2025, in connection with changes in the composition of the Board of Directors, its composition reflected diversity in terms of expertise, knowledge, education, experience, and age. However, as of 2025, there had been no women's representation on the Board of Directors.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The Company's corporate policy regarding diversity within the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	*Apply*	Perusahaan telah mengungkapkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) mengenai pemenuhan prinsip keberagaman dalam proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk pengungkapan komposisi keberagaman pada kedua organ tersebut. Selain itu, dalam Kontrak Manajemen, Perusahaan telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (KPI) yang terkait dengan keberagaman, khususnya proporsi perempuan dalam *nominated talent* serta talenta milenial (usia <42 tahun) dalam *nominated talent*. Implementasi prinsip keberagaman tersebut tercermin dari capaian kinerja Perusahaan. Telah menjawab *Area of Improvement* hasil assessment sebelumnya yaitu "Perusahaan melaporkan dalam Laporan Tahunan terkait keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi tersebut mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris. In the Annual Report, the Company disclosed the fulfillment of diversity principles in the nomination process of the Board of Directors and Board of Commissioners, including the disclosure of diversity composition in both organs. Additionally, in the Management Contract, the Company established Key Performance Indicators (KPIs) related to diversity, specifically the proportion of women among nominated talent and millennial talent (aged <42 years) among nominated talent. The implementation of these diversity principles is reflected in the Company's performance achievements. Has addressed the Area of Improvement from the previous assessment, namely "In the Annual Report, the Company reports the current diversity of the Board of Directors and Board of Commissioners, measurable composition targets, and the progress made in achieving those targets. This information includes references on how diversity is achieved through proper succession planning in the Board of Directors and Board of Commissioners."
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent to achieve the desired Board composition. Independent sources may be used to identify qualified candidates.	*Explain*	Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Pengangkatan tersebut dilakukan oleh RUPS melalui proses pencalonan yang mengacu pada pedoman yang berlaku. Usulan calon anggota Dewan Komisaris terlebih dahulu ditetapkan sebagai bakal calon yang akan mengikuti tahapan seleksi. Dalam proses ini, tim evaluasi melakukan pengumpulan serta penelusuran informasi terhadap bakal calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai sumber yang relevan. The appointment of members of the Board of Commissioners is pursuant to the principles of Good Corporate Governance, namely professionalism, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. The GMS appoints them through a nomination process that refers to the applicable guidelines. The proposal for candidates for the Board of Commissioners is initially determined as prospective candidates who will undergo the selection stages. In this process, the evaluation team collects and traces information about the prospective candidates for the Board of Commissioners from various relevant sources.

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners or the Committee performing the nomination function establishes procedures and nomination criteria aligned with the Board of Commissioners' approved competency matrix, and ensures that candidate profiles meet the requirements set forth in both the matrix and the nomination criteria.	*Explain*	Perusahaan memiliki kebijakan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS melalui proses pencalonan yang mengacu pada pedoman yang berlaku. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh calon anggota Dewan Komisaris meliputi persyaratan materiil dan formal. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang selaras dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui, serta memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi yang ditetapkan. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku (*not applicable*) pada tahun 2025, karena usulan calon anggota Dewan Komisaris berasal langsung dari Pemegang Saham. The Company has a policy that the GMS appoints a member of the Board of Commissioners through a nomination process that refers to the applicable guidelines. The requirements that must be met by all candidates for the Board of Commissioners include material and formal requirements. The Board of Commissioners or the Committee performing the nomination function establishes nomination procedures and criteria that align with the approved Board of Commissioners' expertise matrix, and ensures that the candidates' profiles meet the requirements in the expertise matrix and the established nomination criteria. However, the provision does not apply in 2025, as the nomination of prospective members of the Board of Commissioners comes directly from the Shareholders.
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota -anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must reflect, collectively, a diversity of competencies, expertise, knowledge, experience, age, cultural backgrounds, and gender, necessary to fulfill its oversight role effectively.	*Apply*	Perusahaan memiliki kebijakan terkait komposisi Dewan Komisaris yang dirancang sebagai kombinasi karakteristik, baik dari sisi organ Dewan Komisaris maupun masing-masing anggota secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Karakteristik tersebut tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman yang relevan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris. Selain itu, aspek keberagaman usia dan kesetaraan gender juga menjadi pertimbangan. Komposisi Dewan Komisaris saat ini telah mencerminkan keberagaman, baik dari aspek kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, maupun gender, yang antara lain ditunjukkan dengan adanya keterwakilan Komisaris perempuan. The Company has a policy regarding the composition of the Board of Commissioners designed as a combination of characteristics, both from the Board of Commissioners' perspective as an organ and each member, in accordance with the Company's needs. These characteristics are reflected in the determination of expertise, knowledge, education, and relevant experience in the execution of the supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners. In addition, aspects of age diversity and gender equality are also taken into consideration. The current composition of the Board of Commissioners reflects diversity in terms of abilities, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender, as evidenced by the representation of female Commissioners.
2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and oversight to the Board of Directors, especially in areas where potential conflicts of interest may arise, the Board of Commissioners includes a sufficient number of Independent Commissioners. Their terms are limited, and the duration of their membership as well as their independence are disclosed from a corporate perspective.	*Apply*	Dalam rangka memaksimalkan kemampuan Dewan Komisaris dalam memberikan nasihat dan melakukan fungsi pengawasan secara independen kepada Direksi, serta untuk mengantisipasi potensi benturan kepentingan, Perusahaan memiliki kebijakan bahwa komposisi Komisaris Independen paling sedikit sebesar 20%. Saat ini, Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) Komisaris Independen, yang penetapannya merupakan kewenangan RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku, serta diungkapkan secara transparan, termasuk informasi mengenai jangka waktu keanggotaan dan independensi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari sudut pandang korporasi. To maximize the Board of Commissioners' ability in advisory and independent supervisory functions to the Board of Directors, as well as to anticipate potential conflicts of interest, the Company has a policy that the composition of Independent Commissioners is at least 20%. Currently, the Board of Commissioners consists of 1 (one) Independent Commissioner, whose appointment is the GMS's authority. The term of office of members of the Board of Commissioners is limited according to the applicable regulations and is disclosed transparently, including information regarding the duration of membership and the independence of each member of the Board of Commissioners from a corporate perspective.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To support the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and enhance stakeholder and investor confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures a formal, rigorous, and transparent process for the appointment and nomination of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu dengan melakukan *review* secara berkala atas pengelolaan Sistem Pengelolaan Talenta, melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta, serta melakukan validasi kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS (*Nominated Talent*). To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to enhance investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous, and transparent process for the appointment and elevation of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. It is achieved by conducting regular reviews of Talent Management System management, evaluating the system and procedures for talent classification, and validating the calibration of Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talent), to produce a list of Talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS (Nominated Talent).
2.2	**Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for the Board of Directors must be structured to support sustainable corporate growth and drive the achievement of long-term goals. Remuneration for Directors shall be proposed—possibly through the Nomination and Remuneration Committee—by the Board of Commissioners and approved by the GMS. The proposed amount considers each Director's role, the economic environment, and the Company's performance.	*Explain*	Perusahaan memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi yang mencakup struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi secara berkelanjutan. Namun demikian, Perusahaan belum menerapkan remunerasi berbasis kinerja jangka panjang (*Long Term Incentive*/LTI) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi BUMN. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi atas kebijakan dan usulan Remunerasi oleh Direksi, yang selanjutnya diputuskan oleh RUPS. Besaran remunerasi yang diusulkan kepada RUPS ditetapkan dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi, faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi ekonomi, kinerja perusahaan dan kemampuan keuangan perusahaan. The Company has a remuneration policy for members of the Board of Directors that includes a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development. However, it has not yet implemented long-term performance-based remuneration (Long-Term Incentive/LTI) as regulated in the applicable provisions for state-owned enterprises. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, evaluates the remuneration policies and proposals by the Board of Directors, which are subsequently decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the roles and responsibilities of each member of the Board of Directors, business scale factors, business complexity factors, inflation rates, economic conditions, company performance, and the Company's financial capability.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for the Board of Commissioners must be structured to support sustainable corporate growth and drive the achievement of long-term goals. The proposed remuneration, submitted by the Board of Commissioners to the GMS, considers each member's role, the economic environment, and Company performance, as well as the position of President Commissioner and any chair or membership in committees.	*Explain*	Perusahaan memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris yang mencakup struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi secara berkelanjutan. Namun demikian, Perusahaan belum menerapkan remunerasi berbasis kinerja jangka panjang (*Long Term Incentive*/LTI) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi BUMN. Besaran remunerasi yang diusulkan kepada RUPS ditetapkan berdasarkan komposisi faktor jabatan. Pemegang Saham dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda untuk merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris, serta kemampuan Perseroan. The Company has a remuneration policy for members of the Board of Commissioners that includes a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development. However, the Company has not yet implemented long-term performance-based remuneration (Long Term Incentive/LTI) as regulated in the applicable provisions for SOEs. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined based on the composition of the position factors. Shareholders can set different position factor amounts to reflect the appropriateness and fairness in the execution of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners members, as well as the Company's capabilities.
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on performance, qualifications, and competence of Directors and Commissioners—taking into account corporate operational performance, individual performance, and market conditions—the Nomination and Remuneration Committee ensures a fair and transparent procedure for setting the remuneration policy for the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Explain*	Gaji dan Tantiem/Insentif Kerja/Insentif Khusus Anggota Direksi diberikan berdasarkan komposisi faktor jabatan. Honorarium dan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Anggota Dewan Komisaris diberikan berdasarkan komposisi faktor jabatan. Pemegang Saham dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda untuk merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta kemampuan perusahaan. Salaries and Work Incentives/Special Incentives for Board of Directors members are provided based on the composition of position factors. Honorariums and Performance Incentives/Special Incentives for Board of Commissioners members are provided based on the composition of job factors. Shareholders can set different job factor amounts to reflect the appropriateness and fairness in the execution of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors members, as well as the Company's capabilities.
	Prinsip 3. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris **Principle 3. Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners**		
3.1	**Sifat Hubungan Kerja** Nature of the Working Relationship		
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. Open discussions are maintained between the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as among their respective members. However, it remains essential to protect the confidentiality of information to prevent leaks of sensitive data	*Apply*	1. Mekanisme formal berupa diskusi antara Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui forum Rapat Dewan Komisaris - Direksi, yaitu Rapat Pengawasan maupun Rapat Konsultasi. 2. Telah diatur mengenai tata tertib Rapat, salah satunya mengenai Kerahasiaan, bahwa "Dalam rapat biasanya akan didapat informasi yang bersifat rahasia atau terbatas, terkait diri orang ataupun terkait Perseroan. Adalah menjadi tanggung jawab dari setiap Peserta Rapat untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, terkecuali apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau apabila disepakati oleh pengambil keputusan di Perseroan. 1. The formal mechanism in the form of discussions between the Board of Directors and Board of Commissioners is conducted through the forum of the Board of Commissioners - Board of Directors Meeting, namely the Supervisory Meeting and the Consultation Meeting. 2. The meeting regulations have been established, one of which pertains to Confidentiality, stating that "During meetings, confidential or restricted information may be disclosed, whether regarding individuals or the Company. It is the responsibility of each meeting participant to maintain the confidentiality of such information, unless required by law or as agreed upon by the Company's decision-makers."

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In line with their respective roles and responsibilities, the Board of Directors works collaboratively with the Board of Commissioners in formulating the Company's mission, vision, and strategy, and regularly discusses their implementation.	*Apply*	Sesuai dengan tugas dan peran masing-masing, Direksi menyusun rancangan rencana jangka panjang (visi, misi dan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan), dan Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat atas rancangan RJP yang disiapkan oleh Direksi. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors prepares a draft long-term plan (vision, mission, and strategic plan containing the Company's goals and objectives), and the Board of Commissioners reviews and provides opinions on the draft long-term plan prepared by the Board of Directors.
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary plays a vital role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners, and in promoting the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	*Apply*	Sekretaris Perusahaan memegang peran strategis dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam aspek administratif, koordinasi dan komunikasi antara kedua organ difasilitasi melalui mekanisme korespondensi formal yang terstruktur antara Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan, maupun sebaliknya, sehingga memastikan kelancaran arus informasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi penting dalam memastikan perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik maupun governansi korporat. Dalam perannya sebagai penghubung, Sekretaris Perusahaan juga menjembatani komunikasi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan, guna menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan terhadap perusahaan. The Corporate Secretary plays a strategic role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners. In administrative aspects, coordination and communication between the two bodies are facilitated through structured formal correspondence mechanisms between the Secretary of the Board of Commissioners and the Corporate Secretary, and vice versa, ensuring the smooth flow of information and decision-making. In addition, the Corporate Secretary plays a vital role in ensuring that the Company consistently complies with applicable laws and regulations, in line with the implementation of Good Corporate Governance principles and corporate governance. In their role as a liaison, the Corporate Secretary connects communication between the Company and stakeholders to maintain transparency, accountability, and trust in the Company.
3.2	**Akses Informasi Dewan Komisaris** Access to Information by the Board of Commissioners		
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners must also ensure that it actively obtains adequate information. The Board of Directors regularly provides the Board of Commissioners with comprehensive updates on all matters relevant to the Company, without undue delay. The Board of Commissioners may also request additional information from the Board of Directors at any time.	*Apply*	Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perseroan secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penyampaian informasi Perseroan kepada Dewan Komisaris dilakukan secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat. Direksi secara berkala menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan, dan secara komprehensif mengenai semua informasi yang relevan dengan Perseroan. Direksi bertanggung jawab memastikan bahwa Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan secara efektif, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Commissioners is entitled to receive the Company's information in a timely, complete, measurable, and accurate manner. In this regard, the Board of Directors is responsible for ensuring that the Company's information delivery to the Board of Commissioners is performed in a timely, complete, measurable, and accurate manner. The Board of Directors periodically provides information relevant to the Company to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. To carry out their supervisory duties effectively, the Board of Commissioners may at any time request the Board of Directors to provide additional information.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
3.3	**Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi.** **Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners Related to Ownership Structure Impact**		
3.3.1	Dampak struaktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the Company's shareholding structure and relationships among shareholders, which may impact corporate management and operations.	*Apply*	Dampak struktur kepemilikan terhadap perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham perusahaan yang dapat berdampak terhadap pengelolaan dan operasi perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan prinsip profesionalisme, akutanbilitas sesuai maksud dan tujuan perusahaan. The impact of ownership structure on the Company. The Board of Directors and Board of Commissioners have considered their responsibilities in the context of the share ownership structure and the relationships among the Company's shareholders, which can impact the management and operations of the Company. The Board of Directors and Board of Commissioners carry out their respective roles, duties, and responsibilities with the principles of professionalism and accountability in accordance with the Company's aims and objectives.
	Prinsip 4. Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab **Principle 4. Ethical and Responsible Behavior**		
4.1	**Pedoman Etika dan Perilaku** Code of Ethics		
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi. b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi. c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya. e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi. f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi. g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	*Apply*	Perusahaan memiliki kebijakan mengenai Pedoman Perilaku dan Etika, serta mewajibkan karyawan untuk menandatangani Pakta Integritas. Pedoman Perilaku dan Etika mengungkapkan setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan akan a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. The Company has a policy regarding the Code of Conduct, and requires employees to sign the Integrity Pact. The Code of Conduct states that every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees will: a. Act in the best interest of the corporation; b. Act with honesty and high standards of integrity; c. Be independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and caution. d. Comply with the applicable laws and regulations for the corporation and its operations; e. Avoid unlawful conduct or unethical actions based on corporate ethics guidelines; f. Not involved or participating in any activities that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that will negatively impact the corporation's reputation;

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
Code of Conduct Statement, This statement is reflected in the Code of Business Conduct and Ethics, which must clearly express the Company's expectations that every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees will: a. Act in the best interests of the Company. b. Conduct themselves with honesty and uphold the highest standards of integrity. c. Exercise independence and act based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence. d. Comply with all applicable laws and regulations governing the Company and its operations. e. Avoid any actions that violate laws or are considered unethical based on the Company's code of ethics. f. Refrain from engaging in or participating in any activities that may create a conflict of interest with the Company's best interests or that may negatively affect the Company's reputation. g. Not exploit Company-owned property, information, or other assets—including those of customers—for personal gain or in a way that causes harm to the Company or its customers. h. Not misuse their position or any opportunities derived from it for personal benefit. i. Avoid soliciting or receiving payments, gratuities, or any other benefits from third parties for themselves or others that create conflicts of interest or grant unfair advantage to third parties in violation of laws and regulations. j. Respect differences of opinion and the rights of all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees. k. Ensure full, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted to regulators and in other public communications.		g. Not taking advantage of the corporation's property or information, other asset ownership, or its customers for personal benefit or causing losses to the corporation and its customers. h. Not abuse their position or the opportunities generated by their position for personal gain. i. Avoid actions of requesting or receiving from third parties payments, gratuities, or other benefits for oneself or for others that create a conflict of interest/provide benefits to third parties in violation of laws and regulations. j. Respect the differences of opinion and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees. k. Ensure complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosures in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.
4.1.2 Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes and enforces policies and practices related to anti-money laundering, anti-terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, and anti-fraud, as well as political neutrality, by referencing national or international standards applicable to these areas.	*Explain*	Direksi memiliki kebijakan mengenai Pedoman Perilaku dan Etika yang meliputi kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (anti fraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional. Namun demikian, ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai kebijakan dan praktik pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme masih belum diuraikan secara rinci dan komprehensif. The Board of Directors has a policy regarding the Code of Conduct that includes anti-money laundering and anti-terrorism financing policies and practices, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement, referring to national or international standards. However, the provisions specifically regulating policies and practices for preventing money laundering and terrorist financing have not yet been detailed comprehensively.
4.2 Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture		
4.2.1 Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. The Company articulates, cultivates, and discloses its corporate culture and values.	*Apply*	Tata nilai perusahaan telah ditetapkan Direksi melalui Peraturan Direksi Nomor 047.P./019/DIR/2020 tentang Budaya Perusahaan, yang bertujuan untuk mendorong tercapainya visi perusahaan melalui program-program penguatan budaya. The Company's values have been established by the Board of Directors through Board Regulation Number 047.P./019/DIR/2020 on Corporate Culture, which aims to encourage the achievement of the Company's vision through cultural reinforcement programs.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
4.3	**Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya.** Enforcement and Communication of Ethics, Values, and Culture		
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The Code of Conduct and corporate ethics are effectively communicated to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees; integrated into the Company's strategy and operations, including risk management systems and remuneration structures; and consistently enforced.	*Apply*	Pedoman perilaku dan kode etik perusahaan dalam bentuk Pedoman Perilaku dan Etika telah dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan melalui sosialisasi dan *refreshment* GCG dan melalui *website*. Pedoman Perilaku dan Etika diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi perusahaan termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi. Penerapan Budaya Perusahaan, Pedoman Perilaku dan Etika menjadi tanggung jawab Insan perusahaan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan budaya The Company's Code of Conduct has been communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees through GCG socialization and refreshment, and its website. The Code of Conduct is integrated into the Company's strategy and operations, including the risk management system and remuneration structure. The implementation of Corporate Culture, Code of Conduct is the responsibility of the Company's employees, including the Board of Commissioners and Board of Directors, in applying the culture.
	Prinsip 5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan **Principle 5. Risk Management, Internal Control, and Compliance**		
5.1	**Pengendalian Internal dan Kepatuhan.** Internal Control and Compliance		
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors periodically reviews the adequacy of the design and operational effectiveness of the Company's governance, risk management, internal control, and compliance systems, and reports on their implementation and outcomes to shareholders through the Company's Annual Report.	*Apply*	Direksi secara berkala melakukan reviu terhadap ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal, serta kepatuhan korporasi guna memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai tujuan strategis perusahaan dan prinsip-prinsip governansi. Hasil reviu tersebut menjadi dasar bagi Direksi dalam penyusunan laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham. The Board of Directors periodically reviews the appropriateness of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control, and corporate compliance to ensure that all mechanisms operate in accordance with the Company's strategic objectives and governance principles. The results of these reviews serve as the basis for the Board of Directors in preparing the annual report delivered to Shareholders.
5.2	**Manajemen Risiko** Risk Management		
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. The Company treats strategy and risk as interconnected elements. These are transparently disclosed, incorporated into the responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, and form part of discussions during joint Board meetings.	*Apply*	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are a unity, expressed transparently, integrated into the execution of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in discussions during their meetings.
5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.	*Apply*	Dewan Komisaris memiliki Komite Investasi dan Manajemen Risiko, yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris,dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Board of Commissioners has an Investment and Risk Management Committee, which assists in the execution of the Board of Commissioners' duties by creating transparent, focused, and independent mechanisms for overseeing corporate risk management.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
5.3	**Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan** Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan		
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors establishes an integrated GRC system that addresses uncertainties in a cohesive and integrity-driven manner, ensuring that the Company is able to achieve its objectives.	*Apply*	Direksi telah membangun kebijakan dan sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors has set integrated governance, risk management, and compliance (GRC) policies and systems, addressing various uncertainties in a cohesive manner and with high integrity, to ensure that the Company can achieve its objectives.
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the division overseeing the compliance function does not simultaneously carry out roles that may present a conflict of interest.	*Apply*	Direksi memastikan bidang yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Satuan/Bidang yang mengelola fungsi hukum dan kepatuhan melakukan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan terkait penerapan GRC yang telah ditetapkan oleh Direksi untuk memastikan kebijakan penerapan GRC selaras dengan sasaran strategis Perusahaan. The Board of Directors ensures that the division supervising the compliance function does not also perform functions that could potentially create a conflict of interest. The unit or division that manages the legal and compliance functions monitors and evaluates the policies related to the GRC as established by the Board of Directors to ensure that the GRC implementation policies align with the Company's strategic objectives.
5.4	**Audit Internal** Internal Audit		
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function supports the Company in achieving its objectives by applying an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal controls, and corporate governance.	*Apply*	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan fungsi audit internal membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function helps the Company achieve its goals by conveying an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.
	Prinsip 6. Pengungkapan dan Transparansi Principle 6. Disclosure and Transparency		
6.1	**Kebijakan dan Pengungkapan** Disclosure Policy		
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The Company has disclosure and transparency policies and procedures in place to ensure the release of material information while safeguarding sensitive and confidential information.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia Perusahaan. Terdapat kebijakan yang mengatur pengendalian informasi termasuk klasifikasi informasi, pihak-pihak yang memberikan data dan prosedur pengungkapan, yang diatur pada Keputusan Direksi Nomor 152.K/010/DIR/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi, Data dan Dokumen Perusahaan. The Company has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and the protection of sensitive and confidential company information. There is a policy that regulates information control, including information classification, parties providing data, and disclosure procedures, as stipulated in the Board of Directors' Decision No. 152.K/010/DIR/2010 concerning the Policy on Information, Data, and Company Document Management.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders must have regular and timely access to material and relevant information regarding the Company.	*Apply*	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Perusahaan memiliki kebijakan bahwa pemegang saham memiliki hak memperoleh informasi material mengenai Perusahaan, secara tepat waktu, terukur, dan teratur. The shareholders' right to obtain relevant material information on the corporation regularly and promptly must be fulfilled. The Company has a policy that shareholders have the right to obtain material information about the Company in a timely, measurable, and orderly manner.
6.2	**Laporan Keuangan dan Keberlanjutan** Financial and Sustainability Reporting		
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Company discloses the systems and procedures in place to ensure that unaudited or unreviewed interim financial reports are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information for making sound investment decisions.	*Apply*	Perusahaan mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat, melalui pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting* / ICOFR). The Company discloses systems and procedures to ensure that interim financial statements that are not audited or reviewed by external auditors are materially accurate, complete, and provide investors with the appropriate information to make informed investment decisions, through the implementation of Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR).
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of the financial audit conducted by the external auditor. This includes making recommendations on the appointment, reappointment, and, if necessary, the dismissal and remuneration of the external auditor.	*Explain*	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal antara lain proses seleksi auditor eksternal dilakukan secara transparan. Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan audit eksternal. Namun, Komite Audit belum memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Hal ini dikarenakan kontrak penunjukkan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan dilakukan oleh PT PLN (Persero). Serta Komite Audit belum melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereviu management letter yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen. The Audit Committee ensures the quality of the financial statement audit conducted by external auditors. These activities include recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors. It covers the transparent selection process for external auditors. The Board of Commissioners has reviewed the appropriateness and effectiveness of the external audit implementation. However, the Audit Committee has not ensured that the contract with the auditor does not contain clauses that could interfere with the auditor's independence or competence in conducting the financial statement audit. It is because the contract for the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) to audit the Financial Statements is performed by PT PLN (Persero). Moreover, the Audit Committee has not yet conducted adequate dialogue with the external auditor without the presence of management and monitored the interaction between management and the external auditor, including reviewing the management letter provided by the external auditor and overseeing management's response.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be accurately prepared and disclosed in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	*Apply*	Laporan keberlanjutan telah disiapkan dan diungkapkan dengan akurat, serta disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional yaitu 1. *Global Reporting Initiative* (GRI *Standard*) dan GRI Sektor Utilitas Listrik (*Electric Utilities Sector Disclosures*) 2. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 3. *The International Financial Reporting Standards* (IFRS) *Sustainability Disclosure Standards* 4. *The Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) Utilitas Listrik dan Pembangkit Listrik The sustainability report has been prepared and disclosed accurately. It is structured according to the national or international sustainability reporting framework, namely: 1. Global Reporting Initiative (GRI Standard) and GRI Electric Utilities Sector Disclosures 2. POJK Number 51/POJK.03/2017 and SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021 3. The International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards 4. The Sustainability Accounting Standards Board (SASB) for Electric Utilities and Power Plants
6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The Company publishes an integrated annual report that contextualizes past performance while providing insights into risks, opportunities, and future prospects—enabling shareholders and stakeholders to understand the Company's strategic goals and its progress in delivering sustainable value.	*Apply*	Perusahaan telah menerbitkan laporan tahunan yang menempatkan kinerja historis dalam konteks dan menggambarkan yang menggambarkan risiko, peluang & prospek korporasi di masa depan dalam Sub Bab Prospek Usaha khususnya mengenai prospek usaha industri ketengalistrikan dan pembangkit tenaga listrik, serta strategi dan peluang Perusahaan kedepan untuk mendukung Program Keberlanjutan atau ESG. The Company has published an annual report that places historical performance in context and describes the risks, opportunities, and future corporate prospects in the Business Prospects Sub-Chapter, particularly regarding the business prospects of the electricity and power plant industry, as well as its strategies and opportunities moving forward to support the Sustainability or ESG Program.
6.3	**Diseminasi Informasi** Information Dissemination		
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information channels must provide equal, timely, and cost-effective access to relevant information for users.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki saluran penyebaran informasi yang menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan efisien biaya bagi para pemangku kepentingan melalui situs website perusahaan dan berbagai platform media sosial. Perusahaan secara konsisten menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses serta dipahami, guna mendukung transparansi dan menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, Perusahaan memastikan seluruh informasi yang dipublikasikan telah sesuai dengan ketentuan klasifikasi informasi perusahaan yang berlaku. Perusahaan juga telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. The Company has established information dissemination channels that provide equal, timely, and cost-efficient access for stakeholders through its website and various social media platforms. The Company consistently provides material and relevant information in an easily accessible and understandable manner to support transparency and maintain objectivity in conducting business activities. In addition, the Company ensures that all published information complies with the applicable company information classification regulations. The Company has also obtained the ISO 27001:2022 Information Security Management System certification.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Company ensures that its annual statement on the implementation of the Indonesian Code of Corporate Governance—including explanations regarding each Recommendation and Guideline—is available on the Company's website for a minimum of five years.	*Apply*	Perusahaan telah melaksanakan penilaian atas penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) secara konsisten sejak tahun 2022, termasuk memberikan penjelasan atas implementasi setiap Rekomendasi dan Panduan yang relevan. Hasil penilaian tersebut telah diungkapkan secara transparan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dipublikasikan melalui situs web perusahaan. The Company has consistently conducted assessments of the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) since 2022, including providing explanations for the implementation of each relevant Recommendation and Guideline. The results of these assessments have been transparently disclosed in the Company's Annual Report and published on its website.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For companies listed in jurisdictions outside their home country, applicable corporate governance regulations must be clearly disclosed. In cases of cross-listing, the criteria and procedures for listing recognition—including those for primary listings—must be transparent and well-documented.	*Explain*	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan (N/A). Perusahaan tidak melakukan perdagangan saham maupun penerbitan obligasi, sehingga praktik ini tidak dilakukan. For corporations listed on the capital market in jurisdictions other than their original jurisdiction, the applicable corporate governance regulations must be disclosed clearly. In the case of cross listing, its criteria and procedures, the criteria and procedures for recognizing listing requirements for the main listing must be transparent and documented (N/A). The Company does not engage in stock trading or bond issuance, so this practice is not carried out.
	Prinsip 7. Pengungkapan dan Transparansi **Principle 7. Disclosure and Transparency**		
7.1	**Hak Pemegang Saham** Shareholders' Rights		
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The Company has a communication policy that facilitates and encourages the participation of shareholders and investors.	*Apply*	Perusahaan memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor, menyediakan wadah atau *platform* dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen. The Company has a communication policy that facilitates and encourages the participation of shareholders or investors, providing a forum or platform for constructive dialogue between all shareholders and management.
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. If the Company is a parent entity, it ensures that its corporate governance policies also apply to its subsidiaries and other entities under common control in which it has significant investment.	*Apply*	Perusahaan yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi perusahaan adalah signifikan. Hubungan antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi dilaksanakan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dimana kepentingan, arah dan kebijakan Perusahaan dijalankan melalui RUPS Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi. The Company, which is the parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and jointly controlled entities in which the Company's investment is significant. The relationship between the Company and its Subsidiaries/Associates is conducted through good corporate governance mechanisms, where the interests, direction, and policies of the Company are implemented through the GMS of the Subsidiaries/Associates.
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The Company has policies and procedures governing acquisitions, takeovers, and material transactions such as mergers and substantial asset sales, to ensure that such transactions are conducted transparently, on fair terms, and in a manner that protects the rights of all shareholders according to their respective share classes.	*Explain*	Perusahaan memiliki ketentuan mengenai pengambilalihan pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 29 dan *Board Manual.* Perusahaan memiliki kebijakan investasi serta prosedur dan proses bisnis mengenai akuisisi saham, namun Perusahaan belum memiliki aturan dan prosedur yang mengatur pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset perusahaan yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The Company has provisions regarding takeovers in the Company's Articles of Association, Article 29, and the Board Manual. The Company has investment policies, procedures, and business processes regarding share acquisitions. However, the Company does not yet have rules and procedures governing takeovers and extraordinary transactions such as mergers and the sale of its substantial assets to ensure that transactions occur transparently and under fair conditions, protecting the rights of all shareholders according to their class.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
7.2	**Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham** Fair Treatment of Shareholders		
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: a. semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; b. pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The Company establishes policies and procedures to ensure: a. All shareholders of the same series and class of shares are treated equally; b. Disclosure of these policies and procedures, as well as disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to exert disproportionate influence or control relative to their ownership.	*Explain*	Perusahaan memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a. semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara b. pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya Ketentuan mengenai hak pemegang saham telah dicantumkan dalam *Corporate Governance Code* (CG *Code*) Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta Laporan Tahunan Perusahaan yang dipublikasikan melalui situs website perusahaan. Perusahaan belum mengungkapkan perjanjian antar pemegang saham, *multiple voting rights* (N/A) dan perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di korporasi. Perusahaan belum menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak pemegang saham sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan. The Company has rules and procedures that ensure a. all shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, b. disclosure of those rules and procedures, as well as the disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to gain influence or control that is disproportionate to their share ownership Provisions regarding shareholders' rights have been included in the Corporate Governance Code (CG Code), Corporate Governance Guidelines, as well as the Company's Annual Report published on the Company's website. The Company has not yet disclosed the shareholders' agreement, multiple voting rights (N/A), and other commitments that enable certain shareholders to have voting rights beyond their ownership in the corporation. The Company has not yet provided mechanisms/procedures that enable shareholders to have the opportunity to obtain effective compensation for violations of shareholders' rights in accordance with applicable laws at a reasonable cost and without excessive delay.
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The Company has policies and procedures to ensure that related party transactions are approved and conducted in a way that properly manages conflicts of interest and safeguards the interests of the Company and its shareholders.	*Apply*	Perusahaan memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan Perusahaan dan pemegang saham. Perusahaan memiliki kebijakan akuntansi, sebagai prosedur baku terhadap setiap transaksi yang dilakukan untuk melakukan pencatatan. Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara adil dan wajar memenuhi prinsip *arm's length transaction*. Perusahaan memiliki ketentuan mengenai anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan, agar mengungkapkan potensi benturan kepentingan tersebut dan agar tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan tersebut. The Company has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and executed in a manner that assures conflicts of interest are properly managed, and protects the interests of the Company and shareholders. The Company has an accounting policy as a standard procedure for recording every transaction conducted. All transactions with related parties have been conducted fairly and justly, adhering to the arm's length transaction principle. The Company has provisions regarding members of the Board of Commissioners who have a conflict of interest, to disclose the potential conflict of interest and not to participate in the decision-making process.

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The Company has and discloses a policy to prevent insider trading. It maintains clear rules governing any trading of the Company's shares by directors, commissioners, and insiders to ensure that no one benefits, directly or indirectly, from non-public or undisclosed information.	*Apply*	Perusahaan memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Perusahaan memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham Perusahaan yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. Perusahaan memiliki *Code of Conduct* Pedoman Perilaku dan Etika yang mengatur Perusahaan tidak menolerir adanya praktik penjualan informasi dari orang dalam (insider trading) dan Perusahaan akan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku insider trading sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan praktik penjualan informasi Perusahaan. The Company possesses and discloses a policy to prevent insider trading. It has clear rules regarding any trading in the Company's shares conducted by Directors, Commissioners, and insiders. It aims to ensure that no one can gain directly or indirectly from information that is unavailable in the market. The Company has a Code of Conduct that regulates that it does not tolerate insider trading practices and will take legal action against perpetrators of insider trading in accordance with applicable regulations. Therefore, all Company employees are prohibited from engaging in the practice of selling Company information.
7.3	**Rapat Umum Pemegang Saham** General Meeting of Shareholders (GMS)		
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The Company announces the GMS along with its full agenda and supporting materials as early as possible, and no later than 28 days prior to the meeting, allowing sufficient time for shareholders to review and understand the meeting topics. Meeting invitations and related information are disclosed electronically, including via the Company's website.	*Apply*	Perusahaan telah menyampaikan panggilan/undangan RUPS, beserta dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin, sehingga dapat memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs website perusahaan. The Company has sent out the notice/invitation for the GMS, along with the agenda and materials for the GMS as comprehensively and promptly as possible, so that shareholders have sufficient time and materials to study the meeting agenda thoroughly. The meeting invitation and all GMS information are disclosed on the Company's website.
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The Company has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders' participation and voting rights in the GMS.	*Explain*	Perusahaan memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. Namun demikian, belum seluruhnya Dewan Komisaris dan Ketua Komite hadir dalam RUPS. The Company has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS. However, not all members of the Board of Commissioners and the Committee Chair were present at the GMS.
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders actively participate in appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Explain*	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di perusahaan lain, dan apakah calon Direktur dan/atau Komisaris dinilai independen dari sudut pandang perusahaan (N/A). Proses nominasi Direktur dan Komisaris menjadi kewenangan pemegang saham, dalam hal ini yaitu PT PLN (Persero), sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
			Shareholders effectively participate in appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, conducts an in-depth examination of candidates for Directors and Commissioners and conveys all relevant material information regarding the candidates to the shareholders in the process of electing board members. The disclosed information includes information on the positions of Directors or Commissioners in other companies, and whether the candidates for Directors and/or Commissioners are considered independent from the Company's perspective (N/A). The process of nominating Directors and Commissioners is the shareholders' authority, in this case PT PLN (Persero), in accordance with the applicable provisions.
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The Company ensures transparency and accountability of the external auditor during the GMS.	*Explain*	Perusahaan memastikan transparansi dan akuntabilitas eksternal di RUPS. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit eksternal. Namun demikian, Perusahaan belum mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS. Auditor Eksternal belum dihadirkan dalam RUPS untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada pemegang saham terkait audit atas laporan keuangan perusahaan. The Company ensures transparency and external accountability at the GMS. The Board of Commissioners has evaluated the implementation of the external audit. However, the Company has not yet identified and informed the candidates for the external auditor who will be appointed or reappointed at the GMS. The External Auditor was not present at the GMS to provide direct explanations to the shareholders regarding the audit of the Company's financial statements.
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. The results of voting and a summary of the GMS minutes are made publicly available on the following business day.	*Explain*	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya, melalui situs *website* Perusahaan. Namun demikian, laman atau media digital komunikasi resmi Perusahaan belum memuat dan menyediakan penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat, selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun. Laman atau media digital komunikasi resmi Perusahaan memuat penyelenggaraan RUPS berupa agenda rapat, hasil pemungutan suara dan keputusan tiap agenda rapat dalam 6 (enam) tahun. The announcement of the voting results and the complete summary of the GMS minutes will be made public on the next business day via the Company's website. However, the official communication website or digital media of the Company has not yet included and provided the holding of the GMS, along with all meeting materials, reports, and related documents, including the annual report and voting results, and the meeting agenda, for at least 10 (ten) years. The official digital communication media of the Company contains the conduct of the GMS in the form of meeting agendas, voting results, and decisions for each meeting agenda for 6 (six) years.

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
Prinsip 8. Penghargaan Terhadap Pemangku Kepentingan **Principle 8. Respect for Stakeholders**			
8.1	**Keterlibatan Pemangku kepentingan Kunci (*Stakeholder Engagement*)** Engagement with Key Stakeholders		
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. Through the Corporate Secretary, the Company conducts regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and engages them to understand their expectations, concerns, and the Company's impact on them.	*Apply*	Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci, dimana salah satu tugas Sekretaris Perusahaan adalah bertindak sebagai penghubung dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pedoman pelaksana tata kelola (pemangku kepentingan), dimana salah satunya mengatur mengenai klasifikasi *stakeholder* (pemangku kepentingan) dan tahapan tata kelola *stakeholder*. Perusahaan menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci untuk menyampaikan pendapat, masukan maupun pengaduan atau keluhan, baik dugaan pelanggaran ataupun kecurangan atas hak-hak pemangku kepentingan kunci. Perusahan telah mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan kunci. Perusahaan juga mengungkapkan keterlibatan pemangku kepentingan dan dampak perusahaan terhadap pemangku kepentingan. The Company, through the Corporate Secretary, conducts regular, transparent, and effective communication with key stakeholders, where one of their duties is to act as a liaison with the stakeholders. The Company has a policy regarding the guidelines for governance implementation (stakeholders), which includes the classification of stakeholders and the stages of stakeholder governance. The Company provides channels that can be used by key stakeholders to convey opinions, input, or complaints, whether they are allegations of violations or fraud regarding key stakeholders' rights. The Company has disclosed the views, inputs, and complaints conveyed by key stakeholders. The Company has also revealed stakeholder engagement and its impact on stakeholders.
8.2	**Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis** Integration of Sustainability into the Business Model		
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners and the Board of Directors are jointly responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including setting the Company's sustainability strategy, priorities, and targets. Both Boards incorporate sustainability considerations into their roles, including in corporate strategy development and implementation, business planning, key action plans, and risk management.	*Apply*	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. Perusahaan telah memiliki target keberlanjutan dalam Kontrak Manajemen Korporat, yang dilakukan monitor oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala. Dalam pengelolaan keberlanjutan, Direksi mendelegasikan wewenang kepada Bidang Corporate Planning and Sustainability untuk memastikan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi perencanaan korporat, proyeksi keuangan jangka panjang, penyelarasan strategi korporat dengan RKAP, RJP Unit dan RJP Anak Perusahaan dalam rangka sustainability dan pertumbuhan perusahaan. The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, is responsible, accountable, and transparent in sustainability governance, including setting the Company's sustainability strategies, priorities, and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when performing their roles, including but not limited to the development and implementation of corporate strategies, business plans, key action plans, and risk management. The Company has sustainability targets in the Corporate Management Contract, which are monitored periodically by the Board of Directors and Board of Commissioners. In sustainability management, the Board of Directors delegates authority to the Corporate Planning and Sustainability Division to ensure the strategy for planning, implementation, development, and evaluation of corporate planning, long-term financial projections, alignment of corporate strategy with the ABOP, Unit Long-term Business Plan, and Subsidiary Long-term Business Plan in the context of sustainability and company growth

	Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
8.3	**Perlindungan Terhadap Pemangku Kepentingan** Stakeholder Protection		
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that the Company's operations uphold high standards of ethics, social responsibility, and environmental stewardship throughout the organization, and that proper policies and procedures are in place to respect and uphold stakeholder rights.	*Apply*	Direksi telah memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi Perusahaan mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh Perusahaan dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors has ensured and stated that the Company's operations reflect the application of high ethical, social, and environmental standards throughout the Company and ensure that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with the rights of stakeholders.
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work in the long-term interests of the Company and to prioritize sustainability.	*Explain*	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. Namun demikian, Perusahaan belum memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritize sustainability. However, the Company does not yet have a long-term incentive policy for them.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Corporate Governance Guidelines for Public Companies

Pemetaan penerapan GCG mengacu pada POJK No. 21/POJK.04/2015 dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah dilakukan oleh Perusahaan untuk menilai kesesuaian implementasi GCG dengan lima aspek, delapan prinsip, dan 25 rekomendasi utama sebagaimana diatur dalam pedoman tersebut. Selain berfungsi sebagai alat evaluasi, hasil pemetaan tersebut juga menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut guna peningkatan kualitas tata kelola secara berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan perusahaan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemangku kepentingan.

Adapun hasil pemetaan penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka selama periode tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The mapping of GCG implementation refers to POJK No. 21/POJK.04/2015 and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning the Guidelines for Public Company Governance, which has been carried out by the Company to assess the conformity of GCG implementation with five aspects, eight principles, and 25 main recommendations as stipulated in the guidelines. In addition to serving as an evaluation tool, the results of the mapping also form the basis for developing follow-up plans to enhance the quality of governance sustainably, particularly in strengthening transparency, accountability, and integrity in corporate management as a form of protection for stakeholder interests.

The results of mapping the implementation of the Guidelines for Public Company Governance in 2025 are as follows:

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of Public Company Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
Aspek A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect A. Relationship Between Public Companies and Shareholders in Safeguarding Shareholder Rights			
Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1. Enhancing the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Implementation			
1.1.	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. The Public Company has established technical procedures for vote collection, either open or closed, which prioritize independence and the interests of shareholders.	*Comply*	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait pemungutan suara dalam RUPS sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan dimuat dalam tata tertib RUPS yang telah diungkapkan pada *website* perusahaan https://www.plnnusantarapower.co.id/sustainability/annual-general-shareholders-meeting. Anggaran Dasar Pasal 25 ayat 5 "Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat". The Company has a policy regarding voting in the GMS as regulated in the Articles of Association and included in the GMS rules, which have been disclosed on its website https://www.plnnusantarapower.co.id/sustainability/annual-generalshareholders-meeting. Articles of Association Article 25 paragraph 5 "Voting on personal matters is conducted by an unsigned closed ballot, and voting on other matters is conducted verbally, unless the Chairman of the Meeting decides otherwise without objection from the Shareholders present at the Meeting."
1.2.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners attend the Annual GMS.	*Explain*	Seluruh anggota Direksi telah menghadiri RUPS RKAP 2025 dan RUPS LPT 2024, sedangkan anggota Dewan Komisaris belum seluruhnya hadir dalam pelaksanaan RUPS RKAP 2025 dan RUPS LPT 2024, sebagaimana telah diungkapkan pada *website* perusahaan https://www.plnnusantarapower.co.id/sustainability/annual-general-shareholders-meeting. All members of the Board of Directors attended the GMS for 2025 ABOP and the 2024 AAR, while not all members of the Board of Commissioners were present at that GMS, as stated on the Company's website https://www.plnnusantarapower.co.id/sustainability/annual-general-shareholders-meeting.
1.3.	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the minutes of the GMS is made available on the Company's website for a minimum of one (1) year.	*Comply*	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Website Perusahaan https://www.plnnusantarapower.co.id/sustainability/annual-general-shareholders-meeting. The summary of the GMS minutes is available on the Company's Website at https://www.plnnusantarapower.co.id/sustainability/annual-generalshareholders-meeting.
Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2. Enhancing the Quality of Communication Between the Public Company and Shareholders or Investors			
2.1	Perusahaan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Company has a communication policy with shareholders or investors.	*Comply*	Perusahaan telah menyusun kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor, yang mencakup pengaturan strategi, program dan waktu pelaksanaan komunikasi (stakeholder management), serta panduan yang mendukung Pemegang Saham atau Investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut, yang tercantum pada Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0039.P/DIR/2024 tentang Pedoman Pelaksana Tata Kelola Stakeholder (Pemangku Kepentingan) PT PLN Nusantara Power dan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0060.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT PLN Nusantara Power. The Company has developed a communication policy with shareholders or investors, which includes the arrangement of strategies, programs, and the timing of communication implementation (stakeholder management), as well as guidelines that support shareholders or investors to participate in such communication, as outlined in the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power Number 0039.P/DIR/2024 concerning the Guidelines for Implementing Stakeholder Governance of PT PLN Nusantara Power and the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power Number 0060.P/DIR/2024 concerning the Strategic Policy on Corporate Communication and Social and Environmental Responsibility (TJSL) at PT PLN Nusantara Power.
2.2	Perusahaan mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham atau investor dalam situs web. The Company discloses its communication policy with shareholders or investors on its website.	*Comply*	Perusahaan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi korporasi melalui Peraturan Direksi Nomor 0060.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Komunikasi Korporat dan TJSL yang mengatur pola komunikasi dengan pemegang saham dan investor pada website https://www.plnnusantarapower.co.id/sustainability/annual-general-shareholders-meeting. The Company has disclosed its corporate communication policy pursuant to Board of Directors Regulation No. 0060.P/DIR/2025 on Strategic Corporate Communication and TJSL Policy, which regulates communication patterns with shareholders and investors at https://www.plnnusantarapower.co.id/sustainability/annual-general-shareholdersmeeting.

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
Aspek B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect B. Functions and Roles of the Board of Commissioners		
Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners		
3.1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbang-kan kondisi Perusahaan. The number of members of the Board of Commissioners is determined by taking into account the condition of the Company.	*Comply*	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Karakteristik tersebut tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris. Selain itu juga mempertimbangkan keberagaman usia dan kesetaraan gender. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) Perusahaan tanggal 26 Juni 2025, telah diangkat dan ditetapkan 6 orang Anggota Dewan Komisaris (1 Komisaris Utama dan 5 Komisaris), dimana jumlah Dewan Komisaris telah sama dengan jumlah Direksi The composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of the Board of Commissioners as an organ and the individual members, in accordance with the needs of the Company. These characteristics are reflected in the determination of the expertise, knowledge, education, and experience required in the execution of the supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners. In addition, it also considers age diversity and gender equality. Based on the Circular Shareholders' Resolution of the Company dated June 26, 2025, 6 members of the Board of Commissioners (1 President Commissioner and 5 Commissioners) were appointed and determined, where the number of the Board of Commissioners is equal to the number of the Board of Directors.
3.2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of the Board of Commissioners considers the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	*Comply*	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Karakteristik tersebut tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris. Selain itu juga mempertimbangkan keberagaman usia dan kesetaraan *gender*. Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2025 telah memperhatikan latar belakang yang beragam dalam hal keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan Perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris dalam *website* Perusahaan. The composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of the Board of Commissioners as an organ and the individual members, in accordance with the needs of the Company. These characteristics are reflected in the determination of the expertise, knowledge, education, and experience required in the execution of the supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners. In addition, it also considers age diversity and gender equality. The composition of the Company's Board of Commissioners in 2025 took into account diverse backgrounds in terms of expertise, knowledge, and experience aimed at supporting the Company's development. It can be seen from the profiles of each Board of Commissioners on the Company's website.
Prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4. Enhancing the Quality of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners		
4.1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate its performance.	*Comply*	Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan Penilaian Sendiri atau Self Assessment penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. Muatan Kebijakan Penilaian Sendiri atau *Self Assessment* penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial mencakup: 1. maksud dan tujuan penilaian 2. waktu pelaksanaannya secara berkala 3. tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan berdasarkan rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi dan Remunerasi. The Board of Commissioners has a Self-Assessment Policy for the collegial performance evaluation of the Board of Commissioners. The content of the Self-Assessment Policy for the collegial performance evaluation of the Board of Commissioners includes: 1. the purpose and objectives of the assessment 2. the implementation time is periodic 3. benchmarks or assessment criteria used based on the recommendations provided by the Nomination and Remuneration Committee.

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
4.2.	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Company's Annual Report.	*Comply*	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan melalui *website* Perusahaan https://www.plnnusantarapower.co.id/sustainability/annual-general-shareholders-meeting. The self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners has been disclosed at https://www.plnnusantarapower.co.id/sustainability/annual-general-shareholders-meeting.
4.3.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of its members if involved in financial crimes.	*Comply*	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan, yang tercantum pada dokumen *Board of Commissioner Manual* (BOC *Manual*) Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2025 pada Sub Bab 2.11 Independensi dan Akuntabilitas poin 15 "Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan yakni yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris" The Board of Commissioners has a policy requiring the resignation of its members involved in financial crimes, as stated in the Board of Commissioner Manual (BOC Manual) Guidelines for the Work Procedures of the Company's Board of Commissioners for the Year 2025 in Sub-Chapter 2.11 Independence and Accountability point 15: "Members of the Board of Commissioners involved in financial crimes, namely those who have received a legally binding decision, are required to resign from their position as members of the Board of Commissioners."
4.4.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee responsible for Nomination and Remuneration formulates a succession policy in the nomination process of the Board of Directors.	*Comply*	Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki kebijakan dalam bentuk *charter* atau piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mencakup pengaturan terkait fungsi nominasi dan kebijakan suksesi Direksi sebagaimana yang diatur pada bagian fungsi, tugas dan tanggung jawab. The Nomination and Remuneration Committee has a policy in the form of a charter, or the Nomination and Remuneration Committee charter, which includes regulations related to the nomination function and the Board of Directors' succession policy as outlined in the section on functions, duties, and responsibilities.
Aspek C. Fungsi dan Peran Direksi **Aspect C. Functions and Roles of the Board of Directors**			
Prinsip 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. **Principle 5. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors**			
5.1.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The number of members of the Board of Directors is determined with consideration to the condition of the Public Company and the effectiveness of decision-making.	*Comply*	Komposisi Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Penentuan komposisi anggota Direksi ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perseroan. Selain itu juga mempertimbangkan keberagaman usia dan kesetaraan *gender*. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) Perusahaan tanggal 26 Juni 2025, telah diangkat dan ditetapkan 6 orang Anggota Direksi. The composition of the Board of Directors is a combination of characteristics both in terms of the Board of Directors as an organ and the individual members, in accordance with the needs of the Company. The determination of the composition of the Board of Directors is made by considering the expertise, knowledge, education, and experience that are appropriate for the distribution of tasks and functions of the Board of Directors in achieving the Company's objectives. In addition, it also considers age diversity and gender equality. Based on the Circular Shareholders' Resolution of the Company dated June 26, 2025, 6 members of the Board of Directors were appointed and designated.

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
5.2.	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of the Board of Directors considers the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	*Comply*	Komposisi Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Penentuan komposisi anggota Direksi ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perseroan. Selain itu juga mempertimbangkan keberagaman usia dan kesetaraan gender. Komposisi Direksi Perusahaan Tahun 2025 telah memperhatikan latar belakang yang beragam dalam hal keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan Perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi dalam *website* Perusahaan. The composition of the Board of Directors is a combination of characteristics both in terms of the Board of Directors as an organ and the individual members, in accordance with the needs of the Company. The composition of the Board of Directors is determined by considering the expertise, knowledge, education, and experience that are appropriate for the distribution of the Board of Directors' tasks and functions in achieving the Company's objectives. In addition, it also considers age diversity and gender equality. The composition of the Company's Board of Directors in 2025 took into account diverse backgrounds in terms of expertise, knowledge, and experience aimed at supporting the Company's development. It can be seen from the profiles of each Board of Director on the Company's website. The composition of the Board of Directors is a combination of characteristics both in terms of the Board of Directors as an organ and the individual members, in accordance with the needs of the Company. The composition of the Board of Directors is determined by considering the expertise, knowledge, education, and experience that are appropriate for the distribution of tasks and functions of the Board of Directors in achieving the Company's objectives. In addition, it also considers age diversity and gender equality. The composition of the Company's Board of Directors in 2025 took into account diverse backgrounds in terms of expertise, knowledge, and experience aimed at supporting the Company's development. This can be seen from the profiles of each Board of Director on the Company's website.
5.3.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors responsible for accounting and finance possess expertise and/or knowledge in accounting.	*Comply*	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PLN Nusantara Power Tahun 2025 dijabat oleh Bapak Dwi Hartono (Januari - 25 Juni 2025), kemudian digantikan oleh Bapak Teguh Widhi Harsono (26 Juni 2026 - sekarang). Bapak Dwi Hartono memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, sebagaimana riwayat jabatan beliau yaitu EVP Manajemen Keuangan Aset PT PLN (Persero) (2021 - 2022) Bapak Teguh Widhi Harsono memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, dalam hal riwayat pendidikan dan riwayat jabatan. The members of the Board of Directors in charge of the accounting and finance sectors possess expertise and/or knowledge in the field of accounting. The Director of Finance and Risk Management of PT PLN Nusantara Power in 2025 was held by Mr. Dwi Hartono (January - June 25, 2025), and then succeeded by Mr. Teguh Widhi Harsono (June 26, 2026 - present). Mr. Dwi Hartono has expertise and/or knowledge in accounting, as evidenced by his previous position as EVP of Asset Financial Management at PT PLN (Persero) (2021 - 2022). Mr. Teguh Widhi Harsono has expertise and/or knowledge in the field of accounting, in terms of educational background and work history.
Prinsip 6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. **Principle 6. Enhancing the Quality of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors**			
6.1.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate its performance.	*Comply*	Direksi telah memiliki Kebijakan Penilaian Sendiri atau *Self Assessment* penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu. Muatan Kebijakan Penilaian Sendiri atau *Self Assessment* penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu mencakup: 1. maksud dan tujuan penilaian 2. waktu pelaksanaannya secara berkala 3. tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan berdasarkan rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi dan Remunerasi. The Board of Directors has its own Self-Assessment Policy for the performance evaluation of the Board of Directors both collegially and individually. The content of that Self-Assessment Policy includes: 1. the purpose and objectives of the assessment 2. the implementation time is periodic 3. the used assessment benchmarks or criteria are based on the recommendations provided by the Nomination and Remuneration Committee.

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
6.2.	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Directors is disclosed in the Company's Annual Report.	*Comply*	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan melalui *website* Perusahaan https://www.plnnusantarapower.co.id/sustainability/annual-general-shareholders-meeting. The self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors has been disclosed at https://www.plnnusantarapower.co.id/sustainability/annual-general-shareholders-meeting.
6.3.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of its members if involved in financial crimes.	*Explain*	Direksi telah memiliki kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan, yang tercantum pada dokumen *Board of Director Manual* (BOD *Manual*) Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi Perusahaan Tahun 2026 pada Sub Bab 2.12 Independensi dan Akuntabilitas poin 15 "Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan yakni yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Direksi". The Board of Directors has a policy for the resignation of Board members involved in financial crimes, as stated in the Board of Director Manual (BOD Manual) Guidelines for the Work Procedures of the Company's Board of Directors for the Year 2026 in Sub-Chapter 2.12 Independence and Accountability point 15 "Board members involved in financial crimes, namely those who have received a legally binding verdict, are required to resign from their position as Board of Directors members."
Aspek D. Partisipasi Pemangku Kepentingan **Aspect D. Stakeholder Participation**			
Prinsip 7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. **Principle 7. Enhancing Corporate Governance through Stakeholder Participation**			
7.1	Perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading.* The Company has a policy to prevent insider trading.	*Explain*	Perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* yang tercantum pada *Code of Conduct* (COC) Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan Tahun 2026 pada Sub Bab 9.2 Informasi Orang Dalam yaitu "Perseroan tidak menolerir adanya praktik penjualan informasi dari orang dalam (*insider trading*) dan Perseroan akan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku insider trading sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh Insan PLN NP dilarang melakukan praktik penjualan informasi Perseroan." The Company has a policy to prevent insider trading as stated in the Code of Conduct (COC) Guidelines for Company Behavior and Ethics 2026 in Sub-Chapter 9.2 Insider Information, which states, "The Company does not tolerate insider trading practices and will take legal action against insider trading perpetrators in accordance with applicable regulations." Therefore, all PLN NP employees are prohibited from engaging in the practice of insider trading.
7.2	Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*. The Company has an anti-corruption and anti-fraud policy.	*Comply*	Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud sebagaimana yang diatur dalam: 1. *Code of Conduct* (COC) Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan Tahun 2026 Bab 4 Anti Suap dan Korupsi 2. Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0055.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Kepatuhan PT PLN Nusantara Power 3. Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 002.K/021/DIR/2020 dan 003.K/DK-PLNNP/2020 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT PLN Nusantara Power The Company has an anti-corruption and anti-fraud policy as regulated in: 1. Code of Conduct (COC) Guidelines for Company Behavior and Ethics 2026 Chapter 4 Anti-Bribery and Corruption 2. Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power Number 0055.P/DIR/2024 on the Strategic Policy of Compliance Management of PT PLN Nusantara Power 3. Joint Decision between the Board of Directors and Board of Commissioners Number 002.K/021/DIR/2020 and 003.K/DK-PLNNP/2020 on the Anti-Fraud Policy within PT PLN Nusantara Power

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
7.3	Perusahaan memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Company has a policy on the selection and capacity building of suppliers or vendors.	*Comply*	Perusahaan telah memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah mencakup 1. Mekanisme Umum Pengadaan Barang/Jasa (sebagaimana tercantum pada Peraturan Direksi Nomor 0034.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power dan Peraturan Direksi Nomor 0035.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Lainnya PT PLN Nusantara Power) 2. Kriteria dalam pemilihan penyedia barang/jasa 3. Penilaian kinerja dan performa penyedia barang/jasa 4. Pembinaan penyedia barang/jasa (sebagaimana tercantum pada Peraturan Direksi Nomor 0040.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Pelaksana Pengelola Penyedia Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power) The Company has a Procurement Policy for Goods and Services that includes 1. General Mechanism for Procurement of Goods/Services (as stated in the Board of Directors Regulation Number 0034.P/DIR/2025 concerning the Strategic Policy for Procurement of Goods/Services of PT PLN Nusantara Power and the Board of Directors Regulation Number 0035.P/DIR/2025 concerning the Implementation Policy for Procurement of Other Goods/Services of PT PLN Nusantara Power) 2. Criteria for selecting goods/services providers 3. Evaluation of the performance of goods/services providers 4. Training for /services providers (as stated in the Board of Directors Regulation Number 0040.P/DIR/2025 concerning the Implementation Policy for Goods/Services Provider Management PT PLN Nusantara Power)
7.4	Perusahaan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Company has a policy on the fulfillment of creditors' rights.	*Explain*	Perusahaan telah memiliki Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang diatur pada *Code of Conduct* (COC) Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan Tahun 2026 pada Bab 11 Perlindungan Hak-hak Kreditur, yang mengatur antara lain 1. Pengakuan dan Perlindungan Hak Kreditur 2. Transparansi dan Keterbukaan Informasi 3. Kepatuhan terhadap Perjanjian dan Komitmen 4. Penyelesaian Sengketa 5. Prinsip Keadilan The Company has a Policy on the fulfillment of creditor rights regulated in the Code of Conduct (COC) Guidelines for Company Behaviour and Ethics 2026 in Chapter 11 Protection of Creditor Rights, which regulates, among others 1. Recognition and Protection of Creditor Rights 2. Transparency and Openness of Information 3. Compliance with Agreements and Commitments 4. Dispute Resolution 5. Principle of Justice
7.5	Perusahaan memiliki kebijakan sistem *whistleblowing.* The Company has a whistleblowing system policy.	*Comply*	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing system*) yang mengatur mengenai jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing,* cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan Kebijakan yang mengatur *whistleblowing* system antara lain: 1. *Code of Conduct* (COC) Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan Tahun 2026 pada Bab 5 Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) 2. Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 004.K/021/DIR/2020 dan 007.K/DK-PLNNP/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT PLN Nusantara Power The Company has a policy regarding a whistleblowing system that regulates the types of violations that can be reported via the whistleblowing system, the reporting methods, the protection and confidentiality guarantees for the whistleblower, the handling of complaints, the parties managing the complaints, and the results of handling and follow-up on the complaints. The policies governing the whistleblowing system include: 1. Code of Conduct (COC) Guidelines for Company Behavior and Ethics 2026 in Chapter 5, Whistleblowing System 2. Joint Decision between the Board of Directors and Board of Commissioners Number 004.K/021/DIR/2020 and 007.K/DK-PLNNP/2020 regarding the Whistleblowing System of PT PLN Nusantara Power

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
7.6	Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Company has a policy on the provision of long-term incentives for the Board of Directors and employees.	*Explain*	Perusahaan telah memberikan penghargaan baik kepada Direksi dan Karyawan atas kompetensi dan kinerja tertentu secara jangka pendek, namun belum adanya kebijakan pemberian insentif secara jangka panjang. Perusahaan belum memiliki kebijakan terkait kompensasi atau insentif jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan, antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP). The Company has rewarded both the Board of Directors and employees for certain competencies and performances in the short term, but there is no long-term incentive policy in place. The Company does not yet have a policy related to long-term performance-based compensation or incentives for management and/or employees, such as a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP).
Aspek E. Keterbukaan Informasi **Aspect E. Information Disclosure**			
Prinsip 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. **Principle 8. Enhancing the Implementation of Information Disclosure**			
8.1	Perusahaan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The Company utilizes information technology beyond its website as a medium for information disclosure.	*Comply*	Selain memastikan ketersediaan data dan informasi bagi kepentingan internal, Perusahaan juga berkomitmen untuk memberikan akses informasi kepada publik sebagai bagian dari penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Akses ini diberikan kepada para pemangku kepentingan eksternal yang membutuhkan informasi terkait kegiatan maupun kinerja Perusahaan, dalam rangka membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi secara lebih luas. Selain website, Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media lainnya seperti majalah dan *platform* media sosial, yaitu: 1. Surat elektronik (*email*) : info@plnnusantarapower.co.id 2. Instagram : @plnnusantarapower 3. Twitter : @ptpln_np 4. Facebook : www.facebook.com/plnnusantarapower 5. Youtube : plnnusantarapower 6. Website : www.plnnusantarapower.co.id In addition to ensuring the availability of data and information for internal purposes, the Company is also committed to providing public access to information as part of the implementation of transparency and accountability principles. This access is granted to external stakeholders who need information related to the Company's activities or performance, to build trust and strengthen relationships with the community. The Company has made broader use of information technology. In addition to the website, the Company utilizes information technology and other media applications, such as magazines and social media platforms, namely: 1. email: info@plnnusantarapower.co.id 2. Instagram: @plnnusantarapower 3. Twitter: @ptpln_np 4. Facebook: www.facebook.com/plnnusantarapower 5. Youtube: plnnusantarapower 6. Website: www.plnnusantarapower.co.id
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial ownership of at least 5% (five percent) of shares in the Public Company, in addition to disclosure of ultimate beneficial ownership through major and controlling shareholders.	*Comply*	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2024 telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan yang memiliki saham paling sedikit 5% (lima persen), serta pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali. Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2024, Komposisi Pemegang Saham dengan persentase kepemilikan 5% atau lebih atas saham PLN Nusantara Power Januari sampai dengan Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut: 1. Pemegang Saham dengan kepemilikan 5% atau lebih : PT PLN (Persero) (99,99%) 2. Pemegang Saham dengan kepemilikan kurang dari 5% : Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (0,01%) The Company's Annual Report for the 2024 Financial Year disclosed the ultimate beneficial owners in the Company's share ownership who hold at least 5% (five percent) of the shares, as well as the disclosure of information on major and controlling shareholders. As stated in the 2024 Annual Report, the composition of shareholders with a 5% or more ownership percentage of PLN Nusantara Power shares from January to December 2024 is as follows: 1. Shareholders with an ownership of 5% or more: PT PLN (Persero) (99.99%) 2. Shareholders with ownership of less than 5%: Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (0.01%)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environment Responsibilities

07

Strategi Keberlanjutan
Sustainability Strategy

PLN NP telah merumuskan berbagai strategi keberlanjutan yang diarahkan untuk menjawab tantangan global terkait perubahan iklim serta percepatan transisi menuju energi bersih dan tercapainya target *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Sebagai wujud komitmen nyata, PLN NP telah melaksanakan berbagai langkah mitigasi dampak perubahan iklim, antara lain melalui penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi bersih, peningkatan program efisiensi energi, serta pengurangan emisi gas rumah kaca secara bertahap dan terukur. Selain itu, Perusahaan juga terus mengembangkan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan dan mengadopsi teknologi inovatif guna mendukung operasional yang rendah emisi, sekaligus memperkuat upaya mitigasi risiko perubahan iklim secara berkelanjutan.

PLN NP has formulated various sustainability strategies aimed at addressing global challenges related to climate change, accelerating the transition to clean energy, and achieving the Net Zero Emission target by 2060. As a manifestation of its genuine commitment, PLN NP has implemented various climate change impact mitigation measures, including increasing the capacity of clean energy-based power plants, enhancing energy efficiency programs, and gradually and measurably reducing greenhouse gas emissions. In addition, the Company continues to develop more environmentally friendly infrastructure and adopt innovative technologies to support low-emission operations, while also strengthening efforts to mitigate climate change risks sustainably.

Menjawab Tantangan dan Menangkap Peluang Keberlanjutan Dengan Komitmen *Environmental, Social and Governance* (ESG)
Responding to Challenges and Seizing Sustainability Opportunities with Environmental, Social and Governance (ESG) Commitments

Tahun 2025 menjadi momentum percepatan transformasi energi global, di mana keberlanjutan berkembang menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung transisi energi. Peningkatan dampak perubahan iklim, dinamika geopolitik, isu ketahanan energi, serta pertumbuhan kebutuhan listrik global akibat ekspansi industri, kendaraan listrik, pusat data, dan teknologi kecerdasan buatan mendorong percepatan peralihan menuju energi rendah emisi dan energi terbarukan. Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan juga menghadapi tantangan berupa variabilitas cuaca ekstrem, kebutuhan investasi infrastruktur yang besar, dan ketahanan rantai pasok teknologi energi. Dalam konteks nasional, PLN NP menghadapi tantangan terkait keamanan pasokan energi primer, percepatan adopsi EBT, dinamika regulasi lingkungan, serta transformasi organisasi di lingkungan PLN Group.

The year 2025 marks a momentum for the acceleration of global energy transformation, where sustainability evolves into a strategic necessity in supporting the energy transition. The increasing impact of climate change, geopolitical dynamics, energy security issues, and the growth in global electricity demand due to industrial expansion, electric vehicles, data centers, and artificial intelligence technology drive the acceleration toward low-emission and renewable energy. On the other hand, the development of renewable energy also faces challenges such as extreme weather variability, the need for significant infrastructure investment, and the resilience of the energy technology supply chain. In the national context, PLN NP faces challenges related to the security of primary energy supply, the acceleration of NRE adoption, the dynamics of environmental regulations, and organizational transformation within the PLN Group.

Di tengah tantangan tersebut, PLN NP terus memperkuat perannya dalam mendukung transisi energi di Indonesia melalui transformasi portofolio energi, peningkatan efisiensi operasional, pengembangan inovasi rendah karbon, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko keberlanjutan. Berbagai inisiatif tersebut diintegrasikan ke dalam strategi bisnis, operasional, dan pengambilan keputusan investasi sebagai bagian dari upaya mendukung target Net Zero Emission Indonesia 2060, menjaga ketahanan usaha, serta menciptakan nilai jangka panjang melalui pengembangan energi bersih dan penguatan kinerja ESG.

Amidst these challenges, PLN NP continues to strengthen its role in supporting the energy transition in Indonesia through energy portfolio transformation, operational efficiency improvements, low-carbon innovation development, and the strengthening of governance and sustainability risk management. Various initiatives are integrated into business strategies, operations, and investment decision-making as part of efforts to support Indonesia's 2060 Net Zero Emission target, maintain business resilience, and create long-term value through the development of clean energy and strengthening ESG performance.

Untuk menjawab kondisi dan tantangan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi PLN NP telah mempertimbangkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim ke dalam Strategi, Rencana Bisnis, Kebijakan dan Keputusan Investasi Perusahaan. Hal ini dilakukan melalui keterlibatan dalam penyusunan hingga pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Tim Komite *Sustainability*, serta Tata Kelola Keberlanjutan Perusahaan. Metodologi yang dilakukan melalui rapat Direksi, rapat Komite keberlanjutan, dan rapat Tim ESG, dimana program yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan yang dibahas di antaranya yaitu peningkatan *awareness*, *self assessment Maturity Level Sustainability*, serta rapat tim ESG secara *biweekly* untuk memastikan progres dan ketercapaian target dalam *Maturity Level Sustainability*. *Maturity Level Sustainability* merupakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang digunakan oleh PLN *Holding* selaku Perusahaan Induk untuk mengukur

To address these conditions and challenges, the Board of Commissioners and the Board of Directors of PLN NP have considered sustainability and climate-related risks and opportunities in the Company's Strategy, Business Plan, Policies, and Investment Decisions. This is conducted through involvement in the preparation and approval of the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Sustainability Committee Team, and the Company's Sustainability Governance. The methodology is carried out through Board of Directors meetings, Sustainability Committee meetings, and ESG Team meetings, where programs related to sustainability aspects are discussed, including awareness enhancement, self-assessment of Sustainability Maturity Level, and biweekly ESG team meetings to ensure progress and achievement of targets in Sustainability Maturity Level. Sustainability Maturity Level is a Key Performance Indicator (KPI) used by PLN Holding as the Parent Company to measure the extent to which sustainability aspects have been

sejauh mana implementasi aspek-aspek Keberlanjutan telah diterapkan dalam proses bisnis di PLN NP. Selain itu, Perusahaan telah menyusun Net Zero Emission Roadmap yang komprehensif dan selaras dengan roadmap PLN *Holding* guna memastikan keselarasan program pengurangan emisi serta efektivitas pencapaian target dekarbonisasi.

Untuk memastikan implementasi ESG dilakukan secara terstruktur, terkoordinasi dan berkelanjutan, pada 28 Mei 2024 PLN NP telah melakukan pembentukan Komite *Sustainability* melalui Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor: 0028.K/DIR/2024. Komite ini bersifat lintas fungsi dan berperan dalam mengoordinasikan serta mengawal pelaksanaan aspek keberlanjutan di seluruh lini organisasi. Tim Komite *Sustainability* juga aktif berpartisipasi dalam menyampaikan progres implementasi aspek keberlanjutan, yang terbagi ke dalam lima *stream*, yaitu *stream* lingkungan, *stream* dekarbonisasi pembangkit tenaga fosil, *stream* ekspansi bisnis EBT, *stream* sosial, dan *stream* tata kelola. Pada tahun 2025, Komite *Sustainability* telah melakukan pembahasan terkait isu keberlanjutan dan iklim dengan metode komunikasi yang dilakukan melalui agenda *Workshop Carbon Disclosure Project* (CDP) *Rating* dan *Awareness Alignment Internasional Financial Reporting Standards* (IFRS) pada tanggal 21-22 Juli 2025 dalam mempersiapkan PLN Nusantara Power dalam ESG Rating yang mencakup aspek *Climate Change* dan *Water Security*, serta penyesuaian standar pelaporan keuangan perusahaan secara internasional. Komite Sustainability juga melaksanakan agenda *Workshop* ESG *Sustainability Culture* & ESG *Deployment Unit* Pembangkit pada tanggal 29-30 September 2025, isu yang dibahas di antaranya yaitu *knowledge sharing* kepada anggota Komite *Sustainability* terkait *Sustainability Mindset, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), dan *Sustainability Procurement*, serta mempersiapkan Unit Pembangkit PLN Nusantara Power dalam mendukung pencapaian *Maturity Level Sustainability* melalui penyusunan roadmap Unit. Dengan inisiatif dan kolaborasi tim ESG PLN NP tersebut, PLN NP telah berhasil mencapai ESG *Rating* "B" melalui CDP *Rating* kategori *Climate change* dan *Water Security*. Tim Komite *Sustainability* juga aktif berpartisipasi dalam menyampaikan progres implementasi aspek keberlanjutan, yang terbagi ke dalam 5 *stream*, yaitu *stream* lingkungan, *stream* dekarbonisasi pembangkit tenaga fosil, stream ekspansi bisnis EBT, *stream* sosial, dan *stream* tata kelola.

implemented in the business processes at PLN NP. In addition, the Company has developed a comprehensive Net Zero Emission Roadmap aligned with the PLN Holding roadmap to ensure the alignment of emission reduction programs and the effectiveness of achieving decarbonization targets.

To ensure that ESG implementation is performed in a structured, coordinated, and sustainable manner, on May 28, 2024, PLN NP established the Sustainability Committee through the Board of Directors' Decree of PT PLN Nusantara Power No. 0028.K/DIR/2024. This committee is cross-functional and plays a role in coordinating and overseeing the implementation of sustainability aspects across all lines of the organization. The Sustainability Committee team also actively participates in conveying the progress of sustainability aspect implementation, which is divided into five streams: the environmental stream, the fossil fuel power plant decarbonization stream, the NRE business expansion stream, the social stream, and the governance stream. In 2025, the Sustainability Committee held discussions on sustainability and climate issues using communication methods through the agenda of the Carbon Disclosure Project (CDP) Rating Workshop and Awareness Alignment of International Financial Reporting Standards (IFRS) on July 21-22, 2025, in preparation for PLN Nusantara Power's ESG Rating, which includes aspects of Climate Change and Water Security, as well as the adjustment of international financial reporting standards for the Company. The Sustainability Committee also held the agenda of the ESG Sustainability Culture & ESG Deployment Workshop for the Power Generation Unit on September 29-30, 2025. The issues discussed included knowledge sharing with Sustainability Committee members regarding Sustainability Mindset, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), and Sustainability Procurement, as well as preparing the PLN Nusantara Power Plant Unit to support the achievement of the Sustainability Maturity Level through the development of a Unit roadmap. With the initiative and collaboration of the PLN NP ESG team, PLN NP has successfully achieved an ESG Rating of "B" through the CDP Rating in the categories of Climate Change and Water Security. The Sustainability Committee team also actively participates in reporting the progress of sustainability implementation aspects, which are divided into 5 streams: the environmental stream, the fossil fuel power plant decarbonization stream, the NRE business expansion stream, the social stream, and the governance stream.

Pada tahun 2025, PLN NP telah menetapkan berbagai target terkait keberlanjutan dan iklim, yang tergambar melalui indikator *Maturity Level Sustainability* dan *Carbon Emission Reduction*, dimana pada akhir tahun tercapai lebih dari 100%.

In 2025, PLN NP set various targets related to sustainability and climate, reflected through the Maturity Level Sustainability and Carbon Emission Reduction indicators, where it achieved more than 100% by the end of the year.

Target dan Realisasi terkait Keberlanjutan dan Iklim PLN NP Tahun 2025
Targets and Realizations related to PLN NP Sustainability and Climate in 2025

Indikator Kinerja Performance Indicator	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement
Maturity Level Sustainability	Level	3,70	3,89	105,14%
Carbon Emission Reduction	%	1,26	1,46	115,87%
Total of units with PROPER (Beyond Compliance)	jumlah total	14	16	114,29%

Dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis dan transisi energi, PLN NP telah menetapkan arah pengembangan dan langkah yang akan di ambil dengan mengoptimalkan *core competency* dan inovasi berkelanjutan. Adapun arah pengembangan dan tujuan strategis PLN NP adalah sebagai berikut:

In facing dynamic business challenges and the energy transition, PLN NP has set development directions and steps to be taken by optimizing core competencies and sustainable innovation. The development directions and strategic goals of PLN NP are as follows:

Arah Pengembangan dan Tujuan Strategis PLN NP 2024 – 2028
Direction of Development and Strategic Objectives of PLN NP for 2024-2028

Kompetensi inti PLN NP merupakan faktor utama yang menentukan pencapaian misi PLN NP. Sesuai dengan kompetensi inti PLN NP tersebut maka PLN NP merumuskan arah pengembangan perusahaan yakni *new energy* dan *sustainable* sebagai berikut:

- *Digital & Operational Exellence*: Mencapai *Quartile* 1 *performance* dalam kinerja operasional dan pelaksanaan proyek PLN NP dengan mengoptimalkan *core asset* melalui keunggulan operasional dengan pencapaian implementasi digital power plant 100% pada pembangkit utama
- *Net Zero Emission*: Mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan, menargetkan kapasitas kumulatif >5 GW dari sumber energi baru terbarukan hingga tahun 2028 dan 15 GW pada tahun 2037, dengan memperluas kapasitas dan kapabilitas organisasi guna mengakselerasi transisi energi. Potensi pengurangan emisi sebanyak 22+ $mtCO_2$ hingga 2028
- *Growth*: Penambahan penjualan hingga 68 TWh dari pembangkit milik sendiri serta pendapatan Rp 4.5 Tn dari penawaran solusi & jasa, di seluruh Indonesia & 5 pasar internasional.
- *Launchpad*: Pencapaian 100% *Index Risk Maturity & Maturity Level Sustainability*

Dalam salah satu pilar sasaran strategis PLN NP 2024-2028 yaitu '*Net Zero Emission*', PLN NP telah menargetkan kapasitas kumulatif >5 GW dari sumber EBT hingga tahun 2028 dan 15 GW pada tahun 2037, dengan memperluas kapasitas dan kapabilitas organisasi guna mengakselerasi transisi energi. Dengan komitmen ini, akan menghasilkan potensi pengurangan emisi sebanyak 22+ $mtCO_2$ hingga 2028, dengan capaian dari waktu ke waktu sebagai berikut:

PLN NP core competencies are the main factors that determine mission achievement of PLN NP. According PLN NP core competencies, PLN NP formulates the direction of the Company development, namely new energy and sustainable as follows:

- Digital & Operational Excellence: Achieving Quartile 1 performance in operational performance and implementation of PLN NP projects by optimizing core assets through operational excellence with the achievement of 100% digital power plant implementation at the main power plant
- Net Zero Emission: Realizing sustainable growth, targeting a cumulative capacity of >5 GW from new renewable energy sources by 2028 and 15 GW by 2037, by expanding the capacity and capabilities of the organization to accelerate the energy transition. Potential emission reduction of 22+ mtCO2 by 2028
- Growth: Additional sales of up to 68 TWh from self-owned power plants and revenue of Rp4.5 Tn from offering solutions & services, throughout Indonesia & 5 international markets.
- Launchpad: Achievement of 100% Index Risk Maturity & Maturity Level Sustainability

In one of the pillars of PLN NP strategic targets for 2024-2028, namely 'Net Zero Emission', PLN NP target a cumulative capacity of >5 GW from renewable energy sources by 2028 and 15 GW by 2037, by expanding the organization's capacity and capabilities to accelerate the energy transition. With this commitment, it will result in a potential emission reduction of 22+ mtCO2 by 2028, with the following achievements over time:

Segera (<1 tahun) Immediate (<1 year)	Jangka Pendek (1-2 tahun) Short Term (1-2 years)	Jangka Menengah (2-5 tahun) Medium Term (2-5 years)	Jangka Panjang (5-15 tahun) Long Term (5-15 years)
• Mengoperasikan ~0.25 GW EBT (*co-firing* biomassa, tenaga surya, tenaga air, dan transisi PLTD) termasuk pembangkit milik sendiri dan IPP • Melakukan studi kelayakan penerapan EBT *next generation* di Indonesia, seperti PLTN dengan teknologi SMR, ekosistem hidrogen, CCUS, *energy storage system* • Operating ~0.25 GW of renewable energy (co-firing biomass, solar, hydropower, and transitional DPP) including owned and IPP plants • Conducting feasibility studies on the application of next generation renewable energy in Indonesia, such as Nuclear power plants with SMR technology, hydrogen ecosystems, CCUS, and energy storage systems	• Mengoperasikan ~1 GW EBT (*cofiring* biomassa, tenaga surya, tenaga air, dan transisi PLTD) termasuk pembangkit milik sendiri dan IPP • Melakukan studi kelayakan penerapan EBT next generation di Indonesia, seperti PLTN dengan teknologi SMR, ekosistem hidrogen, CCUS, *energy storage system* • Operating ~1 GW of renewable energy (co-firing biomass, solar, hydropower, and transitional DPP) including owned and IPP plants • Conducting feasibility studies on the application of next generation renewable energy in Indonesia, such as Nuclear power plants with SMR technology, hydrogen ecosystems, CCUS, and energy storage systems	• Mengoperasikan ~3 GW EBT (*co-firing* biomassa, tenaga surya, tenaga air, dan transisi PLTD) termasuk pembangkit milik sendiri dan IPP • Melakukan studi kelayakan penerapan EBT next generation di Indonesia, seperti PLTN dengan teknologi SMR, ekosistem hidrogen, CCUS, *energy storage system* • ~3 GW of renewable energy (co-firing biomass, solar, hydropower, and transitional DPP) including owned and IPP plants Conducting feasibility studies on the application of • Next generation renewable energy in Indonesia, such as Nuclear power plants with SMR technology, hydrogen ecosystems, CCUS, and energy storage systems	• Mengoperasikan ~6,3 GW EBT (*co-firing* biomassa, tenaga surya, tenaga air, dan transisi PLTD) termasuk pembangkit milik sendiri dan IPP • Melakukan studi kelayakan penerapan EBT next generation di Indonesia, seperti PLTN dengan teknologi SMR, ekosistem hidrogen, CCUS, *energy storage system* • Operating ~6.3 GW of NRE (biomass co-firing, solar power, hydroelectric power, and diesel power plant transition), including its own power plants and IPPs • Conducting feasibility studies on the implementation of next-generation NRE in Indonesia, such as nuclear power plants with SMR technology, hydrogen ecosystems, CCUS, and energy storage systems

Sejalan dengan adanya beberapa perubahan utama yang signifikan, antara lain yaitu percepatan target dekarbonisasi dimana Indonesia menargetkan untuk mencapai *Net Zero* pada 2060 dengan aspirasi sektor ketenagalistrikan ditetapkan pada 2050, mendukung komitmen Pemerintah Indonesia pada COP29 yang mengharuskan PLN NP untuk berkontribusi dalam implementasi pasar karbon internasional dan mendukung transisi penuh ke EBT yang diikuti rencana *coal phase down* sampai dengan 2040, serta PLN *Group* sedang menjalankan restrukturisasi *Holding SubHolding* untuk *streamlining* proses bisnis.

In line with several significant major changes, including the acceleration of decarbonization targets where Indonesia targets to achieve Net Zero by 2060 with the aspirations of the electricity sector set in 2050, supporting the Indonesian Government's commitment to COP29 which requires PLN NP to contribute to the implementation of the international carbon market and support the full transition to NRE followed by a coal phase down plan until 2040, and PLN Group is currently restructuring the Holding SubHolding to streamline business processes.

Untuk memperkuat kinerja keberlanjutan dan aksi menangani perubahan iklim dari waktu ke waktu, PLN NP telah memiliki *Sustainability Roadmap* 2024-2030 sebagai panduan strategis dalam mengarahkan transformasi bisnis menuju sistem energi yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga merupakan bentuk respon PLN NP terhadap isu ESG yang signifikan sejalan dengan konteks keberlanjutan Perusahaan.

To strengthen sustainability performance and actions to address climate change over time, PLN NP also has the 2024–2030 Sustainability Roadmap serves as a strategic guideline for directing business transformation toward a cleaner, more resilient, and sustainable energy system. This policy is also actualization of PLN NP response to significant ESG issues in line with the Company sustainability context.

Sejalan dengan transisi energi, PLN NP menetapkan fokus pengembangan bisnis dan niaga untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, yaitu memperkuat strategi keberlanjutan melalui pengembangan portofolio pembangkit dengan rencana inisiasi kapasitas sebesar 2.263 MW pada berbagai tahapan proyek guna menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung pertumbuhan pembangkit EBT. Selain itu, PLN NP mendorong pertumbuhan bisnis *beyond* kWh di dalam dan luar negeri melalui ekspansi pasar, pengembangan produk dan layanan, penguatan sinergi antar entitas, serta peningkatan proses bisnis untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

In line with the energy transition, PLN NP has set a focus on business and commercial development to support sustainable growth, namely strengthening sustainability strategies through the development of a power plant portfolio with a capacity initiation plan of 2,263 MW at various project stages to maintain the reliability of electricity supply while supporting the growth of NRE power plants. Additionally, PLN NP encourages business growth beyond kWh both domestically and internationally through market expansion, product and service development, strengthening synergies between entities, and improving business processes to create sustainable and competitive growth.

Landasan Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Basis for the Scope of Social and Environmental Responsibility

Pelaksanaan tanggung jawab sosial di lingkungan PLN NP berlandaskan pada kerangka regulasi nasional yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari keberlanjutan usaha.

Sebagai implementasinya, PLN telah menetapkan berbagai kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan TJSL di PLN NP, selaras dengan Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) PT PLN Nusantara Power, Kebijakan Aspek Sosial Masyarakat PT PLN Nusantara Power tanggal 12 November 2024 dan Peraturan Direksi Nomor 0060.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN Nusantara Power.

The implementation of social responsibility within PLN NP is based on a strong national regulatory framework, including Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, specifically Article 74, Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility (TJSL), and the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and the SOE TJSL Program. These regulations emphasize the obligation of companies engaged in and/or related to natural resources to conduct social and environmental responsibility as part of business sustainability.

To implement this, PLN has established various policies that serve as guidelines for the implementation of TJSL at PLN NP, in line with the Company Code of Conduct of PT PLN Nusantara Power, the Social Community Aspects Policy of PT PLN Nusantara Power dated November 12, 2024, and Board of Directors' Regulation Number 0060.P/DIR/2025 concerning the Strategic Policy on Corporate Communication and CSR of PT PLN Nusantara Power.

Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure

Struktur tata kelola PLN NP mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Perusahaan. Organ utama tata kelola Perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris didukung oleh berbagai organ pendukung tata kelola.

Direksi didukung oleh Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Satuan Legal, Risk and Compliance, serta unit kerja lainnya. Sementara itu, Dewan Komisaris didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. PLN NP juga memiliki kebijakan tata kelola (*soft structure*) yang berperan penting dalam mengarahkan proses bisnis dan hubungan dengan pemangku kepentingan agar tujuan Perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kebijakan tersebut meliputi CG *Code*, *Code of Conduct*, *Board Manual*, *Board of Commissioner Manual, Board of Director Manual,* Pedoman *Subsidiary Governance*, ESG *Policy*, serta pedoman tata kelola lainnya.

PLN NP's governance structure refers to the Law of the Republic of Indonesia No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association. The Company's governance main organ consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. In carrying out the of management and supervisory functions, the Board of Directors and Board of Commissioners are assisted by various Supporting Organs.

The Board of Directors is supported by the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit, the Legal, Risk, and Compliance Unit, and other work units. Meanwhile, the Board of Commissioners is supported by the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Investment and Risk Management Committee, and Nomination and Remuneration Committee. PLN NP also has governance policies (soft structure) that play a crucial role in directing business processes and relationships with stakeholders so that the Company's objectives can be achieved effectively and efficiently. These policies include the CG Code, Code of Conduct, Board Manual, Board of Commissioner Manual, Board of Director Manual, Guidelines for Subsidiary Governance, ESG Policy, and other governance guidelines.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance Organs

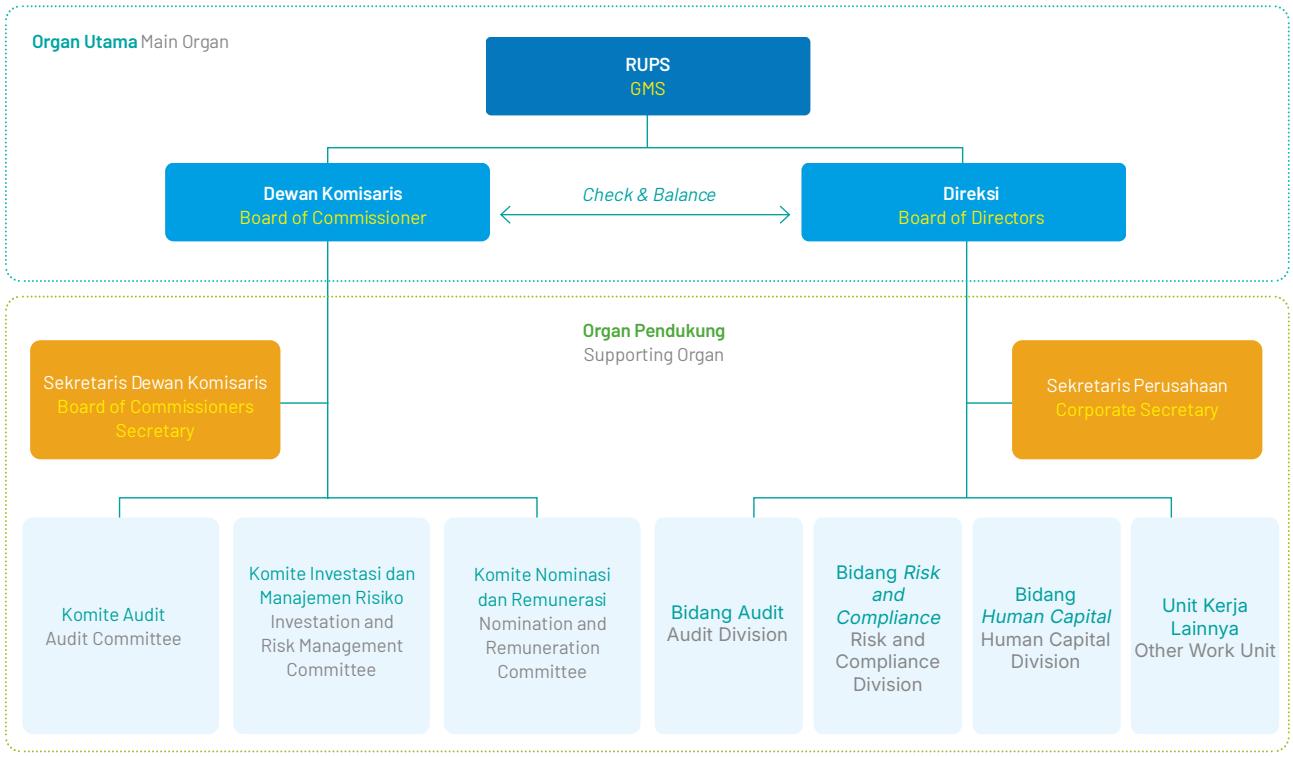

Seiring dengan perkembangan pada penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan, PLN NP membentuk Komite Sustainability berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0028.K/DIR/2024 tentang Pembentukan Komite *Sustainability* PT PLN Nusantara Power, yang berada di bawah pembinaan Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi serta Direktur Keuangan. Komite ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator, dan anggota dari lima *stream* yang mewakili berbagai bidang terkait.

Along with developments in the implementation of sustainability principles, PLN NP established a Sustainability Committee based on the Decree of the Board of Directors No. 0028.K/DIR/2024 on the Establishment of the Sustainability Committee of PT PLN Nusantara Power, which is under the guidance of the Director of Human Capital Management and Administration and the Director of Finance. The committee consists of a Chairman, Vice Chairman, Secretary, Coordinator, and members from five streams representing various related fields.

Struktur Komite Keberlanjutan PLN NP
Structure of PLN NP's Sustainability Committee

Direksi
Board of Directors
(Steering Committee)

Ketua Chairman
Kepala Satuan Technology Development and Asset Management
Head of Technology Development and Asset Management Unit

Wakil Ketua
Deputy

- Kepala Satuan Legal, Risk, and Compliance
  Head of Legal, Risk and Compliance Unit
- Kepala Satuan Pengawasan Intern
  Head of Internal Audit Unit
- Kepala Satuan *Supply Chain Management*
  Head of Supply Chain Management Unit

Penanggung Jawab Bidang
Person in Charge of Division

(1)
***Stream* Lingkungan**
Environmental Stream

Koordinator Coordinator
VP Health, Safety, Security, and Environment

Anggota Member
1. VP O&M Planning and Control (I, II, III, IV, V and NRE)
2. VP Pre-Construction
3. VP Construction Control
4. VP Project Management Office
5. VP Power Generation Reliability (I and II)
6. VP Primary Energy Planning and Control (I and II)

(2)
***Stream* Dekarbonisasi Pembangkit Tenaga Fosil**
Fossil Power Plant Decarbonization Stream

Koordinator Coordinator
VP Technology Development

Anggota Member
1. VP O&M Planning and Control (I, II, III, IV, V and NRE)
2. VP Power Generation Reliability (I and II)
3. VP Primary Energy Planning and Control (I and II)
4. VP Business Development-Generation
5. VP Business Development-Generation Derivatives
6. VP Health, Safety, Security, and Environment

(3)
***Stream* Ekspansi Bisnis EBT**
NRE Business Expansion Stream

Koordinator Coordinator
VP Business Development-Generation

Anggota Member
1. VP Portofolio Management and Subsidiaries
2. VP Business Development-Generation Derivatives
3. VP Pre-Construction
4. VP Construction Control
5. VP Project Management Office
6. VP Power Generation Reliability (I and II)

Komite Keberlanjutan
Sustainability Committee

Kepala Satuan *Project Management*
Head of Project Management Unit

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Secretary

1. VP Corporate Planning and Sustainability
2. VP, GCG, Secretary, and Protocol
3. Manager. Corporate Planning and Sustainability
4. Manager GCG and Corporate Reporting

(4)
***Stream* Sosial**
Social Stream

Koordinator Coordinator
VP Corporate Communication and CSR

Anggota Member
1. VP Information Technology and Digital
2. VP Human Capital Strategy
3. VP Human Capital Development
4. VP Human Capital Services
5. VP Procurement
6. VP Logistic and System
7. VP Demand Planning and Sourcing
8. VP General Affairs

(5)
***Stream* Tata Kelola**
Governance Stream

Koordinator Coordinator
VP Risk Management and Compliance

Anggota Member
1. VP Corporate Finance
2. VP Treasury and Tax
3. VP Auditor 1,2,3
4. VP Asset Management System Implementation
5. VP Corporate Performance
6. VP Accounting and Insurance

- Komite keberlanjutan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dan mengawasi kinerja keberlanjutan di PLN NP
- Komite keberlanjutan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh bidang terkait baik di pusat maupun di tingkat operasional pada setiap UP
- The Sustainability Committee is responsible for coordinating and supervising sustainability performance in PLN NP.
- The Sustainability Committee coordinates and collaborates with all relevant areas both at the central and operational levels in each GU.

Keterangan
Remark

Garis Koordinasi
Coordination Line

Environment

Social

Governance

Wakil Ketua
Deputy

Penanggung Jawab Bidang
Person in Charge of Division

Komite ini bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja keberlanjutan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh bidang terkait baik di pusat maupun di tingkat operasional pada setiap Unit Pembangkit PLN NP. Sepanjang tahun 2025, Komite Sustainability telah melaksanakan pengelolaan inisiatif program pada masing-masing workstream yang meliputi ESG *Workstream* dan *Energy Transition Workstream* untuk mencapai masing-masing target, sebagai berikut:

Pengelolaan Inisiatif Workstream Komite Sustainability
Management of Sustainability Committee Workstream Initiatives

ESG

Workstream	Lingkungan Environment	Sosial Social
Initiatives	• Penerapan Kebijakan Lingkungan • Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan • Implementasi program-program keanekaragaman hayati dan rehabilitasi pada area lahan kritis • Penerapan Program Tanggap Darurat • Pengelolaan Limbah B3 • Pengelolaan emisi konvensional • Pemetaan risiko dan peluang atas pengelolaan aspek lingkungan • Penerapan Pengelolaan Efluen • Pengelolaan Risiko Air • Pengungkapan Tren Intensitas Air • Implementasi Program Pengelolaan Air • Environmental Policy Implementation • Implementation of Environmental Management System • Implementation of biodiversity and rehabilitation programs on critical land areas • Implementation of emergency response programs • B3 waste management • Conventional emission management • Risk and opportunity mapping of environmental management aspects • Effluent management implementation • Water risk management • Disclosure of water intensity trends • Implementation of water management program	• Kebijakan Kebebasan Berserikat • Kebijakan Diskriminasi • Program Keberagaman • Perjanjian Perundingan Bersama • Tingkat Perputaran Karyawan • Pengembangan Karyawan • Sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja • Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja • Pengungkapan LTIR *Trend* dan *Employee Fatality Rate* • Penerapan *Green Procurement Policy* • Cakupan *Social Supplier Standards* • *Monitoring* rantai pasok • Implementasi Program-program keamanan kontraktor • Pengungkapan data kecelakaan kontraktor • Verifikasi Pelaporan ESG • Kebijakan Hak Asasi Manusia • Program Pengembangan Masyarakat • Program Pelibatan Masyarakat • Penetapan Kebijakan Masyarakat Adat • Freedom of association policies • Discrimination policy • Diversity programs • Collective bargaining agreements • Employee turnover rate • Employee development • Occupational health and safety certifications • Occupational health and safety management system • Disclosure of LTIR Trend and Employee Fatality Rate • Implementation of Green Procurement Policy • Coverage of Social Supplier Standards • Supply chain monitoring • Implementation of contractor safety programs • Disclosure of contractor accident data • Contractor accident data disclosure • ESG reporting verification • Human rights policy • Community development programs • Community engagement programs • Indigenous peoples policy implementation
Key Target	***Improvement of the Maturity Level of Sustainability to 3,58 at 2026 and CDP Rating's aspects Climate Change dan Water Management to B Score at the end of 2028***	

This committee is responsible for overseeing sustainability performance through coordination and collaboration with all relevant areas both at the central and operational levels at each PLN NP Generating Unit. Throughout 2025, the Sustainability Committee carried out the management of program initiatives in each workstream, including the ESG Workstream and Energy Transition Workstream, to achieve each target, as follows:

Energy Transition

Tata Kelola
Governance

- Penerapan Kebijakan Pencegahan Penyuapan dan Korupsi
- Implementasi Program Pencegahan Penyuapan dan Korupsi
- Program Sistem Pelaporan Pelanggaran
- Penandatanganan *Global Compact*
- Pengungkapan Pajak
- Standar Pelaporan ESG
- Tata Kelola ESG
- Target Performa ESG
- Kebijakan Keterlibatan Politik
- Lobi dan Biaya Politik
- Implementation of Bribery and Corruption Prevention Policy
- Implementation of Bribery and Corruption Prevention program
- Whistleblowing system program
- Signing of global compact
- Tax disclosure
- ESG reporting standards
- ESG governance
- ESG performance targets
- Political engagement policy
- Lobbying and Political Costs

Dekarbonasi Pembangkit Tenaga Fosil
Fossil Power Plant Decarbonization

- Transisi asset eksisting: diesilisasi, *cofiring*, *hybrid*
- Pengungkapan *trend* intensitas karbon
- Implementasi program pengurangan emisi GRK
- Pengungkapan Cakupan Perhitungan GRK
- Pengelolaan Risiko GRK
- Pengelolaan risiko fisik perubahan iklim
- Existing asset transition: decilization, cofiring, hybrid
- Disclosure of carbon intensity trend
- Implementation of GHG emission reduction program
- Disclosure of GHG calculation coverage
- GHG risk management
- Physical risk management of climate change

Ekspansi Bisnis EBT
NRE Business Expansion Stream

- Penggunaan dan implementasi program-program energi terbarukan
- Pengungkapan Produk dan Jasa Berkelanjutan Penggunaan dan implementasi program-program energi terbarukan
- Pengungkapan produk dan jasa berkelanjutan
- Pemetaan risiko dan peluan bisnis EBT
- Pengembangan strategi ekspansi bisnis
- Pengelolaan sumber daya EBT yang digunakan
- Pengelolaan dampak ESG pada proses pengembangan
- Use and implementation of renewable energy programs
- Disclosure of sustainable products and services and implementation of renewable energy programs
- Disclosure of sustainable products and services
- Mapping of NRE business risks and opportunities
- Development of business expansion strategy
- Management of NRE resources used
- Management of ESG impacts on the development process

Emission intensity reduction to 22+ mtCO₂/MWh in 2028

Visi Misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Vision and Mission of Social and Environmental Responsibility

Visi TJSL PLN NP
Social and Environmental Responsibility Vision of PLN NP

Menjadi Perusahaan Energi yang memiliki kinerja tinggi dalam pengelolaan dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara harapan pemangku kepentingan dan tujuan perusahaan untuk menjadi "*most trusted and preferred company*".

To become an energy company with high performance in managing environmental, social, and economic impacts, considering the balance between stakeholder expectations and the Company's goals to become the "most trusted and preferred company."

Misi TJSL PLN NP
Social and Environmental Responsibility Mission of PLN NP

- Meningkatkan reputasi perusahaan melalui peningkatan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan program-program CSR yang lebih berkualitas dan akuntabel.
- Meningkatkan orientasi pengelolaan program yang terukur dampaknya.
- Meningkatkan dukungan terhadap operasi PLN NP melalui peningkatan penerimaan para pemangku kepentingan terhadap eksistensi PLN NP sebagai bagian dari masyarakat (*corporate citizenship*).
- Meningkatkan konsistensi komitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan program-program CSR relevan dan unik.
- Meningkatkan kualitas hubungan yang luas dengan para pemangku kepentingan melalui strategi komunikasi yang elegan mepromosikan tema CSR yang kokoh, sesuai dengan tujuan perusahaan dan harapan para pemangku kepentingan.

- Enhance the Company's reputation through improved environmental, social, and economic performance with more quality and accountable CSR programs.
- Increase the management orientation of programs with measurable impacts.
- Enhance support for PLN NP operations through increased stakeholder acceptance of PLN NP's existence as part of the community (corporate citizenship).
- Consistently commit to sustainability and community welfare by involving stakeholders in managing relevant and unique CSR programs.
- Improve the quality of extensive relationships with stakeholders through elegant communication strategies promoting robust CSR themes, aligned with the Company's goals and stakeholders' expectations.

Pengembangan Kompetensi Keberlanjutan
Sustainability Competency Development

Pengembangan kompetensi merupakan langkah strategis PLN NP dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi dinamika bisnis yang terus berkembang. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan, *workshop*, serta pembelajaran berkelanjutan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan industri, baik dalam aspek K3, lingkungan, CSR, maupun keberlanjutan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa program pengembangan kompetensi keberlanjutan yang telah diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2025:

Competency development is a strategic step by PLN NP in enhancing the quality of human resources to be able to deal with the continuously evolving business dynamics. These efforts are performed through various training programs, workshops, and continuous learning designed to meet the organization's needs and industry developments, both in terms of OHS, environment, CSR, and overall sustainability. The following are some sustainability competency development programs that have been provided to the Board of Directors and Board of Commissioners during 2025:

Keikutsertaan Badan Tata Kelola dalam Program Pengembangan Kompetensi terkait Keberlanjutan
Participation of Governance Bodies in Sustainability-related Competency Development Programs

No.	Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/ *Workshop*/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Resource Person	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
1	Adam Muhammad	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Pengawasan Tata Kelola Risiko (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Certification	12-13 November 2025 November 12-13, 2025	LSP MKS, Jakarta
2	Muhammad Syafii	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Pengawasan Tata Kelola Risiko (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Certification	12-13 November 2025 November 12-13, 2025	LSP MKS, Jakarta
3	Suharyono	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Pengawasan Tata Kelola Risiko (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Certification	12-13 November 2025 November 12-13, 2025	LSP MKS, Jakarta
4	Ade Armando	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Pengawasan Tata Kelola Risiko (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Certification	12-13 November 2025 November 12-13, 2025	LSP MKS, Jakarta
5	M. Pradana Indraputra	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Pengawasan Tata Kelola Risiko (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Certification	12-13 November 2025 November 12-13, 2025	LSP MKS, Jakarta
Direksi Board of Directors					
1	Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	1 Agustus 2025 August 1, 2025	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS), *online*
2	Dwi Hartono	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	*Qualified Chief Risk Officer* (QCRO)	6 Agustus 2025 August 6, 2025	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS), *online*
3	Komang Parmita	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	*Qualified Chief Risk Officer* (QCRO)	6 Agustus 2025 August 6, 2025	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS), *online*
4	M.Irwansyah Putra	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	12-14 November 2025 November 12-14, 2025	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS), *online*
5	Tb Ari Wibawa Mukti	Direktur Manajemen Human Capital & Administrasi Director of Human Capital Management & Administration	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	12-14 November 2025 November 12-14, 2025	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS), *online*

Ikhtisar Kinerja dan Inisiatif Program Keberlanjutan

Highlights on Sustainability Program Performance and Initiatives

Pada tahun 2025, PLN NP terus melanjutkan dan memperkuat berbagai inisiatif strategis sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam memenuhi komitmen keberlanjutan yang telah ditetapkan. Inisiatif-inisiatif tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan lingkungan, pemberdayaan sosial, hingga implementasi praktik bisnis yang bertanggung jawab. Melalui langkah-langkah ini, PLN NP berupaya untuk memastikan tercapainya tujuan jangka panjang yang berfokus pada keberlanjutan, serta memperkuat peranannya sebagai entitas yang berkontribusi positif terhadap ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Inisiatif program keberlanjutan Perusahaan mencakup Aspek Ekonomi, Lingkungan dan Sosial yang telah dilakukan Perusahaan sepanjang tahun 2025. Ikhtisar kinerja dan inisiatif program keberlanjutan selengkapnya dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan PLN NP Tahun 2025.

In 2025, PLN NP continued and strengthened various strategic initiatives as part of the Company's efforts to fulfill the established sustainability commitments. These initiatives cover various aspects, ranging from environmental management, social empowerment, to the implementation of responsible business practices. Through these steps, PLN NP seeks to ensure the achievement of long-term goals that focus on sustainability, as well as strengthen its role as an entity that contributes positively to the economy, society and the environment. Sustainability program initiatives by the Company cover the Economic, Environmental and Social Aspects that the Company carried out throughout 2025. A complete highlight of performance and sustainability program initiatives is available in the PLN NP Sustainability Report for 2025.

Kinerja Keberlanjutan Aspek Ekonomi

Economic Sustainability Performance

Kinerja aspek ekonomi mencerminkan kemampuan PLN NP dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini ditunjukkan melalui pertumbuhan pendapatan, efisiensi operasional, serta pengelolaan biaya yang efektif guna menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga berkontribusi terhadap perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, pembayaran pajak, serta pemberdayaan mitra usaha lokal. Selain itu, PLN NP berkomitmen untuk go internasional dan menjajaki target market yang kebih luas sehingga dapat menciptakan peluang usaha baru yang akan berdampak bagi masyarakat sekitar.

The performance of the economic aspect reflects PLN NP's ability to create sustainable added value for all stakeholders. It is demonstrated through revenue growth, operational efficiency, and effective cost management to maintain the Company's financial stability. Moreover, the Company contributes to the economy through job creation, tax payments, and the empowerment of local business partners. In addition, PLN NP is committed to expanding internationally and exploring a wider target market, which can create new business opportunities that will impact the surrounding community.

Ikhtisar Capaian Kinerja Ekonomi
Overview of Economic Performance Achievements

Pada tahun 2025 pencapaian kinerja ekonomi dapat dilihat pada aspek realisasi produksi tenaga listrik yang berhasil melebihi target RKAP yaitu sebesar 66.919,39 GWh dari 63.675,78 GWh (tercapai 105,09%) dan realisasi penjualan tenaga listrik pada tahun 2025 sebesar 63.285,67 GWh dari target RKAP sebesar 60.231,71 GWh (tercapai 105,07%). Adanya jumlah produksi listrik yang melebihi target tersebut, memberikan dampak positif pada pada kinerja keuangan PLN NP, dimana realisasi laba bersih berhasil melebihi target RKAP yaitu sebesar Rp13.057.644 juta dari Rp10.560.780 juta (tercapai 123,64%).

In 2025, the achievement of economic performance can be seen in the aspect of electricity production realization, which successfully exceeded the RKAP target, amounting to 66,919.39 GWh from 63,675.78 GWh (achieved 105.09%). The realization of electricity sales in 2025 amounted to 63,285.67 GWh from the RKAP target of 60,231.71 GWh (achieved 105.07%). The amount of electricity production exceeding the target had a positive impact on PLN NP's financial performance, where the realization of net profit successfully exceeded the RKAP target, amounting to Rp13,057,644 million from Rp10,560,780 million (achieved 123,64%).

Perbandingan Target dan Kinerja Operasional dan Keuangan
Comparison of Operational and Financial Targets and Performance

Indikator Indicator	2025		Pencapaian Achievement	2024		Pencapaian Achievement	2023		Pencapaian Achievement
	Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization	
Produksi Tenaga Listrik (GWh) Electricity Production (GWh)	63.675,78	66.919,39	105,09%	57.533,78	67.094,65	116,62%	58.915,20	66.846,00	113,05%
Penjualan Listrik (GWh) Electricity Sales (GWh)	60.231,71	63.285,67	105,07%	54.189,52	63.415,18	117,02%	55.497,83	63.178,60	113,21%
Pendapatan Usaha (Rp Juta) Business Revenue (Rp Million)	101.997.484	98.893.003	96,96%	86.521.210	91.713.159	106,00%	89.552.725	90.375.607	100,92%
Laba Tahun Berjalan (Rp Juta) Profit for the Year (Rp Million)	10.560.780	13.057.644	123,64%	10.040.984	12.909.581	128,57%	8.183.702	13.667.653	167,01%

Kontribusi Kepada Negara
Contribution to the State

Dalam mendorong perkembangan perekonomian di Indonesia PLN NP berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi keuntungan bagi Negara. Wujud komitmen keberlanjutan ini ditunjukan dengan kepatuhan PLN terhadap pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai wajib pajak melalui pembayaran

In encouraging economic development in Indonesia, PLN NP is committed to keeping the provision of profitable contributions to the State. PLN NP actualizes this sustainability commitment through compliance with fulfilling the Company obligations as a taxpayer through tax payments and dividends. The total tax deposit for

pajak dan dividen. Jumlah setoran pajak tahun 2025 sebesar Rp4,42 Triliun, meningkat 7,76% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,1 Triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan kinerja operasional Perusahaan serta optimalisasi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2025 is Rp4.42 trillion, an increase of 7.76% compared to 2024, which was Rp4.1 trillion. The increase was primarily driven by improved operational performance of the Company and the optimization of compliance in fulfilling tax obligations.

Sebagai pemotong pajak, Perusahaan secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak-pajak seperti PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan sewa bangunan; PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi; dan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan.

As a tax withholding agent, the Company actively participates in withholding, depositing and reporting taxes such as Article 4 paragraph 2 Income Tax on construction services and building rentals; Article 21 Income Tax on income received by individual taxpayers; and Article 23 Income Tax on income received by corporate taxpayers

Tabel Setoran Pajak (Rp Miliar)
Table of Tax Deposit (Rp Billion)

Uraian Description	2023	2024	2025	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Rp
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	456,26	513,07	526,29	2,58%	13,22
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	210,48	168,71	163,04	-3,36%	(5,67)
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 paragraph 2	22,86	24,35	22,45	-7,81%	(1,90)
PPh Pasal 15 Income Tax Article 15	19,94	24,39	18,93	-22,40%	(5,46)
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	348,73	506,46	681,88	34,64%	175,42
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	-	-	36,30	-	36,30
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	0,0189	0,0878	0,096	15,97%	0,013
PPh Badan Corporate Income Tax	-	-	62,22	-	62,22
PBB Property Tax	39,41	67,91	65,05	-4,21%	(2,86)
PPN Masukan Input VAT	2.941,97	2.795,03	2.842,00	1,68%	46,97
Jumlah Setoran Pajak **Amount of Tax Deposit**	**4.039,66**	**4.100,00**	**4.418,25**	**7,76%**	**318,24**

Selain pembayaran pajak kepada Negara, adapun kontribusi lain PLN NP terhadap Negara secara tidak langsung melalui peningkatan APBN yaitu PLN NP telah menyumbang dividen kepada PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2025. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2025, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2024. Berdasarkan surat PLN tanggal 15 Desember 2025, pembagian dividen untuk tahun buku 2024 ditetapkan sebesar Rp12.865 miliar.

In addition to tax payments to the State, PLN NP contributes to the State indirectly through the increase in the State Budget (APBN), as PLN NP provided dividends to PT PLN (Persero), which is a State-Owned Enterprise (BUMN), in 2025. Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders dated June 19, 2025, the shareholders authorized the majority shareholders to determine the retained earnings, general reserves, objectives, and dividends from the Company's profit in 2024. According to the PLN letter dated December 15, 2025, the dividend distribution for the 2024 financial year was set at Rp12.865 billion.

Kinerja Keberlanjutan Aspek Lingkungan
Environmental Sustainability Performance

Kinerja keberlanjutan pada aspek lingkungan mencerminkan sejauh mana suatu Perusahaan mampu mengelola dampak aktivitasnya terhadap alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, efisiensi penggunaan energi dan air, pengelolaan limbah yang efektif, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik biasanya menerapkan prinsip ekonomi sirkular, memanfaatkan sumber daya terbarukan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.

Sustainability performance in the environmental aspect reflects the extent to which a company is capable of managing the impact of its activities on nature responsibly and sustainably. This includes efforts to reduce greenhouse gas emissions, efficient use of energy and water, effective waste management, and biodiversity protection. Companies with good environmental performance usually implement circular economy principles, utilize renewable resources, and ensure compliance with applicable environmental regulations.

Komitmen PLN NP terhadap pengelolaan lingkungan Perusahaan juga dilakukan melalui penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi PT Pembangkitan Jawa-Bali No.027.K/020/DIR/2023. Kebijakan ini mengacu pada peraturan yang berlaku diantaranya PP 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Kebijakan tersebut mengatur penggunaan sumber daya energi dan sumber daya alam dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan unit pembangkit PLN NP secara efisien. Untuk itu sebagai bagian dari komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan, PLN NP secara aktif mempraktikkan operasional yang ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse,* dan *recycle*). Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong terciptanya sistem pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

PLN NP's commitment to environmental management is also conducted through the establishment of the Integrated Management System Policy of PT Pembangkitan Jawa-Bali No.027.K/020/DIR/2023. This policy refers to applicable regulations, including Government Regulation No. 22 of 2021 on Environmental Protection and Management and ISO 14001 on Environmental Management Systems. The policy regulates the use of energy and natural resources in the operational and maintenance activities of PLN NP's power plant units efficiently. Therefore, as part of its commitment to environmental sustainability, PLN NP actively practices environmentally friendly operations by applying the 3R principles (reduce, reuse, and recycle). This approach aims to minimize negative environmental impacts and promote the creation of a more efficient and responsible resource management system.

Manajemen PLN NP secara konsisten melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup guna memastikan keselarasan dengan regulasi terkini serta meningkatkan efektivitas implementasi program. Kebijakan yang saat ini diterapkan merupakan hasil penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 0027.K/020/DIR/2023 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi. Melalui komitmen ini, PLN NP menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang diwujudkan melalui berbagai inisiatif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar wilayah operasional perusahaan.

PLN NP management consistently conducts evaluations and updates of environmental management policies to ensure alignment with current regulations and to enhance the effectiveness of program implementation. The policies currently in place are the result of improvements to previous provisions, as stipulated in the Board of Directors Decree Number 0027.K/020/DIR/2023 on the Integrated Management System Policy. Through this commitment, PLN NP demonstrates its seriousness in fulfilling social and environmental responsibilities, manifested through various initiatives to uphold and enhance the quality of the environment around the Company's operational areas.

Kegiatan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Activities

Dalam komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan, PLN NP telah mengimplementasikan berbagai program strategis yang dirancang untuk mendukung prinsip keberlanjutan sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Inisiatif tersebut mencakup pengelolaan emisi dan limbah secara terintegrasi, peningkatan efisiensi energi, konservasi sumber daya air, serta perlindungan keanekaragaman hayati di sekitar wilayah operasional. Beberapa program utama yang telah dijalankan oleh PLN NP selama tahun 2025 antara lain:

In its commitment to environmental management, PLN NP has implemented various strategic programs designed to support sustainability principles while minimizing negative impacts on ecosystems. These initiatives include integrated emission and waste management, energy efficiency improvements, water resource conservation, and biodiversity protection around operational areas. Several key programs that have been implemented by PLN NP during 2025 include:

Program Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Compliance Program

Program kepatuhan pengelolaan lingkungan merupakan bagian penting dari upaya Perusahaan dalam memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar lingkungan yang ditetapkan. Pada tahun 2025, program kepatuhan pengelolaan lingkungan yang dijalankan oleh PLN NP adalah sebagai berikut:

The environmental management compliance program is an essential part of the Company's efforts to ensure that all operational activities run in accordance with applicable laws and established environmental standards. In 2025, the environmental management compliance program executed by PLN NP is as follows:

Program Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Compliance Program

No.	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Kegiatan Activity Realization	
1.	Pengelolaan Lingkungan Environmental Management	• Pengelolaan Limbah Padat Domestik • Pengelolaan Limbah FABA • Pengelolaan Limbah B3 • Pengurangan Sampah Plastik • Pengelolaan Limbah Cair • Pengelolaan Emisi Non-GRK • Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	• Domestic Solid Waste Management • FABA Waste Management • Hazardous Waste Management • Plastic Waste Reduction • Liquid Waste Management • Non-GHG Emission Management • Environmental Management System Certification
2.	Penggunaan Sumber Daya Resource Usage	• Program Efisiensi Penggunaan Air • Program Pengelolaan Risiko Kelangkaan Air	• Water Use Efficiency Program • Water Scarcity Risk Management Program
3.	Pengelolaan Perubahan Iklim Climate Change Management	• Pengendalian Perubahan Iklim • Inventarisasi dan Penghitungan Emisi GRK • Perdagangan Karbon • Aksi Adaptasi Perubahan Iklim • Mitigasi Perubahan Iklim	• Climate Change Control • GHG Emissions Inventory and Accounting • Carbon Trading • Climate Change Adaptation Action • Climate Change Mitigation
4.	Penggunaan Lahan dan Keanekaragaman Hayati Land Use and Biodiversity	• Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Penutupan dan Rehabilitasi Lahan	• Biodiversity Management • Site Closure and Rehabilitation

Penggunaan Energi Ramah Lingkungan
Use of Green Energy

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, PLN NP terus mendorong peningkatan efisiensi energi sekaligus mempercepat pengembangan energi hijau dalam mendukung transformasi menuju sistem ketenagalistrikan yang lebih ramah lingkungan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan masih memanfaatkan berbagai sumber energi primer seperti bahan bakar minyak, batubara, dan gas untuk memenuhi kebutuhan produksi listrik. Meskipun demikian, PLN NP secara aktif mengupayakan optimalisasi penggunaan energi tersebut melalui penerapan teknologi yang lebih efisien serta pengurangan intensitas emisi. Sejalan dengan itu, perusahaan juga terus memperluas pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan sebagai langkah strategis dalam mendukung transisi energi nasional. Beberapa inisiatif program efisiensi energi yang diterapkan pada pembangkit dalam proses produksi listrik antara lain:

- *Retrofit* dan *Remote Operation* sebagai solusi konservasi dan upaya *sustainable* pembangkit listrik *Green Energy*
- Diversifikasi suplai PS dengan PV *Rooftop*
- Pemasangan panel Listrik Tenaga Surya Gedung
- Optimasi CNG (*Compressed Natural Gas*)
- Penggantian lampu penerangan ke LED
- Pengantian AC konvensional ke AC *inverter*

- *Uprating* PV *Rooftop*

As part of its commitment to sustainable environmental management, PLN NP continues to promote energy efficiency improvements while accelerating the development of green energy to support the transformation toward a greener power system. In carrying out its operational activities, the Company continues to utilize various primary energy sources, including oil, coal, and gas, to meet its electricity production needs. Nevertheless, PLN NP actively strives to optimize the use of these energy sources by applying more efficient technologies and reducing emission intensity. In line with that, the Company also continues to expand the utilization of cleaner and more sustainable energy sources as a strategic step in supporting the national energy transition. Several energy efficiency program initiatives implemented at power plants in the electricity production process include:

- Retrofit and Remote Operation as conservation solutions and sustainable Green Energy power plant efforts
- Diversification of PS supply with Rooftop PV
- Installation of Building Solar Electricity panels
- CNG (Compressed Natural Gas) optimization
- Replacement of lighting to LED
- Replacement of conventional air conditioners to inverter air conditioners
- Uprating PV Rooftop

Komitmen dalam penerapan insiatif efisiensi khususnya energi primer PLN NP ditunjukkan dengan penggunaan biomassa sebagai campuran bahan bakar pembangkit. Jumlah konsumsi energi primer tahun 2025 yaitu 963.684.114 Gigajoule meningkat dari tahun 2024 sebesar 937.346.765 Gigajoule, yang dirincikan dalam tabel berikut.

Commitment to the implementation of efficiency initiatives, especially primary energy for PLN NP, is shown by the use of biomass as a mixture of power plant fuels. The total primary energy consumption in 2025 was 963,684,114 Gigajoules, an increase from 2024 of 937,346,765 Gigajoules, which is detailed in the following table.

Konsumsi Energi Primer Tahun 2023-2025 (Gigajoule)
Primary Energy Consumption 2022-2024 (Gigajoule)

No.	Jumlah Energi Power Total Power Energy	2025	2024	2023
Energi Fosil Fossil Energy				
1	High Speed Diesel (HSD)	2.798.498	3.178.136	3.008.749
2	Bio HSD	5.075.560	6.977.584	6.389.430
3	Marine Fuel Oil (MFO)	2.052.817	1.200.765	2.045.697
4	Batubara Coal	721.004.340	685.154.636	694.941.665
5	Gas	216.659.443	227.241.602	218.700.418
Energi Terbarukan Renewable Energy				
6	Air	60.404	62.386	60.569
7	Biomassa	12.745.211	9.785.930	5.805.613
8	Solar Panel	162	186	-
9	Bio Fame	3.287.679	3.745.539	2.738.327
Total Penggunaan Energi Dalam Perusahaan Total Energy Use in the Company		**963.684.114**	**937.346.765**	**933.690.469**

Sistem Pengolahan Limbah
Waste Treatment System

Limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi apabila tidak dikelola secara optimal. Oleh karena itu, PLN NP menerapkan pengelolaan limbah secara efektif melalui kepatuhan terhadap regulasi, upaya pengurangan limbah dari sumbernya, serta proses pengolahan dan pembuangan yang aman dan ramah lingkungan. Pengelolaan tersebut mencakup limbah dari proses produksi listrik, penggunaan bahan kimia, kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan, serta pengolahan air limbah dan limbah B3.

Waste generated from the Company's operational activities has the potential to cause environmental, social, and economic impacts if not managed optimally. Therefore, PLN NP implements waste management effectively through compliance with regulations, efforts to reduce waste at the source, and safe and environmentally friendly processing and disposal processes. The management includes waste from the electricity production process, the use of chemicals, maintenance and repair activities of equipment, as well as the treatment of wastewater and B3 waste.

Limbah B3
B3 Waste

Dalam pengelolaan limbah B3, PLN NP senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan limbah B3. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional pembangkit disimpan sementara di fasilitas TPS LB3 yang telah memiliki izin atau telah tercakup dalam dokumen lingkungan, sesuai dengan batas waktu penyimpanan yang ditetapkan. Selanjutnya, limbah tersebut disalurkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin resmi sebagai

In the management of toxic and hazardous waste (B3), PLN NP always adheres to the applicable legal regulations, including the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 6 of 2021 on B3 management. Waste generated from power plant operational activities is temporarily stored in hazardous waste temporary storage facilities (TPS LB3) that have permits or are included in environmental documents, in accordance with the predetermined storage time limits. Next, the waste is channeled to third parties who have official

pengumpul, pemanfaat, atau pengolah limbah B3. Dalam proses pengangkutannya, PLN NP juga memastikan kerja sama dengan transporter yang telah mengantongi perizinan lengkap dari instansi berwenang, seperti KLHK dan Kementerian Perhubungan, guna menjamin pengelolaan limbah dilakukan secara aman, tertib, dan sesuai regulasi.

permits as collectors, users, or processors of B3 waste. In the transportation process, PLN NP also ensures cooperation with transporters who have obtained complete permits from the relevant authorities, such as KLHK and the Ministry of Transportation, to guarantee that waste management is run safely, orderly, and in accordance with regulations.

Metode Pengelolaan Limbah B3 PLN NP
B3 Waste Management Method of PLN NP

Identifikasi dan Klasifikasi Identification and Classification	Timbulan limbah diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Setiap jenis limbah B3 memiliki karakteristik dan sifat bahaya yang berbeda, sehingga penanganan dan pengelolaan yang tepat harus disesuaikan dengan jenis limbah tersebut. Waste generation is identified and classified based by type. Each type of hazardous waste has different characteristics and hazardous properties, so proper management must be tailored to the type of waste.
Pemisahan dan Penyimpanan Segregation and Storage	Limbah B3 harus dipisahkan dari limbah non-B3 dan disimpan secara terpisah dalam wadah yang sesuai. Wadah penyimpanan limbah B3 harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tumpahan dan kontaminasi lingkungan. Penyimpanan limbah B3 juga harus memperhatikan karakteristik dan sifat bahaya antara satu jenis limbah B3 dengan lainnya. Bangunan penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi peraturan pemerintah, sehingga mampu mengurangi risiko terhadap lingkungan. Hazardous waste must be separated from non-hazardous waste and stored separately in appropriate containers. Hazardous waste storage containers must be designed in such a way as to prevent spillage and contamination of the environment. The storage of B3 waste must also pay attention to the characteristics and hazardous nature of one type of B3 waste to another. The temporary storage building for hazardous waste must comply with government regulations to reduce the risk to the environment.
Transportasi yang Aman Safe Transportation	Limbah B3 harus diangkut dengan menggunakan kendaraan dan kontainer yang sesuai. Pengangkutan limbah B3 harus mematuhi peraturan dan standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, PLN NP bekerja sama dengan pengangkut/transportir yang berizin. B3 waste must be transported using appropriate vehicles and containers. B3 waste transportation must comply with regulations and safety standards set by the government. Based on this, PLN NP cooperates with licensed carriers/transporters.
Pemanfaatan/ Pengolahan oleh Pihak ketiga Utilization/Processing by third parties	Dalam rangka melakukan pengelolaan akhir limbah B3, PLN NP bekerja sama dengan pemanfaat/ pengolah akhir limbah B3 berizin In order to carry out the final B3 waste management, PLN NP cooperates with licensed B3 waste end-users/processors.
Reduksi Timbulan Limbah B3 Reduction of hazardous waste generation	Melakukan reduksi limbah B3 dengan pengoptimalan penyimpanan material dan mencari substitusi material yang lebih ramah lingkungan Reducing hazardous waste by optimizing material storage and finding substitutes for more environmentally friendly materials.

Volume dan Metode Pengelolaan Limbah B3 (Ton)
Volume and Method of B3 Waste Management (Tons)

Jenis Limbah B3 Type of B3 Waste	Metode Pengelolaan Limbah Waste Management Method	Metode Pengelolaan Limbah Waste Management Method	Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan Total B3 Waste Generated			Jumlah Limbah B3 yang Dialihkan dari Pembuangan (Dimanfaatkan) Total B3 Waste Diverted from Disposal (Utilized)			Jumlah Limbah B3 yang Disimpan dan Keluar Total B3 Waste Stored and Discharged		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Oli/ minyak/ pelumas bekas Used oil/ grease/ lubricant	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	Dimanfaatkan untuk substitusi bahan bakar, Dimanfaatkan untuk substitusi bahan baku Utilized for fuel substitution, Utilized for raw material substitution	387,61	334,91	307,17	0	0	0	35,73	346,11	305,71
Kemasan B3 B3 Packaging	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	Ditimbun, Dimanfaatkan untuk substitusi bahan bakar Stockpiled, Utilized for fuel substitution	11,67	9,41	7,08	0	0	0	10,95	9,71	7,06
Bahan kimia kadaluarsa Expired chemicals	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	Ditimbun Stockpiled	13,59	5,2	10,76	0	0	0	12,99	5,2	9,91
Majun & Sarung tangan terkontaminasi Contaminated mop & gloves	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	Dimanfaatkan untuk substitusi bahan bakar Utilized for fuel substitution	41,16	43,6	54,16	0	0	0	41,33	44,79	54,12
Limbah terkontaminasi B3 B3 contaminated waste	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	Ditimbun, Dimanfaatkan untuk substitusi bahan baku Stockpiled, Utilized for raw material substitution	37,17	44,63	108,84	0	0	0	35,13	42,28	108,84
Resin bekas Used resin	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	Ditimbun Stockpiled	10,56	21,34	12,89	0	0	0	9,00	50,02	12,56
Aki bekas Used batteries	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	Dimanfaatkan untuk substitusi bahan baku, Ditimbun Utilized for raw material substitution, Stockpiled	100,54	3,02	58,49	0	0	0	99,75	4,68	58,49
Filter bekas Used filters	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	Ditimbun Stockpiled	5,61	3,13	0,75	0	0	0	4,96	5,9	0,75

Jenis Limbah B3 Type of B3 Waste	Metode Pengelolaan Limbah Waste Management Method	Metode Pengelolaan Limbah Waste Management Method	Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan Total B3 Waste Generated			Jumlah Limbah B3 yang Dialihkan dari Pembuangan (Dimanfaatkan) Total B3 Waste Diverted from Disposal (Utilized)			Jumlah Limbah B3 yang Disimpan dan Keluar Total B3 Waste Stored and Discharged		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Refraktori Refractories	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	Dimanfaatkan untuk substitusi bahan bakar, Dimanfaatkan untuk substitusi bahan baku Utilized for fuel substitution, Utilized for raw material substitution	49,06	67,33	68,76	0	0	0	53,23	64,96	68,74
Limbah elektronik e-waste	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	Ditimbun, Dimanfaatkan untuk substitusi bahan baku Stockpiled, Utilized for raw material substitution	1,64	2,07	2,82	0	0	0	1,43	2,01	2,82
Limbah laboratorium/ klinik Laboratory/ clinic waste	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	Ditimbun Stockpiled	0,03	0,21	1,60	0	0	0	0,03	0,21	1,60
Sludge Ipal	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	Ditimbun Stockpiled	3,8	0,46	0,00	0	0	0	2,19	0,46	0,00
Jumlah Total			**662,44**	**535,31**	**633,32**	**0**	**0**	**0**	**306,72**	**576,33**	**630,60**

Catatan: Perhitungan inventarisasi volume limbah B3 mencakup 16 unit peserta proper *beyond compliance*

Note: The inventory calculation of B3 waste volume includes 16 participating units of proper beyond compliance

Limbah Non-B3
Non-B3 Waste

PLN NP berkomitmen untuk melakukan pengelolaan limbah non-B3 dengan memaksimalkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pendekatan ini tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mendukung upaya keberlanjutan yang ramah lingkungan dalam operasional perusahaan. PLN NP melakukan pemanfaatan limbah organik menjadi kompos ataupun briket, sedangkan sebagian limbah anorganik seperti kardus kemasan, botol minuman sekali pakai, plastik, dan limbah non-B3 lainnya dikelola di bank sampah binaan di sekitar lokasi pembangkit. Sisa limbah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, diserahkan ke TPA.

PLN NP is committed to managing non-B3 waste by maximizing the 3R principle (reduce, reuse, recycle) to reduce the amount of waste that ends up in landfills. This approach not only reduces negative impacts on the environment, but also supports environmentally friendly sustainability efforts in company operations. PLN NP utilizes organic waste into compost or briquettes, while some inorganic waste, such as cardboard boxes, disposable beverage bottles, plastics, and other non-B3 waste, is managed in waste banks around the power plant site. The remaining waste that cannot be reused is sent to landfill.

Selama tahun 2025, PLN NP menghasilkan limbah Non B3 sebanyak 695,55 ton, meningkat 39,12% dibandingkan tahun 2024 sebesar 499,97 ton. Dari total limbah non B3 yang dihasilkan, sebanyak 482,83 ton atau 63,61% berhasil dimanfaatkan kembali oleh Perusahaan melalui berbagai inisiatif.

During 2025, PLN NP generated 695.55 tons of non-B3 waste, an increase of 39.12% compared to 499.97 tons in 2024. Of the total non-B3 waste generated, 482.83 tons or 63.61% was successfully reused by the Company through various initiatives.

Selain itu, PLN NP juga berkomitmen untuk mengelola FABA (*Fly Ash Bottom Ash*), yang merupakan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) Terdaftar sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan Pemanfaatan FABA merupakan salah satu bentuk pengelolaan limbah Non B3 yang dilakukan oleh perusahaan penghasil limbah (PLTU). Pemanfaatan FABA yang dilakukan oleh PLTU merupakan kegiatan tambahan (beyond compliance) yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mengelola lingkungan yg lebih baik.

In addition, PLN NP is committed to managing FABA (Fly Ash Bottom Ash), which is a Registered Non-Hazardous and Toxic Waste (Non-B3) in accordance with Government Regulation (PP) 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. FABA Utilization activities are a form of non-B3 waste management carried out by waste-generating companies (CFPP). The utilization of FABA carried out by the CFPP is an additional activity (beyond compliance) carried out by the Company in managing a better environment.

Pada tahun 2025, total FABA yang dihasilkan oleh Perusahaan tercatat sebanyak 1.105.215,54 ton, mengalami peningkatan sebesar 5,97% dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 1.042.906,00 ton. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan unit pembangkit PLTU Batubara. Di sisi lain, jumlah FABA yang berhasil dimanfaatkan pada tahun 2025 mencapai 1.176.022,38 ton, atau 106,41% dari total FABA yang dihasilkan. Praktik pemanfaatan telah memiliki acuan yaitu Persetujuan Lingkungan unit PLTU yang telah terintegrasi dengan Dokumen Rincian Teknis (DRT) Pemanfaatan Limbah Non B3 Terdaftar. Pemanfaatan internal dilakukan di dalam area PLTU diantaranya yaitu untuk material pembuatan paving batako, breakwater, stabilisasi lahan, dan lain-lain. Sedangkan pemanfaatan eksternal dilakukan kerjasama dengan pihak eksternal diantaranya instansi pemerintah, kelompok masyarakat, serta industri semen dan batching plant yang telah memiliki perizinan lingkungan

In 2025, the total FABA generated by the Company was recorded at 1,105,215.54 tons, an increase of 5.97% compared to 2024, which was 1,042,906.00 tons. This increase was mainly due to the addition of a Coal CFPP unit. On the other hand, the amount of FABA successfully utilized in 2025 reached 1,176,022.38 tons, or 106.41% of the total FABA produced. Utilization practices have a reference, namely the Environmental Approval of the CFPP unit, which is integrated with the Technical Detail Document (DRT) for the Utilization of Registered Non-B3 Waste. Internal utilization is performed within the CFPP area, including for materials used in making paving blocks, breakwaters, land stabilization, and others. Meanwhile, external utilization is conducted in collaboration with external parties, including government agencies, community groups, and cement and batching plant industries that have environmental permits.

Berikut adalah berbagai macam inovasi yang dilakukan Perusahaan dalam pengelolaan limbah baik B3 maupun non-B3:

The following are various kinds of innovations made by the Company in the management of both B3 and non-B3 waste:

Unit Pembangkit Power Plant Unit	Inovasi Innovation	
Limbah B3 B3 Waste		
UP Tanjung Awar - Awar Tanjung Awar - Awar GU	*Zero Outdated Chemical Stock*	Zero Outdated Chemical Stock
UP Indramayu Indramayu GU	Pengurangan Limbah Filter *Oil Boiler Feedwater Pump System*	Reduction of Waste from the Boiler Feedwater Pump System Oil Filter
UP Muara Karang Muara Karang GU	Perubahan Metode *Pre-Assembly Accessory* Gear Menggunakan *Special Tool* untuk Menurunkan Potensi *Oil Leakage* dan Pemakaian Limbah Terkontaminasi B3	Modification of the Pre-Assembly Method for Accessory Gears Using a Special Tool to Reduce the Risk of Oil Leaks and the Use of B3 Contaminated Waste
UP Rembang Rembang GU	TOSCAT (*Turbine oil Shortcut*) - Spesial *tool* untuk perbaikan kualitas *lube oil* mengurangi timbulan limbah B3 Pelumas	TOSCAT (Turbine Oil Shortcut) - A specialized tool for improving lubricant quality and reducing B3 waste from lubricants
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	SHOOT (*Stabilized Heating & Oil Optimization for Transformer*)	SHOOT (Stabilized Heating & Oil Optimization for Transformer)
UP Gresik Gresik GU	*Duplicative Chemical Sieve pada Desalination Plant*	Duplicative Chemical Sieve in the Desalination Plant
UP Paiton Paiton GU	Rekonfigurasi *Mesh Filter* (20 Mikron) untuk Menghindari *Engine Blocking*	Reconfiguring the Mesh Filter (20 Microns) to Prevent Engine Clogging
PLTU Belitung Belitung CFPP	*Upgrade Oil Purifier Unhydrated*	Upgrade Oil Purifier Unhydrated
UP Tenayan Tenayan GU	*Regeneration and Refining of Used Transformer* Oil menggunakan alat Tecno Fluida DS-M-80	Regeneration and Refining of Used Transformer Oil Using the Tecno Fluida DS-M-80 tool
PLTU Bangka Bangka CFPP	PELITA RETRO (Pengurangan Timbulan Limbah Oli Bekas Trafo Melalui *Retreatment Transformator Oil*)	PELITA RETRO (Reducing Waste from Used Transformer Oil Through Transformer Oil Retreatment)
UP Pacitan Pacitan GU	ALUCING (*Automatic Lubricant for Reducing* Majun)	ALUCING (Automatic Lubricant for Reducing Leftover Fabric)
UP Punagaya Punagaya GU	*Upgrade Material Elbow* GV Dari AISI 102 Menjadi ASTM 335 P22	Upgrade the Material of the GV Elbow from AISI 102 to ASTM 335 P22
UP Cirata Cirata GU	Instalasi *Fluoroelastomer Confinement Sleeve* pada unit Servo *Inlet Valve* untuk Mencegah Ceceran Oli	Installation of a Fluoroelastomer Confinement Sleeve on the Servo Inlet Valve unit to Prevent Oil Leaks
PLTGU Belawan Belawan CCPP	Penggunaan *Oil Purifier*	Oil Purifier Usage
PLTA Besai Besai HPP	*Smart Repainting* : Penjadwalan Peremajaan Pengecatan Unit	Smart Repainting: Scheduling Unit Repainting
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU	*Integrated Gland Seal Pressure Control System* untuk Stabilisasi *Lube Oil System* pada Unit Turbin	Integrated Gland Seal Pressure Control System for Stabilizing the Lube Oil System in a Turbine Unit
Limbah Non-B3 Terdaftar Registered Non-B3 Waste		
UP Paiton Paiton GU	Larutan Garam sebagai Aktivasi Ionik Peningkatan Kekuatan Tekan Balok dalam Pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)	Salt Solutions as Ionic Activators to Enhance the Compressive Strength of Beams in the Use of Fly Ash and Bottom Ash (FABA)
PLTU Belitung Belitung CFPP	Pemanfaatan FABA sebagai Pembenah Tanah (Amelioran) untuk Budidaya Tanaman Hortikultura	The Use of FABA as a Soil Conditioner (Amelioran) for Horticultural Crop Cultivation
PLTU Bangka Bangka CFPP	FABA sebagai METEOR CUMI (Media Terumbu Karang dan Atraktor Cumi)	FABA as METEOR CUMI (Coral Reef Media and Squid Attractor)
UP Punagaya Punagaya GU	FASTER (FABA *for Soil Treatment and Environmental Restoration*)	FASTER (FABA for Soil Treatment and Environmental Restoration)
UP Rembang Rembang GU	BUIS FABA (Buis Beton dari FABA sebagai Pembangunan dan Penguatan Tanggul Laut)	BUIS FABA (Concrete Pipes from FABA for Sea Wall Construction and Reinforcement)

Unit Pembangkit Power Plant Unit	Inovasi Innovation	
UP Indramayu Indramayu GU	OPERA FABA (Optimasi Pembakaran *Boiler* untuk Mereduksi TImbulan FABA)	OPERA FABA (Boiler Combustion Optimization to Reduce FABA Generations)
UP Pacitan Pacitan GU	FAST-B (*Fly Ash and Bottom Ash for Breakwater*)	FAST-B (Fly Ash and Bottom Ash for Breakwater)
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU	Penerapan Teknologi *Supplementary* Mineral *Admixture* Untuk Mendukung Konsep *Sustainable Smart City* di IKN	The Application of Supplementary Mineral Admixture Technology to Support the Concept of a Sustainable Smart City in the IKN
UP Tenayan Tenayan GU	BATARA (Bumi Asri Tanah Raya)	BATARA (Bumi Asri Tanah Raya)
Limbah Non B3 Non-B3 Waste		
UP Indramayu Indramayu GU	LENTERA (Logam Bekas Energi Terbarukan Ramah Lingkungan)	LENTERA (Used Metal for Environmentally Friendly Renewable Energy)
UP Tanjung Awar - awar Tanjung Awar – awar GU	Program Optimalisasi Penggunaan Logam Bekas sebagai Material Daur Ulang untuk Fasilitas Rehabilitasi Primata	Program to Optimize the Use of Scrap Metal as Recycled Material for Primate Rehabilitation Facilities
UP Muara Karang Muara Karang GU	*Recycle* Sampah Kayu Berbasis Pentahelix untuk Pengembangan Kit TB Paru dan Bilik Skrining	Recycle Sampah Kayu Berbasis Pentahelix untuk Pengembangan Kit TB Paru dan Bilik Skrining
UP Rembang Rembang GU	MORISET (*Motorized Fire Hose Repair Tool Kit*)	MORISET (Motorized Fire Hose Repair Tool Kit)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	SIFORA (Sinergi Filter Udara Olahan Ramah Lingkungan)	SIFORA (Synergy of Environmentally Friendly Processed Air Filters)
UP Gresik Gresik GU	*Innovative Cladding Approach* untuk Meningkatkan *Reliability Tube* HRSG	An Innovative Cladding Approach to Improve the Reliability of HRSG Tubes
UP Paiton Paiton GU	Voer Organik Tinggi Kalsium Berbahan Biogenik Laut untuk Kedai Pancing Desa Pandean	High-Calcium Organic Fish Feed Made from Marine Biogenic Ingredients for the Pandean Village Fishing Shop
PLTU Belitung Belitung CFPP	MEKANIK (Membran Bekas untuk Kaki Gazebo dan Meja Inovasi Kreatif)	MEKANIK (Recycled Membrane for Gazebo Legs and Creative Innovation Tables)
UP Tenayan Tenayan GU	BERSINAR (Besi Daur Ulang Jadi Sel Surya Inovatif untuk Energi Terbarukan)	BERSINAR (Recycled Iron Turned into Innovative Solar Cells for Renewable Energy)
PLTU Punagaya Punagaya CFPP	GOFOOD LE (*GO FOOD Less food wastE*)	GOFOOD LE (GO FOOD Less food wastE)
UP Pacitan Pacitan GU	Pemanfaatan Sampah Sisa Makanan, Duan dan Rumput Menjadi Pupuk Organik FORTAN (*Fertilizer Organic from Pacitan*)	Turning Food Waste, Rice Bran, and Grass into FORTAN (Fertilizer Organic from Pacitan) Organic Fertilizer
PLTU Bangka Bangka CFPP	Botol Plastik dan Sampah Jadi *Paving Block* (BOBA BLOCK)	Plastic Bottles and Trash Turned into Paving Blocks (BOBA BLOCK)
UP Cirata Cirata GU	Aduksi Ekstrak Belimbing sebagai Agen Valorisasi Lignoselulosa dalam Fabrikasi *Bioenhancer* Sampah Organik	The Addition of Starfruit Extract as a Lignocellulose Valorization Agent in the Production of Organic Waste Bioenhancers
PLTGU Belawan PLTGU Belawan	Transformasi Limbah Anorganik Menjadi *Paving Block* Ramah Lingkungan	Transforming Inorganic Waste into Eco-Friendly Paving Blocks
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU	Penerapan *ameliorated composting* berbasis tertitip pada limbah organik menjadi pupuk *organomineral*	The application of closed-system ameliorated composting on organic waste to produce organomineral fertilizer

Pemantauan Kualitas Lingkungan
Environmental Quality Monitoring

PLN NP terus memperkuat komitmennya dalam meminimalkan dampak lingkungan dengan mengintensifkan upaya pengurangan emisi di seluruh unit pembangkit yang dikelola. Inisiatif ini menjadi bagian penting dari strategi perusahaan dalam menjaga kualitas udara sekaligus mendukung pencapaian target keberlanjutan yang lebih luas. Melalui penerapan sistem pengelolaan emisi yang terukur dan berkelanjutan, PLN NP berupaya menekan tingkat pencemaran udara serta meningkatkan kinerja lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, langkah ini juga mencerminkan kontribusi aktif perusahaan dalam mendukung target nasional penurunan emisi gas rumah kaca dan upaya global dalam menghadapi perubahan iklim, sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya poin 13 terkait aksi terhadap perubahan iklim.

PLN NP continues to strengthen its commitment to minimizing environmental impact by intensifying emission reduction efforts across all managed power generation units. This initiative is a crucial part of the Company's strategy to maintain air quality while supporting the achievement of broader sustainability targets. Through the implementation of a measurable and sustainable emission management system, PLN NP aims to reduce air pollution levels and improve overall environmental performance. In addition, this step also reflects the Company's active contribution in supporting national targets for reducing greenhouse gas emissions and global efforts in addressing climate change, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly point 13 related to climate action.

Dengan langkah-langkah ini, PLN NP menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memelihara kualitas udara dan mengurangi dampak emisi yang ditimbulkan oleh operasional pembangkit listrik, sekaligus berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

With these measures, PLN NP demonstrates an ongoing commitment to maintaining air quality and reducing the impact of emissions caused by power plant operations while contributing to global efforts to address climate change.

Inventarisasi Emisi Gas Buang
Exhaust Gas Emission Inventory

PLN NP secara konsisten melaksanakan pemantauan emisi gas buang dari kegiatan operasional sebagai dasar dalam menentukan langkah pengelolaan dampak lingkungan, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2019 tentang baku mutu emisi pembangkitan. Proses pengukuran dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap konsentrasi emisi dalam satuan mg/m³, yang kemudian dianalisis untuk memperoleh nilai rata-rata dalam periode tertentu. Selain metode tersebut, perusahaan juga memanfaatkan sistem *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) sebagai pendekatan tambahan untuk memperoleh data emisi secara kontinu dan lebih komprehensif. Dengan

PLN NP consistently conducts monitoring of exhaust gas emissions from operational activities as a basis for determining steps to manage environmental impacts. It refers to the provisions of Regulation of the Minister of Environment Number 15 of 2019 concerning emission quality standards for power generators. The measurement process is carried out through periodic monitoring of emission concentrations in mg/m³, which are then analyzed to obtain average values over a specific period. In addition to this method, the Company utilizes the Continuous Emission Monitoring System (CEMS) as an additional approach to obtain emission data continuously and more comprehensively. With the implementation of this systematic measurement

penerapan metode pengukuran yang sistematis ini, PLN NP dapat memastikan pengendalian emisi dilakukan secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada tahun 2025, total emisi gas buang yang dihasilkan PLN NP tercatat sebesar 225.662.404 kg/tahun, berhasil meningkat sebesar 25,10% dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 180.383.730 kg/tahun. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya perbedaan kualitas bahan bakar sehingga mempengaruhi emisi non GRK yang dihasilkan, namun terdapat penurunan beban emisi CO dikarenakan pembakaran lebih sempurna.

method, PLN NP can ensure that emission control is carried out effectively and in accordance with the established standards. In 2025, the total exhaust emissions produced by PLN NP were recorded at 225,662,404 kg/year, achieving an increase of 25.10% compared to 2024, which was 180,383,730 kg/year. This increase is primarily due to differences in fuel quality, which affects the non-GHG emissions produced, but there is a reduction in CO emission load due to more complete combustion.

Emisi Gas Buang
Exhaust Gas Emissions

Parameter	Beban Emisi (kg/tahun) Emissions Load (kg/year)		
	2025	2024	2023
Nitrogen Oksida (NO_x) Nitrogen Oxides (NO_x)	135.784.704	96.614.920	133.693.900
Partikulat (PM) Particulate (PM)	16.417.085	11.723.450	12.684.610
Sulfur Dioksida (SO_2) Sulfur Dioxide (SO_2)	62.695.189	58.354.190	61.561.820
Karbon Monoksida (CO) Carbon Monoxide (CO)	10.763.951	13.690.080	37.744.520
Merkuri (Hg) Mercury (Hg)	1.476	1.090	1.190
Jumlah Total	**225.662.404**	**180.383.730**	**245.686.040**

- Metode pengukuran emisi gas buang adalah dengan mengukur kualitas emisi (mg/m³) secara rutin kemudian mengambil nilai rata-ratanya dalam suatu periode, dan metode pengukuran kedua (opsional) menggunakan akumulasi data CEMS
- Sumber faktor emisi yang digunakan berasal dari emisi yang dihasilkan dari pembakaran di dalam *boiler* (PLTU), gas turbin (PLTG dan PLTGU) serta silinder mesin diesel (PLTD)
- Perhitungan emisi non GRK mencakup 143 unit dari 143 unit (100 %)

- The method for measuring exhaust gas emissions involves routinely measuring emission levels (mg/m³) and then calculating the average value within a period, and the second (optional) measurement method uses CEMS data accumulation.
- The emission factors used are derived from emissions generated by combustion in boilers (CFPP), gas turbines (GTPP and CCPP), and diesel engine cylinders (DPP)
- The calculation of non-GHG emissions covers 143 out of 143 units (100%)

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
Greenhouse Gas Emission Inventory

Sebagai wujud penerapan prinsip bisnis berkelanjutan, PLN NP secara berkelanjutan mengelola emisi yang timbul dari operasional pembangkit berbasis bahan bakar fosil melalui pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilakukan secara rutin dan terukur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi besaran emisi yang dihasilkan serta menghitung intensitas emisi sebagai indikator kinerja lingkungan perusahaan. Hasil inventarisasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses evaluasi dan perumusan strategi pengurangan emisi yang lebih efektif. Melalui langkah ini, PLN NP turut memperkuat komitmennya dalam mendukung pencapaian target jangka panjang menuju *Net Zero Emission*.

As a manifestation of sustainable business principles, PLN NP continuously manages emissions arising from fossil fuel-based power plant operations through the routine and measurable execution of greenhouse gas (GHG) emission inventories. This activity aims to identify the amount of emissions produced and calculate the emission intensity as an indicator of the Company's environmental performance. The results of the inventory then serve as the basis for the evaluation process and the formulation of more effective emission reduction strategies. Following this step, PLN NP also strengthens its commitment to supporting the achievement of long-term targets toward Net Zero Emissions.

Perhitungan baseline emisi GRK PLN NP menggunakan tahun dasar 2020, selaras dengan kebijakan dari komitmen *Net Zero Emission* yang ditetapkan oleh PLN *Holding*. Penetapan ini mempertimbangkan dua target utama, yaitu target jangka menengah dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia pada tahun 2030, serta target jangka panjang menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Untuk sumber faktor emisi GRK yang digunakan adalah Publikasi Intensitas Emisi *Grid* Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) serta Panduan IPCC 2006 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*).

PLN NP's GHG emission baseline calculation uses the 2020 base year, in line with the policy of the Net Zero Emission commitment set by PLN Holding. This determination considers two main targets, namely the medium-term target in Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC) document by 2030, as well as the long-term target towards Net Zero Emission by 2060. The source of GHG emission factors used is the 2018 Grid Emission Intensity Publication published by the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) and the 2006 IPCC Guidelines (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Dalam menghimpun dan mengonsolidasi data emisi GRK, PLN NP mengacu pada pedoman dan arahan dari Holding PLN yang ditetapkan dalam petunjuk teknis inventarisasi emisi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kendali operasional, di mana PLN NP hanya menghitung emisi dari aset yang secara operasional berada di bawah kendali Perusahaan, yakni seluruh aset yang dikelola dan dimiliki PLN NP, aset yang memiliki kontrak Aset Manajemen (AMC) dan aset yang dioperasikan oleh anak perusahaan PT PLN NP Services. Sementara itu, untuk aset dengan porsi kendali finansialnya melebihi 51% saham namun dikelola oleh swasta, tidak termasuk dalam konsolidasi perhitungan emisi GRK PLN NP, melainkan berada pada konsolidasi data Independent Power Producer (IPP) ke Persero. Kebijakan konsolidasi ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan pembaruan petunjuk inventarisasi dari Holding PLN. Ke depan, proses inventarisasi akan diarahkan untuk dilakukan secara digital melalui aplikasi *Climate Click*, sebagai bagian dari integrasi sistem pelaporan lingkungan yang efisien dan terstandar di seluruh entitas dalam *Holding* PLN.

In collecting and consolidating GHG emission data, PLN NP refers to PLN Holding's guidelines and directions outlined in the technical guidelines for emissions inventory. The approach used is the operational control approach, where PLN NP only calculates emissions from assets that are operationally under the Company's control, namely all assets managed and owned by PLN NP, assets with Asset Management Contracts (AMC) and assets operated by its subsidiary PT PLN NP Services. Meanwhile, for assets with a portion of financial control exceeding 51% of shares but managed by the private sector are not included in the consolidation of PLN NP GHG emission calculations, but are in the consolidation of Independent Power Producer (IPP) data to the Persero. This consolidation policy is dynamic and subject to change in accordance with updates to the inventory guidance from Holding PLN. In the future, the inventory process will be directed to be carried out digitally through the Climate Click application as part of the integration of an efficient and standardized environmental reporting system across all entities in Holding PLN.

Perusahaan juga melakukan pengelolaan terhadap emisi bahan perusak ozon (BPO) yang menjadi salah faktor tingkat radiasi matahari ke Bumi. BPO akan menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon yang mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. PLN NP telah menerapkan kebijakan dan peraturan yang sejalan dengan protokol internasional dan nasional untuk melindungi lapisan ozon, termasuk kepatuhan terhadap Protokol Montreal, yang merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengurangi dan menghapuskan produksi dan konsumsi bahan-bahan perusak ozon. PLN NP juga mematuhi peraturan terkait pengelolaan bahan perusak ozon yang ditetapkan oleh

The Company also manages ozone-depleting substances (BPO) emissions, which are a factor in the level of solar radiation to the Earth. BPOs will cause depletion of the ozone layer, resulting in environmental degradation. PLN NP has implemented policies and regulations in line with international and national protocols to protect the ozone layer, including compliance with the Montreal Protocol, which is an international agreement that aims to reduce and eliminate the production and consumption of ozone-depleting substances. PLN NP also complies with regulations related to the management of ozone-depleting substances set by the Ministry of Environment

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebagai langkah nyata, PLN NP telah melakukan beberapa inisiatif antara lain dengan mengganti refrigerant jenis R22 yang digunakan pada AC dan lemari es dengan R32, yang lebih ramah lingkungan dan memiliki dampak lebih rendah terhadap lapisan ozon. Selain itu, PLN NP juga menggantikan lampu TL (tabung lampu fluoresen) dengan lampu LED (Light Emitting Diode) yang lebih efisien dan bebas dari bahan berbahaya. Dengan demikian, Perusahaan ikut andil dalam upaya untuk mencegah penipisan/terjadinya lubang lapisan ozon di atmosfer.

and Forestry (KLHK). As a concrete step, PLN NP conducted several initiatives, including replacing R22 refrigerant used in air conditioners and refrigerators with R32, which is more eco-friendly and has a lower impact on the ozone layer. In addition, PLN NP also replaced TL (fluorescent light tube) lamps with LED (Light Emitting Diode) lamps, which are more efficient and free from hazardous materials. Thus, the Company is contributing to efforts to prevent the depletion of the ozone layer in the atmosphere.

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca *Scope* 1 (Ton CO_2eq)
Scope 1 Greenhouse Gas Emissions Inventory (Ton CO_2eq)

Scope	*Category*	2025	2024	2023
Scope 1	Karbon dioksida (CO_2) Carbon dioxide (CO_2)	51.469.961,68	52.552.999,98	49.555.462,39
	Metana (CH_4) Methane (CH_4)	886,43	905,56	787,56
	Nitrogen dioksida (N_2O) Nitrogen dioxide (N_2O)	584,13	596,29	648,24
	Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO_2eq) Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO_2eq)	**51.471.432,24**	**52.554.501,83**	**49.556.898,19**
Total Produksi (MWh)* TTotal Production (MWh)*		62.512.386,66	63.415.178,97	63.178.604,00
	Intensitas Emisi (Ton CO_2eq/MWh) Emission Intensity (Ton CO_2eq/MWh)	**0,82**	**0,83**	**0,78**
Scope 1 *Mobile combustion***	Karbon dioksida (CO_2) Carbon dioxide (CO_2)	11.740,43	13.478.316,00	2.956.153,86
Scope 1 SF6 *Leakage****	SF6 (Ton)	5.318,52	3620,00	0,7

Catatan:
- Pengukuran intensitas emisi dilakukan dengan cara membagi total emisi GRK yang dihasilkan dengan total produksi
- Perhitungan emisi GRK *scope* 1 mencakup seluruh 143 unit (100%)

* Total produksi menggunakan total produksi *netto* untuk unit yang melakukan perhitungan emisi scope 1.

** Kendaraan operasional adalah yang beroperasi di area kerja, baik kendaraan berat, angkutan, patroli ataupun emergency. Dihitung menggunakan jumlah kiloliter bahan bakar yang dikonsumsi setahun.

*** Gas Sulfur Heksafluorida (SF6) dihitung dari logsheet neraca massa tabung gas *top-up*.

Notes:
- Emission intensity is measured by dividing the total GHG emissions produced by total production.
- Scope 1 GHG emission calculation covers all 143 units (100%).

* Total production uses the net total production for the unit conducting the scope 1 emissions calculation.

** Operational vehicles are those that operate in the work area, whether heavy vehicles, transportation, patrol or emergency. Calculated using the number of kiloliters of fuel consumed per year.

***Sulfur hexafluoride (SF6) gas is calculated from the mass balance logsheet for the top-up gas cylinder.

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Scope 2 (Ton CO_2eq)
Scope 2 Greenhouse Gas Emissions Inventory (Ton CO_2eq)

Scope	*Category*	2025	2024	2023
Scope 2	*Purchased Electricity* (MWH)	30.717,87	35.300,96	2.771,67
Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO_2eq) Greenhouse Gas Emissions (Tons CO_2eq)		**26.368,87**	**28.240,76**	**2.217,34**

Catatan:
- Perhitungan menggunakan faktor emisi GRK sistem ketenagalistikan yang diterbitkan oleh DJK 2019, menggunakan nilai BM yang berlaku pada masing-masing *grid* nasional dan metode perhitungan berasal dari IPCC 2006
- Perhitungan emisi GRK *scope* 2 mencakup 115 unit dari 143 unit (80,41%)
- Perhitungan emisi GRK memiliki perubahan metode perhitungan dan perubahan jumlah unit yang dihitung

Notes:
- The calculation uses the GHG emission factor of the electricity system published by DGCE 2019, using the BM value applicable to each national grid and the calculation method derived from IPCC 2006
- Scope 2 GHG emission calculation covers 115 units out of 143 units (80.41%)
- The calculation of GHG emissions has a change in the calculation method and a change in the number of units calculated

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca *Scope* 3 (Ton CO_2eq)
Scope 3 Greenhouse Gas Emissions Inventory (Ton CO_2eq)

Scope	*Category*	2025	2024	2023
Scope 3	*Upstream Transportation* (Kilo Liter HSD dan and Bio Solar)*	79.203,15	91.443,26	112.537,78
	Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO_2eq) Greenhouse Gas Emissions (Tons CO_2eq)	**212.263,07**	**247.458,36**	**301.601,26**

Catatan:
- Perhitungan emisi GRK *scope* 3 menggunakan perhitungan IPCC 2006
- Perhitungan emisi GRK *scope* 3 mencakup 78 unit dari 143 unit (54,54%)
- Upstream emission berasal dari jumlah jejak karbon dari emisi selama transportasi energi primer dari produsen hingga tiba di pembangkit, sebagian besar berupa angkutan laut tongkang dan juga tangki truk bahan bakar

Notes:
- Calculation of scope 3 GHG emissions using IPCC 2006
- Scope 3 GHG emission calculation covers 78 units out of 143 units (54.54%)
- Upstream emissions are derived from the sum of the carbon footprint of emissions during the transportation of primary energy from the producer to the plant, mostly in the form of sea freight barges and fuel tank trucks.

Pengelolaan Penggunaan dan Konservasi Air
Water Use Management and Conservation

PLN NP memiliki komitmen yang kuat dalam penggunaan air secara bijak dengan mengedepankan prinsip konservasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Mengingat air merupakan komponen penting dalam operasional pembangkit listrik, terutama untuk proses pendinginan, pengolahan, dan produksi energi, PLN NP berupaya mengelola penggunaannya secara efisien dan bertanggung jawab. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan serta kualitas sumber air tetap terjaga, sekaligus meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem di sekitar wilayah operasional. Dengan demikian, pengelolaan air yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan operasional perusahaan.

Dalam prosesnya, PLN NP menetapkan tujuan dan target yang berkaitan dengan air sebagai bagian dari pendekatan pengelolaan air dan air limbah. Tujuan utama dalam mengelola air dan air limbah adalah untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan efisiensi dari penggunaan air dan air limbah dalam operasional pembangkitan. Untuk mencapai tujuan ini, PLN NP menetapkan beberapa target kinerja yang berkaitan dengan air, seperti:

1. Efisiensi penggunaan air pada proses operasional dan domestik;
2. Melakukan perawatan secara periodik pada fasilitas pengelolaan air dan air limbah; serta
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan air limbah.

PLN NP has a strong commitment to the wise consumption of water by prioritizing conservation principles to maintain the sustainability of water resources. Considering that water is a crucial component in power plant operations, especially for cooling, processing, and energy production processes, PLN NP strives to manage its use efficiently and responsibly. These efforts are undertaken to ensure the availability and quality of water sources are maintained, while also minimizing possible adverse effects on the environment and ecosystems around the operational areas. Thus, sustainable water management becomes an important part of supporting the continuity of the company's operations.

In the process, PLN NP sets water-related objectives and targets as part of its water and wastewater management approach. The main objective in managing water and wastewater is to reduce negative impacts and increase the efficiency of water and wastewater use in generation operations. To achieve this goal, PLN NP sets several water-related performance targets, such as:

1. Water use efficiency in operational and domestic processes;
2. Periodically maintain water and wastewater management facilities; and
3. Increasing community participation in water and wastewater management.

Volume Penggunaan Air Berdasarkan Sumber (megaliter)
Volume of Water Use by Source (megaliters)

Sumber Air Water Source	Volume Penggunaan Air di Semua Wilayah (megaliter) Water Withdrawal Volume in All Areas (megaliters)			Volume Penggunaan Air di Semua Wilayah yang Mengalami Langka Air/*Water-Stressed Area* (megaliter) Water Withdrawal Volume in All Water-Stressed Areas (megaliters)		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Air Laut Sea Water	**8.032.446,00**	**6.495.338,70**	**12.753.317,00**			
Freshwater (≤1000 mg/L TDS)	-	-	-	-	-	-
Other Water (>1000 mg/L TDS)	**8.032.446,00**	6.495.338,70	12.753.317,00	-	-	-
Air Sungai River Water	**9.706.589,90**	**7.133.387,20**	**4.516.804,00**	**9.701.631,00**	**7.128.356,30**	**4.513.258,82**
Freshwater (≤1000 mg/L TDS)	**9.706.589,90**	7.133.387,20	4.516.804,00	**9.701.631,00**	7.128.356,30	4.513.258,82
Other Water (>1000 mg/L TDS)		-	-			
Air Tanah Groundwater	**1.631,57**	**1.715,87**	**1.654,41**	**1.631,57**	**1.715,87**	**1.654,41**
Freshwater (≤1000 mg/L TDS)	**1.631,57**	1.715,87	1.654,41	**1.631,57**	1.715,87	1.654,41
Other Water (>1000 mg/L TDS)		-	-	-	-	-
Air PDAM PDAM Water	**0,00**	**0,00**	**13,77**	-	-	**13,77**
Freshwater (≤1000 mg/L TDS)		-	13,77	-	-	13,77
Other Water (>1000 mg/L TDS)		-	-	-	-	-
Total	**17.740.667,47**	**13.630.441,77**	**17.271.789,18**	**9.703.262,57**	**7.130.072,17**	**4.514.913,23**

Catatan:
- TDS = *Total Dissolved Solids* atau Total Padatan Terlarut
- Perhitungan inventarisasi pengambilan/penarikan air mencakup 16 unit peserta proper *beyond compliance*
- Data pengambilan/penarikan air mencakup seluruh air yang diambil dari badan air

Note:
- TDS = Total Dissolved Solids or Total Dissolved Solids
- The water withdrawal inventory calculation covers 16 units participating in proper beyond-compliance
- Water withdrawal data covers all water taken from water bodies

Sumber Air Water Source	Volume Penggunaan Air di Semua Wilayah (megaliter) Water Usage Volume in All Areas (megaliters)			Volume Penggunaan Air di Semua Wilayah yang Mengalami Langka Air/*Water-Stressed Area* (megaliter) Water Usage Volume in All Water-Stressed Areas (megaliters)		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Air Laut Sea Water	**2.956,60**	2.397,30	2.906,60	-	-	-
Air Sungai River Water	**168,84**	163,46	176,94	**4,67**	0,96	-
Air Tanah Groundwater	**1.610,80**	1.694,05	1.654,41	**1.610,80**	1.694,05	1.654,41
Air PDAM PDAM Water	**0**	0	13,77	-	-	13,77
Total	**4.736,24**	**4.254,80**	**4.751,72**	**1.615,47**	**1.695,01**	**1.668,18**

Catatan:
- Metode pengukuran menggunakan flowmeter debit yang di pasang di titik-titik tertentu
- Data penggunaan air mencakup seluruh air yang digunakan untuk keperluan operasional pembangkit dan domestik, tidak termasuk air *reject* dari *reverse osmosis/water treatment plant* dan air bahang
- Perhitungan Inventarisasi Penggunaan Air mencakup 16 unit peserta proper *beyond compliance*.

Note:
- The measurement method uses a debit flowmeter installed at certain points
- Water usage data includes all water used for operational and domestic purposes at power plants, excluding rejected water from reverse osmosis/water treatment plants and hot water
- Water Usage Inventory calculations include 16 units participating in proper beyond compliance

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya air, sepanjang tahun 2025 PLN NP telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif efisiensi dan konservasi air melalui program-program sebagai berikut:

To improve the efficient use of water resources, throughout 2025, PLN NP implemented a number of water efficiency and conservation initiatives through the following programs:

Program Efisiensi/Konservasi Air PLN NP
PLN NP Water Efficiency/Conservation Program

***Via Hydrobot* (Optimasi Operasi PLTA secara *Realtime*)** Via Hydrobot (Optimasi Operasi PLTA secara Realtime)	**HERO (Hemat Air *Cleaning* Ro)** HERO (Hemat Air Cleaning Ro)	**Penerapan *Glycol Mixture* sebagai Media Termal Adaptif dalam Unit *Climatization Control*** Penerapan Glycol Mixture sebagai Media Termal Adaptif dalam Unit Climatization Control	**SAMSONITE (*Sealing* Pompa Kondensor Dengan Sistem Tertutup)** SAMSONITE (Sealing Pompa Kondensor Dengan Sistem Tertutup)
Penyesuaian Strategi Injeksi PO_4 pada Drum Boiler Unit Penyesuaian Strategi Injeksi PO_4 pada Drum Boiler Unit	**Injeksi *Chlorine* Pada *Settling Basin* Untuk Memperpanjang Interval CIP UF** Injeksi Chlorine Pada Settling Basin Untuk Memperpanjang Interval CIP UF	**Implementasi HRSG Leaksense: Sistem Deteksi dan Prediksi Risiko Kebocoran Pipa HRSG** Implementasi HRSG Leaksense: Sistem Deteksi dan Prediksi Risiko Kebocoran Pipa HRSG	**IPPAD-CS (Inovasi Penghematan Pemakaian *Air Demin Cold Start Up*)** IPPAD-CS (Inovasi Penghematan Pemakaian Air Demin Cold Start Up)
PEGASUS (Penggantian *Spiral Tube Sampling*) modifikasi fasilitas drain *water-steam sample precooling* PEGASUS (Penggantian Spiral Tube Sampling) modifikasi fasilitas drain water-steam sample precooling	**Penggunaan Teknologi *Adaptive Slag Removal Control System* (ASRCS) di *Unit Boiler* (CFB)** Penggunaan Teknologi Adaptive Slag Removal Control System (ASRCS) di Unit Boiler (CFB)	**Modifikasi Penambahan Dosing Regeneration Pump di Two Bed dan Mix Bed** Modifikasi Penambahan Dosing Regeneration Pump di Two Bed dan Mix Bed	***Oil Clean Saver with Solvent Rinse Method***
Upgrade Segment Cooling Tower* Untuk Meningkatkan Sistem *Vacuum Pump Upgrade Segment Cooling Tower Untuk Meningkatkan Sistem Vacuum Pump	***Reuse Drain Water Tank* (RENDANK) pada *Deaerator* dan *Pre-Heater*** Reuse Drain Water Tank (RENDANK) pada Deaerator dan Pre-Heater	***CLEAR : Chute Layout Enchancement to Avoid Loading Retention***	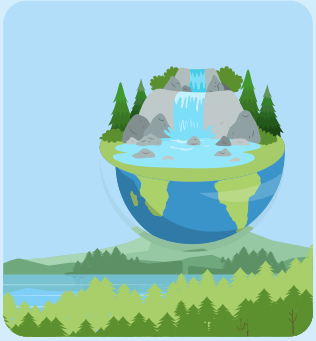

Keanekaragaman Hayati
Biodiversity

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. PLN NP memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas operasional tidak memberikan dampak negatif terhadap flora dan fauna di sekitar wilayah kerja. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan melalui perlindungan habitat alami, rehabilitasi area yang terdampak, serta penanaman kembali vegetasi di kawasan tertentu. Selain itu, pemantauan secara berkala terhadap kondisi ekosistem juga diperlukan untuk memastikan keberlangsungan spesies lokal tetap terjaga.

Biodiversity is one of the essential aspects in efforts to maintain ecosystem balance and environmental sustainability. PLN NP has the responsibility to ensure that operational activities do not harm the flora and fauna in the surrounding work area. Efforts to preserve biodiversity can be carried out through the protection of natural habitats, rehabilitation of affected areas, and replanting vegetation in certain regions. In addition, regular monitoring of ecosystem conditions is also necessary to ensure the sustainability of local species.

Dalam beberapa tahun terakhir, PLN NP konsisten menanam pohon di seluruh unit pembangkitan sebagai salah satu program *Green and Clean Power Plant*. Program ini merupakan wujud peran PLN NP untuk mengatasi emisi karbondioksida yang berasal dari proses produksi listrik. Penanaman pohon dapat membuat proses produksi listrik lebih aman dan bersih karena karbondioksida dapat terserap. Berikut adalah daftar program penanaman pohon selama tahun 2023-2025:

In recent years, PLN NP has consistently planted trees across all power plant units as part of the Green and Clean Power Plant program. This program is a manifestation of PLN NP's role in addressing carbon dioxide emissions resulting from the electricity production process. Tree planting can make the electricity production process safer and cleaner because carbon dioxide can be absorbed. The following is a list of tree planting programs for the years 2023-2025:

Program Penanaman Pohon Tahun 2025
Tree Planting Program in 2023-2025

Unit Pembangkit Generation Unit	2025	2024	2023
UP Indramayu Indramayu GU	30.722	30.919	19.658
UP Paiton 1, 2, 9 Paiton 1, 2, 9 GU	23.060	65.620	37.500
UP Rembang Rembang GU	9.366	15.703	13.755
UP Muara Karang Muara Karang GU	9.100	22.321	19.150
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU	1.350	5.671	4.524
UP Cirata Cirata GU	81.500	68.900	5.428
UP Gresik Gresik GU	11.940	162.298	8.000
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	2.050	5.070	5.610
UP Tenayan Tenayan GU	9.442	1.816	2.071
Jumlah Penanaman Pohon Number of Tree Planting	**178.530**	**378.318**	**115.696**

Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung kelestarian lingkungan, PLN NP juga telah melaksanakan kegiatan penanaman dan rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir sekitar unit pembangkit. Mangrove memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi pemanasan global, karena dapat menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Selama tahun 2025, kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan PLN NP berhasil menyerap 571,5 ton CO2, yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai mitigasi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas ekosistem pesisir.

As part of its commitment to supporting environmental sustainability, PLN NP has also carried out mangrove planting and rehabilitation activities in the coastal areas around the power plant units. Mangroves play a very important role in reducing global warming because they can absorb carbon dioxide from the atmosphere. During 2025, the mangrove planting activities carried out by PLN NP successfully absorbed 571.5 tons of CO2, contributing to the reduction of greenhouse gas emissions as a climate change mitigation effort and enhancing the quality of coastal ecosystems.

PLN NP juga berkomitmen untuk turut serta dalam upaya pemulihan lahan melalui program pengembangan masyarakat yang berfokus pada pemulihan dan konservasi lingkungan. Hingga tahun 2025, secara kumulatif PLN NP telah berhasil berkontribusi dalam pemulihan lahan seluas 3.008,31 hektar.

PLN NP is also committed to participating in land restoration efforts through community development programs that focus on environmental restoration and conservation. By 2025, cumulatively, PLN NP successfully contributed to the restoration of 3,008.31 hectares of land.

Menangani Pengaduan Lingkungan
Handling Environmental Complaints

PLN NP memandang umpan balik dari masyarakat sebagai elemen penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan lingkungan. Berbagai masukan, kritik, dan saran dari masyarakat menjadi dasar evaluasi bagi perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional tidak hanya memberikan manfaat secara bisnis, tetapi juga tetap selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sejalan dengan hal tersebut, PLN NP berkomitmen menjadikan *feedback* publik sebagai bagian dari peningkatan kinerja keberlanjutan di bidang lingkungan. Perusahaan juga menyediakan fasilitas pengaduan lingkungan sebagai sarana evaluasi dan kontrol, termasuk melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) yang dapat diakses melalui situs resmi PLN NP atau dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan.

PLN NP views feedback from the community as a crucial element in supporting the sustainability of environmental management. Various inputs, criticisms, and suggestions from the community serve as the basis for the Company's evaluation to ensure that operational activities not only provide business benefits but also remain aligned with efforts to preserve the environment and the welfare of the surrounding community. In line with this, PLN NP is committed to making public feedback a part of improving sustainability performance in the environmental field. The Company also provides environmentally compliant facilities as a means of evaluation and control, including through the Whistleblowing System (WBS) mechanism, which can be accessed via the official PLN NP website or by contacting the Corporate Secretary.

Sebagai hasil dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara baik dan efektif, selama tahun 2025 PLN NP tidak menerima pengaduan terkait lingkungan dari masyarakat sekitar maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga PLN NP tidak mendapatkan denda atau sanksi non moneter atas peristiwa ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait lingkungan.

As a result of well and effectively conducted environmental management, throughout 2025, PLN NP did not receive any environmental complaints from the surrounding community or other stakeholders, so PLN NP did not incur any fines or non-monetary sanctions for incidents of non-compliance with environmental laws and regulations.

Biaya Kegiatan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Activity Costs

Pada tahun 2025, PLN NP merealisasikan biaya sebesar Rp53.707 juta untuk kegiatan tanggung jawab sosial terkait lingkungan, meningkat sebesar 4,56% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp51.364 juta. Peningkatan biaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan dikarenakan adanya penambahan jumlah unit.

In 2025, PLN NP realized costs amounting to Rp53,707 million for environmental-related social responsibility activities, an increase of 4.56% compared to 2024, which was Rp51,364 million. The increase in environmental management and preservation costs was due to the addition of more units.

Tabel Tabel Realisasi Biaya Kegiatan Pengelolaan Lingkungan PLN NP Tahun 2023-2025 (Rp Juta)
Table of Cost Realization of PLN NP Environmental Management Activities in 2023-2025 (Rp Million)

No.	Komponen Biaya Lingkungan Environmental Cost Component	2025	2024	2023
1	Pengendalian Pencemaran Air Water Pollution Control	6.563	5.370	7.585
2	Pengendalian Pencemaran Udara Air Pollution Control	16.246	13.499	10.077
3	Pengelolaan Limbah Waste Management	16.447	18.393	19.369
4	Keanekaragaman Hayati Biodiversity	14.451	14.102	12.766
Jumlah Total		**53.707**	**51.364**	**49.797**

Penghargaan dan Sertifikasi Di Bidang Lingkungan yang Dimiliki
Environmental Awards and Certifications Held

PLN NP telah menerapkan sistem manajemen lingkungan secara terpadu dan terintegrasi dengan sistem manajemen yang lain serta terus konsisten melaksanakan upaya-upaya perbaikan berkelanjutan untuk mencapai visi misi PLN NP. Dengan komitmen PLN NP tersebut, PLN NP dan Anak Perusahaan mendapatkan beberapa sertifikasi antara lain ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 50001:2011 tentang Sistem Manajemen Energi, dan ISO 55001:2014 tentang Sistem Manajemen Aset. PLN NP juga membekali karyawan dengan beragam sertifikasi terkait lingkungan diantaranya penanggung jawab Pengendalian dan Pencemaran Air (PPPA), penanggung jawab Pengendalian dan Pencemaran Udara (PPPU), operator Pengendalian dan Pencemaran Air (PPA), operator Pengendalian dan Pencemaran Udara (PPU), dan Pengendalian Limbah B3 (PLB3).

PLN NP has implemented an integrated environmental management system and integrated with other management systems and continues to consistently carry out continuous improvement efforts to achieve PLN NP's vision and mission. With its commitment, PLN NP and its subsidiaries received several certifications including ISO 14001:2015 on Environmental Management System, ISO 50001:2011 on Energy Management System, and ISO 55001:2014 on Asset Management System. PLN NP also provides employees with various certifications related to the environment including the person in charge of Water Pollution Control (PPPA), the person in charge of Air Pollution Control (PPPU), Water Pollution Control operator (PPA), Air Pollution Control operator (PPU), and Hazardous Waste Control (PLB3).

Selama Tahun 2025, PLN NP berhasil mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan, yaitu:

1. Penghargaan PROPER Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia
   PLN NP mendapatkan 72 penghargaan PROPER dengan rincian berikut:
   - 4 Proper Emas
   - 12 Proper Hijau
   - 56 Proper Biru

2. *Marine Special Utilization Compliance Award* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia

During 2025, PLN NP managed to receive awards in the environmental field, namely:

1. The 2025 PROPER Award from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) of the Republic of Indonesia
   PLN NP received 72 PROPER awards, as detailed below:
   - 4 Gold Proper
   - 12 Green Proper
   - 56 Blue Proper

2. Marine Special Utilization Compliance Award from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) of the Republic of Indonesia

PLN NP menerima penghargaan untuk kategori Kegiatan Berusaha Terminal Khusus. Penghargaan ini merupakan bentuk insentif atas kepatuhan pengelolaan ruang laut yang mendukung implementasi Rencana Tata Ruang dan Zonasi (RTR/RZ), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

PLN NP received an award in the category of Special Terminal Business Activities. This award is an incentive for compliance with marine space management that supports the implementation of the Spatial Planning and Zoning Plan (RTR/RZ), as regulated in Government Regulation Number 21 of 2021 concerning Spatial Planning Administration.

3. *Environmental & Social Innovation Awards* (ENSIA) 2025 dari Prospectus Media
   PLN NP mendapatkan 46 penghargaan yang diraih oleh 10 Unit yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana dua Unit PLN NP masuk dalam Top Best 4 Participant. Penghargaan yang diraih mencakup berbagai kategori, seperti Lingkungan-Efisiensi Air, Pengurangan Limbah B3, Penurunan Emisi, hingga Inovasi Sosial dan *Local Hero*.
   - Kategori Lingkungan: 11 *Platinum*, 9 *Gold*, 9 *Silver*
   - Kategori Inovasi Sosial: 8 *Platinum*, 1 *Gold*, 1 *Silver*
   - Kategori Inovasi Khusus: 2 penghargaan
   - *Local Hero*: 3 penghargaan
   - Top Best 4 Participant: 2 unit

3. Environmental & Social Innovation Awards (ENSIA) 2025 from Prospectus Media
   PLN NP received 46 awards, achieved by 10 Units spread across Indonesia, with two PLN NP Units making it into the Top 4 Best Participants. The awards cover various categories, such as Environmental-Water Efficiency, B3 Waste Reduction, Emission Reduction, as well as Social Innovation and Local Hero.
   - Environmental Category: 11 Platinum, 9 Gold, 9 Silver
   - Social Innovation Category: 8 Platinum, 1 Gold, 1 Silver
   - Special Innovation Category: 2 awards
   - Local Hero: 3 awards
   - Top Best 4 Participant: 2 units

4. Lestari *Awards* 2025 dari Kompas Gramedia
   PLN NP berhasil meraih Lestari Award 2025 untuk Kategori *Renewable Energy* melalui salah satu program unggulan perusahaan, BEST (Besai *Environmental Sustainability and Transformation*).

4. Lestari Awards 2025 from Kompas Gramedia
   PLN NP successfully won the Lestari Award 2025 in the Renewable Energy category through one of the Company's flagship programs, BEST (Besai Environmental Sustainability and Transformation).

5. ASEAN *Energy Awards* 2025 dari ASEAN *Centre for Energy* (ACE)
   PLN NP berhasil meraih 4 (empat) Penghargaan ASEAN *Energy Awards* 2025
   - Juara Utama – kategori Energy Management in Small and Medium Industries
   - Juara Utama – kategori *Enabler Technology*
   - Juara Utama – kategori Biofuels
   - 1st *Runner Up Combined Heat and Power* (CHP) *Generation*

5. ASEAN Energy Awards 2025 from ASEAN Centre for Energy (ACE)

   PLN NP won four ASEAN Energy Awards 2025
   - Grand Champion –Energy Management in Small and Medium Industries category
   - Grand Champion –Enabler Technology category
   - Grand Champion –Biofuels category
   - 1st Runner Up Combined Heat and Power (CHP) Generation

6. Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Subroto Award dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI

6. Subroto Award for Electrical Safety (K2) from the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia

PLN NP berhasil meraih 6 (enam) penghargaan dalam Subroto Award 2025, yang meliputi:

- Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan: UP Paiton (PLTU 1, 2, dan 9), PLTGU Muara Karang dan PLTA Besai
- Bidang Efisiensi Energi: PLTGU Muara Karang
- Bidang Bioenergi: PLTU Paiton
- Bidang Aneka Baru dan Energi Terbarukan: PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PMSE), anak perusahaan hasil kolaborasi antara PLN NP dan Masdar (UAE) atas pembangunan dan pengoperasian PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp.

7. Asia ESG *Positive Impact Award* 2025 dari Institutional Investor / Media Asia
   PLN NP melalui program unggulannya, BEST (Besai *Environmental Sustainability and Transformation*) meraih Asia ESG *Positive Impact Award* 2025 untuk kategori *Renewable Energy*. Penghargaan ini merupakan penghargaan lanjutan setelah sebelumnya program unggulan PLN NP tersebut memenangkan Lestari *Award* 2025 yang diselenggarakan oleh Kompas Gramedia grup.

PLN NP won 6 (six) awards at the 2025 Subroto Awards, including:

- Electricity Safety: Paiton GU (1, 2, and 9 CFPP), Muara Karang CCPP, and Besai HPP
- Energy Efficiency: Muara Karang CCPP
- Bioenergy: Paiton CFPP
- Various New and Renewable Energies: PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PMSE), a subsidiary of PLN NP and Masdar (UAE) established to develop and operate the 192 MWp Cirata Floating SPP.

7. Asia ESG Positive Impact Award 2025 from Institutional Investor/Media Asia
   PLN NP, through its flagship program, BEST (Besai Environmental Sustainability and Transformation), won the Asia ESG Positive Impact Award 2025 in the Renewable Energy category. This award is a continuation after PLN NP's flagship program previously won the Lestari Award 2025 organized by the Kompas Gramedia group.

Kinerja Sosial
Social Performance

Kinerja aspek sosial merupakan salah satu dimensi penting dalam keberlanjutan yang mencerminkan kontribusi Perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Aspek ini mencakup berbagai inisiatif seperti peningkatan kualitas ketenagakerjaan, penerapan prinsip kesetaraan dan inklusivitas, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Selain itu, Perusahaan juga berperan aktif dalam program tanggung jawab sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal. Dengan mengelola aspek sosial secara konsisten dan berkelanjutan, Perusahaan tidak hanya menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat reputasi serta keberlanjutan operasional dalam jangka panjang.

The performance of the social aspect is one of the important dimensions of sustainability that reflects the Company's contribution to the welfare of employees, the community, and other stakeholders. This aspect covers various initiatives such as improving the quality of employment, implementing principles of equality and inclusivity, and protecting workers' rights. In addition, the Company also actively participates in social responsibility programs that focus on community empowerment, education improvement, health, and local economic development. By managing social aspects consistently and sustainably, the Company not only creates added value for the community but also strengthens its reputation and operational sustainability in the long term.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility on Social and Community Development

Komitmen dan Kebijakan

Commitment and Policy

Pengembangan sosial dan kemasyarakatan merupakan bagian dari komitmen PLN NP dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitar. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, perusahaan berupaya meningkatkan kualitas hidup dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal agar program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, perusahaan tidak hanya memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang lebih luas.

Social and community development is part of PLN NP's commitment to creating a sustainable, positive impact on the surrounding environment. Through various community empowerment programs, the Company strives to enhance the quality of life with a focus on education, health, economy, and environment. These activities are carried out participatively by involving local stakeholders to ensure that the programs are targeted and provide long-term benefits. With an inclusive and sustainable approach, the Company not only strengthens harmonious relationships with the community but also contributes to broader social development.

Wujud Komitmen terhadap keberlanjutan dalam pengembangan masyarakat ditunjukan PLN NP dalam Peraturan Direksi No. 0060.P/DIR/2025 tentang Kebijakan Strategis Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT PLN Nusantara Power dan Kebijakan Aspek Sosial Masyarakat PT PLN Nusantara Power tanggal 12 November 2024 yang mengacu pada sejumlah peraturan yang berlaku antara lain Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas yang tercantum pada pasal 74 terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0004.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT PLN (Persero).

Commitment to sustainability in community development is shown by PLN NP in the Board of Directors' Regulation No. 0060.P/DIR/2025 concerning the Strategic Policy on Corporate Communication and Social and Environmental Responsibility (TJSL) at PT PLN Nusantara Power and the Social Aspects Policy of PT PLN Nusantara Power dated November 12, 2024, which refers to several applicable regulations, including Law No. 40 on Limited Liability Companies as stated in Article 74 regarding Social and Environmental Responsibility, Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility, and the Board of Directors' Regulation of PT PLN (Persero) No. 0004.P/DIR/2024 concerning the Strategic Policy on Corporate Communication and Social and Environmental Responsibility (TJSL) at PT PLN (Persero).

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan

Community-related Corporate Social Responsibility Program

Untuk memastikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat dan tepat sasaran, PLN Nusantara Power memulai setiap inisiatif dengan melakukan pemetaan sosial (*social mapping*). Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial di sekitar wilayah operasional, sekaligus memahami kebutuhan, potensi, dan tingkat kerentanan masyarakat setempat. Perusahaan juga melibatkan forum komunikasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam seluruh tahapan program CSR, mulai dari perencanaan hingga evaluasi sehingga diharapkan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menangani masalah sosial yang ada.

To ensure that the corporate social responsibility (CSR) programs implemented actually provide benefits and are targeted, PLN Nusantara Power begins each initiative with social mapping. This activity aims to identify various social issues around the operational area, while also understanding the needs, potential, and vulnerability levels of the local community. The Company also involves community communication forums and local stakeholders in all stages of the CSR program, from planning to evaluation, so that the implemented program meets the community's needs and is capable of addressing existing social issues.

Untuk dapat menciptakan dampak yang lebih terarah, berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi komunitas serta lingkungan sekitar, Prinsip 3P ini kemudian dituangkan Perusahaan kedalam tipologi CSR yang terklasifikasi menjadi beberapa bidang utama dan dijalankan Perusahaan secara adaptif, guna memastikan setiap inisiatif CSR yang dijalankan selaras dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran.

To be able to create a more targeted, sustainable impact and provide optimal benefits for the community and the surrounding environment, the 3P Principle is then translated by the Company into a typology of CSR, which is classified into several main fields and carried out by the Company adaptively, to ensure that each CSR initiative carried out is in line with the needs and characteristics of the targeted community.

Pada tahun 2025, penyaluran CSR PLN Nusantara Power meliputi empat pilar program yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, hukum & tata kelola. Kemudian dari empat pilar tersebut, pada tahun 2025 PLN Nusantara Power melakukan empat kategori program prioritas utama, yaitu pendidikan, lingkungan, program Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta CSV (*Create Shared Value*)

In 2025, the CSR distribution of PLN Nusantara Power included four program pillars: social, environmental, economic, and law & governance. Furthermore, of these four pillars, in 2025, PLN Nusantara Power implemented four main priority program categories: education, environment, Micro and Small Business (MSB) programs, and CSV (Create Shared Value)

Tipologi CSR PLN Nusantara Power 2025
CSR Typology PLN Nusantara Power 2025

Sosial	Social
Lingkungan	Environment
Ekonomi	Economy
Hukum dan Tata Kelola	Legal and Governance

Program prioritas utama CSR PLN Nusantara Power 2025
CSR top priority programs PLN Nusantara Power 2025

Pendidikan	Education
Lingkungan	Environment
Program UMK	UMK Program
CSV	CSV

Sepanjang tahun 2025, PLN Nusantara Power telah merealisasikan kegiatan CSR di 33 (Tiga Puluh Tiga) Unit Kerja yaitu Kantor Pusat, UP Muara Karang, UP Muara Tawar, UP Cirata, UP Brantas, UP Paiton, UP Gresik, UP Rembang, UP Indramayu, UP Pacitan, UP Tanjung Awar-Awar, UP Tenayan, UP Kaltim Teluk, UP Pulang Pisau, UP Arun, UP Sambelia, UP Pandan, UP Belawan, UP Nagan Raya, UP Pekanbaru, UP Bandar Lampung, UP Sebalang, UP Tarahan, UP Bukit Asam, UP Kaltimra, UP Kalselteng, UP Kapuas, UP Punagaya, UP Minahasa, UP Kendari, UP Gorontalo, UP Sengkang dan UP Bakaru.

Throughout 2025, PLN Nusantara Power realized CSR activities in 33 (Thirty-Three) Work Units, namely Head Office, Muara Karang GU, Muara Tawar GU, Cirata GU, Brantas GU, Paiton GU, Gresik GU, Rembang GU, Indramayu GU, Pacitan GU, Tanjung Awar-Awar GU, Tenayan GU, Kaltim Teluk GU, Pulang Pisau GU, Arun GU, Sambelia GU, Pandan GU, Belawan GU, Nagan Raya GU, Pekanbaru GU, Bandar Lampung GU, Sebalang GU, Tarahan GU, Bukit Asam GU, Kaltimra GU, Kalselteng GU, Kapuas GU, Punagaya GU, Minahasa GU, Kendari GU, Gorontalo GU, Sengkang GU, and Bakaru GU.

Realisasi Pelaksanaan Program CSR Berdasarkan Pilar CSR
Realization of CSR Program Implementation by CSR Pillar

Sosial Social	**Lingkungan** Environment	**Ekonomi** Economy	**Hukum & Tata Kelola** Law & Governance
Pada pilar sosial, PLN NP melaksanakan kegiatan CSR dalam bentuk pemberian program peningkatan kesehatan, program peningkatan pendidikan, pemberdayaan kaum rentan, perempuan dan anak, pencegahan stunting, penyediaan sarana/prasarana umum, serta bantuan kebencanaan. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan CSR pilar sosial telah terlaksana sebanyak 296 kegiatan. In the social pillar, PLN NP carries out CSR activities in the form of providing health improvement programs, education improvement programs, empowering vulnerable people, women, and children, preventing stunting, providing public facilities/infrastructure, and disaster assistance. Throughout 2025, there were 296 social category CSR activities carried out.	Pada pilar lingkungan, PLN NP melaksanakan kegiatan CSR dalam bentuk pelestarian lingkungan, program konservasi alam, penanaman pohon, edukasi lingkungan, ekowisata dan penyediaan sarana air bersih. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan CSR pilar lingkungan telah terlaksana sebanyak 226 kegiatan. In the environmental pillar, PLN NP carries out CSR activities in the form of environmental preservation, nature conservation programs, tree planting, environmental education, ecotourism, and provision of clean water facilities. Throughout 2025, 226 CSR activities under the environmental category were conducted.	Pada pilar Ekonomi, PLN NP melaksanakan kegiatan CSR dalam bentuk pembinaan dan pengembangan UMK, pemberdayaan komunitas/ kelompok masyarakat, dan penyediaan sarana/prasarana umum. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan CSR pilar ekonomi telah terlaksana sebanyak 254 kegiatan. In the Economic pillar, PLN NP implements CSR activities in the form of fostering and developing MSEs, empowering communities/ community groups, and providing public facilities/ infrastructure. Throughout 2025, 254 economic category CSR activities were carried out.	Pada pilar Hukum & Tata Kelola, PLN NP melaksanakan kegiatan CSR dalam bentuk program evaluasi dan *monitoring* dalam CSR seperti pelaksanaan *Social Mapping*, SROI, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, Pembuatan AD/RT organisasi masyarakat yang terlibat dalam program, dll. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan CSR pilar Hukum & Tata Kelola telah terlaksana sebanyak 87 kegiatan. In the Law & Governance pillar, PLN NP implements CSR activities in the form of evaluation and monitoring programs in CSR such as the implementation of Social Mapping, SROI, measurement of the Community Satisfaction Index, Making AD/RT of community organizations involved in the program, etc. Throughout 2025, 87 activities under the Law & Governance category of CSR were carried out.

Jumlah total penerima manfaat atas program-program yang telah dilakukan yaitu sebesar 62.509 orang
The total number of beneficiaries of the community development is 62.509 people

Laki-laki: 34.393 orang Malei: 34.393 people	**Perempuan: 28.116 orang** Female: 28.116 people

Program Sumantri Berseri (Sungai Maron Lestari, Bersih dan Berdikari)

SUMANTRI BERSERI (Preserve, Clean, and Self-sustaining Maron River) Program

Program inovasi sosial SUMANTRI BERSERI hadir untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial di Sungai Maron, seperti erosi, pencemaran, pembalakan liar, serta rendahnya pendapatan masyarakat. Program ini dijalankan melalui tiga pilar terintegrasi.

Pada aspek Maron Lestari, dilakukan elektrifikasi perahu wisata, pengendalian erosi, penanaman vegetasi, dan sistem peringatan banjir untuk menekan emisi dan menjaga ekosistem. Maron Bersih berfokus pada pengelolaan sampah melalui TPS3R dan pengolahan limbah menjadi produk bernilai. Sementara Maron Berdikari mendorong kemandirian ekonomi lewat penguatan UMKM, pemanfaatan potensi kelapa, serta alih profesi masyarakat menjadi pelaku wisata dengan peningkatan pendapatan.

Program ini juga memperkuat inklusivitas dengan melibatkan perempuan dan kelompok rentan, sekaligus mendorong ekonomi sirkular melalui pemanfaatan FABA dalam produksi gerabah.

Tujuan dari program ini, antara lain:
1. Pemulihan dan perlindungan lingkungan Sungai
2. Pengurangan emisi dan pengelolaan wisata berkelanjutan
3. Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi Masyarakat

The SUMANTRI BERSERI social innovation program is here to address environmental and social issues in the Maron River, such as erosion, pollution, illegal logging, and low community income. This program is implemented through three integrated pillars.

In the Maron Lestari aspect, the electrification of tourist boats, erosion control, vegetation planting, and flood warning systems are performed to reduce emissions and preserve the ecosystem. Maron Bersih focuses on waste management through TPS3R and processing waste into valuable products. Meanwhile, Maron Berdikari promotes economic independence by strengthening MSMEs, utilizing coconut potential, and transforming the community into tourism actors with increased income.

This program also strengthens inclusivity by involving women and vulnerable groups, while promoting a circular economy through the use of FABA in pottery production.

The objectives of this program, among others:
1. River restoration and environmental protection
2. Emissions reduction and sustainable tourism management
3. Improving community well-being and economic self-reliance

Dampak dan Capaian Program tahun 2025
Program Impact and Achievement in 2025

Sosial Social	Lingkungan Environment	Ekonomi Economy	Kesejahteraan Welfare
1. Jumlah penerima manfaat 197 orang 2. Terbentuk 2 kelompok baru: KSB Sukrasana dan kelompok pengelola sampah Suwanda Karsa 3. Terbentuk kohesi sosial (POKDARWIS, UMKM, dan Pengrajin Gerabah) 1. 197 beneficiaries 2. Two new groups were formed: KSB Sukrasana and the Suwanda Karsa waste management group 3. Social cohesion has been fostered (POKDARWIS, MSMEs, and Pottery Artisans)	1. Pendapatan POKDARWIS Sungai Maron sebesar Rp159.630.000 (pendapatan selama paruh pertama 2025) 2. Pendapatan joki perahu Rp3.196.000,-/bulan/orang (peningkatan 28%-207%) 3. Pendapatan 3 kepala keluarga perempuan atau janda sebesar Rp2.228.700,-/bulan/orang (peningkatan 83%) 4. Pendapatan 11 UMKM Rp2.545.455 (peningkatan 84%) 5. Pendapatan lansia pengrajin gerabah Rp625.000/bulan/orang 1. Sungai Maron POKDARWIS revenue of Rp159,630,000 (revenue for the first half of 2025) 2. Boat operators' income: Rp3,196,000/month/person (an increase of 28%–207%) 3. Income for 3 female-headed households or widows: Rp2,228,700/month/person (an increase of 83%) 4. Income for 11 MSMEs: Rp2,545,455 (84% increase) 5. Income for elderly pottery artisans: Rp625,000/month/person	1. Reduksi emisi GRK sebesar 3,51 ton CO_2eq/tahun melalui aksi reboisasi dan Sungai Maron 2. 7.035 pohon terselamatkan melalui penghentian penebangan kayu, sepanjang tahun 2023–2025 3. Reduksi emisi GRK sebesar 3,04 CO_2/tahun melalui elektrifikasi perahu 4. Penurunan erosi 79m² di sempadan Sungai Maron 5. 4.800 kg sampah rumah tangga dan wisata terkelola per Oktober 2025 1. Reduction of GHG emissions by 3.51 tons of CO_2eq/year through reforestation along the Maron Riverbanks 2. 7,035 trees saved by halting logging from 2023 to 2025 3. Reduction of GHG emissions by 3.04 CO_2/year through boat electrification 4. Reduction of erosion by 79 m² along the Maron River 5. 4,800 kg of household and tourism waste managed by October 2025	1. 18 anak usia dini terpenuhi hak belajarnya melalui Generasi Hijau Panji Mardika 1. 18 young children's right to education has been fulfilled through Generasi Hijau Panji Mardika (Panji Mardika Green Generation)

Program Peternakan Terintegrasi Selobanteng
Selobanteng Integrated Livestock Program

Program Peternakan Terintegrasi Selobanteng merupakan program yang dilatarbelakangi oleh potensi besar peternakan sapi potong di Desa Selobanteng, Kabupaten Situbondo, yang memiliki populasi lebih dari 800 ekor dan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat setempat. Namun, pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pakan hijauan saat musim kemarau akibat kondisi lahan yang berbatu dan minim sumber air, pemanfaatan lahan nonproduktif yang belum optimal, serta limbah pertanian dan kotoran ternak yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, masyarakat juga menghadapi keterbatasan pengetahuan terkait kesehatan ternak serta pemasaran ternak secara digital, sehingga diperlukan pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus nilai ekonomi peternakan di desa tersebut.

The Integrated Livestock Program in Selobanteng is a program backed by the significant potential of beef cattle farming in Selobanteng Village, Situbondo Regency, which has a population of over 800 head and serves as one of the economic pillars for the local community. However, the development of this sector still faces various challenges, such as the limited availability of forage during the dry season due to rocky land conditions and minimal water sources, the suboptimal utilization of non-productive land, and the underutilization of agricultural waste and livestock manure. Additionally, the community faces limitations in knowledge related to livestock health and digital livestock marketing, necessitating an integrated approach to enhance both productivity and the economic value of livestock farming in the village.

Tujuan dari program ini, antara lain:

1. Mengembangkan potensi peternakan sapi yang ada di Desa Selobanteng.
2. Menjalankan manajemen pakan fermentasi sebagai alternatif pakan ternak pada saat musim kemarau
3. Melakukan pengecekan kesehatan hewan ternak rutin bersama dengan Puskeswan
3. Mengelola pengolahan pupuk organik dari limbah kotoran ternak sapi
4. Menjalankan produksi olahan sayur secara rutin sebagai peluang peningkatan pendapatan bagi kelompok Wanita

The objectives of this program, among others:

1. Developing the potential of cattle farming in Selobanteng Village.
2. Implementing fermented feed management as an alternative to animal feed during the dry season.
3. Conducting routine livestock health checks together with the Puskeswan
4. Managing the processing of organic fertilizer from cow dung waste
5. Running routine production of processed vegetables as an opportunity to increase income for women's groups

Dampak dan Capaian Program tahun 2025
Program Impact and Achievement in 2025

Sosial Social	Lingkungan Environment	Ekonomi Economy	Kesejahteraan Welfare
1. Adanya 5 variasi produk olahan sayur yang menjadi oleh-oleh khas Desa Selobanteng. 2. Terbentuknya kebiasaan untuk mengolah kotoran ternak menjadi pupuk organik pada 7 anggota kelompok pupuk 3. Terbentuknya kebiasaan membuat pakan fermentasi pada 10 anggota kelompok ternak	1. Membuka peluang perluasan pemasaran produk olahan sayur bagi 12 anggota Kelompok KRPL 2. Mendorong pengurusan perizinan agar dapat memiliki 3 izin usaha, yaitu NIB, PIRT, dan halal. 3. Mendorong pemasaran pupuk organik secara meluas melalui kelompok pupuk	1. Pengolahan limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik. 2. Pengolahan tanaman jagung menjadi pakan fermentasi yang lebih tahan lama untuk pakan ternak 1. Processing livestock manure into organic fertilizer. 2. Processing corn into fermented feed that has a longer shelf life for livestock	1. Memberdayakan wanita melalui kegiatan produksi olahan sayur yang berdampak pada peningkatan penambahan tambahan bagi ibu rumah tangga sebanyak 12 orang kelompok KRPL 2. Memberdayakan peternak melalui kegiatan pembuatan pakan fermentasi dan pupuk organik

Sosial Social	Lingkungan Environment	Ekonomi Economy	Kesejahteraan Welfare
1. Five varieties of processed vegetable products have become signature souvenirs of Selobanteng Village. 2. Seven members of the fertilizer group have adopted the practice of turning livestock manure into organic fertilizer. 3. 10 members of the livestock group have adopted the practice of making fermented feed.	1. Opening up opportunities for expanding the marketing of processed vegetable products for the 12 members of the KRPL Group; 2. Encouraging the processing of permits to obtain three business licenses: NIB, PIRT, and halal certification; 3. Promoting broad marketing of organic fertilizer through the fertilizer group		1. Empowering women through vegetable processing activities, resulting in additional income for 12 housewives in the KRPL group 2. Empowering livestock farmers through the production of fermented feed and organic fertilizer

Dewi Sri Werdani (Desa Wisata Sendangasri dan Wanita Berdaya Tani BerSinergi)

Dewi Sri Werdani (Sendangasri Tourism Village and Women Empowered Farmers Synergize)

Dewi Sri Wardani merupakan gabungan dua kelompok binaan PLN NP UP Rembang, yaitu DESSEN (Desa Wisata Sendangasri) dan WBT KWT Melati yang berlokasi di Desa Sendangasri, Kecamatan Lasem. Program yang didukung sejak tahun 2022 ini berfokus pada pengembangan seni, budaya, serta edukasi dan pengelolaan pertanian bagi anak-anak maupun masyarakat. Keunggulan program ini terletak pada konsep wisata edukasi yang mengintegrasikan pembelajaran kesenian dan pertanian dalam satu paket, yang menjadi satu-satunya di Kabupaten Rembang. Selain itu, kelompok DESSEN juga menciptakan karya seni lokal seperti Tari “Tri Karya Boga” dan lagu “Sembodo”.

Dewi Sri Wardani is a combination of two groups fostered by PLN NP Rembang GU, namely DESSEN (Desa Wisata Sendangasri) and WBT KWT Melati, located in Sendangasri Village, Lasem District. This program, supported since 2022, focuses on the development of arts, culture, as well as education and agricultural management for children and the community. The strength of this program lies in the educational tourism concept that integrates art and agriculture learning into one package, making it the only one in Rembang Regency. In addition, the DESSEN group also created local artworks such as the dance "Tri Karya Boga" and the song "Sembodo."

Tujuan dari program ini, antara lain:

1. Melestarikan seni dan budaya yang ada di Desa Sendangasri Lasem Kabupaten Rembang
2. Penguatan bidang pertanian secara mandiri dan P2L
3. Menjadikan Desa Sendangasri sebagai salah satu destinasi wisata pertanian, seni budaya pertama di Kabupaten Rembang

The objectives of this program, among others:

1. Preserving the arts and culture in Sendangasri Village, Lasem, Rembang Regency.
2. Strengthening agriculture independently and P2L
3. Making Sendangasri Village one of the first agricultural and cultural tourism destinations in Rembang Regency

Dampak dan Capaian Program tahun 2025

Program Impact and Achievement in 2025

Sosial Social	Lingkungan Environment	Ekonomi Economy	Kesejahteraan Welfare
1. Menciptakan pembelajaran seni inklusif untuk 20 anak kebutuhan khusus 2. Layanan akses finansial melalui simpan pinjam anggota dengan total asset Rp16.750.000 3. Meningkatkannya partisipasi 3.120 warga mengelola aktivitas Desa Wisata 1. Creating inclusive arts education for 20 children with special needs 2. Financial access services through a member-based savings and loan program with total assets of Rp 16,750,000 3. Increasing the participation of 3,120 residents in managing Tourism Village activities	1. Menekan kemiskinan 3,12% di Desa Sendangasri dengan pendapatan rata-rata perbulan 110% UMR. 2. Pendapatan Paket Wisata Rp22.000.000 3. Produk kelompok sebanyak 7 varian memberikan pendapatan Rp127.650.000 4. Pendapatan Pelatihan Seni Rp24.750.000 5. Pendapatan MBAH BERSERI Rp26.850.000 6. Memberdayakan 24 masyarakat miskin dan 3 difabel 11. Reduced poverty by 3.12% in Sendangasri Village, with an average monthly income of 110% of the Regional Minimum Wage. 2. Tourism package revenue of Rp22,000,000 3. Group products (7 varieties) generated revenue of Rp127,650,000 4. Art Training Revenue of Rp24,750,000 5. MBAH BERSERI revenue of Rp26,850,000 6. Empowering 24 people living in poverty and three people with disabilities	1. 15.500 Kg FABA termanfaatkan setara dengan 3,65 ton/CO_2-eq 2. 14.450 Kg limbah KOHE terkelola setara mencegah terbentuknya 49.074 kg/CO_2-Eq GRK 3. 92 Orang memiliki akses air bersih sejumlah 20.000 literairsaat kekeringan 4. Meningkatkan angka penggunaan pupuk organik 2,05% di Kabupaten Rembang. 1. 15,500 kg of FABA was utilized, equivalent to 3.65 tons of CO2-eq 2. 14,450 kg of KOHE waste managed, equivalent to preventing the formation of 49,074 kg of CO2-eq GHG 3. 92 people gained access to 20,000 liters of clean water during the drought 4. Increased the rate of organic fertilizer use by 2.05% in Rembang Regency.	1. 50 anggota kelompok meningkat kapasitasnya 2. Menjadi Learning Center P5 untuk 1975 siswa dari 8 sekolah6 karya orisinal kelompok sudah mendapatkan Hak Cipta 3. Akses hiburan dan pasar rakyat gratis kepada masyarakat melalui pertunjukan seni dengan rata-rata pengunjung 3.120. 4. Pasar rakyat melibatkan lebih dari 28 UMKM 1. 50 group members improved their capacity 2. Became a P5 Learning Center for 1,975 students from eight schools; six of the group's original works have been copyrighted 3. Provided free access to entertainment and a farmers' market for the community through arts performances, with an average attendance of 3,120 4. The farmers' market involved more than 28 MSMEs

Lestari Bumi Harmoni
Lestari Bumi Harmoni

Program Lestari Bumi Harmoni dilatarbelakangi oleh maraknya perburuan liar flora dan fauna di Hutan Binor, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau, serta ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi di Dusun Klompangan sebagai wilayah tertinggal di Desa Binor. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibentuk Kelompok PERISAI (Pecinta Rimba dan Satwa Indonesia) yang berperan sebagai penggerak edukasi masyarakat dalam pelestarian flora dan fauna. Program ini kemudian dikembangkan melalui berbagai kegiatan seperti pembibitan, penanaman, Warung Alas, serta pusat edukasi dan konservasi, yang mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat.

Tujuan dari program ini, antara lain:
1. Memaksimalkan potensi sumber daya lokal sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial.
2. Mencegah adanya perburuan flora dan fauna secara liar, serta mendorong upaya edukasi konservasi bagi masyarakat.
3. Mencegah potensi bencana yang terjadi di kawasan Hutan Binor.
4. Mewujudkan pusat wisata edukasi lingkungan di Desa Binor dengan konsep Eco-Edu Park Bumi Harmoni.
5. Optimalisasi manajemen pengelolaan keuangan dan pemasaran produk yang dihasilkan.
6. Mendorong profesionalisme pada setiap kegiatan turunan Program Lestari Bumi Harmoni melalui peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok

The Lestari Bumi Harmoni Program is motivated by the rampant poaching of flora and fauna in the Binor Forest, cases of forest and land fires (karhutla) during the dry season, and the significant economic disparity in Dusun Klompangan, a disadvantaged area in the Binor Village. To address these issues, the PERISAI Group (Pecinta Rimba dan Satwa Indonesia) was established, with a role in driving community education in the preservation of flora and fauna. This program was then developed through various activities such as nurseries, planting, Warung Alas, and education and conservation centers, which integrate social and environmental aspects while also providing economic added value to the local community.

The objectives of this program include:
1. Maximizing the potential of local resources as an effort to improve community welfare in the economic and social fields.
2. Preventing illegal hunting of flora and fauna and encouraging conservation education efforts for the community.
3. Preventing potential disasters that occur in the Binor Forest area.
4. Creating an environmental education tourism center in Binor Village with the concept of Eco-Edu Park Bumi Harmoni.
5. Optimizing financial management and marketing of products produced.
6. Encouraging professionalism in every derivative activity of the Lestari Bumi Harmoni Program through increasing the knowledge and skills capacity of group members.

Dampak dan Capaian Program tahun 2025
Program Impact and Achievement in 2025

Sosial Social	Lingkungan Environment	Ekonomi Economy	Kesejahteraan Welfare
1. Penerima manfaat program berjumlah 53 orang 2. Peningkatan frekuensi kerja bakti/gotong royong sebesar 4x dalam sebulan 3. Keterlibatan 23 orang kelompok rentan dalam program 4. Keterlibatan Karang Taruna dalam budidaya maggot di Kawasan Bumi Harmoni 5. Keterlibatan 17 anggota kelompok dalam pelatihan pembuatan baglog jamur 6. Peningkatan kapasitas 20 peserta ERC (*Edu-Action Ranger Camp*) 1. The program beneficiaries were 53 people. 2. Increased frequency of community service/ congregation by 4x a month 3. Involvement of 23 vulnerable groups in the program 4. Involvement of youth organizations in maggot cultivation in the Bumi Harmoni area 5. Involvement of 17 group members in mushroom baglog-making training 6. Capacity building for 20 ERC (Edu-Action Ranger Camp) participants	1. Pendapatan petani meningkat 85% setelah adanya inovasi alat pengusir hama 2. Peningkatan pendapatan Rp 1 juta per anggota Warung Alas 3. Peningkatan pendapatan Rp133 juta untuk kelompok Bank Bibit 4. Peningkatan pendapat kelompok Postaklim Rp7,2 juta per bulan 5. Penghematan pengeluaran pakan burung di kandang *aviary* dampak dari budidaya *maggot* sebagai substitusi pakan burung 6. Penambahan 1 infrastruktur pendukung berupa Galeri *Aviary* 1. Farmers' income increased by 85% after the pest-repellent innovation 2. Increased income of Rp1 million per Warung Alas member 3. Increased income of Rp133 million for the Seed Bank group 4. Increased income for the Postaklim group of Rp7.2 million per month 5. Savings in bird feed expenditure in aviary cages as a result of maggot cultivation as a substitute for bird feed 6. Addition of 1 supporting infrastructure in the form of the Aviary Gallery	1. Penurunan kasus Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2. 550,2 Ha wilayah konservasi 3. Penanaman 18.730 pohon dan 5.000 mangrove yang dilakukan di 5 desa 4. Menyerap 826,1 Ton CO_2 per tahun 5. Peningkatan dan perluasan distribusi bibit ke 2 desa yaitu Desa Selobanteng dan Desa Batur 1. Reduction in forest and land fire cases 2. 550.2 hectares of hunting conservation areas 3. Planting 18,730 trees and 5,000 mangroves in five villages 4. Absorbed 826.1 tons of CO2 per year 5. Increasing and expanding the distribution of seedlings to two villages, Selobanteng Village and Batur Village	1. Peningkatan pengetahuan konservasi 4 kelompok 2. Peningkatan pengetahuan konservasi pengunjung Eco-Edu Park Bumi Harmoni mencapai 7.900 orang per Maret 2024 3. Peningkatan jumlah lapangan pekerjaan baru bagi warga Desa Binor 4. Terjaganya kesehatan para lansia di Desa Binor 5. Terjalinnya kolaborasi wisata dengan Resto Pantai Bohay 1. Increased conservation knowledge of four groups 2. Increased conservation knowledge Bumi Harmoni 3. Eco-Edu Park visitors reach 7,900 people as of March 2024 4. Increased number of new jobs for Binor Village residents 5. The elderly's health is maintained in Binor Village 6. Establishment of a tourism collaboration with Resto Pantai Bohay

Nusantara *Volunteering Program* (NVP)

Nusantara *Volunteering Program* (NVP) merupakan program relawan yang mendorong keterlibatan aktif pegawai PLN NP dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di seluruh unit PLN di Indonesia. Melalui program ini, karyawan berkontribusi secara langsung dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus memperkuat keterlibatan, kolaborasi tim, serta pengembangan keterampilan karyawan.

Pada tahun 2025, PLN NP kembali berhasil memenuhi KPI Subholding PT PLN (Persero) terkait keterlibatan karyawan dalam program sosial kemasyarakatan, dengan target partisipasi sebanyak 4.736 karyawan dan realisasi mencapai 4.895 karyawan atau 103% dari target yang ditetapkan. Adapun kegiatan NVP berdasarkan kategorinya adalah sebagai berikut:

Nusantara Volunteering Program (NVP) is a volunteer program that encourages the active involvement of PLN NP employees in the implementation of Corporate Social Responsibility programs across all PLN units in Indonesia. Through this program, employees contribute directly to social and environmental activities that have a positive impact on the community, while also strengthening engagement, team collaboration, and employee skill development.

In 2025, PLN NP successfully met the KPI of PT PLN (Persero) Subholding regarding employee involvement in community social programs, with a participation target of 4,736 employees and an actual realization of 4,895 employees or 103% of the set target. The NVP activities based on their categories are as follows:

Biaya Yang Dikeluarkan
Program Expenditures

PLN NP mengeluarkan biaya untuk program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan sebesar Rp62.325 juta yang mencakup pilar Sosial, Lingkungan, Ekonomi dan Hukum & Tata Kelola dengan rincian sebagai berikut:

PLN NP allocated Rp62,325 million for social responsibility programs toward social and community development, covering Social, Environmental, Economy, and Law & Governance pillars with the following details:

Anggaran dan Realisasi Biaya CSR Tahun 2025 (dalam jutaan)
The Budget and Actual CSR Expenses for 2025 (in million)

No.	Bidang Program CSR Field of CSR Program	RKAP 2025 2025 ABOP	Realisasi 2025 2025 Realization	Realisasi 2024 2024 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian terhadap RKAP 2025 (%) Achievement to 2025 ABOP (%)
Pilar CSR Tahun 2024 - 2025 Pilar CSR Tahun 2024 - 2025						
1	Sosial Social	21.599	17.747	17.747	**Tahun 2023 belum menggunakan tipologi ini** Have not used this typology for 2023	82,16%
2	Lingkungan Environment	23.053	15.824	15.824		79,13%
3	Ekonomi Economy	18.814	14.887	14.887		68,64%
4	Hukum & Tata Kelola Legal & Governance	12.424	13.777	13.777		110,89%
Pilar CSR Tahun 2023 Pilar CSR Tahun 2023						
5	*Empowerment*	**Tahun 2024-2025 menggunakan tipologi yang berbeda** Using a different typology in 2024-2025		14.248	14.248	-
6	*Capacity Building*			17.596	17.596	-
7	Infrastruktur Infrastructure			8.058	8.058	-
8	*Charity*			4.957	4.957	-
9	KLBS (Kejadian Luar Biasa) KLBS (Extraordinary Events)			2.064	2.064	-
10	CSV			4.230	4.230	-
Total		**75.890**	**62.235**	**62.491**	**51.153**	**82,01%**

Penghargaan
Penghargaan

Pada tahun 2025 PLN NP mendapatkan penghargaan dan apresiasi atas program-program CSR yang berhasil dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain:

1. Indonesia *Green Award* 2025 dari *La Tofi School of Social Responsibility*
   PLN NP berhasil meraih Indonesia *Green Award* 2025 untuk Kategori Mengembangkan Pengolahan Sampah Terpadu melalui UP Pacitan.

2. Penghargaan PROPER Tahun 2025 dari KLHK RI

   PLN NP mendapatkan 72 penghargaan PROPER dengan rincian berikut:

In 2025, PLN NP received several awards and accolades for its continuously successful CSR programs, including:

1. Indonesia Green Award 2025 from La Tofi School of Social Responsibility
   PLN NP won the 2025 Indonesia Green Award in the category of Integrated Waste Management through Pacitan GU.

2. PROPER Award 2025 from the Ministry of Environment and Forestry of RI
   PLN NP won 72 PROPER awards, as detailed below:

- 4 Proper Emas
- 12 Proper Hijau
- 56 Proper Biru

3. 2nd Bina Mitra UMKM *Award* 2025 dari CFCD *Foundation*
   PLN NP mendapatkan 2 penghargaan dalam 2nd Bina Mitra UMKM Award 2025 yaitu:
   - 1 penghargaan *Gold* – UP Muara Karang
   - 1 penghargaan *Silver* – UP Punagaya

4. Nusantara CSR *Award* - La Tofi *Award* 2025
   PLN NP melalui UP Muara Karang berhasil meraih penghargaan dalam Nusantara CSR *Award* – La Tofi *Award* 2025
   - *Best of The Best* TJSL UMKM dan Pariwisata dan Kebudayaan
   - Pembina UMKM Kesehatan

5. Piagam Penghargaan Walikota Jakarta Utara

   PLN NP melalui UP Muara Karang menerima Piagam Penghargaan Walikota Jakarta Utara 2025 atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat melalui kepatuhan perpajakan, partisipasi dalam program lingkungan, serta pelaksanaan program CSR yang mendukung penanganan banjir dan percepatan penurunan stunting.

6. *Top* CSR *Award* 2025 dari Majalah Top Business
   PLN NP berhasil meraih 5 penghargaan TOP CSR sebagai berikut:
   - 2 Penghargaan kategori Bintang 5
   - 2 Penghargaan kategori Bintang 4
   - 1 Penghargaan kategori Bintang 3
   - 5 Penghargaan Top Leader on CSR Commitment

7. Indonesia *Social Responsibility Award* (ISRA) 2025 dari Prospectus Media
   PLN NP meraih 6 penghargaan pada ajang Indonesia *Social Responsibility Award* (ISRA) 2025 sebagai berikut:
   - *Bronze Award* pada kategori program *Economic Empowerment* (UP Tanjung Awar - Awar)
   - *Bronze Award* pada kategori program *Economic Empowerment* (UP Pulang Pisau)
   - *Bronze Award* pada kategori program *Economic Empowerment* (PLTU Belitung)
   - *Gold Award* pada kategori program *Health Quality Improvement* (UP Pacitan)

- 4 Gold Proper
- 12 Green Proper
- 56 Blue Proper

3. 2nd Bina Mitra UMKM Award 2025 from CFCD Foundation
   PLN NP received two awards at the 2nd Bina Mitra UMKM Award 2025, namely:
   - 1 Gold award – Muara Karang GU
   - 1 Silver award – Punagaya GU

4. PLN NP, through Muara Karang GU, won an award at the Nusantara CSR Award – La Tofi Award 2025

   - Best of the Best in Social and Environmental Responsibility MSMEs, Tourism, and Culture
   - Advisor to MSMEs in the Health Sector

5. Certificate of Recognition from the Mayor of North Jakarta
   PLN NP, through Muara Karang GU, received the 2025 North Jakarta Mayor's Certificate of Recognition for its contribution to supporting regional development and community welfare through tax compliance, participation in environmental programs, and the implementation of CSR programs that support flood management and the acceleration of stunting reduction.

6. Top CSR Award 2025 from Top Business Magazine
   PLN NP won the following 5 TOP CSR awards:

   - 2 5-star awards
   - 2 4-star awards
   - 1 3-star award
   - 5 Top Leader Awards on CSR Commitment

7. Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2025 from Prospectus Media
   PLN NP won six awards at the 2025 Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) as follows:

   - Bronze Award in the Economic Empowerment program category (Tanjung Awar – Awar GU)
   - Bronze Award in the Economic Empowerment program category (Pulang Pisau GU)
   - Bronze Award in the Economic Empowerment program category (Belitung CFPP)
   - Gold Award in the Health Quality Improvement program category (Pacitan GU)

- *Gold Award* pada kategori program *Education* (UP Indramayu)
- *Platinum Award* pada kategori program *Gender Equality & Social Inclusion* (UP Gresik)

8. *Circular Economy Sustainability Award* (CESA) 2025 dari Indonesia *Circular Economy Forum*
   PLN NP mendapatkan dua penghargaan dalam ajang *Circular Economy Sustainability Award* (CESA) 2025. Penghargaan itu meliputi: melalui UP Tenayan dan UP Rembang.
   - UP Tenayan - *Gold Winner* pada kategori Sumber Daya Input melalui Program Budidaya Cacing Tanah Muda Jaya Organik.
   - UP Rembang - *Gold Winner* pada kategori Perpanjangan Sumberdaya *Output* dan Daur Ulang melalui Program TJSL Trenggulunan Agro View.

9. *Environmental & Social Innovation Awards* (ENSIA) 2025 dari PT Sucofindo
   PLN NP mendapatkan 46 penghargaan yang diraih oleh 10 Unit yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana dua Unit PLN NP masuk dalam *Top Best 4 Participant*. Penghargaan yang diraih mencakup berbagai kategori, seperti Lingkungan-Efisiensi Air, Pengurangan Limbah B3, Penurunan Emisi, hingga Inovasi Sosial dan *Local Hero*.
   - Kategori Lingkungan: 11 *Platinum*, 9 *Gold*, 9 *Silver*
   - Kategori Inovasi Sosial: 8 *Platinum*, 1 *Gold*, 1 *Silver*
   - Kategori Inovasi Khusus: 2 penghargaan
   - *Local Hero*: 3 penghargaan
   - *Top Best 4 Participant*: 2 unit

10. Lestari *Awards* 2025 dari Kompas Gramedia
    PLN NP berhasil meraih Lestari *Award* 2025 untuk Kategori *Renewable Energy* melalui salah satu program unggulan perusahaan, BEST (Besai *Environmental Sustainability and Transformation*).

11. *Initiative Award* 2025 dari BusinessUpdate.id
    PLN NP meraih penghargaan pada kategori Education and Future Talent dalam *Initiative Award* 2025 melalui program SIPANDU DESI (Sistem Pengembangan Agrikultur Terpadu Desa Sinergi Energi) yang dijalankan oleh UP Tanjung Awar-awar. Program ini diakui sebagai praktik terbaik pelaksanaan TJSL karena mengintegrasikan

- Gold Award in the Education program category (Indramayu GU)
- Platinum Award in the Gender Equality & Social Inclusion program category (Gresik GU)

8. Circular Economy Sustainability Award (CESA) 2025 from Indonesia Circular Economy Forum
   PLN NP won two awards at the 2025 Circular Economy Sustainability Award (CESA). The awards were presented to Tenayan GU and Rembang GU.
   - Tenayan GU - Gold Winner in the Input Resources category through the Muda Jaya Organic Worm Cultivation Program.
   - Rembang GU - Gold Winner in the category of Output Resource Expansion and Recycling through the Trenggulunan Agro View Social and Environmental Responsibility Program.

9. Environmental & Social Innovation Awards (ENSIA) 2025 from PT Sucofindo
   PLN NP received 46 awards, achieved by 10 Units spread across Indonesia, with two PLN NP Units making it into the Top 4 Best Participants. The awards cover various categories, such as Environmental-Water Efficiency, B3 Waste Reduction, Emission Reduction, as well as Social Innovation and Local Hero.
   - Environment category: 11 Platinum, 9 Gold, 9 Silver
   - Social Innovation category: 8 Platinum, 1 Gold, 1 Silver
   - Special Innovation category: 2 awards
   - Local Hero: 3 awards
   - Top Best 4 Participant: 2 units

10. Lestari Awards 2025 from Kompas Gramedia
    PLN NP won the 2025 Lestari Award in the Renewable Energy category through one of the Company's flagship programs, BEST (Besai Environmental Sustainability and Transformation).

11. Initiative Award 2025 from BusinessUpdate.id
    PLN NP won an award in the Education and Future Talent category at the Initiative Award 2025 through the SIPANDU DESI program (Integrated Agricultural Development System of the Synergy Energy Village) run by UP Tanjung Awar-awar. This program is recognized as a best practice in the implementation of CSR because it integrates green technology,

teknologi hijau, kolaborasi multipihak, dan edukasi untuk pemberdayaan masyarakat serta penguatan ekosistem pengetahuan di bidang agrikultur.

12. Asia ESG *Positive Impact Award* 2025 dari Institutional Investor / Media Asia
PLN NP melalui program unggulannya, BEST (Besai *Environmental Sustainability and Transformation*) meraih Asia ESG *Positive Impact Award* 2025 untuk kategori *Renewable Energy*. Penghargaan ini merupakan penghargaan lanjutan setelah sebelumnya program unggulan PLN NP tersebut memenangkan Lestari *Award* 2025 yang diselenggarakan oleh Kompas Gramedia grup

multi-stakeholder collaboration, and education for community empowerment and the strengthening of the knowledge ecosystem in the field of agriculture.

12. Asia ESG Positive Impact Award 2025 fromInstitutional Investor/Media Asia
PLN NP, through its flagship program, BEST (Besai Environmental Sustainability and Transformation), won the Asia ESG Positive Impact Award 2025 in the Renewable Energy category. This award is a continuation of the previous win, where PLN NP's flagship program also received the Lestari Award 2025, organized by the Kompas Gramedia group.

Penanganan Pengaduan Masyarakat
Community Complaints Handling

PLN Nusantara Power menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik maupun keluhan kepada Perusahaan atas dampak operasi yang ditimbulkan melalui surat resmi, *e-mail*, telepon, *website* maupun tatap muka langsung dengan mendatangai Unit-Unit Pembangkit yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan pada saat dilaksanakan survei kepuasan masyarakat maupun saat kegiatan pelaksanaan program CSR berlangsung.

PLN Nusantara Power provides a means for the community to convey suggestions, criticisms, or complaints to the Company regarding the operational impacts caused through official letters, emails, phone calls, the website, or face-to-face interactions by visiting the Power Plant Units located close to their residential areas. In addition, the community can also submit complaints during the implementation of community satisfaction surveys or during CSR program activities.

Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat
Community Complaints Handling Mechanism

Pada tahun 2025, PLN Nusantara Power tidak menerima pengaduan dari masyarakat terkait dampak operasi Perusahaan.

In 2025, PLN Nusantara Power did not receive any complaints from the community regarding the Company's operational impacts.

Kinerja Sosial Aspek Pelanggan
Social Performance on Customer Aspect

Komitmen dan Kebijakan Terhadap Pelanggan
Commitment and Policy regarding Customers

Keberlanjutan dalam aspek pelanggan menekankan pentingnya membangun hubungan jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan, kualitas layanan, dan kepuasan yang konsisten. PLN NP perlu memastikan bahwa kebutuhan pelanggan tidak hanya terpenuhi saat ini, tetapi juga diantisipasi di masa depan melalui inovasi yang bertanggung jawab. Dengan mengedepankan transparansi, responsivitas, dan nilai tambah yang berkelanjutan, organisasi dapat menciptakan loyalitas pelanggan sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang stabil.

Sustainability in the customer aspect emphasizes the importance of building long-term relationships based on trust, service quality, and consistent satisfaction. PLN NP needs to ensure that customer needs are not only met currently but also anticipated in the future through responsible innovation. By prioritizing transparency, responsiveness, and sustainable added value, organizations can create customer loyalty while supporting stable business growth.

Perusahaan meyakini bahwa kepuasan Pelanggan merupakan elemen penting bagi keberlanjutan usaha PLN NP. Kepuasan pelanggan tercermin dari kemampuan PLN NP untuk memberikan produk dan layanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.

The Company believes that customer satisfaction is an important element for the sustainability of PLN NP's business. Customer satisfaction is reflected in PLN NP's ability to provide products and services that are not only of high quality but also environmentally friendly and socially responsible.

PLN NP menerapkan sejumlah ketentuan dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan di antaranya:

- Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code*) tahun 2020 yang mencakup aturan mengenai manajemen jaringan, penyambungan, operasi, perencanaan dan pelaksanaan operasi, transaksi tenaga listrik, pengukuran dan kebutuhan data;
- Prosedur Tetap Transaksi Tenaga Listrik Tahun 2023 yang mengatur komunikasi transaksi jual-beli tenaga listrik, mengatur ancillary services;
- Prosedur Tetap Deklarasi Kondisi Pembangkit dan Indeks Kinerja Pembangkit (DKPIKP) Sistem Jamali tahun 2023, Prosedur Tetap DKPIKP Sistem Sumatera tahun 2022, Prosedur Tetap DKPIKP Sistem Kalimantan tahun 2022, Prosedur Tetap DKPIKP Sistem Sulawesi tahun 2021 yang mengatur status kondisi pembangkit, tata cara komunikasi operasi, dan perhitungan kinerja pembangkit;

PLN NP implements several provisions to provide the best services to customers, including:

- The 2020 Grid Code, which includes rules on network management, connections, operations, planning and operational execution, electricity transactions, measurement, and data requirements;
- The 2023 Standard Procedure for Electricity Transactions, which governs the communication of electricity sales transactions and ancillary services;
- Fixed Procedure for Declaration of Power Plant Condition and Power Plant Performance Index (DKPIKP) of Jamali System in 2023, Fixed Procedure for DKPIKP of Sumatera System in 2022, Fixed Procedure for DKPIKP of Kalimantan System in 2022, Fixed Procedure for DKPIKP of Sulawesi System in 2021, which regulates the status of power plant condition, operating communication procedures, and calculation of power plant performance;

- SPLN (Standar PT PLN) K7.001:2026 Indikator Kinerja Pembangkit;
- Pedoman Operasi Baku Komunikasi Pengelolaan Tenaga Listrik Tahun 2020; serta
- Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Desember 2022, Amandemen Desember 2023.

Sebagai salah satu upaya dalam mendukung komitmen terhadap Pelanggan, PLN NP telah merumuskan Standar pelayanan berupa kesiapan operasi dan energi listrik serta jasa *Operation & Maintenance* (O&M) diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dan Kontrak Perjanjian Jasa O&M antara PLN NP dengan PT PLN (Persero) sebagai pelanggan tunggal. Faktor-faktor yang menjadi indikator tingkat kualitas layanan pun dijadikan target KPI Korporat setiap tahun, sehingga pencapaian indikator tersebut dipantau secara berkala oleh Manajemen PLN NP. Indikator tersebut antara lain *Equivalent Availability Factor* (EAF) sebagai indikator faktor kesiapan pembangkit untuk beroperasi, *Equivalent Force Outage Rate (*EFOR) sebagai indikator untuk mengukur tingkat ketidaksiapan unit pembangkit yang disebabkan oleh gangguan peralatan (*outage*) dan *derating*.

- SPLN (PT PLN Standard) K7.001:2026 Power Plant Performance Indicators;
- The 2020 Standard Operating Guidelines for Electricity Management Communication; and
- Power Purchase Agreement (PPA) December 2022, Amendment December 2023

As one of the efforts to support the commitment to Customers, PLN NP has formulated Service Standards in the form of operational readiness and electrical energy, as well as Operation & Maintenance (O&M) services regulated in the Power Purchase Agreement (PPA) and the O&M Service Agreement Contract between PLN NP and PT PLN (Persero) as the sole customer. Factors that serve as indicators of service quality levels are also set as Corporate KPI targets each year, so the achievement of these indicators is monitored periodically by PLN NP Management. These indicators include the Equivalent Availability Factor (EAF) as an indicator of the power plant's readiness to operate, and the Equivalent Force Outage Rate (EFOR) as an indicator to measure the unavailability of the power plant units caused by equipment malfunctions (outages) and derating.

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Aspek Pelanggan
Realization of Customer-Related Corporate Social Responsibility Program

Peningkatan Layanan Pelanggan
Customer Service Improvement

Peningkatan layanan pelanggan menjadi prioritas utama PLN NP dalam upaya menciptakan pengalaman yang lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui penguatan kualitas interaksi dengan pelanggan, percepatan waktu respons, serta penyediaan berbagai kanal layanan yang mudah diakses. Perusahaan juga secara aktif mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pelanggan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar lebih profesional dan solutif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Perusahaan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Pelanggan yaitu:

PLN NP's top priority is to improve customer service in an effort to create a better and more sustainable experience. It is achieved through strengthening the quality of interactions with customers, accelerating response times, and providing various easily accessible service channels. The Company also actively collects and analyzes customer feedback as a basis for continuous improvement, while simultaneously enhancing the competence of human resources to be more professional and solution-oriented. The steps taken by the Company in an effort to improve service to Customers are as follows:

1. Memberikan kemudahan layanan bagi Pelanggan untuk memperoleh informasi terkait produk, layanan, dan operasional bisnis Perusahaan di *Call Center*, website, dan media sosial Perusahaan;
2. Melakukan survei kepuasan Pelanggan;
3. Menangani keluhan serta pendapat Pelanggan untuk terus menyempurnakan proses dan kualitas pelayanan;
4. Mempercepat rangkaian proses bisnis dan pekerjaan lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lancar dan optimal;
5. Memberi kepastian dalam penyelesaian klaim sehingga dapat meningkatkan kepuasan Pelanggan.

1. Providing convenience services for Customers to obtain information related to the Company's products, services, and business operations in the Call Center, website, and social media;
2. Conducting customer satisfaction surveys;
3. Handling customer complaints and opinions to continuously improve the process and quality of service;
4. Accelerating a series of business processes and other work to provide smooth and optimal service;
5. Providing certainty in claim settlement so as to increase customer satisfaction.

Survei Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Survey

Survei kepuasan pelanggan memungkinkan PLN NP untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam pelayanan. Survei kepuasan pelanggan merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan PLN NP untuk mengukur tingkat kepuasan serta memahami kebutuhan dan harapan pelanggan secara lebih mendalam. Melalui survei kepuasan pelanggan, PLN NP dapat mengumpulkan saran dan masukan dari pelanggan mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap layanan PLN NP. Informasi ini sangat berharga untuk pengembangan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan.

Customer satisfaction surveys allow PLN NP to identify areas that need improvement in service. Customer satisfaction surveys are one of the crucial instruments used by PLN NP to measure satisfaction levels and understand customer needs and expectations more deeply. Through customer satisfaction surveys, PLN NP can gather suggestions and feedback from customers regarding their needs and expectations for PLN NP's services. This information is priceless for the development of new products and services that better align with customer desires.

Hasil Penilaian Pelanggan PLN NP
PLN NP Customer Assessment Results

Nilai Kepuasan, Ketidakpuasan dan Keterikatan Pelanggan PLN NP
Customer Satisfaction, Dissatisfaction, and Engagement Scores of PLN NP

No	Jenis Nilai Type of Score	Nilai (%) Score (%)		
		2023	2024	2025
A	Nilai Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Score	84,80	87,26	87,27
B	Nilai Ketidakpuasan Pelanggan Customer Dissatisfaction Score	14,35	11,59	12,37
C	Nilai Keterikatan Pelanggan Customer Engagement Score	96,93	98,47	98,69

Secara keseluruhan, survei kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh PLN NP memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Dengan menggunakan hasil survei sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan, PLN NP tidak hanya dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan layanan, tetapi juga dapat berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

Overall, customer satisfaction surveys conducted by PLN NP play a crucial role in improving service quality and customer satisfaction. By using the survey results as a basis for continuous improvement, PLN NP can not only identify and improve service weaknesses, but can also innovate to meet evolving customer needs.

Akses Informasi Layanan dan Pengaduan Pelanggan

Access to Service Information and Customer Complaints

PLN NP menyediakan fasilitas pengaduan atau keluhan pelanggan melalui Aplikasi MAPS (*Monitoring Action Plan Survey*). Aplikasi ini berfungsi sebagai media dalam memonitoring progress penyelesaian hasil dari survei kepuasan pelanggan yang telah dilakukan sebelumnya dan juga menjadi media komunikasi yang mendukung interaksi langsung antara Perusahaan dan pengguna jasa dalam memenuhi berbagai kebutuhan layanan, termasuk permintaan informasi (*inquiry*), penyampaian saran dan apresiasi, serta penanganan keluhan pelanggan secara efisien (*complaint handling*).

PLN NP provides a customer complaint or grievance facility via the MAPS Application (Monitoring Action Plan Survey). This application serves as a medium to monitor the progress of resolving the results of previously conducted customer satisfaction surveys. Additionally, it acts as a communication medium that supports direct interaction between the Company and service users in meeting various service needs, including information requests (inquiry), submission of suggestions and appreciation, as well as efficient customer complaint handling (complaint handling).

Untuk meningkatkan jangkauan media Aplikasi MAPS kepada pengguna jasa di seluruh Indonesia, Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui beberapa sarana berikut:

- Situs resmi: maps.plnnusantarapower.co.id
- Telepon: 031-8283180
- Faks : 031-8283192
- Surat: Jl. Ketintang Baru No. 11 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60231

To increase the media reach of the MAPS Application to service users throughout Indonesia, customers can submit complaints through the following channels:

- Official sites: maps.plnnusantarapower.co.id
- Telephone: 031-8283180
- Facsimile : 031-8283192
- Mail: Jl. Ketintang Baru No. 11 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60231

Seluruh pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Bidang *Contract Management and Customer Relations*. Pengaduan atau keluhan yang masuk akan dikelompokkan berdasarkan dimensi kepuasan pelanggan untuk setiap produk sebagaimana ditetapkan dalam PLN NP IMS 6.2.3 Mengelola Keluhan Pelanggan. Mekanisme pengaduan pelanggan dan tindaklanjutnya diuraikan dalam skema berikut.

All complaints will be followed up by the Contract Management and Customer Relations Department. Complaints received will be categorized based on customer satisfaction dimensions for each product as stipulated in PLN NP IMS 6.2.3 Managing Customer Complaints. The customer complaint mechanism and follow-up actions are outlined in the following scheme.

Mekanisme Pengaduan Pelanggan
Customer Complaint Mechanism

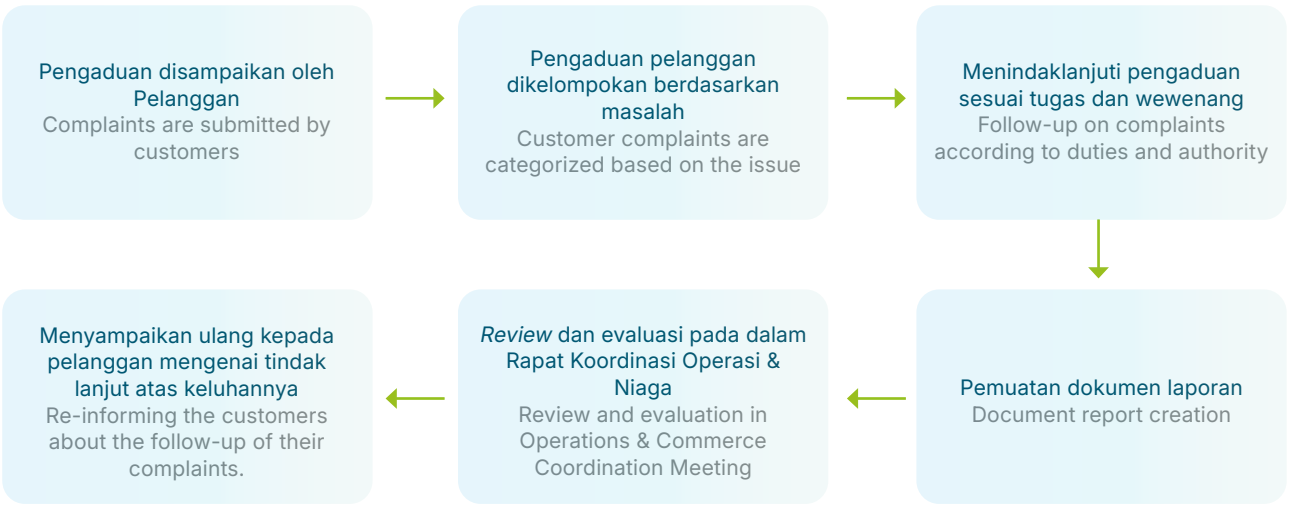

Hingga akhir tahun 2025, dalam aplikasi MAPS PLN NP menerima sebanyak 525 laporan keluhan pelanggan (241 untuk Direktorat Pembangkit Batubara dan 284 untuk Direktorat Pembangkit Gas dan Non Batubara), dan seluruh keluhan tersebut telah selesai ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi PLN NP dalam melindungi hak pelanggan untuk didengar pendapat dan keluhannya sehingga layanan yang diperoleh dapat sesuai dengan kontrak perjanjian.

Until the end of 2025, in the MAPS application, PLN NP received a total of 525 customer complaint reports (241 for the Coal Power Plant Directorate and 284 for the Gas and Non-Coal Power Plant Directorate). All of these complaints have been fully followed up on. It demonstrates PLN NP's high commitment to protecting customers' rights to have their opinions and complaints heard, ensuring that the services provided are in accordance with the contractual agreement.

Perlindungan Privasi Pelanggan
Customer Data Confidentiality

PLN NP berkomitmen menjamin kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh pelanggan termasuk menjaga nama baik pelanggan sebagaimana yang diatur dalam *Code of Conduct*. Informasi berupa keluhan pelanggan yang disampaikan melalui aplikasi MAPS (*Monitoring Action Plan Survey*) dikelola secara professional oleh PLN NP, sehingga hanya pihak terkait yang memiliki akses terhadap informasi tersebut guna menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan tersebut. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keluhan pelanggan diharapkan dapat menjaga kepercayaan pelanggan sehingga kualitas layanan PLN NP dapat terus dikembangkan.

PLN NP is committed to ensuring the confidentiality of information provided by customers, including protecting customer reputations as stipulated in the Code of Conduct. Customer complaints submitted through MAPS (Monitoring Action Plan Survey) Application are managed professionally by PLN NP, with access restricted to relevant parties to follow up and resolve complaints. The use of technology in managing customer complaints is expected to maintain customer trust, allowing PLN NP to continuously develop service quality.

Pengembangan dan Inovasi Produk Berkelanjutan

Sustainable Product Development and Innovation

PLN NP menganggap bahwa salah satu indikator kepuasan pelanggan terletak pada pengembangan dan inovasi produk yang terus dilakukan. Dalam upaya meningkatkan layanan, perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta memanfaatkan teknologi terbaru. Dengan adanya inovasi yang berkelanjutan, PLN NP berharap dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan, meningkatkan pengalaman mereka, dan memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, PLN NP terus melalukan inovasi dan pengembangan terhadap layanan kepada pelanggan. Pengembangan dan inovasi produk berkelanjutan serta pengembangan pelayanan pelanggan yang dilakukan PLN NP pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *Co-firing* berkelanjutan (*Sustainable Biomass Co-firing*)
   Co-firing biomassa berkelanjutan telah diuji coba dan dikomersialisasikan di 25 unit pembangkit PLTU batu bara PLN NP. Sampai dengan tahun 2025, PLN NP telah memproduksi energi hijau sebesar 1.041 GWh dengan pemanfaatan biomassa sebanyak 1.004,59 ribu ton. Untuk peningkatan produksi energi hijau, PLN NP juga telah melakukan beberapa pengujian biomassa alternatif untuk masing-masing unit termasuk pemanfaatan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK), Bagasse Tebu, dan *Oil Palm Mesocarp Fiber* (OPMF). Selain itu, telah dilakukan pengujian 100% *co-firing* biomass pada 7 unit tersebar serta kajian konversi PLTU menjadi PLTBm.

2. Utilisasi Ekosistem *Green Hydrogen*
   Beberapa program yang mendukung ekosistem hidrogen yang bersumber dari *green hydrogen* yang dihasilkan oleh hydrogen plant dengan sumber energi dari PLTS dan REC (*Renewable Energy Certificate*) di unit PLN NP. Saat ini terdapat 8 unit *green hydrogen plant* beroperasi yang tersebar di unit pembangkit PLN NP di Pulau Jawa. Selain itu, utilisasi *hydrogen fuel cell generator* (HFCG) yang telah dilakukan pengujian pengoperasian di UP Muara Karang, ikut berpartisipasi dalam *Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition* (GHES) 2025. Dalam kegiatan ini, PLN NP juga membawa tiga inovasi unggulan lainnya yaitu, Hydrogen Refueling Station, mobil listrik hybrid berbahan bakar hidrogen H-E Nusantara, serta teknologi produksi *Green Hydrogen.*

PLN NP considers that one of the indicators of customer satisfaction lies in continuous product development and innovation. To improve services, the Company is committed to delivering products and services that meet customer needs and utilize the latest technology. With continuous innovation, PLN NP hopes to provide significant added value to customers, improve their experience, and ensure long-term sustainability. Therefore, PLN NP continues to innovate and develop services to customers. The sustainable product development, innovation, and customer service development carried out by PLN NP in 2025 are as follows:

1. Sustainable Co-Firing Implementation (Sustainable Biomass Co-firing)
   Sustainable biomass co-firing has been tested and commercialized in 25 units of PLN NP's Coal CFPP. Until 2025, PLN NP produced 1,041 GWh of green energy with 1,004.59 thousand tons of biomass utilization. To increase green energy production, PLN NP also carried out several alternative biomass tests for each unit, including the utilization of Waste Recycled Banknotes (LRUK), Sugarcane Bagasse, and Oil Palm Mesocarp Fiber (OPMF). In addition, 100% biomass co-firing testing has been carried out on seven scattered units, as well as a study on the conversion of CFPP to Biomass Power Plant.

2. Utilization of the Green Hydrogen Ecosystem
   Several programs support the hydrogen ecosystem sourced from green hydrogen produced by hydrogen plants with energy sources from SPP and REC (Renewable Energy Certificate) in PLN NP units. Currently, there are eight green hydrogen plant units operating in PLN NP's power plant units in Java. Additionally, the utilization of a hydrogen fuel cell generator (HFCG), which has been tested in Muara Karang GU, participates in the Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2025. At this event, PLN NP also showcased three other flagship innovations: a Hydrogen Refueling Station, the H-E Nusantara hydrogen-powered hybrid electric vehicle, and green hydrogen production technology.

3. Kajian *Energy Storage System*
   PLN NP telah mengkaji pemanfaatan teknologi *Battery Energy Storage System* (BESS) skala besar pada sistem kelistrikan Sulutgo dan Jamali untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan akibat peningkatan penetrasi pembangkit EBT yang cenderung bersifat *intermittent*. Kerja sama kajian dilakukan dengan pihak Insitut Teknologi Bandung.

4. *Carbon Capture Utilization & Storage* (CCUS)
   PLN NP telah melakukan inisiasi kajian dan kerja sama studi terkait CCUS dan pemanfaatannya di Pembangkit Listrik PLN NP bersama dengan akademisi, badan riset, ataupun perusahaan *technology provider*. Beberapa akademisi seperti dengan ITB, badan riset lokal seperti dengan BRIN, ataupun internasional seperti Jera, JGC, NEDO untuk PLTU-PLTU dengan skema CCUS menggunakan teknologi *Regenerative Amine*. Selain itu, contoh kerja sama studi PLN NP dengan entitas lain, seperti dengan Pertamina, GE, dan BP untuk CCUS untuk PLTGU. Kemudian, PLN NP juga berencana untuk menginisiasi riset *pilot project* CCU menggunakan teknologi *Micro Algae* yang akan di-*install* di PLTGU Muara Karang.

3. Energy Storage System Study
   PLN NP has studied the utilization of large-scale Battery Energy Storage System (BESS) technology in the Sulutgo and Jamali electrical systems to support the reliability of the electrical system due to the higher adoption of intermittent NRE sources. The collaborative study was conducted with the Bandung Institute of Technology.

4. Carbon Capture Utilization & Storage (CCUS)
   PLN NP has initiated studies and collaborative research related to CCUS and its utilization in PLN NP Power Plants, together with academics, research institutions, and technology provider companies. Some academics include collaborations with ITB, local research institutions like BRIN, and international ones like Jera, JGC, and NEDO for coal-fired power plants with CCUS schemes using Regenerative Amine technology. Additionally, examples of PLN NP's collaborative studies with other entities include Pertamina, GE, and BP for CCUS in CCPP. Furthermore, PLN NP also plans to initiate a pilot project research on CCU using Micro Algae technology to be installed at the Muara Karang CCPP.

Biaya Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelanggan
Expenditures of Customer-related Corporate Social Responsibility Program

Selama tahun 2025 PLN NP mengeluarkan biaya sebesar Rp1,02 Miliar untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pelanggan yaitu untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan survei kepuasan pelanggan PLN NP mulai dari evaluasi, pelaksanaan dan tindak lanjutnya.

During 2025, PLN NP incurred costs amounting to Rp1.02 billion for the implementation of the Company's social responsibility toward Customers, specifically for the series of customer satisfaction survey activities of PLN NP, including evaluation, execution, and follow-up.

Kinerja Sosial Aspek Ketenagakerjaan
Social Performance on Employment Aspects

Komitmen dan Kebijakan Ketenagakerjaan dan K3
Commitment and Policy regarding Employment and OHS

Komitmen kinerja sosial pada aspek ketenagakerjaan mencerminkan upaya PLN NP dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan inklusif bagi seluruh pekerja. PLN NP berupaya memastikan terpenuhinya hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk

The commitment to social performance in the employment aspect reflects PLN NP's efforts to create a fair, safe, and inclusive work environment for all employees. PLN NP strives to ensure that employees' rights are fulfilled in accordance with applicable labor regulations, including fair wages, reasonable working

dalam hal upah yang layak, jam kerja yang wajar, serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan juga menjadi fokus penting untuk mendukung produktivitas dan pertumbuhan karier karyawan. Dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi, perusahaan berkomitmen membangun hubungan industrial yang harmonis serta mendukung terciptanya kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.

hours, and guarantees of occupational safety and health. In addition, competency development through training and skill enhancement is also a key focus to support employee productivity and career growth. By applying the principles of equality and non-discrimination, the Company is committed to building harmonious industrial relations and supporting the sustainable welfare of the workforce.

Pelaksanaan inisiatif keberlanjutan tersebut mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain fokus pada ketenagakerjaan, Perusahaan juga menempatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.

The implementation of these sustainability initiatives refers to the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower. In addition to focusing on employment, the Company also places Occupational Health and Safety (OHS) as a top priority. This is in line with the provisions in Law Number 1 Year 1970 on Occupational Safety, Law Number 30 Year 2009 on Electricity, as well as Government Regulation Number 50 Year 2012 on the Implementation of the OHS Management System.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, PLN NP secara aktif menjalankan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terbebas dari potensi risiko. Upaya ini dilakukan demi menjaga kesejahteraan fisik dan mental seluruh karyawan. Pengelolaan K3 yang baik tidak hanya mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, tetapi juga memperkuat budaya keselamatan di seluruh lini operasional.

In human resource management, PLN NP actively carries out continuous evaluation and improvement to create a work environment that is safe, healthy, and free from potential risks. This effort is made to maintain the physical and mental well-being of all employees. The good OHS management not only reduces the risk of work accidents and occupational diseases, but also strengthens the safety culture in all operational lines.

Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan standar ISO 45001:2018 dan PP 50 Tahun 2012, dengan target utama mencapai zero accident atau nihil kecelakaan kerja. Keseriusan ini juga tercermin dalam Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi PLN NP, Safety Golden Rules, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

This commitment is realized through the implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) in accordance with the ISO 45001: 2018 standard and PP 50 of 2012, with the main target of achieving zero accidents. This seriousness is also reflected in the PLN NP Integrated Management System Policy, Safety Golden Rules, and Collective Labor Agreement (CLA).

Manajemen PLN NP turut aktif sebagai bagian dari Tim Perunding dan Tim Perumus dalam penyusunan dan kesepakatan PKB. Saat ini, perusahaan telah menerapkan PKB hasil kesepakatan antara PLN NP dan Serikat Pekerja PJB untuk periode 2022–2024, dengan Nomor PT PJB 0001.K/021/DIR/2022 dan SP PJB 003.K/SP-DPP/2022. PKB ini telah didaftarkan secara resmi ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui Nomor KEP. 4/HI.00.01/00.0000.221123013/B/I/2023 pada tanggal 25 Januari 2023.

PLN NP management actively participated as part of the Negotiating Team and Formulation Team in the preparation and agreement of the PKB. Currently, the Company has implemented the CLA agreed between PLN NP and PJB Labor Union for the period 2022-2024, with PT PJB Number 0001.K/021/DIR/2022 and SP PJB 003.K/SP-DPP/2022. This PKB has been officially registered with the Ministry of Manpower through Number KEP. 4/HI.00.01/00.0000.221123013/B/I/2023 on January 25, 2023.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Ketenagakerjaan
Employment-related Corporate Social Responsibility Program

Program-program yang telah dijalankan oleh PLN NP dalan inisiatif keberlanjutan aspek ketenagakerjaan pada tahun 2025 diantaranya:

The programs implemented by PLN NP in sustainable employment initiatives in 2025 include:

Kesetaraan dalam Program Peningkatan Kompetensi dan Keahlian Karyawan
Equality in Employee Competency and Skills Enhancement Program

Pengembangan Kompetensi SDM merupakan bagian dari Nawa Karsa Direktorat SDM sebagai manifestasi dari komitmen PLN NP dalam mengutamakan pengembangan karyawan dan keberlanjutan Perusahaan. PLN NP memandang pentingnya penguatan kompetensi sebagai fondasi utama untuk menjamin kelancaran operasional dan peningkatan kinerja unit-unit pembangkit yang telah diintegrasikan. Program Pengembangan Kompetensi *Human Capital* yang diinisiasi oleh PLN NP disusun dengan cermat melalui analisis kebutuhan pelatihan (*Training Need Analysis*/TNA) yang komprehensif, mengarah pada penyusunan *Competency Based Training* (CBT), *Performance Based Training* (PBT), dan Program Pembelajaran Strategis.

HR Competency Development is part of the HR Directorate's Nawa Karsa as a manifestation of PLN NP's commitment to prioritizing employee development and Company sustainability. PLN NP views the importance of strengthening competencies as the main foundation to ensure the smooth operation and improved performance of the integrated generating units. The Human Capital Competency Development Program initiated by PLN NP is carefully prepared through a comprehensive Training Need Analysis (TNA), leading to the preparation of Competency Based Training (CBT), Performance Based Training (PBT), and Strategic Learning Programs.

Pengembangan kompetensi dan keahlian karyawan PLN NP dilaksanakan secara terpusat oleh PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan beserta Unit Pelaksana Diklat di bawahnya. Kegiatan Pendidikan, pelatihan dan pengembangan pegawai yang telah dilaksanakan yaitu:

The development of competencies and expertise of PLN NP employees is carried out centrally by PT PLN (Persero) Education and Training Center and the Education and Training Implementation Unit under it. Education, training, and employee development activities that have been carried out are:

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
Training and Competency Development Program

- **Diklat Penjenjangan**
  Upgrading Training
- **Program Pendidikan Formal**
  Formal Education Program
- **Program Magang**
  Internship Program
- **Program *Benchmarking***
  Benchmarking Program
- **Program Sertifikasi**
  Certification Program
- **Program Pembelajaran Profesi**
  Professional Learning Program
- **Program Pembekalan Masa Purnabakti**
  Retirement Debriefing Program

Kesetaraan dalam Program Kesejahteraan Karyawan

Equality in Employee Welfare Program

Kesetaraan dalam program kesejahteraan karyawan merupakan prinsip penting yang diterapkan PLN NP untuk memastikan bahwa seluruh pekerja memperoleh hak dan manfaat yang sama tanpa adanya diskriminasi. Program kesejahteraan dirancang secara inklusif agar dapat diakses oleh seluruh karyawan berdasarkan ketentuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan perbedaan *gender*, maupun latar belakang lainnya.

PLN NP telah menerapkan sistem remunerasi yang adil, setara, dan kompetitif, sejalan dengan standar industri sejenis. Remunerasi yang diberikan kepada karyawan mencakup dua bentuk utama, yaitu penghargaan ekstrinsik (kompensasi dan manfaat karyawan) dan penghargaan instrinsik (program ataupun fasilitas lainnya) diantaranya:

- Kompensasi Tetap, berupa *Pay for Person* (P1)
- Kompensasi tidak tetap
  - Kompensasi Jangka Pendek terdiri atas
    a) *Pay for Position* (P2)
    b) *Pay for Performance* (P3)
    c) Tunjangan Hari Raya
    d) Tunjangan Cuti Tahunan
  - Kompensasi Jangka Panjang terdiri atas
    a) Tunjangan Cuti Besar
    b) Penghargaan Kesetiaan Kerja
    c) Kompensasi Pelepasan
    d) Kompensasi selama Masa Persiapan Pensiun
- Manfaat Karyawan
  - Manfaat Umum
    terdiri atas jaminan sosial (Kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiunan dan kematian), hak cuti, pemeliharaan Kesehatan, pakaian dinas, bantuan akomodasi terkait mutasi, bantuan pinjaman pembelian rumah atau perawatan rumah dan bantuan kematian/pemakaman
  - Manfaat Khusus
    terdiri atas bantuan/fasilitas kendaraan, fasilitas kerja, fasilitas tenaga pengamanan, keanggotaan profesi, kartu kredit korporat, dan keanggotaan klub tertentu sesuai dengan kebutuhan
- Penghargaan Intrinsik
  - Program Pembelajaran dan Sertifikasi Kompetensi/Profesi

Equality in employee welfare programs is an important principle implemented by PLN NP to ensure that all workers receive the same rights and benefits without discrimination. The welfare programs are designed inclusively to be accessible to all employees based on established provisions and needs, not based on gender differences or other backgrounds.

PLN NP has implemented a fair, equitable, and competitive remuneration system, in line with similar industry standards. The remuneration provided to employees includes two main forms, namely extrinsic rewards (compensation and employee benefits) and intrinsic rewards (programs or other facilities), among others:

- Fixed Compensation, in the form of Pay for Person (P1)
- Non-fixed compensation
  - Short-term Compensation consists of
    a) Pay for Position (P2)
    b) Pay for Performance (P3)
    c) Religious Holiday Allowance
    d) Annual Leave Allowance
  - Long term Compensation consists of
    a) Grand Leave Allowance
    b) Longevity Award
    c) Release Compensation
    d) Compensation during the Retirement Preparation Period
- Employee Benefits
  - General Benefits
    consists of social security (health, work accidents, old age, pensions and death), leave entitlements, health care, official clothing, accommodation assistance related to mutations, assistance with home purchase loans or home maintenance and death/funeral assistance.
  - Special Benefits
    consists of vehicle assistance/facilities, work facilities, security personnel facilities, professional membership, corporate credit cards, and membership of certain clubs in accordance with the needs of the organization.
- Intrinsic Rewards
  - Learning Program and Competency/Profession Certification

- Program Keseimbangan Hidup
- Bantuan hukum
- Pengakuan (*Recognition*)
- Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Karyawan bangga (*privilege*)

- Life Balance Program
- Legal aid
- Recognition
- Opportunity to do something that makes Employees proud (privilege)

PLN NP secara rutin melakukan penyesuaian remunerasi setiap tahun sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kesejahteraan karyawan. Sistem pengupahan yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan pemerintah dan berlaku secara setara bagi seluruh karyawan, baik laki-laki maupun perempuan. Selain gaji, perusahaan juga memberikan berbagai tunjangan seperti cuti tahunan, cuti besar, serta penghargaan kesetiaan kerja (winduan) sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi karyawan. Tidak hanya itu, PLN NP juga menyediakan Bantuan Ganti Rugi bagi karyawan yang mengalami musibah akibat peristiwa luar biasa atau kecelakaan kerja, sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

PLN NP routinely adjusts remuneration every year as a commitment to maintaining employee welfare. The wage system implemented is in accordance with government regulations and applies equally to all employees, both men and women. In addition to salaries, the Company provides various allowances, such as annual leave, long leave, and work loyalty awards (eight years) as a form of appreciation for employee dedication. Moreover, PLN NP also provides Compensation Assistance for employees who experience misfortunes due to extraordinary events or work accidents, as a manifestation of the Company's concern in providing protection and support for the welfare of the workforce.

Program Purnabakti
Retirement Program

Dalam rangka menjamin keberlanjutan kesejahteraan karyawan di masa depan, PLN NP menerapkan kebijakan program pensiun yang bersifat komprehensif. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan finansial bagi karyawan setelah memasuki masa purna tugas, sehingga tetap memiliki jaminan penghasilan yang layak. PLN NP juga memberikan kontribusi dalam program pensiun tersebut sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan jangka panjang karyawan. Dengan adanya kebijakan ini, perusahaan berupaya memberikan rasa aman serta mendukung perencanaan masa depan karyawan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

To ensure the sustainability of employee welfare in the future, PLN NP implements a comprehensive pension program policy. This program is designed to provide financial protection for employees after they enter retirement, ensuring they still have a decent income guarantee. PLN NP also contributes to this pension program as a form of the Company's responsibility toward the long-term welfare of its employees. With this policy, the Company strives to provide a sense of security and support for employees' future planning in a more structured and sustainable manner.

Karyawan yang mencapai batas usia pensiun yaitu 56 tahun mendapatkan manfaat pensiun dari PLN NP. Beberapa program jaminan sosial dan hari tua yang diterapkan oleh PLN NP antara lain:

Employees who reach the retirement age of 56 years receive pension benefits from PLN NP. Some of the social security and pension programs implemented by PLN NP include:

- Program Pensiun Manfaat Pasti
  Program ini dikelola oleh pihak Dana Pensiun PLN (Persero) atau DP-PLN dengan pendanaan yang diperoleh DP-PLN berasal dari iuran Peserta sebesar 6% x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)

- Defined Benefit Pension Program
  This program is managed by the PLN (Persero) Pension Fund or DP-PLN with funding obtained by DP-PLN from Participant contributions of 6% x Basic Pensionable Income (PhDP) and Employer

dan iuran Pemberi Kerja sebesar 19,14% x PhDP. Hal ini diatur dan sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) Nomor Nomor 005.P/DIR/2024 dan Surat dari Direktur Utama Dana Pensiun PLN Nomor 074/KPS.06/DIRUT/PLN/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025.

- Iuran Pasti
  Program ini dikelola oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk karyawan dengan iuran Peserta sebesar 6% x *Pay for Person* (P1) serta iuran Pemberi Kerja sebesar 4% x P1.

PLN NP juga mengikutsertakan seluruh karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan berupa program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Pensiun (JP) serta turut memberikan pendampingan masa pensiun melalui program Masa Persiapan Pensiun (MPP). Pensiunan dan keluarganya mendapatkan bantuan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 039.K/010/ DIR/2017 tentang Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Karyawan Yang Telah Berhenti Bekerja (Pensiunan) di PLN NP.

contributions of 19.14% x PhDP. This is regulated and in accordance with the Decision of the Board of Directors of PT PLN (Persero) as the Founder of the PT PLN (Persero) Pension Fund Number 005.P/DIR/2024 and Letter from the President Director on PLN Pension Funds Number 074/KPS.06/DIRUT/PLN/VI/2025 dated June 16, 2025.

- Defined Contribution
  This program is managed by the Financial Institution Pension Fund (DPLK) for employees with Participant contributions of 6% x Pay for Person (P1) and Employer contributions of 4% x P1.

PLN NP also includes all employees in the Social Security for Employment program in the form of Old Age Insurance (JHT), Work Accident Insurance, Death Insurance, Job Loss Insurance, and Pension Insurance (JP) and also provides retirement assistance through the Retirement Preparation Period (MPP) program. Retirees and their families receive health care assistance in accordance with the Decree of the Board of Directors Number 039.K/010/ DIR/2017 concerning Health Care Assistance for Employees Who Have Stopped Working (Retirees) in PLN NP.

Bidang Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja dan Keamanan

Occupational Health, Safety, and Security

Kesehatan kerja, keselamatan, dan keamanan merupakan aspek fundamental dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. PLN NP berkomitmen untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan dengan memprioritaskan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja melalui penerapan sistem manajemen K3 yang terstandarisasi. Upaya ini mencakup identifikasi dan pengendalian risiko kerja, penyediaan alat pelindung diri, serta pelaksanaan pelatihan keselamatan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan karyawan. Selain itu, perusahaan juga secara rutin melakukan inspeksi dan evaluasi terhadap potensi bahaya di tempat kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dengan penerapan prinsip keselamatan yang ketat, perusahaan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung keberlangsungan operasional secara optimal.

Occupational health, safety, and security are fundamental aspects in creating a productive and sustainable work environment. PLN NP is committed to ensuring that all operational activities run by prioritizing the protection of workers' health and safety through a standardized OHS management system. These efforts include the identification and control of work risks, the provision of personal protective equipment, and the implementation of regular safety training to enhance employee awareness and preparedness. In addition, the Company regularly conducts inspections and evaluations of potential hazards in the workplace to prevent occupational accidents. With the implementation of strict safety principles, the Company strives to create a work environment that is safe, healthy, and supports the optimal continuity of operations.

Pembahasan mengenai aspek keselamatan dan kesehatan kepada karyawan juga turut disosialisasikan Perusahaan seawal mungkin melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tercantum dalam Bab IX tentang Perlengkapan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terdiri dari 6 Pasal yaitu pasal 52 sampai 57, diantaranya membahas mengenai:

- Tempat dan Lingkungan Kerja;
- Kewajiban mematuhi K3;
- Penyediaan perlengkapan dan peralatan pendukung K3 beserta prosedur pendukungnya;
- Sarana pelayanan kesehatan dan Fasilitas pemeliharaan kesehatan;
- Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK); serta
- Kompensasi rehabilitas serta santunan.

Discussions on safety and health aspects are communicated to employees as early as possible through the Collective Labor Agreement (PKB), outlined in Chapter IX on Work Equipment, Safety, and Health, consisting of six articles (Articles 52 to 57), covering:

- Workplace and Environment
- K3 Compliance Obligations
- Provision of K3 Equipment and Procedures
- Health Services and Maintenance Facilities
- Work Accidents and Occupational Diseases
- Rehabilitation and Compensation

PLN NP melalui bidang HSE juga menjalankan beberapa program penguatan budaya & sistem manajemen K3, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

PLN NP's HSE department also implements several programs to strengthen OHS culture and management systems, including:

Program Penguatan budaya dan Sistem Manajemen K3
OHS Culture and Management System Strengthening Program

Safety Total Patrol	Merupakan kegiatan patroli K3 rutin oleh unit yang dilakukan para leader unit, karyawan dan tenaga alih daya. Selain itu, dilakukan juga pengecekan & pemeliharaan rutin Infrastruktur K3 beserta kesiapannya untuk mengantisipasi kebutuhan operasional K3 termasuk untuk kondisi *emergency* dengan turut serta melakukan implementasi SMK3 dan implementasi ISO 45001:2018. Adapun hasil dari kegiatan patroli ini akan ditampilkan setiap minggu melalui *Dashboard* K3 bagian monitor untuk *monitoring* tindak lanjut ketidaksesuaian yang ada di tempat kerja.	It is a routine OHS patrol activity by the unit conducted by unit leaders, employees, and outsourced workers. In addition, routine checks and maintenance of OHS infrastructure and its readiness are also carried out to anticipate OHS operational needs, including for emergency conditions, by participating in the implementation of SMK3 and ISO 45001:2018. The results of these patrol activities will be displayed weekly via the OHS Dashboard in the monitoring section to track the follow-up on any discrepancies found in the workplace.
Implementasi CSMS CSMS Implementation	Sampai dengan bulan Desember 2025 persentase implementasi CSMS mencapai 75% untuk seluruh Unit. Dari total vendor yang terdaftar di PLN NP sebanyak 1.842 vendor sudah lolos CSMS, 1.178 vendor tidak lolos CSMS, 1.003 vendor inprogress penilaian prakualifikasi. Adapun untuk total vendor yang sudah terdaftar di web CSMS adalah 4.023 vendor.	As of December 2025, the percentage of CSMS implementation reached 75% for all Units. Out of the total vendors registered with PLN NP, 1,842 vendors have passed CSMS, 1,178 vendors did not pass CSMS, and 1,003 vendors are undergoing prequalification assessment. The total number of vendors registered on the CSMS website is 4,023.

Implementasi WPO Plus
WPO Plus Implementation

Berupa *Dashboard* yang mengintegrasikan antara aspek *security* & K3. Melalui *dashboard* ini diharapkan pengurusan working permit dapat dilakukan secara efektif dan dapat dimonitor progresnya. Hingga bulan Desember 2025 implementasi *Working Permit Online* (WPO) di PLN NP menunjukkan bahwa:

- Unit Eksisting: Modul *Working Permit* 100%, Modul *Safety Induction* 100%, Modul *Safety Permit* 100%
- Unit yang bergabung tahun 2023; Modul *Working Permit* 94%; Modul *Safety Induction* 94%; Modul *Safety Permit* 69%
- Unit OM ke NPS: Modul *Working Permit* 83%, Modul *Safety Induction* 58%, Modul *Safety Permit* 100%

In the form of a Dashboard that integrates security and OHS aspects. Through this dashboard, the management of working permits is expected to run effectively, and their progress can be monitored. Until December 2025, the implementation of the Working Permit Online (WPO) at PLN NP shows that:

- Existing Unit: Working Permit Module 100%, Safety Induction Module 100%, Safety Permit Module 100%
- Unit that joined in 2023; Working Permit Module 94%; Safety Induction Module 94%; Safety Permit Module 69%
- OM Unit to NPS: Working Permit Module 83%, Safety Induction Module 58%, Safety Permit Module 100%

Pelaksanaan Rapat P2K3 Korporat
P2K3 Corporate Meeting

Dilakukan satu kali dalam satu bulan sebagai bentuk Partisipasi konsultasi dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang kemudian pelaksanaannya akan dimonitor secara rutin. Adapun materi minimal yang dibahas saat rapat P2K3 meliputi statistik kecelakaan kerja dalam periode bulan sebelumnya, persentase kesiapan fasilitas *emergency*, pembahasan temuan total patrol safety & pembahasan aspek kesehatan (*Industrial hygiene*).

Conducted once a month as a form of worker consultation and communication participation regarding occupational safety and health, which will subsequently be monitored regularly. The minimum materials discussed during the P2K3 meeting include work accident statistics for the previous month, percentage of emergency facility readiness, discussion of total safety patrol findings, and discussion of health aspects (Industrial hygiene).

Implementasi SMK2
Electrical Safety Management System Implementation

Dalam rangka pemenuhan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, maka PLN NP mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan (SMK2) serta pelaporan kedalam aplikasi SIMATRIK Kementerian ESDM yang sudah dilakukan oleh unit yang dikelola PLN NP dan Unit yang dikelola PLN NPS. Penerapan sistem ini mencakup seluruh aktivitas dan proses bisnis di unit pembangkitan.

To comply with Regulation of the Minister of EMR Number 10 of 2021 concerning Electrical Safety, PLN NP implements the Electrical Safety Management System (SMK2) and reports to the SIMATRIK application of the Ministry of EMR, which has been carried out by units managed by PLN NP and units managed by PLN NPS. The implementation of this system covers all activities and business processes in the generation units.

Implementasi SMK3
Implementaion of Occupational Safety and Health Management System (OHSMS)

Sebagai bentuk pemenuhan peraturan perundang-undangan khususnya PP nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), selama tahun 2025, PLN NP telah melaksanakan resertifikasi/sertifikasi SMK3 pada 15 unit pembangkitnya. Hal ini menjadi wujud dari komitmen Perusahaan terhadap penerapan SMK3.

As a form of compliance with regulations, specifically Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3), during 2025, PLN NP conducted re-certification/certification of SMK3 in 15 of its power plant units. This is a manifestation of the Company's commitment to the implementation of Occupational Safety and Health Management

Monitoring Perizinan Peralatan K3
Monitoring of OHS Equipment Permits

Monitoring perizinan peralatan K3 dilakukan melalui Aplikasi SISMINDOKUM. Selama tahun 2025, terdapat 3639 data di seluruh unit pembangkit, dan sebaran peralatan yang telah kadaluarsa mencapai 38.97 %. Kemudian ditemukan beberapa unit pembangkit dengan jumlah peralatan kadaluarsa melebihi 25% sebanyak 10 unit dari total 32 unit pembangkit (25%) yang dilakukan *monitoring*.

Monitoring of K3 equipment licensing is conducted via the SISMINDOKUM Application. During 2025, there were 3,639 data entries across all power plant units, and the distribution of expired equipment reached 38.97%. Subsequently, it was found that 10 of the 32 power plants (25%) being monitored had more than 25% of their equipment past its expiration date.

Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan
Security Management System Implementation

Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) merupakan sistem terintegrasi yang mencakup kebijakan, pola, standar pengamanan, kompetensi pelaksana, serta monitoring dan evaluasi terkait pengamanan. Untuk memastikan pelaksanaan SMP berjalan dengan optimal, PLN NP melakukan Audit Internal SMP secara berkala setiap tahun sesuai dengan Perpol 07 Tahun 2019.

The Security Management System (SMP) is an integrated system that includes policies, patterns, security standards, the executor's competencies, as well as monitoring and evaluation related to security. To ensure the optimal implementation of the Security Management System (SMP), PLN NP conducts periodic internal audits of the SMP annually in accordance with Regulation of the Indonesian National Police Number 7 of 2019 07 of 2019.

Penguatan budaya, kompetensi dan sertifikasi K3
Strengthening OHS culture, competence, and certification

Untuk meningkatkan kompetensi dan *awareness* terkait K3 maka dilakukan beberapa program *workshop*, PGD, pelatihan dan sertifikasi K3 serta resertifikasi SMK3 PP 50 Tahun 2012 dan ISO 45001.

To enhance competencies and awareness regarding OHS, several programs have been implemented, including workshops, PGD, OHS training and certification, as well as recertification of SMK3 under Government Regulation No. 50 of 2012 and ISO 45001.

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor

Contractor Safety Management System (CSMS) Implementation

PLN NP menempatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai prioritas utama yang tidak hanya berlaku bagi karyawan internal, tetapi juga bagi para kontraktor yang beraktivitas di lingkungan Perusahaan. Untuk memastikan standar keselamatan yang sama, PLN NP menerapkan kebijakan yang mewajibkan seluruh kontraktor mengikuti ketentuan K3 melalui pelatihan, pengawasan rutin, serta penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, meminimalkan potensi kecelakaan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja bagi semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan tersebut, PLN NP menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh individu yang berkontribusi dalam kegiatan operasional Perusahaan.

PLN NP puts occupational health and safety (OHS) as a top priority that applies not only to internal employees but also to contractors working within the Company. To ensure the same safety standards, PLN NP implements a policy requiring all contractors to adhere to OHS regulations through training, regular supervision, and the use of personal protective equipment (PPE) appropriate to the type of work. This step is taken to create a safe working environment, minimize the potential for accidents, and raise awareness of the importance of occupational safety for all parties involved. With this approach, PLN NP shows its commitment to maintaining the health and safety of all individuals contributing to the Company's operational activities.

Untuk tahun 2025, PLN NP memastikan bahwa kontraktor yang bekerja di lokasi proyek dilengkapi dengan perlindungan K3 yang sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan melalui tersedianya klinik *Contractor Safety Management System* (CSMS). Selain itu, PLN NP juga memberikan pelatihan K3 kepada kontraktor untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang praktik K3 yang aman dan efisien CSMS, PLN NP memastikan mitra kerja/ kontraktor Perusahaan telah memenuhi persyaratan K3 yang berlaku di Perusahaan serta mampu menerapkan persyaratan K3 dalam pekerjaan kontrak yang dilaksanakan. Implementasi CSMS secara *full cycle* dapat diakses di https://csms.plnnusantarapower.co.id/. Penerapan CSMS menjadi salah satu wujud sinergi antara PLN NP dengan stakeholder dalam mewujudkan budaya K3 secara menyeluruh agar nihil kecelakaan pada rekanan juga dapat tercapai.

For 2025, PLN NP ensures that contractors working at project sites are equipped with OHS protection in accordance with established safety standards through the availability of Contractor Safety Management System (CSMS) clinics. In addition, PLN NP also provides OHS training to contractors to increase their awareness and understanding of safe and efficient OHS practices CSMS, PLN NP ensures the Company's work partners/contractors have met the OHS requirements applicable in the Company and are able to apply OHS requirements in the contract work carried out. The full cycle of CSMS implementation can be accessed at https://csms.plnnusantarapower.co.id/. The implementation of CSMS is a form of synergy between PLN NP and stakeholders in realizing a comprehensive OHS culture. Therefore, zero accidents to partners can also be achieved.

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kepada Masyarakat

Occupational Safety Management System Implementation for the Community

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diterapkan PLN NP tidak hanya ditujukan bagi pemangku kepentingan internal seperti karyawan dan kontraktor, tetapi juga mencakup masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Pada tahun 2025, PLN NP memastikan seluruh kegiatan operasional dijalankan dengan standar K3 yang ketat untuk meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, PLN NP juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi risiko yang mungkin timbul serta langkah-langkah pencegahan yang dilakukan. Melalui pendekatan ini, PLN NP berkomitmen menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus memastikan bahwa keberadaan operasional Perusahaan tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan lingkungan sekitar.

Occupational health and safety (OHS) protection implemented by PLN NP is not only intended for internal stakeholders such as employees and contractors, but also includes the community adjacent to the Company's operational areas. In 2025, PLN NP ensured that all operational activities were conducted with strict OHS standards to minimize potential adverse effects on the environment and public safety. As a form of social responsibility, PLN NP also actively conducts outreach to the community regarding potential risks that may arise and the preventive measures being taken. By following this approach, PLN NP is committed to maintaining harmonious relations with the community while ensuring that the Company's operational presence does not endanger the health and safety of the surrounding environment.

Kesetaraan *Gender* dan Kesempatan Kerja
Gender Equality and Employment Opportunities

PLN NP berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi yakni dengan melakukan pengelolaan karyawan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang khususnya karyawan PLN NP terkait rekrutmen, program pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, sampai dengan pemberian remunerasi dan kesejahteraan kepada karyawan tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, dan faktor keberagaman lainnya.

PLN NP strives to apply the principles of equality and anti-discrimination by managing employees without discriminating against gender, education, and background. The Company provides equal opportunities for everyone, especially PLN NP employees related to recruitment, competency development programs, performance assessment, career development, and the provision of remuneration and welfare to employees regardless of differences in gender, religion, and other diversity factors.

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu diperlakukan dengan setara dan diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa adanya diskriminasi. Dengan mendorong keberagaman, PLN NP menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan kreatif, serta memberikan ruang bagi setiap karyawan untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan Perusahaan. Sebagai wujud komitmen, PLN NP telah menerbitkan Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*) pada 27 Maret 2024 dan Kebijakan Pengarusutamaan *Gender* (PUG) dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada 19 Juni 2024.

The Company is committed to creating an inclusive work culture where every individual is treated equally and given equal opportunities to develop without discrimination. By encouraging diversity, PLN NP creates a more dynamic and creative work environment and provides space for each employee to make their best contribution to the Company's progress. As a form of commitment, PLN NP issued the Respectful Workplace Policy on March 27, 2024, and the Gender Mainstreaming and Human Rights Policy on June 19, 2024.

Selama tahun 2025, tidak terdapat laporan mengenai insiden diskriminasi terkait ras, warna kulit, gender, agama, opini politik, asal usul sosial dan segala bentuk diskriminasi lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang terkait Perusahaan.

During 2025, there were no reported incidents of discrimination related to race, color, gender, religion, political opinion, social origin, or any other form of discrimination involving internal or external stakeholders related to the Company.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan
Employment Grievance Mechanism

Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu sarana penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak karyawan serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan transparan. Perusahaan menyediakan saluran resmi bagi karyawan untuk menyampaikan keluhan, masukan, maupun pelaporan terkait isu ketenagakerjaan seperti kondisi kerja, perlakuan tidak adil, maupun pelanggaran kebijakan Perusahaan. Mekanisme pengaduan bagi karyawan yang diterapkan di lingkungan PLN NP sebagai berikut:

The mechanism for reporting employment issues is one of the important means of ensuring the fulfillment of employee rights and the creation of harmonious and transparent industrial relations. The Company provides official channels for employees to submit complaints, feedback, or reports related to employment issues such as working conditions, unfair treatment, or violations of company policies. The complaint mechanism for employees implemented within the PLN NP is as follows:

Tata Cara Tingkatan Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan
Procedures for Handling Complaints and Grievances

Keluhan dan Pengaduan Karyawan dibicarakan dan diselesaikan dengan Atasannya Langsung
Employee complaints and grievances are initially discussed and resolved with their immediate supervisor

→

Bila penyelesaian tingkat pertama belum mencapai hasil yang memuaskan, maka dengan sepengetahuan Atasannya langsung, Karyawan dapat meneruskan keluhan dan pengaduannya kepada Atasannya yang lebih tinggi.
If the first level of resolution does not yield satisfactory results, with the Supervisor's knowledge, the employee can escalate the complaint to a higher-level Supervisor.

→

Bila penyelesaian tingkat kedua tersebut telah dijalankan tanpa hasil yang memuaskan, maka Pekerja dapat meneruskan keluhan dan pengaduannya kepada Serikat Pekerja. Dalam tingkatan ini keluhan dan pengaduan Pekerja tersebut akan diselesaikan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja dalam Lembaga Bipartit.
If the second level of resolution is also unsatisfactory, the employee can escalate the complaint to the Workers' Union. At this level, the complaint will be resolved between the Employer and the Workers' Union within a Bipartite Institution.

→

Untuk memudahkan pelaksanaan dari ketentuan dalam pasal ini maka dibuat Berita Acara Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Karyawan.
To facilitate the implementation of these provisions, a Record of Complaint and Grievance Resolution is created.

Selama tahun 2025 PLN NP tidak menerima pengaduan dari karyawan mengenai masalah ketenagakerjaan. Kondisi ini mencerminkan kepuasan karyawan terhadap penerapan pengelolaan SDM di PLN NP. Dengan demikian, tidak adanya pengaduan dari karyawan mengenai masalah ketenagakerjaan selama tahun 2025 menunjukkan bahwa PLN NP berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memenuhi standar ketenagakerjaan yang berlaku.

During 2025, PLN NP did not receive any complaints from employees regarding labor issues. This condition reflects employee satisfaction with the implementation of HR management in PLN NP. Thus, the absence of complaints from employees regarding labor issues during 2025 indicates that PLN NP has succeeded in creating a conducive work environment and meeting applicable labor standards.

Tingkat Keterikatan dan Kepuasan Karyawan
Employee Engagement and Satisfaction Levels

Pada tahun 2025, PLN NP melaksanakan *Employee Experience Survey* (EES) sebagai salah satu upaya untuk mengevaluasi dan memahami pengalaman karyawan sepanjang siklus perjalanan kerja mereka di Perusahaan. Survei ini mencakup berbagai dimensi

In 2025, PLN NP conducted the Employee Experience Survey (EES) as one of the efforts to evaluate and understand employees' experiences throughout their work journey at the Company. This survey covers various assessment dimensions aimed at measuring

penilaian yang bertujuan untuk mengukur tingkat keterlibatan, kepuasan, serta persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja yang ada. Melalui pelaksanaan EES, Perusahaan berupaya memastikan bahwa setiap karyawan merasa terlibat, dihargai, didukung, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan kontribusi secara optimal.

the level of engagement, satisfaction, and employees' perceptions of the existing work environment. Through the implementation of the EES, the Company strives to ensure that every employee feels engaged, valued, supported, and highly motivated to contribute optimally.

Dalam EES, ada beberapa hal yang diukur, antara lain:

1) *Work Engagement Score*
2) *Experience vs Expectations*
3) *Intent to Stay*
4) *Well-Being*
5) *Inclusion*

In EES, there are several things that are measured, among others:

1) Work Engagement Score
2) Experience vs Expectations
3) Intent to Stay
4) Well-Being
5) Inclusion

PLN NP meyakini bahwa keterlibatan dan pengalaman karyawan merupakan indikator utama dalam mencapai kinerja Perusahaan yang tinggi. Oleh karena itu, PLN NP melaksanakan *Employee Experience Survey* (EES) setiap tahun sebagai salah satu media untuk menilai efektivitas program pengelolaan SDM dari sudut pandang karyawan.

PLN NP believes that employee engagement and experience are key indicators in achieving high Company performance. Therefore, PLN NP conducts an Employee Experience Survey (EES) every year as one of the media to assess the effectiveness of HR management programs from the employees' perspective.

Hasil *Employee Engagement Survey* (EES) Tahun 2025 sebesar 83,63%, dengan *response rate* sebesar 91,39%.

The results of the 2025 Employee Engagement Survey (EES) were 83.63%, with a response rate of 91.39%.

Biaya yang Dikeluarkan terkait Kegiatan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Costs Incurred for Employment, Occupational Health and Safety (OHS) Activities

Biaya yang dianggarkan oleh Perusahaan untuk kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap Ketenagakerjaan tahun 2025 adalah sebesar Rp3,49 triliun, dengan realisasi sebesar Rp3,46 triliun (99,19%) meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,41 triliun. Biaya yang dikeluarkan meliputi gaji dan tunjangan, bonus dan insentif karyawan; imbalan kerja, tunjangan kesehatan serta biaya kepegawaian lainnya.

The budgeted cost by the Company for activities related to the responsibility for Employment in 2025 was Rp3.49 trillion, with an actual realization of Rp3.46 trillion (99.19%), an increase compared to 2024, which was Rp3.41 trillion. The expenses incurred include salaries and allowances, employee bonuses and incentives, work rewards, health benefits, and other personnel costs.

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

PLN NP telah menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) yang memuat Informasi terkait dengan pengelolaan dan kinerja aspek keberlanjutan termasuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN NP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pedoman penyusunan Laporan ini mengacu pada peraturan dan standar pelaporan keberlanjutan sebagai berikut:

- GRI *Standards*, dimana PLN NP telah melaporkan sesuai (*in accordance*) dengan GRI *Standards* untuk periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025, dan menyertakan Pengungkapan Sektor Utilitas Listrik (*Electric Utilities Sector Disclosures*);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- *The International Financial Reporting Standards* (IFRS) *Sustainability Disclosure Standards*:
  - IFRS S1: *General Requirements for Disclosure of Sustainability related Financial Information*;
  - IFRS S2: *Climate-related Disclosures and Industry-based Guidance on implementing Climate related Disclosures* (*Electric Utilities & Power Generators*); serta

PLN NP prepared a Sustainability Report containing information related to the management and performance of sustainability aspects including the implementation of PLN NP social and environmental responsibilities in supporting the achievement of sustainable development goals (SDGs). The guidelines for preparing this Report refer to the following sustainability reporting regulations and standards:

- GRI Standards, where PLN NP arrange report following the GRI Standards for the period January 1, 2025-December 31, 2025, and includes Electric Utilities Sector Disclosures;
- Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies;
- Circular by the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia (SEOJK) Number 16/ SEOJK.04/2021 Concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies;
- International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards:
  - IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability related Financial Information;
  - IFRS S2: Climate-related Disclosures and Industry-based Guidance on implementing Climate related Disclosures (Electric Utilities & Power Generators); and

- *The Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) *Standards - Infrastructure Sector: Electric Utilities & Power Generators.*

Untuk informasi lebih lengkap terkait Laporan Keberlanjutan, dapat dilihat dalam buku terpisah dari Buku Laporan Tahunan ini.

- Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards - Infrastructure Sector: Electric Utilities & Power Plants.

More complete information regarding the Sustainability Report is available in the separate book from this Annual Report Book.

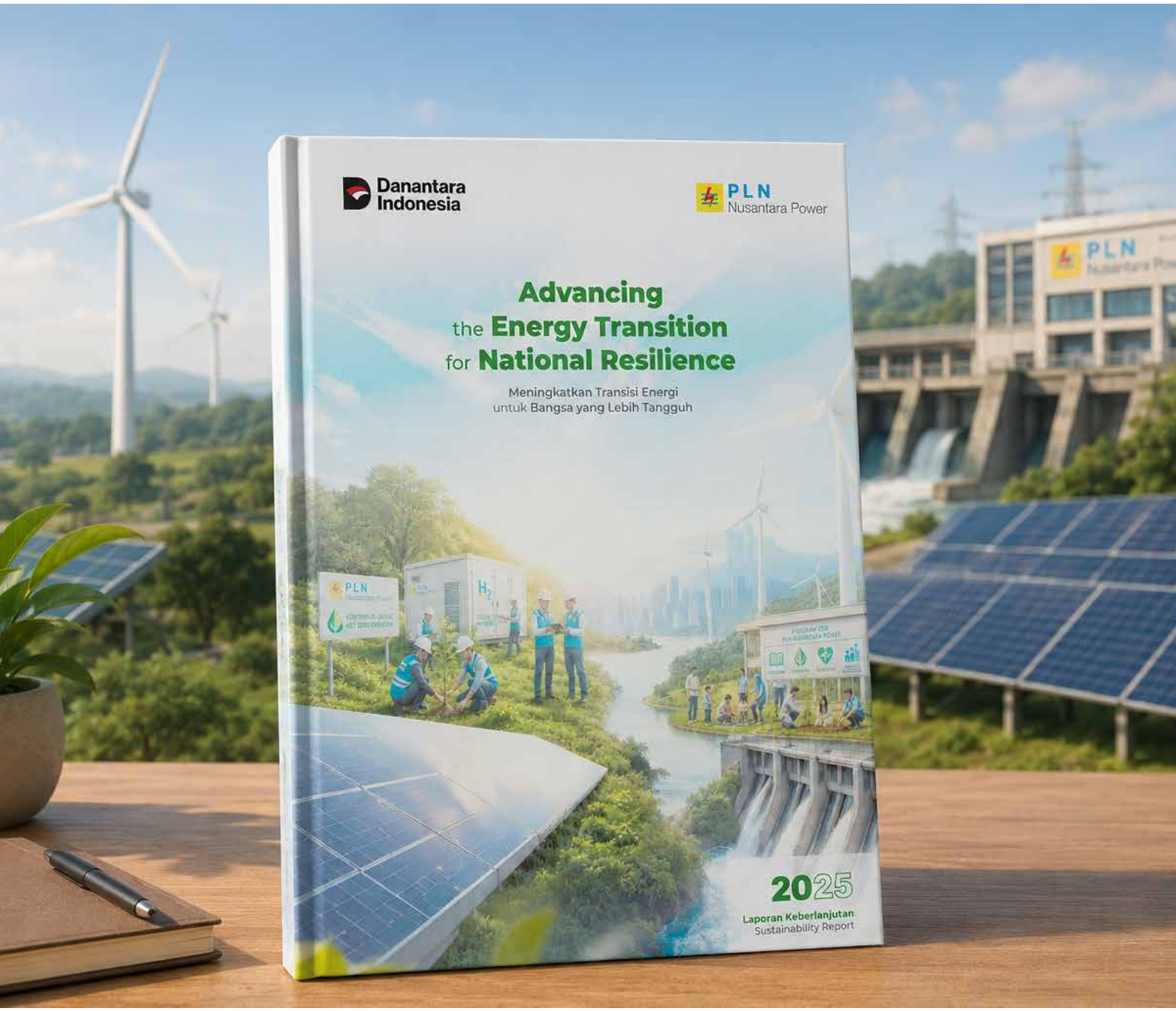

Laporan Keuangan Audit

Audited Financial Statements

08

PT PLN NUSANTARA POWER
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2025/
31 DECEMBER 2025

PLN Nusantara Power

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2025 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

For and On behalf of the Board of Directors, we the undersigned:

Nama	Ruly Firmansyah	*Name*
Alamat Kantor	Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya	*Office Address*
Alamat Domisili	Jalan Legoso Raya No. 66 RT 003 RW 001, Pisangan Ciputat Timur, Tangerang Selatan	*Address of Domicile*
Telepon	(031) 8283180	*Telephone*
Jabatan	Direktur Utama/*President Director*	*Position*
Nama	Teguh Widhi Harsono	*Name*
Alamat Kantor	Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya	*Office Address*
Alamat Domisili	BSD Cluster Anggrek Loka Sektor II 3 Blok AM No 8 Tangerang Selatan	*Address of Domicile*
Telepon	(031) 8283180	*Telephone*
Jabatan	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ *Finance and Risk Management Director*	*Position*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT PLN Nusantara Power dan entitas anaknya ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT PLN Nusantara Power and its subsidiaries (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;*
   b. *The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and*
4. *We are responsible for the Group's internal control system.*

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili DewanDireksi.

For and on behalf of the Board of Directors.

SURABAYA,
23 April/*April* 2026

Ruly Firmansyah
Direktur Utama/
President Director

Teguh Widhi Harsono
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

PT PLN NUSANTARA POWER
Kantor Pusat : Jl. Ketintang Baru 11, Surabaya - Indonesia 60231 ☎ 62-31-8283180 (hunting) Fax : 62-31-8283183
Kantor Jakarta : Gedung Office 18 Park, Lantai 2 ABCD Jl. TB Simatupang No. 18, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12520
Email : info@plnnusantarapower.co.id Website : www.plnnusantarapower.co.id

Laporan/*Report* No. 00709/2.1457/AU.1/02/1122-1/1/IV/2026

Laporan auditor independen
Kepada para Pemegang Saham

PT PLN Nusantara Power

Independent auditors' report
To the Shareholders of

PT PLN Nusantara Power

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PLN Nusantara Power dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT PLN Nusantara Power and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901/3119 2901
F: +62 (21) 5290 5555/5290 5050

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

pwc

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Merencanakan dan melaksanakan audit grup untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau unit bisnis dalam grup sebagai basis untuk merumuskan opini atas laporan keuangan grup. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan penelaahan atas pelaksanaan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Plan and perform the group audit to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business units within the group as a basis for forming an opinion on the group financial statements. We are responsible for the direction, supervision and review of the audit work performed for purposes of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Jakarta,
23 April 2026

Toto Harsono, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.1122

PLN Nusantara Power
00709/2.1457/AU.1/02/1122-1/1/IV/2026

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4	6,126,259	7,544,144	*Cash and cash equivalents*
Deposito berjangka		13,414	975,373	*Time deposits*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya		171,386	152,486	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang usaha	5			*Trade receivables*
Pihak berelasi		52,295,916	42,160,441	*Related parties*
Pihak ketiga		153,580	162,991	*Third parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak berelasi		73,743	143,524	*Related parties*
Pihak ketiga		215,525	165,632	*Third parties*
Piutang kepada ventura bersama		72,689	67,120	*Receivables from joint ventures*
Persediaan	6	4,056,253	4,731,916	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	25a	552,129	484,978	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka dan uang muka		199,388	156,050	*Prepaid expenses and advances*
Jumlah Aset Lancar		**63,930,282**	**56,744,655**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	7	267,041,410	273,816,264	*Property, plant and equipment*
Aset hak guna	8	1,985,186	2,141,502	*Right-of-use assets*
Properti investasi	9	1,571,321	1,540,618	*Investment properties*
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	10	21,910,592	19,841,653	*Investments in associates and joint ventures*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya		18,123	18,629	*Restricted cash in banks and time deposits*
Aset pajak tangguhan	25d	48,121	60,542	*Deferred tax assets*
Piutang kepada ventura bersama		218,051	425,970	*Receivables from joint ventures*
Piutang lain-lain		146,464	128,419	*Other receivables*
Pajak dibayar di muka	25a	617,047	345,047	*Prepaid taxes*
Aset tidak lancar lain		184,660	303,935	*Other non-current assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**293,740,975**	**298,622,579**	***Total Non-current Assets***
JUMLAH ASET		**357,671,257**	**355,367,234**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	11			*Trade payables*
Pihak berelasi		5,354,332	5,974,317	*Related parties*
Pihak ketiga		3,615,512	3,445,246	*Third parties*
Utang lain-lain	12			*Other payables*
Pihak ketiga		1,037,961	1,265,572	*Third parties*
Pihak berelasi		823,920	595,620	*Related parties*
Utang pajak	25b			*Taxes payable*
Pajak penghasilan badan		25,252	69,142	*Corporate income tax*
Pajak lainnya		219,629	198,670	*Other taxes*
Beban yang masih harus dibayar		254,018	43,249	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:				*Current maturities of long-term liabilities:*
Pinjaman dari pemegang saham	26a	344,494	340,062	*Loans from a shareholder*
Liabilitas sewa	13	583,016	585,475	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	14	813,070	854,809	*Short-term employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**13,071,204**	**13,372,162**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan	25d	21,367,295	19,293,753	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:				*Long-term liabilities, net of current maturities:*
Pinjaman dari pemegang saham	26a	1,802,157	2,058,105	*Loans from a shareholder*
Liabilitas sewa	13	1,854,654	1,934,441	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	14	4,421,466	4,064,779	*Employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**29,445,572**	**27,351,078**	***Total Non-current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**42,516,776**	**40,723,240**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 1.234.041.991.999 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 308.510.497.999 saham	15	154,255,249	154,255,249	*Capital stock - par value of Rp500 (full amount) per share Authorised - 1,234,041,991,999 shares Subscribed and fully paid-up - 308,510,497,999 shares*
Tambahan modal disetor	17	(96,808,595)	(96,808,376)	*Additional paid-in capital*
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali		(62,725)	(62,725)	*Difference in transaction with non-controlling interest*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya		1,429,875	1,429,875	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaannya		37,254,263	37,119,373	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain		218,670,692	218,369,778	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:				*Equity attributable to:*
Pemilik entitas induk		314,738,759	314,303,174	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	18	415,722	340,820	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**315,154,481**	**314,643,994**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**357,671,257**	**355,367,234**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/1 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
PENDAPATAN USAHA				***REVENUE***
Penjualan tenaga listrik	19	94,971,854	88,321,254	*Sales of electricity*
Pendapatan usaha lainnya	20	3,921,149	3,391,905	*Other operating revenue*
Jumlah Pendapatan Usaha		**98,893,003**	**91,713,159**	***Total Revenue***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Bahan bakar dan pelumas	21	(60,826,866)	(55,681,478)	*Fuel and lubricants*
Penyusutan aset tetap	7	(9,594,443)	(9,151,166)	*Property, plant and equipment depreciation*
Penyusutan aset hak guna	8	(328,759)	(366,757)	*Right-of-use assets depreciation*
Pemeliharaan	22	(7,063,278)	(6,349,593)	*Maintenance*
Kepegawaian	23	(3,461,449)	(3,418,620)	*Employee costs*
Pembelian tenaga listrik		(634,450)	(827,516)	*Purchased electricity*
Lain-lain	24	(2,283,491)	(2,177,630)	*Others*
Jumlah Beban Usaha		**(84,192,736)**	**(77,972,760)**	***Total Operating Expenses***
LABA USAHA		**14,700,267**	**13,740,399**	***OPERATING INCOME***
Penghasilan keuangan		193,524	261,921	*Finance income*
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing, bersih		(12,296)	5,032	*(Loss)/gain on foreign exchange, net*
Beban keuangan		(385,544)	(378,045)	*Finance costs*
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	10	2,520,399	2,350,862	*Share in net income of associates and joint ventures*
Beban lain-lain, bersih		(807,983)	(148,218)	*Other expenses, net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**16,208,367**	**15,831,951**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	25c	(3,150,723)	(2,922,370)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN		**13,057,644**	**12,909,581**	***PROFIT FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
LABA TAHUN BERJALAN		**13,057,644**	**12,909,581**	***PROFIT FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:				***Other comprehensive income for the year:***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:*
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	10	399,522	471,469	*Share in other comprehensive income from associates and joint ventures*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Revaluasi aset tetap	7	-	7,820,712	*Revaluation of property, plant and equipment*
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	14	(98,274)	(186,182)	*Remeasurement of defined benefit plans*
Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait	25c	21,620	(1,580,280)	*Related income tax benefit/(expense)*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		**322,868**	**6,525,719**	***Other comprehensive income for the year, after tax***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**13,380,512**	**19,435,300**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Profit for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		12,984,152	12,865,251	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		73,492	44,330	*Non-controlling interests*
Jumlah		**13,057,644**	**12,909,581**	***Total***
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Total comprehensive income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		13,301,055	19,384,615	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		79,457	50,685	*Non-controlling interests*
Jumlah		**13,380,512**	**19,435,300**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to the owners of the parent entity*												
							Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain/ *Other comprehensive income/(loss)*							
	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and fully paid-up capital stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Ekuitas *merging entity*/ *Equity of merging entity*	Saldo laba/*Retained earnings* Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Saldo laba/*Retained earnings* Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Surplus revaluasi aset tetap/ *Property, plant and equipment revaluation surplus*	Pengukuran kembali atas program manfaat pasti/ *Remeasurement on defined benefit plan*	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Share of other comprehensive income from associates and joint ventures*	Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali/ *Difference in transaction with non-controlling interest*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk/ *Equity attributable to the parent entity*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024		154,255,249	(96,808,376)	-	1,429,875	37,897,720	211,175,421	(804,288)	1,479,281	(62,725)	308,562,157	298,667	308,860,824	*Balance as at 1 January 2024*
Dividen	16	-	-	-	-	(13,643,598)	-	-	-	-	(13,643,598)	(8,658)	(13,652,256)	*Dividends*
Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	126	*Issuance of subsidiaries' shares to non-controlling interests*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	12,865,251	6,199,472	(145,222)	465,114	-	19,384,615	50,685	19,435,300	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		**154,255,249**	**(96,808,376)**	**-**	**1,429,875**	**37,119,373**	**217,374,893**	**(949,510)**	**1,944,395**	**(62,725)**	**314,303,174**	**340,820**	**314,643,994**	***Balance as at 31 December 2024***
Dividen	16	-	-	-	-	(12,865,251)	-	-	-	-	(12,865,251)	(4,555)	(12,869,806)	*Dividends*
Perbedaan dari nilai restrukturisasi entitas sepengendali	17	-	(219)	-	-	-	-	-	-	-	(219)	-	(219)	*Difference in value of restructuring of entities under common control*
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	7	-	-	-	-	15,989	(15,989)	-	-	-	-	-	-	*Reclassification of property, plant and equipment revaluation surplus to retained earnings*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	12,984,152	-	(76,654)	393,557	-	13,301,055	79,457	13,380,512	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025		**154,255,249**	**(96,808,595)**	**-**	**1,429,875**	**37,254,263**	**217,358,904**	**(1,026,164)**	**2,337,952**	**(62,725)**	**314,738,759**	**415,722**	**315,154,481**	***Balance as at 31 December 2025***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 4 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			***CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025*** *(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*
	2025	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	75,051,582	66,855,828	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(71,626,168)	(62,887,474)	*Cash paid to suppliers, employees and others*
Penerimaan bunga	263,305	221,230	*Interest received*
Pembayaran bunga	(385,544)	(235,259)	*Interest paid*
Pembayaran surat ketetapan pajak	(127)	(5,637)	*Payments of tax assessment letter*
Penerimaan restitusi pajak	376,511	326,780	*Receipt of tax refunds*
Pembayaran pajak penghasilan	(819,581)	(713,543)	*Payments of income taxes*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**2,859,978**	**3,561,925**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	(4,911,456)	(2,966,520)	*Purchase of property, plant and equipment*
Penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	393	790	*Proceeds from sale of unused assets*
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama	856,883	774,118	*Dividends received from associates and joint ventures*
Penempatan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(157,544)	(147,914)	*Additions of investments in associates and joint ventures*
Perolehan aset tidak lancar lainnya	(15,181)	(24,328)	*Purchase of other non-current assets*
Penarikan deposito berjangka	530,507	377,900	*Withdrawal of time deposits*
Penempatan deposito berjangka	-	(443,688)	*Placement of time deposits*
Penarikan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	87,284	99,395	*Withdrawal of restricted cash in banks and time deposits*
Hasil dari penjualan kepemilikan atas entitas anak	130,960	-	*Proceeds from sale of ownership in subsidiary*
Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(99,019)	(130,450)	*Placement of restricted cash in banks and time deposits*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(3,577,173)**	**(2,460,697)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	-	316,985	*Proceeds of loans from a shareholder*
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham	(323,579)	(313,731)	*Payments of loans from a shareholder*
Penerimaan setoran modal dari kepentingan non-pengendali	-	126	*Proceeds of capital injection from non-controlling interests*
Pembayaran liabilitas sewa	(372,369)	(398,299)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran dividen oleh entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	(4,555)	(8,658)	*Payments of dividends by subsidiaries to non-controlling interests*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(700,503)**	**(403,577)**	***Net cash used in financing activities***
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(1,417,698)**	**697,651**	***NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(187)	205	*Effect of changes in foreign currency*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**7,544,144**	**6,846,288**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**6,126,259**	**7,544,144**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Lihat Catatan 30 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

Refer to Note 30 for the presentation of the Group's cash flow information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/1 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT PLN Nusantara Power ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 3 Oktober 1995, dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-12495-HT.01.01 Th.95 tanggal 3 Oktober 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9299.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 29 Maret 2023, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, terkait dengan penambahan bidang usaha. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0020884.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 April 2023.

Perusahaan berdomisili di Surabaya dengan satuan-satuan usaha yang berlokasi di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya.

Pada tahun 2023, Perusahaan membentuk kantor strategis di Jakarta yang berkedudukan di Gedung 18 Office Park, lantai 2, 8 dan 9, Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat yang mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

a. Pembangkitan tenaga listrik;
b. Konstruksi bangunan elektrikal;
c. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
d. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan; dan
e. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, termasuk memberikan penugasan kepada entitas anaknya.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN"), sebuah perusahaan yang berdomisili di Jakarta, Indonesia.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT PLN Nusantara Power (the "Company") was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 16 dated 3 October 1995, of Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-12495-HT.01.01 Th.95 dated 3 October 1995 and was published in State Gazette No. 90 dated 10 November 1995, Supplement No. 9299.

The Company's Articles of Association were last amended based on Notarial Deed No. 40 dated 29 March 2023, from Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, regarding the addition of business activities. This deed of amendment has been received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Decision Letter No. AHU-0020884.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 10 April 2023.

The Company is domiciled in Surabaya with business units located in Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, and Nusa Tenggara. The Company's head office is located in Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya.

In 2023, the Company established a strategic office in Jakarta located at 18 Office Park Building, 2nd, 8th, and 9th floor, Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Jakarta Selatan.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage in the electric power industry business, based on the principles of competitive industry and commerce, consisting of the following activities:

a. Power plants;
b. Electrical buildings construction;
c. Installation of electrical equipments;
d. Maintenance and/or operation of electrical equipments; and
e. Sales and/or other supporting business activities in order to optimise the available resources of the Company, including delegating assignments to its subsidiaries.

The Company is part of the business group of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN"), a company domiciled in Jakarta, Indonesia.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/2 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah karyawan tetap Perusahaan dan entitas anaknya (secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup") masing-masing sebanyak 14.041 karyawan (tidak diaudit) dan 13.501 karyawan (tidak diaudit).

b. Pembentukan struktur *subholding*

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PLN Masa/Tahap *Legal End-State* serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 70 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, PLN membentuk empat *subholding* yang terdiri dari:

1. Dua *subholding* di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PT PLN Nusantara Power ("PNP") (sebelumnya Pembangkitan Jawa Bali) dan PT Indonesia Power atau disebut PLN Indonesia Power ("PIP"), nama merek yang digunakan;
2. Satu *subholding* di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI") (sebelumnya PT PLN Batubara); dan
3. Satu *subholding* untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan (Beyond kWh), yaitu bernama PT Indonesia Comnet Plus ("ICON").

Sebagai tindak lanjut pembentukan *subholding* PLN tersebut sesuai dengan Akta Notaris No. 76 tanggal 30 Desember 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta tentang Persetujuan atas Pemisahan Kegiatan Usaha Pembangkitan Listrik PLN kepada Perusahaan, yang menyatakan bahwa sebagian aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan listrik PLN akan beralih secara hukum menjadi hak serta kewajiban dari Perusahaan yang menerima pemisahan sejak tanggal efektif pemisahan di 1 Januari 2023.

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Establishment and general information** (continued)*

As at 31 December 2025 and 2024, the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") had a total number of permanent employees of 14,041 (unaudited) and 13,501 (unaudited), respectively.

b. Establishment of subholding structures

Based on the Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprise ("SOE") of the Republic of Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 dated 30 December 2022, regarding the Approval for The Establishment of Holding and Subholding of PLN for the Legal End-State Period/Stage as well as the Restructuring and Transfer of Assets as stated in the Notarial Deed No. 70, dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, PLN established four subholdings, consisting of:

1. *Two subholdings in the power generation sector, namely PT PLN Nusantara Power ("PNP") (formerly Pembangkitan Jawa Bali) and PT Indonesia Power or namely PLN Indonesia Power ("PIP"), the branding name used;*
2. *One subholding in the primary energy procurement and logistics sector, namely PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI") (formerly PT PLN Batubara); and*
3. *One subholding for business activities outside of power generation, transmission, and electricity distribution (Beyond kWh), namely PT Indonesia Comnet Plus ("ICON").*

As a follow-up to the establishment of the PLN subholding in accordance with Notarial Deed No. 76 dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta regarding Approval of Separation of PLN's Power Generation Business Activities to the Company, it was stated that several assets and liabilities of PLN's power generation business activities would legally be transferred to become the rights and obligations of the Company that received the separation from the effective date of the separation on 1 January 2023.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/3 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan pengurus dan informasi lain

Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

	2025*)	2024	
Komisaris Utama	Edi Srimulyanti	Hendra Iswahyudi	*President Commissioner*
Komisaris	Ade Armando	Evy Haryadi	*Commissioners*
	Suharyono	Ida Nuryatin Finahari	
	M. Pradana Indraputra	Emir Kresna Wardana	
	Adam Muhammad	-	
	Muhammad Syafi'i	-	
Komisaris Independen	Edi Srimulyanti	Bagus Puruhito	*Independent Commissioners*
	-	Kenedy	
	-	Widjono Hardjanto	

*) Berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 18 Juli 2025, dari Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Direktur Utama	Ruly Firmansyah	Ruly Firmansyah	*President Director*
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi	T.B. Ari Wibawa Mukti*)	Komang Parmita**)	*Director of Human Capital Management and Administration*
Direktur Pengembangan dan Niaga	Dwi Hartono	Dwi Hartono***)	*Director of Development and Commerce*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Teguh Widhi Harsono*)	Dwi Hartono	*Director of Finance and Risk Management*
Direktur Operasi Pembangkit Gas	M. Irwansyah Putra*)	Komang Parmita	*Director of Operation Gas Power Plant*
Direktur Operasi Pembangkit Batubara	Komang Parmita	Rachmanoe Indarto	*Director of Operation Coal Power Plant*

*) Berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 18 Juli 2025, dari Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
**) Merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi berdasarkan Akta Notaris No. 80 tanggal 28 Oktober 2024, dari Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
***) Merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pengembangan dan Niaga berdasarkan Akta Notaris No. 80 tanggal 28 Oktober 2024, dari Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025*)	2024	
Ketua	Suharyono	Kenedy	*Chairman*
Wakil ketua	Ade Armando	Widjono Hardjanto	*Vice chairman*
Sekretaris/Anggota	Andi Haslinda	Ericson Saragi Sidabutar	*Secretary/Member*
Anggota	Fadilatul Imami	Andi Haslinda	*Member*

*) Berdasarkan Surat Keputusan No. 009.K/DK-PLN NP/2025 tanggal 4 Juli 2025, yang telah disetujui oleh Komisaris Utama Perusahaan.

1. *GENERAL* *(continued)*

c. Management and other information

The composition of the Company's Board of Commissioners was as follows:

*) *Based on Notarial Deed No. 31 dated 18 July 2025, of Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.*

The composition of the Company's Board of Directors as at 31 December 2025 and 2024 was as follows:

*) *Based on Notarial Deed No. 31 dated 18 July 2025, of Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.*
**) *Also serving as Acting Director of Human Capital Management and Administration based on Notarial Deed No. 80 dated 28 October 2024, of Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.*
***) *Also serving as Acting Director of Development and Commerce based on Notarial Deed No. 80 dated 28 October 2024, of Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.*

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2025 and 2024 was as follows:

*) *Based on Decision Letter No. 009.K/DK-PLN NP/2025 dated 4 July 2025, which has been approved by the President Commissioner of the Company.*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/4 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak

Perusahaan memiliki saham entitas anak, baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. *GENERAL* (continued)

d. Subsidiaries

The Company has ownership interests directly or indirectly in the following subsidiaries:

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 2025	2024	Tahun operasi komersial/ *Start of commercial operations*	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2025	2024
PT PLN Nusantara Power Services ("PLN NPS") dan entitas anaknya/ *and its subsidiary*	Surabaya	Jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan/ (pemasangan) peralatan ketenagalistrikan/ *Operation and maintenance of power plant and construction/ (installation) of electricity equipment*	99.00	99.00	2001	2,844,303	1,952,525
PT Mitra Karya Prima ("MKP") *)	Surabaya	Jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik/ *Operation and maintenance of power plant*	92.00	92.00	2005	320,147	236,602
PT PLN Nusantara Power Construction ("PLN NPC")	Jakarta	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan/ *Engineering, procurement and construction, and operations and maintenance in the electricity sector*	99.00	99.00	2004	2,176,902	2,161,374
PT Prima Power Nusantara ("PPN") **)	Jakarta	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan/ *Engineering, procurement and construction, and operations and maintenance in the electricity sector*	-	100.00	2016	-	155,266
PT Navigat Innovative Indonesia ("NII")	Palembang	Penyediaan tenaga listrik, perdagangan dan/atau keagenan atas tenaga kelistrikan/ *Electricity provider, trading, and/or agent of electricity equipment*	72.97	72.97	2002	529,346	508,468
PT PLN Nusantara Renewables ("PLN NR") dan entitas anaknya/ *and its subsidiaries*	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan/ *Investment in electricity*	100.00	100.00	2015	11,246,723	10,259,669
PT Nusantara Renewables Investasi ("NRI") *)	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan/ *Investment in electricity*	99.88	99.88	2025	117,370	102,524
PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo ("PJB Investindo") *) dan entitas anaknya/ *and its subsidiary*	Jakarta	Penempatan investasi di pengadaan listrik/ *Investments in electricity procurement*	100.00	100.00	2020	437,612	406,340
PT Pembangkitan Jawa Baskara Investasi Cirata ("PJBIC") *)	Jakarta	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal/ *Financing through equity participation*	100.00	100.00	2020	433,374	406,329
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("PLNSC")	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa, enjiniring, rantai pasokan, dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan/ *Operation and services trading, engineering, supply chain, consultation in the electricity sector*	51.00	51.00	2018	1,395,643	748,293

*) Kepemilikan tidak langsung/*Indirect ownership*
**) Pelepasan kepemilikan pada 2025/*Disposal of ownership in 2025*

Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 1 Oktober 2025, dari Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham untuk menjual kepemilikan saham PPN ke PT Indonesia Connectivity Investasi ("Iconvest"). Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham PPN, atau setara dengan 100% kepemilikan, dengan nilai pengalihan sebesar Rp130.960. Nilai buku bersih PPN untuk porsi kepemilikan Perusahaan pada saat tanggal penjualan adalah sebesar Rp131.179. Kerugian atas penjualan sebesar Rp219 dicatat pada perbedaan dari nilai restukturisasi entitas sepengendali (Catatan 17).

Based on Notarial Deed No. 02 dated 1 October 2025 of Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., a Notary in Jakarta, the Company entered into a share sale agreement to sell their ownership in PPN to PT Indonesia Connectivity Investasi ("Iconvest"). The Company sold the whole ownership of PPN, or equivalent to 100% of ownership, with proceed amounting to Rp130,960. The net book value of PPN shares at the date of disposal was Rp131,179. A loss of Rp219 was recorded on the difference in value of restructuring of entities under common control (Note 17).

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/5 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan SAK di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi, atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3.

b. Perubahan pada PSAK dan ISAK

Implementasi dari standar-standar baru, amendemen dan penyesuaian tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau sebelumnya:

- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran"; dan
- PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi".

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("FAS"), including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS").

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Basis of the preparation of the financial statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared using the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on a going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian FAS requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

b. Changes to SFAS and IFAS

The implementation of the following new standards, amendments and annual improvements which are effective from 1 January 2025 did not result in changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for current or prior financial years:

- *Amendment to SFAS No. 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability"; and*
- *SFAS No. 117, "Insurance Contracts".*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/6 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan)

Penerapan dari amendemen standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan;
- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam; dan
- Revisi PSAK No. 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Standar baru dan amandemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027, tetapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 119 dan Amendemen PSAK No. 119 "Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan".

Penerapan dari standar baru berikut berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini:

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan interpretasi pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

i. Entitas anak

i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Changes to SFAS and IFAS** (continued)*

The adoption of these amended standards, which are effective beginning 1 January 2026 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact on the amounts reported for the current or prior financial years:

- *Amendment to SFAS No. 109, "Financial Instruments" and SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" regarding classification and measurement of financial instruments;*
- *Amendment to SFAS No. 109, "Financial Instruments" and SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" regarding Contracts Referencing Nature-dependent Electricity; and*
- *Revision to SFAS No. 338 "Business Combinations of Entities Under Common Control".*

The new standard and amendments to accounting standards issued, but only effective for the financial year beginning 1 January 2027, but early adoption is permitted, is as follows:

- *SFAS No. 119 and amendments to SFAS No. 119 "Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures".*

The adoption of the new standard is effective beginning 1 January 2027. Retrospective application is required, and the comparative information for the financial year ending 31 December 2026 will be restated in accordance with this standard:

- *SFAS No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements".*

As at the date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and interpretations on the Group's consolidated financial statements.

c. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

i.1. Consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/7 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.1. Konsolidasi (lanjutan)

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

i.2. Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***i. Subsidiaries** (continued)*

***i.1. Consolidation** (continued)*

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

i.2. Acquisition

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. The identifiable assets, liabilities and contingent liabilities acquired, assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owners of the parent entity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/8 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.2. Akuisisi (lanjutan)

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto entitas anak yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***i. Subsidiaries** (continued)*

***i.2. Acquisition** (continued)*

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired are recorded as goodwill. If these amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/9 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika tanggal hilangnya pengendalian. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

- **Akuisisi**

  Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION* *(continued)*

c. *Principles of consolidation* *(continued)*

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained on the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

iv. Accounting for associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, and is generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investment in associates is accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted using the equity method less impairment losses, if any.

- ***Acquisitions***

  Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/10 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Akuisisi** (lanjutan)

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

- **Metode ekuitas**

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Mutasi dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures *(continued)*

- ***Acquisitions*** *(continued)*

Goodwill on the acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of the acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

- ***Equity method***

In applying the equity method, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and Group's share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates or joint ventures are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of the impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture will be changed, where necessary, to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/11 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Metode ekuitas** (lanjutan)

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

- **Pelepasan**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan dan Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures *(continued)*

- ***Equity method*** *(continued)*

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

- ***Disposals***

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Gains and losses arising from the partial disposal or dilution of an investment in an associate and joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/12 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup, diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

d. Foreign currency translation

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities, are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency").

The consolidated financial statements are Rupiah ("Rp"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the exchange rates prevailing at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the consolidated statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the exchange rates prevailing at the date of consolidated statement of financial position published by Bank Indonesia, were as follows:

	2025*)	2024*)	
Dolar AS ("US$")	16,720	16,157	*US Dollar ("US$")*
Euro ("EUR")	19,753	16,851	*Euro ("EUR")*
Yuan Tiongkok ("CNY")	2,401	2,214	*Chinese Yuan ("CNY")*
Dolar Singapura ("SG$")	13,069	11,919	*Singapore Dollar ("SG$")*
Dolar Australia ("AU$")	11,255	10,082	*Australian Dollar ("AU$")*
Yen Jepang ("JPY")	108	102	*Japanese Yen ("JPY")*
Won Korea ("KRW")	12	11	*Korean Won ("KRW")*
Ringgit Malaysia ("MYR")	4,144	3,616	*Malaysian Ringgit ("MYR")*

*) Dalam nilai penuh

*) *In full amount*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/13 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 224: "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" sebagai berikut:

(a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
  (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari pihak ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari pihak ketiga;
  (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
  (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
  (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
  (viii) Entitas, atau setiap anggota dari kelompok yang menjadi bagiannya, memberikan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION* *(continued)*

e. *Transactions with related parties*

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS No. 224: "Related Party Disclosures" as follows:

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
  (i) Has control or joint control over the reporting entity;
  (ii) Has significant influence over the reporting entity; or
  (iii) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
  (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to each other);
  (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
  (iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
  (iv) One entity is a joint venture of a third party and the other entity is an associate of the third party;
  (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of the employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
  (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
  (vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel on the entity (or of a parent of the entity); or
  (viii) The entity or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/14 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah Indonesia, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

f. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:
- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain; dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah memilih tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***e. Transactions with related parties** (continued)*

A Government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government refers to the Government of the Republic of Indonesia, Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

f. Financial assets

i. Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- *financial assets measured at fair value either through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI"); and*
- *those to be measured at amortised cost.*

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI").

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing such assets changes.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/15 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are SPPI.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

- *Amortised cost: Assets that are held for the collection of contractual cash flows in cases where such cash flows represent SPPI are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/16 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya: (lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam penghasilan atau beban lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam kerugian atau keuntungan kurs mata uang asing, bersih dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***f. Financial assets** (continued)*

***i. Classification, recognition and measurement** (continued)*

Debt instruments (continued)

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments: (continued)

- *Fair value through other comprehensive income: Assets that are held for the collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, in cases where the assets' cash flows represent SPPI, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income and expenses. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in losses or gains on foreign exchange, net and impairment expenses in other expenses.*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/17 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya: (lanjutan)

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi dan disajikan bersih dalam laba rugi.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***f. Financial assets** (continued)*

***i. Classification, recognition and measurement** (continued)*

Debt instruments (continued)

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments: (continued)

- *FVTPL: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at FVTPL. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and that is not part of a hedging relationship, is recognised in profit or loss and presented net in profit or loss.*

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

iii. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amounts are reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/18 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian ("KKE"). Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan "pendekatan yang disederhanakan" untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenal risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.

h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

g. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss ("ECL"). To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, which is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies the "simplified approach" to measuring ECL which uses a lifetime ECL allowance or all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components. The ECL reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due, with the exception of the receivables which can be assessed at their own rating of ECL.

h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/19 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Piutang usaha dan lain-lain

Piutang usaha merupakan jumlah yang dapat diterima dari pelanggan atas penjualan listrik atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Piutang lain-lain merupakan saldo piutang yang tidak terkait dengan kegiatan usaha normal Grup.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar imbalan yang tidak bersyarat, kecuali jika piutang tersebut mengandung komponen pendanaan yang signifikan, dalam hal ini mereka diakui pada nilai wajar. Selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan kerugian.

Piutang kepada ventura bersama merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada ventura bersama Grup.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap item baris yang sama.

Lihat Catatan 2g untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

j. Persediaan

Persediaan suku cadang, batubara, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan jenis persediaan pada masa mendatang.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

i. Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for sales of electricity or services performed in the normal course of business. If receivables are expected to be collected within one year or less, they are classified as current assets. Otherwise, the receivables are presented as non-current assets in the consolidated statement of financial position.

Other receivables represent receivables that are not related to the normal business activities of the Group.

Trade and non-trade receivables are recognised initially at the amount of consideration that is unconditional, unless they contain significant financing components, in which case they are recognised at fair value. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less loss allowance.

Receivables from joint ventures are receivables balance reflecting loan given to the joint venture of the Group.

Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

See Note 2g for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

j. Inventories

Spare parts, coal, fuel, lubricants, tools and supplies are valued at cost less a provision for obsolete and slow-moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow-moving inventory is determined on the basis of estimated future usage of individual inventory items.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/20 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Setelah pengakuan awal, kelas-kelas aset berikut ini yang diukur menggunakan metode revaluasi:
- Hak atas tanah;
- Bangunan umum, waduk, dan prasarana;
- Instalasi dan mesin pembangkit;
- Perlengkapan transmisi;
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik; dan
- Material cadang utama.

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan, kecuali hak atas tanah, dan penurunan nilai. Hak atas tanah tidak disusutkan. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Manajemen melakukan revaluasi aset secara berkala. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain termasuk aset tetap yang akan dihapus. Apabila penurunan melebihi "surplus revaluasi aset tetap", maka selisih lebihnya dibebankan pada laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

k. Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are initially recognised at cost which comprises the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

After initial recognition, the following classes of assets are measured using the revaluation method:
- *Land rights;*
- *Buildings, reservoirs and infrastructure;*
- *Installations and power plants;*
- *Transmission equipment;*
- *Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply; and*
- *Major spare parts.*

The classes of asset above, are shown at fair value less subsequent depreciation, except land rights, and impairment losses. Land rights are not depreciated. The valuation of those assets is performed by external independent valuers that are registered with the Financial Services Authority ("FSA"). Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Management revaluates the assets in regular basis. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is presented to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use a revaluation model are credited to "Property, plant and equipment revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are charged against "Property, plant and equipment revaluation surplus" as part of other comprehensive income including property, plant and equipment which will be written-off. If the decrease exceeds the "property, plant and equipment revaluation surplus", the excess difference is charged to profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/21 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Terkait hak atas tanah, Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 116, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 216, "Aset Tetap" yaitu hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Aset tetap, kecuali hak atas tanah disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION* *(continued)*

k. Property, plant and equipment *(continued)*

For land rights, the Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represents an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS No. 116, "Leases". If the land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 216, "Property, Plant and Equipment" under which land rights are recognised at cost and not depreciated.

Property, plant and equipment, except land rights are depreciated to their residual values using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

	Tahun/ *Years*	
Bangunan umum, waduk dan prasarana	10 - 50	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi	10 - 40	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	10	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	5	*General equipment*
Kendaraan bermotor	5	*Motor vehicles*
Material cadang utama	10 - 40	*Major spare parts*

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah dan disesuaikan, jika diperlukan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 2m).

The useful lives, residual values and depreciation methods of property, plant and equipment are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 2m).

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/22 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari aset tetap Grup. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

Setiap periode pelaporan, selisih antara penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset yang diakui di dalam laporan laba rugi dan penyusutan berdasarkan harga perolehan awal aset ditransfer dari "surplus revaluasi aset tetap" ke dalam "saldo laba".

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang akan direlokasi/ditransfer, sedang diperbaiki, dan akan dihapus. Aset yang tidak digunakan dalam operasi, kecuali aset yang akan dihapus, disusutkan dengan metode garis lurus dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Aset dalam pembangunan

Aset dalam pembangunan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi. Aset dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***k. Property, plant and equipment** (continued)*

The costs of repairs and maintenance are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs that are incurred in order to add, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognised as assets if and only if it is probable that the future economic benefits that are associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

For property, plant and equipment that can no longer be utilised or sold, the carrying amount is eliminated from the Group's property, plant and equipment. The resulting gains or losses on disposals of property, plant and equipment are recognised in profit or loss.

At each reporting period, the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset charged to the profit or loss and depreciation based on the asset's original cost is transferred from "property, plant and equipment revaluation surplus" to "retained earnings".

Assets not used in operations consist of property, plant and equipment that will be relocated/transferred, under repaired, and to be disposed. Assets not used in operations, except for assets to be disposed, are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

Construction in progress

Construction in progress represents costs directly attributable to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, the depreciation of property, plant and equipment used in the construction and the cost of testing whether the asset is functioning properly. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/23 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (hak atas tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Nilai wajar didasarkan kepada harga pasar aktif, disesuaikan, jika perlu, dengan perbedaan alam, lokasi atau kondisi dari aset tersebut. Jika informasi tersebut tidak tersedia, Grup menggunakan metode penilaian alternatif, seperti harga terbaru di pasar yang kurang aktif atau proyeksi arus kas yang didiskontokan.

Penentuan nilai wajar properti investasi dilakukan pada tanggal posisi keuangan didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

I. Investment properties

Investment properties are properties (land rights or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognised as an asset when and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprising its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group chooses to use the fair value model and measure all of its investment properties at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognised in profit or loss for the period in which it arises.

Fair value is based on active market prices, adjusted, if necessary, for differences in the nature, location or condition of the specific asset. If this information is not available, the Group uses alternative valuation methods, such as recent prices on less active markets or discounted cash flow projections.

The fair value of investment property as at the financial position date is based on an annual valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued. These valuations form the basis for the carrying amounts in the consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/24 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan (pada tanggal penerima mendapatkan kontrol) atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan. Dalam menentukan nilai pertimbangan dari penghentian pengakuan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari variabel pertimbangan, adanya komponen pembiayaan yang signifikan, pertimbangan non kas dan pertimbangan utang ke pembeli (jika ada).

Pengalihan dilaksanakan ke (atau dari) properti investasi hanya ketika adanya perubahan pemakaian. Untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang ditempati pemilik, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan pemakaian tersebut. Jika properti yang ditempati pemilik menjadi properti investasi, Grup mengakui properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum pada aset tetap sampai tanggal perubahaan pemakaian.

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya *goodwill*, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji penurunan nilainya ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***l. Investment properties** (continued)*

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between t
he net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the year of derecognition or disposed. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property, the Group considers the effects of variable consideration, the existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

m. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life, for example, goodwill, are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/25 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui langsung dalam laba rugi, kecuali aset yang diukur pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak akan dipulihkan kembali.

n. Utang usaha dan lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok di luar kegiatan usaha biasa.

o. Sewa

Grup sebagai pemberi sewa

Ketika Grup bertindak sebagai pemberi sewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION* *(continued)*

m. Impairment of non-financial assets *(continued)*

Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed at each reporting date for a possible reversal of the impairment. Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognised, if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment testing was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

n. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less of the reporting date. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost.

Other payables are obligations to pay for goods or services obtained from suppliers outside of the ordinary business activities.

o. Leases

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is as an operating lease.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/26 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai pemberi sewa (lanjutan)

Pendapatan sewa dari sewa operasi dimana Grup bertindak sebagai pesewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan basis yang sama dengan pendapatan sewa. Aset terkait yang disewakan ditampilkan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

Grup sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa aset tetap tertentu. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 1 hingga 12 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***o. Leases** (continued)*

***The Group as a lessor** (continued)*

Lease income from operating leases where the Group is a lessor is recognised in income on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added to the carrying amount of the underlying asset and recognised as expense over the lease term on the same basis as lease income. The respective leased assets are included in the statement of financial position based on their nature.

The Group as a lessee

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and an assessment of whether the fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group leases certain property, plant and equipment. The rental contracts are typically made for fixed periods of 1 to 12 years but may have extension options. Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group.

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;*
- *variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/27 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup:

- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, mata uang dan jaminan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap tahun.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***o. Leases** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Group:

- *where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;*
- *uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Group, which does not have recent third-party financing; and*
- *makes adjustments specific to the lease, e.g. term, currency and security.*

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each year.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/28 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak guna juga diuji penurunan nilainya (Catatan 2m).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari perlengkapan umum.

Opsi ekstensi dan terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

o. Leases *(continued)*

The Group as a lessee *(continued)*

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- *the amount of the initial measurement of the lease liability;*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;*
- *any initial direct costs; and*
- *restoration costs.*

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use assets are depreciated over the underlying asset's useful life.

The right-of-use assets are also tested for impairment (Note 2m).

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/29 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Modifikasi sewa

Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa harus:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan;

- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

o. Leases *(continued)*

The Group as a lessee *(continued)*

Lease modification

A lessee shall account for a lease modification as a separate lease if both:

- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*

- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, a lessee shall:

- *allocate the consideration in the modified contract;*
- *determine the lease term of the modified lease;*
- *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. The revised discount rate is determined as the interest rate implicit in the lease for the remainder of the lease term, if that rate can be readily determined, or the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification, if the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined;*
- *decreasing the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee shall recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*

- *making a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/30 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pinjaman

Pinjaman awalnya diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak diselesaikan, dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup, pada atau sebelum akhir tahun pelaporan, dipertimbangkan dalam mengklasifikasikan perjanjian pinjaman dengan perjanjian sebagai lancar atau tidak lancar. Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup setelah periode pelaporan tidak memengaruhi klasifikasi pada tanggal pelaporan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

p. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of borrowings facilities are recognised as transaction costs of the borrowings to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are derecognised from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has a right to defer payment of the liability for at least 12 months after the reporting date.

Covenants that the Group is required to comply with, on or before the end of the reporting year, are considered in classifying loan arrangements with covenants as current or non-current. Covenants that the Group is required to comply with after the reporting period do not affect the classification at the reporting date.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/31 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama tahun berjalan, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

r. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Proses kajian tersebut melibatkan penggunaan berbagai pertimbangan dan asumsi. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION* *(continued)*

q. Borrowing costs

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the year, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

r. Provisions

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Group will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Such assessments would typically involve significant use of judgement and estimates. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/32 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Imbalan kerja

Kewajiban jangka pendek

Liabilitas untuk upah dan gaji, termasuk imbalan non-moneter dan akumulasi cuti sakit yang akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir dari periode ketika pekerja memberikan jasa yang berhubungan diakui dari jasa yang diberikan hingga akhir dari periode pelaporan dan diukur pada jumlah yang diperkirakan akan dibayar ketika liabilitas diselesaikan. Liabilitas disajikan sebagai kewajiban imbalan kerja masa kini pada laporan posisi keuangan.

Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") atau Peraturan Perusahaan ("PP"), mana yang lebih tinggi. Karena Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB adalah program manfaat pasti.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

s. Employee benefits

Short term obligations

Liabilities for wages and salaries, including non-monetary benefits and accumulating sick leave that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee benefit obligations in the statement of the financial position.

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, which is usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Manpower Regulation or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA") or the Company Regulation (the "CR"), whichever is higher. Since the Manpower Regulation or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under the Manpower Regulation or the CLA represent defined benefit plans.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/33 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Sehubungan dengan program manfaat pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian setara dengan nilai kini kewajiban manfaat pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban manfaat pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

Nilai kini kewajiban manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan imbal hasil obligasi Pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program manfaat pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan pada ekuitas dalam penghasilan komperhensif lain.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar di muka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang tunjangan kecelakan dinas serta bantuan kematian dan pemakaman. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada PKB.

Tunjangan kecelakaan dinas diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris bagi karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun tidak.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***s. Employee benefits** (continued)*

Post-employment benefits (continued)

In respect of the defined benefit pension plans, the liability recognised in the consolidated statement of financial position is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of the plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment awards.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no active market for such bonds, the yields of Government bonds are used.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to the other comprehensive income in the year in which they arise. The accumulated remeasurements balance is reported in equity in the other comprehensive income.

For defined contribution plans, the Group pays contributions to public or private pension plans. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or reduction in future payments is available.

The Group provides other employee benefits such as disability benefit and death and funeral allowances benefit. The benefits that are paid are based on the CLA.

The disability benefit is provided to employees who have a work accident. The death benefit is provided to the heirs whether or not the employee passes away as a result of a work accident.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/34 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Grup menyediakan imbalan pemeliharaan kesehatan untuk karyawan yang berhak atas imbalan tersebut. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan pada karyawan aktif dan pensiunan yang memenuhi masa kerja minimum tertentu atau berhenti bekerja karena cacat atau meninggal dunia. Perkiraan biaya imbalan ini dicadangkan sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode akuntansi yang sama dengan yang digunakan untuk program pensiun imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode saat terjadinya.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang cuti besar dan penghargaan kesetiaan kerja. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada PKB.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun terus menerus. Penghargaan kesetiaan kerja diberikan setiap delapan tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 16 tahun terus menerus.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***s. Employee benefits** (continued)*

Health care benefits

The Group provides health care benefits to its employees who are entitled to these benefits. The entitlement to these benefits is usually granted to both active and retired employees who have fulfilled the minimum service period or ceased working due to disability or death. The expected costs of these benefits are accrued over the years of employment using the same accounting method as used for defined benefit pension plans. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period they arise.

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long leave allowance and loyalty benefit. The benefits paid are based on the CLA.

The long leave allowance is given to employees who have worked for at least six years continuously. The loyalty benefit is given every eight years for employees who have worked for 16 years continuously.

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit method. The long-term employee benefits liabilities recognised in the consolidated statement of financial position represent the present value of the defined benefit obligation.

Termination benefits

Termination benefits are paid when employee is terminated by the Group before the normal retirement date or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of termination benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" that involve the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees who are expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/35 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru atau opsi disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak dari jumlah yang diterima.

u. Pembagian dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

v. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Penjualan tenaga listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PLN dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya.

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu ketika listrik dikonsumsi oleh PLN.

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi dan jasa lainnya

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu hanya jika Grup dapat mengukur dengan andal atas penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tertentu, Grup mungkin tidak dapat mengukur hasil atas kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Grup berekspektasi untuk memulihkan biaya yang timbul dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, Grup mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang timbul sampai saat yang dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi pembangkit tenaga listrik diakui atas dasar pekerjaan yang diselesaikan dalam sepanjang waktu pada saat jasa tersebut diberikan kepada pelanggan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

t. Share capital

Ordinary shares are classified as equity and incremental costs directly attributable to the issuance of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax from the proceeds.

u. Dividend distributions

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as liabilities in the consolidated financial statements in the period when the dividends are declared.

v. Revenue and expense recognition

Revenue

Sales of electricity

Revenue from sales of electricity is recognised based on electricity supply (kWh) to PLN using the tariff formula stipulated in the power purchase agreements. The tariff formula includes the calculation of the capacity component, the fixed cost for operations and maintenance components, the fuel costs, power supply levels and other variables.

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time when electricity is consumed by PLN.

Rendering of services on maintenance and operation and other services

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time only if the Group can reasonably measure its progress towards the complete satisfaction of the performance obligation. In some circumstances, the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Group expects to recover the costs that have been incurred in satisfying the performance obligation. In those circumstances, the Group recognises revenue only to the extent of the costs that have been incurred until such a time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

Revenue from services on maintenance and operation of power plant is recognised on the basis of the work completed over time as the services are rendered to the customers.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/36 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Komponen pembiayaan

Grup tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun dengan nilai waktu uang.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

w. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui pada ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat pada ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban usaha pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***v. Revenue and expense recognition** (continued)*

***Revenue** (continued)*

Financing component

The Group does not expect to have any contracts where the period between the transfer of the promised goods or services to the customer and the payment by the customer exceeds one year. Consequently, the Group does not adjust any of the transaction prices for the time value of money.

Expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

w. Income tax

Income tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity.

The current income tax is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period. Management periodically evaluates positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. Management establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

For income that is subject to final tax, tax expenses are recognised proportionally with the accounting revenue that is recognised and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/37 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; pajak tangguhan tidak diakui pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak memengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak atas dalam ventura bersama dan asosiasi dimana Grup dapat mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer dan kemungkinan perbedaan tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

w. Income tax *(continued)*

Deferred income tax is recognised using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in joint ventures and associates where the Group is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not be reversed in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/38 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Penentuan umur sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau tahun setelah opsi penghentian) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Umur sewa dinilai kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau grup menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang memengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

Sewa - penentuan suku bunga pinjaman inkremental

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan estimasi untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dibuat, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group as reported in future years.

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 2, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:

Determining lease term

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the identified asset throughout the period of use and right to direct the use of the identified asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option or not exercise a termination option. Extension options (or years after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the group becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs, which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

Leases - determination of incremental borrowing rate

Since the Group cannot readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need estimation in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining the incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/39 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan: (lanjutan)

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan hal berikut ini:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah; dan
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  - persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  - fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, lihat Catatan 10 untuk daftar ventura bersama tersebut. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan ventura bersama.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical judgements in applying accounting policies *(continued)*

In the process of applying the accounting policies described in Note 2, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made: (continued)

Interest in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers the following:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle; and*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
  - *the legal form of the separate vehicle;*
  - *the terms of the contractual arrangement; and*
  - *other facts and circumstances (when relevant).*

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures, see Note 10 for the list of joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangements. The Group has also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/40 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

Provisi atas KKE piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Dalam menentukan KKE piutang, manajemen diharuskan untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dalam membuat asumsi dan estimasi untuk memasukkan informasi yang relevan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan prakiraan kondisi ekonomi. Pertimbangan telah diterapkan dalam menentukan umur dan titik pengakuan awal piutang.

Tingkat penyisihan tertentu dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi kolektibilitas akun. Dalam kasus ini, Grup menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk hubungan dengan status kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk mencatat cadangan khusus untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo dalam jumlah yang diharapkan dapat diterima. Cadangan spesifik ini dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima memengaruhi jumlah yang diestimasi.

Taksiran masa manfaat aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap yang dimiliki Grup ditentukan berdasarkan periode aset tersebut diharapkan masih dapat digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis atau komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun, terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat memengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical accounting estimates and assumptions

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

Provision for ECL of trade receivables and other financial assets

In determining ECL for receivables, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions, and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectability of the accounts. In these cases, the Group uses judgement based on the best available facts and circumstances, including relationship with the customers credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in amounts that it expects to collect. These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated.

Estimated useful lives of property, plant and equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant, and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/41 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini. (lanjutan)

Nilai wajar aset tetap dan properti investasi yang menggunakan model revaluasi

Dalam proses revaluasi aset, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan masing-masing dalam Catatan 7 dan 9.

Imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Grup.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 14.

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical accounting estimates and assumptions *(continued)*

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below. (continued)

Fair value of property, plant and equipment and investment properties that use revaluation model

In the process of asset revaluation, management, with the assistance of an independent public valuer, determines the data inputs and assumptions, assesses valuation methods, and holds discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the asset class. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or in assumptions may significantly affect the value of assets that use the revaluation model.

Details of the valuation approach and significant data inputs used in the revaluation of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 7 and 9, respectively.

Post-employment benefits

The determination of post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries when calculating such amounts. Those assumptions include, among others, the discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from assumptions are accumulated and amortised over future periods and therefore, generally affect the recognised expenses and liabilities recorded in such future periods. While it is believed that the assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the post-employment benefits liability of the Group.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefits are disclosed in Note 14.

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/42 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini. (lanjutan)

Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi pajak dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical accounting estimates and assumptions *(continued)*

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below. (continued)

Income taxes (continued)

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

4. KAS DAN SETARA KAS / ***4. CASH AND CASH EQUIVALENTS***

	2025	2024	
Kas	3,649	2,877	*Cash on hand*
Bank			*Cash in banks*
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")*
Rupiah	1,215,139	4,160,410	*Rupiah*
US$	67,852	32,745	*US$*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")*
Rupiah	415,835	522,218	*Rupiah*
US$	35,301	63,584	*US$*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")*
Rupiah	2,619,404	1,871,305	*Rupiah*
US$	70,676	107,060	*US$*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")*
Rupiah	176,857	77,943	*Rupiah*
US$	2,851	796	*US$*
Subjumlah	4,603,915	6,836,061	*Subtotal*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/43 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / **4. *CASH AND CASH EQUIVALENTS*** *(continued)*

	2025	2024	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")			*PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")*
Rupiah	26,423	14,789	*Rupiah*
US$	8	8	*US$*
PT Bank KB Bukopin Tbk			*PT Bank KB Bukopin Tbk*
Rupiah	221	535	*Rupiah*
Subjumlah	26,652	15,332	*Subtotal*
Jumlah	4,630,567	6,851,393	***Total***
Deposito berjangka			*Time deposits*
Pihak berelasi			*Related parties*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	-	10,000	*Rupiah*
US$	266,162	116,330	*US$*
BRI			*BRI*
Rupiah	35,000	200,000	*Rupiah*
US$	951,289	283,432	*US$*
BNI			*BNI*
Rupiah	89,000	80,000	*Rupiah*
US$	30,096	-	*US$*
BSI			*BSI*
US$	120,384	-	*US$*
Subjumlah	1,491,931	689,762	*Subtotal*
Pihak ketiga			*Third party*
Bank CIMB Niaga			*Bank CIMB Niaga*
Rupiah	112	112	*Rupiah*
Jumlah	1,492,043	689,874	***Total***
Jumlah kas dan setara kas	**6,126,259**	**7,544,144**	***Total cash and cash equivalents***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rates per annum on time deposits*
Rupiah	3.50% - 4.00%	2.00% - 5.60%	*Rupiah*
US$	2.00% - 4.00%	1.75% - 5.00%	*US$*
Jangka waktu	1 - 3 bulan/ *months*	1 - 3 bulan/ *months*	*Maturity*

Lihat Catatan 26 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for information on the details of transactions and balances with related parties.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/44 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

	2025	2024	
Pihak berelasi	52,295,916	42,160,441	*Related parties*
Pihak ketiga	209,488	215,192	*Third parties*
Dikurangi cadangan KKE	(55,908)	(52,201)	*Less allowance for ECL*
Jumlah, bersih - pihak ketiga	**153,580**	**162,991**	***Total, net - third parties***
Jumlah, bersih	**52,449,496**	**42,323,432**	***Total, net***

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	2025	2024	
Belum jatuh tempo	27,701,167	13,843,316	*Not yet due*
Sudah jatuh tempo:			*Past due:*
1 - 30 hari	196,015	3,736,671	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	3,418,225	10,547,279	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	1,131,580	3,267,020	*61 - 90 days*
91 - 120 hari	8,708,945	2,665,427	*91 - 120 days*
Lebih dari 120 hari	11,293,564	8,263,719	*More than 120 days*
Jumlah, bersih	**52,449,496**	**42,323,432**	***Total, net***

Mutasi cadangan KKE adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for ECL is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal tahun	52,201	47,648	*Balance at beginning of year*
Penambahan	3,707	4,553	*Additions*
Saldo akhir tahun	**55,908**	**52,201**	***Balance at end of year***

Berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan PLN, piutang usaha Perusahaan disalinghapuskan terhadap utang usaha terkait pembelian energi primer dan utang bunga atas pinjaman dari pemegang saham (Catatan 29d).

Based on the agreement between the Company and PLN, the trade receivables of the Company were offset with trade payables related to the purchase of primary energy and interest payable on loans from a shareholder (Note 29d).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada risiko signifikan terkait piutang usaha yang telah lama jatuh tempo. Di dalam grup PLN, PLN bertindak sebagai pusat perbendaharaan yang bertanggung jawab mengelola alokasi arus kas di seluruh grup PLN. Oleh karena itu, PLN akan membayar piutang dengan memadai sesuai dengan alokasi arus kasnya, memastikan bahwa Perusahaan memiliki arus kas yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya.

Management believes there is no significant risk associated with long-outstanding receivables. Within the PLN group, PLN acts as the treasury center which responsible for managing the allocation of cash flows across the PLN group. As a result, PLN will sufficiently settle the receivables according to its cash flow allocation, ensuring that the Company has the necessary cash flow for its operational activities.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas KKE untuk piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang dibentuk cukup untuk menutupi risiko kerugian kredit dari piutang usaha.

Management is of the opinion that the allowance for ECL of trade receivables as at 31 December 2025 and 2024 is adequate to cover the credit loss risk of trade receivables.

Lihat Catatan 26 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for information on the details of transactions and balances with related parties.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/45 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PERSEDIAAN / *INVENTORIES*

	2025	2024	
Batubara, bahan bakar dan pelumas	3,208,178	3,853,917	*Coal, fuel and lubricants*
Suku cadang dan bahan pendukung	917,954	946,303	*Spare parts and consumables*
Jumlah	4,126,132	4,800,220	*Total*
Cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	(69,879)	(68,304)	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Jumlah, bersih	**4,056,253**	**4,731,916**	***Total, net***

Pergerakan cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal tahun	68,304	49,332	*Balance at beginning of year*
Penambahan	1,575	18,972	*Additions*
Saldo akhir tahun	**69,879**	**68,304**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah cukup untuk menutupi risiko kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang.

Management is of the opinion that the allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence as at 31 December 2025 and 2024 is adequate to cover the possible losses on the decline in value of inventories and inventory obsolescence.

Jumlah pemakaian persediaan yang diakui sebagai beban usaha dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp29.281.504 dan Rp26.921.217.

The total amount of inventories used recognised as operating expenses in profit or loss for the years ended 31 December 2025 and 2024 amounted to Rp29,281,504 and Rp26,921,217, respectively.

7. ASET TETAP / *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT*

	2025					
	1 Januari/ *January* 2025	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December* 2025	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Hak atas tanah	17,674,439	-	-	-	17,674,439	*Land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	27,242,634	98,971	-	43,880	27,385,485	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	212,181,406	503,379	-	921,363	213,606,148	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi	13,156,580	28,582	-	439,704	13,624,866	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	27,914	-	-	(17,198)	10,716	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	5,343,068	206,171	-	114,326	5,663,565	*General equipment*
Kendaraan bermotor	786,906	26,580	-	44,944	858,430	*Motor vehicles*
Material cadang utama	292,270	4,203	-	54,055	350,528	*Major spare parts*
Subjumlah	276,705,217	867,886	-	1,601,074	279,174,177	*Subtotal*
Aset dalam pembangunan	1,603,498	2,706,226	-	(2,171,681)	2,138,043	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	2,912,463	-	(152,286)	570,607	3,330,784	*Assets not used in operations*
Jumlah	281,221,178	3,574,112	(152,286)	-	284,643,004	*Total*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/46 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan) / *7. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

	2025					
	1 Januari/ *January 2025*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December 2025*	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	961,228	-	(828)	960,400	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	7,871,646	-	(17,077)	7,854,569	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi	-	416,294	-	(336)	415,958	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	3,129	-	(39)	3,090	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	4,696,203	283,631	-	(75,555)	4,904,279	*General equipment*
Kendaraan bermotor	682,525	45,784	-	(15,747)	712,562	*Motor vehicles*
Material cadang utama	-	12,731	-	(1)	12,730	*Major spare parts*
Subjumlah	5,378,728	9,594,443	-	(109,583)	14,863,588	*Subtotal*
Aset tidak digunakan dalam operasi	2,026,186	754,523	(152,286)	109,583	2,738,006	*Assets not used in operations*
Jumlah	7,404,914	10,348,966	(152,286)	-	17,601,594	*Total*
Jumlah tercatat bersih	**273,816,264**				**267,041,410**	***Net carrying value***

	2024						
	1 Januari/ *January 2024*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Dampak revaluasi/ *Revaluation impact*	31 Desember/ *December 2024*	
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Hak atas tanah	17,075,712	185	-	147,100	451,442	17,674,439	*Land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	28,657,958	71,428	-	646,264	(2,133,016)	27,242,634	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	230,846,661	976,359	-	(3,770,655)	(15,870,959)	212,181,406	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi	4,345,280	24,919	-	9,441,290	(654,909)	13,156,580	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	49,556	-	-	(2,239)	(19,403)	27,914	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	5,105,756	150,009	-	87,303	-	5,343,068	*General equipment*
Kendaraan bermotor	744,470	8,708	-	33,728	-	786,906	*Motor vehicles*
Material cadang utama	680,593	463	-	(326,867)	(61,919)	292,270	*Major spare parts*
Subjumlah	287,505,986	1,232,071	-	6,255,924	(18,288,764)	276,705,217	*Subtotal*
Aset dalam pembangunan	4,746,689	2,522,407	-	(5,665,598)	-	1,603,498	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	3,632,374	-	(262,851)	(379,733)	(77,327)	2,912,463	*Assets not used in operations*
Jumlah	295,885,049	3,754,478	(262,851)	210,593	(18,366,091)	281,221,178	*Total*
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan umum, waduk dan prasarana	1,741,884	879,045	-	-	(2,620,929)	-	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	14,935,815	7,463,385	-	-	(22,399,200)	-	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi	513,886	392,963	-	-	(906,849)	-	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	14,508	6,094	-	-	(20,602)	-	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	4,352,797	343,406	-	-	-	4,696,203	*General equipment*
Kendaraan bermotor	628,080	54,445	-	-	-	682,525	*Motor vehicles*
Material cadang utama	41,412	11,828	-	-	(53,240)	-	*Major spare parts*
Subjumlah	22,228,382	9,151,166	-	-	(26,000,820)	5,378,728	*Subtotal*
Aset tidak digunakan dalam operasi	2,376,031	53,868	(262,851)	(63,535)	(77,327)	2,026,186	*Assets not used in operations*
Jumlah	24,604,413	9,205,034	(262,851)	(63,535)	(26,078,147)	7,404,914	*Total*
Jumlah tercatat bersih	**271,280,636**					**273,816,264**	***Net carrying value***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/47 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

7. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT* *(continued)*

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2025	2024	
Beban usaha	9,594,443	9,151,166	*Operating expenses*
Beban lain-lain, bersih	754,523	53,868	*Other expenses, net*
Jumlah	**10,348,966**	**9,205,034**	***Total***

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu, sedangkan HGB akan jatuh tempo antara tahun 2026 sampai dengan 2053, tetapi dapat diperpanjang oleh Grup. Grup juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Grup.

The Group owns several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date, while HGB will expire from 2026 to 2053, but they are renewable by the Group. The Group also has several land rights, that are still in the extension process and in the process of transfer of certificates to the name of the Group.

Aset tetap, kecuali hak atas tanah dan kendaraan bermotor, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya (termasuk *machinery breakdown*) kepada PT Asuransi Tugu Pratama ("Tugu") dan PT Asuransi Perisai Listrik Nasional ("APLN"), dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar US$9,4 milyar dan Rp127.533 pada 31 Desember 2025. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

The property, plant and equipment, except land rights and motor vehicles, has been insured against fire and other possible risks (including machinery breakdown) with PT Asuransi Tugu Pratama ("Tugu") and PT Asuransi Perisai Listrik Nasional ("APLN"), with the coverage amounting to US$9.4 billion and Rp127,533 at 31 December 2025. Management is of the opinion that the sum insured is adequate to cover the possible losses on the insured assets.

Revaluasi aset

Assets revaluation

Pada 2024, manajemen mempekerjakan penilai eksternal independen dan berkualifikasi, Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") untuk menentukan nilai wajar aset tetap. KJPP RHR merupakan penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

In 2024, management engaged external independent and qualified valuers, Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") to determine the fair value of its property, plant, and equipment. KJPP RHR is an independent valuer registered in the Ministry of Finance and FSA.

Tabel di bawah ini menganalisis aset tetap yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan hierarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 113 berdasarkan valuasi tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

The table below analyses the property, plant and equipment that have been recorded at fair value, based on the fair value hierarchy in SFAS No. 113 based on valuation as at 31 December 2024 as follows:

	Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2024 menggunakan/ *Fair value measurements as at 31 December 2024 using*				
	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Jumlah/ *Total*	
Pengukuran nilai wajar					***Fair value measurement***
Hak atas tanah	-	422,639	17,251,800	17,674,439	*Land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	474,111	26,768,523	27,242,634	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	-	212,181,406	212,181,406	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi	-	-	13,156,580	13,156,580	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	-	27,914	27,914	*Telecommunications and data processing equipment*
Material cadang utama	-	-	292,270	292,270	*Major spare parts*
Jumlah	**-**	**896,750**	**269,678,493**	**270,575,243**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/48 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Revaluasi aset (lanjutan)

Perbedaan tingkatan nilai wajar dijelaskan sebagai berikut:
- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) di pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam nilai wajar Tingkat 1.

Tidak terdapat transfer antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 selama tahun berjalan.

Nilai wajar Tingkat 2 dari hak atas tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan tergantung dari kondisi tertentu, bangunan umum menggunakan pendekatan biaya. Input yang diperoleh dari pasar yaitu antara lain:

a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
e. Biaya pembuatan baru per meter persegi;
f. Tingkat depresiasi;
g. Biaya operasional;
h. Keuntungan pengembang; dan
i. Indeks Kemahalan Konstruksi.

Rekonsiliasi atas saldo awal terhadap saldo akhir dari pengukuran nilai wajar dengan menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

7. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT *(continued)*

Assets revaluation *(continued)*

The different levels of fair value are defined as follows:
- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

There were no property, plant and equipment which could be classified at Level 1 fair value.

There were no transfers between Levels 1 and 2 during the year.

The Level 2 fair value of land rights is calculated using the market approach and income approach depends on certain circumstances, building is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market that consists of, among others, the following:

a. Sale or rental price per square metre;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount and capitalisation rate;
e. Replacement cost new per square metre;
f. Depreciation rate;
g. Operational expense;
h. Developer margin; and
i. Construction Cost Index.

Reconciliation of the beginning balances to the closing balances of the fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follow:

	1 Januari/ *January* 2024	Penambahan/ *Additions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Jumlah yang diakui dalam laba rugi/ *Amounts to be recognised in profit or loss*		Penghasilan/ (kerugian) yang diakui pada penghasilan komprehensif lain/ *Gains/(losses) recognised in other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2024	
				Depresiasi/ *Depreciation*	Penurunan nilai/ *Impairment*			
Hak atas tanah	16,700,330	185	147,100	-	-	404,185	17,251,800	*Land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	26,580,620	64,136	587,082	(879,045)	(7,344)	423,074	26,768,523	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	215,910,846	976,359	(3,770,655)	(7,463,385)	(80,942)	6,609,183	212,181,406	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi	3,831,394	24,919	9,441,290	(392,963)	(16,782)	268,722	13,156,580	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	35,048	-	(2,239)	(6,094)	63	1,136	27,914	*Telecommunications and data processing equipment*
Material cadang utama	639,181	463	(326,867)	(11,828)	-	(8,679)	292,270	*Major spare parts*
Jumlah	**263,697,419**	**1,066,062**	**6,075,711**	**(8,753,315)**	**(105,005)**	**7,697,621**	**269,678,493**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/49 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Revaluasi aset (lanjutan)

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Nilai wajar Tingkat 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi.

Selain menggunakan input yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan lainnya.

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

7. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT *(continued)*

Assets revaluation *(continued)*

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

The Level 3 fair value is calculated through the market approach, income approach, and cost approach by using unobservable inputs.

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialised property, such as power plants, transmission networks, and others.

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024/ *Fair value as at 31 December 2024*	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable inputs*	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable inputs*	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Hak atas tanah						***Land rights***
Hak atas tanah pembangkit	17,251,800	Pendekatan pendapatan dengan metode pengembangan lahan/ *The income approach with the land development method*	-Penyesuaian parameter pengembangan/ *Adjustment of parameter development*	60% - 80%*	-Semakin tinggi koefisien luas bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher KLB, the higher fair value*	*Power plant land rights*
			-Data luas dan aspek legal/ *Land area and legal aspects*	-	-Tanah bersertifikat akan memiliki nilai wajar lebih tinggi/ *Certified land will have the higher fair value*	
			-Perubahan peruntukan/ *Zoning changes*	-	-Peruntukan tanah sekitar mengindikasikan nilai wajar yang lebih tinggi/ *Zoning of neighboring land might have the higher fair value*	
Bangunan						***Buildings***
Bangunan pembangkit	17,448,244	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Indeks koefisien jenis pembangkit/ *Power plant type index coefficient***	1.50 - 6.91	-Semakin besar indeks koefisien maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*Power plant buildings*
			-Volume bangunan/ *Building volumes*	60% - 70%*	-Semakin besar volume maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher building volumes, the higher fair value*	
Waduk dan prasarana	9,261,949	Trending/ *Trending*	-Indeks koefisien berdasarkan Badan Pusat Statistik ("BPS")/ *Index coefficient BPS*	1.00 - 2.57	-Semakin besar tingkat indeks koefisien maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*Reservoir and infrastructure*
			-Nilai perolehan/ *Acquisition value*	10% - 30%	-Semakin besar nilai perolehan, semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the acquisition costs, the higher fair value*	
Jalan dan sepur samping	58,330	Trending/ *Trending*	-Indeks koefisien BPS/ *Index coefficient BPS*	1.00 - 2.57	-Semakin besar tingkat indeks koefisien maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*Road and rail side*
			-Nilai perolehan/ *Acquisition value*	10% - 30%	-Semakin besar nilai perolehan maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the acquisition costs, the higher the fair value*	

*) Kisaran bobot dari input yang tidak dapat diobservasi/*The range of weights of the unobservable input*
**) Untuk pembangkit listrik tenaga minyak gas ("PLTMG") dan pembangkit listrik tenaga gas *mobile power plant* ("PLTG MPP")/ *For oil and gas power plants ("PLTMG") and gas mobile power plants ("PLTG MPP")*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/50 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Revaluasi aset (lanjutan)

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

7. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT* *(continued)*

Assets revaluation *(continued)*

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows: (continued)

	Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024/ *Fair value as at 31 December 2024*	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable inputs*	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable inputs*	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Instalasi dan mesin pembangkit	212,181,406	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat kemunduran fungsional/ *Functional obsolescence rate*	1% - 71%	-Semakin besar tingkat kemunduran fungsional maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher functional obsolescence rate, the lower fair value*	***Installation and power plants***
			-Nilai pengganti baru/ *Replacement cost new ("RCN")*	50% - 60%*	-Semakin tinggi nilai pengganti baru maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher RCN, the higher fair value*	
			-Tingkat indeks *Producer Price Index* ("PPI")/ *PPI index rate*	1.00 - 3.80	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	
Perlengkapan transmisi	13,156,580	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat kemunduran fungsional/ *Functional obsolescence rate*	1% - 71%	-Semakin besar tingkat kemunduran fungsional maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher functional obsolescence rate, the lower fair value*	***Transmission equipment***
			-Nilai pengganti baru/ *RCN*	50% - 60%*	-Semakin tinggi nilai pengganti baru maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher RCN, the higher fair value*	
			-Tingkat indeks *Producer Price Index* ("PPI")/ *PPI index rate*	1.00 - 3.80	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	27,914	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 1.10	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Telecommunications and data processing equipment***
			-Nilai perolehan/ *Acquisition value*	50% - 60%*	-Semakin besar nilai perolehan maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the acquisition costs, the higher fair value*	
Material cadang utama	292,270	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 3.80	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Major spare parts***
			-Nilai perolehan/ *Acquisition value*	50% - 60%*	-Semakin besar nilai perolehan maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the acquisition costs, the higher fair value*	

*) Kisaran bobot dari input yang tidak dapat diobservasi/*The range of weights of the unobservable input*
**) Untuk PLTMG dan PLTG MPP/*For PLTMG and PLTG MPP*"

Selain yang menggunakan model revaluasi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

Other than the assets for which the revaluation model has been applied, there is no significant difference between the fair value and the carrying value of the property, plant, and equipment.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/51 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan) / ***7. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT*** *(continued)*

Revaluasi aset (lanjutan) / ***Assets revaluation*** *(continued)*

Mutasi surplus revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut: / *The movements of property, plant and equipment revaluation surplus are as follows:*

	2025	2024	
Saldo awal tahun	217,374,893	211,175,421	*Balance at beginning of year*
Peningkatan surplus revaluasi	-	7,820,712	*Increase on revaluation surplus*
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba atas penghapusan aset tidak digunakan dalam operasi	(15,989)	-	*Reclassification on revaluation surplus from disposals of assets not used in operations*
Subjumlah	(15,989)	7,820,712	*Subtotal*
Beban pajak terkait	-	(1,621,240)	*Related income tax expense*
Saldo akhir tahun	**217,358,904**	**217,374,893**	***Balance at end of year***

Jika Grup tidak menerapkan model revaluasi, nilai tercatat bersih aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp141.858.749 dan Rp141.580.433.

If the Group did not apply the revaluation model, the net carrying value of the property, plant and equipment as at 31 December 2025 and 2024 would have amounted to Rp141,858,749 and Rp141,580,433, respectively.

Aset dalam pembangunan / ***Construction in progress***

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/ perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut: / *This account represents the costs that have been incurred in relation to the construction and renovation/repairs of power supply facilities, as follows:*

	2025	2024	
Pembangkit listrik			*Power plants*
Tenaga uap ("PLTU")	866,395	695,413	*Steam power plant ("PLTU")*
Tenaga gas uap ("PLTGU")	343,474	457,979	*Steam gas power plant ("PLTGU")*
Tenaga air ("PLTA")	303,804	148,520	*Hydro power plant ("PLTA")*
Tenaga gas ("PLTG")	293,061	169,724	*Gas power plant ("PLTG")*
Tenaga diesel ("PLTD")	247,349	85,996	*Diesel power plant ("PLTD")*
Fungsi pendukung	83,960	45,866	*Supporting function*
Jumlah	**2,138,043**	**1,603,498**	***Total***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan masing-masing sebesar Rpnihil dan Rp77.070.

For the years ended 31 December 2025 and 2024, the borrowing costs that were capitalised to construction in progress were Rpnil and Rp77,070, respectively.

Aset tidak digunakan dalam operasi / ***Assets not used in operations***

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang akan direlokasi/ditransfer, sedang diperbaiki, dan akan dihapus.

Assets not used in operations consist of property, plant and equipment that will be relocated/transferred, under repaired, and to be disposed.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, terdapat aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi dan telah dijual dengan harga jual bersih dan keuntungan yang diakui masing-masing sebesar Rp393 dan Rp790.

As of 31 December 2025 and 2024, certain assets that were not used in operations were sold, with net sales proceeds and recognised gains of Rp393 and Rp790, respectively.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Based on management's assessment, there were no events or changes in circumstaces that indicate significant decline in the value of the property, plant and equipment as at 31 December 2025 and 2024.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/52 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET HAK GUNA / *8. RIGHT-OF-USE ASSETS*

	2025				
	1 Januari/ *January* 2025	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	31 Desember/ *December* 2025	
Biaya perolehan					***Acquisition costs***
Hak atas tanah	845,714	6,427	-	852,141	*Land rights*
Bangunan	41,272	8,415	-	49,687	*Buildings*
Perlengkapan transmisi	1,662,263	-	-	1,662,263	*Transmission equipment*
Perlengkapan umum	3,225	-	(185)	3,040	*General equipment*
Kendaraan bermotor	247,577	173,276	(45,609)	375,244	*Motor vehicles*
Jumlah	2,800,051	188,118	(45,794)	2,942,375	*Total*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Hak atas tanah	203,664	86,228	-	289,892	*Land rights*
Bangunan	28,180	10,803	-	38,983	*Buildings*
Perlengkapan transmisi	267,702	129,690	-	397,392	*Transmission equipment*
Perlengkapan umum	93	37	(37)	93	*General equipment*
Kendaraan bermotor	158,910	102,001	(30,082)	230,829	*Motor vehicles*
Jumlah	658,549	328,759	(30,119)	957,189	*Total*
Jumlah tercatat bersih	**2,141,502**			**1,985,186**	***Net carrying value***

	2024				
	1 Januari/ *January* 2024	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	31 Desember/ *December* 2024	
Biaya perolehan					***Acquisition costs***
Hak atas tanah	1,017,719	8,789	(180,794)	845,714	*Land rights*
Bangunan	36,844	9,266	(4,838)	41,272	*Buildings*
Instalasi dan mesin pembangkit	143,671	-	(143,671)	-	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi	1,662,263	-		1,662,263	*Transmission equipment*
Perlengkapan umum	280	3,225	(280)	3,225	*General equipment*
Kendaraan bermotor	197,975	81,134	(31,532)	247,577	*Motor vehicles*
Jumlah	3,058,752	102,414	(361,115)	2,800,051	*Total*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Hak atas tanah	102,853	102,009	(1,198)	203,664	*Land rights*
Bangunan	19,759	10,215	(1,794)	28,180	*Buildings*
Instalasi dan mesin pembangkit	95,780	47,891	(143,671)	-	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi	137,976	129,726	-	267,702	*Transmission equipment*
Perlengkapan umum	14	79	-	93	*General equipment*
Kendaraan bermotor	114,908	76,837	(32,835)	158,910	*Motor vehicles*
Jumlah	471,290	366,757	(179,498)	658,549	*Total*
Jumlah tercatat bersih	**2,587,462**			**2,141,502**	***Net carrying value***

Beban penyusutan untuk aset hak guna disajikan sebagai bagian dari beban usaha sebesar Rp328.759 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 (2024: Rp366.757).

Depreciation expense for right-of-use assets was presented as part of operating expenses and is recognised in profit or loss amounting to Rp328,759 for the year ended 31 December 2025 (2024: Rp366,757).

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset hak guna secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Based on management's review, there are no events or changes in circumstances that indicate a significant decline in the value of the right-of-use assets on 31 December 2025 and 2024.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/53 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PROPERTI INVESTASI / *9. INVESTMENT PROPERTIES*

	2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Perubahan nilai wajar/ *Changes in fair value*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pemilikan langsung					*Direct acquisition*
Hak atas tanah dan bangunan	1,540,618	30,703	-	1,571,321	*Land rights and buildings*

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Perubahan nilai wajar/ *Changes in fair value*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pemilikan langsung					*Direct acquisition*
Hak atas tanah dan bangunan	1,630,239	57,437	(147,058)	1,540,618	*Land rights and buildings*

Properti investasi merupakan hak atas tanah dan bangunan yang dimilik Perusahaan yang terletak di Surabaya - Jawa Timur, Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Karawang - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Cipeundeuy - Bandung Barat, Tarahan - Bandar Lampung dan Asahan - Sumatra Utara dengan hak legal berupa HGB berjangka waktu dari 32 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2042, yang disewakan kepada PLN, PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), BNI, PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java ("PHE ONWJ"), PT Nusantara Regas ("NR"), PT Cirata Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited, PT Andritz, PT Lisna Abadi Utama dan PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN").

Investment properties represents land rights and building that owned by the Company located in Surabaya - East Java, Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Karawang - West Java, Pluit - North Jakarta, Cipeundeuy - West Bandung, Tarahan - Bandar Lampung and Asahan - North Sumatra with HGB for periods between 32 to 40 years, which will be expired in 2042, which are leased to PLN, PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), BNI, PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java ("PHE ONWJ"), PT Nusantara Regas ("NR"), PT Cirata Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited, PT Andritz, PT Lisna Abadi Utama and PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN").

Pendapatan dari properti investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.111 dan Rp55.575.

Income from investment properties for the years ended 31 December 2025 and 2024 amounted to Rp20,111 and Rp55,575, respectively.

Pada tanggal tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi, yang masing-masing dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan ("KJPP MBPRU") dan KJPP RHR, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

As at 31 December 2025 and 2024, the Company performed a revaluation of the fair value of its investment properties which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun and Partners ("KJPP MBPRU") and KJPP RHR, respectively, independent valuers registered with the Ministry of Finance and FSA.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/54 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai Tingkat 2 dalam hierarki nilai wajar.

Nilai wajar Tingkat 2 dari hak atas tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:
a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan; dan
d. Tingkat diskonto.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah, dan elemen perbandingan lainnya.

Grup juga mencatat perubahan nilai wajar yang disajikan sebagai bagian dari beban lain-lain - bersih dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Berdasarkan penilaian manajemen, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

***9. INVESTMENT PROPERTIES** (continued)*

The fair values of the investment properties are within Level 2 of the fair value hierarchy.

The Level 2 fair value of the land rights calculated using the market approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of:
a. Sale or rental price per square metre;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate; and
d. Discount rate.

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land rights, and other comparison elements.

The Group also recorded the changes in fair value were presented as part of other expenses - net in statement of profit or loss for the years ended 31 December 2025 and 2024.

Based on management's assessment, there are no events or changes in circumstances that indicate any impairment in the value of the investment properties as at 31 December 2025 and 2024.

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

Details of the investments in associates and joint ventures are as follows:

Entitas/*Entity*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Tahun operasi/ *Commercial operations*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2025	2024
Investasi pada entitas asosiasi/ *Investments in associates*					
PT Sumber Segara Primadaya ("S2P")	Cilacap	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam power plant*	2006	49.00	49.00
PT Rekind Daya Mamuju ("RDM")	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam power plant*	2018	10.00**)	10.00**)
PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali ("SS Pewali")	Sumatra Selatan/ *South Sumatra*	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam power plant*	2025	10.00**)	10.00**)
Investasi pada ventura bersama/ *Investments in joint ventures*					
PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Palembang	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam power plant*	2015	40.25	40.25
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("KPJB")	Jepara	Operasi dan pemeliharaan/ *Operational and maintenance*	2010	49.00	49.00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam power plant*	2019	30.00	30.00
BDSN	Asahan	Pembangkit listrik tenaga air/ *Hydro power plant*	2011	36.61	36.61
PT North Sumatera Hydro Energy ("NSHE")	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga air/ *Hydro power plant*	*)	25.00	25.00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali ("GTPJB")	Jakarta	Operasi dan pemeliharaan/ *Operational and maintenance*	2019	30.00	30.00
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi ("PMSE")	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya/ *Solar power plant*	2023	51.00	51.00
PT Nusantara Sembcorp Solar Energy ("NSSE")	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya/ *Solar power plant*	2024	51.00	51.00
PT Nusantara Tembesi Baru Energi ("NTBE")	Batam	Pembangkit listrik tenaga surya/ *Solar power plant*	*)	51.00	51.00
PT Nusantara Guodian Karangkates Indonesia ("NGKI")	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya/ *Solar power plant*	*)	51.00	51.00

*) Dalam tahap pengembangan/*Under development stage*
**) Terdapat perwakilan Grup/*There is the Group's representative*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/55 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Grup dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar kuotasian yang tersedia untuk sahamnya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

All associates and joint ventures are recorded by the Group using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for their shares.

As at 31 December 2025 and 2024, management believes that there is no significant restriction and risk regarding the investments in associates and joint ventures.

The movements in the investments in associates and joint ventures are as follows:

	2025						
	Jumlah tercatat 1 Januari 2025/ *Carrying amount 1 January 2025*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba/(rugi) bersih/ *Share in net income/ (loss)*	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ *Share in other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2025/ *Carrying amount 31 December 2025*	
Entitas asosiasi							***Associates***
S2P	8,527,062	-	(497,050)	1,213,037	-	9,243,049	*S2P*
RDM	39,083	-	-	(21,863)	-	17,220	*RDM*
SS Pewali	66,411	-	-	(1,960)	-	64,451	*SS Pewali*
Subjumlah	**8,632,556**	**-**	**(497,050)**	**1,189,214**	**-**	**9,324,720**	***Subtotal***
Ventura bersama							***Joint ventures***
BPI	1,841,820	-	(34,152)	47,966	61,861	1,917,495	*BPI*
KPJB	77,426	-	(6,822)	6,234	-	76,838	*KPJB*
SGPJB	5,294,628	-	(176,437)	725,497	203,354	6,047,042	*SGPJB*
BDSN	1,199,998	-	(142,422)	176,402	45,704	1,279,682	*BDSN*
NSHE	2,270,420	-	-	335,720	80,381	2,686,521	*NSHE*
GTPJB	3,072	-	-	265	153	3,490	*GTPJB*
PMSE	224,522	-	-	19,005	10,677	254,204	*PMSE*
NSSE	102,514	1,925	-	19,722	1	124,162	*NSSE*
NGKI	151,643	3,976	-	1,021	-	156,640	*NGKI*
NTBE	43,054	-	-	(647)	(2,609)	39,798	*NTBE*
Subjumlah	**11,209,097**	**5,901**	**(359,833)**	**1,331,185**	**399,522**	**12,585,872**	***Subtotal***
Jumlah	**19,841,653**	**5,901**	**(856,883)**	**2,520,399**	**399,522**	**21,910,592**	***Total***

	2024						
	Jumlah tercatat 1 Januari 2024/ *Carrying amount 1 January 2024*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba/(rugi) bersih/ *Share in net income/ (loss)*	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ *Share in other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2024/ *Carrying amount 31 December 2024*	
Entitas asosiasi							***Associates***
S2P	7,590,934	-	(381,907)	1,318,035	-	8,527,062	*S2P*
RDM	46,588	-	-	(10,387)	2,882	39,083	*RDM*
SS Pewali	68,001	-	-	(1,590)	-	66,411	*SS Pewali*
Subjumlah	**7,705,523**	**-**	**(381,907)**	**1,306,058**	**2,882**	**8,632,556**	***Subtotal***
Ventura bersama							***Joint ventures***
BPI	1,803,802	-	(89,107)	42,957	84,168	1,841,820	*BPI*
KPJB	78,732	-	(6,822)	5,516	-	77,426	*KPJB*
SGPJB	4,593,871	-	(171,150)	643,883	228,024	5,294,628	*SGPJB*
BDSN	1,146,697	-	(125,165)	121,898	56,568	1,199,998	*BDSN*
NSHE	1,984,981	-	-	184,557	100,882	2,270,420	*NSHE*
GTPJB	3,061	-	(308)	359	(40)	3,072	*GTPJB*
PMSE	177,557	2,072	-	45,908	(1,015)	224,522	*PMSE*
NSSE	-	102,470	-	44	-	102,514	*NSSE*
NGKI	-	151,643	-	-	-	151,643	*NGKI*
NTBE	-	43,372	-	(318)	-	43,054	*NTBE*
Subjumlah	**9,788,701**	**299,557**	**(392,552)**	**1,044,804**	**468,587**	**11,209,097**	***Subtotal***
Jumlah	**17,494,224**	**299,557**	**(774,459)**	**2,350,862**	**471,469**	**19,841,653**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/56 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas:

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

The following tables contain the summarised financial information for associates and joint ventures as at 31 December 2025 and 2024 which are accounted for using the equity method:

Entitas asosiasi / *Associates*

	2025				
	S2P	RDM	SS Pewali	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	1,132,119	7,242	486,259	1,625,620	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	4,851,522	248,071	120,960	5,220,553	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	5,983,641	255,313	607,219	6,846,173	*Total current assets*
Aset tidak lancar	28,660,809	1,316,204	5,729,801	35,706,814	*Non-current assets*
Liabilitas lancar					*Current liabilities*
Liabilitas keuangan (tidak termasuk utang usaha)	4,118,201	917,709	525,374	5,561,284	*Financial liabilities (excluding trade payables)*
Liabilitas lancar lainnya	1,231,957	153,325	91,841	1,477,123	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	5,350,158	1,071,034	617,215	7,038,407	*Total current liabilities*
Liabilitas tidak lancar					*Non-current liabilities*
Liabilitas keuangan	7,407,404	106,885	3,950,518	11,464,807	*Financial liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya	3,009,770	55,767	1,124,824	4,190,361	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	10,417,174	162,652	5,075,342	15,655,168	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	18,877,118	337,831	644,463	19,859,412	*Net assets*
% kepemilikan	49.00%	10.00%	10.00%		*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih entitas asosiasi	9,249,788	33,783	64,446	9,348,017	*The Group's share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	(6,739)	(16,563)	5	(23,297)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**9,243,049**	**17,220**	**64,451**	**9,324,720**	***Total carrying value***
Pendapatan	13,083,275	28,393	1,205,573	14,317,241	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(6,735,300)	(180,628)	(901,692)	(7,817,620)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	(197,883)	-	-	(197,883)	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	22,774	-	-	22,774	*Finance income*
Beban keuangan	(789,276)	(72,998)	-	(862,274)	*Finance costs*
Beban usaha	(2,409,742)	(6,503)	(49,774)	(2,466,019)	*Operating expenses*
(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih	196,512	13,102	(273,705)	(64,091)	*Other (expenses)/income - net*
Beban pajak penghasilan	(694,775)	-	-	(694,775)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) tahun berjalan	2,475,585	(218,634)	(19,598)	2,237,353	*Profit/(loss) for the year*
% kepemilikan	49.00%	10.00%	10.00%		*% of ownership*
Bagian Grup atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi tahun berjalan	**1,213,037**	**(21,863)**	**(1,960)**	**1,189,214**	***The Group's share in net income/(loss) for the year of associates***
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	*Other comprehensive income*
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lainnya entitas asosiasi	-	-	-	-	***The Group's share of other comprehensive income of associates***
Dividen yang diterima dari entitas asosiasi	**(497,050)**	-	-	**(497,050)**	***Dividends received from associates***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/57 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas: (lanjutan)

***10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES** (continued)*

The following tables contain the summarised financial information for the associates and joint ventures as at 31 December 2025 and 2024 that have been accounted for using the equity method: (continued)

Entitas asosiasi (lanjutan)

***Associates** (continued)*

	2024				
	S2P	RDM	SS Pewali	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	909,817	13,154	145,637	1,068,608	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	4,866,075	299,408	28,489	5,193,972	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	5,775,892	312,562	174,126	6,262,580	*Total current assets*
Aset tidak lancar	29,278,617	1,362,567	5,652,329	36,293,513	*Non-current assets*
Liabilitas lancar					*Current liabilities*
Liabilitas keuangan (tidak termasuk utang usaha)	3,955,782	167,247	182,347	4,305,376	*Financial liabilities (excluding trade payables)*
Liabilitas lancar lainnya	1,340,102	99,872	537	1,440,511	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	5,295,884	267,119	182,884	5,745,887	*Total current liabilities*
Liabilitas tidak lancar					*Non-current liabilities*
Liabilitas keuangan	8,043,582	966,272	2,480,101	11,489,955	*Financial liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya	4,312,433	28,450	2,506,306	6,847,189	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	12,356,015	994,722	4,986,407	18,337,144	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	17,402,610	413,288	657,164	18,473,062	*Net assets*
% kepemilikan	49.00%	10.00%	10.00%		*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih entitas asosiasi	8,527,279	41,329	65,716	8,634,324	*The Group's share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	(217)	(2,246)	695	(1,768)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**8,527,062**	**39,083**	**66,411**	**8,632,556**	***Total carrying value***
Pendapatan	12,798,252	190,365	-	12,988,617	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(6,026,296)	(212,016)	-	(6,238,312)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	(181,524)	-	-	(181,524)	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	9,514	-	-	9,514	*Finance income*
Beban keuangan	(955,081)	(72,436)	-	(1,027,517)	*Finance costs*
Beban usaha	(2,202,558)	(7,743)	(27,136)	(2,237,437)	*Operating expenses*
(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih	13,218	(2,035)	11,185	22,368	*Other (expenses)/income - net*
Beban pajak penghasilan	(765,658)	-	51	(765,607)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) tahun berjalan	2,689,867	(103,865)	(15,900)	2,570,102	*Profit/(loss) for the year*
% kepemilikan	49.00%	10.00%	10.00%		*% of ownership*
Bagian Grup atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi tahun berjalan	**1,318,035**	**(10,387)**	**(1,590)**	**1,306,058**	***The Group's share in net income/(loss) for the year of associates***
Penghasilan komprehensif lainnya	-	28,824	-	28,824	*Other comprehensive income*
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lainnya entitas asosiasi	**-**	**2,882**	**-**	**2,882**	***The Group's share of other comprehensive income of associates***
Dividen yang diterima dari entitas asosiasi	**(381,907)**	**-**	**-**	**(381,907)**	***Dividends received from associates***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/58 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas: (lanjutan)

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

The following tables contain the summarised financial information for the associates and joint ventures as at 31 December 2025 and 2024 that have been accounted for using the equity method: (continued)

Ventura bersama / *Joint ventures*

	2025							
	BPI	KPJB	SGPJB	BDSN	NSHE	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	763,495	81,478	3,169,031	751,642	64,306	345,993	5,175,945	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	305,927	81,644	6,841,251	721,380	283	471,224	8,421,709	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	1,069,422	163,122	10,010,282	1,473,022	64,589	817,217	13,597,654	*Total current assets*
Aset tidak lancar	4,529,101	35,771	24,166,332	5,750,930	27,843,322	3,600,213	65,925,669	*Non-current assets*
Liabilitas lancar								*Current liabilities*
Liabilitas keuangan (tidak termasuk utang usaha)	9,352	22,302	3,295,569	139,835	2,244,360	30,217	5,741,635	*Financial liabilities (excluding trade payables)*
Liabilitas lancar lainnya	226,506	10,394	90,591	89,876	210,625	272,936	900,928	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	235,858	32,696	3,386,160	229,711	2,454,985	303,153	6,642,563	*Total current liabilities*
Liabilitas tidak lancar								*Non-current liabilities*
Liabilitas keuangan	-	501	9,242,247	2,182,625	13,296,187	2,903,770	27,625,330	*Financial liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya	601,356	7,783	1,420,352	1,310,053	1,410,656	42,804	4,793,004	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	601,356	8,284	10,662,599	3,492,678	14,706,843	2,946,574	32,418,334	*Total of non-current liabilities*
Aset bersih	4,761,309	157,913	20,127,855	3,501,563	10,746,083	1,167,703	40,462,426	*Net assets*
% kepemilikan	40.25%	49.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%		*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	1,916,427	77,377	6,038,357	1,281,922	2,686,521	593,226	12,593,830	*The Group's share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	1,068	(539)	8,685	(2,240)	-	(14,932)	(7,958)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**1,917,495**	**76,838**	**6,047,042**	**1,279,682**	**2,686,521**	**578,294**	**12,585,872**	***Total carrying value***
Pendapatan	939,033	249,072	10,513,224	712,372	5,346,551	715,371	18,475,623	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(689,006)	(211,046)	(7,013,402)	(19,908)	(3,013,588)	(217,508)	(11,164,458)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	(40,087)	(7,364)	-	(993)	-	(39,308)	(87,752)	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	-	6,331	125,760	5,118	-	3,628	140,837	*Finance income*
Beban keuangan	-	(401)	(1,012,060)	(155,452)	(691,187)	(229,264)	(2,088,364)	*Finance costs*
Beban usaha	(36,983)	(23,066)	(254,310)	(38,165)	(17,609)	(178,807)	(548,940)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain - bersih	(33,352)	5,349	87,969	(21,132)	80,009	25,573	144,416	*Other income/(expenses) - net*
Beban pajak penghasilan	(20,434)	(6,152)	(28,857)	-	(361,296)	(2,135)	(418,874)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) tahun berjalan	119,171	12,723	2,418,324	481,840	1,342,880	77,550	4,452,488	*Profit/(loss) for the year*
% kepemilikan	40.25%	49.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%		*% of ownership*
Bagian Grup atas laba bersih ventura bersama tahun berjalan	**47,966**	**6,234**	**725,497**	**176,402**	**335,720**	**39,366**	**1,331,185**	***The Group's share of net income for the year of joint ventures***
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lainnya	153,692	-	677,845	124,840	321,522	16,331	1,294,230	*Other comprehensive income/(losses)*
Bagian Grup atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya ventura bersama	**61,861**	**-**	**203,354**	**45,704**	**80,381**	**8,222**	**399,522**	***The Group's share of other comprehensive income/ (losses) of joint ventures***
Dividen yang diterima dari ventura bersama	**(34,152)**	**(6,822)**	**(176,437)**	**(142,422)**	**-**	**-**	**(359,833)**	***Dividends received from joint ventures***

	2024							
	BPI	KPJB	SGPJB	BDSN	NSHE	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	337,869	74,661	3,576,069	608,536	32,785	435,004	5,064,924	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	446,590	83,904	7,160,432	722,799	377	802,080	9,216,182	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	784,459	158,565	10,736,501	1,331,335	33,162	1,237,084	14,281,106	*Total current assets*
Aset tidak lancar	4,671,721	39,185	22,892,269	5,738,754	21,375,573	3,019,041	57,736,543	*Non-current assets*
Liabilitas lancar								*Current liabilities*
Liabilitas keuangan (tidak termasuk utang usaha)	13,127	13,922	3,037,323	247,813	2,231,938	1,021,171	6,565,294	*Financial liabilities (excluding trade payables)*
Liabilitas lancar lainnya	244,129	16,623	80,765	94,643	3,259	190,886	630,305	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	257,256	30,545	3,118,088	342,456	2,235,197	1,212,057	7,195,599	*Total current liabilities*
Liabilitas tidak lancar								*Non-current liabilities*
Liabilitas keuangan	-	-	11,325,391	2,208,582	9,157,941	1,982,328	24,674,242	*Financial liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya	618,582	9,897	1,536,558	1,241,266	978,847	1,541	4,386,691	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	618,582	9,897	12,861,949	3,449,848	10,136,788	1,983,869	29,060,933	*Total of non-current liabilities*
Aset bersih	4,580,342	157,308	17,648,733	3,277,785	9,036,750	1,060,199	35,761,117	*Net assets*
% kepemilikan	40.25%	49.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%		*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	1,843,588	77,081	5,294,620	1,199,997	2,259,188	538,452	11,212,926	*The Group's share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	(1,768)	345	8	1	11,232	(13,647)	(3,829)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**1,841,820**	**77,426**	**5,294,628**	**1,199,998**	**2,270,420**	**524,805**	**11,209,097**	***Total carrying value***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/59 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas: (lanjutan)

Ventura bersama (lanjutan)

10. *INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)*

The following tables contain the summarised financial information for the associates and joint ventures as at 31 December 2025 and 2024, that have been accounted for using the equity method: (continued)

***Joint ventures** (continued)*

	2024							
	BPI	**KPJB**	**SGPJB**	**BDSN**	**NSHE**	**Lainnya/ *Others***	**Jumlah/ *Total***	
Pendapatan	945,071	242,941	10,672,235	640,613	6,148,121	(431,609)	18,217,372	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(682,498)	(209,900)	(7,023,600)	(19,236)	(4,679,349)	-	(12,614,583)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	(31,459)	(8,890)	-	(1,004)	-	-	(41,353)	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	-	5,068	131,462	4,693	-	22,897	164,120	*Finance income*
Beban keuangan	-	(1,103)	(1,317,138)	(161,960)	(472,308)	(95,748)	(2,048,257)	*Finance costs*
Beban usaha	(86,459)	(17,829)	(266,161)	(50,026)	(37,551)	(23,656)	(481,682)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain - bersih	40,080	4,893	(87,395)	10,761	(2,516)	29,975	(4,202)	*Other income/(expenses) - net*
Beban pajak penghasilan	(78,010)	(3,923)	36,874	(90,876)	(218,170)	(26,566)	(380,671)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) tahun berjalan	106,725	11,257	2,146,277	332,965	738,227	(524,707)	2,810,744	*Profit/(loss) for the year*
% kepemilikan	40.25%	49.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%		*% of ownership*
Bagian Grup atas laba bersih ventura bersama tahun berjalan	**42,957**	**5,516**	**643,883**	**121,898**	**184,557**	**45,993**	**1,044,804**	***The Group's share of net income for the year of joint ventures***
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lainnya	209,113	-	760,079	154,516	403,528	(2,125)	1,525,111	*Other comprehensive income/(losses)*
Bagian Grup atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya ventura bersama	**84,168**	**-**	**228,024**	**56,568**	**100,882**	**(1,055)**	**468,587**	***The Group's share of other comprehensive income/ (losses) of joint ventures***
Dividen yang diterima dari ventura bersama	**(89,107)**	**(6,822)**	**(171,150)**	**(125,165)**	**-**	**(308)**	**(392,552)**	***Dividends received from joint ventures***

Investasi pada entitas diatas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Grup. Manajemen meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai.

The investments in the above entities are held primarily for the purpose of potential long-term growth, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Group. Management believes that there are no indications of impairment.

11. UTANG USAHA

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian bahan bakar, barang, dan jasa sebagai berikut:

11. *TRADE PAYABLES*

This account represents the payables arising from purchases of fuel, goods, and services as follows:

	2025	**2024**	
Pihak berelasi	5,354,332	5,974,317	*Related parties*
Pihak ketiga	3,615,512	3,445,246	*Third parties*
Jumlah	**8,969,844**	**9,419,563**	***Total***

Lihat Catatan 26 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for information on the details of transactions and balances with related parties.

12. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, pemeliharaan dan lainnya sebagai berikut:

12. *OTHER PAYABLES*

This account represents liabilities in connection with purchase of electricity, maintenance services and others as follows:

	2025	**2024**	
Pihak ketiga	1,037,961	1,265,572	*Third parties*
Pihak berelasi	823,920	595,620	*Related parties*
Jumlah	**1,861,881**	**1,861,192**	***Total***

Lihat Catatan 26 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for information on the details of transactions and balances with related parties.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/60 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. LIABILITAS SEWA / *13. LEASE LIABILITIES*

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa yang berkaitan dengan sewa tanah, bangunan, perlengkapan umum dan kendaraan bermotor. Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap berkisar dari 1 sampai dengan 12 tahun. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda.

The Group entered into several lease agreements related to the rental of land, buildings, general equipment and motor vehicles. Rental agreements are typically made for fixed periods ranging from 1 to 12 years. Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions.

Nilai kini pembayaran minimum atas liabilitas sewa tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments for such lease liabilities as at 31 December 2025 and 2024 is as follows:

	2025	2024	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	608,907	667,017	*No later than one year*
Antara lebih dari satu tahun sampai tiga tahun	726,856	726,194	*Later than one year and no later than three years*
Antara lebih dari tiga tahun sampai lima tahun	723,793	726,856	*Later than three years and no later than five years*
Lebih dari lima tahun	1,337,735	1,698,431	*More than five years*
Jumlah	3,397,291	3,818,498	*Total*
Dikurangi: bunga	(959,621)	(1,298,582)	*Less: interest*
Nilai kini pembayaran sewa masa datang	2,437,670	2,519,916	*Present value of future minimum lease payments*
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	**(583,016)**	**(585,475)**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**1,854,654**	**1,934,441**	***Non-current portion***

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp787.698 (2024: Rp838.441).

The total cash outflow for leases for the year ended 31 December 2025 was Rp787,698 (2024: Rp838,441).

	2025	2024	
Pihak berelasi	2,054,299	2,263,720	*Related parties*
Pihak ketiga	383,371	256,196	*Third parties*
Jumlah	**2,437,670**	**2,519,916**	***Total***

Lihat Catatan 26 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for information on the details of transactions and balances with related parties.

Jumlah terkait sewa yang dicatat pada laba rugi adalah sebagai berikut:

The amount related to leases recorded in profit or loss are as follows:

	2025	2024	
Beban bunga (disajikan sebagai beban keuangan)	234,436	259,739	*Interest expense (presented as finance costs)*
Beban terkait sewa jangka pendek (disajikan sebagai beban usaha)	148,811	142,718	*Expenses relating to short-term leases (presented as operating expenses)*
Beban terkait sewa aset bernilai rendah (disajikan sebagai beban usaha)	30,949	36,428	*Expenses relating to low value assets (presented as operating expenses)*
Beban terkait pembayaran sewa variabel (disajikan sebagai beban usaha)	1,133	1,257	*Expenses relating to variable lease payment (presented as operating expenses)*
Jumlah	**415,329**	**440,142**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/61 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. LIABILITAS SEWA (lanjutan) / 13. *LEASE LIABILITIES (continued)*

Lihat Catatan 29 untuk informasi nilai wajar dari liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Refer to Note 29 for information on the fair value of the lease liabilities as at 31 December 2025 and 2024.

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA / 14. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	2025	2024	
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian:			***Liabilities recognised in the consolidated statements of financial position:***
Program pensiun manfaat pasti	38,075	-	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	1,770,943	1,501,780	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	2,758,893	2,733,995	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	149,628	104,875	*Other long-term benefits*
Jumlah	4,717,539	4,340,650	*Total*
Bagian jangka panjang	**(4,421,466)**	**(4,064,779)**	***Non-current portion***
Bagian jangka pendek	296,073	275,871	*Current portion*
Bonus dan insentif prestasi kerja	516,997	578,938	*Bonus and performance incentives*
Bagian jangka pendek	**813,070**	**854,809**	***Current portion***
Beban diakui di laba rugi: (Catatan 23)			***Expense recognised in profit or loss: (Note 23)***
Program pensiun manfaat pasti	5,541	7,643	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	173,094	189,557	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	236,717	201,231	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	87,312	40,457	*Other long-term benefits*
Jumlah	**502,664**	**438,888**	***Total***
Pengukuran kembali program manfaat pasti diakui di kerugian komprehensif lain:			***Remeasurement on defined benefit plan recognised in other comprehensive loss:***
Program pensiun manfaat pasti	(45,950)	(6,136)	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	(206,289)	(56,696)	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	153,965	(123,350)	*Health care benefits*
Jumlah	**(98,274)**	**(186,182)**	***Total***

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman Grup.

The assumptions regarding the future mortality experience are based on actuarial advice in accordance with published statistics and experiences by the Group.

Pada tahun 2025, Grup melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup.

In 2025, the Group conducted a study to determine which mortality tables best suited the mortality profile of most of the Group's employees and pensioners.

Perhitungan aktuaria atas program pensiun manfaat pasti, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dihitung oleh kantor konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Enny Diah Awal dan 2024 dihitung oleh KKA Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan dalam laporannya masing-masing tertanggal 9 Maret 2026 dan 7 Mei 2025.

The actuarial calculations of the defined benefit pension program, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits for the year ended 31 December 2025 were calculated by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Enny Diah Awal and 2024 were calculated by KKA Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan based on its report dated 9 March 2026 and 7 May 2025, respectively.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/62 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-8/NB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas peningkatan manfaat pasti pensiun yang disediakan Grup dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 20,49% dari penghasilan dasar pensiun (2024: 6,00% dan 20,49%).

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Defined benefit pension program

The Group has established a defined benefit pension program covering all of its eligible permanent employees. This plan provides benefits based on the basic pension income and the period of employment.

The pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated 15 May 1997.

DP-PLN has obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-8/NB.1/2016 dated 11 February 2016 in relation to the increase in the pension benefits that are provided by the Group's pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer, which are 6.00% and 20.49% from basic pension income, respectively (2024: 6.00% and 20.49%).

The amounts recognised in the consolidated statements of financial position as at 31 December 2025 and 2024 were determined as follows:

	2025	2024	
Nilai kini kewajiban yang didanai	716,446	610,689	*Present value of funded obligations*
Nilai wajar aset program	(678,371)	(637,514)	*Fair value of plan assets*
Jumlah	38,075	(26,825)	*Total*
Dampak batas atas aset	-	26,825	*Impact of asset ceiling*
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	**38,075**	**-**	***Liability in the consolidated statements of financial position***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/63 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*** *(continued)*

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / ***Defined benefit pension program*** *(continued)*

Mutasi liabilitas program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *The movements in the defined benefit pension program obligations during the years were as follows*:

	2025	2024	
Pada awal tahun	610,689	571,997	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	10,396	11,408	*Current service cost*
Biaya bunga	41,934	36,794	*Interest expense*
	52,330	48,202	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
Kerugian/(keuntungan) aktuaria dari perubahan:			*Actuarial loss/(gain) from changes in:*
Penyesuaian atas pengalaman	(15,373)	35,062	*Experience adjustments*
Asumsi keuangan	106,384	(5,756)	*Financial assumptions*
Asumsi demografik	903	(1,572)	*Demographic assumptions*
Asumsi lainnya	-	158	*Other assumptions*
	91,914	27,892	
Pembayaran manfaat	(38,487)	(37,402)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**716,446**	**610,689**	***At end of the year***

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *The movements in the fair value of the plan assets during the years were as follows:*

	2025	2024	
Pada awal tahun	637,514	600,088	*At beginning of year*
Dikreditkan ke laba rugi:			*Credited to profit or loss:*
Imbalan hasil aset program	44,461	37,359	*Return on plan assets*
Iuran pekerja	4,229	3,200	*Contribution from employees*
	48,690	40,559	
Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain:			*Credited to other comprehensive income:*
Keuntungan aktuaria dari:			*Actuarial gains from changes in:*
Pengukuran kembali atas imbal hasil aset	17,238	20,490	*Remeasurement of return on plan assets*
Iuran dari pemberi kerja	13,416	13,779	*Contribution from employers*
Pembayaran manfaat	(38,487)	(37,402)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**678,371**	**637,514**	***At end of the year***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/64 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / ***Defined benefit pension program** (continued)*

Jumlah yang diakui pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in profit or loss for the years ended 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	10,396	11,408	*Current service cost*
Biaya bunga	41,934	36,794	*Interest expense*
Bunga batas atas aset	1,901	-	*Interest on assets ceiling*
Imbalan hasil aset program	(44,461)	(37,359)	*Return on plan assets*
Iuran pekerja	(4,229)	(3,200)	*Contribution from employees*
Jumlah	**5,541**	**7,643**	***Total***

Mutasi program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the defined benefit pension program during the years were as follows:

	2025	2024	
Pada awal tahun	-	-	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	10,396	11,408	*Current service cost*
Biaya bunga	41,934	36,794	*Interest expense*
Bunga batas atas aset	1,901	-	*Interest of asset ceiling*
Imbalan hasil aset program	(44,461)	(37,359)	*Return on plan assets*
Iuran pekerja	(4,229)	(3,200)	*Contribution from employees*
	5,541	7,643	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
Kerugian/(keuntungan) aktuaria dari perubahan:			*Actuarial loss/(gain) from changes in:*
Penyesuaian atas pengalaman	(15,373)	35,062	*Experience adjustments*
Asumsi keuangan	106,384	(5,756)	*Financial assumptions*
Asumsi demografik	903	(1,572)	*Demographic assumptions*
Asumsi lainnya	-	158	*Other assumptions*
Keuntungan aktuarial yang diakui	(17,238)	(20,490)	*Recognised actuarial gains*
Perubahan dampak batas atas aset	(28,726)	(1,266)	*Changes in impact of asset ceiling*
	45,950	6,136	
Iuran dari pemberi kerja	(13,416)	(13,779)	*Contribution from employers*
Pada akhir tahun	**38,075**	**-**	***At end of the year***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/65 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / ***Defined benefit pension program*** *(continued)*

Aset program terdiri dari: / *The plan assets comprise the following:*

	2025 Jumlah/ *Total*	2025 %	2024 Jumlah/ *Total*	2024 %	
Instrumen utang	319,058	47.03	332,848	52.21	*Debt instruments*
Instrumen ekuitas	173,163	25.53	141,407	22.18	*Equity instruments*
Properti	72,557	10.70	69,206	10.86	*Property*
Kas dan setara kas	65,077	9.59	48,041	7.54	*Cash and cash equivalents*
Lain-lain	48,516	7.15	46,012	7.21	*Others*
Jumlah	**678,371**	**100.00**	**637,514**	**100.00**	***Total***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut: / *The principal actuarial assumptions used were as follows:*

	2025	2024	
Umur pensiun normal	56 tahun/ *years old*	56 tahun/ *years old*	*Normal retirement age*
Tabel mortalita karyawan	TMI-IV	CSO-58	*Mortality table for employees*
Tabel mortalita pensiunan	AMT-49	AMT-49	*Mortality table for pensioners*
Tingkat diskonto	6.43%	7.09%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan manfaat pensiun	5.00%	5.00%	*Pension benefit rate increase*

Sensitivitas dari liabilitas program pensiun manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut: / *The sensitivity of the defined benefits pension program obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:*

	Dampak atas kewajiban manfaat pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1.00%	(68,661)	82,001	*Discount rate*
Tingkat kenaikan manfaat pensiun	1.00%	14,705	(13,505)	*Pension benefit increase rate*

Imbalan pascakerja lainnya / ***Other post-employment benefits***

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Grup juga menyediakan imbalan pesangon, penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian, dan pemakaman bagi pegawai yang memenuhi syarat.

In addition to the pension plan and health care benefits, the Group also provides severance benefits, unfunded post-employment benefits, work accident, death, and funeral allowances for eligible employees.

PLN NPS melakukan pendanaan dana pensiun yang dikelola bank lokal sebesar 4% dari penghasilan dasar.

PLN NPS provides a funded pension plan that is managed by local banks at 4% of the basic income.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/66 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Imbalan pascakerja lainnya (lanjutan) / ***Other post-employment benefits** (continued)*

MKP dan PLN NPC memberikan imbalan pascakerja manfaat pasti tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi syarat sesuai dengan PP.

MKP and PLN NPC provides unfunded post-employment benefits for their qualifying employees under the CR.

Entitas lainnya memberikan imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai dengan PKB.

Other entities provide post-employment benefits for qualifying employees under the CLA.

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated statements of financial position were determined as follows:

	2025	2024	
Nilai kini kewajiban yang didanai	1,874,534	1,599,086	*Present value of funded obligations*
Nilai wajar aset program	(103,591)	(97,306)	*Fair value of plan assets*
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	**1,770,943**	**1,501,780**	***Liability in the consolidated statements of financial position***

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements of the other post-employment benefits obligations during the years were as follows:

	2025	2024	
Pada awal tahun	1,599,086	1,440,713	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	91,145	90,901	*Current service cost*
Biaya bunga	88,901	98,656	*Interest expense*
Biaya jasa lalu	410	-	*Past service cost*
	180,456	189,557	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
Kerugian/(keuntungan) aktuaria dari perubahan:			*Actuarial loss/(gain) from changes in:*
Asumsi keuangan	166,683	(24,014)	*Financial assumptions*
Asumsi demografik	(5,256)	7,913	*Demographic assumptions*
Asumsi lainnya	(652)	(566)	*Other assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	38,045	73,363	*Experience adjustments*
	198,820	56,696	
Pembayaran manfaat	(103,828)	(87,880)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**1,874,534**	**1,599,086**	***At end of the year***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/67 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

14. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES* *(continued)*

Other post-employment benefits *(continued)*

The movements in the fair value of the plan assets during the years were as follows:

	2025	2024	
Pada awal tahun	97,306	82,052	*At beginning of year*
Dikreditkan ke laba rugi:			*Credited to profit or loss:*
Imbalan hasil aset program	7,362	-	*Return on plan assets*
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
Kerugian aktuarial yang diakui	(7,469)	-	*Recognised actuarial losses*
Iuran dari pemberi kerja	15,449	15,254	*Contribution from employers*
Pembayaran manfaat	(9,057)	-	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**103,591**	**97,306**	***At end of the year***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2025	2024	
Umur pensiun normal	56 tahun/ *years old*	56 tahun/ *years old*	*Normal retirement age*
Tabel mortalita	TMI-2019	TMI-2019	*Mortality table*
Tingkat diskonto	6.54% - 6.60%	6.85% - 7.14%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	3.00% - 7.99%	1.00% - 7.12%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pascakerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other post-employment benefits obligations to changes in the principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pascakerja lainnya/ *Impact on other post-employment benefits obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1.00%	(299,323)	41,029	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1.00%	38,208	(299,891)	*Salary increase rate*

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Grup menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Grup memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi, dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun manfaat pasti.

Health care benefits

In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Group also provides unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

The Group has a number of post-employment health care benefit schemes. The accounting method, assumptions, and frequency of the valuations are similar to those used for the defined benefit pension schemes.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/68 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Imbalan pemeliharaan kesehatan (lanjutan) / ***Health care benefits** (continued)*

Mutasi liabilitas imbalan pemeliharaan kesehatan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements of the health care benefits obligations during the years were as follows:

	2025	2024	
Pada awal tahun	2,733,995	2,479,703	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	43,846	35,001	*Current service cost*
Biaya bunga	192,871	166,230	*Interest expense*
	236,717	201,231	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria dari perubahan:			*Actuarial (gain)/loss from changes in:*
Asumsi keuangan	19,251	458,865	*Financial assumptions*
Asumsi lainnya	-	85,906	*Other assumptions*
Asumsi demografik	6,957	252,792	*Demographic assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(180,173)	(674,213)	*Experience adjustments*
	(153,965)	123,350	
Pembayaran manfaat	(57,854)	(70,289)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**2,758,893**	**2,733,995**	***At end of the year***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2025	2024	
Umur pensiun normal	56 tahun/ *years old*	56 tahun/ *years old*	*Normal retirement age*
Tabel mortalita karyawan	TMI-IV	CSO-58	*Mortality table for employees*
Tabel mortalita pensiunan	AMT-49	AMT-49	*Mortality table for pensioners*
Tingkat diskonto	6.67%	6.38% - 7.13%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	6.00%	6.00%	*Future health cost increase rate*

Sensitivitas dari liabilitas pemeliharaan kesehatan terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the health care benefits obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pemeliharaan kesehatan/ *Impact on healthcare benefits obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1.00%	(329,737)	468,252	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1.00%	320,066	(359,532)	*Future health cost increase rate*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/69 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Imbalan kerja jangka panjang lainnya / ***Other long-term benefits***

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa uang cuti besar dan manfaat penghargaan winduan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

The Group provides other long-term employee benefits such as long service leave and an eight-year service awards for the qualifying employees.

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements of the other long-term employee benefits obligations during the years were as follows:

	2025	2024	
Pada awal tahun	104,875	101,282	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	67,202	20,594	*Current service cost*
Biaya bunga	3,789	4,135	*Interest expense*
Kerugian/(keuntungan) aktuaria dari perubahan:			*Actuarial loss/(gain) from changes in:*
Asumsi keuangan	4,438	(1,004)	*Financial assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	11,883	16,732	*Experience adjustments*
	87,312	40,457	
Pembayaran manfaat	(42,559)	(36,864)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**149,628**	**104,875**	***At end of the year***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2025	2024	
Umur pensiun normal	56 tahun/ *years old*	56 tahun/ *years old*	*Normal retirement age*
Tabel mortalita	TMI-2019	TMI-2019	*Mortality table*
Tingkat diskonto	5.30% - 5.64%	6.38% - 7.01%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.12%	7.12%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long-term employee benefits obligations to changes in the principal assumptions were as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Impact on other long-term benefits obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1.00%	(3,182)	3,361	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1.00%	3,361	(3,165)	*Salary increase rate*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/70 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program pensiun manfaat pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada *Zero Coupon Bond* dari *Indonesia Government Securities Yield Curve*. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang, meskipun Grup juga berinvestasi pada instrumen ekuitas, properti, kas dan setara kas dan lain-lain. Grup meyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Rata-rata durasi adalah masing-masing 11,85 tahun untuk program pensiun manfaat pasti, 13,58 - 14,66 tahun untuk imbalan pascakerja lainnya, 16,11 tahun untuk imbalan pemeliharaan kesehatan dan 2,76 - 4,50 tahun untuk imbalan jangka panjang lainnya.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

***14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES** (continued)*

The Group is exposed to a number of risks through its defined benefit pension program and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:

Asset volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to Zero Coupon Bond from Indonesia Government Securities Yield Curve. If the plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets. The largest proportion of assets is invested in debt instruments, although the Group also invests in equity instruments, property, cash and cash equivalents and others. The Group believes that debt instruments offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Life expectancy

The majority of the plans' obligations are providing lifetime benefits, so the increase in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

The weighted average durations are 11.85 years for defined benefit pension program, 13.58 - 14.66 years for other post-employment benefits, 16.11 years for health care benefits, and 2.76 - 4.50 years for other long-term benefits, respectively.

The expected maturity analysis of the undiscounted post-employment benefits and other long-term benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	Antara 1-2 tahun/ *Between 1-2 years*	Antara 2-5 tahun/ *Between 2-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Program pensiun manfaat pasti	41,412	44,859	159,025	1,907,820	2,153,116	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	113,807	190,360	554,619	9,022,811	9,881,597	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	109,445	118,514	417,624	12,314,361	12,959,944	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	31,409	30,505	101,738	96,286	259,938	*Other long-term benefits*
Jumlah	**296,073**	**384,238**	**1,233,006**	**23,341,278**	**25,254,595**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/71 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Manajemen Grup berpendapat bahwa liabilitas imbalan pascakerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB atau PP.

14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The Group's management is of the opinion that the post-employment benefit obligation is adequate to cover all benefits provided for in the Manpower Regulation or the CLA or the CR.

15. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

15. CAPITAL STOCK

The shareholders composition of the company as at 31 December 2025 and 2024 were as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham/ *Number of shares*)*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal disetor/ *Total paid-up capital*	*Shareholders*
PLN	308,510,497,999	99.99	154,255,249	*PLN*
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	0.01	-	*Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)*
Jumlah	**308,510,498,000**	**100.00**	**154,255,249**	***Total***

*)Dalam jumlah penuh/*in full amount*

16. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Dividen

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2025, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2024. Berdasarkan surat PLN tanggal 15 Desember 2025, pembagian dividen untuk tahun buku 2025 ditetapkan sebesar Rp12.865.251 atau Rp41,7 (nilai penuh) per lembar saham.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2024, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2023. Berdasarkan surat PLN tanggal 24 September 2024, pembagian dividen untuk tahun buku 2023 ditetapkan sebesar Rp13.643.598 atau Rp44,22 (nilai penuh) per lembar saham.

16. DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE

Dividends

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated 19 June 2025, the shareholders granted the authority to the majority shareholder to determine the Company's retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the 2024 net income. Based on the letter from PLN dated 15 December 2025, the distribution of dividends for the year 2024 amounted to Rp12,865,251 or Rp41.7 (full amount) per share.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated 28 June 2024, the shareholders granted the authority to the majority shareholder to determine the Company's retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the 2023 net income. Based on the letter from PLN dated 24 September 2024, the distribution of dividends for the year 2023 amounted to Rp13,643,598 or Rp44.22 (full amount) per share.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/72 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM (lanjutan) / *16. DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE (continued)*

Dividen (lanjutan) / ***Dividends** (continued)*

Pada tahun 2025 dan 2024, pembayaran dividen kepada PLN dilakukan dengan pengurangan terhadap piutang usaha dari pihak berelasi (Lihat Catatan 30a).

In 2025 and 2024, the dividend payments to PLN were made through deduction of the trade receivables from related parties (See Note 30a).

Cadangan umum / ***General reserves***

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Under Indonesian Limited Liability Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of this reserve. As at 31 December 2025 and 2024, the Company had not yet established its general reserve in accordance with the Limited Liability Company Law.

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *17. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

	2025	2024	
Pengalihan aset tetap, aset tidak lancar lainnya, dan material pemeliharaan diterima dari PLN	2,870,998	2,870,998	*Property, plant and equipment, non-current assets, and spare parts received from PLN*
Pengampunan pajak	44,207	44,207	*Tax amnesty*
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(99,723,800)	(99,723,581)	*Difference in value from restructuring entities under common control*
Jumlah	**(96,808,595)**	**(96,808,376)**	***Total***

Tambahan modal disetor berasal dari nilai pengalihan aset tetap, termasuk dana rehabilitasi PLTU Gresik Unit 1 dan 2 dan material pemeliharaan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PLN, pemegang saham dari Perusahaan sebesar Rp2.870.998.

Additional paid-in capital represents the transfer of property, plant and equipment, including the funds that were provided for the rehabilitation of PLTU Gresik Unit 1 and 2 and spare parts from 1996 to 2000 received from PLN, the Company shareholder amounting to Rp2,870,998.

Pada tahun 2016, tambahan modal disetor berasal dari partisipasi Grup dalam Pengampunan Pajak sebesar Rp44.207.

In 2016, additional paid-in capital arising from the Group participation in Tax Amnesty amounting to Rp44,207.

Pada tahun 2022, PLN NPC membuat perjanjian jual beli saham dengan PT PLN Enjiniring ("PLNE"), entitas sepengendali. PLN NPC mengakuisisi 125.074.552 saham biasa atau 100% kepemilikan atas PPN dengan mengalihkan 93.411.836 saham biasa atau 99,8% kepemilikan atas Rekadaya Elektrika Consult ("REC") kepada PLNE. Selisih Rp24.376 antara nilai imbalan dan nilai buku bersih dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor di akun ekuitas.

In 2022, PLN NPC made a share sale and purchase agreement with PT PLN Enjiniring ("PLNE"), an entity under common control. PLN NPC acquired 125,074,552 common shares, equal to 100% ownership in PPN by transferring 93,411,836 common shares equal to 99.8% ownership in Rekadaya Elektrika Consult ("REC") to PLNE. The difference of Rp24,376 between the consideration value and the net book value is recorded as a deduction from additional paid-in capital in equity.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/73 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Pada tahun 2023, terdapat tambahan modal disetor sebesar Rp99.699.205 berasal dari selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai buku bersih yang diterima dari PLN akibat adanya pembentukan *subholding*.

Pada tahun 2025, pengurang tambahan modal disetor sebesar Rp219 berasal dari selisih antara jumlah imbalan yang diterima dan nilai buku bersih PPN yang dijual ke Iconvest sebagai entitas sepengendali.

17. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

In 2023, there is additional paid-in capital amounting to Rp99,699,205 derives from the difference between the consideration transferred and the net assets received from PLN due to the establishment of the subholding structures.

In 2025, the deduction of additional paid-in capital amounting to Rp219 derives from the difference between the consideration received and the net book value of PPN which sold to Iconvest as the entity under common control.

18. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI / *18. NON-CONTROLLING INTERESTS*

	2025							
	Jumlah tercatat 1 Januari 2025/ *Carrying amount 1 January 2025*	Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali/ *Issuance of subsidiaries' shares to non-controlling interest*	Divestasi/ *Divestment*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba bersih/ *Share of net profit*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Jumlah tercatat 31 Desember 2025/ *Carrying amount 31 December 2025*	
PLN NPS	26,630	-	-	(2,010)	9,365	-	33,985	*PLN NPS*
NII	137,409	-	-	(2,545)	2,646	5,965	143,475	*NII*
PLN NPC	6,691	-	-	-	55	-	6,746	*PLN NPC*
PLN NR	147	-	-	-	18	-	165	*PLN NR*
PLNSC	169,943	-	-	-	61,408	-	231,351	*PLNSC*
Jumlah	**340,820**	**-**	**-**	**(4,555)**	**73,492**	**5,965**	**415,722**	***Total***

	2024							
	Jumlah tercatat 1 Januari 2024/ *Carrying amount 1 January 2024*	Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali/ *Issuance of subsidiaries' shares to non-controlling interest*	Divestasi/ *Divestment*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba bersih/ *Share of net profit*	Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain/ *Other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2024/ *Carrying amount 31 December 2024*	
PLN NPS	24,075	-	-	(1,880)	4,472	(37)	26,630	*PLN NPS*
NII	130,507	-	-	(6,778)	7,288	6,392	137,409	*NII*
PLN NPC	6,639	-	-	-	52	-	6,691	*PLN NPC*
PLN NR	22	126	-	-	(1)	-	147	*PLN NR*
PLNSC	137,424	-	-	-	32,519	-	169,943	*PLNSC*
Jumlah	**298,667**	**126**	**-**	**(8,658)**	**44,330**	**6,355**	**340,820**	***Total***

19. PENJUALAN TENAGA LISTRIK / *19. SALES OF ELECTRICITY*

Akun ini merupakan penjualan tenaga listrik kepada PLN.

Lihat Catatan 26 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

This account represents the sales of electricity to PLN.

Refer to Note 26 for information on the details of transactions and balances with related parties.

20. PENDAPATAN USAHA LAINNYA / *20. OTHER OPERATING REVENUE*

Akun ini merupakan pendapatan jasa pemeliharaan, konstruksi dan lainnya yang diperoleh dari pihak berelasi dan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

This account represents the operating revenues from maintenance services, constructions and others, which were obtained from related parties and third parties, with details as follows:

	2025	2024	
Jasa operasi dan pemeliharaan	2,151,462	1,700,159	*Operation and maintenance services*
Konstruksi	1,171,360	1,070,377	*Constructions*
Lain-lain	598,327	621,369	*Others*
Jumlah	**3,921,149**	**3,391,905**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/74 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PENDAPATAN USAHA LAINNYA (lanjutan) / *OTHER OPERATING REVENUE (continued)*

Pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan dengan kontrak tetap dan konstruksi sebesar Rp2.703.737 (2024: Rp2.578.186) diakui sepanjang waktu, sedangkan pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan atas penggantian biaya ke PLN dan pendapatan lainnya yang terdiri atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan sebesar Rp1.217.412 (2024: Rp813.719) merupakan pendapatan yang diakui pada waktu tertentu.

Revenue from operation and maintenance services for fixed contract and constructions amounting to Rp2,703,737 (2024: Rp2,578,186) has been recognised over time, while revenue from operation and maintenance services for reimbursed cost to PLN and others representing transfer of goods or services to the customers amounting to Rp1,217,412 (2024: Rp813,719) has been recognised at a point in time.

Lihat Catatan 26 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for information on the details of transactions and balances with related parties.

21. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS / *FUEL AND LUBRICANTS EXPENSES*

	2025	2024	
Bahan bakar minyak			*Fuel*
Biosolar	2,933,059	815,499	*Biodiesel*
Solar High Speed Diesel ("HSD")	812,669	3,281,479	*Solar High Speed Diesel ("HSD")*
Marine Fuel Oil ("MFO")	479,580	320,879	*Marine Fuel Oil ("MFO")*
Subjumlah	4,225,308	4,417,857	*Subtotal*
Bahan bakar non-minyak			*Non-oil fuels*
Gas alam	31,850,012	28,294,906	*Natural gas*
Batubara	23,469,505	21,981,169	*Coals*
Biomassa	577,579	424,158	*Biomass*
Air	469,220	321,209	*Water*
Subjumlah	56,366,316	51,021,442	*Subtotal*
Minyak pelumas dan lain-lain	235,242	242,179	*Lubricants and others*
Jumlah	**60,826,866**	**55,681,478**	***Total***

Lihat Catatan 26 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for information on the details of transactions and balances with related parties.

22. BEBAN PEMELIHARAAN / *MAINTENANCE EXPENSES*

	2025	2024	
Jasa borongan	4,623,396	4,339,816	*Contracted services*
Pemakaian material pemeliharaan	2,439,882	2,009,777	*Maintenance materials used*
Jumlah	**7,063,278**	**6,349,593**	***Total***

Lihat Catatan 26 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for information on the details of transactions and balances with related parties.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/75 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. BEBAN KEPEGAWAIAN / *23. EMPLOYEE COSTS*

	2025	2024	
Gaji dan tunjangan	2,161,840	2,067,902	*Salaries and allowances*
Imbalan kerja (Catatan 14)	502,664	438,888	*Employee benefits (Note 14)*
Bonus dan insentif karyawan	476,891	594,573	*Employee bonus and incentives*
Tunjangan kesehatan	261,371	247,329	*Medical allowances*
Lain-lain	58,683	69,928	*Others*
Jumlah	**3,461,449**	**3,418,620**	***Total***

24. BEBAN USAHA LAIN-LAIN / *24. OTHER OPERATING EXPENSES*

	2025	2024	
Beban konstruksi	990,459	923,136	*Construction cost*
Biaya layanan bahan bakar	381,068	447,292	*Fuel services charge*
Asuransi	300,306	275,155	*Insurance*
Honorarium	147,794	125,763	*Honorarium*
Perjalanan dinas	97,896	94,680	*Business travelling*
Pajak dan retribusi lainnya	90,453	73,535	*Taxes and other retribution*
Konsumsi	39,120	39,716	*Meals consumption*
Jasa profesional	27,041	14,997	*Professional fees*
Pajak final	24,820	29,060	*Final tax*
Lain-lain	184,534	154,296	*Others*
Jumlah	**2,283,491**	**2,177,630**	***Total***

Lihat Catatan 26 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for information on the details of transactions and balances with related parties.

25. PERPAJAKAN / *25. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	2025	2024	
Kelebihan pembayaran atas Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan")			*Overpayments of Corporate Income Taxes ("CIT")*
2025	295,371	-	*2025*
2024	19,356	22,759	*2024*
2023	7,274	163,667	*2023*
2022	4,244	4,244	*2022*
Pembayaran di muka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	68,398	68,398	*Prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment*
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	732,225	544,840	*Value Added Taxes ("VAT")*
Lainnya	42,308	26,117	*Others*
Jumlah	1,169,176	830,025	*Total*
Dikurangi: bagian lancar	**(552,129)**	**(484,978)**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**617,047**	**345,047**	***Non-current portion***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/76 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***25. TAXATION** (continued)*

b. Utang pajak / ***b. Taxes payable***

	2025	2024	
PPh Badan			*CIT*
Pasal 25/29	25,252	69,142	*Article 25/29*
Pajak lainnya			*Other taxes*
PPN	108,900	42,759	*VAT*
Pasal 4(2)	51,643	58,148	*Article 4(2)*
Pasal 22	33,134	43,462	*Article 22*
Pasal 23	23,491	41,427	*Article 23*
Pasal 15	1,742	1,223	*Article 15*
Pasal 21	719	11,651	*Article 21*
Subjumlah	219,629	198,670	*Subtotal*
Jumlah	**244,881**	**267,812**	***Total***

c. Beban pajak penghasilan / ***c. Income tax expense***

	2025	2024	
Beban pajak kini			*Current tax*
Perusahaan			*The Company*
Tahun berjalan	903,538	630,142	*Current year*
Penyesuaian tahun sebelumnya	-	(621)	*Prior year adjustments*
Subjumlah	903,538	629,521	*Subtotal*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Tahun berjalan	136,199	98,686	*Current year*
Penyesuaian tahun sebelumnya	3,403	19,315	*Prior year adjustments*
Subjumlah	139,602	118,001	*Subtotal*
Beban pajak tangguhan			*Deferred tax expense*
Perusahaan	2,110,138	2,171,629	*The Company*
Entitas anak	(2,555)	3,219	*Subsidiaries*
Subjumlah	2,107,583	2,174,848	*Subtotal*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**3,150,723**	**2,922,370**	***Consolidated income tax expense***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/77 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak atas laba Grup sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang suku bunga pajak terhadap laba pada entitas konsolidasian dalam jumlah sebagai berikut:

25. *TAXATION* *(continued)*

c. *Income tax expense* *(continued)*

The tax on Group's profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits on the consolidated entities as follows:

	2025	**2024**	
Laba konsolidasian sebelum pajak	16,208,367	15,831,951	*Consolidated profit before tax*
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku 22%	3,565,841	3,483,029	*Tax expense at prevailing tax rate of 22%*
Penghasilan keuangan telah dikenakan pajak final	(26,986)	(27,791)	*Finance income subject to final tax*
Bagian laba bersih atas entitas asosiasi dan ventura bersama	(554,488)	(517,190)	*Share in net income of associates and joint ventures*
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(333,116)	(307,004)	*Income subject to final tax*
Beban yang berkaitan dengan pajak final	311,692	260,330	*Expenses related to final tax*
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	184,377	12,302	*Other non-deductible expenses*
Penyesuaian tahun sebelumnya	3,403	18,694	*Prior year adjustments*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**3,150,723**	**2,922,370**	***Consolidated income tax expense***

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Perusahaan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan badan.

In these consolidated financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Company has not yet submitted its corporate income tax returns.

Pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan komprehensif lain selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The income tax relating to other comprehensive income during the year is as follows:

	2025			**2024**			
	Sebelum pajak/ *Before tax*	**Manfaat pajak/ *tax benefit***	**Setelah pajak/ *After tax***	**Sebelum pajak/ *Before tax***	**Beban pajak/ *Tax expense***	**Setelah pajak/ *After tax***	
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	(98,274)	21,620	(76,654)	(186,182)	40,960	(145,222)	*Remeasurement on defined benefit plan*
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	7,820,712	(1,621,240)	6,199,472	*Property, plant and equipment revaluation surplus*
Bagian penghasilan/ komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	399,522	-	399,522	471,469	-	471,469	*Share of other comprehensive income from associates and joint ventures*
Jumlah	**301,248**	**21,620**	**322,868**	**8,105,999**	**(1,580,280)**	**6,525,719**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/78 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERPAJAKAN (lanjutan) / *25. TAXATION (continued)*

d. Pajak tangguhan / *d. Deferred tax*

	2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/ (charged) to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Liabilitas imbalan kerja	23,485	4,085	(14,976)	12,594	*Employee benefits liabilities*
Bonus	30,105	2,520	-	32,625	*Bonus*
Provisi untuk persediaan usang	840	-	-	840	*Provision for obsolete inventories*
Provisi untuk penurunan nilai piutang	8,430	816	-	9,246	*Provision for impairment of receivables*
Liabilitas sewa	2,509	11,624	-	14,133	*Lease liabilities*
Aset tetap	(4,827)	(16,490)	-	(21,317)	*Property, plant and equipment*
Jumlah aset pajak tangguhan, bersih	**60,542**	**2,555**	**(14,976)**	**48,121**	***Total of deferred tax assets, net***
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Liabilitas imbalan kerja	931,458	57,211	36,596	1,025,265	*Employee benefits liabilities*
Bonus	97,261	(16,147)	-	81,114	*Bonus*
Provisi untuk persediaan usang	14,187	346	-	14,533	*Provision for obsolete inventories*
Provisi untuk penurunan nilai piutang	3,054	-	-	3,054	*Provision for impairment of receivables*
Liabilitas sewa	551,873	(29,719)		522,154	*Lease liabilities*
Aset tetap	(20,891,586)	(2,121,829)	-	(23,013,415)	*Property, plant and equipment*
Jumlah liabilitas pajak tangguhan, bersih	**(19,293,753)**	**(2,110,138)**	**36,596**	**(21,367,295)**	***Total of deferred tax liabilities, net***
Beban pajak tangguhan		**(2,107,583)**	**21,620**		***Deferred tax expense***

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *(Charged)/ credited to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Liabilitas imbalan kerja	22,592	(272)	1,165	23,485	*Employee benefits liabilities*
Bonus	40,693	(10,588)	-	30,105	*Bonus*
Provisi untuk persediaan usang	796	44	-	840	*Provision for obsolete inventories*
Provisi untuk penurunan nilai piutang	8,276	154	-	8,430	*Provision for impairment of receivables*
Liabilitas sewa	1,901	608	-	2,509	*Lease liabilities*
Aset tetap	(329)	6,835	(11,333)	(4,827)	*Property, plant and equipment*
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	**73,929**	**(3,219)**	**(10,168)**	**60,542**	***Total of deferred tax assets, net***
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Liabilitas imbalan kerja	841,148	50,515	39,795	931,458	*Employee benefits liabilities*
Bonus	76,264	20,997	-	97,261	*Bonus*
Provisi untuk persediaan usang	4,360	9,827	-	14,187	*Provision for obsolete inventories*
Provisi untuk penurunan nilai piutang	3,276	(222)	-	3,054	*Provision for impairment of receivables*
Liabilitas sewa	575,920	(24,047)	-	551,873	*Lease liabilities*
Aset tetap	(17,052,980)	(2,228,699)	(1,609,907)	(20,891,586)	*Property, plant and equipment*
Jumlah liabilitas pajak pangguhan, bersih	**(15,552,012)**	**(2,171,629)**	**(1,570,112)**	**(19,293,753)**	***Total of deferred tax liabilities, net***
Beban pajak tangguhan		**(2,174,848)**	**(1,580,280)**		***Deferred tax expense***

Manajemen Grup berpendapat bahwa liabilitas pajak tangguhan akan diselesaikan setelah 12 bulan.

Management of the Group is of the opinion that deferred tax liabilities will be settled after 12 months.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/79 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak

25. *TAXATION* *(continued)*

e. Tax assessment letters

Jenis pajak/*Tax type*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	Status
Perusahaan/*The Company*				
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2019	136,172	136,172	Banding/*Appeal*
Jumlah		**136,172**	**136,172**	***Total***
Provisi		**(67,774)**	**(67,774)**	***Provision***
Jumlah, bersih		**68,398**	**68,398**	***Total, net***

Selama tahun 2025, Perusahaan dan PLN NPS menerima pengembalian kelebihan pembayaran PPh Badan untuk tahun 2023 masing-masing sebesar Rp146.396 dan Rp9.997.

During 2025, the Company and PLN NPS received a refund of overpayment of CIT for year 2023 amounting to Rp146,396 and Rp9,997, respectively.

Pada tahun 2025, PLN NPS menerima pengembalian atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPN Masa Januari - Desember 2023 senilai Rp81.492.

In 2025, PLN NPS received the refund of Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") for its VAT for period January - December 2023 amounting Rp81,492.

Pada tahun 2025, PLN NPC menerima pengembalian atas SKPLB PPN Masa Januari - Oktober 2024 senilai Rp75.456.

In 2025, PLN NPC received the refund of SKPLB for its VAT for period January - October 2024 amounting Rp75,456.

Pada tahun 2025, PLNSC menerima pengembalian atas SKPLB PPN Desember 2022 senilai Rp63.170.

In 2025, PLNSC received the refund of SKPLB for its VAT for period December 2022 amounting Rp63,170.

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

f. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, each company within the Group which is domiciled in Indonesia calculates and pays tax on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

g. Aturan Model Pilar Dua Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD")

Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. PMK-136 Tahun 2024 ("PMK-136") telah diundangkan di Indonesia, yurisdiksi dimana tempat Perusahaan didirikan, dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Grup berada dalam cakupan ketentuan model OECD Pilar Dua dan menerapkan pengecualian untuk pengakuan serta pengungkapan informasi terkait aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berhubungan dengan pajak penghasilan Pilar Dua mulai 1 Januari 2025.

g. Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") Pillar Two Model Rules

The Ministry of Finance ("MoF) Regulation No. PMK-136 Tahun 2024 ("PMK-136") was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the Company is incorporated, and will come into effect from 1 January 2025.

The Group is within the scope of the OECD Pillar Two model rules and applied the exception to recognizing and disclosing information about deferred tax assets and liabilities relating to Pillar Two income taxes from 1 January 2025.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/80 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aturan Model Pilar Dua OECD (lanjutan)

Entitas induk utama ("UPE") dari Perusahaan berada dalam lingkup aturan model OECD Pilar Dua dan telah menerapkan pengecualian untuk mengakui dan mengungkapkan informasi tentang aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pajak penghasilan Pilar Dua mulai 1 Januari 2025. Undang-undang Pilar Dua telah diundangkan atau hampir diundangkan di beberapa yurisdiksi tempat UPE beroperasi. Undang-undang tersebut mulai berlaku untuk tahun keuangan Perusahaan yang berakhir setelah 31 Desember 2024. UPE tunduk pada undang-undang yang telah diundangkan atau hampir diundangkan tersebut dan telah melakukan penilaian terhadap potensi eksposurnya terhadap pajak penghasilan Pilar Dua.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, tingkat pajak efektif di seluruh yurisdiksi tempat Grup beroperasi berada di atas 15%. Oleh karena itu, tidak diperlukan pajak tambahan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.

***25. TAXATION** (continued)*

***g. OECD Pillar Two Model Rules** (continued)*

The ultimate parent entity ("UPE") of the Company is within the scope of the OECD Pillar Two model rules and has applied the exception to recognising and disclosing information about deferred tax assets and liabilities relating to Pillar Two income taxes from 1 January 2025. Pillar Two legislation has been enacted or substantially enacted in certain jurisdictions in which the UPE operates. The legislation has become effective for the Company's financial year ended after 31 December 2024. The UPE is subject to the enacted or substantially enacted legislation and has conducted an assessment of its potential exposure to Pillar Two income taxes.

Based on the assessment, the effective tax rates in all jurisdictions in which the Group operates are above 15%. Therefore, there was no top-up tax required for the year ended 31 December 2025.

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup:

26. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of related parties

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
BRI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank, deposito berjangka dan bank garansi/ *Placement of cash in banks, time deposits, and restricted cash in banks*
BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank, deposito berjangka, dan bank garansi, dan sewa atas properti investasi/ *Placement of cash in banks, time deposits, restricted cash in banks, and lease of investment property*
Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank, deposito berjangka, dan bank garansi/ *Placement of cash in banks, time deposits, and restricted cash in banks*
BSI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka/ *Placement of cash in banks and time deposits*
Pertamina	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian minyak pelumas dan sewa atas properti investasi/ *Purchase of lubricants and lease of investment property*
PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ *Purchase of gas*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/81 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup: (lanjutan)

***26. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES** (continued)*

***Nature of related parties** (continued)*

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group: (continued)

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
PT Pertamina Patra Niaga ("Patra Niaga")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar minyak/ *Purchase of fuel*
PT Pertamina Hulu Energi ("PHE")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar gas dan sewa atas properti investasi/ *Purchase of gas and lease of investment property*
PT Pertamina EP Cepu ("PEPC")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ *Purchase of gas*
PT Pertamina EP ("PEP")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ *Purchase of gas*
PT Pertamina Gas ("Pertagas")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ *Purchase of gas*
Perta Arun Gas ("PAG")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ *Purchase of gas*
NR	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi atas jasa regasifikasi dan sewa atas properti investasi/ *Regasification services and lease of investment property*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk ("PTBA")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian batubara/ *Purchase of coal*
Tugu	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Asuransi instalasi dan mesin pembangkit dan perlengkapan transmisi/ *Insurance services for installation and power plants and transmission equipment*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Asuransi instalasi dan mesin pembangkit dan perlengkapan transmisi/ *Insurance services for installation and power plants and transmission equipment*
PT Hutama Karya (Persero) ("HK")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa konstruksi/ *Construction services*
Perum Jasa Tirta ("Jasa Tirta")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian air/ *Purchase of water*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/82 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

***Nature of related parties** (continued)*

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup: (lanjutan)

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group: (continued)

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
PLN	Entitas induk pengendali/ *Controlling parent entity*	Transaksi penjualan tenaga listrik, jasa operasi dan pemeliharaan, sewa tanah, dan sewa atas atas properti investasi/ *Sales of electricity, operation and maintenance services, land lease, and lease of investment property*
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	Pemegang saham minoritas/ *Minority shareholder*	Penyertaan modal/ *Paid-in capital*
PIP	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi penjualan barang dan jasa/ *Sales of goods and services*
PT PLN Batam ("PLN Batam")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi penjualan barang dan jasa/ *Sales of goods and services*
EPI	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian bahan bakar gas dan biaya manajemen/ *Purchase of gas and management fee*
PT PLN Energi Gas ("PLN EG")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi sewa *Floating Storage Regasification Unit*/ *Lease of Floating Storage Regasification Unit*
PT PLN Energy Services ("PLN ES") (dahulu/*previously* PT Haleyora Power)	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
ICON	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PLNE	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT PLN Nusa Daya ("PLN ND")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT PLN Batubara Niaga ("BBN")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian batubara/ *Purchase of coal*
PT Energy Management Indonesia (Persero) ("EMI")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT Bahtera Adhiguna ("BAG")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian jasa pelayaran/ *Purchase of shipping services*
APLN	Pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Asuransi bangunan dan perlengkapan umum/ *Insurance for buildings and general equipment*
S2P	Entitas asosiasi/*Associate*	Jasa operasi dan pemeliharaan/ *Operation and maintenance services*
RDM	Entitas asosiasi/*Associate*	Transaksi jasa proyek/ *Project services*
BDSN	Ventura bersama/*Joint venture*	Jasa operasi dan pemeliharaan/ *Operation and maintenance services*
BPI	Ventura bersama/*Joint venture*	Jasa operasi dan pemeliharaan/ *Operation and maintenance services*
SGPJB	Ventura bersama/*Joint venture*	Piutang kepada ventura bersama/ *Receivables from joint ventures*
PMSE	Ventura bersama/*Joint venture*	Piutang kepada ventura bersama/ *Receivables from joint ventures*
NSSE	Ventura bersama/*Joint venture*	Piutang kepada ventura bersama/ *Receivables from joint ventures*
KPJB	Ventura bersama/*Joint venture*	Jasa operasi dan pemeliharaan dan piutang dividen/ *Operation and maintenance services and dividend receivables*
DP-PLN	Pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Pengelola dana pensiun/ *Pension fund manager*
Komisaris dan Direktur/ *Commissioners and Directors*	Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Upah dan tunjangan/ *Salaries and allowances*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/83 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *26. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Saldo dengan pihak berelasi / ***Balances with related parties***

	2025	2024	
Kas dan setara kas (Catatan 4)			***Cash and cash equivalents (Note 4)***
BNI	2,809,176	2,058,365	*BNI*
Bank Mandiri	1,549,153	4,319,485	*Bank Mandiri*
BRI	1,437,425	1,069,234	*BRI*
BSI	300,092	78,739	*BSI*
Jumlah	**6,095,846**	**7,525,823**	***Total***
Piutang usaha (Catatan 5)			***Trade receivables (Note 5)***
PLN	51,779,866	41,527,071	*PLN*
PLN Batam	316,718	324,748	*PLN Batam*
Pertamina	83,299	125,934	*Pertamina*
BPI	19,422	16,672	*BPI*
EPI	88	79,668	*EPI*
Lain-lain	96,523	86,348	*Others*
Jumlah	**52,295,916**	**42,160,441**	***Total***
Utang usaha (Catatan 11)			***Trade payables (Note 11)***
EPI	2,920,079	3,117,255	*EPI*
Patra Niaga	1,158,569	1,125,226	*Patra Niaga*
PTBA	384,962	747,779	*PTBA*
BBN	163,933	212,957	*BBN*
BAG	154,379	112,864	*BAG*
HK	98,431	98,431	*HK*
Jasa Tirta	89,130	25,684	*Jasa Tirta*
PHE	69,549	78,961	*PHE*
PEPC	66,116	76,619	*PEPC*
PGN	47,235	257,932	*PGN*
Lain-lain	201,949	120,609	*Others*
Jumlah	**5,354,332**	**5,974,317**	***Total***
Utang lain-lain (Catatan 12)			***Other payables (Note 12)***
PLN	672,586	428,599	*PLN*
PLN ND	63,568	25,450	*PLN ND*
PLN EG	34,714	-	*PLN EG*
PLNE	27,772	114,567	*PLNE*
ICON	10,544	17,445	*ICON*
Lain-lain	14,736	9,559	*Others*
Jumlah	**823,920**	**595,620**	***Total***
Pinjaman dari pemegang saham (Catatan 26a)			***Loans from a shareholder (Note 26a)***
PLN	**2,146,651**	**2,398,167**	*PLN*
Liabilitas sewa (Catatan 13)			***Lease liabilities (Note 13)***
PLN EG	1,264,834	1,394,560	*PLN EG*
PLN	789,465	869,160	*PLN*
Jumlah	**2,054,299**	**2,263,720**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/84 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *26. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Transaksi dengan pihak berelasi / ***Transactions with related parties***

	2025	2024	
Penjualan tenaga listrik (Catatan 19)			***Sales of electricity (Note 19)***
PLN	**94,971,854**	**88,321,254**	*PLN*
Pendapatan usaha lainnya			***Other operating revenue***
PLN	2,363,299	1,621,486	*PLN*
PLN Batam	261,089	557,636	*PLN Batam*
PIP	180,124	190,635	*PIP*
BDSN	115,683	85,686	*BDSN*
BPI	106,153	149,534	*BPI*
Lain-lain	116,858	63,039	*Others*
Jumlah	**3,143,206**	**2,668,016**	***Total***
Beban bahan bakar dan pelumas			***Fuel and lubricants expenses***
EPI	25,289,907	14,720,292	*EPI*
PTBA	5,873,109	5,703,681	*PTBA*
Patra Niaga	3,637,054	3,890,661	*Patra Niaga*
PGN	3,252,638	3,605,137	*PGN*
BBN	2,120,643	1,669,112	*BBN*
BAG	1,532,959	2,014,040	*BAG*
PHE	1,137,633	1,017,343	*PHE*
PEP	630,825	501,419	*PEP*
Jasa Tirta	376,331	288,182	*Jasa Tirta*
PLN EG	207,208	283,615	*PLN EG*
PLNE	117,963	118,867	*PLNE*
Pertagas	513	171,313	*Pertagas*
NR	-	473,004	*NR*
Perta Arun Gas	-	298,410	*Perta Arun Gas*
Jumlah	**44,176,783**	**34,755,076**	***Total***
Beban pemeliharaan			***Maintenance expenses***
PLN ND	303,018	211,303	*PLN ND*
PLNE	96,722	186,035	*PLNE*
Lain-lain	293,886	69,428	*Others*
Jumlah	**693,626**	**466,766**	***Total***
Beban usaha lain-lain			***Other operating expenses***
EPI	381,068	447,292	*EPI*
Tugu	306,789	189,564	*Tugu*
Jumlah	**687,857**	**636,856**	***Total***
Beban keuangan			***Finance costs***
PLN EG	157,024	165,437	*PLN EG*
PLN	129,457	170,843	*PLN*
Jumlah	**286,481**	**336,280**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/85 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Pinjaman dari pemegang saham

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar US$280.000.000 dengan tingkat bunga tahunan LIBOR USD enam bulan dengan marjin 0,98%. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek *add-on* PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2032. Pada tanggal 31 Oktober 2023, perjanjian ini telah diamendemen untuk mengubah suku bunga dari LIBOR menjadi SOFR.

Pada tahun 2025 dan 2024, Perusahaan melakukan penarikan pokok pinjaman masing-masing senilai Rpnihil (setara dengan US$nihil) dan Rp316.985 (setara dengan US$19.924.861). Perusahaan melakukan pembayaran pokok pinjaman masing-masing senilai Rp323.579 (setara dengan US$19.597.178) dan Rp313.731 (setara dengan US$19.597.178).

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp2.146.651 (setara dengan US$127.381.661) dan Rp2.398.167 (setara dengan US$146.978.839), dengan porsi jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp344.494 dan Rp340.062.

b. Kompensasi manajemen kunci

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp55.774 dan Rp63.637.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

***26. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES** (continued)*

a. Loans from a shareholder

On 20 March 2018, the Company entered into a loan agreement with PLN amounted to US$280,000,000 with an annual interest rate of LIBOR USD six-month with 0.98% margin. The loan used to fund the add-on project of PLTGU Muara Tawar Block 2, 3 and 4. The terms of this agreement is effective since the agreement was signed and will be expired on 8 May 2032. On 31 October 2023, the agreement has been amended to change the interest rate from LIBOR to SOFR.

In 2025 and 2024, the Company drawdown the principal of loan amounted to Rpnil (equivalent to US$nil) and Rp316,985 (equivalent to US$19,924,861), respectively. The Company also paid the principal of loan amounted to Rp323,579 (equivalent to US$19,597,178) and Rp313,731 (equivalent to US$19,597,178), respectively.

The outstanding balances of this loan as at 31 December 2025 and 2024 amounted to Rp2,146,651 (equivalent to US$127,381,661) and amounted to Rp2,398,167 (equivalent to US$146,978,839), respectively, with the current portion as at 31 December 2025 and 2024 amounted to Rp344,494 and Rp340,062, respectively.

b. Key management compensation

The total compensation of the Company's Board of Commissioners and Directors for 31 December 2025 and 2024 amounted to Rp55,774 and Rp63,637, respectively.

All of the compensation to the Company's Boards of Commissioners and Directors are short-term employee benefits.

27. IKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

a. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBTL")

Perusahaan memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN akan membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Formula pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

27. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As at 31 December 2025, the Group had significant commitments and contingencies as follows:

a. Power Purchase Agreements ("PPA")

The Company has various PPAs with PLN. Under those agreements, PLN will pay the Company for the supply of electricity at the amount determined based on the payment formula. Such a payment formula includes the cost of capacity, energy, as well as operations and maintenance components which depends on the level of energy supplied and other variables as stipulated in the agreement.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/86 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. PJBTL (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Direksi PLN No. 0357.K/DIR/2022 tanggal 28 November 2022 tentang tindak lanjut pembentukan *subholding* PLN Masa/Tahap Legal End-State, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sirkuler Perusahaan tanggal 21 September 2022 dan 30 Desember 2022, terdapat perubahan dan pernyataan Kembali atas PJBTL antara Perusahaan dan PLN.

Pada tanggal 30 Desember 2022, PLN dan Perusahaan menandatangani 22 amendemen dan pernyataan kembali PJBTL yang terdiri dari: 5 atas wilayah Jawa, Madura, Bali, 7 atas wilayah Sumatra, 4 atas wilayah Kalimantan, 1 atas wilayah Maluku dan 5 atas wilayah Sulawesi. Amendemen dan pernyataan kembali PJBTL tersebut akanberlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dengan periode kontrak dari tahun 2023 sampai dengan 2032.

b. Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan

Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit.

Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengelolaan Aset ("AMC") yang terdiri atas:

i. Pengelolaan Aset PLTU Air Anyir Bangka dan PLTU Suge Belitung antara Perusahaan dan PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk memperpanjang durasi perjanjian, dimana perjanjian telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2028.

ii. Pengelolaan Aset CNG Plant Gresik antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara ("PLN JBTBN") yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk memperpanjang durasi perjanjian, dimana perjanjian telah diperpanjang sampai dengan Perusahaan ditetapkan sebagai pemilik aset.

iii. Pengelolaan Aset PLTU Bolok dan PLTU Ropa antara Perusahaan dan PLN JBTBN yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk memperpanjang durasi perjanjian, dimana perjanjian telah diperpanjang sampai dengan Perusahaan ditetapkan sebagai pemilik aset.

27. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. PPA *(continued)*

Based on the Decree of the Board of Directors of PLN No. 0357.K/DIR/2022 dated 28 November 2022 regarding the follow-up to the establishment of the Subholding of PLN for the Legal End-State Period/Stage, and the Company's circular General Meeting of Shareholders on 21 September 2022 and 30 December 2022, there are amendments and restatements of the PPA between the Company and PLN.

On 30 December 2022, PLN and the Company signed 22 amendments and restatements of the PPA consisting of 5 for the Java, Madura and Bali area, 7 for the Sumatra area, 4 for the Kalimantan area, 1 for the Maluku area and 5 for the Sulawesi area. The amendments and restatements of these PPA became effective on 1 January 2023 with a contract period from 2023 up to 2032.

b. Operation and Maintenance Agreements

The Company and PLN entered into an Asset Management Services Master Agreement.

This agreement was followed by an Asset Management Contract ("AMC") consisting of the following:

i. Asset Management of PLTU Air Anyir Bangka and PLTU Suge Belitung between the Company and PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung which has been amended several times to extend the duration of the agreement, where the agreement has been extended until 31 December 2028.

ii. Asset Management of CNG Gresik between the Company and PLN Region East Java, Bali and Nusa Tenggara ("PLN JBTBN") which has been amended several times to extend the duration of the agreement, where the agreement has been extended until the Company is determined as the owner of the asset.

iii. Asset Management of PLTU Bolok and PLTU Ropa between the Company and PLN JBTBN which has been amended several times to extend the duration of the agreement, where the agreement has been extended until the Company is determined as the owner of the asset.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/87 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan (lanjutan)

Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Operasi dan Jasa Pemeliharaan yang terdiri atas:

i. Perjanjian PLTU Tidore (2 x 7 MW) tahap *Supporting* yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2026 atau sampai dengan terjadinya transfer Aset PLTU Tidore (mana yang terjadi lebih dahulu).

ii. Perjanjian PLTA Ampel Gading (2 x 5 MW) tahap *Performance Based* yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.

iii. Perjanjian PLTU Sambelia (2 x 50 MW) tahap *Supporting Based* yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Perusahaan dan PLN menandatangani Amandemen II Perjanjian Induk Jasa Pengelolaan Pembangkit yang akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2028. Perjanjian tersebut mencakup pengelolaan beberapa unit pembangkit milik PLN yang berada di wilayah Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Jasa Pengelolaan Pembangkit tahap *Performance Based* yang akan berlaku sampai dengan Perusahaan ditetapkan menjadi pemilik aset. Perjanjian tersebut mencakup pengelolaan beberapa unit pembangkit milik PLN yang berada di wilayah Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

27. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Operation and Maintenance Agreements *(continued)*

The Company and PLN entered into Operation and Maintenance Services Agreements consisting of the following:

i. PLTU Tidore (2 x 7 MW) Supporting phase agreement which valid until 31 December 2026 or until the Transfer of the PLTU Tidore Asset (whichever occurs first).

ii. PLTA Ampel Gading (2 x 5 MW) Performance Based phase agreement which valid until 31 December 2026.

iii. PLTU Sambelia (2 x 50 MW) Supporting Based phase agreement which valid until 31 December 2026.

The Company and PLN signed the Amendment II to the Master Agreement for Power Plant Management which will be valid until 31 December 2028. The agreement covers the management of several power plant units owned by PLN located in the regions of Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi.

The Company and PLN entered into a Power Plant Management Services Master Agreement Performance Based phase which will be valid until the Company is determined as the owner of the assets. The agreement covers the management of several power plant units owned by PLN located in the regions of Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku and Papua.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/88 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar

i. Batubara

27. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

c. Fuel Supply Agreements

i. Coal

Pemasok/ *Supplier*	No. Kontrak/ *Contract no.*	Satuan/ *Unit of measure*	Jumlah/ *Quantity*)*	Periode/ *Period*
PTBA	1154.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2025	Metrik ton/*Metric ton*	258,650,000	Dec 2012 - Dec 2032
	1217.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2025	Metrik ton/*Metric ton*	2,445,000	Jan 2024 - Dec 2026
	2754.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2024	Metrik ton/*Metric ton*	14,568,000	Sep 2004 - Dec 2031
Konsorsium PT Arutmin Indonesia dan/*and* PT Darma Henwa Tbk	1653.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2024	Metrik ton/*Metric ton*	121,980,000	Aug 2019 - Aug 2027
Konsorsium PLN Batubara Niaga Sumber Tambang PT Arutmin via PT Jhonlin Group	0719.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2025	Metrik ton/*Metric ton*	1,070,000	Feb 2025 - Dec 2025**)
Konsorsium PT Dwi Guna Laksana dan/*and* PT Borneo Indobara	2149.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2025	Metrik ton/*Metric ton*	1,890,000	Dec 2009 - Dec 2033
Konsorsium PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk dan/*and* PT Borneo Indonesia	1822.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2024	Metrik ton/*Metric ton*	10,000,000	Apr 2022 - Apr 2027
PT Indexim Coalindo	1972.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2023	Metrik ton/*Metric ton*	6,100,000	Apr 2018 - Mar 2028
Konsorsium PT Antareja Energi Asia, PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua dan/ *and* PT Berkat Murah Energi	0709.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2024	Metrik ton/*Metric ton*	10,100,000	Jan 2022 - Jan 2027
PT Bhumi Rantau Energi	2054.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2025	Metrik ton/*Metric ton*	1,597,500	Jun 2024 - Dec 2026
	2055.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2025	Metrik ton/*Metric ton*	590,000	Jun 2024 - Dec 2026
Konsorsium PT Global Energi Lestari dan/*and* PT Tempirai Energi Resource	0092.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2026	Metrik ton/*Metric ton*	5,927,000	Jan 2022 - Dec 2026
Konsorsium PT Global Energi Lestari, PT Era Perkasa Mining, dan/*and* PT Quasar Inti Nusantara	3718.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2025	Metrik ton/*Metric ton*	11,075,000	Jan 2022 - Jan 2027
PT Bara Tabang	3737.Amd/EPI.01.01/PLNEPI0100/2025	Metrik ton/*Metric ton*	2,000,000	Jan 2024 - Dec 2026

*) Dalam angka penuh
**) Masih dalam tahap perpanjangan

**) In full amount*
***) Currently in renewal process*

Selama tahun 2025, harga dasar batubara di tempat penyerahan *stockpile* unit berkisar antara Rp621.498 (nilai penuh) sampai dengan Rp1.422.332 (nilai penuh) per ton, yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature*, *Hardgrove Grindability Index* dan ukuran batubara.

During 2025, the stockpile price of coal ranges from Rp621,498 (full amount) to Rp1,422,332 (full amount) per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, Ash Fusion Temperature, Hardgrove Grindability Index and coal size.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan ditinjau secara periodik setiap 6 (enam) bulanan atau sewaktu-waktu untuk disesuaikan dengan indeks harga batubara acuan.

In accordance with the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") No. 11 of 2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of MoEMR No. 7 of 2017 regarding Procedures for the Determination of Benchmark Prices for the Sale of Metal Minerals and Coal, all the above contract base prices will be reviewed periodically every 6 (six) months or at any time to be adjusted according to the reference coal price index.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

In relation to the coal sales and purchase agreement, suppliers are obliged to submit their performance guarantees.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/89 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

ii. Gas

27. *COMMITMENTS AND CONTINGENCIES* *(continued)*

c. *Fuel Supply Agreements* *(continued)*

ii. Gas

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Supplier*	Nomor kontrak/ *Contract number*	Jumlah yang disepakati/ *Agreed quantity*		
			Periode/ *Periods*	Satuan/*Unit of measure*	Jumlah/ *Quantity**)
Gresik	PT Saka Energi Indonesia	2214.Amd/EPI.01.02/PLN0100/2023	2022 - 2026	TBTU	44.3
Gresik	PT Petrogas Jatim Utama	ZEPC01.PJ/061/2026	2026 - 2027	BBTU	12,385
Gresik	EPI	ZZB012.PJ/061/2024	2024 - 2027	BBTU	36,510
Gresik	PGN Jambaran Tiung Biru	0670.PJ/EPI.01.02/DIRUT/2017	2022 - 2035	BBTU	511,000
Gresik	PHE WMO, Kodeco Energy Co., Ltd., dan/*and* PT Mandiri Madura Barat	0002.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2025	2023 - 2027	BBTU	28,412
Gorontalo	EPI	ZEPC02.PJ/061/2025	2025 - 2025**)	Kargo/*Cargo*	
Muara Tawar	PEP	0021.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024	2024 - 2026	MMSCF	12,096
Muara Karang	EPI	ZZB013.PJ/EP/061/2024	2024 - 2030	BBTU	17,076
Muara Karang, Muara Tawar, Arun dan/*and* Belawan	EPI	ZEPC01.PJ/061/2025	2025 - 2027	Kargo/*Cargo*	
Pekanbaru	EPI	ZZB004.PJ/061/2024	2024 - 2028	BBTU	8,375
Kaltimra	PEP	ZEPC06.PJ/061/2025	2023 - 2027	BBTU	Sesuai kebutuhan/ *As needed*
Kalselteng	Ophir Indonesia (Bangkanai) Limited	-	2016 - 2033	BBTU	130,000
Sengkang	EPI	ZZB008.PJ/EP/061/2024	2024 - 2027	BBTU	47,100

*) Dalam angka penuh
**) Masih dalam tahap perpanjangan

**) In full amount*
***) Currently in renewal process*

Harga realisasi pembelian gas pipa dan *Liquefied Natural Gas* ("LNG") pada titik penyerahan di tahun 2025 berkisar antara US$4,94 sampai dengan US$23 dan Rp105.294,96 per *Million British Thermal Unit* ("MMBTU")/*Million Standard Cubic Feet* ("MSCF").

The gas pipeline and Liquefied Natural Gas ("LNG") purchase prices at the point of delivery in 2025 range from US$4.94 to US$23 and Rp105,294.96 (full amount) per Million British Thermal Unit ("MMBTU")/Million Standard Cubic Feet ("MSCF").

iii. Bahan Bakar Minyak ("BBM")

Pada tahun 2024 dan 2025, pembelian volume BBM akan menggunakan formula harga dan kuantitas yang diatur dalam beberapa Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak dengan Patra Niaga yang diperbarui setiap tiga bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo utang usaha atas pembelian bahan bakar kepada Patra Niaga adalah masing-masing sebesar Rp1.158.569 dan Rp1.125.226.

iii. Fuel

In 2024 and 2025, the purchase of fuel volume was based on the price formula and quantity outlined in several Fuel Purchase Agreement with Patra Niaga which was updated every three months.

As at 31 December 2025 and 2024, the trade payables outstanding for purchases of fuel from Patra Niaga amounted to Rp1,158,569 and Rp1,125,226, respectively.

d. Perolehan barang modal

Pada tanggal 19 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian novasi dengan PLN dan Konsorsium Doosan Enerbility Co. Ltd dan HK sehubungan dengan Perjanjian Kontrak No. 0125.PJ/DAN.02.01/DIR/2017, tertanggal 29 Maret 2017, untuk proyek add-on PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3, dan 4. Perjanjian tersebut terakhir diubah yaitu Addendum IV, pada tanggal 31 Agustus 2023 terkait kerja tambah untuk *switchyard* serta kerja tambah untuk *transducer* blok 2.

d. *Capital expenditures*

On 19 December 2017, the Company signed a novation agreement with PLN and the Consortium of Doosan Enerbility Co. Ltd and HK in connection with the Contract Agreement No. 0125.JP/DAN.02.01/DIR/2017, dated 29 March 2017, for the add-on project of PLTGU Muara Tawar Block 2, 3, and 4. The agreement was last amended through Addendum IV, dated 31 August 2023 related to variations order for switchyard, as well as additional work for transducer block 2.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/90 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d. Perolehan barang modal (lanjutan)

Pada tanggal 29 Maret 2023, Perusahaan dengan Konsorsium Mitsubishi Corporation dan PT Wijaya Karya telah menandatangani kesepakatan bersama penerimaan pengalihan kontrak No. 1255.PJ/DAN.02.01/DIR/2016, tertanggal 26 Agustus 2016 terkait proyek PLTGU Muara Karang sebagai akibat pembentukan *subholding*. Perjanjian tersebut terakhir diubah yaitu Addendum IV, pada tanggal 12 Juni 2023 terkait perubahan pihak dalam kontrak dan nilai kontrak dikarenakan perubahan PPN, serta penambahan ketentuan tentang klaim biaya *overhead*.

Sehubungan dengan perjanjian diatas dan kegiatan pembangkit lainnya, Perusahaan mempunyai fasilitas *Standby Letter of Credit* ("SBLC") dengan rincian sebagai berikut:

27. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

d. Capital expenditures *(continued)*

On 29 March 2023, the Company and the Consortium of Mitsubishi Corporation and PT Wijaya Karya entered into an agreement to transfer contract No. 1255.PJ/DAN.02.01/DIR/2016, dated 26 August 2016 regarding the PLTGU Muara Karang project as a result of the establishment of subholding. The agreement was last amended through Addendum IV, dated 12 June 2023 related to changes in parties to the contract and contract value due to changes in VAT, as well as additional provisions regarding overhead cost claims.

In relation to the above agreements and other power plant activities, the Company has Standby Letter of Credit ("SBLC") facilities with the following details:

Bank penerbit/ ***Issuing Bank***	**Penerima manfaat/** ***Beneficiary***	**Mata uang/** ***Currency***	**Jumlah/** ***Total ****
Mandiri	Doosan Enerbility Co. Ltd.	EUR	1,388
	Doosan Enerbility Co. Ltd.	US$	1,446,143
	Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	16,884,309
	Mitsubishi Corporation	JPY	104,322,000
	Southern Cable Sdn Bhd	MYR	10,342,873
	Southern Cable Sdn Bhd	MYR	6,540,829
	Southern Cable Sdn Bhd	MYR	8,355,237
BRI	HK	USD	1,747,228

*) Dalam jumlah penuh

*) *In full amount*

e. Litigasi

Grup dari waktu ke waktu terlibat dalam berbagai tuntutan hukum yang dapat memengaruhi kegiatan bisnis Grup. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, dari proses litigasi yang ada Grup berkeyakinan bahwa proses litigasi yang berjalan tersebut tidak akan mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi konsolidasian secara material.

e. Litigation

From time to time, the Group is involved in various legal proceedings as a normal consequence of the Group's business. As at the date of completion of the consolidated financial statements, based on the existing litigation processes, the Group believes that these ongoing legal proceedings will not have a material impact on the consolidated financial position or results of operations.

28. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, dan piutang kepada ventura bersama sebesar Rp59.505.150 (2024: Rp51.944.729) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

28. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2025, the Group classified its cash and cash equivalents, time deposits, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits, and receivables from joint ventures amounting to Rp59,505,150 (2024: Rp51,944,729) as financial assets at amortised cost.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/91 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, liabilitas sewa, dan pinjaman dari pemegang saham sebesar Rp15.670.064 (2024: Rp16.242.087) sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

28. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

As at 31 December 2025, the Group classified its trade payables, other payables, accrued expenses, lease liabilities, and loans from a shareholder amounting to Rp15,670,064 (2024: Rp16,242,087) as financial liabilities carried at amortised cost.

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Faktor risiko keuangan

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing), risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi, yang dibantu oleh Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Direksi bertuga menentukan prinsip dasar kebijakan Manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar, analisis umur piutang untuk risiko kredit dan analisis beta untuk menentukan risiko pasar dari portofolio investasi.

Sementara itu, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan bertugas membantu Direksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

i. Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar uang mata asing

Grup memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang didenominasi dalam mata uang asing, sehingga Grup terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Kebijakan Grup untuk mengelola eksposur mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Financial risk factors

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk), interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Group's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seek to minimise potential adverse effects on th Group's financial performance.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors, supported by the Risk Management and Compliance Committee. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, and the liquidity risk.

The Group uses various methods to measure risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rate, foreign exchange risks, aging analysis for credit risk and beta analysis in respect of investment portfolios to determine market risk.

Meanwhile, the Risk Management and Compliance Committee has a responsibility to assist the Board of Directors in ensuring that risk management has been implemented in accordance with these principles

i. Market risk

(i) Foreign exchange risk

The Group has foreign currency exposures arising from transactions with customers and suppliers which are denominated in foreign exchange, therefore the Group is exposed to exchange rate fluctuations.

The Group's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/92 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko nilai tukar uang mata asing (lanjutan)

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Grup untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

***29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Financial risk factors** (continued)*

***i. Market risk** (continued)*

***(i) Foreign exchange risk** (continued)*

The following table explains the details of the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. 10% increase or decrease represents the management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates after considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes only after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

	Dampak pada laba setelah pajak/ *Effect of profit after tax*				
	2025		**2024**		
	+10%	**-10%**	**+10%**	**-10%**	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	120,480	(120,480)	47,109	(47,109)	*Cash and cash equivalents*
Deposito berjangka	711	(711)	65,213	(65,213)	*Time deposits*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5,828	(5,828)	5,632	(5,632)	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang lain-lain	1,606	(1,606)	2,495	(2,495)	*Other receivables*
Piutang kepada ventura bersama	23,055	(23,055)	38,994	(38,994)	*Receivables from joint ventures*
Subjumlah	151,680	(151,680)	159,443	(159,443)	*Subtotal*
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Pinjaman dari pemegang saham	(166,126)	166,126	(185,230)	185,230	*Loans from a shareholder*
Utang usaha	(263,801)	263,801	(309,945)	309,945	*Trade payables*
Subjumlah	(429,927)	429,927	(495,175)	495,175	*Subtotal*
Jumlah	**(278,247)**	**278,247**	**(335,732)**	**335,732**	***Total***

ii. Risiko suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2025, dan 2024, manajemen percaya risiko tingkat suku bunga adalah minimal dikarenakan Grup hanya terekspos risiko tingkat suku bunga melalui saldo pinjaman dari pemegang saham.

ii. Interest rate risk

As at 31 December 2025 and 2024, management believes that the exposure from interest rate risk is minimal because the Group is exposed interest rate risk only from loans from a shareholder.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/93 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

ii. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jika tingkat suku bunga atas pinjaman dari pemegang saham 50 bp lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp8.306 (2024: Rp9.261).

iii. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2025, total eksposur maksimum dari risiko kredit adalah Rp59.501.501 (2024: Rp51.941.852). Risiko kredit terutama berasal dari rekening bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, serta piutang kepada ventura bersama.

Semua rekening bank, deposito berjangka, dan rekening bank, dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank lokal yang memiliki reputasi.

***29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Financial risk factors** (continued)*

***ii. Interest rate risk** (continued)*

The sensitivity analysis below has been determined based on the Group's exposure to interest rates for financial instruments after tax at the reporting date. The analysis has been prepared by assuming that the amounts of assets and liabilities that were outstanding at the end of the reporting period were outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point ("bp") increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables being held constant. A 50 bp increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in interest rates after considering the current economic conditions.

As at 31 December 2025, if interest rates on loans from a shareholder had been 50 bp higher/lower with all other variables being held constant, the post-tax profit for the year would have been Rp8,306 (2024: Rp9,261) lower/higher.

iii. Credit risk

As at 31 December 2025, the total maximum exposure from credit risk was Rp59,501,501 (2024: Rp51,941,852). Credit risk arises from cash in banks, time deposits, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits, and receivables from joint ventures.

All of the cash in banks, time deposits and restricted cash in banks and time deposits are placed in reputable local banks.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/94 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

iii. Risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 PLN memberikan kontribusi masing-masing sebesar 98,62% dan 98,00% dari seluruh nilai piutang usaha. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena risiko kegagalan kredit dari PLN rendah dimana Grup telah secara legal terikat dalam perjanjian dengan PLN untuk penjualan listrik dan jasa lainnya.

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup diharuskan untuk menilai penyisihan KKE untuk semua piutang. Grup telah mencatat penambahan atas penyisihan kerugian kredit sebesar Rp3.707 pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: Rp4.553). Tidak ada pergerakan lain dalam penyisihan kerugian kredit selain dari penambahan cadangan kerugian.

iv. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

***29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Financial risk factors** (continued)*

***iii. Credit risk** (continued)*

As at 31 December 2025 and 2024 PLN gave a contribution of 98.62% and 98.00% from the total trade receivables, respectively. Management believes that the credit risk is limited due to the credit default of PLN is low since the Group has legally binding agreement with PLN for sales of electricity and other services transactions.

Certain financial assets are individually assessed for impairment and if found to be impaired, have an impairment loss assigned to them on an individual basis.

At the end of each reporting year, the Group is required to assess an allowance for ECLs for all receivables. The Group has recorded an addition of credit loss allowance amounting to Rp3,707 as at 31 December 2025 (2024: Rp4,553). There are no other movements within the credit loss allowance other than addition of loss allowance.

iv. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or other financial assets. The ultimate responsibility for liquidity risk management was in the Directors, who have built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's funding and liquidity management requirements. The Group manages its liquidity risk by maintaining adequate cash and reserve borrowing facilities by continuously monitoring the forecast and actual cash flows and by matching the maturity profiles of financial liabilities and assets.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/95 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

iv. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

***29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Financial risk factors** (continued)*

***iv. Liquidity risk** (continued)*

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table represent contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

	2025					
	Dalam satu tahun/*Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/*More than one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/*More than three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/*More than five years*	Jumlah/*Total*	
Utang usaha	8,969,844	-	-	-	8,969,844	*Trade payables*
Liabilitas sewa	608,907	726,856	723,793	1,337,735	3,397,291	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	1,861,881	-	-	-	1,861,881	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	254,018	-	-	-	254,018	*Accrued expenses*
Pinjaman dari pemegang saham	356,426	699,154	680,702	498,425	2,234,707	*Loans from a shareholder*
Jumlah	**12,051,076**	**1,426,010**	**1,404,495**	**1,836,160**	**16,717,741**	***Total***

	2024					
	Dalam satu tahun/*Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/*More than one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/*More than three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/*More than five years*	Jumlah/*Total*	
Utang usaha	9,419,563	-	-	-	9,419,563	*Trade payables*
Liabilitas sewa	667,017	726,194	726,856	1,698,431	3,818,498	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	1,861,192	-	-	-	1,861,192	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	43,249	-	-	-	43,249	*Accrued expenses*
Pinjaman dari pemegang saham	447,197	838,731	767,829	858,776	2,912,533	*Loans from a shareholder*
Jumlah	**12,438,218**	**1,564,925**	**1,494,685**	**2,557,207**	**18,055,035**	***Total***

b. Manajemen modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Grup terdiri ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba.

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

b. Capital management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Group's capital structure consists of equity shareholders that consist of capital stock, additional paid-in capital, and retained earnings.

The Board of Directors of the Company periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/96 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Manajemen modal (lanjutan)

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Grup. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

c. Estimasi nilai wajar

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya sebagai berikut:

1. Kas dan setara kas, deposito berjangka, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan piutang lain-lain akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

2. Nilai tercatat dari piutang ventura bersama mendekati nilai wajarnya karena merupakan bunga pinjaman mengambang yang pada awalnya diakui pada nilai wajar berdasarkan tingkat bunga pasar pada saat tanggal pengakuan awal.

3. Utang usaha, utang lain-lain, dan beban yang masih harus dibayar akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

4. Pinjaman dari pemegang saham merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga variabel sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

d. Saling hapus aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

***29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Capital management** (continued)*

The Group aims to minimise the cost of capital, in order to maximise its value. Therefore, the Group's policy in seeking the funding that will always take into account the financial risks that may arise in the future.

c. Fair value estimation

As at 31 December 2025 and 2024, the carrying amounts of the financial assets and liabilities approximate their fair values as follows:

1. *Cash and cash equivalents, time deposits, restricted cash in banks and time deposits, trade receivables, and other receivables are due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values.*

2. *The carrying amount of the receivables from joint ventures approximates its fair value as they are floating interest receivables which were initially recognised at fair value based in market rates at the initial recognition date.*

3. *Trade payables, other payables, and accrued expenses are due within 12 months, thus the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.*

4. *Loans from a shareholder comprises liabilities with variable interest rates where the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.*

d. Offsetting financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statements of financial position where the Group currently has a legally enforceable right to offset the recognised amounts, and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/97 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

d. Saling hapus aset dan liabilitas keuangan (lanjutan) / *Offsetting financial assets and liabilities (continued)*

Aset dan liabilitas keuangan berikut ini tunduk kepada saling hapus, tunduk pada pengaturan induk untuk penyelesaian secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following financial assets and liabilities are subject to offsetting, enforceable master netting arrangements and similar agreements as at 31 December 2025 and 2024:

	Jumlah bruto instrumen keuangan yang diakui/ *Gross amounts of recognised financial instruments*	Jumlah bruto instrumen keuangan yang diakui disalinghapuskan di laporan posisi keuangan konsolidasian/*Gross amounts of recognised financial instruments offset in the consolidated statement of financial position*	Jumlah bersih/ *Net amount*	
31 Desember 2025				***31 December 2025***
Aset keuangan				***Financial assets***
Piutang usaha	66,181,257	(13,731,761)	52,449,496	*Trade receivables*
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	22,701,605	(13,731,761)	8,969,844	*Trade payables*
Pinjaman dari pemegang saham jatuh tempo dalam waktu satu tahun	344,494	-	344,494	*Loans from a shareholder, net of current maturities*
31 Desember 2024				***31 December 2024***
Aset keuangan				***Financial assets***
Piutang usaha	60,749,652	(18,426,220)	42,323,432	*Trade receivables*
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	27,702,997	(18,283,434)	9,419,563	*Trade payables*
Pinjaman dari pemegang saham jatuh tempo dalam waktu satu tahun	482,848	(142,786)	340,062	*Loans from a shareholder, net of current maturities*

30. INFORMASI ARUS KAS / *CASH FLOW INFORMATION*

a. Transaksi non kas / *Non-cash transactions*

Tabel di bawah ini menunjukkan transaksi non kas Grup selama tahun berjalan sebagai berikut:

The table below shows the Group's non-cash transactions during the year as follows:

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas:			***Non-cash activities:***
Saling hapus piutang usaha dengan utang usaha	866,510	4,639,836	*Offsetting trade receivables with trade payables*
Pembayaran dividen dengan saling hapus piutang usaha	12,865,251	13,643,598	*Dividend payments through trade receivables offset*
Saling hapus piutang usaha dengan utang bunga	-	142,786	*Offsetting trade receivables with interest payables*
Perolehan aset tetap melalui utang usaha	725,545	2,062,889	*Additions of property, plant and equipment through trade payables*
Penambahan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi properti investasi	-	147,100	*Additions of property, plant and equipment from reclassification of investments property*
Dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang belum diterima	6,822	6,822	*Dividends from associates and joint ventures that have not been received*
Penempatan modal saham pada entitas ventura bersama melalui utang lain-lain	-	151,643	*Placement of investment in joint venture through other payable*
Penambahan deposito berjangka (kas dan setara kas) dari deposito berjangka	450,037	-	*Additions of short-term time deposits (cash and cash equivalents) from time deposits*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/98 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

***30. CASH FLOW INFORMATION** (continued)*

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The below tables set out the reconciliation of the liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2025 and 2024 as follows:

2025

	1 Januari/ *January 2025*	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows from financing activities* — Arus kas/*Cash flows* — Penerimaan/ *Proceeds*	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows from financing activities* — Arus kas/*Cash flows* — Pembayaran/ *Payments*	Perubahan transaksi non-kas/ *Non-cash changes* — Perubahan lainnya/ *Other changes*)*	Perubahan transaksi non-kas/ *Non-cash changes* — Perubahan mata uang asing/ *Changes in foreign exchange rate*	31 Desember/ *December 2025*	
Pinjaman dari pemegang saham	2,398,167	-	(323,579)	-	72,063	2,146,651	*Loans from a shareholder*
Liabilitas sewa	2,519,916	-	(372,369)	290,123	-	2,437,670	*Lease liabilities*

2024

	1 Januari/ *January 2024*	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows from financing activities* — Arus kas/*Cash flows* — Penerimaan/ *Proceeds*	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows from financing activities* — Arus kas/*Cash flows* — Pembayaran/ *Payments*	Perubahan transaksi non-kas/ *Non-cash changes* — Perubahan lainnya/ *Other changes*)*	Perubahan transaksi non-kas/ *Non-cash changes* — Perubahan mata uang asing/ *Changes in foreign exchange rate*	31 Desember/ *December 2024*	
Pinjaman dari pemegang saham	2,284,744	316,985	(313,731)	-	110,169	2,398,167	*Loans from a shareholder*
Liabilitas sewa	2,635,386	-	(398,299)	282,829	-	2,519,916	*Lease liabilities*

*) Termasuk pengukuran kembali yang timbul dari modifikasi kontrak/*Include remeasurement arising from contract modification*

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN

a. Perubahan anggota Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 004.K/DK-PLN NP/2026 tertanggal 17 Maret 2026 tentang perubahan susunan Komite Audit pada Dewan Komisaris Perusahaan, susunan Komite Audit mengalami perubahan sebagai berikut:

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. Changes of Audit Committee member

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 004.K/DK-PLN NP/2026 dated 17 March 2026 regarding the changes of composition of the Audit Committee on the Board of Commissioners of the Company, the composition of the Audit Committee has changed as follows:

	2026	
Ketua	Suharyono	*Chairman*
Wakil ketua	Ade Armando	*Vice chairman*
Sekretaris/Anggota	Fadilatul Imami	*Secretary/Member*
Anggota	Awal Susmanto	*Member*

b. Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap NSHE

Pada 30 Januari 2026, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ("KLH/BPLH") mengajukan gugatan tanggung jawab mutlak terhadap NSHE di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait dugaan proyek NSHE yang berkontribusi pada kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat banjir di Sumatra Utara pada Desember 2025, dengan tuntutan senilai Rp201 miliar (nilai penuh) untuk biaya pemulihan lingkungan. Manajemen NSHE telah mencatat biaya tersebut sebagai aset dalam penyelesaian dan provisi kewajiban penarikan aset dalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2025.

b. Lawsuit of the Ministry of Environment against NSHE

On 30 January 2026, the Ministry of Environment/Environmental Control Agency ("KLH/BPLH") filed a strict liability lawsuit against NSHE at the South Jakarta District Court, related to allegations that the NSHE project contributed to environmental damage and pollution caused by the flood in North Sumatra in December 2025, with a claim amounting to Rp201 billion (full amount) for environmental restoration costs. NSHE management has recorded this cost as part of asset under construction and provision for asset retirement obligation in the consolidated financial statements as of 31 December 2025.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/99 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

b. Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap NSHE (lanjutan)

Pada tanggal 16 Maret 2026, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Persetujuan Kegiatan (Konstruksi) PLTA Batang Toru No. 1444 tahun 2026 yang berisi pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH No. 3559 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada NSHE di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sehingga dengan diterimanya persetujuan ini, NSHE dapat kembali melanjutkan konstruksi PLTA Batang Toru yang sebelumnya sempat dihentikan dengan target *commercial operation date* tetap sesuai rencana pada akhir 2026.

Grup berkeyakinan tidak terdapat indikasi penurunan nilai investasi pada NSHE pada tanggal pelaporan.

***31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD** (continued)*

***b. Lawsuit of the Ministry of Environment against NSHE** (continued)*

On 16 March 2026, the Ministry of Environment issued the Construction Approval for the Batang Toru Hydroelectric Power Plant No. 1444 year 2026 which revoked the Minister of Environment/Head of BPLH Decree No. 3559 of 2025 concerning the Imposition of Administrative Sanctions in the form of Government Coercion on NSHE in South Tapanuli Regency. Therefore, with the receipt of this approval, NSHE can resume the construction of the Batang Toru Hydroelectric Power Plant which had previously been halted, with the target commercial operation date remaining as planned at the end of 2026.

The Group believes no indication of impairment of the investment in NSHE as of the reporting date.

32. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Dewan Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 22 April 2026.

32. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Board of Directors and authorised for issue on 22 April 2026.

Lampiran Tindak Lanjut *Feedback* ARA 2024
Attachment of 2024 ARA Feedback Follow-up

Berikut ringkasan tindak lanjut atas feedback ARA 2024, disajikan pada pada tabel berikut sebagai bentuk komitmen PLN NP terhadap perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*):

The following is a summary of the follow-up to the ARA 2024 feedback, presented in the following table as commitment by PLN NP to continuous improvement:

Bagian 1: Pertanyaan yang masih memperoleh nilai 0 pada ARA 2024
Part 1: Questions that still receive a score of 0 on 2024 ARA

No.	Kode Code	Kriteria Criteria	Hasil Telaah AR 2024 2024 AR Review Results	Rencana Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 Follow-up Plan in the 2025 Annual Report	Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 (halaman) Follow-up to the 2025 Annual Report (page)
1	A.1.10.10.d	Kebijakan Dividen Dividend Policy	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 345–348 It has been disclosed in 2024 AR pages 345–348	-	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 368 It has been re-disclosed in 2025 AR page 368
2	A.1.10.14.a	Tanggal, nilai, objek transaksi_Informasi Material Date, value, object Material transaction Information	Telah diungkapkan (nilai transaksi) pada AR 2024 halaman 392 - 401 It has been disclosed (transaction value) in 2024 AR pages 392 - 401	Melengkapi pengungkapan tanggal dan objek transaksi Completing disclosure of transaction date and object	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 423-425 It has been re-disclosed in 2025 AR page 423-425
3	A.1.11.7a.e2	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)_Komite Nominasi dan Remunerasi Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of a committee and other positions (if any), Nomination and Remuneration Committee	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 559-560 Pengungkapan rangkap jabatan untuk Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari Dewan Komisaris dirujuk ke bagian Profil Perusahaan (Profil Dewan Komisaris). It has been disclosed in 2024 AR pages 559-560 Disclosure of concurrent positions for Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners is referred to the Company Profile section (Board of Commissioners Profile).	Pengungkapan rangkap jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari Dewan Komisaris juga disajikan pada profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Bab GCG, termasuk untuk komite Dewan Komisaris lainnya. Disclosure of concurrent positions of Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners is also presented in the profiles of Members of the Nomination and Remuneration Committee in the GCG Chapter, including for other committees of the Board of Commissioners.	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 595-598 It has been re-disclosed in 2025 AR page 595-598

No.	Kode Code	Kriteria Criteria	Hasil Telaah AR 2024 2024 AR Review Results	Rencana Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 Follow-up Plan in the 2025 Annual Report	Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 (halaman) Follow-up to the 2025 Annual Report (page)
4	A.1.11.7a.e3	Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.1.11.7a.e2) _Komite Nominasi dan Remunerasi In the event that there is no concurrent position, then this matter is disclosed; (A.1.11.7a.e2) _Nomination and Remuneration Committee	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 559-560 Pengungkapan rangkap jabatan untuk Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari Dewan Komisaris dirujuk ke bagian Profil Perusahaan (Profil Dewan Komisaris). It has been disclosed in 2024 AR pages 559-560 Disclosure of concurrent positions for Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners is referred to the Company Profile section (Board of Commissioners Profile).	Pengungkapan rangkap jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari Dewan Komisaris juga disajikan pada profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Bab GCG, termasuk untuk komite Dewan Komisaris lainnya. Dalam hal tidak ada rangkap jabatan, akan diungkapkan secara eksplisit: "Tidak terdapat rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, maupun kebijakan internal Perseroan." Disclosure of concurrent positions of Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners is also presented in the profiles of Members of the Nomination and Remuneration Committee in the GCG Chapter, including for other committees of the Board of Commissioners. In the event that there is no concurrent position, it will be explicitly stated: "There is no concurrent position that is contrary to the provisions of laws and regulations, the Company's Articles of Association, or the Company's internal policies."	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 595-598 It has been re-disclosed in 2025 AR page 595-598
5	A.1.11.7a.e4	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan_Komite Nominasi dan Remunerasi Work experience and time period both inside and outside the Company_Nomination and Remuneration Committee	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 559-560 Pengungkapan pengalaman kerja untuk Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari Dewan Komisaris dirujuk ke bagian Profil Perusahaan (Profil Dewan Komisaris). It has been disclosed in 2024 AR pages 559-560 Disclosure of work experience for Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners is referred to the Company Profile section (Board of Commissioners Profile).	Pengungkapan pengalaman kerja Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari Dewan Komisaris juga disajikan pada profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Bab GCG, termasuk untuk komite Dewan Komisaris lainnya. Disclosure of work experience of the Nomination and Remuneration Committee Members of the Board of Commissioners is also presented in the profiles of the Nomination and Remuneration Committee Members in the GCG Chapter, including for other Board of Commissioners committees.	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 595-598 It has been re-disclosed in 2025 AR page 595-598

No.	Kode Code	Kriteria Criteria	Hasil Telaah AR 2024 2024 AR Review Results	Rencana Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 Follow-up Plan in the 2025 Annual Report	Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 (halaman) Follow-up to the 2025 Annual Report (page)
6	A.1.11.7a.g	Pernyataan independensi komite_ Komite Nominasi dan Remunerasi Independence statement by the Nomination and Remuneration Committee	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 561-562 It has been disclosed in 2024 AR pages 561-562	-	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 599-600 It has been re-disclosed in 2025 AR page 599-600
7	A.1.11.7a.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut_ Komite Nominasi dan Remunerasi Policy and implementation of meeting frequency and level of member attendance at the meetings_Nomination and Remuneration Committee	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 567-568 It has been disclosed in 2024 AR pages 567-568	-	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 605-606 It has been re-disclosed in 2025 AR page 605-606
8	A.1.11.7a.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku_ Komite Nominasi dan Remunerasi Brief description of the implementation of activities in the fiscal year_Nomination and Remuneration Committee	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 566-567 It has been disclosed in 2024 AR pages 566-567	-	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman ..... It has been re-disclosed in 2025 AR page .....
9	A.1.11.8b.k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut_ Komite Lain KPolicy and implementation of meeting frequency and level of member attendance at the meetings_Other Committees	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 586 (kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat) It has been disclosed in 2024 AR page 586 (meeting frequency policy and implementation)	Melengkapi pengungkapan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut (bentuk tabel) untuk komite lain di bawah DIreksi Completing disclosure of the level of member attendance at the meeting (in tabular form) for other committees under the Board of Directors	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 604 It has been re-disclosed in 2025 AR page 604
10	A.1.11.8a.l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku Brief description of the implementation of activities in the financial year	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 586 It has been disclosed in 2024 AR page 586	Melengkapi pengungkapan melalui tabel atau poin-poin yang memuat rincian kegiatan Completing disclosure through tables or bullet points containing details of the activities.	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 629 It has been re-disclosed in 2025 AR page 629
11		Jenis risiko dan cara pengelolaannya Types of risks and how to manage them	Peta risiko belum diungkapkan pada AR 2024 Risk map has not been disclosed in 2024 AR	Menambahkan pengungkapan peta risiko Drafting risk map disclosure	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 683-688 It has been re-disclosed in 2025 AR page 683-688

No.	Kode Code	Kriteria Criteria	Hasil Telaah AR 2024 2024 AR Review Results	Rencana Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 Follow-up Plan in the 2025 Annual Report	Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 (halaman) Follow-up to the 2025 Annual Report (page)
12		Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan_Profil Dewan Komisaris Work experience and time period both inside and outside the Company_Board of Commissioners Profile	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 135-141 It has been disclosed in 2024 AR pages 135-141	Memperbaiki pengungkapan dengan memisahkan pengalaman kerja di dalam maupun di luar perusahaan Improve disclosure by separating work experience inside and outside the company.	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 149-154 It has been re-disclosed in 2025 AR page 149-154
13		Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan_Profil Direksi Work experience and time period both inside and outside the Company_Director's Profile	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 142-145 It has been disclosed in 2024 AR pages 142-145	Memperbaiki pengungkapan dengan memisahkan pengalaman kerja di dalam maupun di luar perusahaan Improving disclosure by separating work experience inside and outside the company.	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 155-160 It has been re-disclosed in 2025 AR page 155-160
14		Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Structure and Composition of Shareholders	Belum diungkapkan dalam AR 2024 Not yet disclosed in 2024 AR	Menambahkan pengungkapan mengenai Kepemilikan Saham oleh Manajemen Senior, karena menjadi salah 1 kriteria pengungkapan dalam ACGS Definisi manajemen senior (merujuk SR): manajemen senior sebagai pemimpin senior setingkat Direksi, Kepala Satuan, Kepala Divisi, Kepala Bidang dan General Manager atau yang setara pimpinan unit wilayah kerja Perusahaan. Drafting disclosure regarding Share Ownership by Senior Management, as it is one of the disclosure criteria in ACGS. Definition of senior management (referring to SR): senior management as senior leaders at the level of Directors, Head of Unit, Head of Division, Head of Division and General Manager or equivalent to the head of the Company's regional work unit.	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 175 It has been re-disclosed in 2025 AR page 175

Bagian 2: Pertanyaan Penalti yang masih diperoleh pada ARA 2024
Part 2: Penalty Questions still accrued in 2024 ARA

No.	Kode Code	Kriteria Criteria	Hasil Telaah AR 2024 2024 AR Review Results	Rencana Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 Follow-up Plan in the 2025 Annual Report	Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 (halaman) Follow-up to the 2025 Annual Report (page)
1	BC1	Tanggal penerbitan Laporan Keuangan Tahunan (ASEAN CG Score Card B.D.1.1 & Peraturan OJK) B.C.1 Date of publication of Annual Financial Report (ASEAN CG Score Card BD1.1 & OJK Regulation) BC1	Telah diungkapkan pada AR halaman 816 - 820, namun pada kriteria ACGS mensyaratkan penerbitan Laporan Keuangan Tahunan 120 hari setelah tahun buku tidak dapat dipenuhi oleh PLN NP It has been disclosed in AR pages 816 - 820, however the ACGS criteria requiring the publication of the Annual Financial Report 120 days after the fiscal year cannot be met by PLN NP.	Penerbitan Laporan Keuangan Tahunan 120 hari setelah tahun buku tidak dapat dipenuhi oleh PLN NP (merupakan output KAP) The publication of the Annual Financial Report 120 days after the fiscal year cannot be fulfilled by PLN NP (which is the output of KAP)	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman hal 877 Laporan Keuangan Tahunan pada ...., lebih dari 120 hari, sehingga belum dapat memenuhi pertanyaan penalty ACGS (B.C.1) It has been re-disclosed in 2025 AR page 877 Annual Financial Report on ...., more than 120 days, so it cannot fulfill the ACGS penalty question (BC1)

Bagian 3: Pertanyaan Bonus yang belum diperoleh pada ARA 2024
Part 3: Unearned Bonus Questions on 2024 ARA

No.	Kode Code	Kriteria Criteria	Hasil Telaah AR 2024 2024 AR Review Results	Rencana Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 Follow-up Plan in the 2025 Annual Report	Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 (halaman) Follow-up to the 2025 Annual Report (page)
1	BA3	Tanggung jawab Komite Audit dalam pemberian rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal (ASEAN CG ScoreCard E.2.24) (B A 3) The Audit Committee's responsibility in providing recommendations on the appointment and dismissal of external auditors (ASEAN CG ScoreCard E.2.24) (BA 3)	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 551-552 (Bagian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit poin 8) It has been disclosed in 2024 AR pages 551-552 (Audit Committee Duties and Responsibilities Section point 8)	Menambahkan paragraf eksplisit bahwa Komite Audit memberi rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal Drafting explicit paragraph that the Audit Committee makes recommendations on the appointment and dismissal of external auditors.	

No.	Kode Code	Kriteria Criteria	Hasil Telaah AR 2024 2024 AR Review Results	Rencana Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 Follow-up Plan in the 2025 Annual Report	Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 (halaman) Follow-up to the 2025 Annual Report (page)
2	BA3	Tanggung jawab Komite Audit dalam pemberian rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal (ASEAN CG ScoreCard E.2.24) (B A 3) The Audit Committee's responsibility in providing recommendations on the appointment and dismissal of external auditors (ASEAN CG ScoreCard E.2.24) (BA 3)	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 535 bahwa Perusahaan belum memiliki kebijakan penghargaan/ kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka panjang Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 535 bahwa Perusahaan belum memiliki kebijakan penghargaan/ kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka panjang	Menyusun kebijakan LTI yang mengaitkan remunerasi Direksi dengan kinerja jangka panjang Jika kebijakan LTI belum ada, maka perlu menyesuaikan narasi bahwa penetapan remunerasi Direksi telah mempertimbangkan pencapaian kinerja korporasi dan target strategis perusahaan. Ke depan, Perusahaan akan melakukan kajian untuk mengembangkan kebijakan remunerasi yang lebih mempertimbangkan kinerja jangka panjang. Developing LTI policy that links the Directors' remuneration to long-term performance. If an LTI policy does not yet exist, it is necessary to align the narrative so that the determination of Directors' remuneration considers the corporate performance and strategic targets. Going forward, the Company will conduct a review to develop a remuneration policy that takes long-term performance into account.	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 569 It has been re-disclosed in 2025 AR page 569

Tambahan Informasi
Additional Information

No.	Kriteria Criteria	Hasil Telaah AR 2024 2024 AR Review Results	Rencana Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 Follow-up Plan in the 2025 Annual Report	Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 (halaman) Follow-up to the 2025 Annual Report (page)
1	Jenis risiko dan cara pengelolaannya Types of risks and how to manage them	Peta risiko belum diungkapkan pada AR 2024 Risk map has not been disclosed in AR 2024	Menambahkan pengungkapan peta risiko Adding risk map disclosure	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 688 It has been re-disclosed in 2025 AR page 688
2	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan_Profil Dewan Komisaris Work experience and time period both inside and outside the Company_Board of Commissioners Profile	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 135-141 It has been disclosed in AR 2024 pages 135-141	Memperbaiki pengungkapan dengan memisahkan pengalaman kerja di dalam maupun di luar perusahaan Improve disclosure by separating work experience inside and outside the company.	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 149-154 It has been re-disclosed in 2025 AR page 149-154

No.	Kriteria Criteria	Hasil Telaah AR 2024 2024 AR Review Results	Rencana Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 Follow-up Plan in the 2025 Annual Report	Tindak Lanjut pada Laporan Tahunan 2025 (halaman) Follow-up to the 2025 Annual Report (page)
3	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan_Profil Direksi Work experience and time period both inside and outside the Company_Director's Profile	Telah diungkapkan pada AR 2024 halaman 142-145 It has been disclosed in AR 2024 pages 142-145	Memperbaiki pengungkapan dengan memisahkan pengalaman kerja di dalam maupun di luar perusahaan Improve disclosure by separating work experience inside and outside the company.	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 155-160 It has been re-disclosed in 2025 AR page 155-160
4	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Structure and Composition of Shareholders	Belum diungkapkan dalam AR 2024 Not yet disclosed in AR 2024	Menambahkan pengungkapan mengenai Kepemilikan Saham oleh Manajemen Senior, karena menjadi salah 1 kriteria pengungkapan dalam ACGS Definisi manajemen senior (merujuk SR): manajemen senior sebagai pemimpin senior setingkat Direksi, Kepala Satuan, Kepala Divisi, Kepala Bidang dan General Manager atau yang setara pimpinan unit wilayah kerja Perusahaan. Added disclosure regarding Share Ownership by Senior Management, as it is one of the disclosure criteria in the ACGS. Definition of senior management (referring to SR): senior management as senior leaders at the level of Directors, Unit Heads, Division Heads, Division Heads, and General Managers, or equivalent heads of the Company's regional work units.	Telah diungkapkan kembali pada AR 2025 halaman 175 It has been re-disclosed in 2025 AR page 175

2025

Laporan Tahunan
Annual Report

ACCELERATING SUSTAINABLE GROWTH for a GREENER ENERGY

Mempercepat Pertumbuhan Berkelanjutan
untuk Energi yang Lebih Hijau

PLN Nusantara Power

Kantor Pusat
Head Office

Jl. Ketintang Baru No. 11
Surabaya 60231
Jawa Timur, Indonesia

Kantor Strategis Jakarta
Jakarta Strategic Office

18 Office Park Lt. 2 ABCD
Jl. TB Simatupang No. 18
DKI Jakarta, Indonesia

+62 31 8283 180
+62 31 8283 183
info@plnnusantarapower.co.id
www.plnnusantarapower.co.id